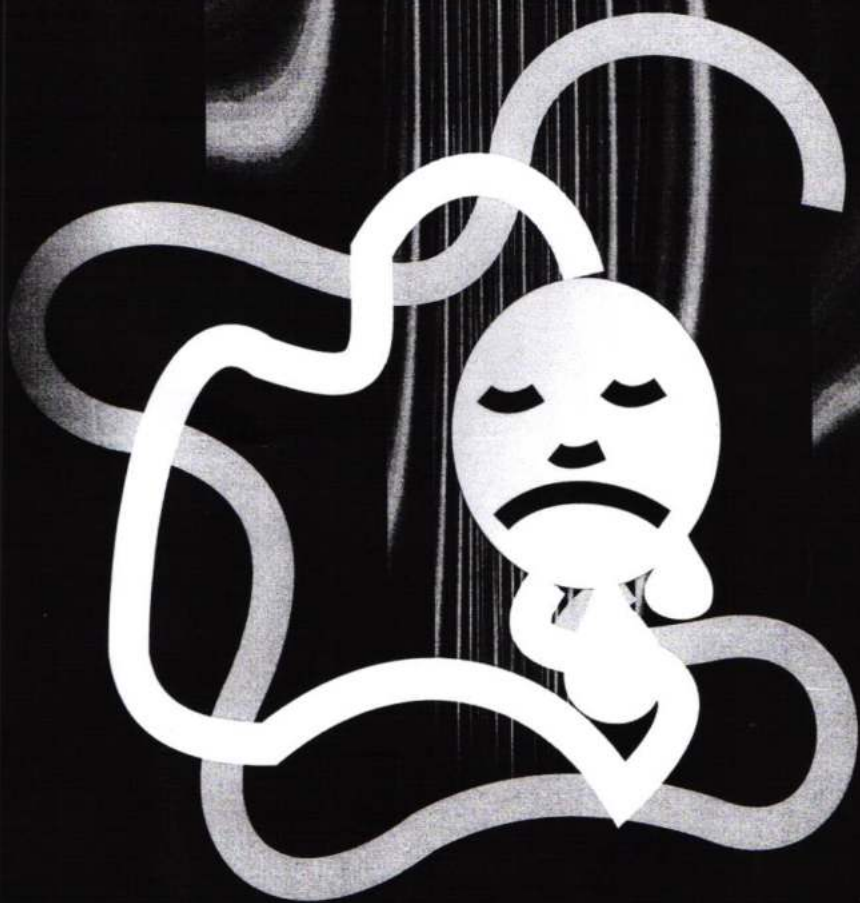


ISBN 979-445-142-8

Masalah-masalah **KEMISKINAN**



F.X. Sri Sadewo

FX. Sri Sadewo

Masalah-masalah Kemiskinan di Surabaya

FX. Sri Sadewo

Penerbit : Unesa University Press - 2007
iii, 218 hal., Illus, 21

ISBN : 979 - 445 -142 - 8

© 2007 - Unesa University Press

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin
tertulis dari Penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam
bentuk apapun, baik cetak, fotoprint, mikrofilm dan
sebagainya.*

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA

FX. Sri Sadewo



Penerbit
Unesa University Press

SEKAPUR SIRIH

Menjadi miskin bukan sebagai suatu pilihan, berbeda bila menjadi orang kaya. Dari hari ke hari orang berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Kekayaan tidak saja menjadi atribut dari status sosial seseorang. Barang-barang miliknya dibawa seiring jalan orang tersebut. Orang lain menoleh, takjub, dan iri, sebaliknya si kaya dengan tegap, wajah men-dongak ke atas dan bangga. Tidak demikian dengan orang miskin, ia tertunduk ke bawah, tidak berani menatap wajah orang, selain menengadah tangan. Sangat tidak berdaya.

Gambaran orang miskin yang demikian ini memang tidak separah itu. Orang miskin sering lebih tegap dan *trenginas*, dari hari ke hari untuk mencari makan. Ia bekerja dan mengumpulkan satu demi satu rupiah untuk makan. Memang, tidak semua yang dikumpulkan bisa disimpan, sebaliknya habis untuk kebutuhan konsumsinya.

Intinya, kemiskinan bukanlah suatu kebanggaan. Namun demikian, ternyata tidak semuanya benar, pada setiap kelompok keyakinan tertentu, ada orang yang merelakan dirinya untuk melepaskan dari kesenangan duniawi. Mereka menjadi miskin secara sukarela demi keyakinan. Kelompok demikian tidak dibahas dalam buku ini.

Surabaya, awal Februari 2007
penyunting

FX Sri Sadewo

DAFTAR ISI

BAGIAN I

PENDAHULUAN:

PROBLEMATIKA PERKOTAAN

BAB 1

URBANISASI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA.....	1

BAB 2

PERADABAN, URBANISASI DAN PEMINGGIRAN.....	10

BAB 3

KEMISKINAN DAN PENGUKURANNYA.....	19

BAGIAN II

USAHA-USAHA MEMBEBASAKAN DARI KEMISKINAN KOTA

BAB 4

SURABAYA, GELIAT CALON KOTA METROPOLITAN.....	33

BAB 5

BURUH BANGUNAN

Sektor Informal tidak hanya sebagai "Safety Valve" bagi Orang Miskin "Baru" di Surabaya tahun 1990-an.....	49

BAB 6

PFTANI KOTA

Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang Urban.....	78

BAB 7:

PETUGAS *CLEANING SERVICE*

Berharap di Sektor "Formal", meski harus Cerdik dan Tabah....	107

BAB 8

PENGAMEN

Seniman Jalanan dan Suara-suara "Lapar" Orang Miskin Kota.....	131

BAB 9

MAHASISWADAN ORANG MISKIN KOTA

Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota.....	169

BAGIAN IIII

PENUTUP

BAB 10

KEMISKINAN KOTA DAN PEMBANGUNAN.....	210

BAGIAN I
PENDAHULUAN:
PROBLEMATIKA PERKOTAAN

BAB 1

URBANISASI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA¹⁾

Pendahuluan

Jika suatu bangsa sadar dengan proses modernisasinya, sebenarnya bangsa tersebut hanya ingin berusaha untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia serta aliran peradapan pada jaman bangsa tersebut hidup. Kecenderungan suatu bangsa untuk memodenisir dirinya sejauh mungkin dilakukan dengan pembangunan. Dalam pembangunan ini secara sadar diupayakan untuk dipercepatnya perubahan struktur sosial-ekonomi dalam bangsa yang bersangkutan. Konsekuensi dari hal ini antara lain mengakibatkan juga suatu proses pergeseran dalam struktur mata pencaharian, stratifikasi sosial, serta meningkatkan mobilitas geografi seperti migrasi dan urbanisasi.

Masalah urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja, dalam arti perpindahan dari desa ke kota, akan tetapi juga dilihat sebagai perubahan budaya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut jika ditinjau dari perspektif budaya, maka urbanisasi ini perlu kerangka berfikir yang lain yaitu yang menyangkut masalah nilai, norma dan pengetahuan. Urbanisasi juga mempunyai kecenderungan untuk melibatkan perubahan-perubahan dalam sub sistem masyarakat yang lain. Terutama pada tingkat makro, karena urbanisasi juga berarti mobilitas dan jika mobilitas terjadi, maka sub sistem lain biasanya juga berubah.

Dengan melihat urbanisasi sebagai proses perubahan kebudayaan, dalam arti perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan

1 Bab 1. Urbanisasi dalam Perspektif Budaya oleh Martinus Legowo

model-model pengetahuan (ide-ide), akan memudahkan untuk memasukkan berbagai gejala yang mungkin muncul di perkotaan dalam kerangka penjelasan ini. Masalah-masalah yang muncul pada dimensi yang lain dapat dijelaskan lewat kerangka berfikir yang melihat ada kesejajaran masyarakat. Antara desa dan kota memiliki perbedaan dalam hal kebudayaan karena pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan lingkungan dan lingkungan yang mereka hadapipun berbeda. Permasalahan ini akan menimbulkan persoalan dalam menyesuaikan dengan lingkungan kota, terutama dalam memperjuangkan hidup dan cara (gaya) hidup. Sehubungan dengan ini Parsudi Suparlan (1978) menjelaskan bahwa persebaran kebudayaan kepada anggota dan pewarisan kepada generasi selanjutnya dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucap maupun dalam tindakan.

Di sini kita harus bisa memandang bahwa kebudayaan sebagai suatu kekhususan sistem nilai, karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang lain. dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kearah yang lebih sesuai dengan kehidupan yang lain.

Urbanisasi: Sebuah Kerangka Konsep

Deskripsi urbanisasi banyak yang diartikan sebagai suatu mobilitas horizontal, yaitu dari desa ke kota. Menurut Said Rusli (1983), dijelaskan bahwa urbanisasi dilihatnya sebagai gejala kependudukan, yaitu berybahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Menurut Lee (1984) ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi, yaitu (1) factor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) factor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) factor penghalang, dan (4) Faktor-faktor pribadi. Selanjutnya Louis Wirth's dalam studi urbanisasinya mengatakan bahwa : "*Urbanism as a way of life*"

(Urbanisasi sebagai cara hidup) di mana pemusatan penduduk di dalam kota dianggap sebagai variabel yang sangat menentukan kemungkinan hidup individu, serta interaksi antar individu. Urbanisasi sebagai cara hidup yang khas dapat didekati secara empiris dari 3 perspektif yang saling berhubungan, yaitu : (1) sebagai suatu struktur fisik yang terdiri dari penduduk, teknologi dan keteraturan ekologis, (2) sebagai suatu sistem organisasi sosial yang melihat suatu struktur sosial yang khas suatu rangkaian institusi sosial dan suatu pola hubungan sosial yang khas pula, (3) sebagai seperangkat sikap dan ide-ide, dan kumpulan pribadi-pribadi yang ikut serta dalam bentuk-bentuk tingkah laku kolektif yang khas, dan menjadi obyek dari mekanisme pengawasan sosial yang khas pula. Lebih lanjut Said Rusli (1983) melihat bahwa urbanisasi itu sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Kemudian ditunjukkan oleh Bintarto (1984) melalui kerangka berfikirnya yang menganalisa tentang gejala urbanisasi dengan menekankan pada faktor *push* dan *pull*. Penjelasan kerangka berfikir ini hanya menekankan kepada masalah sebab dan akibat.

Sehubungan dengan kerangka berfikir urbanisasi tersebut di atas rasanya kurang lengkap jika tidak dicarikan kerangka berfikir lainnya, yaitu yang mampu menutupi kekurangan ini. Berdasarkan pertimbangan ini perlu kiranya penekanan aspek budaya yang menyangkut nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan sebagai kerangka berfikir hendaknya diberikan porsi yang lebih banyak dalam membantu memecahkan persoalan urbanisasi. Latar belakang berfikir semacam ini sudah disadari oleh para ahli. seperti White dalam Haviland (1989), mendefinisikan aspek tekno-ekonomis kebudayaan sebagai cara yang digunakan oleh para anggota suatu kebudayaan untuk menghadapi lingkungan mereka, dan aspek inilah yang selanjutnya menentukan aspek sosial dan ideology kebudayaan. Karena White menganggap cara kebudayaan beradaptasi dengan lingkungan merupakan factor yang penting dalam perkembangannya.

Lebih lanjut Malinowski dalam Koentjaraningrat (1980), menjelaskan bahwa pendekatan fungsional memainkan peranan yang penting dalam memberikan tekanan pada interelasi di dalam

kebudayaan dan pada cara-cara kebudayaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang hidup menurut peraturan-peraturannya.

Dengan demikian kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan (emosi) manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral yang sumber-sumber dari nilai moral tersebut pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia.

Urbanisasi Sebagai Proses Perubahan Kebudayaan

Urbanisasi menurut Philip M. Hauser (1973) dapat didefinisikan sebagai proses yang membawa transformasi besar dalam pandangan hidup manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pergeseran dari "rural" ke "urban". Sehubungan dengan demikian kita perlu melihat definisi kebudayaan agar diperoleh gambaran yang jelas karena gejala perubahan di sini adalah perubahan kebudayaan.

Kebudayaan disini harus dilihat dari proses kognitif, yaitu sebagai serangkaian pengetahuan yang digunakan sebagai strategi untuk menghadapi kehidupan, yang berkenaan dengan pemahaman dan pengintepretasian lingkungan serta pengalaman yang dihadapi oleh manusia. Lingkungan dan pengalaman ini sangat menentukan bagi proses belajar seseorang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1978) bahwa kebudayaan dengan demikian merupakan sistem ide, yang merupakan serangkaian petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas model-model kognitif yang bersumber pada dan diselimuti oleh nilai-nilai yang ada dalam etos dan pandangan hidup, yang dalam penggunaannya oleh para pelakunya untuk mengintepretasi dan menghadapi lingkungannya dilakukan secara selektif. Jadi kebudayaan disini adalah pedoman bagi tingkah laku manusia. Sebagai pedoman, ia memegang peranan penting karena dapat mengarahkan tindakan-tindakan dari si pendukungnya.

Deskripsi ataupun definisi kebudayaan sebagai proses kognitif memiliki implikasi lanjutan terhadap pemahaman urbanisasi. Kita harus melihat bahwa urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja (dalam arti perpindahan dari desa ke kota), akan tetapi perubahan tersebut juga dilihat sebagai proses budaya. Demikian juga termasuk transfer nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kota. Mengenai transfer kebudayaan ini hendaknya disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga merupakan keputusan untuk melakukan penyesuaian kebudayaan di lingkungan yang baru (sesuai dengan iklim perkotaan).

Masalah yang dihadapi sekarang adalah kesulitan dalam mengubah sistem ide mereka (kaum urbanis), dengan demikian bisa mengalami hambatan dalam transfer kebudayaan. Sistem ide ini merupakan salah satu unsur yang paling sukar dirubah dan seandainya bisa dirubah membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kebudayaan suatu masyarakat itu sudah mengakar dalam diri penduduknya. Lebih jauh lagi apabila kebudayaan itu sendiri tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakatnya, dalam arti sudah tidak diperlukan lagi oleh masyarakat penduduknya sehingga dengan demikian kebudayaan akan berubah. Proses adaptasi sangat penting artinya agar kebudayaan kota dapat diterima dengan baik. Sehubungan dengan adanya adaptasi ini manusia tidak hanya telah menjamin kelestariannya, tetapi juga pemekarannya. Oleh karena itu tidak berarti bahwa apa saja yang dikerjakan oleh manusia dikerjakan karena sifat adaptifnya terhadap lingkungan tertentu. Yang jelas, manusia tidak bersaksi terhadap lingkungan seperti apa adanya, tetapi ia bersaksi terhadap lingkungan seperti apa adanya, tetapi ia bereaksi terhadap lingkungan seperti apa yang dipahaminya, dan kelompok manusia dapat memahami lingkungan yang sama dengan cara-cara yang berbeda satu sama lain. Mereka juga bereaksi terhadap hal-hal yang bukan lingkungan : pertama-tama sifat biologinya, kepercayaan, sikap dan konsekuensi perilaku mereka untuk orang lain. Semua itu menghadapkan mereka kepada masalah, dan orang yang memelihara kebudayaan itu untuk memecahkan masalah.

Kota, Lingkungan yang Menuntut Perubahan Budaya

Lingkungan mempengaruhi kebudayaan, sehingga kebudayaan yang terbentuk merupakan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan hidup yang dihadapinya. Sehubungan dengan hal ini dapat diketahui bahwa lingkungan desa dan kota merupakan dua kubu yang berbeda. Strategi adaptasi di pedesaan juga berbeda dengan strategi adaptasi di kota, selain itu pertumbuhan kebudayaan yang ada di desa berbeda dengan yang ada di kota. Simbol-simbol komunikasipun ikut berubah dalam proses ini, sehingga manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu memiliki model berfikir yang banyak dipengaruhi dan disesuaikan dengan lingkungan itu yang menjadikan sikap dan tindakan mereka memiliki corak latar belakang lingkungan asalnya. Masalah-masalah inilah yang berkaitan erat dengan urbanisasi yang ada di perkotaan.

Agar permasalahan ini menjadi jelas dan mudah dipahami, terlebih dahulu perlu kiranya menjabarkan apa yang dimaksud dengan kota. Louis Wirth dalam Goede (1982) mendefinisikan sebagai suatu *"relatively large, dense, and permanent settlement of socially heterogeneous individuals"*. Ada tiga komponen yang cukup penting dari definisi ini, yaitu : (1) ukuran yang besar; (2) adanya kepadatan; dan (3) sifatnya yang heterogen. Komponen yang dikemukakan oleh Wirth ini melahirkan permasalahan pada saat terjadinya kontak antara desa dan kota. Latar belakang pemikiran ini karena melihat adanya konsep adaptasi dalam kaitannya dengan perubahan ekologi. Masalah ini sangat penting diperhatikan karena baik nilai-nilai, norma-norma, maupun pengetahuan yang tumbuh di perkotaan membedakan dirinya dengan yang ada di pedesaan. Selanjutnya Sartono Kartodirdjo (1977) memberikan suatu konsepsi lain untuk mengkaji masalah yang berhubungan dengan pandangan hidup ini dengan menggunakan tiga perspektif sebagai pendekatannya. Pertama, bahwa sebagai struktur fisik, kota mempunyai dasar populasi yang dideferensiasikan menurut tingkat teknologi, susunan ekologis dan faktor-faktor lain. Kedua, sebagai susunan sosial, pandangan hidup ini menggantikan hubungan primer dan sekunder. Berhubung dengan proses ini maka ikatan kekerabatan diperlemah, dan

solidaritas sosial menjadi goyah. Ketiga, dengan gaya hidup ini muncul mentalitas kota dengan sikap, ide-ide, dan kepribadian yang berbeda dengan mentalitas tradisional. Ketiga perspektif ini sangat penting bagi penjelasan tentang urbanisasi. Hubungan-hubungan sosial yang muncul juga membutuhkan corak yang khusus, menuntut adanya strategi adaptasi tertentu.

Dalam memandang gaya hidup kota, Wirth mengemukakan pandangannya sebagai berikut : (1) munculnya pandangan yang sekuler; (2) terbentuknya asosiasi yang bersifat sukarela; (3) adanya peranan sosial yang terpisah-pisah; dan (4) peranan norma-norma menjadi tidak jelas. Dalam pandangan semacam ini tentu saja ada individu yang terlibat di dalamnya yang mewujudkan suatu keteraturan.

Kaum urbanis yang datang ke kota dengan bekal nilai-nilai, norma-norma dan model-model pengetahuan yang memiliki corak pedesaan. Adanya kontak dengan kondisi perkotaan dan masyarakatnya akan membangkitkan berbagai masalah yang seandainya diurut penyebabnya adalah perbedaan latar belakang budaya. Kondisi kota merupakan sesuatu yang asing bagi kaum urbanis sehingga sistem pengetahuan yang mereka miliki tidak dapat dipakai untuk memahami dan menginterpretasikan dengan tepat kondisi kehidupan di perkotaan. Simbol-simbol kehidupanpun sudah berubah, hubungan-hubungan sosial sudah menjadi dangkal. Orang kota sudah mengembangkan kehidupan yang komersial. Stratifikasi sosialpun sudah semakin jelas perbedaannya sehingga menyebabkan hilangnya kontak yang menyeluruh antar wargamasyarakat.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada kaum urbanis ini adalah: (1) mereka merubah sistem pengetahuan lama yang dibawa dari daerah asal agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan yang berlaku di perkotaan; dan (2) mereka tetap mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, model-model pengetahuan lama. Sistem pengetahuan untuk selanjutnya digunakan untuk merubah lingkungan agar sesuai dengan sistem pengetahuan mereka yang sudah mapan. Untuk yang pertama mereka akan menjadi golongan orang kota, yang harmonis dengan lingkungan hidup di perkotaan. Selanjutnya yang kedua, mereka akan hidup sebagai orang desa di perkotaan, yang lengkap dengan gaya hidup di pedesaan.

Penutup

Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi akan memungkinkan kita sampai pada penjelasan yang lebih mendasar. Urbanisasi tidak hanya menyangkut masalah perubahan fisik, tetapi juga harus dilihat dalam konteks budaya yang berarti perubahan sistem pengetahuan untuk menginterpretasikan kehidupannya. Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi merupakan salah satu bidang penjelasan yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Perlu diketahui bahwa kita harus memandang kebudayaan sebagai kekhususan-kekhususan sistem nilai, karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang lain. Dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan ke arah yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bintoro

1984 **Urbanisasi dan Permasalahannya**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Evers, Hans-Dieter

1978 "Urbanization and Urban Conflict in Southeast Asia". Dalam Peter SJ Chen and Hans-Dieter Evers (ed.), **Studies in Asean Sociology**. Singapore: Chopmen Enterprises.

Goede, JH

1982 "Urbanisasi dan Urbanisme" dalam JW Schoorl, **Modernisasi**, Jakarta: Gramedia.

Houser, Philip M

- 1973 **Perkembangan Kota Semarang**, Salatiga: LPIS IKIP
Kristen Satyawacana.

Lee, Everet S

- 1983 **Suatu Teori Migrasi**, diterjemahkan oleh Hans Daeng.
Yogyakarta, PPK- UGM.

McGee, TG

- 1976 **Suatu Aspek Urbanisasi di Asia Tenggara**, Yogyakarta,
Lembaga Kependudukan UGM.

Parsudi Suparlan

- 1977 " Flat dari aspek Antropologi", **Widyapura**, No.1, Th II

Said Rusli

- 1984 **Pengantar Ilmu Kependudukan**, Jakarta: LP3ES.

Sartono Kartodirdjo

- 1978 Kata Pengantar dalam Sartono Kartodirdjo (ed.),
Masyarakat Kuno dan Kelompok Sosial, Jakarta:
Bhatara Karya Aksara.

Wirth, Louis

- 1978 Urbanisasi sebagai cara hidup, **Berita Antropologi**,
Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, No. 34.

BAB 2

PERADABAN, URBANISASI DAN PEMINGGIRAN

Kota sebagai Pusat Peradaban

Cukup rumit menjelaskan kelahiran sebuah kota. Dari catatan Michael P. Todaro dan Jerry Stilkind (1991) menggambarkan bagaimana penduduk kota telah membengkak berlipat-lipat jumlahnya, tidak saja di negara-negara maju, tetapi sebaliknya di negara-negara sedang berkembang. Di dalam wilayah yang terbatas, kota dihuni oleh puluhan juta manusia, Mexico City dengan 31 juta jiwa, Sao Paolo 25,8 juta jiwa, New York 20,4 juta jiwa, sementara itu Jakarta dengan 16,7 juta jiwa. Orang-orang dengan "sukarela" hidup bersesak-sesak di kota yang sempit, fasilitas yang terbatas. Untuk di Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya, tak jarang harus tinggal di bantaran sungai. Dengan kondisi lingkungan yang "tidak sehat" (menurut ukuran ilmu kesehatan lingkungan), mereka tinggal, bahkan menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah tersebut.

Kepadatan nampaknya menjadi ciri dari sebuah kota. Setiap kota di mana pun memiliki wilayah-wilayah padat. Wilayah-wilayah itu biasanya tidak jauh dari pusat kota. Hanya sedikit kota-kota di dunia ini direncanakan dengan penataan ruang taat asas. Kota yang demikian ini biasanya tidak tumbuh secara alamiah, tetapi "kloning" (rekayasa) dari kota-kota lama yang telanjur semrawut.

Hal ini tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan kota tersebut. Di dalam sejarahnya, kota ini lahir dari revolusi peradaban pertama, yaitu revolusi agraris. Dimulai dari domestikasi (penjinakan) pada binatang dan tanaman hingga bercocok tanam dan penemuan "teknologi" pertanian, sebut saja kapak persegi dan alat besi, manusia kemudian di-"rumah"-kan. Manusia tidak lagi berkeliaran

mengikuti binatang buruan, tetapi cukup memilih tempat tinggal. Hal ini tidak berjalan dalam waktu yang singkat dan langsung. Pada waktu penjinakan binatang, manusia tidak lagi berburu, tetapi menjadi penggembala. Membawa binatang piaraannya ke padang-padang. Mereka meninggalkan gua, tetapi membawa kemah-kemahnya. Ketika bercocok tanam, mereka tidak lagi berjalan ke padang-padang, tetapi menetap di mana lahan pertanian itu berada. Rumah-rumah pun didirikan di sekitar lahan pertanian (lihat Sukadana, 1983: 47-62).

Pembagian pekerjaan di antara manusia ini kemudian menjadi semakin kompleks. Dari secara tegas, mereka berbagi tugas dengan penanda jenis kelaminnya, mereka meletakkan perempuan di rumah bersama anak-anaknya, hanya pada waktu tertentu saja, seperti tanam, panen dan sesudahnya ditarik turun ke lahan pertanian. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang telah melahirkan peradaban tersebut. Ada dugaan yang mulai melakukan domestikasi binatang dan tanaman adalah kaum perempuan tatkala manusia laki-laki sedang sibuk berburu dan berperang. Oleh karena itu, segala atribut "lahir" yang dimiliki oleh perempuan menjadi penanda kesuburan lahan tersebut.

Karena hasilnya berlimpah, tidak bisa dihabiskan dalam waktu yang singkat, maka masyarakat petani mengalami surplus pangan. Surplus pangan ini merupakan berkah dan malapetaka. Menjadi berkah karena manusia tidak lagi hidup hanya untuk mencari makan. Waktu luangnya digunakan untuk mengembangkan teknologi dan kesenian. Spesialisasi pekerjaan di luar pertanian pun berkembang. Sementara itu, surplus pangan ini menjadi malapetaka karena menjadi daya tarik bagi kelompok manusia yang masih nomaden untuk menguasai. Peperangan pada masa lampau biasanya terjadi pada masa paska panen.

Strategi yang dikembangkan kemudian adalah hidup lebih berkelompok, rumah-rumah tidak lagi berjauhan, mengikuti lahan pertanian, namun sebaliknya berkelompok, sebagai perkampungan. Lahan pertanian diletakkan di sisi luar, antara lahan pertanian dan perkampungan dibatasi tumpukan batu seperti layaknya batas dan benteng kota, atau rimbunan pohon-pohon bambu, seperti pola-pola perkampungan lama di Asia Tenggara, antara lain: Huta

(Batak). Hanya ada satu pintu masuk ke perkampungan. Pada waktu malam hari dan saat-saat tertentu kaum lelaki secara bergiliran bertugas untuk menjaga perkampungan.

Hal itu diatur oleh kepala kampung. Kepala kampung ini dipilih mengikuti prinsip *primus inter pares*. Lama-kelamaan orang yang berjaga ini dipilih secara khusus, di kampung Jawa dikenal dengan *Jagabaya*. Orang-orang ini dibayar dengan himpunan kecil dari hasil panen (*jimpitan*) pada masing-masing keluarga. Aktivitas ini diatur oleh kepala kampung. Dalam perkembangannya, ditemukan sistem pertanian sawah, hubungan antar keluarga, antar kampung ini menjadi semakin teratur dan meluas seiring jaringan irigasi dari sungai ke sawah. Dari antara kepala kampung, seorang dipilih sebagai pemimpin. Pemimpin ini raja di masa kemudian, kampung tempat tinggalnya adalah kota, sedangkan para *jagabaya* menjadi tentara, dan *jimpitan* adalah pajak. Tanda-tanda pembayaran *jimpitan* ini adalah awal dari manusia mengenal angka dan huruf pertama kali, sebagaimana terjadi pada bangsa Sumeria di Mesopotamia kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (perhatikan Haviland, 1988: 31; Sukadana, 1983: 71-72; Hawkes, 1965: 326, 363-364). Secara ringkas, Mumford (1970), sebagaimana dikutip oleh Adi Sukadana (1983: 72), mengurutkan rangkaian perkembangan sebuah kota sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahap-tahap Perkembangan Kota

Stadium		Bentuk Perkembangan
1	Eoplis	Perkembangan sebuah desa menjadi suatu pemukiman yang tetap dengan penggunaan tanah yang teratur
2	Polis	Suatu kumpulan desa atau kelompokkeluarga besar dengan adat-istiadat serta kegiatan agraris yang bertahan.
3	Metropolis	Sebuah kota yang tumbuh dari sejumlah desa tau kota kecil, sehingga merupakan suatu pemukiman induk dengan pusat perdagangan dan interaksi macam-macam kebudayaan.
4	Megapolis	Sebuah kota besar dengan tanda-tanda permulaan kemunduran peradaban
5	Tyrannopolis	Sebuahkota besar yang hidup sebagai parasit di lingkungan-nya. Tampak detorasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan usaha administratif.
6	Nekropolis	Sebuah kota besar dalam keadaan kemunduran umum, menuju kemusnaannya.

Sang pemimpin, raja tidak serta merta membangun istananya. Terlebih dahulu, ia menyusun kekuatan untuk menjaga keamanan rakyatnya. Rakyat dengan sukarela menyerahkan sebagian kemerdekaannya untuk diatur oleh raja tersebut. Kekuatan itu berupa tentara dan pemungut pajak, serta "pelayan" bagi rakyat. Timbunan hasil panen sebagai bayaran untuk tentara ini diletakkan dalam *lumbung-lumbung* di kota. Kelebihannya dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan lain. Demikian pula, rakyatnya juga menukarkan hasil panen dengan peralatan dan barang lain yang dibutuhkan. Peralatan dan barang tersebut dihasilkan oleh tukang-tukang yang telah berkembang pada masa sebelumnya. Atau, para pedagang dari luar membawa dan menjualnya. Para pedagang membangun toko dan perusahaan di kota tersebut. Tanah bisa membeli dari masyarakat setempat atau menyewa pada raja. Oleh karena itu, pada abad pertengahan di Eropa sejumlah kota tumbuh akibat perkembangan perusahaan di dalamnya, seperti *gilda-gilda* di kota-kota Italia. Di Nusantara, sejumlah kota pantai merupakan kota perdagangan, seperti Surabaya dengan syabandarnya. Itu awal pertumbuhan kota sebagai pusat peradaban dengan berbagai fungsi, mulai pasar, birokrasi hingga benteng, sebagaimana dipaparkan oleh Max Weber (1977), dan kota pun tumbuh sebagai pusat peradaban (Keesing, 1989: 49-50).

Urbanisasi dan Peminggiran

Pada awal pertumbuhan kota, jumlah penduduknya tidak begitu besar. Meskipun demikian, menempati lahan yang sempit. Kota tumbuh dengan cepat, terutama akibat dari urbanisasi (perpindahan manusia dari desa ke kota). Demikian pula, terlihat pada perkembangan kota-kota pertama di dunia. Menurut catatan Modelski (1997) Di dalam penggalian kota-kota lama, diketahui bahwa luas setiap kota memiliki luas hanya beberapa hektar saja, tetapi dihuni lebih dari seribu jiwa. Jumlah penduduk kota-kota pertama itu berlipat dua pada setiap seratus tahunnya Pelipatan jumlah penduduk ini semakin pendek ketika memasuki abad ke-20 dan kini masuk paruh pertama abad ke-21. Pelipatan dalam jumlah besar ini menjadi sulit dibuktikan akibat pertambahan alami, namun lebih meyakinkan sebagai pengaruh urbanisasi.

Perpindahan penduduk dari desa-kota, atau penggabungan desa-desa menjadi wilayah kota.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan pada Kota-kota Pertama

Kota (Pengarang)	Periode	Luas (ha)	Perkiraan Jumlah Penduduk	Kepadatan
ERIDU				
✓ Mallowan (1970: 331)	Ubaid	8-10	4.000	500
✓ Wright (1981: 325)	Early Uruk	40	6.200-10.000	155-250
HABUBA-KABIRA				
✓ Algaze (1993)	3.100 SM	40	6-8.000	150-200
HIERAKONPOLIS				
✓ Valhelle, 1990	3.400 SM	35	5-10.000	143-350
URUK				
✓ Nissen, 1993: 56	Akhir milenium ketiga SM	250	25-50.000	100-200
✓ Adams, 1981: 85	Awal Dinasti 1	400	40-50.000	100-125
UR				
✓ Wright, 1981: 327	Awal Dinasti 1	21	Kurang dari 6.000	286
✓ Wooley, 1965: 193	Dinasti 3	50	34.000	680
✓ Wright, 1981: 320-1	Dinasti 3	50 (termasuk dinding kota)	34.000	690
EBLA				
✓ Pettinato, 1981: 134	Dinasti 3	56	Sekitar 40.000 lebih	714
MOHENJO-DARO				
✓ Barrow & Shodhan, 1977: 11	2.500 SM	51 (wilayah perkotaan)	40.000	784
✓ Whitehouse, 1983	2.000 SM	100+	40.000	400
HARAPPA				
✓ Whitehouse, 1983	2.000 SM	43+	20.000 s/d 25.000	465-581

Sumber: Modelski, 1997

Pergerakan-pergerakan etnik hingga milenium pertama Masehi telah menenggelamkan kota-kota lama, kemudian tumbuh kota-kota baru. Kota-kota baru dunia ini dalam sejarahnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kota-kota pendahulunya,

yaitu tumbuh dari pertanian yang menyebar ke seluruh wilayah di dunia, tetapi kini jauh lebih rumit. Kota tidak lagi sebagai kota produsen, tetapi sebagai kota konsumen, dagang dan pemerintahan. Everett S. Lee (1995) yang memperbaiki teori Ravenstein, menunjukkan bahwa keanekaragaman fungsi kota tersebut telah menjadi medan magnet bagi penduduk desa sekitarnya. Daya tariknya menjadi semakin menguat tatkala jalur transportasi antara desa dan kota semakin mudah dan murah. Revolusi industri telah menghasilkan alat transportasi massal yang murah, seperti kereta api dan bus.

Sementara itu, desa-desa mengalami entropi. Cara-cara produksi dalam sistem pertanian menjadi semakin tidak menguntungkan bagi pekerja. Monetisasi dan revolusi hijau-biru memaksa para tuan tanah mengabaikan pola-pola hubungan yang "mesra" terbina dari masa lampau, yaitu patron-klien. Pada masa lampau, di Inggris perpindahan penduduk ke kota diawali dari rendahnya upah buruh tani di pedesaan. Penyebabnya bukan perubahan teknologi, tetapi jumlah buruh yang tidak bekerja jauh lebih banyak dari lahan pertanian, sehingga buruh menurunkan upahnya demi memperoleh pekerjaannya. Pada titik tertentu, upah yang diterima tidak seimbang dengan tenaganya, sehingga mereka memilih memasuki industri-industri di perkotaan (lihat Hallas, 2000: 67-84). Sementara itu, paska Perang Dunia II, revolusi hijau-biru mengakibatkan penyingkiran kaum perempuan dari lahan pertanian, kaum miskin desa menjadi semakin terpuruk. Hasil panen tidak lagi melebihi dari biaya produksi, sehingga petani-petani kecil menjual tanahnya kepada tuan tanah atau orang kota.

Wiradi (1987) menggambarkan dengan baik dinamika masyarakat petani di Jawa. Dalam tulisannya, ia menggambarkan bahwa monetisasi dan revolusi hijau-biru mengakibatkan masyarakat buruh tani dan petani kecil mengembangkan sektor non-pertanian. Lambat laun mereka kemudian desa menuju ke kota untuk kebutuhan keluarganya. Sektor pertanian yang tidak mendukung ditinggalkan. Namun, hasil dari sektor pertanian (bila ada) digunakan untuk mendukung usaha-usaha sektor non-pertanian di pedesaan dan pada gilirannya untuk modal di perkotaan. Pada petani kaya, sektor non-pertanian merupakan

diversifikasi usaha dari sektor pertanian, begitu pula bila melakukan migrasi dan berusaha di kota. Dengan modal yang besar, hasilnya pun berlipat, tetapi hal tidak demikian pada petani miskin atau buruh tani. Hasil di perkotaan tidak memberikan keuntungan yang besar, selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya di desa dan seringkali jarang digunakan untuk mengembangkan sektor pertaniannya.

Sebagaimana ditulis oleh Eric Wolf (1985) bahwa salah satu faktor pengikat dari masyarakat desa adalah tanah. Ketika kehilangan tanah, maka lambat laun hilang pula ikatan pada desa asalnya, dan akhirnya menetap di kota. Keputusan menetap di kota merupakan konsekuensi ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghidupannya, meski hanya masuk ke sektor informal. Selain kondisi obyektif kaum migran, pilihan memasuki sektor informal juga semata-mata karena sektor formal terbatas jumlahnya dan tidak bersifat lentur.

Dengan demikian, jelaslah mengapa kota dari hari ke hari tidak semakin longgar, tetapi semakin padat. Kebutuhan akan tanah untuk pemukiman, perkantoran dan pabrik semakin menggusur sektor pertanian di kota (lihat Sadewo, Harianto, dan Mulyadi, 2004). Kampung-kampung lama dari hari ke hari tergusur, dan digantikan oleh pusat perkantoran dan perbelanjaan. Penduduknya memilih pindah ke daerah pinggiran kota. Namun demikian, pendirian pusat perkantoran dan perbelanjaan sebagai representasi pertumbuhan sektor formal tetap tidak mampu menampung tenaga kerja, terutama di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, dari data BPS, sebagaimana dikutip oleh Samhadi (2006: 33), sektor formal hanya bisa menampung 30% tenaga kerja, sebaliknya sektor yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, sektor informal menampung 70% tenaga kerja.

Di dalam analisis Samhadi (2006:33), pertumbuhan sektor informal di Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut karena ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja. Di Indonesia, angka pengangguran terus meningkat, dari 5,18 juta orang tahun 1997, menjadi 6,07 juta orang (1998), 8,9 juta

orang (1999), 8,44 juta orang (2000), 8,01 juta orang (2001), 9,13 orang (2002), 9,53 juta orang (2003), 10,25 juta orang (2004) dan 10,9 juta orang (2005). Jika setengah penganggur (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu) dimasukkan, angka pengangguran saat ini mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 37% dari total angkatan kerja (106,9 juta orang). Kondisi ini berlawanan dengan pertumbuhan sektor formal. Berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2004-2009 sebesar 6,6% per tahun dan setiap persen pertumbuhan bisa menyerap 600.000 angkatan kerja. Namun, pada kenyataan angka pertumbuhan tersebut diperkirakan baru bisa dicapai tahun 2007, dan sekarang ini hanya mampu menciptakan sekitar 178.000 lapangan kerja baru.

DAFTAR PUSTAKA

Hallas, C.S.

2000 Poverty and Pragmatism in Northern Uplands of England: the North Yorkshire Pennines c. 1770-1900. **Social History**. Vol. 25. No. 1.

Haviland, William A.

1988 **Antropologi Jilid 2**. diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.

Hawkes, Jacquetta.,

1965 **Prehistory. History of Mankind, Cultural and Scientific Development**. New York: A Mentor Book.

Keesing, Roger M.

1989 **Antropologi Budaya. Suatu Perspektif Kontemporer**. Diterjemahkan oleh Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga.

Modelski,

1997 Early World Cities. Extending the census to the fourth millennium. **Paper**. Konvensi ISA. World System Data Historical Group. Toronto. Dapat diakses di <http://www.etext.org/Politics/World.Systems/papers/modelski/geocit.htm>.

Samhadi, Sri Hartati.

2006 Dilema Sektor Informal. **Kompas**. 16 April.

Sukadana, A. Adi.,

1983 **Antropoekologi**. Surabaya: Airlangga University Press.

Todaro, Michael P., dan Jerry Stilkind.

1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota**. Jakarta: Gramedia.

Weber, Max.

1977 Apakah yang disebut Kota? Diterjemahkan oleh Darsiti Soeratman dan Amin Soendoro. Dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). **Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial**. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Wiradi, Gunawan.

1983 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: Rajawali.

BAB 3

KEMISKINAN DAN PENGUKURANNYA

Kemiskinan sejati tidak berarti tidak memiliki apa-apa, melainkan keterlepasan dari keterikatan akan benda-benda di dunia dan dalam melepaskan kekuasaan atas benda-benda secara sukarela. Itulah sebabnya ada orang-orang miskin yang sungguh-sungguh kaya. Demikian pula sebaliknya.

Escriva (1987: 150)

Kemiskinan, antara Ada dan Tidak, Nampak dan Tidak Nampak

Di dalam satu film yang dibintangi oleh Jean Claude van Damme, *Hard Target*, diceritakan di New Orleans terdapat sindikat yang memiliki usaha perburuan manusia. Sindikat itu terdiri dari seorang pemimpin, seorang kepercayaan, dan beberapa orang sebagai anjing-anjing pemburu yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Pakaian mereka hitam dengan kaca mata hitam pula. Mereka mengumpulkan uang dari orang-orang kaya yang ingin berburu. Satu orang kaya membayar \$ 750.000. Bila berhasil membunuh buruannya, uangnya akan kembali dan ditambah lagi dengan bonusnya.

Untuk memperoleh orang-orang yang diburu, mereka menggunakan jasa makelar. Makelar ini memiliki usaha menyebarkan pamflet. Makelar tersebut memperkerjakan orang-orang gelandangan yang beberapa di antaranya adalah bekas veteran Perang Vietnam. Dicarilah dari mereka, orang veteran yang memiliki bintang dengan kemampuan tempur semasa perang dan paling penting lagi, tidak memiliki sanak keluarga. Orang tersebut



PENERBIT :
UNESA UNIVERSITY PRESS
ANGGOTA IKAPI

ISBN : 978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA

FX Sri Sadewo, dkk



Editor
Martinus Legowo

FX Sri Sadewo

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031-8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031-8288598
Email. unipress@unesa.ac.id
unipressunesa@yahoo.com

ISBN : 978-979-028-847-8



978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN di Surabaya

Edisi Revisi

Penulis

FX Sri Sadewo
Martinus Legowo
Sugeng Harianto
Agus Trilaksana
Usman Mulyadi

Editor

Martinus Legowo



**Penerbit
Unesa University Press**

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN

di Surabaya

Edisi Revisi

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email: unipressunesa@yahoo.com

unipress@unesa.ac.id

ix, 255 hal., Illus, 15.5 x 23

ISBN: 978-979-028-847-8

copyright © 2015, Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Menjadi miskin bukan sebagai suatu pilihan, berbeda bila menjadi orang kaya. Dari hari ke hari orang berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Kekayaan tidak saja menjadi atribut dari status sosial seseorang. Barang-barang miliknya dibawa seiring jalan orang tersebut. Orang lain menoleh, takjub, dan iri, sebaliknya si kaya dengan tegap, wajah mendongak ke atas dan bangga. Tidak demikian dengan orang miskin, ia tertunduk ke bawah, tidak berani menatap wajah orang, selain menengadah tangan. Sangat tidak berdaya.

Gambaran orang miskin yang demikian ini memang tidak separah itu. Orang miskin sering lebih tegap dan *trengginas*, dari hari ke hari untuk mencari makan. Ia bekerja dan mengumpulkan satu demi satu rupiah untuk makan. Memang, tidak semua yang dikumpulkan bisa disimpan, sebaliknya habis untuk kebutuhan konsumsinya.

Intinya, kemiskinan bukanlah suatu kebanggaan. Namun demikian, ternyata tidak semuanya benar, pada setiap kelompok keyakinan tertentu, ada orang yang merelakan dirinya untuk melepaskan dari kesenangan duniawi. Mereka menjadi miskin secara sukarela demi keyakinan. Kelompok demikian tidak dibahas dalam buku ini.

Surabaya, awal Februari 2007
penyunting

FX Sri Sadewo

Kata Pengantar

(edisi revisi)

Persoalan-persoalan kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan menjadi indikator ketidaksejahteraan suatu masyarakat. Semakin besar jumlah orang miskin, hal itu menunjukkan kegagalan para penyelenggara negara (pemerintah). Di setiap negara, hidup sejahtera, baik secara material maupun non-material menjadi satu tujuan mengapa mereka memerdekakan diri. Kesejahteraan material ditandai dengan kemakmuran secara ekonomi, sementara itu kesejahteraan non-material ditandai dengan rasa aman dan nyaman, atau tepatnya kebahagiaan. Pengelola negara tidak bisa memilih salah satu yang lebih dahulu dicapai, baru yang lain dicapai berikutnya. Ketidaksejahteraan secara material pada gilirannya mengakibatkan berbagai tindakan yang mengurangi rasa aman, nyaman dan bahagia. Sebaliknya, rasa aman, nyaman dan bahagia merupakan hal yang abstrak dan jauh lebih sulit untuk dicapai. Ukuran-ukurannya pun berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, orang akan mengenal dengan konsep *American Dreams* (Mimpi Amerika). Dalam nilai tersebut, ternyata ada ukuran ekonomi juga menjadi acuan.

Memang tidak selalu, ukuran kesejahteraan material menjadi utama bagi seseorang. Karena nilai-nilai tertentu, orang lebih memilih ketenangan hidupnya tanpa bergantung pada perolehan ekonominya. Orang-orang yang demikian telah memilih kemiskinan menjadi bagian hidupnya. Mereka miskin secara sukarela, sudah barang tentu dengan berbagai alasan. Namun demikian, hal tersebut tentu dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah yang lebih besar, kesejahteraan material merupakan hal yang selalu diharapkan. Artinya, mereka tidak ingin menjadi

miskin. Pemahaman yang demikian ini kemudian menjadi kesepakatan bersama bagi negara-negara di dunia melalui MDG's (*Milleneum Development Goals*) yang dideklarasikan pada bulan September 2000 dan berharap dicapai tahun 2015. Point yang pertama dari MDG's adalah meningkatkan jumlah orang yang berpendapatan di atas 1 \$ per kapita per hari. Angka 1 \$ itu sebagai ambang batas kemiskinan absolut. Menjelang tahun 2015, seluruh pemerintah penandatangan MDGs melakukan evaluasi dan menyatakan belum tercapai sepenuhnya. Akhirnya, pada 12-13 Nopember 2014 mereka kembali menandatangani kesepakatan bersama untuk melanjutkan program-program tersebut dengan perbaikannya. Kesepakatan itu tertuang dalam SDGs (Sustainable Development Goals).

Kegamangan terhadap kondisi kemiskinan itu sebenarnya tidak saja dimiliki oleh pengelola negara, tetapi juga mereka yang mengalami. Pertambahann jumlah orang miskin itu tidak terlepas dari kegagalan berbagai program pembangunan. Kegagalan pembangunan pertanian di perdesaan misalnya telah meningkatkan jumlah orang miskin. Wilayah perdesaan telah di-"kota"-kan dengan industri yang jauh dari karakternya. Orang yang termajinalisasi dari pembangunan pedesaan tersebut pada gilirannya urbanisasi ke wilayah perkotaan. Dengan mengambil kasus kota Surabaya, buku ini dengan baik menggambarkan orang-orang miskin itu sebenarnya tidak menyerah begitu saja. Mereka yang berasal dari desa beradaptasi dengan wilayah perkotaan dan bekerja pada berbagai sektor formal atau informal.

Buku ini diawali dengan perdebatan teoritik tentang pertumbuhan perkotaan dan indikator kemiskinan. Hal itu disajikan dalam bagian pertama. Bagian berikutnya, gambaran tentang usaha-usaha orang miskin berjuang dan bertahan hidup direkam dengan baik melalui sejumlah penelitian pada beberapa sektor pekerjaan di Surabaya. Mereka, orang miskin sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka menyuarakan dalam berbagai bentuk,

misalnya melalui aktivitas mengamen dan adegan teatrikal pada waktu demo. Hal itu dicermati dan ditulis pada bab 8 dan bab 9. Di bagian akhir, penulis merangkum bagaimana usaha-usaha orang miskin kota bertahan dan beradaptasi dalam kemiskinan.

Di dalam edisi revisi ini, penulis mengolah ulang terutama terkait dengan metode penelitian. Hal itu ingin menunjukkan pada pembaca bahwa apa yang ditulis bukan sekedar imajinasi tentang orang miskin, tetapi apa yang ada, terjadi dan dipahami tentang orang miskin.

Lebih dari itu, selain edisi revisi dalam bentuk cetak, dengan mencermati perubahan teknologi, buku ini ditampilkan dalam bentuk ebook yang tidak berbeda jauh dari edisi cetak. Penerbitan ebook bertujuan agar buku ini dapat dibaca secara luas, sekaligus dengan harapan untuk memperoleh kritik. Ada rencana dalam waktu tidak lebih dari dua tahun, buku ini juga dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris.

Surabaya, Desember 2015

FX Sri Sadewo

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar (edisi revisi)	v
Daftar Isi	ix
Bagian 1. Problematika Perkotaan	1
Bab 1 Urbanisasi dalam Perspektif Budaya (Martinus Legowo)	3
Bab 2 Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran (FX Sri Sadewo)	13
Bab 3 Kemiskinan dan Pengukurannya (FX Sri Sadewo)	23
Bagian 2. Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota	39
Bab 4 Surabaya, Geliat Calon Kota Metropolitan (FX Sri Sadewo)	41
Bab 5 Buruh Bangunan di Kota Besar. Mekanisme Survival Kelompok Miskin Migran di Surabaya Tahun 1990-an (FX Sri Sadewo)	59

Bab 6	
Petani Kota. Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang Urban (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto, dan Usman Mulyadi)	93
Bab 7:	
Petugas <i>Cleaning Service</i> . Berharap di Sektor " <i>Formal</i> ", meski Harus Cerdik dan Tabah (Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo, dan Arief Sudrajat)	127
Bab 8	
Pengamen Seniman Jalanan dan Suara-suara " <i>Lapar</i> " Orang Miskin Kota (Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto)	153
Bab 9	
Mahasiswa dan Orang Miskin Kota Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi)	195
Bagian 3.	
Penutup	241
Bab 10	
Kemiskinan Kota dan Pembangunan (FX Sri Sadewo)	243

Indeks

FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya

Bagian 1

Problematika Perkotaan

Bab 1

Urbanisasi dalam Perspektif Budaya

Martinus Legowo

Pendahuluan

Jika suatu bangsa sadar dengan proses modernisasinya, sebenarnya bangsa tersebut hanya ingin berusaha untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia serta aliran peradapan pada jaman bangsa tersebut hidup. Kecenderungan suatu bangsa untuk memodernisir dirinya sejauh mungkin dilakukan dengan pembangunan. Dalam pembangunan ini secara sadar diupayakan untuk dipercepatnya perubahan struktur sosial-ekonomi dalam bangsa yang bersangkutan. Konsekuensi dari hal ini antara lain mengakibatkan juga suatu proses pergeseran dalam struktur mata pencaharian, stratifikasi sosial, serta meningkatkan mobilitas geografi seperti migrasi dan urbanisasi.

Masalah urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja, dalam arti perpindahan dari desa ke kota, akan tetapi juga dilihat sebagai perubahan budaya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut jika ditinjau dari perspektif budaya, maka urbanisasi ini perlu kerangka berfikir yang lain yaitu yang menyangkut masalah nilai, norma dan pengetahuan. Urbanisasi juga mempunyai kecenderungan untuk melibatkan perubahan-

perubahan dalam sub sistem masyarakat yang lain. Terutama pada tingkat makro, karena urbanisasi juga berarti mobilitas dan jika mobilitas terjadi, maka sub sistem lain biasanya juga berubah.

Dengan melihat urbanisasi sebagai proses perubahan kebudayaan, dalam arti perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan (*ide-ide*), akan memudahkan untuk memasukkan berbagai gejala yang mungkin muncul di perkotaan dalam kerangka penjelasan ini. Masalah-masalah yang muncul pada dimensi yang lain dapat dijelaskan lewat kerangka berfikir yang melihat ada kesejajaran masyarakat. Antara desa dan kota memiliki perbedaan dalam hal kebudayaan karena pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan lingkungan dan lingkungan yang mereka hadapipun berbeda. Permasalahan ini akan menimbulkan persoalan dalam menyesuaikan dengan lingkungan kota, terutama dalam memperjuangkan hidup dan cara (*gaya*) hidup. Sehubungan dengan ini Parsudi Suparlan (1978) menjelaskan bahwa persebaran kebudayaan kepada anggota dan pewarisan kepada generasi selanjutnya dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucap maupun dalam tindakan.

Di sini kita harus bisa memandang bahwa kebudayaan sebagai suatu kekhususan sistem nilai, karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang lain. dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kearah yang lebih sesuai dengan kehidupan yang lain.

Urbanisasi: Sebuah Kerangka Konsep

Deskripsi urbanisasi banyak yang diartikan sebagai suatu mobilitas horizontal, yaitu dari desa ke kota. Menurut Said Rusli (1983), dijelaskan bahwa urbanisasi dilihatnya sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Menurut Lee (1984) ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi, yaitu (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) faktor penghalang, dan (4) Faktor-faktor pribadi. Selanjutnya Louis Wirth's dalam studi urbanisasinya mengatakan bahwa : "*Urbanism as a way of life*" (Urbanisasi sebagai cara hidup) di mana pemusatan penduduk di dalam kota dianggap sebagai variabel yang sangat menentukan kemungkinan hidup individu, serta interaksi antar individu. Urbanisasi sebagai cara hidup yang khas dapat didekati secara empiris dari 3 perspektif yang saling berhubungan, yaitu : (1) sebagai suatu struktur fisik yang terdiri dari penduduk, teknologi dan keteraturan ekologis, (2) sebagai suatu sistem organisasi sosial yang melihat suatu struktur sosial yang khas suatu rangkaian institusi sosial dan suatu pola hubungan sosial yang khas pula, (3) sebagai seperangkat sikap dan ide-ide, dan kumpulan pribadi-pribadi yang ikut serta dalam bentuk-bentuk tingkah laku kolektif yang khas, dan menjadi obyek dari mekanisme pengawasan sosial yang khas pula. Lebih lanjut, Said Rusli (1983) melihat bahwa urbanisasi itu sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Hal itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Bintarto (1984) bahwa gejala urbanisasi terkait dengan faktor *push* dan *pull*.

Karena hanya melihat dari sisi faktor *push* dan *pull*, maka urbanisasi harus juga dilihat dari sisi budaya. Aspek budaya itu menyangkut nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan. Hal itu dilakukan oleh White dalam Haviland (1989),

mendefinisikan aspek tekno-ekonomis kebudayaan sebagai cara yang digunakan oleh para anggota suatu kebudayaan untuk menghadapi lingkungan mereka, dan aspek inilah yang selanjutnya menentukan aspek sosial dan ideology kebudayaan. Cara kebudayaan ini merupakan cara beradaptasi dengan lingkungan.

Dengan demikian kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan (emosi) manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral yang sumber-sumber dari nilai moral tersebut pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia.

Urbanisasi Sebagai Proses Perubahan Kebudayaan

Urbanisasi menurut Philip M. Hauser (1973) dapat didefinisikan sebagai proses yang membawa transformasi besar dalam pandangan hidup manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pergeseran dari “rural” ke “urban”. Sehubungan dengan demikian kita perlu melihat definisi kebudayaan agar diperoleh gambaran yang jelas karena gejala perubahan di sini adalah perubahan kebudayaan.

Kebudayaan disini harus dilihat dari proses kognitif, yaitu sebagai serangkaian pengetahuan yang digunakan sebagai strategi untuk menghadapi kehidupan, yang berkenaan dengan pemahaman dan pengintepretasian lingkungan serta pengalaman yang dihadapi oleh manusia. Lingkungan dan pengalaman ini sangat menentukan bagi proses belajar seseorang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1978) bahwa kebudayaan dengan demikian merupakan sistem ide, yang merupakan serangkaian petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan

strategi-strategi yang terdiri atas model-model kognitif yang bersumber pada dan diselimuti oleh nilai-nilai yang ada dalam etos dan pandangan hidup, yang dalam penggunaannya oleh para pelakunya untuk menginterpretasi dan menghadapi lingkungannya dilakukan secara selektif. Jadi kebudayaan disini adalah pedoman bagi tingkah laku manusia. Sebagai pedoman, ia memegang peranan penting karena dapat mengarahkan tindakan-tindakan dari si pendukungnya.

Deskripsi atau pendefinisian kebudayaan sebagai proses kognitif memiliki implikasi lanjutan terhadap pemahaman urbanisasi. Kita harus melihat bahwa urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja (dalam arti perpindahan dari desa ke kota), akan tetapi perubahan tersebut juga dilihat sebagai proses budaya. Demikian juga termasuk transfer nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kota. Mengenai transfer kebudayaan ini hendaknya disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga merupakan keputusan untuk melakukan penyesuaian kebudayaan di lingkungan yang baru (sesuai dengan iklim perkotaan).

Masalah yang dihadapi sekarang adalah kesulitan dalam mengubah sistem ide mereka (kaum urbanis), dengan demikian bisa mengalami hambatan dalam transfer kebudayaan. Sistem ide ini merupakan salah satu unsur yang paling sukar diubah dan seandainya bisa diubah membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kebudayaan suatu masyarakat itu sudah mengakar dalam diri pendukungnya. Lebih jauh lagi apabila kebudayaan itu sendiri tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakatnya, dalam arti sudah tidak diperlukan lagi oleh masyarakat pendukungnya sehingga dengan demikian kebudayaan akan berubah. Proses adaptasi sangat penting artinya agar kebudayaan kota dapat diterima dengan baik. Sehubungan dengan adanya adaptasi ini manusia tidak hanya telah menjamin kelestariannya, tetapi juga

pemekarannya. Oleh karena itu, tidak berarti bahwa apa saja yang dikerjakan oleh manusia dikerjakan karena sifat adaptifnya terhadap lingkungan tertentu. Yang jelas, manusia tidak bersaksi terhadap lingkungan seperti apa adanya, tetapi tetapi ia bereaksi terhadap lingkungan seperti apa yang dipahaminya, dan kelompok manusia dapat memahami lingkungan yang sama dengan cara-cara yang berbeda satu sama lain. Mereka juga bereaksi terhadap hal-hal yang bukan lingkungan: pertama-tama sifat biologinya, kepercayaan, sikap dan konsekuensi perilaku mereka untuk orang lain. Semua itu menghadapkan mereka kepada masalah, dan orang yang memelihara kebudayaan itu untuk memecahkan masalah.

Kota, Lingkungan yang Menuntut Perubahan Budaya

Lingkungan mempengaruhi kebudayaan, sehingga nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan hidup yang dihadapinya. Lingkungan desa dan kota merupakan dua kubu yang berbeda. Strategi adaptasi di pedesaan juga berbeda dengan strategi adaptasi di kota. Selain itu, pertumbuhan kebudayaan yang ada di desa berbeda dengan yang ada di kota. Simbol-simbol komunikasi pun ikut berubah dalam proses ini, sehingga manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu memiliki model berfikir yang banyak dipengaruhi dan disesuaikan dengan lingkungan itu yang menjadikan sikap dan tindakan mereka memiliki corak latar belakang lingkungan asalnya. Masalah-masalah inilah yang berkaitan erat dengan urbanisasi yang ada di perkotaan.

Masalah itu ada karena sebagaimana dicirikan oleh Louis Wirth dalam Goede (1982) bahwa kota sebagai suatu *“relatively large, dense, and permanent settlement of socially heterogeneous individuals”*. Ada tiga komponen yang cukup penting dari definisi ini, yaitu : (1) ukuran yang besar; (2) adanya kepadatan; dan (3) sifatnya yang heterogen. Komponen yang dikemukakan oleh Wirth ini melahir-

kan masalah pada saat terjadinya kontak antara desa dan kota. Masalah ini sangat penting diperhatikan karena baik nilai-nilai, norma-norma, maupun pengetahuan yang tumbuh di perkotaan membedakan dengan yang ada di pedesaan. Selanjutnya, Sartono Kartodirdjo (1977) memberikan suatu konsepsi lain untuk mengkaji masalah yang berhubungan dengan pandangan hidup ini dengan menggunakan tiga perspektif sebagai pendekatannya. Pertama, bahwa sebagai struktur fisik, kota mempunyai dasar populasi yang dideferensiasikan menurut tingkat teknologi, susunan ekologis dan faktor-faktor lain. Kedua, sebagai susunan sosial, pandangan hidup ini menggantikan hubungan primer dan sekunder. Berhubung dengan proses ini maka ikatan kekerabatan diperlemah, dan solidaritas sosial menjadi goyah. Ketiga, dengan gaya hidup ini muncul mentalitas kota dengan sikap, ide-ide, dan kepribadian yang berbeda dengan mentalitas tradisional. Ketiga perspektif ini sangat penting bagi penjelasan tentang urbanisasi. Hubungan-hubungan sosial yang muncul juga membutuhkan corak yang khusus, menuntut adanya strategi adaptasi tertentu.

Tentang gaya hidup kota, Wirth mengemukakan bahwa (1) masyarakat kota cenderung sekuler, (2) terbentuknya asosiasi yang bersifat sukarela; (3) adanya peranan sosial yang terpisah-pisah; dan (4) peranan norma-norma menjadi tidak jelas. Kaum urbanis akan mengalami perubahan ke arah tersebut. Namun demikian, mereka tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai, norma-norma dan model-model pengetahuan yang memiliki corak pedesaan. Oleh karena itu, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Kondisi kota merupakan sesuatu yang asing bagi kaum urbanis, sehingga sistem pengetahuan yang mereka miliki tidak dapat dipakai untuk memahami dan menginterpretasikan dengan tepat kondisi kehidupan di perkotaan. Simbol-simbol kehidupanpun sudah berubah, hubungan-hubungan sosial sudah menjadi dangkal. Orang kota sudah mengembangkan kehidupan yang komersial. Stratifikasi sosialpun sudah semakin jelas perbedaan-

nya, sehingga menyebabkan hilangnya kontak yang menyeluruh antar warga masyarakat.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada kaum urbanis ini adalah: (1) mereka mengubah sistem pengetahuan lama yang dibawa dari daerah asal agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan yang berlaku di perkotaan; dan (2) mereka tetap mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, model-model pengetahuan lama. Sistem pengetahuan untuk selanjutnya digunakan untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan sistem pengetahuan mereka yang sudah mapan. Untuk yang pertama mereka akan menjadi golongan orang kota, yang harmonis dengan lingkungan hidup di perkotaan. Selanjutnya yang kedua, mereka akan hidup sebagai orang desa di perkotaan, yang lengkap dengan gaya hidup di pedesaan.

Penutup

Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi memungkinkan kita sampai pada penjelasan yang lebih mendasar. Urbanisasi tidak hanya menyangkut masalah perubahan fisik, tetapi juga harus dilihat dalam konteks budaya yang berarti perubahan sistem pengetahuan untuk menginterpretasikan kehidupannya. Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi merupakan salah satu bidang penjelasan yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Perlu diketahui bahwa kita harus memandang kebudayaan sebagai kekhususan-kekhususan sistem nilai karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang lain. Dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam

diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan ke arah yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat lain.

Daftar Pustaka

Bintoro

1984 **Urbanisasi dan Permasalahannya**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Evers, Hans-Dieter

1978 "Urbanization and Urban Conflict in Southeast Asia". Dalam Peter SJ Chen and Hans-Dieter Evers (ed.), **Studies in Asean Sociology**. Singapore: Chopmen Enterprises.

Goede, JH

1982 "Urbanisasi dan Urbanisme" dalam JW Schoorl, **Modernisasi**, Jakarta: Gramedia.

Houser, Philip M

1973 **Perkembangan Kota Semarang**, Salatiga: LPIS IKIP Kristen Satyawacana.

Lee, Everet S

1983 **Suatu Teori Migrasi**, diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta, PPK- UGM.

McGee, TG

1976 **Suatu Aspek Urbanisasi di Asia Tenggara**, Yogyakarta, Lembaga Kependudukan UGM.

Parsudi Suparlan

1977 "Flat dari aspek Antropologi", **Widyapura**, No.1, Th II

Said Rusli

1984 **Pengantar Ilmu Kependudukan**, Jakarta: LP3ES.

Sartono Kartodirdjo

1978 Kata Pengantar dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), **Masyarakat Kuno dan Kelompok Sosial**, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Wirth, Louis

1978 Urbanisasi sebagai cara hidup, **Berita Antropologi**, Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, No. 34.

Bab 2

Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran

Kota sebagai Pusat Peradaban

Dari catatan Michael P.Todaro dan Jerry Stilkind (1991) menggambarkan bagaimana penduduk kota telah membengkak berlipat-lipat jumlahnya, tidak saja di negara-negara maju, tetapi sebaliknya di negara-negara sedang berkembang. Di dalam wilayah yang terbatas, kota dihuni oleh puluhan juta manusia, Mexico City dengan 31 juta jiwa, Sao Paolo 25,8 juta jiwa, New York 20,4 juta jiwa, sementara itu Jakarta dengan 16,7 juta jiwa. Orang-orang dengan “sukarela” hidup bersesak-sesak di kota yang sempit, fasilitas yang terbatas. Untuk di Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya, mereka tak jarang harus tinggal di bantaran sungai. Dengan kondisi lingkungan yang “tidak sehat” (menurut ukuran ilmu kesehatan lingkungan), mereka tinggal, bahkan menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah tersebut.

Kepadatan nampaknya menjadi ciri dari sebuah kota. Setiap kota di mana pun memiliki wilayah-wilayah padat. Wilayah-wilayah itu biasanya tidak jauh dari pusat kota. Hanya sedikit kota-kota di dunia ini direncanakan dengan penataan ruang taat asas. Kota yang demikian ini biasanya tidak tumbuh secara

alamiah, tetapi “kloning” (rekayasa) dari kota-kota lama yang telanjur semrawut.

Hal ini tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan kota tersebut. Di dalam sejarahnya, kota ini lahir dari revolusi peradaban pertama, yaitu revolusi agraris. Dimulai dari domestikasi (penjinakan) binatang dan tanaman hingga bercocok tanam dan penemuan “teknologi” pertanian, sebut saja kapak persegi dan alat besi, manusia kemudian di-“rumah”-kan. Manusia tidak lagi berkeliaran mengikuti binatang buruan, tetapi cukup memilih tempat tinggal. Hal ini tidak berjalan dalam waktu yang singkat dan langsung. Pada waktu penjinakan binatang, manusia tidak lagi berburu, tetapi menjadi penggembala. Mereka membawa binatang piaraannya ke padang-padang. Mereka meninggalkan gua, tetapi membawa kemah-kemahnya. Ketika bercocok tanam, mereka tidak lagi berjalan ke padang-padang, tetapi menetap di mana lahan pertanian itu berada. Rumah-rumah pun didirikan di sekitar lahan pertanian (lihat Sukadana, 1983: 47-62).

Pembagian pekerjaan di antara manusia ini kemudian menjadi semakin kompleks. Dari secara tegas, mereka berbagi tugas dengan penanda jenis kelaminnya, mereka meletakkan perempuan di rumah bersama anak-anaknya, hanya pada waktu tertentu saja, seperti tanam, panen dan sesudahnya ditarik turun ke lahan pertanian. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang telah melahirkan peradaban tersebut. Ada dugaan yang mulai melakukan domestikasi binatang dan tanaman adalah kaum perempuan tatkala manusia laki-laki sedang sibuk berburu dan berperang. Oleh karena itu, segala atribut “lahir” yang dimiliki oleh perempuan menjadi penanda kesuburan lahan tersebut.

Karena hasilnya berlimpah, tidak bisa dihabiskan dalam waktu yang singkat, maka masyarakat petani mengalami surplus pangan. Surplus pangan ini merupakan berkah dan malapetaka. Menjadi berkah karena manusia tidak lagi hidup hanya untuk

mencari makan. Waktu luangnya digunakan untuk mengembangkan teknologi dan kesenian. Spesialisasi pekerjaan di luar pertanian pun berkembang. Sementara itu, surplus pangan ini menjadi malapetaka karena menjadi daya tarik bagi kelompok manusia yang masih nomaden untuk menguasai. Peperangan pada masa lampau biasanya terjadi pada masa paska panen.

Strategi yang dikembangkan kemudian adalah hidup lebih berkelompok, rumah-rumah tidak lagi berjauhan, mengikuti lahan pertanian, namun sebaliknya berkelompok, sebagai perkampungan. Lahan pertanian diletakkan di sisi luar, antara lahan pertanian dan perkampungan dibatasi tumpukan batu seperti layaknya batas dan benteng kota, atau rimbunan pohon-pohon bambu, seperti pola-pola perkampungan lama di Asia Tenggara, antara lain: Huta (Batak). Hanya ada satu pintu masuk ke perkampungan. Pada waktu malam hari dan saat-saat tertentu kaum lelaki secara bergiliran bertugas untuk menjaga perkampungan.

Hal itu diatur oleh kepala kampung. Kepala kampung ini dipilih mengikuti prinsip *primus inter pares*. Lama-kelamaan orang yang berjaga ini dipilih secara khusus, di kampung Jawa dikenal dengan *Jagabaya*. Orang-orang ini dibayar dengan himpunan kecil dari hasil panen (*jimpitan*) pada masing-masing keluarga. Aktivitas ini diatur oleh kepala kampung. Dalam perkembangannya, penemuan sistem pertanian sawah membuat hubungan antar keluarga, antar kampung ini menjadi semakin teratur dan meluas seiring jaringan irigasi dari sungai ke sawah. Dari antara kepala kampung, seorang dipilih sebagai pemimpin. Pemimpin ini raja di masa kemudian, kampung tempat tinggalnya adalah kota, sedangkan para *jagabaya* menjadi tentara, dan *jimpitan* adalah pajak. Tanda-tanda pembayaran *jimpitan* ini adalah awal dari manusia mengenal angka dan huruf pertama kali, sebagaimana terjadi pada bangsa Sumeria di Mesopotamia kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (perhatikan Haviland, 1988: 31; Sukadana, 1983: 71-72; Hawkes, 1965: 326, 363-364). Secara ringkas, Mumford (1970),

sebagaimana dikutip oleh Adi Sukadana (1983: 72), mengurutkan rangkaian perkembangan sebuah kota sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahap-tahap Perkembangan Kota
(Sukadana, 1983: 72)

Stadium	Bentuk Perkembangan
1 Eoplis	Perkembangan sebuah desa menjadi suatu pemukiman yang tetap dengan penggunaan tanah yang teratur
2 Polis	Suatu kumpulan desa atau kelompok keluarga besar dengan adat-istiadat serta kegiatan agraris yang bertahan.
3 Metropolis	Sebuah kota yang tumbuh dari sejumlah desa tau kota kecil, sehingga merupakan suatu pemukiman induk dengan pusat perdagangan dan interaksi macam-macam kebudayaan.
4 Megapolis	Sebuah kota besar dengan tanda-tanda permulaan kemunduran peradaban
5 Tyranopolis	Sebuah kota besar yang hidup sebagai parasit di lingkungannya. Tampak detorasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan usaha administratif.
6 Nekropolis	Sebuah kota besar dalam keadaan kemunduran umum, menuju kemusnahan-nya.

Sang pemimpin, raja tidak serta merta membangun istananya. Terebih dahulu, ia menyusun kekuatan untuk menjaga keamanan rakyatnya. Rakyat dengan sukarela menyerahkan sebagian kemerdekaannya untuk diatur oleh raja tersebut. Kekuatan itu berupa tentara dan pemungut pajak, serta “pelayan” bagi rakyat. Timbunan hasil panen sebagai bayaran untuk tentara ini diletakkan dalam *lumbung-lumbung* di kota. Kelebihannya dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan lain. Demikian pula, rakyat-

nya juga menukarkan hasil panen dengan peralatan dan barang lain yang dibutuhkan. Peralatan dan barang tersebut dihasilkan oleh tukang-tukang yang telah berkembang pada masa sebelumnya. Atau, para pedagang dari luar membawa dan menjualnya. Para pedagang membangun toko dan perusahaan di kota tersebut. Tanah bisa membeli dari masyarakat setempat atau menyewa pada raja. Oleh karena itu, pada abad pertengahan di Eropa sejumlah kota tumbuh akibat perkembangan perusahaan di dalamnya, seperti *gilda-gilda* di kota-kota Italia. Di Nusantara, sejumlah kota pantai merupakan kota perdagangan, seperti Surabaya dengan syabandarnya. Itu awal pertumbuhan kota sebagai pusat peradaban dengan berbagai fungsi, mulai pasar, birokrasi hingga benteng, sebagaimana dipaparkan oleh Max Weber (1977), dan kota pun tumbuh sebagai pusat peradaban (Keesing, 1989: 49-50).

Urbanisasi dan Peminggiran

Pada awal pertumbuhan kota, jumlah penduduknya tidak begitu besar. Meskipun demikian, menempati lahan yang sempit. Kota tumbuh dengan cepat, terutama akibat dari urbanisasi (perpindahan manusia dari desa ke kota). Demikian pula, terlihat pada perkembangan kota-kota pertama di dunia. Menurut catatan Modelski (1997) Di dalam penggalian kota-kota lama, diketahui bahwa luas setiap kota memiliki luas hanya beberapa hektar saja, tetapi dihuni lebih dari seribu jiwa. Jumlah penduduk kota-kota pertama itu berlipat dua pada setiap seratus tahunnya. Pelipatan jumlah penduduk ini semakin pendek ketika memasuki abad ke-20 dan kini masuk paruh pertama abad ke-21. Pelipatan dalam jumlah besar ini menjadi sulit dibuktikan akibat penambahan alami, namun lebih meyakinkan sebagai pengaruh urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa-kota, atau penggabungan desa-desa menjadi wilayah kota.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan pada Kota-kota Pertama
(Modelska, 1997)

Kota (Pengarang)	Periode	Luas (ha)	Perkiraan Jumlah Penduduk	Kepadatan
ERIDU				
▪ Mallowan (1970: 331)	Ubaid	8-10	4.000	500
▪ Wright (1981: 325)	Early Uruk	40	6.200- 10.000	155-250
HABUBA-KABIRA				
▪ Algaze (1993)	3.100 SM	40	6-8.000	150-200
HIERAKONPOLIS				
▪ Valhelle, 1990	3.400 SM	35	5-10.000	143-350
URUK				
▪ Nissen, 1993: 56	Akhir millenium ketiga SM	250	25-50.000	100-200
▪ Adams, 1981: 85	Awal Dinasti 1	400	40-50.000	100-125
UR				
▪ Wright, 1981: 327	Awal Dinasti 1	21	Kurang dari 6.000	286
▪ Wooley, 1965: 193	Dinasti 3	50	34.000	680
▪ Wright, 1981: 320-1	Dinasti 3	50 (termasuk dinding kota)	34.000	690
EBLA				
▪ Pettinato, 1981: 134	Dinasti 3	56	Sekitar 40.000 lebih	714
MOHENJO-DARO				
▪ Barrow & Shodhan, 1977: 11	2.500 SM	51 (wilayah kota)	40.000	784
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	100+	40.000	400
HARAPPA				
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	43+	20.000 s/d 25.0000	465-581

Pergerakan-pergerakan etnik hingga milineum pertama Masehi telah menenggelamkan kota-kota lama, kemudian tumbuh kota-kota baru. Kota-kota baru dunia ini dalam sejarahnya sebenarnya tidak jauh berbeda engan kota-kota pendahulunya, yaitu tumbuh dari pertanian yang menyebar ke seluruh wilayah di dunia, tetapi kini jauh lebih rumit. Kota tidak lagi sebagai kota produsen, tetapi sebagai kota konsumen, dagang dan pemerintahan. Everett S. Lee (1995) yang memperbaiki teori Ravenstein, menunjukkan bahwa keanekaragaman fungsi kota tersebut telah menjadi medan magnet bagi penduduk desa sekitarnya. Daya tariknya menjadi semakin menguat tatkala jalur transportasi antara desa dan kota semakin mudah dan murah. Revolusi industri telah menghasilkan alat transportasi massal yang murah, seperti kereta api dan bus.

Sementara itu, desa-desa mengalami entropi. Cara-cara produksi dalam sistem pertanian menjadi semakin tidak menguntungkan bagi pekerja. Monetisasi dan revolusi hijau-biru memaksa para tuan tanah mengabaikan pola-pola hubungan yang “mesra” terbina dari masa lampau, yaitu patron-klien. Pada masa lampau, di Inggris perpindahan penduduk ke kota diawali dari rendahnya upah buruh tani di pedesaan. Penyebabnya bukan perubahan teknologi, tetapi jumlah buruh yang tidak bekerja jauh lebih banyak dari lahan pertanian, sehingga buruh menurunkan upahnya demi memperoleh pekerjaannya. Pada titik tertentu, upah yang diterima tidak seimbang dengan tenaganya, sehingga mereka memilih memasuki industri-industri di perkotaan (lihat Hallas, 2000: 67-84). Sementara itu, paska Perang Dunia II, revolusi hijau-biru mengakibatkan penyingkiran kaum perempuan dari lahan pertanian, kaum miskin desa menjadi semakin terpuruk. Hasil panen tidak lagi melebihi dari biaya produksi, sehingga petani-petani kecil menjual tanahnya kepada tuan tanah atau orang kota.

Wiradi (1987) menggambarkan dengan baik dinamika masyarakat petani di Jawa. Dalam tulisannya, ia menggambarkan bahwa monetisasi dan revolusi hijau-biru mengakibatkan masyarakat buruh tani dan petani kecil mengembangkan sektor non-pertanian. Lambat-laut mereka kemudian desa menuju ke kota untuk kebutuhan keluarganya. Sektor pertanian yang tidak mendukung ditinggalkan. Namun, hasil dari sektor pertanian (bila ada) digunakan untuk mendukung usaha-usaha sektor non-pertanian di pedesaan dan pada gilirannya untuk modal di perkotaan. Pada petani kaya, sektor non-pertanian merupakan diversifikasi usaha dari sektor pertanian, begitu pula bila melakukan migrasi dan berusaha di kota. Dengan modal yang besar, hasilnya pun berlipat, tetapi hal tidak demikian pada petani miskin atau buruh tani. Hasil di perkotaan tidak memberikan keuntungan yang besar, selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya di desa dan seringkali jarang digunakan untuk mengembangkan sektor pertaniannya.

Sebagaimana ditulis oleh Eric Wolf (1985) bahwa salah satu faktor pengikat dari masyarakat desa adalah tanah. Ketika kehilangan tanah, maka lambat laun hilang pula ikatan pada desa asalnya, dan akhirnya menetap di kota. Keputusan menetap di kota merupakan konsekuensi ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghidupannya, meski hanya masuk ke sektor informal. Selain kondisi obyektif kaum migran, pilihan memasuki sektor informal juga semata-mata karena sektor formal terbatas jumlahnya dan tidak bersifat lentur.

Dengan demikian, jelaslah mengapa kota dari hari ke hari tidak semakin longgar, tetapi semakin padat. Kebutuhan akan tanah untuk pemukiman, perkantoran dan pabrik semakin mengusur sektor pertanian di kota (lihat Sadewo, Harianto, dan Mulyadi, 2004). Kampung-kampung lama dari hari ke hari tergusur, dan digantikan oleh pusat perkantoran dan perbelanjaan. Penduduknya memilih pindah ke daerah pinggiran kota. Namun

demikian, pendirian pusat perkantoran dan perbelanjaan sebagai representasi pertumbuhan sektor formal tetap tidak mampu menampung tenaga kerja, terutama di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, dari data BPS, sebagaimana dikutip oleh Samhadi (2006: 33), sektor formal hanya bisa menampung 30% tenaga kerja, sebaliknya sektor yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, sektor informal menampung 70% tenaga kerja.

Di dalam analisis Samhadi (2006:33), pertumbuhan sektor informal di Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut karena ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja. Di Indonesia, angka pengangguran terus meningkat, dari 5,18 juta orang tahun 1997, menjadi 6,07 juta orang (1998), 8,9 juta orang (1999), 8,44 juta orang (2000), 8,01 juta orang (2001), 9,13 orang (2002), 9,53 juta orang (2003), 10,25 juta orang (2004) dan 10,9 juta orang (2005). Jika setengah penganggur (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu) dimasukkan, angka pengangguran saat ini mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 37% dari toatal angkatan kerja (106,9 juta orang). Kondisi ini berlawanan dengan pertumbuhan sektor formal. Berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2004-2009 sebesar 6,6% per tahun dan setiap persen pertumbuhan bisa menyerap 600.000 angkatan kerja. Namun, pada kenyataan angka pertumbuhan tersebut diperkirakan baru bisa dicapai tahun 2007, dan sekarang ini hanya mampu menciptakan sekitar 178.000 lapangan kerja baru.

Daftar Pustaka

- Hallas, C.S.
2000 Poverty and Pragmatism in Northern Uplands of England: the North Yorkshire Pennines c. 1770-1900. **Social History**. Vol. 25. No. 1.

- Haviland, William A.
1988 **Antropologi Jilid 2.** diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.
- Hawkes, Jacquetta.,
1965 **Prehistory. History of Mankind, Cultural and Scientific Development.** New York: A Mentor Book.
- Keesing, Roger M.
1989 **Antropologi Budaya. Suatu Perspektif Kontemporer.** Diterjemahkan oleh Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga.
- Modelska,
1997 Early World Cities. Extending the census to the fourth millennium. **Paper.** Konvensi ISA. World Sytem Data Historical Group. Toronto. Dapat diakses di <http://www.etext.org/Politics/World.Systems/papers/modelski/geocit.htm>.
- Samhadi, Sri Hartati.
2006 Dilema Sektor Informal. **Kompas.** 16 April.
- Sukadana, A. Adi.,
1983 **Antropo-ekologi.** Surabaya: Airlangga University Press.
- Todaro, Michael P., dan Jerry Stilkind.
1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.
- Weber, Max.
1977 Apakah yang disebut Kota? Diterjemahkan oleh Darsiti Soeratman dan Amin Soendoro. Dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). **Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Wiradi, Gunawan.
1983 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 3

Kemiskinan dan Pengukurannya

Kemiskinan sejati tidak berarti tidak memiliki apa-apa, melainkan keterlepasan dari keterikatan akan benda-benda di dunia dan dalam melepaskan kekuasaan atas benda-benda secara sukarela. Itulah sebabnya ada orang-orang miskin yang sungguh-sungguh kaya. Demikian pula sebaliknya.

Escriva (1987: 150)

Kemiskinan:

Antara Ada dan Tidak, Nampak dan Tidak Nampak

Di dalam satu film yang dibintangi oleh Jean Claude van Damme, *Hard Target*, diceritakan di New Orleans terdapat sindikat yang memiliki usaha perburuan manusia. Sindikat itu terdiri dari seorang pemimpin, seorang kepercayaan, dan beberapa orang sebagai anjing-anjing pemburu yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Pakaian mereka hitam dengan kaca mata hitam pula. Mereka mengumpulkan uang dari orang-orang kaya yang ingin berburu. Satu orang kaya membayar \$ 750.000. Bila berhasil membunuh buruannya, uangnya akan kembali dan ditambah lagi dengan bonusnya.

Untuk memperoleh orang-orang yang diburu, mereka menggunakan jasa makelar. Makelar ini memiliki usaha menyebarkan pamflet. Makelar tersebut memperkerjakan orang-orang gelandangan yang beberapa di antaranya adalah bekas veteran Perang Vietnam. Dicarilah dari mereka, orang veteran yang memiliki bintang dengan kemampuan tempur semasa perang dan paling penting lagi, tidak memiliki sanak keluarga. Orang tersebut

ditawari sebagai orang buruan dengan bayaran \$ 10.000 bila berhasil lepas dengan menyeberangi sungai dalam waktu 1 (satu) jam. Orang-orang gelandangan yang miskin tersebut diiming-imingi bahwa betapa enaknyanya memperoleh sebesar itu. *“Kamu tidak perlu menggelandang, mencari makan di tong sampah, atau dari gereja ke gereja. Kamu bisa hidup enak, meninggalkan kehidupan jalanan yang keras dan bisa mati kedinginan di tengah malam. Hanya dengan satu jam saja. Dan, kamu bisa!*

Kenyataannya, tidak seorang pun berhasil. Bagaimana tidak, satu orang diburu oleh puluhan orang dengan senjata yang lengkap. Satu orang buruan yang berlari, sementara itu dikejar oleh anjing-anjing bersepeda motor dan mobil. Ketika terbunuh, mayatnya tinggal dibuang atau dibakar dalam gubuknya. Polisi tidak bisa mengetahui jejak pembunuhan tersebut karena dokter yang mengotopsi telah dibayar untuk memalsukan hasil *visum et repertum*, sehingga menunjukkan kematian yang wajar dan kasusnya ditutup.

Suatu ketika datang seorang wanita yang kehilangan ayahnya, Nona Binder. Di luar kebiasaan, ayah tidak menulis surat lagi padanya. Oleh karena itu, ia mencari dengan dibantu Chance (Jean Claude van Damme). Dari data visum dokter, ia mati terbakar dalam gubuknya, tetapi tidak demikian menurut Chance karena salah satu kalung identitasnya ditemukan berlubang ditembus anak panah. Bersama dengan polisi wanita yang akhirnya terbunuh, Nona Binder dan Chance membongkar sindikat perburuan manusia. Karena takut terbongkar, sindikat pun berbalik memburu Chance. Namun, pada akhirnya terjadi sebaliknya, Chance dengan kekuatan dan kecerdikannya mampu membunuh satu per satu pemburunya. Selain Nona Binder, ia dibantu Paman Duvee, seorang pembuat minuman keras ilegal. Kelebihannya, Chance lebih tahu medannya, yaitu rawa-rawa dan Gudang Mardi Grass. Akhirnya, seluruh sindikat mati terbunuh berikut orang-orang kaya yang ikut berburu.

Apa yang terpikirkan dari film tersebut, seandainya sindikat tersebut ada, maka tidak salah mengapa di dunia ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang miskin. Binatang buruan harus lebih banyak dibandingkan pemburunya. Di dalam bentuk lain, pernah pula terdapat penjualan organ-organ tubuh dari orang-orang miskin dan orang-orang terpidana, terdapat pula *child trafficking* (penjualan anak-anak) baik untuk pekerja di bawah umur maupun menjadi kesenangan seks. Mereka diambil, diculik atau apa pun dari keluarga-keluarga miskin.

Paling mudah mengingat mereka adalah dengan melihat angka-angka di Biro Statistik. Itulah yang dilakukan oleh sebagian besar pemerintah di dunia ini, mulai dari angka kesakitan, kematian anak di bawah umur, kematian ibu melahirkan, angka kematian karena kurang gizi hingga apa lagi. Karena terlalu bosan mengisi lembar demi lembar instrumen survai, sering kemudian angka tersebut tidak pernah berubah, cukup mengambil dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, orang miskin tidak bertambah, tidak juga berkurang, meski jumlah penduduk selalu bertambah berlipat-lipat.

Menjadi terhenyak ketika kematian mereka berada tepat di depan kita, setidaknya-tidaknya oleh media massa disajikan di depan piring makan kita. Di Indonesia, menjelang akhir pemerintahan Suharto, tahun 1997, di televisi disiarkan langsung acara pembukaan SEA-Games yang menghabiskan ratusan juta rupiah, sementara itu di Irian Jaya, sekarang Papua, yaitu di Pegunungan Jaya Wijaya, terdapat puluhan orang mati karena kelaparan. Begitu pula, ketika pesta demokrasi yang menghabiskan puluhan milyar rupiah pada paska pemerintahan Suharto dengan menghasilkan anggota Dewan yang kerdil dan egoistis¹, kita disuguhkan sekian

¹ Di dalam beberapa kasus di pusat dan daerah, telah ditunjukkan pada kita tentang tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, serta kegiatan studi

banyak anak-anak busung lapar, dan bahkan di antaranya meninggal dunia. Bila kurban tsunami di Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) tidak mencapai di atas seratus ribu jiwa, mungkin baunya tidak sampai di hidung kita, kemudian kita akan menutup mata dan telinga atas penderitaan mereka. Hal ini bisa dilihat pada penanganan gempa sebelumnya di Indonesia Timur.

Sebenarnya, apa yang dialami oleh kita, rakyat Indonesia, tidak berbeda jauh dengan di negara-negara maju. Pada akhir tahun 1990-an misalnya, seorang veteran Perang Vietnam dengan berbagai bintang kehormatan ditemukan mati kedinginan di taman, depan Gedung Putih, Washington. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan penghormatan yang berlebihan pada tentara yang pulang dari Perang Badai Gurun.

Artinya, ada dan tidak adanya pengakuan keberadaan mereka sebenarnya bersifat kontekstual. Lebih kontekstual lagi dari sisi pandangan pengambil kebijakan publik dan birokrasi pemerintahan. Bila menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, maka jumlah mereka selalu dieliminasi sedemikian rupa mendekati titik nol. Namun, menjadi berbeda tatkala jumlah mereka kemudian dikompensasi dengan jumlah proyek, anggaran atau dana, maka jumlah mereka menjadi berlipat. Pada kasus Inpres Desa Tertinggal (IDT), tatkala dilakukan pendataan terhadap jumlah orang miskin dan desa tertinggal, awal kali para bupati menampik adanya desa tertinggal dengan keluarga miskin di dalamnya. Namun demikian, berbeda tatkala disebutkan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana untuk mengentaskan desa tertinggal tersebut. Demikian pula, dorongan yang besar untuk menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah keluarga pra-sejahtera berkaitan dengan pemberian beras subsidi bagi

banding, sementara itu kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat krisis moneter 1997-1998.

pemerintah paska Suharto, maka jatah beras bersubsidi dari tahun ke tahun terus berkurang sebagai bukti telah terjadi pengurangan keluarga miskin.

Mereka, orang-orang miskin, tidak berarti berdiam diri. Mereka memiliki strategi sendiri dalam mengatasi kemiskinannya. Namun demikian, strategi tersebut tidak selalu diterima, sebagian besar kebijakan tata ruang kota misalnya sangat tidak menguntungkan kelompok miskin. Hal ini mengingatkan kita pada cerita Abunawas tentang Orang Kaya dan Orang Miskin. Di dalam cerita tersebut, terdapat dua orang, sebut saja Alu si orang kaya, Ali si orang miskin. Kedua orang itu memiliki postur yang berbeda. Alu yang memiliki rumah besar dengan isinya yang berlimpah itu kurus badannya, sementara itu Ali yang hanya tinggal di dalam gubuk yang menempel di tembok pagar Alu memiliki postur gemuk. Tidak saja Ali, istri dan kedua anaknya pun berbadan gemuk.

Suatu ketika seseorang bertanya pada Ali, mengapa seluruh anggota keluarganya berbadan sehat dan gemuk. Apa yang dimakan, sehingga menghasilkan tubuh semacam itu. Ali pun menjawab, *"Mudah saja hanya nasi dan lauk ala kadarnya. Kami sekeluarga menikmati benar, bahkan dengan nasi pun kami bisa karena setiap hari asap dapur Alu memberikan aroma masakan yang lezat."* Jawaban Ali tersebut didengar oleh Alu. Oleh karenanya, Alu pun marah. *"Itu sebabnya badanku kurus, aroma masakanku sudah dimakan Ali sekeluarga. Aku tidak terima. Aku akan menghadap pada Pak Hakim. Menuntut ganti rugi."* Maka, pergi Alu ke hadapan Hakim dan menuntut ganti rugi 100 real uang emas pada Ali.

Hakim pun tidak bisa memutuskan dan meminta tolong pada Abunawas. Oleh Abunawas, Alu pun dipanggil. Hakim kemudian memutuskan bahwa tuntutan Alu dipenuhi dengan catatan tidak boleh dipegang. Hakim dari jauh menghitung dengan melempar uang tersebut satu per satu. Setelah selesai, Abunawas mengatakan bahwa Alu telah menerima ganti rugi

tersebut. Alu pun protes, maka Abunawas juga mengatakan bahwa Ali tidak mengambil apapun dari Alu, mengapa Alu merasa dirugikan.

Gubuk-gubuk mereka digusur dan dihancurkan, begitu pula dengan rombongan jual pun diangkut Satpol PP. Mereka yang melacur dan menggelandang pun dicap *pekat* (penyakit masyarakat) ditangkap dan diadili, meski dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi, “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlandar dipelihara oleh negara.*” Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya ditangkap.....

Mendefinisikan Kemiskinan

Kemiskinan sebenarnya tidak saja diamati, tetapi juga dirasakan. Membangun empati bersama dengan orang dan keluarga miskin mungkin lebih dari cukup, terutama bagi pengambil kebijakan publik. Oleh karenanya, Dillon dan Hermanto (1993: 18-19) mencermati bahwa ada 2 (dua) pandangan tentang kemiskinan. Di satu pihak, kemiskinan adalah suatu proses, di pihak lain kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19; kutip dari Pakpahan dan Hermanto, 1992). Dengan demikian, kemiskinan dapat pula dipandang sebagai salah satu akibat dari kegagalan dari kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini memunculkan kemiskinan relatif atau dikenal pula kemiskinan struktural.

Sementara itu, kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala dari suatu masyarakat melahirkan konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut oleh Bank Dunia pada tahun 1990 didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu individu memenuhi

kebutuhan dasarnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19), meski telah berkembang pada tahun-tahun belakangan ini.

Acuan bahwa orang miskin selalu diarahkan pada kegagalan dalam pemenuhan sumber daya dan dana ini kemudian mengarahkan definisi kemiskinan lebih pada dimensi ekonomi. Oleh karena itu, seperti yang dihimpun oleh Andre Bayo Ala (1981: 3-5), antara lain dari pendapat Sar A Levitan (1980), Schiller (dalam Stone, Whelen dan Murin, 1979), Emil Salim (1980), dan Ajit Ghose dan Keith Griffin (1980), lebih mengacu pada ketidakmampuan individu atau keluarga dalam kebutuhan hidupnya melalui pendapatan yang diperolehnya.

Hal itu berbeda dengan pendapat John Friedman dalam Ala (1981: 4) yang lebih mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial itu meliputi modal yang produktif atau aset, seperti tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan, sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, antara lain: partai politik, sindikat dan koperasi, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan dan barang-barang, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya.

Oleh karena itu, Andre Bayo Ala (1981: 5-8) menyimpulkan beberapa aspek kemiskinan. Pertama, kemiskinan menyangkut nilai-nilai (*values*), sesuatu yang dihargai tinggi oleh individu dan masyarakat. Kedua, kemiskinan itu multi-dimensional, memiliki berbagai aspek kondisi dalam orang dan keluarga miskin. Ketiga, aspek-aspek kemiskinan itu saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga membentuk lingkaran kemiskinan atau spiral kemiskinan (*the poverty spiral*) dalam istilah Lukas Hendratta. Keempat, di dalam kemiskinan terdapat aktor, yaitu orang-orang yang hanya sedikit atau tidak mampu mengakumulasi nilai-nilai utama, sehingga kebutuhannya

akan nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi secara layak. Aktor itu bisa secara individu, namun bisa secara kolektif, seperti keluarga atau komunitas lokal. Berkaitan dengan aktor, Niels Mulder (1986: 76) mendefinisikan sebagai mereka yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal, seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk bisa hidup dengan cukupan dan wajar. Mereka yang tidak sampai pada patokan itu dipandang sebagai orang miskin. Kelima, kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai utama secara layak, dan terakhir bahwa gap antara nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai tersebut, artinya besar-kecilnya gap tersebut menunjukkan parah tidaknya kemiskinan tersebut. Bila gap yang dicapai seseorang antara nilai-nilai yang harus dicapai dan pemenuhannya besar, maka semakin parah kemiskinan tersebut atau disebut kemiskinan absolut. Sementara itu, bila gap antara akumulasi nilai yang diperoleh dan pemenuhan kecil, maka orang tersebut berada dalam kemiskinan relatif.

Ravallion (1992: 4) secara lebih sederhana menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat dinyatakan oleh masyarakat ketika seseorang atau lebih tidak mencapai titik minimum dari kesejahteraan material yang layak menurut standard masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka muncul 3 (tiga) pertanyaan berkaitan dengan ukuran standar kelayakan kesejahteraan ini. Pertama, bagaimana cara kita menilai kesejahteraan atau hidup layak tersebut. Kedua, bila sudah diukur, bagaimana menentukan seseorang itu miskin atau sebaliknya berkecukupan. Terakhir, pertanyaan adalah bagaimana cara mengumpulkan indikator kesejahteraan individu ke dalam ukuran kemiskinan.

Ketiga pertanyaan tersebut memiliki implikasi lebih mendalam, khususnya berkaitan dengan ukuran kemiskinan (*poverty line*). Akibatnya, dari tahun ke tahun perdebatan ukuran kemiskinan selalu berlanjut, begitu pula dengan cara-cara pengukurannya.

Bagi pemerintah dan ahli studi pembangunan, akurasi ukuran dan caranya sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Jebakan pengukuran ini adalah bias ekonomi. Kemiskinan lebih disebabkan oleh kegagalan seseorang dan sekelompok orang (keluarga) dalam mencapai tingkat ekonomi tertentu.

Lebih tepat, bila mendefinisikan kemiskinan itu sebagai situasi di mana seseorang atau sekelompok orang (keluarga) berada dalam kondisi secara sosial, ekonomi dan budaya tidak menguntungkan. Mereka berada dalam hidup yang tidak layak dan tidak sejahtera (*welfare/well-being*).

Meskipun demikian, dalam buku panduan Bank Dunia tentang pengurangan kemiskinan, Jeni Klugman (2002: 2-3) menyebutkan bahwa kemiskinan bukan sekedar tingkat pendapatan yang rendah, tetapi lebih dari itu tingkat konsumsi dan pendapatan yang rendah ini berhubungan dengan distribusi modal manusia dan aset sosial dan fisik (*lack of opportunity*), seperti pemilikan tanah dan peluang pasar. Selain dari berkurang kesempatan, kemiskinan juga berarti kemampuan yang rendah (*low capabilities*), yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, dan tingkat keamanan yang rendah, yaitu rentan dan pendapatan yang mudah terganggu, serta terakhir, ketidakberdayaan (*empowerment*), kemampuan keluarga miskin dalam berpartisipasi, negosiasi dengan perubahan dan berhubungan institusi yang dapat berpengaruh pada kelayakan hidupnya.

Apa yang disebut oleh Jeni Klugman (2002) ini adalah dimensi atau indikator kemiskinan. Dimensi tersebut ternyata juga tidak berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh orang miskin. Dari penelitian Smeru (Mawardi, 2004: 1-5), menurut orang miskin, kemiskinannya disebabkan oleh ketidakberdayaan, keterkucilan, kekurangan materi, kelemahan fisik, kerentanan, dan sikap atau perilaku. Ketidakberdayaan itu meliputi faktor yang di luar kendali masyarakat miskin, antara lain: lapangan kerja, tingkat biaya/harga (baik barang konsumsi, sarana produksi, maupun harga jual

produksi), kebijakan pemerintah, sistem adat, lilitan hutang, keamanan, dan takdir/kodrat. Munculnya aspek takdir mungkin mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang mereka alami sudah sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya memunculkan sikap apatis. Bagi mereka, sepertinya sudah tidak ada peluang lagi untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan menganggap hanya mukjizat Tuhan yang mampu mengubah keadaan. Kekurangan Materi adalah kepemilikan atau tidak memiliki berbagai macam aset, seperti rumah, tanah, modal kerja, warisan, serta rendahnya penghasilan karena upah atau hasil panen rendah). Faktor berikutnya adalah keterkucilan yang berkaitan dengan hambatan fisik dan nonfisik dalam mengakses kesempatan meningkatkan kesejahteraan, antara lain mencakup aspek lokasi yang terpencil, buruknya prasarana transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tidak ada atau kurangnya akses terhadap kredit, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan air bersih. Faktor lain, kerentanan, dianggap penyebab dari kemiskinan karena mencerminkan ketidakstabilan atau guncangan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan. Di dalamnya mencakup aspek pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerjaan tidak tetap, masalah dalam produksi, bencana alam, dan musibah keluarga. Terakhir, sikap dan perilaku juga dianggap sebagai penyebab kemiskinan, yaitu kebiasaan buruk atau sikap yang cenderung menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan atau menghambat kemajuan, Sikap dan perilaku itu antara lain meliputi kurangnya upaya untuk bekerja, tidak bisa mengatur uang atau boros, masalah ketidakharmonisan keluarga, serta kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan.

Dimensi atau oleh orang miskin dianggap sebagai faktor penyebab ini sebenarnya telah menjadi perhatian dari Nasikun (1993: 4) dan Chambers (1980) dengan *integrated poverty*. Di dalam analisis sosiologis, kemiskinan dibedakan sebagai kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (*budaya kemiskinan*). Kemiskin-

an struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi obyektif yang berpengaruh pada kesejahteraan keluarga miskin, mulai dari kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak hingga ketidakmampuan dalam bernegosiasi untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang berpihak pada orang miskin sebagaimana disebutkan oleh Sritua Arief dan Adi Sasono (1984: 109), dan Chambers (1980). Sementara itu, kemiskinan juga dipandang sebagai cara hidup atau kebudayaan dari keluarga miskin yang disosialisasikan. Pola-pola sosialisasi yang berlandaskan pada kebudayaannya ini merupakan mekanisme adaptif atau *survival* berkaitan dengan kondisi-kondisi keluarga miskin yang marginal (Lewis, 1981: 15-30; Lewis, 1988; Gailbraith, 1983).

Menimbang Kemiskinan, Menentukan Kesejahteraan

Apapun definisi kemiskinan, bila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang di dalam masyarakat dianggap tidak beruntung, maka sebenarnya telah dapat menggolongkan mereka ke dalam kelompok miskin. Bagi kita, bagaimana membangun empati bersama, turut merasakan dan kemudian berbagi, sehingga mereka tidak lagi berkekurangan, tersisih dan terabaikan. Mungkin, hal ini mengingatkan kita pada tahun 1990-an pada waktu bencana kelaparan di Ethiopia, seorang koki restoran di Roma, Italia, dengan sederhana mengolah makanan sisa pelanggan, dan kemudian mengirimkan ke tempat beca. Atau, Ibu Teresa mengawali dengan merawat orang-orang tua terlantar dan sakit-sakitan di pinggir jalan kota India. Apa yang dikatakannya, *"Biarlah mereka merasakan kebahagiaan, meski hanya menjelang ajal menjemput!"*

Tidak usah terlalu jauh mencari orang-orang yang tidak sejahtera, bila pula ada di sekitar kita, mungkin bawahan kita dan seterusnya. Di dalam dunia yang kapitalistik, demi memperoleh keuntungan yang besar, sering kita menciptakan pekerjaan yang

tidak dibayar seimbang, sehingga menghasilkan kelompok miskin “baru.” Suatu misal, salah satu pasar swalayan terbesar di Surabaya, dengan alasan tertentu karyawan tidak boleh menikmati makanan siap saji yang dijualnya, meski pada waktu menjelang tutup. Manajer lebih memilih membuang ke tempat sampah, padahal masih layak dimakan. Untuk makan, karyawan menerima nasi kotak dengan harga yang tidak layak. Akibatnya, menjelang akhir tahun 2004 sejumlah karyawan masuk rumah sakit karena keracunan. Hal ini berbeda dengan kebijakan rumah makan rawon “Nguling” di Probolinggo, selain pegawainya juga menikmati, setiap malam puluhan nasi rawon dibungkus untuk keluarga miskin dan janda di lingkungan sekitarnya. Kata kuncinya hanya satu: *empati*. Meskipun empati sebagai kata kunci dalam mencermati kemiskinan, bagi pengambil kebijakan publik persoalan kemiskinan tidak saja pada definisi dan empati, tetapi pada dimensi dan ukurannya. Dimensi dan ukuran menjadi penting karena program pengurangan tingkat kemiskinan (*poverty reducing*) berkaitan dengan pendanaan.

Di Indonesia selama ini perkiraan-perkiraan tentang kemiskinan umumnya didasarkan atas pendekatan pendapatan kebutuhan dasar (*basic needs income* atau *BNI Approach*), dimana garis kemiskinan ditentukan dengan memperkirakan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi suatu paket kebutuhan dasar inti konsumsi perorangan (makanan, sandang, perumahan). Batas ambang garis kemiskinan setara nilai konsumsi pangan minimum, yaitu 2.100 kalori ditambah 6,12 % hingga 17,96 % nilai konsumsi non pangan. Jika perkiraan nilai konsumsi perkapita rata-rata penduduk Indonesia sebesar dua kali dari nilai konsumsi pangan pada akhir PJP II, maka batas ambang garis kemiskinan sepanjang 25 tahun mendatang dapat ditetapkan sebesar dua kali lipat dari nilai konsumsi pangan minimum (kira-kira setara dua kali Rp 15.000,00 menurut tingkat harga tahun 1990) (Nasikun, 1993: 1-2). Kelemahan dari pendekatan ini adalah tingkat minimum dasar

pendapatan tidak akan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Kelemahan lainnya, secara operasional, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dimana pendapatan tidak cukup. Pendapatan ditafsirkan sebagai kemampuan suatu rumah tangga atau perorangan untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa.

Untuk itu, Nasikun (1993: 2-3) mengajukan dua alternatif tolok ukur kemiskinan lain. *Pertama*, menawarkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan sebagai suatu fenomena multifaset atau multidimensional. *Kedua*, mengusulkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan pada tingkatnya yang relatif. Mendasarkan diri pada pemikiran Chambers yang melihat kemiskinan sebagai suatu *integrated concept*, Nasikun merumuskan konseptualisasi kemiskinan multidimensional yang terdiri atas lima dimensi: (1) kemiskinan “proper”; (2) kelemahan fisik; (3) kerentanan terhadap atau menghadapi berbagai bentuk situasi darurat; (4) ketidakberdayaan (*powerlessness*); dan (5) isolasi. Kemiskinan “proper” kurang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan aset yang kurang dan/atau akses yang rendah terhadap aliran lalu lintas uang dan barang, terutama pangan. Kelemahan fisik diartikan sebagai berat dan pertumbuhan badan yang tidak normal dan sensitif terhadap variasi musim atau konjungtur ekonomi. Kerentanan terhadap berbagai bentuk situasi darurat diartikan sebagai penjualan barang atau tenaga kerja, hubungan utang piutang atau gadai, dan tindakan lain yang terpaksa dilakukan untuk mengatasi berbagai situasi darurat. Ketidakberdayaan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau kelompok dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang menyangkut nasib dan peruntungannya sendiri dan hubungan-hubungan sosial dengan orang, keluarga atau kelompok lain. Isolasi diartikan sebagai posisi relatif seseorang, keluarga, atau kelompok dalam ruang spasial dan sosial yang dilembagakan oleh masyarakat tempat ia menjadi bagiannya.

Dimensi kemiskinan proper dapat diukur antara lain melalui butir-butir pertanyaan pengeluaran rata-rata sebulan dan rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan. Dari dimensi kelemahan fisik, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan tingkat morbiditas dalam kurun waktu sebulan sebelumnya: (1) apakah sebulan yang lalu ada keluhan kesehatan, karena panas, batuk, pilek, muntaber, sakit gigi, kejang-kejang, kecelakaan, dan lainnya; (2) kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari; (3) apakah sekarang masih sakit; (4) jenis pelayanan yang memberikan perawatan. Dari dimensi ketidakberdayaan, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) status penguasaan bangunan tempat tinggal; (2) status penguasaan tanah; (3) kondisi rumah atau bangunan tempat tinggal; (4) luas bangunan dan pekarangan; (5) jenis fondasi bangunan terluas; (6) jenis kerangka atap yang terbanyak. Dilihat dari dimensi isolasi antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) jarak terdekat dari dan ke tempat fasilitas-fasilitas kendaraan umum, kesehatan, pasar, atau kelompok perkotaan, bioskup, taman hiburan/ rekreasi, SD, SLTP, SLTA; (2) lama bersekolah (dalam jumlah tahun); (3) mendengarkan radio seminggu yang lalu, nonton TV seminggu yang lalu dan membaca koran/majalah seminggu yang lalu (Nasikun, 1993: 3).

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo.
 1981 Definisi Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
- Arief, Sritua., dan Adi Sasono.
 1984 **Ketergantungan dan Keterbelakangan**. Jakarta: Sinar Harapan.

- Dillon, HS., dan Hermanto
 1993 Kemiskinan di Negara Berkembang. Masalah Konseptual dan Global. **Prisma**. Tahun XII No. 3
- Galbraith, John Kenneth.
 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa**. Diterjemahkan oleh Tom Anwar. Jakarta: Sinar Harapan.
- Klugman, Jeni.
 2002a Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross Cutting Issues**. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Lewis, Oscar.
 1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
 1988 **Kisah Lima Keluarga. Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan**. Diterjemahkan oleh Rochmulyati Hamzah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulder, Niels.
 1986 **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasikun,
 Nasikun.
 1988 “Desa dalam Perspektif Pembangunan,” makalah disampaikan sebagai bahan ceramah pada Kursus Singkat Teori dan Konsep Studi Pedesaan yang diselenggarakan oleh Divisi Studi Pedesaan, PAU-Studi Sosial, UGM Yogyakarta, tanggal 12 – 31 Agustus.
 1993 “Redefinisi Kriteria Batas Ambang Kemiskinan Berwawasan Martabat Manusia,” **makalah** disampaikan pada Seminar Bulanan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), UGM, tanggal 7 Juni.
- Ravallion, Martin.
 1992 **Poverty Comparison. A Guide to Concepts and Methods**. LSMS Working Paper No. 88. Washington: World Bank.

Bagian 2

Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota

Bab 4

Surabaya: Geliat Calon Kota Metropolitan

Rek, ayo rek, mlaku-mlaku ning Tunjungan Rek, rek
ayo rek... Mlaku-mlaku ngumbah mata...

(lagu rakyat Surabaya)

Kota Lama dengan Wajah Kolonial

Sepuluh tahun yang lalu, sekitar tahun 1991, ketika salah seorang anggota tim peneliti (FX Sri Sadewo) mengunjungi ibukota Jakarta kedua kalinya. Jakarta adalah kota yang sangat berbeda dibandingkan pada tahun 1970-an, terdapat jalan utama yang membentang dengan lebar kurang lebih 100 meter panjangnya. Daerah-daerah periferinya sudah terhubung satu sama lain, seperti Kota Depok, Kab. Tangerang dan Bekasi. Keadaan ini terus berubah hingga tahun-tahun terakhir ini. Apa yang dibayangkan oleh peneliti tersebut, Jakarta seperti gurita raksasa dengan tentakel-tentakel yang menjulur ke Timur, Barat dan Selatan.

Ketika kemudian kembali ke kota Surabaya, peneliti kemudian bertanya apa yang salah dari catatan mata pelajaran Geografi dengan menyebut Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Mungkin lebih tepat sebagai kota terbesar ke lima atau ketujuh di Indonesia. Kota terbesar pertama adalah Jakarta, kedua Jakarta dan seterusnya hingga kelima adalah Surabaya.

Meskipun demikian, Surabaya telah berusaha tumbuh sebagai kota terbesar kedua. Dari sisi usia, kota ini sebenarnya

jauh lebih tua dari Jakarta. Kota ini tercatat dalam sejarah pada tanggal 31 Mei 1293 M sebagai hari lahirnya, sedangkan Jakarta pada berdiri pada abad ke-16. Sebagaimana lazimnya pertumbuhan kota-kota pesisir, Surabaya awalnya adalah sebuah desa nelayan, kemudian berkembang sebagai pelabuhan dalam rangkaian jalur sutera (*silk road*). Namun demikian, seperti halnya Jakarta, kota ini tidak pernah sekalipun menjadi pusat kerajaan-kerajaan besar pada masa lampau. Nampaknya, raja-raja Jawa lebih memilih mendirikan ibukota pusat pemerintahan di wilayah pedalaman, daripada pesisir. Salah satu di antaranya, kecuali Sriwijaya, kerajaan-kerajaan tersebut dibangun melalui basis pertanian sebagai struktur ekonominya. Kota-kota tersebut lebih sebagai syahbandar yang harus menyetor pajak ke ibukota yang berada di pedalaman.



Gambar 4.1.
Totem Surabaya Modern,
Penghubung dengan Roh dari Masa Lalu

Kota Surabaya, menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (2004) yang disampaikan di Sarasehan “*Surabaya dan Tantangan Masa Depan*,”² bahwa kota Surabaya, sebagai kota pesisir lainnya, lebih tepat dibangun oleh pemerintah kolonial (Belanda). Memang benar, sesudah kerajaan Majapahit runtuh, kota ini sebagai kadipaten (kerajaan lokal) taklukan di bawah kerajaan Mataraman. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, kota ini diserahkan kepada VOC dan pemerintah kolonial. Surabaya sebagai Kota Eropa, yang semula hanya merupakan pos pangkalan bertembok tanggul tanah *temu gelang*, terletak di kawasan berawa-rawa di sebelah utara daerah pemukiman orang-orang Jawa, sepanjang abad 19 berhasil dibangun meluas menjadi suatu terminal tempat penumpukan hasil bumi untuk diekspor dan dijual ke Eropa.



Gambar 4.2.
Bambu Runcing: Simbol Perlawanan Kaum Urban

² Sarasehan ‘Surabaya dan Tantangan Masa Depan.’ Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Tabel 4.1
Perkembangan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk kota Surabaya
(Handinoto, 1996, Pemda KMS, 1978, BPS, 1997 dan 2002).

Abad/Tahun	Luas Wilayah (dalam ha)	Jumlah Penduduk
2005 (Perkiraan)	32.636	2.750.000
2000	32.636	2.444.976
1995	32.636	2.329.598
1990	32.600	2.100.000
1980	---	2.027.913
1971	---	1.953.248
1920	---	200.000
1905	4.275	150.188
Awal abad ke-18	---	50.000 s/d 60.000
1625 (Penaklukan oleh Mataram)	---	1.000

Perkembangan kota Surabaya menjadi pesat tatkala liberalisasi ekonomi. Ekonomi eksploitatif dengan investasi modal Eropa telah berhasil memanfaatkan kesuburan *binterland* Jawa Timur. Surabaya kemudian lebih menempatkan sebagai kota pemberi layanan jasa ekonomi daripada sebagai pusat pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsinya, Surabaya menjadi organisasi kerja yang membangun berbagai institusi ekonomi dan mekanisme kontrol untuk mengendalikan ekonomi agribisnis di daerah Jawa Timur. Institusi bisnis kapitalistik ditandai dengan bangunan yang berfungsi sebagai kantor-kantor dagang dan kantor-kantor layanan jasa hukum, serta jasa keuangan, kantor-kantor administrasi

pemerintahan, dan gudang-gudang. Jalan-jalan penghubung diperkeras, saluran-saluran penatusan dibangun, rel-rel berikut stasiun terminalnya diciptakan, dan ujung muara sungai Brantas pun diperdalam dan diluruskan untuk kemudian diberi nama baru yang mengingatkan sebuah sungai besar di Negeri Belanda Selatan, *Maas River*. Di kiri-kanan sungai, dibangun kade-kade tempat kapal dan perahu bertambat, sedangkan di kiri-kanan muara dibangun pelabuhan untuk tempat kapal-kapal besar merapat guna membongkar dan mengangkat muatan (Wignjosoebroto, 2004: 2).

Sarat Fungsi, Sarat Beban:

Kota Industri, Maritim, Perdagangan, Pendidikan dan Apalagi?

Dengan demikian, wilayah utaranya, atau dikenal sebagai kota lama, selain sebagai pusat pemerintahan *Oost Java Proviciën*, tumbuh sebagai pusat perdagangan. Suatu bentuk yang lazim, bahwa pertumbuhan dari perdagangan mengikuti keberadaan pusat pemerintahan. Kedekatan geografis akan mempengaruhi kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Pertumbuhan industri bergeser ke wilayah selatan, mengikuti alur sungai Kalimas, yaitu Ngagel-Wonokromo dan Kebraon-Karangpilang (Jalan Mastrip sekarang). Hal ini merupakan konsekuensi dari industri yang memerlukan air sebagai pendingin mesin-uapnya. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pemukimannya, mengikuti catatan dari Hans-Dieter Evers (1985), dari atas dasar etnik menjadi mata pencaharian. Kampung-kampung etnik luruh (meski tidak semuanya) menjadi perumahan dan kampung-kampung atas dasar mata pencaharian, seperti: Tjantian (tukang arloji), Kawatan (tukang cor tembaga), dan Bubutan (tukang bubut) (Handinoto, 1996: 72; kutip dari Faber, 1931: 185).



Gambar 4.3.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-1

Melalui mekanisme urbanisasi, kota ini kemudian tumbuh dengan relatif pesat. Kota ini meluas dari hampir sepuluh kali lipat dalam waktu seratus tahun, dari hanya semula 4.275 ha menjadi 32.636 ha. Kota semula berpusat di wilayah kota lama, yaitu Kebonrojo, Pasar Besar, kantor Walikota Surabaya sekarang hingga ke Waru (perbatasan Sidoarjo), Karangpilang dan Sepanjang, sementara itu terjadi pemindahan terminal bis dari Jembatan Merah ke Osowilangun (dekat perbatasan Kab. Gresik) pada pertengahan tahun 1990-an. Tabel 1 hanya mencatat jumlah penduduk tetap, perkiraan jumlah penduduk musiman bisa menjadi separuhnya. Dari perkiraan tersebut, Kota ini praktis dihuni hampir 4 juta jiwa untuk tahun 2005.



Gambar 4.4.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-2

Kota ini juga menjadi kota multi-etnik. Orang-orang Madura menggunakan kota Surabaya sebagai alur memasuki wilayah Jawa Timur bagian Selatan dan Barat. Sebagian bekerja sebagai buruh industri dan berdagang, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh perkebunan yang berada di wilayah Mojokerto, Jombang hingga karesidenan Madiun. Sementara itu, orang-orang Jawa Pesisiran dan Mataraman memasuki kantor-kantor pemerintahan menjadi *ambtenar*, pegawai *pangreh praja*, atau sebagai pegawai kantor-kantor dagang dan layanan hukum. Meski tidak begitu besar jumlahnya, kelompok-kelompok etnik lain dari kawasan Indonesia Timur memasuki kota Surabaya, mulai dari pedagang antar pulau hingga menjadi *ambtenar* dan tentara kolonial. Batas-batas kampung etnik pun menjadi meluruh tatkala aturan *wijken* dan *passesn stelsel* (sistem pas dan pemukiman)

dicabut pada tahun 1920-an, terutama bagi kelompok etnik *Timur Asing*.

Untuk memperkuat institusi-institusinya, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sistem pendidikan formal. Sekolah dasar pertama kali didirikan oleh CC Werner tahun 1818 untuk anak orang Belanda di Surabaya, muridnya hanya 35 orang. Sekolah tutup seiring dengan kematian CC Werner, baru tahun 1821 pemerintah kolonial mendirikan sekolah dasar negeri (*Government Europeesche Lagere School*). Untuk orang-orang pribumi, sekolah dasar swasta didirikan oleh *Maatschappij Tot Nut van Het Algemeen*, dengan nama *Javaansche School* tahun 1853, sedangkan sekolah negeri tahun 1860. Atas instruksi Residen Surabaya, tahun 1864 sekolah tersebut didirikan di beberapa distrik dengan nama *Districtschool*, meski tidak berlangsung lama karena biaya. Beberapa tahun kemudian, pemerintah mendirikan *Holandsche Indische School* (HIS) untuk anak-anak pribumi yang mampu dan Sekolah *Ongko Loro* untuk anak pribumi yang kurang mampu (Handinoto, 1996: 59-60).

Tanggal 2 Mei 1853 sebuah sekolah teknik swasta (*ambachtschool*) didirikan, dan pihak pemerintah baru mendirikan *government ambachtschool* pada tahun 1862. Sekolah setingkat sekolah menengah atas, yaitu HBS (*Hoogere Burger School*) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian diubah 5 tahun didirikan pada tahun 1875 di Jl. Baliwerti (bekas gedung FT Kimia ITS), kemudian dipindah di *Regenstraat* (sekarang Jl. Kebonrojo, Kantor Pos Besar Surabaya) pada tahun 1881 dan pada tahun 1923 di pindah ke *HBS Straat* (Jl. Wijayakusuma, sekarang SMA Negeri II, Surabaya). Sekolah kejuruan lain, seperti dokter hewan, berdiri dengan nama *School Ter Onleiding van de Veeartsenijkunst* tahun 1860-an

Perkembangan fasilitas pendidikan formal di Surabaya ini berlanjut hingga masa kemerdekaan. Sementara itu, masyarakat pribumi sebenarnya telah mengembangkan sistem pendidikan,

yaitu pesantren. Model pendidikan ini sebenarnya berakar dari sistem pendidikan *mandala* pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Para santri meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama kiyai dalam pondok pesantren. Mereka bekerja dan belajar, pagi hari melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh gurunya, sesudahnya belajar mengaji dan mendengar ajaran moral gurunya, yaitu Kiyai. Pada waktu mengaji, santri ini dibimbing oleh para seniornya, yaitu santri yang lebih dahulu masuk. Oleh karenanya, kata santren dalam pesantren tersebut berarti *nyantri*, menimba ilmu sambil bekerja di lingkungan gurunya. Dari catatan von Faber (1931), sebagaimana dikutip Handinoto (1996: 60), jumlah pesantren mencapai 162 buah, salah satu di antaranya pondok pesantren yang cukup dikenal adalah di Sidosermo-Wonokromo.

Tabel 4.2.
Perkembangan Perguruan Tinggi di Surabaya Tahun 2004
(BPS Jawa Timur, 2005)

Jenis	Surabaya	Jawa Timur
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	4	9
a. Mahasiswa	57.228	112.694
b. Dosen	3.507	6.455
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	70	249
a. Universitas	24	69
b. Institut	3	13
c. Sekolah Tinggi	29	119
d. Akademi	11	42
e. Politeknik	3	6

Perguruan tinggi negeri yang tertua di Surabaya adalah Universitas Airlangga yang berdiri dari perpaduan pendidikan

dokter dari masa kolonial Belanda dan Sekolah Tinggi Hukum, baru kemudian sesudahnya tahun 1960-an berdiri Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (dulu IKIP Surabaya yang merupakan perkembangan dari Fakultas Pendidikan Universitas Airlangga dan IKIP Malang), dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), sedangkan salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup tua di Surabaya, seperti Universitas Surabaya (*Ubhaya*), berdiri pada 1960-an. Universitas ini mulanya merupakan perkembangan dari Universitas Trisakti. Pada pertengahan tahun 1990-an, universitas ini mendirikan kampus baru di Trenggilis Mejoyo. Jumlah mahasiswa telah menyamai perguruan tinggi negeri, di atas 10 ribu mahasiswa. Ada sekitar 10 gedung dengan rata-rata 3-4 lantai.

Tidak saja Universitas Surabaya, Universitas Kristen Petra (Petra), Universitas Katolik Widyamandala (WM) dan Universitas 17 Agustus (Untag) juga memiliki jumlah yang kurang lebih sama, hampir 10 ribu mahasiswa. Untuk memenuhi fasilitas pendidikannya, Petra dan Untag misalnya mendirikan kampus bertingkat 8 (delapan). Selain beberapa universitas ini, di Surabaya juga sekitar 10 universitas memiliki mahasiswa antara 5 ribu dan 10 ribu, seperti UPN (Universitas Pembangunan Nasional Veteran), Unitomo (Universitas Dr. Soetomo), dan ITATS (Institut Teknologi Adhitama Surabaya). Sebelum 2 (dua) tahun yang lalu, jumlah mahasiswa Unitomo dan ITATS mencapai di atas 10 ribu. Konflik internal, yaitu antara yayasan dan rektorat, di kedua perguruan tinggi yang diberitakan ke media massa menjadi “promosi” yang buruk bagi penampilan perguruan tinggi (*performance*).

Pasca reformasi, dengan alih-alih sebagai langkah persiapan menuju BHMN (Badan Hukum Milik Negara), sejumlah perguruan tinggi negeri, kecuali IAIN, menyelenggarakan program ekstension (non-reguler). Ada berbagai istilah untuk program tersebut, antara lain: program khusus, pmdk nonreguler, dan

PMDK. Melalui program ini, perguruan tinggi menerima mahasiswa di luar SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang diselenggarakan di bawah pengawasan Dikti. Mahasiswa yang diterima dikenakan SPP dan uang IKOMA/SOM yang besar, bergantung pada fakultasnya. Uang SPP biasanya sebesar kurang lebih dua kali lipat dari kelas reguler. Asumsinya, mereka mahasiswa yang tidak diberi subsidi oleh negara (pemerintah). Oleh karenanya, mereka harus menanggung sendiri biaya operasional pendidikannya selama studi. Jumlah SPP ini sering jauh lebih besar daripada di perguruan tinggi swasta, bisa mencapai di atas dua juta, seperti pada program-program studi yang memerlukan laboratorium. Di Fakultas Farmasi Unair, seorang mahasiswa non-reguler harus membayar 4 juta rupiah/semester.

Dari tahun ke tahun, terutama paska tahun 1997-1998, yaitu krisis ekonomi, telah terjadi penurunan jumlah peminat sebagai mahasiswa baik di PTN maupun PTS di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya. Untuk peserta SPMB menurun dari tahun ke tahun sebanyak lebih dari 100.000 pendaftar. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang diterima pun juga berkurang. Ada beberapa penyebab penurunan peminat ini, antara lain: jumlah lulusan SMA juga berkurang akibat keberhasilan KB pada tahun 1970-1980-an. Alasan berikutnya, lulusan SMA kini jauh lebih realistis, "*Buat apa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, kalau nantinya hanya menjadi pengangguran.*"³ Mereka memilih untuk mengambil kursus keterampilan atau langsung mencari pekerjaan.

Lebih lanjut, tidak semua lulusan SMA sederajat melanjutkan perguruan tinggi, sebagai mahasiswa program gelar sarjana atau ahli madya (D3). Memang, tidak ada catatan resmi dari Pemkot tentang rasio jumlah lulusan yang melanjutkan dan keseluruhan. Namun, diperkirakan untuk kota Surabaya hanya

³ Hasil wawancara dengan lulusan SMA yang tidak mendaftar SPMB dan melanjutkan ke perguruan tinggi, DA, tanggal 12 September 2005.

separoh saja lulusan mahasiswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah memilih untuk bekerja atau melanjutkan kursus kerja satu tahun hingga dua tahun. Oleh karenanya, jumlah kursus di Surabaya cukup banyak, hampir separuh dari jumlah perguruan tinggi. Kursus atau program keahlian yang ada di Surabaya adalah program keahlian perhotelan/pariwisata, program keahlian komputer, dan program keahlian teknik. Sementara itu, perguruan tinggi juga menyelenggarakan pula, seperti ITS dengan PIKTI, Unair dengan berbagai program keahlian, dan UNESA dengan P2KB, P3B dan P3KT.

Kondisi Obyektif Masyarakat Miskin Kota

Sementara itu, di “pinggiran” lingkaran kota terdapat orang yang tidak bisa menikmati fasilitas yang ditawarkan kota. Pendidikan tinggi adalah “barang mewah” yang menjadi impian dan harus ber-*jibaku* untuk masuk dan menyentuh tembok-tembok kampus. Bagi mereka, hidup “sehat” dan dapat mencari makan adalah anugerah. Mereka adalah kelompok masyarakat rentan kota, atau dalam istilah Sosiologi (Kemiskinan) lebih dikenal sebagai masyarakat marjinal (*marginal community*) ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai dalam kehidupan perkotaan.

Di Surabaya, ada dua kelompok, yaitu: penduduk asli atau dikenal dengan orang *kampung* yang tidak memiliki akses karena kondisi obyektifnya, seperti: tingkat pendidikan dan modal. Kelompok kedua adalah kaum urban yang memiliki akses terbatas di Surabaya, kemudian sering ditemui memilih tinggal bersama di lingkungan *kampung* tersebut karena dengan alasan mendekati tempat kerja.

Bila oleh BPS dan BKKBN, mereka, kedua kelompok itu, digolongkan sebagai kelompok miskin kota. Jumlahnya di

Surabaya, menurut tafsiran BPS dan BKKBN, kurang lebih 327.572 jiwa, atau seperdelapan dari jumlah penduduk Surabaya (BPS Surabaya, 2003). Jumlah ini menjadi besar tatkala harus memasukkan keluarga urban yang sering tidak aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Data Suryahadi, et.al (2003: 78) menunjukkan bahwa dengan jumlah rumah tangga di Surabaya sebanyak 707.167 jiwa, maka setidaknya-dikatakan miskin bila setidaknya pendapatan sebesar 202.512,56 sebulan dengan *standard error* 6.701,98.

Bila faktor penyebabnya adalah pekerjaan, maka jumlah orang miskin yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran) berdasarkan sensus tahun 2000 di Surabaya 82.691 orang atau 7,23% dari angkatan kerja. Hanya bila mengandalkan data pekerjaan, maka besarnya angka pengangguran ini belum cukup. Data statistik kependudukan tidak pernah menghimpun seberapa banyak orang yang bekerja pada pelapisan terendah dari suatu usaha, perkantoran, seperti buruh, karyawan swasta atau pegawai negeri golongan rendah (I dan II), atau kelompok sektor informal yang memiliki modal terbatas (kecil), atau hanya mengandalkan tenaga saja. Data terakhir dari BPS, berkaitan pemberian dana kompensasi BBM, jumlah keluarga miskin di Surabaya diperkirakan 106.000 keluarga (**Kompas**, 29 September 2005, “106.000 KKB untuk Warga Surabaya”).

BPS sebenarnya telah memberikan kriteria ukuran kelompok miskin yang merupakan kelompok rentan ini. Pertama, dari pola konsumsi energi di bawah 2100 kkal per kapita sehari. Kedua, menggunakan indikator kesehatan, mulai dari persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, persentase penduduk tanpa akses pada pelayanan kesehatan dasar dan angka kematian bayi. Ketiga, indikator pendidikan dasar, yaitu: persentase penduduk usia 7-15 tahun tidak sekolah dan persentase penduduk dewasa yang buta huruf. Keempat, indikator ketenagakerjaan, yaitu: persentase penduduk penganggur terbuka, setengah

penganggur dan pekerja sektor informal. Kelima, indikator perumahan, yaitu persentase rumah tangga tanpa akses pada listrik, rumah tangga dengan lantai tanah, dan persentase rumah dengan luas tanah kurang dari 10 m². Terakhir, indikator air dan sanitasi, yaitu: persentase penduduk tanpa akses air bersih dan persentase penduduk tanpa jamban sendiri (BPS, 2004: 1; bandingkan juga dengan Klugman, 2002: 2-24; Coundouel, Hetschel dan Wodon, 2002: 29-46). Di lapangan, ukuran-ukuran demikian sulit dilakukan, antara lain: tidak ada lagi rumah berlantai tanah – hasil dari program lantanisasi pada tahun 1990-an), demikian pula rumah tanpa listrik karena program listrik masuk desa/kampung.



Gambar 4.5.

The Lost Generation, Buah dari Pembangunan?

Dari tempat tinggal, kelompok masyarakat rentan kota ini biasanya tinggal di pemukiman yang kumuh (*kampung*). Catatan Siswono Judohusodo (1991: 2), jumlah orang Surabaya yang tinggal di kampung sekitar 25% dari jumlah penduduk. Jumlah kampung tersebut lebih dari 100 (seratus) jumlahnya, mulai dari wilayah Surabaya Utara sebagai kota lama. Di kota lama, kampung-kampung itu sering bercirikan sebagai kampung etnis, seperti kampung Arab dan *Pecinan*, seperti daerah Ampel untuk kampung Arab dan Kembang Jepun dan Karet sekitarnya untuk *Pecinan*. Orang-orang Madura tinggal mulai dari Perak (Pelabuhan) hingga Semampir, bahkan ada beberapa kampung, seperti Wonosari Lor, sebagian besar penghuninya beretnis Madura. Asal mereka, orang-orang Madura di Surabaya, adalah daerah Bangkalan dan Sampang. Suatu pola yang lazim mengikuti arah transportasi terdekat (Jonge, 1989; Kuntowijoyo, 1988). Wilayah perkampungan orang-orang yang memanjang di sepanjang pinggir Surabaya Utara ini hingga memasuki wilayah Surabaya Selatan (sekitar Pasar Wonokromo dan Keputran) ini seperti setengah lingkaran. Sementara itu, dari arah pelabuhan, orang Madura mendiami wilayah Pasar Loak Dupak hingga ke Benowo (wilayah Surabaya Barat).

Kampung orang Surabaya asli berada di sekitar tengah kota, seperti mulai dari Kepatihan dan Oro-oro Ombo (dulu tempat pusat pemerintahan Kadipaten Surabaya dan berlanjut hingga masa kolonial Belanda), wilayah Kebalen, Surabayan, Wonorejo hingga Kupang dan Kembang Kuning terus ke arah Selatan, yaitu Ketintang dan Pakis. Kampung-kampung ini berada di sepanjang jalan utama dan di antara gedung. Wilayah yang strategis ini, yaitu sebagai kawasan pusat pemerintahan dan perdagangan, sebenarnya tidak saja dihuni oleh orang-orang Surabaya asli, tetapi juga oleh orang-orang urban. Di daerah Kaliasin misalnya, sebagian pemilik menyewakan kamar (kost) dengan harga dari 200 ribu hingga 500 ribu rupiah, tergantung keadaan

kamarnya. Orang-orang urban (terutama berstatus *single*) memilih kost di tempat tersebut. “*Selain dekat tempat kerja, enak untuk malam minggu. Mau jalan-jalan ke Tunjungan tidak jauh.*”⁴

Tabel 4.3.
Jumlah Orang dan Keluarga Miskin (Rentan) di Surabaya, berikut fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
(BPS, 2003)

No.	Rincian	Jumlah
1.	Kecamatan	28
2.	Penduduk	2.532.417
3.	Keluarga	707.167
4.	Orang Miskin (BPS)	327.572
5.	Keluarga Miskin	91.880
6.	Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskemas Pembantu	48
	b. Dokter	141
	c. Paramedik	824
7.	Pendidikan	
	a. Sekolah (SD dan SMP)	2.743
	b. Guru	31.193
	c. Kelas	16.522
	d. Murid	553.250

Kampung-kampung tersebut, baik tempat tinggal orang Surabayan, Madura, Arab dan Cina ini setiap tahunnya selalu

⁴ Hasil wawancara dengan A yang bekerja di Tunjungan Plaza Sabtu, 4 Juni 2005, pk. 19.00 WIB.

menjadi daerah epidemi demam berdarah (DB), selain ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) dan diare/muntaber. Rumah-rumah kampung tersebut sangat rapat satu sama lain menyulitkan melakukan kontrol terhadap genangan air (bersih). Saluran air (got) pun sering *mampet*, buntu. Sementara itu, keberadaannya di tengah kota dengan arus kendaraan yang padat, angka pencemaran udara menjadi sangat tinggi – hal ini bisa dilihat dari papan penanda tingkat pencemaran di Surabaya, mulai dari Jalan A. Yani, Kertajaya hingga Bubutan. Angka pencemaran rendah pada pagi hari ketika jalan masih sepi. Kecuali Jalan *Ondomoben*, Diponegoro dan Darmo, pohon-pohon yang membantu mengurangi pencemaran udara sangat sedikit tumbuh di pinggir jalan.⁵ Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada korelasi positif antara kondisi perkampungan yang kumuh di Surabaya dan angka penyakit.

Untuk mengatasi kondisi perkampungan, khususnya sanitasi, pemerintah telah melakukan perbaikan perkampungan, dengan memperbaiki saluran air hingga jalan. Program tersebut dikenal dengan program KIP (*Kampoeng Improvement Programme*). Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara perbaikan kampung dan penurunan angka kesakitan.

Data lain yang menarik untuk Surabaya adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan. Setiap kecamatan memiliki lebih dari satu fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibangun oleh pemerintah, belum lagi dengan klinik praktek dokter bersama dan rumah sakit swasta. Jumlah dokternya adalah 141 orang. Namun demikian, data ini berasal dari *Surabaya dalam Angka* yang mendasari pada data di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dikelola

⁵ Kebijakan tata ruang kota Surabaya untuk 2010 direncanakan akan menyediakan 20% ruang terbuka hijau.

pemerintah, sehingga rasio dokter dalam 100.000 penduduk adalah 7 (jauh dari 40, sesuai Indikator Indonesia Sehat 2010, Depkes, 2003). Bila dianalisis dengan membandingkan jumlah orang miskin dan keluarga miskin, maka ada korelasi positif. Artinya, fasilitas tersebut didirikan sesuai dengan jumlah orang/keluarga miskin. Demikian pula fasilitas kesehatan, sekolah, guru dan kelas dalam analisis ternyata berkorelasi dengan jumlah orang miskin. Persoalannya terletak pada kemampuan akses dari kelompok miskin tersebut.

Bab 5

Buruh Bangunan

Sektor Informal tidak hanya sebagai “*Safety Valve*” bagi Orang Miskin “Baru” di Surabaya tahun 1990-an

FX Sri Sadewo

Pembangunan “Bias Kota” Menuai Migran

Kota-kota besar di negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, mengalami proses pertumbuhan yang lain dibandingkan dengan negara industri. Kota-kota tersebut pada mulanya memiliki fungsi pemerintahan dan ekonomi pada jaman kolonial. Industrialisasi yang tumbuh di kota itu mulanya hanya sebatas melengkapi fungsi ekonomis, melayani kepentingan kolonial, seperti: pelabuhan ekspor.

Sesudah Perang Dunia ke-2, kota-kota tersebut menjadi ibukota pemerintahan negara baru. Proses konsolidasi dari negara-negara baru mengakibatkan kota tadi berkembang dengan cepat. Proses perkembangan ini dikenal sebagai *urbanisasi tanpa industrialisasi*. Jika di negara industri, proses urbanisasi didorong oleh usaha efisiensi dari bidang pertanian pedesaan, misalnya melalui mekanisasi yang menghacurkan petani gurem kemudian ditarik ke sektor industri di kota besar, maka hal itu tidak terjadi di negara-negara sedang berkembang (Magenda, 1983: 7-9).

Karena mengambil model pembangunan dari negara industri, negara baru kemudian melakukan industrialisasi. Industri mulanya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pasar, melayani

kelompok elite perkotaan, seperti birokrat pemerintahan, kaum usahawan, dan karyawan. Akibatnya, industri cenderung memusat di kota besar yang menentukan urat nadi mereka. Lebih dari itu, industri-industri baru ini tidak meningkatkan produk industri kecil pribumi, tetapi lebih sering menggantikan. Pengabaian terhadap industri kecil dari pertanian pada gilirannya mengakibatkan sejumlah rakyat berpindah dari desa ke kota. Kota-kota besar di dunia ketiga bertambah penduduknya hingga delapan kali dari ukuran semula, bila dibandingkan antara 1920-an dan sekarang. Separuh dari pertumbuhan ini berasal dari penambahan alamiah penduduk kota, dan sisanya dari perpindahan penduduk (Owens dan Shaw, 1983: 40-42). Demikian pula dengan kota-kota Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta.

Pertumbuhan kota yang “*urban bias*” itu ternyata tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Menjadi semakin berat, ketika harus diikuti perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan. Penggunaan teknologi pertanian yang berakibat pada polarisasi kepemilikan tanah dan marginalisasi petani kecil dan buruh tani, serta pada gilirannya perembesan industri kecil dan besar ke wilayah pedesaan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi ke arah non-pertanian di pedesaan. Atau, untuk menyelamatkan keluarganya, mereka memilih bekerja di kota. Dalam catatan Steele (1984: 379), ada kecenderungan kaum migran kemudian memilih sektor yang tidak memerlukan keterampilan, seperti buruh bangunan, kuli angkut, atau tukang becak. Mereka yang memilih pekerjaan sebagai buruh bangunan mempunyai alasan, yaitu upah yang ditawarkan relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, selain mudah dimasuki (Effendi, 1985: 51-52).

Hal yang serupa terjadi di Surabaya. Dengan mengambil 75 responden dan 7 informan, penelitian ini mencermati secara mendalam mulai dari proses perpindahan dari desa, hingga bekerja sebagai buruh bangunan. Bila mengikuti pendapat Irwan

Abdullah (1984) bahwa proses migrasi merupakan proses perubahan pola pikir, dan begitu pula dengan ancaman antropologi kognitif, setiap kemampuan diperoleh sebagai anggota masyarakat yang “unik,” maka perubahan untuk menjadi buruh bangunan di Surabaya merupakan perjuangan tidak saja secara fisik, tetapi juga kesiapan untuk berubah.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung tahun 1988-1989.⁶ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang diterapkan adalah *life history* dan analisis etnografi, sementara itu pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penggunaan tabulasi frekuensi dan silang.

Responden diambil secara availability, yaitu tidak saja *accidental*, tetapi juga memperhitungkan kesediaan untuk diwawancara. Hal itu dilakukan karena pertama, buruh bangunan bersifat sporadis dan terus bergerak (mobil), sehingga tidak bisa diketahui besaran jumlah dan alamat yang tepat. Mereka lebih sering tinggal sementara di bangunan yang dikerjakan. Kedua, buruh bangunan yang berasal dari desa sering lebih tertutup pada orang di luar lingkungan kerjanya. Mereka lebih terikat dan bersosialisasi dengan teman-teman sekerja. Teman-teman sekerjanya tidak jarang berasal dari satu daerah asal.

Profil Buruh Bangunan dan Keluarganya

Ali Effendi, Mandor Borongan yang Sukses, tapi Malang.

Ia adalah seorang mandor yang agak pendiam, tidak banyak cakap. Tampangnya bersih dengan kumis tipis, meski kulitnya agak hitam. Perawakannya kurus. Setiap orang akan

⁶ Studi kasus ini diolah dari hasil penelitian skripsi FX Sri Sadewo di Program Studi Antropologi, FISIP-Unair, tahun 1989.

menyangka dia berpendidikan sekolah menengah kejuruan, padahal tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar, hanya kelas empat. Seorang majikannya pernah heran dan mengira ia lulusan STM ketika melihat hasil gambarnya. Orang itu, setelah tahu latar belakangnya, mendesaknya untuk melanjutkan sekolah. Dia mau membiaya. Hal itu terjadi pada tahun 1980-an.

Pada waktu penelitian, Ali Effendi berumur 28 tahun, tapi wajahnya lebih tua daripada usia sebenarnya. Dia lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Kabupaten Gresik. Dia mengakui, sejak kecil dia nakal. Dia menyesalkan masa lalunya, terlebih ketika ia tidak menamatkan sekolah.

“...Dari segi biaya, keluarga kami berkecukupan. Ada paman dari kota yang mau membantu saya. Adik saya sendiri sudah tamat STM. Tapi, saya tidak tamat. Saya sebenarnya cukup pintar, gampang mudeng (memahami, pen). Sekarang saya sudah tua. Itu sebabnya saya menolak tawaran untuk sekolah lagi. Pengalaman itu lebih penting. Buktinya, adik saya yang STM itu masih menganggur...”

Pada usia 15 tahun, Ali Effendi minggat dari rumah, dari desanya. Pertama kali di Surabaya, ia bekerja sebagai kernet truk perusahaan. Setahun kemudian, ia bekerja sebagai tukang las di galangan. Tidak lebih dari satu, ia kemudian menjadi kuli pada seorang mandor. Ia dibimbing langsung oleh seorang tukang batu dan mandor. Selama 2 tahun lebih ikut mandor itu, ia diangkat sebagai tukang dengan bayaran yang hanya untuk makan dan minum. *“Yang penting menjadi tukang, tidak kuli lagi.”* Selama menjadi tukang batu itu, ia juga belajar menjadi tukang kayu, tukang besi dan membaca gambar.

Ketika mandornya berpisah dengan pelaksana, maka Ali Effendi pun juga berpisah dengan mandornya. Di tempat kerja

yang baru, dengan pelaksana Elizabeth, ia melamar sebagai mandor borong. Ia diterima karena bisa membaca gambar.

Sejak itu, ia tidak hanya mengerjakan satu rumah saja. Pernah, ia mendapat proyek membangun rumah di kompleks BTN, tapi bersamaan juga di Manyar.

“..Kalau membangun rumah di BTN atau Perumnas, untungnya sedikit, bahkan untuk mengurangi biaya harus kerja sebagai tukang. Untungnya, saya juga mengerjakan di Manyar. Jadi, transpor dan kebutuhan keluarga dari Manyar, sedangkan hasil dari Perumnas cukup bayar tukang dan kulinya. Untungnya mepet sekali daripada rumah luks...”

Baginya, yang penting bagi mandor borong adalah bisa menyelesaikan. Pantangan bila meninggalkan pekerjaan. Ia akan dicap tidak bertanggung jawab. *“Jangan harap bisa dipercaya orang, kalau melarikan diri. Sekali tidak dipercaya, tidak ada lagi pekerjaan.”*

Dalam mencari tukang dan kuli, Ali Effendi berani membayar lebih mahal bila mereka rajin dan hasil pekerjaannya baik.

“Jam tujuh pagi, tukang dan kuli saya sudah bekerja. Dan, nglaut nanti pukul empat hingga lima sore. Tergantung selesainya pekerjaan. Untuk menggerakkan orang, saya menunjuk salah satu tukang sebagai kepala tukang, setengah mandor. Upahnya lebih besar.”

Ali Effendi juta tidak bersusah payah membentak atau marah bila ada pekerjaan yang kurang beres. Menurutny, itu hanya menghabiskan tenaga dan waktu, sekaligus mengurangi kewibawaan. *“Cukup panggil kepala tungkang atau tukang yang ngerjakan, ditanya apakah benar-benar berniat bekerja atau tidak. Habis perkara.”*

Menurut pengakuannya, pada saat ini banyak saingan, dan persaingannya tidak sehat. Menurunkan harga borongan itu sudah wajar. Belum lagi, ada pesaing yang *ngatok* (cari muka) dengan

cara menjelekjelekkan atau menghambat hubungannya dengan pelaksana, agar diberi pekerjaan terus. Kemampuan mereka sering di bawahnya. Hal itu terjadi karena dalam pekerjaan bangunan borongan hubungan antara mandor dan pelaksana sangat penting. Mandor harus mengikuti selera pelaksana. Kalau tidak sesuai, pelaksana tidak mau membayar. *“Kalau sudah begini, saya stress, iya larinya minum-minum, pasang nomer dan main perempuan.”*

Pelarian ini menjadi kebiasaanyang sudah dihilangkan, apalagi seorang mandor dapat menghasilkan uang Rp. 100.000,00 bersih, bahkan sampai Rp. 250.000,00.⁷ Dengan uang sebanyak itu, ia kemudian berfoya-foya ke tempat pelacuran. Ia sendiri sudah kawin 7 kali, keempat istrinya bekas pelacur. Pada waktu penelitian, ia sedang berurusan dengan germo yang pelacurnya minta kawin, padahal ia masih berstatus beristri. Istrinya tinggal di Sepanjang, di tanah dan rumah yang dibangunnya. Lebih parah lagi, kebiasaan membeli nomer “togel.” Akibatnya, *“baru-baru ini saya menjual motor saya untuk tombakan dan urusan dengan pelacur itu.”*

Mat Aji, Tukang Kayu yang unik.

“Bu, kulo wangsul sak meniko. Biasane dbuhur, sak sampune nampi bayaran, kulo wangsul. Sakniki, mandore mbayare jam gangsal sonten,” kata Mat Aji pada salah seorang pelanggan di mana ia menjadi tukang kebun sesudah jam kerja. (“Bu, saya pulang sekarang ke desa sekarang, biasanya saya sudah pulang jam 12 siang, sesudah menerima upah. Sekarang, mandor baru membayar

⁷ Pada tahun 1990-an, harga beras Rp. 450,00, harga emas Rp. 10.000,00 dan harga Premium Rp. 500,00. Gaji PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp.100.000,00. Sekarang, tahun 2006 harga beras rata-rata Rp 4.000,00, harga emas Rp. 120.000,00 dan harga Premium Rp. 4.500,00, sedangkan gaji PNS golongan IIIa sudah mencapai Rp. 1.000.000,00.

jam 5 sore”). Di proyek bangunan, hingga sekarang hari Sabtu merupakan hari kerja separuh hari, selesai jam 12 siang. Pada jam itu mandor membayar upah untuk setiap tukang dan kuli bergantung dari beberapa hari mereka bekerja.

Mat Aji berjanji akan kembali dua hari kemudian. Hal itu biasa dilakukannya. Setiap hari Sabtu, sesudah mengambil upah, ia ke Terminal. Dia pulang ke desanya, Desa Sukomangu, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto. Pada waktu pulang, ia bisa membawa uang antara Rp. 10.000,00 hingga Rp. 25.000,00. Uang sebesar itu sudah dipotong ongkos transport Rp. 1.000,00 (karcis bis Surabaya-Mojokerto Rp. 550,00, ojek Rp. 150,00 dan selebihnya ongkos naik colt), dan uang makan selama seminggu Rp. 1.800,00 (beras 2,5 kg @ Rp. 450,00, lauk Rp. 450,00 dan *mbako* Rp. 200,00), sedangkan sayur diambil dari pekarangan temannya di Pakis. Sayur itu ditanam sendiri. “*Aku nandur dhewe. Tapi, nggake ana sing wani maneni. Koncoku mungkin sungkan. Ora melu nandur kok maneni. Tapi, sakjane gak opo-opo wong yo dhuk pekarangane. Ping pindone, waktu mbangun omabe itu, aku iya ngewangi. Gratis.*”

Mbako (tembakau, pen.) tidak selalu dibeli. Mat Aji sering diberi dari teman-temannya yang minta tolong untuk membuat *jimat*, meski ia sendiri tidak memintanya. *Jimat* itu untuk *pengasih*an (welas asih), agar orang yang memakainya mudah mendapat pekerjaan. Dia membuat dari *sabuk* (ikat pinggang), kertas, bolppoint hitam dan minyak wangi yang masih baru. Kemudian, Mat Aji *melekan* (tidak tidur) sambil *wiridan* (membaca dan menulis mantra) sampai jam 2 atau 3 pagi. Mantra ditulis dalam bahasa Arab *Gandul* dengan bolppoint dan minyak wangi pada kertas yang dimasukkan ke dalam ikat pinggang.

Tentang oleh-oleh untuk di rumah, Mat Aji membelinya di terminal seharga antara Rp. 2.000,00 hingga Rp. 5.000,00. Oleh-oleh itu dibedakan, untuk ibunya yang tinggal di desa lain, dan untuk istri dan keempat anaknya. Untuk ibunya, dia membelikan lebih istimewa, lebih mahal daripada untuk istri dan

keempat anaknya. Sesampai di rumah, oleh-oleh itu diletakkan di meja, tetapi anak-anaknya tidak berani membuka sebelum Mat Aji membagikannya, sedangkan untuk ibunya dikirim oleh anak sulungnya yang sudah dewasa.

Perhatian pada ibunya begitu kuat karena Mat Aji adalah anak tertua dari lima bersaudara, dan kini hanya ibunya yang masih hidup di desa Tegan, desa tetangganya. Ayahnya dulu seorang petani yang memiliki sawah cukup luas. Sejak kecil, Mat Aji membantu ke sawah. Selain itu, ia lebih suka berburu ular, *nyambek* (biawak), dan *celeng* (babi hutan). Dagingnya ia jual atas permintaan orang kota. Sementara itu, dalam sisi pendidikan Ia hanya tamat SR (Sekolah Rakyat, setingkat dengan SD sekarang). Sewaktu di SR, ia berguru dengan seorang kiyai di pondok. Dari kiyai itu, ia mengenal ilmu *klenik*, perdukunan.

Setelah beberapa tahun menikah, ayahnya membelikan dan membangun rumah di atas seribu meter persegi. Rumah itu didiami hingga sekarang, meski sudah beberapa kali mengalami rehab. Rumah itu sekarang separuh berdinding bata, separuh sisanya gedeng, berlantai tanah yang dikeraskan dan memakai penerangan listrik. Rumah itu secara bertahap kini dibangun dengan lantai ubin/keramik dan tembok. Pembangunan ini tidak terlepas dari kegiatan arisan dengan 12 tetangga. Di dalam ariasan itu, setiap triwulan setiap anggota mengumpulkan uang untuk membeli bahan, dan saling membantu membangun rumah ukuran 8x12 m dengan leter L 3 meter secara bergiliran.

Rumah Mat Aji bertetangga dengan keempat adiknya dan seorang kakak ipar (kakak dari isterinya). Keempat adik dan kakak ipar itu bekerja sebagai tukang, selain berkebun dan bertani membantu ibunya. Ada pula yang menjadi tukang batu, tukang besi dan tukang kayu.

Selain menjadi tukang kayu di kota, Mat Aji sendiri bekerja di kebun dengan menanam duren, nangka, moris (*sirzak*), dan poh gadung (mangga). Selain untuk dimakan sendiri, hasil

kebut di-*tebas* (dijual). Setiap pohon laku terjual seharga Rp. 25.000,00 atau lebih, tergantung jenisnya. Dia jua pernah berjualan *apokat*, dari kebun sendiri dan tetangganya. Kini, kebun itu menjadi tanggung jawab anak *barep*-nya (anak sulung) yang dulu pernah diajak bekerja di Delta Plaza pada waktu liburan.

Mat Aji belajar pertukangan, khususnya tukang kayu dari saudara dan tetangganya. Sebagian besar orang-orang di desa itu bekerja sebagai tukang daripada petani sebab sawahnya yang sempit tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mat Aji serius menekuni pertukangan ketika merehab rumahnya. Waktu itu, dia mengukur dari rumah lama ke bahan mentah, kayu, dengan menggunakan *debog* (batang pisang) dan *pring* (bambu). Untuk membuat lubang, ia meletakkan *dlumang* (kertas) yang dibasahi dengan minyak rambut (*kelentik*) di kayu lama untuk ukuran besarnya. Ketika sedang bekerja di siang hari, ada seorang tamu, tetangganya, datang ke rumah dan kemudian mengajarnya cara yang benar.

Berbeda dengan orang-orang sekitar rumahnya, Mat Aji mencari pekerjaan di tempat yang lebih jauh. Informasi pekerjaan diperoleh di pasar. Dia mengaku sudah pernah menjadi tukang di ujung lain dari kabupaten Mojokerto, sebelum ke Surabaya. *“Kalau mengharapkan pekerjaan di sekitar rumah atau di desa tetangga, bakalan tidak makan dan anak-anak tidak sekolah.”*

Mat Aji pertama kali ke Surabaya diajak oleh kakak iparnya sekitar tahun 1983-1984. Di rumah yang dikerjakan pertama kali itu ia sekarang bekerja sebagai tukang kebun. Dari tempat itu, dia ikut mandor mengerjakan di Darmo Grande, kemudian di Perak. Di Perak, ia terpaksa kost dan berkenalan dengan temannya yang sekarang ini tinggal di Pakis. Sesudah di Perak, ia mengerjakan di Jobang. Dengan mandor yang sama pula, ia bekerja di Malang. Dari Malang, ia diajak mengerjakan rumah Perumnas di Bondowoso, tapi tidak bisa menolak dengan alasan tidak bisa pulang sekali seminggu.

Pada waktu penelitian ini, dia pergi ke Surabaya karena terpaksa. Anak-anaknya membutuhkan uang sebesar Rp. 57.000,00 untuk biaya ujian EBTA (sekarang UNAS, pen). Dia sebenarnya sudah menitipkan anak-anaknya kepada guru untuk memberi pekerjaan di sekolah agar bisa membiayai uang sekolah sendiri. *“Buru-buru anak Bapak, saya sendiri pusing memikirkan anak sendiri,”* dia menirukan ucapan seorang guru dari anak sulungnya.

Pada waktu penelitian ini dilakukan, dia bekerja berkat tawaran teman sebangku di bis antar kota ke jurusan Surabaya. Kalau tidak *nggandol* (menumpang gratis, pen.) truk sampai di Darmo Grande, ia biasa naik truk dengan bekal dari rumah Rp. 3.000,00 sampai Rp. 5.000,00. Kesepakatan untuk pergi ke Surabaya itu diambil setelah berunding dengan isterinya, sedangkan uang dari simpanan atau pinjam baik dari saudara maupun tetangga bila tidak punya. Setelah dipotong untuk transpor, uang itu digunakan untuk biaya makan selama mencari kerja (1-3 hari) dan selama belum mendapat upah dari mandor atau uang dari sesama buruh. Bila mandornya baik, dia dipinjami dengan potong upah. Bila tidak, dia terpaksa pinjam uang dengan tanggungan baju atau barang lain yang dibawa.

Selama 3 hari pertama tiba di Surabaya, dia biasanya langsung menuju ke kompleks perumahan untuk mendatangi setiap rumah yang dibangun sambil menanyakan bila ada pekerjaan. Dia biasanya menempuh 4 kilometer sehari, kemudian pindah lagi hingga mendapatkan pekerjaan. Selama mencari kerja dia tidur di rumah temannya (Pakis) atau dari mesjid ke mesjid. Bila tidak mendapatkan pekerjaan selama 3 hari, Mat Ali kembali ke desanya. *“Tapi, syukurlah selama ini saya bisa memperoleh pekerjaan kurang dari 3 hari,”* katanya, *“Dan, salah satu di antaranya karena ini.”* Dia tersenyum sambil menunjukkan ikat pinggangnya ketika ditanya apa rahasianya mendapat pekerjaan secepat itu.

Ran, Tukang Batu yang Kerja Keras.

Ran mulai menginjakkan kaki di Surabaya untuk bekerja sejak tahun 1982. Dia mengaku, waktu itu dia membutuhkan uang untuk mengerjakan sawah dan kebutuhan rumah tangganya. Sawahnya waktu itu mencukupi hasilnya. *“Saya beruntung sekali waktu itu. Di terminal Nganjuk saya berkenalan Cak Arief, tukang batu. Dia ajak saya jadi kulinya. Dia butuh untuk ngecor dan pasang bata,”* katanya dalam bahasa Jawa Ngoko.

Dia dilahirkan dan dibesarkan di desa Jarak, Nganjuk. Dia hidup bersama isteri keduanya, anak-anak dan adik laki-lakinya. Isteri pertamanya sudah meninggal. Isterinya yang sekarang adalah adik dari isteri yang terdahulu. Dari isteri pertamanya, dia mendapat empat anak, sedangkan isteri kedua dua anak. Anaknya yang sulung sudah duduk di kelas 2 SMP pada waktu penelitian ini.

Adik laki-laki yang ikut dia ini menggantikan ia bekerja di sawah. Pada tahun tersebut, sawahnya bertambah 0,5 ha, sebelumnya hanya 0,25 ha dan menjadi 0,75 ha dari hasil kerja menjadi *kuli* di Surabaya. Sawah itu berstatus hak milik, sementara itu ia juga membeli dengan cara *adol tabunan*.

Dia bekerja dan tinggal di tempat kerjanya. Setelah beberapa minggu bekerja, dia kembali mengajak teman dan saudara sepupunya, tiga orang jumlahnya, ke Surabaya, sama-sama menjadi *kuli*. Dan, pada waktu penelitian hanya dua yang bertahan sebagai *kuli*, salah satunya menjadi tukang batu, seperti dia. Seorang telah beralih sebagai pelayan toko. *“Yang jadi pelayan toko itu tidak tahan kerja di bangunan. Habis, di desa dia tidak pernah bekerja, hanya di rumah saja. Yang tetap jadi kuli itu salah, karena tidak mau belajar.”*

Setelah dari Cak Arief, dia masih tetap terus bekerja di tempat itu. Cak Arief kembali ke Jombang. *“Mungkin, dia sudah di-petrus. Sebab, hubungi baik surat maupun saya datang, dia tidak ada di*

rumah. Ngakunya, dia pernah jadi copet, tapi sebenarnya di baik sekali. Ngajari saya nukang batu. Cuma dia boros.”

Setelah dari tempat kerja yang pertama, dia ikut temannya bekerja di Kayoon. Ran waktu itu masih menjadi *kuli*, meski sudah mempunyai keahlian dari tempat kerjanya yang terdahulu. Dia kemudian pindah lagi di Kramat Gantung, merenovasi toko. *“Saya pindah mandor. Kalau tidak begitu, saya tetap dianggap kuli. Padahal, kemampuan saya sudah seperti tukang.”*

Di Surabaya, Ran selalu berhemat. Dia memasak sendiri. Beras dibawa dari rumah, lauknya beli di warung. *“Kalau ngirit, bisa bawa uang ke rumah lebih banyak. Tapi, itu tergantung mandor dan pemiliknya. Ada yang tidak boleh masak, takut temboknya hitam kena asap. Rokok pun saya bawa dari rumah. Harganya murah dan bau mentol agarangat.”*

Dia *nglaut* (selesai bekerja) jam 4 sampai 5.30 sore, kemudian mandir dan merebus air buat kopi atau teh. Dia tidur sekitar jam 10 malam di tanah yang dilapisi *tripleks*. Pagi-pagi dia sudah bangun, memasak dan bersiap-siap bekerja lagi. *“Kalau tidur, saya tidak tentu. Kalau ada yang ngajak ngobrol atau nonton wayang atau ketoprak, iya bisa larut pagi.”*

Dia rata-rata pulang ke desa sebulan sekali. Selain membawa uang Rp. 30.000,00 bersih, artinya telah dipotong untuk biaya hidup di Surabaya, oleh-oleh makanan, pakaian dan mainan untuk anak-anak, isteri dan adik lelakinya. Ketika kembali dari desa, Ran sering membawa hasil panen, seperti kelapa, buah dan beras. Sebagian untuk dirinya, sebagian lagi untuk teman, mandor dan pemilik rumah tempat dia bekerja dahulu. Dia memberikan oleh-oleh dari desa itu dengan harapan dia akan diajak bekerja bila ada *garapan*. *“Saya belum merencakan untuk jadi mandor borongan, saya belum ada modal. Tapi, saya sekarang berani jadi tukang yang dibayar borongan.”*

Mas Pur, Tukang Besi produk Balai Latihan Kerja.

Tiap pagi, selain hari Minggu, Mas Pur berangkat dari tempat menumpanginya ke tempat kerja sejauh 7 km dengan naik sepeda. Ia tinggal menumpang di rumah familinya, Waru, Sidoarjo. Tempat kerjanya di Margorejo, Wonocolo, Surabaya. Ia sudah bekerja sebagai tukang besi selama 6,5 tahun.

Selain di Surabaya, dia mengaku pernah bekerja di kota-kota besar Pulau Sumatera, seperti di Aceh dan Medan. *“Terlalu jauh, saya sering tidak pulang rumah, di Cilacap. Untung saya bisa balik ke Jawa karena informasi dari famili kalau di Surabaya banyak kerjaan.”*

Ijazah SMA (Umum) yang dimilikinya, tetapi tidak pernah dipakai untuk melamar pekerjaan. *“Kalau hanya ijazah SMA, siapa yang mau menerima saya kerja. Saya pakai sertifikat BLK. Dari BLK, ia memperoleh keterampilan pertukangan, mulai dari tukang batu hingga tukang besi. “Kalau nglamar kerja, saya lihat dabulu apa yang mereka butuhkan. Kalau butuh tukang batu, saya juga bisa. Sekarang pekerjaan saya sebagai tukang batu.”* Meskipun demikian, ia lebih sering menerima tawaran sebagai tukang besi. Menurutnya, pekerjaan tukang besi itu jauh lebih mudah dibandingkan tukang-tukang lainnya. *“Kerjanya hanya membuat plat, begel untuk pondasi dan tulangan. Kalau hanya mengkhususkan sebagai tukang besi saja, rugi mas. Dipakai hanya di awal saja, sisanya pekerjaan tukang batu dan kayu. Jadi, akhirnya saya pilih pekerjaan tukang apa saja. Asal kerja.”*

Sebagai tukang batu, Mas Pur dibayar per hari Rp. 4.000,00, tapi sebagai tukang besi hanya antara Rp. 3.000,00 hingga Rp. 2.500,00. *“Kalau jadi tukang besi dan tukang batu, saya pilih borongan. Hasilnya lebih banyak. Tergantung rajin dan kecepakatan.”*

Pukul 3 sore ia sudah *nglaut*, dan bersiap-siap pulang dengan mengumpulkan peralatan dan mandi di tempat kerja. Sekitar pukul 4.30 sore dia sudah melaju pulang ke waru. *“Saya kadang-kadang pulang pergi naik bemo. Tapi, saya lebih suka naik sepeda.*

Lebih hemat. Uangnya bisa dipakai untuk jajan pada waktu istirahat siang.

Dia mengaku bahwa hampir setiap bulan mengirimkan sebagian upanya untuk orangtuanya yang menjadi petani dengan luas sawah 0,86 ha dan untuk saudaranya. Dia sendiri telah bercerai sewaktu bekerja di Sumatera. Sisa uang lainnya untuk makan di tempat kerja dan *nyumbang* ke famili yang rumahnya ditempati. Tidak selalu dalam bentuk uang karena saudaranya *sungkan* menerima.

“...Saya belikan saja kebutuhan dapur, seperti beras dan bayar listrik. Itu saja sudah hampir Rp. 30.000,00. Tidak seberapa, bila dibandingkan harus kost. Memang, lama kelamaan saya juga sungkan. Memang ada rencana untuk pindah dan kost. Tapi, kapan dan alasan apa. Masih saya pikir-pikir...”

Pak Mian, Keluarga Kuli Batu.

“Helo.... helo Purnomo, apa ning kono?” kata Mak Sri di depan *corong omplong* (kaleng bekas). (*“Helo.. helo Purnomo, apa ada di situ”*). Purnomo adalah anak bungsunya. Umurnya kurang dari lima tahun. Ia berdiri di ujung lain. Ia melekatkan corong yang dihubungkan benang itu ke telinganya. Ia tertawa mendengar suara ibunya. Mainan itu dibuatkan Pak Min, teman kerja ayah dan ibunya. Begitu pula dengan truk mainan yang terbuat dari kayu. Mereka tinggal di bangunan yang belum jadi. Di tempat itu, kedua orang tuanya bekerja.

Ningsih anak perempuan sulungnya sedang *ngladeni* sarapan pagi tukang dan kuli. Selain itu, ia mencatat berapa dan apa yang dimakan tukang dan kuli. Mereka biasanya *ngebon*, membayar setelah mendapat upah di akhir minggu. Biasanya dalam seminggu mereka menghabiskan Rp. 5.000,00 untuk makan, belum lagi untuk *ses* (rokok).

Masakan itu dibuat oleh Ningsih dan ibunya, Mak Sri, antara jam 5 sampai 6 pagi. Bahan-bahannyadibeli sore hari sebelumnya di toko dan pasar terdekat, kurang lebih 300 meter jauhnya atau *kulakan* pada hari Minggu. Pak Mian yang pergi *kulakan*. Sementara isteri dan anaknya memasak. Pak Mian membantu mencari dan merebus air. Air itu diambil dari ledeng rumah di seberang jalan. Dia tidak perlu membayar karena sudah dibayar oleh mandornya dengan cara mengganti tagihan air tiap bulan, biasanya sekitar Rp. 20.000,00. “*Mereka sebenarnya curang, Mas. Masak yang sering pakai mereka. Tapi, seluruh tagihannya yang bayar kami. Mestinya, untuk adilnya dibagi dua,*” kata Mandronya yang d-iya-kan oleh tukang dan kuli lainnya.

Pukul 7 pagi, Pak Mian dan Mak Sri sudah ganti dengan baju *telesan* (baju yang sudah luntur warnanya untuk kerja). Sementara itu, Ningsih terus melayani tukang dan kuli yang mau makan. Prunomo sendiri sudah berganti mainan dengan truk yang terbuat kayu. *Om* yang mengawasi bangunan, sebagai wakil dari pemilik bangunan (rumah), ikut menggoda Prunomo. *Om*, seorang Tionghoa separuh bayu ini adalah paman (kakak dari ayah) pemilik bangunan. “*Pur, sing gawe truk iki sapa?*” “*Lik Min,*” sahut Prunomo tanpa menoleh sedikitpun. “*Iki truk kudu momot gragal nggo digarap bapakmu,*” godo Cak Podo, teman ayahnya, sampil meletakkan batu pada *bak* truk mainan. (“Truk ini harus berisi batu yang harus dikerjakan ayahmu”). Akibatnya, truk tidak bisa ditarik lagi oleh Purnomo karena terasa berat. Teman-temah ayahnya tertawa melihat tingkah Purnomo menarik truk. “*Ah, kowe ngawur Cak Podo,*” kata Pak Min sambil membantu Purnomo menarik truk.

Kurang lebih pukul 8 pagi, mereka semua bekerja. Pak Min, sesudah mengisi air ke dalam tong, *ngladeni* tukang batu dan keramik membuat *luluh* (campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1:3). Sementara itu, Pak Mian dan Mak Sri *ngayak* pasir dan mengangkat *luluh* ke tukang batu dan keramik.

Sementara itu, Ningsih tetap menjaga warung dan melayani pembeli, sambil *ngemong* Purnomo. Warung itu sebenarnya *direksiget* (gudang). *"Saya sebenarnya ingin sekolah. Tapi, tidak ada biaya. Jadi, kelas tiga SD saya sudah berhenti. Kata bapak, kalau ada biaya, tahun depan saya sekolah lagi,"* kata Ningsih. Ningsih berkulit hitam manis, seperti ibunya, dan berambut hitam panjang sebatas pinggang. Hal ini berbeda dengan ayahnya, Pak Mian. Ciri-ciri Pak Mian bertubuh sedang, 50 tahun umurnya, berambut keriting (*"Susah diatur. Tidak perlu potong,"* katanya) dan biji mata sebelah kiri berbintih putih (mungkin akibat kekurangan vitamin A). Lebih lanjut, selain melayani pembeli, dia memasak air untuk minum ketika menjelang jam 12 siang. Waktu istirahat siang, atau istilahnya *nglaut*.

Pada waktu *nglaut*, Mak Sri dan Ningsih kembali melayani mereka yang bekerja di bangunan itu, termasuk mandornya. Setelah *nglaut*, sekitar pukul 1 siang mereka kembali bekerja. Mereka baru selesai bekerja sekitar jam 4 sampai 4.30 sore. *"Beginilah cara kami mencari makan. Datang ke Surabaya, hanya jadi kuli dan buka warung,"* kata Pak Mian. Meskipun demikian, sejumlah teman sekerjanya menyayangkan tekad mereka. *"Sayang, dia tidak bisa mencapai jenjang lebih tinggi. Tidak bisa jadi tukang. Ketuweken (terlalu tua, pen). Tidak bisa belajar. Apalagi membawa keluarganya di Surabaya,"* kata Pak Min.

Menurut pengakuannya, Pak Mian berasal dari Desa Tanggul Angin, Kab. Bojonegoro. Pak Mian tidak mempunyai sawah atau ladang. Sawah milik ayahnya yang 0,5 ha luasnya sekarang dimiliki dan dikerjakan oleh kakak sulungnya. Dia dan isterinya di desa hanya bekerja sebagai buruh tani yang dibayar Rp. 1.000,00 per hati pada waktu musim tanam atau musim panen. *"Saya dan sekeluarga berniat pulang desa akhir Maret nanti. Kami dengar akan ada panen bawang dari teman dan kerabat keteta pulang bulan yang lalu."*

Pertama kali datang ke Surabaya, Pak Mian diajak temannya sudah tiga lamanya sebelum penelitian ini. Ia ditawarkan menjadi kuli. Waktu itu, ia menjadi kuli di Rungkut. Sudah 2-3 bulan pada waktu penelitian berlangsung, isteri dan kedua anaknya di ajak. Baru beberapa minggu setelah bekerja di Surabaya, isterinya mengajak untuk buka warung, berjualan nasi. Modalnya diperoleh dari hasil tabungan.

Ia bekerja di Rungkut kurang lebih dua tahun lamanya. Setelah selesai bangunan yang satu, ia berpindah ke bangunan lain. Kurang lebih satu tahun terakhir, mereka diajak mandor ke tempat yang sekarang di kawasan Chris Utama, Pakis Gurung. Di tempat tinggal yang sekaligus tempat kerjanya, dia bersama isteri dan anak-anaknya menempati satu ruangan yang belum jadi. Dia tidur di atas *tripleks* dan menggunakan *sendir* buatan sendiri untuk penerangan bila malam hari. Untuk menghangatkan dan memasak, mereka menggunakan kayu bakar.

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga sebagai Faktor Pendorong Migrasi

Everett S. Lee (1985: 8-9) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi, yakni: faktor dorong-tarik, penghalang antara dan faktor pribadi. Faktor dorong-tarik, oleh pendekatan sistem, digambarkan sebagai akibat *over*-populasi dan lingkungan yang memburuk di kawasan desa serta daya tarik kota.

Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan sangat sulit, pada kasus ini semua responden telah melakukan migrasi desa-kota. Mereka berasal dari daerah asal yang berbeda satu sama lain. Cara lain yang digunakan adalah menanyakan alasan pergi bekerja di Surabaya.

Tabel 5.1.
Alasan Pergi Bekerja di Surabaya (N=75)

No.	Rincian	Utama		Kedua	
		f	%	f	%
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	38	50,67	8	10,67
2.	Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarga	17	22,67	9	12,00
3.	Mengisi Waktu Luang (Pra-Panen dan Tanam)	0	0,00	20	26,67
4.	Diajak Kawan	10	13,33	5	6,67
5.	Lain-lain	5	6,67	0	0,00
6.	Tidak Menjawab	2	2,67	33	44,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 6.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak adanya pekerjaan di desa sebagai alasan utama yang dominan. Atau, singkatnya tidak adanya pekerjaan sebagai faktor pendorong. Hal itu bisa dipahami karena revolusi hijau dan biru telah mengakibatkan efisiensi dan komersialisasi di sektor pertanian. Revolusi hijau mengakibatkan penyeragaman musim tanam (dan sekaligus musim panen), sehingga petani kecil dan buruh tani hanya bekerja pada lahan pertanian tertentu saja dalam satu kali musim tanam-panen. Jumlah buruh tani yang digunakan pun semakin terbatas akibat penggunaan teknologi pertanian. Untuk membajak, hanya menggunakan satu traktor sudah bisa mengolah tanah dalam jumlah yang besar. Sementara itu, ketika musim panen tenaga yang diperlukan juga sedikit karena menggunakan sabit. Penurunan penggunaan tenaga di sektor pertanian ini tidak diikuti pengembangan sektor non-pertanian yang lebih luas, terlebih lagi dalam bentuk industri kecil rumah tangga (Adiwikarta, 1984: 71-77; Sayogyo, 1978: 3-14; Manning, 1988: 3-39). Akibatnya,

mereka memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Penjelasan yang ini juga dapat digunakan untuk memahami alasan utama kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga (pendapatan tambahan).

Tabel 5.2
Luas Pemilikan Tanah sebelum Bekerja dan Alasan-alasan Bermigrasi
(N=75)

No.	Alasan	Utama			Kedua		
		Sempit	Sedang	Luas	Sempit	Sedang	Luas
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	27 50,00%	6 75,00%	5 38,46%	8 14,81%	0 0,00%	0 0,00%
2.	Mencukupi Kebutuhan Keluarga	12 22,22%	2 25,00%	3 23,08%	2 3,70%	0 0,00%	7 53,85%
3.	Isi Waktu Luang	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	17 31,48%	0 0,00%	3 23,08%
4.	Diajak Kawan	7 12,96%	0 0,00%	3 23,08%	5 9,26%	0 0,00%	0 0,00%
5.	Lain-lain	8 14,81%	0 0,00%	2 15,38%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
6.	Tidak Menjawab	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	22 40,74%	8 100,00%	3 23,08%

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 26

Oleh karena itu, pada alasan kedua yang dominan adalah mengisi waktu luang pra panen dan tanam. Mereka, buruh bangunan yang terjaring, mengisi waktu luang dengan bekerja di Surabaya. Mereka mengaku sebenarnya ingin juga bekerja di daerah asal, tetapi ternyata tidak ada pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Akhirnya, mereka memilih menjadi buruh bangunan di Surabaya.

Bila dikaitkan dengan SES dan tanah yang dimiliki sebelum melakukan migrasi, maka tidak ada pekerjaan menjadi satu penjelasan kolektif (*collective reasoning*) masyarakat desa mengapa mereka meninggalkan desanya dan menuju kota. Namun, bila digali lebih dalam lagi, di samping pekerjaan yang tidak ada, bagi informan yang memiliki SES tinggi (dan tanah) yang luas, pekerjaan merupakan “keberadaan” dirinya. Mereka tidak puas hanya bekerja ikut atau bersama orang tua. “*Yen kerja ning sawah melu wong tuwo iku podho wae ngganggu. Kulo pingin duwe penghasilan dhewe. Sawah ben diurus sing ning desa.*” (Kalau ikut orang tua bekerja di sawah itu sama dengan menganggur. Saya ingin punya pendapatan sendiri. Sawah biar diurus oleh orang yang masih tinggal di desa). Jawaban ini rata-rata diberikan oleh buruh bangunan yang ber-SES tinggi dengan tanah di atas 0,5 ha, bahkan ada salah seorang responden yang memiliki sawah 5 ha lebih suka menyuruh tetangganya mengerjakan daripada dirinya.

Menjadi Penglaju, Migran Permanen dan Sirkuler untuk Menyiasati Faktor Penghalang

Meski masih belum ada kesepakatan konsep *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen, Hugo misalnya, mengusulkan ukuran-ukuran yang cocok dari keterlibatan seseorang yang pindah, yaitu: (1) apakah keluarganya ikut pindah atau tidak; (2) apakah tanah, rumah atau harta benda lainnya di desa tetap menjadi miliknya atau tidak; (3) apakah ada kiriman uang atau barang ke desa, kiriman-kiriman tersebut seberapa bagain dari jumlah seluruh penghasilannya; (4) apakah dia mempunyai peranan politik atau sosial di desa; dan (5) apakah sering pulang ke desa (Goldstein, 1980: 75). Pakar lain menghendaki perlunya memperhatikan kriteria ruang (wilayah, jarak ekonomi dan jarak sosial), tempat tinggal, waktu dan kegiatan dalam migrasi, khususnya desa-kota (Standing, 1987: 1-20).

Selain mengikuti pendapat Hugo, cara lain yang ditempuh untuk seseorang melakukan migrasi permanen, sirkuler dan/atau *nglaju* adalah menanyakan apakah ada rencana kembali (*niat*) ke daerah asalnya (Mantra, 1985: 3) dan frekuensi kembalinya. Buruh bangunan yang menyatakan kembali dan tetap menetap di desa adalah 80,00%, sedangkan 15% menyatakan menetap di Surabaya. Alasan mereka yang memilih menetap di Surabaya adalah karena keluarganya sudah dipindahkan, tidak mempunyai sawah atau terlalu sempit, atau selain keluarganya telah dipindahkan, karena tidak ada pekerjaan di desa. Beberapa yang mengambil keputusan pindah ke Surabaya telah memiliki rumah, namun ada pula yang mengontrak, tinggal bersama famili dan orang lain, biasanya teman sekerjanya (sumber: pertanyaan no. 42 dan 61).

Tabel 5.3
Jarak dan Frekuensi kembali ke Daerah Asal
(N=75)

No	Jarak ke Daerah Asal	Dekat		Sedang		Jauh	
	Frekuensi Kembali	f	%	f	%	f	%
1.	Tinggi	16	76,19	2	5,71	3	16,67
2.	Sedang	0	0,00	27	77,14	8	44,44
3.	Rendah	5	23,81	7	20,00	7	38,89

Sumber: data primer, pertanyaan no. 11, 59, 60 dan 63.

Sementara itu, mereka yang tidak punya rencana menetap melakukan migrasi sirkuler dan *nglaju*. Responden yang *nglaju* akan pulang setiap hari, jumlahnya 8 orang, dua orang lebih memilih pulang 2 hari sekali. Migrasi sirkuler dilakukan dengan cara pulang 1 atau 2 kali dalam sebulan, bahkan ada yang tidak pulang setiap bulan, meski tetap memberikan kiriman uang yang ditiptkan pada saudara atau teman-teman sedesanya (sumber: pertanyaan no. 60 dan 61). Frekuensi pulang ke daerah asal

mereka berbeda bergantung dari jarak antara Surabaya dan daerah asalnya. Semakin dekat jaraknya, semakin sering pulang, bisa setiap hari, atau mengambil pola *nglaju*. Sementara itu, semakin jauh jaraknya semakin lama pulang rentang waktu pulangnya (lihat tabel 4.3).

Ketika berangkat ke Surabaya, mereka tidak selalu diajak oleh orang tuanya atau temannya, tetapi 22 (29,33%) orang mengambil inisiatif sendiri. Meskipun demikian, ajakan dari teman se-desa yang terlebih dahulu pergi ke Surabaya dan telah memperoleh pekerjaan tetap dominan, yaitu 25 (33,33%). Pada waktu diajak atau berinisiatif sendiri ke Surabaya, mereka meminta pertimbangan dan ijin dari orang tua (37,33%), keluarga (33,33%) dan cukup tekad dan keputusan sendiri (29,33%). Permintaan ijin pada orang tua dan keluarga biasanya dilakukan anak muda dengan karakteristik sosial tertentu. Sebagaimana pendapat David F. Sly dan J. Michael Wrigley (1985: 75-97), keputusan migrasi pada anak muda pada dasarnya dibuat oleh kepala keluarga, khususnya yang kurang berpendidikan, sedangkan orang di luar keluarga lebih berperan pada migran yang berpendidikan. Namun demikian, orang yang memberikan pertimbangan ini tidak berarti ikut membiayai migrasi tersebut, karena dari temuan lapangan 77,34% responden mencari biaya sendiri.

Magang atau *Ngernet*, Proses Belajar dan Adaptasi Kerja

Kartini Sjahrir (1985: 82) memaparkan bahwa keahlian seorang tukang di Jakarta diperoleh secara bertahap dari teman sekolah sekerjanya. Mandor maupun kontraktor tidak pernah menyelenggarakan suatu latihan keterampilan khusus. Setiap tukang memperolehnya lewat pengalaman kerja dan barangkali juga bakat. Hal ini terjadi pada buruh bangunan di Surabaya. Hampir semua buruh mengaku pernah menjadi kuli sebelum kedudukannya sekarang, bahkan ada yang mau bekerja tanpa di-

bayar, hanya uang makan, seperti Ali Effendi. Pekerjaan *kuuli, laden tukang*, tidak selalu dijalani di Surabaya, biasa jadi di desa asalnya atau kota

Alat-alat kerja didapat dengan jalan beli sendiri (36,0%), pinjam atau diberi oleh mandor atau pemilik bangunan (7,0%), atau dari sebagian membeli dan sebagian lain pinjam (16,%) (sumber: data primer, pertanyaan no. 64). Alat-alat ini dikenalkan oleh teman kerja, teman se-daerah, saudara, dan/atau orang tuanya, sekaligus dibimbing cara menggunakannya. Tabel 5.4 menunjukkan bahwa selain didukung oleh kemauan sendiri, teman kerja sangat berperan dalam mengenalkan dan membimbing dalam penggunaan alat-alat kerja. Proses belajarnya tidak seperti pada pelatihan, tetapi sambil kerja temannya memperhatikan. Kalau salah, baru diberi tahu mana yang salah, bisa pada saat itu juga atau pada waktu *nglaut*.

Tabel 5.4
Yang Mengenalkan Alat dan Membimbing/Melatih Pekerjaan
(N=75)

No.	Rincian	Yang Mengenal Alat		Yang Membimbing	
		f	%	f	%
1.	Sendiri	4	5,33	4	5,33
2.	Orang tua	2	2,67	5	6,67
3.	Saudara	4	5,33	4	5,33
4.	Teman se-daerah	3	4,00	0	0,00
5.	Teman se-kerja	11	14,67	14	18,67
6.	Sendiri dan orang tua/saudara	9	12,00	12	16,00
7.	Sendiri dan teman se-daerah	2	2,67	5	6,67
8.	Sendiri dan teman se-kerja	22	29,33	26	34,67
9.	Sendiri, orang tua/saudara dan teman se-kerja	10	13,33	5	6,67
10.	Sendiri, orang tua/saudara, teman sekerja dan teman se-daerah	8	10,67	0	0,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 56 dan 57.

Proses magang, *ngernet* atau *belajaran* diceriterakan oleh Pan Ran, yakni pada awalnya seorang *kuli* mengikuti tukangnya bekerja dan seringkali tukang inilah yang memberikan pekerjaan padanya, tapi hanya 1 atau 2 kali proyek mereka ikut, selebihnya mencari sendiri. Pertama kali kuli batu memperhatikan tukang bekerja sewaktu *laden* dan memberikan luluh. Tukang memberitahu berapa campurannya, apakah pasir itu perlu di-*ayak* atau tidak, jenis batu yang digunakan dan campuran semennya. *Kuli* juga diminta memegang ujung lain dari pipa plastik yang berisi air untuk melihat sejajar atau tidak dan *ngelot* (menimbang ketebalan lapisan semen). Selain itu, lambat laun kuli disuruh mengerjakan pasang batu bata supaya target (borongan) terpenuhi. “*Ayo melu masang, nggak ono rugi. Aku nggak iso mbayar sampeyan!*” (“Ayo ikut pasang kalau tidak bisa rugi. Kalau rugi, saya tidak membayar kamu!”). Setelah kelihatan sudah agak terampil, tukang memberikan bonus dan sering mengajak lembur. Bila yang membayar mandor, tukang akan mempromosikan *kuli*-nya. Bila *kuli* merasa sudah bisa melakukan, dia keluar dan mencari tempat kerja baru atas informasi teman-temannya. “*Umpamane ora pindah, bakal pancet ae.*” (“Kalau tidak pindah, kondisinya tetap saja”).

Di tempat yang baru, dia melamar sebagai tukang, bukan *kuli* lagi. Oleh mandor yang baru, dia boleh bekerja dengan masa percobaan beberapa hari.. Bila hasilnya kurang baik, mandor akan menurunkan upahnya, tapi biasanya tukang yang “baru” ini memilih keluar. Kalau hasilnya baik, ia tetap bekerja dengan status yang baru, sebagai tukang.

Untuk meningkat menjadi kepala tukang atau mandor, seorang tukang harus dekat dengan mandor atau pelaksana. Mereka mengajarkan bagaimana seluk-beluk mencari proyek dan memberikan kepercayaan. Di samping itu, tukang tersebut menyisakan upahnya untuk modal. *Kuli* jarang langsung menjadi mandor atau kepala tukang, tetapi harus bertahap.



Gambar 5.1.

Kadang dengan perut kosong, sudah harus bekerja.

Perubahan Status Sosial Ekonomi Keluarga, berkah dari Kota Besar

Perubahan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal sebenarnya tidak terlepas dari perilaku pengiriman uang atau barang, dalam istilah kependudukan adalah *remittance*. Pengiriman uang atau barang ini dilakukan oleh kaum migran, termasuk oleh buruh bangunan. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa semua buruh bangunan yang berstatus berkeluarga dan separuh dari berstatus janda/duda, atau 70,7% dari 75 responden mengaku mengirimkan uang dan/atau barang pada keluarganya, khususnya istri dan/atau anak-anak mereka. Bentuk pemberian itu bervariasi, namun umumnya berupa uang setiap kali pulang.

Tabel 5.5
Bentuk Pengiriman/Pemberian Uang dan/atau Barang pada Keluarga
(N=75)

No.	Rincian	Istri dan anak-anak		Orang Tua/ Mertua		Kerabat Lain	
		f	%	f	%	f	%
1.	Uang secara teratur	22	29,33	0	0,00	5	6,67
2.	Uang setiap kali pulang	25	33,33	16	21,33	0	0,00
3.	Uang dan/atau barang	3	4,00	20	26,67	12	16,00
4.	Barang-barang saja	3	4,00	15	20,00	15	20,00
5.	Tidak memberi apa-apa	22	29,33	24	32,00	43	57,33

Sumber: data primer, pertanyaan no. 67.

Tabel 5.5 juga menunjukkan bahwa buruh bangunan juga mengirim uang dan/atau barang setiap kali pulang, meski frekuensi pemberiannya berbeda bila dibandingkan istri dan/atau anak-anak. Namun tidak demikian untuk kerabat, kecenderungan memberikan uang, meski dalam jumlah kecil, biasanya dilakukan oleh buruh bangunan pada kerabat yang masih menjadi tanggungannya, seperti yang dilakukan Pak Ran. Atau, pemberian itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya selama proses migrasi, misalnya memberikan tumpangan menginap, atau mencari/memberi informasi tentang pekerjaan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pemberian uang dan/ atau barang ini digunakan membeli tanah atau barang-barang elektronik sebagai investasi. Sebelum ke Surabaya, separuh lebih dari buruh bangunan berstatus petani kecil atau tidak memiliki tanah (*tunakisma*). Kalau pun memiliki tanah pertanian, ada sejumlah pola pemilikan, mulai dari milik sendiri, warisan, beli

sewa, bagi hasil, hadiah/hibah dan lungguh. Pola penguasaan lahan yang demikian ini adalah wajar pada masyarakat Jawa pada tahun 1990-an. Data Sensus Pertanian tahun 1983 yang dilakukan oleh BPS, 63,3% usaha tani dari 11,6 juta rumah tangga petani di Jawa adalah petani gurem dengan luas tanah rata-rata 0,25 ha. Meski pada buruh bangunan yang tidak bertanah dan petani sempit tidak berubah, namun pada kelompok buruh bangunan di atas 0,25 ha mengalami perubahan luas tanahnya.

Tabel 5.6
Luas Pemilikan Tanah Pertanian Sebelum dan
Sesudah Bekerja di Surabaya
(N=75)

No.	Luas Lahan (dalam ha)	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Tidak Bertanah	28	37,33	28	37,33
2.	0,01 – 0,25	21	28,00	21	28,00
3.	0,26 – 0,50	7	9,33	0	0,00
4.	0,51 – 0,75	3	4,00	2	2,67
5.	0,76 – 1,00	8	10,67	16	21,33
6.	1,01 – 1,25	2	2,67	2	2,67
7.	Lebih dari 1,25	6	8,00	6	8,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 16.

Ada temuan yang menarik dari tabel 5.6, bahwa tidak peningkatan perluasan tanah pertanian yang dimiliki. Pada beberapa kasus perpindahan pekerjaan yang kurang dari satu tahun pada waktu penelitian ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Lebih dari itu, para buruh tani dan pemilik tanah yang bertanah sempit lebih memilih mengembangkan sektor non-pertanian, bahkan telah dilakukan pada waktu sebelum melakukan proses migrasi. Sementara itu, petani yang memiliki tanah di atas

0,25 ha tetap mengembangkan strategi peningkatan ekonomi pada sektor pertanian. Caranya, hasil dari bekerja di kota digunakan untuk membeli tanah. Dengan membeli tanah yang cukup luas hingga mencapai 1 ha. Dengan luas tanah tersebut, setidak-tidak biaya antara pengelolaan padi dan keuntungan dari menjual beras seimbang atau lebih untung.



Gambar 5.2
Bekerja untuk keluarga di desa?

Tidak ada perubahan signifikan pada kelompok buruh bangunan yang *tunakisma* (tidak bertanah) dan petani *gurem* (lahan kurang dari 0,25 ha) ini nampaknya berhubungan dengan (1) status pekerjaan di desa yang tidak lagi memfokuskan pada sektor pertanian, dan (2) orientasi dalam pengembangan modal yang dimiliki. Orientasi pengembangan ini terlihat dari perubahan kualitas rumahnya. Meski luas tanah atau rumah relatif tidak berubah, tetapi terlihat perubahan pada bahan dinding, lantai dan penggunaan listrik. Lebih penting lagi, status kepemilikan rumah

pun telah berubah, bila dulu bergantung pada orangtuanya, kini mereka telah mengutamakan untuk membeli sendiri, baik dengan cara membeli, maupun membuat sendiri.

Tabel 5.7
Kondisi Obyektif Rumah di Daerah Asal Sebelum dan Sesudah Bekerja
di Surabaya (N=75)

No	Kondisi Obyektif	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Luas Rumah (dalam m ²)				
	a. Kurang dari 40	10	13,33	16	21,33
	b. 40,01 – 60,00	21	28,00	15	20,00
	c. 60,01 – 80,00	7	9,33	4	5,33
	d. 80,01 – 100,00	15	20,00	18	24,00
	e. 100,01 – 120,00	10	13,33	7	9,33
	f. Lebih dari 120,00	12	16,00	15	20,00
2.	Dinding terbuat dari				
	a. Tembok	49	65,33	62	82,67
	b. Papan	7	9,33	3	4,00
	c. Gedeg	19	25,33	10	13,33
3.	Lantai terbuat dari				
	a. Tegel/Keramik	7	9,33	9	12,00
	b. Semen	31	41,33	53	70,67
	c. Tanah	37	49,33	13	17,33
4.	Penerangan				
	a. Listrik	33	44,00	53	70,67
	b. Lampu Minyak	42	56,00	22	29,33
5.	Status Pemilikan				
	a. Beli Sendiri	11	14,67	20	26,67
	b. Buat Sendiri	9	12,00	18	24,00
	c. Hibah Orangtua	8	10,67	13	17,33
	d. Buat Sendiri dgn dibantu Orangtua	18	24,00	9	12,00
	e. Milik Orangtua	29	38,67	15	20,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 27.



Gambar 5.3

Makan bersama, bekerja bersama. Modal sosial orang miskin kota.

Penutup

Apa yang dapat disimpulkan dari perilaku buruh bangunan. Pertama, mobilitas buruh bangunan yang bekerja di Surabaya adalah *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen. Frekuensi mereka kembali ke daerah asal ini berhubungan dengan dengan jarak antara tempat kerja dan daerah asal. Semakin dekat jaraknya, semakin tinggi frekuensi kembali ke daerah asal. Intensitas hubungan dengan asal ini sebenarnya berbeda bergantung status kawinnya. Pada buruh bangunan yang berstatus kawin, dengan istri dan anak-anak yang tinggal di daerah asal, intensitasnya semakin tinggi, sebaliknya tidak demikian pada status tidak kawin dan janda/duda. Intensitas ini ditandai dari frekuensi kembali ke daerah asal, pengiriman uang dan/atau barang, ada tidaknya teman atau famili dari daerah asal yang diajak bekerja dan keterlibatannya pada organisasi di daerah asalnya.

Kedua, pola migrasi yang demikian sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang *bias* kota dan pembangunan pertanian yang memarjinalikan kelompok miskin pedesaan. Oleh karena itu, pada buruh bangunan yang ber-SES rendah di daerah asal cenderung mempunyai alasan tidak ada pekerjaan di daerah asalnya. Sementara itu, selain karena tidak ada pekerjaan, buruh bangunan yang ber-SES tinggi lebih melihat ketidakpuasan atas pekerjaan di daerah asal. Bekerja ikut orang tua di sawah dianggap tidak memiliki pekerjaan.

Ketiga, dari hasil penelitian ini, keberhasilan migrasi ini sebenarnya ditentukan juga oleh intensitas pembelajaran, baik di daerah asal maupun sesudah di Surabaya. Intensitas pembelajaran terhadap pekerjaan di daerah terjadi tatkala mereka beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian di pedesaan, yaitu menjadi buruh bangunan. Di dalam kajian antropologi kognitif, pekerjaan buruh bangunan awalnya tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian, menggunakan alat-alat utama yang sama, seperti pacul dan sekop. Oleh karena itu, bisa dipahami bila Intensitas pembelajaran sebenarnya berbanding terbalik dengan SES buruh bangunan sebelum ke Surabaya.

Keempat, keberhasilan migrasi berpengaruh pada peningkatan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal. Peningkatan status keluarganya ditandai dengan peningkatan luas tanah pertanian yang dimiliki dan kualitas rumahnya. Pada buruh bangunan yang sebelumnya merupakan petani gurem lebih menginvestasikan di sektor pertanian dengan membeli lahan pertanian. Namun demikian, buruh bangunan yang tuna kisma dan bekerja di sektor non-pertanian ini lebih memperbaiki rumahnya.

Terakhir, penelitian ini juga menguatkan anggapan bahwa sektor formal di perkotaan tidak selalu menjadi tujuan dari migrasi. Sektor formal memiliki daya tampung yang terbatas, hal itu berbeda dengan sektor informal seperti buruh bangunan. Pada

kasus buruh bangunan, sepanjang ada kegiatan membangun rumah atau proyek lain, beberapa pun jumlah orangnya dapat tertampung⁸. Sementara itu, masyarakat desa yang melakukan migrasi memiliki kesadaran dan mengukur kemampuannya. Mereka tidak lagi menaruh mimpi-mimpinya, tetapi lebih realitis apa yang bisa dilakukan di daerah tujuan.

Daftar Pustaka

Adiwikarta, Sudardja.

1984 Dampak Irigasi Jatiluhur dan Pola Keluarga Tani. **Prisma**. Th. XIII No. 9.

Ananta, Aris., dan Prijono Tjiptoherjianto.

1985 Sektor Informal: suatu Tinjauan Ekonomis. **Prisma**. Th. XIV. No. 3.

Effendi, Tadjuddin Noer.

1985 Masalah Ketenagakerjaan di Pedesaan dan Strategi Penanganannya. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: CV Rajawali.

Lee, Everett S.

1985 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta; PPK-UGM.

Magenda, Burhan D.

1983 Manusia Kota Besar: Contoh dari Surabaya. **Widyapura**. Th. IV. No. 2.

Mantra, Ida Bagoes.

1985 **Migrasi Penduduk di Indonesia. Suatu Analisis Hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1980**. Yogyakarta: PPK-UGM.

⁸ Lebih menarik lagi, pada situasi krisis ekonomi tahun 1997-2006 ini kecenderungan untuk mendirikan bangunan tidak berkurang, baik melalui proyek *real-estate* maupun rumah pribadi.

Owens, Edgar., dan Robert. Shaw.

- 1983 **Pembangunan Ditinjau Kembali. Menjembatani Gap antara Pemerintah dan Rakyat.** Diterjemahkan oleh A.S. Wan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sjahrir, Kartini.

- 1986 **Tukang-tukang di Jakarta, Suatu Jaringan Kerja.** **Prisma.** Th. XV. No. 9.

Sly, David F., dan J. Michael Wrigley.

- 1985 **Migration Decision Making and Migration Behavior in Rural Kenya.** Dalam James T. Fawcett. **Migration Intentions and Behavior: Third World Perspective, A Special Issues of Population and Enviornment.** New York: Human Science Press,Inc.

Standing, Guy.

- 1987 **Konsep-konsep Mobilitas di Negara sedang Berkembang.** Yogyakarta: PPSK UGM.

Stelle, Ross.

- 1985 **Mobilitas Pekerjaan dan Penghasilan Migran di Surabaya.** Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.

Bab 6

Petani Kota

Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang
Urban

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto,
dan Usman Mulyadi

Pertumbuhan Kota dan Marginalisasi Pertanian, Sebuah Pendahuluan

Kota-kota di Indonesia, khususnya Jawa, tumbuh dan memiliki multi fungsi. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, misalnya memiliki nama *akronim* yang mengikuti namanya, yaitu INDAMARDI, artinya industri, perdagangan, maritim dan pendidikan. Nampaknya, hal ini merupakan pola yang lazim dari pertumbuhan kota-kota di dunia. Kota tumbuh sebagai tahap lanjut dari pedesaan tatkala manusia mengembangkan kemampuannya yang tidak lagi sekedar *food gathering*, tetapi menjadi *food producing*, yaitu bercocok tanam. Revolusi peradaban pertama inilah, pertanian, kemudian menuntut golongan pekerjaan lain di luar pertanian. Golongan pertama adalah mereka yang menjaga kekayaan atau produksi dari pertanian, membentuk pemimpin yang *primus inter pares* dan tentara. Golongan kedua adalah pedagang yang menjual atau menjadi perantara antara petani dan kelompok masyarakat lain. Kedua golongan ini berada di wilayah yang disebut kota dengan bangunan benteng di sekitarnya atau *gilda-gilda* pada abad Pertengahan di Eropa (lihat Sukadana, 1983: 57-74; Nas, 1984: 2-3).

Multi-fungsi ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia. Kota Surabaya awalnya memang merupakan desa (*wanua*) di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha pada masanya, antara lain Kajuruhan, Mataram Hindu, Singhasari dan Majapahit. Karena posisinya berada di pantai, desa ini tidak saja sebagai desa pertanian, tetapi juga tumbuh sebagai pelabuhan (Soekadri, 1996: 5-23). Pada masa selanjutnya, menjadi kota syahbandar (Majapahit, abad 14-15), sekaligus penyebaran agama Islam semasa Sunan Ampel dan penerusnya (lihat Faber, 1931: 5-20), dan terutama sesudah 1870, kebijakan *Liberalisasi Ekonomi* di masa pemerintahan kolonial Belanda, berubah sebagai kota industri dan perdagangan, di samping sebagai pusat pendidikan (Handinoto, 1996: 47-127).

Kota Surabaya ini tumbuh meluas dan menjadikan daerah-daerah sekitarnya sebagai *hinterland*, penyangga. Pertumbuhan ini sebenarnya tidak lain untuk menopang aktivitas perkebunan di wilayah-wilayah pedalaman *Oost Java Provincie* (Jawa Timur). Industri yang dibangun berkaitan dengan kelengkapan peralatan mesin pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan. Memang, sebelumnya telah ada pabrik-pabrik dan fasilitas lain yang lebih ditujukan untuk kebutuhan militer. Kota ini meluas hingga Wonokromo sekarang ini, akan tetapi dari sumber-sumber sejarah, yaitu *Verslag van den Toestand de Stads-gemeente Soerabaja* tahun 1870-1940, masih tercatat sebagian besar orang-orang bumi putera bekerja di sawah. Artinya, pola pemukiman tumbuh mengikuti jalur transportasi, meski bergerak di dalam satu garis lurus, tetapi tiga arah, yaitu ke Gresik (*Greesse*), Mojokerto (*Majakerta*), dan Sidoarjo (*Sidaharja/Sidakare*).

Hingga tahun 1970-an, wilayah Sedati, sekitar 20 km dari pusat kota Surabaya dan masuk wilayah Sidoarjo, masih dikenal sebagai daerah *gudang beras*. Selain dipanen dari wilayahnya, beras tersebut dipasok dari wilayah pertanian Surabaya. Melalui program pembangunan lima tahun (PELITA), hampir semua

sawah tersebut memiliki saluran irigasi (teknis) yang mengambil air dari Kali Surabaya (Mas). Pertumbuhan pemukiman, pusat-pusat perdagangan dan industri telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. Meskipun demikian, wilayah pertanian tersebut masih tersisa. Pada tahun 1999, jumlah luas lahan sawah sebesar 2.153 ha, dengan rincian 1.604 ha sawah tadah hujan, 305 ha sawah beririgasi teknis, 153 ha semi teknis dan 91 ha desa (irigasi non PU). Dari wilayah persawahan tersebut, kota ini bisa menerima hasil panen 2.730 ha dengan rata-rata produksi 50,77 kwintal/ha dan jumlah keseluruhan 13.859, produksi yang terkecil dibandingkan wilayah lainnya di Propinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2003: 165-175).

Dengan berbagai sarana pendidikan dan tersedianya lapangan kerja *off-farm* (sektor industri dan perdagangan), keluarga-keluarga petani asli Surabaya ini kemudian beralih ke sektor pekerjaan lain. Tanah sawahnya dijual dan didirikan pemukiman, pusat perdagangan atau industri. Uang ganti itu dikenal dengan istilah *uang landasan*. Karena dalam jumlah besar, sering mereka kemudian menjadi keluarga yang konsumtif. Seperti halnya di Jakarta, meski terjadi mobilitas pekerjaan ke sektor di luar pertanian oleh masyarakat petani asli, namun ternyata sektor pertanian tetap menampung petani-petani (penggarap) di luar Surabaya. Produksi tidak saja beras, melainkan sayur-sayuran hingga tanaman hias.

Meski telah ada penelitian tentang petani kota di Yogyakarta (Setyobudi, 2001), hasil pengamatan awal keadaan kaum tani di Surabaya ini berbeda dengan di Yogyakarta. Bila Setyobudi (2001) mencermati kaum tani yang merupakan penduduk asli Yogyakarta, seperti juga yang diteliti oleh Koentjaraningrat (1976) pada petani buah-buahan di Selatan Jakarta, yaitu kecamatan Pasar Rebo, desa Ciracas dan Cilangkap tahun 1972, maka penelitian ini mencermati *ekspansi* masyarakat petani di luar kota besar (Surabaya), memasuki ruang-ruang yang

kosong, atau mempertahankan lahan sawah pertanian hingga pemiliknya menjual ke investor atau melakukan alih fungsi sawahnya.

Sementara ini, sejumlah ahli kependudukan, khususnya kajian perkotaan, mencermati perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, selain karena faktor-faktor pendorong (*push factor*) di daerah asalnya, seperti sempitnya lapangan pekerjaan, ditambah dengan produk dari kurikulum pendidikan yang *bias kota*, dan faktor-faktor penarik (*pull factor*) di daerah tujuan (kota), seperti lapangan kerja yang terbuka, penuh dengan kemudahan dan kelengkapan sarana kehidupan. Mereka yang pindah dari desa selalu diduga mencari pekerjaan di sektor formal, yaitu di kantor atau pabrik, namun sering tidak disadari sebenarnya telah memiliki pilihan sendiri berdasarkan informasi yang dipunyai.

Menjadi masalah menarik kemudian, ketika mereka pindah ke kota dan tetap mempertahankan pekerjaan lamanya. Persoalannya, di lingkungan pedesaan mata pencaharian, dalam hal ini pertanian, telah membentuk sistem yang mendukung, seperti organisasi kelompok tani, HIPPA (Himpunan Pemakai Air) dan Petugas PPL. Hal ini berbeda dengan lingkungan barunya, jaringan semacam itu tidak ada. Kalau pun ada, fungsinya tidak berjalan lebih maksimal dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan berkaitan dengan kasus ini adalah pola migrasi dan strategi adaptasinya.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil penelitian ⁹ yang dilakukan pada tahun 2004. Lokasi penelitian ini berada di Surabaya,

⁹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

khususnya daerah sekitar Ketintang, Kebonsari dan Karah. Wilayah itu meninggalkan jejak-jejak pertanian pada masa lalu Kota Surabaya. Hal itu ditandai dengan bekas kompleks pabrik beras di Jalan Ketintang, tepatnya persis berada di depan kantor kelurahan. Lahan pertanian ini lambat laun tergerus oleh perumahan.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan perpektif etnografis. Tim peneliti mengamati keseharian para petani kota dan melakukan wawancara yang mendalam. Pengamatan itu terekam dengan baik melalui lensa kamera. Gambar memang tidak terlalu terfokus karena harus mengambil jarak dengan para pelaku. Para pelaku tidak terbiasa bisa diambil dengan jarak yang dekat. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi dari kedalaman hasil penelitian. Langkah berikutnya, hasil pengamatan dan wawancara mendalam direkonstruksi dan dianalisis menjadi satu tema tentang perjuangan kaum urban yang memasuki wilayah kota.

Tidak Ada Rotan, Akar pun Jadi, Tidak Ada Pekerjaan Menjadi Petani Tidak Masalah

Petani Asli dan Petani Migran

Di kota besar, seperti Surabaya, akan mengalami kesulitan bila mencari orang yang pada waktu pagi hari berjalan ke luar rumah dengan membawa cangkul dan satu tangan lainnya membawa *bontotan* (bekal makanan) yang dibungkus kain atau dengan menggunakan *rantang*. Apalagi, bila ia menggunakan *caping*, topi berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Di waktu lain, ia membawa *alat pantun*, yaitu kayu persegi panjang dengan sejumlah besi yang menancap, sehingga berbentuk seperti sikat sepatu. Kayu tersebut dihubungkan dengan gagang yang terbuat dari kayu pula. Alat itu digunakan untuk membersihkan atau

menyiangi *gulma*, tanaman pengganggu. Itulah gambaran seorang petani dan sangat sulit didapati di Surabaya, apalagi di pusat kotanya. Bila ada yang membawa cangkul, lebih pasti mereka bekerja sebagai buruh bangunan atau tukang gali (kabel telpon, pipa PAM atau gas).

Ketika menelusuri wilayah Surabaya Utara, bila dulu masih terdapat sawah yang letaknya berpenjaran (*sporadis*) kini cukup sulit didapati, bahkan nyaris tidak ada, kecuali di daerah Surabaya Barat, seperti Tandes, Balongsari dan Lontar, meskipun dalam jumlah yang kecil. Penelitian Nur Laily Assafitri (2004) menunjukkan bahwa Kelurahan Gadel, salah satu kelurahan dari kecamatan Tandes, bila pada tahun 1993 masih ada 2 orang yang berprofesi sebagai petani dan 10 orang buruh tani, maka pada tahun berikutnya (1994) sudah tidak ada lagi, mereka beralih ke pertukangan. Tanah mereka dijual dan menjadi perumahan. Rumah mereka memang lebih baik dan diisi oleh berbagai benda-benda elektronik, seperti tv dan vcd, dan tak jarang pula memiliki sepeda motor. Namun, mereka tidak lagi menjadi pemilik tanah, kecuali sejenkal tanah untuk rumahnya. Mereka kemudian bekerja sebagai tukang di perumahan tersebut tanpa bisa membelinya. Mereka masih menyisakan tradisi *tegal desa*, sebuah upacara ritual untuk menghormati *danyang* yang melindungi desa dengan sumur *sakral*, sebuah sumur yang berada di desa tersebut. Air sumur tersebut tidak pernah habis, bahkan mampu memenuhi kebutuhan untuk tujuh “desa,” yaitu Lempung, Sambisari, Karangpoh, Tandes, Tubanan dan Balongsari. Karena airnya terus mengalir, meskipun pada musim kemarau, sumur tersebut dianggap mempunyai kekuatan supranatural dan dikeramatkan. Kalau pun ada petani di Kecamatan Tandes, Lontar hingga daerah Lidah dan sekitarnya, jumlah mereka pun juga sangat sedikit. Karena kondisi lingkungan tanahnya yang keras, mereka bercocok tanam dengan cara perladangan dan sawah tadah hujan.



Gambar 6.1
Menunggu padi menguning di tengah perumahan

Baru mendekati Surabaya Timur, daerah Jojoran, Karang Menjangan, Karang Empat, Kaliyudan, hingga Kenjeran, hingga Semampir dan Rungkut, terdapat petani sawah. Jumlah mereka tetap tidak terlalu besar. Mereka tinggal di kampung-kampung lama Surabaya dengan bentuk rumah yang sangat sederhana. Mereka bisa sebagai petani pemilik yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang, ataupun bekerja sebagai buruh tani di tanah yang dulu miliknya atau tanah yang sama, tetapi telah berganti pemilik, hanya menunggu alih fungsi ke perumahan, perkantoran atau pabrik. Bila memperhatikan saluran-saluran air di perumahan hingga ke sungai, maka masih terlihat bahwa saluran tersebut sebenarnya diperuntukan sebagai saluran irigasi. Daerah Surabaya Timur dan perbatasan Kab. Sidoarjo pada tahun 1960-an hingga 1970-an terkenal sebagai wilayah gudang besar, sebutannya adalah *beras Sedati*.

Perumahan dan perkantoran tidak melebar hingga ke pinggir pantai Surabaya Timur hingga ke perbatasan Kab. Sidoarjo karena kesulitan jalur transportasi, meskipun kini lambat laun telah merambat ke wilayah tersebut, seperti Perumahan Wiguna di Rungkut. Pada wilayah tersebut, sering terdapat

kampung-kampung dengan sawah di sekitarnya atau tambak. Kondisi rumahnya tetap sangat sederhana. *“Sekarang Mas, nggak ada orang kaya dari tani. Bila ingin kaya, iya tunggu landasan, setelah itu kerja apa saya tidak tahu,”* begitu perkataan salah seorang petani bila ditanya tentang kondisi ekonominya, bahkan anak-anaknya merasa malu kalau menyebutkan pekerjaan orang tuanya karena petani sama dengan orang miskin.

Kata *landasan* itu merupakan istilah alih fungsi dan alih pemilikan khas komunitas petani di Surabaya dan sekitarnya. Kata itu pertama kali muncul ketika pembangunan atau perluasan bandara Juanda, Kab. Sidoarjo. Pada waktu itu, sejumlah sawah terjual dan dialihfungsikan. Pemiliknya memperoleh ganti rugi dan acapkali digunakan untuk naik haji, membeli motor dan benda-benda konsumtif lainnya. Meskipun setelah itu, mereka jatuh miskin karena tidak mempunyai pekerjaan. Uangnya telah habis, barang-barangnya telah terjual.

Dari semua wilayah tersebut, kemudian tim peneliti mengarahkan perhatian di wilayah Surabaya Selatan. Khususnya, di Kec. Ketintang dan Jambangan. Kedua kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Wonocolo pada tahun 1998. Selain wilayahnya terlalu luas, jumlah penduduk (KK) telah melebihi dari ukuran penduduk per kecamatan di Surabaya, sehingga perlu dipisahkan dari kecamatan induknya. Pertambahan jumlah penduduk ini lebih disebabkan oleh perumahan baru.

Di kedua wilayah tersebut terdapat sejumlah bidang sawah yang kini dalam hitungan hari telah berubah menjadi perumahan, bahkan dalam keadaan padi yang sudah berbuah dan tinggal menunggu panen diurug tanah. Tanah itu dijual baik sebagai tanah kapling yang siap bangun, maupun dijadikan perumahan. Ada sejumlah perumahan, antara lain Ketintang Permai, Karang Agung, Gayungsari dan Palm Spring yang baru berdiri, selebihnya untuk rumah tinggal dan tempat usaha.

Bidang yang pertama berada di lingkungan UNESA, luasnya berkisar antara 2 hingga 3 ha. Sawah tersebut lebih merupakan sawah tadah hujan yang berada di antara sejumlah bangunan, antara lain di belakang Gedung P2B, di sebelah Gedung Perpustakaan dan di depan Gedung MIPA. Sebagai sawah tadah hujan, sawah tersebut ditanami hanya satu kali dalam setahun. Mungkin karena hasilnya kurang dan sering terkena banjir pada waktu paruh musim hujan, kini sering tidak ditanami. Bidang sawah berikutnya berada dekat Ketintang Permai dan Perumahan Gayung Kebonsari. Sawah di depan Perumahan Ketintang Permai kini sebagian telah dibangun perumahan baru perluasan dari Perumahan Ketintang Permai dan perluasan Gedung Depag. Keadaan yang sama terjadi di depan Pasar Karah dan Jawa Pos, sehingga harus bertarung dengan waktu.

Tidak seluruhnya petani yang mengerjakan sawah ini adalah penduduk asli daerah tersebut. Sebagian besar merupakan petani migran. Asal mereka bervariasi mulai dari daerah Pantai Utara, yaitu Lamongan dan Bojonegoro, daerah *Surabaya/Are* (Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang), dan daerah Mataraman (Tulungagung dan Nganjuk). Ada di antara mereka yang sudah menetap di Surabaya lebih dari 10 tahun, namun ada pula yang kurang dari 10 tahun, antara 2 hingga 5 tahun. Mereka tidak memiliki rumah sendiri. Mereka mengontrak rumah yang sederhana, meskipun atapnya sudah genting, tetapi dindingnya separuh dari tembok, di atasnya *gedeg* (bambu). Lantainya semen atau tegel yang lama. Air minumannya berasal dari sumur.

“Kami tidak bisa mengontrak rumah yang bagus. Harganya terlalu mahal, bisa di atas dua juta. Apalagi kalau ada air PAM, Listrik dan telpon. Untuk apa? Kami cukup mandi dengan air sumur. Listrik seadanya. Telpon, ah telpon siapa. Kalau mau, ya ke wartel. Yang penting tidak kehabisan, tidak kepanasan. Bisa tidur. Harganya murah. Bisa nabung. Buat apa kita ke Surabaya, kalau tidak membawa kaya.”

Sebagian lainnya tinggal di sawahnya. Mereka membangun gubuk dari bambu. Ukuran 2 x 2 m atau 3 x 3 m. Di dalamnya terdapat dipan untuk tidur, lemari atau kardus tempat pakaian, rak piring, peralatan masak dan makan, serta kompor. Di daerah Jambangan dan Ketintang, jumlah ini memang sedikit, karena memilih *mengontrak* di tanah PJKa yang terbilang murah, tetapi di daerah Pagesangan dan Gayungan (Kebonsari dan Menanggal), yaitu dekat Mesjid Agung, jumlahnya lebih besar daripada mereka yang mengontrak, terutama pada waktu musim kemarau, yaitu menanam *blewah* dan *timun mas*.

“...Kami memilih membangun gubuk di sini. Selain dekat dengan lahan kami, ongkosnya pun jauh lebih murah. Gedeg ini gedeg bekas. Untuk air minum, kita gali sumur. Air sumur ini tidak saja untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk menyirami tanaman. Tanaman ini tidak memerlukan air. Hanya dua kali sehari saja disirami, pagi dan sore hari. Dan, tidak perlu sampai kecembeng (tergenang, pen.).”

Umur petani dan buruh tani yang termuda adalah 35 tahun, yaitu Pak Urip dan Pak Sumaji, sedangkan tertua adalah Pak Supardi (60 tahun). Pendidikan mereka yang paling ditemukan oleh tim peneliti adalah SMP, namun sebagian besar adalah lulusan SD. Artinya, mereka sudah tidak buta huruf lagi. Bila memperhatikan tingkatan pendidikannya, apabila tidak kendala kultural, maka mereka bisa tergolong dari kelompok miskin pedesaan.

Pekerjaan mereka tidak berbeda dengan di tempat asalnya. Mereka merupakan keluarga petani dan buruh tani. Tanah mereka sempit, bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Pada pola migrasi sebelumnya, ada sebagian yang mengakui bahwa bila pekerjaan buruh tani di desa telah usai, maka mereka berpindah ke desa dan kota lain. Mereka berangkat bersama-sama, bisa pula secara sendiri. Kemudian, setelah mempunyai modal dan jaringan

sosial di kota, ada yang sebelumnya menyewa tanah sawah di kota, mereka berangkat ke Surabaya. Oleh karenanya, tempat asalnya tidak berjauhan di kota asalnya, setidaknya-tidaknya satu kecamatan dan memiliki hubungan emosional, baik sebagai kerabat, teman atau lainnya.

Pola yang demikian ini merupakan konsekuensi dari revolusi hijau dan biru. Di dalam perkembangan teknologi pertanian, bibit unggul dan teknologi pengolahan pertanian mengakibatkan penanaman padi secara relatif serempak. Hasilnya, buruh tani dan petani pemilik lahan sempit – kurang dari 0,25 ha – baik wanita maupun laki-laki tidak bisa berkerja di beberapa lahan sawah yang ada di desanya. Wanita buruh tani hanya bekerja pada waktu musim tanam, tetapi sesudah panen mereka tidak bisa lagi turut *menumbuk* padi, pemilik lahan lebih cenderung menggunakan *buller*, dan kini bahkan terdapat *buller* yang kecil yang dengan mesinnya bisa bergerak dari rumah ke rumah. Akhirnya, mereka memilih bekerja ke luar desa dengan pola pekerjaan yang sama atau relatif sama, perpindahan ke sektor non-pertanian mereka tidak secara progresif seperti pemilik lahan luas yang memiliki modal besar dari sektor pertaniannya (Wiradi, 1985: 40-48; kutip dari Sinaga dan White, 1979; Wiradi dan Makali, 1983; serta Collier dan Birowo, 1973).

Terjadinya pemilikan tanah sempit dan perumitan dalam proses pengolahan lahan ini bisa dijelaskan dalam teori *invulsi pertanian* dari Clifford Geertz (1983). Namun, perpindahan ke sektor *off-farm* dan kemudian melakukan migrasi ke kota (urbanisasi) merupakan dampak dari revolusi hijau dan revolusi biru yang merembet pada komersialisasi pertanian dan berlanjut pada runtuhnya hubungan patron-klien. Petani lahan sempit dan buruh tani (*tuna kisma*) tidak mendapat jaminan ekonomi dari pemilik tanah luas yang cenderung memperhitungan untung dan rugi. Sikap pemilik tanah luas ini terjadi karena biaya produksi padi meningkat.



Gambar 6.2.
Menjemur “gabah” di fasilitas umum

Kasus yang menarik lainnya adalah Pak Supri. Ia berusia 48 tahun, berasal dari Kab. Tulungagung. Di desanya ia bekerja sebagai pencari marmer. Artinya, desa asalnya berada dalam lingkungan yang tandus, yaitu di lereng Pegunungan Kendeng Selatan, sebuah pegunungan kapur. Pekerjaan tersebut begitu keras, ia tidak sanggup karena usianya semakin tua dan tenaganya semakin berkurang. Keadaan ini diperparah oleh kebutuhan marmer yang berkurang pada masa krisis moneter, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Fenomena ini sangat menarik karena dari sektor non pertanian di pedesaan ke sektor pertanian di perkotaan, padahal menurut Wiradi (1985) bahwa kecenderungan dimulai dari sektor non-pertanian di desa kemudian berlanjut ke sektor non-pertanian di kota. Apa yang dikatakannya, *“Meski sebagai buruh pencari marmer, di desa saya juga punya kebun yang saya tanami ketela dan jagung. Bertani sawah memang*

bal baru, tapi pekerjaan iya seperti itu saja. Saya juga tidak mengerjakan sendiri, tetapi ada penggarap yang saya upah setiap kali ada pekerjaan di sawah.”

Tabel 6.1.
Tempat Asal dan Tempat Tinggal Informan di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Kebonsari	Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro Kab. Mojokerto
Karakteristik Desa	Eks Desa Pertanian	Pertanian Perladangan dan Non-Pertanian
Tempat Tinggal	Milik Sendiri	Kontrak/Kost Di Gubuk Sawah

Penduduk asli Surabaya yang menjadi petani/buruh tani sangat sedikit. Seperti yang telah disebutkan, dari sejak dulu mereka juga berasal dari keluarga petani *gurem* atau buruh tani. Ketika lingkungan sekitarnya berubah, karena kondisi strukturalnya, yaitu tingkat pendidikannya yang rendah, mereka tidak mampu mengakses sektor ekonomi di luar pertanian. *“Iya, bagaimana lagi bisanya jadi buruh, kalau panen yang buruh tani, di hari lain buruh bangunan atau tukang becak. Sawah yang saya kerjakan ini sudah dua kali ganti pemilik. Sekarang, pemiliknya orang Sidoarjo.”*

Pola Penguasaan dan Pengolahan Lahan

Ada beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam kebijakan pertanian. Hasil pertanian berhubungan dengan kebutuh-

an masyarakat. Di dalam kebijakan skala makro ini, kemudian memunculkan target pencapaian. Di masa pemerintahan Orde Baru, berkembang wacana tentang *swasembada* beras, dan seterusnya. Artinya, mengurangi impor hasil bumi dalam kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, ada dua strategi yang dikembangkan waktu itu, sejak tahun 1970-an, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi lahan dilakukan dengan memasukkan unsur bibit unggul yang menaikkan produksi, dan penggunaan *pestisida* sebagai pembasmi penyakit dan hama lainnya, dan terakhir adalah pemanfaatan teknologi pertanian (mesin) yang membantu petani untuk melakukan percepatan pengolahan tanah dan hasil panen. Penggunaan pupuk buatan dilakukan karena intensifikasi lahan mengakibatkan tanah tidak mampu menghasilkan zat hara yang berguna bagi tanaman, sementara itu penggunaan *pestisida* merupakan konsekuensi dari bibit unggul yang tidak tahan penyakit (perhatikan Ismawan, 1985: 18-19). Program tersebut pada masa itu dikenal dengan program *Bimas* dengan *Panca Usaha Tani*, dimulai dari penanaman bibit unggul PB 5 dan PB 8, dan kemudian berlanjut hingga IR 64 (Mubyarto, 1991: 6-8). Karena program tersebut, pada awal tahun 1990-an Suharto memperoleh penghargaan dari FAO sebagai negara yang swasembada pangan (beras).

Setelah itu, hasil pertanian mengalami titik balik. Kebutuhan beras semakin meningkat dan tidak bisa dipenuhi dengan produksi lokal hingga menjelang terakhir masa pemerintahan Suharto perluasan penanaman (*ekstensifikasi*) padi di Kalimantan dengan program satu hektar lahan gambut. Kebijakan ini diambil sebagai pengganti dari lahan sawah terus berkurang di Jawa dan Sumatera akibat alih fungsi ke non-pertanian.

Selain perluasan lahan, pemerintah menempuh kebijakan diversifikasi tanaman. Pertama, hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman hama akibat penanaman padi yang terus menerus (tiga kali dalam setahun). Kedua, dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan padi. Pada kenyataannya dengan hasil produksi padi yang berlimpah mengakibatkan nilai tukar beras menurun, kesejahteraan petani tidak terjamin. Pemerintah juga mencoba menentukan standar nilai jual padi dan melakukan terus melakukan pembelian padi, terutama pada musim, oleh Bulog/Dolog dalam rangka menstabilkan harga.

Lebih penting dari kebijakan pertanian tersebut adalah kesejahteraan petani. Selain diukur dari nilai tukar beras terhadap harga *barang konsumsi* yang dibeli petani dan juga nilai tukarnya dengan harga *sarana* produksi (Mubyarto, 1991: 2), diperhatikan pula pola penguasaan tanah. Seberapa besar perubahan pemilikan tanah, di wilayah pedesaan dari tahun 1970-an hingga 1990-an telah terjadi perubahan pemilikan, yaitu polarisasi tanah, jumlah petani gurem (di bawah 0,25 ha) semakin berkurang bergeser menjadi buruh tani, sebaliknya jumlah petani pemilik lahan luas (di atas satu ha) tidak bertambah, tetapi tanah yang dikuasainya bertambah luas dan ditambah pelaku baru yang dikenal dengan *petani absentee* atau *petani berdasi*. Hal ini terjadi bahwa akibat revolusi hijau, biaya produksi pertanian meningkat – diperlukan tanah di atas 0,25 ha agar mencapai titik impas (*break event point*) antara biaya produksi dan hasilnya – akibatnya petani gurem tersebut menjual lahan miliknya, dan memilih menjadi petani penggarap dengan pola penyakapan yang tidak menguntungkan atau menjadi buruh tani yang bekerja pada waktu proses produksi, selebihnya bekerja di luar sektor non-pertanian. Hal ini terlihat pada temuan Mubyarto (1991: 3) bahwa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, dan peningkatan di sektor industri dan jasa antara tahun 1960 hingga 1988.

Petani penggarap dan buruh tani yang ditemui dalam penelitian tidak berbeda jauh dari penggambaran Mubyarto (1991) dan Gunawan Wiradi (1985), meskipun beberapa di antaranya menolak asumsi bahwa peralihan ke sektor pertanian di perkotaan ini merupakan kegagalan mereka dalam memasuki

sektor formal (industri dan birokrasi) (lihat Todaro dan Stikind, 1991: 4-33). Seperti yang dikatakan oleh mereka, *"Wong saya ini pendidikan hanya SD. Mau jadi apa di kantor, paling-paling pesuruh. Pesuruh pun sekarang banyak yang lulusan SMA, Mas!"* Mereka realitis dan ingin bekerja apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya.

Tabel 6.2.
Tempat Tinggal Pemilik di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Ketintang dan Jambangan 1. Universitas Negeri Surabaya; 2. PJKK – Kereta Api; 3. Real Estat/ Perumahan; 4. Perseorangan.	Kab. Sidoarjo Perseorangan
Harga Sewa	1. Tidak Membayar 2. Rp. 600.000,00	Rp 600.000,00

Sebagian besar dari informan ini mengerjakan sawah dengan menyewa. Sebidang tanah, dengan luas kurang lebih 0,5 ha, mereka sewa seharga Rp 600.000,00. Mereka menyewa dua tahun lamanya, hal itu berarti kurang lebih enam kali panen padi untuk wilayah Ketintang, Jambangan dan Gayung Kebonsari. Wilayah tersebut merupakan sawah beririgasi, tetapi pada sawah tadah hujan, seperti di Menanggal, empat kali panen dan dua kali panen buah, yaitu blewah dan timun mas. Sebagian besar pemilik tanahnya tidak tinggal di kelurahan atau kecamatan tersebut, tetapi tinggal di luar Surabaya.

Untuk perumahan, selain dikenakan biaya sewa – melalui perjanjian ataupun secara lisan – mereka harus bersedia merela-

kan tanamannya diurug bila *real-estat* tersebut memerlukan lahan tersebut untuk dibangun. Kini, hampir separuh lebih daerah Jambangan, sebelah jalan tol, telah diurug, dibangun oleh perumahan (*real-estat*), seperti *Palm Spring Estat* dan KPR Mandiri, serta penjualan tanah kapling dengan fasilitas jalan yang telah dibuat dan lahan yang diurug. Tim peneliti melihat bagaimana tanaman padi yang mulai menguning tersebut diurug. Begitu pula dengan Unesa, kesepakatan yang sama dilakukan juga pada petani penggarap.

Tabel 6.3.
 Status Pekerjaan Sebelum dan Sesudah dalam Pertanian
 di Surabaya

Di Desa Asal	Buruh Tani	Petani Penggarap	Petani Gurem	Non- Pertanian	Pola Hubungan
Di Surabaya					
Buruh Tani	Surabaya & Luar Surabaya	↓	↓	↓	Upah Harian
Petani Penggarap	Luar Surabaya	Surabaya & Luar Surabaya	Luar Surabaya	Luar Surabaya	Bagi Hasil atau Menyewa
Pola Hubungan	Upah Harian	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	

Tidak semuanya harus menyewa, *PJKA* tidak menetapkan harga sewa pada petani penggarap. Bila ingin menanaminya, mereka gratis, tidak perlu membayar sewa, meski ada ketentuan tidak boleh mendirikan bangunan apapun. Nampaknya, ada kebijakan dari pihak *PJKA*, daripada didirikan bangunan liar yang nantinya susah dibongkar, lebih baik tanah di sekitar rel kereta api

itu dijadikan lahan pertanian. Selain ketentuan tersebut, yaitu tidak mendirikan bangunan permanen, petani penggarap harus bersedia merelakan tanaman bila lahan tersebut diperlukan. Hal ini pernah dilakukan petugas PJKA di Gayung Kebonsari dengan cara melakukan penebangan pada tanaman pisang ketika tanaman tersebut menghalangi pandangan penjaga pintu dan masinis kereta api.

Struktur penguasaan tanah di perkotaan memang berbeda dengan di desa. Di kota, tidak ada lagi golongan tuan tanah yang memiliki tanah ratusan hektar, tidak ada petani kaya yang memiliki tanah di atas 5 hingga 10 ha, seperti pembagian Kroef (1984: 162-163), karena sebagian besar adalah pendatang akibat perluasan kota dalam fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan perniagaan, sehingga berkurang penggunaan lahan untuk pertanian (Weber, 1977: 11-23). Akibatnya, tidak ada lagi penduduk inti (*gogol*) yang memiliki tanah luas, sebagai konsekuensinya “pemilik”-nya adalah perusahaan negara, lembaga-lembaga negara dan perusahaan swasta atau perumahan.

Bila tidak sebagai penyewa, hubungan kerja antara petani penggarap tersebut dan pemilik lahannya adalah penyakapan, yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil di wilayah yang diteliti adalah *maro*, *mertelu* dan *merlima*. Di dalam *maro*, masing-masing memperoleh sebagian yang dari hasil panen, sedangkan dalam *mertelu*, petani penggarap memperoleh sepertiga bagian, dan pemilik lahan dua pertiga, sedangkan *merlima* disepakati dengan *seperlima* bagian milik petani penggarap dan empat bagian lainnya diberikan pada pemilik lahan. Kesepakatan ini bergantung pada luas tanah tersebut dan keterlibatan pemilik lahan. Semakin tanahnya luas, maka bagi hasil menjadi *merlima*, begitu sebaliknya semakin sempit maka bagi hasilnya *mertelu*. Bila hasil bagi lebih besar pada pemilik, maka pemilik mempunyai kewajiban pengadaan pupuk, pestisida, dan sering kali bibit, sebaliknya semakin kecil penerimaan pemilik, maka segala kebutuhan pertanian ditanggung

petani penggarap, begitu pula dengan kerugian akibat gagal panen. *“Wah, kami di sini lebih suka sistem menyewa daripada bagi hasil. Kalau bagi hasil, selama ini kami tidak pernah untung. Kami sering menanggung segala keperluan pertanian. Pemiliknya tinggal datang pada waktu panen. Mendingan sewa. Untung rugi kita tanggung sendiri. Dan, biasanya lebih untung.”* Oleh karenanya, seperti yang telah disebutkan, sebagian besar petani memilih menyewa daripada bagi hasil.

Di dalam menggarap sawah, mereka tidak sendiri. Sebelum bercocok tanam, mereka menyewa traktor milik orang di Sepanjang – di wilayah tersebut, meski sudah mulai bergesar, tetapi sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian penduduk. Selain karena cepat, dan bila dihitung ongkosnya penggunaan traktor jauh lebih murah.

“...Bila dikerjakan buruh tani, satu bidang memerlukan tiga hingga empat orang. Satu harinya orang dibayar duapuluh lima ribu rupiah, belum lagi sarapan dan makan siang dan ditambah dengan satu bungkus rokok. Dengan traktor, cukup membayar seratus ribu. Uang itu sudah termasuk solar dan makannya. Dengan buruh tani, sawah dikerjakan selama dua hari, dengan traktor cukup sehari.”

Meskipun demikian, tidak semuanya bisa dikerjakan oleh traktor. Dalam memperbaiki saluran air dan pematang sawah, petani penggarap harus turun tangan sendiri. Kegiatan dimulai pagi hari sekitar pukul 07.00, sesudah *sarapan* (makan pagi) petani keluar rumah dengan menenteng bekal makan siang dalam kantong plastik. *Tas kresek* tersebut berisi *rantang* yang dibungkus dengan *serbet* dan botol *aqua* untuk air putih. Ada nasi dan lauk pauk di dalam *rantang*. Sering pula bekal tersebut dibawa oleh isteri pada waktu siang. Sementara itu, cangkul ada di pundak. Dengan jalan kaki, petani tersebut ke sawah. Tak jarang, petani juga membawa sepeda atau sepeda motor *bebek*. Kalau membawa kendaraan, *tas kresek* ditaruh pada sepeda motor, sedangkan cangkul dibawa melintang di sepeda motor. Sebagian sepeda

motor itu dibawa dari desa asalnya, sebagian lainnya membeli di Surabaya. Mereka membeli sepeda motor yang murah, tidak lebih dari tiga juta rupiah harganya. Sesampainya di sawah, setelah istirahat sebentar, mereka turun ke sawah, mencangkul, dan seterusnya seperti yang ada pada tabel 5.4.

Pada waktu menjelang panen, mereka menjaga sawahnya. Caranya membuat *orang-orangan*, kemudian ditarik tali ke gubuknya. Di tali tersebut diberi bendera warna-warni dari *tas kresek* (merah, hitam dan putih) dan kaleng. Ketika burung *gelatik* yang jumlahnya ratusan hingga di tanamannya, ia dengan segera menarik tali itu, sehingga menimbulkan gerak *orang-orangan* dan bunyi dari kaleng yang saling berbenturan. Terkadang, para petani tersebut berjalan di pinggir sawah dengan membawa kayu dan tanah (*lempung*) yang dibuat berbentuk bulat-bulat. Dengan menancapkan tanah itu ke ujung kayu, petani tersebut kemudian mengayunkan, sehingga tanah terlempar jauh ke sawah dan membuat burung terkejut dan terbang.

Ketika tanaman padi sudah berusia lebih dari tiga bulan, bulir-bulir telah menguning dan padat, para petani mulai memanennya. Untuk mengerjakan tersebut, mereka menggunakan buruh tani laki-laki. Setelah disabit, padi langsung dirontokkan di tempat tersebut. Gabah biasanya telah dibeli oleh tengkulak jauh hari sebelum panen tiba, namun petani sering menjualnya sebagian saja, sebagian yang lain digunakan untuk keperluan sehari-hari. Satu kilogram gabah harganya Rp. 1.050,00, sebidang tanah kurang lebih setengah hingga satu hektar bisa mencapai 2 ton, paling rendah pernah mencapai 17 kwintal saja.

Tabel 6.4.
Kegiatan Petani Penggarap Laki-laki dari Pra-Tanam hingga Paska Panen Padi
Di Surabaya

Pekerjaan Petani	Kegiatan dalam Satu Kali Masa Tanam-Panen (4 bulan)				
	Pra-Tanam	Tanam	Tunggu	Panen	Paska Panen
07.00–08.00	ke sawah	ke sawah	ke sawah	ke sawah	Di rumah, mengeluarkan karung gabah
09.00–10.00			Menyiangi	Sebelum panen di gubuk mengusir burung.	Ke lapangan atau jalan dekat sawah
08.00–12.00	Mencangkul orang men-traktor	Menunggu buruh tani (Wanita) menanam	Narik becak/ke warung (bersama isteri)	Waktu panen menunggu buruh tani menyabit	Menjemur gabah; Nyelep, dan mengumpulkan jerami
12.00–13.00	Makan siang di sawah. Bersama dengan pengemudi traktor, dan buruh tani		Pulang ke rumah untuk makan	Makan siang di sawah. bersama buruh tani.	
13.00–14.00	Istirahat sebentar. tidur siang dan merokok	Tidur siang di gubuk	Tidur siang di rumah/ warung	Mengusir burung.	Tidur Siang
14.00–17.00	Mencangkul atau menunggu traktor	Pulang ke rumah, Narik becak atau ke warung	Narik Becak atau ke Warung	Memasukan padi ke dlm karung. Menunggu Tengkulak	Membalik gabah agar keringnya merata Membakar jerami
17.00–20.00	Membayar	Membayar buruh tani. Menutup warung. Menunggu penumpang	Mandi, dan terus Narik becak atau ke Warung	Menghitung jumlah karung gabah, Menerima uang, atau menyimpan dalam rumah.	Memasukkan gabah ke dalam karung.
20.00–04.00	Makan Malam dan Tidur	ke rumah, makan malam dan tidur	Makan malam, nonton TV (bila ada) dan tidur		

Besar kecilnya hasil panen tersebut bergantung pada beberapa hal. Pertama, penggunaan bibit unggul. Sebagian besar mereka menggunakan IR 64 atau *Beramo* (*Mamberamo*) yang berasnya punel dan wangi. Hasilnya besar, namun sering tidak tahan penyakit. Kedua, hal ini bergantung pada pemupukan, bila terlambat atau sedikit, maka hasilnya pun sedikit. Untuk pupuknya, mereka menggunakan pupuk urea. Ketiga, penyakit dan hama, untuk mencegah penyakit mereka memberi pestisida, sedangkan hama, khususnya burung dan tikus, kalau burung dengan menjaga setiap hari sebelum panen. Serangan tikus tidak terlalu besar, seperti di desa. Tikus-tikus itu lebih suka tinggal di got dan di rumah (perumahan). Untuk mencegahnya, mereka memberi racun tikus. Terakhir, gangguan yang sering dihadapi adalah musim hujan. Pada waktu musim hujan, karena salurannya sudah berubah, semakin sempit, sementara itu di daerah sekitarnya (perumahan) lebih tinggi – tepat ditinggikan – sawah sering menjadi *tempat buangan* air hujan, sehingga menggenangi tanaman yang baru berusia satu bulan. Bila tergenang lebih dari tiga hari, maka tanaman itu mati, dan petani pun harus menanam lagi.

Narik Becak atau Buka Warung untuk Mencari Tambahan

Berbeda dengan pekerjaan di luar sektor pertanian, petani lebih memiliki waktu yang longgar. Mereka bekerja pada waktu awal musim tanam, mulai dari merawat tanah dengan membajak, melakukan pembibitan, dan dilanjutkan dengan penanaman. Pada waktu menanam bibit, kaum perempuan melakukannya. Para lelakinya praktis *ngganggur*, cukup mengawasi dan memperhatikan pasokan air. Setelah penanaman, mereka cukup merawat dengan memberi pupuk dan menyiangi (*mantun*) yang dikerjakan. Hal itu berlangsung tidak lebih dari sebulan, setelah itu istirahat, dan pada bulan ketiga mulai persiapan masa panen. Pada waktu musim

panen, mereka mengerjakan seperti dalam tabel 4.4. Pekerjaan semua ini menjadi ringan dan waktu petani penggarap lebih banyak ketika mereka menyerahkan pada buruh tani dan traktor.

Setelah musim tanam, sebenarnya petani juga bisa memanfaatkan untuk mengeringkan gabah, sehingga siap di-*selep*. Masalahnya, kini sebagian besar gabah telah dijual pada waktu panen, hanya sedikit yang dikeringkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga waktu pengolahan hasil panen sedikit menyita waktu. Pada waktu masa tunggu, petani memiliki waktu yang luang, kurang lebih antara satu hingga dua bulan lamanya.

Ada beberapa petani penggarap di Surabaya ini menggunakan waktu tersebut untuk mengurus sawah miliknya di desa. Mereka biasanya merupakan petani *gurem* yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar. *“Kami terpaksa ke Surabaya karena di desa tidak ada lagi sawah yang disewakan. Mereka lebih memilih mengerjakan sendiri. Kalau di sini banyak tanah, tetapi kban tidak ada yang mau jadi petani. Karena itulah, kami memilih menyewa di sini.”* Bila sawah di Surabaya telah ditanami, selebihnya diserahkan pada anak atau istrinya untuk mengawasi, mereka kembali ke desa untuk mengolah tanahnya dan menanaminya, kemudian diserahkan pada anaknya yang lain atau kerabatnya untuk diawasi. Karena jaraknya tidak jauh, mereka bisa bolak-balik antara Surabaya dan daerah asalnya.

Seperti yang telah disebutkan pada tabel 5.4., petani penggarap yang tidak punya sawah di desanya atau buruh tani lebih memilih mengisi waktunya untuk menjadi penarik becak atau masuk ke sektor bangunan, menjadi kuli bangunan di perumahan sekitar sawahnya. Becak tersebut disewa dari pemilik di sekitar tempat tinggalnya dan bisa dibawa pulang. Becak itu disewa dengan membayar setiap hari Rp. 5.000,00 dan segala kerusakan ditanggung penyewa. Mereka bisa menyewa karena ada penghubung yang juga penarik becak. Penghubung tersebut menjadi jaminan atau dasar kepercayaan dari pemilik becak, selain

dilihat pula *keajegan* membayar setoran. Penghubung tersebut adalah tetangganya di Surabaya atau teman sekampungnya (di daerah asalnya). Ada beberapa petani juga membeli becak tersebut seharga satu juta rupiah. Rute mereka antara Pasar Wonokromo hingga ke perumahan sekitar tempat tinggalnya, seperti Gayung Kebonsari, Jambangan dan Ketintang. Satu hari, dari pagi hingga malam hari, dengan istirahat siang hari dan sore hari, mereka bisa mengumpulkan uang (bersih) hingga Rp. 30.000,00.

Pagi hari mereka keluar rumah, menunggu penumpang di perempatan jalan. Memang, mereka harus bersaing dengan *len*, *mikrolet angkutan kota*. Meskipun demikian, mereka nampaknya memiliki segmen tersendiri, biasanya penumpangnya membawa barang yang besar dan berat atau jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 1-3 km dari tempatnya mangkal, sementara itu juga tidak dilalui oleh mikrolet. Bila di perempatan tempat mangkalnya terdapat jumlah penarik becak yang besar, maka diatur di kalangan penarik tersebut secara bergiliran, bahkan mereka membentuk paguyuban penarik becak dan membatasi jumlahnya agar pendapatan stabil. *“Memang rezeki itu yang ngatur Tuhan. Tapi, kalau tidak punya paguyuban, Kalau tidak begitu, semua ingin jadi penarik becak. Padahal jumlah penumpang tetap.*

Beberapa di antara petani penggarap yang membawa keluarga, khususnya isterinya ke Surabaya dan sedikit modal, membuka warung di sekitar sawah. Warung tersebut didirikan dengan tidak secara permanen, hanya memerlukan *rombong* dengan biaya seharga satu juta rupiah bila baru, atau lima ratus ribu rupiah dengan bahan bekas. Harga tersebut tidak termasuk ongkos kerjanya – *rombong* tersebut dibuat sendiri. *Rombong* itu merupakan kotak besar dengan dua atau tiga roda di bawahnya, sehingga bisa dipindahkan. Di atasnya *rombong* itu diberi empat tonggak untuk menahan *terpal* atau *plastik* sebagai penutup dari panas matahari dan hujan. Di dalam *rombong*, terdapat rongga

kosong untuk barang-barang dan ditutup dengan papan yang dikunci dengan *gembok*.

Malam hari biasanya petani penggarap membawa sepeda motor atau becak berbelanja di Pasar Keputran atau Pasar Wonokromo. Karena berjualan makanan, mereka berbelanja sayuran dan daging, sedangkan rokok bisa diambil pada toko-toko besar dengan harga miring. Jumlah rokok yang dibelinya pun sedikit, hanya cukup untuk satu minggu. Pada waktu subuh isterinya bangun dan menanak nasi, merebus sayuran, biasanya pagi hari menu makanan yang mudah dibuat adalah *pecel*, sedangkan *peyek* sudah dibuat sebelumnya atau diganti dengan *krupuk* putih. Selain *pecel*, biasanya mereka membuat rawon atau masakan Jawa lain yang mudah diolah.

Sekitar jam 6.30 pagi, masakan telah matang, peani penggarap dan isterinya telah *sarapan*, kemudian dengan becak makanan tersebut diangkut, biasanya *rombong*, terutama bila besar, ditinggal di pinggir jalan, sedangkan perlengkapan dibawa pulang. Sekitar jam 7 pagi warungnya sudah buka, pelanggannya biasanya adalah buruh bangunan yang mengerjakan di perumahan. Buruh tersebut biasanya membuat nasi sendiri, tetapi sering pula makan di warung, terlebih lagi bila siang hari (*laut*). Selain buruh, pembelinya juga orang-orang perumahan yang tidak sempat membuat sarapan pagi, dan orang yang melewati jalan tersebut (baik berangkat kerja ke kantor atau pada waktu pulang).

Pulang Kampung Membawa Uang dan Harga Diri

Seperti yang disebutkan pada bagian awal bab ini, selain dari Surabaya, mereka berasal dari kota-kota di sekitar Surabaya, seperti daerah Pantura (Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan), ada pula yang berasal dari Jawa Pedalaman (Kab. Nganjuk dan Kab. Tulungagung). Jarak antara kota-kota tersebut dan Surabaya tidak lebih dari 200 km. Seperti halnya di kota-kota besar lainnya,

arus transportasi umum dari dan ke Surabaya hampir tidak pernah berhenti. Terminal bus Surabaya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo untuk bagian Timur dan Jawa Pedalaman, yaitu di Terminal *Bungurasih* (Purabaya), sedangkan kendaraan umum dari kota-kota Pantura di sebelah kota Surabaya berhenti terakhir di Terminal Osowilangun. Dari Terminal Osowilangun, terdapat bis kota lewat jalan tol ke Terminal Bungurasih, akan tetapi pada waktu malam hari (lebih dari pukul 18.00) kendaraan umum tersebut, dalam hal ini bis langsung ke Terminal Bungurasih, karena tidak ada kendaraan yang masuk ke Surabaya dari terminal tersebut.

Oleh karenanya, kebutuhan mereka untuk pulang kampung sudah tidak menjadi kendala. Beberapa pun orang yang akan menempuh perjalanan ke luar Surabaya akan dilayani dalam Terminal Bungurasih. Namun demikian, pada waktu menjelang hari raya calon penumpang akan berdesak-desakan dan berebut kendaraan (bis) ke tempat asalnya. Jalan-jalan ke luar kota pun menjadi padat. Biasanya, pemudik menyiasati pulang pada waktu hari H, pasti Terminal Bungurasih akan nampak lengang. Kota-kota daerah asal dari petani penggarap ini bisa ditempuh dalam waktu 3 jam pada siang hari dan 2 – 2,5 pada waktu pagi hari. Kecuali ke Bojonegoro, kendaraan umum (bis) selalu ada. Kendaraan ke Bojonegoro hanya terbatas dari pagi hari hingga pukul tujuh malam.

Beberapa petani penggarap yang memiliki sawah di daerah asalnya masih memiliki ikatan yang kuat dengan daerahnya. Mereka kembali ke daerah asal tidak tergantung pada waktu hari raya. Keharusan kembali pada waktu hari raya memang merupakan tradisi budaya petani. Menurut Eric Wolf (1985), tradisi ini mengikat kembali hubungan antar individu, antara individu dan keluarga, antar keluarga, dalam pola interaksi kemasyarakatan. Ketidakhadiran individu akibat perpindahan ke kota mengurangi interaksinya dengan masyarakat se-desanya, renggang dan perlu

diikat kembali. Hal yang sama dicermati oleh Clifford Geertz (1989), ikatan hubungan itu tidak saja kepada saudara dan tetangganya yang masih hidup, tetapi juga kepada leluhurnya yang dimulai pada waktu menjelang puasa, yaitu *nyadran*. Dalam aktivitas membersihkan kubur ini, seluruh jaringan kekerabatan *alur waris* tersambung kembali. Sementara itu, *rijaya* bukan sekedar *idul fitri*, perayaan satu syawal sebagai tanda berakhirnya bulan puasa dan kembali ke *fitrah*-nya, tetapi sebagai *slametan urip*, ucapan syukur atas keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga. Semua individu didamaikan, direkat kembali sebagai komunitas petani yang telah bergeser.

Kewajiban-kewajiban sosial inilah masih melekat, meski mereka telah berpindah ke kota sekalipun. Namun, pada kasus ini sebagian petani penggarap yang didesanya sebagai petani gurem memiliki ikatan yang lebih kuat karena tanah yang dimilikinya. Tanah tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan pada kerabatnya, anak, isteri atau tetangganya untuk dikerjakan, tetapi setelah habis tanam di Surabaya ia pergi ke desa untuk mengolah tanah dan menanam padi di lahannya. Hal itu bisa berlangsung selama satu minggu lamanya, sementara itu lahan di Surabaya akan dijaga oleh buruh tani, sesama petani penggarap se-desa atau isteri dan anak-anaknya.

Pada waktu pulang ke desa dalam keperluan ini, mereka membawa uang secukupnya dan sedikit oleh-oleh untuk kerabatnya. Ketika kembali ke Surabaya, sering pula mereka membawa hasil bumi dari desanya, seperti kelapa dan beras. Berbeda pula pada waktu hari raya, mereka akan membawa uang dan oleh-oleh yang jauh lebih banyak. Di luar uang tranpor, uang saku mereka bisa mencapai di atas satu juta rupiah (informan enggan menyebut besar riil nilai uang tersebut).

Karena biasanya kembali ke Surabaya seminggu setelah lebaran, semua harta bendanya ditiptkan agar dicuri. Bila memiliki warung, maka rombongan dibawa pulang ke tempat

kontrakan, begitu pula becak dikembalikan ke pemiliknya atau diparkirkan di Wonokromo dengan sistem harian. Untuk rumah berikut isinya, mereka serahkan kepada pemilik rumah untuk menjaganya (*"dereke titip"*). Pemilik biasanya tinggal tidak di lingkungan/pekarangan rumah tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, petani tersebut menyediakan khusus oleh-oleh dari desa dan diberikan pada saat kembali dari desa.

Penutup:

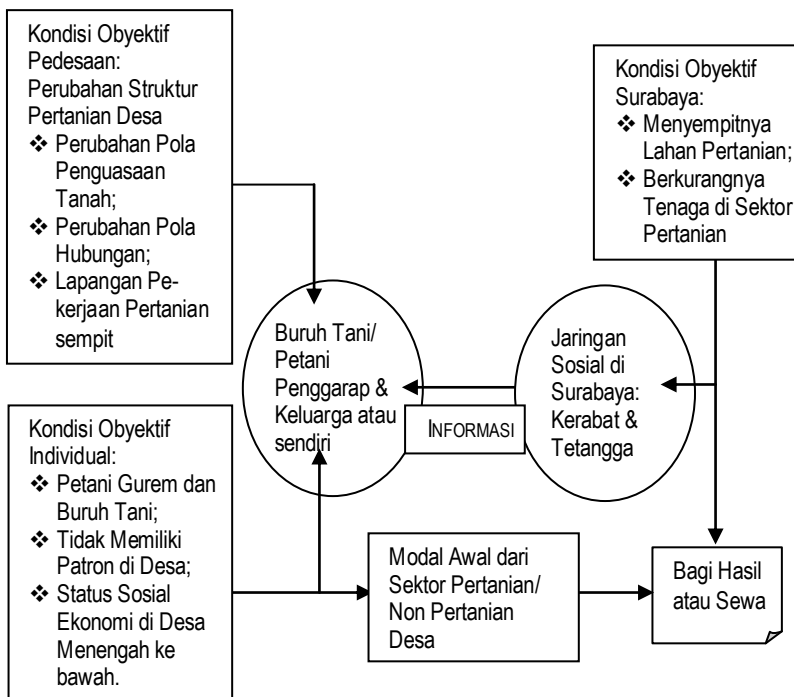
Analisis Ringkas tentang Sektor Pertanian di Kota

Pergeseran struktur penggunaan lahan di perkotaan sebenarnya terjadi tidak saja di Surabaya, tetapi seluruh kota di Indonesia. Bila dalam catatan sejarah, daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat semula merupakan daerah pertanian yang subur, masyarakat aslinya, Betawi, merupakan petani buah yang andal. Namun, pada tahun 1960-an hingga sekarang telah terjadi alih fungsi lahan menjadi bangunan perkantoran dan perumahan, dan sebagian lain menjadi pabrik. Sawah Besar di dekat wilayah Gambir dan Kebon Jeruk tinggal nama yang mengingatkan fungsi lahan tersebut, begitu pula kampung Condet yang semula dipertahankan keasliannya telah mulai menghilang (perhatikan kasus petani buah di Jakarta oleh Koentjaraningrat, 1976: 97-188). Penetapan cagar budaya tersebut hanya memberi sedikit rintangan arus alih fungsi lahan. Kini, masyarakat Betawi tergusur ke Selatan, ke arah Depok, seperti Setu Babakan, Srengseng Sawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan (*Jawa Pos*, 26 Oktober 2004, "Pariwisata. Pemprov Dirikan Museum Betawi"), meskipun terdapat pula kantong-kantong di perkotaan. Untuk mempertahankan eksistensi kulturalnya, mereka membentuk organisasi kemasyarakatan, *Forum Betawi Rempug*.

Begitu pula yang digambarkan oleh Setyobudi (2001) di Yogyakarta, sawah-sawah lambat laun mulai menghilang dari kota

tersebut. Salah satu di antaranya yang mempercepat proses tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar. Jalan lingkar tersebut kemudian memudahkan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan. Wilayah Sleman dan Bantul di pinggir kota Yogyakarta telah berubah menjadi perumahan dan kampus. Hal yang sama terjadi di Semarang, Medan, Makasar dan kota-kota lain di Indonesia. Artinya, jumlah petani di kota pun lambat laun juga berkurang dan menghilang, pekerjaan tersebut menjadi langka. Mereka yang tidak mempunyai akses ekonomi perkotaan akibat kondisi strukturalnya, seperti pendidikan, akan memasuki sektor informal dan sektor yang kurang lebih serupa, yaitu menjadi buruh bangunan.

Bagan 6.1.
Perubahan dari Petani Desa ke Petani Kota



Sementara itu, di wilayah pedesaan, seperti yang telah dicermati oleh ahli-ahli pedesaan, telah terjadi perubahan struktur penguasaan tanah. Mulanya, perubahan itu disebabkan pola pewarisan kemudian diikuti oleh perumitan-perumitan pengolahan sebagai strategi adaptifnya. Pola yang demikian ini diistilahkan oleh Clifford Geertz (1983) sebagai *invulasi pertanian*. Pada tahap selanjutnya, revolusi hijau dan biru telah menciptakan komersialisasi dalam pertanian, hubungan patron-klien menjadi runtuh, dan terus berlanjut hingga memunculkan polarisasi penguasaan tanah (lihat Wiradi, 1985) dan petani berdasi.

Akibatnya, kelompok petani gurem dan buruh tani tidak memiliki akses ekonomi di lingkungan sendiri. Dengan jaringan sosial yang dimilikinya, mereka berpindah ke kota, terlepas ada tidaknya tujuan awal untuk memasuki sektor formal (industri) atau telah ada kesadaran (empati) atas kemampuannya untuk memasuki sektor pertanian di kota, buruh pabrik dan buruh bangunan. Di dalam kasus penelitian ini, mereka memasuki sektor pertanian yang “sudah” ditinggalkan oleh masyarakat kota, kecuali mereka yang masih bertahan, meski hanya menjadi buruh tani. Dengan modal yang dibawa dari desa, mereka tidak lain menjadi buruh tani semata tetapi telah menjadi petani penggarap.

Menjadi petani penggarap merupakan salah satu strategi adaptif mereka di perkotaan. Ada strategi lainnya, yaitu membuka warung dan narik becak. Pekerjaan yang mudah dan/atau tidak jauh dari lingkungan pedesaannya. Hasilnya, selain untuk mengembangkan bodal usaha, mereka juga mengirimkannya ke daerah asalnya, bahkan ada pula yang menabung dan berharap dapat membeli sawah tersebut dari pemilik lahan tersebut. Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi daya tarik bagi mereka yang memiliki keahlian yang sesuai dengan sektor ekonomi perkotaan, tetapi juga menghimpun mereka yang tidak memiliki keahlian.

Daftar Pustaka

Assafitri, Nur Laily.

- 2004 Tradisi Tegal Desa di Kelurahan Gades, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya tahun 1970-2000. **Skripsi**. Surabaya: FIS-Unesa.

BPS Jawa Timur

- 1998 **Jawa Timur dalam Angka 1997**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.
2000 **Jawa Timur dalam Angka 1999**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.
2001 **Jawa Timur dalam Angka 2000**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.
2003 **Jawa Timur dalam Angka 2002**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

Faber, G.H. von.,

- 1931 **Oud Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's eeste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van gemeenteraad (1906).
1933 **Nieuw Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's voornamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931.

Geertz, Clifford.

- 1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia**. Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
1989 **Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa**. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta; Pustaka Jaya.

Handinoto.

- 1996 **Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940**. Yogyakarta: Andi.

Ismawan, Bambang.

- 1985 Pendidikan yang Diperlukan untuk Pengembangan Pedesaan. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: Rajawali.

Koentjaraningrat.

- 1976 Petani Buah-buahan di Selatan Jakarta. Dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat, **Indonesia. Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia.

Kroef, Justus M. van der.

- 1984 Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. **Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa**. Jakarta: Gramedia.

Kustiwan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1 Tahun XXVI.

Labib, Muhammad.

1990 Beberapa Masalah Kebijakan Perbaikan Pemukiman di Perkampungan Kota Surabaya. **Masyarakat, Kebudayaan dan Politik**. No. 4 tahun III. Surabaya: FISIP Unair.

Lee, Everett S.,

1980 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta: PPSK UGM.

Mubyarto,

1991 **Menerawang Masa Depan Pertanian Indonesia**. dalam Mubyarto, et.al. Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan. Yogyakarta: P3PK UGM.

Putra, Shri Ahimsa.

1985 Urbanisasi sebagai Proses Budaya. **Bulletin Antropologi**. No. 1.

Rusli, Said.

1985 **Pengantar Ilmu Kependudukan**. Jakarta: LP3ES.

Setyobudi, Imam.

2001 **Menari di Antara Sawah dan Kota. Ambiguitas Diri, Petani-petani Terakhir di Yogyakarta**. Magelang: Inodnesiaterra.

Sukadana, A.Adi.

1983 **Antropo-ekologi**. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekadri, Heru.

1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan**. Surabaya: IKIP Surabaya.

Tjandrasasmita, Uka.

2000 **Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia**. Kudus: Menara Kudus.

Todaro, Michael P., dan Jerry Stikind.

1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota**. Jakarta: Gramedia.

124 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Verslag van den Toestand der Stadsgemeente Soerabaja over 1930.
Weltevreden-Soerabaia: NV Koninklijke Boekhandel en Drukkerijen G.
Kolff & Co.

Weber, Max.

1977 Apa yang disebut Kota? Dalam Sartono Kartodirdjo. **Masyarakat Kuno dalam Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Wolf, Eric.

1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Jakarta: Rajawali.

Wiradi, Gunawan.

1984 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 7

Petugas *Cleaning Service*

Berharap di Sektor “Formal”, meski Harus Cerdik dan Tabah

Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo,
dan Arief Sudrajat

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi fenomena perkotaan yang selalu hadir. Dilihat dari jumlahnya, kemiskinan di perkotaan akan bertambah karena dua hal yaitu: pertama, penambahan alamiah—lebih banyak kelahiran daripada kematian, dan yang kedua, migrasi orang-orang pedesaan yang miskin ke kota. Dengan kata lain, golongan miskin di kota-kota besar di Indonesia meliputi para migran dan orang-orang yang lahir di sana. Jumlahnya sangat tergantung dari definisi yang diberikan kepada kemiskinan. Collin Clark dan Sayogyo mengajukan ukuran yang hampir sama untuk mengukur kemiskinan. Sayogyo (1978: 3-14), misalnya, mengukur kemiskinan dengan menggunakan ukuran setara dengan beras. Orang disebut miskin jika penghasilannya kurang dari 320 kg beras di desa dan kurang dari 480 kg beras di kota tiap jiwa tiap tahun. Sayogyo juga membedakan golongan berpenghasilan rendah ini menjadi tiga kategori yaitu: miskin, miskin sekali, dan sangat miskin. Namun ukuran ini tak dapat menjelaskan meningkatnya jenis kebutuhan pokok lainnya, yang tentunya ikut berubah dengan meningkatnya pendapatan.

Collin Clark, seperti dikutip oleh Papanek (1986: 223) menggunakan ukuran nilai gizi yang dibutuhkan oleh setiap orang setiap hari. Yang dibutuhkan oleh setiap orang sehari adalah 1.821 kalori. Untuk memenuhinya dibutuhkan beras per tahun 320 kg atau 0,88 kg per hari. Clark hanya memfokuskan kebutuhan makan, kebutuhan lainnya diabaikan.

BPS (Biro Pusat Statistik) memperbaiki ukuran tersebut dengan menambahkan komponen konsumsi non-pangan. BPS menggunakan ukuran setara dengan 2.100 kalori dan menambah komponen konsumsi non-pangan sebesar 6,12% hingga 17,96%. Ukuran ini sebenarnya menggunakan kriteria kebutuhan pangan minimum (*emergency food budget*), yang hanya layak diberlakukan pada situasi darurat.

Jumlah orang miskin di perkotaan sangat tergantung pada ukuran-ukuran tersebut. Jika nilai dari ukuran-ukuran itu diturunkan, maka jumlah orang miskin juga akan turun, demikian sebaliknya. Mereka yang termasuk dalam golongan berpenghasilan rendah ini adalah orang kecil yang bukan orang elit dan bukan orang kelas menengah. Mereka adalah pekerja yang tidak terdidik atau berpendidikan rendah, pegawai rendah, penjaja, tukang becak, pekerja kebersihan, dan *element of lumpen proletariat who are characterized by their struggle to make ends meet simply in order to to fulfill their subsistence needs* (Cohen, 1975: 51).

Golongan berpenghasilan rendah ini adalah sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat, daerah atau negara, yang mendapatkan penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan minimum yang seharusnya mereka penuhi. Mereka, baik pendatang maupun bukan pendatang, mempunyai cara hidup atau kebudayaan sendiri yang berbeda dengan cara hidup atau kebudayaan golongan berpenghasilan tinggi. Yang dimaksudkan kebudayaan di sini adalah kebudayaan kemiskinan yang terwujud dalam lingkungan kemiskinan yang mereka hadapi. Dengan

kebudayaan kemiskinan ini mereka dapat terus mempertahankan kehidupannya.

Di Indonesia penelitian tentang kemiskinan di perkotaan sudah cukup banyak. Misalnya, pada pertengahan tahun 1980-an sepuluh peneliti peserta PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial) Jakarta melakukan penelitian secara terpadu tentang kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah di tiga wilayah di Jakarta Timur, yaitu: Pulogadung, Jatinegara, dan Klender. Mereka di antaranya Sundoyo Pitomo, Bambang S. Sunuharyo, Agusfidar Nasution, Endang Purwaningsih (lihat Sumardi dan Evers, 1985). Penelitian-penelitian tersebut menentukan apa saja yang oleh penduduk berpendapatan rendah di Jakarta dianggap sebagai kebutuhan dasar, dan seberapa jauh mereka merasa puas, di samping perekonomian rumahtangga di perkotaan. Beberapa aspek kebutuhan dasar yang diteliti oleh peneliti peserta PLPIIS antara lain: aspek pengeluaran dan pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang intensif.

Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah merasa tidak cukup penghasilan dan penerimaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka membuat skala prioritas kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan pangan menempati urutan pertama. Hasil yang hampir sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh LP3ES dan FEUI (lihat Papanek dan Jakti, 1986). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan penduduk berpenghasilan rendah dibelanjakan untuk keperluan makan dan rokok. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada masyarakat berpenghasilan rendah proporsi terbesar dari pendapatannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan.

Penelitian Evers (1993) terhadap 1.201 rumahtangga di dua daerah hunian liar di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat

“produksi subsisten di kota” untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah. Produksi subsisten umumnya terwujud dalam produksi pangan, termasuk perikanan dan memelihara ternak. Lea Jelinek (1995) selama tigabelas tahun melakukan pengamatan tentang sebuah kampung di Jakarta mulai muncul, kembang hingga punah. Kampung itu Kampung Kebun Kacang. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana sebuah komunitas miskin di kampung itu mencoba bertahan di tengah-tengah upaya pemerintah kota untuk meratakan kampung itu. Murray (1994) dan Effendi (1993) melakukan penelitian terhadap kampung miskin di dua lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan antropologis Murray meneliti Kelurahan Manggarai dan Bangka untuk melihat dampak pembangunan terhadap kehidupan warga kampung miskin. Penelitian ini memfokuskan pada wanita yang dilihatnya sebagai hasil dari proses pembangunan. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak wanita bekerja di sektor informal, bahkan ditemukan banyak wanita yang berorientasi pada kebudayaan metropolis dengan menjadikan dirinya komoditas seksual. Effendi dalam penelitiannya memfokuskan pada pelacur, gali, dan pengusaha warung di daerah Wonosito Kotamadya Yogyakarta. Meskipun penelitian Effendi ini sudah mengungkap bagaimana masyarakat Wonosito mampu mempertahankan kehidupannya dengan membentuk sistem kehidupan, namun tidak secara khusus meneliti bagaimana mereka mempertahankan hidup. Penelitian Effendi ini dilengkapi oleh penelitian Chris Manning dan kawan-kawan (1996) di kota yang sama, tetapi fokusnya berbeda. Penelitian Manning memfokuskan pada kegunaan sector informal bagi analisis perilaku ekonomi dan struktur social ekonomi di kota dengan mengamati struktur pekerjaan dan kaitannya dengan tingkat penghasilan, stabilitas pekerjaan, dan status social ekonomi keluarga pada sebuah masyarakat kota.

Masih banyak penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan tentang penduduk miskin di perkotaan, antara lain: Gavin Jones (1986) dengan “Demografi dalam Kemiskinan di Kota, Graeme Hugo (1986) “Migrasi Sirkuler,” Gordon Temple (1986) “Migrasi ke Jakarta,” Lea Jelinek (1986) “Sistem Pondok dan Migrasi Sirkuler,” dan John L. Taylor (1993), “Kampung-kampung Miskin dan Tempat Pengelompokan Penghuni Liar di Kota-kota Asia Tenggara,” serta P de Angelino (1993) “Perbudakan Melalui Hutang Buruh pada Perusahaan Batik di Jawa.” Penelitian dan tulisan itu mengungkap dan menganalisis berbagai aspek dari kehidupan masyarakat miskin di perkotaan, namun belum ada yang secara khusus memfokuskan pada upaya yang dikembangkan oleh penduduk berpenghasilan rendah untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah kerasnya persaingan hidup di kota. Karena itu, penelitian ini akan mencoba memfokuskan pada upaya-upaya yang dibangun penduduk berpenghasilan rendah, dalam hal ini pekerja kebersihan, untuk mempertahankan kehidupannya di kota Surabaya ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004.¹⁰ Penelitian tentang upaya bertahan hidup petugas *cleaning service* ini mengambil lokasi di Surabaya. Ada beberapa alasan secara metodologis pemilihan lokasi tersebut. Pertama Surabaya sebagai kota besar, kemiskinan menjadi persoalan serius dan proporsi orang miskin di kota ini juga cukup besar. Surabaya dipilih diharapkan dapat menggambarkan karakteristik kemiskinan kota. Kedua, peneliti sudah cukup lama bertempat tinggal di Surabaya, sehingga pengetahuan tentang lokasi dan masalah kemiskinan cukup

¹⁰ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Arief Sudrajat.

memadai. Pengetahuan seperti ini penting untuk memperlancar proses penelitian secara intensif dan peneliti dapat mendalami masalah yang sedang diteliti. Pertimbangan lain adalah dari aspek biaya, tenaga dan waktu. Di dalam penelitian ini yang menjadi *informan* adalah tenaga-tenaga kebersihan yang sehari-hari bekerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Karena jumlah tenaga kebersihan di Universitas Negeri Surabaya jumlahnya hanya 40 orang, maka dalam penelitian ini ada sejumlah pekerja diwawancarai secara mendalam. Melalui wawancara dan pengamatan, pada setiap informan disusun *life history* yang menggambarkan mulai dari proses migrasi, pemilihan pekerjaan hingga upaya bertahan hidup, mulai dari pencarian pekerjaan tambahan hingga pengeluaran untuk biaya hidupnya.

Fungsi dari Waktu Kerja Berlebih dan Pendapatan

Kehidupan yang keras diperkotaan memungkinkan banyak orang memiliki siasat untuk mempertahankan kehidupan kesehariannya. Demikian juga yang telah dilakukan oleh sebagian besar pekerja *cleaning service*. Model siasat yang dibangun oleh mereka beragam tergantung situasi dan kondisi individu tersebut. Secara umum, pekerjaan *cleaning service* di Unesa dijadwalkan bekerja sejak hari Senin hingga hari Jum'at dan dimulai pukul 06.30 sampai 12.00, kemudian istirahat dan dilanjutkan bekerja mulai jam 13.00 sampai 15.00. Pada hari Sabtu dan Minggu, mereka dibebaskan bekerja dan merupakan hari libur mereka. Hari kerja ini terkait dengan perkuliahan mahasiswa dan jam kerja di Unesa.

Begitu ketatnya jadwal yang dibuat untuk mereka ternyata tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Setiap pekerja mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 325.000,- setiap bulannya. Uang sebesar itu bagi masing-masing pekerja harus diterima dengan lapang dada dan dimanfaatkan secara efisien. Kemampu-

an melakukan efisiensi terhadap penghasilan yang sangat kecil menciptakan berbagai bentuk kekreativitasan bagaimana mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan hidup.

Para pekerja cleaning service di UNESA tidak didominasi oleh satu kelompok atau jenis kelamin tertentu, namun terdiri dari beragam kelompok maupun jenis kelamin. Kelompok-kelompok tersebut terpilah ke dalam kelompok para bujangan yang tidak memiliki keluarga di Surabaya, kelompok bujangan yang bertempat tinggal di Surabaya, kelompok berkeluarga laki-laki, kelompok berkeluarga perempuan.



Gambar 7.1.
Seragam: Formalisasi Tukang Kebun

Siasat Kemiskinan Bujangan: Antara Hidup Menumpang dan Membangun Relasi

Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pengaman Sosial

Perkembangan yang sangat pesat yang terjadi di kota Surabaya, ternyata tidak begitu saja meminggirkan berbagai lembaga semacam pondok pesantren, bahkan kehadiran lembaga pondok pesantren sering merupakan acuan penting bagi para pendatang migran dari luar Surabaya. Hal itu disebabkan pondok pesantren memiliki tradisi yang kental untuk selalu saling membantu terhadap sesama terlebih terhadap para musafir yang memang menurut ajaran agama perlu dibantu. Pandangan orang-orang pondok pesantren yang baik dan selalu menyambut dengan tangan terbuka terhadap para pendatang memungkinkan beberapa pendatang dapat singgah dan tinggal di beberapa pondok pesantren yang tersebar di seluruh kota Surabaya.

Demikian juga dalam pandangan beberapa pekerja *cleaning service* di UNESA, menurut mereka, lembaga pondok pesantren merupakan lembaga yang sedikit banyak dapat membantu kehidupan mereka pada masa-masa awal menjalani kehidupan dan tinggal di kota Surabaya. Pondok pesantren merupakan tumpuan harapan awal mereka. Di samping bekerja di UNESA, mereka dapat mengaji di malam harinya.

Dari beberapa pondok pesantren yang tersebar di sekitar UNESA, Pondok Pesantren Al Idris yang berada di daerah Karangrejo Lama merupakan satu-satunya pondok pesantren yang bersedia menampung beberapa pekerja *cleaning service* untuk tinggal dan mengabdikan di tempat itu. Seluruh pekerja *cleaning service* yang diijinkan tinggal di dalam Pondok Pesantren Al Idris tersebut merupakan kelompok para bujangan dan mereka berasal dari luar kota.

Rencana kedatangan pertama mereka ke Surabaya, sejak awal memang berkeinginan untuk bertempat tinggal di pondok

pesantren. Dengan tinggal di pesantren, di samping dapat bekerja di luar pondok, mereka dapat mengabdikan dan mengaji. Bahkan menurut mereka, dengan tinggal di pondok, mereka dapat segera memecahkan berbagai permasalahan hidup pelik yang mereka hadapi setiap hari karena suasana pondok yang penuh kekeluargaan dan saling bantu membantu sangat mendukung. Apalagi suasana kota Surabaya bagi pekerja *cleaning service* dianggap sebagai kota yang asing dan penuh kekerasan.

Prosedure untuk bisa tinggal di pondok pesantren tidaklah mudah. Seseorang dapat membangun hubungan dengan secara langsung menemui kyai pondok pesantren tersebut atau diantar oleh seorang kenalan yang telah terlebih dahulu mondok di tempat itu untuk menemui kyainya. Meski hubungan telah dibangun, para pekerja *cleaning service* tidak bisa begitu saja langsung mendapatkan kamar atau ruang sendiri namun mereka harus mengawalinya dengan proses pengabdian yaitu dengan membantu berbagai macam pekerjaan di pondok terlebih dahulu. Namun pada umumnya para pekerja ini membantu membersihkan seluruh wilayah pondok yang ditempati. Selepas mereka membantu pekerjaan di pondok seperti membersihkan, mereka juga ikut mengaji dan malamnya mereka menginap di tempat seadanya yang ada di ruang-ruang kosong pondok tersebut seperti istirahat di halaman belakang masjid pondok.

Atas jasa para pekerja tersebut ikut mengabdikan membersihkan pondok setiap hari, akhirnya usaha mendapatkan respon dari pemilik pondok. Sebagai imbalan dari kyai atau pengurus pondok, mereka akhirnya mendapatkan ruang atau kamar apa adanya untuk istirahat tanpa dibebani dengan uang biaya hunian setiap bulan. Penerimaan yang total dari pihak pondok terhadap kehadiran mereka di wilayah pondok pesantren, bagi mereka begitu sangat berharga. Bagaimanapun dengan dibebaskannya mereka dari uang pembayaran hunian, mereka dapat menghemat uang yang sedianya akan dialokasikan sebagai uang kost. Implikasinya,

para pekerja dapat menabung dan uang yang mereka kumpulkan akan mereka berikan kepada keluarga yang ada di desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anang: “*Habis bekerja di UNESA, saya juga bersih-bersih di pondok. Jadi saya nempati pondok ini tidak dipungut biaya. Lumayan mas, yang penting ada tempat tidur, daripada ngekost. Duitnya nanti kan bisa dikirim ke orang tua*”.

Di balik keleluasaan para pekerja tinggal di pondok, bagaimanapun membawa konsekuensi bagi kehidupan kesehariannya. Dibandingkan dengan teman-teman pekerja lainnya, Anang merupakan salah satu pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaan sampingan. Hal itu disebabkan, selepas dia bekerja dari UNESA, ia harus melakukan kewajibannya di pondok. Waktunya habis untuk membersihkan pondok. Implikasinya, penghasilan yang ia dapatkan hanya sebatas yang ia terima dari UNESA. Di luar itu tidak ada penghasilan sama-sekali. Bagi Anang, dengan melakukan pekerjaan sambil berarti ia telah merusak akad yang telah dibuat dengan pemilik pondok. Sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan dengan pemilik pondok yang telah memberi keleluasaan menginap di sana, anang menerima dengan ikhlas jumlah penghasilan yang hanya sebesar ia terima dari UNESA saja. Di samping itu ia bisa beribadah di pondok itu.

Agar jumlah uang yang ia tabung setiap bulan dapat berlebih, Anang dan teman-temannya perlu menyiasatnya yaitu dengan mengurangi tingkat konsumsi sehari-hari dan mengatur uang makan sehari-hari. Caranya yaitu bekerja sama dengan teman di pondok untuk masak bersama. Biaya yang dikeluarkan untuk masak bersama dapat lebih ditekan bila dibandingkan dengan membeli makanan dari luar.

Membangun Relasi dengan Mandor

Kehadiran Mandor pekerja tidak selamanya mencitrakan suatu sosok yang menakutkan bagi para pekerja *cleaning service*.

Meski ada beberapa pekerja yang masih menganggap posisi mandor sebagai posisi yang menakutkan namun ada beberapa pekerja yang menganggap kehadiran para mandor sebagai *partner* bekerja. Tugas mandor adalah mengawasi para pekerja yaitu dengan melakukan proses absensi beberapa kali dalam sehari. Adanya deskripsi pekerjaan mandor seperti inilah, menurut beberapa pekerja sangat ditakuti. Bagaimanapun pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat mandor menyebabkan para pekerja akan diperingatkan, mengulangi pekerjaan bahkan akan menerima gaji yang tidak seperti biasanya atau dikurangi. “*Mas, lha wong saben dino diprekso karo mandore, yo gak iso nyelintung titik*” (Mas, karena setiap hari diperiksa oleh mandor, ya tidak bisa menyimpang sedikit)

Bagi Farid, adanya ancaman semacam itu tidak perlu ditakuti namun memang merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Kalau memang para pekerja serius bekerja, maka hal-hal yang mereka takuti tidak akan terjadi, misalnya bekerja dengan bersih atau selalu tidak pernah absen. Ia menunjukkan bahwa dirinya yang tidak pernah melanggar aturan yang dibuat oleh mandor, hingga saat ini tidak pernah mendapatkan sanksi dari para mandor. Baginya bekerja sebagai cleaning service di UNESA, merupakan pekerjaan yang menyenangkan bahkan menurutnya merupakan peningkatan karier. Hal ini disebabkan, sebelumnya ia bekerja di pabrik Palet Pasuruan (pabrik pembuatan kotak dari kayu untuk bok susu) selama beberapa tahun namun hanya digaji sebesar Rp. 200.000,-. Jadi buat apa ia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Gaji yang telah didapatkan pun mengalami peningkatan. Hal ini perlu disukuri.

Bahkan ia mampu menjalin hubungan dengan mandor secara baik. Hasilnya, Farid sekarang dapat tinggal di kamar yang disediakan oleh mandor. Kamar yang disediakan oleh mandor memang tidak cukup besar namun sudah lebih dari cukup bila

dibandingkan dengan mereka harus mencari kamar sendiri yaitu kost. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya penginapan. Tentu tidak murah untuk harga sebuah kamar di wilayah ketintang dan sekitarnya. Meskipun ia telah mendapatkan fasilitas penginapan, ia masih harus mengeluarkan biaya untuk listrik dan air setiap bulan. Mandor yang telah menyediakan tempat tinggal di wilayah Ketintang Madya II, bahkan seringkali memberinya ijin cuti untuk pulang kampung. Apakah ini bukan suatu manifestasi kebaikan mandor yang seringkali di anggap sebagai orang yang galak.



Gambar 7.2.
Mengharap Rezeki dari Sampah

Keberadaan fasilitas penginapan yang disediakan mandor, membuat Farid dapat menabung. Hanya saja selama ia tinggal di situ, ia tidak dapat meningkatkan nilai tabungannya karena tidak

memiliki pekerjaan sambilan. Pekerjaannya sehari-hari selama tinggal di Surabaya hanyalah sebagai pekerja *cleaning service*. Hal itu merupakan wujud dari kesetiaannya kepada mandor tersebut. Untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya, ia agak *sungekan* kepada mandor yang telah berbaik hati kepadanya. Di samping itu, ia juga bingung ingin bekerja apa bila seandainya pak mandor mengizinkan ia bekerja sambilan. Apalagi tingkat pendidikannya hanya sebatas SMP saja dan ia tidak banyak memiliki hubungan dengan orang lain karena ia berasal dari luar kota yaitu Pasuruan. Paling-paling ia kembali jadi pekerja *cleaning service* di tempat lain, bahkan bisa-bisa terjadi bentrokan jawal.

Kost Bareng, Urunan Mbayar

Memang tidak semua bujangan pekerja *cleaning service* UNESA yang berasal dari luar kota Surabaya, seberuntung dengan rekannya yang berhasil membangun hubungan dengan mandor maupun dengan rekannya yang diijinkan untuk tinggal di pondok pesantren sehingga rekan-rekannya tersebut dapat mengurangi tingkat pengeluarannya untuk biaya penginapan.

Bagi mereka yang tidak beruntung mendapatkan fasilitas penginapan bagaimanapun juga mereka harus mencari kost untuk bisa tinggal di Surabaya. Pilihan kost adalah pilihan yang rasional bila dibandingkan harus nglaju dari tempat tinggalnya ke tempat kerjanya. Hampir semua pekerja *cleaning service* UNESA yang mengambil kost sebagai tempat tinggal berasal dari luar kota Surabaya yang jauh jaraknya seperti Blitar, Nganjuk, Bojonegoro, dan Caruban dll. Dengan begitu, pilihan *nglaju* merupakan pilihan yang tidak rasional karena akan menghabiskan uang penghasilan mereka dalam beberapa hari. Implikasinya, mereka tidak bisa menabung dan selalu kehabisan uang untuk biaya transportasi.

Pilihan untuk mengambil kamar kost sebenarnya merupakan pilihan yang sangat berat karena biaya sewanya yang cukup tinggi untuk daerah Ketintang. Biaya kost-kostan untuk daerah Ketintang Madya yang ditempati beberapa pekerja *cleaning service* UNESA sudah berkisar antara Rp. 75.000,- sampai 100.000,- per bulannya. Belum lagi biaya yang lain seperti listrik dan air.

Mengingat biaya yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan untuk bisa tinggal di wilayah tersebut, maka pilihan mengambil kost sendiri merupakan pilihan yang sangat tidak rasional. Hal ini disebabkan, biaya yang mesti dikeluarkan harus ditanggung sendiri. Namun bila biaya yang harus dikeluarkan tersebut ditanggung bersama-sama, maka pilihan untuk kost tersebut merupakan pilihan yang sangat rasional.

Walaupun tidak semua tempat tinggal yang dikostkan itu mengijinkan untuk ditempati atau disewa untuk beberapa orang. Namun, kalau pekerja *cleaning service* jeli, mereka segera dapat menemukan. Implikasinya, biaya yang mesti mereka keluarkan untuk penginapan akan berkurang. Bahkan, ketika pemilik kamar segera akan menaikkan biaya sewa kamar tersebut bila dihuni lebih dari satu orang, bagaimanapun, biaya tersebut akan tampak lebih murah karena ditanggung berdua atau bertiga. Dengan begitu, sisa uang penghasilannya dapat digunakan untuk keperluan lain atau ditabung oleh masing-masing pekerja.

Uang sewa akan dibayarkan jika para pekerja sudah mendapatkan gaji. Beberapa pemilik rumah sudah memaklumi kebiasaan dan kemampuan ekonomi para pekerja *cleaning service* tersebut sehingga mereka tidak mensyaratkan mereka untuk membayar uang kost di depan atau harus membayar selama satu tahun di muka sekaligus. Di samping uang kost, mereka dibebani dengan uang listrik dan air yang dapat dibayar menjadi satu dengan uang kost atau masih dihitung perbulan tergantung biaya yang akan dibayar tuan rumah ke PLN atau PAM. Hal ini

disebabkan akhir-akhir ini, biaya untuk listrik dan air seringkali naik tiap satu semester. Sisa uang yang mereka dapatkan, menurutnya, masih lebih dari cukup. Apalagi kondisi mereka yang masih bujangan, sebagaimana kata Mas Muluk, “*Lumayan cukup untuk biaya hidup sendiri, karena masih bujang sih mas! Entah nanti kalau sudah punya istri. Kalau ada, sedikit-dikit saya tabung, kalau tabungannya banyak akan saya kirim ke rumah untuk orang tua*”.

Bagi mas Muluk, dengan tinggal kost bersama teman-temannya satu kamar, di samping dapat mengurangi pengeluaran juga memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan sambilan. Keinginan mencari pekerjaan sambilan ini juga terkait dengan alasan atau niat awal mulanya bekerja di surabaya. Menurutnya, niat bekerja ke Surabaya lebih disebabkan pekerjaan di desa itu tidak variatif dibandingkan di Surabaya. Di Surabaya orang bisa memilih pekerjaan yang disenangi dan bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. “*Di sini (Surabaya) pekerjaannya macem-macem, kalau di desa itu yang ada cuma tani. Itu penghasilannya nggak pasti, belum kalau musim kemarau, terus kena hama. Mendingan disini (UNESA),itung-itung cari pengalaman*”

Oleh sebab itu, selama bekerja sebagai cleaning service di UNESA, ia tidak terpaku pada satu pekerjaan namun mencoba untuk menerima pekerjaan lainnya yang jam kerjanya tidak bersamaan dengan jadwal kerjanya di UNESA. Pekerjaan sambilan yang diterima, baik Muluk maupun temannya yang lainnya tidak hanya berupa satu ragam pekerjaan saja namun bermacam-macam, misalnya ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga toko, ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjual keliling atau mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga wartel. Hal ini didukung dengan kondisi kost yang pada umumnya sangat kondusif dan memungkinkan

Hidup Bersama Orang tua

Bila dibandingkan dengan pekerja *cleaning service* UNESA sebelumnya, para bujangan yang hidup bersama orang tua, pada umumnya adalah penduduk asli Surabaya atau mereka yang sudah lama mendiami kota Surabaya. Dengan begitu, kita dapat mengasumsikan bahwa pengetahuan mereka tentang Surabaya dan hubungan antar manusia sedikit banyak lebih menguasai, sehingga dapat memiliki beberapa macam pekerjaan sampingan di luar *cleaning service* UNESA. Namun pada kenyataan di lapangan, ternyata asumsi bahwa bujangan *cleaning service* UNESA yang hidup bersama orang tua memiliki pekerjaan sampingan yang lebih banyak, tidak berlaku sepenuhnya. Beberapa informan yang berhasil diwawancarai menunjukkan bahwa sebagian besar para bujangan ini tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaannya sekarang. Meskipun demikian, ada beberapa memiliki pekerjaan sampingan yang menyenangkan dan dapat menambah keuangan keluarga.

Para bujangan yang bekerja di *cleaning service* UNESA ini, pada umumnya bekerja untuk membantu atau menyumbang memperbesar penghasilan keluarga yang dihasilkan dari kedua orangtuanya yang sama-sama bekerja. Mengenai kebutuhan sehari-hari para bujangan seperti Warno yang bekerja di lingkungan FIS UNESA, semuanya sudah dipenuhi orang tuanya meskipun dalam kapasitas yang sangat terbatas. Lebih-lebih kebutuhan dasar seperti makan, minum dan pakaian. Dengan begitu, sebagian uang hasil pekerjaannya bebas ia nikmati sendiri.

Kebutuhan hidupnya yang cukup banyak dan kewajiban untuk membantu saudara-saudaranya menyebabkan penghasilan yang sudah dibagi dua menjadi sangat sedikit. Implikasinya, ia tidak memiliki tabungan sama-sakali. Setiap gaji, uang yang ia terima, tidak sampai dua minggu sudah habis. Kondisi keuangan yang sangat labil ini, tidak membuat warno memiliki keinginan

atau hasrat untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya. Hal ini disebabkan Warno merasa aman meskipun tidak memiliki uang dan pekerjaan tambahan lainnya. Apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dianggap sudah terpenuhi dari kedua orang tuanya.

Berbeda dengan Warno, bagi Lukman, pekerja *cleaning service* UNESA di lingkungan fakultas teknik UNESA, meski ia berstatus bujangan dan hidup bersama orang tua, ia masih ingin mencari pekerjaan tambahan. Hal itu disebabkan, orang tuanya tidak semuanya bekerja. Ayahnya adalah seorang buruh di wilayah Rungkut sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Penghasilan yang hanya bertumpu pada ayahnya saja menyebabkan roda ekonomi akan goyah. Apalagi pada zaman sekarang biaya listrik dan air sangat tinggi.

Untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari, Lukman tidak hanya bekerja sebagai *cleaning service* UNESA namun di luar jam kerja, ia selalu mencari kesempatan lainnya yang sekiranya dapat menghasilkan uang. Apapun ia lakukan yang penting halal. Tingkat pendidikannya yang mencapai SMA (Sekolah Menengah Atas), tampaknya mempengaruhi kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini terbukti bahwa ia tidak sekedar mencari tambahan penghasilan dengan cara menjadi penjaga wartel saja seperti teman-teman *cleaning service* UNESA lainnya namun di balik kesederhanaannya, ia memiliki telenta atau kemampuan yang tidak terduga. Kemampuan ini nampaknya berkaitan dengan aktivitasnya ketika masa sekolah dan merupakan pengetahuan yang sangat ia sukai semasa di SMA. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kemampuan musikal.

Semasa SMA, ia memiliki sebuah *group band*. Pengalaman mendalami kegiatan itu setidaknya-tidaknya memungkinkan dia memiliki banyak relasi di antara anak-anak muda yang menggemari musik. Apalagi pada masa itu sering melakukan latihan bersama-sama di berbagai tempat. Pengetahuan semacam ini nampaknya menjadi aset bagi Lukman, karena selepas ia dari SMA dan

bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Kegiatan bermain musik tampaknya tidak ditinggalkan. Bahkan seringkali ia mendapatkan job bersama-teman-teman lamanya sebagai pemain band. Job manggung yang sering ia terima biasanya pada acara perkawinan atau ulang tahun.

Meskipun job bermain band tidak selalu ada tiap hari, namun menurutnya ada bulan-bulan tertentu *job* bermain band itu sangat ramai bahkan seringkali menyebabkan ia sangat sibuk di waktu malam hari. Implikasinya, penghasilan bulanan yang ia terima pada bulan-bulan tertentu seringkali lebih banyak berasal dari pekerjaan sampingan.

Oleh karena, ia merasa memiliki sumbangsih yang cukup signifikan terhadap penghasilan keluarga, Lukman merasa bahwa ia pun memiliki hak untuk memuat suatu kebijakan keluarga. Apalagi ia adalah anak kedua dari empat bersaudara. Kebijakan yang seringkali ia urusi berkaitan dengan kebijakan pengeluaran keluarga. Hal-hal mana yang harus di tekan pengeluarannya dan hal-hal mana yang penting bagi keluarga. Meskipun kebijakan pengeluaran keluarga sudah diatur sedemikian rupa, tampaknya pengeluaran tetap saja besar. Pengeluaran untuk makan sehari-hari dan pola konsumsi lainnya tidak begitu besar dan dapat ditekan sekecil mungkin. Hanya pengeluaran air dan listrik sangat menyedot anggaran keluarga. Pengeluaran ini sangat susah ditekan. Solusi penggunaan peralatan listrik yang hemat tetap tidak bisa memecahkan masalah ini.

Adanya beberapa pos yang sangat susah ditekan pengeluaran menyebabkan Lukman hingga saat ini tidak memiliki tabungan sama sekali. Tabungan yang ia miliki adalah tabungan berupa relasi antar teman dalam kelompok band-nya atau kelompok band di daerah lainnya. Hal ini disebabkan melalui relasi inilah ia sewaktu-waktu akan mendapatkan rejeki mendadak dan rejeki ini bisa digunakan sebagai pembayar utang bulan sebelumnya.

**Siasat Keluarga *Cleaning Service*:
Dari Pekerjaan Sambilan, Mendayagunakan Keluarga hingga
Berhemat**

Hidup Hemat, Prioritaskan Kebutuhan

Pak Jamali merupakan pekerja *cleaning service* UNESA yang bekerja di wilayah FIS. Ia sudah menikah dan memiliki satu putra. Rumah yang ia tempati merupakan rumah kontrakan yang berada di daerah Ketintang lama. Sebagai kepala rumah tangga, pak Jamali hanya mengandalkan penghasilan keluarga dari pekerjaannya sebagai *cleaning service* UNESA. Ia tidak memiliki penghasilan keluarga di sektor lainnya. Hal ini menurutnya karena pendidikannya yang hanya setamat SMP. Tingkat pendidikan ini yang menyebabkan ia hanya di terima sebagai tenaga kasar yang umumnya dipekerjakan di siang hari. Di samping itu, usahanya untuk melamar pekerjaan lainnya belum menghasilkan.

Istri Pak Jamali yang juga lulusan SMP, sampai saat ini ia masih menganggur. Ia masih belum tertarik untuk bekerja membantu suaminya. Hal ini disebabkan perkawinannya yang masih tergolong muda dan ia baru saja memiliki anak yang masih berusia 4 tahun. Usia anak yang masih belia inilah yang menyebabkan sebagian besar waktu istrinya dihabiskan untuk menjaga buah hatinya. Keinginan untuk mencari penghasilan tambahan menjadi tertahan sementara waktu. Meskipun istrinya tidak ikut membantu mencari penghasilan keluarga, Pak Jamali masih bersyukur penghasilannya bisa menghidupi keluarganya meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Menurut mereka, tingkat kebutuhan sehari-hari belum begitu banyak. Hal itu disebabkan, keberadaan anaknya yang masih kecil, sehingga tuntutan terhadap segala hal belum ada. Di samping itu kebutuhan Pak Jamali dan istri juga bisa ditekan sesuai dengan prioritasnya. Prioritas keluarga Pak Jamali adalah

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum meskipun terbilang kurang sekali.

Bilamana ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, sering Pak Jamali harus mengubah strategi konsumsinya. Ia dan istrinya mengubah pola makan yang sudah sederhana menjadi lebih sederhana lagi. Bila masih belum mencukupi, Pak Jamali sering menyiasati dengan cukup makan sekali setiap hari. Padahal kebutuhan kalori yang diterima Pak Jamali setiap hari sudah pas-pasan masih ditambah pengurangan jumlah makan setiap harinya. Kebutuhan-kebutuhan mendesak itu bisa berupa biaya membeli obat bagi anaknya. Harta paling berharga yang dimiliki keluarga Pak Jamali hanyalah sebuah TV lama yang diproduksi tahun 1970-an.

Berbeda dengan Pak Jamali, Pak Mudjib adalah seorang bapak dengan dua anak. Sebelum ia bekerja sebagai cleaning service UNESA, ia bekerja sebagai pedagang kaki lima di Wonokromo. Namun, karena usahanya tidak berkembang dengan baik, ia banting stir sebagai pekerja cleaning service UNESA yang dianggapnya sebagai pekerjaan yang dapat diandalkan karena penghasilannya pasti.

Dengan mendiami rumah berlantai tanah di daerah Kertanting Baru, Pak Mudjib hidup saling bekerja sama dengan istrinya. Kerja sama dengan istri menurutnya merupakan hal yang penting karena penghasilan yang ia peroleh dari pekerjaan cleaning service UNESA sangat pas-pasan meskipun dapat diandalkan. Di samping menerima gaji dari suaminya, istri Pak Mudjib membuka usaha cucian baju. Pada umumnya langganan yang dilayani oleh istri Pak Mudjib adalah tetangga-tetangga sekitar saja. Hasilnya cukup lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. *“Untuk nambah kebutuhan, istri saya kadang-kadang juga nerima cucian ! Iya lumayan untuk tambahan dari pada nganggur.”*

Adanya penghasilan tambahan dari pekerjaan istri bukan berarti penghasilan keluarga mencukupi. Keluarga Pak Mudjib

pun masih melakukan banyak penghematan di sana-sini. Untuk kebutuhan listrik, mereka hanya menggunakan beberapa lampu neon dengan watt yang paling kecil dan untuk kebutuhan air, mereka terpaksa menggunakan air sumur untuk segala aktivitas seperti mandi, mencuci, air minum dll.

Cleaning Service untuk Membantu Suami

Di samping kaum laki-laki, kaum perempuan juga berperan serta di dalam pekerjaan *cleaning service* UNESA. Pada umumnya para wanita yang bekerja di sini adalah sekedar membantu penghasilan suaminya yang tidak mencukupi. Ibu Sutinah misalnya, ia sudah bekerja selama 3 tahun sebagai pekerja *cleaning service* UNESA. Suaminya bekerja sebagai buruh pabrik yang penghasilannya sangat terbatas. Padahal ia masih memiliki tiga anak-anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah.

Pada awalnya, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun segera ditinggalkan karena gajinya cuma Rp. 200.000,- per bulan dengan jam kerja yang ketat. Bila dibandingkan dengan pekerjaan sebagai *cleaning service* UNESA, sangat nyata perbedaan penghasilannya. Oleh sebab itu ia dengan senang hati menerimanya. “*Di sini kerjanya ringan cuma membersihkan WC, tapi gajinya lumayan*”. Apalagi menurutnya “*lha wong saya ini lulusan SMP, mau kerja di mana lagi, disini sudah bagus.*”

Menumpang, Berjualan dan Apa lagi, asal untuk Anak

Sumiyati merupakan informan yang berstatus janda satu-satunya yang berhasil kami wawancarai. Ia sudah ditinggal mati suaminya sejak tahun 2000. Kematian suaminya merupakan suatu pukulan yang berat dalam hidupnya, karena selama ini hanya suami satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Untuk menggantikan peran suaminya, akhirnya ia bekerja ke Surabaya. Kedatangannya di Surabaya lebih disebabkan atas kebaikan saudara-

nya. Beserta dengan kedua anaknya, Bu Sumiyati diijinkan untuk tinggal serumah dengan saudaranya tersebut.

Berkat bantuan saudaranya pula Bu Sumiyati dapat bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Meskipun penghasilan yang ia dapatkan dari bekerja *cleaning service* UNESA sangat terbatas untuk biaya hidup selama di surabaya, namun ia sangat bersyukur. Apalagi sebelumnya, ia sama sekali tidak memiliki penghasilan sama sekali.



Gambar 7.3.
Menikmati sedikit, hanya berada di luar pagar kampus

Untuk menutupi kebutuhan yang besar bagi kedua anak-anaknya, dan juga biaya sehari-hari yang ia nikmati seperti listrik dan air di rumah saudaranya, ia mencoba untuk berjualan kecil-kecilan di rumah saudaranya tersbut setiap sore hari. Jualan yang

ia bawa berupa pisang goreng, dan gorengan lainnya. Keuntungannya sedikit banyak membantu kehidupan sehari-harinya dan dapat ikut menyumbangkan biaya sehari-hari kepada saudaranya.

Penutup

Perkembangan Surabaya yang pesat sedikit-tidaknya membawa berkah ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan Surabaya menjadi sebuah pusat daya tarik dan kota tujuan utama bagi kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah. Implikasinya, arus pendatang setiap hari selalu membanjiri Surabaya.

Beragamnya latar belakang yang dibawa para pendatang menyebabkan munculnya perbedaan daya serap diberbagai sektor yang tersedia. Bagi pendatang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang baik atau yang memiliki modal yang cukup, berbagai permasalahan yang dihadapi tampaknya mudah dipecahkan, apalagi ruang yang tersedia bagi mereka sangat luas. Namun bagi para pendatang yang tidak memiliki keahlian maupun modal sama sekali, ruang yang tersedia sangat terbatas. Dampaknya, kemiskinan di kota menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan.

Para pekerja subsisten kota pada umumnya membanjiri pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan yang tinggi seperti pekerjaan cleaning service UNESA. Meskipun pekerjaan ini tidak menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun untuk bisa bekerja sebagai cleaning service UNESA, seseorang membutuhkan satu tahap *entry point*. Tahap ini berkaitan dengan siasat yang memungkinkan ia dapat bekerja di suatu tempat. Biasanya mereka menggunakan hubungan teman untuk membawanya bekerja di tempat itu. Hubungan perkawanan ini

seringkali juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai persoalan sehari-hari mereka.

Siasat para pekerja cleaning service UNESA agar tetap bertahan hidup di Surabaya dengan bekerja sama dengan teman tampaknya menjadi pandangan yang lumrah. Di tengah himpitan ekonomi yang berat, hubungan perkawanan setidaknya mampu mengeliminir berbagai masalah penghasilan keuangan yang tidak memadai dengan cara mengkonsumsi secara bersama-sama. Di samping itu, hubungan perkawanan merupakan ruang psikologis yang aman karena mereka sama-sama senasip dan sepenanggungan.

Pengurangan jumlah barang-barang konsumsi hingga sampai bawah batas minimal yang layak merupakan suatu siasat yang harus mereka lakukan. Demi sesuatu, mereka rela berkorban. Dengan begitu, setiap hari merupakan hari-hari penuh pengorbanan. Demi anak, orang tua rela berkorban untuk makan sekali sehari. Implikasi pengurangan tingkat konsumsi yang berada di bawah standar minimal menyebabkan kondisi fisik mereka bekerja tidak optimal di tengah volume pekerjaan yang mengharuskan seseorang mengkonsumsi kebutuhan pada batas minimal.

Keluarga merupakan tim kerja yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, penghasilan keluarga dapat lebih baik bila dibandingkan dengan hanya kepala rumah tangga saja yang harus bekerja. Kerja sama yang baik antar anggota keluarga bagaimanapun juga akan menutupi berbagai biaya untuk pos-pos tertentu.

Di tengah ketidakberdayaan pada pekerja cleaning service UNESA, ternyata keberadaan suatu lembaga pondok pesantren, ikut berperan menyelamatkan kehidupan para pekerja cleaning service UNESA. Sebagai lembaga sosial setidaknya keberadaan pondok pesantren memungkinkan seorang pekerja bisa hidup lebih layak ditengah tekanan yang berat di Surabaya.

Daftar Pustaka

- Effendi, Tadjudin Noer,
1993 **Masyarakat Hunian Liar di Kota: Sebuah Studi Kasus di Wonosito Kotamadya Yogyakarta**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Evers, Hans-Dieter.
1982 **Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia**, Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
- Jellinek, Lea.
1995 **Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta**, Jakarta: LP3ES.
- Lewis, Oscar.
1993 “Kebudayaan Kemiskinan,” dalam Parsudi Suparlan, Penyunting, **Kemiskinan di Perkotaan**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manning, Chris, dkk,
1986 **Struktur Pekerjaan, Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Murray, Alison J.,
1994 **Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial**, Jakarta: LP3ES.
- Nasution, Agusfidar.
1985 “Buruh Perusahaan Industri Kecil dan Menengah di Jatinegara,” dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**, Jakarta: Rajawali Press.
- Noormohammed, Sidik.
1986 “Perumahan bagi Golongan Miskin di Jakarta,” dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Papanek, Gustav, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,

1986 "Penduduk Miskin di Jakarta," dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pitomo, Sundoyo.

1985 "Kebutuhan Dasar Kelompok Berpenghasilan Rendah di Kota Jakarta," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Purwaningsih, Endang.

1985 "Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Perumnas Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Sayogyo.

1978 "Garis Kemiskinan dan Minimum Kebutuhan Pangan." **Makalah** dalam Kongres II HIPIS di Manado.

Sunuharyo, Bambang Swasto.

1985 "Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga Pegawai Rendah di Perumahan Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Bab 8

Pengamen

Seniman Jalanan dan Suara-suara “Lapar” Orang Miskin Kota

Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo,
dan Sugeng Harianto

Pendahuluan

Di dalam sejarahnya, seniman jalanan telah terjadi cukup lama. Di Eropa dan Amerika, bangsa pengembara, dari rumpun Slavia, yaitu suku Gipsi telah mengembara ratusan tahun dengan bekerja sebagai peternak, penjinak binatang, dan lebih dari itu bermain musik di malam hari, bermain boneka kayu dan meramal nasib. Memang, tidak banyak catatan tentang kelompok etnik ini.

Di Indonesia, khususnya Jawa, meski seniman keraton yang mengembangkan wayang, di dalam tradisi *babad* (Tanah Jawi) diberitakan tatkala untuk menaklukan Ki Ageng Mangir, penguasa wilayah Selatan, putri sulung Panembahan Senapati, *Pembayun*, menyamar sebagai *tleddek*, *wong barang* yang mengembara dengan menyanyi dan menari hingga masuk ke wilayah tersebut. Karena kecantikannya, Ki Ageng Mangir kemudian mengawini. Kisah ini kemudian berlanjut hingga Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senapati dan dibunuh dengan membentur kepalanya di singgasananya, istirinya akhirnya ikut *bela pati*.

Pada masa kolonial seniman jalanan ini berkembang dari lingkungan perkebunan, Augustijn Michels sebagai seorang pemilik *landhuis Citeureup* tercatat pada tahun 1831 bahwa dari

budak-budaknya yang berjumlah 130 orang, terdapat 30 orang budak yang oleh V.I. van de Wall disebut pemain musik yang pandai dan serba bisa (*de onderschidene bekwame muzijkanten*). Di samping itu, ada 4 orang penari ronggeng, 2 pemain gambang, dan 2 penari topeng, bahkan orang Cina juga melatih budak mereka untuk menjadi artis dalam rombongan sandiwara Cina. Budak-budak yang pandai bermain sandiwara, menari, dan menyanyi biasanya berharga tinggi. Gaya hidup yang demikian ini sebenarnya meniru budaya keraton di mana raya memiliki sekelompok seniman, sebagian di antaranya pemain musik Barat yang tinggal di Kampung Musikanan (sebelah timur Pagelaran), dan di halaman dalam keraton terdapat bangunan *koepel*, khusus untuk tempat bermain musik (Soekiman, 2000: 90-91). Gaya hidup ini dimasukkan ke dalam budaya *indis*.

Di dalam perkembangan selanjutnya, muncul kelompok *toniel* atau *stambul*, seni pertunjukan keliling dengan kisah seribu satu malam. Musik dan lagu menyertai dalam pertunjukkan tersebut. Seni pertunjukan rakyat keliling dengan mengambil tradisi lisan juga berkembang pula, grup Ketoprak di Jawa Tengah dan Ludruk di Jawa Timur. Alat-alat musik yang digunakan tidak lengkap, seperti pada seni pertunjukan keraton, bila merupakan seni pertunjukan, maka tema ceritera diambil dari tradisi lisan, seperti pahlawan lokal Sarip Tambakoso pada Ludruk atau mengadopsi ceritera seribu satu malam dan ceritera barat. Sudah barang tentu, alur ceriteranya pasti berbeda dengan tradisi keraton.

Musik jalanan memang tidak selalui kemudian identik dengan seni pertunjukan. Ia bisa tampil sendiri, seperti *musik sinteran* yang dilakukan satu atau dua orang. Seorang memainkan alat musik *sinter*, sedangkan yang lain *nembang*, menyanyikan lagu Jawa, atau sambil bermain *sinter* ia bernyanyi. Alat musik *sinter* merupakan modifikasi alat musik cina yang berupa kotak kayu sebagai wadah resonansi dengan banyak dawai. Cara memainkan

dengan meletakkan sinter secara mendatar dan dipetik dengan kedua tangan.

Bila diamati di kota Surabaya dan sekitarnya, komunitas pemusik jalanan memang terpilah menjadi dua, kelompok pertama terdapat pelaku tradisional (lama), seperti pemusik *sinter*, gitar dan *tayub* dengan lagu-lagu Jawa dan keroncong, penikmatnya adalah kelompok urban dari pedesaan Jawa. Kelompok kedua adalah anak jalanan (anjel) dengan rentang usia bervariasi dari anak-anak hingga remaja dan dewasa. Ada berbagai modus, ada sebagian memilih bernyanyi di pinggir jalan pada saat lampu merah, ada pula bernyanyi di kendaraan umum, biasanya bis kota dan bis antar kota, dan sebagian lain bernyanyi dari rumah ke rumah. Alat musik yang dipakai mulai dari yang paling sederhana, *kecek-kecek* buatan sendiri dari sejumlah tutup botol yang dipaku pada kayu dan digoyang-goyang secara berirama hingga alat musik gitar, dari pemusik yang hanya mengandalkan suara hingga menggunakan alat *sound system* dengan tenaga aki atau baterai.

Berbeda dengan kelompok pertama yang jumlah terbatas dan cenderung berkurang, jumlah kelompok kedua ini tidak semakin berkurang, tetapi cenderung bertambah. Ada beberapa alasan memilih mengambil profesi tersebut, namun sering dicermati sebagai produk dari urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja formal menggiring pelaku pada pekerjaan informal, termasuk musik jalanan.

Bila kelompok pertama, demi memenuhi kenangan penikmatnya, lebih suka melantunkan lagu-lagu lama, seperti pemusik *sinter* dengan tembang-tembang *dandang gula* dan *pangkur*, pemusik keroncong dengan lagu-lagu pop bergaya keroncong, dan seterusnya, maka kelompok kedua mengambil dua modus, yaitu menyanyikan lagu-lagu pop yang sedang “*in*”, atau menciptakan lagu-lagu yang sederhana dengan tema yang jelas dan tidak jauh dari kehidupannya. Di dalam modus pertama, tidak semua lagu-lagu pop yang sedang “*in*” dinyanyikan, misalnya

menjelang akhir pemerintah Orde Baru, antara tahun 1996-1998, pemusik jalanan lebih suka menyanyikan lagu “Anoman Obong” (Iwans Fals) daripada lagu “Tenda Biru” (Desy Ratnasari).

Pada modus kedua, lagu-lagu tersebut bisa muncul ke permukaan tatkala ada produser yang mendengarkan dan merekrutnya ke dalam dunia rekaman, sebut saja Gombloh (alm.) dari Surabaya dengan lagu-lagu perjuangan dan cinta. Rekrutmen ke permukaan bisa terjadi pula bila pemerintah, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (dulu Depdikbud), dan sejumlah kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa menyelenggarakan ajang lomba pemusik atau lagu-lagu jalanan (perhatikan kasus Iwan Fals dalam Murray, 1992). Tulisan ini yang merupakan hasil penelitian bermaksud menggali tentang jenis dan tema musik, hubungan antara obyektif (dan subyektif) dan jenis dan tema musiknya, serta fungsinya bagi masyarakat kota.

Metode Penelitian¹¹

Penggalan data dari komunitas seniman jalanan bukan merupakan hal yang mudah. Mereka merupakan kelompok-kelompok kecil yang tersebar secara sporadis dan sangat *mobil*. Pada saat tertentu mereka dengan mudah ditemui di atas bus-bus kota (dan luar kota), di perempatan jalan, dan berjalan dari rumah ke rumah, namun pada saat lain menghilang karena takut ditangkap oleh Satpol PP karena dianggap orang-orang terlantar yang mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, mereka sebenarnya terbuka untuk diwawancarai. Melalui wawancara dan observasi, selain jenis dan musik, dapat pula digali tentang kondisi subyektif pengamen. Sementara itu, kondisi obyektif tentang per-

¹¹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto.

ubahan masyarakat dan kebijakan publik dapat diketahui dari data sekunder, seperti data statistik dan surat kabar.

Untuk analisis, ada tiga tahap yang dilakukan. Pertama melakukan pengkodean dan melakukan identifikasi terhadap kondisi obyektif dan subyektif pemusik jalanan. Dari koding ini, kemudian dibuat matriks untuk menggambarkan kondisi obyektif dan subyektifnya. Kedua, melakukan koding pada musik/lagu jalanan. Koding didasarkan, antara lain (1) jenis musik, (2) tema, dan (3) isi, (4) tempat atraksi dan (5) penikmat/pendengar (*audience*). Krippendorff (1991: 178-180), tahap ini bisa digolongkan ke dalam klasifikasi kontekstual, yaitu teknik untuk mengeliminasi jenis kelebihan tertentu dalam data dengan cara demikian menyarikan apa yang nampak menjadi konseptualisasi dasar. Diasumsikan bahwa obyek dan lebih jelasnya, kata mempunyai semakin banyak sinonim apabila semakin banyak konteks kejadiannya yang sama. Dalam tahap ini jenis dan tema musik jalanan teridentifikasi. Ketiga, menggunakan matriks yang menghubungkan antara kondisi obyektif dan subyektif terhadap jenis dan tema musik jalanan, sehingga akan nampak fungsi dari musik jalanan, apakah musik jalanan hanya sebagai tampilan rasa keindahan, ataukah sebagai proses imitasi terhadap kondisi obyektif dan subyektifnya, dan lebih dari itu sebagai kritik atau protes sosial.

Pekerjaan itu bernama Pengamen Jalanan

Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya ibarat gadis dan pemuda cantik dan ganteng yang menebarkan daya pesona dan daya tarik, yang siap untuk memikat hati siapa saja. Meskipun Kota Surabaya dikesankan sebagai kota metropolitan yang padat penduduk dan kota yang tidak ramah kepada siapa saja, namun Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berasal dari daerah-

daerah yang menjadi *binterland* Surabaya. Sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, Surabaya sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat peredaran uang, pusat hiburan, dan lainnya. Hal ini menjadikan Surabaya sebagai kota yang menawarkan daya tarik kepada masyarakat di *binterland*-nya. Sebaliknya, daerah-daerah *binterland* yang kurang maju lebih mendorong penduduknya untuk melakukan migrasi ke Surabaya.

Surabaya menawarkan potensi lapangan pekerjaan, baik sektor formal maupun sektor informal, yang sangat luas. Mereka yang tidak dapat memasuki pekerjaan di sektor formal, terbuka luas pekerjaan di sektor informal. Banyak anggota masyarakat, karena kalah bersaing atau tidak mempunyai persyaratan, tidak mampu memasuki sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali memasuki sektor informal. Di kota ini terbuka cukup luas bagi warganya untuk mencari pendapatan dari sektor ini. Sektor informal menjadi sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Salah satu pekerjaan di sektor informal di Surabaya adalah menjadi pengamen jalanan. Bagi sebagian warga kota Surabaya menjadi pengamen jalanan adalah pekerjaan. Pekerjaan ini dipilih karena mereka tidak mempunyai banyak pilihan, bahkan pekerjaan ini menjadi katup penyelamat (*safety valve*) ketika mereka terlempar dari pekerjaan di sektor informal lainnya.

Konsep sosiologi mobilitas sosial yang bersifat horizontal barangkali tepat untuk menggambarkan dinamika kehidupan para pengamen jalanan. Sektor informal memang sektor pekerjaan yang dicirikan oleh adanya mobilitas pekerjaan yang tinggi. Pada sektor informal orang mudah berganti-ganti pekerjaan. Kebanyakan pengamen jalanan melakukan mobilitas pekerjaan ini. Sebelum menjadi pengamen jalan mereka rata-rata sudah pernah bekerja.

Secara ekonomi para pengamen jalanan adalah orang-orang yang berasal dari strata masyarakat bawah. Mereka menjadi

pengamen jalanan lebih didorong oleh kondisi kehidupannya yang termarjinalkan karena mereka adalah orang-orang yang kalah ketika memasuki arena kompetisi, yang di mata mereka, yang tidak memberikan keadilan sosial. Surabaya ibarat arena kompetisi bagi siapa saja yang tidak sanggup dimenangkan oleh para pengamen jalanan, bahkan dalam arena kompetisi itu mereka mengalami ketidakadilan, seperti ditertibkan dan digusur oleh aparat birokrasi maupun aparat represif negara. Ibarat di arena pertandingan sepakbola, negara yang seharusnya menjadi wasit yang adil, justru melakukan pemihakan kepada pihak yang kuat, dan keputusan-keputusannya justru merugikan pihak yang lemah, seperti pedagang asongan, pedagang nasi, pengamen jalanan, dan lainnya.

Penertiban Berbuah Pengamen Jalanan

Kondisi kehidupan semacam itu sehari-hari dialami oleh para pengamen jalanan. Mereka menjadi pengamen jalanan salah satunya disebabkan karena mereka menjadi korban penertiban oleh aparat birokrasi dan aparat represif negara.

Muryanti dan Naning adalah dua orang di antara sekian banyak orang yang mengalami nasib seperti itu. Mak As sapaan akrab Muryanti yang berusia 46 tahun, sehari-hari mengamen berpindah-pindah tempat. Sehari-hari Mak As mengamen di Terminal Joyoboyo, halte bus depan Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani, dan Terminal Bungurasih. Mak As mengawali pekerjaannya di Surabaya dengan bekerja sebagai pedagang nasi di kawasan Terminal Joyoboyo. Bagi Mak As berjualan nasi di Terminal Joyoboyo merupakan pekerjaan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang miskin. Pekerjaan ini dia jalani sudah cukup lama yaitu sudah sekitar 10 tahun. Mak As yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dari pekerjaan berjualan nasi mendapatkan pendapatan

yang diakuinya cukup lumayan. Pendapatan ini dapat membantu pendapatan keluarga. Mak As menceritakan:

Saya berjualan nasi sudah sepuluh tahun lamanya, sebelumnya saya menjadi buruh tani di Tanggulangin. Dari jualan nasi sebenarnya saya mendapatkan hasil yang lumayan, walaupun keuntungan yang saya peroleh tidak banyak, namun setidaknya masih bisa memperoleh keuntungan dari sisa makanan untuk dimakan sendiri.

Tahun 2002 merupakan tahun buruk bagi Mak As. Warung makanan miliknya yang berlokasi di kawasan Terminal Joyoboyo menjadi obyek penertiban oleh aparatur Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya. Penertiban tersebut merupakan peristiwa tragis bagi Mak As, karena dia harus kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Sejak saat itu ia menganggur, sampai ia memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan. *“Mau gimana lagi punya warung sudah kena penertiban, ya akhirnya saya menjadi pengamen, yang penting halal,”* kata Mak As.

Di Surabaya sehari-hari Mak As bertempat tinggal bersama-sama dengan salah satu anaknya. Ia mempunyai tujuh anak dan semuanya sudah dewasa. Ia tidak menetap di Surabaya, seminggu atau bahkan sebulan sekali ia pulang ke Tanggulangin. Tanggulangin adalah desa di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, bahkan sampai sekarangpun ia pun masih mempunyai rumah dan bertempat tinggal di desa itu. Ketika berada di Desa Tanggulangin Mak As tidak jarang bekerja sebagai buruh tani.

Sebagai pengamen jalanan Mak As hanya berbekal alat yang ia beri nama kentrungan. Mak As menjalani pekerjaannya mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 12.00 siang, dan pekerjaan itu ia jalani dengan setulus hati dan tanpa beban. Bagi Mak As pendapatan dari mengamen hanya untuk menambah pendapatan suaminya yang sehari-hari sebagai tukang becak. Mak As mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 10.000 per hari.

Demikian pula yang dialami oleh Naning. Naning lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengamen di perempatan jalan yang ada lampu pengatur lalu lintas. Dia memilih tempat seperti itu tidak banyak menghabiskan tenaga dan tidak berbahaya. Perempuan berusia 28 tahun itu mengaku menjadi pengamen jalanan karena dipaksa oleh keadaan keluarganya. Dia mengaku sudah mempunyai suami yang sehari-hari bekerja secara serabutan, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Naning menceritakan suaminya sehari-hari kadang-kadang bekerja sebagai tukang becak, kadang-kadang bekerja sebagai kuli bangunan. *"Itu pun tidak pasti. Suami saya bekerja serabutan,"* kata Naning.

Bekerja sebagai pengamen jalanan, bagi Naning, sebenarnya bukanlah pekerjaan yang menarik. Untuk memutuskan menjadi pengamen jalanan tidak mudah baginya untuk memutuskan. Sebelum bekerja sebagai pengamen jalanan, Naning bekerja sebagai penjual makanan ringan di Taman Bungkul. Pekerjaan sebagai penjual makanan sudah dia geluti selama 5 tahun. Malang nasibnya, suatu hari pada tahun 2003 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Taman Bungkul. Lapak yang penuh barang dagangan miliknya dibongkar paksa oleh Polisi Pamong Praja. Kebijakan pemerintah kota menertibkan PKL di seluruh kawasan kota menjadi awal bagi dia untuk berpindah profesi. Naning menuturkan:

Mau gimana lagi mas, bisa saya hanya mengamen di jalan. Saya yang hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) bisa bekerja sebagai apa. Selain berjualan dan mengamen saya tidak mempunyai kemampuan lain. Menjadi pengamen jalan sebenarnya sangat terpaksa saya lakukan, namun saya mensyukurinya karena dapat membantu meringankan beban suami saya yang hanya bekerja serabutan.

Bencana Itu Bernama Krisis Ekonomi

Wawan dan Yanto mengalami nasib yang sama. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan, keduanya pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh pabrik. Wawan misalnya, pria yang telah menekuni pekerjaan sebagai pengamen jalanan selama tiga tahun ini, mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Gelar lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang disandanginya belum cukup untuk menjadi modal bagi dia untuk memasuki pekerjaan di sektor formal. Nasib membawanya menjadi kuli bangunan. Pekerjaan yang telah lama dia tekuni tidak memberikan harapan bagi masa depannya. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh bangsanya (Indonesia) mempengaruhi masa depan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Seperti hukum alam, hukum ekonomi *supply and demand* berlaku. Permintaan pekerjaan di sektor perumahan menurun. Bagi Wawan penurunan permintaan itu bermakna sepiunya order pekerjaan. Hal ini yang mendorong Wawan untuk memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. *“Aku dulu bekerja pertama kali sebagai kuli bangunan. Karena sepiunya pekerjaan untuk dikerjakan akhirnya aku jadi pengamen,”* kata Wawan.

Krisis ekonomi negara ini juga berdampak pada kehidupan Yanto. Pemuda berusia 33 tahun ini sebelum menjadi pengamen jalanan bekerja sebagai buruh pabrik. Yanto tidak mengetahui dengan jelas secara tiba-tiba dua tahun lalu dia mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaannya. Yanto menduga pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaannya, karena ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yanto menjalani pekerjaannya sebagai pengamen jalanan sudah dua tahun lamanya dan menjalaninya di atas bus antarkota. *“Sebelum menjadi pengamen jalanan, awalnya saya bekerja sebagai buruh pabrik. Saya tidak tahu persis entah kenapa saya di-PHK. Menurut saya, mungkin perusahaan saya sedang mengalami krisis sehingga akan bangkrut,”* kata Yanto.

Dari Loper Koran ke Pengamen Jalanan

Nasib yang sama juga dialami oleh Deni dan Termas. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan pernah menekuni pekerjaan sebagai loper koran. Deni, pemuda berusia 24 tahun, meskipun kelahiran Surabaya, nemun tumbuh dan besar di Yogyakarta hidup bersama dengan *budhe*-nya. Dia menjadi pengamen jalanan sudah sekitar 10 tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan, Deni menekuni pekerjaan sebagai loper untuk berbagai surat kabar. Sebagai loper koran Deni setiap hari mengayuh sepeda menyusuri jalan dan gang untuk mengantarkan koran ke rumah para pelanggan.

Sebagai loper koran dia awali dengan menjadi loper koran *Suara Pembaharuan* di Yogyakarta. Ketika surat kabar itu tidak terbit lagi, membawa Deni menjadi loper koran *Yogya Pos*. Pekerjaan sebagai loper surat kabar ini tidak bertahan lama, karena nasib surat kabar itu sama dengan *Suara Pembaharuan*. Kebangkrutan dua surat kabar itu membawa Deni untuk pertama kalinya memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. Deni menceritakan, “*Setelah tidak menjadi loper koran aku menjadi pengamen, itu terjadi sekitar tahun 1994-an.*”

Pemuda ini menceritakan, pertama kali menjadi pengamen hanya berbekal alat mengamen sederhana yang dia sebagai *ecek-ecek*. Alat musik ini dia buat dari tutup botol yang dirangkai dengan kayu sehingga bisa menghasilkan bunyi. Dia menggunakan alat musik ini karena dia belum bisa menggunakan alat musik gitar. Kemampuan dia sekarang memainkan gitar diawali ketika dia mengajak temannya yang bisa bermain gitar untuk mengamen. Berawal dari itu dia berusaha belajar bermain gitar, dan akhirnya bisa memainkan alat musik tersebut.

Tahun 1999 Deni pulang ke Surabaya atas permintaan ibunya. Pulang ke Surabaya bukan berarti memutus matarantai pekerjaannya sebagai pengamen jalanan. Pertama kali Deni

mengamen di Surabaya di kawasan perempatan depan Hotel Sahid Surabaya. Di kawasan itu dia hanya mengamen pada siang hari, pada malam hari dia bersama-sama temannya mengamen di warung lesehan di sepanjang Jalan Dharmawangsa.

Statusnya sebagai pengamen jalanan sudah dijalani Termas selama delapan tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan Termas pernah bekerja sebagai loper koran di kawasan Demak Surabaya. Pasar yang sepi membawanya sampai pada keputusan untuk menjadi pengamen jalanan. Pemuda berusia 20 tahun ini awalnya menekuni pekerjaan ini hanya ikut teman-temannya. Sebagai pengamen jalanan dia tidak mempunyai harapan yang banyak. Pendapatan dari pekerjaan ini, bagi dia, yang terpenting bisa dipakai untuk membeli makan, minum, dan rokok.

Sebagai anak jalanan Termas sehari-hari ditampung di rumah singgah Insani di kawasan Jagir Surabaya. Di rumah singgah ini dia bersama dengan teman-temannya, sesama pengamen jalanan, mendirikan grup musik yang diberi nama “Bilawa.” Sebagai pengamen jalanan Termas dan teman-temannya sesama anak jalan bukanlah orang-orang minimalis. Dia bersama dengan teman-temannya mempunyai obsesi tidak sekedar sebagai pengamen jalan, namun bisa menciptakan lagu dan dinyanyikan sendiri, seperti yang dilakukan oleh grup-grup musik lain yang telah mempunyai nama. Bagi Termas dan teman-temannya obsesi itu bukanlah impian, namun impian yang menjadi kenyataan. Mereka telah berhasil menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu tersebut kadang-kadang mereka nyanyikan ketika mengamen di jalanan. Termas menceritakan:

”....Pada awalnya kami mempunyai niat hanya untuk membuat puisi, sehingga lagu-lagu yang ada awalnya dari puisi. Niat bikin puisi kok malah bisa dibuat lagu. Kadang-kadang lagu-lagu tersebut dibuat untuk ngamen juga. Karena lagu-

*lagu tersebut kebanyakan bercerita tentang anak jalanan.
Sehingga pas dinyanyikan untuk ngamen....”*

Waiter Yang Menjadi Pengamen Jalanan

Nasib Iwan sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya sesama pengamen jalanan, karena dia pernah mempunyai pekerjaan tepat di sebuah diskotik. Iwan juga pernah menyandang status sebagai mahasiswa ketika dia belajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya hingga semester 3. Di tempat kerjanya yang penuh dengan hingar bingar suara musik dan gemerlap lampu itu dia pernah bekerja sebagai waitrees. Iwan bekerja di tempat itu hanya beberapa bulan, tanpa sebab yang jelas dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia bekerja membantu kakaknya menjadi distributor minyak tanah. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya usaha kakaknya tutup.

Kebangkrutan usaha distributor minyak tanah yang menjadi usaha kakaknya ini membawa pria berusia 32 tahun ini beralih ke pekerjaan menjadi pengamen jalanan. Bagi Iwan menjadi pengamen jalanan tidaklah mudah dilalui. Seperti yang dialami pengamen jalanan lainnya dia beberapa kali terkena razia oleh petugas dari pemerintah kota Surabaya. Dia menyebut razia sebagai cakupan. Iwan suatu saat terkena cakupan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kepada petugas pemerintah kota dia hanya mampu menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) pengamen. Meskipun demikian dia tidak khawatir karena sudah ada yang mengurus, yaitu pengurus dan bus Damri. Sebagai pengamen di bus kota, terutama Damri, dia harus menjadi anggota pengamen dengan diberikan tanda anggota.

Tema Lagu: Dari Tsunami hingga Demokrasi

Seni adalah cermin masyarakatnya. Dalam konteks demikian seni salah satunya dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial yang dialami masyarakat. Seni yang mengekspresikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut merupakan

produk dari kepekaan pencipta seni tersebut terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakatnya. Kesenian bagi seniman dapat dipakai sebagai salah satu media untuk mengekspresikan protes sosial atau kritik sosial. Salah satu bentuk kesenian tersebut adalah seni musik. Bagi seniman musik kebanyakan seni musik merupakan seni pertunjukan yang tidak hanya mengekspresikan rasa keindahan manusia (fungsi menghibur masyarakat), melainkan juga mempunyai fungsi ekonomi dan sosial. Melalui pertunjukan di atas panggung seniman musik dapat memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh popularitas. Tercatat nama-nama seperti Rhoma Irama, Iwan Fals, Doel Soembang, Ebit G. Ade, dan beberapa lainnya yang menjadikan seni musik sebagai fungsi sosial, yaitu untuk melakukan kontrol sosial terhadap kondisi masyarakat yang diwarnai ketidakadilan, ketimpangan, dan demoralisasi. Melalui syair lagu-lagunya mereka melakukan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat, bahkan penguasa politik.

Demikian halnya seniman (pengamen) musik jalanan di Surabaya. Bagi pengamen jalanan tidak banyak pilihan bagi mereka untuk mengakses sumber-sumber daya untuk menjamin kehidupan yang layak. Mereka di masyarakat metropolitan seperti Kota Surabaya merupakan orang-orang yang marjinal, tidak berdaya, dan terpinggirkan oleh kompetisi kehidupan yang tidak berjalan adil dan seimbang. Bagi mereka hidup di kota besar seperti Surabaya tidak banyak pilihan. Mengamen menjadi pilihan yang terpaksa mereka pilih. Bagi pengamen jalanan mengamen bukan sekedar sebagai arena untuk menjamin survival hidupnya, musik jalanan mereka menggunakan sebagai saluran untuk mengekspresikan kondisi kehidupan yang sehari-hari mereka hadapi. Musik jalanan mereka pakai untuk mengekspresikan kondisi riil kehidupan mereka secara individual dan kondisi kehidupan masyarakat di tingkat supra lokal. Mereka menggunakan seni musik untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat yang

senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya. Melalui syair lagu mereka mengekspresikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang senjang dan tidak adil. Tidak hanya mengkritik masyarakat yang senjang, musik jalanan juga oleh pengamen dipakai untuk mengawasi fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kondisi masyarakat yang senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya mereka ekspresikan melalui simbol-simbol berupa rangkaian kata-kata indah yang mempunyai makna. Simbol-simbol tersebut mereka komunikasikan secara verbal dengan alunan nada yang dapat menghibur setiap insan yang mendengarkan dan menghayatinya. Simbol-simbol yang mereka komunikasikan secara verbal merupakan refleksi realitas kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya. Pengamen jalanan terpinggirkan tidak hanya oleh kompetisi kehidupan yang tidak adil dan seimbang, melainkan juga berhadap-hadapan dengan tingkah polah aparatur birokrasi dan aparatur represif di tingkat supra lokal. Jalan dan angkutan umum merupakan arena kehidupan mereka.

Aparatur Negara, Dari Arogansi hingga Resistensi

Dalam tataran empirik dijumpai banyak fenomena aparatur birokrasi dan militer yang menjadi instrumen bagi para pemilik modal untuk menjamin kepentingan-kepentingannya, seperti kasus penggusuran perkampungan kumuh, penertiban PKL (pedagang kaki lima), dan penindasan buruh. Mereka tidak pernah membela kepentingan-kepentingan kelas proletar, bahkan ketika mereka menjadi instrumen pemilik modal mereka berhadapan dengan kelas proletar.

Para pengamen jalanan di Surabaya tidak jarang mempunyai pengalaman berhadapan dengan aparatur suprastruktur

seperti itu. Dalam memasuki arena tersebut mereka ternyata tidak jarang berhadap-hadapan dengan aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara, yang menurut para pengamen jalanan, tidak menjalankan fungsi idealnya. Di mata pengamen jalanan, aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara idealnya menjalankan fungsi pelayanan dan memberikan pengayoman kepada rakyat jelata, termasuk di dalamnya adalah kaum marginal di perkotaan. Mereka melihat dan mengalami tingkah polah aparaturnya supra lokal, yang melakukan pengejaran, menggusur, menendang, menyikut, dan merampas hak-hak hidup sesamanya, yang mengais sumber kehidupan sebagai tukang becak, pedagang asongan

Pedagang Asongan

*Kejar mengejar jadi tontonan
 Antara kamtib dan pedagang asongan
 Pedagang asongan diburu bagai buronan
 Tragedi ini terjadi di negeri ini
 Malu dong sama bumi pertiwi
 Gengsi dong sama Bu Megawati
 Pedagang asongan dirampas
 Sungguh malangkan mereka
 Becak-becak digusurin, jadi kapalkah becaknya
 Tunjukkanlah yang benar pada kami.... generasi nanti...
 Jangan main sikut..... jangan main tendang....
 Kalau ingin perut kenyang
 Jangan main gusur kalau ingin hidup makmur
 Yang jadi pejabat..... jadilah pejabat
 Asal jangan suka sikat uang rakyat
 Yang jadi polisi jadilah polisi
 Asal jangan main sikat sembarangan
 Yang jadi pak hansip jadilah pak hansip
 Kalo kerja pak jangan suka mengintip
 Yang jadi pak lurah jadilah pak lurah
 Ngurus KTP, biasa saja....
 Yang jadi pak ABRI..... jadilah pak ABRI
 Asal jangan suka pukul rakyat pribumi*

Melalui syair-syair lagu para pengamen jalanan menggambarkan tingkah polah aparat negara ke dalam berbagai ekspresi. Dalam lagu *Pedagang Asongan*, misalnya, pengamen jalan mengekspresikan aparat negara sebagai kekuatan yang senang menggusur, menyikut, menendang, dan merampas hak hidup kelompok marginal di perkotaan, seperti tukang becak, pedagang asongan, bahkan mereka sebagai pengamen jalanan. Dalam lagu itu para pengamen jalanan mengekspresikan aparat negara seharusnya malu terhadap bumi pertiwi dan gengsi terhadap Megawati, yang pada saat syair lagu dibuat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada tataran teortik, bagi Max Weber (dalam Ritzer, 1996) aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya diatur melalui peraturan perundangan yang ketat, hirarkhi kewenangan yang jelas, dan bahkan harus ada pemisahan antara pemilikan yang *private* (pribadi) dengan pemilikan yang *public*. Pemisahan ini bertujuan untuk meredusir penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Namun pada tataran empirik acapkali aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya tidak bisa membedakan antara pemilikan yang *private* dengan pemilikan yang *public*. Sudah menjadi fenomena umum kendaraan dinas pada hari libur lalu lalang di jalan raya, bukan dipakai sebagai sarana untuk menjalankan tugas kantor, melainkan untuk kepentingan pribadi. Pemberitaan di media massa setiap hari mengabarkan pengadilan terhadap para pejabat negara yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, ilegal logging, penyelundupan BMM (Bahan Bakar Minyak), dan lain-lain.

Perhatian terhadap fenomena sosial semacam itu bukan hanya milik masyarakat dari strata menengah-atas, pengamen jalanan pun peka dan kritis, bahkan protes terhadap fenomena-fenomena itu. Mereka mempunyai cara dan media sendiri untuk mengajukan kritik sosial dan protes. Lagu dan pekerjaan mereka jadikan cara dan media untuk melakukan protes. Melalui lagu dan

alunan nada mereka mengkomunikasikan pesan kepada siapa saja yang berada di dalam kendaraan umum. Mereka tidak mempedulikan apakah pesan yang mereka sampaikan diperhatikan atau tidak. Bagi pengamen jalan melalui lagu dan alunan nada mereka telah menyampaikan kebenaran kepada publik.

Tiang Negara

*Kau tabu rayap-rayap makin banyak di mana-mana
Di balik baju resmi, merongrong tiang negara
Kau tabu babi-babi makin gemuk di negari ini
Mereka dengan tenang memakan desa dan kota
Rayap-rayap yang ganas merayap
Berjas dasi dalam kantor,
Makan minum darah rakyat
Babi-babi yang gemuk sekali
Tenang, tentram, berkembang biak
Tak ada yang peduli menggemuk para babi
Lautan sawah dan hutan
Menggencet anak rakyat
Meremas jantung mereka
Merayap para rayap
Dalam bumi yang kian rapuh
Resahnya tipu rakyat
Terbantai tanpa ampun*

Dalam lagu yang mereka beri judul *Tiang Negara*, misalnya, para pengamen jalanan mengekspresikan tingkah polah aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat dengan sebutan *rayap*. Mereka menyebutnya rayap untuk menggambarkan kerakuran aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat. Masyarakat umum menganggap bahwa rayap adalah binatang sejenis serangga yang sangat berbahaya bagi bangunan rumah.

Rayap-rayap, meskipun serangga, namun dapat *mengerogoti* dan menghancurkan bangunan rumah berukuran raksasa dalam waktu yang relatif cepat. Bangunan rumah akan roboh bila tiang-tiangnya digerogeti oleh rayap. Oleh para pengamen, negara diibaratkan bangunan rumah, sedangkan para koruptor adalah rayap-rayap yang siap merobohkan dan menghancurkan bangunan rumah tersebut.

Rayap-rayap di mata pengamen jalanan tidak hanya suka makan uang rakyat, melainkan juga suka berkolaborasi (kolusi) dengan rayap-rayap lainnya, rayap-rayap suka melakukan pemaksaan, dan bahkan siap untuk memakan tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat.. Hasil korupsi mereka nikmati dengan cara melakukan konsumsi secara menyolok mata. Dalam tataran teoritik, seperti diteorikan oleh Veblen, rayap-rayap tersebut adalah *leisure class*. Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan waktu luang yang banyak. Mereka dalam melakukan konsumsi dengan cara menyolok mata.

Tingkah polah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) aparaturnegara juga mereka ekspresikan dalam lagu *Indonesia Oye*. Dalam syair lagu ini pengamen jalanan ekspresikan bahwa para koruptor adalah orang-orang yang suka makan uang rakyat. Untuk memakan uang rakyat tidak perlu melakukan pemaksaan, melainkan cukup dengan melakukan tindakan korupsi, dan hasil korupsi sudah dapat dinikmati.

Di mata pengamen jalanan aparaturnegara birokrasi tidak lebih sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Melalui kolaborasi dengan aparaturnegara birokrasi, para pemilik modal melakukan ekspansi untuk memperluas usahanya di wilayah-wilayah pedesaan yang subur. Dengan modal yang mereka miliki siap untuk membeli apa saja yang dimiliki oleh penduduk di wilayah pedesaan.

Melalui bait-bait lagu para pengamen jalanan menggambarkan bahwa tanah-tanah pertanian yang subur di kawasan

pedesaan semakin sempit akibat dari modernisasi yang melanda kawasan pedesaan. Dalam bahasa mereka, mereka memaknai modernisasi di kawasan pedesaan sebagai penggusuran sawah rakyat. Untuk melakukan penggusuran sawah rakyat di mata pengamen jalan tidak perlu datang ke desa, melainkan cukup menjalin kolusi dengan aparaturnegara.

Indonesia Oye

Ingin makan uang rakyat (banyak)

Bukan berarti harus me(maksa)

Cukup dengan korupsi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Ingin gusur sawah rakyat (desa)

Bukan berarti harus ke (desa)

Cukup dengan kolusi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Hai Indonesiaku (hai Indonesiaku)

*Tanah subur rakyat nganggur (tanah subur rakyat
nganggur)*

Hai Indonesiaku

Sawah rakyat kamu gusur

Tanam padi, tumbuh pabrik

Tanam jagung, tumbuh gedung

Tanam modal, tumbuh korupsi

Tanam cinta, tumbuh aborsi

Tanam demonstran, tumbuh TNI

Modernisasi yang semakin deras menyentuh wilayah pedesaan dilihatnya sebagai fenomena konversi fungsi lahan pertanian. Modernisasi di wilayah pedesaan, di mata pengamen jalanan, bukan bermakna perubahan yang membawa kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera. Yang terjadi justru banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, kemudian menjadi pengangguran, karena lahan pertaniannya berubah fungsi. Dalam bait-bait lagu konversi fungsi lahan ini mereka ekspresikan seperti *tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh*

gedung. Bagi mereka modernisasi di pedesaan seperti itu hanya akan melahirkan pengangguran, seperti bait lagu *tanah subur rakyat nganggur*.

Bagi pengamen jalanan pembangunan identik dengan ketidakadilan, penindasan, penggusuran, penderitaan, dan bahkan pembunuhan. Di mata pengamen jalanan, pembangunan milik aparaturnya negara dan para pemilik modal. Rakyat kecil justru dianggap oleh pengamen jalanan menjadi korban dari pembangunan. Pembangunan bukan menjadi hak rakyat kecil.

Dalam perspektif modernisasi, pembangunan adalah upaya untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat yang belum modern (terbelakang) menjadi kehidupan yang modern. Masyarakat modern ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang modern, gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan modern, dan lainnya. Karena itu, perkampungan kumuh perlu ditata dan dimodernkan agar mempunyai nilai lebih, yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan melalui *trickle down effect*.

Dalam pelaksanaannya, acapkali menggunakan suprastruktur, seperti ideologi, birokrasi, dan militer, sebagai instrumen untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan pembangunan tersebut. Atas nama ideologi keindahan kota dan pembangunanisme, perkampungan kumuh sudah menjadi keharusan untuk digusur, karena sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan lahan dan nilai ekonominya rendah. Bahkan para investor dan aparaturnya negara menggunakan ideologi demi keindahan kota dan pembangunanisme untuk menjamin kepentingan-kepentingannya. Dalam ideologi pembangunanisme siapa yang menolak tanahnya digusur dianggap tidak mensukseskan pembangunan, dan bahkan diancam akan diberi label-label seperti masih berbau PKI (Partai Komunis Indonesia), dan sebagainya. Atas nama keindahan kota dan pembangunanisme investor atas “seijin” aparaturnya negara me-

netapkan secara sepihak harga ganti rugi tanah dan bangunan, bahkan tanpa ganti rugi bagi tanah dan bangunan yang digusur.

Demi keindahan kota dan pembangunan masyarakat yang menempati perkampungan kumuh harus merelakan tanah dan bangunannya digusur dengan atau tanpa ganti rugi. Ganti rugi yang diterima pun acapkali tidak cukup untuk membeli tanah dan rumah di tempat lain dan biaya sosial dan ekonomi lainnya. Mereka harus meninggalkan rumah dan tanahnya yang telah lama mereka tempati. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya, seperti pekerjaan dan sekolah anak-anaknya. Dengan demikian penggusuran tidak hanya bermakna orang kehilangan tanah dan bangunan, tetapi juga kehilangan akses ke sumber-sumber daya kehidupan. Mereka mengekspresikan fenomena sosial penggusuran tersebut seperti syair lagu berikut:

Nglawan

*Mengapakah harus ada yang digusur
Sementara mereka juga punya hak
Apakah ini pembangunan
Kalau rakyat kecil selalu jadi korban
Haruskah untuk keindahan kota
Memaksa korbannya mereka yang lemah
Jangan biarkan derita terus mengalir
Sampai kapankah ini akan berakhir
Bangunlah sudah tiba waktunya
Untuk kita saling bergandeng tangan
Merebut segala perubahan
Ayo lawan, lawan, lawan, hancurkan
Segala bentuk penindasan
Segala bentuk penggusuran*

Secara teoritis anggota militer dan polisi merupakan alat negara yang diberi kewenangan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Mereka harus menjalankan fungsi untuk

menjaga keutuhan teritorial negara, dan melindungi serta menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Organisasi militer dan polisi juga merupakan satu-satunya institusi negara yang diberi kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik untuk menciptakan keutuhan teritorial negara, melindungi dan menciptakan rasa aman.

Namun pada tataran empirik tidak selalu fungsi-fungsi ideal tersebut dijalankan oleh aparaturnya militer dan kepolisian. Dalam banyak kasus, paling tidak di mata para pengamen jalanan, tingkah polah aparaturnya pertahanan dan keamanan mulai dari hansip, polisi, dan tentara acapkali justru lupa tentang fungsi-fungsi yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Bagi pengamen jalanan, aparaturnya militer dan kepolisian, tidak lebih sebagai aparaturnya represif negara yang melakukan penindasan, sok berkuasa, menyiksa, kejam, dan bahkan membunuh rakyat kecil, yang tidak berkuasa dan lemah.

Mengadu Pada Indonesia

*Hari ini saya sengaja mengadu
Kepadamu Indonesiaku
Tentang ulah aparatmu yang lupa waktu
O.... tentu kamu tahu
Bayangkan ulah mereka
Mereka sok berkuasa
Mereka suka menyiksa
Bahkan membunuh sudah biasa
Aku melihat tindakan aparat
Pukul sana pukul sini sampai rumah sakit
Aku melihat kekejaman aparat
Tembak sana tembak sini sampai ke akhirat
Sialan (sialan)
Aparat kurang ajar
Rakyat kecil dijadikan bahan percobaan
Sialan (sialan)
Aparat itu preman
Kuasanya melebihi kuasa Tuhan*

Orde Itu Bernama Orde Babi

Meskipun rezim Orde Baru telah runtuh tahun 1998 dengan ditandai gulingnya kekuasaan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia, para pengamen jalanan belum sepenuhnya melupakan trauma politik yang terjadi selama 32 tahun tersebut. Era reformasi, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, di mata pengamen jalanan belum sepenuhnya menciptakan perubahan, paling tidak perubahan menurut mereka. Mereka mencita-citakan bahwa era reformasi akan mampu menciptakan perubahan yaitu seperti ungkapan *mandi susu cita-citaku*, bukan *pinggang sakit tidur di kursi*. Era reformasi di mata pengamen jalanan tak ubahnya perpanjangan Orde Baru. Melalui lagu *Orde Babi* para pengamen jalanan mengkritik orang-orang yang mengaku reformis saat pemilu, tetapi setelah menang pemilu melupakan dan meninggalkan rakyat.

Orde Babi

Pinggang sakit tidur di kursi

Mandi susu cita-citaku

Ngaku reformis saat Pemilu

Setelah menang rakyat dilupakan

Setelah menang rakyat ditinggalkan

Rambut gondrong uwan dan ketombean

Siang malam kerjanya kotak katik nomer

Penguasa baru takut adili golkar

Koruptor Orba malah dibiarkan

Koruptor Orba dijadikan saran

Laguku ini anti Orde Baru

Orba jahat sengsarakan banyak rakyat

Laguku ini mengajak kamu

Rakyat miskin bersatu boikot pemilu

Rakyat miskin bersatu hancurkan orde babi

Penguasa pada masa era reformasi dipandang sebagai penguasa yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadili Golkar, sebagai simbol Orde Baru yang tersisa. Penguasa era reformasi dianggapnya tidak mempunyai keberanian untuk mengadili para koruptor Orde Baru, bahkan membiarkan dan memposisikan mereka sebagai pemberi saran pemerintahannya.

Lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan pada setiap kesempatan ini secara eksplisit mereka sebut sebagai lagu anti Orde Baru, sebuah rezim yang mereka anggap telah menyengsarakan rakyat. Melalui lagu ini mereka berupaya membangun kesadaran politik di kalangan rakyat miskin untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Mereka mengajak rakyat miskin untuk bersatu padu memboikot pelaksanaan Pemilu. Lagu ini mereka akhir dengan sikap kontravensi yang ditujukan kepada rakyat miskin untuk menghancurkan sebuah rezim yang mereka beri nama *Orde Babi*.

Nyanyian Demokrasi

Tidak selamanya benar apa yang diteorikan oleh Saymor Martin Lipset, seorang ahli politik Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa demokrasi dibangun di atas landasan variabel ekonomi dan sosial. Tingkat melek huruf dan kesejahteraan ekonomi menjadi prasyarat utama pembangunan demokrasi di suatu negara. Lipset mengajukan proposisi teoritis bahwa demokrasi harulah dibangun dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat melek huruf penduduk yang tinggi. Sebaliknya tingkat kesejahteraan ekonomi dan melek huruf penduduk yang rendah menyebabkan rendahnya kesadaran berdemokrasi penduduk.

Tidak demikian halnya di kalangan pengamen jalanan. Mereka yang rata-rata berasal dari lapisan masyarakat bawah secara ekonomi dan tingkat melek huruf mereka juga masih rendah telah mempunyai kesadaran berdemokrasi yang tinggi.

Meskipun mereka di kota Surabaya adalah orang-orang yang termarjinalkan, namun mereka mempunyai pemahaman tentang demokrasi dan berdemokrasi yang memadai, paling tidak gagasan-gagasan demokrasi mereka tuangkan ke dalam bait-bait syair lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan. Pengamen jalanan menjadikan syair lagu untuk mengekspresikan kehidupan demokrasi di kalangan mereka, bahkan melalui syair lagu mereka mencoba membangun kehidupan demokrasi di lingkungan masyarakat lebih luas dengan pesan-pesan moralnya.

Bagi mereka demokrasi adalah simbol dari ekspresi kebebasan, kebenaran, dan keadilan. Demokrasi adalah adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas berpendapat dan berorganisasi, bebas dari pengusiran, bebas dari penekanan, bebas dari penekanan, bebas dari rasa takut, bebas dari sistem politik yang totaliter serta bebas dari penjajahan oleh bangsa sendiri. Melalui judul lagu *Kemerdekaan* dan *Turun ke Jalan* pengamen jalanan melalui gagasan-gagasannya mengajukan kritik terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru yang belum sepenuhnya merdeka. Masyarakat dipandang masih terbelenggu oleh penindasan, penekanan, tidak mempunyai kebebasan berpendapat dan berorganisasi, rasa takut, dan dibelenggu oleh pemerintahan yang otoriter.

Melalui syair lagu *Kemerdekaan* pengamen jalanan memandang adanya kebebasan berbicara bagi setiap warga negara karena merupakan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara tersebut dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negara. Sebagai negara merdeka, menurut pandangan mereka, wujud demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah penduduk harus bebas dari penindasan, penekanan, dan pengusiran. Dalam pandangan pengamen jalanan negara demokrasi adalah negara yang memberi keadilan dan mampu menegakkan kebenaran

Turun ke Jalan

*Mari kita bergandeng tangan
Tuk menggalang kekuatan
Dengan turun ke jalan
Mari kita kepalkan tangan
Tuk lontarkan perlawanan
Terus maju ke depan
Mati kita acungkan tangan
Tuk teriakan
Segala tuntutan perubahan
Rakyat pasti menang
Memenangi penjajahan
Karena kemerdekaan
Adalah jiwa kita
Rakyat pasti menang
Mengenyahkan penindasan
Karena keadilan
Adalah nurani kita
Yakinlah rakyat pasti menang
Karena kemerdekaan adalah jiwa kita
Karena keadilan adalah nurani kita*

Selain itu mereka dalam lagu *Turun ke Jalan* menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di masyarakat demokrasi yang dicita-citakan dengan bait-bait lagu yang diulang-ulang *rakyat pasti menang*. Segala bentuk penindasan dan penjajahan akan dimenangkan oleh rakyat dengan bergandengan tangan untuk menggalang kekuatan. Di mata para pengamen jalanan kemerdekaan merupakan jiwa mereka, dan keadilan merupakan nurani mereka.

Bahkan pengamen jalanan dalam syair lagu *Kompeni* memandang rezim Orde Baru tak ubahnya seperti Kompeni pada masa kolonial Belanda. Tak ubahnya seperti jaman Kompeni, pada saat ini rakyat di negeri ini belum memperoleh kemerdekaannya. Rakyat merasa dijajah oleh bangsannya sendiri

dan bagaikan hidup dalam penjara. Rezim Orde Baru melakukan penindasan dan menimbulkan penderitaan rakyat. Digagas juga rakyat dalam kondisi diintimidasi, dan kehidupan tidak ada demokrasi karena demokrasi dimatikan. Wakil rakyat digambar tidak ubahnya antek-antek Kompeni yang suka *ngapusi* (membohongi) rakyat.

Kemerdekaan

*Kemerdekaan untuk bicara
Harus kita rebut
Karena berbicara adalah hak azazi
Untuk berbicara dilindungi konstitusi
Kami menentang pengusuran
Kami menentang pencekalan
Kami menentang penindasan
Karena ini negara merdeka
Bukan negara yang dijajah
Karena ini negara demokrasi
Bukan negara totaliter
Mari bersama bikin organisasi
Mari bersatu menggalang kekuatan
Kita bikin tuntutan
Dengan turun ke jalan
Tegakkan kebenaran
Tegakkan keadilan*

Dalam negara demokrasi ada kebebasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi politik dengan berbagai cara dan media, serta melakukan komunikasi politik. Baik dalam lagu *Kemerdekaan*, *Turun ke Jalan*, maupun *Kompeni* para pengamen jalanan mengajukan solusi untuk menciptakan masyarakat yang bebas, merdeka, berkeadilan dan tegaknya kebenaran hanya dapat dicapai melalui penggalangan kekuatan dan secara bersama-sama turun ke jalan. Turun ke jalan menjadi gagasan utama bagi pengamen jalanan untuk melakukan partisipasi politik. Bagi

pengamen jalanan pilihan ini menjadi pilihan satu-satunya ketika semua saluran komunikasi politik buntu dan lembaga-lembaga politik, seperti eksekutif, legislatif, dan partai politik tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kompeni

*Ya percuma..... ya percuma
Dari jaman kompeni dan sampai saat ini
Kita ditindas sampai mati
Katanya rakyat sudah tak dijajah
Tapi hanya masih terpenjara
Katanya negara sudah merdeka
Tapi rakyat sudah menderita
Ya percuma..... ya percuma
Dari hari ke hari
Demokrasi diinjak mati
Katanya bebas berorganisasi
Tapi masih diintimidasi
Katanya sudah beraspirasi
Wakil rakyat masih membohongi
Ya ngapusi..... ya ngapusi
Mari bangkitlah kawan semua
Tuk hancurkan segala bentuk kekuasaan
Ayo bangkitlah kawan semua
Tuk merebut segala bentuk hak kita yang dirampas*

Tsunami: Solidaritas dan Duka Pengamen Jalanan.

Duka Aceh juga menjadi duka bagi para pengamen jalanan. Apa yang dirasakan oleh rakyat Aceh di ujung Barat Pulau Sumatra juga dirasakan oleh para pengamen jalan di ujung Timur Pulau Jawa ini. Para pengamen jalanan berempati terhadap duka masyarakat Aceh yang mengalami bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam yang dialami masyarakat Aceh menjadi keprihatinan dan duka masyarakat dunia. Masyarakat dunia berempati seolah-olah apa yang sedang dialami oleh masyarakat

Aceh juga sedang mereka rasakan. Masyarakat dunia mengekspresikan rasa prihatin dan duka dengan cara memberikan bantuan berupa materi maupun nonmateri.

Tsunami

*Bencana melanda negeri ini
Ribuan jiwa melayang pergi
Akibat gelombang tsunami
Banda Aceh nama tempat peristiwa
Meulaboh jadi saksi yang nyata
Mayat-mayatnya sudah bergelimpangan
Ini salah siapa, ini dosa siapa
Mungkinkan Tuhan memurkai kita
Atas segala perbuatan kita
Darah bersimbah jiwapun merana
Selamat jalan wahai saudaraku
Damailah wahai anak negeri
Ciptakan sebuah lagu perdamaian
Satukan tujuan demi cita-cita
Bangunlah kembali Banda Aceh
Siang panas.... semoga anda bahagia
Bercanda bercumbu dengan alam sekitarnya
Tak ada yang pantas untuk dibanggakan
Karena kita kan kembali pada Tuhan
Pokoknya di mana saja anda
Harus hati-hati
Sebentar lagi Joyoboyo
Banyak copet keluyuran
Dompot di saku belakang
Jangan sampai pindah tangan
Nona pakai perhiasan
Awat dijambret orang
Ini sekedar himbauan arek suroboyo*

Seperti masyarakat lainnya, bencana tsunami yang dialami oleh masyarakat Aceh juga menjadi keprihatinan dan duka yang mendalam bagi para pengamen jalanan. Dengan caranya sendiri mereka mengekspresikan rasa keprihatinan dan dukanya. Bagi pengamen jalanan untuk membantu beban masyarakat Aceh tidak harus dengan memberikan bantuan berupa materi, namun dengan bantuan nonmateri dan tanpa harus datang ke Aceh. Para pengamen jalanan mempunyai cara sendiri untuk membantu masyarakat Aceh. Layaknya seniman, mereka membantu masyarakat Aceh dengan lagu.

Bencana alam, seperti gelombang tsunami, ternyata mampu meretas batas-batas negara, budaya, kelas, dan lainnya. Tsunami mampu menggugah kesadaran setiap individu manusia yang dalam dirinya dibekali rasa dan karsa. Kesadaran pengamen jalan mereka ekspresikan melalui lagu. Dalam bait-bait lagu mereka mencoba mengkaitkan bencana alam tersebut dengan manusia yang melakukan kesalahan dan dosa. Akibat kesalahan dan dosa tersebut, Tuhan telah menunjukkan murkanya kepada manusia yang lemah. Melalui lagu pengamen jalanan juga mengajak masyarakat Aceh untuk menciptakan perdamaian dan bersatu untuk membangun kembali Aceh yang telah porak poranda.

Lebih dari itu, pengamen jalanan di wilayah perkotaan dianggap menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Mereka oleh masyarakat kebanyakan dianggap sebagai orang-orang yang kalah dalam pertarungan untuk memperebutkan sumber daya di kota. Mereka tidak memiliki sumber daya, sehingga mereka adalah orang-orang yang tertutup peluangnya bahkan ditolak oleh sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan kecuali memasuki sektor informal, yaitu mengamen. Sebagai anak jalanan mereka tidak lepas dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat, yaitu kehidupan mereka yang keras, dan sangat dekat dengan dunia kejahatan, seperti

pencurian, penjambretan, pencopetan, perampokan, dan lainnya. Debagai *arek Suroboyo* secara keseluruhan mendapatkan stereotipe *bonek* (bondo nekat), yang senang melakukan pemalakan, perampasan, pengrusakan, dan lainnya.

Namun tidak demikian halnya dengan para pengamen jalanan di kota Surabaya. Mereka jauh dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat itu. Meskipun sebagian besar waktunya mereka habiskan di jalanan, melalui syair lagunya mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati nurani dan moralitas. Paling tidak dalam lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan untuk para korban tsunami di Aceh, misalnya, mereka menyelipkan peringatan dan pesan moral kepada penumpang angkutan umum agar berhati-hati terhadap segala bentuk kejahatan yang dapat menimpa para penumpang, baik pencopetan maupun penjambretan. Pesan moral ini mereka ekspresikan sebagai jawaban terhadap label-label yang sifatnya stigmatif, seperti bonek, keras, suka berkelahi, suka merampas, suka memalak, dan melakukan tindakan kriminal lainnya, yang ditujukan kepada *arek Suroboyo*. Makna syair lagu itu juga mereka tunjukkan kepada masyarakat bahwa *arek Suroboyo* masih mempunyai moralitas yang tinggi (lihat lagu *Tsunami*)

Lagu Untuk Anak Jalanan.

Melalui lagu para pengamen jalanan mengekspresikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari anak jalanan. Trotoar dan jalan raya seolah-olah menjadi saksi bisu kehidupan anak jalanan yang mengais rejeki dari mendengarkan suara tanpa mengenal lelah. Dalam lagu-lagunya para pengamen jalan menggambarkan anak-anak di bawah umur menikmati masa bermainnya di trotoar dan pinggir jalan. Sambil bermain mereka bekerja. Sambil bernyanyi mereka juga bekerja. Anak-anak seperti itu digambarkan telah kehilangan kasih sayang yang didambanya. Mereka juga

merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tiada kunjung tiba. Itulah cerita kehidupan, cerita kehidupan anak jalan. Mereka menunggu mimpi menjadi kenyataan. Mereka hanya berharap perjalanan waktulah yang akan berbicara.

Anak Jalanan

*Anak-anak bermain di pinggir jalan
Anak-anak gembira dengarkan suara
Anak-anak bernyanyi sambil bekerja
Anak-anak bekerja terus menyanyi
Hu..... hu..... hu.....
Hu..... hu..... hu..... (2x)
 Bermain sambil bekerja,
 Bermain sambil bermain (2x)
 Itulah hari-hariku
 Itulah suasanaku
 Itulah kondisiku
 Itulah..... a ha
Kudengar kudengar dan kudengar lagi
Di jalan kulihat dan kulihat lagi
Seorang anak kecil terluka hatinya
Hilang kasih sayang yang didambanya
Berjalan susuri sepanjang trotoar
Hari demi hari tiada bosan kau bernyanyi
Kau songong matahari dengan harapan
Akankah kau bahagia kan kau jelang
 Inilah cerita dari kehidupan
 Hati yang luka rindu bahagia
 Akankah mimpi-mimpi jadi kenyataan
 Biarlah waktu yang bicara
 Ho..... ho..... ho..... ho.....
 Biarlah waktu yang bicara*

Mereproduksi Lagu sudah Populer

Memang, tidak selalu pemusik jalanan mengambil tema-tema lagu protes sosial. Namun demikian, diketahui ternyata setiap lagu yang dibawakan mempunyai makna bagi pemusik

jalan, selain konteks dan kondisi obyektif pengamen jalan. Mak As, yang sudah tua usianya misalnya lebih memilih lagu islami karena faktor usianya. Kentrungan yang selalu dia bawa saat Mak As mengamen di jalan. Alat ini tidak ia beli di toko, karena memang tidak ada toko yang menjualnya, melainkan ia buat sendiri. Kentrungan adalah sebuah alat yang terbuat dari bahan kayu dan senar dari karet. Alat ini cukup sederhana dan mudah dibuat. Kata Mak As, siapa saja bisa membuat dan memainkannya. Ia tidak mengeluarkan biaya untuk membuat alat ini, karena ia hanya memanfaatkan kayu dan karet bekas.

Alat ini dia pakai untuk mengiringi lagu-lagu yang bernafaskan Islami dan lagu-lagu Jawa. Mak As memilih lagu-lagu qosidah, lagu-lagu sholawat, dan kadang-kadang dia selingi dengan lagu-lagu Jawa. Bagi Mak As menyanyi lagu harus disesuaikan dengan kondisi penyanyi dan konsumennya. Menurut penilaiannya lagu yang tepat untuk penyanyi seusia dia (46 tahun) adalah lagu-lagu religius dan lagu-lagu Jawa. Selain itu, ia menyanyikan lagu-lagu tersebut juga berdasarkan diri pada permintaan konsumen.

Masak mas orang setua usia saya menyanyikan lagu-lagu anak muda. Tidak pantas dan siapa yang mau dengar. Rasanya lebih pas saya menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat dan lagu-lagu Jawa. Lagu yang saya nyanyikan saya sesuaikan dengan umur saya dan permintaan dari orang-orang yang nanggap saya. Biasanya orang-orang itu suka dengan lagu-lagu Jawa.

Lagu-lagu yang dibawakan Mak As dalam mengamen lebih banyak unsur rekreatifnya. Orang seusia Mak As tidak menggunakan lagu-lagu untuk melakukan kritik sosial atau protes terhadap kondisi dirinya maupun kondisi masyarakat. Kondisi kemiskinan yang dialaminya bersama keluarga seolah-olah tidak ia rasakan sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Ia lebih memposisikan dirinya sebagai penghibur orang lain dengan mendapatkan kompensasi uang.

Sama dengan Mak As, Naning dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengamen jalanan hanya bermodalkan alat musik kentrungan dan suaranya yang pas-pasan. Bagi Naning kentrungan sangat membantu dia dalam menyanyikan lagu-lagu yang ia bawaikan. Lain dengan Mak As, Naning yang usianya masih relatif muda, lebih memilih lagu-lagu beraliran dangdut dan campursari. Mudah dinyanyikan menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan aliran musiknya. Selain itu, lagu-lagu tersebut cocok dinyanyikan oleh orang seusianya.

Identik dengan Mak As, Naning tidak pernah mempunyai gagasan untuk menjadikan lagu-lagu yang ia nyanyikan sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes. Meskipun hidup dalam kemiskinan, namun ia bersama suaminya rela menerima keadaan itu. Bagi Naning, pendapatan Rp 10.000 hingga Rp 15.000 sehari sudah dirasakan cukup. Ia bersama suaminya yang tinggal di Jagir Wonokromo itu mengaku setiap hari ia mengamen mulai pagi hari hingga sore hari.

Deni mempunyai alasan subyektif yang berbeda. Ia lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer yang digandrungi oleh kalangan anak muda. Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh kelompok musik, seperti: Peterpan, Padi, dan Slank. Lagu-lagu dari grup-grup musik tersebut, bagi Deni, disukai dan digandrungi oleh kalangan remaja yang menjadi obyek dia mengamen di Jl. Dharmawangsa. Bagi Deni dan teman-temannya Jl. Dharmawangsa merupakan jalan yang potensial dapat mendatangkan penghasilan besar. Di sepanjang jalan itu banyak beroperasi warung lesehan dan kawasan kos-kosan mahasiswa. Deni mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp 20.000 per hari dari mengamen di sepanjang jalan itu. Belakangan ini Deni dan teman-temannya lebih memilih mengamen di Jl. Pemuda dekat Monkasel (Monumen Kapal Selam). Tempat ini dia pilih karena lebih menguntungkan selain ramai, juga dia bisa bekerja sambil sebagai tukang parkir.

Kondisi penumpang kendaraan umum menjadi pertimbangan Iwan memilih lagu-lagu yang dinyanyikan selama mengamen. Bagi Iwan lagu yang dinyanyikan oleh seorang pengamen harus disesuaikan dengan kondisi penumpang. Sebagai pengamen ia mempersiapkan lagu-lagu dengan banyak aliran. Ketika Iwan menghadapi penumpang yang rata-rata usianya lanjut usia ia memilih lagu-lagu *oldist* atau lagu-lagu nostalgia, sebaliknya ketika berhadapan dengan penumpang yang rata-rata usianya masih muda dia menyanyikan lagu-lagu populer yang sedang hits, misalnya lagu-lagu yang dinyanyikan Dewa, Radja, Ada Band, dan lainnya.

Iwan kadang-kadang menyanyikan lagu yang menyindir polah tingkah polisi pamong praja yang dinilainya tidak adil dan tidak manusiawi. Polisi pamong praja dia ekspresikan dalam syair lagu sebagai aparat yang suka mengobrak warung, tukang becak, dan pengamen. *“Sebenarnya jangan seperti itu caranya, sebaiknya diberi tempat atau lahan sebelum diobrak. Terkadang saya tidak sepenuhnya menyalahkan polisi pamong praja, karena mereka hanya menjalankan tugas dari yang lebih atas,”* kata Iwan.

Lagu-lagu bertema cinta, kata Wawan, tidak cocok dinyanyikan oleh seorang pengamen jalanan sesusia dia. Lagu-lagu tersebut lebih cocok dinyanyikan oleh penyanyi di media televisi. Lagu-lagu Iwan Fals yang syairnya berisi kritik sosial yang menjadi pilihan Wawan. Ia kadang-kadang juga menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, yang juga mempunyai syair yang mengandung kritik sosial dan protes. Wawan yang baru berusia 23 tahun menjadikan lagu dan mengamen sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes terhadap kondisi masyaralat yang senjang dan tidak adil. Kaena itu, ia dalam memilih lagu ia kaitkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari dia sebagai pengamen jalanan. Termasuk mengekspresikan kehidupan anak jalanan dalam syair-syair lagu yang dia ciptakan dan nyanyikan. Sebagai anak jalanan dia tidak mempunyai media untuk mengungkapkan kondisi

kehidupannya yang rentan. Lembaga-lembaga suprastruktur politik seperti lembaga legislatif yang menjalankan fungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat dianggapnya bukan media yang tepat dan efektif. Seolah-olah semua saluran yang idealnya dapat menampung aspirasi dan keluhan kehidupannya tertutup. Dia bersama-sama dengan teman mengamen lebih memilih menciptakan lagu sendiri untuk mengungkapkan kehidupan anak jalanan yang rentan tersebut.

Penutup:

Suatu Analisis Wacana tentang Makna Lagu Anak Jalanan

Bagi sebagian masyarakat berkesenian untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keindahan, sebagian masyarakat lainnya berkesenian selain untuk memenuhi rasa keindahan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan yang sifat material, bahkan dipakai untuk mengekspresikan rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan kesenjangan. Alasan subyektif orang memenuhi kebutuhan rasa keindahan yang bersifat non-material lebih bersifat rekreatif, yang dalam bahasa Max Weber (dalam Ritzer, 1996) disebut dengan tindakan sosial afektual. Ketika dipakai sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan material, berkesenian seperti itu lebih bersifat rasional instrumental. Berkesenian sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial dan kritik sosial. Cara ini lebih bersifat ideologis.

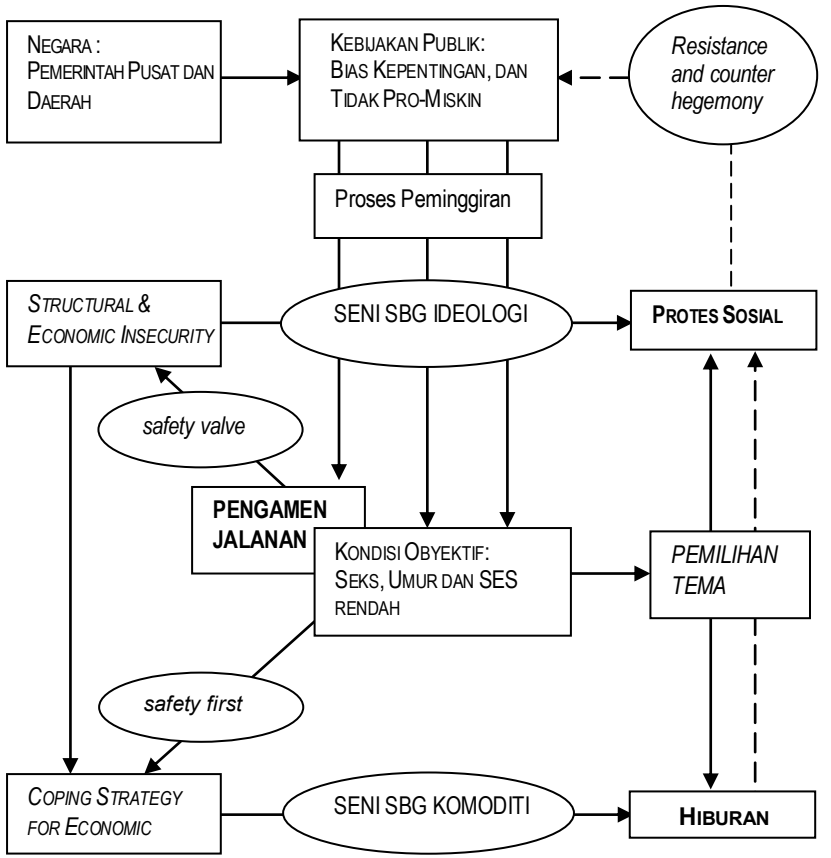
Pandangan seperti itu justru merupakan antitesis dari pandangan Karl Marx (Ritzer, 1996) yang menganggap kesenian adalah bagian dari suprastruktur yang lebih menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Bagi para pemilik modal dunia kesenian diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan, misalnya, yang terjadi pada dunia hiburan di Indonesia. Di balik gemerlapnya dunia hiburan di Indonesia, para pemilik modal mendapatkan keuntungan besar.

Para pengamen jalanan mencoba mengkaitkan kondisi obyektif masyarakat dan kondisi subyektif kehidupannya dengan substansi syair-syair lagu yang mereka ciptakan. Kondisi obyektif dan subyektif tersebut mereka ekspresikan melalui rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna dalam lagu-lagu. Dalam posisi demikian para pengamen jalanan memposisikan kesenian tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya material, mereka juga memposisikan kesenian melalui syair-syair lagu yang diciptakan dan dinyanyikan sebagai media untuk melakukan kontrol sosial, kritik sosial, bahkan protes terhadap tingkah polah aparat birokrasi dan aparat represif negara yang mereka nilai telah melakukan ketidakadilan, penindasan, perampasan, penggusuran, dan bahkan pembunuhan kepada orang-orang yang berasal dari masyarakat lapisan bawah. Mereka juga menggunakan syair lagu-lagu yang mereka ciptakan untuk melakukan kritik terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang meluas di Indonesia dan kebijakan-kebijakan supratsruktur yang lebih memihak kepada para pemilik modal daripada memihak masyarakat kelas bawah. Bahkan melalui lagu-lagu yang diciptakan, mereka mengekspresikan apa yang mereka alami sebagai pengamen jalanan dan mengekspresikan preferensi mereka tentang *the best rezim* atau masyarakat yang ideal.

Bagi pengamen jalanan, melalui syair lagu, *the best rezim* atau masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang dicirikan oleh adanya kemerdekaan dalam semua aspek kehidupan. Negara yang warga negaranya memperoleh kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, bebas dari rasa takut, bebas dari penindasan, bebas penggusuran, bebas dari polah tingkah aparat birokrasi dan keamanan yang represif, bebas dari pembunuhan, bebas dari kemiskinan, dan kebebasan lainnya. Melalui syair lagu-lagunya para pengamen jalanan mempunyai preferensi tentang demokrasi dan negara yang merdeka. Mereka menyebut *orde babi* untuk menggambarkan protes mereka terhadap pemerintah Orde Baru

dan pemerintahan baru yang tidak berani mengadili Golkar dan para koruptor Orde Baru.

Bagan 8.1
Musik Jalanan:
Cermin Hubungan antara Negara dan Pengamen Jalanan



Ketika memaknai bencana alam tsunami yang melanda Aceh dan Pulau Nias, dalam terminologi Max Weber (dalam Ritzer, 1980), mereka memaknai peristiwa itu sebagai introspeksi dan sekaligus melakukan empati. Melalui syair lagu mereka melakukan introspeksi dengan menganggap bahwa peristiwa itu

sebagai akibat dari dosa manusia dan Tuhan menunjukkan murka-Nya. Dalam empatinya para pengamen jalanan mempunyai kesadaran bahwa di tengah-tengah kemiskinan yang mereka alami, sebagai manusia rasa kemanusiannya tersentuh ketika sebagian dari anggota masyarakat mengalami bencana alam yang tak mampu dihadapi oleh manusia manapun. Kesedihan dan rasa kemanusiaan itu mereka ekspresikan melalui syair-syair lagu.

Bagi pengamen jalanan mengamen di jalan adalah sebagai okupasi (pekerjaan). Pekerjaan satu-satunya yang menjadi salah satu sumber pendapatan. Penhasilan mereka sebagai pengamen jalanan sangat tergantung pada kompensasi yang diberikan oleh orang lain. Mereka memperoleh penghasilan rata-rata Rp 10.000. Meskipun kecil, bagi para pengamen jalanan, yang dipentingkan adalah penghasilan tersebut diperoleh dengan cara legal dan halal. Secara sosiologis para pengamen jalanan mengalami mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial yang terjadi antar-sektor informal. Sebelum menjadi pengamen jalanan mereka rata-rata pernah bekerja di sektor informal lainnya, seperti pedagang makanan, buruh pabrik, buruh bangunan, bahkan pekerjaan tetap. Mereka mengalami mobilitas sosial karena berbagai macam sebab, mulai dari krisis ekonomi hingga penertiban oleh aparat polisi pamong praja.

Para pengamen jalanan mempunyai alasan subyektif yang beragam tentang pemilihan lagu yang dinyanyikan. Dilihat dari lagu yang dipilih dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: campursari (Jawa), religius, populer, dangdut, dan kritik sosial (lagu ciptaan sendiri). Lagu-lagu campursari dinyanyikan oleh pengamen jalanan berjenis kelamin perempuan serta usia muda dan tua, representasi dari kategori ini adalah Mak As dan Naning. Selain campursari Mak As juga menyanyikan lagu religius seperti qosidah dan sholawat. Naning juga merupakan representasi yang menyanyikan lagu dangdut. Lagu-lagu populer dan lagu-lagu yang mengandung kritik sosial lebih dipilih oleh pengamen jalan

berjenis kelamin laki-laki dan berusia relatif muda. Wawan dan Iwan merupakan representasi pengamen jalanan yang memilih lagu-lagu populer, sedangkan Termas adalah sosok yang lebih memilih lagu-lagu ciptaannya sendiri yang di dalamnya mengandung kritik sosial dan protes.

Sementara dilihat dari alasan subyektif memilih lagu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: usia, kemudahan, dan konsumen. Pengamen jalanan yang berusia tua, seperti Mak As, lebih pantas menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat, dan campursari, sementara Termas yang usianya baru 20 menganggap tidak pantas menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta, ia lebih memilih lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri yang mengandung kritik sosial dan protes. Bagi Naning, ia menyanyikan lagu-lagu dangdut dan campursari karena mudah untuk dinyanyikan, sementara Wawan dan Iwan lebih mempertimbangkan selera konsumen dan menyesuaikan dengan segmen pasar. Bagi Wawan dan Iwan lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer, seperti lagu-lagu milik Dewa, Radja, Padi, Slank, dan Peterpan untuk memenuhi selera konsumennya yang rata-rata berusia masih muda. Tidak jarang ketika berhadapan dengan penumpang bus yang rata-rata berusia lanjut mereka menyanyikan lagu-lagu nostalgia (*oldist*).

Daftar Pustaka

- Bakker, J.W.M.
1990 **Filsafat Kebudayaan. Suatu Pengantar.** Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.
- Cassier, Ernst.
1987 **Manusia dan Kebudayaan. Sebuah Esei tentang Manusia.** Diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- 194 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Danandjaja, James.

- 1983 Fungsi Teater Rakyat bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia. Dalam Edi Sedyawati dan Sapardi Djoko Damono. **Seni dalam masyarakat Indonesia. Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 1984 **Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain**. Jakarta: Grafitipers.

Darmono, Sapardi Djoko.

- 1977 Kritik Sosial dalam Sastra Indonesia: Lebah tanpa Sengat. **Prisma**. No. 10/ Tahun VI.

Krippendorff, Klaus.

- 1991 **Analisis Isi. Pengantar Teori dan Metodologi**. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Pers.

Murray, Alison J.

- 1992 Budaya Kampung dan Elok Radikal di Jakarta. **Prisma**. No. 5/Th. XXI.

Peursen, C.A. van.

- 1985 **Strategi Kebudayaan**. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.

Ritzer, George

- 1996 **Sociological Theory**. Fourth Edition. Toronto: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 1980 **Sociology A Multiple Paradigm Science**. Revised edition. Toronto: Allyn and Bacon, Inc.

Soekiman, Djoko.

- 2000 **Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Media Abad XX)**. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Sudiarja, A.

- 1983 Susanne K. Langer: Pendekatan Baru dalam Estetika. Dalam M. Sastrapratedja. **Manusia Multi Dimensional. Sebuah Renungan Filsafat**. Jakarta: Gramedia.

Susanto, Astrid S.

- 1977 Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara. **Prisma**. No. 10/Tahun VI.

Bab 9

Mahasiswa dan Orang Miskin Kota

Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan
Usman Mulyadi

Pendahuluan

Apa yang dialami daerah kota besar dan sekitarnya di Indonesia terutama pada tahun 1990-an adalah pertumbuhan bidang jasa dan industri yang makin pesat, meninggalkan bidang pertanian yang menjadi tujuan semula pembangunan. Tujuan semula, sektor industri dibangun untuk menopang pertanian, sesuai dengan GBHN pada Pelita I. Pertumbuhan ini ternyata mengakibatkan pengalihan fungsi lahan, dari yang semula perumahan ke pusat perdagangan atau dikenal dengan istilah CBD (*Central Bussiness District*) dan kawasan industri, dari lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman baru – harga komoditas pertanian rendah dan keuntungan dari nilai tanah untuk alih fungsi (*Kompas*, 15 Agustus 2002, “*Menteri Pertanian Bungaran Saragih: Konversi Lahan Terjadi akibat Harga Komoditas Pertanian Rendah*”; perhatikan juga Kustiawan, 1997; 15-32; bandingkan dengan kasus kota Mexico City, Sao Paolo dan Kalkuta pada Todaro dan Stilkind, 1985: 4-9), keadaan serupa terjadi di Surabaya dan daerah sekitarnya, atau dikenal dengan *Gerbangkertasusila*, dengan Surabaya, sebagai pusat pertumbuhannya.

Dari beberapa catatan, konsekuensi dari alih fungsi atau konversi lahan ini adalah terjadi “penggusuran” penghuni pemukiman “kumuh.” Setelah digusur, kemudian didirikan gedung-gedung bertingkat, baik sebagai hotel dan kantor, seperti Darmo Tegal dan Pandegiling, maupun industri, seperti daerah Rungkut (SIER) dan pemukiman baru. Perluasan kawasan industri ini juga merambah sepanjang jalan menuju Sidoarjo dan Mojokerto (Trosobo dan Krian), demikian pula Kab. Gresik dengan diawali oleh Pabrik Semen Gresik dan Petrokimia Gresik. (*lihat* laporan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur tentang *Pelayanan di Bidang Sertifikasi Tanah*, tahun 1998-1999).

Akibatnya, pertama, terjadi “penggusuran” kampung-kampung lama dan kemudian terdesak ke daerah pinggiran kota. Akibatnya, selalu ada konflik antara pengembang dan kampung lama yang akan tergusur. Konflik ini berpulang pada mekanisme perencanaan kota yang tambal sulam dan dinilai oleh masyarakat lebih menguntungkan pengembang dan kelompok kepentingan lainnya. Pihak birokrasi kota dan Dewan lebih berpihak pada pengembang dengan mengatasmakan kepentingan publik (Surbakti, 1994: 49-68; 1996: 22; Suyanto, 1996: 37-48). Sementara itu, alasan yang serupa, sektor informal yang menjadi penopang kelompok masyarakat rentan kota agar dapat bertahan di lingkungan kota juga turut digusur, perhatikan kasus Tunjungan dan sejumlah pasar tradisional.

Kedua, akibat tergusur kampung-kampung lama, dan bergeser ke daerah pinggiran kota ini, menimbulkan konflik baru di pemukiman baru. Alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian, yaitu industri, perdagangan dan pemukiman, menimbulkan kesenjangan dan konflik antara penduduk asli dan penghuni pemukiman baru. Mereka, penduduk asli, kehilangan mata pencaharian sebagai petani ketika tanahnya dijual, dan sementara itu uang “landasan” biasanya dibeli barang-barang konsumtif – akibatnya setelah uang habis, begitu pula dengan barang-barang-

nya, mereka menjadi pengangguran, atau bila memenuhi syarat, menjadi buruh di pabrik yang berdiri di atas tanahnya. Penurunan status dari pemilik menjadi buruh ini menimbulkan rasa tidak senang ketika melihat penghuni baru, pindahan dari masyarakat kota yang “relatif” lebih mapan hidupnya. Di pihak lain, mereka harus berjuang mengembangkan hubungan buruh-majikan--karena dipandang sebagai mereka yang lebih membutuhkan pekerjaan, maka perlakuan majikan tidak menguntungkannya.

Ketiga, proses sosial yang demikian ini kemudian berlanjut menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah sosial baru dimulai masalah pengangguran, masalah kenakalan remaja hingga tingkat kriminalitas, dari sekedar corat-coret pagar hingga pencurian di perumahan baru. Dari beberapa catatan penghuni pemukiman baru, mereka dan anak-anaknya mengalami benturan dengan penduduk asli (lama), mulai dari perkelahian anak-anak, di-“balak” hingga mengalami pencurian bila rumah ditinggalkan. Inilah konsekuensi dari rangkaian fenomena pertama.

Keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota ini sebenarnya bukan hal yang baru, di Yogyakarta, bersama dengan Romo Mangun, mereka terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Kali Code dengan mengajar anak-anak di bawah kolong, dan berbagai LSM didirikan oleh mahasiswa untuk kepentingan tersebut. Perkembangan selanjutnya, mereka terlibat pula dalam mengartikulasikan kepentingan dalam bentuk demonstrasi, seperti kasus Dita Indah Sari dalam demonstrasi buruh, dan berbagai aktivitas serikat buruh lainnya.

Selain memberi keberanian untuk mengartikulasikan kepentingan strategis, kehadiran mahasiswa, khususnya teater kampus, membuat bentuk lain dari aksi demonstrasi kelompok tersebut. Dari pengamatan awal, keterlibatan teater kampus terjadi tatkala menyelami kehidupan kelompok tersebut untuk menghasilkan ide-ide cerita teater yang sarat akan kritik sosial. Namun,

pada gilirannya observasi partisipan ini bergulir menjadi tindakan aksi atau partisipatif untuk memberdayakan kelompok tersebut.

Metode Penelitian¹²

Dengan memperoleh data tentang isu-isu ketimpangan sosial-politik yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat rentan kota, tulisan ini juga mencermati perubahan pola demonstrasi dan keterlibatan mahasiswa sebagai kaum intelektual. Dengan mengambil *setting* di Surabaya, dilakukan wawancara secara mendalam pada mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota. Selain itu, karena peristiwanya telah berlangsung sebelum penelitian ini dilakukan (*ex-post facto*), maka tulisan ini juga menggunakan sumber-sumber sejaman, seperti Jawa Pos, Surya, Kompas, Bernas, Pikiran Rakyat dan Suara Merdeka. Sumber-sumber tersebut diakses melalui internet. Selain dari situs-situs surat kabar, data juga diperoleh dari situs-situs lsm, seperti Elsam dengan situs www.elsam.com dan konsorsium kelompok miskin kota (UPC) dalam www.urbanpoor.or.id.

Penggunaan wawancara secara mendalam itu bagian dari *oral history* dilakukan pada pelaku, yaitu mahasiswa yang terlibat dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota, khususnya mereka yang berasal dari teater kampus. Individu-individu diperoleh dengan secara purposif dan *snowball*, begitu pula kelompok masyarakat rentan kota yang pernah melakukan demonstrasi. Informasi awalnya diperoleh dari sumber-sumber pertama (cara pertama). Dalam wawancara tersebut, diharapkan dapat memperoleh (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang

¹² Diolah dari Hasil Penelitian Fundamental yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2005 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) usaha mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan.

Dari data sumber-sumber surat kabar, dengan melalui tahapan dalam analisis sejarah dilakukan rekonstruksi tentang pola demonstrasi dan perubahannya pada tahun 1990-an hingga sekarang, berikut isu-isu kesenjangan sosial politik, sedangkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam tentang (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) proses mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan. Di dalam analisis kualitatif, data tersebut diberi koding. Data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara mendalam dilakukan analisis domain, hingga analisis komponensial. Dari teknik-teknik analisis ini, diperoleh proposisi-proposisi yang menggambarkan fenomena tersebut.

Orang Miskin Kota sebagai Korban Kebijakan Pembangunan

Tata Ruang Kota:

Pengusuran, kehilangan rumah dan tempat usaha?

Sungguh tepat sekali, bila kita menggunakan gambaran dari James C. Scott (1983: 27-52) tentang betapa rentannya masyarakat miskin. Ia menggambarkan bahwa setiap kebijakan makro yang terkena pada keluarga miskin seperti ombak yang menerjang orang yang tenggelam dengan air sebatas hidung. Sekali ombak datang, maka tenggelam pula orang tersebut. Oleh karenanya, mereka, kelompok miskin menggunakan prinsip dahulukan selamat (*the safety first*).

Meski terbatas, masyarakat desa tetap memiliki memiliki pilihan. Bila rawan pangan misalnya, orang desa akan mengalihkan makanan pokoknya, dari beras ke ketela, dan seterusnya. Bila tergusur, meski tanah itu telah menjadi bagian diri dan keluarganya, mereka masih bisa menempati tempat-tempat lain di desa yang belum dikelola – sudah barang tentu berubah statusnya dari pemilik ke *ngindung* atau *magersaren* (strata yang rendah dalam masyarakat desa). Tidak demikian pada masyarakat miskin kota, pilihan mereka (amat) sangat terbatas. Klugman (2002: 63) mencatat bahwa orang miskin (rentan) kota sangat tergantung pada pasar kerja yang dualistik dengan bentuk pembayaran tunai (*cash*), tidak memiliki akses pada infrastruktur formal, tidak memiliki akses tanah dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan terakhir dalam situasi ini mereka lebih mengandalkan pada jaringan keluarga daripada pemerintah.

Perubahan tata ruang kota sering berakibat pada masyarakat miskin kota dalam hal pemukiman dan penghidupan (mata pencaharian). Dari pengamatan Ramlan Surbakti (1996: 20-21) pada tahun 1990-an, ada delapan pola perebutan ruang kota.¹³ *Pertama*, konflik antara pemkot dan warga berkaitan dengan perubahan peruntukan tanah, seperti kasus Ngagel Jaya Selatan (antara pusat perdagangan dan jalur hijau), dan Simogunung (penggusuran untuk jalur hijau). *Kedua*, konflik antara pemkot dan perusahaan swasta akibat tindakan swasta menyerobot tanah milik pemkot.¹⁴ *Ketiga*, konflik antara warga dan investor. *Keempat*,

¹³ Perebutan tata ruang kota terlihat pada tarik ulur tentang perda RT/RW. Di dalam perda tersebut, kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki akses di birokrasi (pemkot) dan legislatif (dewan), mengatur peruntukan daerah. Di tingkat pelaksanaan, perebutan tata ruang kota terjadi di BPN untuk status tanah dan perijinan usaha di Dispenda.

¹⁴ Dan, kini terjadi perebutan akibat alih pemilikan dari Pemkot ke perusahaan atau milik pribadi, seperti kasus Gelora Pancasila dan Kolam Renang Brantas.

konflik antara pemkot dan warga yang tergusur akibat pelebaran jalan atau kepentingan umum karena ganti rugi terlalu rendah, seperti: kasus pelebaran jalan Kenjeran untuk *ring road* Timur. *Kelima*, konflik antara eksekutif dan Dewan (publik) karena peralihan aset pemkot tanpa persetujuan Dewan, seperti penjualan *bondho deso* di Pradah Kali Kendal), di Lakasantri dan pengalihan Pasar Induk Sayur Kendangsari. *Keenam*, konflik antara warga, investor dan pemkot karena pemkot membebaskan tanah penduduk dengan alasan untuk kepentingan umum, tetapi kenyataannya untuk kepentingan swasta, seperti: kasus Tubanan, Kasus Pradah Kalikendal, kasus makam Kalidami, dan kasus penggusuran rumah warga Gang Kaliasin Pompa (Kedungdoro), *Ketujuh*, penggunaan tanah fasilitas umum yang tidak jelas dan dijual oleh developer, seperti: kasus tanah YKP di Balongsari dan berbagai kompleks perumahan. Terakhir, konflik akibat salah prosedur dari pihak pemkot, seperti kesalahan pembebasan tanah dan penyimpangan uang dalam kasus SSC dan kasus dua SK untuk bidang tanah yang sama di Dukuh Kupang Timur.

Penggusuran demi tata ruang kota, dengan kata lain ada perubahan peruntukan lahan ini, bagi masyarakat rentan kota sangat berpengaruh. Mereka tidak saja kehilangan tempat tinggalnya, tetapi juga kehilangan mata pencaharian. Oleh karenanya, warga di sekitar Padegiling misalnya, hingga kini tetap bertahan tidak mau pindah. “Berapa pun ganti rugi, asal bisa dapat rumah dan bangun usaha lagi. Kami bersedia.”¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan salah seorang warga Padegiling, tanggal 30 Juli 2005.

Tabel 9.1
Penggusuran dan Kurbannya di Surabaya Tahun 1990-sekarang

Tahun ¹⁶	Penggusuran	Keluarga	Warga
2005	2 kasus	---	500
2004	1 kasus	---	50
2002	3 kasus	200	8.000
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200
1992-1993	26 kasus	109	2.913
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200

Sumber: Suyanto (1996), Supramudyo (2000), dan *UPC-link* (2005)

Namun demikian, dari seluruh kasus tersebut, tidak satupun berpihak pada warga. Pemkot lebih cenderung berpihak pada investor. Pada tahun 2003-2005 peremajaan pasar tradisional misalnya telah mengakibatkan kerugian bagi pedagang tradisional. Di Wonokromo misalnya, pedagang tidak lagi bisa berjualan selama 24 jam, tetapi dibatasi hingga pukul 21.00. Tokonya jauh lebih sempit dibandingkan dengan pasar lama. Mereka, pedagang lama juga tetap harus membeli, sehingga ketika relokasi kembali sebagian mereka tidak setuju, bahkan dari pengamatan¹⁷ di lapangan sejumlah pedagang menderita stress, terutama mereka yang tidak memiliki uang.

¹⁶ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

¹⁷ Pengamatan bulan Januari s/d Mei 2005.

UMR, UMK, dan Sistem Kontrak versus Kenaikan BBM

Persoalan lain dalam masyarakat rentan kota adalah upah. Selain bekerja di sektor informal, sebagian masyarakat tersebut bekerja di pabrik, pusat perbelanjaan (toko) dan perkantoran. Mereka tinggal tidak pernah jauh dari tempat kerjanya, seperti yang telah disebutkan di kampung-kampung tengah kota untuk pusat perbelanjaan, dan kampung-kampung sekitar pabrik, seperti Rungkut, Ngagel, dan Dupak. Sebagian lain membeli rumah tipe RSS jauh di pinggir kota, bahkan di luar kota, seperti Driyorejo. Tinggal kost di dekat tempat bekerja dan membeli rumah di pinggir kota sebenarnya tidak jauh berbeda karena pengeluaran rumah tangga kurang lebih sama. Mereka yang tinggal di tempat kerja harus membayar kost dan biaya lainnya, sementara itu bila di pinggir kota harus mengeluarkan uang transport yang kuang lebih sama besarnya.

Ada perbedaan pendapatan (upah), bagi mereka yang bekerja di di toko, restoran, atau usaha rumah tanggan lainnya, upahnya sering di bawah standar UMR, tidak jaminan kesehatan, meski memperoleh uang makan. Kelebihannya, hubungan antara pekerja dan pemilik bersifat personal, kekeluargaan, hal itu bergantung pada pemiliknya. Tidak jarang, sering terjadi kekerasan atau pelecehdan karena pemilik bersifat sewenang-wenang.

Sementara itu, mereka yang bekerja di pabrik memperoleh upah per harinya. Upah tersebut dapat dibayar setiap minggu, atau setiap bulan. Selain menerima upahnya, sering perusahaan juga memberikan uang makan, dan insentif lainnya. Perusahaan biasanya menyertakan buruhnya (tetap) ke dalam jamsostek. Preminya dibayar setiap hari oleh perusahaan, namun bila tidak masuk dengan (tanpa) ijin upah buruh dipotong oleh premi tersebut.

Upah tersebut mengalami kenaikan yang ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhannya. Pada tahun 1990-an, upah tersebut berdasarkan patokan kebutuhan fisik minimum (KFM) dengan juga mempertimbangkan tingkat inflasi pada harga-harga barang. Ukuran KFM ini memiliki kelemahan. KFM bujangan diukur dengan 2.600 kalori/hari, K-2 (KFM untuk seorang buruh, isteri dan dua anak) setara dengan 8.100 kalori/hari, bila dengan tiga anak, maka KFM setara dengan 10.000 kalori/hari. Kriteria ini menjadi kelemahan pertama dari ukuran tersebut, buruh disetarakan dengan alat produksi dan upah disetarakan dengan tenaga yang dikeluarkan. Kelemahan kedua, barang-barang yang digunakan untuk mengukur KFM hanya berdasarkan kebutuhan buruh laki-laki yang jauh lebih sederhana daripada kebutuhan buruh perempuan (Rudiono, 1992: 70-71).

Dari ukuran ini, kemudian setiap propinsi menetapkan upah minimumnya yang dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional). Asumsinya, harga barang pada setiap propinsi berbeda, oleh karenanya upah minimum buruh pun berbeda. Pada pemerintahan Suharto, upah minimum tersebut ditentukan tidak saja hanya pada wilayah propinsi, tetapi pada wilayah kabupaten atau kota dengan dikenal UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum tersebut tidak saja berdasarkan kebutuhan fisik minimum, tetapi kebutuhan hidup minimum, yaitu dengan menambah beberapa komponen barang kebutuhan lainnya.

Bila pada tahun 1980-an dengan mengikuti hasil kajian Rudiono (1992: 70-76) berdasarkan perbandingan data tahun 1982, 1985 dan 1988, maka upah tersebut tidak pernah melebihi 60% dari KFM, perbandingan tertinggi dicapai di DI Aceh (kini NAD) pada tahun 1982, yaitu 84,6% dari KFM. Kini, untuk Jawa Timur, UMR yang ditetapkan telah sedikit melebihi dari KFM, yaitu sekitar 4%. Kenaikan tersebut menjadi tidak berarti karena

bersamaan dengan penetapan UMR, harga-harga kebutuhan pun semakin naik, terutama kebutuhan bahan pokok (Dinas Infokom Jatim, 2004a).

Bila memperhatikan tabel 9.2, meski kenaikan harga beras berjalan secara linear dengan tidak tajam,¹⁸ tetapi sebenarnya biaya hidup telah meningkat seiring harga BBM yang sering kali ditetapkan pada pertengahan tahun tersebut. Ada perbedaan pola yang dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) dan pemerintahan sesudahnya. Bila pada masa pemerintahan Suharto, kenaikan BBM tidak secara transparan dan terkesan mendadak, sehingga kenaikan harga terjadi pada paska kenaikan harga tersebut. Sementara itu, pada pemerintahan sesudahnya, rencana kenaikan harga tersebut telah disampaikan antara tiga hingga empat bulan sebelumnya. Pada saat pengumuman rencana kenaikan tersebut, para pedagang telah menaikkan harga, dan kemudian berlanjut pada saat penetapan harga baru BBM. Lebih celaka lagi, kenaikan harga BBM sering diikuti oleh kenaikan harga air minum dan tarif dasar PLN.

¹⁸ Pemerintah melakukan pengendalian harga beras dengan cara membuka kran impor beras dari Vietnam dan Cina, sehingga harga beras lokal menjadi jatuh karena secara bersamaan sering dilakukan pada musim panen. Kebijakan ini sangat merugikan kelompok petani (baca **Kompas**, 24 September 2005, "Menggugat Kebijakan Absurd Impor Beras.").

Tabel 9.2.
UMR/UMK Surabaya, BBM, Harga Beras, Emas, Premium dan Kurs
Rupiah thp Dollar tahun 1990-sekarang

Dalam rupiah

Tahun ¹⁹	UMR & UMK	Komoditi		Bahan Bakar Minyak		Kurs Rupiah thp Dollar
		Beras	Emas ²⁰	M. Tanah ²¹	Premium	
2005	578.500	4.000	123.000	700-1.800	1.810-2.400	9.900
2004	550.580	3.700	114.000	700-1.800	1.810	8.900
2003	515.850	3.500	90.000	700-1.800	1.810	8.250
2002	453.500	3.500	80.000	820-1.530	1.450-1.750	8.250
2001	330.700	3.300	76.000	895-400	1.150-1.450	8.250
2000	270.000	3.100	110.000	350	1.150	8.250
1999	230.000	3.000	90.000	350	1.000	8.250
1998	---	1.350-4.500	140.000	280-350	1.000-1.200	2.375-10.500
1997	132.500	1.350	140.000	280	700	2.478
1993-1997	---	800	90.000	280	700	2.000
1991-1993	89.677	700	26.000	220	550	2.000
1990-1991	78.000	600	22.000	190-220	450	2.000
1986-1990	63.285	200-500	10.000	165	385	1.644

Sumber: Kwik (1998), Rudiono (1991) Dinas Infokom Jatim (2005a, 2005b, dan 2005c), Tabor dan Sawit (2001), Pertamina (2005), Astono dan Rosyadi (1997), **Tempo** (1991), 89.677Rahman (1994).

¹⁹ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

²⁰ Harga emas berfluktuasi mengikuti harga emas dunia dan kebutuhan dalam waktu tertentu, seperti: pada waktu puasa harga turun, namun beberapa hari sebelum hari raya harga emas naik, dan akan jatuh kembali sesudah hari raya.

²¹ Selain menentukan patokan harga, untuk minyak tanah Pemerintah menentukan harga eceran tertinggi (HET).

Pemerintah seringkali menenangkan dengan mengatakan tidak ada kenaikan harga yang berarti, atau akan mengadakan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Namun demikian, pada kenyataannya kenaikan tersebut bisa mencapai 100%., dan, bagi masyarakat miskin kota, seberapa pun kenaikannya harga sangat berpengaruh pada kehidupannya. Hal itu akan berpengaruh pada usahanya (sektor informal), seperti dikatakan oleh penjual nasi pecel, *“Ngene iki susah. Ora mundak no rego sing tuku iyo wis kurang. Opo maneh mundakna rego, ora ono sing tuku. Aku bakal rugi. Ora balek modal. Pilih rego tetap, untunge sithik, sing penting mlaku terus”* (Kalau begini susah. Tidak menaikkan harga saja orang yang beli semakin berkurang. Apalagi menaikkan harga, tidak ada yang beli. Saya bisa rugi. Tidak kembali modal. Saya pilih harga tetap, untung sedikit).

Kondisi buruh pabrik jauh tidak beruntung. Kenaikan UMR, kenaikan BBM dan kurs rupiah terhadap dollar sering mengakibatkan pabrik bangkrut, *“apalagi sekarang harus berhadapan dengan barang-barang Cina yang murah.”* Ketika sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bangkrut, perusahaan menggunakan banyak cara untuk mem-PHK, mulai dari secara ketat mencari kesalahan dari buruhnya hingga langsung mem-PHK dan menyerahkannya pada Disnaker dalam proses P4P. Meskipun tidak jarang dimenangkan pihak buruh, tetapi jarang dilaksanakan eksekusi keputusan tersebut. Sementara itu, buruh terus menunggu tanpa pesangon dan mencari pekerjaan lain.

Tahun 2005 ini, peraturan perundang-undangan terbaru memungkinkan pengusaha untuk menggunakan sistem kontrak. Sistem kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, sesudah dapat diperbaharui. Cara ini kini yang dipakai oleh pengusaha, dengan sistem ini tidak perlu mengeluarkan uang pesangon, dan pekerja cenderung tidak menuntut karena takut tidak diperpanjang. Ada kecenderungan perusahaan memilih sistem kontrak. Untuk itu, perusahaan sering merubah suasana kerja, sehingga karyawan

tetap tidak betah, memilih keluar (mengundurkan diri) dan kemudian memasukkan karyawan baru. *“Wah, tepat saya sekarang ketat banget. Salah sedikit, langsung di-SP. Kalau sudah lebih dari dua kali, disuruh membuat surat pengunduran diri,”* seperti yang dikatakan oleh seorang karyawan pusat perbelanjaan yang ada di tengah kota Surabaya.

Selain penggunaan sistem kontrak, pengusaha juga menggunakan sistem kerja borongan, upah bergantung dari tingkat produktivitas buruh. *“Iya, pernah saya hanya memperoleh lima puluh ribu rupiah seminggu. Apa cukup untuk makan? Iya, ngutang ke tetangga, kalau diberi,”* kata Mbak T, seorang buruh yang berstatus janda dengan dua anak. Di dalam sistem borongan tersebut, buruh bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing. Setiap ada barang yang hendak dikerjakan, maka kelompok-kelompok itu berebut dan mengerjakan sebanyak mungkin. *“Kalah berebut, maka hasilnya sangat sedikit,”* tambah Mbak T.

Dalam sistem ini, pengusaha hanya membayar sesuai dengan hasil produk yang dikerjakan. Tidak ada tambahan, seperti: uang makan dan uang kehadiran. Ikatan antara buruh dan pengusaha hanya sebatas ada tidaknya pekerjaan borongan. Bila tidak ada pekerjaan borongan, maka buruh pun menganggur di rumah. Buruh hanya menunggu panggilan dari pabrik. Sementara menunggu pekerjaan, buruh menggunakan tabungannya untuk bekerja ke sektor informal, seperti berjualan pentol bakso dengan sepeda *pancal*.

Mahasiswa sebagai Gaya Hidup Kelas Menengah Kota

Dari pengamatan di lapangan, meski tidak ada penelitian yang menggambarkan adanya korelasi antara status sosial ekonomi dan pilihan universitas, fakultas berikut jurusanannya, nampak terjadi segregasi mahasiswa dari status sosial ekonominya. Untuk perguruan tinggi swasta, mahasiswa yang

berasal dari status sosial ekonomi menengah ke atas lebih memilih Ubaya (Universitas Surabaya), UK Petra, dan WM (Universitas Widya Mandala). Pola yang demikian ini terjadi pula pada mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Oleh karenanya, harga kost di sekitar kampus tersebut bisa mencapai di atas 1 (satu) juta. Di sekitar kampus UK Petra, kamar kost di daerah Siwalankerto mencapai harga 3 juta dengan iklan “*kamar kost dengan fasilitas hotel berbintang.*”

Sementara itu, kelompok mahasiswa berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah memilih tinggal di kamar kost dengan harga 100 ribu ke bawah. Mereka tinggal di daerah kampung-kampung yang padat. Kamar kostnya diisi dua hingga empat orang dengan tempat tidur susun. Dari pengakuan seorang mahasiswa Unesa, Ani (bukan nama sebenarnya), mereka mendapat kiriman sekitar 300 ribu hingga 500 ribu rupiah. Seratus ribu untuk kamar kost, sisanya untuk makan, perlengkapan sehari-hari (sabun, shampo dan odol) dan buku. Jatah makan sehari adalah 10 ribu rupiah, dan sering mereka hanya makan dua kali sehari.

Dengan jumlah kiriman yang terbatas, mereka menerapkan strategi adaptif yang unik diamati. Ada berbagai cara, antara lain: hanya membeli lauk, sedangkan nasi ditanak sendiri, bahkan ada yang mengakui bahwa pada minggu terakhir setiap bulan hanya makan nasi, krupuk dan sambal, atau makan 2 (dua) kali sehari. Tempat tinggal juga disiasati, mulai dari cara kontrak dengan beberapa teman, hingga tinggal di UKM dan Masjid Kampus. Untuk keperluan buku, mereka memilih untuk meminjam pada kakak kelas, fotokopi pada bagian tertentu saja, atau ke perpustakaan, terutama pada saat menjelang ujian.

Pola konsumtif pun berbeda, pada mahasiswa kelas menengah ke atas selalu membawa HP, bahkan HP tersebut berfitur kamera dan movie. Pakaian dan kendaraan yang digunakan pun berbeda dan bergantung dari asal kelas ekonominya. Mobil

setingkat sedan atau niaga terbaru (kijang dan panter) sering berada di parkir kampus-kampus universitas (lihat tabel 9.4). Malam hari, tidak selalu bergantung pada hari kuliah atau tidak, mereka mengunjungi kafe-kafe, seperti Hugo Kafe. Di dalam setiap percakapan, mahasiswa kelas menengah ke atas sering berbicara mengenai tempat-tempat dugem baru. Untuk pergi ke tempat dugem, meeka berkelompok atau berpasang-pasangan dengan membawa mobil.

Tabel 9.3
Mahasiswa antara Status Sosial Ekonomi dan Pilihan Jurusan dan Universitas

Status Sosial Ekonomi	Perguruan Tinggi		Fakultas/Jurusan
	Negeri	Swasta	
Atas	Univ. Airlangga dan ITS	Ubaya, UK Petra dan Widya Mandala	Teknik Arsitektur, Teknik Informatika Kedokteran (Umum dan Gigi), Ekonomi Akuntansi.
Menengah	Univ. Airlangga dan Unesa	Untag 17 Agustus, Unitomo, Univ. Hang Tuah, dan UPN	Teknik Industri, Teknik Sipil, Ekonomi, Ilmu-ilmu Sosial dan MIPA
Bawah	Unesa dan IAIN	Ubhara, Unipa, UWP dll	Pendidikan, Politeknik dan Program Diploma (D1-D3)

Sumber: pengamatan

Mahasiswa dari kelas menengah (baru) mengambil bentuk hendak meniru kelas atas. Caranya, antara lain dengan pemilikan HP, meskipun beberapa di antaranya harus memilih tidak membeli buku teks. Pulsa yang digunakan sering dalam jumlah relatif besar, 200 ribu per bulan. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa dari kelas menengah atas, namun tidak harus berhemat. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan niaga keluaran paling muda adalah lima tahun terakhir.

Tabel 9.4.
Status Sosial Ekonomi Mahasiswa dan Gaya Hidup

Status Sosial Ekonomi	Pekerjaan Orang Tua (Bapak)	Ikon-ikon Budaya			
		Tempat Tinggal	Kendaraan	HP dan fitur	Barang/Kegiat an Konsumtif
Atas	Pengusaha (besar), Birokrasi Pemerintah dgn es. I	Rumah sendiri di perum. elit atau tipe 45 ke atas; kost dgn harga di atas 500 ribu/bulan.	Mobil, se- peda motor laki-laki dgn cc di atas 125,	HP dgn kamera dan movie	Kafe atau tempat dugem lainnya.
Menengah	Wiraswasta, birokrasi pemerintah dgn es II, Guru dan Dosen, pemilik tambak luas, petani kaya.	Rumah sendiri di perumahan dgn tipe 36, kost dgn harga 200-500 ribu/bulan.	Sepeda motor terbaru	HP	Ke Kafe, atau Jalan-jalan di Mall.
Bawah	Mracang, petani kecil, buruh dan sektor informal lain- nya	Rumah sendiri di kampungan atau rumah RSS, kost dgn harga di bawah 200 ribu.	Sepeda motor dgn usia di atas 3 tahun, kendaraan umum, dan jalan kaki	Tidak ber-HP	Jalan-jalan ke Mall dgn frekuensi yg terbatas

Sumber : Pengamatan; bandingkan dgn **Kompas**, 30 September 1996. hal. 4.

Teater Kampus sebagai Bentuk Aktualisasi Diri

Seni teater merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara seni gerak, suara dan musik. Dalam seni tersebut, ada satu arahan cerita yang dibawa para pelakon. Arahan cerita tersebut bisa berasal dari tradisi lisan rakyat atau diangkat dari novel. Di Indonesia, seni teater ini, selain teater modern, seniman juga membawakan seni pertunjukkan tradisional, seperti

wayang orang, ketoprak atau kentrung. Di Jawa Timur, khususnya di wilayah pantura, ludruk tumbuh pada awal abad ke XX.

Tidak ada tulisan yang menggambarkan kapan teater memasuki dunia kaum intelektual, seperti mahasiswa. Djoko Soekiman (2000) menunjukkan bahwa seni pertunjukan tumbuh seiring dengan liberalisasi ekonomi. Seni tersebut dimainkan oleh para “budak” untuk memberikan kegembiraan bagi para “tuan.” Seni pertunjukan tersebut merupakan salah satu penciri dari kebudayaan indis.

Setelah keluar dari kampus, memang kaum intelektual Indonesia, seperti Sukarno, mengembangkan seni pertunjukan sebagai bagian dari *counter hegemoni* terhadap pemerintah kolonial. Ketika di Bengkulu, dalam pembuangannya, Sukarno membentuk kelompok teater. Hal yang serupa dilakukan pula oleh tokoh-tokoh pergerakan di Surabaya tatkala mengadakan pasar malam untuk mengumpulkan dana. Mereka mengundang seniman teater tradisional dan memasukkan ide-ide kritik pada pemerintah kolonial Belanda (Mustadji dan Sadewo, 1992).

Untuk lingkungan kampus pada pemerintahan Suharto hingga sekarang, seni pertunjukan kampus (teater kampus) tumbuh sebagai bagian dari Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) (1978-1998). Pada masa Daoed Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi mahasiswa diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan lebih mengembangkan kemampuan profesinya daripada terlibat dalam aksi politik (turun ke jalan). Dalam istilahnya, mahasiswa dikembangkan menjadi menara gading. Oleh karenanya, organisasi intra kampus direstrukturisasi, dema dihapus, digantikan dengan Sema (senat mahasiswa) dan BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) di tingkat fakultas, dan himakjur (himpunan mahasiswa jurusan) di tingkat jurusan dan himaprodi di tingkat program studi. Senat Mahasiswa dipimpin oleh ketua Senat yang dipilih oleh anggota BPM. Ia biasanya membawahi tiga bidang, yaitu (1) akademis, (2) minat dan bakat,

dan (3) kesejahteraan. Sementara itu, di tingkat universitas/institut dibentuk berbagai unit kegiatan mahasiswa, mulai dari olah raga, keagamaan hingga seni. Dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM), seni teater berkembang di kampus. Seni yang dikembangkan mengambil berbagai bentuk, mulai dari seni teater tradisional, seperti ketoprak, ludruk dan ketrung, hingga seni teater modern.

Tabel 9.5.
Perkiraan Jumlah Teater Kampus dan Anggotanya
di Surabaya

Jenis	Jumlah
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	
a. Teater Kampus	15
b. Anggota	350
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	
a. Teater Kampus	10-20
b. Anggota	200

Sumber : pengamatan

Dari perguruan tinggi negeri di Surabaya, IAIN memiliki jumlah terbanyak. Selain di tingkat institut sebagai UKM, setiap fakultas memiliki setidaknya-tidaknya satu teater kampus, bahkan ada pula teater kampus di tingkat jurusan. Setiap teater kampus memang tidak memiliki jumlah anggota yang besar, antara 10-20 orang, ada beberapa di antaranya aktif tidak di satu teater, misalnya: di tingkat institut dan fakultas. Mereka ini menjadi penggerak teater di tingkat lokal (fakultas dan jurusan). Teater ini mengisi setiap kegiatan/acara di tingkat fakultas dan jurusan. Menarik dicermati, selain Teater Kampus SUA (Sunan Ampel)

yang berbentuk UKM di tingkat institut, teater di tingkat fakultas, seperti Teater Q merupakan teater resmi di bawah pembinaan Pembantu Dekan III.

Tidak jauh dari IAIN Sunan Ampel, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang merupakan metamorfosa dari IKIP Surabaya – akibat kebijakan pemerintah untuk memberikan *double mandate* kepada seluruh IKIP di Indonesia – memiliki 2 (dua) teater kampus di tingkat institut, antara lain: teater institut dan saloka. Keanggotaan teater tersebut didukung oleh mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra, antara lain: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah dan Program Studi Sendratasik, dan dari Fakultas Ilmu Sosial, antara lain: Jurusan Pendidikan Sejarah. Teater Institut pada tahun 1990 hingga tahun 2002 cukup aktif dengan menampilkan setidaknya-tidaknya 2-4 lakon setiap semester, atau kurang lebih satu bulan sekali. Cerita lakon yang ditampilkan bisa merupakan hasil karya anggotanya, cerita adaptasi dari luar, seperti: Anton Chekov, dan cerita Cina, Sampek Engtay. Jumlah anggotanya lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Berbeda dengan Teater Institut, Saloka (Sanggar Ludruk dan Ketoprak mengambil bentuk teater tradisional, seperti: Ludruk dan Ketoprak. Dua tahun terakhir ini Saloka juga memainkan teater tradisional pesisiran, yaitu Kentrung. Bentuk teater kentrung ini dikenalkan oleh dosennya, Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo (alm) yang menulis disertasi tentang seni tersebut. Cerita lakonnya tidak terbatas pada cerita tradisional kentrung, tetapi sering menggunakan tema-tema baru. Pengaruh guru besar tersebut sangat kuat karena sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Selain kedua teater tersebut, ada satu teater yang bukan merupakan UKM. Teater tersebut berdiri dari tahun 1997 hingga 2000, sebut saja

teater Sanggar Abu-abu yang dipimpin oleh mahasiswa fakultas bahasa dan sastra, T²².

Hal yang serupa di ITS dan Unair. Teater kampus di ITS berkembang pesat tatkala mampu bergabung dengan stasiun televisi lokal, yaitu: JTV. Acara yang dikembangkan adalah bentuk teater tradisional, yaitu: ludruk dan kentrung. Ide-ide ceritanya bervariasi, dari cerita tradisional hingga ke cerita modern, bahkan mereka melakukan eksperimen dengan mengambil bentuk kontemporer dan menyebutnya *funky*.

Di perguruan tinggi swasta, ada 2 (dua) teater kampus yang menarik dicermati. Pertama, teater kampus “Kusuma” dari Universitas 17 Agustus 1945. Jumlah anggotanya sangat besar, hampir mencapai 100 orang. Mereka tidak saja memainkan di tingkat universitas, tetapi sering diundang untuk mengisi acara seni. Bentuk teaternya bisa berubah-ubah, dari teater tradisional hingga teater modern. Sementara itu, teater berikutnya adalah teater dari Fakultas Bahasa, UK-Petra. Karena didukung oleh Jurusan Bahasa Inggris, mereka mengambil bentuk teater modern dengan menggunakan Bahasa Inggris. Ide-ide cerita pun diadaptasi dari novel-novel berbahasa asing tersebut, seperti: Romeo dan Juliet. Bagi anggotanya, teater ini memiliki fungsi untuk melatih kemampuan percakapan.

Teater Panggung atau Teater Jalanan sebuah Pilihan Berekspresi

Kebebasan untuk Berekspresi

Menjadi pertanyaan mengapa mahasiswa memilih unit kegiatan teater, atau bahkan mendirikan teater tanpa harus

²² T sendiri kini menjadi aktivis salah satu partai nasionalis, peserta pemilu 2004.

memperoleh pembinaan dari pihak rektorat, seperti pada Teater Abu-abu. Salah satu jawabannya adalah “orang teater itu bebas.” Seperti yang dicermati di lapangan, aktivis teater kampus relatif lebih longgar dalam menghadapi aturan-aturan di kampus. Sebagian besar hanya berpakaian kaos oblong dan celana jeans. Rambutnya panjang. Dari penampilan itu, seperti yang dikatakan oleh HT, seorang mahasiswa ITATS yang menjadi aktivis teater Topeng, *“Ini bukan persoalan penampilan, tetapi idealisme. Ia berani tampil beda. Mungkin kami dianggap nyeleneh. Tapi, kami tidak ingin membongki diri kami dengan penampilan.”*

Terkesan sangat bebas lagi bila melihat mahasiswa anggota UKM Teater Institut dan Saloka Unesa. Sebagian besar berasal dari mahasiswa yang mendekati batas waktu, yaitu semester 13 dan 15 (angkatan tahun 1998 dan tahun 1999). *“Saya suka status sekarang ini. Mahasiswa. Saya tidak peduli kapan lulus. Toh, kalau lulus, tidak bekerja juga percuma. Saya di sini tetap bisa kritis dan kreatif.* Namun demikian, tidak berarti tidak ada aktivis teater kampus yang berprestasi dalam bidang akademik. Ada beberapa di antaranya tercatat sebagai mahasiswa yang berprestasi, sehingga memperoleh beasiswa.

Nilai kebebasan dan kreatifitas yang menjadi tujuan dari mahasiswa tersebut tidak saja terletak pada penampilan, tetapi juga terlihat pada lakon-lakon yang dimainkan. Selain mengadopsi cerita naskah dari pengarang terkenal, kemampuan analitis dari stiatusi sekitarnya terletak cerita naskah yang dimainkan. Dengan terjun di masyarakat, dengan mendatangi dan menangkap fenomena, mereka dapat membuat naskah cerita untuk lakon yang akan dimainkan pada hari atau minggu berikutnya. Mereka menangkap fenomena itu ketika jalan-jalan dan duduk di warung dan mendengar percakapan orang-orang tersebut.

Dalam pembuatan naskah cerita, mereka pertama kali membuat dalam bentuk ringkasan cerita, atau dikenal dengan sinopsis. Kemudian, secara bersama-sama menyusun tata urutan gerak dan percakapan. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah

latihan dua hingga empat kali, sekitar hampir satu bulan lamanya. Di dalam latihan itu, setiap anggota diberi tugas menjadi lakon apa-apa. Setiap orang kemudian menghafal dan menghayati perannya. Bila tidak kebagian peran, mereka masih memiliki tugas untuk meminjamkan ruang hingga promosi.

Penjiwaan sebuah peran ini dilatih dari pertama kali seseorang menjadi anggota. ketika menjadi anggota, mereka harus ikut masa orientasi, oleh “senior” (mahasiswa yang lebih dulu menjadi anggota) ke gunung. Selain latihan fisik dan mental, tetapi mereka lebih menekankan latihan mental, seperti dibentuk-bentak, agar “*lebih berani tampil dan nggak duwe isin* (tidak mudah malu),” bahkan lari sambil memaki-maki dirinya sendiri. Pada waktu malam hari, latihan penjiwaan dilakukan dengan membawa anggota ke tempat yang sunyi. Tidak ada suara. Berikutnya, seorang senior meminta membayangkan, mengingat atau merasakan sesuatu pada dirinya. Akibatnya, ada peserta tiba-tiba menangis karena mengingat orang tua di rumahnya. Orang awam akan melihat mereka seperti kerasukan roh, namun bagi mereka hal itu merupakan bagian dari penjiwaan.

Komodifikasi Teater

Dari latihan menghafal naskah cerita dan dialog, penjiwaan terhadap peran yang dimainkan, hingga mengembangkan koreografi (menciptakan latar panggung sesuai dengan naskah), teater kampus sering kemudian menampilkannya dalam panggung. Secara rutin, hingga tahun 2001, hampir satu-dua bulan sekali Teater Institut (Unesa) misalnya menampilkannya di Gedung I6, gedung yang sudah dirancang sebagai ruang pertemuan, berikut panggung di dalamnya. Sementara itu, mereka sering berlatih pada malam hari di lapangan pementasan yang berbentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk berundak-undak.

Teater-teater lain juga memiliki pola yang serupa, setidaknya tidaknya satu semester sekali. *“Prosesnya cukup lama, Mas. Mencari ide cerita sekitar dan mematangkan hingga jadi naskah cerita berikut dialognya itu bisa satu bulan lamanya.. Menghafal, sambil mengatur laku dan lebih penting lagi mengatur panggung.”* Naskah jauh lebih mudah bila melakukan adaptasi dari cerita rakyat. Lakon-lakon sudah dikenal, sehingga tidak memerlukan perhatian yang lebih serius. *“Cukup mengumpulkan anggota, beritahu cerita rakyat apa yang digunakan. Kemudian, anggota langsung didapuk satu per satu menjadi apa. Dialognya diserahkan pada para pemain. Di panggung, antar pemeran saling lempar dialog.”* Untuk memikat penonton, teater kampus sering menampilkan drama komedi *satiris* (mengkritik).

Bila berstatus UKM, maka kegiatan pementasan akan dijadwalkan rutin setiap semester, dan didanai oleh pihak rektorat. Dana yang berasal dari tiket masuk hanya menutupi kerugian bila ternyata diperlukan biaya yang lebih besar. Pos-pos yang ada dalam setiap pementasan, mulai dari konsumsi, kostum, hingga hiasan panggung dan *balibo* untuk iklan pementasan. Namun demikian, tidak berarti harus mengeluarkan biaya tersebut. Baliho dipakai secara berulang-ulang, dengan mencat kembali dan menulis ulang. Kostum diusahakan seperti pakaian sehari-hari. Hanya hiasan panggung sering harus berubah, tergantung pada naskahnya. Bila ada kelebihan dana, maka disimpan dalam kas teater kampus. Hal ini tidak saja terjadi pada Teater Institut (UNESA), tetapi juga pada Teater Sua (IAIN Sunan Ampel), Teater Kusuma (Untag), dan Teater Crystal (UPN).

Oleh karenanya, meskipun selalu menampilkan sosok yang mengedepankan kebebasan dan kreativitas, teater kampus tetap juga terorganisir. Kepengurusan selalu dipilih setiap dua tahun sekali. Di dalam strukturnya, beberapa teater kampus memiliki divisi kerumahtanggaan atau perlengkapan. Divisi ini bertugas untuk mulai dari perlengkapan tata ruang teater, kebersihan sanggar hingga logistik, termasuk di dalamnya kostum untuk

pentas teater, seperti yang kini dijabat oleh Alle, salah seorang pemain Teater Kusuma Untag.

Selain di kampus, mereka, UKM di tingkat universitas/institut ini juga tampil ke pentas lomba teater di tingkat lokal (kota),²³ propinsi atau nasional. Keikutsertaannya sebagai ajang prestise, apalagi bisa memenangkan. Penilaian dimulai dari orisinalitas naskah cerita yang dipentaskan, koreografi (tata gerak), hingga latar panggung. Oleh karenanya, bila mengikuti kegiatan tersebut, setiap teater mempersiapkan dengan serius. Pihak rektorat mendukung kegiatan teater kampus, mulai dari pendanaan hingga akomodasi dan transportasi.

Bila bukan UKM Institut/Universitas, teater kampus ini lebih mengandalkan kegiatan fakultas/jurusan. Setiap awal tahun ajaran senat mahasiswa (SEMA) fakultas/jurusan atau kini dikenal dengan istilah badan eksekutif mahasiswa (BEM) mengadakan pesta seni. Pesta seni dilakukan setelah perlombaan olah raga antar angkatan untuk jurusan, atau antar jurusan untuk fakultas. Selain karena sebagian anggota teater juga pengurus BEM tersebut, BEM juga membutuhkan teater kampus untuk memeriahkan acara pentas seni.

Teater non-UKM, baik di tingkat institut/universitas maupun fakultas, atau sebut saja teater kampus independen, seperti Sanggar Abu-abu di Unesa pada tahun 1997-2000. Mereka melakukan teater jalanan. Artinya, mereka mementaskan ketika melakukan demonstrasi. Pada waktu hari pertama ujian tertulis SPMB tahun 2000, mereka melakukan aksi teaternya dengan berpakaian compang-camping, bahkan salah satunya hanya menggunakan celana pendek. Seluruh tubuh dilumuri oleh cat air hitam. Mereka berlari memasuki ruang, tepatnya lorong-lorong

²³ Biasanya diadakan oleh Dewan Seni/Kebudayaan Kota atau Diknas Kab./Kota. Di Surabaya, kegiatan tersebut diadakan dalam Festival Seni Surabaya pada bulan Mei setiap tahunnya.

dalam gedung I7 (dari markasnya di gedung H) hingga ke gerbang UNESA, sambil berteriak-teriak, "*Aku tidak bisa sekolah. Biaya Pendidikan Mahal. Percuma kuliah, kalau akhirnya menjadi pengangguran.*" Paling akhir, salah satu di antara pemain berdiri di atas *kap* mobil (milik dosen). Kegiatan teater jalanan ini segera direaksi karena mengganggu ketenangan pada waktu ujian, terlebih lagi seorang dosen sempat bersitegang ketika kapnya diinjak-injak oleh mahasiswa tersebut.

Setelah beberapa kali melakukan aksi mengkritisi kampus dan lingkungan (masalah banjir), aktivitas teater tersebut "berakhir" tatkala ketua teater, T, hendak melakukan aksi pada waktu wisuda. Rencana aksi ini diketahui oleh penyelenggara wisuda, yaitu panitia yudisium dari FIK-Unesa. Tindakan aksi T yang pada waktu itu juga sebagai wisudawan bisa dicegah. Karena dianggap mencoreng nama FIK, sejumlah mahasiswa FIK melakukan reaksi balik dengan menyerbu markas Teater Abu-abu pada waktu pagi hari. Karena serangan ini mendadak, para anggota Teater Abu-abu melarikan diri. Markas kemudian ditutup, sementara itu di kampus tersebar berita tentang penemuan "kondom" dan botol-botol minuman keras di markas, sehingga berkembang bahwa kehidupan anggota teater di markas tersebut sangat longgar. Selain seksualitas, isu-isu yang meruntuhkan imej teater ini adalah isu-isu moralitas, seperti aksinya adalah *pesanan*, dibayar, dan dapat dibelokkan ke sasaran lain bila diberi uang. Meski teater tersebut sudah bubar, anggota-anggotanya kemudian tersebar dalam berbagai aktivitas politik. T misalnya kemudian terlibat berbagai aksi kelompok masyarakat rentan kota, seperti buruh dan korban penggusuran. Aksinya berada di bawah naungan PDI-P, dan kemudian menjelang Pemilu 2004 menjadi salah satu pengurus kepemudaan di PNBK Surabaya.

Tabel 9.6.
Teater Panggung dan Teater Jalanan

No.	Karakteristik	Teater Panggung	Teater Jalanan
1.	Asal	teater UKM	teater UKM dan non-UKM
2.	Jumlah pemain	banyak	sedikit
3.	Naskah cerita	lengkap dan kompleks	singkat dan sederhana
4.	Tata panggung	diperlukan	tidak diperlukan
5.	Kostum	lebih rumit	sederhana, terkesan apa adanya
6.	Pengaturan gerak	sudah dirancang	spontan
7.	Penunjukkan pemain (pelakon)	dipersiapkan, dilatih	spontan
8.	Dialog	kompleks	spontan, sederhana, dan cenderung sedikit dialog
9.	Sponsor	universitas, fakultas, atau pihak lainnya, seperti: dewan seni kota.	LSM atau mandiri
10.	Penggunaan uang	Ada dana pembinaan dari lembaga tertinggi.	diberi uang traspor (“dibayar”), tidak ada uang traspor (tidak “dibayar”) bila secara internal melakukan pendampingan pada masyarakat rentan kota.

Kegiatan teater jalanan bukan sekedar monopoli teater non-UKM. Teater Kusuma misalnya juga melakukan teater jalanan (adekan teatrikal). Kegiatan tersebut biasanya merupakan undangan dari panitia atau penyelenggara aksi. Penyelenggara juga menentukan temanya. Kemudian, teater kampus merancang menjadi rangkaian adegan yang akan ditampilkan pada waktu aksi.

Untuk itu, mereka mendapat uang transport antara 450 ribu hingga 750 ribu rupiah. Pada waktu Hari Pahlawan 10 Nopember 2002 misalnya bersama dengan teater-teater kampus dari Yogyakarta, seperti ISI Yogyakarta, mereka mementaskan (merekonstruksi) peristiwa 10 Nopember 1945. Begitu pula, pada waktu aksi hari AIDS September 2004 atas permintaan salah satu yayasan peduli HIV/AIDS mengadakan teater jalanan mulai dari Jalan Raya Darmo, Basuki Rahmat dan hingga di Balai Pemuda dan Jalan Pahlawan. Selain teater Kusuma, kegiatan aksi tersebut juga diikuti oleh teater kampus se-Surabaya. Di dalam aksi tersebut, mereka menggambarkan bahaya akibat penyakit HIV/AIDS. Mereka berjalan dalam keadaan kurus, lemah dan sakit-sakitan.

Adegan Teatral:

Indikator Kolaborasi Mahasiswa dan Kelompok Miskin Kota

Ekstra Kampus, serikat buruh dan lsm sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan masyarakat rentan kota.

Sesuai dengan teori Robert K. Merton, bahwa seorang individu bisa memiliki beberapa status dan peran. Hal ini berkaitan dengan keanggotaan individu tersebut dalam berbagai kelompok masyarakat (Johnson, 1986), demikian anggota teater kampus. Di lingkungan kampus, mereka tak jarang aktif tidak saja di UKM Teater Kampus, tetapi juga menjadi UKM lainnya, seperti Alle yang menjadi anggota Teater Kusuma dan UKM Fotografi di Untag. Selain itu, mereka juga aktif di tingkat fakultas dan/atau jurusan, sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa.

Tabel 9.7.
Organisasi Ekstra Kampus, Serikat Buruh dan LSM (Jaringan)

No	Organisasi	Orientasi Ideologis	
		Agama	Nasionalis/Sosialisme
1.	Org. Ekstra Kampus		
	Hubungan terpisah dgn masy.rentan kota	IMM, HMI, PMKRI, dan GMKI	GMNI
	merakyat	PMII, KAMMI	FPPI, LMND, SMID, FMN
2.	Serikat Buruh	Sarbumusi	SBSI
3.	LSM		Pijar, Jakker, Jerit

Selain organisasi mahasiswa intra kampus, seperti senat mahasiswa (kini dikenal dengan badan eksekutif mahasiswa), badan perwakilan mahasiswa (kini, dewan legislatif mahasiswa) dan unit kegiatan mahasiswa, di luar kampus terdapat sejumlah organisasi ekstra kampus. Sebelum tahun 1996-an, organisasi ekstra kampus yang dikenal adalah Kelompok Cipayung, yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Pada tahun 1980-an, akibat pengasastunggalan Pancasila sebagai asas organisasi, HMI terpecah menjadi HMI dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). HMI MPO ini tidak menerima asas tunggal tersebut. Atas kebijakan Menteri Daud Yoesoef pada tahun 1978-an, yaitu NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan

Kampus)²⁴, organisasi tersebut tidak diperbolehkan “berada” di dalam kampus, meskipun pada kenyataannya organisasi ekstra (berikut alumninya) tetap bisa bermain dalam perebutan kursi di senat dan bpm. Sementara itu, “negara” (dalam tanda kutip) melalui ABRI juga sering bermain melalui organisasi kepemudaan, FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri ABRI).

Di luar kelompok Cipayung, terdapat organisasi ekstra mahasiswa. Organisasi ini nampaknya lahir dari aktivitas kelompok studi atau kelompok kajian, kemudian bergerak ke arah praksis menjadi aksi-aksi solidaritas dan akhirnya menjadi organisasi ekstra kampus, seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokratik), SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) dan Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ada pula yang memandang munculnya kelompok ini sebagai bentuk ketidakpuasan dari organisasi ekstra (Kelompok Cipayung) yang bersifat elitis dan hanya mengeluarkan catatan akhir tahun terhadap kebijakan dan ketimpangan sosial akibat pembangunan semasa pemerintahan Suharto.

Akibat kuatnya indoktrinasi pemerintahan Suharto melalui penataran P4 dan Opspek, tidak semua mahasiswa menyukai organisasi ekstra kampus dan LSM, seperti K yang melihat bahwa tidak ada gunanya ikut organisasi ekstra karena hanya demo, tidak ada aksi. Untuk melihat fenomena masyarakat yang dapat dijadikan ide cerita, *“Kita bisa saja baca di berbagai pemberitaan, seperti koran dan internet. Saya itu akurat dan datanya bisa untuk ide cerita, seperti yang dikatakan B, mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya.*

²⁴ Kebijakan ini tidak terlepas dari sikap kelompok Cipayung yang selalu mengkritisi pemerintahan Suharto, mulai dari kasus Malari 1974 tentang investasi asing hingga pemerintahan Suharto jatuh (lihat Pour, 1998, dalam kasus Sofyan Wanandi; perhatikan pula Aribowo, 1999). Padahal, kelompok ini dahulu turut mengguling pemerintahan Sukarno, dan mendukung Suharto dalam aksi bersama, KAMI pada tahun 1966-1967.

Namun demikian, sebagian lain anggota teater kampus justru memilih aktif di organisasi ekstra kampus, dan kecenderungannya, ketika aktivitas di organisasi ekstra semakin tinggi, maka ia mengurangi aktivitasnya di teater kampus. Organisasi ekstra tersebut tidak saja berdiri sendiri, tetapi memiliki jaringan pada kelompok rentan kota, seperti PMII dan Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia) karena ber-“naung” (dalam tanda kutip) di bawah NU (Nadhatul Ulama), begitu pula dengan SMID, LMND dan FMN yang memiliki hubungan dengan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) yang dulu dipimpin oleh Mochtar Pakpahan. SBSI adalah serikat buruh di luar “bentukan” pemerintah, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Sebagai serikat buruh, pengurusnya terdiri dari buruh yang aktivis dan aktivis buruh (orang di luar buruh) yang ber-*empati*. Aktivis buruh ini antara lain adalah mahasiswa, termasuk anggota teater kampus. Di luar buruh, ada pula *Jerit* (Jaringan Orang Tertindas), suatu jaringan yang memiliki hubungan dengan Konsorsium Orang Miskin Kota (*Urban Poor Consorsium*/UPC) di Jakarta yang dipimpin oleh Wardah Hafidz.

Membangun Isu-isu dan Beradegan dalam Demonstrasi

Empati, suatu kemampuan individu dalam membayangkan berada dalam posisi orang di luar dirinya, terbentuk tatkala mereka melakukan pendampingan bersama organisasi ekstra kampus yang bekerja sama dengan organisasi atau jaringan masyarakat rentan kota, seperti *Jerit*, *Sarbumusi* dan SBSI. Kelompok mahasiswa, dalam hal ini aktivis teater kampus tersebut sering “meninggalkan” (dalam tanda kutip) statusnya dan menjadi buruh atau tinggal di kampung-kampung kumuh yang akan tergusur. Oleh karenanya, ketika terjun di dalam masyarakat rentan kota ini, aktivis tersebut mengurangi kegiatan teater

kampus. Namun demikian, kebersamaan ini menjadi sumber inspirasi bagi ide naskah untuk pementasan teater kampusnya.



Gambar 9.1.

Kekuatan Buruh = Mogok Kerja dan Pengerahan Massa

Dengan tinggal bersama, bila tidak kost, terkadang tidur di mushala, kesulitan yang dialami oleh masyarakat rentan kota secara langsung dirasakan, seperti kenaikan BBM yang telah terjadi sejak jaman pemerintahan Megawati, kenaikan tarif listrik dan air,²⁵ kenaikan harga-harga di pasar, UMR buruh yang masih belum memenuhi kebutuhan hidup²⁶ dan sistem kontrak. Para

²⁵ Di beberapa kampung, terutama di Surabaya Utara dan pinggiran kota Surabaya Barat dan Selatan, meskipun tidak memasang saluran PDAM. Kenaikan harga air dirasakan pada kenaikan air jerigen *gledekan*.

²⁶ Berkaitan dengan UMK (Kota Surabaya), pemerintah sering tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak bisa membayar karyawannya sesuai dengan UMK. Ada batas-batas toleransi yang sangat longgar diberikan oleh pemerintah, sementara itu pemerintah serta merta menerapkan undang-undang buruh, meski secara substansial merugikan pihak buruh, pemerintah selalu melaksanakan tanpa memperhatikan buruh.

aktivis tersebut membangkitkan kesadaran bahwa mereka berhak hidup layak. Oleh karenanya, masyarakat tersebut di adakan untuk melakukan aksi. *“Mas, pertama kali iya susah. Mereka berpikir ini sudah menjadi suratan dalam hidupnya. Tetapi, melalui diskusi, mereka sadar. Meskipun belum tentu berhasil, setidaknya orang akan mendengarkan suaranya. Satu kata: Laman,”* begitulah pengalaman yang disampaikan oleh B dan J tentang kelompok masyarakat rentan kota. Secara teoritik, pengalaman ini membenarkan pendapat Oscar Lewis (1981) tentang kebudayaan kemiskinan dan John Kenneth Galbraith (1983) sebagai bentuk adaptasi orang-orang miskin terhadap kondisi kehidupan yang rentan.

Di dalam mengembangkan ke dalam aksi (demonstrasi), para aktivis biasanya mendiskusikan terlebih dahulu dengan para buruh yang aktivis dan orang kampung yang aktivis, biasanya kini terbentuk dalam istilah “forum komunikasi.” Hari-hari peringatan peristiwa tertentu bisa dijadikan momen untuk aksi, seperti Hari Buruh (1 Mei), Hari Bumi (September) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Kemerdekaan (17 Agustus). Pada hari buruh, aksi lebih diarahkan pada tema-tema tentang jaminan sosial buruh, mulai dari kenaikan UMK, sistem kontrak dan borongan, jaminan sosial hingga hak berserikat (lihat tabel 4.6; perhatikan Rahayu, et.al, 2002; Supramudyo, 2000; Rahaju, 2002). Demikian pula, pada hari bumi, tema demonstrasinya berisi tuntutan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin kota, sedangkan hari pendidikan adalah tuntutan pendidikan murah, dan pada hari kemerdekaan tentang harapan untuk merdeka dari kemiskinan.

Tabel 9.8.

Isu-isu Kesenjangan Sosial-Politik yang dikembangkan Masyarakat Rentan Kota bersama Aktivis Teater Kampus (dalam Ekstra Kampus, SB dan LSM)

No.	Masyarakat Rentan Kota	Isu-isu Kesenjangan Sosial Politik
1	Umum	a. Turunkan Harga (1998), yang kemudian berlanjut menjadi salah satu tuntutan dalam reformasi, selain Pak Harto turun; b. Tuntutan Penindakan Korupsi (Pengurusan KTP Murah) c. Tuntutan Biaya Pendidikan Murah (1998-2005) d. Tolak Kenaikan BBM (1999-2005) e. Tolak Kenaikan TDL dan Air PDAM;
2	Masyarakat Kampung	a. Batalkan pengusuran (salah satu di antaranya, kasus Stren Kali bersama <i>Jerit</i> tahun 2001, 2002 dan 2004); b. Kenaikan uang ganti rugi;
3	Masyarakat Buruh	a. Bayarkan THR (setiap menjelang hari raya Idul Fitri sejak sekitar tahun 1990an); b. Tuntutan Hak Berserikat (awal tahun 1990-an); c. Tuntutan Kenaikan UMR/Kota; d. Tuntutan Penerapan UMR segera; e. Hapus Sistem Kontrak dan Borongan; f. Hapus Sistem Lembur, Tuntutan Jam Kerja yang Jelas. g. Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon (Pabrik Sepatu di Sidoarjo); h. Tolak UU Perburuhan yang Merugikan buruh; i. Usut Korupsi di Jamsostek (tahun 1998-an) j. Solidaritas terhadap pemecatan teman-teman sekerja, dll.

Di dalam persiapannya, para aktivis tersebut membentuk korlap-korlap yang digunakan untuk menghimpun massa. Sementara itu, spanduk atau karton disiapkan, dananya dihimpun

dengan cara urunan atau hasil dari *ngamen*. Karena dananya terbatas, maka tidak jarang spanduk yang digunakan berasal dari kegiatan aksi sebelumnya. Sementara itu, para aktivis dari teater kampus menyiapkan adegan teatrical. *“Ada dua tujuan adegan ini. Visualisasi tuntutan dan hiburan untuk mengurangi ketegangan. Kalau tidak begitu, demo yang serius bisa membuat aparat tegang. Akhirnya, tindakannya represif. Kalau itu terjadi, akan membuat jera mereka.”*

Setelah ide atau naskah cerita dibuat, H-2 dari aksi tersebut aktivis teater kampus itu mengumpulkan, baik sesama aktivis teater kampus maupun juga kelompok masyarakat rentan (yang mewakilinya) dan melakukan *casting* peran, siapa melakoni siapa, begitu pula pengaturan gerak yang akan dilakukan. Pengaturan gerak ini juga memperhatikan *lanskap* dari acara aksi tersebut. Orang-orang tersebut juga diberitahu kostum apa yang digunakan, biasanya pakaian sehari-hari, *“lebih baik lagi kalau compang-camping, biar kelihatan penderitaannya.”* Karena miskin dialog, latihannya hanya terbatas pada rangkaian gerak masing-masing pemeran. Pemeran di adegan teatrical dalam demonstrasi dapat lebih longgar, berimprovisasi.

Menurut informan B, adegan ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, meskipun merasa sulit bila jumlah peserta demonstrasi terlalu besar. Bila massa yang berdemonstrasi kurang dari 200 orang, adegan teatrical bisa dilaksanakan sambil *long march* ke tempat sasaran. Namun demikian, bila dalam jumlah besar, adegan teatrical hanya dilakukan ketika telah sampai di tempat tujuan. Pelaksanaan adegan di sepanjang jalan akan memacetkan gerak massa pada akhirnya dapat timbul gerakan dorong-mendorong, hingga menimbulkan kekerasan.

Tabel 9.9.
Beberapa Contoh Adegan Teatrical Demonstrasi Masyarakat Rentan Kota
Surabaya tahun 1990 s/d sekarang

No.	Isu-isu Demonstrasi	Adegan Teatrical
1	Tolak Kenaikan BBM	Digambarkan ada sejumlah orang. Laki-laki membawa puluhan jerigen kosong. Begitu juga dengan perempuan yang <i>jaritan</i> membawa kompor tanpa minyak.
2	Tuntutan Biaya Pendidikan Murah	Dengan mengajak anak-anak berpakaian seragam sambil berjualan koran. Sementara itu, orang tua yang bekerja setengah mati, tetapi tidak bisa membayar uang sekolah.
3	Penolakan thp Penggusuran Warga Kampung Stren Kali	Digambarkan ada orang berpakaian sederhana selalu membersihkan kali. Sementara itu, satpol PP dan petugas membawa bulldoser merusak. Orang-orang itu lari, sampai terjatuh. Adegan teatrical ini dibuat dalam pentas panggung dengan perbaikan naskah cerita dalam judul "Jogo Kali," oleh Teater Sua di Balai Pemuda, Surabaya.

Penutup

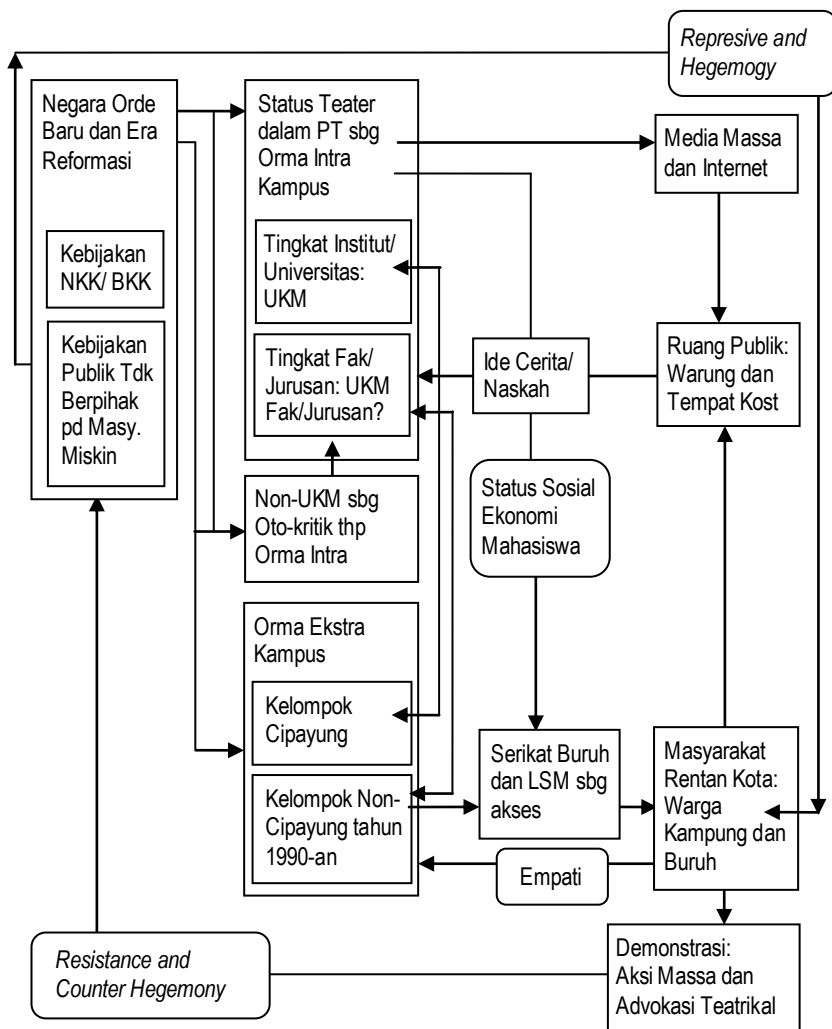
Penelitian Rahaju (2002) telah menunjukkan adanya komunikasi dan aliansi antara buruh dan gerakan mahasiswa. Secara ekstrim ditulis pula dari pernyataan salah seorang tokoh gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa tidak akan memiliki akar yang kuat bila tidak beraliansi dengan buruh. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa proses aliansi antara buruh, warga kampung yang tergusung, sebagai

kelompok masyarakat rentan kota, dan mahasiswa merupakan proses timbal balik. Tahun 1990-an, dengan pembunuhan Marsinah oleh aparaturnegara, gerakan perjuangan buruh memperoleh identitas dan keberanian baru, atau yang diistilahkan oleh Karl Marx sebagai kesadaran kelas, sementara penghancuran dan hegemoni negara atas mahasiswa melalui NKK/BKK tahun 1978 dan Opspek/P4 telah menciptakan bentuk baru gerakan mahasiswa. Ada dua bentuk, yaitu: (1) melakukan modifikasi dari organisasi kemahasiswaan (ormawa) intra kampus, dan (2) mengembangkan kelompok studi, yang kemudian berkembang menjadi organisasi ekstra kampus non-kelompok Cipayang tahun. Di dalam catatan lain, kelompok-kelompok studi juga berkembang dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan. LSM yang terbentuk dari kelompok-kelompok studi ini kemudian mengembangkan jaringan internasional melalui isu-isu yang sama, antara lain: kemiskinan dan demokrasi, meski dikritisi oleh negara pada waktu itu, Suharto, sebagai usaha “menjual” bangsa dan dicurigai sebagai ancaman negara.

Salah satu di antaranya adalah teater kampus. Teater kampus menjadi sarana *conter hegemony*. Bila mengikuti pendapat Antonio Gramsci, bahwa negara, sebagai representasi dari kepentingan kelompok borjuis, melakukan “penaklukan” atas warganya tidak saja menggunakan sarana represif, seperti: hukum dan militer, tetapi juga mengembangkan kontrol moral dan intelektual, sehingga terbentuk kesepakatan lebih bersifat *concensio* (Hendarto, 1993: 66-88) Kontrol moral dan intelektual ini dikembangkan melalui sarana-sarana pendidikan dan media massa. Di dalam perkembangannya, Paulo Freire (1985) memperkuat bahwa model *banking* dalam kurikulum sekolah menyebabkan masyarakat terintegrasi ke dalam sistem industri yang kapitalistik. Meskipun dianggap sebagai langkah kecil, teater kampus, sebagai perkembangan teater modern Indonesia, seperti Teater Sae,

Koma, dan Mandiri (Dahana, 2001) mengembangkan drama satiris yang mengkritik terhadap kehidupan sosial politik Indonesia yang tidak adil dalam setiap kali pertunjukkan.

Bagan 9.1.
Teater Kampus, Masyarakat Rentan Kota dan Adegan Teatrikal





Gambar 9.2

Dengarkanlah Kami, Rasakanlah Penderitaan Kami!

Dalam pencarian ide-ide naskah cerita, selain adaptasi dari naskah karya seniman sebelumnya, seperti Anton Chekov, aktivis teater kampus menemukan perjumpaan yang "mesra" dan "hangat" di dalam masyarakat rentan (kota). Salah satu faktor yang di dalam diri aktivis yang memudahkan memasuki masyarakat rentan (kota) adalah kondisi obyektifnya. Aktivis teater kampus berasal dari kelompok kelas menengah ke bawah di dalam masyarakatnya. Perjumpaan ini sama seperti melihat dirinya di depan kaca, lebih dari itu mereka menemukan jati dirinya di dalam masyarakat tersebut. Apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan di warung-warung makan dan kampung di mana mereka kost, membangun kesadaran dalam diri mereka, bahwa mereka dulu berasal dari kelas tersebut dan sudah selayaknya harus memperjuangkan. Di dalam kondisi yang lebih ekstrim, para aktivis ini kemudian memasuki organisasi ekstra kampus non-

Cipayung tahun 1990-an dan bergabung pada Serikat Buruh (mandiri-bukan organisasi korporatis negara).



Gambar 9.3.

Demi THR, Kenaikan Upah, Uang Makan, haruskah ada korban?

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memberikan sumbangan bagi gerakan kelompok masyarakat rentan kota. Selain mengembangkan jaringan yang mampu mengerahkan massa dalam jumlah yang besar, mereka juga memberikan warna lain dalam aksi massa (demonstrasi), yaitu adegan teatral. Pengerahan massa yang besar memang memberikan kekuatan untuk melawan kebijakan publik yang kurang menguntungkan, namun di sisi lain mengembangkan hubungan yang sinergis antara pengusaha dan negara. Dengan alasan bahwa aksi massa tersebut akan mengancam situasi keamanan, aparat negara kemudian cenderung bertindak represif. Aparat negara menggunakan hak kekerasannya dengan alasan memberikan jaminan rasa aman (meski dapat dibantah, untuk kelompok masyarakat yang mana?). Di bawah kondisi yang demikian, adegan teatral ini sangat membantu dalam visualisasi dari tuntutan, dan sekaligus menjadi hiburan bagi dua kelompok yang bersitegang, yaitu kelompok aksi massa dan aparat negara.

Lebih jauh dari itu, pada kasus lain latihan seni pada kelompok masyarakat rentan kota, termasuk di dalam kelompok buruh, mampu membangkitkan kesadarannya. Di Jakarta misalnya, dalam memperingati Hari Buruh 1 Mei 2005, kelompok buruh, petani dan ibu rumah tangga dari kampung menampilkan drama teatrical dengan judul “*Mereka bilang Aku Perempuan*” karya Ken Zuraida. Mereka berlatih selama satu bulan dan menghayatinya dengan baik (Liputan6, 4 Mei 2005, ”Penderitaan Buruh dalam Drama Teater,”).

Daftar Pustaka

- Aribowo,
1999 Pola Gerakan Mahasiswa Jawa Timur: Kasus Mahasiswa Surabaya. Dalam Anshari Thayeb, et.al. **Jawa Timur dalam Perspektif Negara dan Masyarakat**. Surabaya: Yayasan Lubuk Hati.
- BPS,
2004 **Indikator Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Peningkatan Kemampuan Statistik.**
- Budiman, Arief.
1981 Peranan Mahasiswa sebagai Inteligensia. Disunting oleh Dick Hartoko. ***Golongan Cendekiawan. Mereka yang berumah di angin. Sebuah bunga rampai.*** Jakarta: Gramedia.
- Coundouel, Aline., Jesko S. Hentschel, dan Quentin T. Wodon.
2002 Chapter 1 Poverty Measurement and Analysis. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues.** Washington: The World Bank.
- Dahana, Radhar Panca.
2001 **Ideologi Politik dan Teater Modern Indonesia.** Magelang: IndonesiaTera.

Danandjaja, James.

- 1980 Fungsi Folklor bagi Kolektif Pendukungnya. *Berita Antropologi*. No. 39, tahun XI.
- 1986 Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dogeng dan Lain-lain. *Jakarta: Grafitipers*.

Departemen Kesehatan RI,

- 2003 **Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/ Menkes/SK/VIII/2003.** Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Dinas Informasi dan Komunikasi Jawa Timur.

- 2004a UMK 2005 Gunakan Standar Kebutuhan Hidup Minimal. 1 September. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=1797>. tanggal 13 September 2005.
- 2004b Gubernur Jatim tetapkan UMK Tahun 2005, berlaku 1 Januari. 22 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2487>. tanggal 13 Nopember 2005.
- 2004c UMK Jatim masih berdasarkan KHM karena Keppres Baru Belum Terbit. 26 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2538>. tanggal 13 Septemver 2005.

Galbraith, John Kenneth.

- 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa. Diterjemahkan oleh Tom Anwar.** Jakarta: Sinar Harapan.

Hatta, Mohammad.

- 1983 Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia. Disunting oleh Aswab Mahasin dan Ismed Natsir. **Cendekiawan dan Politik.** Jakarta: LP3ES.

Hendarto, Heru.

- 1993 Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci. Dalam Tim Redaksi Driyarkara. **Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan.** Jakarta: Gramedia.

Hutomo, Suripan Sadi.

- 1991 Kidung Jawa Timuran. Perkembangan dan Kritik Sosialnya. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. No. 6, Tahun V.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi**. Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Jonge, Huub de.

- 1989 **Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu Studi Antropologi Ekonomi**. Jakarta: Gramedia.

Klugman, Jeni.

- 2002 Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues**. Washington: The World Bank.
- 2002 Rural and Urban Poverty: Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 2 Macroeconomic and Sectoral Approaches**. Washington: The World Bank.

Koentjaraningrat,

- 1982 **Sejarah Teori Antropologi 1**. Jakarta: UI-Press.

Kariredjo, Heru Soekadri.

- 1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan**. Surabaya: FPIPS-IKIP Surabaya.

Kompas,

- 1996 Antara Stabilitas dan Demokrasi. Survei "Kompas" tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 1996 Gaya Hidup Kelas Menengah Baru Jakarta. Survei "Kompas" tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 2000 Buruh Sidoarjo Protes UMR, Jalan di Surabaya Diblokir. 27 Nopember.
- 2001 FSPSI Akan Bahas Masalah UMR. 16 Juli.
- 2002 Buruh Gresik Ancam Demo, Wakil Gubernur Minta Jangan Ngotot. 2 Januari 2002.
- 2003 Buruh Tuntut Gubernur Jatim Naikkan UMK. 22 Januari.
- 2005 Menggugat Kebijakan Absurd Impor Berat. 24 September.
- 2005 Inti Ekbis. 106.000 KKB untuk Warga Surabaya. 29 September.

Kuntowijoyo.

- 1988 **Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kustiawan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1/tahun XXVI.

Kwik, Kian Gie.

1998 **Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia. Badai Belum Akan Segera Berlalu**. Jakarta: Gramedia.

Lewis, Oscar.

1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.

Liputan6 SCTV

2005 Penderitaan Buruh dalam Drama Teater. Diakses dari <http://www.liputan6.com/fullnews/100776.html>, tanggal 1 April 2005.

Melalatoa, M. Junus.

1989 Pesan Budaya dalam Kesenian. **Berita Antropologi**. No. 45, tahun XIII.

Pemda Kotamadya Surabaya.

1978 **Master Plan Surabaya Tahun 2000**. Surabaya: Pemda KMS.

Pour, Julius.

1998 **Jakarta Semasa Lengser Keprabon. 100 hari menjelang peralihan kekuasaan**. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Radjab, Suryadi A.

1990 Panggung-panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara. Gerakan Mahasiswa di bawah Orde Baru. **Prisma**. No. 10 tahun. XX.

Rudiono, Danu.

1992 Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak. **Prisma**. No. 1. Tahun XXI.

Rahaju, Siti Pudji.

2002 Pola Komunikasi dan Aliansi antara Buruh dengan Mahasiswa dalam Aksi-aksi Unjuk Rasa dan Pemogokan Buruh Industri di Jawa Timur. **Laporan Penelitian Dosen Muda**. Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Rahayu, Sri Kusumastuti.

2002 **Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Scott, James C.

1983 **Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.** Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Supramudyo, Gitadi Tegas.

2000 Pola Unjuk Rasa di Daerah Perkotaan. Studi tentang Unjuk Rasa Buruh, Sopir, Mahasiswa dan Warga Kampung di Surabaya. **Laporan Penelitian DIP.** Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Susanto, Budi.

1999 *Imajinasi Penguasa dan Identitas Postkolonial. Siasat Politik (Kethoprak) Massa Rakyat.* Yogyakarta: Kanisius.

Surbakti, Ramlan.

1994 Kebijakan Tata Ruang Perkotaan. Siapa Membuat dan Menguntungkan Siapa? **Prisma.** No. 7/tahun XXIII.

1996 Perebutan Ruang di Perkotaan dan Pembengarannya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Suryahadi, et.al.

2003 **Developing a Poverty Map for Indonesia: an Initiatory Work in Three Provinces. Part I: Technical Report.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Suyanto, Bagong.

1996 Pembangunan Kota dan Sengketa Tanah. Kasus Kotamadya Surabaya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Tabor, Steven R., dan M. Husein Sawit.

2001 Social Protection via Rice: The OPK Rice Subsidy Program in Indonesia. **The Developing Economies.** Th. 39. No. 3.

Wignjosoebroto, Soetandyo.

2004 Surabaya: Memahami Riwayatnya Masa Lampau guna Mempertajam Kemampuan Memproyeksi Perannya di Masa yang akan datang. **Makalah** dalam Sarasehan "Surabaya dan Tantangan Masa Depan." Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Wirodono, Sunardian.

1994 *Catatan 1993. Gerakan Politik Indonesia.* Jakarta: Puspa Swara.

240 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Bagian 3

P e n u t u p

Bab 10

Kemiskinan Kota dan Pembangunan

FX Sri Sadewo

karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.
(Pengkotbah 1:18)

Pengetahuan lebih banyak memang sangat menyedihkan bagi empunya. Betapa tidak, dalam kasus-kasus pada buku ini, masyarakat (warga negara, pen) menaruh harapan besar pada pemerintah untuk kesejahteraannya. Namun demikian, bila mengikuti berbagai pandangan dalam teori-teori sosial dan politik, maka pemerintah merupakan ruang pertarungan antar berbagai kelompok kepentingan. Mereka yang bisa mengakses, maka akan memperoleh keuntungan. Kelompok miskin, seperti dari wilayah perkotaan, bukanlah kelompok yang beruntung, baik di tempat yang baru (kota) maupun di daerah asalnya (desa). Dari sejumlah kasus pada bagian 2, ada beberapa hal yang dapat diserahkan dan dipikirkan bersama.

Arah Model Pembangunan yang Salah

Kota dan desa merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kota tumbuh karena revolusi pertanian yang mengkaitkan antara satu desa dan desa yang lainnya. Keberadaan kota mulanya didukung oleh desa-desa, Kota sangat memerlukan desa untuk tenaga kerja, pajak dan barang-barang komoditi. Pada perkembangan selanjutnya, kota tumbuh, seolah-olah otonom,

meninggalkan desa. Kota menjadi *center* (pusat), desa menjadi daerah pinggiran (*periferi*). Sebagai periferi, hampir seluruh enersinya kemudian dicerap kota, kemudian seperti digambarkan oleh Everett S. Lee (1984) sebagai fenomena *push-pull factor* dari migrasi dan urbanisasi.

Fenomena ini terjadi pada abad kedelapan belas di Eropa dan paruh kedua di negara-negara baru paska Perang Dunia ke-2. Kebijakan pajak atas tanah yang dibebankan pada petani oleh bangsawan mengakibatkan hubungan petani dan pekerja melemah, hubungan mereka mulai diukur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekan harga/upah tenaga kerja. Orang-orang desa yang tidak bertanah pun akhirnya berbalik mencari pekerjaan di kota, meskipun kondisi obyektifnya tidak menguntungkan. Mereka bersedia bekerja apa saja dengan upah berapa saja, asal bisa menerima uang *cash*.

Berbagai penelitian seperti James C. Scott (1983), Sujono dan Birowo (1976), dan Hotman Siahaan (1990), menggambarkan betapa perubahan teknologi telah merubah perimbangan pendapatan di desa, kelompok miskin desa semakin *powerless*, tidak mempunyai posisi tawar, sistem bagi hasil menjadi semakin tidak menguntungkan, dari *maro*, *martelu* hingga sistem *ceblokan*, Tulisan dari Agus Trilaksana (2000) dan Zainuddin Maliki (2002) juga menggambarkan hal yang sama di Jawa Timur, namun tindakan yang ekstrim dilakukan kelompok miskin desa adalah merantau hingga ke luar negeri. Mereka menghimpun seluruh enersi terakhirnya dan mempertaruhkan diri dengan bekerja sebagai TKI/TKW. Hal itu tidak terlepas dari *tekong*, orang yang memiliki jaringan dari desa, ke kota hingga keluar batas-batas negara. *Tekong* biasanya adalah kelas menengah desa yang tidak berada dalam hubungan patron-klien dalam struktur ekonomi desa. Dengan posisinya, seorang *tekong* membangun struktur patron-klien yang tidak lagi berbasis pertanian.

Ketika menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, Basofi Soedirman pernah mencanangkan *gerakan kembali ke desa*. Gerakan ini sebenarnya seiring dengan kebijakan pemerintah pusat pada waktu itu. Di tingkat pusat, pemerintah memutuskan lima hari kerja dengan alih-alih satu hari libur tambahan dapat digunakan untuk rekreasi atau kembali ke desa. Artinya, aliran uang yang semula hanya dilakukan pada waktu hari raya dengan fenomena mudik (baca juga Eric Wolf, 1986), kebijakan itu “mengubah” pola menjadi rutin dalam setiap tahun. Gerakan itu tidak relatif berhasil. Ada yang menjadi beberapa kendala, pertama masyarakat desa sekarang telah berubah, menjadi relatif seragam, mulai dari struktur pemerintahan (imbis dari UU No. 5 tahun 1974) hingga struktur ekonomi yang bergeser ke sektor industri. Kedua, dengan demikian, setiap desa relatif tidak memiliki produk unggulan. Ketiga, penciptaan produk unggulan menuntut perhatian dan perubahan paradigma bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal (Kota/Kabupaten hingga desa), misalnya: secara sederhana, kepala desa dan camat harus berani menolak menandatangani surat jual-beli tanah sawah penduduknya, padahal dalam transaksi itu aparat desa memperoleh keuntungan. Belum lagi, perubahan status ke perumahan atau industri akan meningkatkan PAD bagi kabupaten/kota. Sektor industri beralih mampu menampung tenaga kerja dalam ratusan atau ribuan jumlahnya.

Strategi Adaptif Orang Miskin Kota

Kemiskinan yang demikian itu oleh Selo Soemardjan (1980; dikutip dari Karnadji dan Sudarso, 2005: 17) sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan itu diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosialnya mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapat yang sebenarnya tersedia. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasa kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-

tahun. Ciri utamanya adalah mobilitas vertikal tidak terjadi, walaupun terjadi sifatnya lamban. Ciri lain adalah timbul ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Ketergantungan ini memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam hubungan sosial yang timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh (Karnadji dan Sudarso, 2005: 19; kutip dari Mochtar Mas'ud, 1994:14).

Fatalisme atau sikap pasrah merupakan adaptasi psikologis bagi orang-orang miskin di manapun, baik di desa maupun di kota. Sikap ini memberikan ruang yang “menenangkan” di tengah kegelisahan atas ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah-masalah ekonominya. Kehilangan pekerjaan, tempat tinggal yang tidak “nyaman” dan “rentan” dari penggusuran, anggota keluarga yang sakit dan ditambah lagi harga-harga kebutuhan pokok yang belum tentu bisa dibeli merupakan masalah kaum miskin yang dihadapi terus-menerus setiap hari. Sementara itu, mereka berada di tengah-tengah keluarga yang berada dalam kondisi yang serupa. Pilihannya kemudian setiap keluarga mengembangkan etika subsistensi pada masing-masing keluarga. Walaupun ada simpanan, biasanya dalam yang sangat kecil dan tidak berlebih, sehingga tidak bisa digunakan untuk pinjaman pada keluarga lain. Mereka juga tidak mempunyai akses yang cukup baik untuk memperoleh tambahan uang bila memerlukan secara mendadak. Dunia perbankan sering bersifat diskriminatif terhadap kelompok miskin. Untuk memperoleh pinjaman, mereka diharuskan memenuhi syarat administratif yang belum bisa dipenuhi, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP) hingga anggunan. Kaum miskin kota sering mengalami kesulitan pada masalah KTP karena proses mutasi kependudukan yang dinilai mahal tidak dilakukan. Selain KTP, pemilikan barang atau rumah kaum miskin tidak bisa dijadikan anggunan, selain nilai jualnya, karena bukti pemilikan juga tidak ada. Syarat administratif dunia perbankan

bisa diminimalisir pada kelompok kelas menengah yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai. Kesulitan-kesulitan yang menumpuk kemudian menjadi bentuk *stressor* dan bila tidak “diredam,” maka berakibat pada masalah sosial lainnya, seperti pelacuran, pencurian, dan tindak kriminalitas lainnya. Cara peredamannya adalah melalui saluran psikologisnya, yaitu menenangkan, pasrah dan kemudian mengabaikan segala kesulitan yang dalam pandangan Marxian sebagai produk dari ketidakadilan dan eksploitasi pada kelompok yang lebih lemah.

Adaptasi psikologis, yaitu sikap pasrah tidak terjadi dalam waktu yang sekejap. Orang miskin kemudian langsung pasrah, melainkan berlangsung dalam waktu bertahun-tahun, bahkan harus “diwariskan” pada generasi berikutnya. Kemiskinan, seperti kehilangan pekerjaan, gaji/upah yang tidak cukup hingga sakit dan tidak mempunyai akses ekonomi-politik ini menjadi *stressor*, tekanan bagi kejiwaan seseorang dan/atau keluarga, apalagi hal itu berlangsung dengan sangat cepat.

Dalam kajian Emile Durkheim, situasi yang disfungsional ini bisa berakibat pada tindakan “bunuh diri” (lihat Johnson, 1986: 192-195) atau setidaknya mengambal jalan pintas, Koentjaraningrat (2002: 46-50) mengistilahkan mentalitas menerabas. Pada waktu krisis moneter di Indoneisa, pengumuman likuidasi bank, sepasang suami-istri dan empat orang anaknya melakukan bunuh diri di Kalimantan karena tabungan yang menjadi modal usahanya tidak bisa dicairkan. Sementara itu, di Bandung seorang ibu menjual putrinya untuk menikahkan putri yang lain. Sementara itu, di wilayah pesisir Selatan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, dari Pacitan hingga Wonogiri, terjadi semacam “*pulung ngendat*,” kejadian bunuh diri seolah-olah bergilir sesuai arah sinar putih seperti bintang jatuh. Alasan bunuh diri menjadi beralasan mulai dari sakit yang menahun hingga persoalan yang sepele, seperti tidak diajak anak ke kota. Demikian pula, dari sejumlah pemberitaan media massa elektronik, sejumlah

kejadi-an bunuh diri dengan alasan mulai dari kehilangan pekerjaan, sakit menahun dan kini menjalar pada anak-anak sekolah, seperti karena tidak lulus UAN hingga permintaan yang tidak dipenuhi. Hal itu menunjukkan bahwa kejadian bunuh diri dengan berbagai alasan tersebut sebagai produk adaptasi psikologis yang tidak berlangsung dengan baik. Artinya, menaruh harapan yang tinggi dengan mengabaikan kondisi yang sebenarnya, terjadi *deprivasi relatif* antara nilai harapan dan keadaan yang senyatanya.

Langkah strategi adaptasi kaum miskin pertama kali ketika tidak pendapatannya tidak memadai adalah mengurangi konsumsinya. Makanan yang dikonsumsi dikurangi sedemikian rupa, sehingga hanya mampu menggerakkan dirinya secara fisik, dimulai dari frekuensi makan, dari tiga kali untuk kondisi normal, menjadi dua kali sehari. Menunya pun dikurangi mulai dari tidak menggunakan daging dan ayam, berkurang terus hingga makan nasi, kecap dan kerupuk saja. Kebutuhan protein nabati didapat waktu yang tidak, seperti: pada waktu hajatan atau *slametan*, dan untuk umat Islam, dilakukan pada waktu Idul Kurban.

Langkah berikutnya adalah menggerakkan seluruh anggota keluarga untuk memperoleh pendapatan tambahan yang akan membuat hidup layak. Anak-anak memiliki nilai ekonomi yang positif. Mereka merelakan diri untuk meninggalkan masanya yang menyenangkan. Mereka bekerja, meski mungkin hanya dibayar separuh saja. Sementara ibunya bekerja, anak-anak berkeliraran dan kemudian masuk ke jalanan untuk mencari uang, mulai dari meminta-minta, *ngamen*, hingga menjadi joki *three in one*. Di dalam situasi ini anak-anak rawan mengalami kekerasan, mulai di-*palak* hingga dipukul pihak aparat (*trantib*). Kasus di Jakarta, karena menjadi joki, seorang anak dipukul, ditangkap dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas. Catatan-catatan lapangan lain dari kisah anak jalanan, anak-anak perempuan juga mengalami kekerasan seksual.

Tabel 10.1.
Kebutuhan dan Strategi Adaptasi Kaum Miskin

	Normal	Miskin Baru	Miskin Lama
Fatalisme	Rendah	Rendah, dan mulai beranjak naik	Tinggi
Tabungan	Ada, dalam jumlah sedikit. Cukup untuk mengatasi kebutuhan mendadak	Ada, dalam jumlah sedikit dan terus berkurang, akhirnya habis untuk konsumsi. Termasuk rumah dan seluruh isinya.	Tidak ada. Bila ada, tabungan berbentuk barang yang mudah dijual.
Pendapatan	Memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup (layak?) Terjadi pembagian kerja secara seksual, suami mencari nafkah, istri merawat & mendidik anak. Di kota, bila tidak bisa dipenuhi dari penghasilan suami, maka isteri bekerja di rumah atau sektor formal.	Tidak memadai. Sering terjadi karena pencari nafkah utama tidak bekerja, sakit atau meninggal. Isteri ikut mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah.	Sangat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam mencari nafkah. Anak-anak turun ke jalan atau bekerja di pabrik dengan resiko kesehatan yang tinggi.
Pemukiman	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Kondisi rumah higienis.	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Bila kemiskinan berlangsung lama, maka rumah dijual untuk kebutuhan hidup.	Tinggal di perkampungan kumuh dengan status tanah tidak jelas dan rawan penggusuran.
Kesehatan	Meski sedikit, dana diusahakan. Dalam kondisi tertentu Mengandalkan jaminan kesehatan dari perusahaan, ASTEK atau ASKES	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik. Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS
Makanan	3 (tiga) x sehari; asupan gizi memadai	2 – 3 x sehari, asupan gizi mulai tidak penting	1-2 x sehari, asupan gizi tidak penting. Penting

Bila ada orang beranggapan bahwa orang miskin itu malas, hal itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Pola strategi mereka mencari nafkah ternyata sering tidak hanya mengandalkan pada satu pekerjaan. Ada temuan mereka melakukan pekerjaan ganda. Pagi hari bekerja di sektor formal, seperti buruh pabrik, sedangkan sore hari bekerja di sektor informal, seperti berjualan, dan tukang potong rambut. Kalau memiliki pekerjaan pokok berjualan, maka tidak berhenti berjualan pada produk di pagi hari, sering sore hingga malam hari berjualan produk lain. Belum lagi, pada waktu bekerja, mereka berhemat dengan membawa lauk-pauk sendiri. Lama waktu bekerja bisa di atas dari 8 (delapan) jam sehari. Hal itu pada gilirannya akan berakibat pada hubungan yang kurang harmonis di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ada temuan bahwa kecenderungan terjadi perceraian tinggi pada keluarga miskin.

Tabungan merupakan hal yang mewah bagi orang-orang miskin, apalagi dalam bentuk uang. Di dalam kondisi yang normal, pada keluarga yang menengah, tabungan merupakan hal yang penting untuk mengatasi situasi krisis, seperti anggota keluarga yang sakit, rumah rusak, pendidikan anak. Ada beberapa cara untuk menabung, selain membuka rekening di Bank, mereka juga mengikuti arisan dalam jumlah yang besar. Kondisi ini tidak dialami oleh keluarga miskin baru, tabungan yang dimiliki akan habis untuk keperluan konsumsi, kemudian barang rumah tangga juga dijual bila perlu. Selain barang rumah tangga, ternak merupakan salah satu tabungan, sedikit-tidaknya bila masa paceklik. Produk dari ternak, seperti telur dan dagingnya, juga dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Rumah bisa juga berfungsi sebagai tabungan. Di dalam situasi mendesak rumah pun dijual, sehingga mereka pun kemudian pindah ke rumah dengan kondisi yang lebih buruk, dari pe-

rumahan ke kampung, dari kampung ke pinggiran kota. Pindah rumah sebagai strategi kaum miskin (lihat Kok, Mandemakers dan Wals, 2002). Dari milik sendiri, menjadi kontrak, dari kontrak kembali ke rumah orang tua. Ketika berada di dalam keluarga besar (*extended family*), maka kemiskinan tersebut menjadi beban dari keluarganya dan kemudian menjadi *shared poverty* dalam istilah Clifford Geertz (1983), kemiskinan dibagi bersama. Kemiskinan seperti virus yang menyebar. Kualitas dan beban yang tinggi berakibat rumah berikut lingkungannya menjadi tidak sehat dan dalam hasil penelitian R. Eddy Indrayana (2000) bahwa permukiman berkepadatan tinggi beresiko tinggi atau rentan terhadap kesehatan. Sanitasi dan udara yang buruk mengakibatkan penyakit pernapasan dan pencernaan.

Inilah rangkaian dari kemiskinan struktural (pendekatan Marx) menuju kebudayaan kemiskinan (Oscar Lewis). Ketidakmampuan akses untuk memenuhi kebutuhan akibat kondisi-kondisi obyektif yang kurang menguntungkan berakibat pada fatalisme, kepasrahan, dan secara terus-menerus melakukan pengabaian atas nilai-nilai ideal. Ini merupakan sikap realistik terhadap kondisi yang menurut mereka sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka awalnya memiliki mimpi untuk hidup yang layak, menjalani proses ritual yang layak, dan walaupun mati juga layak. Mereka berharap bisa memiliki pekerjaan dengan upah yang layak, tinggal di dalam rumah yang layak, membesarkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Mereka berharap tidak akan gelisah bila sakit atau mati karena sudah memiliki asuransi. Mimpi atau harapan ini tidak bisa dicapai karena mereka berada kondisi obyektif, seperti tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan jaringan, yang tidak menguntungkan. Kondisi-kondisi itu mengurangi dan bahkan membatasi akses politik, ekonomi dan sosialnya terhadap struktur sosial. Oleh karena itu, persoalannya bukan pada sekedar mendefinisikan kemiskinan struktural atau kebudayaan kemiskinan, tetapi harus melihat sebagai rangkaian proses yang kontinu.

Daftar Pustaka

Geertz, Clifford.

- 1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.** Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi.** Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Johnson, Doyle Paul.

- 1986 **Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1.** Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat,

- 2002 **Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kok, Jan., Kees Mandemakers, dan Henk Wals.

- 2002 City nomads. Moving house as a coping strategy, Amsterdam 1890-1940. **Paper** for the 4th European Social Science History Conference The Hague, 27 February-March 2, 2002

Wolf, Eric R.

- 1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-ilmu Sosial Jakarta. Jakarta: Rajawali.

Indeks

A

adegan teatrikal, 207, 231, 240, 245
agribisnis, 48
ambachtschool, 52
Ala, Andre Bayo. 32, 40, 41, 249
Arief, Sritua.
 Adi Sasono, 36

C

CBD, 203
Chambers, 36, 38
Cina, 61, 160, 213, 216, 223

D

danyang, 103
demam berdarah, 61
Dilon, HS.
 Hermanto, 31

E

empowerment, 34
Evers, Hans-Dieter., 11, 49, 157, 158

G

Gailbraith, Kenneth. 36
Gerbangkertasusila, 204
gilda-gilda, 18, 98
Goede, 9, 11
Government Eroppeesche Lagere School, 52

H

Handinoto, 48, 50, 52, 53, 99, 129
Hauser, Philip M. 6
Haviland, 6, 17, 24
HIPPA, 101
Holandsche Indische School, 52

I

Indrayana, 62, 248, 263, 264
integrated poverty, 36
isolasi, 39, 40
ISPA, 61

J

Javaansche School, 52
jimpitan, 16

K

Kampoeng Improvement
 Programme, 62
Kartodirdjo, Sartono., 9, 12, 24, 131
Kemiskinan
 Kultural, 36
 Struktural, 31, 36, 257, 263
 lack of opportunity, 34
 low capabilities, 34
Kemiskinan, perangkap
 kelemahan fisik, 35, 39
 kemiskinan "proper", 39
 kerentanan, 35, 39
 ketidakberdayaan, 34, 35, 39, 40, 156
KFM, 212, 213
Klugman, Jeni., 34, 35, 41, 246, 248

L

Lee, Everett S., 21, 80, 256
Levitan, Sar A., 32

LSM, 205, 231, 233, 234, 239, 242

M

Maas River, 49

*Maatschappij Tat Nut van Het
Algemeen*, 52

mahasiswa, 54, 55, 56, 138, 162,
172, 194, 205, 206, 207, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 229, 230, 232, 233,
234, 235, 241, 242

mandala, 53

Modelski, 18, 20, 24

Mulder, Niels., 33

Mumford, 17

N

Nasikun, 36, 38, 40, 41

nyantri, 53

O

off-farm, 100, 109

P

PAM, 103, 107, 147

passesn stelsel, 51

Perguruan Tinggi, 53, 54, 219, 222

PPL, 101

primus inter pares, 16, 98

pusat peradaban, 18

R

Ravallion, 33, 41

Rudiono, 212, 213, 216, 250

Rusli, Said., 5, 12

S

Sadewo, 22, 45, 64, 66, 98, 102, 133,
137, 159, 162, 203, 206, 221, 255

sakral, 103

Samhadi, 23, 24

Suharto,

pemerintahan 28, 112, 212, 213,
221, 234

Sukadana, A. Adi., 15, 17, 24, 99, 130

Suparlan, Parsudi., 4, 7, 12, 157

Surbakti, Ramlan., 208

Steele, 65

Stilkind, Jerry., 14, 24, 131

T

tegal desa, 103

the safety first, 208

Todaro, Michael P., 14

U

UMK, 211, 213, 215, 237, 247, 249

urban bias, 65

V

VOC, 47

W

Weber, Max., 18, 176, 196, 199

Werner, CC., 52

wijken, 51

Wignjosebroto, Soetandyo. 47

Wiradi, Gunawan. 22, 24, 109, 110,
113, 128, 130, 131

Wirth, Louis., 5, 9

Wolf, Eric., 22, 124, 257

ISBN : 978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA

FX Sri Sadewo, dkk



Editor
Martinus Legowo

FX Sri Sadewo

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031-8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031-8288598
Email. unipress@unesa.ac.id
unipressunesa@yahoo.com

ISBN : 978-979-028-847-8



978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN di Surabaya

Edisi Revisi

Penulis

FX Sri Sadewo
Martinus Legowo
Sugeng Harianto
Agus Trilaksana
Usman Mulyadi

Editor

Martinus Legowo



**Penerbit
Unesa University Press**

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN

di Surabaya

Edisi Revisi

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email: unipressunesa@yahoo.com

unipress@unesa.ac.id

ix, 255 hal., Illus, 15.5 x 23

ISBN: 978-979-028-847-8

copyright © 2015, Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Menjadi miskin bukan sebagai suatu pilihan, berbeda bila menjadi orang kaya. Dari hari ke hari orang berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Kekayaan tidak saja menjadi atribut dari status sosial seseorang. Barang-barang miliknya dibawa seiring jalan orang tersebut. Orang lain menoleh, takjub, dan iri, sebaliknya si kaya dengan tegap, wajah mendongak ke atas dan bangga. Tidak demikian dengan orang miskin, ia tertunduk ke bawah, tidak berani menatap wajah orang, selain menengadah tangan. Sangat tidak berdaya.

Gambaran orang miskin yang demikian ini memang tidak separah itu. Orang miskin sering lebih tegap dan *trengginas*, dari hari ke hari untuk mencari makan. Ia bekerja dan mengumpulkan satu demi satu rupiah untuk makan. Memang, tidak semua yang dikumpulkan bisa disimpan, sebaliknya habis untuk kebutuhan konsumsinya.

Intinya, kemiskinan bukanlah suatu kebanggaan. Namun demikian, ternyata tidak semuanya benar, pada setiap kelompok keyakinan tertentu, ada orang yang merelakan dirinya untuk melepaskan dari kesenangan duniawi. Mereka menjadi miskin secara sukarela demi keyakinan. Kelompok demikian tidak dibahas dalam buku ini.

Surabaya, awal Februari 2007
penyunting

FX Sri Sadewo

Kata Pengantar

(edisi revisi)

Persoalan-persoalan kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan menjadi indikator ketidaksejahteraan suatu masyarakat. Semakin besar jumlah orang miskin, hal itu menunjukkan kegagalan para penyelenggara negara (pemerintah). Di setiap negara, hidup sejahtera, baik secara material maupun non-material menjadi satu tujuan mengapa mereka memerdekakan diri. Kesejahteraan material ditandai dengan kemakmuran secara ekonomi, sementara itu kesejahteraan non-material ditandai dengan rasa aman dan nyaman, atau tepatnya kebahagiaan. Pengelola negara tidak bisa memilih salah satu yang lebih dahulu dicapai, baru yang lain dicapai berikutnya. Ketidaksejahteraan secara material pada gilirannya mengakibatkan berbagai tindakan yang mengurangi rasa aman, nyaman dan bahagia. Sebaliknya, rasa aman, nyaman dan bahagia merupakan hal yang abstrak dan jauh lebih sulit untuk dicapai. Ukuran-ukurannya pun berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, orang akan mengenal dengan konsep *American Dreams* (Mimpi Amerika). Dalam nilai tersebut, ternyata ada ukuran ekonomi juga menjadi acuan.

Memang tidak selalu, ukuran kesejahteraan material menjadi utama bagi seseorang. Karena nilai-nilai tertentu, orang lebih memilih ketenangan hidupnya tanpa bergantung pada perolehan ekonominya. Orang-orang yang demikian telah memilih kemiskinan menjadi bagian hidupnya. Mereka miskin secara sukarela, sudah barang tentu dengan berbagai alasan. Namun demikian, hal tersebut tentu dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah yang lebih besar, kesejahteraan material merupakan hal yang selalu diharapkan. Artinya, mereka tidak ingin menjadi

miskin. Pemahaman yang demikian ini kemudian menjadi kesepakatan bersama bagi negara-negara di dunia melalui MDG's (*Milleneum Development Goals*) yang dideklarasikan pada bulan September 2000 dan berharap dicapai tahun 2015. Point yang pertama dari MDG's adalah meningkatkan jumlah orang yang berpendapatan di atas 1 \$ per kapita per hari. Angka 1 \$ itu sebagai ambang batas kemiskinan absolut. Menjelang tahun 2015, seluruh pemerintah penandatangan MDGs melakukan evaluasi dan menyatakan belum tercapai sepenuhnya. Akhirnya, pada 12-13 Nopember 2014 mereka kembali menandatangani kesepakatan bersama untuk melanjutkan program-program tersebut dengan perbaikannya. Kesepakatan itu tertuang dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kegamangan terhadap kondisi kemiskinan itu sebenarnya tidak saja dimiliki oleh pengelola negara, tetapi juga mereka yang mengalami. Pertambahann jumlah orang miskin itu tidak terlepas dari kegagalan berbagai program pembangunan. Kegagalan pembangunan pertanian di perdesaan misalnya telah meningkatkan jumlah orang miskin. Wilayah perdesaan telah di-"kota"-kan dengan industri yang jauh dari karakternya. Orang yang termajinalisasi dari pembangunan pedesaan tersebut pada gilirannya urbanisasi ke wilayah perkotaan. Dengan mengambil kasus kota Surabaya, buku ini dengan baik menggambarkan orang-orang miskin itu sebenarnya tidak menyerah begitu saja. Mereka yang berasal dari desa beradaptasi dengan wilayah perkotaan dan bekerja pada berbagai sektor formal atau informal.

Buku ini diawali dengan perdebatan teoritik tentang pertumbuhan perkotaan dan indikator kemiskinan. Hal itu disajikan dalam bagian pertama. Bagian berikutnya, gambaran tentang usaha-usaha orang miskin berjuang dan bertahan hidup direkam dengan baik melalui sejumlah penelitian pada beberapa sektor pekerjaan di Surabaya. Mereka, orang miskin sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka menyuarakan dalam berbagai bentuk,

misalnya melalui aktivitas mengamen dan adegan teatrikal pada waktu demo. Hal itu dicermati dan ditulis pada bab 8 dan bab 9. Di bagian akhir, penulis merangkum bagaimana usaha-usaha orang miskin kota bertahan dan beradaptasi dalam kemiskinan.

Di dalam edisi revisi ini, penulis mengolah ulang terutama terkait dengan metode penelitian. Hal itu ingin menunjukkan pada pembaca bahwa apa yang ditulis bukan sekedar imajinasi tentang orang miskin, tetapi apa yang ada, terjadi dan dipahami tentang orang miskin.

Lebih dari itu, selain edisi revisi dalam bentuk cetak, dengan mencermati perubahan teknologi, buku ini ditampilkan dalam bentuk ebook yang tidak berbeda jauh dari edisi cetak. Penerbitan ebook bertujuan agar buku ini dapat dibaca secara luas, sekaligus dengan harapan untuk memperoleh kritik. Ada rencana dalam waktu tidak lebih dari dua tahun, buku ini juga dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris.

Surabaya, Desember 2015

FX Sri Sadewo

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar (edisi revisi)	v
Daftar Isi	ix
Bagian 1. Problematika Perkotaan	1
Bab 1 Urbanisasi dalam Perspektif Budaya (Martinus Legowo)	3
Bab 2 Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran (FX Sri Sadewo)	13
Bab 3 Kemiskinan dan Pengukurannya (FX Sri Sadewo)	23
Bagian 2. Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota	39
Bab 4 Surabaya, Geliat Calon Kota Metropolitan (FX Sri Sadewo)	41
Bab 5 Buruh Bangunan di Kota Besar. Mekanisme Survival Kelompok Miskin Migran di Surabaya Tahun 1990-an (FX Sri Sadewo)	59

Bab 6	
Petani Kota. Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang Urban (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto, dan Usman Mulyadi)	93
Bab 7:	
Petugas <i>Cleaning Service</i> . Berharap di Sektor " <i>Formal</i> ", meski Harus Cerdik dan Tabah (Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo, dan Arief Sudrajat)	127
Bab 8	
Pengamen Seniman Jalanan dan Suara-suara " <i>Lapar</i> " Orang Miskin Kota (Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto)	153
Bab 9	
Mahasiswa dan Orang Miskin Kota Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi)	195
Bagian 3.	
Penutup	241
Bab 10	
Kemiskinan Kota dan Pembangunan (FX Sri Sadewo)	243

Indeks

FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya

Bagian 1

Problematika Perkotaan

Bab 1

Urbanisasi dalam Perspektif Budaya

Martinus Legowo

Pendahuluan

Jika suatu bangsa sadar dengan proses modernisasinya, sebenarnya bangsa tersebut hanya ingin berusaha untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia serta aliran peradapan pada jaman bangsa tersebut hidup. Kecenderungan suatu bangsa untuk memodenisir dirinya sejauh mungkin dilakukan dengan pembangunan. Dalam pembangunan ini secara sadar diupayakan untuk dipercepatnya perubahan struktur sosial-ekonomi dalam bangsa yang bersangkutan. Konsekuensi dari hal ini antara lain mengakibatkan juga suatu proses pergeseran dalam struktur mata pencaharian, stratifikasi sosial, serta meningkatkan mobilitas geografi seperti migrasi dan urbanisasi.

Masalah urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja, dalam arti perpindahan dari desa ke kota, akan tetapi juga dilihat sebagai perubahan budaya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut jika ditinjau dari perspektif budaya, maka urbanisasi ini perlu kerangka berfikir yang lain yaitu yang menyangkut masalah nilai, norma dan pengetahuan. Urbanisasi juga mempunyai kecenderungan untuk melibatkan perubahan-

perubahan dalam sub sistem masyarakat yang lain. Terutama pada tingkat makro, karena urbanisasi juga berarti mobilitas dan jika mobilitas terjadi, maka sub sistem lain biasanya juga berubah.

Dengan melihat urbanisasi sebagai proses perubahan kebudayaan, dalam arti perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan (*ide-ide*), akan memudahkan untuk memasukkan berbagai gejala yang mungkin muncul di perkotaan dalam kerangka penjelasan ini. Masalah-masalah yang muncul pada dimensi yang lain dapat dijelaskan lewat kerangka berfikir yang melihat ada kesejajaran masyarakat. Antara desa dan kota memiliki perbedaan dalam hal kebudayaan karena pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan lingkungan dan lingkungan yang mereka hadapipun berbeda. Permasalahan ini akan menimbulkan persoalan dalam menyesuaikan dengan lingkungan kota, terutama dalam memperjuangkan hidup dan cara (*gaya*) hidup. Sehubungan dengan ini Parsudi Suparlan (1978) menjelaskan bahwa persebaran kebudayaan kepada anggota dan pewarisan kepada generasi selanjutnya dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucap maupun dalam tindakan.

Di sini kita harus bisa memandang bahwa kebudayaan sebagai suatu kekhususan sistem nilai, karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang lain. dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kearah yang lebih sesuai dengan kehidupan yang lain.

Urbanisasi: Sebuah Kerangka Konsep

Deskripsi urbanisasi banyak yang diartikan sebagai suatu mobilitas horizontal, yaitu dari desa ke kota. Menurut Said Rusli (1983), dijelaskan bahwa urbanisasi dilihatnya sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Menurut Lee (1984) ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi, yaitu (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) faktor penghalang, dan (4) Faktor-faktor pribadi. Selanjutnya Louis Wirth's dalam studi urbanisasinya mengatakan bahwa : "*Urbanism as a way of life*" (Urbanisasi sebagai cara hidup) di mana pemusatan penduduk di dalam kota dianggap sebagai variabel yang sangat menentukan kemungkinan hidup individu, serta interaksi antar individu. Urbanisasi sebagai cara hidup yang khas dapat didekati secara empiris dari 3 perspektif yang saling berhubungan, yaitu : (1) sebagai suatu struktur fisik yang terdiri dari penduduk, teknologi dan keteraturan ekologis, (2) sebagai suatu sistem organisasi sosial yang melihat suatu struktur sosial yang khas suatu rangkaian institusi sosial dan suatu pola hubungan sosial yang khas pula, (3) sebagai seperangkat sikap dan ide-ide, dan kumpulan pribadi-pribadi yang ikut serta dalam bentuk-bentuk tingkah laku kolektif yang khas, dan menjadi obyek dari mekanisme pengawasan sosial yang khas pula. Lebih lanjut, Said Rusli (1983) melihat bahwa urbanisasi itu sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Hal itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Bintarto (1984) bahwa gejala urbanisasi terkait dengan faktor *push* dan *pull*.

Karena hanya melihat dari sisi faktor *push* dan *pull*, maka urbanisasi harus juga dilihat dari sisi budaya. Aspek budaya itu menyangkut nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan. Hal itu dilakukan oleh White dalam Haviland (1989),

mendefinisikan aspek tekno-ekonomis kebudayaan sebagai cara yang digunakan oleh para anggota suatu kebudayaan untuk menghadapi lingkungan mereka, dan aspek inilah yang selanjutnya menentukan aspek sosial dan ideology kebudayaan. Cara kebudayaan ini merupakan cara beradaptasi dengan lingkungan.

Dengan demikian kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan (emosi) manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral yang sumber-sumber dari nilai moral tersebut pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia.

Urbanisasi Sebagai Proses Perubahan Kebudayaan

Urbanisasi menurut Philip M. Hauser (1973) dapat didefinisikan sebagai proses yang membawa transformasi besar dalam pandangan hidup manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pergeseran dari “rural” ke “urban”. Sehubungan dengan demikian kita perlu melihat definisi kebudayaan agar diperoleh gambaran yang jelas karena gejala perubahan di sini adalah perubahan kebudayaan.

Kebudayaan disini harus dilihat dari proses kognitif, yaitu sebagai serangkaian pengetahuan yang digunakan sebagai strategi untuk menghadapi kehidupan, yang berkenaan dengan pemahaman dan pengintepretasian lingkungan serta pengalaman yang dihadapi oleh manusia. Lingkungan dan pengalaman ini sangat menentukan bagi proses belajar seseorang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1978) bahwa kebudayaan dengan demikian merupakan sistem ide, yang merupakan serangkaian petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan

strategi-strategi yang terdiri atas model-model kognitif yang bersumber pada dan diselimuti oleh nilai-nilai yang ada dalam etos dan pandangan hidup, yang dalam penggunaannya oleh para pelakunya untuk menginterpretasi dan menghadapi lingkungannya dilakukan secara selektif. Jadi kebudayaan disini adalah pedoman bagi tingkah laku manusia. Sebagai pedoman, ia memegang peranan penting karena dapat mengarahkan tindakan-tindakan dari si pendukungnya.

Deskripsi atau pendefinisian kebudayaan sebagai proses kognitif memiliki implikasi lanjutan terhadap pemahaman urbanisasi. Kita harus melihat bahwa urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja (dalam arti perpindahan dari desa ke kota), akan tetapi perubahan tersebut juga dilihat sebagai proses budaya. Demikian juga termasuk transfer nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kota. Mengenai transfer kebudayaan ini hendaknya disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga merupakan keputusan untuk melakukan penyesuaian kebudayaan di lingkungan yang baru (sesuai dengan iklim perkotaan).

Masalah yang dihadapi sekarang adalah kesulitan dalam mengubah sistem ide mereka (kaum urbanis), dengan demikian bisa mengalami hambatan dalam transfer kebudayaan. Sistem ide ini merupakan salah satu unsur yang paling sukar diubah dan seandainya bisa diubah membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kebudayaan suatu masyarakat itu sudah mengakar dalam diri pendukungnya. Lebih jauh lagi apabila kebudayaan itu sendiri tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakatnya, dalam arti sudah tidak diperlukan lagi oleh masyarakat pendukungnya sehingga dengan demikian kebudayaan akan berubah. Proses adaptasi sangat penting artinya agar kebudayaan kota dapat diterima dengan baik. Sehubungan dengan adanya adaptasi ini manusia tidak hanya telah menjamin kelestariannya, tetapi juga

pemekarannya. Oleh karena itu, tidak berarti bahwa apa saja yang dikerjakan oleh manusia dikerjakan karena sifat adaptifnya terhadap lingkungan tertentu. Yang jelas, manusia tidak bersaksi terhadap lingkungan seperti apa adanya, tetapi tetapi ia bereaksi terhadap lingkungan seperti apa yang dipahaminya, dan kelompok manusia dapat memahami lingkungan yang sama dengan cara-cara yang berbeda satu sama lain. Mereka juga bereaksi terhadap hal-hal yang bukan lingkungan: pertama-tama sifat biologinya, kepercayaan, sikap dan konsekuensi perilaku mereka untuk orang lain. Semua itu menghadapkan mereka kepada masalah, dan orang yang memelihara kebudayaan itu untuk memecahkan masalah.

Kota, Lingkungan yang Menuntut Perubahan Budaya

Lingkungan mempengaruhi kebudayaan, sehingga nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan hidup yang dihadapinya. Lingkungan desa dan kota merupakan dua kubu yang berbeda. Strategi adaptasi di pedesaan juga berbeda dengan strategi adaptasi di kota. Selain itu, pertumbuhan kebudayaan yang ada di desa berbeda dengan yang ada di kota. Simbol-simbol komunikasi pun ikut berubah dalam proses ini, sehingga manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu memiliki model berfikir yang banyak dipengaruhi dan disesuaikan dengan lingkungan itu yang menjadikan sikap dan tindakan mereka memiliki corak latar belakang lingkungan asalnya. Masalah-masalah inilah yang berkaitan erat dengan urbanisasi yang ada di perkotaan.

Masalah itu ada karena sebagaimana dicirikan oleh Louis Wirth dalam Goede (1982) bahwa kota sebagai suatu *“relatively large, dense, and permanent settlement of socially heterogeneous individuals”*. Ada tiga komponen yang cukup penting dari definisi ini, yaitu : (1) ukuran yang besar; (2) adanya kepadatan; dan (3) sifatnya yang heterogen. Komponen yang dikemukakan oleh Wirth ini melahir-

kan masalah pada saat terjadinya kontak antara desa dan kota. Masalah ini sangat penting diperhatikan karena baik nilai-nilai, norma-norma, maupun pengetahuan yang tumbuh di perkotaan membedakan dengan yang ada di pedesaan. Selanjutnya, Sartono Kartodirdjo (1977) memberikan suatu konsepsi lain untuk mengkaji masalah yang berhubungan dengan pandangan hidup ini dengan menggunakan tiga perspektif sebagai pendekatannya. Pertama, bahwa sebagai struktur fisik, kota mempunyai dasar populasi yang dideferensiasikan menurut tingkat teknologi, susunan ekologis dan faktor-faktor lain. Kedua, sebagai susunan sosial, pandangan hidup ini menggantikan hubungan primer dan sekunder. Berhubung dengan proses ini maka ikatan kekerabatan diperlemah, dan solidaritas sosial menjadi goyah. Ketiga, dengan gaya hidup ini muncul mentalitas kota dengan sikap, ide-ide, dan kepribadian yang berbeda dengan mentalitas tradisional. Ketiga perspektif ini sangat penting bagi penjelasan tentang urbanisasi. Hubungan-hubungan sosial yang muncul juga membutuhkan corak yang khusus, menuntut adanya strategi adaptasi tertentu.

Tentang gaya hidup kota, Wirth mengemukakan bahwa (1) masyarakat kota cenderung sekuler, (2) terbentuknya asosiasi yang bersifat sukarela; (3) adanya peranan sosial yang terpisah-pisah; dan (4) peranan norma-norma menjadi tidak jelas. Kaum urbanis akan mengalami perubahan ke arah tersebut. Namun demikian, mereka tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai, norma-norma dan model-model pengetahuan yang memiliki corak pedesaan. Oleh karena itu, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Kondisi kota merupakan sesuatu yang asing bagi kaum urbanis, sehingga sistem pengetahuan yang mereka miliki tidak dapat dipakai untuk memahami dan menginterpretasikan dengan tepat kondisi kehidupan di perkotaan. Simbol-simbol kehidupanpun sudah berubah, hubungan-hubungan sosial sudah menjadi dangkal. Orang kota sudah mengembangkan kehidupan yang komersial. Stratifikasi sosialpun sudah semakin jelas perbedaan-

nya, sehingga menyebabkan hilangnya kontak yang menyeluruh antar warga masyarakat.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada kaum urbanis ini adalah: (1) mereka mengubah sistem pengetahuan lama yang dibawa dari daerah asal agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan yang berlaku di perkotaan; dan (2) mereka tetap mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, model-model pengetahuan lama. Sistem pengetahuan untuk selanjutnya digunakan untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan sistem pengetahuan mereka yang sudah mapan. Untuk yang pertama mereka akan menjadi golongan orang kota, yang harmonis dengan lingkungan hidup di perkotaan. Selanjutnya yang kedua, mereka akan hidup sebagai orang desa di perkotaan, yang lengkap dengan gaya hidup di pedesaan.

Penutup

Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi memungkinkan kita sampai pada penjelasan yang lebih mendasar. Urbanisasi tidak hanya menyangkut masalah perubahan fisik, tetapi juga harus dilihat dalam konteks budaya yang berarti perubahan sistem pengetahuan untuk menginterpretasikan kehidupannya. Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi merupakan salah satu bidang penjelasan yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Perlu diketahui bahwa kita harus memandang kebudayaan sebagai kekhususan-kekhususan sistem nilai karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang lain. Dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam

diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan ke arah yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat lain.

Daftar Pustaka

Bintoro

1984 **Urbanisasi dan Permasalahannya**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Evers, Hans-Dieter

1978 "Urbanization and Urban Conflict in Southeast Asia". Dalam Peter SJ Chen and Hans-Dieter Evers (ed.), **Studies in Asean Sociology**. Singapore: Chopmen Enterprises.

Goede, JH

1982 "Urbanisasi dan Urbanisme" dalam JW Schoorl, **Modernisasi**, Jakarta: Gramedia.

Houser, Philip M

1973 **Perkembangan Kota Semarang**, Salatiga: LPIS IKIP Kristen Satyawacana.

Lee, Everet S

1983 **Suatu Teori Migrasi**, diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta, PPK- UGM.

McGee, TG

1976 **Suatu Aspek Urbanisasi di Asia Tenggara**, Yogyakarta, Lembaga Kependudukan UGM.

Parsudi Suparlan

1977 "Flat dari aspek Antropologi", **Widyapura**, No.1, Th II

Said Rusli

1984 **Pengantar Ilmu Kependudukan**, Jakarta: LP3ES.

Sartono Kartodirdjo

1978 Kata Pengantar dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), **Masyarakat Kuno dan Kelompok Sosial**, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Wirth, Louis

1978 Urbanisasi sebagai cara hidup, **Berita Antropologi**, Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, No. 34.

Bab 2

Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran

Kota sebagai Pusat Peradaban

Dari catatan Michael P.Todaro dan Jerry Stilkind (1991) menggambarkan bagaimana penduduk kota telah membengkak berlipat-lipat jumlahnya, tidak saja di negara-negara maju, tetapi sebaliknya di negara-negara sedang berkembang. Di dalam wilayah yang terbatas, kota dihuni oleh puluhan juta manusia, Mexico City dengan 31 juta jiwa, Sao Paolo 25,8 juta jiwa, New York 20,4 juta jiwa, sementara itu Jakarta dengan 16,7 juta jiwa. Orang-orang dengan “sukarela” hidup bersesak-sesak di kota yang sempit, fasilitas yang terbatas. Untuk di Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya, mereka tak jarang harus tinggal di bantaran sungai. Dengan kondisi lingkungan yang “tidak sehat” (menurut ukuran ilmu kesehatan lingkungan), mereka tinggal, bahkan menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah tersebut.

Kepadatan nampaknya menjadi ciri dari sebuah kota. Setiap kota di mana pun memiliki wilayah-wilayah padat. Wilayah-wilayah itu biasanya tidak jauh dari pusat kota. Hanya sedikit kota-kota di dunia ini direncanakan dengan penataan ruang taat asas. Kota yang demikian ini biasanya tidak tumbuh secara

alamiah, tetapi “kloning” (rekayasa) dari kota-kota lama yang telanjur semrawut.

Hal ini tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan kota tersebut. Di dalam sejarahnya, kota ini lahir dari revolusi peradaban pertama, yaitu revolusi agraris. Dimulai dari domestikasi (penjinakan) binatang dan tanaman hingga bercocok tanam dan penemuan “teknologi” pertanian, sebut saja kapak persegi dan alat besi, manusia kemudian di-“rumah”-kan. Manusia tidak lagi berkeliaran mengikuti binatang buruan, tetapi cukup memilih tempat tinggal. Hal ini tidak berjalan dalam waktu yang singkat dan langsung. Pada waktu penjinakan binatang, manusia tidak lagi berburu, tetapi menjadi penggembala. Mereka membawa binatang piaraannya ke padang-padang. Mereka meninggalkan gua, tetapi membawa kemah-kemahnya. Ketika bercocok tanam, mereka tidak lagi berjalan ke padang-padang, tetapi menetap di mana lahan pertanian itu berada. Rumah-rumah pun didirikan di sekitar lahan pertanian (lihat Sukadana, 1983: 47-62).

Pembagian pekerjaan di antara manusia ini kemudian menjadi semakin kompleks. Dari secara tegas, mereka berbagi tugas dengan penanda jenis kelaminnya, mereka meletakkan perempuan di rumah bersama anak-anaknya, hanya pada waktu tertentu saja, seperti tanam, panen dan sesudahnya ditarik turun ke lahan pertanian. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang telah melahirkan peradaban tersebut. Ada dugaan yang mulai melakukan domestikasi binatang dan tanaman adalah kaum perempuan tatkala manusia laki-laki sedang sibuk berburu dan berperang. Oleh karena itu, segala atribut “lahir” yang dimiliki oleh perempuan menjadi penanda kesuburan lahan tersebut.

Karena hasilnya berlimpah, tidak bisa dihabiskan dalam waktu yang singkat, maka masyarakat petani mengalami surplus pangan. Surplus pangan ini merupakan berkah dan malapetaka. Menjadi berkah karena manusia tidak lagi hidup hanya untuk

mencari makan. Waktu luangnya digunakan untuk mengembangkan teknologi dan kesenian. Spesialisasi pekerjaan di luar pertanian pun berkembang. Sementara itu, surplus pangan ini menjadi malapetaka karena menjadi daya tarik bagi kelompok manusia yang masih nomaden untuk menguasai. Peperangan pada masa lampau biasanya terjadi pada masa paska panen.

Strategi yang dikembangkan kemudian adalah hidup lebih berkelompok, rumah-rumah tidak lagi berjauhan, mengikuti lahan pertanian, namun sebaliknya berkelompok, sebagai perkampungan. Lahan pertanian diletakkan di sisi luar, antara lahan pertanian dan perkampungan dibatasi tumpukan batu seperti layaknya batas dan benteng kota, atau rimbunan pohon-pohon bambu, seperti pola-pola perkampungan lama di Asia Tenggara, antara lain: Huta (Batak). Hanya ada satu pintu masuk ke perkampungan. Pada waktu malam hari dan saat-saat tertentu kaum lelaki secara bergiliran bertugas untuk menjaga perkampungan.

Hal itu diatur oleh kepala kampung. Kepala kampung ini dipilih mengikuti prinsip *primus inter pares*. Lama-kelamaan orang yang berjaga ini dipilih secara khusus, di kampung Jawa dikenal dengan *Jagabaya*. Orang-orang ini dibayar dengan himpunan kecil dari hasil panen (*jimpitan*) pada masing-masing keluarga. Aktivitas ini diatur oleh kepala kampung. Dalam perkembangannya, penemuan sistem pertanian sawah membuat hubungan antar keluarga, antar kampung ini menjadi semakin teratur dan meluas seiring jaringan irigasi dari sungai ke sawah. Dari antara kepala kampung, seorang dipilih sebagai pemimpin. Pemimpin ini raja di masa kemudian, kampung tempat tinggalnya adalah kota, sedangkan para *jagabaya* menjadi tentara, dan *jimpitan* adalah pajak. Tanda-tanda pembayaran *jimpitan* ini adalah awal dari manusia mengenal angka dan huruf pertama kali, sebagaimana terjadi pada bangsa Sumeria di Mesopotamia kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (perhatikan Haviland, 1988: 31; Sukadana, 1983: 71-72; Hawkes, 1965: 326, 363-364). Secara ringkas, Mumford (1970),

sebagaimana dikutip oleh Adi Sukadana (1983: 72), mengurutkan rangkaian perkembangan sebuah kota sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahap-tahap Perkembangan Kota
(Sukadana, 1983: 72)

Stadium	Bentuk Perkembangan
1 Eoplis	Perkembangan sebuah desa menjadi suatu pemukiman yang tetap dengan penggunaan tanah yang teratur
2 Polis	Suatu kumpulan desa atau kelompok keluarga besar dengan adat-istiadat serta kegiatan agraris yang bertahan.
3 Metropolis	Sebuah kota yang tumbuh dari sejumlah desa tau kota kecil, sehingga merupakan suatu pemukiman induk dengan pusat perdagangan dan interaksi macam-macam kebudayaan.
4 Megapolis	Sebuah kota besar dengan tanda-tanda permulaan kemunduran peradaban
5 Tyranopolis	Sebuah kota besar yang hidup sebagai parasit di lingkungannya. Tampak detorasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan usaha administratif.
6 Nekropolis	Sebuah kota besar dalam keadaan kemunduran umum, menuju kemusnahan-nya.

Sang pemimpin, raja tidak serta merta membangun istananya. Terebih dahulu, ia menyusun kekuatan untuk menjaga keamanan rakyatnya. Rakyat dengan sukarela menyerahkan sebagian kemerdekaannya untuk diatur oleh raja tersebut. Kekuatan itu berupa tentara dan pemungut pajak, serta “pelayan” bagi rakyat. Timbunan hasil panen sebagai bayaran untuk tentara ini diletakkan dalam *lumbung-lumbung* di kota. Kelebihannya dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan lain. Demikian pula, rakyat-

nya juga menukarkan hasil panen dengan peralatan dan barang lain yang dibutuhkan. Peralatan dan barang tersebut dihasilkan oleh tukang-tukang yang telah berkembang pada masa sebelumnya. Atau, para pedagang dari luar membawa dan menjualnya. Para pedagang membangun toko dan perusahaan di kota tersebut. Tanah bisa membeli dari masyarakat setempat atau menyewa pada raja. Oleh karena itu, pada abad pertengahan di Eropa sejumlah kota tumbuh akibat perkembangan perusahaan di dalamnya, seperti *gilda-gilda* di kota-kota Italia. Di Nusantara, sejumlah kota pantai merupakan kota perdagangan, seperti Surabaya dengan syabandarnya. Itu awal pertumbuhan kota sebagai pusat peradaban dengan berbagai fungsi, mulai pasar, birokrasi hingga benteng, sebagaimana dipaparkan oleh Max Weber (1977), dan kota pun tumbuh sebagai pusat peradaban (Keesing, 1989: 49-50).

Urbanisasi dan Peminggiran

Pada awal pertumbuhan kota, jumlah penduduknya tidak begitu besar. Meskipun demikian, menempati lahan yang sempit. Kota tumbuh dengan cepat, terutama akibat dari urbanisasi (perpindahan manusia dari desa ke kota). Demikian pula, terlihat pada perkembangan kota-kota pertama di dunia. Menurut catatan Modelski (1997) Di dalam penggalian kota-kota lama, diketahui bahwa luas setiap kota memiliki luas hanya beberapa hektar saja, tetapi dihuni lebih dari seribu jiwa. Jumlah penduduk kota-kota pertama itu berlipat dua pada setiap seratus tahunnya. Pelipatan jumlah penduduk ini semakin pendek ketika memasuki abad ke-20 dan kini masuk paruh pertama abad ke-21. Pelipatan dalam jumlah besar ini menjadi sulit dibuktikan akibat pertambahan alami, namun lebih meyakinkan sebagai pengaruh urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa-kota, atau penggabungan desa-desa menjadi wilayah kota.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan pada Kota-kota Pertama
(Modelska, 1997)

Kota (Pengarang)	Periode	Luas (ha)	Perkiraan Jumlah Penduduk	Kepadatan
ERIDU				
▪ Mallowan (1970: 331)	Ubaid	8-10	4.000	500
▪ Wright (1981: 325)	Early Uruk	40	6.200- 10.000	155-250
HABUBA-KABIRA				
▪ Algaze (1993)	3.100 SM	40	6-8.000	150-200
HIERAKONPOLIS				
▪ Valhelle, 1990	3.400 SM	35	5-10.000	143-350
URUK				
▪ Nissen, 1993: 56	Akhir millenium ketiga SM	250	25-50.000	100-200
▪ Adams, 1981: 85	Awal Dinasti 1	400	40-50.000	100-125
UR				
▪ Wright, 1981: 327	Awal Dinasti 1	21	Kurang dari 6.000	286
▪ Wooley, 1965: 193	Dinasti 3	50	34.000	680
▪ Wright, 1981: 320-1	Dinasti 3	50 (termasuk dinding kota)	34.000	690
EBLA				
▪ Pettinato, 1981: 134	Dinasti 3	56	Sekitar 40.000 lebih	714
MOHENJO-DARO				
▪ Barrow & Shodhan, 1977: 11	2.500 SM	51 (wilayah kota)	40.000	784
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	100+	40.000	400
HARAPPA				
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	43+	20.000 s/d 25.0000	465-581

Pergerakan-pergerakan etnik hingga milineum pertama Masehi telah menenggelamkan kota-kota lama, kemudian tumbuh kota-kota baru. Kota-kota baru dunia ini dalam sejarahnya sebenarnya tidak jauh berbeda engan kota-kota pendahulunya, yaitu tumbuh dari pertanian yang menyebar ke seluruh wilayah di dunia, tetapi kini jauh lebih rumit. Kota tidak lagi sebagai kota produsen, tetapi sebagai kota konsumen, dagang dan pemerintahan. Everett S. Lee (1995) yang memperbaiki teori Ravenstein, menunjukkan bahwa keanekaragaman fungsi kota tersebut telah menjadi medan magnet bagi penduduk desa sekitarnya. Daya tariknya menjadi semakin menguat tatkala jalur transportasi antara desa dan kota semakin mudah dan murah. Revolusi industri telah menghasilkan alat transportasi massal yang murah, seperti kereta api dan bus.

Sementara itu, desa-desa mengalami entropi. Cara-cara produksi dalam sistem pertanian menjadi semakin tidak menguntungkan bagi pekerja. Monetisasi dan revolusi hijau-biru memaksa para tuan tanah mengabaikan pola-pola hubungan yang “mesra” terbina dari masa lampau, yaitu patron-klien. Pada masa lampau, di Inggris perpindahan penduduk ke kota diawali dari rendahnya upah buruh tani di pedesaan. Penyebabnya bukan perubahan teknologi, tetapi jumlah buruh yang tidak bekerja jauh lebih banyak dari lahan pertanian, sehingga buruh menurunkan upahnya demi memperoleh pekerjaannya. Pada titik tertentu, upah yang diterima tidak seimbang dengan tenaganya, sehingga mereka memilih memasuki industri-industri di perkotaan (lihat Hallas, 2000: 67-84). Sementara itu, paska Perang Dunia II, revolusi hijau-biru mengakibatkan penyingkiran kaum perempuan dari lahan pertanian, kaum miskin desa menjadi semakin terpuruk. Hasil panen tidak lagi melebihi dari biaya produksi, sehingga petani-petani kecil menjual tanahnya kepada tuan tanah atau orang kota.

Wiradi (1987) menggambarkan dengan baik dinamika masyarakat petani di Jawa. Dalam tulisannya, ia menggambarkan bahwa monetisasi dan revolusi hijau-biru mengakibatkan masyarakat buruh tani dan petani kecil mengembangkan sektor non-pertanian. Lambat-laut mereka kemudian desa menuju ke kota untuk kebutuhan keluarganya. Sektor pertanian yang tidak mendukung ditinggalkan. Namun, hasil dari sektor pertanian (bila ada) digunakan untuk mendukung usaha-usaha sektor non-pertanian di pedesaan dan pada gilirannya untuk modal di perkotaan. Pada petani kaya, sektor non-pertanian merupakan diversifikasi usaha dari sektor pertanian, begitu pula bila melakukan migrasi dan berusaha di kota. Dengan modal yang besar, hasilnya pun berlipat, tetapi hal tidak demikian pada petani miskin atau buruh tani. Hasil di perkotaan tidak memberikan keuntungan yang besar, selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya di desa dan seringkali jarang digunakan untuk mengembangkan sektor pertaniannya.

Sebagaimana ditulis oleh Eric Wolf (1985) bahwa salah satu faktor pengikat dari masyarakat desa adalah tanah. Ketika kehilangan tanah, maka lambat laun hilang pula ikatan pada desa asalnya, dan akhirnya menetap di kota. Keputusan menetap di kota merupakan konsekuensi ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghidupannya, meski hanya masuk ke sektor informal. Selain kondisi obyektif kaum migran, pilihan memasuki sektor informal juga semata-mata karena sektor formal terbatas jumlahnya dan tidak bersifat lentur.

Dengan demikian, jelaslah mengapa kota dari hari ke hari tidak semakin longgar, tetapi semakin padat. Kebutuhan akan tanah untuk pemukiman, perkantoran dan pabrik semakin mengusur sektor pertanian di kota (lihat Sadewo, Harianto, dan Mulyadi, 2004). Kampung-kampung lama dari hari ke hari tergusur, dan digantikan oleh pusat perkantoran dan perbelanjaan. Penduduknya memilih pindah ke daerah pinggiran kota. Namun

demikian, pendirian pusat perkantoran dan perbelanjaan sebagai representasi pertumbuhan sektor formal tetap tidak mampu menampung tenaga kerja, terutama di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, dari data BPS, sebagaimana dikutip oleh Samhadi (2006: 33), sektor formal hanya bisa menampung 30% tenaga kerja, sebaliknya sektor yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, sektor informal menampung 70% tenaga kerja.

Di dalam analisis Samhadi (2006:33), pertumbuhan sektor informal di Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut karena ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja. Di Indonesia, angka pengangguran terus meningkat, dari 5,18 juta orang tahun 1997, menjadi 6,07 juta orang (1998), 8,9 juta orang (1999), 8,44 juta orang (2000), 8,01 juta orang (2001), 9,13 orang (2002), 9,53 juta orang (2003), 10,25 juta orang (2004) dan 10,9 juta orang (2005). Jika setengah penganggur (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu) dimasukkan, angka pengangguran saat ini mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 37% dari toatal angkatan kerja (106,9 juta orang). Kondisi ini berlawanan dengan pertumbuhan sektor formal. Berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2004-2009 sebesar 6,6% per tahun dan setiap persen pertumbuhan bisa menyerap 600.000 angkatan kerja. Namun, pada kenyataan angka pertumbuhan tersebut diperkirakan baru bisa dicapai tahun 2007, dan sekarang ini hanya mampu menciptakan sekitar 178.000 lapangan kerja baru.

Daftar Pustaka

- Hallas, C.S.
2000 Poverty and Pragmatism in Northern Uplands of England: the North Yorkshire Pennines c. 1770-1900. **Social History**. Vol. 25. No. 1.

- Haviland, William A.
1988 **Antropologi Jilid 2.** diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.
- Hawkes, Jacquetta.,
1965 **Prehistory. History of Mankind, Cultural and Scientific Development.** New York: A Mentor Book.
- Keesing, Roger M.
1989 **Antropologi Budaya. Suatu Perspektif Kontemporer.** Diterjemahkan oleh Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga.
- Modelska,
1997 Early World Cities. Extending the census to the fourth millennium. **Paper.** Konvensi ISA. World Sytem Data Historical Group. Toronto. Dapat diakses di <http://www.etext.org/Politics/World.Systems/papers/modelski/geocit.htm>.
- Samhadi, Sri Hartati.
2006 Dilema Sektor Informal. **Kompas.** 16 April.
- Sukadana, A. Adi.,
1983 **Antropo-ekologi.** Surabaya: Airlangga University Press.
- Todaro, Michael P., dan Jerry Stilkind.
1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.
- Weber, Max.
1977 Apakah yang disebut Kota? Diterjemahkan oleh Darsiti Soeratman dan Amin Soendoro. Dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). **Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Wiradi, Gunawan.
1983 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 3

Kemiskinan dan Pengukurannya

Kemiskinan sejati tidak berarti tidak memiliki apa-apa, melainkan keterlepasan dari keterikatan akan benda-benda di dunia dan dalam melepaskan kekuasaan atas benda-benda secara sukarela. Itulah sebabnya ada orang-orang miskin yang sungguh-sungguh kaya. Demikian pula sebaliknya.

Escriva (1987: 150)

Kemiskinan:

Antara Ada dan Tidak, Nampak dan Tidak Nampak

Di dalam satu film yang dibintangi oleh Jean Claude van Damme, *Hard Target*, diceritakan di New Orleans terdapat sindikat yang memiliki usaha perburuan manusia. Sindikat itu terdiri dari seorang pemimpin, seorang kepercayaan, dan beberapa orang sebagai anjing-anjing pemburu yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Pakaian mereka hitam dengan kaca mata hitam pula. Mereka mengumpulkan uang dari orang-orang kaya yang ingin berburu. Satu orang kaya membayar \$ 750.000. Bila berhasil membunuh buruannya, uangnya akan kembali dan ditambah lagi dengan bonusnya.

Untuk memperoleh orang-orang yang diburu, mereka menggunakan jasa makelar. Makelar ini memiliki usaha menyebarkan pamflet. Makelar tersebut memperkerjakan orang-orang gelandangan yang beberapa di antaranya adalah bekas veteran Perang Vietnam. Dicarilah dari mereka, orang veteran yang memiliki bintang dengan kemampuan tempur semasa perang dan paling penting lagi, tidak memiliki sanak keluarga. Orang tersebut

ditawari sebagai orang buruan dengan bayaran \$ 10.000 bila berhasil lepas dengan menyeberangi sungai dalam waktu 1 (satu) jam. Orang-orang gelandangan yang miskin tersebut diiming-imingi bahwa betapa enaknyanya memperoleh sebesar itu. *“Kamu tidak perlu menggelandang, mencari makan di tong sampah, atau dari gereja ke gereja. Kamu bisa hidup enak, meninggalkan kehidupan jalanan yang keras dan bisa mati kedinginan di tengah malam. Hanya dengan satu jam saja. Dan, kamu bisa!*

Kenyataannya, tidak seorang pun berhasil. Bagaimana tidak, satu orang diburu oleh puluhan orang dengan senjata yang lengkap. Satu orang buruan yang berlari, sementara itu dikejar oleh anjing-anjing bersepeda motor dan mobil. Ketika terbunuh, mayatnya tinggal dibuang atau dibakar dalam gubuknya. Polisi tidak bisa mengetahui jejak pembunuhan tersebut karena dokter yang mengotopsi telah dibayar untuk memalsukan hasil *visum et repertum*, sehingga menunjukkan kematian yang wajar dan kasusnya ditutup.

Suatu ketika datang seorang wanita yang kehilangan ayahnya, Nona Binder. Di luar kebiasaan, ayah tidak menulis surat lagi padanya. Oleh karena itu, ia mencari dengan dibantu Chance (Jean Claude van Damme). Dari data visum dokter, ia mati terbakar dalam gubuknya, tetapi tidak demikian menurut Chance karena salah satu kalung identitasnya ditemukan berlubang ditembus anak panah. Bersama dengan polisi wanita yang akhirnya terbunuh, Nona Binder dan Chance membongkar sindikat perburuan manusia. Karena takut terbongkar, sindikat pun berbalik memburu Chance. Namun, pada akhirnya terjadi sebaliknya, Chance dengan kekuatan dan kecerdikannya mampu membunuh satu per satu pemburunya. Selain Nona Binder, ia dibantu Paman Duvee, seorang pembuat minuman keras ilegal. Kelebihannya, Chance lebih tahu medannya, yaitu rawa-rawa dan Gudang Mardi Grass. Akhirnya, seluruh sindikat mati terbunuh berikut orang-orang kaya yang ikut berburu.

Apa yang terpikirkan dari film tersebut, seandainya sindikat tersebut ada, maka tidak salah mengapa di dunia ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang miskin. Binatang buruan harus lebih banyak dibandingkan pemburunya. Di dalam bentuk lain, pernah pula terdapat penjualan organ-organ tubuh dari orang-orang miskin dan orang-orang terpidana, terdapat pula *child trafficking* (penjualan anak-anak) baik untuk pekerja di bawah umur maupun menjadi kesenangan seks. Mereka diambil, diculik atau apa pun dari keluarga-keluarga miskin.

Paling mudah mengingat mereka adalah dengan melihat angka-angka di Biro Statistik. Itulah yang dilakukan oleh sebagian besar pemerintah di dunia ini, mulai dari angka kesakitan, kematian anak di bawah umur, kematian ibu melahirkan, angka kematian karena kurang gizi hingga apa lagi. Karena terlalu bosan mengisi lembar demi lembar instrumen survai, sering kemudian angka tersebut tidak pernah berubah, cukup mengambil dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, orang miskin tidak bertambah, tidak juga berkurang, meski jumlah penduduk selalu bertambah berlipat-lipat.

Menjadi terhenyak ketika kematian mereka berada tepat di depan kita, setidaknya-tidaknya oleh media massa disajikan di depan piring makan kita. Di Indonesia, menjelang akhir pemerintahan Suharto, tahun 1997, di televisi disiarkan langsung acara pembukaan SEA-Games yang menghabiskan ratusan juta rupiah, sementara itu di Irian Jaya, sekarang Papua, yaitu di Pegunungan Jaya Wijaya, terdapat puluhan orang mati karena kelaparan. Begitu pula, ketika pesta demokrasi yang menghabiskan puluhan milyar rupiah pada paska pemerintahan Suharto dengan menghasilkan anggota Dewan yang kerdil dan egoistis¹, kita disuguhkan sekian

¹ Di dalam beberapa kasus di pusat dan daerah, telah ditunjukkan pada kita tentang tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, serta kegiatan studi

banyak anak-anak busung lapar, dan bahkan di antaranya meninggal dunia. Bila kurban tsunami di Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) tidak mencapai di atas seratus ribu jiwa, mungkin baunya tidak sampai di hidung kita, kemudian kita akan menutup mata dan telinga atas penderitaan mereka. Hal ini bisa dilihat pada penanganan gempa sebelumnya di Indonesia Timur.

Sebenarnya, apa yang dialami oleh kita, rakyat Indonesia, tidak berbeda jauh dengan di negara-negara maju. Pada akhir tahun 1990-an misalnya, seorang veteran Perang Vietnam dengan berbagai bintang kehormatan ditemukan mati kedinginan di taman, depan Gedung Putih, Washington. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan penghormatan yang berlebihan pada tentara yang pulang dari Perang Badai Gurun.

Artinya, ada dan tidak adanya pengakuan keberadaan mereka sebenarnya bersifat kontekstual. Lebih kontekstual lagi dari sisi pandangan pengambil kebijakan publik dan birokrasi pemerintahan. Bila menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, maka jumlah mereka selalu dieliminasi sedemikian rupa mendekati titik nol. Namun, menjadi berbeda tatkala jumlah mereka kemudian dikompensasi dengan jumlah proyek, anggaran atau dana, maka jumlah mereka menjadi berlipat. Pada kasus Inpres Desa Tertinggal (IDT), tatkala dilakukan pendataan terhadap jumlah orang miskin dan desa tertinggal, awal kali para bupati menampik adanya desa tertinggal dengan keluarga miskin di dalamnya. Namun demikian, berbeda tatkala disebutkan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana untuk mengentaskan desa tertinggal tersebut. Demikian pula, dorongan yang besar untuk menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah keluarga pra-sejahtera berkaitan dengan pemberian beras subsidi bagi

banding, sementara itu kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat krisis moneter 1997-1998.

pemerintah paska Suharto, maka jatah beras bersubsidi dari tahun ke tahun terus berkurang sebagai bukti telah terjadi pengurangan keluarga miskin.

Mereka, orang-orang miskin, tidak berarti berdiam diri. Mereka memiliki strategi sendiri dalam mengatasi kemiskinannya. Namun demikian, strategi tersebut tidak selalu diterima, sebagian besar kebijakan tata ruang kota misalnya sangat tidak menguntungkan kelompok miskin. Hal ini mengingatkan kita pada cerita Abunawas tentang Orang Kaya dan Orang Miskin. Di dalam cerita tersebut, terdapat dua orang, sebut saja Alu si orang kaya, Ali si orang miskin. Kedua orang itu memiliki postur yang berbeda. Alu yang memiliki rumah besar dengan isinya yang berlimpah itu kurus badannya, sementara itu Ali yang hanya tinggal di dalam gubuk yang menempel di tembok pagar Alu memiliki postur gemuk. Tidak saja Ali, istri dan kedua anaknya pun berbadan gemuk.

Suatu ketika seseorang bertanya pada Ali, mengapa seluruh anggota keluarganya berbadan sehat dan gemuk. Apa yang dimakan, sehingga menghasilkan tubuh semacam itu. Ali pun menjawab, *"Mudah saja hanya nasi dan lauk ala kadarnya. Kami sekeluarga menikmati benar, bahkan dengan nasi pun kami bisa karena setiap hari asap dapur Alu memberikan aroma masakan yang lezat."* Jawaban Ali tersebut didengar oleh Alu. Oleh karenanya, Alu pun marah. *"Itu sebabnya badanku kurus, aroma masakanku sudah dimakan Ali sekeluarga. Aku tidak terima. Aku akan menghadap pada Pak Hakim. Menuntut ganti rugi."* Maka, pergi Alu ke hadapan Hakim dan menuntut ganti rugi 100 real uang emas pada Ali.

Hakim pun tidak bisa memutuskan dan meminta tolong pada Abunawas. Oleh Abunawas, Alu pun dipanggil. Hakim kemudian memutuskan bahwa tuntutan Alu dipenuhi dengan catatan tidak boleh dipegang. Hakim dari jauh menghitung dengan melempar uang tersebut satu per satu. Setelah selesai, Abunawas mengatakan bahwa Alu telah menerima ganti rugi

tersebut. Alu pun protes, maka Abunawas juga mengatakan bahwa Ali tidak mengambil apapun dari Alu, mengapa Alu merasa dirugikan.

Gubuk-gubuk mereka digusur dan dihancurkan, begitu pula dengan rombongan jual pun diangkut Satpol PP. Mereka yang melacur dan menggelandang pun dicap *pekat* (penyakit masyarakat) ditangkap dan diadili, meski dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlandar dipelihara oleh negara.*" Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya ditangkap.....

Mendefinisikan Kemiskinan

Kemiskinan sebenarnya tidak saja diamati, tetapi juga dirasakan. Membangun empati bersama dengan orang dan keluarga miskin mungkin lebih dari cukup, terutama bagi pengambil kebijakan publik. Oleh karenanya, Dillon dan Hermanto (1993: 18-19) mencermati bahwa ada 2 (dua) pandangan tentang kemiskinan. Di satu pihak, kemiskinan adalah suatu proses, di pihak lain kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19; kutip dari Pakpahan dan Hermanto, 1992). Dengan demikian, kemiskinan dapat pula dipandang sebagai salah satu akibat dari kegagalan dari kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini memunculkan kemiskinan relatif atau dikenal pula kemiskinan struktural.

Sementara itu, kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala dari suatu masyarakat melahirkan konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut oleh Bank Dunia pada tahun 1990 didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu individu memenuhi

kebutuhan dasarnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19), meski telah berkembang pada tahun-tahun belakangan ini.

Acuan bahwa orang miskin selalu diarahkan pada kegagalan dalam pemenuhan sumber daya dan dana ini kemudian mengarahkan definisi kemiskinan lebih pada dimensi ekonomi. Oleh karena itu, seperti yang dihimpun oleh Andre Bayo Ala (1981: 3-5), antara lain dari pendapat Sar A Levitan (1980), Schiller (dalam Stone, Whelen dan Murin, 1979), Emil Salim (1980), dan Ajit Ghose dan Keith Griffin (1980), lebih mengacu pada ketidakmampuan individu atau keluarga dalam kebutuhan hidupnya melalui pendapatan yang diperolehnya.

Hal itu berbeda dengan pendapat John Friedman dalam Ala (1981: 4) yang lebih mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial itu meliputi modal yang produktif atau aset, seperti tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan, sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, antara lain: partai politik, sindikat dan koperasi, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan dan barang-barang, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya.

Oleh karena itu, Andre Bayo Ala (1981: 5-8) menyimpulkan beberapa aspek kemiskinan. Pertama, kemiskinan menyangkut nilai-nilai (*values*), sesuatu yang dihargai tinggi oleh individu dan masyarakat. Kedua, kemiskinan itu multi-dimensional, memiliki berbagai aspek kondisi dalam orang dan keluarga miskin. Ketiga, aspek-aspek kemiskinan itu saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga membentuk lingkaran kemiskinan atau spiral kemiskinan (*the poverty spiral*) dalam istilah Lukas Hendratta. Keempat, di dalam kemiskinan terdapat aktor, yaitu orang-orang yang hanya sedikit atau tidak mampu mengakumulasi nilai-nilai utama, sehingga kebutuhannya

akan nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi secara layak. Aktor itu bisa secara individu, namun bisa secara kolektif, seperti keluarga atau komunitas lokal. Berkaitan dengan aktor, Niels Mulder (1986: 76) mendefinisikan sebagai mereka yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal, seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk bisa hidup dengan cukupan dan wajar. Mereka yang tidak sampai pada patokan itu dipandang sebagai orang miskin. Kelima, kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai utama secara layak, dan terakhir bahwa gap antara nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai tersebut, artinya besar-kecilnya gap tersebut menunjukkan parah tidaknya kemiskinan tersebut. Bila gap yang dicapai seseorang antara nilai-nilai yang harus dicapai dan pemenuhannya besar, maka semakin parah kemiskinan tersebut atau disebut kemiskinan absolut. Sementara itu, bila gap antara akumulasi nilai yang diperoleh dan pemenuhan kecil, maka orang tersebut berada dalam kemiskinan relatif.

Ravallion (1992: 4) secara lebih sederhana menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat dinyatakan oleh masyarakat ketika seseorang atau lebih tidak mencapai titik minimum dari kesejahteraan material yang layak menurut standard masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka muncul 3 (tiga) pertanyaan berkaitan dengan ukuran standar kelayakan kesejahteraan ini. Pertama, bagaimana cara kita menilai kesejahteraan atau hidup layak tersebut. Kedua, bila sudah diukur, bagaimana menentukan seseorang itu miskin atau sebaliknya berkecukupan. Terakhir, pertanyaan adalah bagaimana cara mengumpulkan indikator kesejahteraan individu ke dalam ukuran kemiskinan.

Ketiga pertanyaan tersebut memiliki implikasi lebih mendalam, khususnya berkaitan dengan ukuran kemiskinan (*poverty line*). Akibatnya, dari tahun ke tahun perdebatan ukuran kemiskinan selalu berlanjut, begitu pula dengan cara-cara pengukurannya.

Bagi pemerintah dan ahli studi pembangunan, akurasi ukuran dan caranya sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Jebakan pengukuran ini adalah bias ekonomi. Kemiskinan lebih disebabkan oleh kegagalan seseorang dan sekelompok orang (keluarga) dalam mencapai tingkat ekonomi tertentu.

Lebih tepat, bila mendefinisikan kemiskinan itu sebagai situasi di mana seseorang atau sekelompok orang (keluarga) berada dalam kondisi secara sosial, ekonomi dan budaya tidak menguntungkan. Mereka berada dalam hidup yang tidak layak dan tidak sejahtera (*welfare/well-being*).

Meskipun demikian, dalam buku panduan Bank Dunia tentang pengurangan kemiskinan, Jeni Klugman (2002: 2-3) menyebutkan bahwa kemiskinan bukan sekedar tingkat pendapatan yang rendah, tetapi lebih dari itu tingkat konsumsi dan pendapatan yang rendah ini berhubungan dengan distribusi modal manusia dan aset sosial dan fisik (*lack of opportunity*), seperti pemilikan tanah dan peluang pasar. Selain dari berkurang kesempatan, kemiskinan juga berarti kemampuan yang rendah (*low capabilities*), yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, dan tingkat keamanan yang rendah, yaitu rentan dan pendapatan yang mudah terganggu, serta terakhir, ketidakberdayaan (*empowerment*), kemampuan keluarga miskin dalam berpartisipasi, negosiasi dengan perubahan dan berhubungan institusi yang dapat berpengaruh pada kelayakan hidupnya.

Apa yang disebut oleh Jeni Klugman (2002) ini adalah dimensi atau indikator kemiskinan. Dimensi tersebut ternyata juga tidak berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh orang miskin. Dari penelitian Smeru (Mawardi, 2004: 1-5), menurut orang miskin, kemiskinannya disebabkan oleh ketidakberdayaan, keterkucilan, kekurangan materi, kelemahan fisik, kerentanan, dan sikap atau perilaku. Ketidakberdayaan itu meliputi faktor yang di luar kendali masyarakat miskin, antara lain: lapangan kerja, tingkat biaya/harga (baik barang konsumsi, sarana produksi, maupun harga jual

produksi), kebijakan pemerintah, sistem adat, lilitan hutang, keamanan, dan takdir/kodrat. Munculnya aspek takdir mungkin mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang mereka alami sudah sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya memunculkan sikap apatis. Bagi mereka, sepertinya sudah tidak ada peluang lagi untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan menganggap hanya mukjizat Tuhan yang mampu mengubah keadaan. Kekurangan Materi adalah kepemilikan atau tidak memiliki berbagai macam aset, seperti rumah, tanah, modal kerja, warisan, serta rendahnya penghasilan karena upah atau hasil panen rendah). Faktor berikutnya adalah keterkucilan yang berkaitan dengan hambatan fisik dan nonfisik dalam mengakses kesempatan meningkatkan kesejahteraan, antara lain mencakup aspek lokasi yang terpencil, buruknya prasarana transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tidak ada atau kurangnya akses terhadap kredit, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan air bersih. Faktor lain, kerentanan, dianggap penyebab dari kemiskinan karena mencerminkan ketidakstabilan atau guncangan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan. Di dalamnya mencakup aspek pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerjaan tidak tetap, masalah dalam produksi, bencana alam, dan musibah keluarga. Terakhir, sikap dan perilaku juga dianggap sebagai penyebab kemiskinan, yaitu kebiasaan buruk atau sikap yang cenderung menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan atau menghambat kemajuan, Sikap dan perilaku itu antara lain meliputi kurangnya upaya untuk bekerja, tidak bisa mengatur uang atau boros, masalah ketidakharmonisan keluarga, serta kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan.

Dimensi atau oleh orang miskin dianggap sebagai faktor penyebab ini sebenarnya telah menjadi perhatian dari Nasikun (1993: 4) dan Chambers (1980) dengan *integrated poverty*. Di dalam analisis sosiologis, kemiskinan dibedakan sebagai kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (*budaya kemiskinan*). Kemiskin-

an struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi obyektif yang berpengaruh pada kesejahteraan keluarga miskin, mulai dari kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak hingga ketidakmampuan dalam bernegosiasi untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang berpihak pada orang miskin sebagaimana disebutkan oleh Sritua Arief dan Adi Sasono (1984: 109), dan Chambers (1980). Sementara itu, kemiskinan juga dipandang sebagai cara hidup atau kebudayaan dari keluarga miskin yang disosialisasikan. Pola-pola sosialisasi yang berlandaskan pada kebudayaannya ini merupakan mekanisme adaptif atau *survival* berkaitan dengan kondisi-kondisi keluarga miskin yang marginal (Lewis, 1981: 15-30; Lewis, 1988; Gailbraith, 1983).

Menimbang Kemiskinan, Menentukan Kesejahteraan

Apapun definisi kemiskinan, bila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang di dalam masyarakat dianggap tidak beruntung, maka sebenarnya telah dapat menggolongkan mereka ke dalam kelompok miskin. Bagi kita, bagaimana membangun empati bersama, turut merasakan dan kemudian berbagi, sehingga mereka tidak lagi berkekurangan, tersisih dan terabaikan. Mungkin, hal ini mengingatkan kita pada tahun 1990-an pada waktu bencana kelaparan di Ethiopia, seorang koki restoran di Roma, Italia, dengan sederhana mengolah makanan sisa pelanggan, dan kemudian mengirimkan ke tempat beca. Atau, Ibu Teresa mengawali dengan merawat orang-orang tua terlantar dan sakit-sakitan di pinggir jalan kota India. Apa yang dikatakannya, *"Biarlah mereka merasakan kebahagiaan, meski hanya menjelang ajal menjemput!"*

Tidak usah terlalu jauh mencari orang-orang yang tidak sejahtera, bila pula ada di sekitar kita, mungkin bawahan kita dan seterusnya. Di dalam dunia yang kapitalistik, demi memperoleh keuntungan yang besar, sering kita menciptakan pekerjaan yang

tidak dibayar seimbang, sehingga menghasilkan kelompok miskin “baru.” Suatu misal, salah satu pasar swalayan terbesar di Surabaya, dengan alasan tertentu karyawan tidak boleh menikmati makanan siap saji yang dijualnya, meski pada waktu menjelang tutup. Manajer lebih memilih membuang ke tempat sampah, padahal masih layak dimakan. Untuk makan, karyawan menerima nasi kotak dengan harga yang tidak layak. Akibatnya, menjelang akhir tahun 2004 sejumlah karyawan masuk rumah sakit karena keracunan. Hal ini berbeda dengan kebijakan rumah makan rawon “Nguling” di Probolinggo, selain pegawainya juga menikmati, setiap malam puluhan nasi rawon dibungkus untuk keluarga miskin dan janda di lingkungan sekitarnya. Kata kuncinya hanya satu: *empati*. Meskipun empati sebagai kata kunci dalam mencermati kemiskinan, bagi pengambil kebijakan publik persoalan kemiskinan tidak saja pada definisi dan empati, tetapi pada dimensi dan ukurannya. Dimensi dan ukuran menjadi penting karena program pengurangan tingkat kemiskinan (*poverty reducing*) berkaitan dengan pendanaan.

Di Indonesia selama ini perkiraan-perkiraan tentang kemiskinan umumnya didasarkan atas pendekatan pendapatan kebutuhan dasar (*basic needs income* atau *BNI Approach*), dimana garis kemiskinan ditentukan dengan memperkirakan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi suatu paket kebutuhan dasar inti konsumsi perorangan (makanan, sandang, perumahan). Batas ambang garis kemiskinan setara nilai konsumsi pangan minimum, yaitu 2.100 kalori ditambah 6,12 % hingga 17,96 % nilai konsumsi non pangan. Jika perkiraan nilai konsumsi perkapita rata-rata penduduk Indonesia sebesar dua kali dari nilai konsumsi pangan pada akhir PJP II, maka batas ambang garis kemiskinan sepanjang 25 tahun mendatang dapat ditetapkan sebesar dua kali lipat dari nilai konsumsi pangan minimum (kira-kira setara dua kali Rp 15.000,00 menurut tingkat harga tahun 1990) (Nasikun, 1993: 1-2). Kelemahan dari pendekatan ini adalah tingkat minimum dasar

pendapatan tidak akan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Kelemahan lainnya, secara operasional, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dimana pendapatan tidak cukup. Pendapatan ditafsirkan sebagai kemampuan suatu rumah tangga atau perorangan untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa.

Untuk itu, Nasikun (1993: 2-3) mengajukan dua alternatif tolok ukur kemiskinan lain. *Pertama*, menawarkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan sebagai suatu fenomena multifaset atau multidimensional. *Kedua*, mengusulkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan pada tingkatnya yang relatif. Mendasarkan diri pada pemikiran Chambers yang melihat kemiskinan sebagai suatu *integrated concept*, Nasikun merumuskan konseptualisasi kemiskinan multidimensional yang terdiri atas lima dimensi: (1) kemiskinan “proper”; (2) kelemahan fisik; (3) kerentanan terhadap atau menghadapi berbagai bentuk situasi darurat; (4) ketidakberdayaan (*powerlessness*); dan (5) isolasi. Kemiskinan “proper” kurang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan aset yang kurang dan/atau akses yang rendah terhadap aliran lalu lintas uang dan barang, terutama pangan. Kelemahan fisik diartikan sebagai berat dan pertumbuhan badan yang tidak normal dan sensitif terhadap variasi musim atau konjungtur ekonomi. Kerentanan terhadap berbagai bentuk situasi darurat diartikan sebagai penjualan barang atau tenaga kerja, hubungan utang piutang atau gadai, dan tindakan lain yang terpaksa dilakukan untuk mengatasi berbagai situasi darurat. Ketidakberdayaan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau kelompok dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang menyangkut nasib dan peruntungannya sendiri dan hubungan-hubungan sosial dengan orang, keluarga atau kelompok lain. Isolasi diartikan sebagai posisi relatif seseorang, keluarga, atau kelompok dalam ruang spasial dan sosial yang dilembagakan oleh masyarakat tempat ia menjadi bagiannya.

Dimensi kemiskinan proper dapat diukur antara lain melalui butir-butir pertanyaan pengeluaran rata-rata sebulan dan rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan. Dari dimensi kelemahan fisik, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan tingkat morbiditas dalam kurun waktu sebulan sebelumnya: (1) apakah sebulan yang lalu ada keluhan kesehatan, karena panas, batuk, pilek, muntaber, sakit gigi, kejang-kejang, kecelakaan, dan lainnya; (2) kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari; (3) apakah sekarang masih sakit; (4) jenis pelayanan yang memberikan perawatan. Dari dimensi ketidakberdayaan, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) status penguasaan bangunan tempat tinggal; (2) status penguasaan tanah; (3) kondisi rumah atau bangunan tempat tinggal; (4) luas bangunan dan pekarangan; (5) jenis fondasi bangunan terluas; (6) jenis kerangka atap yang terbanyak. Dilihat dari dimensi isolasi antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) jarak terdekat dari dan ke tempat fasilitas-fasilitas kendaraan umum, kesehatan, pasar, atau kelompok perkotaan, bioskop, taman hiburan/ rekreasi, SD, SLTP, SLTA; (2) lama bersekolah (dalam jumlah tahun); (3) mendengarkan radio seminggu yang lalu, nonton TV seminggu yang lalu dan membaca koran/majalah seminggu yang lalu (Nasikun, 1993: 3).

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo.
 1981 Definisi Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
- Arief, Sritua., dan Adi Sasono.
 1984 **Ketergantungan dan Keterbelakangan**. Jakarta: Sinar Harapan.

- Dillon, HS., dan Hermanto
 1993 Kemiskinan di Negara Berkembang. Masalah Konseptual dan Global. **Prisma**. Tahun XII No. 3
- Galbraith, John Kenneth.
 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa**. Diterjemahkan oleh Tom Anwar. Jakarta: Sinar Harapan.
- Klugman, Jeni.
 2002a Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross Cutting Issues**. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Lewis, Oscar.
 1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
 1988 **Kisah Lima Keluarga. Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan**. Diterjemahkan oleh Rochmulyati Hamzah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulder, Niels.
 1986 **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasikun,
 Nasikun.
 1988 “Desa dalam Perspektif Pembangunan,” makalah disampaikan sebagai bahan ceramah pada Kursus Singkat Teori dan Konsep Studi Pedesaan yang diselenggarakan oleh Divisi Studi Pedesaan, PAU-Studi Sosial, UGM Yogyakarta, tanggal 12 – 31 Agustus.
 1993 “Redefinisi Kriteria Batas Ambang Kemiskinan Berwawasan Martabat Manusia,” **makalah** disampaikan pada Seminar Bulanan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), UGM, tanggal 7 Juni.
- Ravallion, Martin.
 1992 **Poverty Comparison. A Guide to Concepts and Methods**. LSMS Working Paper No. 88. Washington: World Bank.

Bagian 2

Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota

Bab 4

Surabaya: Geliat Calon Kota Metropolitan

Rek, ayo rek, mlaku-mlaku ning Tunjungan Rek, rek
ayo rek... Mlaku-mlaku ngumbah mata...

(lagu rakyat Surabaya)

Kota Lama dengan Wajah Kolonial

Sepuluh tahun yang lalu, sekitar tahun 1991, ketika salah seorang anggota tim peneliti (FX Sri Sadewo) mengunjungi ibukota Jakarta kedua kalinya. Jakarta adalah kota yang sangat berbeda dibandingkan pada tahun 1970-an, terdapat jalan utama yang membentang dengan lebar kurang lebih 100 meter panjangnya. Daerah-daerah periferinya sudah terhubung satu sama lain, seperti Kota Depok, Kab. Tangerang dan Bekasi. Keadaan ini terus berubah hingga tahun-tahun terakhir ini. Apa yang dibayangkan oleh peneliti tersebut, Jakarta seperti gurita raksasa dengan tentakel-tentakel yang menjulur ke Timur, Barat dan Selatan.

Ketika kemudian kembali ke kota Surabaya, peneliti kemudian bertanya apa yang salah dari catatan mata pelajaran Geografi dengan menyebut Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Mungkin lebih tepat sebagai kota terbesar ke lima atau ketujuh di Indonesia. Kota terbesar pertama adalah Jakarta, kedua Jakarta dan seterusnya hingga kelima adalah Surabaya.

Meskipun demikian, Surabaya telah berusaha tumbuh sebagai kota terbesar kedua. Dari sisi usia, kota ini sebenarnya

jauh lebih tua dari Jakarta. Kota ini tercatat dalam sejarah pada tanggal 31 Mei 1293 M sebagai hari lahirnya, sedangkan Jakarta pada berdiri pada abad ke-16. Sebagaimana lazimnya pertumbuhan kota-kota pesisir, Surabaya awalnya adalah sebuah desa nelayan, kemudian berkembang sebagai pelabuhan dalam rangkaian jalur sutera (*silk road*). Namun demikian, seperti halnya Jakarta, kota ini tidak pernah sekalipun menjadi pusat kerajaan-kerajaan besar pada masa lampau. Nampaknya, raja-raja Jawa lebih memilih mendirikan ibukota pusat pemerintahan di wilayah pedalaman, daripada pesisir. Salah satu di antaranya, kecuali Sriwijaya, kerajaan-kerajaan tersebut dibangun melalui basis pertanian sebagai struktur ekonominya. Kota-kota tersebut lebih sebagai syahbandar yang harus menyetor pajak ke ibukota yang berada di pedalaman.



Gambar 4.1.
Totem Surabaya Modern,
Penghubung dengan Roh dari Masa Lalu

Kota Surabaya, menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (2004) yang disampaikan di Sarasehan “*Surabaya dan Tantangan Masa Depan*,”² bahwa kota Surabaya, sebagai kota pesisir lainnya, lebih tepat dibangun oleh pemerintah kolonial (Belanda). Memang benar, sesudah kerajaan Majapahit runtuh, kota ini sebagai kadipaten (kerajaan lokal) taklukan di bawah kerajaan Mataraman. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, kota ini diserahkan kepada VOC dan pemerintah kolonial. Surabaya sebagai Kota Eropa, yang semula hanya merupakan pos pangkalan bertembok tanggul tanah *temu gelang*, terletak di kawasan berawa-rawa di sebelah utara daerah pemukiman orang-orang Jawa, sepanjang abad 19 berhasil dibangun meluas menjadi suatu terminal tempat penumpukan hasil bumi untuk diekspor dan dijual ke Eropa.



Gambar 4.2.
Bambu Runcing: Simbol Perlawanan Kaum Urban

² Sarasehan ‘Surabaya dan Tantangan Masa Depan.’ Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Tabel 4.1
Perkembangan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk kota Surabaya
(Handinoto, 1996, Pemda KMS, 1978, BPS, 1997 dan 2002).

Abad/Tahun	Luas Wilayah (dalam ha)	Jumlah Penduduk
2005 (Perkiraan)	32.636	2.750.000
2000	32.636	2.444.976
1995	32.636	2.329.598
1990	32.600	2.100.000
1980	---	2.027.913
1971	---	1.953.248
1920	---	200.000
1905	4.275	150.188
Awal abad ke-18	---	50.000 s/d 60.000
1625 (Penaklukan oleh Mataram)	---	1.000

Perkembangan kota Surabaya menjadi pesat tatkala liberalisasi ekonomi. Ekonomi eksploitatif dengan investasi modal Eropa telah berhasil memanfaatkan kesuburan *binterland* Jawa Timur. Surabaya kemudian lebih menempatkan sebagai kota pemberi layanan jasa ekonomi daripada sebagai pusat pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsinya, Surabaya menjadi organisasi kerja yang membangun berbagai institusi ekonomi dan mekanisme kontrol untuk mengendalikan ekonomi agribisnis di daerah Jawa Timur. Institusi bisnis kapitalistik ditandai dengan bangunan yang berfungsi sebagai kantor-kantor dagang dan kantor-kantor layanan jasa hukum, serta jasa keuangan, kantor-kantor administrasi

pemerintahan, dan gudang-gudang. Jalan-jalan penghubung diperkeras, saluran-saluran penatusan dibangun, rel-rel berikut stasiun terminalnya diciptakan, dan ujung muara sungai Brantas pun diperdalam dan diluruskan untuk kemudian diberi nama baru yang mengingatkan sebuah sungai besar di Negeri Belanda Selatan, *Maas River*. Di kiri-kanan sungai, dibangun kade-kade tempat kapal dan perahu bertambat, sedangkan di kiri-kanan muara dibangun pelabuhan untuk tempat kapal-kapal besar merapat guna membongkar dan mengangkat muatan (Wignjosoebroto, 2004: 2).

Sarat Fungsi, Sarat Beban:

Kota Industri, Maritim, Perdagangan, Pendidikan dan Apalagi?

Dengan demikian, wilayah utaranya, atau dikenal sebagai kota lama, selain sebagai pusat pemerintahan *Oost Java Proviciën*, tumbuh sebagai pusat perdagangan. Suatu bentuk yang lazim, bahwa pertumbuhan dari perdagangan mengikuti keberadaan pusat pemerintahan. Kedekatan geografis akan mempengaruhi kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Pertumbuhan industri bergeser ke wilayah selatan, mengikuti alur sungai Kalimas, yaitu Ngagel-Wonokromo dan Kebraon-Karangpilang (Jalan Mastrip sekarang). Hal ini merupakan konsekuensi dari industri yang memerlukan air sebagai pendingin mesin-uapnya. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pemukimannya, mengikuti catatan dari Hans-Dieter Evers (1985), dari atas dasar etnik menjadi mata pencaharian. Kampung-kampung etnik luruh (meski tidak semuanya) menjadi perumahan dan kampung-kampung atas dasar mata pencaharian, seperti: Tjantian (tukang arloji), Kawatan (tukang cor tembaga), dan Bubutan (tukang bubut) (Handinoto, 1996: 72; kutip dari Faber, 1931: 185).



Gambar 4.3.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-1

Melalui mekanisme urbanisasi, kota ini kemudian tumbuh dengan relatif pesat. Kota ini meluas dari hampir sepuluh kali lipat dalam waktu seratus tahun, dari hanya semula 4.275 ha menjadi 32.636 ha. Kota semula berpusat di wilayah kota lama, yaitu Kebonrojo, Pasar Besar, kantor Walikota Surabaya sekarang hingga ke Waru (perbatasan Sidoarjo), Karangpilang dan Sepanjang, sementara itu terjadi pemindahan terminal bis dari Jembatan Merah ke Osowilangun (dekat perbatasan Kab. Gresik) pada pertengahan tahun 1990-an. Tabel 1 hanya mencatat jumlah penduduk tetap, perkiraan jumlah penduduk musiman bisa menjadi separuhnya. Dari perkiraan tersebut, Kota ini praktis dihuni hampir 4 juta jiwa untuk tahun 2005.



Gambar 4.4.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-2

Kota ini juga menjadi kota multi-etnik. Orang-orang Madura menggunakan kota Surabaya sebagai alur memasuki wilayah Jawa Timur bagian Selatan dan Barat. Sebagian bekerja sebagai buruh industri dan berdagang, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh perkebunan yang berada di wilayah Mojokerto, Jombang hingga karesidenan Madiun. Sementara itu, orang-orang Jawa Pesisiran dan Mataraman memasuki kantor-kantor pemerintahan menjadi *ambtenar*, pegawai *pangreh praja*, atau sebagai pegawai kantor-kantor dagang dan layanan hukum. Meski tidak begitu besar jumlahnya, kelompok-kelompok etnik lain dari kawasan Indonesia Timur memasuki kota Surabaya, mulai dari pedagang antar pulau hingga menjadi *ambtenar* dan tentara kolonial. Batas-batas kampung etnik pun menjadi meluruh tatkala aturan *wijken* dan *passesn stelsel* (sistem pas dan pemukiman)

dicabut pada tahun 1920-an, terutama bagi kelompok etnik *Timur Asing*.

Untuk memperkuat institusi-institusinya, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sistem pendidikan formal. Sekolah dasar pertama kali didirikan oleh CC Werner tahun 1818 untuk anak orang Belanda di Surabaya, muridnya hanya 35 orang. Sekolah tutup seiring dengan kematian CC Werner, baru tahun 1821 pemerintah kolonial mendirikan sekolah dasar negeri (*Government Europeesche Lagere School*). Untuk orang-orang pribumi, sekolah dasar swasta didirikan oleh *Maatschappij Tot Nut van Het Algemeen*, dengan nama *Javaansche School* tahun 1853, sedangkan sekolah negeri tahun 1860. Atas instruksi Residen Surabaya, tahun 1864 sekolah tersebut didirikan di beberapa distrik dengan nama *Districtschool*, meski tidak berlangsung lama karena biaya. Beberapa tahun kemudian, pemerintah mendirikan *Holandsche Indische School* (HIS) untuk anak-anak pribumi yang mampu dan Sekolah *Ongko Loro* untuk anak pribumi yang kurang mampu (Handinoto, 1996: 59-60).

Tanggal 2 Mei 1853 sebuah sekolah teknik swasta (*ambachtschool*) didirikan, dan pihak pemerintah baru mendirikan *government ambachtschool* pada tahun 1862. Sekolah setingkat sekolah menengah atas, yaitu HBS (*Hoogere Burger School*) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian diubah 5 tahun didirikan pada tahun 1875 di Jl. Baliwerti (bekas gedung FT Kimia ITS), kemudian dipindah di *Regenstraat* (sekarang Jl. Kebonrojo, Kantor Pos Besar Surabaya) pada tahun 1881 dan pada tahun 1923 di pindah ke *HBS Straat* (Jl. Wijayakusuma, sekarang SMA Negeri II, Surabaya). Sekolah kejuruan lain, seperti dokter hewan, berdiri dengan nama *School Ter Onleiding van de Veeartsenijkunst* tahun 1860-an

Perkembangan fasilitas pendidikan formal di Surabaya ini berlanjut hingga masa kemerdekaan. Sementara itu, masyarakat pribumi sebenarnya telah mengembangkan sistem pendidikan,

yaitu pesantren. Model pendidikan ini sebenarnya berakar dari sistem pendidikan *mandala* pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Para santri meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama kiyai dalam pondok pesantren. Mereka bekerja dan belajar, pagi hari melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh gurunya, sesudahnya belajar mengaji dan mendengar ajaran moral gurunya, yaitu Kiyai. Pada waktu mengaji, santri ini dibimbing oleh para seniornya, yaitu santri yang lebih dahulu masuk. Oleh karenanya, kata santren dalam pesantren tersebut berarti *nyantri*, menimba ilmu sambil bekerja di lingkungan gurunya. Dari catatan von Faber (1931), sebagaimana dikutip Handinoto (1996: 60), jumlah pesantren mencapai 162 buah, salah satu di antaranya pondok pesantren yang cukup dikenal adalah di Sidosermo-Wonokromo.

Tabel 4.2.
Perkembangan Perguruan Tinggi di Surabaya Tahun 2004
(BPS Jawa Timur, 2005)

Jenis	Surabaya	Jawa Timur
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	4	9
a. Mahasiswa	57.228	112.694
b. Dosen	3.507	6.455
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	70	249
a. Universitas	24	69
b. Institut	3	13
c. Sekolah Tinggi	29	119
d. Akademi	11	42
e. Politeknik	3	6

Perguruan tinggi negeri yang tertua di Surabaya adalah Universitas Airlangga yang berdiri dari perpaduan pendidikan

dokter dari masa kolonial Belanda dan Sekolah Tinggi Hukum, baru kemudian sesudahnya tahun 1960-an berdiri Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (dulu IKIP Surabaya yang merupakan perkembangan dari Fakultas Pendidikan Universitas Airlangga dan IKIP Malang), dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), sedangkan salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup tua di Surabaya, seperti Universitas Surabaya (*Ubhaya*), berdiri pada 1960-an. Universitas ini mulanya merupakan perkembangan dari Universitas Trisakti. Pada pertengahan tahun 1990-an, universitas ini mendirikan kampus baru di Trenggilis Mejoyo. Jumlah mahasiswa telah menyamai perguruan tinggi negeri, di atas 10 ribu mahasiswa. Ada sekitar 10 gedung dengan rata-rata 3-4 lantai.

Tidak saja Universitas Surabaya, Universitas Kristen Petra (Petra), Universitas Katolik Widyamandala (WM) dan Universitas 17 Agustus (Untag) juga memiliki jumlah yang kurang lebih sama, hampir 10 ribu mahasiswa. Untuk memenuhi fasilitas pendidikannya, Petra dan Untag misalnya mendirikan kampus bertingkat 8 (delapan). Selain beberapa universitas ini, di Surabaya juga sekitar 10 universitas memiliki mahasiswa antara 5 ribu dan 10 ribu, seperti UPN (Universitas Pembangunan Nasional Veteran), Unitomo (Universitas Dr. Soetomo), dan ITATS (Institut Teknologi Adhitama Surabaya). Sebelum 2 (dua) tahun yang lalu, jumlah mahasiswa Unitomo dan ITATS mencapai di atas 10 ribu. Konflik internal, yaitu antara yayasan dan rektorat, di kedua perguruan tinggi yang diberitakan ke media massa menjadi “promosi” yang buruk bagi penampilan perguruan tinggi (*performance*).

Pasca reformasi, dengan alih-alih sebagai langkah persiapan menuju BHMN (Badan Hukum Milik Negara), sejumlah perguruan tinggi negeri, kecuali IAIN, menyelenggarakan program ekstension (non-reguler). Ada berbagai istilah untuk program tersebut, antara lain: program khusus, pmdk nonreguler, dan

PMDK. Melalui program ini, perguruan tinggi menerima mahasiswa di luar SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang diselenggarakan di bawah pengawasan Dikti. Mahasiswa yang diterima dikenakan SPP dan uang IKOMA/SOM yang besar, bergantung pada fakultasnya. Uang SPP biasanya sebesar kurang lebih dua kali lipat dari kelas reguler. Asumsinya, mereka mahasiswa yang tidak diberi subsidi oleh negara (pemerintah). Oleh karenanya, mereka harus menanggung sendiri biaya operasional pendidikannya selama studi. Jumlah SPP ini sering jauh lebih besar daripada di perguruan tinggi swasta, bisa mencapai di atas dua juta, seperti pada program-program studi yang memerlukan laboratorium. Di Fakultas Farmasi Unair, seorang mahasiswa non-reguler harus membayar 4 juta rupiah/semester.

Dari tahun ke tahun, terutama paska tahun 1997-1998, yaitu krisis ekonomi, telah terjadi penurunan jumlah peminat sebagai mahasiswa baik di PTN maupun PTS di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya. Untuk peserta SPMB menurun dari tahun ke tahun sebanyak lebih dari 100.000 pendaftar. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang diterima pun juga berkurang. Ada beberapa penyebab penurunan peminat ini, antara lain: jumlah lulusan SMA juga berkurang akibat keberhasilan KB pada tahun 1970-1980-an. Alasan berikutnya, lulusan SMA kini jauh lebih realistis, "*Buat apa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, kalau nantinya hanya menjadi pengangguran.*"³ Mereka memilih untuk mengambil kursus keterampilan atau langsung mencari pekerjaan.

Lebih lanjut, tidak semua lulusan SMA sederajat melanjutkan perguruan tinggi, sebagai mahasiswa program gelar sarjana atau ahli madya (D3). Memang, tidak ada catatan resmi dari Pemkot tentang rasio jumlah lulusan yang melanjutkan dan keseluruhan. Namun, diperkirakan untuk kota Surabaya hanya

³ Hasil wawancara dengan lulusan SMA yang tidak mendaftar SPMB dan melanjutkan ke perguruan tinggi, DA, tanggal 12 September 2005.

separoh saja lulusan mahasiswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah memilih untuk bekerja atau melanjutkan kursus kerja satu tahun hingga dua tahun. Oleh karenanya, jumlah kursus di Surabaya cukup banyak, hampir separuh dari jumlah perguruan tinggi. Kursus atau program keahlian yang ada di Surabaya adalah program keahlian perhotelan/pariwisata, program keahlian komputer, dan program keahlian teknik. Sementara itu, perguruan tinggi juga menyelenggarakan pula, seperti ITS dengan PIKTI, Unair dengan berbagai program keahlian, dan UNESA dengan P2KB, P3B dan P3KT.

Kondisi Obyektif Masyarakat Miskin Kota

Sementara itu, di “pinggiran” lingkaran kota terdapat orang yang tidak bisa menikmati fasilitas yang ditawarkan kota. Pendidikan tinggi adalah “barang mewah” yang menjadi impian dan harus ber-*jibaku* untuk masuk dan menyentuh tembok-tembok kampus. Bagi mereka, hidup “sehat” dan dapat mencari makan adalah anugerah. Mereka adalah kelompok masyarakat rentan kota, atau dalam istilah Sosiologi (Kemiskinan) lebih dikenal sebagai masyarakat marjinal (*marginal community*) ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai dalam kehidupan perkotaan.

Di Surabaya, ada dua kelompok, yaitu: penduduk asli atau dikenal dengan orang *kampung* yang tidak memiliki akses karena kondisi obyektifnya, seperti: tingkat pendidikan dan modal. Kelompok kedua adalah kaum urban yang memiliki akses terbatas di Surabaya, kemudian sering ditemui memilih tinggal bersama di lingkungan *kampung* tersebut karena dengan alasan mendekati tempat kerja.

Bila oleh BPS dan BKKBN, mereka, kedua kelompok itu, digolongkan sebagai kelompok miskin kota. Jumlahnya di

Surabaya, menurut tafsiran BPS dan BKKBN, kurang lebih 327.572 jiwa, atau seperdelapan dari jumlah penduduk Surabaya (BPS Surabaya, 2003). Jumlah ini menjadi besar tatkala harus memasukkan keluarga urban yang sering tidak aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Data Suryahadi, et.al (2003: 78) menunjukkan bahwa dengan jumlah rumah tangga di Surabaya sebanyak 707.167 jiwa, maka setidaknya-didaknya dikatakan miskin bila setidaknya-tidak pendapatan sebesar 202.512,56 sebulan dengan *standard error* 6.701,98.

Bila faktor penyebabnya adalah pekerjaan, maka jumlah orang miskin yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran) berdasarkan sensus tahun 2000 di Surabaya 82.691 orang atau 7,23% dari angkatan kerja. Hanya bila mengandalkan data pekerjaan, maka besarnya angka pengangguran ini belum cukup. Data statistik kependudukan tidak pernah menghimpun seberapa banyak orang yang bekerja pada pelapisan terendah dari suatu usaha, perkantoran, seperti buruh, karyawan swasta atau pegawai negeri golongan rendah (I dan II), atau kelompok sektor informal yang memiliki modal terbatas (kecil), atau hanya mengandalkan tenaga saja. Data terakhir dari BPS, berkaitan pemberian dana kompensasi BBM, jumlah keluarga miskin di Surabaya diperkirakan 106.000 keluarga (**Kompas**, 29 September 2005, “106.000 KKB untuk Warga Surabaya”).

BPS sebenarnya telah memberikan kriteria ukuran kelompok miskin yang merupakan kelompok rentan ini. Pertama, dari pola konsumsi energi di bawah 2100 kkal per kapita sehari. Kedua, menggunakan indikator kesehatan, mulai dari persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, persentase penduduk tanpa akses pada pelayanan kesehatan dasar dan angka kematian bayi. Ketiga, indikator pendidikan dasar, yaitu: persentase penduduk usia 7-15 tahun tidak sekolah dan persentase penduduk dewasa yang buta huruf. Keempat, indikator ketenagakerjaan, yaitu: persentase penduduk penganggur terbuka, setengah

penganggur dan pekerja sektor informal. Kelima, indikator perumahan, yaitu persentase rumah tangga tanpa akses pada listrik, rumah tangga dengan lantai tanah, dan persentase rumah dengan luas tanah kurang dari 10 m². Terakhir, indikator air dan sanitasi, yaitu: persentase penduduk tanpa akses air bersih dan persentase penduduk tanpa jamban sendiri (BPS, 2004: 1; bandingkan juga dengan Klugman, 2002: 2-24; Coundouel, Hetschel dan Wodon, 2002: 29-46). Di lapangan, ukuran-demikian sulit dilakukan, antara lain: tidak ada lagi rumah berlantai tanah – hasil dari program lantanisasi pada tahun 1990-an), demikian pula rumah tanpa listrik karena program listrik masuk desa/kampung.



Gambar 4.5.

The Lost Generation, Buah dari Pembangunan?

Dari tempat tinggal, kelompok masyarakat rentan kota ini biasanya tinggal di pemukiman yang kumuh (*kampung*). Catatan Siswono Judohusodo (1991: 2), jumlah orang Surabaya yang tinggal di kampung sekitar 25% dari jumlah penduduk. Jumlah kampung tersebut lebih dari 100 (seratus) jumlahnya, mulai dari wilayah Surabaya Utara sebagai kota lama. Di kota lama, kampung-kampung itu sering bercirikan sebagai kampung etnis, seperti kampung Arab dan *Pecinan*, seperti daerah Ampel untuk kampung Arab dan Kembang Jepun dan Karet sekitarnya untuk *Pecinan*. Orang-orang Madura tinggal mulai dari Perak (Pelabuhan) hingga Semampir, bahkan ada beberapa kampung, seperti Wonosari Lor, sebagian besar penghuninya beretnis Madura. Asal mereka, orang-orang Madura di Surabaya, adalah daerah Bangkalan dan Sampang. Suatu pola yang lazim mengikuti arah transportasi terdekat (Jonge, 1989; Kuntowijoyo, 1988). Wilayah perkampungan orang-orang yang memanjang di sepanjang pinggir Surabaya Utara ini hingga memasuki wilayah Surabaya Selatan (sekitar Pasar Wonokromo dan Keputran) ini seperti setengah lingkaran. Sementara itu, dari arah pelabuhan, orang Madura mendiami wilayah Pasar Loak Dupak hingga ke Benowo (wilayah Surabaya Barat).

Kampung orang Surabaya asli berada di sekitar tengah kota, seperti mulai dari Kepatihan dan Oro-oro Ombo (dulu tempat pusat pemerintahan Kadipaten Surabaya dan berlanjut hingga masa kolonial Belanda), wilayah Kebalen, Surabayan, Wonorejo hingga Kupang dan Kembang Kuning terus ke arah Selatan, yaitu Ketintang dan Pakis. Kampung-kampung ini berada di sepanjang jalan utama dan di antara gedung. Wilayah yang strategis ini, yaitu sebagai kawasan pusat pemerintahan dan perdagangan, sebenarnya tidak saja dihuni oleh orang-orang Surabaya asli, tetapi juga oleh orang-orang urban. Di daerah Kaliasin misalnya, sebagian pemilik menyewakan kamar (kost) dengan harga dari 200 ribu hingga 500 ribu rupiah, tergantung keadaan

kamarnya. Orang-orang urban (terutama berstatus *single*) memilih kost di tempat tersebut. “*Selain dekat tempat kerja, enak untuk malam minggu. Mau jalan-jalan ke Tunjungan tidak jauh.*”⁴

Tabel 4.3.
Jumlah Orang dan Keluarga Miskin (Rentan) di Surabaya, berikut fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
(BPS, 2003)

No.	Rincian	Jumlah
1.	Kecamatan	28
2.	Penduduk	2.532.417
3.	Keluarga	707.167
4.	Orang Miskin (BPS)	327.572
5.	Keluarga Miskin	91.880
6.	Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskemas Pembantu	48
	b. Dokter	141
	c. Paramedik	824
7.	Pendidikan	
	a. Sekolah (SD dan SMP)	2.743
	b. Guru	31.193
	c. Kelas	16.522
	d. Murid	553.250

Kampung-kampung tersebut, baik tempat tinggal orang Surabayan, Madura, Arab dan Cina ini setiap tahunnya selalu

⁴ Hasil wawancara dengan A yang bekerja di Tunjungan Plaza Sabtu, 4 Juni 2005, pk. 19.00 WIB.

menjadi daerah epidemi demam berdarah (DB), selain ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) dan diare/muntaber. Rumah-rumah kampung tersebut sangat rapat satu sama lain menyulitkan melakukan kontrol terhadap genangan air (bersih). Saluran air (got) pun sering *mampet*, buntu. Sementara itu, keberadaannya di tengah kota dengan arus kendaraan yang padat, angka pencemaran udara menjadi sangat tinggi – hal ini bisa dilihat dari papan penanda tingkat pencemaran di Surabaya, mulai dari Jalan A. Yani, Kertajaya hingga Bubutan. Angka pencemaran rendah pada pagi hari ketika jalan masih sepi. Kecuali Jalan *Ondomoben*, Diponegoro dan Darmo, pohon-pohon yang membantu mengurangi pencemaran udara sangat sedikit tumbuh di pinggir jalan.⁵ Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada korelasi positif antara kondisi perkampungan yang kumuh di Surabaya dan angka penyakit.

Untuk mengatasi kondisi perkampungan, khususnya sanitasi, pemerintah telah melakukan perbaikan perkampungan, dengan memperbaiki saluran air hingga jalan. Program tersebut dikenal dengan program KIP (*Kampoeng Improvement Programme*). Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara perbaikan kampung dan penurunan angka kesakitan.

Data lain yang menarik untuk Surabaya adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan. Setiap kecamatan memiliki lebih dari satu fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibangun oleh pemerintah, belum lagi dengan klinik praktek dokter bersama dan rumah sakit swasta. Jumlah dokternya adalah 141 orang. Namun demikian, data ini berasal dari *Surabaya dalam Angka* yang mendasari pada data di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dikelola

⁵ Kebijakan tata ruang kota Surabaya untuk 2010 direncanakan akan menyediakan 20% ruang terbuka hijau.

pemerintah, sehingga rasio dokter dalam 100.000 penduduk adalah 7 (jauh dari 40, sesuai Indikator Indonesia Sehat 2010, Depkes, 2003). Bila dianalisis dengan membandingkan jumlah orang miskin dan keluarga miskin, maka ada korelasi positif. Artinya, fasilitas tersebut didirikan sesuai dengan jumlah orang/keluarga miskin. Demikian pula fasilitas kesehatan, sekolah, guru dan kelas dalam analisis ternyata berkorelasi dengan jumlah orang miskin. Persoalannya terletak pada kemampuan akses dari kelompok miskin tersebut.

Bab 5

Buruh Bangunan

Sektor Informal tidak hanya sebagai “*Safety Valve*” bagi Orang Miskin “Baru” di Surabaya tahun 1990-an

FX Sri Sadewo

Pembangunan “Bias Kota” Menuai Migran

Kota-kota besar di negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, mengalami proses pertumbuhan yang lain dibandingkan dengan negara industri. Kota-kota tersebut pada mulanya memiliki fungsi pemerintahan dan ekonomi pada jaman kolonial. Industrialisasi yang tumbuh di kota itu mulanya hanya sebatas melengkapi fungsi ekonomis, melayani kepentingan kolonial, seperti: pelabuhan ekspor.

Sesudah Perang Dunia ke-2, kota-kota tersebut menjadi ibukota pemerintahan negara baru. Proses konsolidasi dari negara-negara baru mengakibatkan kota tadi berkembang dengan cepat. Proses perkembangan ini dikenal sebagai *urbanisasi tanpa industrialisasi*. Jika di negara industri, proses urbanisasi didorong oleh usaha efisiensi dari bidang pertanian pedesaan, misalnya melalui mekanisasi yang menghacurkan petani gurem kemudian ditarik ke sektor industri di kota besar, maka hal itu tidak terjadi di negara-negara sedang berkembang (Magenda, 1983: 7-9).

Karena mengambil model pembangunan dari negara industri, negara baru kemudian melakukan industrialisasi. Industri mulanya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pasar, melayani

kelompok elite perkotaan, seperti birokrat pemerintahan, kaum usahawan, dan karyawan. Akibatnya, industri cenderung memusat di kota besar yang menentukan urat nadi mereka. Lebih dari itu, industri-industri baru ini tidak meningkatkan produk industri kecil pribumi, tetapi lebih sering menggantikan. Pengabaian terhadap industri kecil dari pertanian pada gilirannya mengakibatkan sejumlah rakyat berpindah dari desa ke kota. Kota-kota besar di dunia ketiga bertambah penduduknya hingga delapan kali dari ukuran semula, bila dibandingkan antara 1920-an dan sekarang. Separuh dari pertumbuhan ini berasal dari penambahan alamiah penduduk kota, dan sisanya dari perpindahan penduduk (Owens dan Shaw, 1983: 40-42). Demikian pula dengan kota-kota Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta.

Pertumbuhan kota yang “*urban bias*” itu ternyata tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Menjadi semakin berat, ketika harus diikuti perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan. Penggunaan teknologi pertanian yang berakibat pada polarisasi pemilikan tanah dan marjinalisasi petani kecil dan buruh tani, serta pada gilirannya perembesan industri kecil dan besar ke wilayah pedesaan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi ke arah non-pertanian di pedesaan. Atau, untuk menyelamatkan keluarganya, mereka memilih bekerja di kota. Dalam catatan Steele (1984: 379), ada kecenderungan kaum migran kemudian memilih sektor yang tidak memerlukan keterampilan, seperti buruh bangunan, kuli angkut, atau tukang becak. Mereka yang memilih pekerjaan sebagai buruh bangunan mempunyai alasan, yaitu upah yang ditawarkan relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, selain mudah dimasuki (Effendi, 1985: 51-52).

Hal yang serupa terjadi di Surabaya. Dengan mengambil 75 responden dan 7 informan, penelitian ini mencermati secara mendalam mulai dari proses perpindahan dari desa, hingga bekerja sebagai buruh bangunan. Bila mengikuti pendapat Irwan

Abdullah (1984) bahwa proses migrasi merupakan proses perubahan pola pikir, dan begitu pula dengan ancaman antropologi kognitif, setiap kemampuan diperoleh sebagai anggota masyarakat yang “unik,” maka perubahan untuk menjadi buruh bangunan di Surabaya merupakan perjuangan tidak saja secara fisik, tetapi juga kesiapan untuk berubah.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung tahun 1988-1989.⁶ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang diterapkan adalah *life history* dan analisis etnografi, sementara itu pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penggunaan tabulasi frekuensi dan silang.

Responden diambil secara availability, yaitu tidak saja *accidental*, tetapi juga memperhitungkan kesediaan untuk diwawancara. Hal itu dilakukan karena pertama, buruh bangunan bersifat sporadis dan terus bergerak (mobil), sehingga tidak bisa diketahui besaran jumlah dan alamat yang tepat. Mereka lebih sering tinggal sementara di bangunan yang dikerjakan. Kedua, buruh bangunan yang berasal dari desa sering lebih tertutup pada orang di luar lingkungan kerjanya. Mereka lebih terikat dan bersosialisasi dengan teman-teman sekerja. Teman-teman sekerjanya tidak jarang berasal dari satu daerah asal.

Profil Buruh Bangunan dan Keluarganya

Ali Effendi, Mandor Borongan yang Sukses, tapi Malang.

Ia adalah seorang mandor yang agak pendiam, tidak banyak cakap. Tampangnya bersih dengan kumis tipis, meski kulitnya agak hitam. Perawakannya kurus. Setiap orang akan

⁶ Studi kasus ini diolah dari hasil penelitian skripsi FX Sri Sadewo di Program Studi Antropologi, FISIP-Unair, tahun 1989.

menyangka dia berpendidikan sekolah menengah kejuruan, padahal tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar, hanya kelas empat. Seorang majikannya pernah heran dan mengira ia lulusan STM ketika melihat hasil gambarnya. Orang itu, setelah tahu latar belakangnya, mendesaknya untuk melanjutkan sekolah. Dia mau membiaya. Hal itu terjadi pada tahun 1980-an.

Pada waktu penelitian, Ali Effendi berumur 28 tahun, tapi wajahnya lebih tua daripada usia sebenarnya. Dia lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Kabupaten Gresik. Dia mengakui, sejak kecil dia nakal. Dia menyesalkan masa lalunya, terlebih ketika ia tidak menamatkan sekolah.

“...Dari segi biaya, keluarga kami berkecukupan. Ada paman dari kota yang mau membantu saya. Adik saya sendiri sudah tamat STM. Tapi, saya tidak tamat. Saya sebenarnya cukup pintar, gampang mudeng (memahami, pen). Sekarang saya sudah tua. Itu sebabnya saya menolak tawaran untuk sekolah lagi. Pengalaman itu lebih penting. Buktinya, adik saya yang STM itu masih menganggur....”

Pada usia 15 tahun, Ali Effendi minggat dari rumah, dari desanya. Pertama kali di Surabaya, ia bekerja sebagai kernet truk perusahaan. Setahun kemudian, ia bekerja sebagai tukang las di galangan. Tidak lebih dari satu, ia kemudian menjadi kuli pada seorang mandor. Ia dibimbing langsung oleh seorang tukang batu dan mandor. Selama 2 tahun lebih ikut mandor itu, ia diangkat sebagai tukang dengan bayaran yang hanya untuk makan dan minum. *“Yang penting menjadi tukang, tidak kuli lagi.”* Selama menjadi tukang batu itu, ia juga belajar menjadi tukang kayu, tukang besi dan membaca gambar.

Ketika mandornya berpisah dengan pelaksana, maka Ali Effendi pun juga berpisah dengan mandornya. Di tempat kerja

yang baru, dengan pelaksana Elizabeth, ia melamar sebagai mandor borong. Ia diterima karena bisa membaca gambar.

Sejak itu, ia tidak hanya mengerjakan satu rumah saja. Pernah, ia mendapat proyek membangun rumah di kompleks BTN, tapi bersamaan juga di Manyar.

“..Kalau membangun rumah di BTN atau Perumnas, untungnya sedikit, bahkan untuk mengurangi biaya harus kerja sebagai tukang. Untungnya, saya juga mengerjakan di Manyar. Jadi, transpor dan kebutuhan keluarga dari Manyar, sedangkan hasil dari Perumnas cukup bayar tukang dan kulinya. Untungnya mepet sekali daripada rumah luks...”

Baginya, yang penting bagi mandor borong adalah bisa menyelesaikan. Pantangan bila meninggalkan pekerjaan. Ia akan dicap tidak bertanggung jawab. *“Jangan harap bisa dipercaya orang, kalau melarikan diri. Sekali tidak dipercaya, tidak ada lagi pekerjaan.”*

Dalam mencari tukang dan kuli, Ali Effendi berani membayar lebih mahal bila mereka rajin dan hasil pekerjaannya baik.

“Jam tujuh pagi, tukang dan kuli saya sudah bekerja. Dan, nglaut nanti pukul empat hingga lima sore. Tergantung selesainya pekerjaan. Untuk menggerakkan orang, saya menunjuk salah satu tukang sebagai kepala tukang, setengah mandor. Upahnya lebih besar.”

Ali Effendi juta tidak bersusah payah membentak atau marah bila ada pekerjaan yang kurang beres. Menurutny, itu hanya menghabiskan tenaga dan waktu, sekaligus mengurangi kewibawaan. *“Cukup panggil kepala tungkang atau tukang yang ngerjakan, ditanya apakah benar-benar berniat bekerja atau tidak. Habis perkara.”*

Menurut pengakuannya, pada saat ini banyak saingan, dan persaingannya tidak sehat. Menurunkan harga borongan itu sudah wajar. Belum lagi, ada pesaing yang *ngatok* (cari muka) dengan

cara menjelekjelekkan atau menghambat hubungannya dengan pelaksana, agar diberi pekerjaan terus. Kemampuan mereka sering di bawahnya. Hal itu terjadi karena dalam pekerjaan bangunan borongan hubungan antara mandor dan pelaksana sangat penting. Mandor harus mengikuti selera pelaksana. Kalau tidak sesuai, pelaksana tidak mau membayar. *“Kalau sudah begini, saya stress, iya larinya minum-minum, pasang nomer dan main perempuan.”*

Pelarian ini menjadi kebiasaanyang sudah dihilangkan, apalagi seorang mandor dapat menghasilkan uang Rp. 100.000,00 bersih, bahkan sampai Rp. 250.000,00.⁷ Dengan uang sebanyak itu, ia kemudian berfoya-foya ke tempat pelacuran. Ia sendiri sudah kawin 7 kali, keempat istrinya bekas pelacur. Pada waktu penelitian, ia sedang berurusan dengan germo yang pelacurnya minta kawin, padahal ia masih berstatus beristri. Istrinya tinggal di Sepanjang, di tanah dan rumah yang dibangunnya. Lebih parah lagi, kebiasaan membeli nomer “togel.” Akibatnya, *“baru-baru ini saya menjual motor saya untuk tombakan dan urusan dengan pelacur itu.”*

Mat Aji, Tukang Kayu yang unik.

“Bu, kulo wangsul sak meniko. Biasane dbuhur, sak sampune nampi bayaran, kulo wangsul. Sakniki, mandore mbayare jam gangsal sonten,” kata Mat Aji pada salah seorang pelanggan di mana ia menjadi tukang kebun sesudah jam kerja. (“Bu, saya pulang sekarang ke desa sekarang, biasanya saya sudah pulang jam 12 siang, sesudah menerima upah. Sekarang, mandor baru membayar

⁷ Pada tahun 1990-an, harga beras Rp. 450,00, harga emas Rp. 10.000,00 dan harga Premium Rp. 500,00. Gaji PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp.100.000,00. Sekarang, tahun 2006 harga beras rata-rata Rp 4.000,00, harga emas Rp. 120.000,00 dan harga Premium Rp. 4.500,00, sedangkan gaji PNS golongan IIIa sudah mencapai Rp. 1.000.000,00.

jam 5 sore”). Di proyek bangunan, hingga sekarang hari Sabtu merupakan hari kerja separuh hari, selesai jam 12 siang. Pada jam itu mandor membayar upah untuk setiap tukang dan kuli bergantung dari beberapa hari mereka bekerja.

Mat Aji berjanji akan kembali dua hari kemudian. Hal itu biasa dilakukannya. Setiap hari Sabtu, sesudah mengambil upah, ia ke Terminal. Dia pulang ke desanya, Desa Sukomangu, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto. Pada waktu pulang, ia bisa membawa uang antara Rp. 10.000,00 hingga Rp. 25.000,00. Uang sebesar itu sudah dipotong ongkos transport Rp. 1.000,00 (karcis bis Surabaya-Mojokerto Rp. 550,00, ojek Rp. 150,00 dan selebihnya ongkos naik colt), dan uang makan selama seminggu Rp. 1.800,00 (beras 2,5 kg @ Rp. 450,00, lauk Rp. 450,00 dan *mbako* Rp. 200,00), sedangkan sayur diambil dari pekarangan temannya di Pakis. Sayur itu ditanam sendiri. “*Aku nandur dhewe. Tapi, nggake ana sing wani maneni. Koncoku mungkin sungkan. Ora melu nandur kok maneni. Tapi, sakjane gak opo-opo wong yo dhuk pekarangane. Ping pindone, waktu mbangun omabe itu, aku iya ngewangi. Gratis.*”

Mbako (tembakau, pen.) tidak selalu dibeli. Mat Aji sering diberi dari teman-temannya yang minta tolong untuk membuat *jimat*, meski ia sendiri tidak memintanya. *Jimat* itu untuk *pengasih*an (welas asih), agar orang yang memakainya mudah mendapat pekerjaan. Dia membuat dari *sabuk* (ikat pinggang), kertas, bolppoint hitam dan minyak wangi yang masih baru. Kemudian, Mat Aji *melekan* (tidak tidur) sambil *wiridan* (membaca dan menulis mantra) sampai jam 2 atau 3 pagi. Mantra ditulis dalam bahasa Arab *Gandul* dengan bolppoint dan minyak wangi pada kertas yang dimasukkan ke dalam ikat pinggang.

Tentang oleh-oleh untuk di rumah, Mat Aji membelinya di terminal seharga antara Rp. 2.000,00 hingga Rp. 5.000,00. Oleh-oleh itu dibedakan, untuk ibunya yang tinggal di desa lain, dan untuk istri dan keempat anaknya. Untuk ibunya, dia membelikan lebih istimewa, lebih mahal daripada untuk istri dan

keempat anaknya. Sesampai di rumah, oleh-oleh itu diletakkan di meja, tetapi anak-anaknya tidak berani membuka sebelum Mat Aji membagikannya, sedangkan untuk ibunya dikirim oleh anak sulungnya yang sudah dewasa.

Perhatian pada ibunya begitu kuat karena Mat Aji adalah anak tertua dari lima bersaudara, dan kini hanya ibunya yang masih hidup di desa Tegan, desa tetangganya. Ayahnya dulu seorang petani yang memiliki sawah cukup luas. Sejak kecil, Mat Aji membantu ke sawah. Selain itu, ia lebih suka berburu ular, *nyambek* (biawak), dan *celeng* (babi hutan). Dagingnya ia jual atas permintaan orang kota. Sementara itu, dalam sisi pendidikan Ia hanya tamat SR (Sekolah Rakyat, setingkat dengan SD sekarang). Sewaktu di SR, ia berguru dengan seorang kiyai di pondok. Dari kiyai itu, ia mengenal ilmu *klenik*, perdukunan.

Setelah beberapa tahun menikah, ayahnya membelikan dan membangun rumah di atas seribu meter persegi. Rumah itu didiami hingga sekarang, meski sudah beberapa kali mengalami rehab. Rumah itu sekarang separuh berdinding bata, separuh sisanya gedeng, berlantai tanah yang dikeraskan dan memakai penerangan listrik. Rumah itu secara bertahap kini dibangun dengan lantai ubin/keramik dan tembok. Pembangunan ini tidak terlepas dari kegiatan arisan dengan 12 tetangga. Di dalam ariasan itu, setiap triwulan setiap anggota mengumpulkan uang untuk membeli bahan, dan saling membantu membangun rumah ukuran 8x12 m dengan leter L 3 meter secara bergiliran.

Rumah Mat Aji bertetangga dengan keempat adiknya dan seorang kakak ipar (kakak dari isterinya). Keempat adik dan kakak ipar itu bekerja sebagai tukang, selain berkebun dan bertani membantu ibunya. Ada pula yang menjadi tukang batu, tukang besi dan tukang kayu.

Selain menjadi tukang kayu di kota, Mat Aji sendiri bekerja di kebun dengan menanam duren, nangka, moris (*sirzak*), dan poh gadung (mangga). Selain untuk dimakan sendiri, hasil

kebut di-*tebas* (dijual). Setiap pohon laku terjual seharga Rp. 25.000,00 atau lebih, tergantung jenisnya. Dia jua pernah berjualan *apokat*, dari kebun sendiri dan tetangganya. Kini, kebun itu menjadi tanggung jawab anak *barep*-nya (anak sulung) yang dulu pernah diajak bekerja di Delta Plaza pada waktu liburan.

Mat Aji belajar pertukangan, khususnya tukang kayu dari saudara dan tetangganya. Sebagian besar orang-orang di desa itu bekerja sebagai tukang daripada petani sebab sawahnya yang sempit tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mat Aji serius menekuni pertukangan ketika merehab rumahnya. Waktu itu, dia mengukur dari rumah lama ke bahan mentah, kayu, dengan menggunakan *debog* (batang pisang) dan *pring* (bambu). Untuk membuat lubang, ia meletakkan *dlumang* (kertas) yang dibasahi dengan minyak rambut (*kelentik*) di kayu lama untuk ukuran besarnya. Ketika sedang bekerja di siang hari, ada seorang tamu, tetangganya, datang ke rumah dan kemudian mengajarnya cara yang benar.

Berbeda dengan orang-orang sekitar rumahnya, Mat Aji mencari pekerjaan di tempat yang lebih jauh. Informasi pekerjaan diperoleh di pasar. Dia mengaku sudah pernah menjadi tukang di ujung lain dari kabupaten Mojokerto, sebelum ke Surabaya. *“Kalau mengharapkan pekerjaan di sekitar rumah atau di desa tetangga, bakalan tidak makan dan anak-anak tidak sekolah.”*

Mat Aji pertama kali ke Surabaya diajak oleh kakak iparnya sekitar tahun 1983-1984. Di rumah yang dikerjakan pertama kali itu ia sekarang bekerja sebagai tukang kebun. Dari tempat itu, dia ikut mandor mengerjakan di Darmo Grande, kemudian di Perak. Di Perak, ia terpaksa kost dan berkenalan dengan temannya yang sekarang ini tinggal di Pakis. Sesudah di Perak, ia mengerjakan di Jobang. Dengan mandor yang sama pula, ia bekerja di Malang. Dari Malang, ia diajak mengerjakan rumah Perumnas di Bondowoso, tapi tidak bisa menolak dengan alasan tidak bisa pulang sekali seminggu.

Pada waktu penelitian ini, dia pergi ke Surabaya karena terpaksa. Anak-anaknya membutuhkan uang sebesar Rp. 57.000,00 untuk biaya ujian EBTA (sekarang UNAS, pen). Dia sebenarnya sudah menitipkan anak-anaknya kepada guru untuk memberi pekerjaan di sekolah agar bisa membiayai uang sekolah sendiri. *“Buru-buru anak Bapak, saya sendiri pusing memikirkan anak sendiri,”* dia menirukan ucapan seorang guru dari anak sulungnya.

Pada waktu penelitian ini dilakukan, dia bekerja berkat tawaran teman sebangku di bis antar kota ke jurusan Surabaya. Kalau tidak *nggandol* (menumpang gratis, pen.) truk sampai di Darmo Grande, ia biasa naik truk dengan bekal dari rumah Rp. 3.000,00 sampai Rp. 5.000,00. Kesepakatan untuk pergi ke Surabaya itu diambil setelah berunding dengan isterinya, sedangkan uang dari simpanan atau pinjam baik dari saudara maupun tetangga bila tidak punya. Setelah dipotong untuk transpor, uang itu digunakan untuk biaya makan selama mencari kerja (1-3 hari) dan selama belum mendapat upah dari mandor atau uang dari sesama buruh. Bila mandornya baik, dia dipinjami dengan potong upah. Bila tidak, dia terpaksa pinjam uang dengan tanggungan baju atau barang lain yang dibawa.

Selama 3 hari pertama tiba di Surabaya, dia biasanya langsung menuju ke kompleks perumahan untuk mendatangi setiap rumah yang dibangun sambil menanyakan bila ada pekerjaan. Dia biasanya menempuh 4 kilometer sehari, kemudian pindah lagi hingga mendapatkan pekerjaan. Selama mencari kerja dia tidur di rumah temannya (Pakis) atau dari mesjid ke mesjid. Bila tidak mendapatkan pekerjaan selama 3 hari, Mat Ali kembali ke desanya. *“Tapi, syukurlah selama ini saya bisa memperoleh pekerjaan kurang dari 3 hari,”* katanya, *“Dan, salah satu di antaranya karena ini.”* Dia tersenyum sambil menunjukkan ikat pinggangnya ketika ditanya apa rahasianya mendapat pekerjaan secepat itu.

Ran, Tukang Batu yang Kerja Keras.

Ran mulai menginjakkan kaki di Surabaya untuk bekerja sejak tahun 1982. Dia mengaku, waktu itu dia membutuhkan uang untuk mengerjakan sawah dan kebutuhan rumah tangganya. Sawahnya waktu itu mencukupi hasilnya. *“Saya beruntung sekali waktu itu. Di terminal Nganjuk saya berkenalan Cak Arief, tukang batu. Dia ajak saya jadi kulinya. Dia butuh untuk ngecor dan pasang bata,”* katanya dalam bahasa Jawa Ngoko.

Dia dilahirkan dan dibesarkan di desa Jarak, Nganjuk. Dia hidup bersama isteri keduanya, anak-anak dan adik laki-lakinya. Isteri pertamanya sudah meninggal. Isterinya yang sekarang adalah adik dari isteri yang terdahulu. Dari isteri pertamanya, dia mendapat empat anak, sedangkan isteri kedua dua anak. Anaknya yang sulung sudah duduk di kelas 2 SMP pada waktu penelitian ini.

Adik laki-laki yang ikut dia ini menggantikan ia bekerja di sawah. Pada tahun tersebut, sawahnya bertambah 0,5 ha, sebelumnya hanya 0,25 ha dan menjadi 0,75 ha dari hasil kerja menjadi *kuli* di Surabaya. Sawah itu berstatus hak milik, sementara itu ia juga membeli dengan cara *adol tabunan*.

Dia bekerja dan tinggal di tempat kerjanya. Setelah beberapa minggu bekerja, dia kembali mengajak teman dan saudara sepupunya, tiga orang jumlahnya, ke Surabaya, sama-sama menjadi *kuli*. Dan, pada waktu penelitian hanya dua yang bertahan sebagai *kuli*, salah satunya menjadi tukang batu, seperti dia. Seorang telah beralih sebagai pelayan toko. *“Yang jadi pelayan toko itu tidak tahan kerja di bangunan. Habis, di desa dia tidak pernah bekerja, hanya di rumah saja. Yang tetap jadi kuli itu salah, karena tidak mau belajar.”*

Setelah dari Cak Arief, dia masih tetap terus bekerja di tempat itu. Cak Arief kembali ke Jombang. *“Mungkin, dia sudah di-petrus. Sebab, hubungi baik surat maupun saya datang, dia tidak ada di*

rumah. Ngakunya, dia pernah jadi copet, tapi sebenarnya di baik sekali. Ngajari saya nukang batu. Cuma dia boros.”

Setelah dari tempat kerja yang pertama, dia ikut temannya bekerja di Kayoon. Ran waktu itu masih menjadi *kuli*, meski sudah mempunyai keahlian dari tempat kerjanya yang terdahulu. Dia kemudian pindah lagi di Kramat Gantung, merenovasi toko. *“Saya pindah mandor. Kalau tidak begitu, saya tetap dianggap kuli. Padahal, kemampuan saya sudah seperti tukang.”*

Di Surabaya, Ran selalu berhemat. Dia memasak sendiri. Beras dibawa dari rumah, lauknya beli di warung. *“Kalau ngirit, bisa bawa uang ke rumah lebih banyak. Tapi, itu tergantung mandor dan pemiliknya. Ada yang tidak boleh masak, takut temboknya hitam kena asap. Rokok pun saya bawa dari rumah. Harganya murah dan bau mentol agarangat.”*

Dia *nglaut* (selesai bekerja) jam 4 sampai 5.30 sore, kemudian mandir dan merebus air buat kopi atau teh. Dia tidur sekitar jam 10 malam di tanah yang dilapisi *tripleks*. Pagi-pagi dia sudah bangun, memasak dan bersiap-siap bekerja lagi. *“Kalau tidur, saya tidak tentu. Kalau ada yang ngajak ngobrol atau nonton wayang atau ketoprak, iya bisa larut pagi.”*

Dia rata-rata pulang ke desa sebulan sekali. Selain membawa uang Rp. 30.000,00 bersih, artinya telah dipotong untuk biaya hidup di Surabaya, oleh-oleh makanan, pakaian dan mainan untuk anak-anak, isteri dan adik lelakinya. Ketika kembali dari desa, Ran sering membawa hasil panen, seperti kelapa, buah dan beras. Sebagian untuk dirinya, sebagian lagi untuk teman, mandor dan pemilik rumah tempat dia bekerja dahulu. Dia memberikan oleh-oleh dari desa itu dengan harapan dia akan diajak bekerja bila ada *garapan*. *“Saya belum merencanakan untuk jadi mandor borongan, saya belum ada modal. Tapi, saya sekarang berani jadi tukang yang dibayar borongan.”*

Mas Pur, Tukang Besi produk Balai Latihan Kerja.

Tiap pagi, selain hari Minggu, Mas Pur berangkat dari tempat menumpanginya ke tempat kerja sejauh 7 km dengan naik sepeda. Ia tinggal menumpang di rumah familinya, Waru, Sidoarjo. Tempat kerjanya di Margorejo, Wonocolo, Surabaya. Ia sudah bekerja sebagai tukang besi selama 6,5 tahun.

Selain di Surabaya, dia mengaku pernah bekerja di kota-kota besar Pulau Sumatera, seperti di Aceh dan Medan. *“Terlalu jauh, saya sering tidak pulang rumah, di Cilacap. Untung saya bisa balik ke Jawa karena informasi dari famili kalau di Surabaya banyak kerjaan.”*

Ijazah SMA (Umum) yang dimilikinya, tetapi tidak pernah dipakai untuk melamar pekerjaan. *“Kalau hanya ijazah SMA, siapa yang mau menerima saya kerja. Saya pakai sertifikat BLK. Dari BLK, ia memperoleh keterampilan pertukangan, mulai dari tukang batu hingga tukang besi. “Kalau nglamar kerja, saya lihat dabulu apa yang mereka butuhkan. Kalau butuh tukang batu, saya juga bisa. Sekarang pekerjaan saya sebagai tukang batu.”* Meskipun demikian, ia lebih sering menerima tawaran sebagai tukang besi. Menurutnya, pekerjaan tukang besi itu jauh lebih mudah dibandingkan tukang-tukang lainnya. *“Kerjanya hanya membuat plat, begel untuk pondasi dan tulangan. Kalau hanya mengkhususkan sebagai tukang besi saja, rugi mas. Dipakai hanya di awal saja, sisanya pekerjaan tukang batu dan kayu. Jadi, akhirnya saya pilih pekerjaan tukang apa saja. Asal kerja.”*

Sebagai tukang batu, Mas Pur dibayar per hari Rp. 4.000,00, tapi sebagai tukang besi hanya antara Rp. 3.000,00 hingga Rp. 2.500,00. *“Kalau jadi tukang besi dan tukang batu, saya pilih borongan. Hasilnya lebih banyak. Tergantung rajin dan kecepakatan.”*

Pukul 3 sore ia sudah *nglaut*, dan bersiap-siap pulang dengan mengumpulkan peralatan dan mandi di tempat kerja. Sekitar pukul 4.30 sore dia sudah melaju pulang ke waru. *“Saya kadang-kadang pulang pergi naik bemo. Tapi, saya lebih suka naik sepeda.*

Lebih hemat. Uangnya bisa dipakai untuk jajan pada waktu istirahat siang.

Dia mengaku bahwa hampir setiap bulan mengirimkan sebagian upanya untuk orangtuanya yang menjadi petani dengan luas sawah 0,86 ha dan untuk saudaranya. Dia sendiri telah bercerai sewaktu bekerja di Sumatera. Sisa uang lainnya untuk makan di tempat kerja dan *nyumbang* ke famili yang rumahnya ditempati. Tidak selalu dalam bentuk uang karena saudaranya *sungkan* menerima.

“...Saya belikan saja kebutuhan dapur, seperti beras dan bayar listrik. Itu saja sudah hampir Rp. 30.000,00. Tidak seberapa, bila dibandingkan harus kost. Memang, lama kelamaan saya juga sungkan. Memang ada rencana untuk pindah dan kost. Tapi, kapan dan alasan apa. Masih saya pikir-pikir...”

Pak Mian, Keluarga Kuli Batu.

“Helo.... helo Purnomo, apa ning kono?” kata Mak Sri di depan *corong omplong* (kaleng bekas). (*“Helo.. helo Purnomo, apa ada di situ”*). Purnomo adalah anak bungsunya. Umurnya kurang dari lima tahun. Ia berdiri di ujung lain. Ia melekatkan corong yang dihubungkan benang itu ke telinganya. Ia tertawa mendengar suara ibunya. Mainan itu dibuatkan Pak Min, teman kerja ayah dan ibunya. Begitu pula dengan truk mainan yang terbuat dari kayu. Mereka tinggal di bangunan yang belum jadi. Di tempat itu, kedua orang tuanya bekerja.

Ningsih anak perempuan sulungnya sedang *ngladeni* sarapan pagi tukang dan kuli. Selain itu, ia mencatat berapa dan apa yang dimakan tukang dan kuli. Mereka biasanya *ngebon*, membayar setelah mendapat upah di akhir minggu. Biasanya dalam seminggu mereka menghabiskan Rp. 5.000,00 untuk makan, belum lagi untuk *ses* (rokok).

Masakan itu dibuat oleh Ningsih dan ibunya, Mak Sri, antara jam 5 sampai 6 pagi. Bahan-bahannyadibeli sore hari sebelumnya di toko dan pasar terdekat, kurang lebih 300 meter jauhnya atau *kulakan* pada hari Minggu. Pak Mian yang pergi *kulakan*. Sementara isteri dan anaknya memasak. Pak Mian membantu mencari dan merebus air. Air itu diambil dari ledeng rumah di seberang jalan. Dia tidak perlu membayar karena sudah dibayar oleh mandornya dengan cara mengganti tagihan air tiap bulan, biasanya sekitar Rp. 20.000,00. “*Mereka sebenarnya curang, Mas. Masak yang sering pakai mereka. Tapi, seluruh tagihannya yang bayar kami. Mestinya, untuk adilnya dibagi dua,*” kata Mandronya yang d-iya-kan oleh tukang dan kuli lainnya.

Pukul 7 pagi, Pak Mian dan Mak Sri sudah ganti dengan baju *telesan* (baju yang sudah luntur warnanya untuk kerja). Sementara itu, Ningsih terus melayani tukang dan kuli yang mau makan. Prunomo sendiri sudah berganti mainan dengan truk yang terbuat kayu. *Om* yang mengawasi bangunan, sebagai wakil dari pemilik bangunan (rumah), ikut menggoda Prunomo. *Om*, seorang Tionghoa separuh bayu ini adalah paman (kakak dari ayah) pemilik bangunan. “*Pur, sing gawe truk iki sapa?*” “*Lik Min,*” sahut Prunomo tanpa menoleh sedikitpun. “*Iki truk kudu momot gragal nggo digarap bapakmu,*” godo Cak Podo, teman ayahnya, sampil meletakkan batu pada *bak* truk mainan. (“Truk ini harus berisi batu yang harus dikerjakan ayahmu”). Akibatnya, truk tidak bisa ditarik lagi oleh Purnomo karena terasa berat. Teman-temah ayahnya tertawa melihat tingkah Purnomo menarik truk. “*Ah, kowe ngawur Cak Podo,*” kata Pak Min sambil membantu Purnomo menarik truk.

Kurang lebih pukul 8 pagi, mereka semua bekerja. Pak Min, sesudah mengisi air ke dalam tong, *ngladeni* tukang batu dan keramik membuat *luluh* (campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1:3). Sementara itu, Pak Mian dan Mak Sri *ngayak* pasir dan mengangkat *luluh* ke tukang batu dan keramik.

Sementara itu, Ningsih tetap menjaga warung dan melayani pembeli, sambil *ngemong* Purnomo. Warung itu sebenarnya *direksiget* (gudang). *"Saya sebenarnya ingin sekolah. Tapi, tidak ada biaya. Jadi, kelas tiga SD saya sudah berhenti. Kata bapak, kalau ada biaya, tahun depan saya sekolah lagi,"* kata Ningsih. Ningsih berkulit hitam manis, seperti ibunya, dan berambut hitam panjang sebatas pinggang. Hal ini berbeda dengan ayahnya, Pak Mian. Ciri-ciri Pak Mian bertubuh sedang, 50 tahun umurnya, berambut keriting (*"Susah diatur. Tidak perlu potong,"* katanya) dan biji mata sebelah kiri berbintih putih (mungkin akibat kekurangan vitamin A). Lebih lanjut, selain melayani pembeli, dia memasak air untuk minum ketika menjelang jam 12 siang. Waktu istirahat siang, atau istilahnya *nglaut*.

Pada waktu *nglaut*, Mak Sri dan Ningsih kembali melayani mereka yang bekerja di bangunan itu, termasuk mandornya. Setelah *nglaut*, sekitar pukul 1 siang mereka kembali bekerja. Mereka baru selesai bekerja sekitar jam 4 sampai 4.30 sore. *"Beginilah cara kami mencari makan. Datang ke Surabaya, hanya jadi kuli dan buka warung,"* kata Pak Mian. Meskipun demikian, sejumlah teman sekerjanya menyayangkan tekad mereka. *"Sayang, dia tidak bisa mencapai jenjang lebih tinggi. Tidak bisa jadi tukang. Ketuweken (terlalu tua, pen). Tidak bisa belajaran. Apalagi membawa keluarganya di Surabaya,"* kata Pak Min.

Menurut pengakuannya, Pak Mian berasal dari Desa Tanggul Angin, Kab. Bojonegoro. Pak Mian tidak mempunyai sawah atau ladang. Sawah milik ayahnya yang 0,5 ha luasnya sekarang dimiliki dan dikerjakan oleh kakak sulungnya. Dia dan isterinya di desa hanya bekerja sebagai buruh tani yang dibayar Rp. 1.000,00 per hati pada waktu musim tanam atau musim panen. *"Saya dan sekeluarga berniat pulang desa akhir Maret nanti. Kami dengar akan ada panen bawang dari teman dan kerabat keteta pulang bulan yang lalu."*

Pertama kali datang ke Surabaya, Pak Mian diajak temannya sudah tiga lamanya sebelum penelitian ini. Ia ditawarkan menjadi kuli. Waktu itu, ia menjadi kuli di Rungkut. Sudah 2-3 bulan pada waktu penelitian berlangsung, isteri dan kedua anaknya di ajak. Baru beberapa minggu setelah bekerja di Surabaya, isterinya mengajak untuk buka warung, berjualan nasi. Modalnya diperoleh dari hasil tabungan.

Ia bekerja di Rungkut kurang lebih dua tahun lamanya. Setelah selesai bangunan yang satu, ia berpindah ke bangunan lain. Kurang lebih satu tahun terakhir, mereka diajak mandor ke tempat yang sekarang di kawasan Chris Utama, Pakis Gurung. Di tempat tinggal yang sekaligus tempat kerjanya, dia bersama isteri dan anak-anaknya menempati satu ruangan yang belum jadi. Dia tidur di atas *tripleks* dan menggunakan *sendir* buatan sendiri untuk penerangan bila malam hari. Untuk menghangatkan dan memasak, mereka menggunakan kayu bakar.

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga sebagai Faktor Pendorong Migrasi

Everett S. Lee (1985: 8-9) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi, yakni: faktor dorong-tarik, penghalang antara dan faktor pribadi. Faktor dorong-tarik, oleh pendekatan sistem, digambarkan sebagai akibat *over*-populasi dan lingkungan yang memburuk di kawasan desa serta daya tarik kota.

Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan sangat sulit, pada kasus ini semua responden telah melakukan migrasi desa-kota. Mereka berasal dari daerah asal yang berbeda satu sama lain. Cara lain yang digunakan adalah menanyakan alasan pergi bekerja di Surabaya.

Tabel 5.1.
Alasan Pergi Bekerja di Surabaya (N=75)

No.	Rincian	Utama		Kedua	
		f	%	f	%
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	38	50,67	8	10,67
2.	Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarga	17	22,67	9	12,00
3.	Mengisi Waktu Luang (Pra-Panen dan Tanam)	0	0,00	20	26,67
4.	Diajak Kawan	10	13,33	5	6,67
5.	Lain-lain	5	6,67	0	0,00
6.	Tidak Menjawab	2	2,67	33	44,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 6.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak adanya pekerjaan di desa sebagai alasan utama yang dominan. Atau, singkatnya tidak adanya pekerjaan sebagai faktor pendorong. Hal itu bisa dipahami karena revolusi hijau dan biru telah mengakibatkan efisiensi dan komersialisasi di sektor pertanian. Revolusi hijau mengakibatkan penyeragaman musim tanam (dan sekaligus musim panen), sehingga petani kecil dan buruh tani hanya bekerja pada lahan pertanian tertentu saja dalam satu kali musim tanam-panen. Jumlah buruh tani yang digunakan pun semakin terbatas akibat penggunaan teknologi pertanian. Untuk membajak, hanya menggunakan satu traktor sudah bisa mengolah tanah dalam jumlah yang besar. Sementara itu, ketika musim panen tenaga yang diperlukan juga sedikit karena menggunakan sabit. Penurunan penggunaan tenaga di sektor pertanian ini tidak diikuti pengembangan sektor non-pertanian yang lebih luas, terlebih lagi dalam bentuk industri kecil rumah tangga (Adiwikarta, 1984: 71-77; Sayogyo, 1978: 3-14; Manning, 1988: 3-39). Akibatnya,

mereka memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Penjelasan yang ini juga dapat digunakan untuk memahami alasan utama kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga (pendapatan tambahan).

Tabel 5.2
Luas Pemilikan Tanah sebelum Bekerja dan Alasan-alasan Bermigrasi
(N=75)

No.	Alasan	Utama			Kedua		
		Sempit	Sedang	Luas	Sempit	Sedang	Luas
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	27 50,00%	6 75,00%	5 38,46%	8 14,81%	0 0,00%	0 0,00%
2.	Mencukupi Kebutuhan Keluarga	12 22,22%	2 25,00%	3 23,08%	2 3,70%	0 0,00%	7 53,85%
3.	Isi Waktu Luang	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	17 31,48%	0 0,00%	3 23,08%
4.	Diajak Kawan	7 12,96%	0 0,00%	3 23,08%	5 9,26%	0 0,00%	0 0,00%
5.	Lain-lain	8 14,81%	0 0,00%	2 15,38%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
6.	Tidak Menjawab	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	22 40,74%	8 100,00%	3 23,08%

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 26

Oleh karena itu, pada alasan kedua yang dominan adalah mengisi waktu luang pra panen dan tanam. Mereka, buruh bangunan yang terjaring, mengisi waktu luang dengan bekerja di Surabaya. Mereka mengaku sebenarnya ingin juga bekerja di daerah asal, tetapi ternyata tidak ada pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Akhirnya, mereka memilih menjadi buruh bangunan di Surabaya.

Bila dikaitkan dengan SES dan tanah yang dimiliki sebelum melakukan migrasi, maka tidak ada pekerjaan menjadi satu penjelasan kolektif (*collective reasoning*) masyarakat desa mengapa mereka meninggalkan desanya dan menuju kota. Namun, bila digali lebih dalam lagi, di samping pekerjaan yang tidak ada, bagi informan yang memiliki SES tinggi (dan tanah) yang luas, pekerjaan merupakan “keberadaan” dirinya. Mereka tidak puas hanya bekerja ikut atau bersama orang tua. “*Yen kerja ning sawah melu wong tuwo iku podho wae ngganggu. Kulo pingin duwe penghasilan dhewe. Sawah ben diurus sing ning desa.*” (Kalau ikut orang tua bekerja di sawah itu sama dengan menganggur. Saya ingin punya pendapatan sendiri. Sawah biar diurus oleh orang yang masih tinggal di desa). Jawaban ini rata-rata diberikan oleh buruh bangunan yang ber-SES tinggi dengan tanah di atas 0,5 ha, bahkan ada salah seorang responden yang memiliki sawah 5 ha lebih suka menyuruh tetangganya mengerjakan daripada dirinya.

Menjadi Penglaju, Migran Permanen dan Sirkuler untuk Menyiasati Faktor Penghalang

Meski masih belum ada kesepakatan konsep *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen, Hugo misalnya, mengusulkan ukuran-ukuran yang cocok dari keterlibatan seseorang yang pindah, yaitu: (1) apakah keluarganya ikut pindah atau tidak; (2) apakah tanah, rumah atau harta benda lainnya di desa tetap menjadi miliknya atau tidak; (3) apakah ada kiriman uang atau barang ke desa, kiriman-kiriman tersebut seberapa bagain dari jumlah seluruh penghasilannya; (4) apakah dia mempunyai peranan politik atau sosial di desa; dan (5) apakah sering pulang ke desa (Goldstein, 1980: 75). Pakar lain menghendaki perlunya memperhatikan kriteria ruang (wilayah, jarak ekonomi dan jarak sosial), tempat tinggal, waktu dan kegiatan dalam migrasi, khususnya desa-kota (Standing, 1987: 1-20).

Selain mengikuti pendapat Hugo, cara lain yang ditempuh untuk seseorang melakukan migrasi permanen, sirkuler dan/atau *nglaju* adalah menanyakan apakah ada rencana kembali (*niat*) ke daerah asalnya (Mantra, 1985: 3) dan frekuensi kembalinya. Buruh bangunan yang menyatakan kembali dan tetap menetap di desa adalah 80,00%, sedangkan 15% menyatakan menetap di Surabaya. Alasan mereka yang memilih menetap di Surabaya adalah karena keluarganya sudah dipindahkan, tidak mempunyai sawah atau terlalu sempit, atau selain keluarganya telah dipindahkan, karena tidak ada pekerjaan di desa. Beberapa yang mengambil keputusan pindah ke Surabaya telah memiliki rumah, namun ada pula yang mengontrak, tinggal bersama famili dan orang lain, biasanya teman sekerjanya (sumber: pertanyaan no. 42 dan 61).

Tabel 5.3
Jarak dan Frekuensi kembali ke Daerah Asal
(N=75)

No	Jarak ke Daerah Asal	Dekat		Sedang		Jauh	
	Frekuensi Kembali	f	%	f	%	f	%
1.	Tinggi	16	76,19	2	5,71	3	16,67
2.	Sedang	0	0,00	27	77,14	8	44,44
3.	Rendah	5	23,81	7	20,00	7	38,89

Sumber: data primer, pertanyaan no. 11, 59, 60 dan 63.

Sementara itu, mereka yang tidak punya rencana menetap melakukan migrasi sirkuler dan *nglaju*. Responden yang *nglaju* akan pulang setiap hari, jumlahnya 8 orang, dua orang lebih memilih pulang 2 hari sekali. Migrasi sirkuler dilakukan dengan cara pulang 1 atau 2 kali dalam sebulan, bahkan ada yang tidak pulang setiap bulan, meski tetap memberikan kiriman uang yang ditiptkan pada saudara atau teman-teman sedesanya (sumber: pertanyaan no. 60 dan 61). Frekuensi pulang ke daerah asal

mereka berbeda bergantung dari jarak antara Surabaya dan daerah asalnya. Semakin dekat jaraknya, semakin sering pulang, bisa setiap hari, atau mengambil pola *nglaju*. Sementara itu, semakin jauh jaraknya semakin lama pulang rentang waktu pulanginya (lihat tabel 4.3).

Ketika berangkat ke Surabaya, mereka tidak selalu diajak oleh orang tuanya atau temannya, tetapi 22 (29,33%) orang mengambil inisiatif sendiri. Meskipun demikian, ajakan dari teman se-desa yang terlebih dahulu pergi ke Surabaya dan telah memperoleh pekerjaan tetap dominan, yaitu 25 (33,33%). Pada waktu diajak atau berinisiatif sendiri ke Surabaya, mereka meminta pertimbangan dan ijin dari orang tua (37,33%), keluarga (33,33%) dan cukup tekad dan keputusan sendiri (29,33%). Permintaan ijin pada orang tua dan keluarga biasanya dilakukan anak muda dengan karakteristik sosial tertentu. Sebagaimana pendapat David F. Sly dan J. Michael Wrigley (1985: 75-97), keputusan migrasi pada anak muda pada dasarnya dibuat oleh kepala keluarga, khususnya yang kurang berpendidikan, sedangkan orang di luar keluarga lebih berperan pada migran yang berpendidikan. Namun demikian, orang yang memberikan pertimbangan ini tidak berarti ikut membiayai migrasi tersebut, karena dari temuan lapangan 77,34% responden mencari biaya sendiri.

Magang atau *Ngernet*, Proses Belajar dan Adaptasi Kerja

Kartini Sjahrir (1985: 82) memaparkan bahwa keahlian seorang tukang di Jakarta diperoleh secara bertahap dari teman sekolah sekerjanya. Mandor maupun kontraktor tidak pernah menyelenggarakan suatu latihan keterampilan khusus. Setiap tukang memperolehnya lewat pengalaman kerja dan barangkali juga bakat. Hal ini terjadi pada buruh bangunan di Surabaya. Hampir semua buruh mengaku pernah menjadi kuli sebelum kedudukannya sekarang, bahkan ada yang mau bekerja tanpa di-

bayar, hanya uang makan, seperti Ali Effendi. Pekerjaan *kuuli, laden tukang*, tidak selalu dijalani di Surabaya, biasa jadi di desa asalnya atau kota

Alat-alat kerja didapat dengan jalan beli sendiri (36,0%), pinjam atau diberi oleh mandor atau pemilik bangunan (7,0%), atau dari sebagian membeli dan sebagian lain pinjam (16,%) (sumber: data primer, pertanyaan no. 64). Alat-alat ini dikenalkan oleh teman kerja, teman se-daerah, saudara, dan/atau orang tuanya, sekaligus dibimbing cara menggunakannya. Tabel 5.4 menunjukkan bahwa selain didukung oleh kemauan sendiri, teman kerja sangat berperan dalam mengenalkan dan membimbing dalam penggunaan alat-alat kerja. Proses belajarnya tidak seperti pada pelatihan, tetapi sambil kerja temannya memperhatikan. Kalau salah, baru diberi tahu mana yang salah, bisa pada saat itu juga atau pada waktu *nglaut*.

Tabel 5.4
Yang Mengenalkan Alat dan Membimbing/Melatih Pekerjaan
(N=75)

No.	Rincian	Yang Mengenal Alat		Yang Membimbing	
		f	%	f	%
1.	Sendiri	4	5,33	4	5,33
2.	Orang tua	2	2,67	5	6,67
3.	Saudara	4	5,33	4	5,33
4.	Teman se-daerah	3	4,00	0	0,00
5.	Teman se-kerja	11	14,67	14	18,67
6.	Sendiri dan orang tua/saudara	9	12,00	12	16,00
7.	Sendiri dan teman se-daerah	2	2,67	5	6,67
8.	Sendiri dan teman se-kerja	22	29,33	26	34,67
9.	Sendiri, orang tua/saudara dan teman se-kerja	10	13,33	5	6,67
10.	Sendiri, orang tua/saudara, teman sekerja dan teman se-daerah	8	10,67	0	0,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 56 dan 57.

Proses magang, *ngernet* atau *belajaran* diceriterakan oleh Pan Ran, yakni pada awalnya seorang *kuli* mengikuti tukangnyanya bekerja dan seringkali tukang inilah yang memberikan pekerjaan padanya, tapi hanya 1 atau 2 kali proyek mereka ikut, selebihnya mencari sendiri. Pertama kali kuli batu memperhatikan tukang bekerja sewaktu *laden* dan memberikan luluh. Tukang memberitahu berapa campurannya, apakah pasir itu perlu di-*ayak* atau tidak, jenis batu yang digunakan dan campuran semennya. *Kuli* juga diminta memegang ujung lain dari pipa plastik yang berisi air untuk melihat sejajar atau tidak dan *ngelot* (menimbang ketebalan lapisan semen). Selain itu, lambat laun kuli disuruh mengerjakan pasang batu bata supaya target (borongan) terpenuhi. “*Ayo melu masang, nggak ono rugi. Aku nggak iso mbayar sampeyan!*” (“Ayo ikut pasang kalau tidak bisa rugi. Kalau rugi, saya tidak membayar kamu!”). Setelah kelihatan sudah agak terampil, tukang memberikan bonus dan sering mengajak lembur. Bila yang membayar mandor, tukang akan mempromosikan *kuli*-nya. Bila *kuli* merasa sudah bisa melakukan, dia keluar dan mencari tempat kerja baru atas informasi teman-temannya. “*Umpamane ora pindah, bakal pancet ae.*” (“Kalau tidak pindah, kondisinya tetap saja”).

Di tempat yang baru, dia melamar sebagai tukang, bukan *kuli* lagi. Oleh mandor yang baru, dia boleh bekerja dengan masa percobaan beberapa hari.. Bila hasilnya kurang baik, mandor akan menurunkan upahnya, tapi biasanya tukang yang “baru” ini memilih keluar. Kalau hasilnya baik, ia tetap bekerja dengan status yang baru, sebagai tukang.

Untuk meningkat menjadi kepala tukang atau mandor, seorang tukang harus dekat dengan mandor atau pelaksana. Mereka mengajarkan bagaimana seluk-beluk mencari proyek dan memberikan kepercayaan. Di samping itu, tukang tersebut menyisakan upahnya untuk modal. *Kuli* jarang langsung menjadi mandor atau kepala tukang, tetapi harus bertahap.



Gambar 5.1.

Kadang dengan perut kosong, sudah harus bekerja.

Perubahan Status Sosial Ekonomi Keluarga, berkah dari Kota Besar

Perubahan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal sebenarnya tidak terlepas dari perilaku pengiriman uang atau barang, dalam istilah kependudukan adalah *remittance*. Pengiriman uang atau barang ini dilakukan oleh kaum migran, termasuk oleh buruh bangunan. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa semua buruh bangunan yang berstatus berkeluarga dan separuh dari berstatus janda/duda, atau 70,7% dari 75 responden mengaku mengirimkan uang dan/atau barang pada keluarganya, khususnya istri dan/atau anak-anak mereka. Bentuk pemberian itu bervariasi, namun umumnya berupa uang setiap kali pulang.

Tabel 5.5
Bentuk Pengiriman/Pemberian Uang dan/atau Barang pada Keluarga
(N=75)

No.	Rincian	Istri dan anak-anak		Orang Tua/ Mertua		Kerabat Lain	
		f	%	f	%	f	%
1.	Uang secara teratur	22	29,33	0	0,00	5	6,67
2.	Uang setiap kali pulang	25	33,33	16	21,33	0	0,00
3.	Uang dan/atau barang	3	4,00	20	26,67	12	16,00
4.	Barang-barang saja	3	4,00	15	20,00	15	20,00
5.	Tidak memberi apa-apa	22	29,33	24	32,00	43	57,33

Sumber: data primer, pertanyaan no. 67.

Tabel 5.5 juga menunjukkan bahwa buruh bangunan juga mengirim uang dan/atau barang setiap kali pulang, meski frekuensi pemberiannya berbeda bila dibandingkan istri dan/atau anak-anak. Namun tidak demikian untuk kerabat, kecenderungan memberikan uang, meski dalam jumlah kecil, biasanya dilakukan oleh buruh bangunan pada kerabat yang masih menjadi tanggungannya, seperti yang dilakukan Pak Ran. Atau, pemberian itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya selama proses migrasi, misalnya memberikan tumpangan menginap, atau mencarikan/memberi informasi tentang pekerjaan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pemberian uang dan/ atau barang ini digunakan membeli tanah atau barang-barang elektronik sebagai investasi. Sebelum ke Surabaya, separuh lebih dari buruh bangunan berstatus petani kecil atau tidak memiliki tanah (*tunakisma*). Kalau pun memiliki tanah pertanian, ada sejumlah pola pemilikan, mulai dari milik sendiri, warisan, beli

sewa, bagi hasil, hadiah/hibah dan lungguh. Pola penguasaan lahan yang demikian ini adalah wajar pada masyarakat Jawa pada tahun 1990-an. Data Sensus Pertanian tahun 1983 yang dilakukan oleh BPS, 63,3% usaha tani dari 11,6 juta rumah tangga petani di Jawa adalah petani gurem dengan luas tanah rata-rata 0,25 ha. Meski pada buruh bangunan yang tidak bertanah dan petani sempit tidak berubah, namun pada kelompok buruh bangunan di atas 0,25 ha mengalami perubahan luas tanahnya.

Tabel 5.6
Luas Pemilikan Tanah Pertanian Sebelum dan
Sesudah Bekerja di Surabaya
(N=75)

No.	Luas Lahan (dalam ha)	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Tidak Bertanah	28	37,33	28	37,33
2.	0,01 – 0,25	21	28,00	21	28,00
3.	0,26 – 0,50	7	9,33	0	0,00
4.	0,51 – 0,75	3	4,00	2	2,67
5.	0,76 – 1,00	8	10,67	16	21,33
6.	1,01 – 1,25	2	2,67	2	2,67
7.	Lebih dari 1,25	6	8,00	6	8,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 16.

Ada temuan yang menarik dari tabel 5.6, bahwa tidak peningkatan perluasan tanah pertanian yang dimiliki. Pada beberapa kasus perpindahan pekerjaan yang kurang dari satu tahun pada waktu penelitian ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Lebih dari itu, para buruh tani dan pemilik tanah yang bertanah sempit lebih memilih mengembangkan sektor non-pertanian, bahkan telah dilakukan pada waktu sebelum melakukan proses migrasi. Sementara itu, petani yang memiliki tanah di atas

0,25 ha tetap mengembangkan strategi peningkatan ekonomi pada sektor pertanian. Caranya, hasil dari bekerja di kota digunakan untuk membeli tanah. Dengan membeli tanah yang cukup luas hingga mencapai 1 ha. Dengan luas tanah tersebut, setidak-tidak biaya antara pengelolaan padi dan keuntungan dari menjual beras seimbang atau lebih untung.



Gambar 5.2
Bekerja untuk keluarga di desa?

Tidak ada perubahan signifikan pada kelompok buruh bangunan yang *tunakisma* (tidak bertanah) dan petani *gurem* (lahan kurang dari 0,25 ha) ini nampaknya berhubungan dengan (1) status pekerjaan di desa yang tidak lagi memfokuskan pada sektor pertanian, dan (2) orientasi dalam pengembangan modal yang dimiliki. Orientasi pengembangan ini terlihat dari perubahan kualitas rumahnya. Meski luas tanah atau rumah relatif tidak berubah, tetapi terlihat perubahan pada bahan dinding, lantai dan penggunaan listrik. Lebih penting lagi, status kepemilikan rumah

pun telah berubah, bila dulu bergantung pada orangtuanya, kini mereka telah mengutamakan untuk membeli sendiri, baik dengan cara membeli, maupun membuat sendiri.

Tabel 5.7
Kondisi Obyektif Rumah di Daerah Asal Sebelum dan Sesudah Bekerja
di Surabaya (N=75)

No	Kondisi Obyektif	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Luas Rumah (dalam m ²)				
	a. Kurang dari 40	10	13,33	16	21,33
	b. 40,01 – 60,00	21	28,00	15	20,00
	c. 60,01 – 80,00	7	9,33	4	5,33
	d. 80,01 – 100,00	15	20,00	18	24,00
	e. 100,01 – 120,00	10	13,33	7	9,33
	f. Lebih dari 120,00	12	16,00	15	20,00
2.	Dinding terbuat dari				
	a. Tembok	49	65,33	62	82,67
	b. Papan	7	9,33	3	4,00
	c. Gedeg	19	25,33	10	13,33
3.	Lantai terbuat dari				
	a. Tegel/Keramik	7	9,33	9	12,00
	b. Semen	31	41,33	53	70,67
	c. Tanah	37	49,33	13	17,33
4.	Penerangan				
	a. Listrik	33	44,00	53	70,67
	b. Lampu Minyak	42	56,00	22	29,33
5.	Status Pemilikan				
	a. Beli Sendiri	11	14,67	20	26,67
	b. Buat Sendiri	9	12,00	18	24,00
	c. Hibah Orangtua	8	10,67	13	17,33
	d. Buat Sendiri dgn dibantu Orangtua	18	24,00	9	12,00
	e. Milik Orangtua	29	38,67	15	20,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 27.



Gambar 5.3

Makan bersama, bekerja bersama. Modal sosial orang miskin kota.

Penutup

Apa yang dapat disimpulkan dari perilaku buruh bangunan. Pertama, mobilitas buruh bangunan yang bekerja di Surabaya adalah *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen. Frekuensi mereka kembali ke daerah asal ini berhubungan dengan dengan jarak antara tempat kerja dan daerah asal. Semakin dekat jaraknya, semakin tinggi frekuensi kembali ke daerah asal. Intensitas hubungan dengan asal ini sebenarnya berbeda bergantung status kawinnya. Pada buruh bangunan yang berstatus kawin, dengan istri dan anak-anak yang tinggal di daerah asal, intensitasnya semakin tinggi, sebaliknya tidak demikian pada status tidak kawin dan janda/duda. Intensitas ini ditandai dari frekuensi kembali ke daerah asal, pengiriman uang dan/atau barang, ada tidaknya teman atau famili dari daerah asal yang diajak bekerja dan keterlibatannya pada organisasi di daerah asalnya.

Kedua, pola migrasi yang demikian sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang *bias* kota dan pembangunan pertanian yang memarjinalikan kelompok miskin pedesaan. Oleh karena itu, pada buruh bangunan yang ber-SES rendah di daerah asal cenderung mempunyai alasan tidak ada pekerjaan di daerah asalnya. Sementara itu, selain karena tidak ada pekerjaan, buruh bangunan yang ber-SES tinggi lebih melihat ketidakpuasan atas pekerjaan di daerah asal. Bekerja ikut orang tua di sawah dianggap tidak memiliki pekerjaan.

Ketiga, dari hasil penelitian ini, keberhasilan migrasi ini sebenarnya ditentukan juga oleh intensitas pembelajaran, baik di daerah asal maupun sesudah di Surabaya. Intensitas pembelajaran terhadap pekerjaan di daerah terjadi tatkala mereka beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian di pedesaan, yaitu menjadi buruh bangunan. Di dalam kajian antropologi kognitif, pekerjaan buruh bangunan awalnya tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian, menggunakan alat-alat utama yang sama, seperti pacul dan sekop. Oleh karena itu, bisa dipahami bila Intensitas pembelajaran sebenarnya berbanding terbalik dengan SES buruh bangunan sebelum ke Surabaya.

Keempat, keberhasilan migrasi berpengaruh pada peningkatan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal. Peningkatan status keluarganya ditandai dengan peningkatan luas tanah pertanian yang dimiliki dan kualitas rumahnya. Pada buruh bangunan yang sebelumnya merupakan petani gurem lebih menginvestasikan di sektor pertanian dengan membeli lahan pertanian. Namun demikian, buruh bangunan yang tuna kisma dan bekerja di sektor non-pertanian ini lebih memperbaiki rumahnya.

Terakhir, penelitian ini juga menguatkan anggapan bahwa sektor formal di perkotaan tidak selalu menjadi tujuan dari migrasi. Sektor formal memiliki daya tampung yang terbatas, hal itu berbeda dengan sektor informal seperti buruh bangunan. Pada

kasus buruh bangunan, sepanjang ada kegiatan membangun rumah atau proyek lain, beberapa pun jumlah orangnya dapat tertampung⁸. Sementara itu, masyarakat desa yang melakukan migrasi memiliki kesadaran dan mengukur kemampuannya. Mereka tidak lagi menaruh mimpi-mimpinya, tetapi lebih realitis apa yang bisa dilakukan di daerah tujuan.

Daftar Pustaka

Adiwikarta, Sudardja.

1984 Dampak Irigasi Jatiluhur dan Pola Keluarga Tani. **Prisma**. Th. XIII No. 9.

Ananta, Aris., dan Prijono Tjiptoherjianto.

1985 Sektor Informal: suatu Tinjauan Ekonomis. **Prisma**. Th. XIV. No. 3.

Effendi, Tadjuddin Noer.

1985 Masalah Ketenagakerjaan di Pedesaan dan Strategi Penanganannya. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: CV Rajawali.

Lee, Everett S.

1985 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta; PPK-UGM.

Magenda, Burhan D.

1983 Manusia Kota Besar: Contoh dari Surabaya. **Widyapura**. Th. IV. No. 2.

Mantra, Ida Bagoes.

1985 **Migrasi Penduduk di Indonesia. Suatu Analisis Hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1980**. Yogyakarta: PPK-UGM.

⁸ Lebih menarik lagi, pada situasi krisis ekonomi tahun 1997-2006 ini kecenderungan untuk mendirikan bangunan tidak berkurang, baik melalui proyek *real-estate* maupun rumah pribadi.

Owens, Edgar., dan Robert. Shaw.

- 1983 **Pembangunan Ditinjau Kembali. Menjembatani Gap antara Pemerintah dan Rakyat.** Diterjemahkan oleh A.S. Wan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sjahrir, Kartini.

- 1986 **Tukang-tukang di Jakarta, Suatu Jaringan Kerja.** **Prisma.** Th. XV. No. 9.

Sly, David F., dan J. Michael Wrigley.

- 1985 **Migration Decision Making and Migration Behavior in Rural Kenya.** Dalam James T. Fawcett. **Migration Intentions and Behavior: Third World Perspective, A Special Issues of Population and Enviornment.** New York: Human Science Press,Inc.

Standing, Guy.

- 1987 **Konsep-konsep Mobilitas di Negara sedang Berkembang.** Yogyakarta: PPSK UGM.

Stelle, Ross.

- 1985 **Mobilitas Pekerjaan dan Penghasilan Migran di Surabaya.** Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.

Bab 6

Petani Kota

Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang
Urban

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto,
dan Usman Mulyadi

Pertumbuhan Kota dan Marginalisasi Pertanian, Sebuah Pendahuluan

Kota-kota di Indonesia, khususnya Jawa, tumbuh dan memiliki multi fungsi. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, misalnya memiliki nama *akronim* yang mengikuti namanya, yaitu INDAMARDI, artinya industri, perdagangan, maritim dan pendidikan. Nampaknya, hal ini merupakan pola yang lazim dari pertumbuhan kota-kota di dunia. Kota tumbuh sebagai tahap lanjut dari pedesaan tatkala manusia mengembangkan kemampuannya yang tidak lagi sekedar *food gathering*, tetapi menjadi *food producing*, yaitu bercocok tanam. Revolusi peradaban pertama inilah, pertanian, kemudian menuntut golongan pekerjaan lain di luar pertanian. Golongan pertama adalah mereka yang menjaga kekayaan atau produksi dari pertanian, membentuk pemimpin yang *primus inter pares* dan tentara. Golongan kedua adalah pedagang yang menjual atau menjadi perantara antara petani dan kelompok masyarakat lain. Kedua golongan ini berada di wilayah yang disebut kota dengan bangunan benteng di sekitarnya atau *gilda-gilda* pada abad Pertengahan di Eropa (lihat Sukadana, 1983: 57-74; Nas, 1984: 2-3).

Multi-fungsi ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia. Kota Surabaya awalnya memang merupakan desa (*wanua*) di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha pada masanya, antara lain Kajuruhan, Mataram Hindu, Singhasari dan Majapahit. Karena posisinya berada di pantai, desa ini tidak saja sebagai desa pertanian, tetapi juga tumbuh sebagai pelabuhan (Soekadri, 1996: 5-23). Pada masa selanjutnya, menjadi kota syahbandar (Majapahit, abad 14-15), sekaligus penyebaran agama Islam semasa Sunan Ampel dan penerusnya (lihat Faber, 1931: 5-20), dan terutama sesudah 1870, kebijakan *Liberalisasi Ekonomi* di masa pemerintahan kolonial Belanda, berubah sebagai kota industri dan perdagangan, di samping sebagai pusat pendidikan (Handinoto, 1996: 47-127).

Kota Surabaya ini tumbuh meluas dan menjadikan daerah-daerah sekitarnya sebagai *hinterland*, penyangga. Pertumbuhan ini sebenarnya tidak lain untuk menopang aktivitas perkebunan di wilayah-wilayah pedalaman *Oost Java Provincie* (Jawa Timur). Industri yang dibangun berkaitan dengan kelengkapan peralatan mesin pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan. Memang, sebelumnya telah ada pabrik-pabrik dan fasilitas lain yang lebih ditujukan untuk kebutuhan militer. Kota ini meluas hingga Wonokromo sekarang ini, akan tetapi dari sumber-sumber sejarah, yaitu *Verslag van den Toestand de Stads-gemeente Soerabaja* tahun 1870-1940, masih tercatat sebagian besar orang-orang bumi putera bekerja di sawah. Artinya, pola pemukiman tumbuh mengikuti jalur transportasi, meski bergerak di dalam satu garis lurus, tetapi tiga arah, yaitu ke Gresik (*Greesse*), Mojokerto (*Majakerta*), dan Sidoarjo (*Sidaharja*/*Sidakare*).

Hingga tahun 1970-an, wilayah Sedati, sekitar 20 km dari pusat kota Surabaya dan masuk wilayah Sidoarjo, masih dikenal sebagai daerah *gudang beras*. Selain dipanen dari wilayahnya, beras tersebut dipasok dari wilayah pertanian Surabaya. Melalui program pembangunan lima tahun (PELITA), hampir semua

sawah tersebut memiliki saluran irigasi (teknis) yang mengambil air dari Kali Surabaya (Mas). Pertumbuhan pemukiman, pusat-pusat perdagangan dan industri telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. Meskipun demikian, wilayah pertanian tersebut masih tersisa. Pada tahun 1999, jumlah luas lahan sawah sebesar 2.153 ha, dengan rincian 1.604 ha sawah tadah hujan, 305 ha sawah beririgasi teknis, 153 ha semi teknis dan 91 ha desa (irigasi non PU). Dari wilayah persawahan tersebut, kota ini bisa menerima hasil panen 2.730 ha dengan rata-rata produksi 50,77 kwintal/ha dan jumlah keseluruhan 13.859, produksi yang terkecil dibandingkan wilayah lainnya di Propinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2003: 165-175).

Dengan berbagai sarana pendidikan dan tersedianya lapangan kerja *off-farm* (sektor industri dan perdagangan), keluarga-keluarga petani asli Surabaya ini kemudian beralih ke sektor pekerjaan lain. Tanah sawahnya dijual dan didirikan pemukiman, pusat perdagangan atau industri. Uang ganti itu dikenal dengan istilah *uang landasan*. Karena dalam jumlah besar, sering mereka kemudian menjadi keluarga yang konsumtif. Seperti halnya di Jakarta, meski terjadi mobilitas pekerjaan ke sektor di luar pertanian oleh masyarakat petani asli, namun ternyata sektor pertanian tetap menampung petani-petani (penggarap) di luar Surabaya. Produksi tidak saja beras, melainkan sayur-sayuran hingga tanaman hias.

Meski telah ada penelitian tentang petani kota di Yogyakarta (Setyobudi, 2001), hasil pengamatan awal keadaan kaum tani di Surabaya ini berbeda dengan di Yogyakarta. Bila Setyobudi (2001) mencermati kaum tani yang merupakan penduduk asli Yogyakarta, seperti juga yang diteliti oleh Koentjaraningrat (1976) pada petani buah-buahan di Selatan Jakarta, yaitu kecamatan Pasar Rebo, desa Ciracas dan Cilangkap tahun 1972, maka penelitian ini mencermati *ekspansi* masyarakat petani di luar kota besar (Surabaya), memasuki ruang-ruang yang

kosong, atau mempertahankan lahan sawah pertanian hingga pemiliknya menjual ke investor atau melakukan alih fungsi sawahnya.

Sementara ini, sejumlah ahli kependudukan, khususnya kajian perkotaan, mencermati perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, selain karena faktor-faktor pendorong (*push factor*) di daerah asalnya, seperti sempitnya lapangan pekerjaan, ditambah dengan produk dari kurikulum pendidikan yang *bias kota*, dan faktor-faktor penarik (*pull factor*) di daerah tujuan (kota), seperti lapangan kerja yang terbuka, penuh dengan kemudahan dan kelengkapan sarana kehidupan. Mereka yang pindah dari desa selalu diduga mencari pekerjaan di sektor formal, yaitu di kantor atau pabrik, namun sering tidak disadari sebenarnya telah memiliki pilihan sendiri berdasarkan informasi yang dipunyai.

Menjadi masalah menarik kemudian, ketika mereka pindah ke kota dan tetap mempertahankan pekerjaan lamanya. Persoalannya, di lingkungan pedesaan mata pencaharian, dalam hal ini pertanian, telah membentuk sistem yang mendukung, seperti organisasi kelompok tani, HIPPA (Himpunan Pemakai Air) dan Petugas PPL. Hal ini berbeda dengan lingkungan barunya, jaringan semacam itu tidak ada. Kalau pun ada, fungsinya tidak berjalan lebih maksimal dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan berkaitan dengan kasus ini adalah pola migrasi dan strategi adaptasinya.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil penelitian ⁹ yang dilakukan pada tahun 2004. Lokasi penelitian ini berada di Surabaya,

⁹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

khususnya daerah sekitar Ketintang, Kebonsari dan Karah. Wilayah itu meninggalkan jejak-jejak pertanian pada masa lalu Kota Surabaya. Hal itu ditandai dengan bekas kompleks pabrik beras di Jalan Ketintang, tepatnya persis berada di depan kantor kelurahan. Lahan pertanian ini lambat laun tergerus oleh perumahan.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan perpektif etnografis. Tim peneliti mengamati keseharian para petani kota dan melakukan wawancara yang mendalam. Pengamatan itu terekam dengan baik melalui lensa kamera. Gambar memang tidak terlalu terfokus karena harus mengambil jarak dengan para pelaku. Para pelaku tidak terbiasa bisa diambil dengan jarak yang dekat. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi dari kedalaman hasil penelitian. Langkah berikutnya, hasil pengamatan dan wawancara mendalam direkonstruksi dan dianalisis menjadi satu tema tentang perjuangan kaum urban yang memasuki wilayah kota.

Tidak Ada Rotan, Akar pun Jadi, Tidak Ada Pekerjaan Menjadi Petani Tidak Masalah

Petani Asli dan Petani Migran

Di kota besar, seperti Surabaya, akan mengalami kesulitan bila mencari orang yang pada waktu pagi hari berjalan ke luar rumah dengan membawa cangkul dan satu tangan lainnya membawa *bontotan* (bekal makanan) yang dibungkus kain atau dengan menggunakan *rantang*. Apalagi, bila ia menggunakan *caping*, topi berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Di waktu lain, ia membawa *alat pantun*, yaitu kayu persegi panjang dengan sejumlah besi yang menancap, sehingga berbentuk seperti sikat sepatu. Kayu tersebut dihubungkan dengan gagang yang terbuat dari kayu pula. Alat itu digunakan untuk membersihkan atau

menyiangi *gulma*, tanaman pengganggu. Itulah gambaran seorang petani dan sangat sulit didapati di Surabaya, apalagi di pusat kotanya. Bila ada yang membawa cangkul, lebih pasti mereka bekerja sebagai buruh bangunan atau tukang gali (kabel telpon, pipa PAM atau gas).

Ketika menelusuri wilayah Surabaya Utara, bila dulu masih terdapat sawah yang letaknya berpenjaran (*sporadis*) kini cukup sulit didapati, bahkan nyaris tidak ada, kecuali di daerah Surabaya Barat, seperti Tandes, Balongsari dan Lontar, meskipun dalam jumlah yang kecil. Penelitian Nur Laily Assafitri (2004) menunjukkan bahwa Kelurahan Gadel, salah satu kelurahan dari kecamatan Tandes, bila pada tahun 1993 masih ada 2 orang yang berprofesi sebagai petani dan 10 orang buruh tani, maka pada tahun berikutnya (1994) sudah tidak ada lagi, mereka beralih ke pertukangan. Tanah mereka dijual dan menjadi perumahan. Rumah mereka memang lebih baik dan diisi oleh berbagai benda-benda elektronik, seperti tv dan vcd, dan tak jarang pula memiliki sepeda motor. Namun, mereka tidak lagi menjadi pemilik tanah, kecuali sejenkal tanah untuk rumahnya. Mereka kemudian bekerja sebagai tukang di perumahan tersebut tanpa bisa membelinya. Mereka masih menyisakan tradisi *tegal desa*, sebuah upacara ritual untuk menghormati *danyang* yang melindungi desa dengan sumur *sakral*, sebuah sumur yang berada di desa tersebut. Air sumur tersebut tidak pernah habis, bahkan mampu memenuhi kebutuhan untuk tujuh “desa,” yaitu Lempung, Sambisari, Karangpoh, Tandes, Tubanan dan Balongsari. Karena airnya terus mengalir, meskipun pada musim kemarau, sumur tersebut dianggap mempunyai kekuatan supranatural dan dikeramatkan. Kalau pun ada petani di Kecamatan Tandes, Lontar hingga daerah Lidah dan sekitarnya, jumlah mereka pun juga sangat sedikit. Karena kondisi lingkungan tanahnya yang keras, mereka bercocok tanam dengan cara perladangan dan sawah tadah hujan.



Gambar 6.1
Menunggu padi menguning di tengah perumahan

Baru mendekati Surabaya Timur, daerah Jojoran, Karang Menjangan, Karang Empat, Kaliyudan, hingga Kenjeran, hingga Semampir dan Rungkut, terdapat petani sawah. Jumlah mereka tetap tidak terlalu besar. Mereka tinggal di kampung-kampung lama Surabaya dengan bentuk rumah yang sangat sederhana. Mereka bisa sebagai petani pemilik yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang, ataupun bekerja sebagai buruh tani di tanah yang dulu miliknya atau tanah yang sama, tetapi telah berganti pemilik, hanya menunggu alih fungsi ke perumahan, perkantoran atau pabrik. Bila memperhatikan saluran-saluran air di perumahan hingga ke sungai, maka masih terlihat bahwa saluran tersebut sebenarnya diperuntukan sebagai saluran irigasi. Daerah Surabaya Timur dan perbatasan Kab. Sidoarjo pada tahun 1960-an hingga 1970-an terkenal sebagai wilayah gudang besar, sebutannya adalah *beras Sedati*.

Perumahan dan perkantoran tidak melebar hingga ke pinggir pantai Surabaya Timur hingga ke perbatasan Kab. Sidoarjo karena kesulitan jalur transportasi, meskipun kini lambat laun telah merambat ke wilayah tersebut, seperti Perumahan Wiguna di Rungkut. Pada wilayah tersebut, sering terdapat

kampung-kampung dengan sawah di sekitarnya atau tambak. Kondisi rumahnya tetap sangat sederhana. *“Sekarang Mas, nggak ada orang kaya dari tani. Bila ingin kaya, iya tunggu landasan, setelah itu kerja apa saya tidak tahu,”* begitu perkataan salah seorang petani bila ditanya tentang kondisi ekonominya, bahkan anak-anaknya merasa malu kalau menyebutkan pekerjaan orang tuanya karena petani sama dengan orang miskin.

Kata *landasan* itu merupakan istilah alih fungsi dan alih pemilikan khas komunitas petani di Surabaya dan sekitarnya. Kata itu pertama kali muncul ketika pembangunan atau perluasan bandara Juanda, Kab. Sidoarjo. Pada waktu itu, sejumlah sawah terjual dan dialihfungsikan. Pemiliknya memperoleh ganti rugi dan acapkali digunakan untuk naik haji, membeli motor dan benda-benda konsumtif lainnya. Meskipun setelah itu, mereka jatuh miskin karena tidak mempunyai pekerjaan. Uangnya telah habis, barang-barangnya telah terjual.

Dari semua wilayah tersebut, kemudian tim peneliti mengarahkan perhatian di wilayah Surabaya Selatan. Khususnya, di Kec. Ketintang dan Jambangan. Kedua kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Wonocolo pada tahun 1998. Selain wilayahnya terlalu luas, jumlah penduduk (KK) telah melebihi dari ukuran penduduk per kecamatan di Surabaya, sehingga perlu dipisahkan dari kecamatan induknya. Pertambahan jumlah penduduk ini lebih disebabkan oleh perumahan baru.

Di kedua wilayah tersebut terdapat sejumlah bidang sawah yang kini dalam hitungan hari telah berubah menjadi perumahan, bahkan dalam keadaan padi yang sudah berbuah dan tinggal menunggu panen diurug tanah. Tanah itu dijual baik sebagai tanah kapling yang siap bangun, maupun dijadikan perumahan. Ada sejumlah perumahan, antara lain Ketintang Permai, Karang Agung, Gayungsari dan Palm Spring yang baru berdiri, selebihnya untuk rumah tinggal dan tempat usaha.

Bidang yang pertama berada di lingkungan UNESA, luasnya berkisar antara 2 hingga 3 ha. Sawah tersebut lebih merupakan sawah tadah hujan yang berada di antara sejumlah bangunan, antara lain di belakang Gedung P2B, di sebelah Gedung Perpustakaan dan di depan Gedung MIPA. Sebagai sawah tadah hujan, sawah tersebut ditanami hanya satu kali dalam setahun. Mungkin karena hasilnya kurang dan sering terkena banjir pada waktu paruh musim hujan, kini sering tidak ditanami. Bidang sawah berikutnya berada dekat Ketintang Permai dan Perumahan Gayung Kebonsari. Sawah di depan Perumahan Ketintang Permai kini sebagian telah dibangun perumahan baru perluasan dari Perumahan Ketintang Permai dan perluasan Gedung Depag. Keadaan yang sama terjadi di depan Pasar Karah dan Jawa Pos, sehingga harus bertarung dengan waktu.

Tidak seluruhnya petani yang mengerjakan sawah ini adalah penduduk asli daerah tersebut. Sebagian besar merupakan petani migran. Asal mereka bervariasi mulai dari daerah Pantai Utara, yaitu Lamongan dan Bojonegoro, daerah *Surabaya/Arek* (Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang), dan daerah Mataraman (Tulungagung dan Nganjuk). Ada di antara mereka yang sudah menetap di Surabaya lebih dari 10 tahun, namun ada pula yang kurang dari 10 tahun, antara 2 hingga 5 tahun. Mereka tidak memiliki rumah sendiri. Mereka mengontrak rumah yang sederhana, meskipun atapnya sudah genting, tetapi dindingnya separuh dari tembok, di atasnya *gedeg* (bambu). Lantainya semen atau tegel yang lama. Air minumannya berasal dari sumur.

“Kami tidak bisa mengontrak rumah yang bagus. Harganya terlalu mahal, bisa di atas dua juta. Apalagi kalau ada air PAM, Listrik dan telpon. Untuk apa? Kami cukup mandi dengan air sumur. Listrik seadanya. Telpon, ah telpon siapa. Kalau mau, ya ke wartel. Yang penting tidak kehabisan, tidak kepanasan. Bisa tidur. Harganya murah. Bisa nabung. Buat apa kita ke Surabaya, kalau tidak membawa kaya.”

Sebagian lainnya tinggal di sawahnya. Mereka membangun gubuk dari bambu. Ukuran 2 x 2 m atau 3 x 3 m. Di dalamnya terdapat dipan untuk tidur, lemari atau kardus tempat pakaian, rak piring, peralatan masak dan makan, serta kompor. Di daerah Jambangan dan Ketintang, jumlah ini memang sedikit, karena memilih *mengontrak* di tanah PJKa yang terbilang murah, tetapi di daerah Pagesangan dan Gayungan (Kebonsari dan Menanggal), yaitu dekat Mesjid Agung, jumlahnya lebih besar daripada mereka yang mengontrak, terutama pada waktu musim kemarau, yaitu menanam *blewah* dan *timun mas*.

“...Kami memilih membangun gubuk di sini. Selain dekat dengan lahan kami, ongkosnya pun jauh lebih murah. Gedeg ini gedeg bekas. Untuk air minum, kita gali sumur. Air sumur ini tidak saja untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk menyirami tanaman. Tanaman ini tidak memerlukan air. Hanya dua kali sehari saja disirami, pagi dan sore hari. Dan, tidak perlu sampai kecembeng (tergenang, pen.).”

Umur petani dan buruh tani yang termuda adalah 35 tahun, yaitu Pak Urip dan Pak Sumaji, sedangkan tertua adalah Pak Supardi (60 tahun). Pendidikan mereka yang paling ditemukan oleh tim peneliti adalah SMP, namun sebagian besar adalah lulusan SD. Artinya, mereka sudah tidak buta huruf lagi. Bila memperhatikan tingkatan pendidikannya, apabila tidak kendala kultural, maka mereka bisa tergolong dari kelompok miskin pedesaan.

Pekerjaan mereka tidak berbeda dengan di tempat asalnya. Mereka merupakan keluarga petani dan buruh tani. Tanah mereka sempit, bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Pada pola migrasi sebelumnya, ada sebagian yang mengakui bahwa bila pekerjaan buruh tani di desa telah usai, maka mereka berpindah ke desa dan kota lain. Mereka berangkat bersama-sama, bisa pula secara sendiri. Kemudian, setelah mempunyai modal dan jaringan

sosial di kota, ada yang sebelumnya menyewa tanah sawah di kota, mereka berangkat ke Surabaya. Oleh karenanya, tempat asalnya tidak berjauhan di kota asalnya, setidaknya-tidaknya satu kecamatan dan memiliki hubungan emosional, baik sebagai kerabat, teman atau lainnya.

Pola yang demikian ini merupakan konsekuensi dari revolusi hijau dan biru. Di dalam perkembangan teknologi pertanian, bibit unggul dan teknologi pengolahan pertanian mengakibatkan penanaman padi secara relatif serempak. Hasilnya, buruh tani dan petani pemilik lahan sempit – kurang dari 0,25 ha – baik wanita maupun laki-laki tidak bisa berkerja di beberapa lahan sawah yang ada di desanya. Wanita buruh tani hanya bekerja pada waktu musim tanam, tetapi sesudah panen mereka tidak bisa lagi turut *menumbuk* padi, pemilik lahan lebih cenderung menggunakan *buller*, dan kini bahkan terdapat *buller* yang kecil yang dengan mesinnya bisa bergerak dari rumah ke rumah. Akhirnya, mereka memilih bekerja ke luar desa dengan pola pekerjaan yang sama atau relatif sama, perpindahan ke sektor non-pertanian mereka tidak secara progresif seperti pemilik lahan luas yang memiliki modal besar dari sektor pertaniannya (Wiradi, 1985: 40-48; kutip dari Sinaga dan White, 1979; Wiradi dan Makali, 1983; serta Collier dan Birowo, 1973).

Terjadinya pemilikan tanah sempit dan perumitan dalam proses pengolahan lahan ini bisa dijelaskan dalam teori *invulsi pertanian* dari Clifford Geertz (1983). Namun, perpindahan ke sektor *off-farm* dan kemudian melakukan migrasi ke kota (urbanisasi) merupakan dampak dari revolusi hijau dan revolusi biru yang merembet pada komersialisasi pertanian dan berlanjut pada runtuhnya hubungan patron-klien. Petani lahan sempit dan buruh tani (*tuna kisma*) tidak mendapat jaminan ekonomi dari pemilik tanah luas yang cenderung memperhitungan untung dan rugi. Sikap pemilik tanah luas ini terjadi karena biaya produksi padi meningkat.



Gambar 6.2.
Menjemur “gabah” di fasilitas umum

Kasus yang menarik lainnya adalah Pak Supri. Ia berusia 48 tahun, berasal dari Kab. Tulungagung. Di desanya ia bekerja sebagai pencari marmer. Artinya, desa asalnya berada dalam lingkungan yang tandus, yaitu di lereng Pegunungan Kendeng Selatan, sebuah pegunungan kapur. Pekerjaan tersebut begitu keras, ia tidak sanggup karena usianya semakin tua dan tenaganya semakin berkurang. Keadaan ini diperparah oleh kebutuhan marmer yang berkurang pada masa krisis moneter, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Fenomena ini sangat menarik karena dari sektor non pertanian di pedesaan ke sektor pertanian di perkotaan, padahal menurut Wiradi (1985) bahwa kecenderungan dimulai dari sektor non-pertanian di desa kemudian berlanjut ke sektor non-pertanian di kota. Apa yang dikatakannya, *“Meski sebagai buruh pencari marmer, di desa saya juga punya kebun yang saya tanami ketela dan jagung. Bertani sawah memang*

bal baru, tapi pekerjaan iya seperti itu saja. Saya juga tidak mengerjakan sendiri, tetapi ada penggarap yang saya upah setiap kali ada pekerjaan di sawah.”

Tabel 6.1.
Tempat Asal dan Tempat Tinggal Informan di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Kebonsari	Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro Kab. Mojokerto
Karakteristik Desa	Eks Desa Pertanian	Pertanian Perladangan dan Non-Pertanian
Tempat Tinggal	Milik Sendiri	Kontrak/Kost Di Gubuk Sawah

Penduduk asli Surabaya yang menjadi petani/buruh tani sangat sedikit. Seperti yang telah disebutkan, dari sejak dulu mereka juga berasal dari keluarga petani *gurem* atau buruh tani. Ketika lingkungan sekitarnya berubah, karena kondisi strukturalnya, yaitu tingkat pendidikannya yang rendah, mereka tidak mampu mengakses sektor ekonomi di luar pertanian. *“Iya, bagaimana lagi bisanya jadi buruh, kalau panen yang buruh tani, di hari lain buruh bangunan atau tukang becak. Sawah yang saya kerjakan ini sudah dua kali ganti pemilik. Sekarang, pemiliknya orang Sidoarjo.”*

Pola Penguasaan dan Pengolahan Lahan

Ada beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam kebijakan pertanian. Hasil pertanian berhubungan dengan kebutuh-

an masyarakat. Di dalam kebijakan skala makro ini, kemudian memunculkan target pencapaian. Di masa pemerintahan Orde Baru, berkembang wacana tentang *swasembada* beras, dan seterusnya. Artinya, mengurangi impor hasil bumi dalam kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, ada dua strategi yang dikembangkan waktu itu, sejak tahun 1970-an, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi lahan dilakukan dengan memasukkan unsur bibit unggul yang menaikkan produksi, dan penggunaan *pestisida* sebagai pembasmi penyakit dan hama lainnya, dan terakhir adalah pemanfaatan teknologi pertanian (mesin) yang membantu petani untuk melakukan percepatan pengolahan tanah dan hasil panen. Penggunaan pupuk buatan dilakukan karena intensifikasi lahan mengakibatkan tanah tidak mampu menghasilkan zat hara yang berguna bagi tanaman, sementara itu penggunaan *pestisida* merupakan konsekuensi dari bibit unggul yang tidak tahan penyakit (perhatikan Ismawan, 1985: 18-19). Program tersebut pada masa itu dikenal dengan program *Bimas* dengan *Panca Usaha Tani*, dimulai dari penanaman bibit unggul PB 5 dan PB 8, dan kemudian berlanjut hingga IR 64 (Mubyarto, 1991: 6-8). Karena program tersebut, pada awal tahun 1990-an Suharto memperoleh penghargaan dari FAO sebagai negara yang swasembada pangan (beras).

Setelah itu, hasil pertanian mengalami titik balik. Kebutuhan beras semakin meningkat dan tidak bisa dipenuhi dengan produksi lokal hingga menjelang terakhir masa pemerintahan Suharto perluasan penanaman (*ekstensifikasi*) padi di Kalimantan dengan program satu hektar lahan gambut. Kebijakan ini diambil sebagai pengganti dari lahan sawah terus berkurang di Jawa dan Sumatera akibat alih fungsi ke non-pertanian.

Selain perluasan lahan, pemerintah menempuh kebijakan diversifikasi tanaman. Pertama, hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman hama akibat penanaman padi yang terus menerus (tiga kali dalam setahun). Kedua, dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan padi. Pada kenyataannya dengan hasil produksi padi yang berlimpah mengakibatkan nilai tukar beras menurun, kesejahteraan petani tidak terjamin. Pemerintah juga mencoba menentukan standar nilai jual padi dan melakukan terus melakukan pembelian padi, terutama pada musim, oleh Bulog/Dolog dalam rangka menstabilkan harga.

Lebih penting dari kebijakan pertanian tersebut adalah kesejahteraan petani. Selain diukur dari nilai tukar beras terhadap harga *barang konsumsi* yang dibeli petani dan juga nilai tukarnya dengan harga *sarana* produksi (Mubyarto, 1991: 2), diperhatikan pula pola penguasaan tanah. Seberapa besar perubahan pemilikan tanah, di wilayah pedesaan dari tahun 1970-an hingga 1990-an telah terjadi perubahan pemilikan, yaitu polarisasi tanah, jumlah petani gurem (di bawah 0,25 ha) semakin berkurang bergeser menjadi buruh tani, sebaliknya jumlah petani pemilik lahan luas (di atas satu ha) tidak bertambah, tetapi tanah yang dikuasainya bertambah luas dan ditambah pelaku baru yang dikenal dengan *petani absentee* atau *petani berdasi*. Hal ini terjadi bahwa akibat revolusi hijau, biaya produksi pertanian meningkat – diperlukan tanah di atas 0,25 ha agar mencapai titik impas (*break event point*) antara biaya produksi dan hasilnya – akibatnya petani gurem tersebut menjual lahan miliknya, dan memilih menjadi petani penggarap dengan pola penyakapan yang tidak menguntungkan atau menjadi buruh tani yang bekerja pada waktu proses produksi, selebihnya bekerja di luar sektor non-pertanian. Hal ini terlihat pada temuan Mubyarto (1991: 3) bahwa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, dan peningkatan di sektor industri dan jasa antara tahun 1960 hingga 1988.

Petani penggarap dan buruh tani yang ditemui dalam penelitian tidak berbeda jauh dari penggambaran Mubyarto (1991) dan Gunawan Wiradi (1985), meskipun beberapa di antaranya menolak asumsi bahwa peralihan ke sektor pertanian di perkotaan ini merupakan kegagalan mereka dalam memasuki

sektor formal (industri dan birokrasi) (lihat Todaro dan Stilkind, 1991: 4-33). Seperti yang dikatakan oleh mereka, *"Wong saya ini pendidikan hanya SD. Mau jadi apa di kantor, paling-paling pesuruh. Pesuruh pun sekarang banyak yang lulusan SMA, Mas!"* Mereka realitis dan ingin bekerja apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya.

Tabel 6.2.
Tempat Tinggal Pemilik di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Ketintang dan Jambangan 1. Universitas Negeri Surabaya; 2. PJKK – Kereta Api; 3. Real Estat/ Perumahan; 4. Perseorangan.	Kab. Sidoarjo Perseorangan
Harga Sewa	1. Tidak Membayar 2. Rp. 600.000,00	Rp 600.000,00

Sebagian besar dari informan ini mengerjakan sawah dengan menyewa. Sebidang tanah, dengan luas kurang lebih 0,5 ha, mereka sewa seharga Rp 600.000,00. Mereka menyewa dua tahun lamanya, hal itu berarti kurang lebih enam kali panen padi untuk wilayah Ketintang, Jambangan dan Gayung Kebonsari. Wilayah tersebut merupakan sawah beririgasi, tetapi pada sawah tadah hujan, seperti di Menanggal, empat kali panen dan dua kali panen buah, yaitu blewah dan timun mas. Sebagian besar pemilik tanahnya tidak tinggal di kelurahan atau kecamatan tersebut, tetapi tinggal di luar Surabaya.

Untuk perumahan, selain dikenakan biaya sewa – melalui perjanjian ataupun secara lisan – mereka harus bersedia merela-

kan tanamannya diurug bila *real-estat* tersebut memerlukan lahan tersebut untuk dibangun. Kini, hampir separuh lebih daerah Jambangan, sebelah jalan tol, telah diurug, dibangun oleh perumahan (*real-estat*), seperti *Palm Spring Estat* dan KPR Mandiri, serta penjualan tanah kapling dengan fasilitas jalan yang telah dibuat dan lahan yang diurug. Tim peneliti melihat bagaimana tanaman padi yang mulai menguning tersebut diurug. Begitu pula dengan Unesa, kesepakatan yang sama dilakukan juga pada petani penggarap.

Tabel 6.3.
 Status Pekerjaan Sebelum dan Sesudah dalam Pertanian
 di Surabaya

Di Desa Asal	Buruh Tani	Petani Penggarap	Petani Gurem	Non- Pertanian	Pola Hubungan
Di Surabaya					
Buruh Tani	Surabaya & Luar Surabaya	↓	↓	↓	Upah Harian
Petani Penggarap	Luar Surabaya	Surabaya & Luar Surabaya	Luar Surabaya	Luar Surabaya	Bagi Hasil atau Menyewa
Pola Hubungan	Upah Harian	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	

Tidak semuanya harus menyewa, *PJKA* tidak menetapkan harga sewa pada petani penggarap. Bila ingin menanaminya, mereka gratis, tidak perlu membayar sewa, meski ada ketentuan tidak boleh mendirikan bangunan apapun. Nampaknya, ada kebijakan dari pihak *PJKA*, daripada didirikan bangunan liar yang nantinya susah dibongkar, lebih baik tanah di sekitar rel kereta api

itu dijadikan lahan pertanian. Selain ketentuan tersebut, yaitu tidak mendirikan bangunan permanen, petani penggarap harus bersedia merelakan tanaman bila lahan tersebut diperlukan. Hal ini pernah dilakukan petugas PJKA di Gayung Kebonsari dengan cara melakukan penebangan pada tanaman pisang ketika tanaman tersebut menghalangi pandangan penjaga pintu dan masinis kereta api.

Struktur penguasaan tanah di perkotaan memang berbeda dengan di desa. Di kota, tidak ada lagi golongan tuan tanah yang memiliki tanah ratusan hektar, tidak ada petani kaya yang memiliki tanah di atas 5 hingga 10 ha, seperti pembagian Kroef (1984: 162-163), karena sebagian besar adalah pendatang akibat perluasan kota dalam fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan perniagaan, sehingga berkurang penggunaan lahan untuk pertanian (Weber, 1977: 11-23). Akibatnya, tidak ada lagi penduduk inti (*gogol*) yang memiliki tanah luas, sebagai konsekuensinya “pemilik”-nya adalah perusahaan negara, lembaga-lembaga negara dan perusahaan swasta atau perumahan.

Bila tidak sebagai penyewa, hubungan kerja antara petani penggarap tersebut dan pemilik lahannya adalah penyakapan, yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil di wilayah yang diteliti adalah *maro*, *mertelu* dan *merlima*. Di dalam *maro*, masing-masing memperoleh sebagian yang dari hasil panen, sedangkan dalam *mertelu*, petani penggarap memperoleh sepertiga bagian, dan pemilik lahan dua pertiga, sedangkan *merlima* disepakati dengan *seperlima* bagian milik petani penggarap dan empat bagian lainnya diberikan pada pemilik lahan. Kesepakatan ini bergantung pada luas tanah tersebut dan keterlibatan pemilik lahan. Semakin tanahnya luas, maka bagi hasil menjadi *merlima*, begitu sebaliknya semakin sempit maka bagi hasilnya *mertelu*. Bila hasil bagi lebih besar pada pemilik, maka pemilik mempunyai kewajiban pengadaan pupuk, pestisida, dan sering kali bibit, sebaliknya semakin kecil penerimaan pemilik, maka segala kebutuhan pertanian ditanggung

petani penggarap, begitu pula dengan kerugian akibat gagal panen. *“Wah, kami di sini lebih suka sistem menyewa daripada bagi hasil. Kalau bagi hasil, selama ini kami tidak pernah untung. Kami sering menanggung segala keperluan pertanian. Pemiliknya tinggal datang pada waktu panen. Mendingan sewa. Untung rugi kita tanggung sendiri. Dan, biasanya lebih untung.”* Oleh karenanya, seperti yang telah disebutkan, sebagian besar petani memilih menyewa daripada bagi hasil.

Di dalam menggarap sawah, mereka tidak sendiri. Sebelum bercocok tanam, mereka menyewa traktor milik orang di Sepanjang – di wilayah tersebut, meski sudah mulai bergesar, tetapi sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian penduduk. Selain karena cepat, dan bila dihitung ongkosnya penggunaan traktor jauh lebih murah.

“...Bila dikerjakan buruh tani, satu bidang memerlukan tiga hingga empat orang. Satu harinya orang dibayar duapuluh lima ribu rupiah, belum lagi sarapan dan makan siang dan ditambah dengan satu bungkus rokok. Dengan traktor, cukup membayar seratus ribu. Uang itu sudah termasuk solar dan makannya. Dengan buruh tani, sawah dikerjakan selama dua hari, dengan traktor cukup sehari.”

Meskipun demikian, tidak semuanya bisa dikerjakan oleh traktor. Dalam memperbaiki saluran air dan pematang sawah, petani penggarap harus turun tangan sendiri. Kegiatan dimulai pagi hari sekitar pukul 07.00, sesudah sarapan (makan pagi) petani keluar rumah dengan menenteng bekal makan siang dalam kantong plastik. *Tas kresek* tersebut berisi *rantang* yang dibungkus dengan *serbet* dan botol *aqua* untuk air putih. Ada nasi dan lauk pauk di dalam *rantang*. Sering pula bekal tersebut dibawa oleh isteri pada waktu siang. Sementara itu, cangkul ada di pundak. Dengan jalan kaki, petani tersebut ke sawah. Tak jarang, petani juga membawa sepeda atau sepeda motor *bebek*. Kalau membawa kendaraan, *tas kresek* ditaruh pada sepeda motor, sedangkan cangkul dibawa melintang di sepeda motor. Sebagian sepeda

motor itu dibawa dari desa asalnya, sebagian lainnya membeli di Surabaya. Mereka membeli sepeda motor yang murah, tidak lebih dari tiga juta rupiah harganya. Sesampainya di sawah, setelah istirahat sebentar, mereka turun ke sawah, mencangkul, dan seterusnya seperti yang ada pada tabel 5.4.

Pada waktu menjelang panen, mereka menjaga sawahnya. Caranya membuat *orang-orangan*, kemudian ditarik tali ke gubuknya. Di tali tersebut diberi bendera warna-warni dari *tas kresek* (merah, hitam dan putih) dan kaleng. Ketika burung *gelatik* yang jumlahnya ratusan hingga di tanamannya, ia dengan segera menarik tali itu, sehingga menimbulkan gerak *orang-orangan* dan bunyi dari kaleng yang saling berbenturan. Terkadang, para petani tersebut berjalan di pinggir sawah dengan membawa kayu dan tanah (*lempung*) yang dibuat berbentuk bulat-bulat. Dengan menancapkan tanah itu ke ujung kayu, petani tersebut kemudian mengayunkan, sehingga tanah terlempar jauh ke sawah dan membuat burung terkejut dan terbang.

Ketika tanaman padi sudah berusia lebih dari tiga bulan, bulir-bulir telah menguning dan padat, para petani mulai memanennya. Untuk mengerjakan tersebut, mereka menggunakan buruh tani laki-laki. Setelah disabit, padi langsung dirontokkan di tempat tersebut. Gabah biasanya telah dibeli oleh tengkulak jauh hari sebelum panen tiba, namun petani sering menjualnya sebagian saja, sebagian yang lain digunakan untuk keperluan sehari-hari. Satu kilogram gabah harganya Rp. 1.050,00, sebidang tanah kurang lebih setengah hingga satu hektar bisa mencapai 2 ton, paling rendah pernah mencapai 17 kwintal saja.

Tabel 6.4.
Kegiatan Petani Penggarap Laki-laki dari Pra-Tanam hingga Paska Panen Padi
Di Surabaya

Pekerjaan Petani	Kegiatan dalam Satu Kali Masa Tanam-Panen (4 bulan)				
	Pra-Tanam	Tanam	Tunggu	Panen	Paska Panen
07.00–08.00	ke sawah	ke sawah	ke sawah	ke sawah	Di rumah, mengeluarkan karung gabah
09.00–10.00			Menyiangi	Sebelum panen di gubuk mengusir burung.	Ke lapangan atau jalan dekat sawah
08.00–12.00	Mencangkul orang men-traktor	Menunggu buruh tani (Wanita) menanam	Narik becak/ke warung (bersama isteri)	Waktu panen menunggu buruh tani menyabit	Menjemur gabah; Nyelep, dan mengumpulkan jerami
12.00–13.00	Makan siang di sawah. Bersama dengan pengemudi traktor, dan buruh tani		Pulang ke rumah untuk makan	Makan siang di sawah. bersama buruh tani.	
13.00–14.00	Istirahat sebentar. tidur siang dan merokok	Tidur siang di gubuk	Tidur siang di rumah/ warung	Mengusir burung.	Tidur Siang
14.00–17.00	Mencangkul atau menunggu traktor	Pulang ke rumah, Narik becak atau ke warung	Narik Becak atau ke Warung	Memasukan padi ke dlm karung. Menunggu Tengkulak	Membalik gabah agar keringnya merata Membakar jerami
17.00–20.00	Membayar	Membayar buruh tani. Menutup warung. Menunggu penumpang	Mandi, dan terus Narik becak atau ke Warung	Menghitung jumlah karung gabah, Menerima uang, atau menyimpan dalam rumah.	Memasukkan gabah ke dalam karung.
20.00–04.00	Makan Malam dan Tidur	ke rumah, makan malam dan tidur	Makan malam, nonton TV (bila ada) dan tidur		

Besar kecilnya hasil panen tersebut bergantung pada beberapa hal. Pertama, penggunaan bibit unggul. Sebagian besar mereka menggunakan IR 64 atau *Beramo* (*Mamberamo*) yang berasnya punel dan wangi. Hasilnya besar, namun sering tidak tahan penyakit. Kedua, hal ini bergantung pada pemupukan, bila terlambat atau sedikit, maka hasilnya pun sedikit. Untuk pupuknya, mereka menggunakan pupuk urea. Ketiga, penyakit dan hama, untuk mencegah penyakit mereka memberi pestisida, sedangkan hama, khususnya burung dan tikus, kalau burung dengan menjaga setiap hari sebelum panen. Serangan tikus tidak terlalu besar, seperti di desa. Tikus-tikus itu lebih suka tinggal di got dan di rumah (perumahan). Untuk mencegahnya, mereka memberi racun tikus. Terakhir, gangguan yang sering dihadapi adalah musim hujan. Pada waktu musim hujan, karena salurannya sudah berubah, semakin sempit, sementara itu di daerah sekitarnya (perumahan) lebih tinggi – tepat ditinggikan – sawah sering menjadi *tempat buangan* air hujan, sehingga menggenangi tanaman yang baru berusia satu bulan. Bila tergenang lebih dari tiga hari, maka tanaman itu mati, dan petani pun harus menanam lagi.

Narik Becak atau Buka Warung untuk Mencari Tambahan

Berbeda dengan pekerjaan di luar sektor pertanian, petani lebih memiliki waktu yang longgar. Mereka bekerja pada waktu awal musim tanam, mulai dari merawat tanah dengan membajak, melakukan pembibitan, dan dilanjutkan dengan penanaman. Pada waktu menanam bibit, kaum perempuan melakukannya. Para lelaki praktis *ngganggu*, cukup mengawasi dan memperhatikan pasokan air. Setelah penanaman, mereka cukup merawat dengan memberi pupuk dan menyiangi (*mantun*) yang dikerjakan. Hal itu berlangsung tidak lebih dari sebulan, setelah itu istirahat, dan pada bulan ketiga mulai persiapan masa panen. Pada waktu musim

panen, mereka mengerjakan seperti dalam tabel 4.4. Pekerjaan semua ini menjadi ringan dan waktu petani penggarap lebih banyak ketika mereka menyerahkan pada buruh tani dan traktor.

Setelah musim tanam, sebenarnya petani juga bisa memanfaatkan untuk mengeringkan gabah, sehingga siap di-*selep*. Masalahnya, kini sebagian besar gabah telah dijual pada waktu panen, hanya sedikit yang dikeringkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga waktu pengolahan hasil panen sedikit menyita waktu. Pada waktu masa tunggu, petani memiliki waktu yang luang, kurang lebih antara satu hingga dua bulan lamanya.

Ada beberapa petani penggarap di Surabaya ini menggunakan waktu tersebut untuk mengurus sawah miliknya di desa. Mereka biasanya merupakan petani *gurem* yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar. *“Kami terpaksa ke Surabaya karena di desa tidak ada lagi sawah yang disewakan. Mereka lebih memilih mengerjakan sendiri. Kalau di sini banyak tanah, tetapi kban tidak ada yang mau jadi petani. Karena itulah, kami memilih menyewa di sini.”* Bila sawah di Surabaya telah ditanami, selebihnya diserahkan pada anak atau istrinya untuk mengawasi, mereka kembali ke desa untuk mengolah tanahnya dan menanaminya, kemudian diserahkan pada anaknya yang lain atau kerabatnya untuk diawasi. Karena jaraknya tidak jauh, mereka bisa bolak-balik antara Surabaya dan daerah asalnya.

Seperti yang telah disebutkan pada tabel 5.4., petani penggarap yang tidak punya sawah di desanya atau buruh tani lebih memilih mengisi waktunya untuk menjadi penarik becak atau masuk ke sektor bangunan, menjadi kuli bangunan di perumahan sekitar sawahnya. Becak tersebut disewa dari pemilik di sekitar tempat tinggalnya dan bisa dibawa pulang. Becak itu disewa dengan membayar setiap hari Rp. 5.000,00 dan segala kerusakan ditanggung penyewa. Mereka bisa menyewa karena ada penghubung yang juga penarik becak. Penghubung tersebut menjadi jaminan atau dasar kepercayaan dari pemilik becak, selain

dilihat pula *keajegan* membayar setoran. Penghubung tersebut adalah tetangganya di Surabaya atau teman sekampungnya (di daerah asalnya). Ada beberapa petani juga membeli becak tersebut seharga satu juta rupiah. Rute mereka antara Pasar Wonokromo hingga ke perumahan sekitar tempat tinggalnya, seperti Gayung Kebonsari, Jambangan dan Ketintang. Satu hari, dari pagi hingga malam hari, dengan istirahat siang hari dan sore hari, mereka bisa mengumpulkan uang (bersih) hingga Rp. 30.000,00.

Pagi hari mereka keluar rumah, menunggu penumpang di perempatan jalan. Memang, mereka harus bersaing dengan *len*, *mikrolet angkutan kota*. Meskipun demikian, mereka nampaknya memiliki segmen tersendiri, biasanya penumpangnya membawa barang yang besar dan berat atau jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 1-3 km dari tempatnya mangkal, sementara itu juga tidak dilalui oleh mikrolet. Bila di perempatan tempat mangkalnya terdapat jumlah penarik becak yang besar, maka diatur di kalangan penarik tersebut secara bergiliran, bahkan mereka membentuk paguyuban penarik becak dan membatasi jumlahnya agar pendapatan stabil. *“Memang rezeki itu yang ngatur Tuhan. Tapi, kalau tidak punya paguyuban, Kalau tidak begitu, semua ingin jadi penarik becak. Padahal jumlah penumpang tetap.*

Beberapa di antara petani penggarap yang membawa keluarga, khususnya isterinya ke Surabaya dan sedikit modal, membuka warung di sekitar sawah. Warung tersebut didirikan dengan tidak secara permanen, hanya memerlukan *rombong* dengan biaya seharga satu juta rupiah bila baru, atau lima ratus ribu rupiah dengan bahan bekas. Harga tersebut tidak termasuk ongkos kerjanya – *rombong* tersebut dibuat sendiri. *Rombong* itu merupakan kotak besar dengan dua atau tiga roda di bawahnya, sehingga bisa dipindahkan. Di atasnya *rombong* itu diberi empat tonggak untuk menahan *terpal* atau *plastik* sebagai penutup dari panas matahari dan hujan. Di dalam *rombong*, terdapat rongga

kosong untuk barang-barang dan ditutup dengan papan yang dikunci dengan *gembok*.

Malam hari biasanya petani penggarap membawa sepeda motor atau becak berbelanja di Pasar Keputran atau Pasar Wonokromo. Karena berjualan makanan, mereka berbelanja sayuran dan daging, sedangkan rokok bisa diambil pada toko-toko besar dengan harga miring. Jumlah rokok yang dibelinya pun sedikit, hanya cukup untuk satu minggu. Pada waktu subuh isterinya bangun dan menanak nasi, merebus sayuran, biasanya pagi hari menu makanan yang mudah dibuat adalah *pecel*, sedangkan *peyek* sudah dibuat sebelumnya atau diganti dengan *krupuk* putih. Selain *pecel*, biasanya mereka membuat rawon atau masakan Jawa lain yang mudah diolah.

Sekitar jam 6.30 pagi, masakan telah matang, peani penggarap dan isterinya telah *sarapan*, kemudian dengan becak makanan tersebut diangkut, biasanya *rombong*, terutama bila besar, ditinggal di pinggir jalan, sedangkan perlengkapan dibawa pulang. Sekitar jam 7 pagi warungnya sudah buka, pelanggannya biasanya adalah buruh bangunan yang mengerjakan di perumahan. Buruh tersebut biasanya membuat nasi sendiri, tetapi sering pula makan di warung, terlebih lagi bila siang hari (*laut*). Selain buruh, pembelinya juga orang-orang perumahan yang tidak sempat membuat sarapan pagi, dan orang yang melewati jalan tersebut (baik berangkat kerja ke kantor atau pada waktu pulang).

Pulang Kampung Membawa Uang dan Harga Diri

Seperti yang disebutkan pada bagian awal bab ini, selain dari Surabaya, mereka berasal dari kota-kota di sekitar Surabaya, seperti daerah Pantura (Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan), ada pula yang berasal dari Jawa Pedalaman (Kab. Nganjuk dan Kab. Tulungagung). Jarak antara kota-kota tersebut dan Surabaya tidak lebih dari 200 km. Seperti halnya di kota-kota besar lainnya,

arus transportasi umum dari dan ke Surabaya hampir tidak pernah berhenti. Terminal bus Surabaya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo untuk bagian Timur dan Jawa Pedalaman, yaitu di Terminal *Bungurasih* (Purabaya), sedangkan kendaraan umum dari kota-kota Pantura di sebelah kota Surabaya berhenti terakhir di Terminal Osowilangun. Dari Terminal Osowilangun, terdapat bis kota lewat jalan tol ke Terminal Bungurasih, akan tetapi pada waktu malam hari (lebih dari pukul 18.00) kendaraan umum tersebut, dalam hal ini bis langsung ke Terminal Bungurasih, karena tidak ada kendaraan yang masuk ke Surabaya dari terminal tersebut.

Oleh karenanya, kebutuhan mereka untuk pulang kampung sudah tidak menjadi kendala. Beberapa pun orang yang akan menempuh perjalanan ke luar Surabaya akan dilayani dalam Terminal Bungurasih. Namun demikian, pada waktu menjelang hari raya calon penumpang akan berdesak-desakan dan berebut kendaraan (bis) ke tempat asalnya. Jalan-jalan ke luar kota pun menjadi padat. Biasanya, pemudik menyiasati pulang pada waktu hari H, pasti Terminal Bungurasih akan nampak lengang. Kota-kota daerah asal dari petani penggarap ini bisa ditempuh dalam waktu 3 jam pada siang hari dan 2 – 2,5 pada waktu pagi hari. Kecuali ke Bojonegoro, kendaraan umum (bis) selalu ada. Kendaraan ke Bojonegoro hanya terbatas dari pagi hari hingga pukul tujuh malam.

Beberapa petani penggarap yang memiliki sawah di daerah asalnya masih memiliki ikatan yang kuat dengan daerahnya. Mereka kembali ke daerah asal tidak tergantung pada waktu hari raya. Keharusan kembali pada waktu hari raya memang merupakan tradisi budaya petani. Menurut Eric Wolf (1985), tradisi ini mengikat kembali hubungan antar individu, antara individu dan keluarga, antar keluarga, dalam pola interaksi kemasyarakatan. Ketidakhadiran individu akibat perpindahan ke kota mengurangi interaksinya dengan masyarakat se-desanya, renggang dan perlu

diikat kembali. Hal yang sama dicermati oleh Clifford Geertz (1989), ikatan hubungan itu tidak saja kepada saudara dan tetangganya yang masih hidup, tetapi juga kepada leluhurnya yang dimulai pada waktu menjelang puasa, yaitu *nyadran*. Dalam aktivitas membersihkan kubur ini, seluruh jaringan kekerabatan *alur waris* tersambung kembali. Sementara itu, *rijaya* bukan sekedar *idul fitri*, perayaan satu syawal sebagai tanda berakhirnya bulan puasa dan kembali ke *fitrah*-nya, tetapi sebagai *slametan urip*, ucapan syukur atas keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga. Semua individu didamaikan, direkat kembali sebagai komunitas petani yang telah bergeser.

Kewajiban-kewajiban sosial inilah masih melekat, meski mereka telah berpindah ke kota sekalipun. Namun, pada kasus ini sebagian petani penggarap yang didesanya sebagai petani gurem memiliki ikatan yang lebih kuat karena tanah yang dimilikinya. Tanah tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan pada kerabatnya, anak, isteri atau tetangganya untuk dikerjakan, tetapi setelah habis tanam di Surabaya ia pergi ke desa untuk mengolah tanah dan menanam padi di lahannya. Hal itu bisa berlangsung selama satu minggu lamanya, sementara itu lahan di Surabaya akan dijaga oleh buruh tani, sesama petani penggarap se-desa atau isteri dan anak-anaknya.

Pada waktu pulang ke desa dalam keperluan ini, mereka membawa uang secukupnya dan sedikit oleh-oleh untuk kerabatnya. Ketika kembali ke Surabaya, sering pula mereka membawa hasil bumi dari desanya, seperti kelapa dan beras. Berbeda pula pada waktu hari raya, mereka akan membawa uang dan oleh-oleh yang jauh lebih banyak. Di luar uang tranpor, uang saku mereka bisa mencapai di atas satu juta rupiah (informan enggan menyebut besar riil nilai uang tersebut).

Karena biasanya kembali ke Surabaya seminggu setelah lebaran, semua harta bendanya ditiptkan agar dicuri. Bila memiliki warung, maka rombongan dibawa pulang ke tempat

kontrakan, begitu pula becak dikembalikan ke pemiliknya atau diparkirkan di Wonokromo dengan sistem harian. Untuk rumah berikut isinya, mereka serahkan kepada pemilik rumah untuk menjaganya (*"dereke titip"*). Pemilik biasanya tinggal tidak di lingkungan/pekarangan rumah tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, petani tersebut menyediakan khusus oleh-oleh dari desa dan diberikan pada saat kembali dari desa.

Penutup:

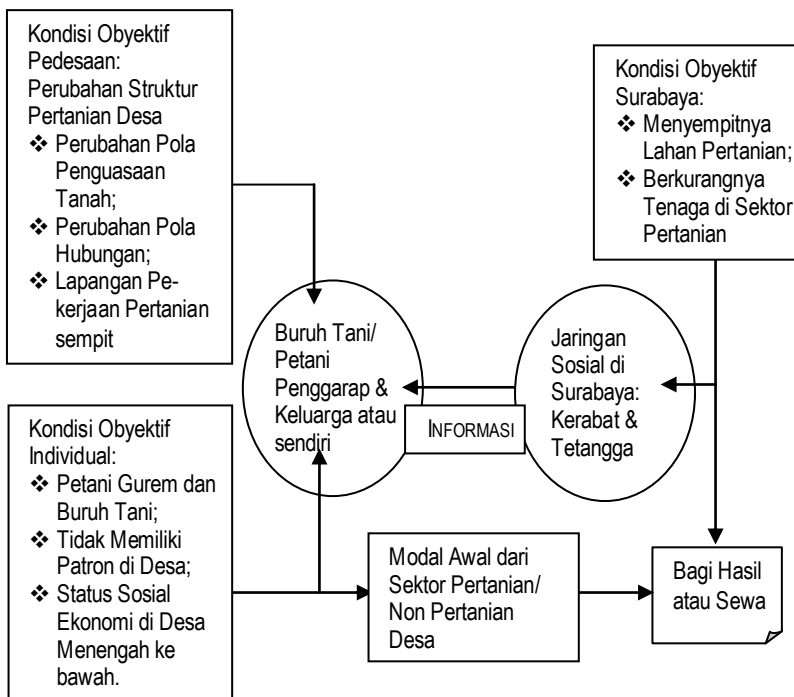
Analisis Ringkas tentang Sektor Pertanian di Kota

Pergeseran struktur penggunaan lahan di perkotaan sebenarnya terjadi tidak saja di Surabaya, tetapi seluruh kota di Indonesia. Bila dalam catatan sejarah, daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat semula merupakan daerah pertanian yang subur, masyarakat aslinya, Betawi, merupakan petani buah yang andal. Namun, pada tahun 1960-an hingga sekarang telah terjadi alih fungsi lahan menjadi bangunan perkantoran dan perumahan, dan sebagian lain menjadi pabrik. Sawah Besar di dekat wilayah Gambir dan Kebon Jeruk tinggal nama yang mengingatkan fungsi lahan tersebut, begitu pula kampung Condet yang semula dipertahankan keasliannya telah mulai menghilang (perhatikan kasus petani buah di Jakarta oleh Koentjaraningrat, 1976: 97-188). Penetapan cagar budaya tersebut hanya memberi sedikit rintangan arus alih fungsi lahan. Kini, masyarakat Betawi tergusur ke Selatan, ke arah Depok, seperti Setu Babakan, Srengseng Sawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan (*Jawa Pos*, 26 Oktober 2004, "Pariwisata. Pemprov Dirikan Museum Betawi"), meskipun terdapat pula kantong-kantong di perkotaan. Untuk mempertahankan eksistensi kulturalnya, mereka membentuk organisasi kemasyarakatan, *Forum Betawi Rempug*.

Begitu pula yang digambarkan oleh Setyobudi (2001) di Yogyakarta, sawah-sawah lambat laun mulai menghilang dari kota

tersebut. Salah satu di antaranya yang mempercepat proses tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar. Jalan lingkar tersebut kemudian memudahkan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan. Wilayah Sleman dan Bantul di pinggir kota Yogyakarta telah berubah menjadi perumahan dan kampus. Hal yang sama terjadi di Semarang, Medan, Makasar dan kota-kota lain di Indonesia. Artinya, jumlah petani di kota pun lambat laun juga berkurang dan menghilang, pekerjaan tersebut menjadi langka. Mereka yang tidak mempunyai akses ekonomi perkotaan akibat kondisi strukturalnya, seperti pendidikan, akan memasuki sektor informal dan sektor yang kurang lebih serupa, yaitu menjadi buruh bangunan.

Bagan 6.1.
Perubahan dari Petani Desa ke Petani Kota



Sementara itu, di wilayah pedesaan, seperti yang telah dicermati oleh ahli-ahli pedesaan, telah terjadi perubahan struktur penguasaan tanah. Mulanya, perubahan itu disebabkan pola pewarisan kemudian diikuti oleh perumitan-perumitan pengolahan sebagai strategi adaptifnya. Pola yang demikian ini diistilahkan oleh Clifford Geertz (1983) sebagai *invulasi pertanian*. Pada tahap selanjutnya, revolusi hijau dan biru telah menciptakan komersialisasi dalam pertanian, hubungan patron-klien menjadi runtuh, dan terus berlanjut hingga memunculkan polarisasi penguasaan tanah (lihat Wiradi, 1985) dan petani berdasi.

Akibatnya, kelompok petani gurem dan buruh tani tidak memiliki akses ekonomi di lingkungan sendiri. Dengan jaringan sosial yang dimilikinya, mereka berpindah ke kota, terlepas ada tidaknya tujuan awal untuk memasuki sektor formal (industri) atau telah ada kesadaran (empati) atas kemampuannya untuk memasuki sektor pertanian di kota, buruh pabrik dan buruh bangunan. Di dalam kasus penelitian ini, mereka memasuki sektor pertanian yang “sudah” ditinggalkan oleh masyarakat kota, kecuali mereka yang masih bertahan, meski hanya menjadi buruh tani. Dengan modal yang dibawa dari desa, mereka tidak lain menjadi buruh tani semata tetapi telah menjadi petani penggarap.

Menjadi petani penggarap merupakan salah satu strategi adaptif mereka di perkotaan. Ada strategi lainnya, yaitu membuka warung dan narik becak. Pekerjaan yang mudah dan/atau tidak jauh dari lingkungan pedesaannya. Hasilnya, selain untuk mengembangkan bodal usaha, mereka juga mengirimkannya ke daerah asalnya, bahkan ada pula yang menabung dan berharap dapat membeli sawah tersebut dari pemilik lahan tersebut. Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi daya tarik bagi mereka yang memiliki keahlian yang sesuai dengan sektor ekonomi perkotaan, tetapi juga menghimpun mereka yang tidak memiliki keahlian.

Daftar Pustaka

Assafitri, Nur Laily.

2004 Tradisi Tegal Desa di Kelurahan Gades, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya tahun 1970-2000. **Skripsi**. Surabaya: FIS-Unesa.

BPS Jawa Timur

1998 **Jawa Timur dalam Angka 1997**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

2000 **Jawa Timur dalam Angka 1999**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

2001 **Jawa Timur dalam Angka 2000**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

2003 **Jawa Timur dalam Angka 2002**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

Faber, G.H. von.,

1931 **Oud Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's eeste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van gemeenteraad (1906).

1933 **Nieuw Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's voornamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931.

Geertz, Clifford.

1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia**. Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

1989 **Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa**. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta; Pustaka Jaya.

Handinoto.

1996 **Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940**. Yogyakarta: Andi.

Ismawan, Bambang.

1985 Pendidikan yang Diperlukan untuk Pengembangan Pedesaan. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: Rajawali.

Koentjaraningrat.

1976 Petani Buah-buahan di Selatan Jakarta. Dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat, **Indonesia. Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia.

Kroef, Justus M. van der.

1984 Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. **Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa**. Jakarta: Gramedia.

Kustiwan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1 Tahun XXVI.

Labib, Muhammad.

1990 Beberapa Masalah Kebijakan Perbaikan Pemukiman di Perkampungan Kota Surabaya. **Masyarakat, Kebudayaan dan Politik**. No. 4 tahun III. Surabaya: FISIP Unair.

Lee, Everett S.,

1980 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta: PPSK UGM.

Mubyarto,

1991 **Menerawang Masa Depan Pertanian Indonesia**. dalam Mubyarto, et.al. Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan. Yogyakarta: P3PK UGM.

Putra, Shri Ahimsa.

1985 Urbanisasi sebagai Proses Budaya. **Bulletin Antropologi**. No. 1.

Rusli, Said.

1985 **Pengantar Ilmu Kependudukan**. Jakarta: LP3ES.

Setyobudi, Imam.

2001 **Menari di Antara Sawah dan Kota. Ambiguitas Diri, Petani-petani Terakhir di Yogyakarta**. Magelang: Inodnesiatera.

Sukadana, A.Adi.

1983 **Antropo-ekologi**. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekadri, Heru.

1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan**. Surabaya: IKIP Surabaya.

Tjandrasasmita, Uka.

2000 **Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia**. Kudus: Menara Kudus.

Todaro, Michael P., dan Jerry Stilkind.

1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota**. Jakarta: Gramedia.

124 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Verslag van den Toestand der Stadsgemeente Soerabaja over 1930.
Weltevreden-Soerabaja: NV Koninklijke Boekhandel en Drukkerijen G.
Kolff & Co.

Weber, Max.

1977 Apa yang disebut Kota? Dalam Sartono Kartodirdjo. **Masyarakat Kuno dalam Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Wolf, Eric.

1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Jakarta: Rajawali.

Wiradi, Gunawan.

1984 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 7

Petugas *Cleaning Service*

Berharap di Sektor “Formal”, meski Harus Cerdik dan Tabah

Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo,
dan Arief Sudrajat

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi fenomena perkotaan yang selalu hadir. Dilihat dari jumlahnya, kemiskinan di perkotaan akan bertambah karena dua hal yaitu: pertama, penambahan alamiah—lebih banyak kelahiran daripada kematian, dan yang kedua, migrasi orang-orang pedesaan yang miskin ke kota. Dengan kata lain, golongan miskin di kota-kota besar di Indonesia meliputi para migran dan orang-orang yang lahir di sana. Jumlahnya sangat tergantung dari definisi yang diberikan kepada kemiskinan. Collin Clark dan Sayogyo mengajukan ukuran yang hampir sama untuk mengukur kemiskinan. Sayogyo (1978: 3-14), misalnya, mengukur kemiskinan dengan menggunakan ukuran setara dengan beras. Orang disebut miskin jika penghasilannya kurang dari 320 kg beras di desa dan kurang dari 480 kg beras di kota tiap jiwa tiap tahun. Sayogyo juga membedakan golongan berpenghasilan rendah ini menjadi tiga kategori yaitu: miskin, miskin sekali, dan sangat miskin. Namun ukuran ini tak dapat menjelaskan meningkatnya jenis kebutuhan pokok lainnya, yang tentunya ikut berubah dengan meningkatnya pendapatan.

Collin Clark, seperti dikutip oleh Papanek (1986: 223) menggunakan ukuran nilai gizi yang dibutuhkan oleh setiap orang setiap hari. Yang dibutuhkan oleh setiap orang sehari adalah 1.821 kalori. Untuk memenuhinya dibutuhkan beras per tahun 320 kg atau 0,88 kg per hari. Clark hanya memfokuskan kebutuhan makan, kebutuhan lainnya diabaikan.

BPS (Biro Pusat Statistik) memperbaiki ukuran tersebut dengan menambahkan komponen konsumsi non-pangan. BPS menggunakan ukuran setara dengan 2.100 kalori dan menambah komponen konsumsi non-pangan sebesar 6,12% hingga 17,96%. Ukuran ini sebenarnya menggunakan kriteria kebutuhan pangan minimum (*emergency food budget*), yang hanya layak diberlakukan pada situasi darurat.

Jumlah orang miskin di perkotaan sangat tergantung pada ukuran-ukuran tersebut. Jika nilai dari ukuran-ukuran itu diturunkan, maka jumlah orang miskin juga akan turun, demikian sebaliknya. Mereka yang termasuk dalam golongan berpenghasilan rendah ini adalah orang kecil yang bukan orang elit dan bukan orang kelas menengah. Mereka adalah pekerja yang tidak terdidik atau berpendidikan rendah, pegawai rendah, penjaja, tukang becak, pekerja kebersihan, dan *element of lumpen proletariat who are characterized by their struggle to make ends meet simply in order to to fulfill their subsistence needs* (Cohen, 1975: 51).

Golongan berpenghasilan rendah ini adalah sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat, daerah atau negara, yang mendapatkan penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan minimum yang seharusnya mereka penuhi. Mereka, baik pendatang maupun bukan pendatang, mempunyai cara hidup atau kebudayaan sendiri yang berbeda dengan cara hidup atau kebudayaan golongan berpenghasilan tinggi. Yang dimaksudkan kebudayaan di sini adalah kebudayaan kemiskinan yang terwujud dalam lingkungan kemiskinan yang mereka hadapi. Dengan

kebudayaan kemiskinan ini mereka dapat terus mempertahankan kehidupannya.

Di Indonesia penelitian tentang kemiskinan di perkotaan sudah cukup banyak. Misalnya, pada pertengahan tahun 1980-an sepuluh peneliti peserta PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial) Jakarta melakukan penelitian secara terpadu tentang kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah di tiga wilayah di Jakarta Timur, yaitu: Pulogadung, Jatinegara, dan Klender. Mereka di antaranya Sundoyo Pitomo, Bambang S. Sunuharyo, Agusfidar Nasution, Endang Purwaningsih (lihat Sumardi dan Evers, 1985). Penelitian-penelitian tersebut menentukan apa saja yang oleh penduduk berpendapatan rendah di Jakarta dianggap sebagai kebutuhan dasar, dan seberapa jauh mereka merasa puas, di samping perekonomian rumahtangga di perkotaan. Beberapa aspek kebutuhan dasar yang diteliti oleh peneliti peserta PLPIIS antara lain: aspek pengeluaran dan pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang intensif.

Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah merasa tidak cukup penghasilan dan penerimaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka membuat skala prioritas kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan pangan menempati urutan pertama. Hasil yang hampir sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh LP3ES dan FEUI (lihat Papanek dan Jakti, 1986). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan penduduk berpenghasilan rendah dibelanjakan untuk keperluan makan dan rokok. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada masyarakat berpenghasilan rendah proporsi terbesar dari pendapatannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan.

Penelitian Evers (1993) terhadap 1.201 rumahtangga di dua daerah hunian liar di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat

“produksi subsisten di kota” untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah. Produksi subsisten umumnya terwujud dalam produksi pangan, termasuk perikanan dan memelihara ternak. Lea Jelinek (1995) selama tigabelas tahun melakukan pengamatan tentang sebuah kampung di Jakarta mulai muncul, kembang hingga punah. Kampung itu Kampung Kebun Kacang. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana sebuah komunitas miskin di kampung itu mencoba bertahan di tengah-tengah upaya pemerintah kota untuk meratakan kampung itu. Murray (1994) dan Effendi (1993) melakukan penelitian terhadap kampung miskin di dua lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan antropologis Murray meneliti Kelurahan Manggarai dan Bangka untuk melihat dampak pembangunan terhadap kehidupan warga kampung miskin. Penelitian ini memfokuskan pada wanita yang dilihatnya sebagai hasil dari proses pembangunan. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak wanita bekerja di sektor informal, bahkan ditemukan banyak wanita yang berorientasi pada kebudayaan metropolis dengan menjadikan dirinya komoditas seksual. Effendi dalam penelitiannya memfokuskan pada pelacur, gali, dan pengusaha warung di daerah Wonosito Kotamadya Yogyakarta. Meskipun penelitian Effendi ini sudah mengungkap bagaimana masyarakat Wonosito mampu mempertahankan kehidupannya dengan membentuk sistem kehidupan, namun tidak secara khusus meneliti bagaimana mereka mempertahankan hidup. Penelitian Effendi ini dilengkapi oleh penelitian Chris Manning dan kawan-kawan (1996) di kota yang sama, tetapi fokusnya berbeda. Penelitian Manning memfokuskan pada kegunaan sector informal bagi analisis perilaku ekonomi dan struktur social ekonomi di kota dengan mengamati struktur pekerjaan dan kaitannya dengan tingkat penghasilan, stabilitas pekerjaan, dan status social ekonomi keluarga pada sebuah masyarakat kota.

Masih banyak penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan tentang penduduk miskin di perkotaan, antara lain: Gavin Jones (1986) dengan “Demografi dalam Kemiskinan di Kota, Graeme Hugo (1986) “Migrasi Sirkuler,” Gordon Temple (1986) “Migrasi ke Jakarta,” Lea Jelinek (1986) “Sistem Pondok dan Migrasi Sirkuler,” dan John L. Taylor (1993), “Kampung-kampung Miskin dan Tempat Pengelompokan Penghuni Liar di Kota-kota Asia Tenggara,” serta P de Angelino (1993) “Perbudakan Melalui Hutang Buruh pada Perusahaan Batik di Jawa.” Penelitian dan tulisan itu mengungkap dan menganalisis berbagai aspek dari kehidupan masyarakat miskin di perkotaan, namun belum ada yang secara khusus memfokuskan pada upaya yang dikembangkan oleh penduduk berpenghasilan rendah untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah kerasnya persaingan hidup di kota. Karena itu, penelitian ini akan mencoba memfokuskan pada upaya-upaya yang dibangun penduduk berpenghasilan rendah, dalam hal ini pekerja kebersihan, untuk mempertahankan kehidupannya di kota Surabaya ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004.¹⁰ Penelitian tentang upaya bertahan hidup petugas *cleaning service* ini mengambil lokasi di Surabaya. Ada beberapa alasan secara metodologis pemilihan lokasi tersebut. Pertama Surabaya sebagai kota besar, kemiskinan menjadi persoalan serius dan proporsi orang miskin di kota ini juga cukup besar. Surabaya dipilih diharapkan dapat menggambarkan karakteristik kemiskinan kota. Kedua, peneliti sudah cukup lama bertempat tinggal di Surabaya, sehingga pengetahuan tentang lokasi dan masalah kemiskinan cukup

¹⁰ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Arief Sudrajat.

memadai. Pengetahuan seperti ini penting untuk memperlancar proses penelitian secara intensif dan peneliti dapat mendalami masalah yang sedang diteliti. Pertimbangan lain adalah dari aspek biaya, tenaga dan waktu. Di dalam penelitian ini yang menjadi *informan* adalah tenaga-tenaga kebersihan yang sehari-hari bekerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Karena jumlah tenaga kebersihan di Universitas Negeri Surabaya jumlahnya hanya 40 orang, maka dalam penelitian ini ada sejumlah pekerja diwawancara secara mendalam. Melalui wawancara dan pengamatan, pada setiap informan disusun *life history* yang menggambarkan mulai dari proses migrasi, pemilihan pekerjaan hingga upaya bertahan hidup, mulai dari pencarian pekerjaan tambahan hingga pengeluaran untuk biaya hidupnya.

Fungsi dari Waktu Kerja Berlebih dan Pendapatan

Kehidupan yang keras diperkotaan memungkinkan banyak orang memiliki siasat untuk mempertahankan kehidupan kesehariannya. Demikian juga yang telah dilakukan oleh sebagian besar pekerja *cleaning service*. Model siasat yang dibangun oleh mereka beragam tergantung situasi dan kondisi individu tersebut. Secara umum, pekerjaan *cleaning service* di Unesa dijadwalkan bekerja sejak hari Senin hingga hari Jum'at dan dimulai pukul 06.30 sampai 12.00, kemudian istirahat dan dilanjutkan bekerja mulai jam 13.00 sampai 15.00. Pada hari Sabtu dan Minggu, mereka dibebaskan bekerja dan merupakan hari libur mereka. Hari kerja ini terkait dengan perkuliahan mahasiswa dan jam kerja di Unesa.

Begitu ketatnya jadwal yang dibuat untuk mereka ternyata tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Setiap pekerja mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 325.000,- setiap bulannya. Uang sebesar itu bagi masing-masing pekerja harus diterima dengan lapang dada dan dimanfaatkan secara efisien. Kemampu-

an melakukan efisiensi terhadap penghasilan yang sangat kecil menciptakan berbagai bentuk kekreativitasan bagaimana mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan hidup.

Para pekerja cleaning service di UNESA tidak didominasi oleh satu kelompok atau jenis kelamin tertentu, namun terdiri dari beragam kelompok maupun jenis kelamin. Kelompok-kelompok tersebut terpilah ke dalam kelompok para bujangan yang tidak memiliki keluarga di Surabaya, kelompok bujangan yang bertempat tinggal di Surabaya, kelompok berkeluarga laki-laki, kelompok berkeluarga perempuan.



Gambar 7.1.
Seragam: Formalisasi Tukang Kebun

Siasat Kemiskinan Bujangan: Antara Hidup Menumpang dan Membangun Relasi

Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pengaman Sosial

Perkembangan yang sangat pesat yang terjadi di kota Surabaya, ternyata tidak begitu saja meminggirkan berbagai lembaga semacam pondok pesantren, bahkan kehadiran lembaga pondok pesantren sering merupakan acuan penting bagi para pendatang migran dari luar Surabaya. Hal itu disebabkan pondok pesantren memiliki tradisi yang kental untuk selalu saling membantu terhadap sesama terlebih terhadap para musafir yang memang menurut ajaran agama perlu dibantu. Pandangan orang-orang pondok pesantren yang baik dan selalu menyambut dengan tangan terbuka terhadap para pendatang memungkinkan beberapa pendatang dapat singgah dan tinggal di beberapa pondok pesantren yang tersebar di seluruh kota Surabaya.

Demikian juga dalam pandangan beberapa pekerja *cleaning service* di UNESA, menurut mereka, lembaga pondok pesantren merupakan lembaga yang sedikit banyak dapat membantu kehidupan mereka pada masa-masa awal menjalani kehidupan dan tinggal di kota Surabaya. Pondok pesantren merupakan tumpuan harapan awal mereka. Di samping bekerja di UNESA, mereka dapat mengaji di malam harinya.

Dari beberapa pondok pesantren yang tersebar di sekitar UNESA, Pondok Pesantren Al Idris yang berada di daerah Karangrejo Lama merupakan satu-satunya pondok pesantren yang bersedia menampung beberapa pekerja *cleaning service* untuk tinggal dan mengabdikan di tempat itu. Seluruh pekerja *cleaning service* yang diijinkan tinggal di dalam Pondok Pesantren Al Idris tersebut merupakan kelompok para bujangan dan mereka berasal dari luar kota.

Rencana kedatangan pertama mereka ke Surabaya, sejak awal memang berkeinginan untuk bertempat tinggal di pondok

pesantren. Dengan tinggal di pesantren, di samping dapat bekerja di luar pondok, mereka dapat mengabdikan dan mengaji. Bahkan menurut mereka, dengan tinggal di pondok, mereka dapat segera memecahkan berbagai permasalahan hidup pelik yang mereka hadapi setiap hari karena suasana pondok yang penuh kekeluargaan dan saling bantu membantu sangat mendukung. Apalagi suasana kota Surabaya bagi pekerja *cleaning service* dianggap sebagai kota yang asing dan penuh kekerasan.

Prosedure untuk bisa tinggal di pondok pesantren tidaklah mudah. Seseorang dapat membangun hubungan dengan secara langsung menemui kyai pondok pesantren tersebut atau diantar oleh seorang kenalan yang telah terlebih dahulu mondok di tempat itu untuk menemui kyainya. Meski hubungan telah dibangun, para pekerja *cleaning service* tidak bisa begitu saja langsung mendapatkan kamar atau ruang sendiri namun mereka harus mengawalinya dengan proses pengabdian yaitu dengan membantu berbagai macam pekerjaan di pondok terlebih dahulu. Namun pada umumnya para pekerja ini membantu membersihkan seluruh wilayah pondok yang ditempati. Selepas mereka membantu pekerjaan di pondok seperti membersihkan, mereka juga ikut mengaji dan malamnya mereka menginap di tempat seadanya yang ada di ruang-ruang kosong pondok tersebut seperti istirahat di halaman belakang masjid pondok.

Atas jasa para pekerja tersebut ikut mengabdikan membersihkan pondok setiap hari, akhirnya usaha mendapatkan respon dari pemilik pondok. Sebagai imbalan dari kyai atau pengurus pondok, mereka akhirnya mendapatkan ruang atau kamar apa adanya untuk istirahat tanpa dibebani dengan uang biaya hunian setiap bulan. Penerimaan yang total dari pihak pondok terhadap kehadiran mereka di wilayah pondok pesantren, bagi mereka begitu sangat berharga. Bagaimanapun dengan dibebaskannya mereka dari uang pembayaran hunian, mereka dapat menghemat uang yang sedianya akan dialokasikan sebagai uang kost. Implikasinya,

para pekerja dapat menabung dan uang yang mereka kumpulkan akan mereka berikan kepada keluarga yang ada di desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anang: “*Habis bekerja di UNESA, saya juga bersih-bersih di pondok. Jadi saya nempati pondok ini tidak dipungut biaya. Lumayan mas, yang penting ada tempat tidur, daripada ngekost. Duitnya nanti kan bisa dikirim ke orang tua*”.

Di balik keleluasaan para pekerja tinggal di pondok, bagaimanapun membawa konsekuensi bagi kehidupan kesehariannya. Dibandingkan dengan teman-teman pekerja lainnya, Anang merupakan salah satu pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaan sampingan. Hal itu disebabkan, selepas dia bekerja dari UNESA, ia harus melakukan kewajibannya di pondok. Waktunya habis untuk membersihkan pondok. Implikasinya, penghasilan yang ia dapatkan hanya sebatas yang ia terima dari UNESA. Di luar itu tidak ada penghasilan sama-sekali. Bagi Anang, dengan melakukan pekerjaan sambil berarti ia telah merusak akad yang telah dibuat dengan pemilik pondok. Sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan dengan pemilik pondok yang telah memberi keleluasaan menginap di sana, anang menerima dengan ikhlas jumlah penghasilan yang hanya sebesar ia terima dari UNESA saja. Di samping itu ia bisa beribadah di pondok itu.

Agar jumlah uang yang ia tabung setiap bulan dapat berlebih, Anang dan teman-temannya perlu menyiasatnya yaitu dengan mengurangi tingkat konsumsi sehari-hari dan mengatur uang makan sehari-hari. Caranya yaitu bekerja sama dengan teman di pondok untuk masak bersama. Biaya yang dikeluarkan untuk masak bersama dapat lebih ditekan bila dibandingkan dengan membeli makanan dari luar.

Membangun Relasi dengan Mandor

Kehadiran Mandor pekerja tidak selamanya mencitrakan suatu sosok yang menakutkan bagi para pekerja *cleaning service*.

Meski ada beberapa pekerja yang masih menganggap posisi mandor sebagai posisi yang menakutkan namun ada beberapa pekerja yang menganggap kehadiran para mandor sebagai *partner* bekerja. Tugas mandor adalah mengawasi para pekerja yaitu dengan melakukan proses absensi beberapa kali dalam sehari. Adanya deskripsi pekerjaan mandor seperti inilah, menurut beberapa pekerja sangat ditakuti. Bagaimanapun pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat mandor menyebabkan para pekerja akan diperingatkan, mengulangi pekerjaan bahkan akan menerima gaji yang tidak seperti biasanya atau dikurangi. “*Mas, lha wong saben dino diprekso karo mandore, yo gak iso nyelintung titik*” (Mas, karena setiap hari diperiksa oleh mandor, ya tidak bisa menyimpang sedikit)

Bagi Farid, adanya ancaman semacam itu tidak perlu ditakuti namun memang merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Kalau memang para pekerja serius bekerja, maka hal-hal yang mereka takuti tidak akan terjadi, misalnya bekerja dengan bersih atau selalu tidak pernah absen. Ia menunjukkan bahwa dirinya yang tidak pernah melanggar aturan yang dibuat oleh mandor, hingga saat ini tidak pernah mendapatkan sanksi dari para mandor. Baginya bekerja sebagai cleaning service di UNESA, merupakan pekerjaan yang menyenangkan bahkan menurutnya merupakan peningkatan karier. Hal ini disebabkan, sebelumnya ia bekerja di pabrik Palet Pasuruan (pabrik pembuatan kotak dari kayu untuk bok susu) selama beberapa tahun namun hanya digaji sebesar Rp. 200.000,-. Jadi buat apa ia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Gaji yang telah didapatkan pun mengalami peningkatan. Hal ini perlu disukuri.

Bahkan ia mampu menjalin hubungan dengan mandor secara baik. Hasilnya, Farid sekarang dapat tinggal di kamar yang disediakan oleh mandor. Kamar yang disediakan oleh mandor memang tidak cukup besar namun sudah lebih dari cukup bila

dibandingkan dengan mereka harus mencari kamar sendiri yaitu kost. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya penginapan. Tentu tidak murah untuk harga sebuah kamar di wilayah ketintang dan sekitarnya. Meskipun ia telah mendapatkan fasilitas penginapan, ia masih harus mengeluarkan biaya untuk listrik dan air setiap bulan. Mandor yang telah menyediakan tempat tinggal di wilayah Ketintang Madya II, bahkan seringkali memberinya ijin cuti untuk pulang kampung. Apakah ini bukan suatu manifestasi kebaikan mandor yang seringkali di anggap sebagai orang yang galak.



Gambar 7.2.
Mengharap Rezeki dari Sampah

Keberadaan fasilitas penginapan yang disediakan mandor, membuat Farid dapat menabung. Hanya saja selama ia tinggal di situ, ia tidak dapat meningkatkan nilai tabungannya karena tidak

memiliki pekerjaan sambilan. Pekerjaannya sehari-hari selama tinggal di Surabaya hanyalah sebagai pekerja *cleaning service*. Hal itu merupakan wujud dari kesetiaannya kepada mandor tersebut. Untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya, ia agak *sungekan* kepada mandor yang telah berbaik hati kepadanya. Di samping itu, ia juga bingung ingin bekerja apa bila seandainya pak mandor mengizinkan ia bekerja sambilan. Apalagi tingkat pendidikannya hanya sebatas SMP saja dan ia tidak banyak memiliki hubungan dengan orang lain karena ia berasal dari luar kota yaitu Pasuruan. Paling-paling ia kembali jadi pekerja *cleaning service* di tempat lain, bahkan bisa-bisa terjadi bentrokan jawal.

Kost Bareng, Urunan Mbayar

Memang tidak semua bujangan pekerja *cleaning service* UNESA yang berasal dari luar kota Surabaya, seberuntung dengan rekannya yang berhasil membangun hubungan dengan mandor maupun dengan rekannya yang diijinkan untuk tinggal di pondok pesantren sehingga rekan-rekannya tersebut dapat mengurangi tingkat pengeluarannya untuk biaya penginapan.

Bagi mereka yang tidak beruntung mendapatkan fasilitas penginapan bagaimanapun juga mereka harus mencari kost untuk bisa tinggal di Surabaya. Pilihan kost adalah pilihan yang rasional bila dibandingkan harus nglaju dari tempat tinggalnya ke tempat kerjanya. Hampir semua pekerja *cleaning service* UNESA yang mengambil kost sebagai tempat tinggal berasal dari luar kota Surabaya yang jauh jaraknya seperti Blitar, Nganjuk, Bojonegoro, dan Caruban dll. Dengan begitu, pilihan *nglaju* merupakan pilihan yang tidak rasional karena akan menghabiskan uang penghasilan mereka dalam beberapa hari. Implikasinya, mereka tidak bisa menabung dan selalu kehabisan uang untuk biaya transportasi.

Pilihan untuk mengambil kamar kost sebenarnya merupakan pilihan yang sangat berat karena biaya sewanya yang cukup tinggi untuk daerah Ketintang. Biaya kost-kostan untuk daerah Ketintang Madya yang ditempati beberapa pekerja *cleaning service* UNESA sudah berkisar antara Rp. 75.000,- sampai 100.000,- per bulannya. Belum lagi biaya yang lain seperti listrik dan air.

Mengingat biaya yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan untuk bisa tinggal di wilayah tersebut, maka pilihan mengambil kost sendiri merupakan pilihan yang sangat tidak rasional. Hal ini disebabkan, biaya yang mesti dikeluarkan harus ditanggung sendiri. Namun bila biaya yang harus dikeluarkan tersebut ditanggung bersama-sama, maka pilihan untuk kost tersebut merupakan pilihan yang sangat rasional.

Walaupun tidak semua tempat tinggal yang dikostkan itu mengijinkan untuk ditempati atau disewa untuk beberapa orang. Namun, kalau pekerja *cleaning service* jeli, mereka segera dapat menemukan. Implikasinya, biaya yang mesti mereka keluarkan untuk penginapan akan berkurang. Bahkan, ketika pemilik kamar segera akan menaikkan biaya sewa kamar tersebut bila dihuni lebih dari satu orang, bagaimanapun, biaya tersebut akan tampak lebih murah karena ditanggung berdua atau bertiga. Dengan begitu, sisa uang penghasilannya dapat digunakan untuk keperluan lain atau ditabung oleh masing-masing pekerja.

Uang sewa akan dibayarkan jika para pekerja sudah mendapatkan gaji. Beberapa pemilik rumah sudah memaklumi kebiasaan dan kemampuan ekonomi para pekerja *cleaning service* tersebut sehingga mereka tidak mensyaratkan mereka untuk membayar uang kost di depan atau harus membayar selama satu tahun di muka sekaligus. Di samping uang kost, mereka dibebani dengan uang listrik dan air yang dapat dibayar menjadi satu dengan uang kost atau masih dihitung perbulan tergantung biaya yang akan dibayar tuan rumah ke PLN atau PAM. Hal ini

disebabkan akhir-akhir ini, biaya untuk listrik dan air seringkali naik tiap satu semester. Sisa uang yang mereka dapatkan, menurutnya, masih lebih dari cukup. Apalagi kondisi mereka yang masih bujangan, sebagaimana kata Mas Muluk, “*Lumayan cukup untuk biaya hidup sendiri, karena masih bujang sih mas! Entah nanti kalau sudah punya istri. Kalau ada, sedikit-dikit saya tabung, kalau tabungannya banyak akan saya kirim ke rumah untuk orang tua*”.

Bagi mas Muluk, dengan tinggal kost bersama teman-temannya satu kamar, di samping dapat mengurangi pengeluaran juga memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan sambilan. Keinginan mencari pekerjaan sambilan ini juga terkait dengan alasan atau niat awal mulanya bekerja di surabaya. Menurutny, niat bekerja ke Surabaya lebih disebabkan pekerjaan di desa itu tidak variatif dibandingkan di Surabaya. Di Surabaya orang bisa memilih pekerjaan yang disenangi dan bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. “*Di sini (Surabaya) pekerjaannya macem-macem, kalau di desa itu yang ada cuma tani. Itu penghasilannya nggak pasti, belum kalau musim kemarau, terus kena hama. Mendingan disini (UNESA),itung-itung cari pengalaman*”

Oleh sebab itu, selama bekerja sebagai cleaning service di UNESA, ia tidak terpaku pada satu pekerjaan namun mencoba untuk menerima pekerjaan lainnya yang jam kerjanya tidak bersamaan dengan jadwal kerjanya di UNESA. Pekerjaan sambilan yang diterima, baik Muluk maupun temannya yang lainnya tidak hanya berupa satu ragam pekerjaan saja namun bermacam-macam, misalnya ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga toko, ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjual keliling atau mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga wartel. Hal ini didukung dengan kondisi kost yang pada umumnya sangat kondusif dan memungkinkan

Hidup Bersama Orang tua

Bila dibandingkan dengan pekerja *cleaning service* UNESA sebelumnya, para bujangan yang hidup bersama orang tua, pada umumnya adalah penduduk asli Surabaya atau mereka yang sudah lama mendiami kota Surabaya. Dengan begitu, kita dapat mengasumsikan bahwa pengetahuan mereka tentang Surabaya dan hubungan antar manusia sedikit banyak lebih menguasai, sehingga dapat memiliki beberapa macam pekerjaan sampingan di luar *cleaning service* UNESA. Namun pada kenyataan di lapangan, ternyata asumsi bahwa bujangan *cleaning service* UNESA yang hidup bersama orang tua memiliki pekerjaan sampingan yang lebih banyak, tidak berlaku sepenuhnya. Beberapa informan yang berhasil diwawancarai menunjukkan bahwa sebagian besar para bujangan ini tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaannya sekarang. Meskipun demikian, ada beberapa memiliki pekerjaan sampingan yang menyenangkan dan dapat menambah keuangan keluarga.

Para bujangan yang bekerja di *cleaning service* UNESA ini, pada umumnya bekerja untuk membantu atau menyumbang memperbesar penghasilan keluarga yang dihasilkan dari kedua orangtuanya yang sama-sama bekerja. Mengenai kebutuhan sehari-hari para bujangan seperti Warno yang bekerja di lingkungan FIS UNESA, semuanya sudah dipenuhi orang tuanya meskipun dalam kapasitas yang sangat terbatas. Lebih-lebih kebutuhan dasar seperti makan, minum dan pakaian. Dengan begitu, sebagian uang hasil pekerjaannya bebas ia nikmati sendiri.

Kebutuhan hidupnya yang cukup banyak dan kewajiban untuk membantu saudara-saudaranya menyebabkan penghasilan yang sudah dibagi dua menjadi sangat sedikit. Implikasinya, ia tidak memiliki tabungan sama-sakali. Setiap gaji, uang yang ia terima, tidak sampai dua minggu sudah habis. Kondisi keuangan yang sangat labil ini, tidak membuat warno memiliki keinginan

atau hasrat untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya. Hal ini disebabkan Warno merasa aman meskipun tidak memiliki uang dan pekerjaan tambahan lainnya. Apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dianggap sudah terpenuhi dari kedua orang tuanya.

Berbeda dengan Warno, bagi Lukman, pekerja *cleaning service* UNESA di lingkungan fakultas teknik UNESA, meski ia berstatus bujangan dan hidup bersama orang tua, ia masih ingin mencari pekerjaan tambahan. Hal itu disebabkan, orang tuanya tidak semuanya bekerja. Ayahnya adalah seorang buruh di wilayah Rungkut sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Penghasilan yang hanya bertumpu pada ayahnya saja menyebabkan roda ekonomi akan goyah. Apalagi pada zaman sekarang biaya listrik dan air sangat tinggi.

Untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari, Lukman tidak hanya bekerja sebagai *cleaning service* UNESA namun di luar jam kerja, ia selalu mencari kesempatan lainnya yang sekiranya dapat menghasilkan uang. Apapun ia lakukan yang penting halal. Tingkat pendidikannya yang mencapai SMA (Sekolah Menengah Atas), tampaknya mempengaruhi kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini terbukti bahwa ia tidak sekedar mencari tambahan penghasilan dengan cara menjadi penjaga wartel saja seperti teman-teman *cleaning service* UNESA lainnya namun di balik kesederhanaannya, ia memiliki telenta atau kemampuan yang tidak terduga. Kemampuan ini nampaknya berkaitan dengan aktivitasnya ketika masa sekolah dan merupakan pengetahuan yang sangat ia sukai semasa di SMA. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kemampuan musikal.

Semasa SMA, ia memiliki sebuah *group band*. Pengalaman mendalami kegiatan itu setidaknya-tidaknya memungkinkan dia memiliki banyak relasi di antara anak-anak muda yang menggemari musik. Apalagi pada masa itu sering melakukan latihan bersama-sama di berbagai tempat. Pengetahuan semacam ini nampaknya menjadi aset bagi Lukman, karena selepas ia dari SMA dan

bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Kegiatan bermain musik tampaknya tidak ditinggalkan. Bahkan seringkali ia mendapatkan job bersama-teman-teman lamanya sebagai pemain band. Job manggung yang sering ia terima biasanya pada acara perkawinan atau ulang tahun.

Meskipun job bermain band tidak selalu ada tiap hari, namun menurutnya ada bulan-bulan tertentu *job* bermain band itu sangat ramai bahkan seringkali menyebabkan ia sangat sibuk di waktu malam hari. Implikasinya, penghasilan bulanan yang ia terima pada bulan-bulan tertentu seringkali lebih banyak berasal dari pekerjaan sampingan.

Oleh karena, ia merasa memiliki sumbangsih yang cukup signifikan terhadap penghasilan keluarga, Lukman merasa bahwa ia pun memiliki hak untuk memuat suatu kebijakan keluarga. Apalagi ia adalah anak kedua dari empat bersaudara. Kebijakan yang seringkali ia urusi berkaitan dengan kebijakan pengeluaran keluarga. Hal-hal mana yang harus di tekan pengeluarannya dan hal-hal mana yang penting bagi keluarga. Meskipun kebijakan pengeluaran keluarga sudah diatur sedemikian rupa, tampaknya pengeluaran tetap saja besar. Pengeluaran untuk makan sehari-hari dan pola konsumsi lainnya tidak begitu besar dan dapat ditekan sekecil mungkin. Hanya pengeluaran air dan listrik sangat menyedot anggaran keluarga. Pengeluaran ini sangat susah ditekan. Solusi penggunaan peralatan listrik yang hemat tetap tidak bisa memecahkan masalah ini.

Adanya beberapa pos yang sangat susah ditekan pengeluaran menyebabkan Lukman hingga saat ini tidak memiliki tabungan sama sekali. Tabungan yang ia miliki adalah tabungan berupa relasi antar teman dalam kelompok band-nya atau kelompok band di daerah lainnya. Hal ini disebabkan melalui relasi inilah ia sewaktu-waktu akan mendapatkan rejeki mendadak dan rejeki ini bisa digunakan sebagai pembayar utang bulan sebelumnya.

**Siasat Keluarga *Cleaning Service*:
Dari Pekerjaan Sambilan, Mendayagunakan Keluarga hingga
Berhemat**

Hidup Hemat, Prioritaskan Kebutuhan

Pak Jamali merupakan pekerja *cleaning service* UNESA yang bekerja di wilayah FIS. Ia sudah menikah dan memiliki satu putra. Rumah yang ia tempati merupakan rumah kontrakan yang berada di daerah Ketintang lama. Sebagai kepala rumah tangga, pak Jamali hanya mengandalkan penghasilan keluarga dari pekerjaannya sebagai *cleaning service* UNESA. Ia tidak memiliki penghasilan keluarga di sektor lainnya. Hal ini menurutnya karena pendidikannya yang hanya setamat SMP. Tingkat pendidikan ini yang menyebabkan ia hanya di terima sebagai tenaga kasar yang umumnya dipekerjakan di siang hari. Di samping itu, usahanya untuk melamar pekerjaan lainnya belum menghasilkan.

Istri Pak Jamali yang juga lulusan SMP, sampai saat ini ia masih menganggur. Ia masih belum tertarik untuk bekerja membantu suaminya. Hal ini disebabkan perkawinannya yang masih tergolong muda dan ia baru saja memiliki anak yang masih berusia 4 tahun. Usia anak yang masih belia inilah yang menyebabkan sebagian besar waktu istrinya dihabiskan untuk menjaga buah hatinya. Keinginan untuk mencari penghasilan tambahan menjadi tertahan sementara waktu. Meskipun istrinya tidak ikut membantu mencari penghasilan keluarga, Pak Jamali masih bersyukur penghasilannya bisa menghidupi keluarganya meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Menurut mereka, tingkat kebutuhan sehari-hari belum begitu banyak. Hal itu disebabkan, keberadaan anaknya yang masih kecil, sehingga tuntutan terhadap segala hal belum ada. Di samping itu kebutuhan Pak Jamali dan istri juga bisa ditekan sesuai dengan prioritasnya. Prioritas keluarga Pak Jamali adalah

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum meskipun terbilang kurang sekali.

Bilamana ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, sering Pak Jamali harus mengubah strategi konsumsinya. Ia dan istrinya mengubah pola makan yang sudah sederhana menjadi lebih sederhana lagi. Bila masih belum mencukupi, Pak Jamali sering menyiasati dengan cukup makan sekali setiap hari. Padahal kebutuhan kalori yang diterima Pak Jamali setiap hari sudah pas-pasan masih ditambah pengurangan jumlah makan setiap harinya. Kebutuhan-kebutuhan mendesak itu bisa berupa biaya membeli obat bagi anaknya. Harta paling berharga yang dimiliki keluarga Pak Jamali hanyalah sebuah TV lama yang diproduksi tahun 1970-an.

Berbeda dengan Pak Jamali, Pak Mudjib adalah seorang bapak dengan dua anak. Sebelum ia bekerja sebagai cleaning service UNESA, ia bekerja sebagai pedagang kaki lima di Wonokromo. Namun, karena usahanya tidak berkembang dengan baik, ia banting stir sebagai pekerja cleaning service UNESA yang dianggapnya sebagai pekerjaan yang dapat diandalkan karena penghasilannya pasti.

Dengan mendiami rumah berlantai tanah di daerah Kertanting Baru, Pak Mudjib hidup saling bekerja sama dengan istrinya. Kerja sama dengan istri menurutnya merupakan hal yang penting karena penghasilan yang ia peroleh dari pekerjaan cleaning service UNESA sangat pas-pasan meskipun dapat diandalkan. Di samping menerima gaji dari suaminya, istri Pak Mudjib membuka usaha cucian baju. Pada umumnya langganannya yang dilayani oleh istri Pak Mudjib adalah tetangga-tetangga sekitar saja. Hasilnya cukup lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. *“Untuk nambah kebutuhan, istri saya kadang-kadang juga nerima cucian ! Iya lumayan untuk tambahan dari pada nganggur.”*

Adanya penghasilan tambahan dari pekerjaan istri bukan berarti penghasilan keluarga mencukupi. Keluarga Pak Mudjib

pun masih melakukan banyak penghematan di sana-sini. Untuk kebutuhan listrik, mereka hanya menggunakan beberapa lampu neon dengan watt yang paling kecil dan untuk kebutuhan air, mereka terpaksa menggunakan air sumur untuk segala aktivitas seperti mandi, mencuci, air minum dll.

Cleaning Service untuk Membantu Suami

Di samping kaum laki-laki, kaum perempuan juga berperan serta di dalam pekerjaan *cleaning service* UNESA. Pada umumnya para wanita yang bekerja di sini adalah sekedar membantu penghasilan suaminya yang tidak mencukupi. Ibu Sutinah misalnya, ia sudah bekerja selama 3 tahun sebagai pekerja *cleaning service* UNESA. Suaminya bekerja sebagai buruh pabrik yang penghasilannya sangat terbatas. Padahal ia masih memiliki tiga anak-anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah.

Pada awalnya, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun segera ditinggalkan karena gajinya cuma Rp. 200.000,- per bulan dengan jam kerja yang ketat. Bila dibandingkan dengan pekerjaan sebagai *cleaning service* UNESA, sangat nyata perbedaan penghasilannya. Oleh sebab itu ia dengan senang hati menerimanya. “*Di sini kerjanya ringan cuma membersihkan WC, tapi gajinya lumayan*”. Apalagi menurutnya “*lha wong saya ini lulusan SMP, mau kerja di mana lagi, disini sudah bagus.*”

Menumpang, Berjualan dan Apa lagi, asal untuk Anak

Sumiyati merupakan informan yang berstatus janda satu-satunya yang berhasil kami wawancarai. Ia sudah ditinggal mati suaminya sejak tahun 2000. Kematian suaminya merupakan suatu pukulan yang berat dalam hidupnya, karena selama ini hanya suami satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Untuk menggantikan peran suaminya, akhirnya ia bekerja ke Surabaya. Kedatangannya di Surabaya lebih disebabkan atas kebaikan saudara-

nya. Beserta dengan kedua anaknya, Bu Sumiyati diijinkan untuk tinggal serumah dengan saudaranya tersebut.

Berkat bantuan saudaranya pula Bu Sumiyati dapat bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Meskipun penghasilan yang ia dapatkan dari bekerja *cleaning service* UNESA sangat terbatas untuk biaya hidup selama di surabaya, namun ia sangat bersyukur. Apalagi sebelumnya, ia sama sekali tidak memiliki penghasilan sama sekali.



Gambar 7.3.
Menikmati sedikit, hanya berada di luar pagar kampus

Untuk menutupi kebutuhan yang besar bagi kedua anak-anaknya, dan juga biaya sehari-hari yang ia nikmati seperti listrik dan air di rumah saudaranya, ia mencoba untuk berjualan kecil-kecilan di rumah saudaranya tersbut setiap sore hari. Jualan yang

ia bawa berupa pisang goreng, dan gorengan lainnya. Keuntungannya sedikit banyak membantu kehidupan sehari-harinya dan dapat ikut menyumbangkan biaya sehari-hari kepada saudaranya.

Penutup

Perkembangan Surabaya yang pesat sedikit-tidaknyanya membawa berkah ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan Surabaya menjadi sebuah pusat daya tarik dan kota tujuan utama bagi kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah. Implikasinya, arus pendatang setiap hari selalu membanjiri Surabaya.

Beragamnya latar belakang yang dibawa para pendatang menyebabkan munculnya perbedaan daya serap diberbagai sektor yang tersedia. Bagi pendatang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang baik atau yang memiliki modal yang cukup, berbagai permasalahan yang dihadapi tampaknya mudah dipecahkan, apalagi ruang yang tersedia bagi mereka sangat luas. Namun bagi para pendatang yang tidak memiliki keahlian maupun modal sama sekali, ruang yang tersedia sangat terbatas. Dampaknya, kemiskinan di kota menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan.

Para pekerja subsisten kota pada umumnya membanjiri pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan yang tinggi seperti pekerjaan cleaning service UNESA. Meskipun pekerjaan ini tidak menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun untuk bisa bekerja sebagai cleaning service UNESA, seseorang membutuhkan satu tahap *entry point*. Tahap ini berkaitan dengan siasat yang memungkinkan ia dapat bekerja di suatu tempat. Biasanya mereka menggunakan hubungan teman untuk membawanya bekerja di tempat itu. Hubungan perkawanan ini

seringkali juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai persoalan sehari-hari mereka.

Siasat para pekerja cleaning service UNESA agar tetap bertahan hidup di Surabaya dengan bekerja sama dengan teman tampaknya menjadi pandangan yang lumrah. Di tengah himpitan ekonomi yang berat, hubungan perkawanan setidaknya mampu mengeliminir berbagai masalah penghasilan keuangan yang tidak memadai dengan cara mengkonsumsi secara bersama-sama. Di samping itu, hubungan perkawanan merupakan ruang psikologis yang aman karena mereka sama-sama senasip dan sepenanggungan.

Pengurangan jumlah barang-barang konsumsi hingga sampai bawah batas minimal yang layak merupakan suatu siasat yang harus mereka lakukan. Demi sesuatu, mereka rela berkorban. Dengan begitu, setiap hari merupakan hari-hari penuh pengorbanan. Demi anak, orang tua rela berkorban untuk makan sekali sehari. Implikasi pengurangan tingkat konsumsi yang berada di bawah standar minimal menyebabkan kondisi fisik mereka bekerja tidak optimal di tengah volume pekerjaan yang mengharuskan seseorang mengkonsumsi kebutuhan pada batas minimal.

Keluarga merupakan tim kerja yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, penghasilan keluarga dapat lebih baik bila dibandingkan dengan hanya kepala rumah tangga saja yang harus bekerja. Kerja sama yang baik antar anggota keluarga bagaimanapun juga akan menutupi berbagai biaya untuk pos-pos tertentu.

Di tengah ketidakberdayaan pada pekerja cleaning service UNESA, ternyata keberadaan suatu lembaga pondok pesantren, ikut berperan menyelamatkan kehidupan para pekerja cleaning service UNESA. Sebagai lembaga sosial setidaknya keberadaan pondok pesantren memungkinkan seorang pekerja bisa hidup lebih layak ditengah tekanan yang berat di Surabaya.

Daftar Pustaka

- Effendi, Tadjudin Noer,
1993 **Masyarakat Hunian Liar di Kota: Sebuah Studi Kasus di Wonosito Kotamadya Yogyakarta**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Evers, Hans-Dieter.
1982 **Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia**, Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
- Jellinek, Lea.
1995 **Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta**, Jakarta: LP3ES.
- Lewis, Oscar.
1993 “Kebudayaan Kemiskinan,” dalam Parsudi Suparlan, Penyunting, **Kemiskinan di Perkotaan**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manning, Chris, dkk,
1986 **Struktur Pekerjaan, Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Murray, Alison J.,
1994 **Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial**, Jakarta: LP3ES.
- Nasution, Agusfidar.
1985 “Buruh Perusahaan Industri Kecil dan Menengah di Jatinegara,” dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**, Jakarta: Rajawali Press.
- Noormohammed, Sidik.
1986 “Perumahan bagi Golongan Miskin di Jakarta,” dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Papanek, Gustav, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,

1986 "Penduduk Miskin di Jakarta," dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pitomo, Sundoyo.

1985 "Kebutuhan Dasar Kelompok Berpenghasilan Rendah di Kota Jakarta," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Purwaningsih, Endang.

1985 "Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Perumnas Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Sayogyo.

1978 "Garis Kemiskinan dan Minimum Kebutuhan Pangan." **Makalah** dalam Kongres II HIPIS di Manado.

Sunuharyo, Bambang Swasto.

1985 "Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga Pegawai Rendah di Perumahan Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Bab 8

Pengamen

Seniman Jalanan dan Suara-suara “Lapar” Orang Miskin Kota

Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo,
dan Sugeng Harianto

Pendahuluan

Di dalam sejarahnya, seniman jalanan telah terjadi cukup lama. Di Eropa dan Amerika, bangsa pengembara, dari rumpun Slavia, yaitu suku Gipsi telah mengembara ratusan tahun dengan bekerja sebagai peternak, penjinak binatang, dan lebih dari itu bermain musik di malam hari, bermain boneka kayu dan meramal nasib. Memang, tidak banyak catatan tentang kelompok etnik ini.

Di Indonesia, khususnya Jawa, meski seniman keraton yang mengembangkan wayang, di dalam tradisi *babad* (Tanah Jawi) diberitakan tatkala untuk menaklukan Ki Ageng Mangir, penguasa wilayah Selatan, putri sulung Panembahan Senapati, *Pembayun*, menyamar sebagai *tleddek*, *wong barang* yang mengembara dengan menyanyi dan menari hingga masuk ke wilayah tersebut. Karena kecantikannya, Ki Ageng Mangir kemudian mengawini. Kisah ini kemudian berlanjut hingga Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senapati dan dibunuh dengan membentur kepalanya di singgasananya, istirinya akhirnya ikut *bela pati*.

Pada masa kolonial seniman jalanan ini berkembang dari lingkungan perkebunan, Augustijn Michels sebagai seorang pemilik *landhuis Citeureup* tercatat pada tahun 1831 bahwa dari

budak-budaknya yang berjumlah 130 orang, terdapat 30 orang budak yang oleh V.I. van de Wall disebut pemain musik yang pandai dan serba bisa (*de onderschidene bekwame muzijkanten*). Di samping itu, ada 4 orang penari ronggeng, 2 pemain gambang, dan 2 penari topeng, bahkan orang Cina juga melatih budak mereka untuk menjadi artis dalam rombongan sandiwara Cina. Budak-budak yang pandai bermain sandiwara, menari, dan menyanyi biasanya berharga tinggi. Gaya hidup yang demikian ini sebenarnya meniru budaya keraton di mana raya memiliki sekelompok seniman, sebagian di antaranya pemain musik Barat yang tinggal di Kampung Musikanan (sebelah timur Pagelaran), dan di halaman dalam keraton terdapat bangunan *koepel*, khusus untuk tempat bermain musik (Soekiman, 2000: 90-91). Gaya hidup ini dimasukkan ke dalam budaya *indis*.

Di dalam perkembangan selanjutnya, muncul kelompok *toniel* atau *stambul*, seni pertunjukan keliling dengan kisah seribu satu malam. Musik dan lagu menyertai dalam pertunjukkan tersebut. Seni pertunjukan rakyat keliling dengan mengambil tradisi lisan juga berkembang pula, grup Ketoprak di Jawa Tengah dan Ludruk di Jawa Timur. Alat-alat musik yang digunakan tidak lengkap, seperti pada seni pertunjukan keraton, bila merupakan seni pertunjukan, maka tema ceritera diambil dari tradisi lisan, seperti pahlawan lokal Sarip Tambakoso pada Ludruk atau mengadopsi ceritera seribu satu malam dan ceritera barat. Sudah barang tentu, alur ceriteranya pasti berbeda dengan tradisi keraton.

Musik jalanan memang tidak selalui kemudian identik dengan seni pertunjukan. Ia bisa tampil sendiri, seperti *musik sinteran* yang dilakukan satu atau dua orang. Seorang memainkan alat musik *sinter*, sedangkan yang lain *nembang*, menyanyikan lagu Jawa, atau sambil bermain *sinter* ia bernyanyi. Alat musik *sinter* merupakan modifikasi alat musik cina yang berupa kotak kayu sebagai wadah resonansi dengan banyak dawai. Cara memainkan

dengan meletakkan sinter secara mendatar dan dipetik dengan kedua tangan.

Bila diamati di kota Surabaya dan sekitarnya, komunitas pemusik jalanan memang terpilah menjadi dua, kelompok pertama terdapat pelaku tradisional (lama), seperti pemusik *sinter*, gitar dan *tayub* dengan lagu-lagu Jawa dan keroncong, penikmatnya adalah kelompok urban dari pedesaan Jawa. Kelompok kedua adalah anak jalanan (anjel) dengan rentang usia bervariasi dari anak-anak hingga remaja dan dewasa. Ada berbagai modus, ada sebagian memilih bernyanyi di pinggir jalan pada saat lampu merah, ada pula bernyanyi di kendaraan umum, biasanya bis kota dan bis antar kota, dan sebagian lain bernyanyi dari rumah ke rumah. Alat musik yang dipakai mulai dari yang paling sederhana, *kecek-kecek* buatan sendiri dari sejumlah tutup botol yang dipaku pada kayu dan digoyang-goyang secara berirama hingga alat musik gitar, dari pemusik yang hanya mengandalkan suara hingga menggunakan alat *sound system* dengan tenaga aki atau baterai.

Berbeda dengan kelompok pertama yang jumlah terbatas dan cenderung berkurang, jumlah kelompok kedua ini tidak semakin berkurang, tetapi cenderung bertambah. Ada beberapa alasan memilih mengambil profesi tersebut, namun sering dicermati sebagai produk dari urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja formal menggiring pelaku pada pekerjaan informal, termasuk musik jalanan.

Bila kelompok pertama, demi memenuhi kenangan penikmatnya, lebih suka melantunkan lagu-lagu lama, seperti pemusik *sinter* dengan tembang-tembang *dandang gula* dan *pangkur*, pemusik keroncong dengan lagu-lagu pop bergaya keroncong, dan seterusnya, maka kelompok kedua mengambil dua modus, yaitu menyanyikan lagu-lagu pop yang sedang “*in*”, atau menciptakan lagu-lagu yang sederhana dengan tema yang jelas dan tidak jauh dari kehidupannya. Di dalam modus pertama, tidak semua lagu-lagu pop yang sedang “*in*” dinyanyikan, misalnya

menjelang akhir pemerintah Orde Baru, antara tahun 1996-1998, pemusik jalanan lebih suka menyanyikan lagu “Anoman Obong” (Iwans Fals) daripada lagu “Tenda Biru” (Desy Ratnasari).

Pada modus kedua, lagu-lagu tersebut bisa muncul ke permukaan tatkala ada produser yang mendengarkan dan merekrutnya ke dalam dunia rekaman, sebut saja Gombloh (alm.) dari Surabaya dengan lagu-lagu perjuangan dan cinta. Rekrutmen ke permukaan bisa terjadi pula bila pemerintah, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (dulu Depdikbud), dan sejumlah kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa menyelenggarakan ajang lomba pemusik atau lagu-lagu jalanan (perhatikan kasus Iwan Fals dalam Murray, 1992). Tulisan ini yang merupakan hasil penelitian bermaksud menggali tentang jenis dan tema musik, hubungan antara obyektif (dan subyektif) dan jenis dan tema musiknya, serta fungsinya bagi masyarakat kota.

Metode Penelitian¹¹

Penggalan data dari komunitas seniman jalanan bukan merupakan hal yang mudah. Mereka merupakan kelompok-kelompok kecil yang tersebar secara sporadis dan sangat *mobil*. Pada saat tertentu mereka dengan mudah ditemui di atas bus-bus kota (dan luar kota), di perempatan jalan, dan berjalan dari rumah ke rumah, namun pada saat lain menghilang karena takut ditangkap oleh Satpol PP karena dianggap orang-orang terlantar yang mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, mereka sebenarnya terbuka untuk diwawancarai. Melalui wawancara dan observasi, selain jenis dan musik, dapat pula digali tentang kondisi subyektif pengamen. Sementara itu, kondisi obyektif tentang per-

¹¹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto.

ubahan masyarakat dan kebijakan publik dapat diketahui dari data sekunder, seperti data statistik dan surat kabar.

Untuk analisis, ada tiga tahap yang dilakukan. Pertama melakukan pengkodean dan melakukan identifikasi terhadap kondisi obyektif dan subyektif pemusik jalanan. Dari koding ini, kemudian dibuat matriks untuk menggambarkan kondisi obyektif dan subyektifnya. Kedua, melakukan koding pada musik/lagu jalanan. Koding didasarkan, antara lain (1) jenis musik, (2) tema, dan (3) isi, (4) tempat atraksi dan (5) penikmat/pendengar (*audience*). Krippendorff (1991: 178-180), tahap ini bisa digolongkan ke dalam klasifikasi kontekstual, yaitu teknik untuk mengeliminasi jenis kelebihan tertentu dalam data dengan cara demikian menyarikan apa yang nampak menjadi konseptualisasi dasar. Diasumsikan bahwa obyek dan lebih jelasnya, kata mempunyai semakin banyak sinonim apabila semakin banyak konteks kejadiannya yang sama. Dalam tahap ini jenis dan tema musik jalanan teridentifikasi. Ketiga, menggunakan matriks yang menghubungkan antara kondisi obyektif dan subyektif terhadap jenis dan tema musik jalanan, sehingga akan nampak fungsi dari musik jalanan, apakah musik jalanan hanya sebagai tampilan rasa keindahan, ataukah sebagai proses imitasi terhadap kondisi obyektif dan subyektifnya, dan lebih dari itu sebagai kritik atau protes sosial.

Pekerjaan itu bernama Pengamen Jalanan

Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya ibarat gadis dan pemuda cantik dan ganteng yang menebarkan daya pesona dan daya tarik, yang siap untuk memikat hati siapa saja. Meskipun Kota Surabaya dikesankan sebagai kota metropolitan yang padat penduduk dan kota yang tidak ramah kepada siapa saja, namun Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berasal dari daerah-

daerah yang menjadi *binterland* Surabaya. Sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, Surabaya sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat peredaran uang, pusat hiburan, dan lainnya. Hal ini menjadikan Surabaya sebagai kota yang menawarkan daya tarik kepada masyarakat di *binterland*-nya. Sebaliknya, daerah-daerah *binterland* yang kurang maju lebih mendorong penduduknya untuk melakukan migrasi ke Surabaya.

Surabaya menawarkan potensi lapangan pekerjaan, baik sektor formal maupun sektor informal, yang sangat luas. Mereka yang tidak dapat memasuki pekerjaan di sektor formal, terbuka luas pekerjaan di sektor informal. Banyak anggota masyarakat, karena kalah bersaing atau tidak mempunyai persyaratan, tidak mampu memasuki sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali memasuki sektor informal. Di kota ini terbuka cukup luas bagi warganya untuk mencari pendapatan dari sektor ini. Sektor informal menjadi sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Salah satu pekerjaan di sektor informal di Surabaya adalah menjadi pengamen jalanan. Bagi sebagian warga kota Surabaya menjadi pengamen jalanan adalah pekerjaan. Pekerjaan ini dipilih karena mereka tidak mempunyai banyak pilihan, bahkan pekerjaan ini menjadi katup penyelamat (*safety valve*) ketika mereka terlempar dari pekerjaan di sektor informal lainnya.

Konsep sosiologi mobilitas sosial yang bersifat horizontal barangkali tepat untuk menggambarkan dinamika kehidupan para pengamen jalanan. Sektor informal memang sektor pekerjaan yang dicirikan oleh adanya mobilitas pekerjaan yang tinggi. Pada sektor informal orang mudah berganti-ganti pekerjaan. Kebanyakan pengamen jalanan melakukan mobilitas pekerjaan ini. Sebelum menjadi pengamen jalan mereka rata-rata sudah pernah bekerja.

Secara ekonomi para pengamen jalanan adalah orang-orang yang berasal dari strata masyarakat bawah. Mereka menjadi

pengamen jalanan lebih didorong oleh kondisi kehidupannya yang termarjinalkan karena mereka adalah orang-orang yang kalah ketika memasuki arena kompetisi, yang di mata mereka, yang tidak memberikan keadilan sosial. Surabaya ibarat arena kompetisi bagi siapa saja yang tidak sanggup dimenangkan oleh para pengamen jalanan, bahkan dalam arena kompetisi itu mereka mengalami ketidakadilan, seperti ditertibkan dan digusur oleh aparat birokrasi maupun aparat represif negara. Ibarat di arena pertandingan sepakbola, negara yang seharusnya menjadi wasit yang adil, justru melakukan pemihakan kepada pihak yang kuat, dan keputusan-keputusannya justru merugikan pihak yang lemah, seperti pedagang asongan, pedagang nasi, pengamen jalanan, dan lainnya.

Penertiban Berbuah Pengamen Jalanan

Kondisi kehidupan semacam itu sehari-hari dialami oleh para pengamen jalanan. Mereka menjadi pengamen jalanan salah satunya disebabkan karena mereka menjadi korban penertiban oleh aparat birokrasi dan aparat represif negara.

Muryanti dan Naning adalah dua orang di antara sekian banyak orang yang mengalami nasib seperti itu. Mak As sapaan akrab Muryanti yang berusia 46 tahun, sehari-hari mengamen berpindah-pindah tempat. Sehari-hari Mak As mengamen di Terminal Joyoboyo, halte bus depan Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani, dan Terminal Bungurasih. Mak As mengawali pekerjaannya di Surabaya dengan bekerja sebagai pedagang nasi di kawasan Terminal Joyoboyo. Bagi Mak As berjualan nasi di Terminal Joyoboyo merupakan pekerjaan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang miskin. Pekerjaan ini dia jalani sudah cukup lama yaitu sudah sekitar 10 tahun. Mak As yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dari pekerjaan berjualan nasi mendapatkan pendapatan

yang diakuinya cukup lumayan. Pendapatan ini dapat membantu pendapatan keluarga. Mak As menceritakan:

Saya berjualan nasi sudah sepuluh tahun lamanya, sebelumnya saya menjadi buruh tani di Tanggulangin. Dari jualan nasi sebenarnya saya mendapatkan hasil yang lumayan, walaupun keuntungan yang saya peroleh tidak banyak, namun setidaknya masih bisa memperoleh keuntungan dari sisa makanan untuk dimakan sendiri.

Tahun 2002 merupakan tahun buruk bagi Mak As. Warung makanan miliknya yang berlokasi di kawasan Terminal Joyoboyo menjadi obyek penertiban oleh aparatur Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya. Penertiban tersebut merupakan peristiwa tragis bagi Mak As, karena dia harus kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Sejak saat itu ia menganggur, sampai ia memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan. *“Mau gimana lagi punya warung sudah kena penertiban, ya akhirnya saya menjadi pengamen, yang penting halal,”* kata Mak As.

Di Surabaya sehari-hari Mak As bertempat tinggal bersama-sama dengan salah satu anaknya. Ia mempunyai tujuh anak dan semuanya sudah dewasa. Ia tidak menetap di Surabaya, seminggu atau bahkan sebulan sekali ia pulang ke Tanggulangin. Tanggulangin adalah desa di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, bahkan sampai sekarangpun ia pun masih mempunyai rumah dan bertempat tinggal di desa itu. Ketika berada di Desa Tanggulangin Mak As tidak jarang bekerja sebagai buruh tani.

Sebagai pengamen jalanan Mak As hanya berbekal alat yang ia beri nama kentrungan. Mak As menjalani pekerjaannya mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 12.00 siang, dan pekerjaan itu ia jalani dengan setulus hati dan tanpa beban. Bagi Mak As pendapatan dari mengamen hanya untuk menambah pendapatan suaminya yang sehari-hari sebagai tukang becak. Mak As mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 10.000 per hari.

Demikian pula yang dialami oleh Naning. Naning lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengamen di perempatan jalan yang ada lampu pengatur lalu lintas. Dia memilih tempat seperti itu tidak banyak menghabiskan tenaga dan tidak berbahaya. Perempuan berusia 28 tahun itu mengaku menjadi pengamen jalanan karena dipaksa oleh keadaan keluarganya. Dia mengaku sudah mempunyai suami yang sehari-hari bekerja secara serabutan, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Naning menceritakan suaminya sehari-hari kadang-kadang bekerja sebagai tukang becak, kadang-kadang bekerja sebagai kuli bangunan. *"Itu pun tidak pasti. Suami saya bekerja serabutan,"* kata Naning.

Bekerja sebagai pengamen jalanan, bagi Naning, sebenarnya bukanlah pekerjaan yang menarik. Untuk memutuskan menjadi pengamen jalanan tidak mudah baginya untuk memutuskan. Sebelum bekerja sebagai pengamen jalanan, Naning bekerja sebagai penjual makanan ringan di Taman Bungkul. Pekerjaan sebagai penjual makanan sudah dia geluti selama 5 tahun. Malang nasibnya, suatu hari pada tahun 2003 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Taman Bungkul. Lapak yang penuh barang dagangan miliknya dibongkar paksa oleh Polisi Pamong Praja. Kebijakan pemerintah kota menertibkan PKL di seluruh kawasan kota menjadi awal bagi dia untuk berpindah profesi. Naning menuturkan:

Mau gimana lagi mas, bisa saya hanya mengamen di jalan. Saya yang hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) bisa bekerja sebagai apa. Selain berjualan dan mengamen saya tidak mempunyai kemampuan lain. Menjadi pengamen jalan sebenarnya sangat terpaksa saya lakukan, namun saya mensyukurinya karena dapat membantu meringankan beban suami saya yang hanya bekerja serabutan.

Bencana Itu Bernama Krisis Ekonomi

Wawan dan Yanto mengalami nasib yang sama. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan, keduanya pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh pabrik. Wawan misalnya, pria yang telah menekuni pekerjaan sebagai pengamen jalanan selama tiga tahun ini, mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Gelar lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang disandanginya belum cukup untuk menjadi modal bagi dia untuk memasuki pekerjaan di sektor formal. Nasib membawanya menjadi kuli bangunan. Pekerjaan yang telah lama dia tekuni tidak memberikan harapan bagi masa depannya. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh bangsanya (Indonesia) mempengaruhi masa depan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Seperti hukum alam, hukum ekonomi *supply and demand* berlaku. Permintaan pekerjaan di sektor perumahan menurun. Bagi Wawan penurunan permintaan itu bermakna sepiunya order pekerjaan. Hal ini yang mendorong Wawan untuk memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. *“Aku dulu bekerja pertama kali sebagai kuli bangunan. Karena sepiunya pekerjaan untuk dikerjakan akhirnya aku jadi pengamen,”* kata Wawan.

Krisis ekonomi negara ini juga berdampak pada kehidupan Yanto. Pemuda berusia 33 tahun ini sebelum menjadi pengamen jalanan bekerja sebagai buruh pabrik. Yanto tidak mengetahui dengan jelas secara tiba-tiba dua tahun lalu dia mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaannya. Yanto menduga pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaannya, karena ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yanto menjalani pekerjaannya sebagai pengamen jalanan sudah dua tahun lamanya dan menjalaninya di atas bus antarkota. *“Sebelum menjadi pengamen jalanan, awalnya saya bekerja sebagai buruh pabrik. Saya tidak tahu persis entah kenapa saya di-PHK. Menurut saya, mungkin perusahaan saya sedang mengalami krisis sehingga akan bangkrut,”* kata Yanto.

Dari Loper Koran ke Pengamen Jalanan

Nasib yang sama juga dialami oleh Deni dan Termas. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan pernah menekuni pekerjaan sebagai loper koran. Deni, pemuda berusia 24 tahun, meskipun kelahiran Surabaya, nemun tumbuh dan besar di Yogyakarta hidup bersama dengan *budhe*-nya. Dia menjadi pengamen jalanan sudah sekitar 10 tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan, Deni menekuni pekerjaan sebagai loper untuk berbagai surat kabar. Sebagai loper koran Deni setiap hari mengayuh sepeda menyusuri jalan dan gang untuk mengantarkan koran ke rumah para pelanggan.

Sebagai loper koran dia awali dengan menjadi loper koran *Suara Pembaharuan* di Yogyakarta. Ketika surat kabar itu tidak terbit lagi, membawa Deni menjadi loper koran *Yogya Pos*. Pekerjaan sebagai loper surat kabar ini tidak bertahan lama, karena nasib surat kabar itu sama dengan *Suara Pembaharuan*. Kebangkrutan dua surat kabar itu membawa Deni untuk pertama kalinya memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. Deni menceritakan, “*Setelah tidak menjadi loper koran aku menjadi pengamen, itu terjadi sekitar tahun 1994-an.*”

Pemuda ini menceritakan, pertama kali menjadi pengamen hanya berbekal alat mengamen sederhana yang dia sebagai *ecek-ecek*. Alat musik ini dia buat dari tutup botol yang dirangkai dengan kayu sehingga bisa menghasilkan bunyi. Dia menggunakan alat musik ini karena dia belum bisa menggunakan alat musik gitar. Kemampuan dia sekarang memainkan gitar diawali ketika dia mengajak temannya yang bisa bermain gitar untuk mengamen. Berawal dari itu dia berusaha belajar bermain gitar, dan akhirnya bisa memainkan alat musik tersebut.

Tahun 1999 Deni pulang ke Surabaya atas permintaan ibunya. Pulang ke Surabaya bukan berarti memutus matarantai pekerjaannya sebagai pengamen jalanan. Pertama kali Deni

mengamen di Surabaya di kawasan perempatan depan Hotel Sahid Surabaya. Di kawasan itu dia hanya mengamen pada siang hari, pada malam hari dia bersama-sama temannya mengamen di warung lesehan di sepanjang Jalan Dharmawangsa.

Statusnya sebagai pengamen jalanan sudah dijalani Termas selama delapan tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan Termas pernah bekerja sebagai loper koran di kawasan Demak Surabaya. Pasar yang sepi membawanya sampai pada keputusan untuk menjadi pengamen jalanan. Pemuda berusia 20 tahun ini awalnya menekuni pekerjaan ini hanya ikut teman-temannya. Sebagai pengamen jalanan dia tidak mempunyai harapan yang banyak. Pendapatan dari pekerjaan ini, bagi dia, yang terpenting bisa dipakai untuk membeli makan, minum, dan rokok.

Sebagai anak jalanan Termas sehari-hari ditampung di rumah singgah Insani di kawasan Jagir Surabaya. Di rumah singgah ini dia bersama dengan teman-temannya, sesama pengamen jalanan, mendirikan grup musik yang diberi nama “Bilawa.” Sebagai pengamen jalanan Termas dan teman-temannya sesama anak jalan bukanlah orang-orang minimalis. Dia bersama dengan teman-temannya mempunyai obsesi tidak sekedar sebagai pengamen jalan, namun bisa menciptakan lagu dan dinyanyikan sendiri, seperti yang dilakukan oleh grup-grup musik lain yang telah mempunyai nama. Bagi Termas dan teman-temannya obsesi itu bukanlah impian, namun impian yang menjadi kenyataan. Mereka telah berhasil menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu tersebut kadang-kadang mereka nyanyikan ketika mengamen di jalanan. Termas menceritakan:

”....Pada awalnya kami mempunyai niat hanya untuk membuat puisi, sehingga lagu-lagu yang ada awalnya dari puisi. Niat bikin puisi kok malah bisa dibuat lagu. Kadang-kadang lagu-lagu tersebut dibuat untuk ngamen juga. Karena lagu-

*lagu tersebut kebanyakan bercerita tentang anak jalanan.
Sehingga pas dinyanyikan untuk ngamen....”*

Waiter Yang Menjadi Pengamen Jalanan

Nasib Iwan sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya sesama pengamen jalanan, karena dia pernah mempunyai pekerjaan tepat di sebuah diskotik. Iwan juga pernah menyandang status sebagai mahasiswa ketika dia belajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya hingga semester 3. Di tempat kerjanya yang penuh dengan hingar bingar suara musik dan gemerlap lampu itu dia pernah bekerja sebagai waitrees. Iwan bekerja di tempat itu hanya beberapa bulan, tanpa sebab yang jelas dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia bekerja membantu kakaknya menjadi distributor minyak tanah. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya usaha kakaknya tutup.

Kebangkrutan usaha distributor minyak tanah yang menjadi usaha kakaknya ini membawa pria berusia 32 tahun ini beralih ke pekerjaan menjadi pengamen jalanan. Bagi Iwan menjadi pengamen jalanan tidaklah mudah dilalui. Seperti yang dialami pengamen jalanan lainnya dia beberapa kali terkena razia oleh petugas dari pemerintah kota Surabaya. Dia menyebut razia sebagai cakupan. Iwan suatu saat terkena cakupan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kepada petugas pemerintah kota dia hanya mampu menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) pengamen. Meskipun demikian dia tidak khawatir karena sudah ada yang mengurus, yaitu pengurus dan bus Damri. Sebagai pengamen di bus kota, terutama Damri, dia harus menjadi anggota pengamen dengan diberikan tanda anggota.

Tema Lagu: Dari Tsunami hingga Demokrasi

Seni adalah cermin masyarakatnya. Dalam konteks demikian seni salah satunya dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial yang dialami masyarakat. Seni yang mengekspresikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut merupakan

produk dari kepekaan pencipta seni tersebut terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakatnya. Kesenian bagi seniman dapat dipakai sebagai salah satu media untuk mengekspresikan protes sosial atau kritik sosial. Salah satu bentuk kesenian tersebut adalah seni musik. Bagi seniman musik kebanyakan seni musik merupakan seni pertunjukan yang tidak hanya mengekspresikan rasa keindahan manusia (fungsi menghibur masyarakat), melainkan juga mempunyai fungsi ekonomi dan sosial. Melalui pertunjukan di atas panggung seniman musik dapat memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh popularitas. Tercatat nama-nama seperti Rhoma Irama, Iwan Fals, Doel Soembang, Ebit G. Ade, dan beberapa lainnya yang menjadikan seni musik sebagai fungsi sosial, yaitu untuk melakukan kontrol sosial terhadap kondisi masyarakat yang diwarnai ketidakadilan, ketimpangan, dan demoralisasi. Melalui syair lagu-lagunya mereka melakukan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat, bahkan penguasa politik.

Demikian halnya seniman (pengamen) musik jalanan di Surabaya. Bagi pengamen jalanan tidak banyak pilihan bagi mereka untuk mengakses sumber-sumber daya untuk menjamin kehidupan yang layak. Mereka di masyarakat metropolitan seperti Kota Surabaya merupakan orang-orang yang marjinal, tidak berdaya, dan terpinggirkan oleh kompetisi kehidupan yang tidak berjalan adil dan seimbang. Bagi mereka hidup di kota besar seperti Surabaya tidak banyak pilihan. Mengamen menjadi pilihan yang terpaksa mereka pilih. Bagi pengamen jalanan mengamen bukan sekedar sebagai arena untuk menjamin survival hidupnya, musik jalanan mereka menggunakan sebagai saluran untuk mengekspresikan kondisi kehidupan yang sehari-hari mereka hadapi. Musik jalanan mereka pakai untuk mengekspresikan kondisi riil kehidupan mereka secara individual dan kondisi kehidupan masyarakat di tingkat supra lokal. Mereka menggunakan seni musik untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat yang

senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya. Melalui syair lagu mereka mengekspresikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang senjang dan tidak adil. Tidak hanya mengkritik masyarakat yang senjang, musik jalanan juga oleh pengamen dipakai untuk mengawasi fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kondisi masyarakat yang senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya mereka ekspresikan melalui simbol-simbol berupa rangkaian kata-kata indah yang mempunyai makna. Simbol-simbol tersebut mereka komunikasikan secara verbal dengan alunan nada yang dapat menghibur setiap insan yang mendengarkan dan menghayatinya. Simbol-simbol yang mereka komunikasikan secara verbal merupakan refleksi realitas kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya. Pengamen jalanan terpinggirkan tidak hanya oleh kompetisi kehidupan yang tidak adil dan seimbang, melainkan juga berhadap-hadapan dengan tingkah polah aparatur birokrasi dan aparatur represif di tingkat supra lokal. Jalan dan angkutan umum merupakan arena kehidupan mereka.

Aparatur Negara, Dari Arogansi hingga Resistensi

Dalam tataran empirik dijumpai banyak fenomena aparatur birokrasi dan militer yang menjadi instrumen bagi para pemilik modal untuk menjamin kepentingan-kepentingannya, seperti kasus penggusuran perkampungan kumuh, penertiban PKL (pedagang kaki lima), dan penindasan buruh. Mereka tidak pernah membela kepentingan-kepentingan kelas proletar, bahkan ketika mereka menjadi instrumen pemilik modal mereka berhadapan dengan kelas proletar.

Para pengamen jalanan di Surabaya tidak jarang mempunyai pengalaman berhadapan dengan aparatur suprastruktur

seperti itu. Dalam memasuki arena tersebut mereka ternyata tidak jarang berhadap-hadapan dengan aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara, yang menurut para pengamen jalanan, tidak menjalankan fungsi idealnya. Di mata pengamen jalanan, aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara idealnya menjalankan fungsi pelayanan dan memberikan pengayoman kepada rakyat jelata, termasuk di dalamnya adalah kaum marginal di perkotaan. Mereka melihat dan mengalami tingkah polah aparaturnya supra lokal, yang melakukan pengejaran, menggusur, menendang, menyikut, dan merampas hak-hak hidup sesamanya, yang mengais sumber kehidupan sebagai tukang becak, pedagang asongan

Pedagang Asongan

*Kejar mengejar jadi tontonan
Antara kamtib dan pedagang asongan
Pedagang asongan diburu bagai buronan
Tragedi ini terjadi di negeri ini
Malu dong sama bumi pertiwi
Gengsi dong sama Bu Megawati
Pedagang asongan dirampas
Sungguh malangkan mereka
Becak-becak digusurin, jadi kapalkah becaknya
Tunjukkanlah yang benar pada kami.... generasi nanti...
Jangan main sikut..... jangan main tendang....
Kalau ingin perut kenyang
Jangan main gusur kalau ingin hidup makmur
Yang jadi pejabat..... jadilah pejabat
Asal jangan suka sikat uang rakyat
Yang jadi polisi jadilah polisi
Asal jangan main sikat sembarangan
Yang jadi pak hansip jadilah pak hansip
Kalo kerja pak jangan suka mengintip
Yang jadi pak lurah jadilah pak lurah
Ngurus KTP, biasa saja....
Yang jadi pak ABRI..... jadilah pak ABRI
Asal jangan suka pukul rakyat pribumi*

Melalui syair-syair lagu para pengamen jalanan menggambarkan tingkah polah aparat negara ke dalam berbagai ekspresi. Dalam lagu *Pedagang Asongan*, misalnya, pengamen jalan mengekspresikan aparat negara sebagai kekuatan yang senang menggusur, menyikut, menendang, dan merampas hak hidup kelompok marginal di perkotaan, seperti tukang becak, pedagang asongan, bahkan mereka sebagai pengamen jalanan. Dalam lagu itu para pengamen jalanan mengekspresikan aparat negara seharusnya malu terhadap bumi pertiwi dan gengsi terhadap Megawati, yang pada saat syair lagu dibuat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada tataran teortik, bagi Max Weber (dalam Ritzer, 1996) aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya diatur melalui peraturan perundangan yang ketat, hirarkhi kewenangan yang jelas, dan bahkan harus ada pemisahan antara pemilikan yang *private* (pribadi) dengan pemilikan yang *public*. Pemisahan ini bertujuan untuk meredusir penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Namun pada tataran empirik acapkali aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya tidak bisa membedakan antara pemilikan yang *private* dengan pemilikan yang *public*. Sudah menjadi fenomena umum kendaraan dinas pada hari libur lalu lalang di jalan raya, bukan dipakai sebagai sarana untuk menjalankan tugas kantor, melainkan untuk kepentingan pribadi. Pemberitaan di media massa setiap hari mengabarkan pengadilan terhadap para pejabat negara yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, ilegal logging, penyelundupan BMM (Bahan Bakar Minyak), dan lain-lain.

Perhatian terhadap fenomena sosial semacam itu bukan hanya milik masyarakat dari strata menengah-atas, pengamen jalanan pun peka dan kritis, bahkan protes terhadap fenomena-fenomena itu. Mereka mempunyai cara dan media sendiri untuk mengajukan kritik sosial dan protes. Lagu dan pekerjaan mereka jadikan cara dan media untuk melakukan protes. Melalui lagu dan

alunan nada mereka mengkomunikasikan pesan kepada siapa saja yang berada di dalam kendaraan umum. Mereka tidak mempedulikan apakah pesan yang mereka sampaikan diperhatikan atau tidak. Bagi pengamen jalan melalui lagu dan alunan nada mereka telah menyampaikan kebenaran kepada publik.

Tiang Negara

*Kau tabu rayap-rayap makin banyak di mana-mana
Di balik baju resmi, merongrong tiang negara
Kau tabu babi-babi makin gemuk di negari ini
Mereka dengan tenang memakan desa dan kota
Rayap-rayap yang ganas merayap
Berjas dasi dalam kantor,
Makan minum darah rakyat
Babi-babi yang gemuk sekali
Tenang, tentram, berkembang biak
Tak ada yang peduli menggemuk para babi
Lautan sawah dan hutan
Menggencet anak rakyat
Meremas jantung mereka
Merayap para rayap
Dalam bumi yang kian rapuh
Resahnya tipu rakyat
Terbantai tanpa ampun*

Dalam lagu yang mereka beri judul *Tiang Negara*, misalnya, para pengamen jalanan mengekspresikan tingkah polah aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat dengan sebutan *rayap*. Mereka menyebutnya rayap untuk menggambarkan kerakuran aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat. Masyarakat umum menganggap bahwa rayap adalah binatang sejenis serangga yang sangat berbahaya bagi bangunan rumah.

Rayap-rayap, meskipun serangga, namun dapat *mengerogoti* dan menghancurkan bangunan rumah berukuran raksasa dalam waktu yang relatif cepat. Bangunan rumah akan roboh bila tiang-tiangnya digerogeti oleh rayap. Oleh para pengamen, negara diibaratkan bangunan rumah, sedangkan para koruptor adalah rayap-rayap yang siap merobohkan dan menghancurkan bangunan rumah tersebut.

Rayap-rayap di mata pengamen jalanan tidak hanya suka makan uang rakyat, melainkan juga suka berkolaborasi (kolusi) dengan rayap-rayap lainnya, rayap-rayap suka melakukan pemaksaan, dan bahkan siap untuk memakan tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat.. Hasil korupsi mereka nikmati dengan cara melakukan konsumsi secara menyolok mata. Dalam tataran teoritik, seperti diteorikan oleh Veblen, rayap-rayap tersebut adalah *leisure class*. Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan waktu luang yang banyak. Mereka dalam melakukan konsumsi dengan cara menyolok mata.

Tingkah polah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) aparaturnegara juga mereka ekspresikan dalam lagu *Indonesia Oye*. Dalam syair lagu ini pengamen jalanan ekspresikan bahwa para koruptor adalah orang-orang yang suka makan uang rakyat. Untuk memakan uang rakyat tidak perlu melakukan pemaksaan, melainkan cukup dengan melakukan tindakan korupsi, dan hasil korupsi sudah dapat dinikmati.

Di mata pengamen jalanan aparaturnegara birokrasi tidak lebih sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Melalui kolaborasi dengan aparaturnegara birokrasi, para pemilik modal melakukan ekspansi untuk memperluas usahanya di wilayah-wilayah pedesaan yang subur. Dengan modal yang mereka miliki siap untuk membeli apa saja yang dimiliki oleh penduduk di wilayah pedesaan.

Melalui bait-bait lagu para pengamen jalanan menggambarkan bahwa tanah-tanah pertanian yang subur di kawasan

pedesaan semakin sempit akibat dari modernisasi yang melanda kawasan pedesaan. Dalam bahasa mereka, mereka memaknai modernisasi di kawasan pedesaan sebagai penggusuran sawah rakyat. Untuk melakukan penggusuran sawah rakyat di mata pengamen jalan tidak perlu datang ke desa, melainkan cukup menjalin kolusi dengan aparaturnegara.

Indonesia Oye

Ingin makan uang rakyat (banyak)

Bukan berarti harus me(maksa)

Cukup dengan korupsi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Ingin gusur sawah rakyat (desa)

Bukan berarti harus ke (desa)

Cukup dengan kolusi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Hai Indonesiaku (hai Indonesiaku)

*Tanah subur rakyat nganggur (tanah subur rakyat
nganggur)*

Hai Indonesiaku

Sawah rakyat kamu gusur

Tanam padi, tumbuh pabrik

Tanam jagung, tumbuh gedung

Tanam modal, tumbuh korupsi

Tanam cinta, tumbuh aborsi

Tanam demonstran, tumbuh TNI

Modernisasi yang semakin deras menyentuh wilayah pedesaan dilihatnya sebagai fenomena konversi fungsi lahan pertanian. Modernisasi di wilayah pedesaan, di mata pengamen jalanan, bukan bermakna perubahan yang membawa kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera. Yang terjadi justru banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, kemudian menjadi pengangguran, karena lahan pertaniannya berubah fungsi. Dalam bait-bait lagu konversi fungsi lahan ini mereka ekspresikan seperti *tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh*

gedung. Bagi mereka modernisasi di pedesaan seperti itu hanya akan melahirkan pengangguran, seperti bait lagu *tanah subur rakyat nganggur*.

Bagi pengamen jalanan pembangunan identik dengan ketidakadilan, penindasan, penggusuran, penderitaan, dan bahkan pembunuhan. Di mata pengamen jalanan, pembangunan milik aparaturnegara dan para pemilik modal. Rakyat kecil justru dianggap oleh pengamen jalanan menjadi korban dari pembangunan. Pembangunan bukan menjadi hak rakyat kecil.

Dalam perspektif modernisasi, pembangunan adalah upaya untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat yang belum modern (terbelakang) menjadi kehidupan yang modern. Masyarakat modern ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang modern, gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan modern, dan lainnya. Karena itu, perkampungan kumuh perlu ditata dan dimodernkan agar mempunyai nilai lebih, yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan melalui *trickle down effect*.

Dalam pelaksanaannya, acapkali menggunakan suprastruktur, seperti ideologi, birokrasi, dan militer, sebagai instrumen untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan pembangunan tersebut. Atas nama ideologi keindahan kota dan pembangunanisme, perkampungan kumuh sudah menjadi keharusan untuk digusur, karena sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan lahan dan nilai ekonominya rendah. Bahkan para investor dan aparaturnegara menggunakan ideologi demi keindahan kota dan pembangunanisme untuk menjamin kepentingan-kepentingannya. Dalam ideologi pembangunanisme siapa yang menolak tanahnya digusur dianggap tidak mensukseskan pembangunan, dan bahkan diancam akan diberi label-label seperti masih berbau PKI (Partai Komunis Indonesia), dan sebagainya. Atas nama keindahan kota dan pembangunanisme investor atas “seijin” aparaturnegara me-

netapkan secara sepihak harga ganti rugi tanah dan bangunan, bahkan tanpa ganti rugi bagi tanah dan bangunan yang digusur.

Demi keindahan kota dan pembangunan masyarakat yang menempati perkampungan kumuh harus merelakan tanah dan bangunannya digusur dengan atau tanpa ganti rugi. Ganti rugi yang diterima pun acapkali tidak cukup untuk membeli tanah dan rumah di tempat lain dan biaya sosial dan ekonomi lainnya. Mereka harus meninggalkan rumah dan tanahnya yang telah lama mereka tempati. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya, seperti pekerjaan dan sekolah anak-anaknya. Dengan demikian penggusuran tidak hanya bermakna orang kehilangan tanah dan bangunan, tetapi juga kehilangan akses ke sumber-sumber daya kehidupan. Mereka mengekspresikan fenomena sosial penggusuran tersebut seperti syair lagu berikut:

Nglawan

*Mengapakah harus ada yang digusur
Sementara mereka juga punya hak
Apakah ini pembangunan
Kalau rakyat kecil selalu jadi korban
Haruskah untuk keindahan kota
Memaksa korbannya mereka yang lemah
Jangan biarkan derita terus mengalir
Sampai kapankah ini akan berakhir
Bangunlah sudah tiba waktunya
Untuk kita saling bergandeng tangan
Merebut segala perubahan
Ayo lawan, lawan, lawan, hancurkan
Segala bentuk penindasan
Segala bentuk penggusuran*

Secara teoritis anggota militer dan polisi merupakan alat negara yang diberi kewenangan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Mereka harus menjalankan fungsi untuk

menjaga keutuhan teritorial negara, dan melindungi serta menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Organisasi militer dan polisi juga merupakan satu-satunya institusi negara yang diberi kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik untuk menciptakan keutuhan teritorial negara, melindungi dan menciptakan rasa aman.

Namun pada tataran empirik tidak selalu fungsi-fungsi ideal tersebut dijalankan oleh aparaturnya militer dan kepolisian. Dalam banyak kasus, paling tidak di mata para pengamen jalanan, tingkah polah aparaturnya pertahanan dan keamanan mulai dari hansip, polisi, dan tentara acapkali justru lupa tentang fungsi-fungsi yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Bagi pengamen jalanan, aparaturnya militer dan kepolisian, tidak lebih sebagai aparaturnya represif negara yang melakukan penindasan, sok berkuasa, menyiksa, kejam, dan bahkan membunuh rakyat kecil, yang tidak berkuasa dan lemah.

Mengadu Pada Indonesia

*Hari ini saya sengaja mengadu
Kepadamu Indonesiaku
Tentang ulah aparatmu yang lupa waktu
O.... tentu kamu tahu
Bayangkan ulah mereka
Mereka sok berkuasa
Mereka suka menyiksa
Bahkan membunuh sudah biasa
Aku melihat tindakan aparat
Pukul sana pukul sini sampai rumah sakit
Aku melihat kekejaman aparat
Tembak sana tembak sini sampai ke akhirat
Sialan (sialan)
Aparat kurang ajar
Rakyat kecil dijadikan bahan percobaan
Sialan (sialan)
Aparat itu preman
Kuasanya melebihi kuasa Tuhan*

Orde Itu Bernama Orde Babi

Meskipun rezim Orde Baru telah runtuh tahun 1998 dengan ditandai gulingnya kekuasaan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia, para pengamen jalanan belum sepenuhnya melupakan trauma politik yang terjadi selama 32 tahun tersebut. Era reformasi, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, di mata pengamen jalanan belum sepenuhnya menciptakan perubahan, paling tidak perubahan menurut mereka. Mereka mencita-citakan bahwa era reformasi akan mampu menciptakan perubahan yaitu seperti ungkapan *mandi susu cita-citaku*, bukan *pinggang sakit tidur di kursi*. Era reformasi di mata pengamen jalanan tak ubahnya perpanjangan Orde Baru. Melalui lagu *Orde Babi* para pengamen jalanan mengkritik orang-orang yang mengaku reformis saat pemilu, tetapi setelah menang pemilu melupakan dan meninggalkan rakyat.

Orde Babi

Pinggang sakit tidur di kursi

Mandi susu cita-citaku

Ngaku reformis saat Pemilu

Setelah menang rakyat dilupakan

Setelah menang rakyat ditinggalkan

Rambut gondrong uwan dan ketombe

Siang malam kerjanya kotak katik nomer

Penguasa baru takut adili golkar

Koruptor Orba malah dibiarkan

Koruptor Orba dijadikan saran

Laguku ini anti Orde Baru

Orba jahat sengsarakan banyak rakyat

Laguku ini mengajak kamu

Rakyat miskin bersatu boikot pemilu

Rakyat miskin bersatu hancurkan orde babi

Penguasa pada masa era reformasi dipandang sebagai penguasa yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadili Golkar, sebagai simbol Orde Baru yang tersisa. Penguasa era reformasi dianggapnya tidak mempunyai keberanian untuk mengadili para koruptor Orde Baru, bahkan membiarkan dan memposisikan mereka sebagai pemberi saran pemerintahannya.

Lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan pada setiap kesempatan ini secara eksplisit mereka sebut sebagai lagu anti Orde Baru, sebuah rezim yang mereka anggap telah menyengsarakan rakyat. Melalui lagu ini mereka berupaya membangun kesadaran politik di kalangan rakyat miskin untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Mereka mengajak rakyat miskin untuk bersatu padu memboikot pelaksanaan Pemilu. Lagu ini mereka akhir dengan sikap kontravensi yang ditujukan kepada rakyat miskin untuk menghancurkan sebuah rezim yang mereka beri nama *Orde Babi*.

Nyanyian Demokrasi

Tidak selamanya benar apa yang diteorikan oleh Saymor Martin Lipset, seorang ahli politik Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa demokrasi dibangun di atas landasan variabel ekonomi dan sosial. Tingkat melek huruf dan kesejahteraan ekonomi menjadi prasyarat utama pembangunan demokrasi di suatu negara. Lipset mengajukan proposisi teoritis bahwa demokrasi harulah dibangun dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat melek huruf penduduk yang tinggi. Sebaliknya tingkat kesejahteraan ekonomi dan melek huruf penduduk yang rendah menyebabkan rendahnya kesadaran berdemokrasi penduduk.

Tidak demikian halnya di kalangan pengamen jalanan. Mereka yang rata-rata berasal dari lapisan masyarakat bawah secara ekonomi dan tingkat melek huruf mereka juga masih rendah telah mempunyai kesadaran berdemokrasi yang tinggi.

Meskipun mereka di kota Surabaya adalah orang-orang yang termarjinalkan, namun mereka mempunyai pemahaman tentang demokrasi dan berdemokrasi yang memadai, paling tidak gagasan-gagasan demokrasi mereka tuangkan ke dalam bait-bait syair lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan. Pengamen jalanan menjadikan syair lagu untuk mengekspresikan kehidupan demokrasi di kalangan mereka, bahkan melalui syair lagu mereka mencoba membangun kehidupan demokrasi di lingkungan masyarakat lebih luas dengan pesan-pesan moralnya.

Bagi mereka demokrasi adalah simbol dari ekspresi kebebasan, kebenaran, dan keadilan. Demokrasi adalah adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas berpendapat dan berorganisasi, bebas dari pengusiran, bebas dari penekanan, bebas dari penekanan, bebas dari rasa takut, bebas dari sistem politik yang totaliter serta bebas dari penjajahan oleh bangsa sendiri. Melalui judul lagu *Kemerdekaan* dan *Turun ke Jalan* pengamen jalanan melalui gagasan-gagasannya mengajukan kritik terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru yang belum sepenuhnya merdeka. Masyarakat dipandang masih terbelenggu oleh penindasan, penekanan, tidak mempunyai kebebasan berpendapat dan berorganisasi, rasa takut, dan dibelenggu oleh pemerintahan yang otoriter.

Melalui syair lagu *Kemerdekaan* pengamen jalanan memandang adanya kebebasan berbicara bagi setiap warga negara karena merupakan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara tersebut dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negara. Sebagai negara merdeka, menurut pandangan mereka, wujud demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah penduduk harus bebas dari penindasan, penekanan, dan pengusiran. Dalam pandangan pengamen jalanan negara demokrasi adalah negara yang memberi keadilan dan mampu menegakkan kebenaran

Turun ke Jalan

*Mari kita bergandeng tangan
Tuk menggalang kekuatan
Dengan turun ke jalan
Mari kita kepalkan tangan
Tuk lontarkan perlawanan
Terus maju ke depan
Mati kita acungkan tangan
Tuk teriakan
Segala tuntutan perubahan
Rakyat pasti menang
Memenangi penjajahan
Karena kemerdekaan
Adalah jiwa kita
Rakyat pasti menang
Mengenyahkan penindasan
Karena keadilan
Adalah nurani kita
Yakinlah rakyat pasti menang
Karena kemerdekaan adalah jiwa kita
Karena keadilan adalah nurani kita*

Selain itu mereka dalam lagu *Turun ke Jalan* menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di masyarakat demokrasi yang dicita-citakan dengan bait-bait lagu yang diulang-ulang *rakyat pasti menang*. Segala bentuk penindasan dan penjajahan akan dimenangkan oleh rakyat dengan bergandengan tangan untuk menggalang kekuatan. Di mata para pengamen jalanan kemerdekaan merupakan jiwa mereka, dan keadilan merupakan nurani mereka.

Bahkan pengamen jalanan dalam syair lagu *Kompeni* memandang rezim Orde Baru tak ubahnya seperti Kompeni pada masa kolonial Belanda. Tak ubahnya seperti jaman Kompeni, pada saat ini rakyat di negeri ini belum memperoleh kemerdekaannya. Rakyat merasa dijajah oleh bangsannya sendiri

dan bagaikan hidup dalam penjara. Rezim Orde Baru melakukan penindasan dan menimbulkan penderitaan rakyat. Digagas juga rakyat dalam kondisi diintimidasi, dan kehidupan tidak ada demokrasi karena demokrasi dimatikan. Wakil rakyat digambar tidak ubahnya antek-antek Kompeni yang suka *ngapusi* (membohongi) rakyat.

Kemerdekaan

*Kemerdekaan untuk bicara
Harus kita rebut
Karena berbicara adalah hak azazi
Untuk berbicara dilindungi konstitusi
Kami menentang pengusuran
Kami menentang pencekalan
Kami menentang penindasan
Karena ini negara merdeka
Bukan negara yang dijajah
Karena ini negara demokrasi
Bukan negara totaliter
Mari bersama bikin organisasi
Mari bersatu menggalang kekuatan
Kita bikin tuntutan
Dengan turun ke jalan
Tegakkan kebenaran
Tegakkan keadilan*

Dalam negara demokrasi ada kebebasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi politik dengan berbagai cara dan media, serta melakukan komunikasi politik. Baik dalam lagu *Kemerdekaan*, *Turun ke Jalan*, maupun *Kompeni* para pengamen jalanan mengajukan solusi untuk menciptakan masyarakat yang bebas, merdeka, berkeadilan dan tegaknya kebenaran hanya dapat dicapai melalui penggalangan kekuatan dan secara bersama-sama turun ke jalan. Turun ke jalan menjadi gagasan utama bagi pengamen jalanan untuk melakukan partisipasi politik. Bagi

pengamen jalanan pilihan ini menjadi pilihan satu-satunya ketika semua saluran komunikasi politik buntu dan lembaga-lembaga politik, seperti eksekutif, legislatif, dan partai politik tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kompeni

*Ya percuma..... ya percuma
Dari jaman kompeni dan sampai saat ini
Kita ditindas sampai mati
Katanya rakyat sudah tak dijajah
Tapi hanya masih terpenjara
Katanya negara sudah merdeka
Tapi rakyat sudah menderita
Ya percuma..... ya percuma
Dari hari ke hari
Demokrasi diinjak mati
Katanya bebas berorganisasi
Tapi masih diintimidasi
Katanya sudah beraspirasi
Wakil rakyat masih membohongi
Ya ngapusi..... ya ngapusi
Mari bangkitlah kawan semua
Tuk hancurkan segala bentuk kekuasaan
Ayo bangkitlah kawan semua
Tuk merebut segala bentuk hak kita yang dirampas*

Tsunami: Solidaritas dan Duka Pengamen Jalanan.

Duka Aceh juga menjadi duka bagi para pengamen jalanan. Apa yang dirasakan oleh rakyat Aceh di ujung Barat Pulau Sumatra juga dirasakan oleh para pengamen jalan di ujung Timur Pulau Jawa ini. Para pengamen jalanan berempati terhadap duka masyarakat Aceh yang mengalami bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam yang dialami masyarakat Aceh menjadi keprihatinan dan duka masyarakat dunia. Masyarakat dunia berempati seolah-olah apa yang sedang dialami oleh masyarakat

Aceh juga sedang mereka rasakan. Masyarakat dunia mengekspresikan rasa prihatin dan duka dengan cara memberikan bantuan berupa materi maupun nonmateri.

Tsunami

*Bencana melanda negeri ini
Ribuan jiwa melayang pergi
Akibat gelombang tsunami
Banda Aceh nama tempat peristiwa
Meulaboh jadi saksi yang nyata
Mayat-mayatnya sudah bergelimpangan
Ini salah siapa, ini dosa siapa
Mungkinkan Tuhan memurkai kita
Atas segala perbuatan kita
Darah bersimbah jiwapun merana
Selamat jalan wahai saudaraku
Damailah wahai anak negeri
Ciptakan sebuah lagu perdamaian
Satukan tujuan demi cita-cita
Bangunlah kembali Banda Aceh
Siang panas.... semoga anda bahagia
Bercanda bercumbu dengan alam sekitarnya
Tak ada yang pantas untuk dibanggakan
Karena kita kan kembali pada Tuhan
Pokoknya di mana saja anda
Harus hati-hati
Sebentar lagi Joyoboyo
Banyak copet keluyuran
Dompot di saku belakang
Jangan sampai pindah tangan
Nona pakai perhiasan
Awat dijambret orang
Ini sekedar himbauan arek suroboyo*

Seperti masyarakat lainnya, bencana tsunami yang dialami oleh masyarakat Aceh juga menjadi keprihatinan dan duka yang mendalam bagi para pengamen jalanan. Dengan caranya sendiri mereka mengekspresikan rasa keprihatinan dan dukanya. Bagi pengamen jalanan untuk membantu beban masyarakat Aceh tidak harus dengan memberikan bantuan berupa materi, namun dengan bantuan nonmateri dan tanpa harus datang ke Aceh. Para pengamen jalanan mempunyai cara sendiri untuk membantu masyarakat Aceh. Layaknya seniman, mereka membantu masyarakat Aceh dengan lagu.

Bencana alam, seperti gelombang tsunami, ternyata mampu meretas batas-batas negara, budaya, kelas, dan lainnya. Tsunami mampu menggugah kesadaran setiap individu manusia yang dalam dirinya dibekali rasa dan karsa. Kesadaran pengamen jalan mereka ekspresikan melalui lagu. Dalam bait-bait lagu mereka mencoba mengkaitkan bencana alam tersebut dengan manusia yang melakukan kesalahan dan dosa. Akibat kesalahan dan dosa tersebut, Tuhan telah menunjukkan murkanya kepada manusia yang lemah. Melalui lagu pengamen jalanan juga mengajak masyarakat Aceh untuk menciptakan perdamaian dan bersatu untuk membangun kembali Aceh yang telah porak poranda.

Lebih dari itu, pengamen jalanan di wilayah perkotaan dianggap menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Mereka oleh masyarakat kebanyakan dianggap sebagai orang-orang yang kalah dalam pertarungan untuk memperebutkan sumber daya di kota. Mereka tidak memiliki sumber daya, sehingga mereka adalah orang-orang yang tertutup peluangnya bahkan ditolak oleh sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan kecuali memasuki sektor informal, yaitu mengamen. Sebagai anak jalanan mereka tidak lepas dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat, yaitu kehidupan mereka yang keras, dan sangat dekat dengan dunia kejahatan, seperti

pencurian, penjambretan, pencopetan, perampokan, dan lainnya. Debagai *arek Suroboyo* secara keseluruhan mendapatkan stereotipe *bonek* (bondo nekat), yang senang melakukan pemalakan, perampasan, pengrusakan, dan lainnya.

Namun tidak demikian halnya dengan para pengamen jalanan di kota Surabaya. Mereka jauh dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat itu. Meskipun sebagian besar waktunya mereka habiskan di jalanan, melalui syair lagunya mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati nurani dan moralitas. Paling tidak dalam lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan untuk para korban tsunami di Aceh, misalnya, mereka menyelipkan peringatan dan pesan moral kepada penumpang angkutan umum agar berhati-hati terhadap segala bentuk kejahatan yang dapat menimpa para penumpang, baik pencopetan maupun penjambretan. Pesan moral ini mereka ekspresikan sebagai jawaban terhadap label-label yang sifatnya stigmatif, seperti bonek, keras, suka berkelahi, suka merampas, suka memalak, dan melakukan tindakan kriminal lainnya, yang ditujukan kepada *arek Suroboyo*. Makna syair lagu itu juga mereka tunjukkan kepada masyarakat bahwa *arek Suroboyo* masih mempunyai moralitas yang tinggi (lihat lagu *Tsunami*)

Lagu Untuk Anak Jalanan.

Melalui lagu para pengamen jalanan mengekspresikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari anak jalanan. Trotoar dan jalan raya seolah-olah menjadi saksi bisu kehidupan anak jalanan yang mengais rejeki dari mendengarkan suara tanpa mengenal lelah. Dalam lagu-lagunya para pengamen jalan menggambarkan anak-anak di bawah umur menikmati masa bermainnya di trotoar dan pinggir jalan. Sambil bermain mereka bekerja. Sambil bernyanyi mereka juga bekerja. Anak-anak seperti itu digambarkan telah kehilangan kasih sayang yang didambanya. Mereka juga

merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tiada kunjung tiba. Itulah cerita kehidupan, cerita kehidupan anak jalan. Mereka menunggu mimpi menjadi kenyataan. Mereka hanya berharap perjalanan waktulah yang akan berbicara.

Anak Jalanan

*Anak-anak bermain di pinggir jalan
Anak-anak gembira dengarkan suara
Anak-anak bernyanyi sambil bekerja
Anak-anak bekerja terus menyanyi
Hu..... hu..... hu.....
Hu..... hu..... hu..... (2x)
 Bermain sambil bekerja,
 Bermain sambil bermain (2x)
 Itulah hari-hariku
 Itulah suasanaku
 Itulah kondisiku
 Itulah..... a ha
Kudengar kudengar dan kudengar lagi
Di jalan kulihat dan kulihat lagi
Seorang anak kecil terluka hatinya
Hilang kasih sayang yang didambanya
Berjalan susuri sepanjang trotoar
Hari demi hari tiada bosan kau bernyanyi
Kau songong matahari dengan harapan
Akankah kau bahagia kan kau jelang
 Inilah cerita dari kehidupan
 Hati yang luka rindu bahagia
 Akankah mimpi-mimpi jadi kenyataan
 Biarlah waktu yang bicara
 Ho..... ho..... ho..... ho.....
 Biarlah waktu yang bicara*

Mereproduksi Lagu sudah Populer

Memang, tidak selalu pemusik jalanan mengambil tema-tema lagu protes sosial. Namun demikian, diketahui ternyata setiap lagu yang dibawakan mempunyai makna bagi pemusik

jalan, selain konteks dan kondisi obyektif pengamen jalan. Mak As, yang sudah tua usianya misalnya lebih memilih lagu islami karena faktor usianya. Kentrungan yang selalu dia bawa saat Mak As mengamen di jalan. Alat ini tidak ia beli di toko, karena memang tidak ada toko yang menjualnya, melainkan ia buat sendiri. Kentrungan adalah sebuah alat yang terbuat dari bahan kayu dan senar dari karet. Alat ini cukup sederhana dan mudah dibuat. Kata Mak As, siapa saja bisa membuat dan memainkannya. Ia tidak mengeluarkan biaya untuk membuat alat ini, karena ia hanya memanfaatkan kayu dan karet bekas.

Alat ini dia pakai untuk mengiringi lagu-lagu yang bernafaskan Islami dan lagu-lagu Jawa. Mak As memilih lagu-lagu qosidah, lagu-lagu sholawat, dan kadang-kadang dia selingi dengan lagu-lagu Jawa. Bagi Mak As menyanyi lagu harus disesuaikan dengan kondisi penyanyi dan konsumennya. Menurut penilaiannya lagu yang tepat untuk penyanyi seusia dia (46 tahun) adalah lagu-lagu religius dan lagu-lagu Jawa. Selain itu, ia menyanyikan lagu-lagu tersebut juga berdasarkan diri pada permintaan konsumen.

Masak mas orang setua usia saya menyanyikan lagu-lagu anak muda. Tidak pantas dan siapa yang mau dengar. Rasanya lebih pas saya menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat dan lagu-lagu Jawa. Lagu yang saya nyanyikan saya sesuaikan dengan umur saya dan permintaan dari orang-orang yang nanggap saya. Biasanya orang-orang itu suka dengan lagu-lagu Jawa.

Lagu-lagu yang dibawakan Mak As dalam mengamen lebih banyak unsur rekreatifnya. Orang seusia Mak As tidak menggunakan lagu-lagu untuk melakukan kritik sosial atau protes terhadap kondisi dirinya maupun kondisi masyarakat. Kondisi kemiskinan yang dialaminya bersama keluarga seolah-olah tidak ia rasakan sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Ia lebih memposisikan dirinya sebagai penghibur orang lain dengan mendapatkan kompensasi uang.

Sama dengan Mak As, Naning dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengamen jalanan hanya bermodalkan alat musik kentrungan dan suaranya yang pas-pasan. Bagi Naning kentrungan sangat membantu dia dalam menyanyikan lagu-lagu yang ia bawaikan. Lain dengan Mak As, Naning yang usianya masih relatif muda, lebih memilih lagu-lagu beraliran dangdut dan campursari. Mudah dinyanyikan menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan aliran musiknya. Selain itu, lagu-lagu tersebut cocok dinyanyikan oleh orang seusianya.

Identik dengan Mak As, Naning tidak pernah mempunyai gagasan untuk menjadikan lagu-lagu yang ia nyanyikan sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes. Meskipun hidup dalam kemiskinan, namun ia bersama suaminya rela menerima keadaan itu. Bagi Naning, pendapatan Rp 10.000 hingga Rp 15.000 sehari sudah dirasakan cukup. Ia bersama suaminya yang tinggal di Jagir Wonokromo itu mengaku setiap hari ia mengamen mulai pagi hari hingga sore hari.

Deni mempunyai alasan subyektif yang berbeda. Ia lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer yang digandrungi oleh kalangan anak muda. Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh kelompok musik, seperti: Peterpan, Padi, dan Slank. Lagu-lagu dari grup-grup musik tersebut, bagi Deni, disukai dan digandrungi oleh kalangan remaja yang menjadi obyek dia mengamen di Jl. Dharmawangsa. Bagi Deni dan teman-temannya Jl. Dharmawangsa merupakan jalan yang potensial dapat mendatangkan penghasilan besar. Di sepanjang jalan itu banyak beroperasi warung lesehan dan kawasan kos-kosan mahasiswa. Deni mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp 20.000 per hari dari mengamen di sepanjang jalan itu. Belakangan ini Deni dan teman-temannya lebih memilih mengamen di Jl. Pemuda dekat Monkasel (Monumen Kapal Selam). Tempat ini dia pilih karena lebih menguntungkan selain ramai, juga dia bisa bekerja sambil sebagai tukang parkir.

Kondisi penumpang kendaraan umum menjadi pertimbangan Iwan memilih lagu-lagu yang dinyanyikan selama mengamen. Bagi Iwan lagu yang dinyanyikan oleh seorang pengamen harus disesuaikan dengan kondisi penumpang. Sebagai pengamen ia mempersiapkan lagu-lagu dengan banyak aliran. Ketika Iwan menghadapi penumpang yang rata-rata usianya lanjut usia ia memilih lagu-lagu *oldist* atau lagu-lagu nostalgia, sebaliknya ketika berhadapan dengan penumpang yang rata-rata usianya masih muda dia menyanyikan lagu-lagu populer yang sedang hits, misalnya lagu-lagu yang dinyanyikan Dewa, Radja, Ada Band, dan lainnya.

Iwan kadang-kadang menyanyikan lagu yang menyindir polah tingkah polisi pamong praja yang dinilainya tidak adil dan tidak manusiawi. Polisi pamong praja dia ekspresikan dalam syair lagu sebagai aparat yang suka mengobrak warung, tukang becak, dan pengamen. *“Sebenarnya jangan seperti itu caranya, sebaiknya diberi tempat atau lahan sebelum diobrak. Terkadang saya tidak sepenuhnya menyalahkan polisi pamong praja, karena mereka hanya menjalankan tugas dari yang lebih atas,”* kata Iwan.

Lagu-lagu bertema cinta, kata Wawan, tidak cocok dinyanyikan oleh seorang pengamen jalanan sesusia dia. Lagu-lagu tersebut lebih cocok dinyanyikan oleh penyanyi di media televisi. Lagu-lagu Iwan Fals yang syairnya berisi kritik sosial yang menjadi pilihan Wawan. Ia kadang-kadang juga menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, yang juga mempunyai syair yang mengandung kritik sosial dan protes. Wawan yang baru berusia 23 tahun menjadikan lagu dan mengamen sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes terhadap kondisi masyaralat yang senjang dan tidak adil. Kaena itu, ia dalam memilih lagu ia kaitkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari dia sebagai pengamen jalanan. Termasuk mengekspresikan kehidupan anak jalanan dalam syair-syair lagu yang dia ciptakan dan nyanyikan. Sebagai anak jalanan dia tidak mempunyai media untuk mengungkapkan kondisi

kehidupannya yang rentan. Lembaga-lembaga suprastruktur politik seperti lembaga legislatif yang menjalankan fungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat dianggapnya bukan media yang tepat dan efektif. Seolah-olah semua saluran yang idealnya dapat menampung aspirasi dan keluhan kehidupannya tertutup. Dia bersama-sama dengan teman mengamen lebih memilih menciptakan lagu sendiri untuk mengungkapkan kehidupan anak jalanan yang rentan tersebut.

Penutup:

Suatu Analisis Wacana tentang Makna Lagu Anak Jalanan

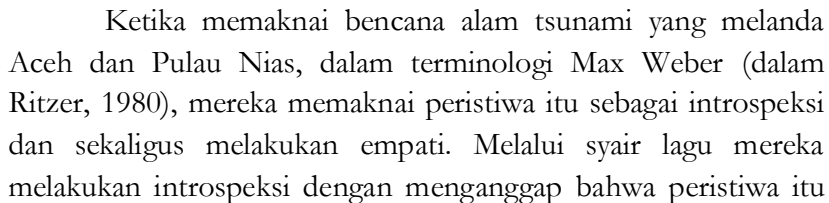
Bagi sebagian masyarakat berkesenian untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keindahan, sebagian masyarakat lainnya berkesenian selain untuk memenuhi rasa keindahan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan yang sifat material, bahkan dipakai untuk mengekspresikan rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan kesenjangan. Alasan subyektif orang memenuhi kebutuhan rasa keindahan yang bersifat non-material lebih bersifat rekreatif, yang dalam bahasa Max Weber (dalam Ritzer, 1996) disebut dengan tindakan sosial afektual. Ketika dipakai sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan material, berkesenian seperti itu lebih bersifat rasional instrumental. Berkesenian sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial dan kritik sosial. Cara ini lebih bersifat ideologis.

Pandangan seperti itu justru merupakan antitesis dari pandangan Karl Marx (Ritzer, 1996) yang menganggap kesenian adalah bagian dari suprastruktur yang lebih menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Bagi para pemilik modal dunia kesenian diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan, misalnya, yang terjadi pada dunia hiburan di Indonesia. Di balik gemerlapnya dunia hiburan di Indonesia, para pemilik modal mendapatkan keuntungan besar.

Para pengamen jalanan mencoba mengkaitkan kondisi obyektif masyarakat dan kondisi subyektif kehidupannya dengan substansi syair-syair lagu yang mereka ciptakan. Kondisi obyektif dan subyektif tersebut mereka ekspresikan melalui rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna dalam lagu-lagu. Dalam posisi demikian para pengamen jalanan memposisikan kesenian tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya material, mereka juga memposisikan kesenian melalui syair-syair lagu yang diciptakan dan dinyanyikan sebagai media untuk melakukan kontrol sosial, kritik sosial, bahkan protes terhadap tingkah polah aparat birokrasi dan aparat represif negara yang mereka nilai telah melakukan ketidakadilan, penindasan, perampasan, penggusuran, dan bahkan pembunuhan kepada orang-orang yang berasal dari masyarakat lapisan bawah. Mereka juga menggunakan syair lagu-lagu yang mereka ciptakan untuk melakukan kritik terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang meluas di Indonesia dan kebijakan-kebijakan supratsruktur yang lebih memihak kepada para pemilik modal daripada memihak masyarakat kelas bawah. Bahkan melalui lagu-lagu yang diciptakan, mereka mengekspresikan apa yang mereka alami sebagai pengamen jalanan dan mengekspresikan preferensi mereka tentang *the best rezim* atau masyarakat yang ideal.

Bagi pengamen jalanan, melalui syair lagu, *the best rezim* atau masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang dicirikan oleh adanya kemerdekaan dalam semua aspek kehidupan. Negara yang warga negaranya memperoleh kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, bebas dari rasa takut, bebas dari penindasan, bebas penggusuran, bebas dari polah tingkah aparat birokrasi dan keamanan yang represif, bebas dari pembunuhan, bebas dari kemiskinan, dan kebebasan lainnya. Melalui syair lagu-lagunya para pengamen jalanan mempunyai preferensi tentang demokrasi dan negara yang merdeka. Mereka menyebut *orde babi* untuk menggambarkan protes mereka terhadap pemerintah Orde Baru

Bagan 8.1
Musik Jalanan:
Cermin Hubungan antara Negara dan Pengamen Jalanan



sebagai akibat dari dosa manusia dan Tuhan menunjukkan murka-Nya. Dalam empatinya para pengamen jalanan mempunyai kesadaran bahwa di tengah-tengah kemiskinan yang mereka alami, sebagai manusia rasa kemanusiannya tersentuh ketika sebagian dari anggota masyarakat mengalami bencana alam yang tak mampu dihadapi oleh manusia manapun. Kesedihan dan rasa kemanusiaan itu mereka ekspresikan melalui syair-syair lagu.

Bagi pengamen jalanan mengamen di jalan adalah sebagai okupasi (pekerjaan). Pekerjaan satu-satunya yang menjadi salah satu sumber pendapatan. Penhasilan mereka sebagai pengamen jalanan sangat tergantung pada kompensasi yang diberikan oleh orang lain. Mereka memperoleh penghasilan rata-rata Rp 10.000. Meskipun kecil, bagi para pengamen jalanan, yang dipentingkan adalah penghasilan tersebut diperoleh dengan cara legal dan halal. Secara sosiologis para pengamen jalanan mengalami mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial yang terjadi antar-sektor informal. Sebelum menjadi pengamen jalanan mereka rata-rata pernah bekerja di sektor informal lainnya, seperti pedagang makanan, buruh pabrik, buruh bangunan, bahkan pekerjaan tetap. Mereka mengalami mobilitas sosial karena berbagai macam sebab, mulai dari krisis ekonomi hingga penertiban oleh aparat polisi pamong praja.

Para pengamen jalanan mempunyai alasan subyektif yang beragam tentang pemilihan lagu yang dinyanyikan. Dilihat dari lagu yang dipilih dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: campursari (Jawa), religius, populer, dangdut, dan kritik sosial (lagu ciptaan sendiri). Lagu-lagu campursari dinyanyikan oleh pengamen jalanan berjenis kelamin perempuan serta usia muda dan tua, representasi dari kategori ini adalah Mak As dan Naning. Selain campursari Mak As juga menyanyikan lagu religius seperti qosidah dan sholawat. Naning juga merupakan representasi yang menyanyikan lagu dangdut. Lagu-lagu populer dan lagu-lagu yang mengandung kritik sosial lebih dipilih oleh pengamen jalan

berjenis kelamin laki-laki dan berusia relatif muda. Wawan dan Iwan merupakan representasi pengamen jalanan yang memilih lagu-lagu populer, sedangkan Termas adalah sosok yang lebih memilih lagu-lagu ciptaannya sendiri yang di dalamnya mengandung kritik sosial dan protes.

Sementara dilihat dari alasan subyektif memilih lagu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: usia, kemudahan, dan konsumen. Pengamen jalanan yang berusia tua, seperti Mak As, lebih pantas menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat, dan campursari, sementara Termas yang usianya baru 20 menganggap tidak pantas menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta, ia lebih memilih lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri yang mengandung kritik sosial dan protes. Bagi Naning, ia menyanyikan lagu-lagu dangdut dan campursari karena mudah untuk dinyanyikan, sementara Wawan dan Iwan lebih mempertimbangkan selera konsumen dan menyesuaikan dengan segmen pasar. Bagi Wawan dan Iwan lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer, seperti lagu-lagu milik Dewa, Radja, Padi, Slank, dan Peterpan untuk memenuhi selera konsumennya yang rata-rata berusia masih muda. Tidak jarang ketika berhadapan dengan penumpang bus yang rata-rata berusia lanjut mereka menyanyikan lagu-lagu nostalgia (*oldist*).

Daftar Pustaka

- Bakker, J.W.M.
1990 **Filsafat Kebudayaan. Suatu Pengantar.** Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.
- Cassier, Ernst.
1987 **Manusia dan Kebudayaan. Sebuah Esei tentang Manusia.** Diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- 194 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Danandjaja, James.

- 1983 Fungsi Teater Rakyat bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia. Dalam Edi Sedyawati dan Sapardi Djoko Damono. **Seni dalam masyarakat Indonesia. Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 1984 **Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain**. Jakarta: Grafitipers.

Darmono, Sapardi Djoko.

- 1977 Kritik Sosial dalam Sastra Indonesia: Lebah tanpa Sengat. **Prisma**. No. 10/ Tahun VI.

Krippendorff, Klaus.

- 1991 **Analisis Isi. Pengantar Teori dan Metodologi**. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Pers.

Murray, Alison J.

- 1992 Budaya Kampung dan Elok Radikal di Jakarta. **Prisma**. No. 5/Th. XXI.

Peursen, C.A. van.

- 1985 **Strategi Kebudayaan**. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.

Ritzer, George

- 1996 **Sociological Theory**. Fourth Edition. Toronto: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 1980 **Sociology A Multiple Paradigm Science**. Revised edition. Toronto: Allyn and Bacon, Inc.

Soekiman, Djoko.

- 2000 **Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Media Abad XX)**. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Sudiarja, A.

- 1983 Susanne K. Langer: Pendekatan Baru dalam Estetika. Dalam M. Sastrapratedja. **Manusia Multi Dimensional. Sebuah Renungan Filsafat**. Jakarta: Gramedia.

Susanto, Astrid S.

- 1977 Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara. **Prisma**. No. 10/Tahun VI.

Bab 9

Mahasiswa dan Orang Miskin Kota

Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan
Usman Mulyadi

Pendahuluan

Apa yang dialami daerah kota besar dan sekitarnya di Indonesia terutama pada tahun 1990-an adalah pertumbuhan bidang jasa dan industri yang makin pesat, meninggalkan bidang pertanian yang menjadi tujuan semula pembangunan. Tujuan semula, sektor industri dibangun untuk menopang pertanian, sesuai dengan GBHN pada Pelita I. Pertumbuhan ini ternyata mengakibatkan pengalihan fungsi lahan, dari yang semula perumahan ke pusat perdagangan atau dikenal dengan istilah CBD (*Central Bussiness District*) dan kawasan industri, dari lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman baru – harga komoditas pertanian rendah dan keuntungan dari nilai tanah untuk alih fungsi (*Kompas*, 15 Agustus 2002, “*Menteri Pertanian Bungaran Saragih: Konversi Lahan Terjadi akibat Harga Komoditas Pertanian Rendah*”; perhatikan juga Kustiawan, 1997; 15-32; bandingkan dengan kasus kota Mexico City, Sao Paolo dan Kalkuta pada Todaro dan Stilkind, 1985: 4-9), keadaan serupa terjadi di Surabaya dan daerah sekitarnya, atau dikenal dengan *Gerbangkertasusila*, dengan Surabaya, sebagai pusat pertumbuhannya.

Dari beberapa catatan, konsekuensi dari alih fungsi atau konversi lahan ini adalah terjadi “penggusuran” penghuni pemukiman “kumuh.” Setelah digusur, kemudian didirikan gedung-gedung bertingkat, baik sebagai hotel dan kantor, seperti Darmo Tegal dan Pandegiling, maupun industri, seperti daerah Rungkut (SIER) dan pemukiman baru. Perluasan kawasan industri ini juga merambah sepanjang jalan menuju Sidoarjo dan Mojokerto (Trosobo dan Krian), demikian pula Kab. Gresik dengan diawali oleh Pabrik Semen Gresik dan Petrokimia Gresik. (*lihat* laporan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur tentang *Pelayanan di Bidang Sertifikasi Tanah*, tahun 1998-1999).

Akibatnya, pertama, terjadi “penggusuran” kampung-kampung lama dan kemudian terdesak ke daerah pinggiran kota. Akibatnya, selalu ada konflik antara pengembang dan kampung lama yang akan tergusur. Konflik ini berpulang pada mekanisme perencanaan kota yang tambal sulam dan dinilai oleh masyarakat lebih menguntungkan pengembang dan kelompok kepentingan lainnya. Pihak birokrasi kota dan Dewan lebih berpihak pada pengembang dengan mengatasnamakan kepentingan publik (Surbakti, 1994: 49-68; 1996: 22; Suyanto, 1996: 37-48). Sementara itu, alasan yang serupa, sektor informal yang menjadi penopang kelompok masyarakat rentan kota agar dapat bertahan di lingkungan kota juga turut digusur, perhatikan kasus Tunjungan dan sejumlah pasar tradisional.

Kedua, akibat tergusur kampung-kampung lama, dan bergeser ke daerah pinggiran kota ini, menimbulkan konflik baru di pemukiman baru. Alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian, yaitu industri, perdagangan dan pemukiman, menimbulkan kesenjangan dan konflik antara penduduk asli dan penghuni pemukiman baru. Mereka, penduduk asli, kehilangan mata pencaharian sebagai petani ketika tanahnya dijual, dan sementara itu uang “landasan” biasanya dibelikan barang-barang konsumtif – akibatnya setelah uang habis, begitu pula dengan barang-barang-

nya, mereka menjadi pengangguran, atau bila memenuhi syarat, menjadi buruh di pabrik yang berdiri di atas tanahnya. Penurunan status dari pemilik menjadi buruh ini menimbulkan rasa tidak senang ketika melihat penghuni baru, pindahan dari masyarakat kota yang “relatif” lebih mapan hidupnya. Di pihak lain, mereka harus berjuang mengembangkan hubungan buruh-majikan--karena dipandang sebagai mereka yang lebih membutuhkan pekerjaan, maka perlakuan majikan tidak menguntungkannya.

Ketiga, proses sosial yang demikian ini kemudian berlanjut menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah sosial baru dimulai masalah pengangguran, masalah kenakalan remaja hingga tingkat kriminalitas, dari sekedar corat-coret pagar hingga pencurian di perumahan baru. Dari beberapa catatan penghuni pemukiman baru, mereka dan anak-anaknya mengalami benturan dengan penduduk asli (lama), mulai dari perkelahian anak-anak, di-“balak” hingga mengalami pencurian bila rumah ditinggalkan. Inilah konsekuensi dari rangkaian fenomena pertama.

Keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota ini sebenarnya bukan hal yang baru, di Yogyakarta, bersama dengan Romo Mangun, mereka terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Kali Code dengan mengajar anak-anak di bawah kolong, dan berbagai LSM didirikan oleh mahasiswa untuk kepentingan tersebut. Perkembangan selanjutnya, mereka terlibat pula dalam mengartikulasikan kepentingan dalam bentuk demonstrasi, seperti kasus Dita Indah Sari dalam demonstrasi buruh, dan berbagai aktivitas serikat buruh lainnya.

Selain memberi keberanian untuk mengartikulasikan kepentingan strategis, kehadiran mahasiswa, khususnya teater kampus, membuat bentuk lain dari aksi demonstrasi kelompok tersebut. Dari pengamatan awal, keterlibatan teater kampus terjadi tatkala menyelami kehidupan kelompok tersebut untuk menghasilkan ide-ide cerita teater yang sarat akan kritik sosial. Namun,

pada gilirannya observasi partisipan ini bergulir menjadi tindakan aksi atau partisipatif untuk memberdayakan kelompok tersebut.

Metode Penelitian¹²

Dengan memperoleh data tentang isu-isu ketimpangan sosial-politik yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat rentan kota, tulisan ini juga mencermati perubahan pola demonstrasi dan keterlibatan mahasiswa sebagai kaum intelektual. Dengan mengambil *setting* di Surabaya, dilakukan wawancara secara mendalam pada mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota. Selain itu, karena peristiwanya telah berlangsung sebelum penelitian ini dilakukan (*ex-post facto*), maka tulisan ini juga menggunakan sumber-sumber sejaman, seperti Jawa Pos, Surya, Kompas, Bernas, Pikiran Rakyat dan Suara Merdeka. Sumber-sumber tersebut diakses melalui internet. Selain dari situs-situs surat kabar, data juga diperoleh dari situs-situs lsm, seperti Elsam dengan situs www.elsam.com dan konsorsium kelompok miskin kota (UPC) dalam www.urbanpoor.or.id.

Penggunaan wawancara secara mendalam itu bagian dari *oral history* dilakukan pada pelaku, yaitu mahasiswa yang terlibat dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota, khususnya mereka yang berasal dari teater kampus. Individu-individu diperoleh dengan secara purposif dan *snowball*, begitu pula kelompok masyarakat rentan kota yang pernah melakukan demonstrasi. Informasi awalnya diperoleh dari sumber-sumber pertama (cara pertama). Dalam wawancara tersebut, diharapkan dapat memperoleh (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang

¹² Diolah dari Hasil Penelitian Fundamental yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2005 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) usaha mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan.

Dari data sumber-sumber surat kabar, dengan melalui tahapan dalam analisis sejarah dilakukan rekonstruksi tentang pola demonstrasi dan perubahannya pada tahun 1990-an hingga sekarang, berikut isu-isu kesenjangan sosial politik, sedangkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam tentang (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) proses mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan. Di dalam analisis kualitatif, data tersebut diberi koding. Data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara mendalam dilakukan analisis domain, hingga analisis komponensial. Dari teknik-teknik analisis ini, diperoleh proposisi-proposisi yang menggambarkan fenomena tersebut.

Orang Miskin Kota sebagai Korban Kebijakan Pembangunan

Tata Ruang Kota:

Pengusuran, kehilangan rumah dan tempat usaha?

Sungguh tepat sekali, bila kita menggunakan gambaran dari James C. Scott (1983: 27-52) tentang betapa rentannya masyarakat miskin. Ia menggambarkan bahwa setiap kebijakan makro yang terkena pada keluarga miskin seperti ombak yang menerjang orang yang tenggelam dengan air sebatas hidung. Sekali ombak datang, maka tenggelam pula orang tersebut. Oleh karenanya, mereka, kelompok miskin menggunakan prinsip dahulukan selamat (*the safety first*).

Meski terbatas, masyarakat desa tetap memiliki memiliki pilihan. Bila rawan pangan misalnya, orang desa akan mengalihkan makanan pokoknya, dari beras ke ketela, dan seterusnya. Bila tergusur, meski tanah itu telah menjadi bagian diri dan keluarganya, mereka masih bisa menempati tempat-tempat lain di desa yang belum dikelola – sudah barang tentu berubah statusnya dari pemilik ke *ngindung* atau *magersaren* (strata yang rendah dalam masyarakat desa). Tidak demikian pada masyarakat miskin kota, pilihan mereka (amat) sangat terbatas. Klugman (2002: 63) mencatat bahwa orang miskin (rentan) kota sangat tergantung pada pasar kerja yang dualistik dengan bentuk pembayaran tunai (*cash*), tidak memiliki akses pada infrastruktur formal, tidak memiliki akses tanah dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan terakhir dalam situasi ini mereka lebih mengandalkan pada jaringan keluarga daripada pemerintah.

Perubahan tata ruang kota sering berakibat pada masyarakat miskin kota dalam hal pemukiman dan penghidupan (mata pencaharian). Dari pengamatan Ramlan Surbakti (1996: 20-21) pada tahun 1990-an, ada delapan pola perebutan ruang kota.¹³ *Pertama*, konflik antara pemkot dan warga berkaitan dengan perubahan peruntukan tanah, seperti kasus Ngagel Jaya Selatan (antara pusat perdagangan dan jalur hijau), dan Simogunung (penggusuran untuk jalur hijau). *Kedua*, konflik antara pemkot dan perusahaan swasta akibat tindakan swasta menyerobot tanah milik pemkot.¹⁴ *Ketiga*, konflik antara warga dan investor. *Keempat*,

¹³ Perebutan tata ruang kota terlihat pada tarik ulur tentang perda RT/RW. Di dalam perda tersebut, kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki akses di birokrasi (pemkot) dan legislatif (dewan), mengatur peruntukan daerah. Di tingkat pelaksanaan, perebutan tata ruang kota terjadi di BPN untuk status tanah dan perijinan usaha di Dispenda.

¹⁴ Dan, kini terjadi perebutan akibat alih pemilikan dari Pemkot ke perusahaan atau milik pribadi, seperti kasus Gelora Pancasila dan Kolam Renang Brantas.

konflik antara pemkot dan warga yang tergusur akibat pelebaran jalan atau kepentingan umum karena ganti rugi terlalu rendah, seperti: kasus pelebaran jalan Kenjeran untuk *ring road* Timur. *Kelima*, konflik antara eksekutif dan Dewan (publik) karena peralihan aset pemkot tanpa persetujuan Dewan, seperti penjualan *bondho deso* di Pradah Kali Kendal), di Lakasantri dan pengalihan Pasar Induk Sayur Kendangsari. *Keenam*, konflik antara warga, investor dan pemkot karena pemkot membebaskan tanah penduduk dengan alasan untuk kepentingan umum, tetapi kenyataannya untuk kepentingan swasta, seperti: kasus Tubanan, Kasus Pradah Kalikendal, kasus makam Kalidami, dan kasus penggusuran rumah warga Gang Kaliasin Pompa (Kedungdoro), *Ketujuh*, penggunaan tanah fasilitas umum yang tidak jelas dan dijual oleh developer, seperti: kasus tanah YKP di Balongsari dan berbagai kompleks perumahan. Terakhir, konflik akibat salah prosedur dari pihak pemkot, seperti kesalahan pembebasan tanah dan penyimpangan uang dalam kasus SSC dan kasus dua SK untuk bidang tanah yang sama di Dukuh Kupang Timur.

Penggusuran demi tata ruang kota, dengan kata lain ada perubahan peruntukan lahan ini, bagi masyarakat rentan kota sangat berpengaruh. Mereka tidak saja kehilangan tempat tinggalnya, tetapi juga kehilangan mata pencaharian. Oleh karenanya, warga di sekitar Padegiling misalnya, hingga kini tetap bertahan tidak mau pindah. “Berapa pun ganti rugi, asal bisa dapat rumah dan bangun usaha lagi. Kami bersedia.”¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan salah seorang warga Padegiling, tanggal 30 Juli 2005.

Tabel 9.1
Penggusuran dan Kurbannya di Surabaya Tahun 1990-sekarang

Tahun ¹⁶	Penggusuran	Keluarga	Warga
2005	2 kasus	---	500
2004	1 kasus	---	50
2002	3 kasus	200	8.000
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200
1992-1993	26 kasus	109	2.913
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200

Sumber: Suyanto (1996), Supramudyo (2000), dan *UPC-link* (2005)

Namun demikian, dari seluruh kasus tersebut, tidak satupun berpihak pada warga. Pemkot lebih cenderung berpihak pada investor. Pada tahun 2003-2005 peremajaan pasar tradisional misalnya telah mengakibatkan kerugian bagi pedagang tradisional. Di Wonokromo misalnya, pedagang tidak lagi bisa berjualan selama 24 jam, tetapi dibatasi hingga pukul 21.00. Tokonya jauh lebih sempit dibandingkan dengan pasar lama. Mereka, pedagang lama juga tetap harus membeli, sehingga ketika relokasi kembali sebagian mereka tidak setuju, bahkan dari pengamatan¹⁷ di lapangan sejumlah pedagang menderita stress, terutama mereka yang tidak memiliki uang.

¹⁶ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

¹⁷ Pengamatan bulan Januari s/d Mei 2005.

UMR, UMK, dan Sistem Kontrak versus Kenaikan BBM

Persoalan lain dalam masyarakat rentan kota adalah upah. Selain bekerja di sektor informal, sebagian masyarakat tersebut bekerja di pabrik, pusat perbelanjaan (toko) dan perkantoran. Mereka tinggal tidak pernah jauh dari tempat kerjanya, seperti yang telah disebutkan di kampung-kampung tengah kota untuk pusat perbelanjaan, dan kampung-kampung sekitar pabrik, seperti Rungkut, Ngagel, dan Dupak. Sebagian lain membeli rumah tipe RSS jauh di pinggir kota, bahkan di luar kota, seperti Driyorejo. Tinggal kost di dekat tempat bekerja dan membeli rumah di pinggir kota sebenarnya tidak jauh berbeda karena pengeluaran rumah tangga kurang lebih sama. Mereka yang tinggal di tempat kerja harus membayar kost dan biaya lainnya, sementara itu bila di pinggir kota harus mengeluarkan uang transport yang kuang lebih sama besarnya.

Ada perbedaan pendapatan (upah), bagi mereka yang bekerja di di toko, restoran, atau usaha rumah tanggan lainnya, upahnya sering di bawah standar UMR, tidak jaminan kesehatan, meski memperoleh uang makan. Kelebihannya, hubungan antara pekerja dan pemilik bersifat personal, kekeluargaan, hal itu bergantung pada pemiliknya. Tidak jarang, sering terjadi kekerasan atau pelecehdan karena pemilik bersifat sewenang-wenang.

Sementara itu, mereka yang bekerja di pabrik memperoleh upah per harinya. Upah tersebut dapat dibayar setiap minggu, atau setiap bulan. Selain menerima upahnya, sering perusahaan juga memberikan uang makan, dan insentif lainnya. Perusahaan biasanya menyertakan buruhnya (tetap) ke dalam jamsostek. Preminya dibayar setiap hari oleh perusahaan, namun bila tidak masuk dengan (tanpa) ijin upah buruh dipotong oleh premi tersebut.

Upah tersebut mengalami kenaikan yang ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhannya. Pada tahun 1990-an, upah tersebut berdasarkan patokan kebutuhan fisik minimum (KFM) dengan juga mempertimbangkan tingkat inflasi pada harga-harga barang. Ukuran KFM ini memiliki kelemahan. KFM bujangan diukur dengan 2.600 kalori/hari, K-2 (KFM untuk seorang buruh, isteri dan dua anak) setara dengan 8.100 kalori/hari, bila dengan tiga anak, maka KFM setara dengan 10.000 kalori/hari. Kriteria ini menjadi kelemahan pertama dari ukuran tersebut, buruh disetarakan dengan alat produksi dan upah disetarakan dengan tenaga yang dikeluarkan. Kelemahan kedua, barang-barang yang digunakan untuk mengukur KFM hanya berdasarkan kebutuhan buruh laki-laki yang jauh lebih sederhana daripada kebutuhan buruh perempuan (Rudiono, 1992: 70-71).

Dari ukuran ini, kemudian setiap propinsi menetapkan upah minimumnya yang dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional). Asumsinya, harga barang pada setiap propinsi berbeda, oleh karenanya upah minimum buruh pun berbeda. Pada pemerintahan Suharto, upah minimum tersebut ditentukan tidak saja hanya pada wilayah propinsi, tetapi pada wilayah kabupaten atau kota dengan dikenal UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum tersebut tidak saja berdasarkan kebutuhan fisik minimum, tetapi kebutuhan hidup minimum, yaitu dengan menambah beberapa komponen barang kebutuhan lainnya.

Bila pada tahun 1980-an dengan mengikuti hasil kajian Rudiono (1992: 70-76) berdasarkan perbandingan data tahun 1982, 1985 dan 1988, maka upah tersebut tidak pernah melebihi 60% dari KFM, perbandingan tertinggi dicapai di DI Aceh (kini NAD) pada tahun 1982, yaitu 84,6% dari KFM. Kini, untuk Jawa Timur, UMR yang ditetapkan telah sedikit melebihi dari KFM, yaitu sekitar 4%. Kenaikan tersebut menjadi tidak berarti karena

bersamaan dengan penetapan UMR, harga-harga kebutuhan pun semakin naik, terutama kebutuhan bahan pokok (Dinas Infokom Jatim, 2004a).

Bila memperhatikan tabel 9.2, meski kenaikan harga beras berjalan secara linear dengan tidak tajam,¹⁸ tetapi sebenarnya biaya hidup telah meningkat seiring harga BBM yang sering kali ditetapkan pada pertengahan tahun tersebut. Ada perbedaan pola yang dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) dan pemerintahan sesudahnya. Bila pada masa pemerintahan Suharto, kenaikan BBM tidak secara transparan dan terkesan mendadak, sehingga kenaikan harga terjadi pada paska kenaikan harga tersebut. Sementara itu, pada pemerintahan sesudahnya, rencana kenaikan harga tersebut telah disampaikan antara tiga hingga empat bulan sebelumnya. Pada saat pengumuman rencana kenaikan tersebut, para pedagang telah menaikkan harga, dan kemudian berlanjut pada saat penetapan harga baru BBM. Lebih celaka lagi, kenaikan harga BBM sering diikuti oleh kenaikan harga air minum dan tarif dasar PLN.

¹⁸ Pemerintah melakukan pengendalian harga beras dengan cara membuka kran impor beras dari Vietnam dan Cina, sehingga harga beras lokal menjadi jatuh karena secara bersamaan sering dilakukan pada musim panen. Kebijakan ini sangat merugikan kelompok petani (baca **Kompas**, 24 September 2005, "Menggugat Kebijakan Absurd Impor Beras.").

Tabel 9.2.
UMR/UMK Surabaya, BBM, Harga Beras, Emas, Premium dan Kurs
Rupiah thp Dollar tahun 1990-sekarang

Dalam rupiah

Tahun ¹⁹	UMR & UMK	Komoditi		Bahan Bakar Minyak		Kurs Rupiah thp Dollar
		Beras	Emas ²⁰	M. Tanah ²¹	Premium	
2005	578.500	4.000	123.000	700-1.800	1.810-2.400	9.900
2004	550.580	3.700	114.000	700-1.800	1.810	8.900
2003	515.850	3.500	90.000	700-1.800	1.810	8.250
2002	453.500	3.500	80.000	820-1.530	1.450-1.750	8.250
2001	330.700	3.300	76.000	895-400	1.150-1.450	8.250
2000	270.000	3.100	110.000	350	1.150	8.250
1999	230.000	3.000	90.000	350	1.000	8.250
1998	---	1.350-4.500	140.000	280-350	1.000-1.200	2.375-10.500
1997	132.500	1.350	140.000	280	700	2.478
1993-1997	---	800	90.000	280	700	2.000
1991-1993	89.677	700	26.000	220	550	2.000
1990-1991	78.000	600	22.000	190-220	450	2.000
1986-1990	63.285	200-500	10.000	165	385	1.644

Sumber: Kwik (1998), Rudiono (1991) Dinas Infokom Jatim (2005a, 2005b, dan 2005c), Tabor dan Sawit (2001), Pertamina (2005), Astono dan Rosyadi (1997), **Tempo** (1991), 89.677Rahman (1994).

¹⁹ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

²⁰ Harga emas berfluktuasi mengikuti harga emas dunia dan kebutuhan dalam waktu tertentu, seperti: pada waktu puasa harga turun, namun beberapa hari sebelum hari raya harga emas naik, dan akan jatuh kembali sesudah hari raya.

²¹ Selain menentukan patokan harga, untuk minyak tanah Pemerintah menentukan harga eceran tertinggi (HET).

Pemerintah seringkali menenangkan dengan mengatakan tidak ada kenaikan harga yang berarti, atau akan mengadakan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Namun demikian, pada kenyataannya kenaikan tersebut bisa mencapai 100%., dan, bagi masyarakat miskin kota, seberapa pun kenaikannya harga sangat berpengaruh pada kehidupannya. Hal itu akan berpengaruh pada usahanya (sektor informal), seperti dikatakan oleh penjual nasi pecel, *“Ngene iki susah. Ora mundak no rego sing tuku iyo wis kurang. Opo maneh mundakna rego, ora ono sing tuku. Aku bakal rugi. Ora balek modal. Pilih rego tetap, untunge sithik, sing penting mlaku terus”* (Kalau begini susah. Tidak menaikkan harga saja orang yang beli semakin berkurang. Apalagi menaikkan harga, tidak ada yang beli. Saya bisa rugi. Tidak kembali modal. Saya pilih harga tetap, untung sedikit).

Kondisi buruh pabrik jauh tidak beruntung. Kenaikan UMR, kenaikan BBM dan kurs rupiah terhadap dollar sering mengakibatkan pabrik bangkrut, *“apalagi sekarang harus berhadapan dengan barang-barang Cina yang murah.”* Ketika sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bangkrut, perusahaan menggunakan banyak cara untuk mem-PHK, mulai dari secara ketat mencari kesalahan dari buruhnya hingga langsung mem-PHK dan menyerahkannya pada Disnaker dalam proses P4P. Meskipun tidak jarang dimenangkan pihak buruh, tetapi jarang dilaksanakan eksekusi keputusan tersebut. Sementara itu, buruh terus menunggu tanpa pesangon dan mencari pekerjaan lain.

Tahun 2005 ini, peraturan perundang-undangan terbaru memungkinkan pengusaha untuk menggunakan sistem kontrak. Sistem kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, sesudah dapat diperbaharui. Cara ini kini yang dipakai oleh pengusaha, dengan sistem ini tidak perlu mengeluarkan uang pesangon, dan pekerja cenderung tidak menuntut karena takut tidak diperpanjang. Ada kecenderungan perusahaan memilih sistem kontrak. Untuk itu, perusahaan sering merubah suasana kerja, sehingga karyawan

tetap tidak betah, memilih keluar (mengundurkan diri) dan kemudian memasukkan karyawan baru. *“Wah, tepat saya sekarang ketat banget. Salah sedikit, langsung di-SP. Kalau sudah lebih dari dua kali, disuruh membuat surat pengunduran diri,”* seperti yang dikatakan oleh seorang karyawan pusat perbelanjaan yang ada di tengah kota Surabaya.

Selain penggunaan sistem kontrak, pengusaha juga menggunakan sistem kerja borongan, upah bergantung dari tingkat produktivitas buruh. *“Iya, pernah saya hanya memperoleh lima puluh ribu rupiah seminggu. Apa cukup untuk makan? Iya, ngutang ke tetangga, kalau diberi,”* kata Mbak T, seorang buruh yang berstatus janda dengan dua anak. Di dalam sistem borongan tersebut, buruh bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing. Setiap ada barang yang hendak dikerjakan, maka kelompok-kelompok itu berebut dan mengerjakan sebanyak mungkin. *“Kalah berebut, maka hasilnya sangat sedikit,”* tambah Mbak T.

Dalam sistem ini, pengusaha hanya membayar sesuai dengan hasil produk yang dikerjakan. Tidak ada tambahan, seperti: uang makan dan uang kehadiran. Ikatan antara buruh dan pengusaha hanya sebatas ada tidaknya pekerjaan borongan. Bila tidak ada pekerjaan borongan, maka buruh pun menganggur di rumah. Buruh hanya menunggu panggilan dari pabrik. Sementara menunggu pekerjaan, buruh menggunakan tabungannya untuk bekerja ke sektor informal, seperti berjualan pentol bakso dengan sepeda *pancal*.

Mahasiswa sebagai Gaya Hidup Kelas Menengah Kota

Dari pengamatan di lapangan, meski tidak ada penelitian yang menggambarkan adanya korelasi antara status sosial ekonomi dan pilihan universitas, fakultas berikut jurusanannya, nampak terjadi segregasi mahasiswa dari status sosial ekonominya. Untuk perguruan tinggi swasta, mahasiswa yang

berasal dari status sosial ekonomi menengah ke atas lebih memilih Ubaya (Universitas Surabaya), UK Petra, dan WM (Universitas Widya Mandala). Pola yang demikian ini terjadi pula pada mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Oleh karenanya, harga kost di sekitar kampus tersebut bisa mencapai di atas 1 (satu) juta. Di sekitar kampus UK Petra, kamar kost di daerah Siwalankerto mencapai harga 3 juta dengan iklan “*kamar kost dengan fasilitas hotel berbintang.*”

Sementara itu, kelompok mahasiswa berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah memilih tinggal di kamar kost dengan harga 100 ribu ke bawah. Mereka tinggal di daerah kampung-kampung yang padat. Kamar kostnya diisi dua hingga empat orang dengan tempat tidur susun. Dari pengakuan seorang mahasiswa Unesa, Ani (bukan nama sebenarnya), mereka mendapat kiriman sekitar 300 ribu hingga 500 ribu rupiah. Seratus ribu untuk kamar kost, sisanya untuk makan, perlengkapan sehari-hari (sabun, shampo dan odol) dan buku. Jatah makan sehari adalah 10 ribu rupiah, dan sering mereka hanya makan dua kali sehari.

Dengan jumlah kiriman yang terbatas, mereka menerapkan strategi adaptif yang unik diamati. Ada berbagai cara, antara lain: hanya membeli lauk, sedangkan nasi ditanak sendiri, bahkan ada yang mengakui bahwa pada minggu terakhir setiap bulan hanya makan nasi, krupuk dan sambal, atau makan 2 (dua) kali sehari. Tempat tinggal juga disiasati, mulai dari cara kontrak dengan beberapa teman, hingga tinggal di UKM dan Masjid Kampus. Untuk keperluan buku, mereka memilih untuk meminjam pada kakak kelas, fotokopi pada bagian tertentu saja, atau ke perpustakaan, terutama pada saat menjelang ujian.

Pola konsumtif pun berbeda, pada mahasiswa kelas menengah ke atas selalu membawa HP, bahkan HP tersebut berfitur kamera dan movie. Pakaian dan kendaraan yang digunakan pun berbeda dan bergantung dari asal kelas ekonominya. Mobil

setingkat sedan atau niaga terbaru (kijang dan panter) sering berada di parkir kampus-kampus universitas (lihat tabel 9.4). Malam hari, tidak selalu bergantung pada hari kuliah atau tidak, mereka mengunjungi kafe-kafe, seperti Hugo Kafe. Di dalam setiap percakapan, mahasiswa kelas menengah ke atas sering berbicara mengenai tempat-tempat dugem baru. Untuk pergi ke tempat dugem, meeka berkelompok atau berpasang-pasangan dengan membawa mobil.

Tabel 9.3
Mahasiswa antara Status Sosial Ekonomi dan Pilihan Jurusan dan Universitas

Status Sosial Ekonomi	Perguruan Tinggi		Fakultas/Jurusan
	Negeri	Swasta	
Atas	Univ. Airlangga dan ITS	Ubaya, UK Petra dan Widya Mandala	Teknik Arsitektur, Teknik Informatika Kedokteran (Umum dan Gigi), Ekonomi Akuntansi.
Menengah	Univ. Airlangga dan Unesa	Untag 17 Agus- tus, Unitomo, Univ. Hang Tuah, dan UPN	Teknik Industri, Teknik Sipil, Ekonomi, Ilmu-ilmu Sosial dan MIPA
Bawah	Unesa dan IAIN	Ubhara, Unipa, UWP dll	Pendidikan, Politeknik dan Program Diploma (D1-D3)

Sumber: pengamatan

Mahasiswa dari kelas menengah (baru) mengambil bentuk hendak meniru kelas atas. Caranya, antara lain dengan pemilikan HP, meskipun beberapa di antaranya harus memilih tidak membeli buku teks. Pulsa yang digunakan sering dalam jumlah relatif besar, 200 ribu per bulan. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa dari kelas menengah atas, namun tidak harus berhemat. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan niaga ke-luaran paling muda adalah lima tahun terakhir.

Tabel 9.4.
Status Sosial Ekonomi Mahasiswa dan Gaya Hidup

Status Sosial Ekonomi	Pekerjaan Orang Tua (Bapak)	Ikon-ikon Budaya			
		Tempat Tinggal	Kendaraan	HP dan fitur	Barang/Kegiat an Konsumtif
Atas	Pengusaha (besar), Birokrasi Pemerintah dgn es. I	Rumah sendiri di perum. elit atau tipe 45 ke atas; kost dgn harga di atas 500 ribu/bulan.	Mobil, se- peda motor laki-laki dgn cc di atas 125,	HP dgn kamera dan movie	Kafe atau tempat dugem lainnya.
Menengah	Wiraswasta, birokrasi pemerintah dgn es II, Guru dan Dosen, pemilik tambak luas, petani kaya.	Rumah sendiri di perumahan dgn tipe 36, kost dgn harga 200-500 ribu/bulan.	Sepeda motor terbaru	HP	Ke Kafe, atau Jalan-jalan di Mall.
Bawah	Mracang, petani kecil, buruh dan sektor informal lain- nya	Rumah sendiri di kampung atau rumah RSS, kost dgn harga di bawah 200 ribu.	Sepeda motor dgn usia di atas 3 tahun, kendaraan umum, dan jalan kaki	Tidak ber-HP	Jalan-jalan ke Mall dgn frekuensi yg terbatas

Sumber : Pengamatan; bandingkan dgn **Kompas**, 30 September 1996. hal. 4.

Teater Kampus sebagai Bentuk Aktualisasi Diri

Seni teater merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara seni gerak, suara dan musik. Dalam seni tersebut, ada satu arahan cerita yang dibawa para pelakon. Arahan cerita tersebut bisa berasal dari tradisi lisan rakyat atau diangkat dari novel. Di Indonesia, seni teater ini, selain teater modern, seniman juga membawakan seni pertunjukkan tradisional, seperti

wayang orang, ketoprak atau kentrung. Di Jawa Timur, khususnya di wilayah pantura, ludruk tumbuh pada awal abad ke XX.

Tidak ada tulisan yang menggambarkan kapan teater memasuki dunia kaum intelektual, seperti mahasiswa. Djoko Soekiman (2000) menunjukkan bahwa seni pertunjukan tumbuh seiring dengan liberalisasi ekonomi. Seni tersebut dimainkan oleh para “budak” untuk memberikan kegembiraan bagi para “tuan.” Seni pertunjukan tersebut merupakan salah satu penciri dari kebudayaan indis.

Setelah keluar dari kampus, memang kaum intelektual Indonesia, seperti Sukarno, mengembangkan seni pertunjukan sebagai bagian dari *counter hegemoni* terhadap pemerintah kolonial. Ketika di Bengkulu, dalam pembuangannya, Sukarno membentuk kelompok teater. Hal yang serupa dilakukan pula oleh tokoh-tokoh pergerakan di Surabaya tatkala mengadakan pasar malam untuk mengumpulkan dana. Mereka mengundang seniman teater tradisional dan memasukkan ide-ide kritik pada pemerintah kolonial Belanda (Mustadji dan Sadewo, 1992).

Untuk lingkungan kampus pada pemerintahan Suharto hingga sekarang, seni pertunjukan kampus (teater kampus) tumbuh sebagai bagian dari Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) (1978-1998). Pada masa Daoed Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi mahasiswa diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan lebih mengembangkan kemampuan profesinya daripada terlibat dalam aksi politik (turun ke jalan). Dalam istilahnya, mahasiswa dikembangkan menjadi menara gading. Oleh karenanya, organisasi intra kampus direstrukturisasi, dema dihapus, digantikan dengan Sema (senat mahasiswa) dan BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) di tingkat fakultas, dan himakjur (himpunan mahasiswa jurusan) di tingkat jurusan dan himaprodi di tingkat program studi. Senat Mahasiswa dipimpin oleh ketua Senat yang dipilih oleh anggota BPM. Ia biasanya membawahi tiga bidang, yaitu (1) akademis, (2) minat dan bakat,

dan (3) kesejahteraan. Sementara itu, di tingkat universitas/institut dibentuk berbagai unit kegiatan mahasiswa, mulai dari olah raga, keagamaan hingga seni. Dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM), seni teater berkembang di kampus. Seni yang dikembangkan mengambil berbagai bentuk, mulai dari seni teater tradisional, seperti ketoprak, ludruk dan ketrung, hingga seni teater modern.

Tabel 9.5.
Perkiraan Jumlah Teater Kampus dan Anggotanya
di Surabaya

Jenis	Jumlah
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	
a. Teater Kampus	15
b. Anggota	350
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	
a. Teater Kampus	10-20
b. Anggota	200

Sumber : pengamatan

Dari perguruan tinggi negeri di Surabaya, IAIN memiliki jumlah terbanyak. Selain di tingkat institut sebagai UKM, setiap fakultas memiliki setidaknya-tidaknya satu teater kampus, bahkan ada pula teater kampus di tingkat jurusan. Setiap teater kampus memang tidak memiliki jumlah anggota yang besar, antara 10-20 orang, ada beberapa di antaranya aktif tidak di satu teater, misalnya: di tingkat institut dan fakultas. Mereka ini menjadi penggerak teater di tingkat lokal (fakultas dan jurusan). Teater ini mengisi setiap kegiatan/acara di tingkat fakultas dan jurusan. Menarik dicermati, selain Teater Kampus SUA (Sunan Ampel)

yang berbentuk UKM di tingkat institut, teater di tingkat fakultas, seperti Teater Q merupakan teater resmi di bawah pembinaan Pembantu Dekan III.

Tidak jauh dari IAIN Sunan Ampel, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang merupakan metamorfosa dari IKIP Surabaya – akibat kebijakan pemerintah untuk memberikan *double mandate* kepada seluruh IKIP di Indonesia – memiliki 2 (dua) teater kampus di tingkat institut, antara lain: teater institut dan saloka. Keanggotaan teater tersebut didukung oleh mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra, antara lain: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah dan Program Studi Sendratasik, dan dari Fakultas Ilmu Sosial, antara lain: Jurusan Pendidikan Sejarah. Teater Institut pada tahun 1990 hingga tahun 2002 cukup aktif dengan menampilkan setidaknya-tidaknya 2-4 lakon setiap semester, atau kurang lebih satu bulan sekali. Cerita lakon yang ditampilkan bisa merupakan hasil karya anggotanya, cerita adaptasi dari luar, seperti: Anton Chekov, dan cerita Cina, Sampek Engtay. Jumlah anggotanya lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Berbeda dengan Teater Institut, Saloka (Sanggar Ludruk dan Ketoprak mengambil bentuk teater tradisional, seperti: Ludruk dan Ketoprak. Dua tahun terakhir ini Saloka juga memainkan teater tradisional pesisiran, yaitu Kentrung. Bentuk teater kentrung ini dikenalkan oleh dosennya, Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo (alm) yang menulis disertasi tentang seni tersebut. Cerita lakonnya tidak terbatas pada cerita tradisional kentrung, tetapi sering menggunakan tema-tema baru. Pengaruh guru besar tersebut sangat kuat karena sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Selain kedua teater tersebut, ada satu teater yang bukan merupakan UKM. Teater tersebut berdiri dari tahun 1997 hingga 2000, sebut saja

teater Sanggar Abu-abu yang dipimpin oleh mahasiswa fakultas bahasa dan sastra, T²².

Hal yang serupa di ITS dan Unair. Teater kampus di ITS berkembang pesat tatkala mampu bergabung dengan stasiun televisi lokal, yaitu: JTV. Acara yang dikembangkan adalah bentuk teater tradisional, yaitu: ludruk dan kentrung. Ide-ide ceritanya bervariasi, dari cerita tradisional hingga ke cerita modern, bahkan mereka melakukan eksperimen dengan mengambil bentuk kontemporer dan menyebutnya *funky*.

Di perguruan tinggi swasta, ada 2 (dua) teater kampus yang menarik dicermati. Pertama, teater kampus “Kusuma” dari Universitas 17 Agustus 1945. Jumlah anggotanya sangat besar, hampir mencapai 100 orang. Mereka tidak saja memainkan di tingkat universitas, tetapi sering diundang untuk mengisi acara seni. Bentuk teaternya bisa berubah-ubah, dari teater tradisional hingga teater modern. Sementara itu, teater berikutnya adalah teater dari Fakultas Bahasa, UK-Petra. Karena didukung oleh Jurusan Bahasa Inggris, mereka mengambil bentuk teater modern dengan menggunakan Bahasa Inggris. Ide-ide cerita pun diadaptasi dari novel-novel berbahasa asing tersebut, seperti: Romeo dan Juliet. Bagi anggotanya, teater ini memiliki fungsi untuk melatih kemampuan percakapan.

Teater Panggung atau Teater Jalanan sebuah Pilihan Berekspresi

Kebebasan untuk Berekspresi

Menjadi pertanyaan mengapa mahasiswa memilih unit kegiatan teater, atau bahkan mendirikan teater tanpa harus

²² T sendiri kini menjadi aktivis salah satu partai nasionalis, peserta pemilu 2004.

memperoleh pembinaan dari pihak rektorat, seperti pada Teater Abu-abu. Salah satu jawabannya adalah “orang teater itu bebas.” Seperti yang dicermati di lapangan, aktivis teater kampus relatif lebih longgar dalam menghadapi aturan-aturan di kampus. Sebagian besar hanya berpakaian kaos oblong dan celana jeans. Rambutnya panjang. Dari penampilan itu, seperti yang dikatakan oleh HT, seorang mahasiswa ITATS yang menjadi aktivis teater Topeng, *“Ini bukan persoalan penampilan, tetapi idealisme. Ia berani tampil beda. Mungkin kami dianggap nyeleneh. Tapi, kami tidak ingin membongki diri kami dengan penampilan.”*

Terkesan sangat bebas lagi bila melihat mahasiswa anggota UKM Teater Institut dan Saloka Unesa. Sebagian besar berasal dari mahasiswa yang mendekati batas waktu, yaitu semester 13 dan 15 (angkatan tahun 1998 dan tahun 1999). *“Saya suka status sekarang ini. Mahasiswa. Saya tidak peduli kapan lulus. Toh, kalau lulus, tidak bekerja juga percuma. Saya di sini tetap bisa kritis dan kreatif.* Namun demikian, tidak berarti tidak ada aktivis teater kampus yang berprestasi dalam bidang akademik. Ada beberapa di antaranya tercatat sebagai mahasiswa yang berprestasi, sehingga memperoleh beasiswa.

Nilai kebebasan dan kreatifitas yang menjadi tujuan dari mahasiswa tersebut tidak saja terletak pada penampilan, tetapi juga terlihat pada lakon-lakon yang dimainkan. Selain mengadopsi cerita naskah dari pengarang terkenal, kemampuan analitis dari stiatusi sekitarnya terletak cerita naskah yang dimainkan. Dengan terjun di masyarakat, dengan mendatangi dan menangkap fenomena, mereka dapat membuat naskah cerita untuk lakon yang akan dimainkan pada hari atau minggu berikutnya. Mereka menangkap fenomena itu ketika jalan-jalan dan duduk di warung dan mendengar percakapan orang-orang tersebut.

Dalam pembuatan naskah cerita, mereka pertama kali membuat dalam bentuk ringkasan cerita, atau dikenal dengan sinopsis. Kemudian, secara bersama-sama menyusun tata urutan gerak dan percakapan. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah

latihan dua hingga empat kali, sekitar hampir satu bulan lamanya. Di dalam latihan itu, setiap anggota diberi tugas menjadi lakon apa-apa. Setiap orang kemudian menghafal dan menghayati perannya. Bila tidak kebagian peran, mereka masih memiliki tugas untuk peminjaman ruang hingga promosi.

Penjiwaan sebuah peran ini dilatih dari pertama kali seseorang menjadi anggota. ketika menjadi anggota, mereka harus ikut masa orientasi, oleh “senior” (mahasiswa yang lebih dulu menjadi anggota) ke gunung. Selain latihan fisik dan mental, tetapi mereka lebih menekankan latihan mental, seperti dibentuk-bentak, agar “*lebih berani tampil dan nggak duwe isin* (tidak mudah malu),” bahkan lari sambil memaki-maki dirinya sendiri. Pada waktu malam hari, latihan penjiwaan dilakukan dengan membawa anggota ke tempat yang sunyi. Tidak ada suara. Berikutnya, seorang senior meminta membayangkan, mengingat atau merasakan sesuatu pada dirinya. Akibatnya, ada peserta tiba-tiba menangis karena mengingat orang tua di rumahnya. Orang awam akan melihat mereka seperti kerasukan roh, namun bagi mereka hal itu merupakan bagian dari penjiwaan.

Komodifikasi Teater

Dari latihan menghafal naskah cerita dan dialog, penjiwaan terhadap peran yang dimainkan, hingga mengembangkan koreografi (menciptakan latar panggung sesuai dengan naskah), teater kampus sering kemudian menampilkannya dalam panggung. Secara rutin, hingga tahun 2001, hampir satu-dua bulan sekali Teater Institut (Unesa) misalnya menampilkannya di Gedung I6, gedung yang sudah dirancang sebagai ruang pertemuan, berikut panggung di dalamnya. Sementara itu, mereka sering berlatih pada malam hari di lapangan pementasan yang berbentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk berundak-undak.

Teater-teater lain juga memiliki pola yang serupa, setidaknya tidaknya satu semester sekali. *“Prosesnya cukup lama, Mas. Mencari ide cerita sekitar dan mematangkan hingga jadi naskah cerita berikut dialognya itu bisa satu bulan lamanya.. Menghafal, sambil mengatur laku dan lebih penting lagi mengatur panggung.”* Naskah jauh lebih mudah bila melakukan adaptasi dari cerita rakyat. Lakon-lakon sudah dikenal, sehingga tidak memerlukan perhatian yang lebih serius. *“Cukup mengumpulkan anggota, beritahu cerita rakyat apa yang digunakan. Kemudian, anggota langsung didapuk satu per satu menjadi apa. Dialognya diserahkan pada para pemain. Di panggung, antar pemeran saling lempar dialog.”* Untuk memikat penonton, teater kampus sering menampilkan drama komedi *satiris* (mengkritik).

Bila berstatus UKM, maka kegiatan pementasan akan dijadwalkan rutin setiap semester, dan didanai oleh pihak rektorat. Dana yang berasal dari tiket masuk hanya menutupi kerugian bila ternyata diperlukan biaya yang lebih besar. Pos-pos yang ada dalam setiap pementasan, mulai dari konsumsi, kostum, hingga hiasan panggung dan *balibo* untuk iklan pementasan. Namun demikian, tidak berarti harus mengeluarkan biaya tersebut. Baliho dipakai secara berulang-ulang, dengan mencat kembali dan menulis ulang. Kostum diusahakan seperti pakaian sehari-hari. Hanya hiasan panggung sering harus berubah, tergantung pada naskahnya. Bila ada kelebihan dana, maka disimpan dalam kas teater kampus. Hal ini tidak saja terjadi pada Teater Institut (UNESA), tetapi juga pada Teater Sua (IAIN Sunan Ampel), Teater Kusuma (Untag), dan Teater Crystal (UPN).

Oleh karenanya, meskipun selalu menampilkan sosok yang mengedepankan kebebasan dan kreativitas, teater kampus tetap juga terorganisir. Kepengurusan selalu dipilih setiap dua tahun sekali. Di dalam strukturnya, beberapa teater kampus memiliki divisi kerumahtanggaan atau perlengkapan. Divisi ini bertugas untuk mulai dari perlengkapan tata ruang teater, kebersihan sanggar hingga logistik, termasuk di dalamnya kostum untuk

pentas teater, seperti yang kini dijabat oleh Alle, salah seorang pemain Teater Kusuma Untag.

Selain di kampus, mereka, UKM di tingkat universitas/institut ini juga tampil ke pentas lomba teater di tingkat lokal (kota),²³ propinsi atau nasional. Keikutsertaannya sebagai ajang prestise, apalagi bisa memenangkan. Penilaian dimulai dari orisinalitas naskah cerita yang dipentaskan, koreografi (tata gerak), hingga latar panggung. Oleh karenanya, bila mengikuti kegiatan tersebut, setiap teater mempersiapkan dengan serius. Pihak rektorat mendukung kegiatan teater kampus, mulai dari pendanaan hingga akomodasi dan transportasi.

Bila bukan UKM Institut/Universitas, teater kampus ini lebih mengandalkan kegiatan fakultas/jurusan. Setiap awal tahun ajaran senat mahasiswa (SEMA) fakultas/jurusan atau kini dikenal dengan istilah badan eksekutif mahasiswa (BEM) mengadakan pesta seni. Pesta seni dilakukan setelah perlombaan olah raga antar angkatan untuk jurusan, atau antar jurusan untuk fakultas. Selain karena sebagian anggota teater juga pengurus BEM tersebut, BEM juga membutuhkan teater kampus untuk memeriahkan acara pentas seni.

Teater non-UKM, baik di tingkat institut/universitas maupun fakultas, atau sebut saja teater kampus independen, seperti Sanggar Abu-abu di Unesa pada tahun 1997-2000. Mereka melakukan teater jalanan. Artinya, mereka mementaskan ketika melakukan demonstrasi. Pada waktu hari pertama ujian tertulis SPMB tahun 2000, mereka melakukan aksi teaternya dengan berpakaian compang-camping, bahkan salah satunya hanya menggunakan celana pendek. Seluruh tubuh dilumuri oleh cat air hitam. Mereka berlari memasuki ruang, tepatnya lorong-lorong

²³ Biasanya diadakan oleh Dewan Seni/Kebudayaan Kota atau Diknas Kab./Kota. Di Surabaya, kegiatan tersebut diadakan dalam Festival Seni Surabaya pada bulan Mei setiap tahunnya.

dalam gedung I7 (dari markasnya di gedung H) hingga ke gerbang UNESA, sambil berteriak-teriak, “*Aku tidak bisa sekolah. Biaya Pendidikan Mahal. Percuma kuliah, kalau akhirnya menjadi pengangguran.*” Paling akhir, salah satu di antara pemain berdiri di atas *kap* mobil (milik dosen). Kegiatan teater jalanan ini segera direaksi karena mengganggu ketenangan pada waktu ujian, terlebih lagi seorang dosen sempat bersitegang ketika kapnya diinjak-injak oleh mahasiswa tersebut.

Setelah beberapa kali melakukan aksi mengkritisi kampus dan lingkungan (masalah banjir), aktivitas teater tersebut “berakhir” tatkala ketua teater, T, hendak melakukan aksi pada waktu wisuda. Rencana aksi ini diketahui oleh penyelenggara wisuda, yaitu panitia yudisium dari FIK-Unesa. Tindakan aksi T yang pada waktu itu juga sebagai wisudawan bisa dicegah. Karena dianggap mencoreng nama FIK, sejumlah mahasiswa FIK melakukan reaksi balik dengan menyerbu markas Teater Abu-abu pada waktu pagi hari. Karena serangan ini mendadak, para anggota Teater Abu-abu melarikan diri. Markas kemudian ditutup, sementara itu di kampus tersebar berita tentang penemuan “kondom” dan botol-botol minuman keras di markas, sehingga berkembang bahwa kehidupan anggota teater di markas tersebut sangat longgar. Selain seksualitas, isu-isu yang meruntuhkan imej teater ini adalah isu-isu moralitas, seperti aksinya adalah *pesanan*, dibayar, dan dapat dibelokkan ke sasaran lain bila diberi uang. Meski teater tersebut sudah bubar, anggota-anggotanya kemudian tersebar dalam berbagai aktivitas politik. T misalnya kemudian terlibat berbagai aksi kelompok masyarakat rentan kota, seperti buruh dan korban penggusuran. Aksinya berada di bawah naungan PDI-P, dan kemudian menjelang Pemilu 2004 menjadi salah satu pengurus kepemudaan di PNBK Surabaya.

Tabel 9.6.
Teater Panggung dan Teater Jalanan

No.	Karakteristik	Teater Panggung	Teater Jalanan
1.	Asal	teater UKM	teater UKM dan non-UKM
2.	Jumlah pemain	banyak	sedikit
3.	Naskah cerita	lengkap dan kompleks	singkat dan sederhana
4.	Tata panggung	diperlukan	tidak diperlukan
5.	Kostum	lebih rumit	sederhana, terkesan apa adanya
6.	Pengaturan gerak	sudah dirancang	spontan
7.	Penunjukkan pemain (pelakon)	dipersiapkan, dilatih	spontan
8.	Dialog	kompleks	spontan, sederhana, dan cenderung sedikit dialog
9.	Sponsor	universitas, fakultas, atau pihak lainnya, seperti: dewan seni kota.	LSM atau mandiri
10.	Penggunaan uang	Ada dana pembinaan dari lembaga tertinggi.	diberi uang transpor (“dibayar”), tidak ada uang transpor (tidak “dibayar”) bila secara internal melakukan pendampingan pada masyarakat rentan kota.

Kegiatan teater jalanan bukan sekedar monopoli teater non-UKM. Teater Kusuma misalnya juga melakukan teater jalanan (adekan teatrikal). Kegiatan tersebut biasanya merupakan undangan dari panitia atau penyelenggara aksi. Penyelenggara juga menentukan temanya. Kemudian, teater kampus merancang menjadi rangkaian adegan yang akan ditampilkan pada waktu aksi.

Untuk itu, mereka mendapat uang transport antara 450 ribu hingga 750 ribu rupiah. Pada waktu Hari Pahlawan 10 Nopember 2002 misalnya bersama dengan teater-teater kampus dari Yogyakarta, seperti ISI Yogyakarta, mereka mementaskan (merekonstruksi) peristiwa 10 Nopember 1945. Begitu pula, pada waktu aksi hari AIDS September 2004 atas permintaan salah satu yayasan peduli HIV/AIDS mengadakan teater jalanan mulai dari Jalan Raya Darmo, Basuki Rahmat dan hingga di Balai Pemuda dan Jalan Pahlawan. Selain teater Kusuma, kegiatan aksi tersebut juga diikuti oleh teater kampus se-Surabaya. Di dalam aksi tersebut, mereka menggambarkan bahaya akibat penyakit HIV/AIDS. Mereka berjalan dalam keadaan kurus, lemah dan sakit-sakitan.

Adegan Teatral:

Indikator Kolaborasi Mahasiswa dan Kelompok Miskin Kota

Ekstra Kampus, serikat buruh dan lsm sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan masyarakat rentan kota.

Sesuai dengan teori Robert K. Merton, bahwa seorang individu bisa memiliki beberapa status dan peran. Hal ini berkaitan dengan keanggotaan individu tersebut dalam berbagai kelompok masyarakat (Johnson, 1986), demikian anggota teater kampus. Di lingkungan kampus, mereka tak jarang aktif tidak saja di UKM Teater Kampus, tetapi juga menjadi UKM lainnya, seperti Alle yang menjadi anggota Teater Kusuma dan UKM Fotografi di Untag. Selain itu, mereka juga aktif di tingkat fakultas dan/atau jurusan, sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa.

Tabel 9.7.
Organisasi Ekstra Kampus, Serikat Buruh dan LSM (Jaringan)

No	Organisasi	Orientasi Ideologis	
		Agama	Nasionalis/Sosialisme
1.	Org. Ekstra Kampus		
	Hubungan terpisah dgn masy.rentan kota ("elitist")	IMM, HMI, PMKRI, dan GMKI	GMNI
	merakyat	PMII, KAMMI	FPPI, LMND, SMID, FMN
2.	Serikat Buruh	Sarbumusi	SBSI
3.	LSM		Pijar, Jakker, Jerit

Selain organisasi mahasiswa intra kampus, seperti senat mahasiswa (kini dikenal dengan badan eksekutif mahasiswa), badan perwakilan mahasiswa (kini, dewan legislatif mahasiswa) dan unit kegiatan mahasiswa, di luar kampus terdapat sejumlah organisasi ekstra kampus. Sebelum tahun 1996-an, organisasi ekstra kampus yang dikenal adalah Kelompok Cipayung, yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Pada tahun 1980-an, akibat pengasastunggalan Pancasila sebagai asas organisasi, HMI terpecah menjadi HMI dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). HMI MPO ini tidak menerima asas tunggal tersebut. Atas kebijakan Menteri Daud Yoesoef pada tahun 1978-an, yaitu NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan

Kampus)²⁴, organisasi tersebut tidak diperbolehkan “berada” di dalam kampus, meskipun pada kenyataannya organisasi ekstra (berikut alumninya) tetap bisa bermain dalam perebutan kursi di senat dan bpm. Sementara itu, “negara” (dalam tanda kutip) melalui ABRI juga sering bermain melalui organisasi kepemudaan, FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri ABRI).

Di luar kelompok Cipayung, terdapat organisasi ekstra mahasiswa. Organisasi ini nampaknya lahir dari aktivitas kelompok studi atau kelompok kajian, kemudian bergerak ke arah praksis menjadi aksi-aksi solidaritas dan akhirnya menjadi organisasi ekstra kampus, seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokratik), SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) dan Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ada pula yang memandang munculnya kelompok ini sebagai bentuk ketidakpuasan dari organisasi ekstra (Kelompok Cipayung) yang bersifat elitis dan hanya mengeluarkan catatan akhir tahun terhadap kebijakan dan ketimpangan sosial akibat pembangunan semasa pemerintahan Suharto.

Akibat kuatnya indoktrinasi pemerintahan Suharto melalui penataran P4 dan Opspek, tidak semua mahasiswa menyukai organisasi ekstra kampus dan LSM, seperti K yang melihat bahwa tidak ada gunanya ikut organisasi ekstra karena hanya demo, tidak ada aksi. Untuk melihat fenomena masyarakat yang dapat dijadikan ide cerita, *“Kita bisa saja baca di berbagai pemberitaan, seperti koran dan internet. Saya itu akurat dan datanya bisa untuk ide cerita, seperti yang dikatakan B, mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya.*

²⁴ Kebijakan ini tidak terlepas dari sikap kelompok Cipayung yang selalu mengkritisi pemerintahan Suharto, mulai dari kasus Malari 1974 tentang investasi asing hingga pemerintahan Suharto jatuh (lihat Pour, 1998, dalam kasus Sofyan Wanandi; perhatikan pula Aribowo, 1999). Padahal, kelompok ini dahulu turut mengguling pemerintahan Sukarno, dan mendukung Suharto dalam aksi bersama, KAMI pada tahun 1966-1967.

Namun demikian, sebagian lain anggota teater kampus justru memilih aktif di organisasi ekstra kampus, dan kecenderungannya, ketika aktivitas di organisasi ekstra semakin tinggi, maka ia mengurangi aktivitasnya di teater kampus. Organisasi ekstra tersebut tidak saja berdiri sendiri, tetapi memiliki jaringan pada kelompok rentan kota, seperti PMII dan Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia) karena ber-“naung” (dalam tanda kutip) di bawah NU (Nadhatul Ulama), begitu pula dengan SMID, LMND dan FMN yang memiliki hubungan dengan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) yang dulu dipimpin oleh Mochtar Pakpahan. SBSI adalah serikat buruh di luar “bentukan” pemerintah, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Sebagai serikat buruh, pengurusnya terdiri dari buruh yang aktivis dan aktivis buruh (orang di luar buruh) yang ber-*empati*. Aktivis buruh ini antara lain adalah mahasiswa, termasuk anggota teater kampus. Di luar buruh, ada pula *Jerit* (Jaringan Orang Tertindas), suatu jaringan yang memiliki hubungan dengan Konsorsium Orang Miskin Kota (*Urban Poor Consorsium*/UPC) di Jakarta yang dipimpin oleh Wardah Hafidz.

Membangun Isu-isu dan Beradegan dalam Demonstrasi

Empati, suatu kemampuan individu dalam membayangkan berada dalam posisi orang di luar dirinya, terbentuk tatkala mereka melakukan pendampingan bersama organisasi ekstra kampus yang bekerja sama dengan organisasi atau jaringan masyarakat rentan kota, seperti *Jerit*, *Sarbumusi* dan SBSI. Kelompok mahasiswa, dalam hal ini aktivis teater kampus tersebut sering “meninggalkan” (dalam tanda kutip) statusnya dan menjadi buruh atau tinggal di kampung-kampung kumuh yang akan tergusur. Oleh karenanya, ketika terjun di dalam masyarakat rentan kota ini, aktivis tersebut mengurangi kegiatan teater

kampus. Namun demikian, kebersamaan ini menjadi sumber inspirasi bagi ide naskah untuk pementasan teater kampusnya.



Gambar 9.1.

Kekuatan Buruh = Mogok Kerja dan Pengerahan Massa

Dengan tinggal bersama, bila tidak kost, terkadang tidur di mushala, kesulitan yang dialami oleh masyarakat rentan kota secara langsung dirasakan, seperti kenaikan BBM yang telah terjadi sejak jaman pemerintahan Megawati, kenaikan tarif listrik dan air,²⁵ kenaikan harga-harga di pasar, UMR buruh yang masih belum memenuhi kebutuhan hidup²⁶ dan sistem kontrak. Para

²⁵ Di beberapa kampung, terutama di Surabaya Utara dan pinggiran kota Surabaya Barat dan Selatan, meskipun tidak memasang saluran PDAM. Kenaikan harga air dirasakan pada kenaikan air jerigen *gledekan*.

²⁶ Berkaitan dengan UMK (Kota Surabaya), pemerintah sering tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak bisa membayar karyawannya sesuai dengan UMK. Ada batas-batas toleransi yang sangat longgar diberikan oleh pemerintah, sementara itu pemerintah serta merta menerapkan undang-undang buruh, meski secara substansial merugikan pihak buruh, pemerintah selalu melaksanakan tanpa memperhatikan buruh.

aktivis tersebut membangkitkan kesadaran bahwa mereka berhak hidup layak. Oleh karenanya, masyarakat tersebut di adakan untuk melakukan aksi. *“Mas, pertama kali iya susah. Mereka berpikir ini sudah menjadi suratan dalam hidupnya. Tetapi, melalui diskusi, mereka sadar. Meskipun belum tentu berhasil, setidaknya orang akan mendengarkan suaranya. Satu kata: Laman,”* begitulah pengalaman yang disampaikan oleh B dan J tentang kelompok masyarakat rentan kota. Secara teoritik, pengalaman ini membenarkan pendapat Oscar Lewis (1981) tentang kebudayaan kemiskinan dan John Kenneth Galbraith (1983) sebagai bentuk adaptasi orang-orang miskin terhadap kondisi kehidupan yang rentan.

Di dalam mengembangkan ke dalam aksi (demonstrasi), para aktivis biasanya mendiskusikan terlebih dahulu dengan para buruh yang aktivis dan orang kampung yang aktivis, biasanya kini terbentuk dalam istilah “forum komunikasi.” Hari-hari peringatan peristiwa tertentu bisa dijadikan momen untuk aksi, seperti Hari Buruh (1 Mei), Hari Bumi (September) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Kemerdekaan (17 Agustus). Pada hari buruh, aksi lebih diarahkan pada tema-tema tentang jaminan sosial buruh, mulai dari kenaikan UMK, sistem kontrak dan borongan, jaminan sosial hingga hak berserikat (lihat tabel 4.6; perhatikan Rahayu, et.al, 2002; Supramudyo, 2000; Rahaju, 2002). Demikian pula, pada hari bumi, tema demonstrasinya berisi tuntutan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin kota, sedangkan hari pendidikan adalah tuntutan pendidikan murah, dan pada hari kemerdekaan tentang harapan untuk merdeka dari kemiskinan.

Tabel 9.8.

Isu-isu Kesenjangan Sosial-Politik yang dikembangkan Masyarakat Rentan Kota bersama Aktivis Teater Kampus (dalam Ekstra Kampus, SB dan LSM)

No.	Masyarakat Rentan Kota	Isu-isu Kesenjangan Sosial Politik
1	Umum	a. Turunkan Harga (1998), yang kemudian berlanjut menjadi salah satu tuntutan dalam reformasi, selain Pak Harto turun; b. Tuntutan Penindakan Korupsi (Pengurusan KTP Murah) c. Tuntutan Biaya Pendidikan Murah (1998-2005) d. Tolak Kenaikan BBM (1999-2005) e. Tolak Kenaikan TDL dan Air PDAM;
2	Masyarakat Kampung	a. Batalkan pengusuran (salah satu di antaranya, kasus Stren Kali bersama <i>Jerit</i> tahun 2001, 2002 dan 2004); b. Kenaikan uang ganti rugi;
3	Masyarakat Buruh	a. Bayarkan THR (setiap menjelang hari raya Idul Fitri sejak sekitar tahun 1990an); b. Tuntutan Hak Berserikat (awal tahun 1990-an); c. Tuntutan Kenaikan UMR/Kota; d. Tuntutan Penerapan UMR segera; e. Hapus Sistem Kontrak dan Borongan; f. Hapus Sistem Lembur, Tuntutan Jam Kerja yang Jelas. g. Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon (Pabrik Sepatu di Sidoarjo); h. Tolak UU Perburuhan yang Merugikan buruh; i. Usut Korupsi di Jamsostek (tahun 1998-an) j. Solidaritas terhadap pemecatan teman-teman sekerja, dll.

Di dalam persiapannya, para aktivis tersebut membentuk korlap-korlap yang digunakan untuk menghimpun massa. Sementara itu, spanduk atau karton disiapkan, dananya dihimpun

dengan cara urunan atau hasil dari *ngamen*. Karena dananya terbatas, maka tidak jarang spanduk yang digunakan berasal dari kegiatan aksi sebelumnya. Sementara itu, para aktivis dari teater kampus menyiapkan adegan teatrical. *“Ada dua tujuan adegan ini. Visualisasi tuntutan dan hiburan untuk mengurangi ketegangan. Kalau tidak begitu, demo yang serius bisa membuat aparat tegang. Akhirnya, tindakannya represif. Kalau itu terjadi, akan membuat jera mereka.”*

Setelah ide atau naskah cerita dibuat, H-2 dari aksi tersebut aktivis teater kampus itu mengumpulkan, baik sesama aktivis teater kampus maupun juga kelompok masyarakat rentan (yang mewakilinya) dan melakukan *casting* peran, siapa melakoni siapa, begitu pula pengaturan gerak yang akan dilakukan. Pengaturan gerak ini juga memperhatikan *landscape* dari acara aksi tersebut. Orang-orang tersebut juga diberitahu kostum apa yang digunakan, biasanya pakaian sehari-hari, *“lebih baik lagi kalau compang-camping, biar kelihatan penderitaannya.”* Karena miskin dialog, latihannya hanya terbatas pada rangkaian gerak masing-masing pemeran. Pemeran di adegan teatrical dalam demonstrasi dapat lebih longgar, berimprovisasi.

Menurut informan B, adegan ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, meskipun merasa sulit bila jumlah peserta demonstrasi terlalu besar. Bila massa yang berdemonstrasi kurang dari 200 orang, adegan teatrical bisa dilaksanakan sambil *long march* ke tempat sasaran. Namun demikian, bila dalam jumlah besar, adegan teatrical hanya dilakukan ketika telah sampai di tempat tujuan. Pelaksanaan adegan di sepanjang jalan akan memacetkan gerak massa pada akhirnya dapat timbul gerakan dorong-mendorong, hingga menimbulkan kekerasan.

Tabel 9.9.
Beberapa Contoh Adegan Teatrical Demonstrasi Masyarakat Rentan Kota
Surabaya tahun 1990 s/d sekarang

No.	Isu-isu Demonstrasi	Adegan Teatrical
1	Tolak Kenaikan BBM	Digambarkan ada sejumlah orang. Laki-laki membawa puluhan jerigen kosong. Begitu juga dengan perempuan yang <i>jaritan</i> membawa kompor tanpa minyak.
2	Tuntutan Biaya Pendidikan Murah	Dengan mengajak anak-anak berpakaian seragam sambil berjualan koran. Sementara itu, orang tua yang bekerja setengah mati, tetapi tidak bisa membayar uang sekolah.
3	Penolakan thp Penggusuran Warga Kampung Stren Kali	Digambarkan ada orang berpakaian sederhana selalu membersihkan kali. Sementara itu, satpol PP dan petugas membawa bulldoser merusak. Orang-orang itu lari, sampai terjatuh. Adegan teatrical ini dibuat dalam pentas panggung dengan perbaikan naskah cerita dalam judul "Jogo Kali," oleh Teater Sua di Balai Pemuda, Surabaya.

Penutup

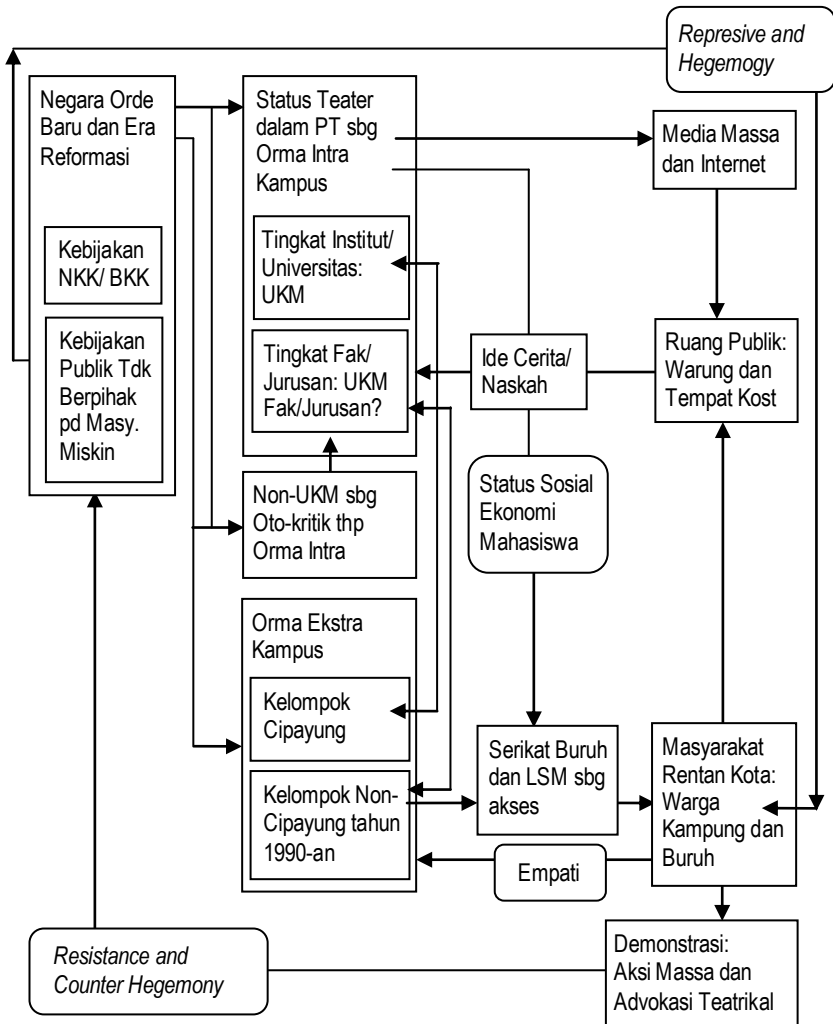
Penelitian Rahaju (2002) telah menunjukkan adanya komunikasi dan aliansi antara buruh dan gerakan mahasiswa. Secara ekstrim ditulis pula dari pernyataan salah seorang tokoh gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa tidak akan memiliki akar yang kuat bila tidak beraliansi dengan buruh. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa proses aliansi antara buruh, warga kampung yang tergusung, sebagai

kelompok masyarakat rentan kota, dan mahasiswa merupakan proses timbal balik. Tahun 1990-an, dengan pembunuhan Marsinah oleh aparaturnegara, gerakan perjuangan buruh memperoleh identitas dan keberanian baru, atau yang diistilahkan oleh Karl Marx sebagai kesadaran kelas, sementara penghancuran dan hegemoni negara atas mahasiswa melalui NKK/BKK tahun 1978 dan Opspek/P4 telah menciptakan bentuk baru gerakan mahasiswa. Ada dua bentuk, yaitu: (1) melakukan modifikasi dari organisasi kemahasiswaan (ormawa) intra kampus, dan (2) mengembangkan kelompok studi, yang kemudian berkembang menjadi organisasi ekstra kampus non-kelompok Cipayang tahun. Di dalam catatan lain, kelompok-kelompok studi juga berkembang dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan. LSM yang terbentuk dari kelompok-kelompok studi ini kemudian mengembangkan jaringan internasional melalui isu-isu yang sama, antara lain: kemiskinan dan demokrasi, meski dikritisi oleh negara pada waktu itu, Suharto, sebagai usaha “menjual” bangsa dan dicurigai sebagai ancaman negara.

Salah satu di antaranya adalah teater kampus. Teater kampus menjadi sarana *conter hegemony*. Bila mengikuti pendapat Antonio Gramsci, bahwa negara, sebagai representasi dari kepentingan kelompok borjuis, melakukan “penaklukan” atas warganya tidak saja menggunakan sarana represif, seperti: hukum dan militer, tetapi juga mengembangkan kontrol moral dan intelektual, sehingga terbentuk kesepakatan lebih bersifat *concensio* (Hendarto, 1993: 66-88) Kontrol moral dan intelektual ini dikembangkan melalui sarana-sarana pendidikan dan media massa. Di dalam perkembangannya, Paulo Freire (1985) memperkuat bahwa model *banking* dalam kurikulum sekolah menyebabkan masyarakat terintegrasi ke dalam sistem industri yang kapitalistik. Meskipun dianggap sebagai langkah kecil, teater kampus, sebagai perkembangan teater modern Indonesia, seperti Teater Sae,

Koma, dan Mandiri (Dahana, 2001) mengembangkan drama satiris yang mengkritik terhadap kehidupan sosial politik Indonesia yang tidak adil dalam setiap kali pertunjukkan.

Bagan 9.1.
Teater Kampus, Masyarakat Rentan Kota dan Adegan Teatrical





Gambar 9.2

Dengarkanlah Kami, Rasakanlah Penderitaan Kami!

Dalam pencarian ide-ide naskah cerita, selain adaptasi dari naskah karya seniman sebelumnya, seperti Anton Chekov, aktivis teater kampus menemukan perjumpaan yang "mesra" dan "hangat" di dalam masyarakat rentan (kota). Salah satu faktor yang di dalam diri aktivis yang memudahkan memasuki masyarakat rentan (kota) adalah kondisi obyektifnya. Aktivis teater kampus berasal dari kelompok kelas menengah ke bawah di dalam masyarakatnya. Perjumpaan ini sama seperti melihat dirinya di depan kaca, lebih dari itu mereka menemukan jati dirinya di dalam masyarakat tersebut. Apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan di warung-warung makan dan kampung di mana mereka kost, membangun kesadaran dalam diri mereka, bahwa mereka dulu berasal dari kelas tersebut dan sudah selayaknya harus memperjuangkan. Di dalam kondisi yang lebih ekstrim, para aktivis ini kemudian memasuki organisasi ekstra kampus non-

Cipayung tahun 1990-an dan bergabung pada Serikat Buruh (mandiri-bukan organisasi korporatis negara).



Gambar 9.3.

Demi THR, Kenaikan Upah, Uang Makan, haruskah ada korban?

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memberikan sumbangan bagi gerakan kelompok masyarakat rentan kota. Selain mengembangkan jaringan yang mampu mengerahkan massa dalam jumlah yang besar, mereka juga memberikan warna lain dalam aksi massa (demonstrasi), yaitu adegan teatral. Pengerahan massa yang besar memang memberikan kekuatan untuk melawan kebijakan publik yang kurang menguntungkan, namun di sisi lain mengembangkan hubungan yang sinergis antara pengusaha dan negara. Dengan alasan bahwa aksi massa tersebut akan mengancam situasi keamanan, aparat negara kemudian cenderung bertindak represif. Aparat negara menggunakan hak kekerasannya dengan alasan memberikan jaminan rasa aman (meski dapat dibantah, untuk kelompok masyarakat yang mana?). Di bawah kondisi yang demikian, adegan teatral ini sangat membantu dalam visualisasi dari tuntutan, dan sekaligus menjadi hiburan bagi dua kelompok yang bersitegang, yaitu kelompok aksi massa dan aparat negara.

Lebih jauh dari itu, pada kasus lain latihan seni pada kelompok masyarakat rentan kota, termasuk di dalam kelompok buruh, mampu membangkitkan kesadarannya. Di Jakarta misalnya, dalam memperingati Hari Buruh 1 Mei 2005, kelompok buruh, petani dan ibu rumah tangga dari kampung menampilkan drama teatrikal dengan judul “*Mereka bilang Aku Perempuan*” karya Ken Zuraida. Mereka berlatih selama satu bulan dan menghayatinya dengan baik (Liputan6, 4 Mei 2005, ”Penderitaan Buruh dalam Drama Teater,”).

Daftar Pustaka

- Aribowo,
1999 Pola Gerakan Mahasiswa Jawa Timur: Kasus Mahasiswa Surabaya. Dalam Anshari Thayeb, et.al. **Jawa Timur dalam Perspektif Negara dan Masyarakat**. Surabaya: Yayasan Lubuk Hati.
- BPS,
2004 **Indikator Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Peningkatan Kemampuan Statistik.**
- Budiman, Arief.
1981 Peranan Mahasiswa sebagai Inteligensia. Disunting oleh Dick Hartoko. ***Golongan Cendekiawan. Mereka yang berumah di angin. Sebuah bunga rampai.*** Jakarta: Gramedia.
- Coundouel, Aline., Jesko S. Hentschel, dan Quentin T. Wodon.
2002 Chapter 1 Poverty Measurement and Analysis. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues.** Washington: The World Bank.
- Dahana, Radhar Panca.
2001 **Ideologi Politik dan Teater Modern Indonesia.** Magelang: IndonesiaTera.

Danandjaja, James.

- 1980 Fungsi Folklor bagi Kolektif Pendukungnya. *Berita Antropologi*. No. 39, tahun XI.
- 1986 Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dogeng dan Lain-lain. *Jakarta: Grafitipers*.

Departemen Kesehatan RI,

- 2003 **Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/ Menkes/SK/VIII/2003.** Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Dinas Informasi dan Komunikasi Jawa Timur.

- 2004a UMK 2005 Gunakan Standar Kebutuhan Hidup Minimal. 1 September. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=1797>. tanggal 13 September 2005.
- 2004b Gubernur Jatim tetapkan UMK Tahun 2005, berlaku 1 Januari. 22 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2487>. tanggal 13 Nopember 2005.
- 2004c UMK Jatim masih berdasarkan KHM karena Keppres Baru Belum Terbit. 26 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2538>. tanggal 13 Septemver 2005.

Galbraith, John Kenneth.

- 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa. Diterjemahkan oleh Tom Anwar.** Jakarta: Sinar Harapan.

Hatta, Mohammad.

- 1983 Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia. Disunting oleh Aswab Mahasin dan Ismed Natsir. **Cendekiawan dan Politik.** Jakarta: LP3ES.

Hendarto, Heru.

- 1993 Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci. Dalam Tim Redaksi Driyarkara. **Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan.** Jakarta: Gramedia.

Hutomo, Suripan Sadi.

- 1991 Kidung Jawa Timuran. Perkembangan dan Kritik Sosialnya. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. No. 6, Tahun V.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi**. Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Jonge, Huub de.

- 1989 **Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu Studi Antropologi Ekonomi**. Jakarta: Gramedia.

Klugman, Jeni.

- 2002 Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues**. Washington: The World Bank.
- 2002 Rural and Urban Poverty: Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 2 Macroeconomic and Sectoral Approaches**. Washington: The World Bank.

Koentjaraningrat,

- 1982 **Sejarah Teori Antropologi 1**. Jakarta: UI-Press.

Kariredjo, Heru Soekadri.

- 1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan**. Surabaya: FPIPS-IKIP Surabaya.

Kompas,

- 1996 Antara Stabilitas dan Demokrasi. Survei "Kompas" tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 1996 Gaya Hidup Kelas Menengah Baru Jakarta. Survei "Kompas" tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 2000 Buruh Sidoarjo Protes UMR, Jalan di Surabaya Diblokir. 27 Nopember.
- 2001 FSPSI Akan Bahas Masalah UMR. 16 Juli.
- 2002 Buruh Gresik Ancam Demo, Wakil Gubernur Minta Jangan Ngotot. 2 Januari 2002.
- 2003 Buruh Tuntut Gubernur Jatim Naikkan UMK. 22 Januari.
- 2005 Menggugat Kebijakan Absurd Impor Berat. 24 September.
- 2005 Inti Ekbis. 106.000 KKB untuk Warga Surabaya. 29 September.

Kuntowijoyo.

- 1988 **Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kustiawan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1/tahun XXVI.

Kwik, Kian Gie.

1998 **Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia. Badai Belum Akan Segera Berlalu**. Jakarta: Gramedia.

Lewis, Oscar.

1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.

Liputan6 SCTV

2005 Penderitaan Buruh dalam Drama Teater. Diakses dari <http://www.liputan6.com/fullnews/100776.html>, tanggal 1 April 2005.

Melalatoa, M. Junus.

1989 Pesan Budaya dalam Kesenian. **Berita Antropologi**. No. 45, tahun XIII.

Pemda Kotamadya Surabaya.

1978 **Master Plan Surabaya Tahun 2000**. Surabaya: Pemda KMS.

Pour, Julius.

1998 **Jakarta Semasa Lengser Keprabon. 100 hari menjelang peralihan kekuasaan**. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Radjab, Suryadi A.

1990 Panggung-panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara. Gerakan Mahasiswa di bawah Orde Baru. **Prisma**. No. 10 tahun. XX.

Rudiono, Danu.

1992 Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak. **Prisma**. No. 1. Tahun XXI.

Rahaju, Siti Pudji.

2002 Pola Komunikasi dan Aliansi antara Buruh dengan Mahasiswa dalam Aksi-aksi Unjuk Rasa dan Pemogokan Buruh Industri di Jawa Timur. **Laporan Penelitian Dosen Muda**. Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Rahayu, Sri Kusumastuti.

2002 **Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Scott, James C.

1983 **Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.** Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Supramudyo, Gitadi Tegas.

2000 Pola Unjuk Rasa di Daerah Perkotaan. Studi tentang Unjuk Rasa Buruh, Sopir, Mahasiswa dan Warga Kampung di Surabaya. **Laporan Penelitian DIP.** Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Susanto, Budi.

1999 *Imajinasi Penguasa dan Identitas Postkolonial. Siasat Politik (Kethoprak) Massa Rakyat.* Yogyakarta: Kanisius.

Surbakti, Ramlan.

1994 Kebijakan Tata Ruang Perkotaan. Siapa Membuat dan Menguntungkan Siapa? **Prisma.** No. 7/tahun XXIII.

1996 Perebutan Ruang di Perkotaan dan Pembesarannya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Suryahadi, et.al.

2003 **Developing a Poverty Map for Indonesia: an Initiatory Work in Three Provinces. Part I: Technical Report.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Suyanto, Bagong.

1996 Pembangunan Kota dan Sengketa Tanah. Kasus Kotamadya Surabaya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Tabor, Steven R., dan M. Husein Sawit.

2001 Social Protection via Rice: The OPK Rice Subsidy Program in Indonesia. **The Developing Economies.** Th. 39. No. 3.

Wignjosoebroto, Soetandyo.

2004 Surabaya: Memahami Riwayatnya Masa Lampau guna Mempertajam Kemampuan Memproyeksi Perannya di Masa yang akan datang. **Makalah** dalam Sarasehan "Surabaya dan Tantangan Masa Depan." Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Wirodono, Sunardian.

1994 *Catatan 1993. Gerakan Politik Indonesia.* Jakarta: Puspa Swara.

240 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Bagian 3

P e n u t u p

Bab 10

Kemiskinan Kota dan Pembangunan

FX Sri Sadewo

karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.
(Pengkotbah 1:18)

Pengetahuan lebih banyak memang sangat menyedihkan bagi empunya. Betapa tidak, dalam kasus-kasus pada buku ini, masyarakat (warga negara, pen) menaruh harapan besar pada pemerintah untuk kesejahteraannya. Namun demikian, bila mengikuti berbagai pandangan dalam teori-teori sosial dan politik, maka pemerintah merupakan ruang pertarungan antar berbagai kelompok kepentingan. Mereka yang bisa mengakses, maka akan memperoleh keuntungan. Kelompok miskin, seperti dari wilayah perkotaan, bukanlah kelompok yang beruntung, baik di tempat yang baru (kota) maupun di daerah asalnya (desa). Dari sejumlah kasus pada bagian 2, ada beberapa hal yang dapat diserahkan dan dipikirkan bersama.

Arah Model Pembangunan yang Salah

Kota dan desa merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kota tumbuh karena revolusi pertanian yang mengkaitkan antara satu desa dan desa yang lainnya. Keberadaan kota mulanya didukung oleh desa-desa, Kota sangat memerlukan desa untuk tenaga kerja, pajak dan barang-barang komoditi. Pada perkembangan selanjutnya, kota tumbuh, seolah-olah otonom,

meninggalkan desa. Kota menjadi *center* (pusat), desa menjadi daerah pinggiran (*periferi*). Sebagai periferi, hampir seluruh enersinya kemudian dicerap kota, kemudian seperti digambarkan oleh Everett S. Lee (1984) sebagai fenomena *push-pull factor* dari migrasi dan urbanisasi.

Fenomena ini terjadi pada abad kedelapan belas di Eropa dan paruh kedua di negara-negara baru paska Perang Dunia ke-2. Kebijakan pajak atas tanah yang dibebankan pada petani oleh bangsawan mengakibatkan hubungan petani dan pekerja melemah, hubungan mereka mulai diukur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekan harga/upah tenaga kerja. Orang-orang desa yang tidak bertanah pun akhirnya berbalik mencari pekerjaan di kota, meskipun kondisi obyektifnya tidak menguntungkan. Mereka bersedia bekerja apa saja dengan upah berapa saja, asal bisa menerima uang *cash*.

Berbagai penelitian seperti James C. Scott (1983), Sujono dan Birowo (1976), dan Hotman Siahaan (1990), menggambarkan betapa perubahan teknologi telah merubah perimbangan pendapatan di desa, kelompok miskin desa semakin *powerless*, tidak mempunyai posisi tawar, sistem bagi hasil menjadi semakin tidak menguntungkan, dari *maro*, *martelu* hingga sistem *ceblokan*, Tulisan dari Agus Trilaksana (2000) dan Zainuddin Maliki (2002) juga menggambarkan hal yang sama di Jawa Timur, namun tindakan yang ekstrim dilakukan kelompok miskin desa adalah merantau hingga ke luar negeri. Mereka menghimpun seluruh enersi terakhirnya dan mempertaruhkan diri dengan bekerja sebagai TKI/TKW. Hal itu tidak terlepas dari *tekong*, orang yang memiliki jaringan dari desa, ke kota hingga keluar batas-batas negara. *Tekong* biasanya adalah kelas menengah desa yang tidak berada dalam hubungan patron-klien dalam struktur ekonomi desa. Dengan posisinya, seorang *tekong* membangun struktur patron-klien yang tidak lagi berbasis pertanian.

Ketika menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, Basofi Soedirman pernah mencanangkan *gerakan kembali ke desa*. Gerakan ini sebenarnya seiring dengan kebijakan pemerintah pusat pada waktu itu. Di tingkat pusat, pemerintah memutuskan lima hari kerja dengan alih-alih satu hari libur tambahan dapat digunakan untuk rekreasi atau kembali ke desa. Artinya, aliran uang yang semula hanya dilakukan pada waktu hari raya dengan fenomena mudik (baca juga Eric Wolf, 1986), kebijakan itu “mengubah” pola menjadi rutin dalam setiap tahun. Gerakan itu tidak relatif berhasil. Ada yang menjadi beberapa kendala, pertama masyarakat desa sekarang telah berubah, menjadi relatif seragam, mulai dari struktur pemerintahan (imbis dari UU No. 5 tahun 1974) hingga struktur ekonomi yang bergeser ke sektor industri. Kedua, dengan demikian, setiap desa relatif tidak memiliki produk unggulan. Ketiga, penciptaan produk unggulan menuntut perhatian dan perubahan paradigma bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal (Kota/Kabupaten hingga desa), misalnya: secara sederhana, kepala desa dan camat harus berani menolak menandatangani surat jual-beli tanah sawah penduduknya, padahal dalam transaksi itu aparat desa memperoleh keuntungan. Belum lagi, perubahan status ke perumahan atau industri akan meningkatkan PAD bagi kabupaten/kota. Sektor industri beralih mampu menampung tenaga kerja dalam ratusan atau ribuan jumlahnya.

Strategi Adaptif Orang Miskin Kota

Kemiskinan yang demikian itu oleh Selo Soemardjan (1980; dikutip dari Karnadji dan Sudarso, 2005: 17) sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan itu diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosialnya mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapat yang sebenarnya tersedia. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasa kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-

tahun. Ciri utamanya adalah mobilitas vertikal tidak terjadi, walaupun terjadi sifatnya lamban. Ciri lain adalah timbul ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Ketergantungan ini memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam hubungan sosial yang timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh (Karnadji dan Sudarso, 2005: 19; kutip dari Mochtar Mas'ud, 1994:14).

Fatalisme atau sikap pasrah merupakan adaptasi psikologis bagi orang-orang miskin di manapun, baik di desa maupun di kota. Sikap ini memberikan ruang yang “menenangkan” di tengah kegelisahan atas ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah-masalah ekonominya. Kehilangan pekerjaan, tempat tinggal yang tidak “nyaman” dan “rentan” dari penggusuran, anggota keluarga yang sakit dan ditambah lagi harga-harga kebutuhan pokok yang belum tentu bisa dibeli merupakan masalah kaum miskin yang dihadapi terus-menerus setiap hari. Sementara itu, mereka berada di tengah-tengah keluarga yang berada dalam kondisi yang serupa. Pilihannya kemudian setiap keluarga mengembangkan etika subsistensi pada masing-masing keluarga. Walaupun ada simpanan, biasanya dalam yang sangat kecil dan tidak berlebih, sehingga tidak bisa digunakan untuk pinjaman pada keluarga lain. Mereka juga tidak mempunyai akses yang cukup baik untuk memperoleh tambahan uang bila memerlukan secara mendadak. Dunia perbankan sering bersifat diskriminatif terhadap kelompok miskin. Untuk memperoleh pinjaman, mereka diharuskan memenuhi syarat administratif yang belum bisa dipenuhi, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP) hingga anggunan. Kaum miskin kota sering mengalami kesulitan pada masalah KTP karena proses mutasi kependudukan yang dinilai mahal tidak dilakukan. Selain KTP, pemilikan barang atau rumah kaum miskin tidak bisa dijadikan anggunan, selain nilai jualnya, karena bukti pemilikan juga tidak ada. Syarat administratif dunia perbankan

bisa diminimalisir pada kelompok kelas menengah yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai. Kesulitan-kesulitan yang menumpuk kemudian menjadi bentuk *stressor* dan bila tidak “diredam,” maka berakibat pada masalah sosial lainnya, seperti pelacuran, pencurian, dan tindak kriminalitas lainnya. Cara peredamannya adalah melalui saluran psikologisnya, yaitu menenangkan, pasrah dan kemudian mengabaikan segala kesulitan yang dalam pandangan Marxian sebagai produk dari ketidakadilan dan eksploitasi pada kelompok yang lebih lemah.

Adaptasi psikologis, yaitu sikap pasrah tidak terjadi dalam waktu yang sekejap. Orang miskin kemudian langsung pasrah, melainkan berlangsung dalam waktu bertahun-tahun, bahkan harus “diwariskan” pada generasi berikutnya. Kemiskinan, seperti kehilangan pekerjaan, gaji/upah yang tidak cukup hingga sakit dan tidak mempunyai akses ekonomi-politik ini menjadi *stressor*, tekanan bagi kejiwaan seseorang dan/atau keluarga, apalagi hal itu berlangsung dengan sangat cepat.

Dalam kajian Emile Durkheim, situasi yang disfungsional ini bisa berakibat pada tindakan “bunuh diri” (lihat Johnson, 1986: 192-195) atau setidaknya mengambal jalan pintas, Koentjaraningrat (2002: 46-50) mengistilahkan mentalitas menerabas. Pada waktu krisis moneter di Indoneisa, pengumuman likuidasi bank, sepasang suami-istri dan empat orang anaknya melakukan bunuh diri di Kalimantan karena tabungan yang menjadi modal usahanya tidak bisa dicairkan. Sementara itu, di Bandung seorang ibu menjual putrinya untuk menikahkan putri yang lain. Sementara itu, di wilayah pesisir Selatan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, dari Pacitan hingga Wonogiri, terjadi semacam “*pulung ngendat*,” kejadian bunuh diri seolah-olah bergilir sesuai arah sinar putih seperti bintang jatuh. Alasan bunuh diri menjadi beralasan mulai dari sakit yang menahun hingga persoalan yang sepele, seperti tidak diajak anak ke kota. Demikian pula, dari sejumlah pemberitaan media massa elektronik, sejumlah

kejadi-an bunuh diri dengan alasan mulai dari kehilangan pekerjaan, sakit menahun dan kini menjalar pada anak-anak sekolah, seperti karena tidak lulus UAN hingga permintaan yang tidak dipenuhi. Hal itu menunjukkan bahwa kejadian bunuh diri dengan berbagai alasan tersebut sebagai produk adaptasi psikologis yang tidak berlangsung dengan baik. Artinya, menaruh harapan yang tinggi dengan mengabaikan kondisi yang sebenarnya, terjadi *deprivasi relatif* antara nilai harapan dan keadaan yang senyatanya.

Langkah strategi adaptasi kaum miskin pertama kali ketika tidak pendapatannya tidak memadai adalah mengurangi konsumsinya. Makanan yang dikonsumsi dikurangi sedemikian rupa, sehingga hanya mampu menggerakkan dirinya secara fisik, dimulai dari frekuensi makan, dari tiga kali untuk kondisi normal, menjadi dua kali sehari. Menunya pun dikurangi mulai dari tidak menggunakan daging dan ayam, berkurang terus hingga makan nasi, kecap dan kerupuk saja. Kebutuhan protein nabati didapat waktu yang tidak, seperti: pada waktu hajatan atau *slametan*, dan untuk umat Islam, dilakukan pada waktu Idul Kurban.

Langkah berikutnya adalah menggerakkan seluruh anggota keluarga untuk memperoleh pendapatan tambahan yang akan membuat hidup layak. Anak-anak memiliki nilai ekonomi yang positif. Mereka merelakan diri untuk meninggalkan masanya yang menyenangkan. Mereka bekerja, meski mungkin hanya dibayar separuh saja. Sementara ibunya bekerja, anak-anak berkeliraran dan kemudian masuk ke jalanan untuk mencari uang, mulai dari meminta-minta, *ngamen*, hingga menjadi joki *three in one*. Di dalam situasi ini anak-anak rawan mengalami kekerasan, mulai di-*palak* hingga dipukul pihak aparat (*trantib*). Kasus di Jakarta, karena menjadi joki, seorang anak dipukul, ditangkap dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas. Catatan-catatan lapangan lain dari kisah anak jalanan, anak-anak perempuan juga mengalami kekerasan seksual.

Tabel 10.1.
Kebutuhan dan Strategi Adaptasi Kaum Miskin

	Normal	Miskin Baru	Miskin Lama
Fatalisme	Rendah	Rendah, dan mulai beranjak naik	Tinggi
Tabungan	Ada, dalam jumlah sedikit. Cukup untuk mengatasi kebutuhan mendadak	Ada, dalam jumlah sedikit dan terus berkurang, akhirnya habis untuk konsumsi. Termasuk rumah dan seluruh isinya.	Tidak ada. Bila ada, tabungan berbentuk barang yang mudah dijual.
Pendapatan	Memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup (layak?) Terjadi pembagian kerja secara seksual, suami mencari nafkah, istri merawat & mendidik anak. Di kota, bila tidak bisa dipenuhi dari penghasilan suami, maka isteri bekerja di rumah atau sektor formal.	Tidak memadai. Sering terjadi karena pencari nafkah utama tidak bekerja, sakit atau meninggal. Isteri ikut mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah.	Sangat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam mencari nafkah. Anak-anak turun ke jalan atau bekerja di pabrik dengan resiko kesehatan yang tinggi.
Pemukiman	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Kondisi rumah higienis.	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Bila kemiskinan berlangsung lama, maka rumah dijual untuk kebutuhan hidup.	Tinggal di perkampungan kumuh dengan status tanah tidak jelas dan rawan penggusuran.
Kesehatan	Meski sedikit, dana diusahakan. Dalam kondisi tertentu Mengandalkan jaminan kesehatan dari perusahaan, ASTEK atau ASKES	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik. Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS
Makanan	3 (tiga) x sehari; asupan gizi memadai	2 – 3 x sehari, asupan gizi mulai tidak penting	1-2 x sehari, asupan gizi tidak penting. Penting

Bila ada orang beranggapan bahwa orang miskin itu malas, hal itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Pola strategi mereka mencari nafkah ternyata sering tidak hanya mengandalkan pada satu pekerjaan. Ada temuan mereka melakukan pekerjaan ganda. Pagi hari bekerja di sektor formal, seperti buruh pabrik, sedangkan sore hari bekerja di sektor informal, seperti berjualan, dan tukang potong rambut. Kalau memiliki pekerjaan pokok berjualan, maka tidak berhenti berjualan pada produk di pagi hari, sering sore hingga malam hari berjualan produk lain. Belum lagi, pada waktu bekerja, mereka berhemat dengan membawa lauk-pauk sendiri. Lama waktu bekerja bisa di atas dari 8 (delapan) jam sehari. Hal itu pada gilirannya akan berakibat pada hubungan yang kurang harmonis di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ada temuan bahwa kecenderungan terjadi perceraian tinggi pada keluarga miskin.

Tabungan merupakan hal yang mewah bagi orang-orang miskin, apalagi dalam bentuk uang. Di dalam kondisi yang normal, pada keluarga yang menengah, tabungan merupakan hal yang penting untuk mengatasi situasi krisis, seperti anggota keluarga yang sakit, rumah rusak, pendidikan anak. Ada beberapa cara untuk menabung, selain membuka rekening di Bank, mereka juga mengikuti arisan dalam jumlah yang besar. Kondisi ini tidak dialami oleh keluarga miskin baru, tabungan yang dimiliki akan habis untuk keperluan konsumsi, kemudian barang rumah tangga juga dijual bila perlu. Selain barang rumah tangga, ternak merupakan salah satu tabungan, sedikit-tidaknya bila masa paceklik. Produk dari ternak, seperti telur dan dagingnya, juga dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Rumah bisa juga berfungsi sebagai tabungan. Di dalam situasi mendesak rumah pun dijual, sehingga mereka pun kemudian pindah ke rumah dengan kondisi yang lebih buruk, dari pe-

rumahan ke kampung, dari kampung ke pinggiran kota. Pindah rumah sebagai strategi kaum miskin (lihat Kok, Mandemakers dan Wals, 2002). Dari milik sendiri, menjadi kontrak, dari kontrak kembali ke rumah orang tua. Ketika berada di dalam keluarga besar (*extended family*), maka kemiskinan tersebut menjadi beban dari keluarganya dan kemudian menjadi *shared poverty* dalam istilah Clifford Geertz (1983), kemiskinan dibagi bersama. Kemiskinan seperti virus yang menyebar. Kualitas dan beban yang tinggi berakibat rumah berikut lingkungannya menjadi tidak sehat dan dalam hasil penelitian R. Eddy Indrayana (2000) bahwa permukiman berkepadatan tinggi beresiko tinggi atau rentan terhadap kesehatan. Sanitasi dan udara yang buruk mengakibatkan penyakit pernapasan dan pencernaan.

Inilah rangkaian dari kemiskinan struktural (pendekatan Marx) menuju kebudayaan kemiskinan (Oscar Lewis). Ketidakmampuan akses untuk memenuhi kebutuhan akibat kondisi-kondisi obyektif yang kurang menguntungkan berakibat pada fatalisme, kepasrahan, dan secara terus-menerus melakukan pengabaian atas nilai-nilai ideal. Ini merupakan sikap realistik terhadap kondisi yang menurut mereka sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka awalnya memiliki mimpi untuk hidup yang layak, menjalani proses ritual yang layak, dan walaupun mati juga layak. Mereka berharap bisa memiliki pekerjaan dengan upah yang layak, tinggal di dalam rumah yang layak, membesarkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Mereka berharap tidak akan gelisah bila sakit atau mati karena sudah memiliki asuransi. Mimpi atau harapan ini tidak bisa dicapai karena mereka berada kondisi obyektif, seperti tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan jaringan, yang tidak menguntungkan. Kondisi-kondisi itu mengurangi dan bahkan membatasi akses politik, ekonomi dan sosialnya terhadap struktur sosial. Oleh karena itu, persoalannya bukan pada sekedar mendefinisikan kemiskinan struktural atau kebudayaan kemiskinan, tetapi harus melihat sebagai rangkaian proses yang kontinu.

Daftar Pustaka

Geertz, Clifford.

- 1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.** Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi.** Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Johnson, Doyle Paul.

- 1986 **Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1.** Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat,

- 2002 **Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kok, Jan., Kees Mandemakers, dan Henk Wals.

- 2002 City nomads. Moving house as a coping strategy, Amsterdam 1890-1940. **Paper** for the 4th European Social Science History Conference The Hague, 27 February-March 2, 2002

Wolf, Eric R.

- 1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-ilmu Sosial Jakarta. Jakarta: Rajawali.

Indeks

A

adegan teatrikal, 207, 231, 240, 245
agribisnis, 48
ambachtschool, 52
Ala, Andre Bayo. 32, 40, 41, 249
Arief, Sritua.
 Adi Sasono, 36

C

CBD, 203
Chambers, 36, 38
Cina, 61, 160, 213, 216, 223

D

danyang, 103
demam berdarah, 61
Dilon, HS.
 Hermanto, 31

E

empowerment, 34
Evers, Hans-Dieter., 11, 49, 157, 158

G

Gailbraith, Kenneth. 36
Gerbangkertasusila, 204
gilda-gilda, 18, 98
Goede, 9, 11
Government Eroppeesche Lagere School, 52

H

Handinoto, 48, 50, 52, 53, 99, 129
Hauser, Philip M. 6
Haviland, 6, 17, 24
HIPPA, 101
Holandsche Indische School, 52

I

Indrayana, 62, 248, 263, 264
integrated poverty, 36
isolasi, 39, 40
ISPA, 61

J

Javaansche School, 52
jimpitan, 16

K

Kampoeng Improvement
 Programme, 62
Kartodirdjo, Sartono., 9, 12, 24, 131
Kemiskinan
 Kultural, 36
 Struktural, 31, 36, 257, 263
 lack of opportunity, 34
 low capabilities, 34
Kemiskinan, perangkap
 kelemahan fisik, 35, 39
 kemiskinan "proper", 39
 kerentanan, 35, 39
 ketidakberdayaan, 34, 35, 39, 40, 156
KFM, 212, 213
Klugman, Jeni., 34, 35, 41, 246, 248

L

Lee, Everett S., 21, 80, 256
Levitan, Sar A., 32

LSM, 205, 231, 233, 234, 239, 242

M

Maas River, 49

*Maatschappij Tat Nut van Het
Algemeen*, 52

mahasiswa, 54, 55, 56, 138, 162,
172, 194, 205, 206, 207, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 229, 230, 232, 233,
234, 235, 241, 242

mandala, 53

Modelska, 18, 20, 24

Mulder, Niels., 33

Mumford, 17

N

Nasikun, 36, 38, 40, 41

nyantri, 53

O

off-farm, 100, 109

P

PAM, 103, 107, 147

passesn stelsel, 51

Perguruan Tinggi, 53, 54, 219, 222

PPL, 101

primus inter pares, 16, 98

pusat peradaban, 18

R

Ravallion, 33, 41

Rudiono, 212, 213, 216, 250

Rusli, Said., 5, 12

S

Sadewo, 22, 45, 64, 66, 98, 102, 133,
137, 159, 162, 203, 206, 221, 255

sakral, 103

Samhadi, 23, 24

Suharto,

pemerintahan 28, 112, 212, 213,
221, 234

Sukadana, A. Adi., 15, 17, 24, 99, 130

Suparlan, Parsudi., 4, 7, 12, 157

Surbakti, Ramlan., 208

Steele, 65

Stilkind, Jerry., 14, 24, 131

T

tegal desa, 103

the safety first, 208

Todaro, Michael P., 14

U

UMK, 211, 213, 215, 237, 247, 249

urban bias, 65

V

VOC, 47

W

Weber, Max., 18, 176, 196, 199

Werner, CC., 52

wijken, 51

Wignjosebroto, Soetandyo. 47

Wiradi, Gunawan. 22, 24, 109, 110,
113, 128, 130, 131

Wirth, Louis., 5, 9

Wolf, Eric., 22, 124, 257

ISBN : 978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA

FX Sri Sadewo, dkk



Editor
Martinus Legowo

FX Sri Sadewo

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031-8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031-8288598
Email. unipress@unesa.ac.id
unipressunesa@yahoo.com

ISBN : 978-979-028-847-8



978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN di Surabaya

Edisi Revisi

Penulis

FX Sri Sadewo
Martinus Legowo
Sugeng Harianto
Agus Trilaksana
Usman Mulyadi

Editor

Martinus Legowo



**Penerbit
Unesa University Press**

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN

di Surabaya

Edisi Revisi

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email: unipressunesa@yahoo.com

unipress@unesa.ac.id

ix, 255 hal., Illus, 15.5 x 23

ISBN: 978-979-028-847-8

copyright © 2015, Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Menjadi miskin bukan sebagai suatu pilihan, berbeda bila menjadi orang kaya. Dari hari ke hari orang berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Kekayaan tidak saja menjadi atribut dari status sosial seseorang. Barang-barang miliknya dibawa seiring jalan orang tersebut. Orang lain menoleh, takjub, dan iri, sebaliknya si kaya dengan tegap, wajah mendongak ke atas dan bangga. Tidak demikian dengan orang miskin, ia tertunduk ke bawah, tidak berani menatap wajah orang, selain menengadah tangan. Sangat tidak berdaya.

Gambaran orang miskin yang demikian ini memang tidak separah itu. Orang miskin sering lebih tegap dan *trengginas*, dari hari ke hari untuk mencari makan. Ia bekerja dan mengumpulkan satu demi satu rupiah untuk makan. Memang, tidak semua yang dikumpulkan bisa disimpan, sebaliknya habis untuk kebutuhan konsumsinya.

Intinya, kemiskinan bukanlah suatu kebanggaan. Namun demikian, ternyata tidak semuanya benar, pada setiap kelompok keyakinan tertentu, ada orang yang merelakan dirinya untuk melepaskan dari kesenangan duniawi. Mereka menjadi miskin secara sukarela demi keyakinan. Kelompok demikian tidak dibahas dalam buku ini.

Surabaya, awal Februari 2007
penyunting

FX Sri Sadewo

Kata Pengantar

(edisi revisi)

Persoalan-persoalan kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan menjadi indikator ketidaksejahteraan suatu masyarakat. Semakin besar jumlah orang miskin, hal itu menunjukkan kegagalan para penyelenggara negara (pemerintah). Di setiap negara, hidup sejahtera, baik secara material maupun non-material menjadi satu tujuan mengapa mereka memerdekakan diri. Kesejahteraan material ditandai dengan kemakmuran secara ekonomi, sementara itu kesejahteraan non-material ditandai dengan rasa aman dan nyaman, atau tepatnya kebahagiaan. Pengelola negara tidak bisa memilih salah satu yang lebih dahulu dicapai, baru yang lain dicapai berikutnya. Ketidaksejahteraan secara material pada gilirannya mengakibatkan berbagai tindakan yang mengurangi rasa aman, nyaman dan bahagia. Sebaliknya, rasa aman, nyaman dan bahagia merupakan hal yang abstrak dan jauh lebih sulit untuk dicapai. Ukuran-ukurannya pun berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, orang akan mengenal dengan konsep *American Dreams* (Mimpi Amerika). Dalam nilai tersebut, ternyata ada ukuran ekonomi juga menjadi acuan.

Memang tidak selalu, ukuran kesejahteraan material menjadi utama bagi seseorang. Karena nilai-nilai tertentu, orang lebih memilih ketenangan hidupnya tanpa bergantung pada perolehan ekonominya. Orang-orang yang demikian telah memilih kemiskinan menjadi bagian hidupnya. Mereka miskin secara sukarela, sudah barang tentu dengan berbagai alasan. Namun demikian, hal tersebut tentu dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah yang lebih besar, kesejahteraan material merupakan hal yang selalu diharapkan. Artinya, mereka tidak ingin menjadi

miskin. Pemahaman yang demikian ini kemudian menjadi kesepakatan bersama bagi negara-negara di dunia melalui MDG's (*Milleneum Development Goals*) yang dideklarasikan pada bulan September 2000 dan berharap dicapai tahun 2015. Point yang pertama dari MDG's adalah meningkatkan jumlah orang yang berpendapatan di atas 1 \$ per kapita per hari. Angka 1 \$ itu sebagai ambang batas kemiskinan absolut. Menjelang tahun 2015, seluruh pemerintah penandatangan MDGs melakukan evaluasi dan menyatakan belum tercapai sepenuhnya. Akhirnya, pada 12-13 Nopember 2014 mereka kembali menandatangani kesepakatan bersama untuk melanjutkan program-program tersebut dengan perbaikannya. Kesepakatan itu tertuang dalam SDGs (Sustainable Development Goals).

Kegamangan terhadap kondisi kemiskinan itu sebenarnya tidak saja dimiliki oleh pengelola negara, tetapi juga mereka yang mengalami. Pertambahann jumlah orang miskin itu tidak terlepas dari kegagalan berbagai program pembangunan. Kegagalan pembangunan pertanian di perdesaan misalnya telah meningkatkan jumlah orang miskin. Wilayah perdesaan telah di-"kota"-kan dengan industri yang jauh dari karakternya. Orang yang termajinalisasi dari pembangunan pedesaan tersebut pada gilirannya urbanisasi ke wilayah perkotaan. Dengan mengambil kasus kota Surabaya, buku ini dengan baik menggambarkan orang-orang miskin itu sebenarnya tidak menyerah begitu saja. Mereka yang berasal dari desa beradaptasi dengan wilayah perkotaan dan bekerja pada berbagai sektor formal atau informal.

Buku ini diawali dengan perdebatan teoritik tentang pertumbuhan perkotaan dan indikator kemiskinan. Hal itu disajikan dalam bagian pertama. Bagian berikutnya, gambaran tentang usaha-usaha orang miskin berjuang dan bertahan hidup direkam dengan baik melalui sejumlah penelitian pada beberapa sektor pekerjaan di Surabaya. Mereka, orang miskin sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka menyuarakan dalam berbagai bentuk,

misalnya melalui aktivitas mengamen dan adegan teatrikal pada waktu demo. Hal itu dicermati dan ditulis pada bab 8 dan bab 9. Di bagian akhir, penulis merangkum bagaimana usaha-usaha orang miskin kota bertahan dan beradaptasi dalam kemiskinan.

Di dalam edisi revisi ini, penulis mengolah ulang terutama terkait dengan metode penelitian. Hal itu ingin menunjukkan pada pembaca bahwa apa yang ditulis bukan sekedar imajinasi tentang orang miskin, tetapi apa yang ada, terjadi dan dipahami tentang orang miskin.

Lebih dari itu, selain edisi revisi dalam bentuk cetak, dengan mencermati perubahan teknologi, buku ini ditampilkan dalam bentuk ebook yang tidak berbeda jauh dari edisi cetak. Penerbitan ebook bertujuan agar buku ini dapat dibaca secara luas, sekaligus dengan harapan untuk memperoleh kritik. Ada rencana dalam waktu tidak lebih dari dua tahun, buku ini juga dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris.

Surabaya, Desember 2015

FX Sri Sadewo

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar (edisi revisi)	v
Daftar Isi	ix
Bagian 1. Problematika Perkotaan	1
Bab 1 Urbanisasi dalam Perspektif Budaya (Martinus Legowo)	3
Bab 2 Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran (FX Sri Sadewo)	13
Bab 3 Kemiskinan dan Pengukurannya (FX Sri Sadewo)	23
Bagian 2. Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota	39
Bab 4 Surabaya, Geliat Calon Kota Metropolitan (FX Sri Sadewo)	41
Bab 5 Buruh Bangunan di Kota Besar. Mekanisme Survival Kelompok Miskin Migran di Surabaya Tahun 1990-an (FX Sri Sadewo)	59

Bab 6	
Petani Kota. Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang Urban (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto, dan Usman Mulyadi)	93
Bab 7:	
Petugas <i>Cleaning Service</i> . Berharap di Sektor " <i>Formal</i> ", meski Harus Cerdik dan Tabah (Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo, dan Arief Sudrajat)	127
Bab 8	
Pengamen Seniman Jalanan dan Suara-suara " <i>Lapar</i> " Orang Miskin Kota (Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto)	153
Bab 9	
Mahasiswa dan Orang Miskin Kota Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi)	195
Bagian 3.	
Penutup	241
Bab 10	
Kemiskinan Kota dan Pembangunan (FX Sri Sadewo)	243

Indeks

FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya

Bagian 1

Problematika Perkotaan

Bab 1

Urbanisasi dalam Perspektif Budaya

Martinus Legowo

Pendahuluan

Jika suatu bangsa sadar dengan proses modernisasinya, sebenarnya bangsa tersebut hanya ingin berusaha untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia serta aliran peradapan pada jaman bangsa tersebut hidup. Kecenderungan suatu bangsa untuk memodenisir dirinya sejauh mungkin dilakukan dengan pembangunan. Dalam pembangunan ini secara sadar diupayakan untuk dipercepatnya perubahan struktur sosial-ekonomi dalam bangsa yang bersangkutan. Konsekuensi dari hal ini antara lain mengakibatkan juga suatu proses pergeseran dalam struktur mata pencaharian, stratifikasi sosial, serta meningkatkan mobilitas geografi seperti migrasi dan urbanisasi.

Masalah urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja, dalam arti perpindahan dari desa ke kota, akan tetapi juga dilihat sebagai perubahan budaya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut jika ditinjau dari perspektif budaya, maka urbanisasi ini perlu kerangka berfikir yang lain yaitu yang menyangkut masalah nilai, norma dan pengetahuan. Urbanisasi juga mempunyai kecenderungan untuk melibatkan perubahan-

perubahan dalam sub sistem masyarakat yang lain. Terutama pada tingkat makro, karena urbanisasi juga berarti mobilitas dan jika mobilitas terjadi, maka sub sistem lain biasanya juga berubah.

Dengan melihat urbanisasi sebagai proses perubahan kebudayaan, dalam arti perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan (*ide-ide*), akan memudahkan untuk memasukkan berbagai gejala yang mungkin muncul di perkotaan dalam kerangka penjelasan ini. Masalah-masalah yang muncul pada dimensi yang lain dapat dijelaskan lewat kerangka berfikir yang melihat ada kesejajaran masyarakat. Antara desa dan kota memiliki perbedaan dalam hal kebudayaan karena pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan lingkungan dan lingkungan yang mereka hadapipun berbeda. Permasalahan ini akan menimbulkan persoalan dalam menyesuaikan dengan lingkungan kota, terutama dalam memperjuangkan hidup dan cara (*gaya*) hidup. Sehubungan dengan ini Parsudi Suparlan (1978) menjelaskan bahwa persebaran kebudayaan kepada anggota dan pewarisan kepada generasi selanjutnya dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucap maupun dalam tindakan.

Di sini kita harus bisa memandang bahwa kebudayaan sebagai suatu kekhususan sistem nilai, karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang lain. dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kearah yang lebih sesuai dengan kehidupan yang lain.

Urbanisasi: Sebuah Kerangka Konsep

Deskripsi urbanisasi banyak yang diartikan sebagai suatu mobilitas horizontal, yaitu dari desa ke kota. Menurut Said Rusli (1983), dijelaskan bahwa urbanisasi dilihatnya sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Menurut Lee (1984) ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi, yaitu (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) faktor penghalang, dan (4) Faktor-faktor pribadi. Selanjutnya Louis Wirth's dalam studi urbanisasinya mengatakan bahwa : "*Urbanism as a way of life*" (Urbanisasi sebagai cara hidup) di mana pemusatan penduduk di dalam kota dianggap sebagai variabel yang sangat menentukan kemungkinan hidup individu, serta interaksi antar individu. Urbanisasi sebagai cara hidup yang khas dapat didekati secara empiris dari 3 perspektif yang saling berhubungan, yaitu : (1) sebagai suatu struktur fisik yang terdiri dari penduduk, teknologi dan keteraturan ekologis, (2) sebagai suatu sistem organisasi sosial yang melihat suatu struktur sosial yang khas suatu rangkaian institusi sosial dan suatu pola hubungan sosial yang khas pula, (3) sebagai seperangkat sikap dan ide-ide, dan kumpulan pribadi-pribadi yang ikut serta dalam bentuk-bentuk tingkah laku kolektif yang khas, dan menjadi obyek dari mekanisme pengawasan sosial yang khas pula. Lebih lanjut, Said Rusli (1983) melihat bahwa urbanisasi itu sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Hal itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Bintarto (1984) bahwa gejala urbanisasi terkait dengan faktor *push* dan *pull*.

Karena hanya melihat dari sisi faktor *push* dan *pull*, maka urbanisasi harus juga dilihat dari sisi budaya. Aspek budaya itu menyangkut nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan. Hal itu dilakukan oleh White dalam Haviland (1989),

mendefinisikan aspek tekno-ekonomis kebudayaan sebagai cara yang digunakan oleh para anggota suatu kebudayaan untuk menghadapi lingkungan mereka, dan aspek inilah yang selanjutnya menentukan aspek sosial dan ideology kebudayaan. Cara kebudayaan ini merupakan cara beradaptasi dengan lingkungan.

Dengan demikian kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan (emosi) manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral yang sumber-sumber dari nilai moral tersebut pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia.

Urbanisasi Sebagai Proses Perubahan Kebudayaan

Urbanisasi menurut Philip M. Hauser (1973) dapat didefinisikan sebagai proses yang membawa transformasi besar dalam pandangan hidup manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pergeseran dari “rural” ke “urban”. Sehubungan dengan demikian kita perlu melihat definisi kebudayaan agar diperoleh gambaran yang jelas karena gejala perubahan di sini adalah perubahan kebudayaan.

Kebudayaan disini harus dilihat dari proses kognitif, yaitu sebagai serangkaian pengetahuan yang digunakan sebagai strategi untuk menghadapi kehidupan, yang berkenaan dengan pemahaman dan pengintepretasian lingkungan serta pengalaman yang dihadapi oleh manusia. Lingkungan dan pengalaman ini sangat menentukan bagi proses belajar seseorang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1978) bahwa kebudayaan dengan demikian merupakan sistem ide, yang merupakan serangkaian petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan

strategi-strategi yang terdiri atas model-model kognitif yang bersumber pada dan diselimuti oleh nilai-nilai yang ada dalam etos dan pandangan hidup, yang dalam penggunaannya oleh para pelakunya untuk menginterpretasi dan menghadapi lingkungannya dilakukan secara selektif. Jadi kebudayaan disini adalah pedoman bagi tingkah laku manusia. Sebagai pedoman, ia memegang peranan penting karena dapat mengarahkan tindakan-tindakan dari si pendukungnya.

Deskripsi atau pendefinisian kebudayaan sebagai proses kognitif memiliki implikasi lanjutan terhadap pemahaman urbanisasi. Kita harus melihat bahwa urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja (dalam arti perpindahan dari desa ke kota), akan tetapi perubahan tersebut juga dilihat sebagai proses budaya. Demikian juga termasuk transfer nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kota. Mengenai transfer kebudayaan ini hendaknya disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga merupakan keputusan untuk melakukan penyesuaian kebudayaan di lingkungan yang baru (sesuai dengan iklim perkotaan).

Masalah yang dihadapi sekarang adalah kesulitan dalam mengubah sistem ide mereka (kaum urbanis), dengan demikian bisa mengalami hambatan dalam transfer kebudayaan. Sistem ide ini merupakan salah satu unsur yang paling sukar dirubah dan seandainya bisa dirubah membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kebudayaan suatu masyarakat itu sudah mengakar dalam diri pendukungnya. Lebih jauh lagi apabila kebudayaan itu sendiri tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakatnya, dalam arti sudah tidak diperlukan lagi oleh masyarakat pendukungnya sehingga dengan demikian kebudayaan akan berubah. Proses adaptasi sangat penting artinya agar kebudayaan kota dapat diterima dengan baik. Sehubungan dengan adanya adaptasi ini manusia tidak hanya telah menjamin kelestariannya, tetapi juga

pemekarannya. Oleh karena itu, tidak berarti bahwa apa saja yang dikerjakan oleh manusia dikerjakan karena sifat adaptifnya terhadap lingkungan tertentu. Yang jelas, manusia tidak bersaksi terhadap lingkungan seperti apa adanya, tetapi tetapi ia bereaksi terhadap lingkungan seperti apa yang dipahaminya, dan kelompok manusia dapat memahami lingkungan yang sama dengan cara-cara yang berbeda satu sama lain. Mereka juga bereaksi terhadap hal-hal yang bukan lingkungan: pertama-tama sifat biologinya, kepercayaan, sikap dan konsekuensi perilaku mereka untuk orang lain. Semua itu menghadapkan mereka kepada masalah, dan orang yang memelihara kebudayaan itu untuk memecahkan masalah.

Kota, Lingkungan yang Menuntut Perubahan Budaya

Lingkungan mempengaruhi kebudayaan, sehingga nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan hidup yang dihadapinya. Lingkungan desa dan kota merupakan dua kubu yang berbeda. Strategi adaptasi di pedesaan juga berbeda dengan strategi adaptasi di kota. Selain itu, pertumbuhan kebudayaan yang ada di desa berbeda dengan yang ada di kota. Simbol-simbol komunikasi pun ikut berubah dalam proses ini, sehingga manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu memiliki model berfikir yang banyak dipengaruhi dan disesuaikan dengan lingkungan itu yang menjadikan sikap dan tindakan mereka memiliki corak latar belakang lingkungan asalnya. Masalah-masalah inilah yang berkaitan erat dengan urbanisasi yang ada di perkotaan.

Masalah itu ada karena sebagaimana dicirikan oleh Louis Wirth dalam Goede (1982) bahwa kota sebagai suatu *“relatively large, dense, and permanent settlement of socially heterogeneous individuals”*. Ada tiga komponen yang cukup penting dari definisi ini, yaitu : (1) ukuran yang besar; (2) adanya kepadatan; dan (3) sifatnya yang heterogen. Komponen yang dikemukakan oleh Wirth ini melahir-

kan masalah pada saat terjadinya kontak antara desa dan kota. Masalah ini sangat penting diperhatikan karena baik nilai-nilai, norma-norma, maupun pengetahuan yang tumbuh di perkotaan membedakan dengan yang ada di pedesaan. Selanjutnya, Sartono Kartodirdjo (1977) memberikan suatu konsepsi lain untuk mengkaji masalah yang berhubungan dengan pandangan hidup ini dengan menggunakan tiga perspektif sebagai pendekatannya. Pertama, bahwa sebagai struktur fisik, kota mempunyai dasar populasi yang dideferensiasikan menurut tingkat teknologi, susunan ekologis dan faktor-faktor lain. Kedua, sebagai susunan sosial, pandangan hidup ini menggantikan hubungan primer dan sekunder. Berhubung dengan proses ini maka ikatan kekerabatan diperlemah, dan solidaritas sosial menjadi goyah. Ketiga, dengan gaya hidup ini muncul mentalitas kota dengan sikap, ide-ide, dan kepribadian yang berbeda dengan mentalitas tradisional. Ketiga perspektif ini sangat penting bagi penjelasan tentang urbanisasi. Hubungan-hubungan sosial yang muncul juga membutuhkan corak yang khusus, menuntut adanya strategi adaptasi tertentu.

Tentang gaya hidup kota, Wirth mengemukakan bahwa (1) masyarakat kota cenderung sekuler, (2) terbentuknya asosiasi yang bersifat sukarela; (3) adanya peranan sosial yang terpisah-pisah; dan (4) peranan norma-norma menjadi tidak jelas. Kaum urbanis akan mengalami perubahan ke arah tersebut. Namun demikian, mereka tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai, norma-norma dan model-model pengetahuan yang memiliki corak pedesaan. Oleh karena itu, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Kondisi kota merupakan sesuatu yang asing bagi kaum urbanis, sehingga sistem pengetahuan yang mereka miliki tidak dapat dipakai untuk memahami dan menginterpretasikan dengan tepat kondisi kehidupan di perkotaan. Simbol-simbol kehidupanpun sudah berubah, hubungan-hubungan sosial sudah menjadi dangkal. Orang kota sudah mengembangkan kehidupan yang komersial. Stratifikasi sosialpun sudah semakin jelas perbedaan-

nya, sehingga menyebabkan hilangnya kontak yang menyeluruh antar warga masyarakat.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada kaum urbanis ini adalah: (1) mereka mengubah sistem pengetahuan lama yang dibawa dari daerah asal agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan yang berlaku di perkotaan; dan (2) mereka tetap mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, model-model pengetahuan lama. Sistem pengetahuan untuk selanjutnya digunakan untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan sistem pengetahuan mereka yang sudah mapan. Untuk yang pertama mereka akan menjadi golongan orang kota, yang harmonis dengan lingkungan hidup di perkotaan. Selanjutnya yang kedua, mereka akan hidup sebagai orang desa di perkotaan, yang lengkap dengan gaya hidup di pedesaan.

Penutup

Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi memungkinkan kita sampai pada penjelasan yang lebih mendasar. Urbanisasi tidak hanya menyangkut masalah perubahan fisik, tetapi juga harus dilihat dalam konteks budaya yang berarti perubahan sistem pengetahuan untuk menginterpretasikan kehidupannya. Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi merupakan salah satu bidang penjelasan yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Perlu diketahui bahwa kita harus memandang kebudayaan sebagai kekhususan-kekhususan sistem nilai karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang lain. Dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam

diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan ke arah yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat lain.

Daftar Pustaka

Bintoro

1984 **Urbanisasi dan Permasalahannya**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Evers, Hans-Dieter

1978 "Urbanization and Urban Conflict in Southeast Asia". Dalam Peter SJ Chen and Hans-Dieter Evers (ed.), **Studies in Asean Sociology**. Singapore: Chopmen Enterprises.

Goede, JH

1982 "Urbanisasi dan Urbanisme" dalam JW Schoorl, **Modernisasi**, Jakarta: Gramedia.

Houser, Philip M

1973 **Perkembangan Kota Semarang**, Salatiga: LPIS IKIP Kristen Satyawacana.

Lee, Everet S

1983 **Suatu Teori Migrasi**, diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta, PPK- UGM.

McGee, TG

1976 **Suatu Aspek Urbanisasi di Asia Tenggara**, Yogyakarta, Lembaga Kependudukan UGM.

Parsudi Suparlan

1977 "Flat dari aspek Antropologi", **Widyapura**, No.1, Th II

Said Rusli

1984 **Pengantar Ilmu Kependudukan**, Jakarta: LP3ES.

Sartono Kartodirdjo

1978 Kata Pengantar dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), **Masyarakat Kuno dan Kelompok Sosial**, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Wirth, Louis

1978 Urbanisasi sebagai cara hidup, **Berita Antropologi**, Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, No. 34.

Bab 2

Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran

Kota sebagai Pusat Peradaban

Dari catatan Michael P.Todaro dan Jerry Stilkind (1991) menggambarkan bagaimana penduduk kota telah membengkak berlipat-lipat jumlahnya, tidak saja di negara-negara maju, tetapi sebaliknya di negara-negara sedang berkembang. Di dalam wilayah yang terbatas, kota dihuni oleh puluhan juta manusia, Mexico City dengan 31 juta jiwa, Sao Paolo 25,8 juta jiwa, New York 20,4 juta jiwa, sementara itu Jakarta dengan 16,7 juta jiwa. Orang-orang dengan “sukarela” hidup bersesak-sesak di kota yang sempit, fasilitas yang terbatas. Untuk di Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya, mereka tak jarang harus tinggal di bantaran sungai. Dengan kondisi lingkungan yang “tidak sehat” (menurut ukuran ilmu kesehatan lingkungan), mereka tinggal, bahkan menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah tersebut.

Kepadatan nampaknya menjadi ciri dari sebuah kota. Setiap kota di mana pun memiliki wilayah-wilayah padat. Wilayah-wilayah itu biasanya tidak jauh dari pusat kota. Hanya sedikit kota-kota di dunia ini direncanakan dengan penataan ruang taat asas. Kota yang demikian ini biasanya tidak tumbuh secara

alamiah, tetapi “kloning” (rekayasa) dari kota-kota lama yang telanjur semrawut.

Hal ini tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan kota tersebut. Di dalam sejarahnya, kota ini lahir dari revolusi peradaban pertama, yaitu revolusi agraris. Dimulai dari domestikasi (penjinakan) binatang dan tanaman hingga bercocok tanam dan penemuan “teknologi” pertanian, sebut saja kapak persegi dan alat besi, manusia kemudian di-“rumah”-kan. Manusia tidak lagi berkeliaran mengikuti binatang buruan, tetapi cukup memilih tempat tinggal. Hal ini tidak berjalan dalam waktu yang singkat dan langsung. Pada waktu penjinakan binatang, manusia tidak lagi berburu, tetapi menjadi penggembala. Mereka membawa binatang piaraannya ke padang-padang. Mereka meninggalkan gua, tetapi membawa kemah-kemahnya. Ketika bercocok tanam, mereka tidak lagi berjalan ke padang-padang, tetapi menetap di mana lahan pertanian itu berada. Rumah-rumah pun didirikan di sekitar lahan pertanian (lihat Sukadana, 1983: 47-62).

Pembagian pekerjaan di antara manusia ini kemudian menjadi semakin kompleks. Dari secara tegas, mereka berbagi tugas dengan penanda jenis kelaminnya, mereka meletakkan perempuan di rumah bersama anak-anaknya, hanya pada waktu tertentu saja, seperti tanam, panen dan sesudahnya ditarik turun ke lahan pertanian. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang telah melahirkan peradaban tersebut. Ada dugaan yang mulai melakukan domestikasi binatang dan tanaman adalah kaum perempuan tatkala manusia laki-laki sedang sibuk berburu dan berperang. Oleh karena itu, segala atribut “lahir” yang dimiliki oleh perempuan menjadi penanda kesuburan lahan tersebut.

Karena hasilnya berlimpah, tidak bisa dihabiskan dalam waktu yang singkat, maka masyarakat petani mengalami surplus pangan. Surplus pangan ini merupakan berkah dan malapetaka. Menjadi berkah karena manusia tidak lagi hidup hanya untuk

mencari makan. Waktu luangnya digunakan untuk mengembangkan teknologi dan kesenian. Spesialisasi pekerjaan di luar pertanian pun berkembang. Sementara itu, surplus pangan ini menjadi malapetaka karena menjadi daya tarik bagi kelompok manusia yang masih nomaden untuk menguasai. Peperangan pada masa lampau biasanya terjadi pada masa paska panen.

Strategi yang dikembangkan kemudian adalah hidup lebih berkelompok, rumah-rumah tidak lagi berjauhan, mengikuti lahan pertanian, namun sebaliknya berkelompok, sebagai perkampungan. Lahan pertanian diletakkan di sisi luar, antara lahan pertanian dan perkampungan dibatasi tumpukan batu seperti layaknya batas dan benteng kota, atau rimbunan pohon-pohon bambu, seperti pola-pola perkampungan lama di Asia Tenggara, antara lain: Huta (Batak). Hanya ada satu pintu masuk ke perkampungan. Pada waktu malam hari dan saat-saat tertentu kaum lelaki secara bergiliran bertugas untuk menjaga perkampungan.

Hal itu diatur oleh kepala kampung. Kepala kampung ini dipilih mengikuti prinsip *primus inter pares*. Lama-kelamaan orang yang berjaga ini dipilih secara khusus, di kampung Jawa dikenal dengan *Jagabaya*. Orang-orang ini dibayar dengan himpunan kecil dari hasil panen (*jimpitan*) pada masing-masing keluarga. Aktivitas ini diatur oleh kepala kampung. Dalam perkembangannya, penemuan sistem pertanian sawah membuat hubungan antar keluarga, antar kampung ini menjadi semakin teratur dan meluas seiring jaringan irigasi dari sungai ke sawah. Dari antara kepala kampung, seorang dipilih sebagai pemimpin. Pemimpin ini raja di masa kemudian, kampung tempat tinggalnya adalah kota, sedangkan para *jagabaya* menjadi tentara, dan *jimpitan* adalah pajak. Tanda-tanda pembayaran *jimpitan* ini adalah awal dari manusia mengenal angka dan huruf pertama kali, sebagaimana terjadi pada bangsa Sumeria di Mesopotamia kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (perhatikan Haviland, 1988: 31; Sukadana, 1983: 71-72; Hawkes, 1965: 326, 363-364). Secara ringkas, Mumford (1970),

sebagaimana dikutip oleh Adi Sukadana (1983: 72), mengurutkan rangkaian perkembangan sebuah kota sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahap-tahap Perkembangan Kota
(Sukadana, 1983: 72)

Stadium	Bentuk Perkembangan
1 Eoplis	Perkembangan sebuah desa menjadi suatu pemukiman yang tetap dengan penggunaan tanah yang teratur
2 Polis	Suatu kumpulan desa atau kelompok keluarga besar dengan adat-istiadat serta kegiatan agraris yang bertahan.
3 Metropolis	Sebuah kota yang tumbuh dari sejumlah desa tau kota kecil, sehingga merupakan suatu pemukiman induk dengan pusat perdagangan dan interaksi macam-macam kebudayaan.
4 Megapolis	Sebuah kota besar dengan tanda-tanda permulaan kemunduran peradaban
5 Tyranopolis	Sebuah kota besar yang hidup sebagai parasit di lingkungannya. Tampak detorasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan usaha administratif.
6 Nekropolis	Sebuah kota besar dalam keadaan kemunduran umum, menuju kemusnahan-nya.

Sang pemimpin, raja tidak serta merta membangun istananya. Terebih dahulu, ia menyusun kekuatan untuk menjaga keamanan rakyatnya. Rakyat dengan sukarela menyerahkan sebagian kemerdekaannya untuk diatur oleh raja tersebut. Kekuatan itu berupa tentara dan pemungut pajak, serta “pelayan” bagi rakyat. Timbunan hasil panen sebagai bayaran untuk tentara ini diletakkan dalam *lumbung-lumbung* di kota. Kelebihannya dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan lain. Demikian pula, rakyat-

nya juga menukarkan hasil panen dengan peralatan dan barang lain yang dibutuhkan. Peralatan dan barang tersebut dihasilkan oleh tukang-tukang yang telah berkembang pada masa sebelumnya. Atau, para pedagang dari luar membawa dan menjualnya. Para pedagang membangun toko dan perusahaan di kota tersebut. Tanah bisa membeli dari masyarakat setempat atau menyewa pada raja. Oleh karena itu, pada abad pertengahan di Eropa sejumlah kota tumbuh akibat perkembangan perusahaan di dalamnya, seperti *gilda-gilda* di kota-kota Italia. Di Nusantara, sejumlah kota pantai merupakan kota perdagangan, seperti Surabaya dengan syabandarnya. Itu awal pertumbuhan kota sebagai pusat peradaban dengan berbagai fungsi, mulai pasar, birokrasi hingga benteng, sebagaimana dipaparkan oleh Max Weber (1977), dan kota pun tumbuh sebagai pusat peradaban (Keesing, 1989: 49-50).

Urbanisasi dan Peminggiran

Pada awal pertumbuhan kota, jumlah penduduknya tidak begitu besar. Meskipun demikian, menempati lahan yang sempit. Kota tumbuh dengan cepat, terutama akibat dari urbanisasi (perpindahan manusia dari desa ke kota). Demikian pula, terlihat pada perkembangan kota-kota pertama di dunia. Menurut catatan Modelski (1997) Di dalam penggalian kota-kota lama, diketahui bahwa luas setiap kota memiliki luas hanya beberapa hektar saja, tetapi dihuni lebih dari seribu jiwa. Jumlah penduduk kota-kota pertama itu berlipat dua pada setiap seratus tahunnya. Pelipatan jumlah penduduk ini semakin pendek ketika memasuki abad ke-20 dan kini masuk paruh pertama abad ke-21. Pelipatan dalam jumlah besar ini menjadi sulit dibuktikan akibat pertambahan alami, namun lebih meyakinkan sebagai pengaruh urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa-kota, atau penggabungan desa-desa menjadi wilayah kota.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan pada Kota-kota Pertama
(Modelski, 1997)

Kota (Pengarang)	Periode	Luas (ha)	Perkiraan Jumlah Penduduk	Kepadatan
ERIDU				
▪ Mallowan (1970: 331)	Ubaid	8-10	4.000	500
▪ Wright (1981: 325)	Early Uruk	40	6.200- 10.000	155-250
HABUBA-KABIRA				
▪ Algaze (1993)	3.100 SM	40	6-8.000	150-200
HIERAKONPOLIS				
▪ Valhelle, 1990	3.400 SM	35	5-10.000	143-350
URUK				
▪ Nissen, 1993: 56	Akhir millenium ketiga SM	250	25-50.000	100-200
▪ Adams, 1981: 85	Awal Dinasti 1	400	40-50.000	100-125
UR				
▪ Wright, 1981: 327	Awal Dinasti 1	21	Kurang dari 6.000	286
▪ Wooley, 1965: 193	Dinasti 3	50	34.000	680
▪ Wright, 1981: 320-1	Dinasti 3	50 (termasuk dinding kota)	34.000	690
EBLA				
▪ Pettinato, 1981: 134	Dinasti 3	56	Sekitar 40.000 lebih	714
MOHENJO-DARO				
▪ Barrow & Shodhan, 1977: 11	2.500 SM	51 (wilayah kota)	40.000	784
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	100+	40.000	400
HARAPPA				
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	43+	20.000 s/d 25.0000	465-581

Pergerakan-pergerakan etnik hingga milineum pertama Masehi telah menenggelamkan kota-kota lama, kemudian tumbuh kota-kota baru. Kota-kota baru dunia ini dalam sejarahnya sebenarnya tidak jauh berbeda engan kota-kota pendahulunya, yaitu tumbuh dari pertanian yang menyebar ke seluruh wilayah di dunia, tetapi kini jauh lebih rumit. Kota tidak lagi sebagai kota produsen, tetapi sebagai kota konsumen, dagang dan pemerintahan. Everett S. Lee (1995) yang memperbaiki teori Ravenstein, menunjukkan bahwa keanekaragaman fungsi kota tersebut telah menjadi medan magnet bagi penduduk desa sekitarnya. Daya tariknya menjadi semakin menguat tatkala jalur transportasi antara desa dan kota semakin mudah dan murah. Revolusi industri telah menghasilkan alat transportasi massal yang murah, seperti kereta api dan bus.

Sementara itu, desa-desa mengalami entropi. Cara-cara produksi dalam sistem pertanian menjadi semakin tidak menguntungkan bagi pekerja. Monetisasi dan revolusi hijau-biru memaksa para tuan tanah mengabaikan pola-pola hubungan yang “mesra” terbina dari masa lampau, yaitu patron-klien. Pada masa lampau, di Inggris perpindahan penduduk ke kota diawali dari rendahnya upah buruh tani di pedesaan. Penyebabnya bukan perubahan teknologi, tetapi jumlah buruh yang tidak bekerja jauh lebih banyak dari lahan pertanian, sehingga buruh menurunkan upahnya demi memperoleh pekerjaannya. Pada titik tertentu, upah yang diterima tidak seimbang dengan tenaganya, sehingga mereka memilih memasuki industri-industri di perkotaan (lihat Hallas, 2000: 67-84). Sementara itu, paska Perang Dunia II, revolusi hijau-biru mengakibatkan penyingkiran kaum perempuan dari lahan pertanian, kaum miskin desa menjadi semakin terpuruk. Hasil panen tidak lagi melebihi dari biaya produksi, sehingga petani-petani kecil menjual tanahnya kepada tuan tanah atau orang kota.

Wiradi (1987) menggambarkan dengan baik dinamika masyarakat petani di Jawa. Dalam tulisannya, ia menggambarkan bahwa monetisasi dan revolusi hijau-biru mengakibatkan masyarakat buruh tani dan petani kecil mengembangkan sektor non-pertanian. Lambat-laut mereka kemudian desa menuju ke kota untuk kebutuhan keluarganya. Sektor pertanian yang tidak mendukung ditinggalkan. Namun, hasil dari sektor pertanian (bila ada) digunakan untuk mendukung usaha-usaha sektor non-pertanian di pedesaan dan pada gilirannya untuk modal di perkotaan. Pada petani kaya, sektor non-pertanian merupakan diversifikasi usaha dari sektor pertanian, begitu pula bila melakukan migrasi dan berusaha di kota. Dengan modal yang besar, hasilnya pun berlipat, tetapi hal tidak demikian pada petani miskin atau buruh tani. Hasil di perkotaan tidak memberikan keuntungan yang besar, selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya di desa dan seringkali jarang digunakan untuk mengembangkan sektor pertaniannya.

Sebagaimana ditulis oleh Eric Wolf (1985) bahwa salah satu faktor pengikat dari masyarakat desa adalah tanah. Ketika kehilangan tanah, maka lambat laun hilang pula ikatan pada desa asalnya, dan akhirnya menetap di kota. Keputusan menetap di kota merupakan konsekuensi ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghidupannya, meski hanya masuk ke sektor informal. Selain kondisi obyektif kaum migran, pilihan memasuki sektor informal juga semata-mata karena sektor formal terbatas jumlahnya dan tidak bersifat lentur.

Dengan demikian, jelaslah mengapa kota dari hari ke hari tidak semakin longgar, tetapi semakin padat. Kebutuhan akan tanah untuk pemukiman, perkantoran dan pabrik semakin mengusur sektor pertanian di kota (lihat Sadewo, Harianto, dan Mulyadi, 2004). Kampung-kampung lama dari hari ke hari tergusur, dan digantikan oleh pusat perkantoran dan perbelanjaan. Penduduknya memilih pindah ke daerah pinggiran kota. Namun

demikian, pendirian pusat perkantoran dan perbelanjaan sebagai representasi pertumbuhan sektor formal tetap tidak mampu menampung tenaga kerja, terutama di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, dari data BPS, sebagaimana dikutip oleh Samhadi (2006: 33), sektor formal hanya bisa menampung 30% tenaga kerja, sebaliknya sektor yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, sektor informal menampung 70% tenaga kerja.

Di dalam analisis Samhadi (2006:33), pertumbuhan sektor informal di Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut karena ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja. Di Indonesia, angka pengangguran terus meningkat, dari 5,18 juta orang tahun 1997, menjadi 6,07 juta orang (1998), 8,9 juta orang (1999), 8,44 juta orang (2000), 8,01 juta orang (2001), 9,13 orang (2002), 9,53 juta orang (2003), 10,25 juta orang (2004) dan 10,9 juta orang (2005). Jika setengah penganggur (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu) dimasukkan, angka pengangguran saat ini mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 37% dari toatal angkatan kerja (106,9 juta orang). Kondisi ini berlawanan dengan pertumbuhan sektor formal. Berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2004-2009 sebesar 6,6% per tahun dan setiap persen pertumbuhan bisa menyerap 600.000 angkatan kerja. Namun, pada kenyataan angka pertumbuhan tersebut diperkirakan baru bisa dicapai tahun 2007, dan sekarang ini hanya mampu menciptakan sekitar 178.000 lapangan kerja baru.

Daftar Pustaka

- Hallas, C.S.
2000 Poverty and Pragmatism in Northern Uplands of England: the North Yorkshire Pennines c. 1770-1900. **Social History**. Vol. 25. No. 1.

- Haviland, William A.
1988 **Antropologi Jilid 2.** diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.
- Hawkes, Jacquetta.,
1965 **Prehistory. History of Mankind, Cultural and Scientific Development.** New York: A Mentor Book.
- Keesing, Roger M.
1989 **Antropologi Budaya. Suatu Perspektif Kontemporer.** Diterjemahkan oleh Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga.
- Modelska,
1997 Early World Cities. Extending the census to the fourth millennium. **Paper.** Konvensi ISA. World Sytem Data Historical Group. Toronto. Dapat diakses di <http://www.etext.org/Politics/World.Systems/papers/modelski/geocit.htm>.
- Samhadi, Sri Hartati.
2006 Dilema Sektor Informal. **Kompas.** 16 April.
- Sukadana, A. Adi.,
1983 **Antropo-ekologi.** Surabaya: Airlangga University Press.
- Todaro, Michael P., dan Jerry Stilkind.
1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.
- Weber, Max.
1977 Apakah yang disebut Kota? Diterjemahkan oleh Darsiti Soeratman dan Amin Soendoro. Dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). **Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Wiradi, Gunawan.
1983 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 3

Kemiskinan dan Pengukurannya

Kemiskinan sejati tidak berarti tidak memiliki apa-apa, melainkan keterlepasan dari keterikatan akan benda-benda di dunia dan dalam melepaskan kekuasaan atas benda-benda secara sukarela. Itulah sebabnya ada orang-orang miskin yang sungguh-sungguh kaya. Demikian pula sebaliknya.

Escriva (1987: 150)

Kemiskinan:

Antara Ada dan Tidak, Nampak dan Tidak Nampak

Di dalam satu film yang dibintangi oleh Jean Claude van Damme, *Hard Target*, diceritakan di New Orleans terdapat sindikat yang memiliki usaha perburuan manusia. Sindikat itu terdiri dari seorang pemimpin, seorang kepercayaan, dan beberapa orang sebagai anjing-anjing pemburu yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Pakaian mereka hitam dengan kaca mata hitam pula. Mereka mengumpulkan uang dari orang-orang kaya yang ingin berburu. Satu orang kaya membayar \$ 750.000. Bila berhasil membunuh buruannya, uangnya akan kembali dan ditambah lagi dengan bonusnya.

Untuk memperoleh orang-orang yang diburu, mereka menggunakan jasa makelar. Makelar ini memiliki usaha menyebarkan pamflet. Makelar tersebut memperkerjakan orang-orang gelandangan yang beberapa di antaranya adalah bekas veteran Perang Vietnam. Dicarilah dari mereka, orang veteran yang memiliki bintang dengan kemampuan tempur semasa perang dan paling penting lagi, tidak memiliki sanak keluarga. Orang tersebut

ditawari sebagai orang buruan dengan bayaran \$ 10.000 bila berhasil lepas dengan menyeberangi sungai dalam waktu 1 (satu) jam. Orang-orang gelandangan yang miskin tersebut diiming-imingi bahwa betapa enaknyanya memperoleh sebesar itu. *“Kamu tidak perlu menggelandang, mencari makan di tong sampah, atau dari gereja ke gereja. Kamu bisa hidup enak, meninggalkan kehidupan jalanan yang keras dan bisa mati kedinginan di tengah malam. Hanya dengan satu jam saja. Dan, kamu bisa!*

Kenyataannya, tidak seorang pun berhasil. Bagaimana tidak, satu orang diburu oleh puluhan orang dengan senjata yang lengkap. Satu orang buruan yang berlari, sementara itu dikejar oleh anjing-anjing bersepeda motor dan mobil. Ketika terbunuh, mayatnya tinggal dibuang atau dibakar dalam gubuknya. Polisi tidak bisa mengetahui jejak pembunuhan tersebut karena dokter yang mengotopsi telah dibayar untuk memalsukan hasil *visum et repertum*, sehingga menunjukkan kematian yang wajar dan kasusnya ditutup.

Suatu ketika datang seorang wanita yang kehilangan ayahnya, Nona Binder. Di luar kebiasaan, ayah tidak menulis surat lagi padanya. Oleh karena itu, ia mencari dengan dibantu Chance (Jean Claude van Damme). Dari data visum dokter, ia mati terbakar dalam gubuknya, tetapi tidak demikian menurut Chance karena salah satu kalung identitasnya ditemukan berlubang ditembus anak panah. Bersama dengan polisi wanita yang akhirnya terbunuh, Nona Binder dan Chance membongkar sindikat perburuan manusia. Karena takut terbongkar, sindikat pun berbalik memburu Chance. Namun, pada akhirnya terjadi sebaliknya, Chance dengan kekuatan dan kecerdikannya mampu membunuh satu per satu pemburunya. Selain Nona Binder, ia dibantu Paman Duvee, seorang pembuat minuman keras ilegal. Kelebihannya, Chance lebih tahu medannya, yaitu rawa-rawa dan Gudang Mardi Grass. Akhirnya, seluruh sindikat mati terbunuh berikut orang-orang kaya yang ikut berburu.

Apa yang terpikirkan dari film tersebut, seandainya sindikat tersebut ada, maka tidak salah mengapa di dunia ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang miskin. Binatang buruan harus lebih banyak dibandingkan pemburunya. Di dalam bentuk lain, pernah pula terdapat penjualan organ-organ tubuh dari orang-orang miskin dan orang-orang terpidana, terdapat pula *child trafficking* (penjualan anak-anak) baik untuk pekerja di bawah umur maupun menjadi kesenangan seks. Mereka diambil, diculik atau apa pun dari keluarga-keluarga miskin.

Paling mudah mengingat mereka adalah dengan melihat angka-angka di Biro Statistik. Itulah yang dilakukan oleh sebagian besar pemerintah di dunia ini, mulai dari angka kesakitan, kematian anak di bawah umur, kematian ibu melahirkan, angka kematian karena kurang gizi hingga apa lagi. Karena terlalu bosan mengisi lembar demi lembar instrumen survai, sering kemudian angka tersebut tidak pernah berubah, cukup mengambil dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, orang miskin tidak bertambah, tidak juga berkurang, meski jumlah penduduk selalu bertambah berlipat-lipat.

Menjadi terhenyak ketika kematian mereka berada tepat di depan kita, setidaknya-tidaknya oleh media massa disajikan di depan piring makan kita. Di Indonesia, menjelang akhir pemerintahan Suharto, tahun 1997, di televisi disiarkan langsung acara pembukaan SEA-Games yang menghabiskan ratusan juta rupiah, sementara itu di Irian Jaya, sekarang Papua, yaitu di Pegunungan Jaya Wijaya, terdapat puluhan orang mati karena kelaparan. Begitu pula, ketika pesta demokrasi yang menghabiskan puluhan milyar rupiah pada paska pemerintahan Suharto dengan menghasilkan anggota Dewan yang kerdil dan egoistis¹, kita disuguhkan sekian

¹ Di dalam beberapa kasus di pusat dan daerah, telah ditunjukkan pada kita tentang tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, serta kegiatan studi

banyak anak-anak busung lapar, dan bahkan di antaranya meninggal dunia. Bila kurban tsunami di Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) tidak mencapai di atas seratus ribu jiwa, mungkin baunya tidak sampai di hidung kita, kemudian kita akan menutup mata dan telinga atas penderitaan mereka. Hal ini bisa dilihat pada penanganan gempa sebelumnya di Indonesia Timur.

Sebenarnya, apa yang dialami oleh kita, rakyat Indonesia, tidak berbeda jauh dengan di negara-negara maju. Pada akhir tahun 1990-an misalnya, seorang veteran Perang Vietnam dengan berbagai bintang kehormatan ditemukan mati kedinginan di taman, depan Gedung Putih, Washington. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan penghormatan yang berlebihan pada tentara yang pulang dari Perang Badai Gurun.

Artinya, ada dan tidak adanya pengakuan keberadaan mereka sebenarnya bersifat kontekstual. Lebih kontekstual lagi dari sisi pandangan pengambil kebijakan publik dan birokrasi pemerintahan. Bila menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, maka jumlah mereka selalu dieliminasi sedemikian rupa mendekati titik nol. Namun, menjadi berbeda tatkala jumlah mereka kemudian dikompensasi dengan jumlah proyek, anggaran atau dana, maka jumlah mereka menjadi berlipat. Pada kasus Inpres Desa Tertinggal (IDT), tatkala dilakukan pendataan terhadap jumlah orang miskin dan desa tertinggal, awal kali para bupati menampik adanya desa tertinggal dengan keluarga miskin di dalamnya. Namun demikian, berbeda tatkala disebutkan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana untuk mengentaskan desa tertinggal tersebut. Demikian pula, dorongan yang besar untuk menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah keluarga pra-sejahtera berkaitan dengan pemberian beras subsidi bagi

banding, sementara itu kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat krisis moneter 1997-1998.

pemerintah paska Suharto, maka jatah beras bersubsidi dari tahun ke tahun terus berkurang sebagai bukti telah terjadi pengurangan keluarga miskin.

Mereka, orang-orang miskin, tidak berarti berdiam diri. Mereka memiliki strategi sendiri dalam mengatasi kemiskinannya. Namun demikian, strategi tersebut tidak selalu diterima, sebagian besar kebijakan tata ruang kota misalnya sangat tidak menguntungkan kelompok miskin. Hal ini mengingatkan kita pada cerita Abunawas tentang Orang Kaya dan Orang Miskin. Di dalam cerita tersebut, terdapat dua orang, sebut saja Alu si orang kaya, Ali si orang miskin. Kedua orang itu memiliki postur yang berbeda. Alu yang memiliki rumah besar dengan isinya yang berlimpah itu kurus badannya, sementara itu Ali yang hanya tinggal di dalam gubuk yang menempel di tembok pagar Alu memiliki postur gemuk. Tidak saja Ali, istri dan kedua anaknya pun berbadan gemuk.

Suatu ketika seseorang bertanya pada Ali, mengapa seluruh anggota keluarganya berbadan sehat dan gemuk. Apa yang dimakan, sehingga menghasilkan tubuh semacam itu. Ali pun menjawab, *"Mudah saja hanya nasi dan lauk ala kadarnya. Kami sekeluarga menikmati benar, bahkan dengan nasi pun kami bisa karena setiap hari asap dapur Alu memberikan aroma masakan yang lezat."* Jawaban Ali tersebut didengar oleh Alu. Oleh karenanya, Alu pun marah. *"Itu sebabnya badanku kurus, aroma masakanku sudah dimakan Ali sekeluarga. Aku tidak terima. Aku akan menghadap pada Pak Hakim. Menuntut ganti rugi."* Maka, pergi Alu ke hadapan Hakim dan menuntut ganti rugi 100 real uang emas pada Ali.

Hakim pun tidak bisa memutuskan dan meminta tolong pada Abunawas. Oleh Abunawas, Alu pun dipanggil. Hakim kemudian memutuskan bahwa tuntutan Alu dipenuhi dengan catatan tidak boleh dipegang. Hakim dari jauh menghitung dengan melempar uang tersebut satu per satu. Setelah selesai, Abunawas mengatakan bahwa Alu telah menerima ganti rugi

tersebut. Alu pun protes, maka Abunawas juga mengatakan bahwa Ali tidak mengambil apapun dari Alu, mengapa Alu merasa dirugikan.

Gubuk-gubuk mereka digusur dan dihancurkan, begitu pula dengan rombongan jual pun diangkut Satpol PP. Mereka yang melacur dan menggelandang pun dicap *pekat* (penyakit masyarakat) ditangkap dan diadili, meski dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlandar dipelihara oleh negara.*" Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya ditangkap.....

Mendefinisikan Kemiskinan

Kemiskinan sebenarnya tidak saja diamati, tetapi juga dirasakan. Membangun empati bersama dengan orang dan keluarga miskin mungkin lebih dari cukup, terutama bagi pengambil kebijakan publik. Oleh karenanya, Dillon dan Hermanto (1993: 18-19) mencermati bahwa ada 2 (dua) pandangan tentang kemiskinan. Di satu pihak, kemiskinan adalah suatu proses, di pihak lain kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19; kutip dari Pakpahan dan Hermanto, 1992). Dengan demikian, kemiskinan dapat pula dipandang sebagai salah satu akibat dari kegagalan dari kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini memunculkan kemiskinan relatif atau dikenal pula kemiskinan struktural.

Sementara itu, kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala dari suatu masyarakat melahirkan konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut oleh Bank Dunia pada tahun 1990 didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu individu memenuhi

kebutuhan dasarnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19), meski telah berkembang pada tahun-tahun belakangan ini.

Acuan bahwa orang miskin selalu diarahkan pada kegagalan dalam pemenuhan sumber daya dan dana ini kemudian mengarahkan definisi kemiskinan lebih pada dimensi ekonomi. Oleh karena itu, seperti yang dihimpun oleh Andre Bayo Ala (1981: 3-5), antara lain dari pendapat Sar A Levitan (1980), Schiller (dalam Stone, Whelen dan Murin, 1979), Emil Salim (1980), dan Ajit Ghose dan Keith Griffin (1980), lebih mengacu pada ketidakmampuan individu atau keluarga dalam kebutuhan hidupnya melalui pendapatan yang diperolehnya.

Hal itu berbeda dengan pendapat John Friedman dalam Ala (1981: 4) yang lebih mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial itu meliputi modal yang produktif atau aset, seperti tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan, sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, antara lain: partai politik, sindikat dan koperasi, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan dan barang-barang, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya.

Oleh karena itu, Andre Bayo Ala (1981: 5-8) menyimpulkan beberapa aspek kemiskinan. Pertama, kemiskinan menyangkut nilai-nilai (*values*), sesuatu yang dihargai tinggi oleh individu dan masyarakat. Kedua, kemiskinan itu multi-dimensional, memiliki berbagai aspek kondisi dalam orang dan keluarga miskin. Ketiga, aspek-aspek kemiskinan itu saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga membentuk lingkaran kemiskinan atau spiral kemiskinan (*the poverty spiral*) dalam istilah Lukas Hendratta. Keempat, di dalam kemiskinan terdapat aktor, yaitu orang-orang yang hanya sedikit atau tidak mampu mengakumulasi nilai-nilai utama, sehingga kebutuhannya

akan nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi secara layak. Aktor itu bisa secara individu, namun bisa secara kolektif, seperti keluarga atau komunitas lokal. Berkaitan dengan aktor, Niels Mulder (1986: 76) mendefinisikan sebagai mereka yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal, seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk bisa hidup dengan cukupan dan wajar. Mereka yang tidak sampai pada patokan itu dipandang sebagai orang miskin. Kelima, kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai utama secara layak, dan terakhir bahwa gap antara nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai tersebut, artinya besar-kecilnya gap tersebut menunjukkan parah tidaknya kemiskinan tersebut. Bila gap yang dicapai seseorang antara nilai-nilai yang harus dicapai dan pemenuhannya besar, maka semakin parah kemiskinan tersebut atau disebut kemiskinan absolut. Sementara itu, bila gap antara akumulasi nilai yang diperoleh dan pemenuhan kecil, maka orang tersebut berada dalam kemiskinan relatif.

Ravallion (1992: 4) secara lebih sederhana menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat dinyatakan oleh masyarakat ketika seseorang atau lebih tidak mencapai titik minimum dari kesejahteraan material yang layak menurut standard masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka muncul 3 (tiga) pertanyaan berkaitan dengan ukuran standar kelayakan kesejahteraan ini. Pertama, bagaimana cara kita menilai kesejahteraan atau hidup layak tersebut. Kedua, bila sudah diukur, bagaimana menentukan seseorang itu miskin atau sebaliknya berkecukupan. Terakhir, pertanyaan adalah bagaimana cara mengumpulkan indikator kesejahteraan individu ke dalam ukuran kemiskinan.

Ketiga pertanyaan tersebut memiliki implikasi lebih mendalam, khususnya berkaitan dengan ukuran kemiskinan (*poverty line*). Akibatnya, dari tahun ke tahun perdebatan ukuran kemiskinan selalu berlanjut, begitu pula dengan cara-cara pengukurannya.

Bagi pemerintah dan ahli studi pembangunan, akurasi ukuran dan caranya sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Jebakan pengukuran ini adalah bias ekonomi. Kemiskinan lebih disebabkan oleh kegagalan seseorang dan sekelompok orang (keluarga) dalam mencapai tingkat ekonomi tertentu.

Lebih tepat, bila mendefinisikan kemiskinan itu sebagai situasi di mana seseorang atau sekelompok orang (keluarga) berada dalam kondisi secara sosial, ekonomi dan budaya tidak menguntungkan. Mereka berada dalam hidup yang tidak layak dan tidak sejahtera (*welfare/well-being*).

Meskipun demikian, dalam buku panduan Bank Dunia tentang pengurangan kemiskinan, Jeni Klugman (2002: 2-3) menyebutkan bahwa kemiskinan bukan sekedar tingkat pendapatan yang rendah, tetapi lebih dari itu tingkat konsumsi dan pendapatan yang rendah ini berhubungan dengan distribusi modal manusia dan aset sosial dan fisik (*lack of opportunity*), seperti pemilikan tanah dan peluang pasar. Selain dari berkurang kesempatan, kemiskinan juga berarti kemampuan yang rendah (*low capabilities*), yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, dan tingkat keamanan yang rendah, yaitu rentan dan pendapatan yang mudah terganggu, serta terakhir, ketidakberdayaan (*empowerment*), kemampuan keluarga miskin dalam berpartisipasi, negosiasi dengan perubahan dan berhubungan institusi yang dapat berpengaruh pada kelayakan hidupnya.

Apa yang disebut oleh Jeni Klugman (2002) ini adalah dimensi atau indikator kemiskinan. Dimensi tersebut ternyata juga tidak berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh orang miskin. Dari penelitian Smeru (Mawardi, 2004: 1-5), menurut orang miskin, kemiskinannya disebabkan oleh ketidakberdayaan, keterkucilan, kekurangan materi, kelemahan fisik, kerentanan, dan sikap atau perilaku. Ketidakberdayaan itu meliputi faktor yang di luar kendali masyarakat miskin, antara lain: lapangan kerja, tingkat biaya/harga (baik barang konsumsi, sarana produksi, maupun harga jual

produksi), kebijakan pemerintah, sistem adat, lilitan hutang, keamanan, dan takdir/kodrat. Munculnya aspek takdir mungkin mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang mereka alami sudah sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya memunculkan sikap apatis. Bagi mereka, sepertinya sudah tidak ada peluang lagi untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan menganggap hanya mukjizat Tuhan yang mampu mengubah keadaan. Kekurangan Materi adalah kepemilikan atau tidak memiliki berbagai macam aset, seperti rumah, tanah, modal kerja, warisan, serta rendahnya penghasilan karena upah atau hasil panen rendah). Faktor berikutnya adalah keterkucilan yang berkaitan dengan hambatan fisik dan nonfisik dalam mengakses kesempatan meningkatkan kesejahteraan, antara lain mencakup aspek lokasi yang terpencil, buruknya prasarana transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tidak ada atau kurangnya akses terhadap kredit, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan air bersih. Faktor lain, kerentanan, dianggap penyebab dari kemiskinan karena mencerminkan ketidakstabilan atau guncangan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan. Di dalamnya mencakup aspek pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerjaan tidak tetap, masalah dalam produksi, bencana alam, dan musibah keluarga. Terakhir, sikap dan perilaku juga dianggap sebagai penyebab kemiskinan, yaitu kebiasaan buruk atau sikap yang cenderung menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan atau menghambat kemajuan, Sikap dan perilaku itu antara lain meliputi kurangnya upaya untuk bekerja, tidak bisa mengatur uang atau boros, masalah ketidakharmonisan keluarga, serta kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan.

Dimensi atau oleh orang miskin dianggap sebagai faktor penyebab ini sebenarnya telah menjadi perhatian dari Nasikun (1993: 4) dan Chambers (1980) dengan *integrated poverty*. Di dalam analisis sosiologis, kemiskinan dibedakan sebagai kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (*budaya kemiskinan*). Kemiskin-

an struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi obyektif yang berpengaruh pada kesejahteraan keluarga miskin, mulai dari kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak hingga ketidakmampuan dalam bernegosiasi untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang berpihak pada orang miskin sebagaimana disebutkan oleh Sritua Arief dan Adi Sasono (1984: 109), dan Chambers (1980). Sementara itu, kemiskinan juga dipandang sebagai cara hidup atau kebudayaan dari keluarga miskin yang disosialisasikan. Pola-pola sosialisasi yang berlandaskan pada kebudayaannya ini merupakan mekanisme adaptif atau *survival* berkaitan dengan kondisi-kondisi keluarga miskin yang marginal (Lewis, 1981: 15-30; Lewis, 1988; Gailbraith, 1983).

Menimbang Kemiskinan, Menentukan Kesejahteraan

Apapun definisi kemiskinan, bila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang di dalam masyarakat dianggap tidak beruntung, maka sebenarnya telah dapat menggolongkan mereka ke dalam kelompok miskin. Bagi kita, bagaimana membangun empati bersama, turut merasakan dan kemudian berbagi, sehingga mereka tidak lagi berkekurangan, tersisih dan terabaikan. Mungkin, hal ini mengingatkan kita pada tahun 1990-an pada waktu bencana kelaparan di Ethiopia, seorang koki restoran di Roma, Italia, dengan sederhana mengolah makanan sisa pelanggan, dan kemudian mengirimkan ke tempat beca. Atau, Ibu Teresa mengawali dengan merawat orang-orang tua terlantar dan sakit-sakitan di pinggir jalan kota India. Apa yang dikatakannya, *"Biarlah mereka merasakan kebahagiaan, meski hanya menjelang ajal menjemput!"*

Tidak usah terlalu jauh mencari orang-orang yang tidak sejahtera, bila pula ada di sekitar kita, mungkin bawahan kita dan seterusnya. Di dalam dunia yang kapitalistik, demi memperoleh keuntungan yang besar, sering kita menciptakan pekerjaan yang

tidak dibayar seimbang, sehingga menghasilkan kelompok miskin “baru.” Suatu misal, salah satu pasar swalayan terbesar di Surabaya, dengan alasan tertentu karyawan tidak boleh menikmati makanan siap saji yang dijualnya, meski pada waktu menjelang tutup. Manajer lebih memilih membuang ke tempat sampah, padahal masih layak dimakan. Untuk makan, karyawan menerima nasi kotak dengan harga yang tidak layak. Akibatnya, menjelang akhir tahun 2004 sejumlah karyawan masuk rumah sakit karena keracunan. Hal ini berbeda dengan kebijakan rumah makan rawon “Nguling” di Probolinggo, selain pegawainya juga menikmati, setiap malam puluhan nasi rawon dibungkus untuk keluarga miskin dan janda di lingkungan sekitarnya. Kata kuncinya hanya satu: *empati*. Meskipun empati sebagai kata kunci dalam mencermati kemiskinan, bagi pengambil kebijakan publik persoalan kemiskinan tidak saja pada definisi dan empati, tetapi pada dimensi dan ukurannya. Dimensi dan ukuran menjadi penting karena program pengurangan tingkat kemiskinan (*poverty reducing*) berkaitan dengan pendanaan.

Di Indonesia selama ini perkiraan-perkiraan tentang kemiskinan umumnya didasarkan atas pendekatan pendapatan kebutuhan dasar (*basic needs income* atau *BNI Approach*), dimana garis kemiskinan ditentukan dengan memperkirakan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi suatu paket kebutuhan dasar inti konsumsi perorangan (makanan, sandang, perumahan). Batas ambang garis kemiskinan setara nilai konsumsi pangan minimum, yaitu 2.100 kalori ditambah 6,12 % hingga 17,96 % nilai konsumsi non pangan. Jika perkiraan nilai konsumsi perkapita rata-rata penduduk Indonesia sebesar dua kali dari nilai konsumsi pangan pada akhir PJP II, maka batas ambang garis kemiskinan sepanjang 25 tahun mendatang dapat ditetapkan sebesar dua kali lipat dari nilai konsumsi pangan minimum (kira-kira setara dua kali Rp 15.000,00 menurut tingkat harga tahun 1990) (Nasikun, 1993: 1-2). Kelemahan dari pendekatan ini adalah tingkat minimum dasar

pendapatan tidak akan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Kelemahan lainnya, secara operasional, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dimana pendapatan tidak cukup. Pendapatan ditafsirkan sebagai kemampuan suatu rumah tangga atau perorangan untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa.

Untuk itu, Nasikun (1993: 2-3) mengajukan dua alternatif tolok ukur kemiskinan lain. *Pertama*, menawarkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan sebagai suatu fenomena multifaset atau multidimensional. *Kedua*, mengusulkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan pada tingkatnya yang relatif. Mendasarkan diri pada pemikiran Chambers yang melihat kemiskinan sebagai suatu *integrated concept*, Nasikun merumuskan konseptualisasi kemiskinan multidimensional yang terdiri atas lima dimensi: (1) kemiskinan “proper”; (2) kelemahan fisik; (3) kerentanan terhadap atau menghadapi berbagai bentuk situasi darurat; (4) ketidakberdayaan (*powerlessness*); dan (5) isolasi. Kemiskinan “proper” kurang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan aset yang kurang dan/atau akses yang rendah terhadap aliran lalu lintas uang dan barang, terutama pangan. Kelemahan fisik diartikan sebagai berat dan pertumbuhan badan yang tidak normal dan sensitif terhadap variasi musim atau konjungtur ekonomi. Kerentanan terhadap berbagai bentuk situasi darurat diartikan sebagai penjualan barang atau tenaga kerja, hubungan utang piutang atau gadai, dan tindakan lain yang terpaksa dilakukan untuk mengatasi berbagai situasi darurat. Ketidakberdayaan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau kelompok dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang menyangkut nasib dan peruntungannya sendiri dan hubungan-hubungan sosial dengan orang, keluarga atau kelompok lain. Isolasi diartikan sebagai posisi relatif seseorang, keluarga, atau kelompok dalam ruang spasial dan sosial yang dilembagakan oleh masyarakat tempat ia menjadi bagiannya.

Dimensi kemiskinan proper dapat diukur antara lain melalui butir-butir pertanyaan pengeluaran rata-rata sebulan dan rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan. Dari dimensi kelemahan fisik, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan tingkat morbiditas dalam kurun waktu sebulan sebelumnya: (1) apakah sebulan yang lalu ada keluhan kesehatan, karena panas, batuk, pilek, muntaber, sakit gigi, kejang-kejang, kecelakaan, dan lainnya; (2) kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari; (3) apakah sekarang masih sakit; (4) jenis pelayanan yang memberikan perawatan. Dari dimensi ketidakberdayaan, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) status penguasaan bangunan tempat tinggal; (2) status penguasaan tanah; (3) kondisi rumah atau bangunan tempat tinggal; (4) luas bangunan dan pekarangan; (5) jenis fondasi bangunan terluas; (6) jenis kerangka atap yang terbanyak. Dilihat dari dimensi isolasi antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) jarak terdekat dari dan ke tempat fasilitas-fasilitas kendaraan umum, kesehatan, pasar, atau kelompok perkotaan, bioskop, taman hiburan/ rekreasi, SD, SLTP, SLTA; (2) lama bersekolah (dalam jumlah tahun); (3) mendengarkan radio seminggu yang lalu, nonton TV seminggu yang lalu dan membaca koran/majalah seminggu yang lalu (Nasikun, 1993: 3).

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo.
 1981 Definisi Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
- Arief, Sritua., dan Adi Sasono.
 1984 **Ketergantungan dan Keterbelakangan**. Jakarta: Sinar Harapan.

- Dillon, HS., dan Hermanto
 1993 Kemiskinan di Negara Berkembang. Masalah Konseptual dan Global. **Prisma**. Tahun XII No. 3
- Galbraith, John Kenneth.
 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa**. Diterjemahkan oleh Tom Anwar. Jakarta: Sinar Harapan.
- Klugman, Jeni.
 2002a Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross Cutting Issues**. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Lewis, Oscar.
 1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
 1988 **Kisah Lima Keluarga. Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan**. Diterjemahkan oleh Rochmulyati Hamzah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulder, Niels.
 1986 **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasikun,
 Nasikun.
 1988 “Desa dalam Perspektif Pembangunan,” makalah disampaikan sebagai bahan ceramah pada Kursus Singkat Teori dan Konsep Studi Pedesaan yang diselenggarakan oleh Divisi Studi Pedesaan, PAU-Studi Sosial, UGM Yogyakarta, tanggal 12 – 31 Agustus.
 1993 “Redefinisi Kriteria Batas Ambang Kemiskinan Berwawasan Martabat Manusia,” **makalah** disampaikan pada Seminar Bulanan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), UGM, tanggal 7 Juni.
- Ravallion, Martin.
 1992 **Poverty Comparison. A Guide to Concepts and Methods**. LSMS Working Paper No. 88. Washington: World Bank.

Bagian 2

Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota

Bab 4

Surabaya: Geliat Calon Kota Metropolitan

Rek, ayo rek, mlaku-mlaku ning Tunjungan Rek, rek
ayo rek... Mlaku-mlaku ngumbah mata...

(lagu rakyat Surabaya)

Kota Lama dengan Wajah Kolonial

Sepuluh tahun yang lalu, sekitar tahun 1991, ketika salah seorang anggota tim peneliti (FX Sri Sadewo) mengunjungi ibukota Jakarta kedua kalinya. Jakarta adalah kota yang sangat berbeda dibandingkan pada tahun 1970-an, terdapat jalan utama yang membentang dengan lebar kurang lebih 100 meter panjangnya. Daerah-daerah periferinya sudah terhubung satu sama lain, seperti Kota Depok, Kab. Tangerang dan Bekasi. Keadaan ini terus berubah hingga tahun-tahun terakhir ini. Apa yang dibayangkan oleh peneliti tersebut, Jakarta seperti gurita raksasa dengan tentakel-tentakel yang menjulur ke Timur, Barat dan Selatan.

Ketika kemudian kembali ke kota Surabaya, peneliti kemudian bertanya apa yang salah dari catatan mata pelajaran Geografi dengan menyebut Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Mungkin lebih tepat sebagai kota terbesar ke lima atau ketujuh di Indonesia. Kota terbesar pertama adalah Jakarta, kedua Jakarta dan seterusnya hingga kelima adalah Surabaya.

Meskipun demikian, Surabaya telah berusaha tumbuh sebagai kota terbesar kedua. Dari sisi usia, kota ini sebenarnya

jauh lebih tua dari Jakarta. Kota ini tercatat dalam sejarah pada tanggal 31 Mei 1293 M sebagai hari lahirnya, sedangkan Jakarta pada berdiri pada abad ke-16. Sebagaimana lazimnya pertumbuhan kota-kota pesisir, Surabaya awalnya adalah sebuah desa nelayan, kemudian berkembang sebagai pelabuhan dalam rangkaian jalur sutera (*silk road*). Namun demikian, seperti halnya Jakarta, kota ini tidak pernah sekalipun menjadi pusat kerajaan-kerajaan besar pada masa lampau. Nampaknya, raja-raja Jawa lebih memilih mendirikan ibukota pusat pemerintahan di wilayah pedalaman, daripada pesisir. Salah satu di antaranya, kecuali Sriwijaya, kerajaan-kerajaan tersebut dibangun melalui basis pertanian sebagai struktur ekonominya. Kota-kota tersebut lebih sebagai syahbandar yang harus menyeter pajak ke ibukota yang berada di pedalaman.



Gambar 4.1.
Totem Surabaya Modern,
Penghubung dengan Roh dari Masa Lalu

Kota Surabaya, menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (2004) yang disampaikan di Sarasehan “*Surabaya dan Tantangan Masa Depan*,”² bahwa kota Surabaya, sebagai kota pesisir lainnya, lebih tepat dibangun oleh pemerintah kolonial (Belanda). Memang benar, sesudah kerajaan Majapahit runtuh, kota ini sebagai kadipaten (kerajaan lokal) taklukan di bawah kerajaan Mataraman. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, kota ini diserahkan kepada VOC dan pemerintah kolonial. Surabaya sebagai Kota Eropa, yang semula hanya merupakan pos pangkalan bertembok tanggul tanah *temu gelang*, terletak di kawasan berawa-rawa di sebelah utara daerah pemukiman orang-orang Jawa, sepanjang abad 19 berhasil dibangun meluas menjadi suatu terminal tempat penumpukan hasil bumi untuk diekspor dan dijual ke Eropa.



Gambar 4.2.
Bambu Runcing: Simbol Perlawanan Kaum Urban

² Sarasehan ‘*Surabaya dan Tantangan Masa Depan*.’ Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Tabel 4.1
Perkembangan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk kota Surabaya
(Handinoto, 1996, Pemda KMS, 1978, BPS, 1997 dan 2002).

Abad/Tahun	Luas Wilayah (dalam ha)	Jumlah Penduduk
2005 (Perkiraan)	32.636	2.750.000
2000	32.636	2.444.976
1995	32.636	2.329.598
1990	32.600	2.100.000
1980	---	2.027.913
1971	---	1.953.248
1920	---	200.000
1905	4.275	150.188
Awal abad ke-18	---	50.000 s/d 60.000
1625 (Penaklukan oleh Mataram)	---	1.000

Perkembangan kota Surabaya menjadi pesat tatkala liberalisasi ekonomi. Ekonomi eksploitatif dengan investasi modal Eropa telah berhasil memanfaatkan kesuburan *binterland* Jawa Timur. Surabaya kemudian lebih menempatkan sebagai kota pemberi layanan jasa ekonomi daripada sebagai pusat pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsinya, Surabaya menjadi organisasi kerja yang membangun berbagai institusi ekonomi dan mekanisme kontrol untuk mengendalikan ekonomi agribisnis di daerah Jawa Timur. Institusi bisnis kapitalistik ditandai dengan bangunan yang berfungsi sebagai kantor-kantor dagang dan kantor-kantor layanan jasa hukum, serta jasa keuangan, kantor-kantor administrasi

pemerintahan, dan gudang-gudang. Jalan-jalan penghubung diperkeras, saluran-saluran penatusan dibangun, rel-rel berikut stasiun terminalnya diciptakan, dan ujung muara sungai Brantas pun diperdalam dan diluruskan untuk kemudian diberi nama baru yang mengingatkan sebuah sungai besar di Negeri Belanda Selatan, *Maas River*. Di kiri-kanan sungai, dibangun kade-kade tempat kapal dan perahu bertambat, sedangkan di kiri-kanan muara dibangun pelabuhan untuk tempat kapal-kapal besar merapat guna membongkar dan mengangkat muatan (Wignjosoebroto, 2004: 2).

Sarat Fungsi, Sarat Beban:

Kota Industri, Maritim, Perdagangan, Pendidikan dan Apalagi?

Dengan demikian, wilayah utaranya, atau dikenal sebagai kota lama, selain sebagai pusat pemerintahan *Oost Java Proviciën*, tumbuh sebagai pusat perdagangan. Suatu bentuk yang lazim, bahwa pertumbuhan dari perdagangan mengikuti keberadaan pusat pemerintahan. Kedekatan geografis akan mempengaruhi kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Pertumbuhan industri bergeser ke wilayah selatan, mengikuti alur sungai Kalimas, yaitu Ngagel-Wonokromo dan Kebraon-Karangpilang (Jalan Mastrip sekarang). Hal ini merupakan konsekuensi dari industri yang memerlukan air sebagai pendingin mesin-uapnya. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pemukimannya, mengikuti catatan dari Hans-Dieter Evers (1985), dari atas dasar etnik menjadi mata pencaharian. Kampung-kampung etnik luruh (meski tidak semuanya) menjadi perumahan dan kampung-kampung atas dasar mata pencaharian, seperti: Tjantian (tukang arloji), Kawatan (tukang cor tembaga), dan Bubutan (tukang bubut) (Handinoto, 1996: 72; kutip dari Faber, 1931: 185).



Gambar 4.3.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-1

Melalui mekanisme urbanisasi, kota ini kemudian tumbuh dengan relatif pesat. Kota ini meluas dari hampir sepuluh kali lipat dalam waktu seratus tahun, dari hanya semula 4.275 ha menjadi 32.636 ha. Kota semula berpusat di wilayah kota lama, yaitu Kebonrojo, Pasar Besar, kantor Walikota Surabaya sekarang hingga ke Waru (perbatasan Sidoarjo), Karangpilang dan Sepanjang, sementara itu terjadi pemindahan terminal bis dari Jembatan Merah ke Osowilangun (dekat perbatasan Kab. Gresik) pada pertengahan tahun 1990-an. Tabel 1 hanya mencatat jumlah penduduk tetap, perkiraan jumlah penduduk musiman bisa menjadi separuhnya. Dari perkiraan tersebut, Kota ini praktis dihuni hampir 4 juta jiwa untuk tahun 2005.



Gambar 4.4.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-2

Kota ini juga menjadi kota multi-etnik. Orang-orang Madura menggunakan kota Surabaya sebagai alur memasuki wilayah Jawa Timur bagian Selatan dan Barat. Sebagian bekerja sebagai buruh industri dan berdagang, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh perkebunan yang berada di wilayah Mojokerto, Jombang hingga karesidenan Madiun. Sementara itu, orang-orang Jawa Pesisiran dan Mataraman memasuki kantor-kantor pemerintahan menjadi *ambtenar*, pegawai *pangreh praja*, atau sebagai pegawai kantor-kantor dagang dan layanan hukum. Meski tidak begitu besar jumlahnya, kelompok-kelompok etnik lain dari kawasan Indonesia Timur memasuki kota Surabaya, mulai dari pedagang antar pulau hingga menjadi *ambtenar* dan tentara kolonial. Batas-batas kampung etnik pun menjadi meluruh tatkala aturan *wijken* dan *passesn stelsel* (sistem pas dan pemukiman)

dicabut pada tahun 1920-an, terutama bagi kelompok etnik *Timur Asing*.

Untuk memperkuat institusi-institusinya, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sistem pendidikan formal. Sekolah dasar pertama kali didirikan oleh CC Werner tahun 1818 untuk anak orang Belanda di Surabaya, muridnya hanya 35 orang. Sekolah tutup seiring dengan kematian CC Werner, baru tahun 1821 pemerintah kolonial mendirikan sekolah dasar negeri (*Government Europeesche Lagere School*). Untuk orang-orang pribumi, sekolah dasar swasta didirikan oleh *Maatschappij Tot Nut van Het Algemeen*, dengan nama *Javaansche School* tahun 1853, sedangkan sekolah negeri tahun 1860. Atas instruksi Residen Surabaya, tahun 1864 sekolah tersebut didirikan di beberapa distrik dengan nama *Districtschool*, meski tidak berlangsung lama karena biaya. Beberapa tahun kemudian, pemerintah mendirikan *Holandsche Indische School* (HIS) untuk anak-anak pribumi yang mampu dan Sekolah *Ongko Loro* untuk anak pribumi yang kurang mampu (Handinoto, 1996: 59-60).

Tanggal 2 Mei 1853 sebuah sekolah teknik swasta (*ambachtschool*) didirikan, dan pihak pemerintah baru mendirikan *government ambachtschool* pada tahun 1862. Sekolah setingkat sekolah menengah atas, yaitu HBS (*Hoogere Burger School*) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian diubah 5 tahun didirikan pada tahun 1875 di Jl. Baliwerti (bekas gedung FT Kimia ITS), kemudian dipindah di *Regenstraat* (sekarang Jl. Kebonrojo, Kantor Pos Besar Surabaya) pada tahun 1881 dan pada tahun 1923 di pindah ke *HBS Straat* (Jl. Wijayakusuma, sekarang SMA Negeri II, Surabaya). Sekolah kejuruan lain, seperti dokter hewan, berdiri dengan nama *School Ter Onleiding van de Veeartsenijkunst* tahun 1860-an

Perkembangan fasilitas pendidikan formal di Surabaya ini berlanjut hingga masa kemerdekaan. Sementara itu, masyarakat pribumi sebenarnya telah mengembangkan sistem pendidikan,

yaitu pesantren. Model pendidikan ini sebenarnya berakar dari sistem pendidikan *mandala* pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Para santri meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama kiyai dalam pondok pesantren. Mereka bekerja dan belajar, pagi hari melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh gurunya, sesudahnya belajar mengaji dan mendengar ajaran moral gurunya, yaitu Kiyai. Pada waktu mengaji, santri ini dibimbing oleh para seniornya, yaitu santri yang lebih dahulu masuk. Oleh karenanya, kata santren dalam pesantren tersebut berarti *nyantri*, menimba ilmu sambil bekerja di lingkungan gurunya. Dari catatan von Faber (1931), sebagaimana dikutip Handinoto (1996: 60), jumlah pesantren mencapai 162 buah, salah satu di antaranya pondok pesantren yang cukup dikenal adalah di Sidosermo-Wonokromo.

Tabel 4.2.
Perkembangan Perguruan Tinggi di Surabaya Tahun 2004
(BPS Jawa Timur, 2005)

Jenis	Surabaya	Jawa Timur
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	4	9
a. Mahasiswa	57.228	112.694
b. Dosen	3.507	6.455
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	70	249
a. Universitas	24	69
b. Institut	3	13
c. Sekolah Tinggi	29	119
d. Akademi	11	42
e. Politeknik	3	6

Perguruan tinggi negeri yang tertua di Surabaya adalah Universitas Airlangga yang berdiri dari perpaduan pendidikan

dokter dari masa kolonial Belanda dan Sekolah Tinggi Hukum, baru kemudian sesudahnya tahun 1960-an berdiri Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (dulu IKIP Surabaya yang merupakan perkembangan dari Fakultas Pendidikan Universitas Airlangga dan IKIP Malang), dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), sedangkan salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup tua di Surabaya, seperti Universitas Surabaya (*Ubhaya*), berdiri pada 1960-an. Universitas ini mulanya merupakan perkembangan dari Universitas Trisakti. Pada pertengahan tahun 1990-an, universitas ini mendirikan kampus baru di Trenggilis Mejoyo. Jumlah mahasiswa telah menyamai perguruan tinggi negeri, di atas 10 ribu mahasiswa. Ada sekitar 10 gedung dengan rata-rata 3-4 lantai.

Tidak saja Universitas Surabaya, Universitas Kristen Petra (Petra), Universitas Katolik Widyamandala (WM) dan Universitas 17 Agustus (Untag) juga memiliki jumlah yang kurang lebih sama, hampir 10 ribu mahasiswa. Untuk memenuhi fasilitas pendidikannya, Petra dan Untag misalnya mendirikan kampus bertingkat 8 (delapan). Selain beberapa universitas ini, di Surabaya juga sekitar 10 universitas memiliki mahasiswa antara 5 ribu dan 10 ribu, seperti UPN (Universitas Pembangunan Nasional Veteran), Unitomo (Universitas Dr. Soetomo), dan ITATS (Institut Teknologi Adhitama Surabaya). Sebelum 2 (dua) tahun yang lalu, jumlah mahasiswa Unitomo dan ITATS mencapai di atas 10 ribu. Konflik internal, yaitu antara yayasan dan rektorat, di kedua perguruan tinggi yang diberitakan ke media massa menjadi “promosi” yang buruk bagi penampilan perguruan tinggi (*performance*).

Pasca reformasi, dengan alih-alih sebagai langkah persiapan menuju BHMN (Badan Hukum Milik Negara), sejumlah perguruan tinggi negeri, kecuali IAIN, menyelenggarakan program ekstension (non-reguler). Ada berbagai istilah untuk program tersebut, antara lain: program khusus, pmdk nonreguler, dan

PMDK. Melalui program ini, perguruan tinggi menerima mahasiswa di luar SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang diselenggarakan di bawah pengawasan Dikti. Mahasiswa yang diterima dikenakan SPP dan uang IKOMA/SOM yang besar, bergantung pada fakultasnya. Uang SPP biasanya sebesar kurang lebih dua kali lipat dari kelas reguler. Asumsinya, mereka mahasiswa yang tidak diberi subsidi oleh negara (pemerintah). Oleh karenanya, mereka harus menanggung sendiri biaya operasional pendidikannya selama studi. Jumlah SPP ini sering jauh lebih besar daripada di perguruan tinggi swasta, bisa mencapai di atas dua juta, seperti pada program-program studi yang memerlukan laboratorium. Di Fakultas Farmasi Unair, seorang mahasiswa non-reguler harus membayar 4 juta rupiah/semester.

Dari tahun ke tahun, terutama paska tahun 1997-1998, yaitu krisis ekonomi, telah terjadi penurunan jumlah peminat sebagai mahasiswa baik di PTN maupun PTS di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya. Untuk peserta SPMB menurun dari tahun ke tahun sebanyak lebih dari 100.000 pendaftar. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang diterima pun juga berkurang. Ada beberapa penyebab penurunan peminat ini, antara lain: jumlah lulusan SMA juga berkurang akibat keberhasilan KB pada tahun 1970-1980-an. Alasan berikutnya, lulusan SMA kini jauh lebih realistis, "*Buat apa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, kalau nantinya hanya menjadi pengangguran.*"³ Mereka memilih untuk mengambil kursus keterampilan atau langsung mencari pekerjaan.

Lebih lanjut, tidak semua lulusan SMA sederajat melanjutkan perguruan tinggi, sebagai mahasiswa program gelar sarjana atau ahli madya (D3). Memang, tidak ada catatan resmi dari Pemkot tentang rasio jumlah lulusan yang melanjutkan dan keseluruhan. Namun, diperkirakan untuk kota Surabaya hanya

³ Hasil wawancara dengan lulusan SMA yang tidak mendaftar SPMB dan melanjutkan ke perguruan tinggi, DA, tanggal 12 September 2005.

separoh saja lulusan mahasiswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah memilih untuk bekerja atau melanjutkan kursus kerja satu tahun hingga dua tahun. Oleh karenanya, jumlah kursus di Surabaya cukup banyak, hampir separuh dari jumlah perguruan tinggi. Kursus atau program keahlian yang ada di Surabaya adalah program keahlian perhotelan/pariwisata, program keahlian komputer, dan program keahlian teknik. Sementara itu, perguruan tinggi juga menyelenggarakan pula, seperti ITS dengan PIKTI, Unair dengan berbagai program keahlian, dan UNESA dengan P2KB, P3B dan P3KT.

Kondisi Obyektif Masyarakat Miskin Kota

Sementara itu, di “pinggiran” lingkaran kota terdapat orang yang tidak bisa menikmati fasilitas yang ditawarkan kota. Pendidikan tinggi adalah “barang mewah” yang menjadi impian dan harus ber-*jibaku* untuk masuk dan menyentuh tembok-tembok kampus. Bagi mereka, hidup “sehat” dan dapat mencari makan adalah anugerah. Mereka adalah kelompok masyarakat rentan kota, atau dalam istilah Sosiologi (Kemiskinan) lebih dikenal sebagai masyarakat marjinal (*marginal community*) ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai dalam kehidupan perkotaan.

Di Surabaya, ada dua kelompok, yaitu: penduduk asli atau dikenal dengan orang *kampung* yang tidak memiliki akses karena kondisi obyektifnya, seperti: tingkat pendidikan dan modal. Kelompok kedua adalah kaum urban yang memiliki akses terbatas di Surabaya, kemudian sering ditemui memilih tinggal bersama di lingkungan *kampung* tersebut karena dengan alasan mendekati tempat kerja.

Bila oleh BPS dan BKKBN, mereka, kedua kelompok itu, digolongkan sebagai kelompok miskin kota. Jumlahnya di

Surabaya, menurut tafsiran BPS dan BKKBN, kurang lebih 327.572 jiwa, atau seperdelapan dari jumlah penduduk Surabaya (BPS Surabaya, 2003). Jumlah ini menjadi besar tatkala harus memasukkan keluarga urban yang sering tidak aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Data Suryahadi, et.al (2003: 78) menunjukkan bahwa dengan jumlah rumah tangga di Surabaya sebanyak 707.167 jiwa, maka setidaknya-dikatakan miskin bila setidaknya pendapatan sebesar 202.512,56 sebulan dengan *standard error* 6.701,98.

Bila faktor penyebabnya adalah pekerjaan, maka jumlah orang miskin yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran) berdasarkan sensus tahun 2000 di Surabaya 82.691 orang atau 7,23% dari angkatan kerja. Hanya bila mengandalkan data pekerjaan, maka besarnya angka pengangguran ini belum cukup. Data statistik kependudukan tidak pernah menghimpun seberapa banyak orang yang bekerja pada pelapisan terendah dari suatu usaha, perkantoran, seperti buruh, karyawan swasta atau pegawai negeri golongan rendah (I dan II), atau kelompok sektor informal yang memiliki modal terbatas (kecil), atau hanya mengandalkan tenaga saja. Data terakhir dari BPS, berkaitan pemberian dana kompensasi BBM, jumlah keluarga miskin di Surabaya diperkirakan 106.000 keluarga (**Kompas**, 29 September 2005, “106.000 KKB untuk Warga Surabaya”).

BPS sebenarnya telah memberikan kriteria ukuran kelompok miskin yang merupakan kelompok rentan ini. Pertama, dari pola konsumsi energi di bawah 2100 kkal per kapita sehari. Kedua, menggunakan indikator kesehatan, mulai dari persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, persentase penduduk tanpa akses pada pelayanan kesehatan dasar dan angka kematian bayi. Ketiga, indikator pendidikan dasar, yaitu: persentase penduduk usia 7-15 tahun tidak sekolah dan persentase penduduk dewasa yang buta huruf. Keempat, indikator ketenagakerjaan, yaitu: persentase penduduk penganggur terbuka, setengah

penganggur dan pekerja sektor informal. Kelima, indikator perumahan, yaitu persentase rumah tangga tanpa akses pada listrik, rumah tangga dengan lantai tanah, dan persentase rumah dengan luas tanah kurang dari 10 m². Terakhir, indikator air dan sanitasi, yaitu: persentase penduduk tanpa akses air bersih dan persentase penduduk tanpa jamban sendiri (BPS, 2004: 1; bandingkan juga dengan Klugman, 2002: 2-24; Coundouel, Hetschel dan Wodon, 2002: 29-46). Di lapangan, ukuran-ukuran demikian sulit dilakukan, antara lain: tidak ada lagi rumah berlantai tanah – hasil dari program lantanisasi pada tahun 1990-an), demikian pula rumah tanpa listrik karena program listrik masuk desa/kampung.



Gambar 4.5.

The Lost Generation, Buah dari Pembangunan?

Dari tempat tinggal, kelompok masyarakat rentan kota ini biasanya tinggal di pemukiman yang kumuh (*kampung*). Catatan Siswono Judohusodo (1991: 2), jumlah orang Surabaya yang tinggal di kampung sekitar 25% dari jumlah penduduk. Jumlah kampung tersebut lebih dari 100 (seratus) jumlahnya, mulai dari wilayah Surabaya Utara sebagai kota lama. Di kota lama, kampung-kampung itu sering bercirikan sebagai kampung etnis, seperti kampung Arab dan *Pecinan*, seperti daerah Ampel untuk kampung Arab dan Kembang Jepun dan Karet sekitarnya untuk *Pecinan*. Orang-orang Madura tinggal mulai dari Perak (Pelabuhan) hingga Semampir, bahkan ada beberapa kampung, seperti Wonosari Lor, sebagian besar penghuninya beretnis Madura. Asal mereka, orang-orang Madura di Surabaya, adalah daerah Bangkalan dan Sampang. Suatu pola yang lazim mengikuti arah transportasi terdekat (Jonge, 1989; Kuntowijoyo, 1988). Wilayah perkampungan orang-orang yang memanjang di sepanjang pinggir Surabaya Utara ini hingga memasuki wilayah Surabaya Selatan (sekitar Pasar Wonokromo dan Keputran) ini seperti setengah lingkaran. Sementara itu, dari arah pelabuhan, orang Madura mendiami wilayah Pasar Loak Dupak hingga ke Benowo (wilayah Surabaya Barat).

Kampung orang Surabaya asli berada di sekitar tengah kota, seperti mulai dari Kepatihan dan Oro-oro Ombo (dulu tempat pusat pemerintahan Kadipaten Surabaya dan berlanjut hingga masa kolonial Belanda), wilayah Kebalen, Surabayan, Wonorejo hingga Kupang dan Kembang Kuning terus ke arah Selatan, yaitu Ketintang dan Pakis. Kampung-kampung ini berada di sepanjang jalan utama dan di antara gedung. Wilayah yang strategis ini, yaitu sebagai kawasan pusat pemerintahan dan perdagangan, sebenarnya tidak saja dihuni oleh orang-orang Surabaya asli, tetapi juga oleh orang-orang urban. Di daerah Kaliasin misalnya, sebagian pemilik menyewakan kamar (kost) dengan harga dari 200 ribu hingga 500 ribu rupiah, tergantung keadaan

kamarnya. Orang-orang urban (terutama berstatus *single*) memilih kost di tempat tersebut. “*Selain dekat tempat kerja, enak untuk malam minggu. Mau jalan-jalan ke Tunjungan tidak jauh.*”⁴

Tabel 4.3.
Jumlah Orang dan Keluarga Miskin (Rentan) di Surabaya, berikut fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
(BPS, 2003)

No.	Rincian	Jumlah
1.	Kecamatan	28
2.	Penduduk	2.532.417
3.	Keluarga	707.167
4.	Orang Miskin (BPS)	327.572
5.	Keluarga Miskin	91.880
6.	Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskemas Pembantu	48
	b. Dokter	141
	c. Paramedik	824
7.	Pendidikan	
	a. Sekolah (SD dan SMP)	2.743
	b. Guru	31.193
	c. Kelas	16.522
	d. Murid	553.250

Kampung-kampung tersebut, baik tempat tinggal orang Surabayan, Madura, Arab dan Cina ini setiap tahunnya selalu

⁴ Hasil wawancara dengan A yang bekerja di Tunjungan Plaza Sabtu, 4 Juni 2005, pk. 19.00 WIB.

menjadi daerah epidemi demam berdarah (DB), selain ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) dan diare/muntaber. Rumah-rumah kampung tersebut sangat rapat satu sama lain menyulitkan melakukan kontrol terhadap genangan air (bersih). Saluran air (got) pun sering *mampet*, buntu. Sementara itu, keberadaannya di tengah kota dengan arus kendaraan yang padat, angka pencemaran udara menjadi sangat tinggi – hal ini bisa dilihat dari papan penanda tingkat pencemaran di Surabaya, mulai dari Jalan A. Yani, Kertajaya hingga Bubutan. Angka pencemaran rendah pada pagi hari ketika jalan masih sepi. Kecuali Jalan *Ondomoben*, Diponegoro dan Darmo, pohon-pohon yang membantu mengurangi pencemaran udara sangat sedikit tumbuh di pinggir jalan.⁵ Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada korelasi positif antara kondisi perkampungan yang kumuh di Surabaya dan angka penyakit.

Untuk mengatasi kondisi perkampungan, khususnya sanitasi, pemerintah telah melakukan perbaikan perkampungan, dengan memperbaiki saluran air hingga jalan. Program tersebut dikenal dengan program KIP (*Kampoeng Improvement Programme*). Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara perbaikan kampung dan penurunan angka kesakitan.

Data lain yang menarik untuk Surabaya adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan. Setiap kecamatan memiliki lebih dari satu fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibangun oleh pemerintah, belum lagi dengan klinik praktek dokter bersama dan rumah sakit swasta. Jumlah dokternya adalah 141 orang. Namun demikian, data ini berasal dari *Surabaya dalam Angka* yang mendasari pada data di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dikelola

⁵ Kebijakan tata ruang kota Surabaya untuk 2010 direncanakan akan menyediakan 20% ruang terbuka hijau.

pemerintah, sehingga rasio dokter dalam 100.000 penduduk adalah 7 (jauh dari 40, sesuai Indikator Indonesia Sehat 2010, Depkes, 2003). Bila dianalisis dengan membandingkan jumlah orang miskin dan keluarga miskin, maka ada korelasi positif. Artinya, fasilitas tersebut didirikan sesuai dengan jumlah orang/keluarga miskin. Demikian pula fasilitas kesehatan, sekolah, guru dan kelas dalam analisis ternyata berkorelasi dengan jumlah orang miskin. Persoalannya terletak pada kemampuan akses dari kelompok miskin tersebut.

Bab 5

Buruh Bangunan

Sektor Informal tidak hanya sebagai “*Safety Valve*” bagi Orang Miskin “Baru” di Surabaya tahun 1990-an

FX Sri Sadewo

Pembangunan “Bias Kota” Menuai Migran

Kota-kota besar di negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, mengalami proses pertumbuhan yang lain dibandingkan dengan negara industri. Kota-kota tersebut pada mulanya memiliki fungsi pemerintahan dan ekonomi pada jaman kolonial. Industrialisasi yang tumbuh di kota itu mulanya hanya sebatas melengkapi fungsi ekonomis, melayani kepentingan kolonial, seperti: pelabuhan ekspor.

Sesudah Perang Dunia ke-2, kota-kota tersebut menjadi ibukota pemerintahan negara baru. Proses konsolidasi dari negara-negara baru mengakibatkan kota tadi berkembang dengan cepat. Proses perkembangan ini dikenal sebagai *urbanisasi tanpa industrialisasi*. Jika di negara industri, proses urbanisasi didorong oleh usaha efisiensi dari bidang pertanian pedesaan, misalnya melalui mekanisasi yang menghacurkan petani gurem kemudian ditarik ke sektor industri di kota besar, maka hal itu tidak terjadi di negara-negara sedang berkembang (Magenda, 1983: 7-9).

Karena mengambil model pembangunan dari negara industri, negara baru kemudian melakukan industrialisasi. Industri mulanya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pasar, melayani

kelompok elite perkotaan, seperti birokrat pemerintahan, kaum usahawan, dan karyawan. Akibatnya, industri cenderung memusat di kota besar yang menentukan urat nadi mereka. Lebih dari itu, industri-industri baru ini tidak meningkatkan produk industri kecil pribumi, tetapi lebih sering menggantikan. Pengabaian terhadap industri kecil dari pertanian pada gilirannya mengakibatkan sejumlah rakyat berpindah dari desa ke kota. Kota-kota besar di dunia ketiga bertambah penduduknya hingga delapan kali dari ukuran semula, bila dibandingkan antara 1920-an dan sekarang. Separuh dari pertumbuhan ini berasal dari penambahan alamiah penduduk kota, dan sisanya dari perpindahan penduduk (Owens dan Shaw, 1983: 40-42). Demikian pula dengan kota-kota Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta.

Pertumbuhan kota yang “*urban bias*” itu ternyata tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Menjadi semakin berat, ketika harus diikuti perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan. Penggunaan teknologi pertanian yang berakibat pada polarisasi pemilikan tanah dan marjinalisasi petani kecil dan buruh tani, serta pada gilirannya perembesan industri kecil dan besar ke wilayah pedesaan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi ke arah non-pertanian di pedesaan. Atau, untuk menyelamatkan keluarganya, mereka memilih bekerja di kota. Dalam catatan Steele (1984: 379), ada kecenderungan kaum migran kemudian memilih sektor yang tidak memerlukan keterampilan, seperti buruh bangunan, kuli angkut, atau tukang becak. Mereka yang memilih pekerjaan sebagai buruh bangunan mempunyai alasan, yaitu upah yang ditawarkan relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, selain mudah dimasuki (Effendi, 1985: 51-52).

Hal yang serupa terjadi di Surabaya. Dengan mengambil 75 responden dan 7 informan, penelitian ini mencermati secara mendalam mulai dari proses perpindahan dari desa, hingga bekerja sebagai buruh bangunan. Bila mengikuti pendapat Irwan

Abdullah (1984) bahwa proses migrasi merupakan proses perubahan pola pikir, dan begitu pula dengan ancaman antropologi kognitif, setiap kemampuan diperoleh sebagai anggota masyarakat yang “unik,” maka perubahan untuk menjadi buruh bangunan di Surabaya merupakan perjuangan tidak saja secara fisik, tetapi juga kesiapan untuk berubah.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung tahun 1988-1989.⁶ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang diterapkan adalah *life history* dan analisis etnografi, sementara itu pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penggunaan tabulasi frekuensi dan silang.

Responden diambil secara availability, yaitu tidak saja *accindetal*, tetapi juga memperhitungkan kesediaan untuk diwawancara. Hal itu dilakukan karena pertama, buruh bangunan bersifat sporadis dan terus bergerak (mobil), sehingga tidak bisa diketahui besaran jumlah dan alamat yang tepat. Mereka lebih sering tinggal sementara di bangunan yang dikerjakan. Kedua, buruh bangunan yang berasal dari desa sering lebih tertutup pada orang di luar lingkungan kerjanya. Mereka lebih terikat dan bersosialisasi dengan teman-teman sekerja. Teman-teman sekerjanya tidak jarang berasal dari satu daerah asal.

Profil Buruh Bangunan dan Keluarganya

Ali Effendi, Mandor Borongan yang Sukses, tapi Malang.

Ia adalah seorang mandor yang agak pendiam, tidak banyak cakap. Tampangnya bersih dengan kumis tipis, meski kulitnya agak hitam. Perawakannya kurus. Setiap orang akan

⁶ Studi kasus ini diolah dari hasil penelitian skripsi FX Sri Sadewo di Program Studi Antropologi, FISIP-Unair, tahun 1989.

menyangka dia berpendidikan sekolah menengah kejuruan, padahal tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar, hanya kelas empat. Seorang majikannya pernah heran dan mengira ia lulusan STM ketika melihat hasil gambarnya. Orang itu, setelah tahu latar belakangnya, mendesaknya untuk melanjutkan sekolah. Dia mau membiaya. Hal itu terjadi pada tahun 1980-an.

Pada waktu penelitian, Ali Effendi berumur 28 tahun, tapi wajahnya lebih tua daripada usia sebenarnya. Dia lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Kabupaten Gresik. Dia mengakui, sejak kecil dia nakal. Dia menyesalkan masa lalunya, terlebih ketika ia tidak menamatkan sekolah.

“...Dari segi biaya, keluarga kami berkecukupan. Ada paman dari kota yang mau membantu saya. Adik saya sendiri sudah tamat STM. Tapi, saya tidak tamat. Saya sebenarnya cukup pintar, gampang mudeng (memahami, pen). Sekarang saya sudah tua. Itu sebabnya saya menolak tawaran untuk sekolah lagi. Pengalaman itu lebih penting. Buktinya, adik saya yang STM itu masih menganggur....”

Pada usia 15 tahun, Ali Effendi minggat dari rumah, dari desanya. Pertama kali di Surabaya, ia bekerja sebagai kernet truk perusahaan. Setahun kemudian, ia bekerja sebagai tukang las di galangan. Tidak lebih dari satu, ia kemudian menjadi kuli pada seorang mandor. Ia dibimbing langsung oleh seorang tukang batu dan mandor. Selama 2 tahun lebih ikut mandor itu, ia diangkat sebagai tukang dengan bayaran yang hanya untuk makan dan minum. *“Yang penting menjadi tukang, tidak kuli lagi.”* Selama menjadi tukang batu itu, ia juga belajar menjadi tukang kayu, tukang besi dan membaca gambar.

Ketika mandornya berpisah dengan pelaksana, maka Ali Effendi pun juga berpisah dengan mandornya. Di tempat kerja

yang baru, dengan pelaksana Elizabeth, ia melamar sebagai mandor borong. Ia diterima karena bisa membaca gambar.

Sejak itu, ia tidak hanya mengerjakan satu rumah saja. Pernah, ia mendapat proyek membangun rumah di kompleks BTN, tapi bersamaan juga di Manyar.

“..Kalau membangun rumah di BTN atau Perumnas, untungnya sedikit, bahkan untuk mengurangi biaya harus kerja sebagai tukang. Untungnya, saya juga mengerjakan di Manyar. Jadi, transpor dan kebutuhan keluarga dari Manyar, sedangkan hasil dari Perumnas cukup bayar tukang dan kulinya. Untungnya mepet sekali daripada rumah luks...”

Baginya, yang penting bagi mandor borong adalah bisa menyelesaikan. Pantangan bila meninggalkan pekerjaan. Ia akan dicap tidak bertanggung jawab. *“Jangan harap bisa dipercaya orang, kalau melarikan diri. Sekali tidak dipercaya, tidak ada lagi pekerjaan.”*

Dalam mencari tukang dan kuli, Ali Effendi berani membayar lebih mahal bila mereka rajin dan hasil pekerjaannya baik.

“Jam tujuh pagi, tukang dan kuli saya sudah bekerja. Dan, nglaut nanti pukul empat hingga lima sore. Tergantung selesainya pekerjaan. Untuk menggerakkan orang, saya menunjuk salah satu tukang sebagai kepala tukang, setengah mandor. Upahnya lebih besar.”

Ali Effendi juta tidak bersusah payah membentak atau marah bila ada pekerjaan yang kurang beres. Menurutny, itu hanya menghabiskan tenaga dan waktu, sekaligus mengurangi kewibawaan. *“Cukup panggil kepala tungkang atau tukang yang ngerjakan, ditanya apakah benar-benar berniat bekerja atau tidak. Habis perkara.”*

Menurut pengakuannya, pada saat ini banyak saingan, dan persaingannya tidak sehat. Menurunkan harga borongan itu sudah wajar. Belum lagi, ada pesaing yang *ngatok* (cari muka) dengan

cara menjelekjelekkan atau menghambat hubungannya dengan pelaksana, agar diberi pekerjaan terus. Kemampuan mereka sering di bawahnya. Hal itu terjadi karena dalam pekerjaan bangunan borongan hubungan antara mandor dan pelaksana sangat penting. Mandor harus mengikuti selera pelaksana. Kalau tidak sesuai, pelaksana tidak mau membayar. *“Kalau sudah begini, saya stress, iya larinya minum-minum, pasang nomer dan main perempuan.”*

Pelarian ini menjadi kebiasaanyang sudah dihilangkan, apalagi seorang mandor dapat menghasilkan uang Rp. 100.000,00 bersih, bahkan sampai Rp. 250.000,00.⁷ Dengan uang sebanyak itu, ia kemudian berfoya-foya ke tempat pelacuran. Ia sendiri sudah kawin 7 kali, keempat istrinya bekas pelacur. Pada waktu penelitian, ia sedang berurusan dengan germo yang pelacurnya minta kawin, padahal ia masih berstatus beristri. Istrinya tinggal di Sepanjang, di tanah dan rumah yang dibangunnya. Lebih parah lagi, kebiasaan membeli nomer “togel.” Akibatnya, *“baru-baru ini saya menjual motor saya untuk tombakan dan urusan dengan pelacur itu.”*

Mat Aji, Tukang Kayu yang unik.

“Bu, kulo wangsul sak meniko. Biasane dbubur, sak sampune nampi bayaran, kulo wangsul. Sakniki, mandore mbayare jam gangsal sonten,” kata Mat Aji pada salah seorang pelanggan di mana ia menjadi tukang kebun sesudah jam kerja. (“Bu, saya pulang sekarang ke desa sekarang, biasanya saya sudah pulang jam 12 siang, sesudah menerima upah. Sekarang, mandor baru membayar

⁷ Pada tahun 1990-an, harga beras Rp. 450,00, harga emas Rp. 10.000,00 dan harga Premium Rp. 500,00. Gaji PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp.100.000,00. Sekarang, tahun 2006 harga beras rata-rata Rp 4.000,00, harga emas Rp. 120.000,00 dan harga Premium Rp. 4.500,00, sedangkan gaji PNS golongan IIIa sudah mencapai Rp. 1.000.000,00.

jam 5 sore”). Di proyek bangunan, hingga sekarang hari Sabtu merupakan hari kerja separuh hari, selesai jam 12 siang. Pada jam itu mandor membayar upah untuk setiap tukang dan kuli bergantung dari beberapa hari mereka bekerja.

Mat Aji berjanji akan kembali dua hari kemudian. Hal itu biasa dilakukannya. Setiap hari Sabtu, sesudah mengambil upah, ia ke Terminal. Dia pulang ke desanya, Desa Sukomangu, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto. Pada waktu pulang, ia bisa membawa uang antara Rp. 10.000,00 hingga Rp. 25.000,00. Uang sebesar itu sudah dipotong ongkos transport Rp. 1.000,00 (karcis bis Surabaya-Mojokerto Rp. 550,00, ojek Rp. 150,00 dan selebihnya ongkos naik colt), dan uang makan selama seminggu Rp. 1.800,00 (beras 2,5 kg @ Rp. 450,00, lauk Rp. 450,00 dan *mbako* Rp. 200,00), sedangkan sayur diambil dari pekarangan temannya di Pakis. Sayur itu ditanam sendiri. “*Aku nandur dhewe. Tapi, nggake ana sing wani maneni. Koncoku mungkin sungkan. Ora melu nandur kok maneni. Tapi, sakjane gak opo-opo wong yo dhuk pekarangane. Ping pindone, waktu mbangun omabe itu, aku iya ngewangi. Gratis.*”

Mbako (tembakau, pen.) tidak selalu dibeli. Mat Aji sering diberi dari teman-temannya yang minta tolong untuk membuat *jimat*, meski ia sendiri tidak memintanya. *Jimat* itu untuk *pengasih*an (welas asih), agar orang yang memakainya mudah mendapat pekerjaan. Dia membuat dari *sabuk* (ikat pinggang), kertas, bolppoint hitam dan minyak wangi yang masih baru. Kemudian, Mat Aji *melekan* (tidak tidur) sambil *wiridan* (membaca dan menulis mantra) sampai jam 2 atau 3 pagi. Mantra ditulis dalam bahasa Arab *Gandul* dengan bolppoint dan minyak wangi pada kertas yang dimasukkan ke dalam ikat pinggang.

Tentang oleh-oleh untuk di rumah, Mat Aji membelinya di terminal seharga antara Rp. 2.000,00 hingga Rp. 5.000,00. Oleh-oleh itu dibedakan, untuk ibunya yang tinggal di desa lain, dan untuk istri dan keempat anaknya. Untuk ibunya, dia membelikan lebih istimewa, lebih mahal daripada untuk istri dan

keempat anaknya. Sesampai di rumah, oleh-oleh itu diletakkan di meja, tetapi anak-anaknya tidak berani membuka sebelum Mat Aji membagikannya, sedangkan untuk ibunya dikirim oleh anak sulungnya yang sudah dewasa.

Perhatian pada ibunya begitu kuat karena Mat Aji adalah anak tertua dari lima bersaudara, dan kini hanya ibunya yang masih hidup di desa Tegan, desa tetangganya. Ayahnya dulu seorang petani yang memiliki sawah cukup luas. Sejak kecil, Mat Aji membantu ke sawah. Selain itu, ia lebih suka berburu ular, *nyambek* (biawak), dan *celeng* (babi hutan). Dagingnya ia jual atas permintaan orang kota. Sementara itu, dalam sisi pendidikan Ia hanya tamat SR (Sekolah Rakyat, setingkat dengan SD sekarang). Sewaktu di SR, ia berguru dengan seorang kiyai di pondok. Dari kiyai itu, ia mengenal ilmu *klenik*, perdukunan.

Setelah beberapa tahun menikah, ayahnya membelikan dan membangun rumah di atas seribu meter persegi. Rumah itu didiami hingga sekarang, meski sudah beberapa kali mengalami rehab. Rumah itu sekarang separuh berdinding bata, separuh sisanya gedeng, berlantai tanah yang dikeraskan dan memakai penerangan listrik. Rumah itu secara bertahap kini dibangun dengan lantai ubin/keramik dan tembok. Pembangunan ini tidak terlepas dari kegiatan arisan dengan 12 tetangga. Di dalam ariasan itu, setiap triwulan setiap anggota mengumpulkan uang untuk membeli bahan, dan saling membantu membangun rumah ukuran 8x12 m dengan leter L 3 meter secara bergiliran.

Rumah Mat Aji bertetangga dengan keempat adiknya dan seorang kakak ipar (kakak dari isterinya). Keempat adik dan kakak ipar itu bekerja sebagai tukang, selain berkebun dan bertani membantu ibunya. Ada pula yang menjadi tukang batu, tukang besi dan tukang kayu.

Selain menjadi tukang kayu di kota, Mat Aji sendiri bekerja di kebun dengan menanam duren, nangka, moris (*sirzak*), dan poh gadung (mangga). Selain untuk dimakan sendiri, hasil

kebut di-*tebas* (dijual). Setiap pohon laku terjual seharga Rp. 25.000,00 atau lebih, tergantung jenisnya. Dia jua pernah berjualan *apokat*, dari kebun sendiri dan tetangganya. Kini, kebun itu menjadi tanggung jawab anak *barep*-nya (anak sulung) yang dulu pernah diajak bekerja di Delta Plaza pada waktu liburan.

Mat Aji belajar pertukangan, khususnya tukang kayu dari saudara dan tetangganya. Sebagian besar orang-orang di desa itu bekerja sebagai tukang daripada petani sebab sawahnya yang sempit tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mat Aji serius menekuni pertukangan ketika merehab rumahnya. Waktu itu, dia mengukur dari rumah lama ke bahan mentah, kayu, dengan menggunakan *debog* (batang pisang) dan *pring* (bambu). Untuk membuat lubang, ia meletakkan *dlumang* (kertas) yang dibasahi dengan minyak rambut (*kelentik*) di kayu lama untuk ukuran besarnya. Ketika sedang bekerja di siang hari, ada seorang tamu, tetangganya, datang ke rumah dan kemudian mengajarnya cara yang benar.

Berbeda dengan orang-orang sekitar rumahnya, Mat Aji mencari pekerjaan di tempat yang lebih jauh. Informasi pekerjaan diperoleh di pasar. Dia mengaku sudah pernah menjadi tukang di ujung lain dari kabupaten Mojokerto, sebelum ke Surabaya. "*Kalau mengharapkan pekerjaan di sekitar rumah atau di desa tetangga, bakalan tidak makan dan anak-anak tidak sekolah.*"

Mat Aji pertama kali ke Surabaya diajak oleh kakak iparnya sekitar tahun 1983-1984. Di rumah yang dikerjakan pertama kali itu ia sekarang bekerja sebagai tukang kebun. Dari tempat itu, dia ikut mandor mengerjakan di Darmo Grande, kemudian di Perak. Di Perak, ia terpaksa kost dan berkenalan dengan temannya yang sekarang ini tinggal di Pakis. Sesudah di Perak, ia mengerjakan di Jobang. Dengan mandor yang sama pula, ia bekerja di Malang. Dari Malang, ia diajak mengerjakan rumah Perumnas di Bondowoso, tapi tidak bisa menolak dengan alasan tidak bisa pulang sekali seminggu.

Pada waktu penelitian ini, dia pergi ke Surabaya karena terpaksa. Anak-anaknya membutuhkan uang sebesar Rp. 57.000,00 untuk biaya ujian EBTA (sekarang UNAS, pen). Dia sebenarnya sudah menitipkan anak-anaknya kepada guru untuk memberi pekerjaan di sekolah agar bisa membiayai uang sekolah sendiri. *“Buru-buru anak Bapak, saya sendiri pusing memikirkan anak sendiri,”* dia menirukan ucapan seorang guru dari anak sulungnya.

Pada waktu penelitian ini dilakukan, dia bekerja berkat tawaran teman sebangku di bis antar kota ke jurusan Surabaya. Kalau tidak *nggandol* (menumpang gratis, pen.) truk sampai di Darmo Grande, ia biasa naik truk dengan bekal dari rumah Rp. 3.000,00 sampai Rp. 5.000,00. Kesepakatan untuk pergi ke Surabaya itu diambil setelah berunding dengan isterinya, sedangkan uang dari simpanan atau pinjam baik dari saudara maupun tetangga bila tidak punya. Setelah dipotong untuk transpor, uang itu digunakan untuk biaya makan selama mencari kerja (1-3 hari) dan selama belum mendapat upah dari mandor atau uang dari sesama buruh. Bila mandornya baik, dia dipinjami dengan potong upah. Bila tidak, dia terpaksa pinjam uang dengan tanggungan baju atau barang lain yang dibawa.

Selama 3 hari pertama tiba di Surabaya, dia biasanya langsung menuju ke kompleks perumahan untuk mendatangi setiap rumah yang dibangun sambil menanyakan bila ada pekerjaan. Dia biasanya menempuh 4 kilometer sehari, kemudian pindah lagi hingga mendapatkan pekerjaan. Selama mencari kerja dia tidur di rumah temannya (Pakis) atau dari mesjid ke mesjid. Bila tidak mendapatkan pekerjaan selama 3 hari, Mat Ali kembali ke desanya. *“Tapi, syukurlah selama ini saya bisa memperoleh pekerjaan kurang dari 3 hari,”* katanya, *“Dan, salah satu di antaranya karena ini.”* Dia tersenyum sambil menunjukkan ikat pinggangnya ketika ditanya apa rahasianya mendapat pekerjaan secepat itu.

Ran, Tukang Batu yang Kerja Keras.

Ran mulai menginjakkan kaki di Surabaya untuk bekerja sejak tahun 1982. Dia mengaku, waktu itu dia membutuhkan uang untuk mengerjakan sawah dan kebutuhan rumah tangganya. Sawahnya waktu itu mencukupi hasilnya. *“Saya beruntung sekali waktu itu. Di terminal Nganjuk saya berkenalan Cak Arief, tukang batu. Dia ajak saya jadi kulinya. Dia butuh untuk ngecor dan pasang bata,”* katanya dalam bahasa Jawa Ngoko.

Dia dilahirkan dan dibesarkan di desa Jarak, Nganjuk. Dia hidup bersama isteri keduanya, anak-anak dan adik laki-lakinya. Isteri pertamanya sudah meninggal. Isterinya yang sekarang adalah adik dari isteri yang terdahulu. Dari isteri pertamanya, dia mendapat empat anak, sedangkan isteri kedua dua anak. Anaknya yang sulung sudah duduk di kelas 2 SMP pada waktu penelitian ini.

Adik laki-laki yang ikut dia ini menggantikan ia bekerja di sawah. Pada tahun tersebut, sawahnya bertambah 0,5 ha, sebelumnya hanya 0,25 ha dan menjadi 0,75 ha dari hasil kerja menjadi *kuli* di Surabaya. Sawah itu berstatus hak milik, sementara itu ia juga membeli dengan cara *adol tabunan*.

Dia bekerja dan tinggal di tempat kerjanya. Setelah beberapa minggu bekerja, dia kembali mengajak teman dan saudara sepupunya, tiga orang jumlahnya, ke Surabaya, sama-sama menjadi *kuli*. Dan, pada waktu penelitian hanya dua yang bertahan sebagai *kuli*, salah satunya menjadi tukang batu, seperti dia. Seorang telah beralih sebagai pelayan toko. *“Yang jadi pelayan toko itu tidak tahan kerja di bangunan. Habis, di desa dia tidak pernah bekerja, hanya di rumah saja. Yang tetap jadi kuli itu salah, karena tidak mau belajar.”*

Setelah dari Cak Arief, dia masih tetap terus bekerja di tempat itu. Cak Arief kembali ke Jombang. *“Mungkin, dia sudah di-petrus. Sebab, hubungi baik surat maupun saya datang, dia tidak ada di*

rumah. Ngakunya, dia pernah jadi copet, tapi sebenarnya di baik sekali. Ngajari saya nukang batu. Cuma dia boros.”

Setelah dari tempat kerja yang petama, dia ikut temannya bekerja di Kayoon. Ran waktu itu masih menjadi *kuli*, meski sudah mempunyai keahlian dari tempat kerjanya yang terdahulu. Dia kemudian pindah lagi di Kramat Gantung, merenovasi toko. *“Saya pindah mandor. Kalau tidak begitu, saya tetap dianggap kuli. Padahal, kemampuan saya sudah seperti tukang.”*

Di Surabaya, Ran selalu berhemat. Dia memasak sendiri. Beras dibawa dari rumah, lauknya beli di warung. *“Kalau ngirit, bisa bawa uang ke rumah lebih banyak. Tapi, itu tergantung mandor dan pemiliknya. Ada yang tidak boleh masak, takut temboknya hitam kena asap. Rokok pun saya bawa dari rumah. Harganya murah dan bau mentol agarangat.”*

Dia *nglaut* (selesai bekerja) jam 4 sampai 5.30 sore, kemudian mandir dan merebus air buat kopi atau teh. Dia tidur sekitar jam 10 malam di tanah yang dilapisi *tripleks*. Pagi-pagi dia sudah bangun, memasak dan bersiap-siap bekerja lagi. *“Kalau tidur, saya tidak tentu. Kalau ada yang ngajak ngobrol atau nonton wayang atau ketoprak, iya bisa larut pagi.”*

Dia rata-rata pulang ke desa sebulan sekali. Selain membawa uang Rp. 30.000,00 bersih, artinya telah dipotong untuk biaya hidup di Surabaya, oleh-oleh makanan, pakaian dan mainan untuk anak-anak, isteri dan adik lelakinya. Ketika kembali dari desa, Ran sering membawa hasil panen, seperti kelapa, buah dan beras. Sebagian untuk dirinya, sebagian lagi untuk teman, mandor dan pemilik rumah tempat dia bekerja dahulu. Dia memberikan oleh-oleh dari desa itu dengan harapan dia akan diajak bekerja bila ada *garapan*. *“Saya belum merencakan untuk jadi mandor borongan, saya belum ada modal. Tapi, saya sekarang berani jadi tukang yang dibayar borongan.”*

Mas Pur, Tukang Besi produk Balai Latihan Kerja.

Tiap pagi, selain hari Minggu, Mas Pur berangkat dari tempat menumpanginya ke tempat kerja sejauh 7 km dengan naik sepeda. Ia tinggal menumpang di rumah familinya, Waru, Sidoarjo. Tempat kerjanya di Margorejo, Wonocolo, Surabaya. Ia sudah bekerja sebagai tukang besi selama 6,5 tahun.

Selain di Surabaya, dia mengaku pernah bekerja di kota-kota besar Pulau Sumatera, seperti di Aceh dan Medan. *“Terlalu jauh, saya sering tidak pulang rumah, di Cilacap. Untung saya bisa balik ke Jawa karena informasi dari famili kalau di Surabaya banyak kerjaan.”*

Ijazah SMA (Umum) yang dimilikinya, tetapi tidak pernah dipakai untuk melamar pekerjaan. *“Kalau hanya ijazah SMA, siapa yang mau menerima saya kerja. Saya pakai sertifikat BLK. Dari BLK, ia memperoleh keterampilan pertukangan, mulai dari tukang batu hingga tukang besi. “Kalau nglamar kerja, saya lihat dabulu apa yang mereka butuhkan. Kalau butuh tukang batu, saya juga bisa. Sekarang pekerjaan saya sebagai tukang batu.”* Meskipun demikian, ia lebih sering menerima tawaran sebagai tukang besi. Menurutnya, pekerjaan tukang besi itu jauh lebih mudah dibandingkan tukang-tukang lainnya. *“Kerjanya hanya membuat plat, begel untuk pondasi dan tulangan. Kalau hanya mengkhususkan sebagai tukang besi saja, rugi mas. Dipakai hanya di awal saja, sisanya pekerjaan tukang batu dan kayu. Jadi, akhirnya saya pilih pekerjaan tukang apa saja. Asal kerja.”*

Sebagai tukang batu, Mas Pur dibayar per hari Rp. 4.000,00, tapi sebagai tukang besi hanya antara Rp. 3.000,00 hingga Rp. 2.500,00. *“Kalau jadi tukang besi dan tukang batu, saya pilih borongan. Hasilnya lebih banyak. Tergantung rajin dan kecepakatan.”*

Pukul 3 sore ia sudah *nglaut*, dan bersiap-siap pulang dengan mengumpulkan peralatan dan mandi di tempat kerja. Sekitar pukul 4.30 sore dia sudah melaju pulang ke waru. *“Saya kadang-kadang pulang pergi naik bemo. Tapi, saya lebih suka naik sepeda.*

Lebih hemat. Uangnya bisa dipakai untuk jajan pada waktu istirahat siang.

Dia mengaku bahwa hampir setiap bulan mengirimkan sebagian upanya untuk orangtuanya yang menjadi petani dengan luas sawah 0,86 ha dan untuk saudaranya. Dia sendiri telah bercerai sewaktu bekerja di Sumatera. Sisa uang lainnya untuk makan di tempat kerja dan *nyumbang* ke famili yang rumahnya ditempati. Tidak selalu dalam bentuk uang karena saudaranya *sungkan* menerima.

“...Saya belikan saja kebutuhan dapur, seperti beras dan bayar listrik. Itu saja sudah hampir Rp. 30.000,00. Tidak seberapa, bila dibandingkan harus kost. Memang, lama kelamaan saya juga sungkan. Memang ada rencana untuk pindah dan kost. Tapi, kapan dan alasan apa. Masih saya pikir-pikir...”

Pak Mian, Keluarga Kuli Batu.

“Helo.... helo Purnomo, apa ning kono?” kata Mak Sri di depan *corong omplong* (kaleng bekas). (*“Helo.. helo Purnomo, apa ada di situ”*). Purnomo adalah anak bungsunya. Umurnya kurang dari lima tahun. Ia berdiri di ujung lain. Ia melekatkan corong yang dihubungkan benang itu ke telinganya. Ia tertawa mendengar suara ibunya. Mainan itu dibuatkan Pak Min, teman kerja ayah dan ibunya. Begitu pula dengan truk mainan yang terbuat dari kayu. Mereka tinggal di bangunan yang belum jadi. Di tempat itu, kedua orang tuanya bekerja.

Ningsih anak perempuan sulungnya sedang *ngladeni* sarapan pagi tukang dan kuli. Selain itu, ia mencatat berapa dan apa yang dimakan tukang dan kuli. Mereka biasanya *ngebon*, membayar setelah mendapat upah di akhir minggu. Biasanya dalam seminggu mereka menghabiskan Rp. 5.000,00 untuk makan, belum lagi untuk *ses* (rokok).

Masakan itu dibuat oleh Ningsih dan ibunya, Mak Sri, antara jam 5 sampai 6 pagi. Bahan-bahannyadibeli sore hari sebelumnya di toko dan pasar terdekat, kurang lebih 300 meter jauhnya atau *kulakan* pada hari Minggu. Pak Mian yang pergi *kulakan*. Sementara isteri dan anaknya memasak. Pak Mian membantu mencari dan merebus air. Air itu diambil dari ledeng rumah di seberang jalan. Dia tidak perlu membayar karena sudah dibayar oleh mandornya dengan cara mengganti tagihan air tiap bulan, biasanya sekitar Rp. 20.000,00. "*Mereka sebenarnya curang, Mas. Masak yang sering pakai mereka. Tapi, seluruh tagihannya yang bayar kami. Mestinya, untuk adilnya dibagi dua,*" kata Mandronya yang d-iya-kan oleh tukang dan kuli lainnya.

Pukul 7 pagi, Pak Mian dan Mak Sri sudah ganti dengan baju *telesan* (baju yang sudah luntur warnanya untuk kerja). Sementara itu, Ningsih terus melayani tukang dan kuli yang mau makan. Prunomo sendiri sudah berganti mainan dengan truk yang terbuat kayu. *Om* yang mengawasi bangunan, sebagai wakil dari pemilik bangunan (rumah), ikut menggoda Prunomo. *Om*, seorang Tionghoa separuh bayu ini adalah paman (kakak dari ayah) pemilik bangunan. "*Pur, sing gawe truk iki sapa?*" "*Lik Min,*" sahut Prunomo tanpa menoleh sedikitpun. "*Iki truk kudu momot gagal nggo digarap bapakmu,*" godo Cak Podo, teman ayahnya, sampil meletakkan batu pada *bak* truk mainan. ("*Truk ini harus berisi batu yang harus dikerjakan ayahmu*"). Akibatnya, truk tidak bisa ditarik lagi oleh Purnomo karena terasa berat. Teman-temah ayahnya tertawa melihat tingkah Purnomo menarik truk. "*Ah, kowe ngawur Cak Podo,*" kata Pak Min sambil membantu Purnomo menarik truk.

Kurang lebih pukul 8 pagi, mereka semua bekerja. Pak Min, sesudah mengisi air ke dalam tong, *ngladeni* tukang batu dan keramik membuat *luluh* (campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1:3). Sementara itu, Pak Mian dan Mak Sri *ngayak* pasir dan mengangkat *luluh* ke tukang batu dan keramik.

Sementara itu, Ningsih tetap menjaga warung dan melayani pembeli, sambil *ngemong* Purnomo. Warung itu sebenarnya *direksiget* (gudang). *"Saya sebenarnya ingin sekolah. Tapi, tidak ada biaya. Jadi, kelas tiga SD saya sudah berhenti. Kata bapak, kalau ada biaya, tahun depan saya sekolah lagi,"* kata Ningsih. Ningsih berkulit hitam manis, seperti ibunya, dan berambut hitam panjang sebatas pinggang. Hal ini berbeda dengan ayahnya, Pak Mian. Ciri-ciri Pak Mian bertubuh sedang, 50 tahun umurnya, berambut keriting (*"Susah diatur. Tidak perlu potong,"* katanya) dan biji mata sebelah kiri berbintih putih (mungkin akibat kekurangan vitamin A). Lebih lanjut, selain melayani pembeli, dia memasak air untuk minum ketika menjelang jam 12 siang. Waktu istirahat siang, atau istilahnya *nglaut*.

Pada waktu *nglaut*, Mak Sri dan Ningsih kembali melayani mereka yang bekerja di bangunan itu, termasuk mandornya. Setelah *nglaut*, sekitar pukul 1 siang mereka kembali bekerja. Mereka baru selesai bekerja sekitar jam 4 sampai 4.30 sore. *"Beginilah cara kami mencari makan. Datang ke Surabaya, hanya jadi kuli dan buka warung,"* kata Pak Mian. Meskipun demikian, sejumlah teman sekerjanya menyayangkan tekad mereka. *"Sayang, dia tidak bisa mencapai jenjang lebih tinggi. Tidak bisa jadi tukang. Ketuweken (terlalu tua, pen). Tidak bisa belajar. Apalagi membawa keluarganya di Surabaya,"* kata Pak Min.

Menurut pengakuannya, Pak Mian berasal dari Desa Tanggul Angin, Kab. Bojonegoro. Pak Mian tidak mempunyai sawah atau ladang. Sawah milik ayahnya yang 0,5 ha luasnya sekarang dimiliki dan dikerjakan oleh kakak sulungnya. Dia dan isterinya di desa hanya bekerja sebagai buruh tani yang dibayar Rp. 1.000,00 per hati pada waktu musim tanam atau musim panen. *"Saya dan sekeluarga berniat pulang desa akhir Maret nanti. Kami dengar akan ada panen bawang dari teman dan kerabat keteta pulang bulan yang lalu."*

Pertama kali datang ke Surabaya, Pak Mian diajak temannya sudah tiga lamanya sebelum penelitian ini. Ia ditawarkan menjadi kuli. Waktu itu, ia menjadi kuli di Rungkut. Sudah 2-3 bulan pada waktu penelitian berlangsung, isteri dan kedua anaknya di ajak. Baru beberapa minggu setelah bekerja di Surabaya, isterinya mengajak untuk buka warung, berjualan nasi. Modalnya diperoleh dari hasil tabungan.

Ia bekerja di Rungkut kurang lebih dua tahun lamanya. Setelah selesai bangunan yang satu, ia berpindah ke bangunan lain. Kurang lebih satu tahun terakhir, mereka diajak mandor ke tempat yang sekarang di kawasan Chris Utama, Pakis Gurung. Di tempat tinggal yang sekaligus tempat kerjanya, dia bersama isteri dan anak-anaknya menempati satu ruangan yang belum jadi. Dia tidur di atas *tripleks* dan menggunakan *sendir* buatan sendiri untuk penerangan bila malam hari. Untuk menghangatkan dan memasak, mereka menggunakan kayu bakar.

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga sebagai Faktor Pendorong Migrasi

Everett S. Lee (1985: 8-9) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi, yakni: faktor dorong-tarik, penghalang antara dan faktor pribadi. Faktor dorong-tarik, oleh pendekatan sistem, digambarkan sebagai akibat *over*-populasi dan lingkungan yang memburuk di kawasan desa serta daya tarik kota.

Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan sangat sulit, pada kasus ini semua responden telah melakukan migrasi desa-kota. Mereka berasal dari daerah asal yang berbeda satu sama lain. Cara lain yang digunakan adalah menanyakan alasan pergi bekerja di Surabaya.

Tabel 5.1.
Alasan Pergi Bekerja di Surabaya (N=75)

No.	Rincian	Utama		Kedua	
		f	%	f	%
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	38	50,67	8	10,67
2.	Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarga	17	22,67	9	12,00
3.	Mengisi Waktu Luang (Pra-Panen dan Tanam)	0	0,00	20	26,67
4.	Diajak Kawan	10	13,33	5	6,67
5.	Lain-lain	5	6,67	0	0,00
6.	Tidak Menjawab	2	2,67	33	44,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 6.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak adanya pekerjaan di desa sebagai alasan utama yang dominan. Atau, singkatnya tidak adanya pekerjaan sebagai faktor pendorong. Hal itu bisa dipahami karena revolusi hijau dan biru telah mengakibatkan efisiensi dan komersialisasi di sektor pertanian. Revolusi hijau mengakibatkan penyeragaman musim tanam (dan sekaligus musim panen), sehingga petani kecil dan buruh tani hanya bekerja pada lahan pertanian tertentu saja dalam satu kali musim tanam-panen. Jumlah buruh tani yang digunakan pun semakin terbatas akibat penggunaan teknologi pertanian. Untuk membajak, hanya menggunakan satu traktor sudah bisa mengolah tanah dalam jumlah yang besar. Sementara itu, ketika musim panen tenaga yang diperlukan juga sedikit karena menggunakan sabit. Penurunan penggunaan tenaga di sektor pertanian ini tidak diikuti pengembangan sektor non-pertanian yang lebih luas, terlebih lagi dalam bentuk industri kecil rumah tangga (Adiwikarta, 1984: 71-77; Sayogyo, 1978: 3-14; Manning, 1988: 3-39). Akibatnya,

mereka memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Penjelasan yang ini juga dapat digunakan untuk memahami alasan utama kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga (pendapatan tambahan).

Tabel 5.2
Luas Pemilikan Tanah sebelum Bekerja dan Alasan-alasan Bermigrasi
(N=75)

No.	Alasan	Utama			Kedua		
		Sempit	Sedang	Luas	Sempit	Sedang	Luas
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	27 50,00%	6 75,00%	5 38,46%	8 14,81%	0 0,00%	0 0,00%
2.	Mencukupi Kebutuhan Keluarga	12 22,22%	2 25,00%	3 23,08%	2 3,70%	0 0,00%	7 53,85%
3.	Isi Waktu Luang	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	17 31,48%	0 0,00%	3 23,08%
4.	Diajak Kawan	7 12,96%	0 0,00%	3 23,08%	5 9,26%	0 0,00%	0 0,00%
5.	Lain-lain	8 14,81%	0 0,00%	2 15,38%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
6.	Tidak Menjawab	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	22 40,74%	8 100,00%	3 23,08%

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 26

Oleh karena itu, pada alasan kedua yang dominan adalah mengisi waktu luang pra panen dan tanam. Mereka, buruh bangunan yang terjaring, mengisi waktu luang dengan bekerja di Surabaya. Mereka mengaku sebenarnya ingin juga bekerja di daerah asal, tetapi ternyata tidak ada pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Akhirnya, mereka memilih menjadi buruh bangunan di Surabaya.

Bila dikaitkan dengan SES dan tanah yang dimiliki sebelum melakukan migrasi, maka tidak ada pekerjaan menjadi satu penjelasan kolektif (*collective reasoning*) masyarakat desa mengapa mereka meninggalkan desanya dan menuju kota. Namun, bila digali lebih dalam lagi, di samping pekerjaan yang tidak ada, bagi informan yang memiliki SES tinggi (dan tanah) yang luas, pekerjaan merupakan “keberadaan” dirinya. Mereka tidak puas hanya bekerja ikut atau bersama orang tua. “*Yen kerja ning sawah melu wong tuwo iku podho wae ngganggu. Kulo pingin duwe penghasilan dhewe. Sawah ben diurus sing ning desa.*” (Kalau ikut orang tua bekerja di sawah itu sama dengan menganggur. Saya ingin punya pendapatan sendiri. Sawah biar diurus oleh orang yang masih tinggal di desa). Jawaban ini rata-rata diberikan oleh buruh bangunan yang ber-SES tinggi dengan tanah di atas 0,5 ha, bahkan ada salah seorang responden yang memiliki sawah 5 ha lebih suka menyuruh tetangganya mengerjakan daripada dirinya.

Menjadi Penglaju, Migran Permanen dan Sirkuler untuk Menyiasati Faktor Penghalang

Meski masih belum ada kesepakatan konsep *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen, Hugo misalnya, mengusulkan ukuran-ukuran yang cocok dari keterlibatan seseorang yang pindah, yaitu: (1) apakah keluarganya ikut pindah atau tidak; (2) apakah tanah, rumah atau harta benda lainnya di desa tetap menjadi miliknya atau tidak; (3) apakah ada kiriman uang atau barang ke desa, kiriman-kiriman tersebut seberapa bagain dari jumlah seluruh penghasilannya; (4) apakah dia mempunyai peranan politik atau sosial di desa; dan (5) apakah sering pulang ke desa (Goldstein, 1980: 75). Pakar lain menghendaki perlunya memperhatikan kriteria ruang (wilayah, jarak ekonomi dan jarak sosial), tempat tinggal, waktu dan kegiatan dalam migrasi, khususnya desa-kota (Standing, 1987: 1-20).

Selain mengikuti pendapat Hugo, cara lain yang ditempuh untuk seseorang melakukan migrasi permanen, sirkuler dan/atau *nglaju* adalah menanyakan apakah ada rencana kembali (*niat*) ke daerah asalnya (Mantra, 1985: 3) dan frekuensi kembalinya. Buruh bangunan yang menyatakan kembali dan tetap menetap di desa adalah 80,00%, sedangkan 15% menyatakan menetap di Surabaya. Alasan mereka yang memilih menetap di Surabaya adalah karena keluarganya sudah dipindahkan, tidak mempunyai sawah atau terlalu sempit, atau selain keluarganya telah dipindahkan, karena tidak ada pekerjaan di desa. Beberapa yang mengambil keputusan pindah ke Surabaya telah memiliki rumah, namun ada pula yang mengontrak, tinggal bersama famili dan orang lain, biasanya teman sekerjanya (sumber: pertanyaan no. 42 dan 61).

Tabel 5.3
Jarak dan Frekuensi kembali ke Daerah Asal
(N=75)

No	Jarak ke Daerah Asal	Dekat		Sedang		Jauh	
	Frekuensi Kembali	f	%	f	%	f	%
1.	Tinggi	16	76,19	2	5,71	3	16,67
2.	Sedang	0	0,00	27	77,14	8	44,44
3.	Rendah	5	23,81	7	20,00	7	38,89

Sumber: data primer, pertanyaan no. 11, 59, 60 dan 63.

Sementara itu, mereka yang tidak punya rencana menetap melakukan migrasi sirkuler dan *nglaju*. Responden yang *nglaju* akan pulang setiap hari, jumlahnya 8 orang, dua orang lebih memilih pulang 2 hari sekali. Migrasi sirkuler dilakukan dengan cara pulang 1 atau 2 kali dalam sebulan, bahkan ada yang tidak pulang setiap bulan, meski tetap memberikan kiriman uang yang ditiptkan pada saudara atau teman-teman sedesanya (sumber: pertanyaan no. 60 dan 61). Frekuensi pulang ke daerah asal

mereka berbeda bergantung dari jarak antara Surabaya dan daerah asalnya. Semakin dekat jaraknya, semakin sering pulang, bisa setiap hari, atau mengambil pola *nglaju*. Sementara itu, semakin jauh jaraknya semakin lama pulang rentang waktu pulanginya (lihat tabel 4.3).

Ketika berangkat ke Surabaya, mereka tidak selalu diajak oleh orang tuanya atau temannya, tetapi 22 (29,33%) orang mengambil inisiatif sendiri. Meskipun demikian, ajakan dari teman se-desa yang terlebih dahulu pergi ke Surabaya dan telah memperoleh pekerjaan tetap dominan, yaitu 25 (33,33%). Pada waktu diajak atau berinisiatif sendiri ke Surabaya, mereka meminta pertimbangan dan ijin dari orang tua (37,33%), keluarga (33,33%) dan cukup tekad dan keputusan sendiri (29,33%). Permintaan ijin pada orang tua dan keluarga biasanya dilakukan anak muda dengan karakteristik sosial tertentu. Sebagaimana pendapat David F. Sly dan J. Michael Wrigley (1985: 75-97), keputusan migrasi pada anak muda pada dasarnya dibuat oleh kepala keluarga, khususnya yang kurang berpendidikan, sedangkan orang di luar keluarga lebih berperan pada migran yang berpendidikan. Namun demikian, orang yang memberikan pertimbangan ini tidak berarti ikut membiayai migrasi tersebut, karena dari temuan lapangan 77,34% responden mencari biaya sendiri.

Magang atau *Ngernet*, Proses Belajar dan Adaptasi Kerja

Kartini Sjahrir (1985: 82) memaparkan bahwa keahlian seorang tukang di Jakarta diperoleh secara bertahap dari teman sekolah sekerjanya. Mandor maupun kontraktor tidak pernah menyelenggarakan suatu latihan keterampilan khusus. Setiap tukang memperolehnya lewat pengalaman kerja dan barangkali juga bakat. Hal ini terjadi pada buruh bangunan di Surabaya. Hampir semua buruh mengaku pernah menjadi kuli sebelum kedudukannya sekarang, bahkan ada yang mau bekerja tanpa di-

bayar, hanya uang makan, seperti Ali Effendi. Pekerjaan *kuuli, laden tukang*, tidak selalu dijalani di Surabaya, biasa jadi di desa asalnya atau kota

Alat-alat kerja didapat dengan jalan beli sendiri (36,0%), pinjam atau diberi oleh mandor atau pemilik bangunan (7,0%), atau dari sebagian membeli dan sebagian lain pinjam (16,%) (sumber: data primer, pertanyaan no. 64). Alat-alat ini dikenalkan oleh teman kerja, teman se-daerah, saudara, dan/atau orang tuanya, sekaligus dibimbing cara menggunakannya. Tabel 5.4 menunjukkan bahwa selain didukung oleh kemauan sendiri, teman kerja sangat berperan dalam mengenalkan dan membimbing dalam penggunaan alat-alat kerja. Proses belajarnya tidak seperti pada pelatihan, tetapi sambil kerja temannya memperhatikan. Kalau salah, baru diberi tahu mana yang salah, bisa pada saat itu juga atau pada waktu *nglaut*.

Tabel 5.4
Yang Mengenalkan Alat dan Membimbing/Melatih Pekerjaan
(N=75)

No.	Rincian	Yang Mengenal Alat		Yang Membimbing	
		f	%	f	%
1.	Sendiri	4	5,33	4	5,33
2.	Orang tua	2	2,67	5	6,67
3.	Saudara	4	5,33	4	5,33
4.	Teman se-daerah	3	4,00	0	0,00
5.	Teman se-kerja	11	14,67	14	18,67
6.	Sendiri dan orang tua/saudara	9	12,00	12	16,00
7.	Sendiri dan teman se-daerah	2	2,67	5	6,67
8.	Sendiri dan teman se-kerja	22	29,33	26	34,67
9.	Sendiri, orang tua/saudara dan teman se-kerja	10	13,33	5	6,67
10.	Sendiri, orang tua/saudara, teman sekerja dan teman se-daerah	8	10,67	0	0,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 56 dan 57.

Proses magang, *ngernet* atau *belajaran* diceriterakan oleh Pan Ran, yakni pada awalnya seorang *kuli* mengikuti tukangnyanya bekerja dan seringkali tukang inilah yang memberikan pekerjaan padanya, tapi hanya 1 atau 2 kali proyek mereka ikut, selebihnya mencari sendiri. Pertama kali kuli batu memperhatikan tukang bekerja sewaktu *laden* dan memberikan luluh. Tukang memberitahu berapa campurannya, apakah pasir itu perlu di-*ayak* atau tidak, jenis batu yang digunakan dan campuran semennya. *Kuli* juga diminta memegang ujung lain dari pipa plastik yang berisi air untuk melihat sejajar atau tidak dan *ngelot* (menimbang ketebalan lapisan semen). Selain itu, lambat laun kuli disuruh mengerjakan pasang batu bata supaya target (borongan) terpenuhi. “*Ayo melu masang, nggak ono rugi. Aku nggak iso mbayar sampeyan!*” (“Ayo ikut pasang kalau tidak bisa rugi. Kalau rugi, saya tidak membayar kamu!”). Setelah kelihatan sudah agak terampil, tukang memberikan bonus dan sering mengajak lembur. Bila yang membayar mandor, tukang akan mempromosikan *kuli*-nya. Bila *kuli* merasa sudah bisa melakukan, dia keluar dan mencari tempat kerja baru atas informasi teman-temannya. “*Umpamane ora pindah, bakal pancet ae.*” (“Kalau tidak pindah, kondisinya tetap saja”).

Di tempat yang baru, dia melamar sebagai tukang, bukan *kuli* lagi. Oleh mandor yang baru, dia boleh bekerja dengan masa percobaan beberapa hari.. Bila hasilnya kurang baik, mandor akan menurunkan upahnya, tapi biasanya tukang yang “baru” ini memilih keluar. Kalau hasilnya baik, ia tetap bekerja dengan status yang baru, sebagai tukang.

Untuk meningkat menjadi kepala tukang atau mandor, seorang tukang harus dekat dengan mandor atau pelaksana. Mereka mengajarkan bagaimana seluk-beluk mencari proyek dan memberikan kepercayaan. Di samping itu, tukang tersebut menyisakan upahnya untuk modal. *Kuli* jarang langsung menjadi mandor atau kepala tukang, tetapi harus bertahap.



Gambar 5.1.

Kadang dengan perut kosong, sudah harus bekerja.

Perubahan Status Sosial Ekonomi Keluarga, berkah dari Kota Besar

Perubahan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal sebenarnya tidak terlepas dari perilaku pengiriman uang atau barang, dalam istilah kependudukan adalah *remittance*. Pengiriman uang atau barang ini dilakukan oleh kaum migran, termasuk oleh buruh bangunan. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa semua buruh bangunan yang berstatus berkeluarga dan separuh dari berstatus janda/duda, atau 70,7% dari 75 responden mengaku mengirimkan uang dan/atau barang pada keluarganya, khususnya istri dan/atau anak-anak mereka. Bentuk pemberian itu bervariasi, namun umumnya berupa uang setiap kali pulang.

Tabel 5.5
Bentuk Pengiriman/Pemberian Uang dan/atau Barang pada Keluarga
(N=75)

No.	Rincian	Istri dan anak-anak		Orang Tua/ Mertua		Kerabat Lain	
		f	%	f	%	f	%
1.	Uang secara teratur	22	29,33	0	0,00	5	6,67
2.	Uang setiap kali pulang	25	33,33	16	21,33	0	0,00
3.	Uang dan/atau barang	3	4,00	20	26,67	12	16,00
4.	Barang-barang saja	3	4,00	15	20,00	15	20,00
5.	Tidak memberi apa-apa	22	29,33	24	32,00	43	57,33

Sumber: data primer, pertanyaan no. 67.

Tabel 5.5 juga menunjukkan bahwa buruh bangunan juga mengirim uang dan/atau barang setiap kali pulang, meski frekuensi pemberiannya berbeda bila dibandingkan istri dan/atau anak-anak. Namun tidak demikian untuk kerabat, kecenderungan memberikan uang, meski dalam jumlah kecil, biasanya dilakukan oleh buruh bangunan pada kerabat yang masih menjadi tanggungannya, seperti yang dilakukan Pak Ran. Atau, pemberian itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya selama proses migrasi, misalnya memberikan tumpangan menginap, atau mencari/memberi informasi tentang pekerjaan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pemberian uang dan/ atau barang ini digunakan membeli tanah atau barang-barang elektronik sebagai investasi. Sebelum ke Surabaya, separuh lebih dari buruh bangunan berstatus petani kecil atau tidak memiliki tanah (*tunakisma*). Kalau pun memiliki tanah pertanian, ada sejumlah pola pemilikan, mulai dari milik sendiri, warisan, beli

sewa, bagi hasil, hadiah/hibah dan lungguh. Pola penguasaan lahan yang demikian ini adalah wajar pada masyarakat Jawa pada tahun 1990-an. Data Sensus Pertanian tahun 1983 yang dilakukan oleh BPS, 63,3% usaha tani dari 11,6 juta rumah tangga petani di Jawa adalah petani gurem dengan luas tanah rata-rata 0,25 ha. Meski pada buruh bangunan yang tidak bertanah dan petani sempit tidak berubah, namun pada kelompok buruh bangunan di atas 0,25 ha mengalami perubahan luas tanahnya.

Tabel 5.6
Luas Pemilikan Tanah Pertanian Sebelum dan
Sesudah Bekerja di Surabaya
(N=75)

No.	Luas Lahan (dalam ha)	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Tidak Bertanah	28	37,33	28	37,33
2.	0,01 – 0,25	21	28,00	21	28,00
3.	0,26 – 0,50	7	9,33	0	0,00
4.	0,51 – 0,75	3	4,00	2	2,67
5.	0,76 – 1,00	8	10,67	16	21,33
6.	1,01 – 1,25	2	2,67	2	2,67
7.	Lebih dari 1,25	6	8,00	6	8,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 16.

Ada temuan yang menarik dari tabel 5.6, bahwa tidak peningkatan perluasan tanah pertanian yang dimiliki. Pada beberapa kasus perpindahan pekerjaan yang kurang dari satu tahun pada waktu penelitian ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Lebih dari itu, para buruh tani dan pemilik tanah yang bertanah sempit lebih memilih mengembangkan sektor non-pertanian, bahkan telah dilakukan pada waktu sebelum melakukan proses migrasi. Sementara itu, petani yang memiliki tanah di atas

0,25 ha tetap mengembangkan strategi peningkatan ekonomi pada sektor pertanian. Caranya, hasil dari bekerja di kota digunakan untuk membeli tanah. Dengan membeli tanah yang cukup luas hingga mencapai 1 ha. Dengan luas tanah tersebut, setidak-tidak biaya antara pengelolaan padi dan keuntungan dari menjual beras seimbang atau lebih untung.



Gambar 5.2
Bekerja untuk keluarga di desa?

Tidak ada perubahan signifikan pada kelompok buruh bangunan yang *tunakisma* (tidak bertanah) dan petani *gurem* (lahan kurang dari 0,25 ha) ini nampaknya berhubungan dengan (1) status pekerjaan di desa yang tidak lagi memfokuskan pada sektor pertanian, dan (2) orientasi dalam pengembangan modal yang dimiliki. Orientasi pengembangan ini terlihat dari perubahan kualitas rumahnya. Meski luas tanah atau rumah relatif tidak berubah, tetapi terlihat perubahan pada bahan dinding, lantai dan penggunaan listrik. Lebih penting lagi, status kepemilikan rumah

pun telah berubah, bila dulu bergantung pada orangtuanya, kini mereka telah mengutamakan untuk membeli sendiri, baik dengan cara membeli, maupun membuat sendiri.

Tabel 5.7
Kondisi Obyektif Rumah di Daerah Asal Sebelum dan Sesudah Bekerja
di Surabaya (N=75)

No	Kondisi Obyektif	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Luas Rumah (dalam m ²)				
	a. Kurang dari 40	10	13,33	16	21,33
	b. 40,01 – 60,00	21	28,00	15	20,00
	c. 60,01 – 80,00	7	9,33	4	5,33
	d. 80,01 – 100,00	15	20,00	18	24,00
	e. 100,01 – 120,00	10	13,33	7	9,33
	f. Lebih dari 120,00	12	16,00	15	20,00
2.	Dinding terbuat dari				
	a. Tembok	49	65,33	62	82,67
	b. Papan	7	9,33	3	4,00
	c. Gedeg	19	25,33	10	13,33
3.	Lantai terbuat dari				
	a. Tegel/Keramik	7	9,33	9	12,00
	b. Semen	31	41,33	53	70,67
	c. Tanah	37	49,33	13	17,33
4.	Penerangan				
	a. Listrik	33	44,00	53	70,67
	b. Lampu Minyak	42	56,00	22	29,33
5.	Status Pemilikan				
	a. Beli Sendiri	11	14,67	20	26,67
	b. Buat Sendiri	9	12,00	18	24,00
	c. Hibah Orangtua	8	10,67	13	17,33
	d. Buat Sendiri dgn dibantu Orangtua	18	24,00	9	12,00
	e. Milik Orangtua	29	38,67	15	20,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 27.



Gambar 5.3

Makan bersama, bekerja bersama. Modal sosial orang miskin kota.

Penutup

Apa yang dapat disimpulkan dari perilaku buruh bangunan. Pertama, mobilitas buruh bangunan yang bekerja di Surabaya adalah *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen. Frekuensi mereka kembali ke daerah asal ini berhubungan dengan dengan jarak antara tempat kerja dan daerah asal. Semakin dekat jaraknya, semakin tinggi frekuensi kembali ke daerah asal. Intensitas hubungan dengan asal ini sebenarnya berbeda bergantung status kawinnya. Pada buruh bangunan yang berstatus kawin, dengan istri dan anak-anak yang tinggal di daerah asal, intensitasnya semakin tinggi, sebaliknya tidak demikian pada status tidak kawin dan janda/duda. Intensitas ini ditandai dari frekuensi kembali ke daerah asal, pengiriman uang dan/atau barang, ada tidaknya teman atau famili dari daerah asal yang diajak bekerja dan keterlibatannya pada organisasi di daerah asalnya.

Kedua, pola migrasi yang demikian sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang *bias* kota dan pembangunan pertanian yang memarjinalikan kelompok miskin pedesaan. Oleh karena itu, pada buruh bangunan yang ber-SES rendah di daerah asal cenderung mempunyai alasan tidak ada pekerjaan di daerah asalnya. Sementara itu, selain karena tidak ada pekerjaan, buruh bangunan yang ber-SES tinggi lebih melihat ketidakpuasan atas pekerjaan di daerah asal. Bekerja ikut orang tua di sawah dianggap tidak memiliki pekerjaan.

Ketiga, dari hasil penelitian ini, keberhasilan migrasi ini sebenarnya ditentukan juga oleh intensitas pembelajaran, baik di daerah asal maupun sesudah di Surabaya. Intensitas pembelajaran terhadap pekerjaan di daerah terjadi tatkala mereka beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian di pedesaan, yaitu menjadi buruh bangunan. Di dalam kajian antropologi kognitif, pekerjaan buruh bangunan awalnya tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian, menggunakan alat-alat utama yang sama, seperti pacul dan sekop. Oleh karena itu, bisa dipahami bila Intensitas pembelajaran sebenarnya berbanding terbalik dengan SES buruh bangunan sebelum ke Surabaya.

Keempat, keberhasilan migrasi berpengaruh pada peningkatan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal. Peningkatan status keluarganya ditandai dengan peningkatan luas tanah pertanian yang dimiliki dan kualitas rumahnya. Pada buruh bangunan yang sebelumnya merupakan petani gurem lebih menginvestasikan di sektor pertanian dengan membeli lahan pertanian. Namun demikian, buruh bangunan yang tuna kisma dan bekerja di sektor non-pertanian ini lebih memperbaiki rumahnya.

Terakhir, penelitian ini juga menguatkan anggapan bahwa sektor formal di perkotaan tidak selalu menjadi tujuan dari migrasi. Sektor formal memiliki daya tampung yang terbatas, hal itu berbeda dengan sektor informal seperti buruh bangunan. Pada

kasus buruh bangunan, sepanjang ada kegiatan membangun rumah atau proyek lain, beberapa pun jumlah orangnya dapat tertampung⁸. Sementara itu, masyarakat desa yang melakukan migrasi memiliki kesadaran dan mengukur kemampuannya. Mereka tidak lagi menaruh mimpi-mimpinya, tetapi lebih realitis apa yang bisa dilakukan di daerah tujuan.

Daftar Pustaka

Adiwikarta, Sudardja.

1984 Dampak Irigasi Jatiluhur dan Pola Keluarga Tani. **Prisma**. Th. XIII No. 9.

Ananta, Aris., dan Prijono Tjiptoherjianto.

1985 Sektor Informal: suatu Tinjauan Ekonomis. **Prisma**. Th. XIV. No. 3.

Effendi, Tadjuddin Noer.

1985 Masalah Ketenagakerjaan di Pedesaan dan Strategi Penanganannya. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: CV Rajawali.

Lee, Everett S.

1985 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta; PPK-UGM.

Magenda, Burhan D.

1983 Manusia Kota Besar: Contoh dari Surabaya. **Widyapura**. Th. IV. No. 2.

Mantra, Ida Bagoes.

1985 **Migrasi Penduduk di Indonesia. Suatu Analisis Hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1980**. Yogyakarta: PPK-UGM.

⁸ Lebih menarik lagi, pada situasi krisis ekonomi tahun 1997-2006 ini kecenderungan untuk mendirikan bangunan tidak berkurang, baik melalui proyek *real-estate* maupun rumah pribadi.

Owens, Edgar., dan Robert. Shaw.

- 1983 **Pembangunan Ditinjau Kembali. Menjembatani Gap antara Pemerintah dan Rakyat.** Diterjemahkan oleh A.S. Wan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sjahrir, Kartini.

- 1986 **Tukang-tukang di Jakarta, Suatu Jaringan Kerja.** **Prisma.** Th. XV. No. 9.

Sly, David F., dan J. Michael Wrigley.

- 1985 **Migration Decision Making and Migration Behavior in Rural Kenya.** Dalam James T. Fawcett. **Migration Intentions and Behavior: Third World Perspective, A Special Issues of Population and Enviornment.** New York: Human Science Press, Inc.

Standing, Guy.

- 1987 **Konsep-konsep Mobilitas di Negara sedang Berkembang.** Yogyakarta: PPSK UGM.

Stelle, Ross.

- 1985 **Mobilitas Pekerjaan dan Penghasilan Migran di Surabaya.** Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.

Bab 6

Petani Kota

Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang
Urban

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto,
dan Usman Mulyadi

Pertumbuhan Kota dan Marginalisasi Pertanian, Sebuah Pendahuluan

Kota-kota di Indonesia, khususnya Jawa, tumbuh dan memiliki multi fungsi. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, misalnya memiliki nama *akronim* yang mengikuti namanya, yaitu INDAMARDI, artinya industri, perdagangan, maritim dan pendidikan. Nampaknya, hal ini merupakan pola yang lazim dari pertumbuhan kota-kota di dunia. Kota tumbuh sebagai tahap lanjut dari pedesaan tatkala manusia mengembangkan kemampuannya yang tidak lagi sekedar *food gathering*, tetapi menjadi *food producing*, yaitu bercocok tanam. Revolusi peradaban pertama inilah, pertanian, kemudian menuntut golongan pekerjaan lain di luar pertanian. Golongan pertama adalah mereka yang menjaga kekayaan atau produksi dari pertanian, membentuk pemimpin yang *primus inter pares* dan tentara. Golongan kedua adalah pedagang yang menjual atau menjadi perantara antara petani dan kelompok masyarakat lain. Kedua golongan ini berada di wilayah yang disebut kota dengan bangunan benteng di sekitarnya atau *gilda-gilda* pada abad Pertengahan di Eropa (lihat Sukadana, 1983: 57-74; Nas, 1984: 2-3).

Multi-fungsi ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia. Kota Surabaya awalnya memang merupakan desa (*wanua*) di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha pada masanya, antara lain Kajuruhan, Mataram Hindu, Singhasari dan Majapahit. Karena posisinya berada di pantai, desa ini tidak saja sebagai desa pertanian, tetapi juga tumbuh sebagai pelabuhan (Soekadri, 1996: 5-23). Pada masa selanjutnya, menjadi kota syahbandar (Majapahit, abad 14-15), sekaligus penyebaran agama Islam semasa Sunan Ampel dan penerusnya (lihat Faber, 1931: 5-20), dan terutama sesudah 1870, kebijakan *Liberalisasi Ekonomi* di masa pemerintahan kolonial Belanda, berubah sebagai kota industri dan perdagangan, di samping sebagai pusat pendidikan (Handinoto, 1996: 47-127).

Kota Surabaya ini tumbuh meluas dan menjadikan daerah-daerah sekitarnya sebagai *hinterland*, penyangga. Pertumbuhan ini sebenarnya tidak lain untuk menopang aktivitas perkebunan di wilayah-wilayah pedalaman *Oost Java Provincie* (Jawa Timur). Industri yang dibangun berkaitan dengan kelengkapan peralatan mesin pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan. Memang, sebelumnya telah ada pabrik-pabrik dan fasilitas lain yang lebih ditujukan untuk kebutuhan militer. Kota ini meluas hingga Wonokromo sekarang ini, akan tetapi dari sumber-sumber sejarah, yaitu *Verslag van den Toestand de Stads-gemeente Soerabaja* tahun 1870-1940, masih tercatat sebagian besar orang-orang bumi putera bekerja di sawah. Artinya, pola pemukiman tumbuh mengikuti jalur transportasi, meski bergerak di dalam satu garis lurus, tetapi tiga arah, yaitu ke Gresik (*Greesse*), Mojokerto (*Majakerta*), dan Sidoarjo (*Sidaharja*/*Sidakare*).

Hingga tahun 1970-an, wilayah Sedati, sekitar 20 km dari pusat kota Surabaya dan masuk wilayah Sidoarjo, masih dikenal sebagai daerah *gudang beras*. Selain dipanen dari wilayahnya, beras tersebut dipasok dari wilayah pertanian Surabaya. Melalui program pembangunan lima tahun (PELITA), hampir semua

sawah tersebut memiliki saluran irigasi (teknis) yang mengambil air dari Kali Surabaya (Mas). Pertumbuhan pemukiman, pusat-pusat perdagangan dan industri telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. Meskipun demikian, wilayah pertanian tersebut masih tersisa. Pada tahun 1999, jumlah luas lahan sawah sebesar 2.153 ha, dengan rincian 1.604 ha sawah tadah hujan, 305 ha sawah beririgasi teknis, 153 ha semi teknis dan 91 ha desa (irigasi non PU). Dari wilayah persawahan tersebut, kota ini bisa menerima hasil panen 2.730 ha dengan rata-rata produksi 50,77 kwintal/ha dan jumlah keseluruhan 13.859, produksi yang terkecil dibandingkan wilayah lainnya di Propinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2003: 165-175).

Dengan berbagai sarana pendidikan dan tersedianya lapangan kerja *off-farm* (sektor industri dan perdagangan), keluarga-keluarga petani asli Surabaya ini kemudian beralih ke sektor pekerjaan lain. Tanah sawahnya dijual dan didirikan pemukiman, pusat perdagangan atau industri. Uang ganti itu dikenal dengan istilah *uang landasan*. Karena dalam jumlah besar, sering mereka kemudian menjadi keluarga yang konsumtif. Seperti halnya di Jakarta, meski terjadi mobilitas pekerjaan ke sektor di luar pertanian oleh masyarakat petani asli, namun ternyata sektor pertanian tetap menampung petani-petani (penggarap) di luar Surabaya. Produksi tidak saja beras, melainkan sayur-sayuran hingga tanaman hias.

Meski telah ada penelitian tentang petani kota di Yogyakarta (Setyobudi, 2001), hasil pengamatan awal keadaan kaum tani di Surabaya ini berbeda dengan di Yogyakarta. Bila Setyobudi (2001) mencermati kaum tani yang merupakan penduduk asli Yogyakarta, seperti juga yang diteliti oleh Koentjaraningrat (1976) pada petani buah-buahan di Selatan Jakarta, yaitu kecamatan Pasar Rebo, desa Ciracas dan Cilangkap tahun 1972, maka penelitian ini mencermati *ekspansi* masyarakat petani di luar kota besar (Surabaya), memasuki ruang-ruang yang

kosong, atau mempertahankan lahan sawah pertanian hingga pemiliknya menjual ke investor atau melakukan alih fungsi sawahnya.

Sementara ini, sejumlah ahli kependudukan, khususnya kajian perkotaan, mencermati perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, selain karena faktor-faktor pendorong (*push factor*) di daerah asalnya, seperti sempitnya lapangan pekerjaan, ditambah dengan produk dari kurikulum pendidikan yang *bias kota*, dan faktor-faktor penarik (*pull factor*) di daerah tujuan (kota), seperti lapangan kerja yang terbuka, penuh dengan kemudahan dan kelengkapan sarana kehidupan. Mereka yang pindah dari desa selalu diduga mencari pekerjaan di sektor formal, yaitu di kantor atau pabrik, namun sering tidak disadari sebenarnya telah memiliki pilihan sendiri berdasarkan informasi yang dipunyai.

Menjadi masalah menarik kemudian, ketika mereka pindah ke kota dan tetap mempertahankan pekerjaan lamanya. Persoalannya, di lingkungan pedesaan mata pencaharian, dalam hal ini pertanian, telah membentuk sistem yang mendukung, seperti organisasi kelompok tani, HIPPA (Himpunan Pemakai Air) dan Petugas PPL. Hal ini berbeda dengan lingkungan barunya, jaringan semacam itu tidak ada. Kalau pun ada, fungsinya tidak berjalan lebih maksimal dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan berkaitan dengan kasus ini adalah pola migrasi dan strategi adaptasinya.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil penelitian ⁹ yang dilakukan pada tahun 2004. Lokasi penelitian ini berada di Surabaya,

⁹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

khususnya daerah sekitar Ketintang, Kebonsari dan Karah. Wilayah itu meninggalkan jejak-jejak pertanian pada masa lalu Kota Surabaya. Hal itu ditandai dengan bekas kompleks pabrik beras di Jalan Ketintang, tepatnya persis berada di depan kantor kelurahan. Lahan pertanian ini lambat laun tergerus oleh perumahan.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan perpektif etnografis. Tim peneliti mengamati keseharian para petani kota dan melakukan wawancara yang mendalam. Pengamatan itu terekam dengan baik melalui lensa kamera. Gambar memang tidak terlalu terfokus karena harus mengambil jarak dengan para pelaku. Para pelaku tidak terbiasa bisa diambil dengan jarak yang dekat. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi dari kedalaman hasil penelitian. Langkah berikutnya, hasil pengamatan dan wawancara mendalam direkonstruksi dan dianalisis menjadi satu tema tentang perjuangan kaum urban yang memasuki wilayah kota.

Tidak Ada Rotan, Akar pun Jadi, Tidak Ada Pekerjaan Menjadi Petani Tidak Masalah

Petani Asli dan Petani Migran

Di kota besar, seperti Surabaya, akan mengalami kesulitan bila mencari orang yang pada waktu pagi hari berjalan ke luar rumah dengan membawa cangkul dan satu tangan lainnya membawa *bontotan* (bekal makanan) yang dibungkus kain atau dengan menggunakan *rantang*. Apalagi, bila ia menggunakan *caping*, topi berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Di waktu lain, ia membawa *alat pantun*, yaitu kayu persegi panjang dengan sejumlah besi yang menancap, sehingga berbentuk seperti sikat sepatu. Kayu tersebut dihubungkan dengan gagang yang terbuat dari kayu pula. Alat itu digunakan untuk membersihkan atau

menyiangi *gulma*, tanaman pengganggu. Itulah gambaran seorang petani dan sangat sulit didapati di Surabaya, apalagi di pusat kotanya. Bila ada yang membawa cangkul, lebih pasti mereka bekerja sebagai buruh bangunan atau tukang gali (kabel telpon, pipa PAM atau gas).

Ketika menelusuri wilayah Surabaya Utara, bila dulu masih terdapat sawah yang letaknya berpenjaran (*sporadis*) kini cukup sulit didapati, bahkan nyaris tidak ada, kecuali di daerah Surabaya Barat, seperti Tandes, Balongsari dan Lontar, meskipun dalam jumlah yang kecil. Penelitian Nur Laily Assafitri (2004) menunjukkan bahwa Kelurahan Gadel, salah satu kelurahan dari kecamatan Tandes, bila pada tahun 1993 masih ada 2 orang yang berprofesi sebagai petani dan 10 orang buruh tani, maka pada tahun berikutnya (1994) sudah tidak ada lagi, mereka beralih ke pertukangan. Tanah mereka dijual dan menjadi perumahan. Rumah mereka memang lebih baik dan diisi oleh berbagai benda-benda elektronik, seperti tv dan vcd, dan tak jarang pula memiliki sepeda motor. Namun, mereka tidak lagi menjadi pemilik tanah, kecuali sejenkal tanah untuk rumahnya. Mereka kemudian bekerja sebagai tukang di perumahan tersebut tanpa bisa membelinya. Mereka masih menyisakan tradisi *tegal desa*, sebuah upacara ritual untuk menghormati *danyang* yang melindungi desa dengan sumur *sakral*, sebuah sumur yang berada di desa tersebut. Air sumur tersebut tidak pernah habis, bahkan mampu memenuhi kebutuhan untuk tujuh “desa,” yaitu Lempung, Sambisari, Karangpoh, Tandes, Tubanan dan Balongsari. Karena airnya terus mengalir, meskipun pada musim kemarau, sumur tersebut dianggap mempunyai kekuatan supranatural dan dikeramatkan. Kalau pun ada petani di Kecamatan Tandes, Lontar hingga daerah Lidah dan sekitarnya, jumlah mereka pun juga sangat sedikit. Karena kondisi lingkungan tanahnya yang keras, mereka bercocok tanam dengan cara perladangan dan sawah tadah hujan.



Gambar 6.1
Menunggu padi menguning di tengah perumahan

Baru mendekati Surabaya Timur, daerah Jojoran, Karang Menjangan, Karang Empat, Kaliyudan, hingga Kenjeran, hingga Semampir dan Rungkut, terdapat petani sawah. Jumlah mereka tetap tidak terlalu besar. Mereka tinggal di kampung-kampung lama Surabaya dengan bentuk rumah yang sangat sederhana. Mereka bisa sebagai petani pemilik yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang, ataupun bekerja sebagai buruh tani di tanah yang dulu miliknya atau tanah yang sama, tetapi telah berganti pemilik, hanya menunggu alih fungsi ke perumahan, perkantoran atau pabrik. Bila memperhatikan saluran-saluran air di perumahan hingga ke sungai, maka masih terlihat bahwa saluran tersebut sebenarnya diperuntukan sebagai saluran irigasi. Daerah Surabaya Timur dan perbatasan Kab. Sidoarjo pada tahun 1960-an hingga 1970-an terkenal sebagai wilayah gudang besar, sebutannya adalah *beras Sedati*.

Perumahan dan perkantoran tidak melebar hingga ke pinggir pantai Surabaya Timur hingga ke perbatasan Kab. Sidoarjo karena kesulitan jalur transportasi, meskipun kini lambat laun telah merambat ke wilayah tersebut, seperti Perumahan Wiguna di Rungkut. Pada wilayah tersebut, sering terdapat

kampung-kampung dengan sawah di sekitarnya atau tambak. Kondisi rumahnya tetap sangat sederhana. *“Sekarang Mas, nggak ada orang kaya dari tani. Bila ingin kaya, iya tunggu landasan, setelah itu kerja apa saya tidak tahu,”* begitu perkataan salah seorang petani bila ditanya tentang kondisi ekonominya, bahkan anak-anaknya merasa malu kalau menyebutkan pekerjaan orang tuanya karena petani sama dengan orang miskin.

Kata *landasan* itu merupakan istilah alih fungsi dan alih pemilikan khas komunitas petani di Surabaya dan sekitarnya. Kata itu pertama kali muncul ketika pembangunan atau perluasan bandara Juanda, Kab. Sidoarjo. Pada waktu itu, sejumlah sawah terjual dan dialihfungsikan. Pemiliknya memperoleh ganti rugi dan acapkali digunakan untuk naik haji, membeli motor dan benda-benda konsumtif lainnya. Meskipun setelah itu, mereka jatuh miskin karena tidak mempunyai pekerjaan. Uangnya telah habis, barang-barangnya telah terjual.

Dari semua wilayah tersebut, kemudian tim peneliti mengarahkan perhatian di wilayah Surabaya Selatan. Khususnya, di Kec. Ketintang dan Jambangan. Kedua kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Wonocolo pada tahun 1998. Selain wilayahnya terlalu luas, jumlah penduduk (KK) telah melebihi dari ukuran penduduk per kecamatan di Surabaya, sehingga perlu dipisahkan dari kecamatan induknya. Pertambahan jumlah penduduk ini lebih disebabkan oleh perumahan baru.

Di kedua wilayah tersebut terdapat sejumlah bidang sawah yang kini dalam hitungan hari telah berubah menjadi perumahan, bahkan dalam keadaan padi yang sudah berbuah dan tinggal menunggu panen diurug tanah. Tanah itu dijual baik sebagai tanah kapling yang siap bangun, maupun dijadikan perumahan. Ada sejumlah perumahan, antara lain Ketintang Permai, Karang Agung, Gayungsari dan Palm Spring yang baru berdiri, selebihnya untuk rumah tinggal dan tempat usaha.

Bidang yang pertama berada di lingkungan UNESA, luasnya berkisar antara 2 hingga 3 ha. Sawah tersebut lebih merupakan sawah tadah hujan yang berada di antara sejumlah bangunan, antara lain di belakang Gedung P2B, di sebelah Gedung Perpustakaan dan di depan Gedung MIPA. Sebagai sawah tadah hujan, sawah tersebut ditanami hanya satu kali dalam setahun. Mungkin karena hasilnya kurang dan sering terkena banjir pada waktu paruh musim hujan, kini sering tidak ditanami. Bidang sawah berikutnya berada dekat Ketintang Permai dan Perumahan Gayung Kebonsari. Sawah di depan Perumahan Ketintang Permai kini sebagian telah dibangun perumahan baru perluasan dari Perumahan Ketintang Permai dan perluasan Gedung Depag. Keadaan yang sama terjadi di depan Pasar Karah dan Jawa Pos, sehingga harus bertarung dengan waktu.

Tidak seluruhnya petani yang mengerjakan sawah ini adalah penduduk asli daerah tersebut. Sebagian besar merupakan petani migran. Asal mereka bervariasi mulai dari daerah Pantai Utara, yaitu Lamongan dan Bojonegoro, daerah *Surabaya/Arek* (Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang), dan daerah Mataraman (Tulungagung dan Nganjuk). Ada di antara mereka yang sudah menetap di Surabaya lebih dari 10 tahun, namun ada pula yang kurang dari 10 tahun, antara 2 hingga 5 tahun. Mereka tidak memiliki rumah sendiri. Mereka mengontrak rumah yang sederhana, meskipun atapnya sudah genting, tetapi dindingnya separuh dari tembok, di atasnya *gedeg* (bambu). Lantainya semen atau tegel yang lama. Air minumannya berasal dari sumur.

“Kami tidak bisa mengontrak rumah yang bagus. Harganya terlalu mahal, bisa di atas dua juta. Apalagi kalau ada air PAM, Listrik dan telpon. Untuk apa? Kami cukup mandi dengan air sumur. Listrik seadanya. Telpon, ah telpon siapa. Kalau mau, ya ke wartel. Yang penting tidak kehabisan, tidak kepanasan. Bisa tidur. Harganya murah. Bisa nabung. Buat apa kita ke Surabaya, kalau tidak membawa kaya.”

Sebagian lainnya tinggal di sawahnya. Mereka membangun gubuk dari bambu. Ukuran 2 x 2 m atau 3 x 3 m. Di dalamnya terdapat dipan untuk tidur, lemari atau kardus tempat pakaian, rak piring, peralatan masak dan makan, serta kompor. Di daerah Jambangan dan Ketintang, jumlah ini memang sedikit, karena memilih *mengontrak* di tanah PJKa yang terbilang murah, tetapi di daerah Pagesangan dan Gayungan (Kebonsari dan Menanggal), yaitu dekat Mesjid Agung, jumlahnya lebih besar daripada mereka yang mengontrak, terutama pada waktu musim kemarau, yaitu menanam *blewah* dan *timun mas*.

“...Kami memilih membangun gubuk di sini. Selain dekat dengan lahan kami, ongkosnya pun jauh lebih murah. Gedeg ini gedeg bekas. Untuk air minum, kita gali sumur. Air sumur ini tidak saja untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk menyirami tanaman. Tanaman ini tidak memerlukan air. Hanya dua kali sehari saja disirami, pagi dan sore hari. Dan, tidak perlu sampai kecembeng (tergenang, pen.).”

Umur petani dan buruh tani yang termuda adalah 35 tahun, yaitu Pak Urip dan Pak Sumaji, sedangkan tertua adalah Pak Supardi (60 tahun). Pendidikan mereka yang paling ditemukan oleh tim peneliti adalah SMP, namun sebagian besar adalah lulusan SD. Artinya, mereka sudah tidak buta huruf lagi. Bila memperhatikan tingkatan pendidikannya, apabila tidak kendala kultural, maka mereka bisa tergolong dari kelompok miskin pedesaan.

Pekerjaan mereka tidak berbeda dengan di tempat asalnya. Mereka merupakan keluarga petani dan buruh tani. Tanah mereka sempit, bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Pada pola migrasi sebelumnya, ada sebagian yang mengakui bahwa bila pekerjaan buruh tani di desa telah usai, maka mereka berpindah ke desa dan kota lain. Mereka berangkat bersama-sama, bisa pula secara sendiri. Kemudian, setelah mempunyai modal dan jaringan

sosial di kota, ada yang sebelumnya menyewa tanah sawah di kota, mereka berangkat ke Surabaya. Oleh karenanya, tempat asalnya tidak berjauhan di kota asalnya, setidaknya-tidaknya satu kecamatan dan memiliki hubungan emosional, baik sebagai kerabat, teman atau lainnya.

Pola yang demikian ini merupakan konsekuensi dari revolusi hijau dan biru. Di dalam perkembangan teknologi pertanian, bibit unggul dan teknologi pengolahan pertanian mengakibatkan penanaman padi secara relatif serempak. Hasilnya, buruh tani dan petani pemilik lahan sempit – kurang dari 0,25 ha – baik wanita maupun laki-laki tidak bisa berkerja di beberapa lahan sawah yang ada di desanya. Wanita buruh tani hanya bekerja pada waktu musim tanam, tetapi sesudah panen mereka tidak bisa lagi turut *menumbuk* padi, pemilik lahan lebih cenderung menggunakan *buller*, dan kini bahkan terdapat *buller* yang kecil yang dengan mesinnya bisa bergerak dari rumah ke rumah. Akhirnya, mereka memilih bekerja ke luar desa dengan pola pekerjaan yang sama atau relatif sama, perpindahan ke sektor non-pertanian mereka tidak secara progresif seperti pemilik lahan luas yang memiliki modal besar dari sektor pertaniannya (Wiradi, 1985: 40-48; kutip dari Sinaga dan White, 1979; Wiradi dan Makali, 1983; serta Collier dan Birowo, 1973).

Terjadinya pemilikan tanah sempit dan perumitan dalam proses pengolahan lahan ini bisa dijelaskan dalam teori *invulsi pertanian* dari Clifford Geertz (1983). Namun, perpindahan ke sektor *off-farm* dan kemudian melakukan migrasi ke kota (urbanisasi) merupakan dampak dari revolusi hijau dan revolusi biru yang merembet pada komersialisasi pertanian dan berlanjut pada runtuhnya hubungan patron-klien. Petani lahan sempit dan buruh tani (*tuna kisma*) tidak mendapat jaminan ekonomi dari pemilik tanah luas yang cenderung memperhitungan untung dan rugi. Sikap pemilik tanah luas ini terjadi karena biaya produksi padi meningkat.



Gambar 6.2.
Menjemur “gabah” di fasilitas umum

Kasus yang menarik lainnya adalah Pak Supri. Ia berusia 48 tahun, berasal dari Kab. Tulungagung. Di desanya ia bekerja sebagai pencari marmer. Artinya, desa asalnya berada dalam lingkungan yang tandus, yaitu di lereng Pegunungan Kendeng Selatan, sebuah pegunungan kapur. Pekerjaan tersebut begitu keras, ia tidak sanggup karena usianya semakin tua dan tenaganya semakin berkurang. Keadaan ini diperparah oleh kebutuhan marmer yang berkurang pada masa krisis moneter, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Fenomena ini sangat menarik karena dari sektor non pertanian di pedesaan ke sektor pertanian di perkotaan, padahal menurut Wiradi (1985) bahwa kecenderungan dimulai dari sektor non-pertanian di desa kemudian berlanjut ke sektor non-pertanian di kota. Apa yang dikatakannya, *“Meski sebagai buruh pencari marmer, di desa saya juga punya kebun yang saya tanami ketela dan jagung. Bertani sawah memang*

bal baru, tapi pekerjaan iya seperti itu saja. Saya juga tidak mengerjakan sendiri, tetapi ada penggarap yang saya upah setiap kali ada pekerjaan di sawah.”

Tabel 6.1.
Tempat Asal dan Tempat Tinggal Informan di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Kebonsari	Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro Kab. Mojokerto
Karakteristik Desa	Eks Desa Pertanian	Pertanian Perladangan dan Non-Pertanian
Tempat Tinggal	Milik Sendiri	Kontrak/Kost Di Gubuk Sawah

Penduduk asli Surabaya yang menjadi petani/buruh tani sangat sedikit. Seperti yang telah disebutkan, dari sejak dulu mereka juga berasal dari keluarga petani *gurem* atau buruh tani. Ketika lingkungan sekitarnya berubah, karena kondisi strukturalnya, yaitu tingkat pendidikannya yang rendah, mereka tidak mampu mengakses sektor ekonomi di luar pertanian. *“Iya, bagaimana lagi bisanya jadi buruh, kalau panen yang buruh tani, di hari lain buruh bangunan atau tukang becak. Sawah yang saya kerjakan ini sudah dua kali ganti pemilik. Sekarang, pemiliknya orang Sidoarjo.”*

Pola Penguasaan dan Pengolahan Lahan

Ada beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam kebijakan pertanian. Hasil pertanian berhubungan dengan kebutuh-

an masyarakat. Di dalam kebijakan skala makro ini, kemudian memunculkan target pencapaian. Di masa pemerintahan Orde Baru, berkembang wacana tentang *swasembada* beras, dan seterusnya. Artinya, mengurangi impor hasil bumi dalam kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, ada dua strategi yang dikembangkan waktu itu, sejak tahun 1970-an, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi lahan dilakukan dengan memasukkan unsur bibit unggul yang menaikkan produksi, dan penggunaan *pestisida* sebagai pembasmi penyakit dan hama lainnya, dan terakhir adalah pemanfaatan teknologi pertanian (mesin) yang membantu petani untuk melakukan percepatan pengolahan tanah dan hasil panen. Penggunaan pupuk buatan dilakukan karena intensifikasi lahan mengakibatkan tanah tidak mampu menghasilkan zat hara yang berguna bagi tanaman, sementara itu penggunaan *pestisida* merupakan konsekuensi dari bibit unggul yang tidak tahan penyakit (perhatikan Ismawan, 1985: 18-19). Program tersebut pada masa itu dikenal dengan program *Bimas* dengan *Panca Usaha Tani*, dimulai dari penanaman bibit unggul PB 5 dan PB 8, dan kemudian berlanjut hingga IR 64 (Mubyarto, 1991: 6-8). Karena program tersebut, pada awal tahun 1990-an Suharto memperoleh penghargaan dari FAO sebagai negara yang swasembada pangan (beras).

Setelah itu, hasil pertanian mengalami titik balik. Kebutuhan beras semakin meningkat dan tidak bisa dipenuhi dengan produksi lokal hingga menjelang terakhir masa pemerintahan Suharto perluasan penanaman (*ekstensifikasi*) padi di Kalimantan dengan program satu hektar lahan gambut. Kebijakan ini diambil sebagai pengganti dari lahan sawah terus berkurang di Jawa dan Sumatera akibat alih fungsi ke non-pertanian.

Selain perluasan lahan, pemerintah menempuh kebijakan diversifikasi tanaman. Pertama, hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman hama akibat penanaman padi yang terus menerus (tiga kali dalam setahun). Kedua, dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan padi. Pada kenyataannya dengan hasil produksi padi yang berlimpah mengakibatkan nilai tukar beras menurun, kesejahteraan petani tidak terjamin. Pemerintah juga mencoba menentukan standar nilai jual padi dan melakukan terus melakukan pembelian padi, terutama pada musim, oleh Bulog/Dolog dalam rangka menstabilkan harga.

Lebih penting dari kebijakan pertanian tersebut adalah kesejahteraan petani. Selain diukur dari nilai tukar beras terhadap harga *barang konsumsi* yang dibeli petani dan juga nilai tukarnya dengan harga *sarana* produksi (Mubyarto, 1991: 2), diperhatikan pula pola penguasaan tanah. Seberapa besar perubahan pemilikan tanah, di wilayah pedesaan dari tahun 1970-an hingga 1990-an telah terjadi perubahan pemilikan, yaitu polarisasi tanah, jumlah petani gurem (di bawah 0,25 ha) semakin berkurang bergeser menjadi buruh tani, sebaliknya jumlah petani pemilik lahan luas (di atas satu ha) tidak bertambah, tetapi tanah yang dikuasainya bertambah luas dan ditambah pelaku baru yang dikenal dengan *petani absentee* atau *petani berdasi*. Hal ini terjadi bahwa akibat revolusi hijau, biaya produksi pertanian meningkat – diperlukan tanah di atas 0,25 ha agar mencapai titik impas (*break event point*) antara biaya produksi dan hasilnya – akibatnya petani gurem tersebut menjual lahan miliknya, dan memilih menjadi petani penggarap dengan pola penyakapan yang tidak menguntungkan atau menjadi buruh tani yang bekerja pada waktu proses produksi, selebihnya bekerja di luar sektor non-pertanian. Hal ini terlihat pada temuan Mubyarto (1991: 3) bahwa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, dan peningkatan di sektor industri dan jasa antara tahun 1960 hingga 1988.

Petani penggarap dan buruh tani yang ditemui dalam penelitian tidak berbeda jauh dari penggambaran Mubyarto (1991) dan Gunawan Wiradi (1985), meskipun beberapa di antaranya menolak asumsi bahwa peralihan ke sektor pertanian di perkotaan ini merupakan kegagalan mereka dalam memasuki

sektor formal (industri dan birokrasi) (lihat Todaro dan Stilkind, 1991: 4-33). Seperti yang dikatakan oleh mereka, *"Wong saya ini pendidikan hanya SD. Mau jadi apa di kantor, paling-paling pesuruh. Pesuruh pun sekarang banyak yang lulusan SMA, Mas!"* Mereka realitis dan ingin bekerja apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya.

Tabel 6.2.
Tempat Tinggal Pemilik di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Ketintang dan Jambangan 1. Universitas Negeri Surabaya; 2. PJKK – Kereta Api; 3. Real Estat/ Perumahan; 4. Perseorangan.	Kab. Sidoarjo Perseorangan
Harga Sewa	1. Tidak Membayar 2. Rp. 600.000,00	Rp 600.000,00

Sebagian besar dari informan ini mengerjakan sawah dengan menyewa. Sebidang tanah, dengan luas kurang lebih 0,5 ha, mereka sewa seharga Rp 600.000,00. Mereka menyewa dua tahun lamanya, hal itu berarti kurang lebih enam kali panen padi untuk wilayah Ketintang, Jambangan dan Gayung Kebonsari. Wilayah tersebut merupakan sawah beririgasi, tetapi pada sawah tadah hujan, seperti di Menanggal, empat kali panen dan dua kali panen buah, yaitu blewah dan timun mas. Sebagian besar pemilik tanahnya tidak tinggal di kelurahan atau kecamatan tersebut, tetapi tinggal di luar Surabaya.

Untuk perumahan, selain dikenakan biaya sewa – melalui perjanjian ataupun secara lisan – mereka harus bersedia merela-

kan tanamannya diurug bila *real-estat* tersebut memerlukan lahan tersebut untuk dibangun. Kini, hampir separuh lebih daerah Jambangan, sebelah jalan tol, telah diurug, dibangun oleh perumahan (*real-estat*), seperti *Palm Spring Estat* dan KPR Mandiri, serta penjualan tanah kapling dengan fasilitas jalan yang telah dibuat dan lahan yang diurug. Tim peneliti melihat bagaimana tanaman padi yang mulai menguning tersebut diurug. Begitu pula dengan Unesa, kesepakatan yang sama dilakukan juga pada petani penggarap.

Tabel 6.3.
Status Pekerjaan Sebelum dan Sesudah dalam Pertanian
di Surabaya

Di Desa Asal	Buruh Tani	Petani Penggarap	Petani Gurem	Non- Pertanian	Pola Hubungan
Di Surabaya					
Buruh Tani	Surabaya & Luar Surabaya	↓	↓	↓	Upah Harian
Petani Penggarap	Luar Surabaya	Surabaya & Luar Surabaya	Luar Surabaya	Luar Surabaya	Bagi Hasil atau Menyewa
Pola Hubungan	Upah Harian	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	

Tidak semuanya harus menyewa, *PJKA* tidak menetapkan harga sewa pada petani penggarap. Bila ingin menanaminya, mereka gratis, tidak perlu membayar sewa, meski ada ketentuan tidak boleh mendirikan bangunan apapun. Nampaknya, ada kebijakan dari pihak *PJKA*, daripada didirikan bangunan liar yang nantinya susah dibongkar, lebih baik tanah di sekitar rel kereta api

itu dijadikan lahan pertanian. Selain ketentuan tersebut, yaitu tidak mendirikan bangunan permanen, petani penggarap harus bersedia merelakan tanaman bila lahan tersebut diperlukan. Hal ini pernah dilakukan petugas PJKA di Gayung Kebonsari dengan cara melakukan penebangan pada tanaman pisang ketika tanaman tersebut menghalangi pandangan penjaga pintu dan masinis kereta api.

Struktur penguasaan tanah di perkotaan memang berbeda dengan di desa. Di kota, tidak ada lagi golongan tuan tanah yang memiliki tanah ratusan hektar, tidak ada petani kaya yang memiliki tanah di atas 5 hingga 10 ha, seperti pembagian Kroef (1984: 162-163), karena sebagian besar adalah pendatang akibat perluasan kota dalam fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan perniagaan, sehingga berkurang penggunaan lahan untuk pertanian (Weber, 1977: 11-23). Akibatnya, tidak ada lagi penduduk inti (*gogol*) yang memiliki tanah luas, sebagai konsekuensinya “pemilik”-nya adalah perusahaan negara, lembaga-lembaga negara dan perusahaan swasta atau perumahan.

Bila tidak sebagai penyewa, hubungan kerja antara petani penggarap tersebut dan pemilik lahannya adalah penyakapan, yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil di wilayah yang diteliti adalah *maro*, *mertelu* dan *merlima*. Di dalam *maro*, masing-masing memperoleh sebagian yang dari hasil panen, sedangkan dalam *mertelu*, petani penggarap memperoleh sepertiga bagian, dan pemilik lahan dua pertiga, sedangkan *merlima* disepakati dengan *seperlima* bagian milik petani penggarap dan empat bagian lainnya diberikan pada pemilik lahan. Kesepakatan ini bergantung pada luas tanah tersebut dan keterlibatan pemilik lahan. Semakin tanahnya luas, maka bagi hasil menjadi *merlima*, begitu sebaliknya semakin sempit maka bagi hasilnya *mertelu*. Bila hasil bagi lebih besar pada pemilik, maka pemilik mempunyai kewajiban pengadaan pupuk, pestisida, dan sering kali bibit, sebaliknya semakin kecil penerimaan pemilik, maka segala kebutuhan pertanian ditanggung

petani penggarap, begitu pula dengan kerugian akibat gagal panen. *“Wah, kami di sini lebih suka sistem menyewa daripada bagi hasil. Kalau bagi hasil, selama ini kami tidak pernah untung. Kami sering menanggung segala keperluan pertanian. Pemiliknya tinggal datang pada waktu panen. Mendingan sewa. Untung rugi kita tanggung sendiri. Dan, biasanya lebih untung.”* Oleh karenanya, seperti yang telah disebutkan, sebagian besar petani memilih menyewa daripada bagi hasil.

Di dalam menggarap sawah, mereka tidak sendiri. Sebelum bercocok tanam, mereka menyewa traktor milik orang di Sepanjang – di wilayah tersebut, meski sudah mulai bergeser, tetapi sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian penduduk. Selain karena cepat, dan bila dihitung ongkosnya penggunaan traktor jauh lebih murah.

“...Bila dikerjakan buruh tani, satu bidang memerlukan tiga hingga empat orang. Satu harinya orang dibayar duapuluh lima ribu rupiah, belum lagi sarapan dan makan siang dan ditambah dengan satu bungkus rokok. Dengan traktor, cukup membayar seratus ribu. Uang itu sudah termasuk solar dan makannya. Dengan buruh tani, sawah dikerjakan selama dua hari, dengan traktor cukup sehari.”

Meskipun demikian, tidak semuanya bisa dikerjakan oleh traktor. Dalam memperbaiki saluran air dan pematang sawah, petani penggarap harus turun tangan sendiri. Kegiatan dimulai pagi hari sekitar pukul 07.00, sesudah sarapan (makan pagi) petani keluar rumah dengan menenteng bekal makan siang dalam kantong plastik. *Tas kresek* tersebut berisi *rantang* yang dibungkus dengan *serbet* dan botol *aqua* untuk air putih. Ada nasi dan lauk pauk di dalam *rantang*. Sering pula bekal tersebut dibawa oleh isteri pada waktu siang. Sementara itu, cangkul ada di pundak. Dengan jalan kaki, petani tersebut ke sawah. Tak jarang, petani juga membawa sepeda atau sepeda motor *bebek*. Kalau membawa kendaraan, *tas kresek* ditaruh pada sepeda motor, sedangkan cangkul dibawa melintang di sepeda motor. Sebagian sepeda

motor itu dibawa dari desa asalnya, sebagian lainnya membeli di Surabaya. Mereka membeli sepeda motor yang murah, tidak lebih dari tiga juta rupiah harganya. Sesampainya di sawah, setelah istirahat sebentar, mereka turun ke sawah, mencangkul, dan seterusnya seperti yang ada pada tabel 5.4.

Pada waktu menjelang panen, mereka menjaga sawahnya. Caranya membuat *orang-orangan*, kemudian ditarik tali ke gubuknya. Di tali tersebut diberi bendera warna-warni dari *tas kresek* (merah, hitam dan putih) dan kaleng. Ketika burung *gelatik* yang jumlahnya ratusan hingga di tanamannya, ia dengan segera menarik tali itu, sehingga menimbulkan gerak *orang-orangan* dan bunyi dari kaleng yang saling berbenturan. Terkadang, para petani tersebut berjalan di pinggir sawah dengan membawa kayu dan tanah (*lempung*) yang dibuat berbentuk bulat-bulat. Dengan menancapkan tanah itu ke ujung kayu, petani tersebut kemudian mengayunkan, sehingga tanah terlempar jauh ke sawah dan membuat burung terkejut dan terbang.

Ketika tanaman padi sudah berusia lebih dari tiga bulan, bulir-bulir telah menguning dan padat, para petani mulai memanennya. Untuk mengerjakan tersebut, mereka menggunakan buruh tani laki-laki. Setelah disabit, padi langsung dirontokkan di tempat tersebut. Gabah biasanya telah dibeli oleh tengkulak jauh hari sebelum panen tiba, namun petani sering menjualnya sebagian saja, sebagian yang lain digunakan untuk keperluan sehari-hari. Satu kilogram gabah harganya Rp. 1.050,00, sebidang tanah kurang lebih setengah hingga satu hektar bisa mencapai 2 ton, paling rendah pernah mencapai 17 kwintal saja.

Tabel 6.4.
Kegiatan Petani Penggarap Laki-laki dari Pra-Tanam hingga Paska Panen Padi
Di Surabaya

Pekerjaan Petani	Kegiatan dalam Satu Kali Masa Tanam-Panen (4 bulan)				
	Pra-Tanam	Tanam	Tunggu	Panen	Paska Panen
07.00–08.00	ke sawah	ke sawah	ke sawah	ke sawah	Di rumah, mengeluarkan karung gabah
09.00–10.00			Menyiangi	Sebelum panen di gubuk mengusir burung.	Ke lapangan atau jalan dekat sawah
08.00–12.00	Mencangkul orang men-traktor	Menunggu buruh tani (Wanita) menanam	Narik becak/ke warung (bersama isteri)	Waktu panen menunggu buruh tani menyabit	Menjemur gabah; Nyelep, dan mengumpulkan jerami
12.00–13.00	Makan siang di sawah. Bersama dengan pengemudi traktor, dan buruh tani		Pulang ke rumah untuk makan	Makan siang di sawah. bersama buruh tani.	
13.00–14.00	Istirahat sebentar. tidur siang dan merokok	Tidur siang di gubuk	Tidur siang di rumah/ warung	Mengusir burung.	Tidur Siang
14.00–17.00	Mencangkul atau menunggu traktor	Pulang ke rumah, Narik becak atau ke warung	Narik Becak atau ke Warung	Memasukan padi ke dlm karung. Menunggu Tengkulak	Membalik gabah agar keringnya merata Membakar jerami
17.00–20.00	Membayar	Membayar buruh tani. Menutup warung. Menunggu penumpang	Mandi, dan terus Narik becak atau ke Warung	Menghitung jumlah karung gabah, Menerima uang, atau menyimpan dalam rumah.	Memasukkan gabah ke dalam karung.
20.00–04.00	Makan Malam dan Tidur	ke rumah, makan malam dan tidur	Makan malam, nonton TV (bila ada) dan tidur		

Besar kecilnya hasil panen tersebut bergantung pada beberapa hal. Pertama, penggunaan bibit unggul. Sebagian besar mereka menggunakan IR 64 atau *Beramo* (*Mamberamo*) yang berasnya punel dan wangi. Hasilnya besar, namun sering tidak tahan penyakit. Kedua, hal ini bergantung pada pemupukan, bila terlambat atau sedikit, maka hasilnya pun sedikit. Untuk pupuknya, mereka menggunakan pupuk urea. Ketiga, penyakit dan hama, untuk mencegah penyakit mereka memberi pestisida, sedangkan hama, khususnya burung dan tikus, kalau burung dengan menjaga setiap hari sebelum panen. Serangan tikus tidak terlalu besar, seperti di desa. Tikus-tikus itu lebih suka tinggal di got dan di rumah (perumahan). Untuk mencegahnya, mereka memberi racun tikus. Terakhir, gangguan yang sering dihadapi adalah musim hujan. Pada waktu musim hujan, karena salurannya sudah berubah, semakin sempit, sementara itu di daerah sekitarnya (perumahan) lebih tinggi – tepat ditinggikan – sawah sering menjadi *tempat buangan* air hujan, sehingga menggenangi tanaman yang baru berusia satu bulan. Bila tergenang lebih dari tiga hari, maka tanaman itu mati, dan petani pun harus menanam lagi.

Narik Becak atau Buka Warung untuk Mencari Tambahan

Berbeda dengan pekerjaan di luar sektor pertanian, petani lebih memiliki waktu yang longgar. Mereka bekerja pada waktu awal musim tanam, mulai dari merawat tanah dengan membajak, melakukan pembibitan, dan dilanjutkan dengan penanaman. Pada waktu menanam bibit, kaum perempuan melakukannya. Para lelakinya praktis *ngganggur*, cukup mengawasi dan memperhatikan pasokan air. Setelah penanaman, mereka cukup merawat dengan memberi pupuk dan menyiangi (*mantun*) yang dikerjakan. Hal itu berlangsung tidak lebih dari sebulan, setelah itu istirahat, dan pada bulan ketiga mulai persiapan masa panen. Pada waktu musim

panen, mereka mengerjakan seperti dalam tabel 4.4. Pekerjaan semua ini menjadi ringan dan waktu petani penggarap lebih banyak ketika mereka menyerahkan pada buruh tani dan traktor.

Setelah musim tanam, sebenarnya petani juga bisa memanfaatkan untuk mengeringkan gabah, sehingga siap di-*selep*. Masalahnya, kini sebagian besar gabah telah dijual pada waktu panen, hanya sedikit yang dikeringkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga waktu pengolahan hasil panen sedikit menyita waktu. Pada waktu masa tunggu, petani memiliki waktu yang luang, kurang lebih antara satu hingga dua bulan lamanya.

Ada beberapa petani penggarap di Surabaya ini menggunakan waktu tersebut untuk mengurus sawah miliknya di desa. Mereka biasanya merupakan petani *gurem* yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar. *“Kami terpaksa ke Surabaya karena di desa tidak ada lagi sawah yang disewakan. Mereka lebih memilih mengerjakan sendiri. Kalau di sini banyak tanah, tetapi kban tidak ada yang mau jadi petani. Karena itulah, kami memilih menyewa di sini.”* Bila sawah di Surabaya telah ditanami, selebihnya diserahkan pada anak atau istrinya untuk mengawasi, mereka kembali ke desa untuk mengolah tanahnya dan menanaminya, kemudian diserahkan pada anaknya yang lain atau kerabatnya untuk diawasi. Karena jaraknya tidak jauh, mereka bisa bolak-balik antara Surabaya dan daerah asalnya.

Seperti yang telah disebutkan pada tabel 5.4., petani penggarap yang tidak punya sawah di desanya atau buruh tani lebih memilih mengisi waktunya untuk menjadi penarik becak atau masuk ke sektor bangunan, menjadi kuli bangunan di perumahan sekitar sawahnya. Becak tersebut disewa dari pemilik di sekitar tempat tinggalnya dan bisa dibawa pulang. Becak itu disewa dengan membayar setiap hari Rp. 5.000,00 dan segala kerusakan ditanggung penyewa. Mereka bisa menyewa karena ada penghubung yang juga penarik becak. Penghubung tersebut menjadi jaminan atau dasar kepercayaan dari pemilik becak, selain

dilihat pula *keajegan* membayar setoran. Penghubung tersebut adalah tetangganya di Surabaya atau teman sekampungnya (di daerah asalnya). Ada beberapa petani juga membeli becak tersebut seharga satu juta rupiah. Rute mereka antara Pasar Wonokromo hingga ke perumahan sekitar tempat tinggalnya, seperti Gayung Kebonsari, Jambangan dan Ketintang. Satu hari, dari pagi hingga malam hari, dengan istirahat siang hari dan sore hari, mereka bisa mengumpulkan uang (bersih) hingga Rp. 30.000,00.

Pagi hari mereka keluar rumah, menunggu penumpang di perempatan jalan. Memang, mereka harus bersaing dengan *len*, *mikrolet angkutan kota*. Meskipun demikian, mereka nampaknya memiliki segmen tersendiri, biasanya penumpangnya membawa barang yang besar dan berat atau jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 1-3 km dari tempatnya mangkal, sementara itu juga tidak dilalui oleh mikrolet. Bila di perempatan tempat mangkalnya terdapat jumlah penarik becak yang besar, maka diatur di kalangan penarik tersebut secara bergiliran, bahkan mereka membentuk paguyuban penarik becak dan membatasi jumlahnya agar pendapatan stabil. *“Memang rezeki itu yang ngatur Tuhan. Tapi, kalau tidak punya paguyuban, Kalau tidak begitu, semua ingin jadi penarik becak. Padahal jumlah penumpang tetap.*

Beberapa di antara petani penggarap yang membawa keluarga, khususnya isterinya ke Surabaya dan sedikit modal, membuka warung di sekitar sawah. Warung tersebut didirikan dengan tidak secara permanen, hanya memerlukan *rombong* dengan biaya seharga satu juta rupiah bila baru, atau lima ratus ribu rupiah dengan bahan bekas. Harga tersebut tidak termasuk ongkos kerjanya – *rombong* tersebut dibuat sendiri. *Rombong* itu merupakan kotak besar dengan dua atau tiga roda di bawahnya, sehingga bisa dipindahkan. Di atasnya *rombong* itu diberi empat tonggak untuk menahan *terpal* atau *plastik* sebagai penutup dari panas matahari dan hujan. Di dalam *rombong*, terdapat rongga

kosong untuk barang-barang dan ditutup dengan papan yang dikunci dengan *gembok*.

Malam hari biasanya petani penggarap membawa sepeda motor atau becak berbelanja di Pasar Keputran atau Pasar Wonokromo. Karena berjualan makanan, mereka berbelanja sayuran dan daging, sedangkan rokok bisa diambil pada toko-toko besar dengan harga miring. Jumlah rokok yang dibelinya pun sedikit, hanya cukup untuk satu minggu. Pada waktu subuh isterinya bangun dan menanak nasi, merebus sayuran, biasanya pagi hari menu makanan yang mudah dibuat adalah *pecel*, sedangkan *peyek* sudah dibuat sebelumnya atau diganti dengan *krupuk* putih. Selain *pecel*, biasanya mereka membuat rawon atau masakan Jawa lain yang mudah diolah.

Sekitar jam 6.30 pagi, masakan telah matang, peani penggarap dan isterinya telah *sarapan*, kemudian dengan becak makanan tersebut diangkut, biasanya *rombong*, terutama bila besar, ditinggal di pinggir jalan, sedangkan perlengkapan dibawa pulang. Sekitar jam 7 pagi warungnya sudah buka, pelanggannya biasanya adalah buruh bangunan yang mengerjakan di perumahan. Buruh tersebut biasanya membuat nasi sendiri, tetapi sering pula makan di warung, terlebih lagi bila siang hari (*laut*). Selain buruh, pembelinya juga orang-orang perumahan yang tidak sempat membuat sarapan pagi, dan orang yang melewati jalan tersebut (baik berangkat kerja ke kantor atau pada waktu pulang).

Pulang Kampung Membawa Uang dan Harga Diri

Seperti yang disebutkan pada bagian awal bab ini, selain dari Surabaya, mereka berasal dari kota-kota di sekitar Surabaya, seperti daerah Pantura (Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan), ada pula yang berasal dari Jawa Pedalaman (Kab. Nganjuk dan Kab. Tulungagung). Jarak antara kota-kota tersebut dan Surabaya tidak lebih dari 200 km. Seperti halnya di kota-kota besar lainnya,

arus transportasi umum dari dan ke Surabaya hampir tidak pernah berhenti. Terminal bus Surabaya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo untuk bagian Timur dan Jawa Pedalaman, yaitu di Terminal *Bungurasih* (Purabaya), sedangkan kendaraan umum dari kota-kota Pantura di sebelah kota Surabaya berhenti terakhir di Terminal Osowilangun. Dari Terminal Osowilangun, terdapat bis kota lewat jalan tol ke Terminal Bungurasih, akan tetapi pada waktu malam hari (lebih dari pukul 18.00) kendaraan umum tersebut, dalam hal ini bis langsung ke Terminal Bungurasih, karena tidak ada kendaraan yang masuk ke Surabaya dari terminal tersebut.

Oleh karenanya, kebutuhan mereka untuk pulang kampung sudah tidak menjadi kendala. Beberapa pun orang yang akan menempuh perjalanan ke luar Surabaya akan dilayani dalam Terminal Bungurasih. Namun demikian, pada waktu menjelang hari raya calon penumpang akan berdesak-desakan dan berebut kendaraan (bis) ke tempat asalnya. Jalan-jalan ke luar kota pun menjadi padat. Biasanya, pemudik menyiasati pulang pada waktu hari H, pasti Terminal Bungurasih akan nampak lengang. Kota-kota daerah asal dari petani penggarap ini bisa ditempuh dalam waktu 3 jam pada siang hari dan 2 – 2,5 pada waktu pagi hari. Kecuali ke Bojonegoro, kendaraan umum (bis) selalu ada. Kendaraan ke Bojonegoro hanya terbatas dari pagi hari hingga pukul tujuh malam.

Beberapa petani penggarap yang memiliki sawah di daerah asalnya masih memiliki ikatan yang kuat dengan daerahnya. Mereka kembali ke daerah asal tidak tergantung pada waktu hari raya. Keharusan kembali pada waktu hari raya memang merupakan tradisi budaya petani. Menurut Eric Wolf (1985), tradisi ini mengikat kembali hubungan antar individu, antara individu dan keluarga, antar keluarga, dalam pola interaksi kemasyarakatan. Ketidakhadiran individu akibat perpindahan ke kota mengurangi interaksinya dengan masyarakat se-desanya, renggang dan perlu

diikat kembali. Hal yang sama dicermati oleh Clifford Geertz (1989), ikatan hubungan itu tidak saja kepada saudara dan tetangganya yang masih hidup, tetapi juga kepada leluhurnya yang dimulai pada waktu menjelang puasa, yaitu *nyadran*. Dalam aktivitas membersihkan kubur ini, seluruh jaringan kekerabatan *alur waris* tersambung kembali. Sementara itu, *rijaya* bukan sekedar *idul fitri*, perayaan satu syawal sebagai tanda berakhirnya bulan puasa dan kembali ke *fitrah*-nya, tetapi sebagai *slametan urip*, ucapan syukur atas keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga. Semua individu didamaikan, direkat kembali sebagai komunitas petani yang telah bergeser.

Kewajiban-kewajiban sosial inilah masih melekat, meski mereka telah berpindah ke kota sekalipun. Namun, pada kasus ini sebagian petani penggarap yang didesanya sebagai petani gurem memiliki ikatan yang lebih kuat karena tanah yang dimilikinya. Tanah tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan pada kerabatnya, anak, isteri atau tetangganya untuk dikerjakan, tetapi setelah habis tanam di Surabaya ia pergi ke desa untuk mengolah tanah dan menanam padi di lahannya. Hal itu bisa berlangsung selama satu minggu lamanya, sementara itu lahan di Surabaya akan dijaga oleh buruh tani, sesama petani penggarap se-desa atau isteri dan anak-anaknya.

Pada waktu pulang ke desa dalam keperluan ini, mereka membawa uang secukupnya dan sedikit oleh-oleh untuk kerabatnya. Ketika kembali ke Surabaya, sering pula mereka membawa hasil bumi dari desanya, seperti kelapa dan beras. Berbeda pula pada waktu hari raya, mereka akan membawa uang dan oleh-oleh yang jauh lebih banyak. Di luar uang tranpor, uang saku mereka bisa mencapai di atas satu juta rupiah (informan enggan menyebut besar riil nilai uang tersebut).

Karena biasanya kembali ke Surabaya seminggu setelah lebaran, semua harta bendanya ditiptkan agar dicuri. Bila memiliki warung, maka rombongan dibawa pulang ke tempat

kontrakan, begitu pula becak dikembalikan ke pemiliknya atau diparkirkan di Wonokromo dengan sistem harian. Untuk rumah berikut isinya, mereka serahkan kepada pemilik rumah untuk menjaganya (*"dereke titip"*). Pemilik biasanya tinggal tidak di lingkungan/pekarangan rumah tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, petani tersebut menyediakan khusus oleh-oleh dari desa dan diberikan pada saat kembali dari desa.

Penutup:

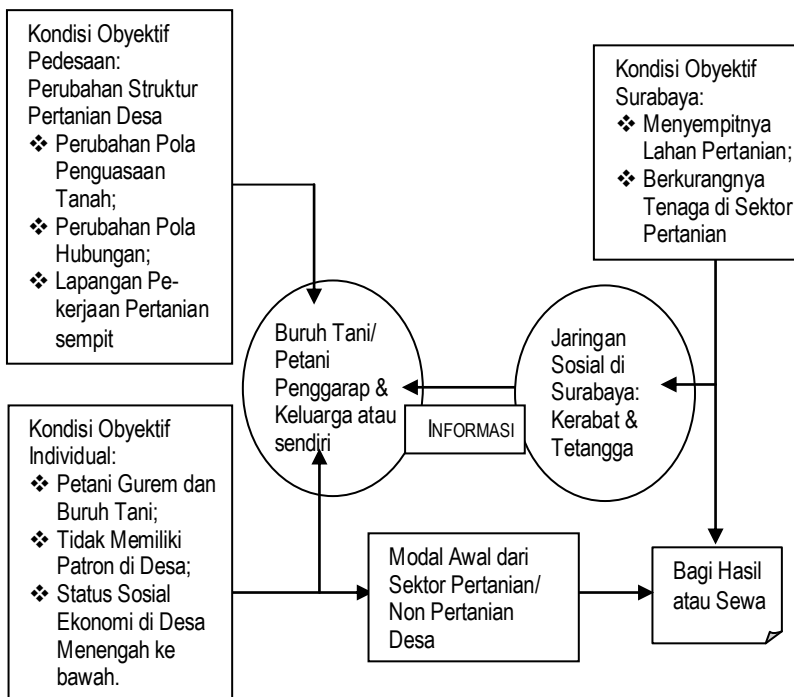
Analisis Ringkas tentang Sektor Pertanian di Kota

Pergeseran struktur penggunaan lahan di perkotaan sebenarnya terjadi tidak saja di Surabaya, tetapi seluruh kota di Indonesia. Bila dalam catatan sejarah, daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat semula merupakan daerah pertanian yang subur, masyarakat aslinya, Betawi, merupakan petani buah yang andal. Namun, pada tahun 1960-an hingga sekarang telah terjadi alih fungsi lahan menjadi bangunan perkantoran dan perumahan, dan sebagian lain menjadi pabrik. Sawah Besar di dekat wilayah Gambir dan Kebon Jeruk tinggal nama yang mengingatkan fungsi lahan tersebut, begitu pula kampung Condet yang semula dipertahankan keasliannya telah mulai menghilang (perhatikan kasus petani buah di Jakarta oleh Koentjaraningrat, 1976: 97-188). Penetapan cagar budaya tersebut hanya memberi sedikit rintangan arus alih fungsi lahan. Kini, masyarakat Betawi tergusur ke Selatan, ke arah Depok, seperti Setu Babakan, Srengseng Sawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan (*Jawa Pos*, 26 Oktober 2004, "Pariwisata. Pemprov Dirikan Museum Betawi"), meskipun terdapat pula kantong-kantong di perkotaan. Untuk mempertahankan eksistensi kulturalnya, mereka membentuk organisasi kemasyarakatan, *Forum Betawi Rempug*.

Begitu pula yang digambarkan oleh Setyobudi (2001) di Yogyakarta, sawah-sawah lambat laun mulai menghilang dari kota

tersebut. Salah satu di antaranya yang mempercepat proses tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar. Jalan lingkar tersebut kemudian memudahkan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan. Wilayah Sleman dan Bantul di pinggir kota Yogyakarta telah berubah menjadi perumahan dan kampus. Hal yang sama terjadi di Semarang, Medan, Makasar dan kota-kota lain di Indonesia. Artinya, jumlah petani di kota pun lambat laun juga berkurang dan menghilang, pekerjaan tersebut menjadi langka. Mereka yang tidak mempunyai akses ekonomi perkotaan akibat kondisi strukturalnya, seperti pendidikan, akan memasuki sektor informal dan sektor yang kurang lebih serupa, yaitu menjadi buruh bangunan.

Bagan 6.1.
Perubahan dari Petani Desa ke Petani Kota



Sementara itu, di wilayah pedesaan, seperti yang telah dicermati oleh ahli-ahli pedesaan, telah terjadi perubahan struktur penguasaan tanah. Mulanya, perubahan itu disebabkan pola pewarisan kemudian diikuti oleh perumitan-perumitan pengolahan sebagai strategi adaptifnya. Pola yang demikian ini diistilahkan oleh Clifford Geertz (1983) sebagai *invulasi pertanian*. Pada tahap selanjutnya, revolusi hijau dan biru telah menciptakan komersialisasi dalam pertanian, hubungan patron-klien menjadi runtuh, dan terus berlanjut hingga memunculkan polarisasi penguasaan tanah (lihat Wiradi, 1985) dan petani berdasi.

Akibatnya, kelompok petani gurem dan buruh tani tidak memiliki akses ekonomi di lingkungan sendiri. Dengan jaringan sosial yang dimilikinya, mereka berpindah ke kota, terlepas ada tidaknya tujuan awal untuk memasuki sektor formal (industri) atau telah ada kesadaran (empati) atas kemampuannya untuk memasuki sektor pertanian di kota, buruh pabrik dan buruh bangunan. Di dalam kasus penelitian ini, mereka memasuki sektor pertanian yang “sudah” ditinggalkan oleh masyarakat kota, kecuali mereka yang masih bertahan, meski hanya menjadi buruh tani. Dengan modal yang dibawa dari desa, mereka tidak lain menjadi buruh tani semata tetapi telah menjadi petani penggarap.

Menjadi petani penggarap merupakan salah satu strategi adaptif mereka di perkotaan. Ada strategi lainnya, yaitu membuka warung dan narik becak. Pekerjaan yang mudah dan/atau tidak jauh dari lingkungan pedesaannya. Hasilnya, selain untuk mengembangkan bodal usaha, mereka juga mengirimkannya ke daerah asalnya, bahkan ada pula yang menabung dan berharap dapat membeli sawah tersebut dari pemilik lahan tersebut. Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi daya tarik bagi mereka yang memiliki keahlian yang sesuai dengan sektor ekonomi perkotaan, tetapi juga menghimpun mereka yang tidak memiliki keahlian.

Daftar Pustaka

Assafitri, Nur Laily.

- 2004 Tradisi Tegal Desa di Kelurahan Gades, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya tahun 1970-2000. **Skripsi**. Surabaya: FIS-Unesa.

BPS Jawa Timur

- 1998 **Jawa Timur dalam Angka 1997**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.
2000 **Jawa Timur dalam Angka 1999**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.
2001 **Jawa Timur dalam Angka 2000**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.
2003 **Jawa Timur dalam Angka 2002**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

Faber, G.H. von.,

- 1931 **Oud Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's eeste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van gemeenteraad (1906).
1933 **Nieuw Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's voornamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931.

Geertz, Clifford.

- 1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia**. Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
1989 **Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa**. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta; Pustaka Jaya.

Handinoto.

- 1996 **Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940**. Yogyakarta: Andi.

Ismawan, Bambang.

- 1985 Pendidikan yang Diperlukan untuk Pengembangan Pedesaan. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: Rajawali.

Koentjaraningrat.

- 1976 Petani Buah-buahan di Selatan Jakarta. Dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat, **Indonesia. Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia.

Kroef, Justus M. van der.

- 1984 Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. **Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa**. Jakarta: Gramedia.

Kustiwan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1 Tahun XXVI.

Labib, Muhammad.

1990 Beberapa Masalah Kebijakan Perbaikan Pemukiman di Perkampungan Kota Surabaya. **Masyarakat, Kebudayaan dan Politik**. No. 4 tahun III. Surabaya: FISIP Unair.

Lee, Everett S.,

1980 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta: PPSK UGM.

Mubyarto,

1991 **Menerawang Masa Depan Pertanian Indonesia**. dalam Mubyarto, et.al. Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan. Yogyakarta: P3PK UGM.

Putra, Shri Ahimsa.

1985 Urbanisasi sebagai Proses Budaya. **Bulletin Antropologi**. No. 1.

Rusli, Said.

1985 **Pengantar Ilmu Kependudukan**. Jakarta: LP3ES.

Setyobudi, Imam.

2001 **Menari di Antara Sawah dan Kota. Ambiguitas Diri, Petani-petani Terakhir di Yogyakarta**. Magelang: Inodnesiaterra.

Sukadana, A.Adi.

1983 **Antropo-ekologi**. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekadri, Heru.

1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan**. Surabaya: IKIP Surabaya.

Tjandrasasmita, Uka.

2000 **Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia**. Kudus: Menara Kudus.

Todaro, Michael P., dan Jerry Stikind.

1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota**. Jakarta: Gramedia.

124 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Verslag van den Toestand der Stadsgemeente Soerabaja over 1930.
Weltevreden-Soerabaia: NV Koninklijke Boekhandel en Drukkerijen G.
Kolff & Co.

Weber, Max.

1977 Apa yang disebut Kota? Dalam Sartono Kartodirdjo. **Masyarakat Kuno dalam Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Wolf, Eric.

1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Jakarta: Rajawali.

Wiradi, Gunawan.

1984 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 7

Petugas *Cleaning Service*

Berharap di Sektor “Formal”, meski Harus Cerdik dan Tabah

Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo,
dan Arief Sudrajat

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi fenomena perkotaan yang selalu hadir. Dilihat dari jumlahnya, kemiskinan di perkotaan akan bertambah karena dua hal yaitu: pertama, penambahan alamiah—lebih banyak kelahiran daripada kematian, dan yang kedua, migrasi orang-orang pedesaan yang miskin ke kota. Dengan kata lain, golongan miskin di kota-kota besar di Indonesia meliputi para migran dan orang-orang yang lahir di sana. Jumlahnya sangat tergantung dari definisi yang diberikan kepada kemiskinan. Collin Clark dan Sayogyo mengajukan ukuran yang hampir sama untuk mengukur kemiskinan. Sayogyo (1978: 3-14), misalnya, mengukur kemiskinan dengan menggunakan ukuran setara dengan beras. Orang disebut miskin jika penghasilannya kurang dari 320 kg beras di desa dan kurang dari 480 kg beras di kota tiap jiwa tiap tahun. Sayogyo juga membedakan golongan berpenghasilan rendah ini menjadi tiga kategori yaitu: miskin, miskin sekali, dan sangat miskin. Namun ukuran ini tak dapat menjelaskan meningkatnya jenis kebutuhan pokok lainnya, yang tentunya ikut berubah dengan meningkatnya pendapatan.

Collin Clark, seperti dikutip oleh Papanek (1986: 223) menggunakan ukuran nilai gizi yang dibutuhkan oleh setiap orang setiap hari. Yang dibutuhkan oleh setiap orang sehari adalah 1.821 kalori. Untuk memenuhinya dibutuhkan beras per tahun 320 kg atau 0,88 kg per hari. Clark hanya memfokuskan kebutuhan makan, kebutuhan lainnya diabaikan.

BPS (Biro Pusat Statistik) memperbaiki ukuran tersebut dengan menambahkan komponen konsumsi non-pangan. BPS menggunakan ukuran setara dengan 2.100 kalori dan menambah komponen konsumsi non-pangan sebesar 6,12% hingga 17,96%. Ukuran ini sebenarnya menggunakan kriteria kebutuhan pangan minimum (*emergency food budget*), yang hanya layak diberlakukan pada situasi darurat.

Jumlah orang miskin di perkotaan sangat tergantung pada ukuran-ukuran tersebut. Jika nilai dari ukuran-ukuran itu diturunkan, maka jumlah orang miskin juga akan turun, demikian sebaliknya. Mereka yang termasuk dalam golongan berpenghasilan rendah ini adalah orang kecil yang bukan orang elit dan bukan orang kelas menengah. Mereka adalah pekerja yang tidak terdidik atau berpendidikan rendah, pegawai rendah, penjaja, tukang becak, pekerja kebersihan, dan *element of lumpen proletariat who are characterized by their struggle to make ends meet simply in order to to fulfill their subsistence needs* (Cohen, 1975: 51).

Golongan berpenghasilan rendah ini adalah sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat, daerah atau negara, yang mendapatkan penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan minimum yang seharusnya mereka penuhi. Mereka, baik pendatang maupun bukan pendatang, mempunyai cara hidup atau kebudayaan sendiri yang berbeda dengan cara hidup atau kebudayaan golongan berpenghasilan tinggi. Yang dimaksudkan kebudayaan di sini adalah kebudayaan kemiskinan yang terwujud dalam lingkungan kemiskinan yang mereka hadapi. Dengan

kebudayaan kemiskinan ini mereka dapat terus mempertahankan kehidupannya.

Di Indonesia penelitian tentang kemiskinan di perkotaan sudah cukup banyak. Misalnya, pada pertengahan tahun 1980-an sepuluh peneliti peserta PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial) Jakarta melakukan penelitian secara terpadu tentang kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah di tiga wilayah di Jakarta Timur, yaitu: Pulogadung, Jatinegara, dan Klender. Mereka di antaranya Sundoyo Pitomo, Bambang S. Sunuharyo, Agusfidar Nasution, Endang Purwaningsih (lihat Sumardi dan Evers, 1985). Penelitian-penelitian tersebut menentukan apa saja yang oleh penduduk berpendapatan rendah di Jakarta dianggap sebagai kebutuhan dasar, dan seberapa jauh mereka merasa puas, di samping perekonomian rumahtangga di perkotaan. Beberapa aspek kebutuhan dasar yang diteliti oleh peneliti peserta PLPIIS antara lain: aspek pengeluaran dan pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang intensif.

Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah merasa tidak cukup penghasilan dan penerimaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka membuat skala prioritas kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan pangan menempati urutan pertama. Hasil yang hampir sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh LP3ES dan FEUI (lihat Papanek dan Jakti, 1986). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan penduduk berpenghasilan rendah dibelanjakan untuk keperluan makan dan rokok. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada masyarakat berpenghasilan rendah proporsi terbesar dari pendapatannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan.

Penelitian Evers (1993) terhadap 1.201 rumahtangga di dua daerah hunian liar di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat

“produksi subsisten di kota” untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah. Produksi subsisten umumnya terwujud dalam produksi pangan, termasuk perikanan dan memelihara ternak. Lea Jelinek (1995) selama tigabelas tahun melakukan pengamatan tentang sebuah kampung di Jakarta mulai muncul, kembang hingga punah. Kampung itu Kampung Kebun Kacang. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana sebuah komunitas miskin di kampung itu mencoba bertahan di tengah-tengah upaya pemerintah kota untuk meratakan kampung itu. Murray (1994) dan Effendi (1993) melakukan penelitian terhadap kampung miskin di dua lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan antropologis Murray meneliti Kelurahan Manggarai dan Bangka untuk melihat dampak pembangunan terhadap kehidupan warga kampung miskin. Penelitian ini memfokuskan pada wanita yang dilihatnya sebagai hasil dari proses pembangunan. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak wanita bekerja di sektor informal, bahkan ditemukan banyak wanita yang berorientasi pada kebudayaan metropolis dengan menjadikan dirinya komoditas seksual. Effendi dalam penelitiannya memfokuskan pada pelacur, gali, dan pengusaha warung di daerah Wonosito Kotamadya Yogyakarta. Meskipun penelitian Effendi ini sudah mengungkap bagaimana masyarakat Wonosito mampu mempertahankan kehidupannya dengan membentuk sistem kehidupan, namun tidak secara khusus meneliti bagaimana mereka mempertahankan hidup. Penelitian Effendi ini dilengkapi oleh penelitian Chris Manning dan kawan-kawan (1996) di kota yang sama, tetapi fokusnya berbeda. Penelitian Manning memfokuskan pada kegunaan sector informal bagi analisis perilaku ekonomi dan struktur social ekonomi di kota dengan mengamati struktur pekerjaan dan kaitannya dengan tingkat penghasilan, stabilitas pekerjaan, dan status social ekonomi keluarga pada sebuah masyarakat kota.

Masih banyak penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan tentang penduduk miskin di perkotaan, antara lain: Gavin Jones (1986) dengan “Demografi dalam Kemiskinan di Kota, Graeme Hugo (1986) “Migrasi Sirkuler,” Gordon Temple (1986) “Migrasi ke Jakarta,” Lea Jelinek (1986) “Sistem Pondok dan Migrasi Sirkuler,” dan John L. Taylor (1993), “Kampung-kampung Miskin dan Tempat Pengelompokan Penghuni Liar di Kota-kota Asia Tenggara,” serta P de Angelino (1993) “Perbudakan Melalui Hutang Buruh pada Perusahaan Batik di Jawa.” Penelitian dan tulisan itu mengungkap dan menganalisis berbagai aspek dari kehidupan masyarakat miskin di perkotaan, namun belum ada yang secara khusus memfokuskan pada upaya yang dikembangkan oleh penduduk berpenghasilan rendah untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah kerasnya persaingan hidup di kota. Karena itu, penelitian ini akan mencoba memfokuskan pada upaya-upaya yang dibangun penduduk berpenghasilan rendah, dalam hal ini pekerja kebersihan, untuk mempertahankan kehidupannya di kota Surabaya ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004.¹⁰ Penelitian tentang upaya bertahan hidup petugas *cleaning service* ini mengambil lokasi di Surabaya. Ada beberapa alasan secara metodologis pemilihan lokasi tersebut. Pertama Surabaya sebagai kota besar, kemiskinan menjadi persoalan serius dan proporsi orang miskin di kota ini juga cukup besar. Surabaya dipilih diharapkan dapat menggambarkan karakteristik kemiskinan kota. Kedua, peneliti sudah cukup lama bertempat tinggal di Surabaya, sehingga pengetahuan tentang lokasi dan masalah kemiskinan cukup

¹⁰ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Arief Sudrajat.

memadai. Pengetahuan seperti ini penting untuk memperlancar proses penelitian secara intensif dan peneliti dapat mendalami masalah yang sedang diteliti. Pertimbangan lain adalah dari aspek biaya, tenaga dan waktu. Di dalam penelitian ini yang menjadi *informan* adalah tenaga-tenaga kebersihan yang sehari-hari bekerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Karena jumlah tenaga kebersihan di Universitas Negeri Surabaya jumlahnya hanya 40 orang, maka dalam penelitian ini ada sejumlah pekerja diwawancara secara mendalam. Melalui wawancara dan pengamatan, pada setiap informan disusun *life history* yang menggambarkan mulai dari proses migrasi, pemilihan pekerjaan hingga upaya bertahan hidup, mulai dari pencarian pekerjaan tambahan hingga pengeluaran untuk biaya hidupnya.

Fungsi dari Waktu Kerja Berlebih dan Pendapatan

Kehidupan yang keras diperkotaan memungkinkan banyak orang memiliki siasat untuk mempertahankan kehidupan kesehariannya. Demikian juga yang telah dilakukan oleh sebagian besar pekerja *cleaning service*. Model siasat yang dibangun oleh mereka beragam tergantung situasi dan kondisi individu tersebut. Secara umum, pekerjaan *cleaning service* di Unesa dijadwalkan bekerja sejak hari Senin hingga hari Jum'at dan dimulai pukul 06.30 sampai 12.00, kemudian istirahat dan dilanjutkan bekerja mulai jam 13.00 sampai 15.00. Pada hari Sabtu dan Minggu, mereka dibebaskan bekerja dan merupakan hari libur mereka. Hari kerja ini terkait dengan perkuliahan mahasiswa dan jam kerja di Unesa.

Begitu ketatnya jadwal yang dibuat untuk mereka ternyata tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Setiap pekerja mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 325.000,- setiap bulannya. Uang sebesar itu bagi masing-masing pekerja harus diterima dengan lapang dada dan dimanfaatkan secara efisien. Kemampu-

an melakukan efisiensi terhadap penghasilan yang sangat kecil menciptakan berbagai bentuk kekreativitasan bagaimana mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan hidup.

Para pekerja cleaning service di UNESA tidak didominasi oleh satu kelompok atau jenis kelamin tertentu, namun terdiri dari beragam kelompok maupun jenis kelamin. Kelompok-kelompok tersebut terpilah ke dalam kelompok para bujangan yang tidak memiliki keluarga di Surabaya, kelompok bujangan yang bertempat tinggal di Surabaya, kelompok berkeluarga laki-laki, kelompok berkeluarga perempuan.



Gambar 7.1.
Seragam: Formalisasi Tukang Kebun

Siasat Kemiskinan Bujangan: Antara Hidup Menumpang dan Membangun Relasi

Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pengaman Sosial

Perkembangan yang sangat pesat yang terjadi di kota Surabaya, ternyata tidak begitu saja meminggirkan berbagai lembaga semacam pondok pesantren, bahkan kehadiran lembaga pondok pesantren sering merupakan acuan penting bagi para pendatang migran dari luar Surabaya. Hal itu disebabkan pondok pesantren memiliki tradisi yang kental untuk selalu saling membantu terhadap sesama terlebih terhadap para musafir yang memang menurut ajaran agama perlu dibantu. Pandangan orang-orang pondok pesantren yang baik dan selalu menyambut dengan tangan terbuka terhadap para pendatang memungkinkan beberapa pendatang dapat singgah dan tinggal di beberapa pondok pesantren yang tersebar di seluruh kota Surabaya.

Demikian juga dalam pandangan beberapa pekerja *cleaning service* di UNESA, menurut mereka, lembaga pondok pesantren merupakan lembaga yang sedikit banyak dapat membantu kehidupan mereka pada masa-masa awal menjalani kehidupan dan tinggal di kota Surabaya. Pondok pesantren merupakan tumpuan harapan awal mereka. Di samping bekerja di UNESA, mereka dapat mengaji di malam harinya.

Dari beberapa pondok pesantren yang tersebar di sekitar UNESA, Pondok Pesantren Al Idris yang berada di daerah Karangrejo Lama merupakan satu-satunya pondok pesantren yang bersedia menampung beberapa pekerja *cleaning service* untuk tinggal dan mengabdikan di tempat itu. Seluruh pekerja *cleaning service* yang diijinkan tinggal di dalam Pondok Pesantren Al Idris tersebut merupakan kelompok para bujangan dan mereka berasal dari luar kota.

Rencana kedatangan pertama mereka ke Surabaya, sejak awal memang berkeinginan untuk bertempat tinggal di pondok

pesantren. Dengan tinggal di pesantren, di samping dapat bekerja di luar pondok, mereka dapat mengabdikan dan mengaji. Bahkan menurut mereka, dengan tinggal di pondok, mereka dapat segera memecahkan berbagai permasalahan hidup pelik yang mereka hadapi setiap hari karena suasana pondok yang penuh kekeluargaan dan saling bantu membantu sangat mendukung. Apalagi suasana kota Surabaya bagi pekerja *cleaning service* dianggap sebagai kota yang asing dan penuh kekerasan.

Prosedure untuk bisa tinggal di pondok pesantren tidaklah mudah. Seseorang dapat membangun hubungan dengan secara langsung menemui kyai pondok pesantren tersebut atau diantar oleh seorang kenalan yang telah terlebih dahulu mondok di tempat itu untuk menemui kyainya. Meski hubungan telah dibangun, para pekerja *cleaning service* tidak bisa begitu saja langsung mendapatkan kamar atau ruang sendiri namun mereka harus mengawalinya dengan proses pengabdian yaitu dengan membantu berbagai macam pekerjaan di pondok terlebih dahulu. Namun pada umumnya para pekerja ini membantu membersihkan seluruh wilayah pondok yang ditempati. Selepas mereka membantu pekerjaan di pondok seperti membersihkan, mereka juga ikut mengaji dan malamnya mereka menginap di tempat seadanya yang ada di ruang-ruang kosong pondok tersebut seperti istirahat di halaman belakang masjid pondok.

Atas jasa para pekerja tersebut ikut mengabdikan membersihkan pondok setiap hari, akhirnya usaha mendapatkan respon dari pemilik pondok. Sebagai imbalan dari kyai atau pengurus pondok, mereka akhirnya mendapatkan ruang atau kamar apa adanya untuk istirahat tanpa dibebani dengan uang biaya hunian setiap bulan. Penerimaan yang total dari pihak pondok terhadap kehadiran mereka di wilayah pondok pesantren, bagi mereka begitu sangat berharga. Bagaimanapun dengan dibebaskannya mereka dari uang pembayaran hunian, mereka dapat menghemat uang yang sedianya akan dialokasikan sebagai uang kost. Implikasinya,

para pekerja dapat menabung dan uang yang mereka kumpulkan akan mereka berikan kepada keluarga yang ada di desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anang: *“Habis bekerja di UNESA, saya juga bersih-bersih di pondok. Jadi saya nempati pondok ini tidak dipungut biaya. Lumayan mas, yang penting ada tempat tidur, daripada ngekost. Duitnya nanti kan bisa dikirim ke orang tua”*.

Di balik keleluasaan para pekerja tinggal di pondok, bagaimanapun membawa konsekuensi bagi kehidupan kesehariannya. Dibandingkan dengan teman-teman pekerja lainnya, Anang merupakan salah satu pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaan sampingan. Hal itu disebabkan, selepas dia bekerja dari UNESA, ia harus melakukan kewajibannya di pondok. Waktunya habis untuk membersihkan pondok. Implikasinya, penghasilan yang ia dapatkan hanya sebatas yang ia terima dari UNESA. Di luar itu tidak ada penghasilan sama-sekali. Bagi Anang, dengan melakukan pekerjaan sambil berarti ia telah merusak akad yang telah dibuat dengan pemilik pondok. Sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan dengan pemilik pondok yang telah memberi keleluasaan menginap di sana, anang menerima dengan ikhlas jumlah penghasilan yang hanya sebesar ia terima dari UNESA saja. Di samping itu ia bisa beribadah di pondok itu.

Agar jumlah uang yang ia tabung setiap bulan dapat berlebih, Anang dan teman-temannya perlu menyiasatinya yaitu dengan mengurangi tingkat konsumsi sehari-hari dan mengatur uang makan sehari-hari. Caranya yaitu bekerja sama dengan teman di pondok untuk masak bersama. Biaya yang dikeluarkan untuk masak bersama dapat lebih ditekan bila dibandingkan dengan membeli makanan dari luar.

Membangun Relasi dengan Mandor

Kehadiran Mandor pekerja tidak selamanya mencitrakan suatu sosok yang menakutkan bagi para pekerja *cleaning service*.

Meski ada beberapa pekerja yang masih menganggap posisi mandor sebagai posisi yang menakutkan namun ada beberapa pekerja yang menganggap kehadiran para mandor sebagai *partner* bekerja. Tugas mandor adalah mengawasi para pekerja yaitu dengan melakukan proses absensi beberapa kali dalam sehari. Adanya deskripsi pekerjaan mandor seperti inilah, menurut beberapa pekerja sangat ditakuti. Bagaimanapun pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat mandor menyebabkan para pekerja akan diperingatkan, mengulangi pekerjaan bahkan akan menerima gaji yang tidak seperti biasanya atau dikurangi. “*Mas, lha wong saben dino diprekso karo mandore, yo gak iso nyelintung titik*” (Mas, karena setiap hari diperiksa oleh mandor, ya tidak bisa menyimpang sedikit)

Bagi Farid, adanya ancaman semacam itu tidak perlu ditakuti namun memang merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Kalau memang para pekerja serius bekerja, maka hal-hal yang mereka takuti tidak akan terjadi, misalnya bekerja dengan bersih atau selalu tidak pernah absen. Ia menunjukkan bahwa dirinya yang tidak pernah melanggar aturan yang dibuat oleh mandor, hingga saat ini tidak pernah mendapatkan sanksi dari para mandor. Baginya bekerja sebagai cleaning service di UNESA, merupakan pekerjaan yang menyenangkan bahkan menurutnya merupakan peningkatan karier. Hal ini disebabkan, sebelumnya ia bekerja di pabrik Palet Pasuruan (pabrik pembuatan kotak dari kayu untuk bok susu) selama beberapa tahun namun hanya digaji sebesar Rp. 200.000,-. Jadi buat apa ia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Gaji yang telah didapatkan pun mengalami peningkatan. Hal ini perlu disukuri.

Bahkan ia mampu menjalin hubungan dengan mandor secara baik. Hasilnya, Farid sekarang dapat tinggal di kamar yang disediakan oleh mandor. Kamar yang disediakan oleh mandor memang tidak cukup besar namun sudah lebih dari cukup bila

dibandingkan dengan mereka harus mencari kamar sendiri yaitu kost. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya penginapan. Tentu tidak murah untuk harga sebuah kamar di wilayah ketintang dan sekitarnya. Meskipun ia telah mendapatkan fasilitas penginapan, ia masih harus mengeluarkan biaya untuk listrik dan air setiap bulan. Mandor yang telah menyediakan tempat tinggal di wilayah Ketintang Madya II, bahkan seringkali memberinya ijin cuti untuk pulang kampung. Apakah ini bukan suatu manifestasi kebaikan mandor yang seringkali di anggap sebagai orang yang galak.



Gambar 7.2.
Mengharap Rezeki dari Sampah

Keberadaan fasilitas penginapan yang disediakan mandor, membuat Farid dapat menabung. Hanya saja selama ia tinggal di situ, ia tidak dapat meningkatkan nilai tabungannya karena tidak

memiliki pekerjaan sambilan. Pekerjaannya sehari-hari selama tinggal di Surabaya hanyalah sebagai pekerja *cleaning service*. Hal itu merupakan wujud dari kesetiaannya kepada mandor tersebut. Untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya, ia agak *sungkan* kepada mandor yang telah berbaik hati kepadanya. Di samping itu, ia juga bingung ingin bekerja apa bila seandainya pak mandor mengizinkan ia bekerja sambilan. Apalagi tingkat pendidikannya hanya sebatas SMP saja dan ia tidak banyak memiliki hubungan dengan orang lain karena ia berasal dari luar kota yaitu Pasuruan. Paling-paling ia kembali jadi pekerja *cleaning service* di tempat lain, bahkan bisa-bisa terjadi bentrokan jawal.

Kost Bareng, Urunan Mbayar

Memang tidak semua bujangan pekerja *cleaning service* UNESA yang berasal dari luar kota Surabaya, seberuntung dengan rekannya yang berhasil membangun hubungan dengan mandor maupun dengan rekannya yang diijinkan untuk tinggal di pondok pesantren sehingga rekan-rekannya tersebut dapat mengurangi tingkat pengeluarannya untuk biaya penginapan.

Bagi mereka yang tidak beruntung mendapatkan fasilitas penginapan bagaimanapun juga mereka harus mencari kost untuk bisa tinggal di Surabaya. Pilihan kost adalah pilihan yang rasional bila dibandingkan harus nglaju dari tempat tinggalnya ke tempat kerjanya. Hampir semua pekerja *cleaning service* UNESA yang mengambil kost sebagai tempat tinggal berasal dari luar kota Surabaya yang jauh jaraknya seperti Blitar, Nganjuk, Bojonegoro, dan Caruban dll. Dengan begitu, pilihan *nglaju* merupakan pilihan yang tidak rasional karena akan menghabiskan uang penghasilan mereka dalam beberapa hari. Implikasinya, mereka tidak bisa menabung dan selalu kehabisan uang untuk biaya transportasi.

Pilihan untuk mengambil kamar kost sebenarnya merupakan pilihan yang sangat berat karena biaya sewanya yang cukup tinggi untuk daerah Ketintang. Biaya kost-kostan untuk daerah Ketintang Madya yang ditempati beberapa pekerja *cleaning service* UNESA sudah berkisar antara Rp. 75.000,- sampai 100.000,- per bulannya. Belum lagi biaya yang lain seperti listrik dan air.

Mengingat biaya yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan untuk bisa tinggal di wilayah tersebut, maka pilihan mengambil kost sendiri merupakan pilihan yang sangat tidak rasional. Hal ini disebabkan, biaya yang mesti dikeluarkan harus ditanggung sendiri. Namun bila biaya yang harus dikeluarkan tersebut ditanggung bersama-sama, maka pilihan untuk kost tersebut merupakan pilihan yang sangat rasional.

Walaupun tidak semua tempat tinggal yang dikostkan itu mengijinkan untuk ditempati atau disewa untuk beberapa orang. Namun, kalau pekerja *cleaning service* jeli, mereka segera dapat menemukan. Implikasinya, biaya yang mesti mereka keluarkan untuk penginapan akan berkurang. Bahkan, ketika pemilik kamar segera akan menaikkan biaya sewa kamar tersebut bila dihuni lebih dari satu orang, bagaimanapun, biaya tersebut akan tampak lebih murah karena ditanggung berdua atau bertiga. Dengan begitu, sisa uang penghasilannya dapat digunakan untuk keperluan lain atau ditabung oleh masing-masing pekerja.

Uang sewa akan dibayarkan jika para pekerja sudah mendapatkan gaji. Beberapa pemilik rumah sudah memaklumi kebiasaan dan kemampuan ekonomi para pekerja *cleaning service* tersebut sehingga mereka tidak mensyaratkan mereka untuk membayar uang kost di depan atau harus membayar selama satu tahun di muka sekaligus. Di samping uang kost, mereka dibebani dengan uang listrik dan air yang dapat dibayar menjadi satu dengan uang kost atau masih dihitung perbulan tergantung biaya yang akan dibayar tuan rumah ke PLN atau PAM. Hal ini

disebabkan akhir-akhir ini, biaya untuk listrik dan air seringkali naik tiap satu semester. Sisa uang yang mereka dapatkan, menurutnya, masih lebih dari cukup. Apalagi kondisi mereka yang masih bujangan, sebagaimana kata Mas Muluk, “*Lumayan cukup untuk biaya hidup sendiri, karena masih bujang sih mas! Entah nanti kalau sudah punya istri. Kalau ada, sedikit-dikit saya tabung, kalau tabungannya banyak akan saya kirim ke rumah untuk orang tua*”.

Bagi mas Muluk, dengan tinggal kost bersama teman-temannya satu kamar, di samping dapat mengurangi pengeluaran juga memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan sambilan. Keinginan mencari pekerjaan sambilan ini juga terkait dengan alasan atau niat awal mulanya bekerja di surabaya. Menurutny, niat bekerja ke Surabaya lebih disebabkan pekerjaan di desa itu tidak variatif dibandingkan di Surabaya. Di Surabaya orang bisa memilih pekerjaan yang disenangi dan bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. “*Di sini (Surabaya) pekerjaannya macem-macem, kalau di desa itu yang ada cuma tani. Itu penghasilannya nggak pasti, belum kalau musim kemarau, terus kena hama. Mendingan disini (UNESA),itung-itung cari pengalaman*”

Oleh sebab itu, selama bekerja sebagai cleaning service di UNESA, ia tidak terpaku pada satu pekerjaan namun mencoba untuk menerima pekerjaan lainnya yang jam kerjanya tidak bersamaan dengan jadwal kerjanya di UNESA. Pekerjaan sambilan yang diterima, baik Muluk maupun temannya yang lainnya tidak hanya berupa satu ragam pekerjaan saja namun bermacam-macam, misalnya ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga toko, ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjual keliling atau mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga wartel. Hal ini didukung dengan kondisi kost yang pada umumnya sangat kondusif dan memungkinkan

Hidup Bersama Orang tua

Bila dibandingkan dengan pekerja *cleaning service* UNESA sebelumnya, para bujangan yang hidup bersama orang tua, pada umumnya adalah penduduk asli Surabaya atau mereka yang sudah lama mendiami kota Surabaya. Dengan begitu, kita dapat mengasumsikan bahwa pengetahuan mereka tentang Surabaya dan hubungan antar manusia sedikit banyak lebih menguasai, sehingga dapat memiliki beberapa macam pekerjaan sampingan di luar *cleaning service* UNESA. Namun pada kenyataan di lapangan, ternyata asumsi bahwa bujangan *cleaning service* UNESA yang hidup bersama orang tua memiliki pekerjaan sampingan yang lebih banyak, tidak berlaku sepenuhnya. Beberapa informan yang berhasil diwawancarai menunjukkan bahwa sebagian besar para bujangan ini tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaannya sekarang. Meskipun demikian, ada beberapa memiliki pekerjaan sampingan yang menyenangkan dan dapat menambah keuangan keluarga.

Para bujangan yang bekerja di *cleaning service* UNESA ini, pada umumnya bekerja untuk membantu atau menyumbang memperbesar penghasilan keluarga yang dihasilkan dari kedua orangtuanya yang sama-sama bekerja. Mengenai kebutuhan sehari-hari para bujangan seperti Warno yang bekerja di lingkungan FIS UNESA, semuanya sudah dipenuhi orang tuanya meskipun dalam kapasitas yang sangat terbatas. Lebih-lebih kebutuhan dasar seperti makan, minum dan pakaian. Dengan begitu, sebagian uang hasil pekerjaannya bebas ia nikmati sendiri.

Kebutuhan hidupnya yang cukup banyak dan kewajiban untuk membantu saudara-saudaranya menyebabkan penghasilan yang sudah dibagi dua menjadi sangat sedikit. Implikasinya, ia tidak memiliki tabungan sama-sakali. Setiap gaji, uang yang ia terima, tidak sampai dua minggu sudah habis. Kondisi keuangan yang sangat labil ini, tidak membuat warno memiliki keinginan

atau hasrat untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya. Hal ini disebabkan Warno merasa aman meskipun tidak memiliki uang dan pekerjaan tambahan lainnya. Apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dianggap sudah terpenuhi dari kedua orang tuanya.

Berbeda dengan Warno, bagi Lukman, pekerja *cleaning service* UNESA di lingkungan fakultas teknik UNESA, meski ia berstatus bujangan dan hidup bersama orang tua, ia masih ingin mencari pekerjaan tambahan. Hal itu disebabkan, orang tuanya tidak semuanya bekerja. Ayahnya adalah seorang buruh di wilayah Rungkut sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Penghasilan yang hanya bertumpu pada ayahnya saja menyebabkan roda ekonomi akan goyah. Apalagi pada zaman sekarang biaya listrik dan air sangat tinggi.

Untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari, Lukman tidak hanya bekerja sebagai *cleaning service* UNESA namun di luar jam kerja, ia selalu mencari kesempatan lainnya yang sekiranya dapat menghasilkan uang. Apapun ia lakukan yang penting halal. Tingkat pendidikannya yang mencapai SMA (Sekolah Menengah Atas), tampaknya mempengaruhi kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini terbukti bahwa ia tidak sekedar mencari tambahan penghasilan dengan cara menjadi penjaga wartel saja seperti teman-teman *cleaning service* UNESA lainnya namun di balik kesederhanaannya, ia memiliki telenta atau kemampuan yang tidak terduga. Kemampuan ini nampaknya berkaitan dengan aktivitasnya ketika masa sekolah dan merupakan pengetahuan yang sangat ia sukai semasa di SMA. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kemampuan musikal.

Semasa SMA, ia memiliki sebuah *group band*. Pengalaman mendalami kegiatan itu setidaknya-tidaknya memungkinkan dia memiliki banyak relasi di antara anak-anak muda yang menggemari musik. Apalagi pada masa itu sering melakukan latihan bersama-sama di berbagai tempat. Pengetahuan semacam ini nampaknya menjadi aset bagi Lukman, karena selepas ia dari SMA dan

bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Kegiatan bermain musik tampaknya tidak ditinggalkan. Bahkan seringkali ia mendapatkan job bersama-teman-teman lamanya sebagai pemain band. Job manggung yang sering ia terima biasanya pada acara perkawinan atau ulang tahun.

Meskipun job bermain band tidak selalu ada tiap hari, namun menurutnya ada bulan-bulan tertentu *job* bermain band itu sangat ramai bahkan seringkali menyebabkan ia sangat sibuk di waktu malam hari. Implikasinya, penghasilan bulanan yang ia terima pada bulan-bulan tertentu seringkali lebih banyak berasal dari pekerjaan sampingan.

Oleh karena, ia merasa memiliki sumbangsih yang cukup signifikan terhadap penghasilan keluarga, Lukman merasa bahwa ia pun memiliki hak untuk memuat suatu kebijakan keluarga. Apalagi ia adalah anak kedua dari empat bersaudara. Kebijakan yang seringkali ia urusi berkaitan dengan kebijakan pengeluaran keluarga. Hal-hal mana yang harus di tekan pengeluarannya dan hal-hal mana yang penting bagi keluarga. Meskipun kebijakan pengeluaran keluarga sudah diatur sedemikian rupa, tampaknya pengeluaran tetap saja besar. Pengeluaran untuk makan sehari-hari dan pola konsumsi lainnya tidak begitu besar dan dapat ditekan sekecil mungkin. Hanya pengeluaran air dan listrik sangat menyedot anggaran keluarga. Pengeluaran ini sangat susah ditekan. Solusi penggunaan peralatan listrik yang hemat tetap tidak bisa memecahkan masalah ini.

Adanya beberapa pos yang sangat susah ditekan pengeluaran menyebabkan Lukman hingga saat ini tidak memiliki tabungan sama sekali. Tabungan yang ia miliki adalah tabungan berupa relasi antar teman dalam kelompok band-nya atau kelompok band di daerah lainnya. Hal ini disebabkan melalui relasi inilah ia sewaktu-waktu akan mendapatkan rejeki mendadak dan rejeki ini bisa digunakan sebagai pembayar utang bulan sebelumnya.

**Siasat Keluarga *Cleaning Service*:
Dari Pekerjaan Sambilan, Mendayagunakan Keluarga hingga
Berhemat**

Hidup Hemat, Prioritaskan Kebutuhan

Pak Jamali merupakan pekerja *cleaning service* UNESA yang bekerja di wilayah FIS. Ia sudah menikah dan memiliki satu putra. Rumah yang ia tempati merupakan rumah kontrakan yang berada di daerah Ketintang lama. Sebagai kepala rumah tangga, pak Jamali hanya mengandalkan penghasilan keluarga dari pekerjaannya sebagai *cleaning service* UNESA. Ia tidak memiliki penghasilan keluarga di sektor lainnya. Hal ini menurutnya karena pendidikannya yang hanya setamat SMP. Tingkat pendidikan ini yang menyebabkan ia hanya di terima sebagai tenaga kasar yang umumnya dipekerjakan di siang hari. Di samping itu, usahanya untuk melamar pekerjaan lainnya belum menghasilkan.

Istri Pak Jamali yang juga lulusan SMP, sampai saat ini ia masih menganggur. Ia masih belum tertarik untuk bekerja membantu suaminya. Hal ini disebabkan perkawinannya yang masih tergolong muda dan ia baru saja memiliki anak yang masih berusia 4 tahun. Usia anak yang masih belia inilah yang menyebabkan sebagian besar waktu istrinya dihabiskan untuk menjaga buah hatinya. Keinginan untuk mencari penghasilan tambahan menjadi tertahan sementara waktu. Meskipun istrinya tidak ikut membantu mencari penghasilan keluarga, Pak Jamali masih bersyukur penghasilannya bisa menghidupi keluarganya meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Menurut mereka, tingkat kebutuhan sehari-hari belum begitu banyak. Hal itu disebabkan, keberadaan anaknya yang masih kecil, sehingga tuntutan terhadap segala hal belum ada. Di samping itu kebutuhan Pak Jamali dan istri juga bisa ditekan sesuai dengan prioritasnya. Prioritas keluarga Pak Jamali adalah

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum meskipun terbilang kurang sekali.

Bilamana ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, sering Pak Jamali harus mengubah strategi konsumsinya. Ia dan istrinya mengubah pola makan yang sudah sederhana menjadi lebih sederhana lagi. Bila masih belum mencukupi, Pak Jamali sering menyiasati dengan cukup makan sekali setiap hari. Padahal kebutuhan kalori yang diterima Pak Jamali setiap hari sudah pas-pasan masih ditambah pengurangan jumlah makan setiap harinya. Kebutuhan-kebutuhan mendesak itu bisa berupa biaya membeli obat bagi anaknya. Harta paling berharga yang dimiliki keluarga Pak Jamali hanyalah sebuah TV lama yang diproduksi tahun 1970-an.

Berbeda dengan Pak Jamali, Pak Mudjib adalah seorang bapak dengan dua anak. Sebelum ia bekerja sebagai cleaning service UNESA, ia bekerja sebagai pedagang kaki lima di Wonokromo. Namun, karena usahanya tidak berkembang dengan baik, ia banting stir sebagai pekerja cleaning service UNESA yang dianggapnya sebagai pekerjaan yang dapat diandalkan karena penghasilannya pasti.

Dengan mendiami rumah berlantai tanah di daerah Kertanting Baru, Pak Mudjib hidup saling bekerja sama dengan istrinya. Kerja sama dengan istri menurutnya merupakan hal yang penting karena penghasilan yang ia peroleh dari pekerjaan cleaning service UNESA sangat pas-pasan meskipun dapat diandalkan. Di samping menerima gaji dari suaminya, istri Pak Mudjin membuka usaha cucian baju. Pada umumnya langganannya yang dilayani oleh istri Pak Mudjib adalah tetangga-tetangga sekitar saja. Hasilnya cukup lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. *“Untuk nambah kebutuhan, istri saya kadang-kadang juga nerima cucian ! Iya lumayan untuk tambahan dari pada nganggur.”*

Adanya penghasilan tambahan dari pekerjaan istri bukan berarti penghasilan keluarga mencukupi. Keluarga Pak Mudjib

pun masih melakukan banyak penghematan di sana-sini. Untuk kebutuhan listrik, mereka hanya menggunakan beberapa lampu neon dengan watt yang paling kecil dan untuk kebutuhan air, mereka terpaksa menggunakan air sumur untuk segala aktivitas seperti mandi, mencuci, air minum dll.

Cleaning Service untuk Membantu Suami

Di samping kaum laki-laki, kaum perempuan juga berperan serta di dalam pekerjaan *cleaning service* UNESA. Pada umumnya para wanita yang bekerja di sini adalah sekedar membantu penghasilan suaminya yang tidak mencukupi. Ibu Sutinah misalnya, ia sudah bekerja selama 3 tahun sebagai pekerja *cleaning service* UNESA. Suaminya bekerja sebagai buruh pabrik yang penghasilannya sangat terbatas. Padahal ia masih memiliki tiga anak-anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah.

Pada awalnya, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun segera ditinggalkan karena gajinya cuma Rp. 200.000,- per bulan dengan jam kerja yang ketat. Bila dibandingkan dengan pekerjaan sebagai *cleaning service* UNESA, sangat nyata perbedaan penghasilannya. Oleh sebab itu ia dengan senang hati menerimanya. “*Di sini kerjanya ringan cuma membersihkan WC, tapi gajinya lumayan*”. Apalagi menurutnya “*lha wong saya ini lulusan SMP, mau kerja di mana lagi, disini sudah bagus.*”

Menumpang, Berjualan dan Apa lagi, asal untuk Anak

Sumiyati merupakan informan yang berstatus janda satu-satunya yang berhasil kami wawancarai. Ia sudah ditinggal mati suaminya sejak tahun 2000. Kematian suaminya merupakan suatu pukulan yang berat dalam hidupnya, karena selama ini hanya suami satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Untuk menggantikan peran suaminya, akhirnya ia bekerja ke Surabaya. Kedatangannya di Surabaya lebih disebabkan atas kebaikan saudara-

nya. Beserta dengan kedua anaknya, Bu Sumiyati diijinkan untuk tinggal serumah dengan saudaranya tersebut.

Berkat bantuan saudaranya pula Bu Sumiyati dapat bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Meskipun penghasilan yang ia dapatkan dari bekerja *cleaning service* UNESA sangat terbatas untuk biaya hidup selama di surabaya, namun ia sangat bersyukur. Apalagi sebelumnya, ia sama sekali tidak memiliki penghasilan sama sekali.



Gambar 7.3.
Menikmati sedikit, hanya berada di luar pagar kampus

Untuk menutupi kebutuhan yang besar bagi kedua anak-anaknya, dan juga biaya sehari-hari yang ia nikmati seperti listrik dan air di rumah saudaranya, ia mencoba untuk berjualan kecil-kecilan di rumah saudaranya tersbut setiap sore hari. Jualan yang

ia bawa berupa pisang goreng, dan gorengan lainnya. Keuntungannya sedikit banyak membantu kehidupan sehari-harinya dan dapat ikut menyumbangkan biaya sehari-hari kepada saudaranya.

Penutup

Perkembangan Surabaya yang pesat sedikit-tidaknyanya membawa berkah ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan Surabaya menjadi sebuah pusat daya tarik dan kota tujuan utama bagi kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah. Implikasinya, arus pendatang setiap hari selalu membanjiri Surabaya.

Beragamnya latar belakang yang dibawa para pendatang menyebabkan munculnya perbedaan daya serap diberbagai sektor yang tersedia. Bagi pendatang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang baik atau yang memiliki modal yang cukup, berbagai permasalahan yang dihadapi tampaknya mudah dipecahkan, apalagi ruang yang tersedia bagi mereka sangat luas. Namun bagi para pendatang yang tidak memiliki keahlian maupun modal sama sekali, ruang yang tersedia sangat terbatas. Dampaknya, kemiskinan di kota menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan.

Para pekerja subsisten kota pada umumnya membanjiri pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan yang tinggi seperti pekerjaan cleaning service UNESA. Meskipun pekerjaan ini tidak menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun untuk bisa bekerja sebagai cleaning service UNESA, seseorang membutuhkan satu tahap *entry point*. Tahap ini berkaitan dengan siasat yang memungkinkan ia dapat bekerja di suatu tempat. Biasanya mereka menggunakan hubungan teman untuk membawanya bekerja di tempat itu. Hubungan perkawanan ini

seringkali juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai persoalan sehari-hari mereka.

Siasat para pekerja cleaning service UNESA agar tetap bertahan hidup di Surabaya dengan bekerja sama dengan teman tampaknya menjadi pandangan yang lumrah. Di tengah himpitan ekonomi yang berat, hubungan perkawanan setidaknya mampu mengeliminir berbagai masalah penghasilan keuangan yang tidak memadai dengan cara mengkonsumsi secara bersama-sama. Di samping itu, hubungan perkawanan merupakan ruang psikologis yang aman karena mereka sama-sama senasip dan sepenanggungan.

Pengurangan jumlah barang-barang konsumsi hingga sampai bawah batas minimal yang layak merupakan suatu siasat yang harus mereka lakukan. Demi sesuatu, mereka rela berkorban. Dengan begitu, setiap hari merupakan hari-hari penuh pengorbanan. Demi anak, orang tua rela berkorban untuk makan sekali sehari. Implikasi pengurangan tingkat konsumsi yang berada di bawah standar minimal menyebabkan kondisi fisik mereka bekerja tidak optimal di tengah volume pekerjaan yang mengharuskan seseorang mengkonsumsi kebutuhan pada batas minimal.

Keluarga merupakan tim kerja yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, penghasilan keluarga dapat lebih baik bila dibandingkan dengan hanya kepala rumah tangga saja yang harus bekerja. Kerja sama yang baik antar anggota keluarga bagaimanapun juga akan menutupi berbagai biaya untuk pos-pos tertentu.

Di tengah ketidakberdayaan pada pekerja cleaning service UNESA, ternyata keberadaan suatu lembaga pondok pesantren, ikut berperan menyelamatkan kehidupan para pekerja cleaning service UNESA. Sebagai lembaga sosial setidaknya keberadaan pondok pesantren memungkinkan seorang pekerja bisa hidup lebih layak ditengah tekanan yang berat di Surabaya.

Daftar Pustaka

- Effendi, Tadjudin Noer,
1993 **Masyarakat Hunian Liar di Kota: Sebuah Studi Kasus di Wonosito Kotamadya Yogyakarta**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Evers, Hans-Dieter.
1982 **Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia**, Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
- Jellinek, Lea.
1995 **Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta**, Jakarta: LP3ES.
- Lewis, Oscar.
1993 “Kebudayaan Kemiskinan,” dalam Parsudi Suparlan, Penyunting, **Kemiskinan di Perkotaan**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manning, Chris, dkk,
1986 **Struktur Pekerjaan, Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Murray, Alison J.,
1994 **Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial**, Jakarta: LP3ES.
- Nasution, Agusfidar.
1985 “Buruh Perusahaan Industri Kecil dan Menengah di Jatinegara,” dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**, Jakarta: Rajawali Press.
- Noormohammed, Sidik.
1986 “Perumahan bagi Golongan Miskin di Jakarta,” dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Papanek, Gustav, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,

1986 "Penduduk Miskin di Jakarta," dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pitomo, Sundoyo.

1985 "Kebutuhan Dasar Kelompok Berpenghasilan Rendah di Kota Jakarta," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Purwaningsih, Endang.

1985 "Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Perumnas Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Sayogyo.

1978 "Garis Kemiskinan dan Minimum Kebutuhan Pangan." **Makalah** dalam Kongres II HIPIS di Manado.

Sunuharyo, Bambang Swasto.

1985 "Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga Pegawai Rendah di Perumahan Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Bab 8

Pengamen

Seniman Jalanan dan Suara-suara “Lapar” Orang Miskin Kota

Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo,
dan Sugeng Harianto

Pendahuluan

Di dalam sejarahnya, seniman jalanan telah terjadi cukup lama. Di Eropa dan Amerika, bangsa pengembara, dari rumpun Slavia, yaitu suku Gipsi telah mengembara ratusan tahun dengan bekerja sebagai peternak, penjinak binatang, dan lebih dari itu bermain musik di malam hari, bermain boneka kayu dan meramal nasib. Memang, tidak banyak catatan tentang kelompok etnik ini.

Di Indonesia, khususnya Jawa, meski seniman keraton yang mengembangkan wayang, di dalam tradisi *babad* (Tanah Jawi) diberitakan tatkala untuk menaklukan Ki Ageng Mangir, penguasa wilayah Selatan, putri sulung Panembahan Senapati, *Pembayun*, menyamar sebagai *tledek*, *wong barang* yang mengembara dengan menyanyi dan menari hingga masuk ke wilayah tersebut. Karena kecantikannya, Ki Ageng Mangir kemudian mengawini. Kisah ini kemudian berlanjut hingga Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senapati dan dibunuh dengan membentur kepalanya di singgasananya, istirinya akhirnya ikut *bela pati*.

Pada masa kolonial seniman jalanan ini berkembang dari lingkungan perkebunan, Augustijn Michels sebagai seorang pemilik *landhuis Citeureup* tercatat pada tahun 1831 bahwa dari

budak-budaknya yang berjumlah 130 orang, terdapat 30 orang budak yang oleh V.I. van de Wall disebut pemain musik yang pandai dan serba bisa (*de onderschidene bekwame muzijkanten*). Di samping itu, ada 4 orang penari ronggeng, 2 pemain gambang, dan 2 penari topeng, bahkan orang Cina juga melatih budak mereka untuk menjadi artis dalam rombongan sandiwara Cina. Budak-budak yang pandai bermain sandiwara, menari, dan menyanyi biasanya berharga tinggi. Gaya hidup yang demikian ini sebenarnya meniru budaya keraton di mana raya memiliki sekelompok seniman, sebagian di antaranya pemain musik Barat yang tinggal di Kampung Musikanan (sebelah timur Pagelaran), dan di halaman dalam keraton terdapat bangunan *koepel*, khusus untuk tempat bermain musik (Soekiman, 2000: 90-91). Gaya hidup ini dimasukkan ke dalam budaya *indis*.

Di dalam perkembangan selanjutnya, muncul kelompok *toniel* atau *stambul*, seni pertunjukan keliling dengan kisah seribu satu malam. Musik dan lagu menyertai dalam pertunjukkan tersebut. Seni pertunjukan rakyat keliling dengan mengambil tradisi lisan juga berkembang pula, grup Ketoprak di Jawa Tengah dan Ludruk di Jawa Timur. Alat-alat musik yang digunakan tidak lengkap, seperti pada seni pertunjukan keraton, bila merupakan seni pertunjukan, maka tema ceritera diambil dari tradisi lisan, seperti pahlawan lokal Sarip Tambakoso pada Ludruk atau mengadopsi ceritera seribu satu malam dan ceritera barat. Sudah barang tentu, alur ceriteranya pasti berbeda dengan tradisi keraton.

Musik jalanan memang tidak selalui kemudian identik dengan seni pertunjukan. Ia bisa tampil sendiri, seperti *musik sinteran* yang dilakukan satu atau dua orang. Seorang memainkan alat musik *sinter*, sedangkan yang lain *nembang*, menyanyikan lagu Jawa, atau sambil bermain *sinter* ia bernyanyi. Alat musik *sinter* merupakan modifikasi alat musik cina yang berupa kotak kayu sebagai wadah resonansi dengan banyak dawai. Cara memainkan

dengan meletakkan sinter secara mendatar dan dipetik dengan kedua tangan.

Bila diamati di kota Surabaya dan sekitarnya, komunitas pemusik jalanan memang terpilah menjadi dua, kelompok pertama terdapat pelaku tradisional (lama), seperti pemusik *sinter*, gitar dan *tayub* dengan lagu-lagu Jawa dan keroncong, penikmatnya adalah kelompok urban dari pedesaan Jawa. Kelompok kedua adalah anak jalanan (anjel) dengan rentang usia bervariasi dari anak-anak hingga remaja dan dewasa. Ada berbagai modus, ada sebagian memilih bernyanyi di pinggir jalan pada saat lampu merah, ada pula bernyanyi di kendaraan umum, biasanya bis kota dan bis antar kota, dan sebagian lain bernyanyi dari rumah ke rumah. Alat musik yang dipakai mulai dari yang paling sederhana, *kecek-kecek* buatan sendiri dari sejumlah tutup botol yang dipaku pada kayu dan digoyang-goyang secara berirama hingga alat musik gitar, dari pemusik yang hanya mengandalkan suara hingga menggunakan alat *sound system* dengan tenaga aki atau baterai.

Berbeda dengan kelompok pertama yang jumlah terbatas dan cenderung berkurang, jumlah kelompok kedua ini tidak semakin berkurang, tetapi cenderung bertambah. Ada beberapa alasan memilih mengambil profesi tersebut, namun sering dicermati sebagai produk dari urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja formal menggiring pelaku pada pekerjaan informal, termasuk musik jalanan.

Bila kelompok pertama, demi memenuhi kenangan penikmatnya, lebih suka melantunkan lagu-lagu lama, seperti pemusik *sinter* dengan tembang-tembang *dandang gula* dan *pangkur*, pemusik keroncong dengan lagu-lagu pop bergaya keroncong, dan seterusnya, maka kelompok kedua mengambil dua modus, yaitu menyanyikan lagu-lagu pop yang sedang “*in*”, atau menciptakan lagu-lagu yang sederhana dengan tema yang jelas dan tidak jauh dari kehidupannya. Di dalam modus pertama, tidak semua lagu-lagu pop yang sedang “*in*” dinyanyikan, misalnya

menjelang akhir pemerintah Orde Baru, antara tahun 1996-1998, pemusik jalanan lebih suka menyanyikan lagu “Anoman Obong” (Iwans Fals) daripada lagu “Tenda Biru” (Desy Ratnasari).

Pada modus kedua, lagu-lagu tersebut bisa muncul ke permukaan tatkala ada produser yang mendengarkan dan merekrutnya ke dalam dunia rekaman, sebut saja Gombloh (alm.) dari Surabaya dengan lagu-lagu perjuangan dan cinta. Rekrutmen ke permukaan bisa terjadi pula bila pemerintah, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (dulu Depdikbud), dan sejumlah kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa menyelenggarakan ajang lomba pemusik atau lagu-lagu jalanan (perhatikan kasus Iwan Fals dalam Murray, 1992). Tulisan ini yang merupakan hasil penelitian bermaksud menggali tentang jenis dan tema musik, hubungan antara obyektif (dan subyektif) dan jenis dan tema musiknya, serta fungsinya bagi masyarakat kota.

Metode Penelitian¹¹

Penggalan data dari komunitas seniman jalanan bukan merupakan hal yang mudah. Mereka merupakan kelompok-kelompok kecil yang tersebar secara sporadis dan sangat *mobil*. Pada saat tertentu mereka dengan mudah ditemui di atas bus-bus kota (dan luar kota), di perempatan jalan, dan berjalan dari rumah ke rumah, namun pada saat lain menghilang karena takut ditangkap oleh Satpol PP karena dianggap orang-orang terlantar yang mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, mereka sebenarnya terbuka untuk diwawancarai. Melalui wawancara dan observasi, selain jenis dan musik, dapat pula digali tentang kondisi subyektif pengamen. Sementara itu, kondisi obyektif tentang per-

¹¹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto.

ubahan masyarakat dan kebijakan publik dapat diketahui dari data sekunder, seperti data statistik dan surat kabar.

Untuk analisis, ada tiga tahap yang dilakukan. Pertama melakukan pengkodean dan melakukan identifikasi terhadap kondisi obyektif dan subyektif pemusik jalanan. Dari koding ini, kemudian dibuat matriks untuk menggambarkan kondisi obyektif dan subyektifnya. Kedua, melakukan koding pada musik/lagu jalanan. Koding didasarkan, antara lain (1) jenis musik, (2) tema, dan (3) isi, (4) tempat atraksi dan (5) penikmat/pendengar (*audience*). Krippendorff (1991: 178-180), tahap ini bisa digolongkan ke dalam klasifikasi kontekstual, yaitu teknik untuk mengeliminasi jenis kelebihan tertentu dalam data dengan cara demikian menyarikan apa yang nampak menjadi konseptualisasi dasar. Diasumsikan bahwa obyek dan lebih jelasnya, kata mempunyai semakin banyak sinonim apabila semakin banyak konteks kejadiannya yang sama. Dalam tahap ini jenis dan tema musik jalanan teridentifikasi. Ketiga, menggunakan matriks yang menghubungkan antara kondisi obyektif dan subyektif terhadap jenis dan tema musik jalanan, sehingga akan nampak fungsi dari musik jalanan, apakah musik jalanan hanya sebagai tampilan rasa keindahan, ataukah sebagai proses imitasi terhadap kondisi obyektif dan subyektifnya, dan lebih dari itu sebagai kritik atau protes sosial.

Pekerjaan itu bernama Pengamen Jalanan

Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya ibarat gadis dan pemuda cantik dan ganteng yang menebarkan daya pesona dan daya tarik, yang siap untuk memikat hati siapa saja. Meskipun Kota Surabaya dikesankan sebagai kota metropolitan yang padat penduduk dan kota yang tidak ramah kepada siapa saja, namun Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berasal dari daerah-

daerah yang menjadi *binterland* Surabaya. Sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, Surabaya sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat peredaran uang, pusat hiburan, dan lainnya. Hal ini menjadikan Surabaya sebagai kota yang menawarkan daya tarik kepada masyarakat di *binterland*-nya. Sebaliknya, daerah-daerah *binterland* yang kurang maju lebih mendorong penduduknya untuk melakukan migrasi ke Surabaya.

Surabaya menawarkan potensi lapangan pekerjaan, baik sektor formal maupun sektor informal, yang sangat luas. Mereka yang tidak dapat memasuki pekerjaan di sektor formal, terbuka luas pekerjaan di sektor informal. Banyak anggota masyarakat, karena kalah bersaing atau tidak mempunyai persyaratan, tidak mampu memasuki sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali memasuki sektor informal. Di kota ini terbuka cukup luas bagi warganya untuk mencari pendapatan dari sektor ini. Sektor informal menjadi sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Salah satu pekerjaan di sektor informal di Surabaya adalah menjadi pengamen jalanan. Bagi sebagian warga kota Surabaya menjadi pengamen jalanan adalah pekerjaan. Pekerjaan ini dipilih karena mereka tidak mempunyai banyak pilihan, bahkan pekerjaan ini menjadi katup penyelamat (*safety valve*) ketika mereka terlempar dari pekerjaan di sektor informal lainnya.

Konsep sosiologi mobilitas sosial yang bersifat horizontal barangkali tepat untuk menggambarkan dinamika kehidupan para pengamen jalanan. Sektor informal memang sektor pekerjaan yang dicirikan oleh adanya mobilitas pekerjaan yang tinggi. Pada sektor informal orang mudah berganti-ganti pekerjaan. Kebanyakan pengamen jalanan melakukan mobilitas pekerjaan ini. Sebelum menjadi pengamen jalan mereka rata-rata sudah pernah bekerja.

Secara ekonomi para pengamen jalanan adalah orang-orang yang berasal dari strata masyarakat bawah. Mereka menjadi

pengamen jalanan lebih didorong oleh kondisi kehidupannya yang termarjinalkan karena mereka adalah orang-orang yang kalah ketika memasuki arena kompetisi, yang di mata mereka, yang tidak memberikan keadilan sosial. Surabaya ibarat arena kompetisi bagi siapa saja yang tidak sanggup dimenangkan oleh para pengamen jalanan, bahkan dalam arena kompetisi itu mereka mengalami ketidakadilan, seperti ditertibkan dan digusur oleh aparat birokrasi maupun aparat represif negara. Ibarat di arena pertandingan sepakbola, negara yang seharusnya menjadi wasit yang adil, justru melakukan pemihakan kepada pihak yang kuat, dan keputusan-keputusannya justru merugikan pihak yang lemah, seperti pedagang asongan, pedagang nasi, pengamen jalanan, dan lainnya.

Penertiban Berbuah Pengamen Jalanan

Kondisi kehidupan semacam itu sehari-hari dialami oleh para pengamen jalanan. Mereka menjadi pengamen jalanan salah satunya disebabkan karena mereka menjadi korban penertiban oleh aparat birokrasi dan aparat represif negara.

Muryanti dan Naning adalah dua orang di antara sekian banyak orang yang mengalami nasib seperti itu. Mak As sapaan akrab Muryanti yang berusia 46 tahun, sehari-hari mengamen berpindah-pindah tempat. Sehari-hari Mak As mengamen di Terminal Joyoboyo, halte bus depan Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani, dan Terminal Bungurasih. Mak As mengawali pekerjaannya di Surabaya dengan bekerja sebagai pedagang nasi di kawasan Terminal Joyoboyo. Bagi Mak As berjualan nasi di Terminal Joyoboyo merupakan pekerjaan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang miskin. Pekerjaan ini dia jalani sudah cukup lama yaitu sudah sekitar 10 tahun. Mak As yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dari pekerjaan berjualan nasi mendapatkan pendapatan

yang diakuinya cukup lumayan. Pendapatan ini dapat membantu pendapatan keluarga. Mak As menceritakan:

Saya berjualan nasi sudah sepuluh tahun lamanya, sebelumnya saya menjadi buruh tani di Tanggulangin. Dari jualan nasi sebenarnya saya mendapatkan hasil yang lumayan, walaupun keuntungan yang saya peroleh tidak banyak, namun setidaknya masih bisa memperoleh keuntungan dari sisa makanan untuk dimakan sendiri.

Tahun 2002 merupakan tahun buruk bagi Mak As. Warung makanan miliknya yang berlokasi di kawasan Terminal Joyoboyo menjadi obyek penertiban oleh aparatur Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya. Penertiban tersebut merupakan peristiwa tragis bagi Mak As, karena dia harus kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Sejak saat itu ia menganggur, sampai ia memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan. *“Mau gimana lagi punya warung sudah kena penertiban, ya akhirnya saya menjadi pengamen, yang penting halal,”* kata Mak As.

Di Surabaya sehari-hari Mak As bertempat tinggal bersama-sama dengan salah satu anaknya. Ia mempunyai tujuh anak dan semuanya sudah dewasa. Ia tidak menetap di Surabaya, seminggu atau bahkan sebulan sekali ia pulang ke Tanggulangin. Tanggulangin adalah desa di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, bahkan sampai sekarangpun ia pun masih mempunyai rumah dan bertempat tinggal di desa itu. Ketika berada di Desa Tanggulangin Mak As tidak jarang bekerja sebagai buruh tani.

Sebagai pengamen jalanan Mak As hanya berbekal alat yang ia beri nama kentrungan. Mak As menjalani pekerjaannya mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 12.00 siang, dan pekerjaan itu ia jalani dengan setulus hati dan tanpa beban. Bagi Mak As pendapatan dari mengamen hanya untuk menambah pendapatan suaminya yang sehari-hari sebagai tukang becak. Mak As mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 10.000 per hari.

Demikian pula yang dialami oleh Naning. Naning lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengamen di perempatan jalan yang ada lampu pengatur lalu lintas. Dia memilih tempat seperti itu tidak banyak menghabiskan tenaga dan tidak berbahaya. Perempuan berusia 28 tahun itu mengaku menjadi pengamen jalanan karena dipaksa oleh keadaan keluarganya. Dia mengaku sudah mempunyai suami yang sehari-hari bekerja secara serabutan, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Naning menceritakan suaminya sehari-hari kadang-kadang bekerja sebagai tukang becak, kadang-kadang bekerja sebagai kuli bangunan. *"Itu pun tidak pasti. Suami saya bekerja serabutan,"* kata Naning.

Bekerja sebagai pengamen jalanan, bagi Naning, sebenarnya bukanlah pekerjaan yang menarik. Untuk memutuskan menjadi pengamen jalanan tidak mudah baginya untuk memutuskan. Sebelum bekerja sebagai pengamen jalanan, Naning bekerja sebagai penjual makanan ringan di Taman Bungkul. Pekerjaan sebagai penjual makanan sudah dia geluti selama 5 tahun. Malang nasibnya, suatu hari pada tahun 2003 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Taman Bungkul. Lapak yang penuh barang dagangan miliknya dibongkar paksa oleh Polisi Pamong Praja. Kebijakan pemerintah kota menertibkan PKL di seluruh kawasan kota menjadi awal bagi dia untuk berpindah profesi. Naning menuturkan:

Mau gimana lagi mas, bisa saya hanya mengamen di jalan. Saya yang hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) bisa bekerja sebagai apa. Selain berjualan dan mengamen saya tidak mempunyai kemampuan lain. Menjadi pengamen jalan sebenarnya sangat terpaksa saya lakukan, namun saya mensyukurinya karena dapat membantu meringankan beban suami saya yang hanya bekerja serabutan.

Bencana Itu Bernama Krisis Ekonomi

Wawan dan Yanto mengalami nasib yang sama. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan, keduanya pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh pabrik. Wawan misalnya, pria yang telah menekuni pekerjaan sebagai pengamen jalanan selama tiga tahun ini, mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Gelar lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang disandanginya belum cukup untuk menjadi modal bagi dia untuk memasuki pekerjaan di sektor formal. Nasib membawanya menjadi kuli bangunan. Pekerjaan yang telah lama dia tekuni tidak memberikan harapan bagi masa depannya. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh bangsanya (Indonesia) mempengaruhi masa depan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Seperti hukum alam, hukum ekonomi *supply and demand* berlaku. Permintaan pekerjaan di sektor perumahan menurun. Bagi Wawan penurunan permintaan itu bermakna sepihnya order pekerjaan. Hal ini yang mendorong Wawan untuk memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. *“Aku dulu bekerja pertama kali sebagai kuli bangunan. Karena sepihnya pekerjaan untuk dikerjakan akhirnya aku jadi pengamen,”* kata Wawan.

Krisis ekonomi negara ini juga berdampak pada kehidupan Yanto. Pemuda berusia 33 tahun ini sebelum menjadi pengamen jalanan bekerja sebagai buruh pabrik. Yanto tidak mengetahui dengan jelas secara tiba-tiba dua tahun lalu dia mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaannya. Yanto menduga pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaannya, karena ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yanto menjalani pekerjaannya sebagai pengamen jalanan sudah dua tahun lamanya dan menjalaninya di atas bus antarkota. *“Sebelum menjadi pengamen jalanan, awalnya saya bekerja sebagai buruh pabrik. Saya tidak tahu persis entah kenapa saya di-PHK. Menurut saya, mungkin perusahaan saya sedang mengalami krisis sehingga akan bangkrut,”* kata Yanto.

Dari Loper Koran ke Pengamen Jalanan

Nasib yang sama juga dialami oleh Deni dan Termas. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan pernah menekuni pekerjaan sebagai loper koran. Deni, pemuda berusia 24 tahun, meskipun kelahiran Surabaya, nemun tumbuh dan besar di Yogyakarta hidup bersama dengan *budhe*-nya. Dia menjadi pengamen jalanan sudah sekitar 10 tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan, Deni menekuni pekerjaan sebagai loper untuk berbagai surat kabar. Sebagai loper koran Deni setiap hari mengayuh sepeda menyusuri jalan dan gang untuk mengantarkan koran ke rumah para pelanggan.

Sebagai loper koran dia awali dengan menjadi loper koran *Suara Pembaharuan* di Yogyakarta. Ketika surat kabar itu tidak terbit lagi, membawa Deni menjadi loper koran *Yogya Pos*. Pekerjaan sebagai loper surat kabar ini tidak bertahan lama, karena nasib surat kabar itu sama dengan *Suara Pembaharuan*. Kebangkrutan dua surat kabar itu membawa Deni untuk pertama kalinya memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. Deni menceritakan, “*Setelah tidak menjadi loper koran aku menjadi pengamen, itu terjadi sekitar tahun 1994-an.*”

Pemuda ini menceritakan, pertama kali menjadi pengamen hanya berbekal alat mengamen sederhana yang dia sebagai *ecek-ecek*. Alat musik ini dia buat dari tutup botol yang dirangkai dengan kayu sehingga bisa menghasilkan bunyi. Dia menggunakan alat musik ini karena dia belum bisa menggunakan alat musik gitar. Kemampuan dia sekarang memainkan gitar diawali ketika dia mengajak temannya yang bisa bermain gitar untuk mengamen. Berawal dari itu dia berusaha belajar bermain gitar, dan akhirnya bisa memainkan alat musik tersebut.

Tahun 1999 Deni pulang ke Surabaya atas permintaan ibunya. Pulang ke Surabaya bukan berarti memutus matarantai pekerjaannya sebagai pengamen jalanan. Pertama kali Deni

mengamen di Surabaya di kawasan perempatan depan Hotel Sahid Surabaya. Di kawasan itu dia hanya mengamen pada siang hari, pada malam hari dia bersama-sama temannya mengamen di warung lesehan di sepanjang Jalan Dharmawangsa.

Statusnya sebagai pengamen jalanan sudah dijalani Termas selama delapan tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan Termas pernah bekerja sebagai loper koran di kawasan Demak Surabaya. Pasar yang sepi membawanya sampai pada keputusan untuk menjadi pengamen jalanan. Pemuda berusia 20 tahun ini awalnya menekuni pekerjaan ini hanya ikut teman-temannya. Sebagai pengamen jalanan dia tidak mempunyai harapan yang banyak. Pendapatan dari pekerjaan ini, bagi dia, yang terpenting bisa dipakai untuk membeli makan, minum, dan rokok.

Sebagai anak jalanan Termas sehari-hari ditampung di rumah singgah Insani di kawasan Jagir Surabaya. Di rumah singgah ini dia bersama dengan teman-temannya, sesama pengamen jalanan, mendirikan grup musik yang diberi nama “Bilawa.” Sebagai pengamen jalanan Termas dan teman-temannya sesama anak jalan bukanlah orang-orang minimalis. Dia bersama dengan teman-temannya mempunyai obsesi tidak sekedar sebagai pengamen jalan, namun bisa menciptakan lagu dan dinyanyikan sendiri, seperti yang dilakukan oleh grup-grup musik lain yang telah mempunyai nama. Bagi Termas dan teman-temannya obsesi itu bukanlah impian, namun impian yang menjadi kenyataan. Mereka telah berhasil menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu tersebut kadang-kadang mereka nyanyikan ketika mengamen di jalanan. Termas menceritakan:

”....Pada awalnya kami mempunyai niat hanya untuk membuat puisi, sehingga lagu-lagu yang ada awalnya dari puisi. Niat bikin puisi kok malah bisa dibuat lagu. Kadang-kadang lagu-lagu tersebut dibuat untuk ngamen juga. Karena lagu-

*lagu tersebut kebanyakan bercerita tentang anak jalanan.
Sehingga pas dinyanyikan untuk ngamen....”*

Waiter Yang Menjadi Pengamen Jalanan

Nasib Iwan sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya sesama pengamen jalanan, karena dia pernah mempunyai pekerjaan tepat di sebuah diskotik. Iwan juga pernah menyandang status sebagai mahasiswa ketika dia belajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya hingga semester 3. Di tempat kerjanya yang penuh dengan hingar bingar suara musik dan gemerlap lampu itu dia pernah bekerja sebagai waitrees. Iwan bekerja di tempat itu hanya beberapa bulan, tanpa sebab yang jelas dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia bekerja membantu kakaknya menjadi distributor minyak tanah. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya usaha kakaknya tutup.

Kebangkrutan usaha distributor minyak tanah yang menjadi usaha kakaknya ini membawa pria berusia 32 tahun ini beralih ke pekerjaan menjadi pengamen jalanan. Bagi Iwan menjadi pengamen jalanan tidaklah mudah dilalui. Seperti yang dialami pengamen jalanan lainnya dia beberapa kali terkena razia oleh petugas dari pemerintah kota Surabaya. Dia menyebut razia sebagai cakupan. Iwan suatu saat terkena cakupan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kepada petugas pemerintah kota dia hanya mampu menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) pengamen. Meskipun demikian dia tidak khawatir karena sudah ada yang mengurus, yaitu pengurus dan bus Damri. Sebagai pengamen di bus kota, terutama Damri, dia harus menjadi anggota pengamen dengan diberikan tanda anggota.

Tema Lagu: Dari Tsunami hingga Demokrasi

Seni adalah cermin masyarakatnya. Dalam konteks demikian seni salah satunya dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial yang dialami masyarakat. Seni yang mengekspresikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut merupakan

produk dari kepekaan pencipta seni tersebut terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakatnya. Kesenian bagi seniman dapat dipakai sebagai salah satu media untuk mengekspresikan protes sosial atau kritik sosial. Salah satu bentuk kesenian tersebut adalah seni musik. Bagi seniman musik kebanyakan seni musik merupakan seni pertunjukan yang tidak hanya mengekspresikan rasa keindahan manusia (fungsi menghibur masyarakat), melainkan juga mempunyai fungsi ekonomi dan sosial. Melalui pertunjukan di atas panggung seniman musik dapat memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh popularitas. Tercatat nama-nama seperti Rhoma Irama, Iwan Fals, Doel Soembang, Ebit G. Ade, dan beberapa lainnya yang menjadikan seni musik sebagai fungsi sosial, yaitu untuk melakukan kontrol sosial terhadap kondisi masyarakat yang diwarnai ketidakadilan, ketimpangan, dan demoralisasi. Melalui syair lagu-lagunya mereka melakukan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat, bahkan penguasa politik.

Demikian halnya seniman (pengamen) musik jalanan di Surabaya. Bagi pengamen jalanan tidak banyak pilihan bagi mereka untuk mengakses sumber-sumber daya untuk menjamin kehidupan yang layak. Mereka di masyarakat metropolitan seperti Kota Surabaya merupakan orang-orang yang marjinal, tidak berdaya, dan terpinggirkan oleh kompetisi kehidupan yang tidak berjalan adil dan seimbang. Bagi mereka hidup di kota besar seperti Surabaya tidak banyak pilihan. Mengamen menjadi pilihan yang terpaksa mereka pilih. Bagi pengamen jalanan mengamen bukan sekedar sebagai arena untuk menjamin survival hidupnya, musik jalanan mereka menggunakan sebagai saluran untuk mengekspresikan kondisi kehidupan yang sehari-hari mereka hadapi. Musik jalanan mereka pakai untuk mengekspresikan kondisi riil kehidupan mereka secara individual dan kondisi kehidupan masyarakat di tingkat supra lokal. Mereka menggunakan seni musik untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat yang

senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya. Melalui syair lagu mereka mengekspresikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang senjang dan tidak adil. Tidak hanya mengkritik masyarakat yang senjang, musik jalanan juga oleh pengamen dipakai untuk mengawasi fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kondisi masyarakat yang senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya mereka ekspresikan melalui simbol-simbol berupa rangkaian kata-kata indah yang mempunyai makna. Simbol-simbol tersebut mereka komunikasikan secara verbal dengan alunan nada yang dapat menghibur setiap insan yang mendengarkan dan menghayatinya. Simbol-simbol yang mereka komunikasikan secara verbal merupakan refleksi realitas kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya. Pengamen jalanan terpinggirkan tidak hanya oleh kompetisi kehidupan yang tidak adil dan seimbang, melainkan juga berhadap-hadapan dengan tingkah polah aparatur birokrasi dan aparatur represif di tingkat supra lokal. Jalan dan angkutan umum merupakan arena kehidupan mereka.

Aparatur Negara, Dari Arogansi hingga Resistensi

Dalam tataran empirik dijumpai banyak fenomena aparatur birokrasi dan militer yang menjadi instrumen bagi para pemilik modal untuk menjamin kepentingan-kepentingannya, seperti kasus penggusuran perkampungan kumuh, penertiban PKL (pedagang kaki lima), dan penindasan buruh. Mereka tidak pernah membela kepentingan-kepentingan kelas proletar, bahkan ketika mereka menjadi instrumen pemilik modal mereka berhadapan dengan kelas proletar.

Para pengamen jalanan di Surabaya tidak jarang mempunyai pengalaman berhadapan dengan aparatur suprastruktur

seperti itu. Dalam memasuki arena tersebut mereka ternyata tidak jarang berhadap-hadapan dengan aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara, yang menurut para pengamen jalanan, tidak menjalankan fungsi idealnya. Di mata pengamen jalanan, aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara idealnya menjalankan fungsi pelayanan dan memberikan pengayoman kepada rakyat jelata, termasuk di dalamnya adalah kaum marginal di perkotaan. Mereka melihat dan mengalami tingkah polah aparaturnya supra lokal, yang melakukan pengejaran, menggusur, menendang, menyikut, dan merampas hak-hak hidup sesamanya, yang mengais sumber kehidupan sebagai tukang becak, pedagang asongan

Pedagang Asongan

*Kejar mengejar jadi tontonan
Antara kamtib dan pedagang asongan
Pedagang asongan diburu bagai buronan
Tragedi ini terjadi di negeri ini
Malu dong sama bumi pertiwi
Gengsi dong sama Bu Megawati
Pedagang asongan dirampas
Sungguh malangkan mereka
Becak-becak digusurin, jadi kapalkah becaknya
Tunjukkanlah yang benar pada kami.... generasi nanti...
Jangan main sikut..... jangan main tendang....
Kalau ingin perut kenyang
Jangan main gusur kalau ingin hidup makmur
Yang jadi pejabat..... jadilah pejabat
Asal jangan suka sikat uang rakyat
Yang jadi polisi jadilah polisi
Asal jangan main sikat sembarangan
Yang jadi pak hansip jadilah pak hansip
Kalo kerja pak jangan suka mengintip
Yang jadi pak lurah jadilah pak lurah
Ngurus KTP, biasa saja....
Yang jadi pak ABRI..... jadilah pak ABRI
Asal jangan suka pukul rakyat pribumi*

Melalui syair-syair lagu para pengamen jalanan menggambarkan tingkah polah aparat negara ke dalam berbagai ekspresi. Dalam lagu *Pedagang Asongan*, misalnya, pengamen jalan mengekspresikan aparat negara sebagai kekuatan yang senang menggusur, menyikut, menendang, dan merampas hak hidup kelompok marginal di perkotaan, seperti tukang becak, pedagang asongan, bahkan mereka sebagai pengamen jalanan. Dalam lagu itu para pengamen jalanan mengekspresikan aparat negara seharusnya malu terhadap bumi pertiwi dan gengsi terhadap Megawati, yang pada saat syair lagu dibuat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada tataran teortik, bagi Max Weber (dalam Ritzer, 1996) aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya diatur melalui peraturan perundangan yang ketat, hirarkhi kewenangan yang jelas, dan bahkan harus ada pemisahan antara pemilikan yang *private* (pribadi) dengan pemilikan yang *public*. Pemisahan ini bertujuan untuk meredusir penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Namun pada tataran empirik acapkali aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya tidak bisa membedakan antara pemilikan yang *private* dengan pemilikan yang *public*. Sudah menjadi fenomena umum kendaraan dinas pada hari libur lalu lalang di jalan raya, bukan dipakai sebagai sarana untuk menjalankan tugas kantor, melainkan untuk kepentingan pribadi. Pemberitaan di media massa setiap hari mengabarkan pengadilan terhadap para pejabat negara yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, ilegal logging, penyelundupan BMM (Bahan Bakar Minyak), dan lain-lain.

Perhatian terhadap fenomena sosial semacam itu bukan hanya milik masyarakat dari strata menengah-atas, pengamen jalanan pun peka dan kritis, bahkan protes terhadap fenomena-fenomena itu. Mereka mempunyai cara dan media sendiri untuk mengajukan kritik sosial dan protes. Lagu dan pekerjaan mereka jadikan cara dan media untuk melakukan protes. Melalui lagu dan

alunan nada mereka mengkomunikasikan pesan kepada siapa saja yang berada di dalam kendaraan umum. Mereka tidak mempedulikan apakah pesan yang mereka sampaikan diperhatikan atau tidak. Bagi pengamen jalan melalui lagu dan alunan nada mereka telah menyampaikan kebenaran kepada publik.

Tiang Negara

*Kau tabu rayap-rayap makin banyak di mana-mana
Di balik baju resmi, merongrong tiang negara
Kau tabu babi-babi makin gemuk di negari ini
Mereka dengan tenang memakan desa dan kota
Rayap-rayap yang ganas merayap
Berjas dasi dalam kantor,
Makan minum darah rakyat
Babi-babi yang gemuk sekali
Tenang, tentram, berkembang biak
Tak ada yang peduli menggemuk para babi
Lautan sawah dan hutan
Menggencet anak rakyat
Meremas jantung mereka
Merayap para rayap
Dalam bumi yang kian rapuh
Resahnya tipu rakyat
Terbantai tanpa ampun*

Dalam lagu yang mereka beri judul *Tiang Negara*, misalnya, para pengamen jalanan mengekspresikan tingkah polah aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat dengan sebutan *rayap*. Mereka menyebutnya rayap untuk menggambarkan kerakuran aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat. Masyarakat umum menganggap bahwa rayap adalah binatang sejenis serangga yang sangat berbahaya bagi bangunan rumah.

Rayap-rayap, meskipun serangga, namun dapat *mengerogoti* dan menghancurkan bangunan rumah berukuran raksasa dalam waktu yang relatif cepat. Bangunan rumah akan roboh bila tiang-tiangnya digerogeti oleh rayap. Oleh para pengamen, negara diibaratkan bangunan rumah, sedangkan para koruptor adalah rayap-rayap yang siap merobohkan dan menghancurkan bangunan rumah tersebut.

Rayap-rayap di mata pengamen jalanan tidak hanya suka makan uang rakyat, melainkan juga suka berkolaborasi (kolusi) dengan rayap-rayap lainnya, rayap-rayap suka melakukan pemaksaan, dan bahkan siap untuk memakan tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat.. Hasil korupsi mereka nikmati dengan cara melakukan konsumsi secara menyolok mata. Dalam tataran teoritik, seperti diteorikan oleh Veblen, rayap-rayap tersebut adalah *leisure class*. Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan waktu luang yang banyak. Mereka dalam melakukan konsumsi dengan cara menyolok mata.

Tingkah polah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) aparaturnegara juga mereka ekspresikan dalam lagu *Indonesia Oye*. Dalam syair lagu ini pengamen jalanan ekspresikan bahwa para koruptor adalah orang-orang yang suka makan uang rakyat. Untuk memakan uang rakyat tidak perlu melakukan pemaksaan, melainkan cukup dengan melakukan tindakan korupsi, dan hasil korupsi sudah dapat dinikmati.

Di mata pengamen jalanan aparaturnegara birokrasi tidak lebih sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Melalui kolaborasi dengan aparaturnegara birokrasi, para pemilik modal melakukan ekspansi untuk memperluas usahanya di wilayah-wilayah pedesaan yang subur. Dengan modal yang mereka miliki siap untuk membeli apa saja yang dimiliki oleh penduduk di wilayah pedesaan.

Melalui bait-bait lagu para pengamen jalanan menggambarkan bahwa tanah-tanah pertanian yang subur di kawasan

pedesaan semakin sempit akibat dari modernisasi yang melanda kawasan pedesaan. Dalam bahasa mereka, mereka memaknai modernisasi di kawasan pedesaan sebagai penggusuran sawah rakyat. Untuk melakukan penggusuran sawah rakyat di mata pengamen jalan tidak perlu datang ke desa, melainkan cukup menjalin kolusi dengan aparaturnegara.

Indonesia Oye

Ingin makan uang rakyat (banyak)

Bukan berarti harus me(maksa)

Cukup dengan korupsi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Ingin gusur sawah rakyat (desa)

Bukan berarti harus ke (desa)

Cukup dengan kolusi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Hai Indonesiaku (hai Indonesiaku)

*Tanah subur rakyat nganggur (tanah subur rakyat
nganggur)*

Hai Indonesiaku

Sawah rakyat kamu gusur

Tanam padi, tumbuh pabrik

Tanam jagung, tumbuh gedung

Tanam modal, tumbuh korupsi

Tanam cinta, tumbuh aborsi

Tanam demonstran, tumbuh TNI

Modernisasi yang semakin deras menyentuh wilayah pedesaan dilihatnya sebagai fenomena konversi fungsi lahan pertanian. Modernisasi di wilayah pedesaan, di mata pengamen jalanan, bukan bermakna perubahan yang membawa kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera. Yang terjadi justru banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, kemudian menjadi pengangguran, karena lahan pertaniannya berubah fungsi. Dalam bait-bait lagu konversi fungsi lahan ini mereka ekspresikan seperti *tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh*

gedung. Bagi mereka modernisasi di pedesaan seperti itu hanya akan melahirkan pengangguran, seperti bait lagu *tanah subur rakyat nganggur*.

Bagi pengamen jalanan pembangunan identik dengan ketidakadilan, penindasan, penggusuran, penderitaan, dan bahkan pembunuhan. Di mata pengamen jalanan, pembangunan milik aparaturnya negara dan para pemilik modal. Rakyat kecil justru dianggap oleh pengamen jalanan menjadi korban dari pembangunan. Pembangunan bukan menjadi hak rakyat kecil.

Dalam perspektif modernisasi, pembangunan adalah upaya untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat yang belum modern (terbelakang) menjadi kehidupan yang modern. Masyarakat modern ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang modern, gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan modern, dan lainnya. Karena itu, perkampungan kumuh perlu ditata dan dimodernkan agar mempunyai nilai lebih, yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan melalui *trickle down effect*.

Dalam pelaksanaannya, acapkali menggunakan suprastruktur, seperti ideologi, birokrasi, dan militer, sebagai instrumen untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan pembangunan tersebut. Atas nama ideologi keindahan kota dan pembangunanisme, perkampungan kumuh sudah menjadi keharusan untuk digusur, karena sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan lahan dan nilai ekonominya rendah. Bahkan para investor dan aparaturnya negara menggunakan ideologi demi keindahan kota dan pembangunanisme untuk menjamin kepentingan-kepentingannya. Dalam ideologi pembangunanisme siapa yang menolak tanahnya digusur dianggap tidak mensukseskan pembangunan, dan bahkan diancam akan diberi label-label seperti masih berbau PKI (Partai Komunis Indonesia), dan sebagainya. Atas nama keindahan kota dan pembangunanisme investor atas “seijin” aparaturnya negara me-

netapkan secara sepihak harga ganti rugi tanah dan bangunan, bahkan tanpa ganti rugi bagi tanah dan bangunan yang digusur.

Demi keindahan kota dan pembangunan masyarakat yang menempati perkampungan kumuh harus merelakan tanah dan bangunannya digusur dengan atau tanpa ganti rugi. Ganti rugi yang diterima pun acapkali tidak cukup untuk membeli tanah dan rumah di tempat lain dan biaya sosial dan ekonomi lainnya. Mereka harus meninggalkan rumah dan tanahnya yang telah lama mereka tempati. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya, seperti pekerjaan dan sekolah anak-anaknya. Dengan demikian penggusuran tidak hanya bermakna orang kehilangan tanah dan bangunan, tetapi juga kehilangan akses ke sumber-sumber daya kehidupan. Mereka mengekspresikan fenomena sosial penggusuran tersebut seperti syair lagu berikut:

Nglawan

*Mengapakah harus ada yang digusur
Sementara mereka juga punya hak
Apakah ini pembangunan
Kalau rakyat kecil selalu jadi korban
Haruskah untuk keindahan kota
Memaksa korbannya mereka yang lemah
Jangan biarkan derita terus mengalir
Sampai kapankah ini akan berakhir
Bangunlah sudah tiba waktunya
Untuk kita saling bergandeng tangan
Merebut segala perubahan
Ayo lawan, lawan, lawan, hancurkan
Segala bentuk penindasan
Segala bentuk penggusuran*

Secara teoritis anggota militer dan polisi merupakan alat negara yang diberi kewenangan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Mereka harus menjalankan fungsi untuk

menjaga keutuhan teritorial negara, dan melindungi serta menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Organisasi militer dan polisi juga merupakan satu-satunya institusi negara yang diberi kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik untuk menciptakan keutuhan teritorial negara, melindungi dan menciptakan rasa aman.

Namun pada tataran empirik tidak selalu fungsi-fungsi ideal tersebut dijalankan oleh aparaturnya militer dan kepolisian. Dalam banyak kasus, paling tidak di mata para pengamen jalanan, tingkah polah aparaturnya pertahanan dan keamanan mulai dari hansip, polisi, dan tentara acapkali justru lupa tentang fungsi-fungsi yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Bagi pengamen jalanan, aparaturnya militer dan kepolisian, tidak lebih sebagai aparaturnya represif negara yang melakukan penindasan, sok berkuasa, menyiksa, kejam, dan bahkan membunuh rakyat kecil, yang tidak berkuasa dan lemah.

Mengadu Pada Indonesia

*Hari ini saya sengaja mengadu
Kepadamu Indonesiaku
Tentang ulah aparatmu yang lupa waktu
O.... tentu kamu tahu
Bayangkan ulah mereka
Mereka sok berkuasa
Mereka suka menyiksa
Bahkan membunuh sudah biasa
Aku melihat tindakan aparat
Pukul sana pukul sini sampai rumah sakit
Aku melihat kekejaman aparat
Tembak sana tembak sini sampai ke akhirat
Sialan (sialan)
Aparat kurang ajar
Rakyat kecil dijadikan bahan percobaan
Sialan (sialan)
Aparat itu preman
Kuasanya melebihi kuasa Tuhan*

Orde Itu Bernama Orde Babi

Meskipun rezim Orde Baru telah runtuh tahun 1998 dengan ditandai gulingnya kekuasaan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia, para pengamen jalanan belum sepenuhnya melupakan trauma politik yang terjadi selama 32 tahun tersebut. Era reformasi, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, di mata pengamen jalanan belum sepenuhnya menciptakan perubahan, paling tidak perubahan menurut mereka. Mereka mencita-citakan bahwa era reformasi akan mampu menciptakan perubahan yaitu seperti ungkapan *mandi susu cita-citaku*, bukan *pinggang sakit tidur di kursi*. Era reformasi di mata pengamen jalanan tak ubahnya perpanjangan Orde Baru. Melalui lagu *Orde Babi* para pengamen jalanan mengkritik orang-orang yang mengaku reformis saat pemilu, tetapi setelah menang pemilu melupakan dan meninggalkan rakyat.

Orde Babi

Pinggang sakit tidur di kursi

Mandi susu cita-citaku

Ngaku reformis saat Pemilu

Setelah menang rakyat dilupakan

Setelah menang rakyat ditinggalkan

Rambut gondrong uwan dan ketombean

Siang malam kerjanya kotak katik nomer

Penguasa baru takut adili golkar

Koruptor Orba malah dibiarkan

Koruptor Orba dijadikan saran

Laguku ini anti Orde Baru

Orba jahat sengsarakan banyak rakyat

Laguku ini mengajak kamu

Rakyat miskin bersatu boikot pemilu

Rakyat miskin bersatu hancurkan orde babi

Penguasa pada masa era reformasi dipandang sebagai penguasa yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadili Golkar, sebagai simbol Orde Baru yang tersisa. Penguasa era reformasi dianggapnya tidak mempunyai keberanian untuk mengadili para koruptor Orde Baru, bahkan membiarkan dan memposisikan mereka sebagai pemberi saran pemerintahannya.

Lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan pada setiap kesempatan ini secara eksplisit mereka sebut sebagai lagu anti Orde Baru, sebuah rezim yang mereka anggap telah menyengsarakan rakyat. Melalui lagu ini mereka berupaya membangun kesadaran politik di kalangan rakyat miskin untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Mereka mengajak rakyat miskin untuk bersatu padu memboikot pelaksanaan Pemilu. Lagu ini mereka akhir dengan sikap kontravensi yang ditujukan kepada rakyat miskin untuk menghancurkan sebuah rezim yang mereka beri nama *Orde Babi*.

Nyanyian Demokrasi

Tidak selamanya benar apa yang diteorikan oleh Saymor Martin Lipset, seorang ahli politik Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa demokrasi dibangun di atas landasan variabel ekonomi dan sosial. Tingkat melek huruf dan kesejahteraan ekonomi menjadi prasyarat utama pembangunan demokrasi di suatu negara. Lipset mengajukan proposisi teoritis bahwa demokrasi harulah dibangun dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat melek huruf penduduk yang tinggi. Sebaliknya tingkat kesejahteraan ekonomi dan melek huruf penduduk yang rendah menyebabkan rendahnya kesadaran berdemokrasi penduduk.

Tidak demikian halnya di kalangan pengamen jalanan. Mereka yang rata-rata berasal dari lapisan masyarakat bawah secara ekonomi dan tingkat melek huruf mereka juga masih rendah telah mempunyai kesadaran berdemokrasi yang tinggi.

Meskipun mereka di kota Surabaya adalah orang-orang yang termarjinalkan, namun mereka mempunyai pemahaman tentang demokrasi dan berdemokrasi yang memadai, paling tidak gagasan-gagasan demokrasi mereka tuangkan ke dalam bait-bait syair lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan. Pengamen jalanan menjadikan syair lagu untuk mengekspresikan kehidupan demokrasi di kalangan mereka, bahkan melalui syair lagu mereka mencoba membangun kehidupan demokrasi di lingkungan masyarakat lebih luas dengan pesan-pesan moralnya.

Bagi mereka demokrasi adalah simbol dari ekspresi kebebasan, kebenaran, dan keadilan. Demokrasi adalah adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas berpendapat dan berorganisasi, bebas dari pengusiran, bebas dari penekanan, bebas dari penekanan, bebas dari rasa takut, bebas dari sistem politik yang totaliter serta bebas dari penjajahan oleh bangsa sendiri. Melalui judul lagu *Kemerdekaan* dan *Turun ke Jalan* pengamen jalanan melalui gagasan-gagasannya mengajukan kritik terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru yang belum sepenuhnya merdeka. Masyarakat dipandang masih terbelenggu oleh penindasan, penekanan, tidak mempunyai kebebasan berpendapat dan berorganisasi, rasa takut, dan dibelenggu oleh pemerintahan yang otoriter.

Melalui syair lagu *Kemerdekaan* pengamen jalanan memandang adanya kebebasan berbicara bagi setiap warga negara karena merupakan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara tersebut dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negara. Sebagai negara merdeka, menurut pandangan mereka, wujud demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah penduduk harus bebas dari penindasan, penekanan, dan pengusiran. Dalam pandangan pengamen jalanan negara demokrasi adalah negara yang memberi keadilan dan mampu menegakkan kebenaran

Turun ke Jalan

*Mari kita bergandeng tangan
Tuk menggalang kekuatan
Dengan turun ke jalan
Mari kita kepalkan tangan
Tuk lontarkan perlawanan
Terus maju ke depan
Mati kita acungkan tangan
Tuk teriakan
Segala tuntutan perubahan
Rakyat pasti menang
Memenangi penjajahan
Karena kemerdekaan
Adalah jiwa kita
Rakyat pasti menang
Mengenyahkan penindasan
Karena keadilan
Adalah nurani kita
Yakinlah rakyat pasti menang
Karena kemerdekaan adalah jiwa kita
Karena keadilan adalah nurani kita*

Selain itu mereka dalam lagu *Turun ke Jalan* menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di masyarakat demokrasi yang dicita-citakan dengan bait-bait lagu yang diulang-ulang *rakyat pasti menang*. Segala bentuk penindasan dan penjajahan akan dimenangkan oleh rakyat dengan bergandengan tangan untuk menggalang kekuatan. Di mata para pengamen jalanan kemerdekaan merupakan jiwa mereka, dan keadilan merupakan nurani mereka.

Bahkan pengamen jalanan dalam syair lagu *Kompeni* memandang rezim Orde Baru tak ubahnya seperti Kompeni pada masa kolonial Belanda. Tak ubahnya seperti jaman Kompeni, pada saat ini rakyat di negeri ini belum memperoleh kemerdekaannya. Rakyat merasa dijajah oleh bangsannya sendiri

dan bagaikan hidup dalam penjara. Rezim Orde Baru melakukan penindasan dan menimbulkan penderitaan rakyat. Digagas juga rakyat dalam kondisi diintimidasi, dan kehidupan tidak ada demokrasi karena demokrasi dimatikan. Wakil rakyat digambar tidak ubahnya antek-antek Kompeni yang suka *ngapusi* (membohongi) rakyat.

Kemerdekaan

*Kemerdekaan untuk bicara
Harus kita rebut
Karena berbicara adalah hak azazi
Untuk berbicara dilindungi konstitusi
Kami menentang pengusuran
Kami menentang pencekalan
Kami menentang penindasan
Karena ini negara merdeka
Bukan negara yang dijajah
Karena ini negara demokrasi
Bukan negara totaliter
Mari bersama bikin organisasi
Mari bersatu menggalang kekuatan
Kita bikin tuntutan
Dengan turun ke jalan
Tegakkan kebenaran
Tegakkan keadilan*

Dalam negara demokrasi ada kebebasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi politik dengan berbagai cara dan media, serta melakukan komunikasi politik. Baik dalam lagu *Kemerdekaan*, *Turun ke Jalan*, maupun *Kompeni* para pengamen jalanan mengajukan solusi untuk menciptakan masyarakat yang bebas, merdeka, berkeadilan dan tegaknya kebenaran hanya dapat dicapai melalui penggalangan kekuatan dan secara bersama-sama turun ke jalan. Turun ke jalan menjadi gagasan utama bagi pengamen jalanan untuk melakukan partisipasi politik. Bagi

pengamen jalanan pilihan ini menjadi pilihan satu-satunya ketika semua saluran komunikasi politik buntu dan lembaga-lembaga politik, seperti eksekutif, legislatif, dan partai politik tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kompeni

*Ya percuma..... ya percuma
Dari jaman kompeni dan sampai saat ini
Kita ditindas sampai mati
Katanya rakyat sudah tak dijajah
Tapi hanya masih terpenjara
Katanya negara sudah merdeka
Tapi rakyat sudah menderita
Ya percuma..... ya percuma
Dari hari ke hari
Demokrasi diinjak mati
Katanya bebas berorganisasi
Tapi masih diintimidasi
Katanya sudah beraspirasi
Wakil rakyat masih membohongi
Ya ngapusi..... ya ngapusi
Mari bangkitlah kawan semua
Tuk hancurkan segala bentuk kekuasaan
Ayo bangkitlah kawan semua
Tuk merebut segala bentuk hak kita yang dirampas*

Tsunami: Solidaritas dan Duka Pengamen Jalanan.

Duka Aceh juga menjadi duka bagi para pengamen jalanan. Apa yang dirasakan oleh rakyat Aceh di ujung Barat Pulau Sumatra juga dirasakan oleh para pengamen jalan di ujung Timur Pulau Jawa ini. Para pengamen jalanan berempati terhadap duka masyarakat Aceh yang mengalami bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam yang dialami masyarakat Aceh menjadi keprihatinan dan duka masyarakat dunia. Masyarakat dunia berempati seolah-olah apa yang sedang dialami oleh masyarakat

Aceh juga sedang mereka rasakan. Masyarakat dunia mengekspresikan rasa prihatin dan duka dengan cara memberikan bantuan berupa materi maupun nonmateri.

Tsunami

*Bencana melanda negeri ini
Ribuan jiwa melayang pergi
Akibat gelombang tsunami
Banda Aceh nama tempat peristiwa
Meulaboh jadi saksi yang nyata
Mayat-mayatnya sudah bergelimpangan
Ini salah siapa, ini dosa siapa
Mungkinkan Tuhan memurkai kita
Atas segala perbuatan kita
Darah bersimbah jiwapun merana
Selamat jalan wahai saudaraku
Damailah wahai anak negeri
Ciptakan sebuah lagu perdamaian
Satukan tujuan demi cita-cita
Bangunlah kembali Banda Aceh
Siang panas.... semoga anda bahagia
Bercanda bercumbu dengan alam sekitarnya
Tak ada yang pantas untuk dibanggakan
Karena kita kan kembali pada Tuhan
Pokoknya di mana saja anda
Harus hati-hati
Sebentar lagi Joyoboyo
Banyak copet keluyuran
Dompot di saku belakang
Jangan sampai pindah tangan
Nona pakai perhiasan
Awat dijambret orang
Ini sekedar himbauan arek suroboyo*

Seperti masyarakat lainnya, bencana tsunami yang dialami oleh masyarakat Aceh juga menjadi keprihatinan dan duka yang mendalam bagi para pengamen jalanan. Dengan caranya sendiri mereka mengekspresikan rasa keprihatinan dan dukanya. Bagi pengamen jalanan untuk membantu beban masyarakat Aceh tidak harus dengan memberikan bantuan berupa materi, namun dengan bantuan nonmateri dan tanpa harus datang ke Aceh. Para pengamen jalanan mempunyai cara sendiri untuk membantu masyarakat Aceh. Layaknya seniman, mereka membantu masyarakat Aceh dengan lagu.

Bencana alam, seperti gelombang tsunami, ternyata mampu meretas batas-batas negara, budaya, kelas, dan lainnya. Tsunami mampu menggugah kesadaran setiap individu manusia yang dalam dirinya dibekali rasa dan karsa. Kesadaran pengamen jalan mereka ekspresikan melalui lagu. Dalam bait-bait lagu mereka mencoba mengkaitkan bencana alam tersebut dengan manusia yang melakukan kesalahan dan dosa. Akibat kesalahan dan dosa tersebut, Tuhan telah menunjukkan murkanya kepada manusia yang lemah. Melalui lagu pengamen jalanan juga mengajak masyarakat Aceh untuk menciptakan perdamaian dan bersatu untuk membangun kembali Aceh yang telah porak poranda.

Lebih dari itu, pengamen jalanan di wilayah perkotaan dianggap menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Mereka oleh masyarakat kebanyakan dianggap sebagai orang-orang yang kalah dalam pertarungan untuk memperebutkan sumber daya di kota. Mereka tidak memiliki sumber daya, sehingga mereka adalah orang-orang yang tertutup peluangnya bahkan ditolak oleh sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan kecuali memasuki sektor informal, yaitu mengamen. Sebagai anak jalanan mereka tidak lepas dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat, yaitu kehidupan mereka yang keras, dan sangat dekat dengan dunia kejahatan, seperti

pencurian, penjambretan, pencopetan, perampokan, dan lainnya. Debagai *arek Suroboyo* secara keseluruhan mendapatkan stereotipe *bonek* (bondo nekat), yang senang melakukan pemalakan, perampasan, pengrusakan, dan lainnya.

Namun tidak demikian halnya dengan para pengamen jalanan di kota Surabaya. Mereka jauh dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat itu. Meskipun sebagian besar waktunya mereka habiskan di jalanan, melalui syair lagunya mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati nurani dan moralitas. Paling tidak dalam lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan untuk para korban tsunami di Aceh, misalnya, mereka menyelipkan peringatan dan pesan moral kepada penumpang angkutan umum agar berhati-hati terhadap segala bentuk kejahatan yang dapat menimpa para penumpang, baik pencopetan maupun penjambretan. Pesan moral ini mereka ekspresikan sebagai jawaban terhadap label-label yang sifatnya stigmatif, seperti bonek, keras, suka berkelahi, suka merampas, suka memalak, dan melakukan tindakan kriminal lainnya, yang ditujukan kepada *arek Suroboyo*. Makna syair lagu itu juga mereka tunjukkan kepada masyarakat bahwa *arek Suroboyo* masih mempunyai moralitas yang tinggi (lihat lagu *Tsunami*)

Lagu Untuk Anak Jalanan.

Melalui lagu para pengamen jalanan mengekspresikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari anak jalanan. Trotoar dan jalan raya seolah-olah menjadi saksi bisu kehidupan anak jalanan yang mengais rejeki dari mendengarkan suara tanpa mengenal lelah. Dalam lagu-lagunya para pengamen jalan menggambarkan anak-anak di bawah umur menikmati masa bermainnya di trotoar dan pinggir jalan. Sambil bermain mereka bekerja. Sambil bernyanyi mereka juga bekerja. Anak-anak seperti itu digambarkan telah kehilangan kasih sayang yang didambanya. Mereka juga

merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tiada kunjung tiba. Itulah cerita kehidupan, cerita kehidupan anak jalan. Mereka menunggu mimpi menjadi kenyataan. Mereka hanya berharap perjalanan waktulah yang akan berbicara.

Anak Jalanan

*Anak-anak bermain di pinggir jalan
Anak-anak gembira dengarkan suara
Anak-anak bernyanyi sambil bekerja
Anak-anak bekerja terus menyanyi
Hu..... hu..... hu.....
Hu..... hu..... hu..... (2x)
 Bermain sambil bekerja,
 Bermain sambil bermain (2x)
 Itulah hari-hariku
 Itulah suasanaku
 Itulah kondisiku
 Itulah..... a ha
Kudengar kudengar dan kudengar lagi
Di jalan kulihat dan kulihat lagi
Seorang anak kecil terluka hatinya
Hilang kasih sayang yang didambanya
Berjalan susuri sepanjang trotoar
Hari demi hari tiada bosan kau bernyanyi
Kau songong matahari dengan harapan
Akankah kau bahagia kan kau jelang
 Inilah cerita dari kehidupan
 Hati yang luka rindu bahagia
 Akankah mimpi-mimpi jadi kenyataan
 Biarlah waktu yang bicara
 Ho..... ho..... ho..... ho.....
 Biarlah waktu yang bicara*

Mereproduksi Lagu sudah Populer

Memang, tidak selalu pemusik jalanan mengambil tema-tema lagu protes sosial. Namun demikian, diketahui ternyata setiap lagu yang dibawakan mempunyai makna bagi pemusik

jalan, selain konteks dan kondisi obyektif pengamen jalan. Mak As, yang sudah tua usianya misalnya lebih memilih lagu islami karena faktor usianya. Kentrungan yang selalu dia bawa saat Mak As mengamen di jalan. Alat ini tidak ia beli di toko, karena memang tidak ada toko yang menjualnya, melainkan ia buat sendiri. Kentrungan adalah sebuah alat yang terbuat dari bahan kayu dan senar dari karet. Alat ini cukup sederhana dan mudah dibuat. Kata Mak As, siapa saja bisa membuat dan memainkannya. Ia tidak mengeluarkan biaya untuk membuat alat ini, karena ia hanya memanfaatkan kayu dan karet bekas.

Alat ini dia pakai untuk mengiringi lagu-lagu yang bernafaskan Islami dan lagu-lagu Jawa. Mak As memilih lagu-lagu qosidah, lagu-lagu sholawat, dan kadang-kadang dia selingi dengan lagu-lagu Jawa. Bagi Mak As menyanyi lagu harus disesuaikan dengan kondisi penyanyi dan konsumennya. Menurut penilaiannya lagu yang tepat untuk penyanyi seusia dia (46 tahun) adalah lagu-lagu religius dan lagu-lagu Jawa. Selain itu, ia menyanyikan lagu-lagu tersebut juga berdasarkan diri pada permintaan konsumen.

Masak mas orang setua usia saya menyanyikan lagu-lagu anak muda. Tidak pantas dan siapa yang mau dengar. Rasanya lebih pas saya menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat dan lagu-lagu Jawa. Lagu yang saya nyanyikan saya sesuaikan dengan umur saya dan permintaan dari orang-orang yang nanggap saya. Biasanya orang-orang itu suka dengan lagu-lagu Jawa.

Lagu-lagu yang dibawakan Mak As dalam mengamen lebih banyak unsur rekreatifnya. Orang seusia Mak As tidak menggunakan lagu-lagu untuk melakukan kritik sosial atau protes terhadap kondisi dirinya maupun kondisi masyarakat. Kondisi kemiskinan yang dialaminya bersama keluarga seolah-olah tidak ia rasakan sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Ia lebih memposisikan dirinya sebagai penghibur orang lain dengan mendapatkan kompensasi uang.

Sama dengan Mak As, Naning dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengamen jalanan hanya bermodalkan alat musik kentrungan dan suaranya yang pas-pasan. Bagi Naning kentrungan sangat membantu dia dalam menyanyikan lagu-lagu yang ia bawaikan. Lain dengan Mak As, Naning yang usianya masih relatif muda, lebih memilih lagu-lagu beraliran dangdut dan campursari. Mudah dinyanyikan menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan aliran musiknya. Selain itu, lagu-lagu tersebut cocok dinyanyikan oleh orang seusianya.

Identik dengan Mak As, Naning tidak pernah mempunyai gagasan untuk menjadikan lagu-lagu yang ia nyanyikan sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes. Meskipun hidup dalam kemiskinan, namun ia bersama suaminya rela menerima keadaan itu. Bagi Naning, pendapatan Rp 10.000 hingga Rp 15.000 sehari sudah dirasakan cukup. Ia bersama suaminya yang tinggal di Jagir Wonokromo itu mengaku setiap hari ia mengamen mulai pagi hari hingga sore hari.

Deni mempunyai alasan subyektif yang berbeda. Ia lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer yang digandrungi oleh kalangan anak muda. Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh kelompok musik, seperti: Peterpan, Padi, dan Slank. Lagu-lagu dari grup-grup musik tersebut, bagi Deni, disukai dan digandrungi oleh kalangan remaja yang menjadi obyek dia mengamen di Jl. Dharmawangsa. Bagi Deni dan teman-temannya Jl. Dharmawangsa merupakan jalan yang potensial dapat mendatangkan penghasilan besar. Di sepanjang jalan itu banyak beroperasi warung lesehan dan kawasan kos-kosan mahasiswa. Deni mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp 20.000 per hari dari mengamen di sepanjang jalan itu. Belakangan ini Deni dan teman-temannya lebih memilih mengamen di Jl. Pemuda dekat Monkasel (Monumen Kapal Selam). Tempat ini dia pilih karena lebih menguntungkan selain ramai, juga dia bisa bekerja sambil sebagai tukang parkir.

Kondisi penumpang kendaraan umum menjadi pertimbangan Iwan memilih lagu-lagu yang dinyanyikan selama mengamen. Bagi Iwan lagu yang dinyanyikan oleh seorang pengamen harus disesuaikan dengan kondisi penumpang. Sebagai pengamen ia mempersiapkan lagu-lagu dengan banyak aliran. Ketika Iwan menghadapi penumpang yang rata-rata usianya lanjut usia ia memilih lagu-lagu *oldist* atau lagu-lagu nostalgia, sebaliknya ketika berhadapan dengan penumpang yang rata-rata usianya masih muda dia menyanyikan lagu-lagu populer yang sedang hits, misalnya lagu-lagu yang dinyanyikan Dewa, Radja, Ada Band, dan lainnya.

Iwan kadang-kadang menyanyikan lagu yang menyindir polah tingkah polisi pamong praja yang dinilainya tidak adil dan tidak manusiawi. Polisi pamong praja dia ekspresikan dalam syair lagu sebagai aparat yang suka mengobrak warung, tukang becak, dan pengamen. *“Sebenarnya jangan seperti itu caranya, sebaiknya diberi tempat atau lahan sebelum diobrak. Terkadang saya tidak sepenuhnya menyalahkan polisi pamong praja, karena mereka hanya menjalankan tugas dari yang lebih atas,”* kata Iwan.

Lagu-lagu bertema cinta, kata Wawan, tidak cocok dinyanyikan oleh seorang pengamen jalanan sesusia dia. Lagu-lagu tersebut lebih cocok dinyanyikan oleh penyanyi di media televisi. Lagu-lagu Iwan Fals yang syairnya berisi kritik sosial yang menjadi pilihan Wawan. Ia kadang-kadang juga menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, yang juga mempunyai syair yang mengandung kritik sosial dan protes. Wawan yang baru berusia 23 tahun menjadikan lagu dan mengamen sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes terhadap kondisi masyaralat yang senjang dan tidak adil. Kaena itu, ia dalam memilih lagu ia kaitkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari dia sebagai pengamen jalanan. Termasuk mengekspresikan kehidupan anak jalanan dalam syair-syair lagu yang dia ciptakan dan nyanyikan. Sebagai anak jalanan dia tidak mempunyai media untuk mengungkapkan kondisi

kehidupannya yang rentan. Lembaga-lembaga suprastruktur politik seperti lembaga legislatif yang menjalankan fungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat dianggapnya bukan media yang tepat dan efektif. Seolah-olah semua saluran yang idealnya dapat menampung aspirasi dan keluhan kehidupannya tertutup. Dia bersama-sama dengan teman mengamen lebih memilih menciptakan lagu sendiri untuk mengungkapkan kehidupan anak jalanan yang rentan tersebut.

Penutup:

Suatu Analisis Wacana tentang Makna Lagu Anak Jalanan

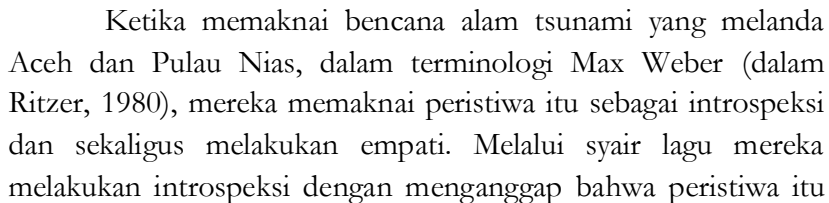
Bagi sebagian masyarakat berkesenian untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keindahan, sebagian masyarakat lainnya berkesenian selain untuk memenuhi rasa keindahan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan yang sifat material, bahkan dipakai untuk mengekspresikan rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan kesenjangan. Alasan subyektif orang memenuhi kebutuhan rasa keindahan yang bersifat non-material lebih bersifat rekreatif, yang dalam bahasa Max Weber (dalam Ritzer, 1996) disebut dengan tindakan sosial afektual. Ketika dipakai sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan material, berkesenian seperti itu lebih bersifat rasional instrumental. Berkesenian sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial dan kritik sosial. Cara ini lebih bersifat ideologis.

Pandangan seperti itu justru merupakan antitesis dari pandangan Karl Marx (Ritzer, 1996) yang menganggap kesenian adalah bagian dari suprastruktur yang lebih menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Bagi para pemilik modal dunia kesenian diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan, misalnya, yang terjadi pada dunia hiburan di Indonesia. Di balik gemerlapnya dunia hiburan di Indonesia, para pemilik modal mendapatkan keuntungan besar.

Para pengamen jalanan mencoba mengkaitkan kondisi obyektif masyarakat dan kondisi subyektif kehidupannya dengan substansi syair-syair lagu yang mereka ciptakan. Kondisi obyektif dan subyektif tersebut mereka ekspresikan melalui rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna dalam lagu-lagu. Dalam posisi demikian para pengamen jalanan memposisikan kesenian tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya material, mereka juga memposisikan kesenian melalui syair-syair lagu yang diciptakan dan dinyanyikan sebagai media untuk melakukan kontrol sosial, kritik sosial, bahkan protes terhadap tingkah polah aparat birokrasi dan aparat represif negara yang mereka nilai telah melakukan ketidakadilan, penindasan, perampasan, penggusuran, dan bahkan pembunuhan kepada orang-orang yang berasal dari masyarakat lapisan bawah. Mereka juga menggunakan syair lagu-lagu yang mereka ciptakan untuk melakukan kritik terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang meluas di Indonesia dan kebijakan-kebijakan supratsruktur yang lebih memihak kepada para pemilik modal daripada memihak masyarakat kelas bawah. Bahkan melalui lagu-lagu yang diciptakan, mereka mengekspresikan apa yang mereka alami sebagai pengamen jalanan dan mengekspresikan preferensi mereka tentang *the best rezim* atau masyarakat yang ideal.

Bagi pengamen jalanan, melalui syair lagu, *the best rezim* atau masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang dicirikan oleh adanya kemerdekaan dalam semua aspek kehidupan. Negara yang warga negaranya memperoleh kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, bebas dari rasa takut, bebas dari penindasan, bebas penggusuran, bebas dari polah tingkah aparat birokrasi dan keamanan yang represif, bebas dari pembunuhan, bebas dari kemiskinan, dan kebebasan lainnya. Melalui syair lagu-lagunya para pengamen jalanan mempunyai preferensi tentang demokrasi dan negara yang merdeka. Mereka menyebut *orde babi* untuk menggambarkan protes mereka terhadap pemerintah Orde Baru

Bagan 8.1
Musik Jalanan:
Cermin Hubungan antara Negara dan Pengamen Jalanan



sebagai akibat dari dosa manusia dan Tuhan menunjukkan murka-Nya. Dalam empatinya para pengamen jalanan mempunyai kesadaran bahwa di tengah-tengah kemiskinan yang mereka alami, sebagai manusia rasa kemanusiannya tersentuh ketika sebagian dari anggota masyarakat mengalami bencana alam yang tak mampu dihadapi oleh manusia manapun. Kesedihan dan rasa kemanusiaan itu mereka ekspresikan melalui syair-syair lagu.

Bagi pengamen jalanan mengamen di jalan adalah sebagai okupasi (pekerjaan). Pekerjaan satu-satunya yang menjadi salah satu sumber pendapatan. Penhasilan mereka sebagai pengamen jalanan sangat tergantung pada kompensasi yang diberikan oleh orang lain. Mereka memperoleh penghasilan rata-rata Rp 10.000. Meskipun kecil, bagi para pengamen jalanan, yang dipentingkan adalah penghasilan tersebut diperoleh dengan cara legal dan halal. Secara sosiologis para pengamen jalanan mengalami mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial yang terjadi antar-sektor informal. Sebelum menjadi pengamen jalanan mereka rata-rata pernah bekerja di sektor informal lainnya, seperti pedagang makanan, buruh pabrik, buruh bangunan, bahkan pekerjaan tetap. Mereka mengalami mobilitas sosial karena berbagai macam sebab, mulai dari krisis ekonomi hingga penertiban oleh aparat polisi pamong praja.

Para pengamen jalanan mempunyai alasan subyektif yang beragam tentang pemilihan lagu yang dinyanyikan. Dilihat dari lagu yang dipilih dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: campursari (Jawa), religius, populer, dangdut, dan kritik sosial (lagu ciptaan sendiri). Lagu-lagu campursari dinyanyikan oleh pengamen jalanan berjenis kelamin perempuan serta usia muda dan tua, representasi dari kategori ini adalah Mak As dan Naning. Selain campursari Mak As juga menyanyikan lagu religius seperti qosidah dan sholawat. Naning juga merupakan representasi yang menyanyikan lagu dangdut. Lagu-lagu populer dan lagu-lagu yang mengandung kritik sosial lebih dipilih oleh pengamen jalan

berjenis kelamin laki-laki dan berusia relatif muda. Wawan dan Iwan merupakan representasi pengamen jalanan yang memilih lagu-lagu populer, sedangkan Termas adalah sosok yang lebih memilih lagu-lagu ciptaannya sendiri yang di dalamnya mengandung kritik sosial dan protes.

Sementara dilihat dari alasan subyektif memilih lagu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: usia, kemudahan, dan konsumen. Pengamen jalanan yang berusia tua, seperti Mak As, lebih pantas menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat, dan campursari, sementara Termas yang usianya baru 20 menganggap tidak pantas menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta, ia lebih memilih lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri yang mengandung kritik sosial dan protes. Bagi Naning, ia menyanyikan lagu-lagu dangdut dan campursari karena mudah untuk dinyanyikan, sementara Wawan dan Iwan lebih mempertimbangkan selera konsumen dan menyesuaikan dengan segmen pasar. Bagi Wawan dan Iwan lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer, seperti lagu-lagu milik Dewa, Radja, Padi, Slank, dan Peterpan untuk memenuhi selera konsumennya yang rata-rata berusia masih muda. Tidak jarang ketika berhadapan dengan penumpang bus yang rata-rata berusia lanjut mereka menyanyikan lagu-lagu nostalgia (*oldist*).

Daftar Pustaka

- Bakker, J.W.M.
1990 **Filsafat Kebudayaan. Suatu Pengantar.** Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.
- Cassier, Ernst.
1987 **Manusia dan Kebudayaan. Sebuah Esei tentang Manusia.** Diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- 194 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Danandjaja, James.

- 1983 Fungsi Teater Rakyat bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia. Dalam Edi Sedyawati dan Sapardi Djoko Damono. **Seni dalam masyarakat Indonesia. Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 1984 **Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain**. Jakarta: Grafitipers.

Darmono, Sapardi Djoko.

- 1977 Kritik Sosial dalam Sastra Indonesia: Lebah tanpa Sengat. **Prisma**. No. 10/ Tahun VI.

Krippendorff, Klaus.

- 1991 **Analisis Isi. Pengantar Teori dan Metodologi**. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Pers.

Murray, Alison J.

- 1992 Budaya Kampung dan Elok Radikal di Jakarta. **Prisma**. No. 5/Th. XXI.

Peursen, C.A. van.

- 1985 **Strategi Kebudayaan**. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.

Ritzer, George

- 1996 **Sociological Theory**. Fourth Edition. Toronto: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 1980 **Sociology A Multiple Paradigm Science**. Revised edition. Toronto: Allyn and Bacon, Inc.

Soekiman, Djoko.

- 2000 **Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Media Abad XX)**. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Sudiarja, A.

- 1983 Susanne K. Langer: Pendekatan Baru dalam Estetika. Dalam M. Sastrapratedja. **Manusia Multi Dimensional. Sebuah Renungan Filsafat**. Jakarta: Gramedia.

Susanto, Astrid S.

- 1977 Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara. **Prisma**. No. 10/Tahun VI.

Bab 9

Mahasiswa dan Orang Miskin Kota

Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan
Usman Mulyadi

Pendahuluan

Apa yang dialami daerah kota besar dan sekitarnya di Indonesia terutama pada tahun 1990-an adalah pertumbuhan bidang jasa dan industri yang makin pesat, meninggalkan bidang pertanian yang menjadi tujuan semula pembangunan. Tujuan semula, sektor industri dibangun untuk menopang pertanian, sesuai dengan GBHN pada Pelita I. Pertumbuhan ini ternyata mengakibatkan pengalihan fungsi lahan, dari yang semula perumahan ke pusat perdagangan atau dikenal dengan istilah CBD (*Central Bussiness District*) dan kawasan industri, dari lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman baru – harga komoditas pertanian rendah dan keuntungan dari nilai tanah untuk alih fungsi (*Kompas*, 15 Agustus 2002, “*Menteri Pertanian Bungaran Saragih: Konversi Lahan Terjadi akibat Harga Komoditas Pertanian Rendah*”; perhatikan juga Kustiawan, 1997; 15-32; bandingkan dengan kasus kota Mexico City, Sao Paolo dan Kalkuta pada Todaro dan Stilkind, 1985: 4-9), keadaan serupa terjadi di Surabaya dan daerah sekitarnya, atau dikenal dengan *Gerbangkertasusila*, dengan Surabaya, sebagai pusat pertumbuhannya.

Dari beberapa catatan, konsekuensi dari alih fungsi atau konversi lahan ini adalah terjadi “penggusuran” penghuni pemukiman “kumuh.” Setelah digusur, kemudian didirikan gedung-gedung bertingkat, baik sebagai hotel dan kantor, seperti Darmo Tegal dan Pandegiling, maupun industri, seperti daerah Rungkut (SIER) dan pemukiman baru. Perluasan kawasan industri ini juga merambah sepanjang jalan menuju Sidoarjo dan Mojokerto (Trosobo dan Krian), demikian pula Kab. Gresik dengan diawali oleh Pabrik Semen Gresik dan Petrokimia Gresik. (*lihat* laporan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur tentang *Pelayanan di Bidang Sertifikasi Tanah*, tahun 1998-1999).

Akibatnya, pertama, terjadi “penggusuran” kampung-kampung lama dan kemudian terdesak ke daerah pinggiran kota. Akibatnya, selalu ada konflik antara pengembang dan kampung lama yang akan tergusur. Konflik ini berpulang pada mekanisme perencanaan kota yang tambal sulam dan dinilai oleh masyarakat lebih menguntungkan pengembang dan kelompok kepentingan lainnya. Pihak birokrasi kota dan Dewan lebih berpihak pada pengembang dengan mengatasmakan kepentingan publik (Surbakti, 1994: 49-68; 1996: 22; Suyanto, 1996: 37-48). Sementara itu, alasan yang serupa, sektor informal yang menjadi penopang kelompok masyarakat rentan kota agar dapat bertahan di lingkungan kota juga turut digusur, perhatikan kasus Tunjungan dan sejumlah pasar tradisional.

Kedua, akibat tergusur kampung-kampung lama, dan bergeser ke daerah pinggiran kota ini, menimbulkan konflik baru di pemukiman baru. Alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian, yaitu industri, perdagangan dan pemukiman, menimbulkan kesenjangan dan konflik antara penduduk asli dan penghuni pemukiman baru. Mereka, penduduk asli, kehilangan mata pencaharian sebagai petani ketika tanahnya dijual, dan sementara itu uang “landasan” biasanya dibeli barang-barang konsumtif – akibatnya setelah uang habis, begitu pula dengan barang-barang-

nya, mereka menjadi pengangguran, atau bila memenuhi syarat, menjadi buruh di pabrik yang berdiri di atas tanahnya. Penurunan status dari pemilik menjadi buruh ini menimbulkan rasa tidak senang ketika melihat penghuni baru, pindahan dari masyarakat kota yang “relatif” lebih mapan hidupnya. Di pihak lain, mereka harus berjuang mengembangkan hubungan buruh-majikan--karena dipandang sebagai mereka yang lebih membutuhkan pekerjaan, maka perlakuan majikan tidak menguntungkannya.

Ketiga, proses sosial yang demikian ini kemudian berlanjut menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah sosial baru dimulai masalah pengangguran, masalah kenakalan remaja hingga tingkat kriminalitas, dari sekedar corat-coret pagar hingga pencurian di perumahan baru. Dari beberapa catatan penghuni pemukiman baru, mereka dan anak-anaknya mengalami benturan dengan penduduk asli (lama), mulai dari perkelahian anak-anak, di-“balak” hingga mengalami pencurian bila rumah ditinggalkan. Inilah konsekuensi dari rangkaian fenomena pertama.

Keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota ini sebenarnya bukan hal yang baru, di Yogyakarta, bersama dengan Romo Mangun, mereka terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Kali Code dengan mengajar anak-anak di bawah kolong, dan berbagai LSM didirikan oleh mahasiswa untuk kepentingan tersebut. Perkembangan selanjutnya, mereka terlibat pula dalam mengartikulasikan kepentingan dalam bentuk demonstrasi, seperti kasus Dita Indah Sari dalam demonstrasi buruh, dan berbagai aktivitas serikat buruh lainnya.

Selain memberi keberanian untuk mengartikulasikan kepentingan strategis, kehadiran mahasiswa, khususnya teater kampus, membuat bentuk lain dari aksi demonstrasi kelompok tersebut. Dari pengamatan awal, keterlibatan teater kampus terjadi tatkala menyelami kehidupan kelompok tersebut untuk menghasilkan ide-ide cerita teater yang sarat akan kritik sosial. Namun,

pada gilirannya observasi partisipan ini bergulir menjadi tindakan aksi atau partisipatif untuk memberdayakan kelompok tersebut.

Metode Penelitian¹²

Dengan memperoleh data tentang isu-isu ketimpangan sosial-politik yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat rentan kota, tulisan ini juga mencermati perubahan pola demonstrasi dan keterlibatan mahasiswa sebagai kaum intelektual. Dengan mengambil *setting* di Surabaya, dilakukan wawancara secara mendalam pada mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota. Selain itu, karena peristiwanya telah berlangsung sebelum penelitian ini dilakukan (*ex-post facto*), maka tulisan ini juga menggunakan sumber-sumber sejaman, seperti Jawa Pos, Surya, Kompas, Bernas, Pikiran Rakyat dan Suara Merdeka. Sumber-sumber tersebut diakses melalui internet. Selain dari situs-situs surat kabar, data juga diperoleh dari situs-situs lsm, seperti Elsam dengan situs www.elsam.com dan konsorsium kelompok miskin kota (UPC) dalam www.urbanpoor.or.id.

Penggunaan wawancara secara mendalam itu bagian dari *oral history* dilakukan pada pelaku, yaitu mahasiswa yang terlibat dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota, khususnya mereka yang berasal dari teater kampus. Individu-individu diperoleh dengan secara purposif dan *snowball*, begitu pula kelompok masyarakat rentan kota yang pernah melakukan demonstrasi. Informasi awalnya diperoleh dari sumber-sumber pertama (cara pertama). Dalam wawancara tersebut, diharapkan dapat memperoleh (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang

¹² Diolah dari Hasil Penelitian Fundamental yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2005 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) usaha mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan.

Dari data sumber-sumber surat kabar, dengan melalui tahapan dalam analisis sejarah dilakukan rekonstruksi tentang pola demonstrasi dan perubahannya pada tahun 1990-an hingga sekarang, berikut isu-isu kesenjangan sosial politik, sedangkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam tentang (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) proses mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan. Di dalam analisis kualitatif, data tersebut diberi koding. Data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara mendalam dilakukan analisis domain, hingga analisis komponensial. Dari teknik-teknik analisis ini, diperoleh proposisi-proposisi yang menggambarkan fenomena tersebut.

Orang Miskin Kota sebagai Korban Kebijakan Pembangunan

Tata Ruang Kota:

Pengusuran, kehilangan rumah dan tempat usaha?

Sungguh tepat sekali, bila kita menggunakan gambaran dari James C. Scott (1983: 27-52) tentang betapa rentannya masyarakat miskin. Ia menggambarkan bahwa setiap kebijakan makro yang terkena pada keluarga miskin seperti ombak yang menerjang orang yang tenggelam dengan air sebatas hidung. Sekali ombak datang, maka tenggelam pula orang tersebut. Oleh karenanya, mereka, kelompok miskin menggunakan prinsip dahulukan selamat (*the safety first*).

Meski terbatas, masyarakat desa tetap memiliki memiliki pilihan. Bila rawan pangan misalnya, orang desa akan mengalihkan makanan pokoknya, dari beras ke ketela, dan seterusnya. Bila tergusur, meski tanah itu telah menjadi bagian diri dan keluarganya, mereka masih bisa menempati tempat-tempat lain di desa yang belum dikelola – sudah barang tentu berubah statusnya dari pemilik ke *ngindung* atau *magersaren* (strata yang rendah dalam masyarakat desa). Tidak demikian pada masyarakat miskin kota, pilihan mereka (amat) sangat terbatas. Klugman (2002: 63) mencatat bahwa orang miskin (rentan) kota sangat tergantung pada pasar kerja yang dualistik dengan bentuk pembayaran tunai (*cash*), tidak memiliki akses pada infrastruktur formal, tidak memiliki akses tanah dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan terakhir dalam situasi ini mereka lebih mengandalkan pada jaringan keluarga daripada pemerintah.

Perubahan tata ruang kota sering berakibat pada masyarakat miskin kota dalam hal pemukiman dan penghidupan (mata pencaharian). Dari pengamatan Ramlan Surbakti (1996: 20-21) pada tahun 1990-an, ada delapan pola perebutan ruang kota.¹³ *Pertama*, konflik antara pemkot dan warga berkaitan dengan perubahan peruntukan tanah, seperti kasus Ngagel Jaya Selatan (antara pusat perdagangan dan jalur hijau), dan Simogunung (penggusuran untuk jalur hijau). *Kedua*, konflik antara pemkot dan perusahaan swasta akibat tindakan swasta menyerobot tanah milik pemkot.¹⁴ *Ketiga*, konflik antara warga dan investor. *Keempat*,

¹³ Perebutan tata ruang kota terlihat pada tarik ulur tentang perda RT/RW. Di dalam perda tersebut, kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki akses di birokrasi (pemkot) dan legislatif (dewan), mengatur peruntukan daerah. Di tingkat pelaksanaan, perebutan tata ruang kota terjadi di BPN untuk status tanah dan perijinan usaha di Dispenda.

¹⁴ Dan, kini terjadi perebutan akibat alih pemilikan dari Pemkot ke perusahaan atau milik pribadi, seperti kasus Gelora Pancasila dan Kolam Renang Brantas.

konflik antara pemkot dan warga yang tergusur akibat pelebaran jalan atau kepentingan umum karena ganti rugi terlalu rendah, seperti: kasus pelebaran jalan Kenjeran untuk *ring road* Timur. *Kelima*, konflik antara eksekutif dan Dewan (publik) karena peralihan aset pemkot tanpa persetujuan Dewan, seperti penjualan *bondho deso* di Pradah Kali Kendal), di Lakasantri dan pengalihan Pasar Induk Sayur Kendangsari. *Keenam*, konflik antara warga, investor dan pemkot karena pemkot membebaskan tanah penduduk dengan alasan untuk kepentingan umum, tetapi kenyataannya untuk kepentingan swasta, seperti: kasus Tubanan, Kasus Pradah Kalikendal, kasus makam Kalidami, dan kasus penggusuran rumah warga Gang Kaliasin Pompa (Kedungdoro), *Ketujuh*, penggunaan tanah fasilitas umum yang tidak jelas dan dijual oleh developer, seperti: kasus tanah YKP di Balongsari dan berbagai kompleks perumahan. Terakhir, konflik akibat salah prosedur dari pihak pemkot, seperti kesalahan pembebasan tanah dan penyimpangan uang dalam kasus SSC dan kasus dua SK untuk bidang tanah yang sama di Dukuh Kupang Timur.

Penggusuran demi tata ruang kota, dengan kata lain ada perubahan peruntukan lahan ini, bagi masyarakat rentan kota sangat berpengaruh. Mereka tidak saja kehilangan tempat tinggalnya, tetapi juga kehilangan mata pencaharian. Oleh karenanya, warga di sekitar Padegiling misalnya, hingga kini tetap bertahan tidak mau pindah. “Berapa pun ganti rugi, asal bisa dapat rumah dan bangun usaha lagi. Kami bersedia.”¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan salah seorang warga Padegiling, tanggal 30 Juli 2005.

Tabel 9.1
Penggusuran dan Kurbannya di Surabaya Tahun 1990-sekarang

Tahun ¹⁶	Penggusuran	Keluarga	Warga
2005	2 kasus	---	500
2004	1 kasus	---	50
2002	3 kasus	200	8.000
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200
1992-1993	26 kasus	109	2.913
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200

Sumber: Suyanto (1996), Supramudyo (2000), dan *UPC-link* (2005)

Namun demikian, dari seluruh kasus tersebut, tidak satupun berpihak pada warga. Pemkot lebih cenderung berpihak pada investor. Pada tahun 2003-2005 peremajaan pasar tradisional misalnya telah mengakibatkan kerugian bagi pedagang tradisional. Di Wonokromo misalnya, pedagang tidak lagi bisa berjualan selama 24 jam, tetapi dibatasi hingga pukul 21.00. Tokonya jauh lebih sempit dibandingkan dengan pasar lama. Mereka, pedagang lama juga tetap harus membeli, sehingga ketika relokasi kembali sebagian mereka tidak setuju, bahkan dari pengamatan¹⁷ di lapangan sejumlah pedagang menderita stress, terutama mereka yang tidak memiliki uang.

¹⁶ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

¹⁷ Pengamatan bulan Januari s/d Mei 2005.

UMR, UMK, dan Sistem Kontrak versus Kenaikan BBM

Persoalan lain dalam masyarakat rentan kota adalah upah. Selain bekerja di sektor informal, sebagian masyarakat tersebut bekerja di pabrik, pusat perbelanjaan (toko) dan perkantoran. Mereka tinggal tidak pernah jauh dari tempat kerjanya, seperti yang telah disebutkan di kampung-kampung tengah kota untuk pusat perbelanjaan, dan kampung-kampung sekitar pabrik, seperti Rungkut, Ngagel, dan Dupak. Sebagian lain membeli rumah tipe RSS jauh di pinggir kota, bahkan di luar kota, seperti Driyorejo. Tinggal kost di dekat tempat bekerja dan membeli rumah di pinggir kota sebenarnya tidak jauh berbeda karena pengeluaran rumah tangga kurang lebih sama. Mereka yang tinggal di tempat kerja harus membayar kost dan biaya lainnya, sementara itu bila di pinggir kota harus mengeluarkan uang transport yang kuang lebih sama besarnya.

Ada perbedaan pendapatan (upah), bagi mereka yang bekerja di di toko, restoran, atau usaha rumah tanggan lainnya, upahnya sering di bawah standar UMR, tidak jaminan kesehatan, meski memperoleh uang makan. Kelebihannya, hubungan antara pekerja dan pemilik bersifat personal, kekeluargaan, hal itu bergantung pada pemiliknya. Tidak jarang, sering terjadi kekerasan atau pelecehdan karena pemilik bersifat sewenang-wenang.

Sementara itu, mereka yang bekerja di pabrik memperoleh upah per harinya. Upah tersebut dapat dibayar setiap minggu, atau setiap bulan. Selain menerima upahnya, sering perusahaan juga memberikan uang makan, dan insentif lainnya. Perusahaan biasanya menyertakan buruhnya (tetap) ke dalam jamsostek. Preminya dibayar setiap hari oleh perusahaan, namun bila tidak masuk dengan (tanpa) ijin upah buruh dipotong oleh premi tersebut.

Upah tersebut mengalami kenaikan yang ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhannya. Pada tahun 1990-an, upah tersebut berdasarkan patokan kebutuhan fisik minimum (KFM) dengan juga mempertimbangkan tingkat inflasi pada harga-harga barang. Ukuran KFM ini memiliki kelemahan. KFM bujangan diukur dengan 2.600 kalori/hari, K-2 (KFM untuk seorang buruh, isteri dan dua anak) setara dengan 8.100 kalori/hari, bila dengan tiga anak, maka KFM setara dengan 10.000 kalori/hari. Kriteria ini menjadi kelemahan pertama dari ukuran tersebut, buruh disetarakan dengan alat produksi dan upah disetarakan dengan tenaga yang dikeluarkan. Kelemahan kedua, barang-barang yang digunakan untuk mengukur KFM hanya berdasarkan kebutuhan buruh laki-laki yang jauh lebih sederhana daripada kebutuhan buruh perempuan (Rudiono, 1992: 70-71).

Dari ukuran ini, kemudian setiap propinsi menetapkan upah minimumnya yang dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional). Asumsinya, harga barang pada setiap propinsi berbeda, oleh karenanya upah minimum buruh pun berbeda. Pada pemerintahan Suharto, upah minimum tersebut ditentukan tidak saja hanya pada wilayah propinsi, tetapi pada wilayah kabupaten atau kota dengan dikenal UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum tersebut tidak saja berdasarkan kebutuhan fisik minimum, tetapi kebutuhan hidup minimum, yaitu dengan menambah beberapa komponen barang kebutuhan lainnya.

Bila pada tahun 1980-an dengan mengikuti hasil kajian Rudiono (1992: 70-76) berdasarkan perbandingan data tahun 1982, 1985 dan 1988, maka upah tersebut tidak pernah melebihi 60% dari KFM, perbandingan tertinggi dicapai di DI Aceh (kini NAD) pada tahun 1982, yaitu 84,6% dari KFM. Kini, untuk Jawa Timur, UMR yang ditetapkan telah sedikit melebihi dari KFM, yaitu sekitar 4%. Kenaikan tersebut menjadi tidak berarti karena

bersamaan dengan penetapan UMR, harga-harga kebutuhan pun semakin naik, terutama kebutuhan bahan pokok (Dinas Infokom Jatim, 2004a).

Bila memperhatikan tabel 9.2, meski kenaikan harga beras berjalan secara linear dengan tidak tajam,¹⁸ tetapi sebenarnya biaya hidup telah meningkat seiring harga BBM yang sering kali ditetapkan pada pertengahan tahun tersebut. Ada perbedaan pola yang dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) dan pemerintahan sesudahnya. Bila pada masa pemerintahan Suharto, kenaikan BBM tidak secara transparan dan terkesan mendadak, sehingga kenaikan harga terjadi pada paska kenaikan harga tersebut. Sementara itu, pada pemerintahan sesudahnya, rencana kenaikan harga tersebut telah disampaikan antara tiga hingga empat bulan sebelumnya. Pada saat pengumuman rencana kenaikan tersebut, para pedagang telah menaikkan harga, dan kemudian berlanjut pada saat penetapan harga baru BBM. Lebih celaka lagi, kenaikan harga BBM sering diikuti oleh kenaikan harga air minum dan tarif dasar PLN.

¹⁸ Pemerintah melakukan pengendalian harga beras dengan cara membuka kran impor beras dari Vietnam dan Cina, sehingga harga beras lokal menjadi jatuh karena secara bersamaan sering dilakukan pada musim panen. Kebijakan ini sangat merugikan kelompok petani (baca **Kompas**, 24 September 2005, "Menggugat Kebijakan Absurd Impor Beras.").

Tabel 9.2.
UMR/UMK Surabaya, BBM, Harga Beras, Emas, Premium dan Kurs
Rupiah thp Dollar tahun 1990-sekarang

Dalam rupiah

Tahun ¹⁹	UMR & UMK	Komoditi		Bahan Bakar Minyak		Kurs Rupiah thp Dollar
		Beras	Emas ²⁰	M. Tanah ²¹	Premium	
2005	578.500	4.000	123.000	700-1.800	1.810-2.400	9.900
2004	550.580	3.700	114.000	700-1.800	1.810	8.900
2003	515.850	3.500	90.000	700-1.800	1.810	8.250
2002	453.500	3.500	80.000	820-1.530	1.450-1.750	8.250
2001	330.700	3.300	76.000	895-400	1.150-1.450	8.250
2000	270.000	3.100	110.000	350	1.150	8.250
1999	230.000	3.000	90.000	350	1.000	8.250
1998	---	1.350-4.500	140.000	280-350	1.000-1.200	2.375-10.500
1997	132.500	1.350	140.000	280	700	2.478
1993-1997	---	800	90.000	280	700	2.000
1991-1993	89.677	700	26.000	220	550	2.000
1990-1991	78.000	600	22.000	190-220	450	2.000
1986-1990	63.285	200-500	10.000	165	385	1.644

Sumber: Kwik (1998), Rudiono (1991) Dinas Infokom Jatim (2005a, 2005b, dan 2005c), Tabor dan Sawit (2001), Pertamina (2005), Astono dan Rosyadi (1997), **Tempo** (1991), 89.677Rahman (1994).

¹⁹ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

²⁰ Harga emas berfluktuasi mengikuti harga emas dunia dan kebutuhan dalam waktu tertentu, seperti: pada waktu puasa harga turun, namun beberapa hari sebelum hari raya harga emas naik, dan akan jatuh kembali sesudah hari raya.

²¹ Selain menentukan patokan harga, untuk minyak tanah Pemerintah menentukan harga eceran tertinggi (HET).

Pemerintah seringkali menenangkan dengan mengatakan tidak ada kenaikan harga yang berarti, atau akan mengadakan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Namun demikian, pada kenyataannya kenaikan tersebut bisa mencapai 100%., dan, bagi masyarakat miskin kota, seberapa pun kenaikannya harga sangat berpengaruh pada kehidupannya. Hal itu akan berpengaruh pada usahanya (sektor informal), seperti dikatakan oleh penjual nasi pecel, *“Ngene iki susah. Ora mundak no rego sing tuku iyo wis kurang. Opo maneh mundakna rego, ora ono sing tuku. Aku bakal rugi. Ora balek modal. Pilih rego tetap, untunge sithik, sing penting mlaku terus”* (Kalau begini susah. Tidak menaikkan harga saja orang yang beli semakin berkurang. Apalagi menaikkan harga, tidak ada yang beli. Saya bisa rugi. Tidak kembali modal. Saya pilih harga tetap, untung sedikit).

Kondisi buruh pabrik jauh tidak beruntung. Kenaikan UMR, kenaikan BBM dan kurs rupiah terhadap dollar sering mengakibatkan pabrik bangkrut, *“apalagi sekarang harus berhadapan dengan barang-barang Cina yang murah.”* Ketika sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bangkrut, perusahaan menggunakan banyak cara untuk mem-PHK, mulai dari secara ketat mencari kesalahan dari buruhnya hingga langsung mem-PHK dan menyerahkannya pada Disnaker dalam proses P4P. Meskipun tidak jarang dimenangkan pihak buruh, tetapi jarang dilaksanakan eksekusi keputusan tersebut. Sementara itu, buruh terus menunggu tanpa pesangon dan mencari pekerjaan lain.

Tahun 2005 ini, peraturan perundang-undangan terbaru memungkinkan pengusaha untuk menggunakan sistem kontrak. Sistem kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, sesudah dapat diperbaharui. Cara ini kini yang dipakai oleh pengusaha, dengan sistem ini tidak perlu mengeluarkan uang pesangon, dan pekerja cenderung tidak menuntut karena takut tidak diperpanjang. Ada kecenderungan perusahaan memilih sistem kontrak. Untuk itu, perusahaan sering merubah suasana kerja, sehingga karyawan

tetap tidak betah, memilih keluar (mengundurkan diri) dan kemudian memasukkan karyawan baru. *“Wah, tepat saya sekarang ketat banget. Salah sedikit, langsung di-SP. Kalau sudah lebih dari dua kali, disuruh membuat surat pengunduran diri,”* seperti yang dikatakan oleh seorang karyawan pusat perbelanjaan yang ada di tengah kota Surabaya.

Selain penggunaan sistem kontrak, pengusaha juga menggunakan sistem kerja borongan, upah bergantung dari tingkat produktivitas buruh. *“Iya, pernah saya hanya memperoleh lima puluh ribu rupiah seminggu. Apa cukup untuk makan? Iya, ngutang ke tetangga, kalau diberi,”* kata Mbak T, seorang buruh yang berstatus janda dengan dua anak. Di dalam sistem borongan tersebut, buruh bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing. Setiap ada barang yang hendak dikerjakan, maka kelompok-kelompok itu berebut dan mengerjakan sebanyak mungkin. *“Kalah berebut, maka hasilnya sangat sedikit,”* tambah Mbak T.

Dalam sistem ini, pengusaha hanya membayar sesuai dengan hasil produk yang dikerjakan. Tidak ada tambahan, seperti: uang makan dan uang kehadiran. Ikatan antara buruh dan pengusaha hanya sebatas ada tidaknya pekerjaan borongan. Bila tidak ada pekerjaan borongan, maka buruh pun menganggur di rumah. Buruh hanya menunggu panggilan dari pabrik. Sementara menunggu pekerjaan, buruh menggunakan tabungannya untuk bekerja ke sektor informal, seperti berjualan pentol bakso dengan sepeda *pancal*.

Mahasiswa sebagai Gaya Hidup Kelas Menengah Kota

Dari pengamatan di lapangan, meski tidak ada penelitian yang menggambarkan adanya korelasi antara status sosial ekonomi dan pilihan universitas, fakultas berikut jurusanannya, nampak terjadi segregasi mahasiswa dari status sosial ekonominya. Untuk perguruan tinggi swasta, mahasiswa yang

berasal dari status sosial ekonomi menengah ke atas lebih memilih Ubaya (Universitas Surabaya), UK Petra, dan WM (Universitas Widya Mandala). Pola yang demikian ini terjadi pula pada mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Oleh karenanya, harga kost di sekitar kampus tersebut bisa mencapai di atas 1 (satu) juta. Di sekitar kampus UK Petra, kamar kost di daerah Siwalankerto mencapai harga 3 juta dengan iklan “*kamar kost dengan fasilitas hotel berbintang.*”

Sementara itu, kelompok mahasiswa berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah memilih tinggal di kamar kost dengan harga 100 ribu ke bawah. Mereka tinggal di daerah kampung-kampung yang padat. Kamar kostnya diisi dua hingga empat orang dengan tempat tidur susun. Dari pengakuan seorang mahasiswa Unesa, Ani (bukan nama sebenarnya), mereka mendapat kiriman sekitar 300 ribu hingga 500 ribu rupiah. Seratus ribu untuk kamar kost, sisanya untuk makan, perlengkapan sehari-hari (sabun, shampo dan odol) dan buku. Jatah makan sehari adalah 10 ribu rupiah, dan sering mereka hanya makan dua kali sehari.

Dengan jumlah kiriman yang terbatas, mereka menerapkan strategi adaptif yang unik diamati. Ada berbagai cara, antara lain: hanya membeli lauk, sedangkan nasi ditanak sendiri, bahkan ada yang mengakui bahwa pada minggu terakhir setiap bulan hanya makan nasi, krupuk dan sambal, atau makan 2 (dua) kali sehari. Tempat tinggal juga disiasati, mulai dari cara kontrak dengan beberapa teman, hingga tinggal di UKM dan Masjid Kampus. Untuk keperluan buku, mereka memilih untuk meminjam pada kakak kelas, fotokopi pada bagian tertentu saja, atau ke perpustakaan, terutama pada saat menjelang ujian.

Pola konsumtif pun berbeda, pada mahasiswa kelas menengah ke atas selalu membawa HP, bahkan HP tersebut berfitur kamera dan movie. Pakaian dan kendaraan yang digunakan pun berbeda dan bergantung dari asal kelas ekonominya. Mobil

setingkat sedan atau niaga terbaru (kijang dan panter) sering berada di parkir kampus-kampus universitas (lihat tabel 9.4). Malam hari, tidak selalu bergantung pada hari kuliah atau tidak, mereka mengunjungi kafe-kafe, seperti Hugo Kafe. Di dalam setiap percakapan, mahasiswa kelas menengah ke atas sering berbicara mengenai tempat-tempat dugem baru. Untuk pergi ke tempat dugem, meeka berkelompok atau berpasang-pasangan dengan membawa mobil.

Tabel 9.3
Mahasiswa antara Status Sosial Ekonomi dan Pilihan Jurusan dan Universitas

Status Sosial Ekonomi	Perguruan Tinggi		Fakultas/Jurusan
	Negeri	Swasta	
Atas	Univ. Airlangga dan ITS	Ubaya, UK Petra dan Widya Mandala	Teknik Arsitektur, Teknik Informatika Kedokteran (Umum dan Gigi), Ekonomi Akuntansi.
Menengah	Univ. Airlangga dan Unesa	Untag 17 Agustus, Unitomo, Univ. Hang Tuah, dan UPN	Teknik Industri, Teknik Sipil, Ekonomi, Ilmu-ilmu Sosial dan MIPA
Bawah	Unesa dan IAIN	Ubhara, Unipa, UWP dll	Pendidikan, Politeknik dan Program Diploma (D1-D3)

Sumber: pengamatan

Mahasiswa dari kelas menengah (baru) mengambil bentuk hendak meniru kelas atas. Caranya, antara lain dengan pemilikan HP, meskipun beberapa di antaranya harus memilih tidak membeli buku teks. Pulsa yang digunakan sering dalam jumlah relatif besar, 200 ribu per bulan. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa dari kelas menengah atas, namun tidak harus berhemat. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan niaga keluaran paling muda adalah lima tahun terakhir.

Tabel 9.4.
Status Sosial Ekonomi Mahasiswa dan Gaya Hidup

Status Sosial Ekonomi	Pekerjaan Orang Tua (Bapak)	Ikon-ikon Budaya			
		Tempat Tinggal	Kendaraan	HP dan fitur	Barang/Kegiat an Konsumtif
Atas	Pengusaha (besar), Birokrasi Pemerintah dgn es. I	Rumah sendiri di perum. elit atau tipe 45 ke atas; kost dgn harga di atas 500 ribu/bulan.	Mobil, se- peda motor laki-laki dgn cc di atas 125,	HP dgn kamera dan movie	Kafe atau tempat dugem lainnya.
Menengah	Wiraswasta, birokrasi pemerintah dgn es II, Guru dan Dosen, pemilik tambak luas, petani kaya.	Rumah sendiri di perumahan dgn tipe 36, kost dgn harga 200-500 ribu/bulan.	Sepeda motor terbaru	HP	Ke Kafe, atau Jalan-jalan di Mall.
Bawah	Mracang, petani kecil, buruh dan sektor informal lain- nya	Rumah sendiri di kampungan atau rumah RSS, kost dgn harga di bawah 200 ribu.	Sepeda motor dgn usia di atas 3 tahun, kendaraan umum, dan jalan kaki	Tidak ber-HP	Jalan-jalan ke Mall dgn frekuensi yg terbatas

Sumber : Pengamatan; bandingkan dgn **Kompas**, 30 September 1996. hal. 4.

Teater Kampus sebagai Bentuk Aktualisasi Diri

Seni teater merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara seni gerak, suara dan musik. Dalam seni tersebut, ada satu arahan cerita yang dibawa para pelakon. Arahan cerita tersebut bisa berasal dari tradisi lisan rakyat atau diangkat dari novel. Di Indonesia, seni teater ini, selain teater modern, seniman juga membawakan seni pertunjukkan tradisional, seperti

wayang orang, ketoprak atau kentrung. Di Jawa Timur, khususnya di wilayah pantura, ludruk tumbuh pada awal abad ke XX.

Tidak ada tulisan yang menggambarkan kapan teater memasuki dunia kaum intelektual, seperti mahasiswa. Djoko Soekiman (2000) menunjukkan bahwa seni pertunjukan tumbuh seiring dengan liberalisasi ekonomi. Seni tersebut dimainkan oleh para “budak” untuk memberikan kegembiraan bagi para “tuan.” Seni pertunjukan tersebut merupakan salah satu penciri dari kebudayaan indis.

Setelah keluar dari kampus, memang kaum intelektual Indonesia, seperti Sukarno, mengembangkan seni pertunjukan sebagai bagian dari *counter hegemoni* terhadap pemerintah kolonial. Ketika di Bengkulu, dalam pembuangannya, Sukarno membentuk kelompok teater. Hal yang serupa dilakukan pula oleh tokoh-tokoh pergerakan di Surabaya tatkala mengadakan pasar malam untuk mengumpulkan dana. Mereka mengundang seniman teater tradisional dan memasukkan ide-ide kritik pada pemerintah kolonial Belanda (Mustadji dan Sadewo, 1992).

Untuk lingkungan kampus pada pemerintahan Suharto hingga sekarang, seni pertunjukan kampus (teater kampus) tumbuh sebagai bagian dari Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) (1978-1998). Pada masa Daoed Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi mahasiswa diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan lebih mengembangkan kemampuan profesinya daripada terlibat dalam aksi politik (turun ke jalan). Dalam istilahnya, mahasiswa dikembangkan menjadi menara gading. Oleh karenanya, organisasi intra kampus direstrukturisasi, dema dihapus, digantikan dengan Sema (senat mahasiswa) dan BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) di tingkat fakultas, dan himakjur (himpunan mahasiswa jurusan) di tingkat jurusan dan himaprodi di tingkat program studi. Senat Mahasiswa dipimpin oleh ketua Senat yang dipilih oleh anggota BPM. Ia biasanya membawahi tiga bidang, yaitu (1) akademis, (2) minat dan bakat,

dan (3) kesejahteraan. Sementara itu, di tingkat universitas/institut dibentuk berbagai unit kegiatan mahasiswa, mulai dari olah raga, keagamaan hingga seni. Dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM), seni teater berkembang di kampus. Seni yang dikembangkan mengambil berbagai bentuk, mulai dari seni teater tradisional, seperti ketoprak, ludruk dan ketrung, hingga seni teater modern.

Tabel 9.5.
Perkiraan Jumlah Teater Kampus dan Anggotanya
di Surabaya

Jenis	Jumlah
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	
a. Teater Kampus	15
b. Anggota	350
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	
a. Teater Kampus	10-20
b. Anggota	200

Sumber : pengamatan

Dari perguruan tinggi negeri di Surabaya, IAIN memiliki jumlah terbanyak. Selain di tingkat institut sebagai UKM, setiap fakultas memiliki setidaknya-tidaknya satu teater kampus, bahkan ada pula teater kampus di tingkat jurusan. Setiap teater kampus memang tidak memiliki jumlah anggota yang besar, antara 10-20 orang, ada beberapa di antaranya aktif tidak di satu teater, misalnya: di tingkat institut dan fakultas. Mereka ini menjadi penggerak teater di tingkat lokal (fakultas dan jurusan). Teater ini mengisi setiap kegiatan/acara di tingkat fakultas dan jurusan. Menarik dicermati, selain Teater Kampus SUA (Sunan Ampel)

yang berbentuk UKM di tingkat institut, teater di tingkat fakultas, seperti Teater Q merupakan teater resmi di bawah pembinaan Pembantu Dekan III.

Tidak jauh dari IAIN Sunan Ampel, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang merupakan metamorfosa dari IKIP Surabaya – akibat kebijakan pemerintah untuk memberikan *double mandate* kepada seluruh IKIP di Indonesia – memiliki 2 (dua) teater kampus di tingkat institut, antara lain: teater institut dan saloka. Keanggotaan teater tersebut didukung oleh mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra, antara lain: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah dan Program Studi Sendratasik, dan dari Fakultas Ilmu Sosial, antara lain: Jurusan Pendidikan Sejarah. Teater Institut pada tahun 1990 hingga tahun 2002 cukup aktif dengan menampilkan setidaknya-tidaknya 2-4 lakon setiap semester, atau kurang lebih satu bulan sekali. Cerita lakon yang ditampilkan bisa merupakan hasil karya anggotanya, cerita adaptasi dari luar, seperti: Anton Chekov, dan cerita Cina, Sampek Engtay. Jumlah anggotanya lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Berbeda dengan Teater Institut, Saloka (Sanggar Ludruk dan Ketoprak mengambil bentuk teater tradisional, seperti: Ludruk dan Ketoprak. Dua tahun terakhir ini Saloka juga memainkan teater tradisional pesisiran, yaitu Kentrung. Bentuk teater kentrung ini dikenalkan oleh dosennya, Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo (alm) yang menulis disertasi tentang seni tersebut. Cerita lakonnya tidak terbatas pada cerita tradisional kentrung, tetapi sering menggunakan tema-tema baru. Pengaruh guru besar tersebut sangat kuat karena sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Selain kedua teater tersebut, ada satu teater yang bukan merupakan UKM. Teater tersebut berdiri dari tahun 1997 hingga 2000, sebut saja

teater Sanggar Abu-abu yang dipimpin oleh mahasiswa fakultas bahasa dan sastra, T²².

Hal yang serupa di ITS dan Unair. Teater kampus di ITS berkembang pesat tatkala mampu bergabung dengan stasiun televisi lokal, yaitu: JTV. Acara yang dikembangkan adalah bentuk teater tradisional, yaitu: ludruk dan kentrung. Ide-ide ceritanya bervariasi, dari cerita tradisional hingga ke cerita modern, bahkan mereka melakukan eksperimen dengan mengambil bentuk kontemporer dan menyebutnya *funky*.

Di perguruan tinggi swasta, ada 2 (dua) teater kampus yang menarik dicermati. Pertama, teater kampus “Kusuma” dari Universitas 17 Agustus 1945. Jumlah anggotanya sangat besar, hampir mencapai 100 orang. Mereka tidak saja memainkan di tingkat universitas, tetapi sering diundang untuk mengisi acara seni. Bentuk teaternya bisa berubah-ubah, dari teater tradisional hingga teater modern. Sementara itu, teater berikutnya adalah teater dari Fakultas Bahasa, UK-Petra. Karena didukung oleh Jurusan Bahasa Inggris, mereka mengambil bentuk teater modern dengan menggunakan Bahasa Inggris. Ide-ide cerita pun diadaptasi dari novel-novel berbahasa asing tersebut, seperti: Romeo dan Juliet. Bagi anggotanya, teater ini memiliki fungsi untuk melatih kemampuan percakapan.

Teater Panggung atau Teater Jalanan sebuah Pilihan Berekspresi

Kebebasan untuk Berekspresi

Menjadi pertanyaan mengapa mahasiswa memilih unit kegiatan teater, atau bahkan mendirikan teater tanpa harus

²² T sendiri kini menjadi aktivis salah satu partai nasionalis, peserta pemilu 2004.

memperoleh pembinaan dari pihak rektorat, seperti pada Teater Abu-abu. Salah satu jawabannya adalah “orang teater itu bebas.” Seperti yang dicermati di lapangan, aktivis teater kampus relatif lebih longgar dalam menghadapi aturan-aturan di kampus. Sebagian besar hanya berpakaian kaos oblong dan celana jeans. Rambutnya panjang. Dari penampilan itu, seperti yang dikatakan oleh HT, seorang mahasiswa ITATS yang menjadi aktivis teater Topeng, *“Ini bukan persoalan penampilan, tetapi idealisme. Ia berani tampil beda. Mungkin kami dianggap nyeleneh. Tapi, kami tidak ingin membongki diri kami dengan penampilan.”*

Terkesan sangat bebas lagi bila melihat mahasiswa anggota UKM Teater Institut dan Saloka Unesa. Sebagian besar berasal dari mahasiswa yang mendekati batas waktu, yaitu semester 13 dan 15 (angkatan tahun 1998 dan tahun 1999). *“Saya suka status sekarang ini. Mahasiswa. Saya tidak peduli kapan lulus. Toh, kalau lulus, tidak bekerja juga percuma. Saya di sini tetap bisa kritis dan kreatif.* Namun demikian, tidak berarti tidak ada aktivis teater kampus yang berprestasi dalam bidang akademik. Ada beberapa di antaranya tercatat sebagai mahasiswa yang berprestasi, sehingga memperoleh beasiswa.

Nilai kebebasan dan kreatifitas yang menjadi tujuan dari mahasiswa tersebut tidak saja terletak pada penampilan, tetapi juga terlihat pada lakon-lakon yang dimainkan. Selain mengadopsi cerita naskah dari pengarang terkenal, kemampuan analitis dari stiatusi sekitarnya terletak cerita naskah yang dimainkan. Dengan terjun di masyarakat, dengan mendatangi dan menangkap fenomena, mereka dapat membuat naskah cerita untuk lakon yang akan dimainkan pada hari atau minggu berikutnya. Mereka menangkap fenomena itu ketika jalan-jalan dan duduk di warung dan mendengar percakapan orang-orang tersebut.

Dalam pembuatan naskah cerita, mereka pertama kali membuat dalam bentuk ringkasan cerita, atau dikenal dengan sinopsis. Kemudian, secara bersama-sama menyusun tata urutan gerak dan percakapan. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah

latihan dua hingga empat kali, sekitar hampir satu bulan lamanya. Di dalam latihan itu, setiap anggota diberi tugas menjadi lakon apa-apa. Setiap orang kemudian menghafal dan menghayati perannya. Bila tidak kebagian peran, mereka masih memiliki tugas untuk meminjamkan ruang hingga promosi.

Penjiwaan sebuah peran ini dilatih dari pertama kali seseorang menjadi anggota. ketika menjadi anggota, mereka harus ikut masa orientasi, oleh “senior” (mahasiswa yang lebih dulu menjadi anggota) ke gunung. Selain latihan fisik dan mental, tetapi mereka lebih menekankan latihan mental, seperti dibentuk-bentak, agar “*lebih berani tampil dan nggak duwe isin* (tidak mudah malu),” bahkan lari sambil memaki-maki dirinya sendiri. Pada waktu malam hari, latihan penjiwaan dilakukan dengan membawa anggota ke tempat yang sunyi. Tidak ada suara. Berikutnya, seorang senior meminta membayangkan, mengingat atau merasakan sesuatu pada dirinya. Akibatnya, ada peserta tiba-tiba menangis karena mengingat orang tua di rumahnya. Orang awam akan melihat mereka seperti kerasukan roh, namun bagi mereka hal itu merupakan bagian dari penjiwaan.

Komodifikasi Teater

Dari latihan menghafal naskah cerita dan dialog, penjiwaan terhadap peran yang dimainkan, hingga mengembangkan koreografi (menciptakan latar panggung sesuai dengan naskah), teater kampus sering kemudian menampilkannya dalam panggung. Secara rutin, hingga tahun 2001, hampir satu-dua bulan sekali Teater Institut (Unesa) misalnya menampilkannya di Gedung I6, gedung yang sudah dirancang sebagai ruang pertemuan, berikut panggung di dalamnya. Sementara itu, mereka sering berlatih pada malam hari di lapangan pementasan yang berbentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk berundak-undak.

Teater-teater lain juga memiliki pola yang serupa, setidaknya tidaknya satu semester sekali. *“Prosesnya cukup lama, Mas. Mencari ide cerita sekitar dan mematangkan hingga jadi naskah cerita berikut dialognya itu bisa satu bulan lamanya.. Menghafal, sambil mengatur laku dan lebih penting lagi mengatur panggung.”* Naskah jauh lebih mudah bila melakukan adaptasi dari cerita rakyat. Lakon-lakon sudah dikenal, sehingga tidak memerlukan perhatian yang lebih serius. *“Cukup mengumpulkan anggota, beritahu cerita rakyat apa yang digunakan. Kemudian, anggota langsung didapuk satu per satu menjadi apa. Dialognya diserahkan pada para pemain. Di panggung, antar pemeran saling lempar dialog.”* Untuk memikat penonton, teater kampus sering menampilkan drama komedi *satiris* (mengkritik).

Bila berstatus UKM, maka kegiatan pementasan akan dijadwalkan rutin setiap semester, dan didanai oleh pihak rektorat. Dana yang berasal dari tiket masuk hanya menutupi kerugian bila ternyata diperlukan biaya yang lebih besar. Pos-pos yang ada dalam setiap pementasan, mulai dari konsumsi, kostum, hingga hiasan panggung dan *balibo* untuk iklan pementasan. Namun demikian, tidak berarti harus mengeluarkan biaya tersebut. Baliho dipakai secara berulang-ulang, dengan mencat kembali dan menulis ulang. Kostum diusahakan seperti pakaian sehari-hari. Hanya hiasan panggung sering harus berubah, tergantung pada naskahnya. Bila ada kelebihan dana, maka disimpan dalam kas teater kampus. Hal ini tidak saja terjadi pada Teater Institut (UNESA), tetapi juga pada Teater Sua (IAIN Sunan Ampel), Teater Kusuma (Untag), dan Teater Crystal (UPN).

Oleh karenanya, meskipun selalu menampilkan sosok yang mengedepankan kebebasan dan kreativitas, teater kampus tetap juga terorganisir. Kepengurusan selalu dipilih setiap dua tahun sekali. Di dalam strukturnya, beberapa teater kampus memiliki divisi kerumahtanggaan atau perlengkapan. Divisi ini bertugas untuk mulai dari perlengkapan tata ruang teater, kebersihan sanggar hingga logistik, termasuk di dalamnya kostum untuk

pentas teater, seperti yang kini dijabat oleh Alle, salah seorang pemain Teater Kusuma Untag.

Selain di kampus, mereka, UKM di tingkat universitas/institut ini juga tampil ke pentas lomba teater di tingkat lokal (kota),²³ propinsi atau nasional. Keikutsertaannya sebagai ajang prestise, apalagi bisa memenangkan. Penilaian dimulai dari orisinalitas naskah cerita yang dipentaskan, koreografi (tata gerak), hingga latar panggung. Oleh karenanya, bila mengikuti kegiatan tersebut, setiap teater mempersiapkan dengan serius. Pihak rektorat mendukung kegiatan teater kampus, mulai dari pendanaan hingga akomodasi dan transportasi.

Bila bukan UKM Institut/Universitas, teater kampus ini lebih mengandalkan kegiatan fakultas/jurusan. Setiap awal tahun ajaran senat mahasiswa (SEMA) fakultas/jurusan atau kini dikenal dengan istilah badan eksekutif mahasiswa (BEM) mengadakan pesta seni. Pesta seni dilakukan setelah perlombaan olah raga antar angkatan untuk jurusan, atau antar jurusan untuk fakultas. Selain karena sebagian anggota teater juga pengurus BEM tersebut, BEM juga membutuhkan teater kampus untuk memeriahkan acara pentas seni.

Teater non-UKM, baik di tingkat institut/universitas maupun fakultas, atau sebut saja teater kampus independen, seperti Sanggar Abu-abu di Unesa pada tahun 1997-2000. Mereka melakukan teater jalanan. Artinya, mereka mementaskan ketika melakukan demonstrasi. Pada waktu hari pertama ujian tertulis SPMB tahun 2000, mereka melakukan aksi teaternya dengan berpakaian compang-camping, bahkan salah satunya hanya menggunakan celana pendek. Seluruh tubuh dilumuri oleh cat air hitam. Mereka berlari memasuki ruang, tepatnya lorong-lorong

²³ Biasanya diadakan oleh Dewan Seni/Kebudayaan Kota atau Diknas Kab./Kota. Di Surabaya, kegiatan tersebut diadakan dalam Festival Seni Surabaya pada bulan Mei setiap tahunnya.

dalam gedung I7 (dari markasnya di gedung H) hingga ke gerbang UNESA, sambil berteriak-teriak, “*Aku tidak bisa sekolah. Biaya Pendidikan Mahal. Percuma kuliah, kalau akhirnya menjadi pengangguran.*” Paling akhir, salah satu di antara pemain berdiri di atas *kap* mobil (milik dosen). Kegiatan teater jalanan ini segera direaksi karena mengganggu ketenangan pada waktu ujian, terlebih lagi seorang dosen sempat bersitegang ketika kapnya diinjak-injak oleh mahasiswa tersebut.

Setelah beberapa kali melakukan aksi mengkritisi kampus dan lingkungan (masalah banjir), aktivitas teater tersebut “berakhir” tatkala ketua teater, T, hendak melakukan aksi pada waktu wisuda. Rencana aksi ini diketahui oleh penyelenggara wisuda, yaitu panitia yudisium dari FIK-Unesa. Tindakan aksi T yang pada waktu itu juga sebagai wisudawan bisa dicegah. Karena dianggap mencoreng nama FIK, sejumlah mahasiswa FIK melakukan reaksi balik dengan menyerbu markas Teater Abu-abu pada waktu pagi hari. Karena serangan ini mendadak, para anggota Teater Abu-abu melarikan diri. Markas kemudian ditutup, sementara itu di kampus tersebar berita tentang penemuan “kondom” dan botol-botol minuman keras di markas, sehingga berkembang bahwa kehidupan anggota teater di markas tersebut sangat longgar. Selain seksualitas, isu-isu yang meruntuhkan imej teater ini adalah isu-isu moralitas, seperti aksinya adalah *pesanan*, dibayar, dan dapat dibelokkan ke sasaran lain bila diberi uang. Meski teater tersebut sudah bubar, anggota-anggotanya kemudian tersebar dalam berbagai aktivitas politik. T misalnya kemudian terlibat berbagai aksi kelompok masyarakat rentan kota, seperti buruh dan korban penggusuran. Aksinya berada di bawah naungan PDI-P, dan kemudian menjelang Pemilu 2004 menjadi salah satu pengurus kepemudaan di PNBK Surabaya.

Tabel 9.6.
Teater Panggung dan Teater Jalanan

No.	Karakteristik	Teater Panggung	Teater Jalanan
1.	Asal	teater UKM	teater UKM dan non-UKM
2.	Jumlah pemain	banyak	sedikit
3.	Naskah cerita	lengkap dan kompleks	singkat dan sederhana
4.	Tata panggung	diperlukan	tidak diperlukan
5.	Kostum	lebih rumit	sederhana, terkesan apa adanya
6.	Pengaturan gerak	sudah dirancang	spontan
7.	Penunjukkan pemain (pelakon)	dipersiapkan, dilatih	spontan
8.	Dialog	kompleks	spontan, sederhana, dan cenderung sedikit dialog
9.	Sponsor	universitas, fakultas, atau pihak lainnya, seperti: dewan seni kota.	LSM atau mandiri
10.	Penggunaan uang	Ada dana pembinaan dari lembaga tertinggi.	diberi uang transpor (“dibayar”), tidak ada uang transpor (tidak “dibayar”) bila secara internal melakukan pendampingan pada masyarakat rentan kota.

Kegiatan teater jalanan bukan sekedar monopoli teater non-UKM. Teater Kusuma misalnya juga melakukan teater jalanan (adekan teatrikal). Kegiatan tersebut biasanya merupakan undangan dari panitia atau penyelenggara aksi. Penyelenggara juga menentukan temanya. Kemudian, teater kampus merancang menjadi rangkaian adegan yang akan ditampilkan pada waktu aksi.

Untuk itu, mereka mendapat uang transport antara 450 ribu hingga 750 ribu rupiah. Pada waktu Hari Pahlawan 10 Nopember 2002 misalnya bersama dengan teater-teater kampus dari Yogyakarta, seperti ISI Yogyakarta, mereka mementaskan (merekonstruksi) peristiwa 10 Nopember 1945. Begitu pula, pada waktu aksi hari AIDS September 2004 atas permintaan salah satu yayasan peduli HIV/AIDS mengadakan teater jalanan mulai dari Jalan Raya Darmo, Basuki Rahmat dan hingga di Balai Pemuda dan Jalan Pahlawan. Selain teater Kusuma, kegiatan aksi tersebut juga diikuti oleh teater kampus se-Surabaya. Di dalam aksi tersebut, mereka menggambarkan bahaya akibat penyakit HIV/AIDS. Mereka berjalan dalam keadaan kurus, lemah dan sakit-sakitan.

Adegan Teatral:

Indikator Kolaborasi Mahasiswa dan Kelompok Miskin Kota

Ekstra Kampus, serikat buruh dan lsm sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan masyarakat rentan kota.

Sesuai dengan teori Robert K. Merton, bahwa seorang individu bisa memiliki beberapa status dan peran. Hal ini berkaitan dengan keanggotaan individu tersebut dalam berbagai kelompok masyarakat (Johnson, 1986), demikian anggota teater kampus. Di lingkungan kampus, mereka tak jarang aktif tidak saja di UKM Teater Kampus, tetapi juga menjadi UKM lainnya, seperti Alle yang menjadi anggota Teater Kusuma dan UKM Fotografi di Untag. Selain itu, mereka juga aktif di tingkat fakultas dan/atau jurusan, sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa.

Tabel 9.7.
Organisasi Ekstra Kampus, Serikat Buruh dan LSM (Jaringan)

No	Organisasi	Orientasi Ideologis	
		Agama	Nasionalis/Sosialisme
1.	Org. Ekstra Kampus		
	Hubungan terpisah dgn masy.rentan kota ("elitis")	IMM, HMI, PMKRI, dan GMKI	GMNI
	merakyat	PMII, KAMMI	FPPI, LMND, SMID, FMN
2.	Serikat Buruh	Sarbumusi	SBSI
3.	LSM		Pijar, Jakker, Jerit

Selain organisasi mahasiswa intra kampus, seperti senat mahasiswa (kini dikenal dengan badan eksekutif mahasiswa), badan perwakilan mahasiswa (kini, dewan legislatif mahasiswa) dan unit kegiatan mahasiswa, di luar kampus terdapat sejumlah organisasi ekstra kampus. Sebelum tahun 1996-an, organisasi ekstra kampus yang dikenal adalah Kelompok Cipayung, yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Pada tahun 1980-an, akibat pengasastunggalan Pancasila sebagai asas organisasi, HMI terpecah menjadi HMI dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). HMI MPO ini tidak menerima asas tunggal tersebut. Atas kebijakan Menteri Daud Yoesoef pada tahun 1978-an, yaitu NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan

Kampus)²⁴, organisasi tersebut tidak diperbolehkan “berada” di dalam kampus, meskipun pada kenyataannya organisasi ekstra (berikut alumninya) tetap bisa bermain dalam perebutan kursi di senat dan bpm. Sementara itu, “negara” (dalam tanda kutip) melalui ABRI juga sering bermain melalui organisasi kepemudaan, FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri ABRI).

Di luar kelompok Cipayung, terdapat organisasi ekstra mahasiswa. Organisasi ini nampaknya lahir dari aktivitas kelompok studi atau kelompok kajian, kemudian bergerak ke arah praksis menjadi aksi-aksi solidaritas dan akhirnya menjadi organisasi ekstra kampus, seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokratik), SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) dan Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ada pula yang memandang munculnya kelompok ini sebagai bentuk ketidakpuasan dari organisasi ekstra (Kelompok Cipayung) yang bersifat elitis dan hanya mengeluarkan catatan akhir tahun terhadap kebijakan dan ketimpangan sosial akibat pembangunan semasa pemerintahan Suharto.

Akibat kuatnya indoktrinasi pemerintahan Suharto melalui penataran P4 dan Opspek, tidak semua mahasiswa menyukai organisasi ekstra kampus dan LSM, seperti K yang melihat bahwa tidak ada gunanya ikut organisasi ekstra karena hanya demo, tidak ada aksi. Untuk melihat fenomena masyarakat yang dapat dijadikan ide cerita, *“Kita bisa saja baca di berbagai pemberitaan, seperti koran dan internet. Saya itu akurat dan datanya bisa untuk ide cerita, seperti yang dikatakan B, mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya.*

²⁴ Kebijakan ini tidak terlepas dari sikap kelompok Cipayung yang selalu mengkritisi pemerintahan Suharto, mulai dari kasus Malari 1974 tentang investasi asing hingga pemerintahan Suharto jatuh (lihat Pour, 1998, dalam kasus Sofyan Wanandi; perhatikan pula Aribowo, 1999). Padahal, kelompok ini dahulu turut mengguling pemerintahan Sukarno, dan mendukung Suharto dalam aksi bersama, KAMI pada tahun 1966-1967.

Namun demikian, sebagian lain anggota teater kampus justru memilih aktif di organisasi ekstra kampus, dan kecenderungannya, ketika aktivitas di organisasi ekstra semakin tinggi, maka ia mengurangi aktivitasnya di teater kampus. Organisasi ekstra tersebut tidak saja berdiri sendiri, tetapi memiliki jaringan pada kelompok rentan kota, seperti PMII dan Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia) karena ber-“naung” (dalam tanda kutip) di bawah NU (Nadhatul Ulama), begitu pula dengan SMID, LMND dan FMN yang memiliki hubungan dengan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) yang dulu dipimpin oleh Mochtar Pakpahan. SBSI adalah serikat buruh di luar “bentukan” pemerintah, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Sebagai serikat buruh, pengurusnya terdiri dari buruh yang aktivis dan aktivis buruh (orang di luar buruh) yang ber-*empati*. Aktivis buruh ini antara lain adalah mahasiswa, termasuk anggota teater kampus. Di luar buruh, ada pula *Jerit* (Jaringan Orang Tertindas), suatu jaringan yang memiliki hubungan dengan Konsorsium Orang Miskin Kota (*Urban Poor Consorsium*/UPC) di Jakarta yang dipimpin oleh Wardah Hafidz.

Membangun Isu-isu dan Beradegan dalam Demonstrasi

Empati, suatu kemampuan individu dalam membayangkan berada dalam posisi orang di luar dirinya, terbentuk tatkala mereka melakukan pendampingan bersama organisasi ekstra kampus yang bekerja sama dengan organisasi atau jaringan masyarakat rentan kota, seperti *Jerit*, *Sarbumusi* dan SBSI. Kelompok mahasiswa, dalam hal ini aktivis teater kampus tersebut sering “meninggalkan” (dalam tanda kutip) statusnya dan menjadi buruh atau tinggal di kampung-kampung kumuh yang akan tergusur. Oleh karenanya, ketika terjun di dalam masyarakat rentan kota ini, aktivis tersebut mengurangi kegiatan teater

kampus. Namun demikian, kebersamaan ini menjadi sumber inspirasi bagi ide naskah untuk pementasan teater kampusnya.



Gambar 9.1.

Kekuatan Buruh = Mogok Kerja dan Pengerahan Massa

Dengan tinggal bersama, bila tidak kost, terkadang tidur di mushala, kesulitan yang dialami oleh masyarakat rentan kota secara langsung dirasakan, seperti kenaikan BBM yang telah terjadi sejak jaman pemerintahan Megawati, kenaikan tarif listrik dan air,²⁵ kenaikan harga-harga di pasar, UMR buruh yang masih belum memenuhi kebutuhan hidup²⁶ dan sistem kontrak. Para

²⁵ Di beberapa kampung, terutama di Surabaya Utara dan pinggiran kota Surabaya Barat dan Selatan, meskipun tidak memasang saluran PDAM. Kenaikan harga air dirasakan pada kenaikan air jerigen *gledekan*.

²⁶ Berkaitan dengan UMK (Kota Surabaya), pemerintah sering tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak bisa membayar karyawannya sesuai dengan UMK. Ada batas-batas toleransi yang sangat longgar diberikan oleh pemerintah, sementara itu pemerintah serta merta menerapkan undang-undang buruh, meski secara substansial merugikan pihak buruh, pemerintah selalu melaksanakan tanpa memperhatikan buruh.

aktivis tersebut membangkitkan kesadaran bahwa mereka berhak hidup layak. Oleh karenanya, masyarakat tersebut di adakan untuk melakukan aksi. *“Mas, pertama kali iya susah. Mereka berpikir ini sudah menjadi suratan dalam hidupnya. Tetapi, melalui diskusi, mereka sadar. Meskipun belum tentu berhasil, setidaknya orang akan mendengarkan suaranya. Satu kata: Laman,”* begitulah pengalaman yang disampaikan oleh B dan J tentang kelompok masyarakat rentan kota. Secara teoritik, pengalaman ini membenarkan pendapat Oscar Lewis (1981) tentang kebudayaan kemiskinan dan John Kenneth Galbraith (1983) sebagai bentuk adaptasi orang-orang miskin terhadap kondisi kehidupan yang rentan.

Di dalam mengembangkan ke dalam aksi (demonstrasi), para aktivis biasanya mendiskusikan terlebih dahulu dengan para buruh yang aktivis dan orang kampung yang aktivis, biasanya kini terbentuk dalam istilah “forum komunikasi.” Hari-hari peringatan peristiwa tertentu bisa dijadikan momen untuk aksi, seperti Hari Buruh (1 Mei), Hari Bumi (September) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Kemerdekaan (17 Agustus). Pada hari buruh, aksi lebih diarahkan pada tema-tema tentang jaminan sosial buruh, mulai dari kenaikan UMK, sistem kontrak dan borongan, jaminan sosial hingga hak berserikat (lihat tabel 4.6; perhatikan Rahayu, et.al, 2002; Supramudyo, 2000; Rahaju, 2002). Demikian pula, pada hari bumi, tema demonstrasinya berisi tuntutan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin kota, sedangkan hari pendidikan adalah tuntutan pendidikan murah, dan pada hari kemerdekaan tentang harapan untuk merdeka dari kemiskinan.

Tabel 9.8.

Isu-isu Kesenjangan Sosial-Politik yang dikembangkan Masyarakat Rentan Kota bersama Aktivis Teater Kampus (dalam Ekstra Kampus, SB dan LSM)

No.	Masyarakat Rentan Kota	Isu-isu Kesenjangan Sosial Politik
1	Umum	a. Turunkan Harga (1998), yang kemudian berlanjut menjadi salah satu tuntutan dalam reformasi, selain Pak Harto turun; b. Tuntutan Penindakan Korupsi (Pengurusan KTP Murah) c. Tuntutan Biaya Pendidikan Murah (1998-2005) d. Tolak Kenaikan BBM (1999-2005) e. Tolak Kenaikan TDL dan Air PDAM;
2	Masyarakat Kampung	a. Batalkan pengusuran (salah satu di antaranya, kasus Stren Kali bersama <i>Jerit</i> tahun 2001, 2002 dan 2004); b. Kenaikan uang ganti rugi;
3	Masyarakat Buruh	a. Bayarkan THR (setiap menjelang hari raya Idul Fitri sejak sekitar tahun 1990an); b. Tuntutan Hak Berserikat (awal tahun 1990-an); c. Tuntutan Kenaikan UMR/Kota; d. Tuntutan Penerapan UMR segera; e. Hapus Sistem Kontrak dan Borongan; f. Hapus Sistem Lembur, Tuntutan Jam Kerja yang Jelas. g. Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon (Pabrik Sepatu di Sidoarjo); h. Tolak UU Perburuhan yang Merugikan buruh; i. Usut Korupsi di Jamsostek (tahun 1998-an) j. Solidaritas terhadap pemecatan teman-teman sekerja, dll.

Di dalam persiapannya, para aktivis tersebut membentuk korlap-korlap yang digunakan untuk menghimpun massa. Sementara itu, spanduk atau karton disiapkan, dananya dihimpun

dengan cara urunan atau hasil dari *ngamen*. Karena dananya terbatas, maka tidak jarang spanduk yang digunakan berasal dari kegiatan aksi sebelumnya. Sementara itu, para aktivis dari teater kampus menyiapkan adegan teatrical. *“Ada dua tujuan adegan ini. Visualisasi tuntutan dan hiburan untuk mengurangi ketegangan. Kalau tidak begitu, demo yang serius bisa membuat aparat tegang. Akhirnya, tindakannya represif. Kalau itu terjadi, akan membuat jera mereka.”*

Setelah ide atau naskah cerita dibuat, H-2 dari aksi tersebut aktivis teater kampus itu mengumpulkan, baik sesama aktivis teater kampus maupun juga kelompok masyarakat rentan (yang mewakilinya) dan melakukan *casting* peran, siapa melakoni siapa, begitu pula pengaturan gerak yang akan dilakukan. Pengaturan gerak ini juga memperhatikan *lanskap* dari acara aksi tersebut. Orang-orang tersebut juga diberitahu kostum apa yang digunakan, biasanya pakaian sehari-hari, *“lebih baik lagi kalau compang-camping, biar kelihatan penderitaannya.”* Karena miskin dialog, latihannya hanya terbatas pada rangkaian gerak masing-masing pemeran. Pemeran di adegan teatrical dalam demonstrasi dapat lebih longgar, berimprovisasi.

Menurut informan B, adegan ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, meskipun merasa sulit bila jumlah peserta demonstrasi terlalu besar. Bila massa yang berdemonstrasi kurang dari 200 orang, adegan teatrical bisa dilaksanakan sambil *long march* ke tempat sasaran. Namun demikian, bila dalam jumlah besar, adegan teatrical hanya dilakukan ketika telah sampai di tempat tujuan. Pelaksanaan adegan di sepanjang jalan akan memacetkan gerak massa pada akhirnya dapat timbul gerakan dorong-mendorong, hingga menimbulkan kekerasan.

Tabel 9.9.
Beberapa Contoh Adegan Teatrical Demonstrasi Masyarakat Rentan Kota
Surabaya tahun 1990 s/d sekarang

No.	Isu-isu Demonstrasi	Adegan Teatrical
1	Tolak Kenaikan BBM	Digambarkan ada sejumlah orang. Laki-laki membawa puluhan jerigen kosong. Begitu juga dengan perempuan yang <i>jaritan</i> membawa kompor tanpa minyak.
2	Tuntutan Biaya Pendidikan Murah	Dengan mengajak anak-anak berpakaian seragam sambil berjualan koran. Sementara itu, orang tua yang bekerja setengah mati, tetapi tidak bisa membayar uang sekolah.
3	Penolakan thp Penggusuran Warga Kampung Stren Kali	Digambarkan ada orang berpakaian sederhana selalu membersihkan kali. Sementara itu, satpol PP dan petugas membawa bulldoser merusak. Orang-orang itu lari, sampai terjatuh. Adegan teatrical ini dibuat dalam pentas panggung dengan perbaikan naskah cerita dalam judul "Jogo Kali," oleh Teater Sua di Balai Pemuda, Surabaya.

Penutup

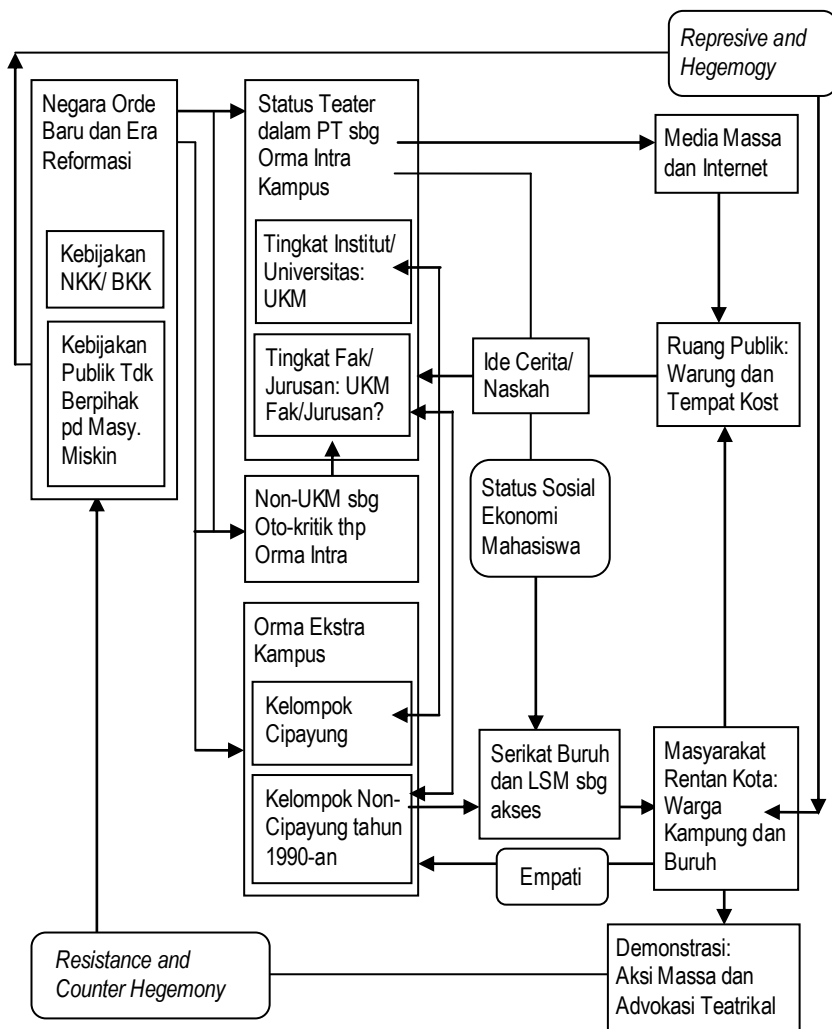
Penelitian Rahaju (2002) telah menunjukkan adanya komunikasi dan aliansi antara buruh dan gerakan mahasiswa. Secara ekstrim ditulis pula dari pernyataan salah seorang tokoh gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa tidak akan memiliki akar yang kuat bila tidak beraliansi dengan buruh. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa proses aliansi antara buruh, warga kampung yang tergusung, sebagai

kelompok masyarakat rentan kota, dan mahasiswa merupakan proses timbal balik. Tahun 1990-an, dengan pembunuhan Marsinah oleh aparaturnegara, gerakan perjuangan buruh memperoleh identitas dan keberanian baru, atau yang diistilahkan oleh Karl Marx sebagai kesadaran kelas, sementara penghancuran dan hegemoni negara atas mahasiswa melalui NKK/BKK tahun 1978 dan Opspek/P4 telah menciptakan bentuk baru gerakan mahasiswa. Ada dua bentuk, yaitu: (1) melakukan modifikasi dari organisasi kemahasiswaan (ormawa) intra kampus, dan (2) mengembangkan kelompok studi, yang kemudian berkembang menjadi organisasi ekstra kampus non-kelompok Cipayang tahun. Di dalam catatan lain, kelompok-kelompok studi juga berkembang dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan. LSM yang terbentuk dari kelompok-kelompok studi ini kemudian mengembangkan jaringan internasional melalui isu-isu yang sama, antara lain: kemiskinan dan demokrasi, meski dikritisi oleh negara pada waktu itu, Suharto, sebagai usaha “menjual” bangsa dan dicurigai sebagai ancaman negara.

Salah satu di antaranya adalah teater kampus. Teater kampus menjadi sarana *conter hegemony*. Bila mengikuti pendapat Antonio Gramsci, bahwa negara, sebagai representasi dari kepentingan kelompok borjuis, melakukan “penaklukan” atas warganya tidak saja menggunakan sarana represif, seperti: hukum dan militer, tetapi juga mengembangkan kontrol moral dan intelektual, sehingga terbentuk kesepakatan lebih bersifat *concensio* (Hendarto, 1993: 66-88) Kontrol moral dan intelektual ini dikembangkan melalui sarana-sarana pendidikan dan media massa. Di dalam perkembangannya, Paulo Freire (1985) memperkuat bahwa model *banking* dalam kurikulum sekolah menyebabkan masyarakat terintegrasi ke dalam sistem industri yang kapitalistik. Meskipun dianggap sebagai langkah kecil, teater kampus, sebagai perkembangan teater modern Indonesia, seperti Teater Sae,

Koma, dan Mandiri (Dahana, 2001) mengembangkan drama satiris yang mengkritik terhadap kehidupan sosial politik Indonesia yang tidak adil dalam setiap kali pertunjukkan.

Bagan 9.1.
Teater Kampus, Masyarakat Rentan Kota dan Adegan Teatrikal





Gambar 9.2

Dengarkanlah Kami, Rasakanlah Penderitaan Kami!

Dalam pencarian ide-ide naskah cerita, selain adaptasi dari naskah karya seniman sebelumnya, seperti Anton Chekov, aktivis teater kampus menemukan perjumpaan yang "mesra" dan "hangat" di dalam masyarakat rentan (kota). Salah satu faktor yang di dalam diri aktivis yang memudahkan memasuki masyarakat rentan (kota) adalah kondisi obyektifnya. Aktivis teater kampus berasal dari kelompok kelas menengah ke bawah di dalam masyarakatnya. Perjumpaan ini sama seperti melihat dirinya di depan kaca, lebih dari itu mereka menemukan jati dirinya di dalam masyarakat tersebut. Apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan di warung-warung makan dan kampung di mana mereka kost, membangun kesadaran dalam diri mereka, bahwa mereka dulu berasal dari kelas tersebut dan sudah selayaknya harus memperjuangkan. Di dalam kondisi yang lebih ekstrim, para aktivis ini kemudian memasuki organisasi ekstra kampus non-

Cipayung tahun 1990-an dan bergabung pada Serikat Buruh (mandiri-bukan organisasi korporatis negara).



Gambar 9.3.

Demi THR, Kenaikan Upah, Uang Makan, haruskah ada korban?

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memberikan sumbangan bagi gerakan kelompok masyarakat rentan kota. Selain mengembangkan jaringan yang mampu mengerahkan massa dalam jumlah yang besar, mereka juga memberikan warna lain dalam aksi massa (demonstrasi), yaitu adegan teatral. Pengerahan massa yang besar memang memberikan kekuatan untuk melawan kebijakan publik yang kurang menguntungkan, namun di sisi lain mengembangkan hubungan yang sinergis antara pengusaha dan negara. Dengan alasan bahwa aksi massa tersebut akan mengancam situasi keamanan, aparat negara kemudian cenderung bertindak represif. Aparat negara menggunakan hak kekerasannya dengan alasan memberikan jaminan rasa aman (meski dapat dibantah, untuk kelompok masyarakat yang mana?). Di bawah kondisi yang demikian, adegan teatral ini sangat membantu dalam visualisasi dari tuntutan, dan sekaligus menjadi hiburan bagi dua kelompok yang bersitegang, yaitu kelompok aksi massa dan aparat negara.

Lebih jauh dari itu, pada kasus lain latihan seni pada kelompok masyarakat rentan kota, termasuk di dalam kelompok buruh, mampu membangkitkan kesadarannya. Di Jakarta misalnya, dalam memperingati Hari Buruh 1 Mei 2005, kelompok buruh, petani dan ibu rumah tangga dari kampung menampilkan drama teatrikal dengan judul “*Mereka bilang Aku Perempuan*” karya Ken Zuraida. Mereka berlatih selama satu bulan dan menghayatinya dengan baik (Liputan6, 4 Mei 2005, ”Penderitaan Buruh dalam Drama Teater,”).

Daftar Pustaka

- Aribowo,
1999 Pola Gerakan Mahasiswa Jawa Timur: Kasus Mahasiswa Surabaya. Dalam Anshari Thayeb, et.al. **Jawa Timur dalam Perspektif Negara dan Masyarakat**. Surabaya: Yayasan Lubuk Hati.
- BPS,
2004 **Indikator Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Peningkatan Kemampuan Statistik.**
- Budiman, Arief.
1981 Peranan Mahasiswa sebagai Inteligensia. Disunting oleh Dick Hartoko. *Golongan Cendekiawan. Mereka yang berumah di angin. Sebuah bunga rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Coundouel, Aline., Jesko S. Hentschel, dan Quentin T. Wodon.
2002 Chapter 1 Poverty Measurement and Analysis. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues**. Washington: The World Bank.
- Dahana, Radhar Panca.
2001 **Ideologi Politik dan Teater Modern Indonesia**. Magelang: IndonesiaTera.

Danandjaja, James.

- 1980 Fungsi Folklor bagi Kolektif Pendukungnya. *Berita Antropologi*. No. 39, tahun XI.
- 1986 Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dogeng dan Lain-lain. *Jakarta: Grafitipers*.

Departemen Kesehatan RI,

- 2003 **Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/ Menkes/SK/VIII/2003.** Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Dinas Informasi dan Komunikasi Jawa Timur.

- 2004a UMK 2005 Gunakan Standar Kebutuhan Hidup Minimal. 1 September. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=1797>. tanggal 13 September 2005.
- 2004b Gubernur Jatim tetapkan UMK Tahun 2005, berlaku 1 Januari. 22 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2487>. tanggal 13 Nopember 2005.
- 2004c UMK Jatim masih berdasarkan KHM karena Keppres Baru Belum Terbit. 26 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2538>. tanggal 13 Septemver 2005.

Galbraith, John Kenneth.

- 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa. Diterjemahkan oleh Tom Anwar.** Jakarta: Sinar Harapan.

Hatta, Mohammad.

- 1983 Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia. Disunting oleh Aswab Mahasin dan Ismed Natsir. **Cendekiawan dan Politik.** Jakarta: LP3ES.

Hendarto, Heru.

- 1993 Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci. Dalam Tim Redaksi Driyarkara. **Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan.** Jakarta: Gramedia.

Hutomo, Suripan Sadi.

- 1991 Kidung Jawa Timuran. Perkembangan dan Kritik Sosialnya. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. No. 6, Tahun V.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi.** Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Jonge, Huub de.

- 1989 **Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu Studi Antropologi Ekonomi.** Jakarta: Gramedia.

Klugman, Jeni.

- 2002 Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues.** Washington: The World Bank.
- 2002 Rural and Urban Poverty: Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 2 Macroeconomic and Sectoral Approaches.** Washington: The World Bank.

Koentjaraningrat,

- 1982 ***Sejarah Teori Antropologi 1.*** Jakarta: UI-Press.

Kariredjo, Heru Soekadri.

- 1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan.** Surabaya: FPIPS-IKIP Surabaya.

Kompas,

- 1996 Antara Stabilitas dan Demokrasi. Survei “Kompas” tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 1996 Gaya Hidup Kelas Menengah Baru Jakarta. Survei “Kompas” tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 2000 Buruh Sidoarjo Protes UMR, Jalan di Surabaya Diblokir. 27 Nopember.
- 2001 FSPSI Akan Bahas Masalah UMR. 16 Juli.
- 2002 Buruh Gresik Ancam Demo, Wakil Gubernur Minta Jangan Ngotot. 2 Januari 2002.
- 2003 Buruh Tuntut Gubernur Jatim Naikkan UMK. 22 Januari.
- 2005 Menggugat Kebijakan Absurd Impor Berat. 24 September.
- 2005 Inti Ekbis. 106.000 KKB untuk Warga Surabaya. 29 September.

Kuntowijoyo.

- 1988 **Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940.** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kustiawan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1/tahun XXVI.

Kwik, Kian Gie.

1998 **Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia. Badai Belum Akan Segera Berlalu**. Jakarta: Gramedia.

Lewis, Oscar.

1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.

Liputan6 SCTV

2005 Penderitaan Buruh dalam Drama Teater. Diakses dari <http://www.liputan6.com/fullnews/100776.html>, tanggal 1 April 2005.

Melalatoa, M. Junus.

1989 Pesan Budaya dalam Kesenian. **Berita Antropologi**. No. 45, tahun XIII.

Pemda Kotamadya Surabaya.

1978 **Master Plan Surabaya Tahun 2000**. Surabaya: Pemda KMS.

Pour, Julius.

1998 **Jakarta Semasa Lengser Keprabon. 100 hari menjelang peralihan kekuasaan**. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Radjab, Suryadi A.

1990 Panggung-panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara. Gerakan Mahasiswa di bawah Orde Baru. **Prisma**. No. 10 tahun. XX.

Rudiono, Danu.

1992 Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak. **Prisma**. No. 1. Tahun XXI.

Rahaju, Siti Pudji.

2002 Pola Komunikasi dan Aliansi antara Buruh dengan Mahasiswa dalam Aksi-aksi Unjuk Rasa dan Pemogokan Buruh Industri di Jawa Timur. **Laporan Penelitian Dosen Muda**. Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Rahayu, Sri Kusumastuti.

2002 **Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Scott, James C.

1983 **Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.** Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Supramudyo, Gitadi Tegas.

2000 Pola Unjuk Rasa di Daerah Perkotaan. Studi tentang Unjuk Rasa Buruh, Sopir, Mahasiswa dan Warga Kampung di Surabaya. **Laporan Penelitian DIP.** Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Susanto, Budi.

1999 *Imajinasi Penguasa dan Identitas Postkolonial. Siasat Politik (Kethoprak) Massa Rakyat.* Yogyakarta: Kanisius.

Surbakti, Ramlan.

1994 Kebijakan Tata Ruang Perkotaan. Siapa Membuat dan Menguntungkan Siapa? **Prisma.** No. 7/tahun XXIII.

1996 Perebutan Ruang di Perkotaan dan Pembengarannya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Suryahadi, et.al.

2003 **Developing a Poverty Map for Indonesia: an Initiatory Work in Three Provinces. Part I: Technical Report.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Suyanto, Bagong.

1996 Pembangunan Kota dan Sengketa Tanah. Kasus Kotamadya Surabaya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Tabor, Steven R., dan M. Husein Sawit.

2001 Social Protection via Rice: The OPK Rice Subsidy Program in Indonesia. **The Developing Economies.** Th. 39. No. 3.

Wignjosoebroto, Soetandyo.

2004 Surabaya: Memahami Riwayatnya Masa Lampau guna Mempertajam Kemampuan Memproyeksi Perannya di Masa yang akan datang. **Makalah** dalam Sarasehan "Surabaya dan Tantangan Masa Depan." Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Wirodono, Sunardian.

1994 *Catatan 1993. Gerakan Politik Indonesia.* Jakarta: Puspa Swara.

240 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Bagian 3

P e n u t u p

Bab 10

Kemiskinan Kota dan Pembangunan

FX Sri Sadewo

karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.
(Pengkotbah 1:18)

Pengetahuan lebih banyak memang sangat menyedihkan bagi empunya. Betapa tidak, dalam kasus-kasus pada buku ini, masyarakat (warga negara, pen) menaruh harapan besar pada pemerintah untuk kesejahteraannya. Namun demikian, bila mengikuti berbagai pandangan dalam teori-teori sosial dan politik, maka pemerintah merupakan ruang pertarungan antar berbagai kelompok kepentingan. Mereka yang bisa mengakses, maka akan memperoleh keuntungan. Kelompok miskin, seperti dari wilayah perkotaan, bukanlah kelompok yang beruntung, baik di tempat yang baru (kota) maupun di daerah asalnya (desa). Dari sejumlah kasus pada bagian 2, ada beberapa hal yang dapat diserahkan dan dipikirkan bersama.

Arah Model Pembangunan yang Salah

Kota dan desa merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kota tumbuh karena revolusi pertanian yang mengkaitkan antara satu desa dan desa yang lainnya. Keberadaan kota mulanya didukung oleh desa-desa, Kota sangat memerlukan desa untuk tenaga kerja, pajak dan barang-barang komoditi. Pada perkembangan selanjutnya, kota tumbuh, seolah-olah otonom,

meninggalkan desa. Kota menjadi *center* (pusat), desa menjadi daerah pinggiran (*periferi*). Sebagai periferi, hampir seluruh enersinya kemudian dicerap kota, kemudian seperti digambarkan oleh Everett S. Lee (1984) sebagai fenomena *push-pull factor* dari migrasi dan urbanisasi.

Fenomena ini terjadi pada abad kedelapan belas di Eropa dan paruh kedua di negara-negara baru paska Perang Dunia ke-2. Kebijakan pajak atas tanah yang dibebankan pada petani oleh bangsawan mengakibatkan hubungan petani dan pekerja melemah, hubungan mereka mulai diukur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekan harga/upah tenaga kerja. Orang-orang desa yang tidak bertanah pun akhirnya berbalik mencari pekerjaan di kota, meskipun kondisi obyektifnya tidak menguntungkan. Mereka bersedia bekerja apa saja dengan upah berapa saja, asal bisa menerima uang *cash*.

Berbagai penelitian seperti James C. Scott (1983), Sujono dan Birowo (1976), dan Hotman Siahaan (1990), menggambarkan betapa perubahan teknologi telah merubah perimbangan pendapatan di desa, kelompok miskin desa semakin *powerless*, tidak mempunyai posisi tawar, sistem bagi hasil menjadi semakin tidak menguntungkan, dari *maro*, *martelu* hingga sistem *ceblokan*, Tulisan dari Agus Trilaksana (2000) dan Zainuddin Maliki (2002) juga menggambarkan hal yang sama di Jawa Timur, namun tindakan yang ekstrim dilakukan kelompok miskin desa adalah merantau hingga ke luar negeri. Mereka menghimpun seluruh enersi terakhirnya dan mempertaruhkan diri dengan bekerja sebagai TKI/TKW. Hal itu tidak terlepas dari *tekong*, orang yang memiliki jaringan dari desa, ke kota hingga keluar batas-batas negara. *Tekong* biasanya adalah kelas menengah desa yang tidak berada dalam hubungan patron-klien dalam struktur ekonomi desa. Dengan posisinya, seorang *tekong* membangun struktur patron-klien yang tidak lagi berbasis pertanian.

Ketika menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, Basofi Soedirman pernah mencanangkan *gerakan kembali ke desa*. Gerakan ini sebenarnya seiring dengan kebijakan pemerintah pusat pada waktu itu. Di tingkat pusat, pemerintah memutuskan lima hari kerja dengan alih-alih satu hari libur tambahan dapat digunakan untuk rekreasi atau kembali ke desa. Artinya, aliran uang yang semula hanya dilakukan pada waktu hari raya dengan fenomena mudik (baca juga Eric Wolf, 1986), kebijakan itu “mengubah” pola menjadi rutin dalam setiap tahun. Gerakan itu tidak relatif berhasil. Ada yang menjadi beberapa kendala, pertama masyarakat desa sekarang telah berubah, menjadi relatif seragam, mulai dari struktur pemerintahan (imbis dari UU No. 5 tahun 1974) hingga struktur ekonomi yang bergeser ke sektor industri. Kedua, dengan demikian, setiap desa relatif tidak memiliki produk unggulan. Ketiga, penciptaan produk unggulan menuntut perhatian dan perubahan paradigma bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal (Kota/Kabupaten hingga desa), misalnya: secara sederhana, kepala desa dan camat harus berani menolak menandatangani surat jual-beli tanah sawah penduduknya, padahal dalam transaksi itu aparat desa memperoleh keuntungan. Belum lagi, perubahan status ke perumahan atau industri akan meningkatkan PAD bagi kabupaten/kota. Sektor industri berdalih mampu menampung tenaga kerja dalam ratusan atau ribuan jumlahnya.

Strategi Adaptif Orang Miskin Kota

Kemiskinan yang demikian itu oleh Selo Soemardjan (1980; dikutip dari Karnadji dan Sudarso, 2005: 17) sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan itu diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosialnya mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapat yang sebenarnya tersedia. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasa kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-

tahun. Ciri utamanya adalah mobilitas vertikal tidak terjadi, walaupun terjadi sifatnya lamban. Ciri lain adalah timbul ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Ketergantungan ini memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam hubungan sosial yang timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh (Karnadji dan Sudarso, 2005: 19; kutip dari Mochtar Mas'ud, 1994:14).

Fatalisme atau sikap pasrah merupakan adaptasi psikologis bagi orang-orang miskin di manapun, baik di desa maupun di kota. Sikap ini memberikan ruang yang “menenangkan” di tengah kegelisahan atas ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah-masalah ekonominya. Kehilangan pekerjaan, tempat tinggal yang tidak “nyaman” dan “rentan” dari penggusuran, anggota keluarga yang sakit dan ditambah lagi harga-harga kebutuhan pokok yang belum tentu bisa dibeli merupakan masalah kaum miskin yang dihadapi terus-menerus setiap hari. Sementara itu, mereka berada di tengah-tengah keluarga yang berada dalam kondisi yang serupa. Pilihannya kemudian setiap keluarga mengembangkan etika subsistensi pada masing-masing keluarga. Walaupun ada simpanan, biasanya dalam yang sangat kecil dan tidak berlebih, sehingga tidak bisa digunakan untuk pinjaman pada keluarga lain. Mereka juga tidak mempunyai akses yang cukup baik untuk memperoleh tambahan uang bila memerlukan secara mendadak. Dunia perbankan sering bersifat diskriminatif terhadap kelompok miskin. Untuk memperoleh pinjaman, mereka diharuskan memenuhi syarat administratif yang belum bisa dipenuhi, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP) hingga anggunan. Kaum miskin kota sering mengalami kesulitan pada masalah KTP karena proses mutasi kependudukan yang dinilai mahal tidak dilakukan. Selain KTP, pemilikan barang atau rumah kaum miskin tidak bisa dijadikan anggunan, selain nilai jualnya, karena bukti pemilikan juga tidak ada. Syarat administratif dunia perbankan

bisa diminimalisir pada kelompok kelas menengah yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai. Kesulitan-kesulitan yang menumpuk kemudian menjadi bentuk *stressor* dan bila tidak “diredam,” maka berakibat pada masalah sosial lainnya, seperti pelacuran, pencurian, dan tindak kriminalitas lainnya. Cara peredamannya adalah melalui saluran psikologisnya, yaitu menenangkan, pasrah dan kemudian mengabaikan segala kesulitan yang dalam pandangan Marxian sebagai produk dari ketidakadilan dan eksploitasi pada kelompok yang lebih lemah.

Adaptasi psikologis, yaitu sikap pasrah tidak terjadi dalam waktu yang sekejap. Orang miskin kemudian langsung pasrah, melainkan berlangsung dalam waktu bertahun-tahun, bahkan harus “diwariskan” pada generasi berikutnya. Kemiskinan, seperti kehilangan pekerjaan, gaji/upah yang tidak cukup hingga sakit dan tidak mempunyai akses ekonomi-politik ini menjadi *stressor*, tekanan bagi kejiwaan seseorang dan/atau keluarga, apalagi hal itu berlangsung dengan sangat cepat.

Dalam kajian Emile Durkheim, situasi yang disfungsional ini bisa berakibat pada tindakan “bunuh diri” (lihat Johnson, 1986: 192-195) atau setidaknya mengambill jalan pintas, Koentjaraningrat (2002: 46-50) mengistilahkan mentalitas menerabas. Pada waktu krisis moneter di Indoneisa, pengumuman likuidasi bank, sepasang suami-istri dan empat orang anaknya melakukan bunuh diri di Kalimantan karena tabungan yang menjadi modal usahanya tidak bisa dicairkan. Sementara itu, di Bandung seorang ibu menjual putrinya untuk menikahkan putri yang lain. Sementara itu, di wilayah pesisir Selatan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, dari Pacitan hingga Wonogiri, terjadi semacam “*pulung ngendat*,” kejadian bunuh diri seolah-olah bergilir sesuai arah sinar putih seperti bintang jatuh. Alasan bunuh diri menjadi beralasan mulai dari sakit yang menahun hingga persoalan yang sepele, seperti tidak diajak anak ke kota. Demikian pula, dari sejumlah pemberitaan media massa elektronik, sejumlah

kejadi-an bunuh diri dengan alasan mulai dari kehilangan pekerjaan, sakit menahun dan kini menjalar pada anak-anak sekolah, seperti karena tidak lulus UAN hingga permintaan yang tidak dipenuhi. Hal itu menunjukkan bahwa kejadian bunuh diri dengan berbagai alasan tersebut sebagai produk adaptasi psikologis yang tidak berlangsung dengan baik. Artinya, menaruh harapan yang tinggi dengan mengabaikan kondisi yang sebenarnya, terjadi *deprivasi relatif* antara nilai harapan dan keadaan yang senyatanya.

Langkah strategi adaptasi kaum miskin pertama kali ketika tidak pendapatannya tidak memadai adalah mengurangi konsumsinya. Makanan yang dikonsumsi dikurangi sedemikian rupa, sehingga hanya mampu menggerakkan dirinya secara fisik, dimulai dari frekuensi makan, dari tiga kali untuk kondisi normal, menjadi dua kali sehari. Menunya pun dikurangi mulai dari tidak menggunakan daging dan ayam, berkurang terus hingga makan nasi, kecap dan kerupuk saja. Kebutuhan protein nabati didapat waktu yang tidak, seperti: pada waktu hajatan atau *slametan*, dan untuk umat Islam, dilakukan pada waktu Idul Kurban.

Langkah berikutnya adalah menggerakkan seluruh anggota keluarga untuk memperoleh pendapatan tambahan yang akan membuat hidup layak. Anak-anak memiliki nilai ekonomi yang positif. Mereka merelakan diri untuk meninggalkan masanya yang menyenangkan. Mereka bekerja, meski mungkin hanya dibayar separuh saja. Sementara ibunya bekerja, anak-anak berkeliraran dan kemudian masuk ke jalanan untuk mencari uang, mulai dari meminta-minta, *ngamen*, hingga menjadi joki *three in one*. Di dalam situasi ini anak-anak rawan mengalami kekerasan, mulai di-*palak* hingga dipukul pihak aparat (*trantib*). Kasus di Jakarta, karena menjadi joki, seorang anak dipukul, ditangkap dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas. Catatan-catatan lapangan lain dari kisah anak jalanan, anak-anak perempuan juga mengalami kekerasan seksual.

Tabel 10.1.
Kebutuhan dan Strategi Adaptasi Kaum Miskin

	Normal	Miskin Baru	Miskin Lama
Fatalisme	Rendah	Rendah, dan mulai beranjak naik	Tinggi
Tabungan	Ada, dalam jumlah sedikit. Cukup untuk mengatasi kebutuhan mendadak	Ada, dalam jumlah sedikit dan terus berkurang, akhirnya habis untuk konsumsi. Termasuk rumah dan seluruh isinya.	Tidak ada. Bila ada, tabungan berbentuk barang yang mudah dijual.
Pendapatan	Memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup (layak?) Terjadi pembagian kerja secara seksual, suami mencari nafkah, istri merawat & mendidik anak. Di kota, bila tidak bisa dipenuhi dari penghasilan suami, maka isteri bekerja di rumah atau sektor formal.	Tidak memadai. Sering terjadi karena pencari nafkah utama tidak bekerja, sakit atau meninggal. Isteri ikut mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah.	Sangat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam mencari nafkah. Anak-anak turun ke jalan atau bekerja di pabrik dengan resiko kesehatan yang tinggi.
Pemukiman	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Kondisi rumah higienis.	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Bila kemiskinan berlangsung lama, maka rumah dijual untuk kebutuhan hidup.	Tinggal di perkampungan kumuh dengan status tanah tidak jelas dan rawan penggusuran.
Kesehatan	Meski sedikit, dana diusahakan. Dalam kondisi tertentu Mengandalkan jaminan kesehatan dari perusahaan, ASTEK atau ASKES	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik. Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS
Makanan	3 (tiga) x sehari; asupan gizi memadai	2 – 3 x sehari, asupan gizi mulai tidak penting	1-2 x sehari, asupan gizi tidak penting. Penting

Bila ada orang beranggapan bahwa orang miskin itu malas, hal itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Pola strategi mereka mencari nafkah ternyata sering tidak hanya mengandalkan pada satu pekerjaan. Ada temuan mereka melakukan pekerjaan ganda. Pagi hari bekerja di sektor formal, seperti buruh pabrik, sedangkan sore hari bekerja di sektor informal, seperti berjualan, dan tukang potong rambut. Kalau memiliki pekerjaan pokok berjualan, maka tidak berhenti berjualan pada produk di pagi hari, sering sore hingga malam hari berjualan produk lain. Belum lagi, pada waktu bekerja, mereka berhemat dengan membawa lauk-pauk sendiri. Lama waktu bekerja bisa di atas dari 8 (delapan) jam sehari. Hal itu pada gilirannya akan berakibat pada hubungan yang kurang harmonis di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ada temuan bahwa kecenderungan terjadi perceraian tinggi pada keluarga miskin.

Tabungan merupakan hal yang mewah bagi orang-orang miskin, apalagi dalam bentuk uang. Di dalam kondisi yang normal, pada keluarga yang menengah, tabungan merupakan hal yang penting untuk mengatasi situasi krisis, seperti anggota keluarga yang sakit, rumah rusak, pendidikan anak. Ada beberapa cara untuk menabung, selain membuka rekening di Bank, mereka juga mengikuti arisan dalam jumlah yang besar. Kondisi ini tidak dialami oleh keluarga miskin baru, tabungan yang dimiliki akan habis untuk keperluan konsumsi, kemudian barang rumah tangga juga dijual bila perlu. Selain barang rumah tangga, ternak merupakan salah satu tabungan, sedikit-tidaknya bila masa paceklik. Produk dari ternak, seperti telur dan dagingnya, juga dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Rumah bisa juga berfungsi sebagai tabungan. Di dalam situasi mendesak rumah pun dijual, sehingga mereka pun kemudian pindah ke rumah dengan kondisi yang lebih buruk, dari pe-

rumahan ke kampung, dari kampung ke pinggiran kota. Pindah rumah sebagai strategi kaum miskin (lihat Kok, Mandemakers dan Wals, 2002). Dari milik sendiri, menjadi kontrak, dari kontrak kembali ke rumah orang tua. Ketika berada di dalam keluarga besar (*extended family*), maka kemiskinan tersebut menjadi beban dari keluarganya dan kemudian menjadi *shared poverty* dalam istilah Clifford Geertz (1983), kemiskinan dibagi bersama. Kemiskinan seperti virus yang menyebar. Kualitas dan beban yang tinggi berakibat rumah berikut lingkungannya menjadi tidak sehat dan dalam hasil penelitian R. Eddy Indrayana (2000) bahwa permukiman berkepadatan tinggi beresiko tinggi atau rentan terhadap kesehatan. Sanitasi dan udara yang buruk mengakibatkan penyakit pernapasan dan pencernaan.

Inilah rangkaian dari kemiskinan struktural (pendekatan Marx) menuju kebudayaan kemiskinan (Oscar Lewis). Ketidakmampuan akses untuk memenuhi kebutuhan akibat kondisi-kondisi obyektif yang kurang menguntungkan berakibat pada fatalisme, kepasrahan, dan secara terus-menerus melakukan pengabaian atas nilai-nilai ideal. Ini merupakan sikap realistik terhadap kondisi yang menurut mereka sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka awalnya memiliki mimpi untuk hidup yang layak, menjalani proses ritual yang layak, dan walaupun mati juga layak. Mereka berharap bisa memiliki pekerjaan dengan upah yang layak, tinggal di dalam rumah yang layak, membesarkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Mereka berharap tidak akan gelisah bila sakit atau mati karena sudah memiliki asuransi. Mimpi atau harapan ini tidak bisa dicapai karena mereka berada kondisi obyektif, seperti tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan jaringan, yang tidak menguntungkan. Kondisi-kondisi itu mengurangi dan bahkan membatasi akses politik, ekonomi dan sosialnya terhadap struktur sosial. Oleh karena itu, persoalannya bukan pada sekedar mendefinisikan kemiskinan struktural atau kebudayaan kemiskinan, tetapi harus melihat sebagai rangkaian proses yang kontinu.

Daftar Pustaka

Geertz, Clifford.

- 1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.** Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi.** Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Johnson, Doyle Paul.

- 1986 **Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1.** Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat,

- 2002 **Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kok, Jan., Kees Mandemakers, dan Henk Wals.

- 2002 City nomads. Moving house as a coping strategy, Amsterdam 1890-1940. **Paper** for the 4th European Social Science History Conference The Hague, 27 February-March 2, 2002

Wolf, Eric R.

- 1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-ilmu Sosial Jakarta. Jakarta: Rajawali.

Indeks

A

adegan teatrikal, 207, 231, 240, 245
agribisnis, 48
ambachtschool, 52
Ala, Andre Bayo. 32, 40, 41, 249
Arief, Sritua.
 Adi Sasono, 36

C

CBD, 203
Chambers, 36, 38
Cina, 61, 160, 213, 216, 223

D

danyang, 103
demam berdarah, 61
Dilon, HS.
 Hermanto, 31

E

empowerment, 34
Evers, Hans-Dieter., 11, 49, 157, 158

G

Gailbraith, Kenneth. 36
Gerbangkertasusila, 204
gilda-gilda, 18, 98
Goede, 9, 11
Government Eroppeesche Lagere School, 52

H

Handinoto, 48, 50, 52, 53, 99, 129
Hauser, Philip M. 6
Haviland, 6, 17, 24
HIPPA, 101
Holandsche Indische School, 52

I

Indrayana, 62, 248, 263, 264
integrated poverty, 36
isolasi, 39, 40
ISPA, 61

J

Javaansche School, 52
jimpitan, 16

K

Kampoeng Improvement
 Programme, 62
Kartodirdjo, Sartono., 9, 12, 24, 131
Kemiskinan
 Kultural, 36
 Struktural, 31, 36, 257, 263
 lack of opportunity, 34
 low capabilities, 34
Kemiskinan, perangkap
 kelemahan fisik, 35, 39
 kemiskinan "proper", 39
 kerentanan, 35, 39
 ketidakberdayaan, 34, 35, 39, 40, 156
KFM, 212, 213
Klugman, Jeni., 34, 35, 41, 246, 248

L

Lee, Everett S., 21, 80, 256
Levitan, Sar A., 32

LSM, 205, 231, 233, 234, 239, 242

M

Maas River, 49

*Maatschappij Tat Nut van Het
Algemeen*, 52

mahasiswa, 54, 55, 56, 138, 162,
172, 194, 205, 206, 207, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 229, 230, 232, 233,
234, 235, 241, 242

mandala, 53

Modelske, 18, 20, 24

Mulder, Niels., 33

Mumford, 17

N

Nasikun, 36, 38, 40, 41

nyantri, 53

O

off-farm, 100, 109

P

PAM, 103, 107, 147

passesn stelsel, 51

Perguruan Tinggi, 53, 54, 219, 222

PPL, 101

primus inter pares, 16, 98

pusat peradaban, 18

R

Ravallion, 33, 41

Rudiono, 212, 213, 216, 250

Rusli, Said., 5, 12

S

Sadewo, 22, 45, 64, 66, 98, 102, 133,
137, 159, 162, 203, 206, 221, 255

sakral, 103

Samhadi, 23, 24

Suharto,

pemerintahan 28, 112, 212, 213,
221, 234

Sukadana, A. Adi., 15, 17, 24, 99, 130

Suparlan, Parsudi., 4, 7, 12, 157

Surbakti, Ramlan., 208

Steele, 65

Stilkind, Jerry., 14, 24, 131

T

tegal desa, 103

the safety first, 208

Todaro, Michael P., 14

U

UMK, 211, 213, 215, 237, 247, 249

urban bias, 65

V

VOC, 47

W

Weber, Max., 18, 176, 196, 199

Werner, CC., 52

wijken, 51

Wignjosebroto, Soetandyo. 47

Wiradi, Gunawan. 22, 24, 109, 110,
113, 128, 130, 131

Wirth, Louis., 5, 9

Wolf, Eric., 22, 124, 257

ISBN : 978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA

FX Sri Sadewo, dkk



Editor
Martinus Legowo

FX Sri Sadewo

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN DI SURABAYA



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031-8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031-8288598
Email. unipress@unesa.ac.id
unipressunesa@yahoo.com

ISBN : 978-979-028-847-8



978-979-028-847-8

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN di Surabaya

Edisi Revisi

Penulis

FX Sri Sadewo
Martinus Legowo
Sugeng Harianto
Agus Trilaksana
Usman Mulyadi

Editor

Martinus Legowo



**Penerbit
Unesa University Press**

MASALAH-MASALAH KEMISKINAN

di Surabaya

Edisi Revisi

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email: unipressunesa@yahoo.com

unipress@unesa.ac.id

ix, 255 hal., Illus, 15.5 x 23

ISBN: 978-979-028-847-8

copyright © 2015, Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Menjadi miskin bukan sebagai suatu pilihan, berbeda bila menjadi orang kaya. Dari hari ke hari orang berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Kekayaan tidak saja menjadi atribut dari status sosial seseorang. Barang-barang miliknya dibawa seiring jalan orang tersebut. Orang lain menoleh, takjub, dan iri, sebaliknya si kaya dengan tegap, wajah mendongak ke atas dan bangga. Tidak demikian dengan orang miskin, ia tertunduk ke bawah, tidak berani menatap wajah orang, selain menengadah tangan. Sangat tidak berdaya.

Gambaran orang miskin yang demikian ini memang tidak separah itu. Orang miskin sering lebih tegap dan *trengginas*, dari hari ke hari untuk mencari makan. Ia bekerja dan mengumpulkan satu demi satu rupiah untuk makan. Memang, tidak semua yang dikumpulkan bisa disimpan, sebaliknya habis untuk kebutuhan konsumsinya.

Intinya, kemiskinan bukanlah suatu kebanggaan. Namun demikian, ternyata tidak semuanya benar, pada setiap kelompok keyakinan tertentu, ada orang yang merelakan dirinya untuk melepaskan dari kesenangan duniawi. Mereka menjadi miskin secara sukarela demi keyakinan. Kelompok demikian tidak dibahas dalam buku ini.

Surabaya, awal Februari 2007
penyunting

FX Sri Sadewo

Kata Pengantar

(edisi revisi)

Persoalan-persoalan kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan menjadi indikator ketidaksejahteraan suatu masyarakat. Semakin besar jumlah orang miskin, hal itu menunjukkan kegagalan para penyelenggara negara (pemerintah). Di setiap negara, hidup sejahtera, baik secara material maupun non-material menjadi satu tujuan mengapa mereka memerdekakan diri. Kesejahteraan material ditandai dengan kemakmuran secara ekonomi, sementara itu kesejahteraan non-material ditandai dengan rasa aman dan nyaman, atau tepatnya kebahagiaan. Pengelola negara tidak bisa memilih salah satu yang lebih dahulu dicapai, baru yang lain dicapai berikutnya. Ketidaksejahteraan secara material pada gilirannya mengakibatkan berbagai tindakan yang mengurangi rasa aman, nyaman dan bahagia. Sebaliknya, rasa aman, nyaman dan bahagia merupakan hal yang abstrak dan jauh lebih sulit untuk dicapai. Ukuran-ukurannya pun berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, orang akan mengenal dengan konsep *American Dreams* (Mimpi Amerika). Dalam nilai tersebut, ternyata ada ukuran ekonomi juga menjadi acuan.

Memang tidak selalu, ukuran kesejahteraan material menjadi utama bagi seseorang. Karena nilai-nilai tertentu, orang lebih memilih ketenangan hidupnya tanpa bergantung pada perolehan ekonominya. Orang-orang yang demikian telah memilih kemiskinan menjadi bagian hidupnya. Mereka miskin secara sukarela, sudah barang tentu dengan berbagai alasan. Namun demikian, hal tersebut tentu dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah yang lebih besar, kesejahteraan material merupakan hal yang selalu diharapkan. Artinya, mereka tidak ingin menjadi

miskin. Pemahaman yang demikian ini kemudian menjadi kesepakatan bersama bagi negara-negara di dunia melalui MDG's (*Milleneum Development Goals*) yang dideklarasikan pada bulan September 2000 dan berharap dicapai tahun 2015. Point yang pertama dari MDG's adalah meningkatkan jumlah orang yang berpendapatan di atas 1 \$ per kapita per hari. Angka 1 \$ itu sebagai ambang batas kemiskinan absolut. Menjelang tahun 2015, seluruh pemerintah penandatangan MDGs melakukan evaluasi dan menyatakan belum tercapai sepenuhnya. Akhirnya, pada 12-13 Nopember 2014 mereka kembali menandatangani kesepakatan bersama untuk melanjutkan program-program tersebut dengan perbaikannya. Kesepakatan itu tertuang dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kegamangan terhadap kondisi kemiskinan itu sebenarnya tidak saja dimiliki oleh pengelola negara, tetapi juga mereka yang mengalami. Pertambahann jumlah orang miskin itu tidak terlepas dari kegagalan berbagai program pembangunan. Kegagalan pembangunan pertanian di perdesaan misalnya telah meningkatkan jumlah orang miskin. Wilayah perdesaan telah di-"kota"-kan dengan industri yang jauh dari karakternya. Orang yang termajinalisasi dari pembangunan pedesaan tersebut pada gilirannya urbanisasi ke wilayah perkotaan. Dengan mengambil kasus kota Surabaya, buku ini dengan baik menggambarkan orang-orang miskin itu sebenarnya tidak menyerah begitu saja. Mereka yang berasal dari desa beradaptasi dengan wilayah perkotaan dan bekerja pada berbagai sektor formal atau informal.

Buku ini diawali dengan perdebatan teoritik tentang pertumbuhan perkotaan dan indikator kemiskinan. Hal itu disajikan dalam bagian pertama. Bagian berikutnya, gambaran tentang usaha-usaha orang miskin berjuang dan bertahan hidup direkam dengan baik melalui sejumlah penelitian pada beberapa sektor pekerjaan di Surabaya. Mereka, orang miskin sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka menyuarakan dalam berbagai bentuk,

misalnya melalui aktivitas mengamen dan adegan teatrikal pada waktu demo. Hal itu dicermati dan ditulis pada bab 8 dan bab 9. Di bagian akhir, penulis merangkum bagaimana usaha-usaha orang miskin kota bertahan dan beradaptasi dalam kemiskinan.

Di dalam edisi revisi ini, penulis mengolah ulang terutama terkait dengan metode penelitian. Hal itu ingin menunjukkan pada pembaca bahwa apa yang ditulis bukan sekedar imajinasi tentang orang miskin, tetapi apa yang ada, terjadi dan dipahami tentang orang miskin.

Lebih dari itu, selain edisi revisi dalam bentuk cetak, dengan mencermati perubahan teknologi, buku ini ditampilkan dalam bentuk ebook yang tidak berbeda jauh dari edisi cetak. Penerbitan ebook bertujuan agar buku ini dapat dibaca secara luas, sekaligus dengan harapan untuk memperoleh kritik. Ada rencana dalam waktu tidak lebih dari dua tahun, buku ini juga dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris.

Surabaya, Desember 2015

FX Sri Sadewo

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar (edisi revisi)	v
Daftar Isi	ix
Bagian 1. Problematika Perkotaan	1
Bab 1 Urbanisasi dalam Perspektif Budaya (Martinus Legowo)	3
Bab 2 Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran (FX Sri Sadewo)	13
Bab 3 Kemiskinan dan Pengukurannya (FX Sri Sadewo)	23
Bagian 2. Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota	39
Bab 4 Surabaya, Geliat Calon Kota Metropolitan (FX Sri Sadewo)	41
Bab 5 Buruh Bangunan di Kota Besar. Mekanisme Survival Kelompok Miskin Migran di Surabaya Tahun 1990-an (FX Sri Sadewo)	59

Bab 6	
Petani Kota. Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang Urban (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto, dan Usman Mulyadi)	93
Bab 7:	
Petugas <i>Cleaning Service</i> . Berharap di Sektor " <i>Formal</i> ", meski Harus Cerdik dan Tabah (Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo, dan Arief Sudrajat)	127
Bab 8	
Pengamen Seniman Jalanan dan Suara-suara " <i>Lapar</i> " Orang Miskin Kota (Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto)	153
Bab 9	
Mahasiswa dan Orang Miskin Kota Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota (FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi)	195
Bagian 3.	
Penutup	241
Bab 10	
Kemiskinan Kota dan Pembangunan (FX Sri Sadewo)	243

Indeks

FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya

Bagian 1

Problematika Perkotaan

Bab 1

Urbanisasi dalam Perspektif Budaya

Martinus Legowo

Pendahuluan

Jika suatu bangsa sadar dengan proses modernisasinya, sebenarnya bangsa tersebut hanya ingin berusaha untuk menyesuaikan dengan konstelasi dunia serta aliran peradapan pada jaman bangsa tersebut hidup. Kecenderungan suatu bangsa untuk memodenisir dirinya sejauh mungkin dilakukan dengan pembangunan. Dalam pembangunan ini secara sadar diupayakan untuk dipercepatnya perubahan struktur sosial-ekonomi dalam bangsa yang bersangkutan. Konsekuensi dari hal ini antara lain mengakibatkan juga suatu proses pergeseran dalam struktur mata pencaharian, stratifikasi sosial, serta meningkatkan mobilitas geografi seperti migrasi dan urbanisasi.

Masalah urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja, dalam arti perpindahan dari desa ke kota, akan tetapi juga dilihat sebagai perubahan budaya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut jika ditinjau dari perspektif budaya, maka urbanisasi ini perlu kerangka berfikir yang lain yaitu yang menyangkut masalah nilai, norma dan pengetahuan. Urbanisasi juga mempunyai kecenderungan untuk melibatkan perubahan-

perubahan dalam sub sistem masyarakat yang lain. Terutama pada tingkat makro, karena urbanisasi juga berarti mobilitas dan jika mobilitas terjadi, maka sub sistem lain biasanya juga berubah.

Dengan melihat urbanisasi sebagai proses perubahan kebudayaan, dalam arti perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan (*ide-ide*), akan memudahkan untuk memasukkan berbagai gejala yang mungkin muncul di perkotaan dalam kerangka penjelasan ini. Masalah-masalah yang muncul pada dimensi yang lain dapat dijelaskan lewat kerangka berfikir yang melihat ada kesejajaran masyarakat. Antara desa dan kota memiliki perbedaan dalam hal kebudayaan karena pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan lingkungan dan lingkungan yang mereka hadapipun berbeda. Permasalahan ini akan menimbulkan persoalan dalam menyesuaikan dengan lingkungan kota, terutama dalam memperjuangkan hidup dan cara (*gaya*) hidup. Sehubungan dengan ini Parsudi Suparlan (1978) menjelaskan bahwa persebaran kebudayaan kepada anggota dan pewarisan kepada generasi selanjutnya dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucap maupun dalam tindakan.

Di sini kita harus bisa memandang bahwa kebudayaan sebagai suatu kekhususan sistem nilai, karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang lain. dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kearah yang lebih sesuai dengan kehidupan yang lain.

Urbanisasi: Sebuah Kerangka Konsep

Deskripsi urbanisasi banyak yang diartikan sebagai suatu mobilitas horizontal, yaitu dari desa ke kota. Menurut Said Rusli (1983), dijelaskan bahwa urbanisasi dilihatnya sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Menurut Lee (1984) ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi, yaitu (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) faktor penghalang, dan (4) Faktor-faktor pribadi. Selanjutnya Louis Wirth's dalam studi urbanisasinya mengatakan bahwa : "*Urbanism as a way of life*" (Urbanisasi sebagai cara hidup) di mana pemusatan penduduk di dalam kota dianggap sebagai variabel yang sangat menentukan kemungkinan hidup individu, serta interaksi antar individu. Urbanisasi sebagai cara hidup yang khas dapat didekati secara empiris dari 3 perspektif yang saling berhubungan, yaitu : (1) sebagai suatu struktur fisik yang terdiri dari penduduk, teknologi dan keteraturan ekologis, (2) sebagai suatu sistem organisasi sosial yang melihat suatu struktur sosial yang khas suatu rangkaian institusi sosial dan suatu pola hubungan sosial yang khas pula, (3) sebagai seperangkat sikap dan ide-ide, dan kumpulan pribadi-pribadi yang ikut serta dalam bentuk-bentuk tingkah laku kolektif yang khas, dan menjadi obyek dari mekanisme pengawasan sosial yang khas pula. Lebih lanjut, Said Rusli (1983) melihat bahwa urbanisasi itu sebagai gejala kependudukan, yaitu berubahnya proporsi penduduk perkotaan karena migrasi dari desa ke kota. Hal itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Bintarto (1984) bahwa gejala urbanisasi terkait dengan faktor *push* dan *pull*.

Karena hanya melihat dari sisi faktor *push* dan *pull*, maka urbanisasi harus juga dilihat dari sisi budaya. Aspek budaya itu menyangkut nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan. Hal itu dilakukan oleh White dalam Haviland (1989),

mendefinisikan aspek tekno-ekonomis kebudayaan sebagai cara yang digunakan oleh para anggota suatu kebudayaan untuk menghadapi lingkungan mereka, dan aspek inilah yang selanjutnya menentukan aspek sosial dan ideology kebudayaan. Cara kebudayaan ini merupakan cara beradaptasi dengan lingkungan.

Dengan demikian kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan (emosi) manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral yang sumber-sumber dari nilai moral tersebut pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia.

Urbanisasi Sebagai Proses Perubahan Kebudayaan

Urbanisasi menurut Philip M. Hauser (1973) dapat didefinisikan sebagai proses yang membawa transformasi besar dalam pandangan hidup manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pergeseran dari “rural” ke “urban”. Sehubungan dengan demikian kita perlu melihat definisi kebudayaan agar diperoleh gambaran yang jelas karena gejala perubahan di sini adalah perubahan kebudayaan.

Kebudayaan disini harus dilihat dari proses kognitif, yaitu sebagai serangkaian pengetahuan yang digunakan sebagai strategi untuk menghadapi kehidupan, yang berkenaan dengan pemahaman dan pengintepretasian lingkungan serta pengalaman yang dihadapi oleh manusia. Lingkungan dan pengalaman ini sangat menentukan bagi proses belajar seseorang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1978) bahwa kebudayaan dengan demikian merupakan sistem ide, yang merupakan serangkaian petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan

strategi-strategi yang terdiri atas model-model kognitif yang bersumber pada dan diselimuti oleh nilai-nilai yang ada dalam etos dan pandangan hidup, yang dalam penggunaannya oleh para pelakunya untuk menginterpretasi dan menghadapi lingkungannya dilakukan secara selektif. Jadi kebudayaan disini adalah pedoman bagi tingkah laku manusia. Sebagai pedoman, ia memegang peranan penting karena dapat mengarahkan tindakan-tindakan dari si pendukungnya.

Deskripsi atau pendefinisian kebudayaan sebagai proses kognitif memiliki implikasi lanjutan terhadap pemahaman urbanisasi. Kita harus melihat bahwa urbanisasi tidak hanya sekedar dipandang sebagai perubahan tempat saja (dalam arti perpindahan dari desa ke kota), akan tetapi perubahan tersebut juga dilihat sebagai proses budaya. Demikian juga termasuk transfer nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan kota. Mengenai transfer kebudayaan ini hendaknya disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga merupakan keputusan untuk melakukan penyesuaian kebudayaan di lingkungan yang baru (sesuai dengan iklim perkotaan).

Masalah yang dihadapi sekarang adalah kesulitan dalam mengubah sistem ide mereka (kaum urbanis), dengan demikian bisa mengalami hambatan dalam transfer kebudayaan. Sistem ide ini merupakan salah satu unsur yang paling sukar diubah dan seandainya bisa diubah membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kebudayaan suatu masyarakat itu sudah mengakar dalam diri pendukungnya. Lebih jauh lagi apabila kebudayaan itu sendiri tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakatnya, dalam arti sudah tidak diperlukan lagi oleh masyarakat pendukungnya sehingga dengan demikian kebudayaan akan berubah. Proses adaptasi sangat penting artinya agar kebudayaan kota dapat diterima dengan baik. Sehubungan dengan adanya adaptasi ini manusia tidak hanya telah menjamin kelestariannya, tetapi juga

pemekarannya. Oleh karena itu, tidak berarti bahwa apa saja yang dikerjakan oleh manusia dikerjakan karena sifat adaptifnya terhadap lingkungan tertentu. Yang jelas, manusia tidak bersaksi terhadap lingkungan seperti apa adanya, tetapi tetapi ia bereaksi terhadap lingkungan seperti apa yang dipahaminya, dan kelompok manusia dapat memahami lingkungan yang sama dengan cara-cara yang berbeda satu sama lain. Mereka juga bereaksi terhadap hal-hal yang bukan lingkungan: pertama-tama sifat biologinya, kepercayaan, sikap dan konsekuensi perilaku mereka untuk orang lain. Semua itu menghadapkan mereka kepada masalah, dan orang yang memelihara kebudayaan itu untuk memecahkan masalah.

Kota, Lingkungan yang Menuntut Perubahan Budaya

Lingkungan mempengaruhi kebudayaan, sehingga nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan hidup yang dihadapinya. Lingkungan desa dan kota merupakan dua kubu yang berbeda. Strategi adaptasi di pedesaan juga berbeda dengan strategi adaptasi di kota. Selain itu, pertumbuhan kebudayaan yang ada di desa berbeda dengan yang ada di kota. Simbol-simbol komunikasi pun ikut berubah dalam proses ini, sehingga manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu memiliki model berfikir yang banyak dipengaruhi dan disesuaikan dengan lingkungan itu yang menjadikan sikap dan tindakan mereka memiliki corak latar belakang lingkungan asalnya. Masalah-masalah inilah yang berkaitan erat dengan urbanisasi yang ada di perkotaan.

Masalah itu ada karena sebagaimana dicirikan oleh Louis Wirth dalam Goede (1982) bahwa kota sebagai suatu *“relatively large, dense, and permanent settlement of socially heterogeneous individuals”*. Ada tiga komponen yang cukup penting dari definisi ini, yaitu : (1) ukuran yang besar; (2) adanya kepadatan; dan (3) sifatnya yang heterogen. Komponen yang dikemukakan oleh Wirth ini melahir-

kan masalah pada saat terjadinya kontak antara desa dan kota. Masalah ini sangat penting diperhatikan karena baik nilai-nilai, norma-norma, maupun pengetahuan yang tumbuh di perkotaan membedakan dengan yang ada di pedesaan. Selanjutnya, Sartono Kartodirdjo (1977) memberikan suatu konsepsi lain untuk mengkaji masalah yang berhubungan dengan pandangan hidup ini dengan menggunakan tiga perspektif sebagai pendekatannya. Pertama, bahwa sebagai struktur fisik, kota mempunyai dasar populasi yang dideferensiasikan menurut tingkat teknologi, susunan ekologis dan faktor-faktor lain. Kedua, sebagai susunan sosial, pandangan hidup ini menggantikan hubungan primer dan sekunder. Berhubung dengan proses ini maka ikatan kekerabatan diperlemah, dan solidaritas sosial menjadi goyah. Ketiga, dengan gaya hidup ini muncul mentalitas kota dengan sikap, ide-ide, dan kepribadian yang berbeda dengan mentalitas tradisional. Ketiga perspektif ini sangat penting bagi penjelasan tentang urbanisasi. Hubungan-hubungan sosial yang muncul juga membutuhkan corak yang khusus, menuntut adanya strategi adaptasi tertentu.

Tentang gaya hidup kota, Wirth mengemukakan bahwa (1) masyarakat kota cenderung sekuler, (2) terbentuknya asosiasi yang bersifat sukarela; (3) adanya peranan sosial yang terpisah-pisah; dan (4) peranan norma-norma menjadi tidak jelas. Kaum urbanis akan mengalami perubahan ke arah tersebut. Namun demikian, mereka tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai, norma-norma dan model-model pengetahuan yang memiliki corak pedesaan. Oleh karena itu, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Kondisi kota merupakan sesuatu yang asing bagi kaum urbanis, sehingga sistem pengetahuan yang mereka miliki tidak dapat dipakai untuk memahami dan menginterpretasikan dengan tepat kondisi kehidupan di perkotaan. Simbol-simbol kehidupanpun sudah berubah, hubungan-hubungan sosial sudah menjadi dangkal. Orang kota sudah mengembangkan kehidupan yang komersial. Stratifikasi sosialpun sudah semakin jelas perbedaan-

nya, sehingga menyebabkan hilangnya kontak yang menyeluruh antar warga masyarakat.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada kaum urbanis ini adalah: (1) mereka mengubah sistem pengetahuan lama yang dibawa dari daerah asal agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan yang berlaku di perkotaan; dan (2) mereka tetap mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, model-model pengetahuan lama. Sistem pengetahuan untuk selanjutnya digunakan untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan sistem pengetahuan mereka yang sudah mapan. Untuk yang pertama mereka akan menjadi golongan orang kota, yang harmonis dengan lingkungan hidup di perkotaan. Selanjutnya yang kedua, mereka akan hidup sebagai orang desa di perkotaan, yang lengkap dengan gaya hidup di pedesaan.

Penutup

Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi memungkinkan kita sampai pada penjelasan yang lebih mendasar. Urbanisasi tidak hanya menyangkut masalah perubahan fisik, tetapi juga harus dilihat dalam konteks budaya yang berarti perubahan sistem pengetahuan untuk menginterpretasikan kehidupannya. Perspektif budaya dalam memahami masalah urbanisasi merupakan salah satu bidang penjelasan yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Perlu diketahui bahwa kita harus memandang kebudayaan sebagai kekhususan-kekhususan sistem nilai karena kebudayaan yang berkembang pada daerah tertentu tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku pada masyarakat lain. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengetahuan yang khusus untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang lain. Dalam proses urbanisasi, pengambilan keputusan untuk melakukan urbanisasi harus juga diikuti oleh pengambilan keputusan dalam

diri individu untuk merubah nilai-nilai, norma-norma, dan model-model pengetahuan ke arah yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat lain.

Daftar Pustaka

Bintoro

1984 **Urbanisasi dan Permasalahannya**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Evers, Hans-Dieter

1978 "Urbanization and Urban Conflict in Southeast Asia". Dalam Peter SJ Chen and Hans-Dieter Evers (ed.), **Studies in Asean Sociology**. Singapore: Chopmen Enterprises.

Goede, JH

1982 "Urbanisasi dan Urbanisme" dalam JW Schoorl, **Modernisasi**, Jakarta: Gramedia.

Houser, Philip M

1973 **Perkembangan Kota Semarang**, Salatiga: LPIS IKIP Kristen Satyawacana.

Lee, Everet S

1983 **Suatu Teori Migrasi**, diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta, PPK- UGM.

McGee, TG

1976 **Suatu Aspek Urbanisasi di Asia Tenggara**, Yogyakarta, Lembaga Kependudukan UGM.

Parsudi Suparlan

1977 "Flat dari aspek Antropologi", **Widyapura**, No.1, Th II

Said Rusli

1984 **Pengantar Ilmu Kependudukan**, Jakarta: LP3ES.

Sartono Kartodirdjo

1978 Kata Pengantar dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), **Masyarakat Kuno dan Kelompok Sosial**, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Wirth, Louis

1978 Urbanisasi sebagai cara hidup, **Berita Antropologi**, Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, No. 34.

Bab 2

Peradaban, Urbanisasi dan Peminggiran

Kota sebagai Pusat Peradaban

Dari catatan Michael P.Todaro dan Jerry Stilkind (1991) menggambarkan bagaimana penduduk kota telah membengkak berlipat-lipat jumlahnya, tidak saja di negara-negara maju, tetapi sebaliknya di negara-negara sedang berkembang. Di dalam wilayah yang terbatas, kota dihuni oleh puluhan juta manusia, Mexico City dengan 31 juta jiwa, Sao Paolo 25,8 juta jiwa, New York 20,4 juta jiwa, sementara itu Jakarta dengan 16,7 juta jiwa. Orang-orang dengan “sukarela” hidup bersesak-sesak di kota yang sempit, fasilitas yang terbatas. Untuk di Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya, mereka tak jarang harus tinggal di bantaran sungai. Dengan kondisi lingkungan yang “tidak sehat” (menurut ukuran ilmu kesehatan lingkungan), mereka tinggal, bahkan menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah tersebut.

Kepadatan nampaknya menjadi ciri dari sebuah kota. Setiap kota di mana pun memiliki wilayah-wilayah padat. Wilayah-wilayah itu biasanya tidak jauh dari pusat kota. Hanya sedikit kota-kota di dunia ini direncanakan dengan penataan ruang taat asas. Kota yang demikian ini biasanya tidak tumbuh secara

alamiah, tetapi “kloning” (rekayasa) dari kota-kota lama yang telanjur semrawut.

Hal ini tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan kota tersebut. Di dalam sejarahnya, kota ini lahir dari revolusi peradaban pertama, yaitu revolusi agraris. Dimulai dari domestikasi (penjinakan) binatang dan tanaman hingga bercocok tanam dan penemuan “teknologi” pertanian, sebut saja kapak persegi dan alat besi, manusia kemudian di-“rumah”-kan. Manusia tidak lagi berkeliaran mengikuti binatang buruan, tetapi cukup memilih tempat tinggal. Hal ini tidak berjalan dalam waktu yang singkat dan langsung. Pada waktu penjinakan binatang, manusia tidak lagi berburu, tetapi menjadi penggembala. Mereka membawa binatang piaraannya ke padang-padang. Mereka meninggalkan gua, tetapi membawa kemah-kemahnya. Ketika bercocok tanam, mereka tidak lagi berjalan ke padang-padang, tetapi menetap di mana lahan pertanian itu berada. Rumah-rumah pun didirikan di sekitar lahan pertanian (lihat Sukadana, 1983: 47-62).

Pembagian pekerjaan di antara manusia ini kemudian menjadi semakin kompleks. Dari secara tegas, mereka berbagi tugas dengan penanda jenis kelaminnya, mereka meletakkan perempuan di rumah bersama anak-anaknya, hanya pada waktu tertentu saja, seperti tanam, panen dan sesudahnya ditarik turun ke lahan pertanian. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang telah melahirkan peradaban tersebut. Ada dugaan yang mulai melakukan domestikasi binatang dan tanaman adalah kaum perempuan tatkala manusia laki-laki sedang sibuk berburu dan berperang. Oleh karena itu, segala atribut “lahir” yang dimiliki oleh perempuan menjadi penanda kesuburan lahan tersebut.

Karena hasilnya berlimpah, tidak bisa dihabiskan dalam waktu yang singkat, maka masyarakat petani mengalami surplus pangan. Surplus pangan ini merupakan berkah dan malapetaka. Menjadi berkah karena manusia tidak lagi hidup hanya untuk

mencari makan. Waktu luangnya digunakan untuk mengembangkan teknologi dan kesenian. Spesialisasi pekerjaan di luar pertanian pun berkembang. Sementara itu, surplus pangan ini menjadi malapetaka karena menjadi daya tarik bagi kelompok manusia yang masih nomaden untuk menguasai. Peperangan pada masa lampau biasanya terjadi pada masa paska panen.

Strategi yang dikembangkan kemudian adalah hidup lebih berkelompok, rumah-rumah tidak lagi berjauhan, mengikuti lahan pertanian, namun sebaliknya berkelompok, sebagai perkampungan. Lahan pertanian diletakkan di sisi luar, antara lahan pertanian dan perkampungan dibatasi tumpukan batu seperti layaknya batas dan benteng kota, atau rimbunan pohon-pohon bambu, seperti pola-pola perkampungan lama di Asia Tenggara, antara lain: Huta (Batak). Hanya ada satu pintu masuk ke perkampungan. Pada waktu malam hari dan saat-saat tertentu kaum lelaki secara bergiliran bertugas untuk menjaga perkampungan.

Hal itu diatur oleh kepala kampung. Kepala kampung ini dipilih mengikuti prinsip *primus inter pares*. Lama-kelamaan orang yang berjaga ini dipilih secara khusus, di kampung Jawa dikenal dengan *Jagabaya*. Orang-orang ini dibayar dengan himpunan kecil dari hasil panen (*jimpitan*) pada masing-masing keluarga. Aktivitas ini diatur oleh kepala kampung. Dalam perkembangannya, penemuan sistem pertanian sawah membuat hubungan antar keluarga, antar kampung ini menjadi semakin teratur dan meluas seiring jaringan irigasi dari sungai ke sawah. Dari antara kepala kampung, seorang dipilih sebagai pemimpin. Pemimpin ini raja di masa kemudian, kampung tempat tinggalnya adalah kota, sedangkan para *jagabaya* menjadi tentara, dan *jimpitan* adalah pajak. Tanda-tanda pembayaran *jimpitan* ini adalah awal dari manusia mengenal angka dan huruf pertama kali, sebagaimana terjadi pada bangsa Sumeria di Mesopotamia kurang lebih 5.000 tahun yang lalu (perhatikan Haviland, 1988: 31; Sukadana, 1983: 71-72; Hawkes, 1965: 326, 363-364). Secara ringkas, Mumford (1970),

sebagaimana dikutip oleh Adi Sukadana (1983: 72), mengurutkan rangkaian perkembangan sebuah kota sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahap-tahap Perkembangan Kota
(Sukadana, 1983: 72)

Stadium	Bentuk Perkembangan
1 Eoplis	Perkembangan sebuah desa menjadi suatu pemukiman yang tetap dengan penggunaan tanah yang teratur
2 Polis	Suatu kumpulan desa atau kelompok keluarga besar dengan adat-istiadat serta kegiatan agraris yang bertahan.
3 Metropolis	Sebuah kota yang tumbuh dari sejumlah desa tau kota kecil, sehingga merupakan suatu pemukiman induk dengan pusat perdagangan dan interaksi macam-macam kebudayaan.
4 Megapolis	Sebuah kota besar dengan tanda-tanda permulaan kemunduran peradaban
5 Tyranopolis	Sebuah kota besar yang hidup sebagai parasit di lingkungannya. Tampak detorasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan usaha administratif.
6 Nekropolis	Sebuah kota besar dalam keadaan kemunduran umum, menuju kemusnahan-nya.

Sang pemimpin, raja tidak serta merta membangun istananya. Terebih dahulu, ia menyusun kekuatan untuk menjaga keamanan rakyatnya. Rakyat dengan sukarela menyerahkan sebagian kemerdekaannya untuk diatur oleh raja tersebut. Kekuatan itu berupa tentara dan pemungut pajak, serta “pelayan” bagi rakyat. Timbunan hasil panen sebagai bayaran untuk tentara ini diletakkan dalam *lumbung-lumbung* di kota. Kelebihannya dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan lain. Demikian pula, rakyat-

nya juga menukarkan hasil panen dengan peralatan dan barang lain yang dibutuhkan. Peralatan dan barang tersebut dihasilkan oleh tukang-tukang yang telah berkembang pada masa sebelumnya. Atau, para pedagang dari luar membawa dan menjualnya. Para pedagang membangun toko dan perusahaan di kota tersebut. Tanah bisa membeli dari masyarakat setempat atau menyewa pada raja. Oleh karena itu, pada abad pertengahan di Eropa sejumlah kota tumbuh akibat perkembangan perusahaan di dalamnya, seperti *gilda-gilda* di kota-kota Italia. Di Nusantara, sejumlah kota pantai merupakan kota perdagangan, seperti Surabaya dengan syabandarnya. Itu awal pertumbuhan kota sebagai pusat peradaban dengan berbagai fungsi, mulai pasar, birokrasi hingga benteng, sebagaimana dipaparkan oleh Max Weber (1977), dan kota pun tumbuh sebagai pusat peradaban (Keesing, 1989: 49-50).

Urbanisasi dan Peminggiran

Pada awal pertumbuhan kota, jumlah penduduknya tidak begitu besar. Meskipun demikian, menempati lahan yang sempit. Kota tumbuh dengan cepat, terutama akibat dari urbanisasi (perpindahan manusia dari desa ke kota). Demikian pula, terlihat pada perkembangan kota-kota pertama di dunia. Menurut catatan Modelski (1997) Di dalam penggalian kota-kota lama, diketahui bahwa luas setiap kota memiliki luas hanya beberapa hektar saja, tetapi dihuni lebih dari seribu jiwa. Jumlah penduduk kota-kota pertama itu berlipat dua pada setiap seratus tahunnya. Pelipatan jumlah penduduk ini semakin pendek ketika memasuki abad ke-20 dan kini masuk paruh pertama abad ke-21. Pelipatan dalam jumlah besar ini menjadi sulit dibuktikan akibat pertambahan alami, namun lebih meyakinkan sebagai pengaruh urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa-kota, atau penggabungan desa-desa menjadi wilayah kota.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan pada Kota-kota Pertama
(Modelski, 1997)

Kota (Pengarang)	Periode	Luas (ha)	Perkiraan Jumlah Penduduk	Kepadatan
ERIDU				
▪ Mallowan (1970: 331)	Ubaid	8-10	4.000	500
▪ Wright (1981: 325)	Early Uruk	40	6.200- 10.000	155-250
HABUBA-KABIRA				
▪ Algaze (1993)	3.100 SM	40	6-8.000	150-200
HIERAKONPOLIS				
▪ Valhelle, 1990	3.400 SM	35	5-10.000	143-350
URUK				
▪ Nissen, 1993: 56	Akhir millenium ketiga SM	250	25-50.000	100-200
▪ Adams, 1981: 85	Awal Dinasti 1	400	40-50.000	100-125
UR				
▪ Wright, 1981: 327	Awal Dinasti 1	21	Kurang dari 6.000	286
▪ Wooley, 1965: 193	Dinasti 3	50	34.000	680
▪ Wright, 1981: 320-1	Dinasti 3	50 (termasuk dinding kota)	34.000	690
EBLA				
▪ Pettinato, 1981: 134	Dinasti 3	56	Sekitar 40.000 lebih	714
MOHENJO-DARO				
▪ Barrow & Shodhan, 1977: 11	2.500 SM	51 (wilayah kota)	40.000	784
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	100+	40.000	400
HARAPPA				
▪ Whitehouse, 1983	2.000 SM	43+	20.000 s/d 25.0000	465-581

Pergerakan-pergerakan etnik hingga milineum pertama Masehi telah menenggelamkan kota-kota lama, kemudian tumbuh kota-kota baru. Kota-kota baru dunia ini dalam sejarahnya sebenarnya tidak jauh berbeda engan kota-kota pendahulunya, yaitu tumbuh dari pertanian yang menyebar ke seluruh wilayah di dunia, tetapi kini jauh lebih rumit. Kota tidak lagi sebagai kota produsen, tetapi sebagai kota konsumen, dagang dan pemerintahan. Everett S. Lee (1995) yang memperbaiki teori Ravenstein, menunjukkan bahwa keanekaragaman fungsi kota tersebut telah menjadi medan magnet bagi penduduk desa sekitarnya. Daya tariknya menjadi semakin menguat tatkala jalur transportasi antara desa dan kota semakin mudah dan murah. Revolusi industri telah menghasilkan alat transportasi massal yang murah, seperti kereta api dan bus.

Sementara itu, desa-desa mengalami entropi. Cara-cara produksi dalam sistem pertanian menjadi semakin tidak menguntungkan bagi pekerja. Monetisasi dan revolusi hijau-biru memaksa para tuan tanah mengabaikan pola-pola hubungan yang “mesra” terbina dari masa lampau, yaitu patron-klien. Pada masa lampau, di Inggris perpindahan penduduk ke kota diawali dari rendahnya upah buruh tani di pedesaan. Penyebabnya bukan perubahan teknologi, tetapi jumlah buruh yang tidak bekerja jauh lebih banyak dari lahan pertanian, sehingga buruh menurunkan upahnya demi memperoleh pekerjaannya. Pada titik tertentu, upah yang diterima tidak seimbang dengan tenaganya, sehingga mereka memilih memasuki industri-industri di perkotaan (lihat Hallas, 2000: 67-84). Sementara itu, paska Perang Dunia II, revolusi hijau-biru mengakibatkan penyingkiran kaum perempuan dari lahan pertanian, kaum miskin desa menjadi semakin terpuruk. Hasil panen tidak lagi melebihi dari biaya produksi, sehingga petani-petani kecil menjual tanahnya kepada tuan tanah atau orang kota.

Wiradi (1987) menggambarkan dengan baik dinamika masyarakat petani di Jawa. Dalam tulisannya, ia menggambarkan bahwa monetisasi dan revolusi hijau-biru mengakibatkan masyarakat buruh tani dan petani kecil mengembangkan sektor non-pertanian. Lambat-laut mereka kemudian desa menuju ke kota untuk kebutuhan keluarganya. Sektor pertanian yang tidak mendukung ditinggalkan. Namun, hasil dari sektor pertanian (bila ada) digunakan untuk mendukung usaha-usaha sektor non-pertanian di pedesaan dan pada gilirannya untuk modal di perkotaan. Pada petani kaya, sektor non-pertanian merupakan diversifikasi usaha dari sektor pertanian, begitu pula bila melakukan migrasi dan berusaha di kota. Dengan modal yang besar, hasilnya pun berlipat, tetapi hal tidak demikian pada petani miskin atau buruh tani. Hasil di perkotaan tidak memberikan keuntungan yang besar, selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya di desa dan seringkali jarang digunakan untuk mengembangkan sektor pertaniannya.

Sebagaimana ditulis oleh Eric Wolf (1985) bahwa salah satu faktor pengikat dari masyarakat desa adalah tanah. Ketika kehilangan tanah, maka lambat laun hilang pula ikatan pada desa asalnya, dan akhirnya menetap di kota. Keputusan menetap di kota merupakan konsekuensi ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghidupannya, meski hanya masuk ke sektor informal. Selain kondisi obyektif kaum migran, pilihan memasuki sektor informal juga semata-mata karena sektor formal terbatas jumlahnya dan tidak bersifat lentur.

Dengan demikian, jelaslah mengapa kota dari hari ke hari tidak semakin longgar, tetapi semakin padat. Kebutuhan akan tanah untuk pemukiman, perkantoran dan pabrik semakin mengusur sektor pertanian di kota (lihat Sadewo, Harianto, dan Mulyadi, 2004). Kampung-kampung lama dari hari ke hari tergusur, dan digantikan oleh pusat perkantoran dan perbelanjaan. Penduduknya memilih pindah ke daerah pinggiran kota. Namun

demikian, pendirian pusat perkantoran dan perbelanjaan sebagai representasi pertumbuhan sektor formal tetap tidak mampu menampung tenaga kerja, terutama di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, dari data BPS, sebagaimana dikutip oleh Samhadi (2006: 33), sektor formal hanya bisa menampung 30% tenaga kerja, sebaliknya sektor yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, sektor informal menampung 70% tenaga kerja.

Di dalam analisis Samhadi (2006:33), pertumbuhan sektor informal di Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut karena ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja. Di Indonesia, angka pengangguran terus meningkat, dari 5,18 juta orang tahun 1997, menjadi 6,07 juta orang (1998), 8,9 juta orang (1999), 8,44 juta orang (2000), 8,01 juta orang (2001), 9,13 orang (2002), 9,53 juta orang (2003), 10,25 juta orang (2004) dan 10,9 juta orang (2005). Jika setengah penganggur (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu) dimasukkan, angka pengangguran saat ini mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 37% dari toatal angkatan kerja (106,9 juta orang). Kondisi ini berlawanan dengan pertumbuhan sektor formal. Berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2004-2009 sebesar 6,6% per tahun dan setiap persen pertumbuhan bisa menyerap 600.000 angkatan kerja. Namun, pada kenyataan angka pertumbuhan tersebut diperkirakan baru bisa dicapai tahun 2007, dan sekarang ini hanya mampu menciptakan sekitar 178.000 lapangan kerja baru.

Daftar Pustaka

- Hallas, C.S.
2000 Poverty and Pragmatism in Northern Uplands of England: the North Yorkshire Pennines c. 1770-1900. **Social History**. Vol. 25. No. 1.

- Haviland, William A.
1988 **Antropologi Jilid 2.** diterjemahkan oleh R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.
- Hawkes, Jacquetta.,
1965 **Prehistory. History of Mankind, Cultural and Scientific Development.** New York: A Mentor Book.
- Keesing, Roger M.
1989 **Antropologi Budaya. Suatu Perspektif Kontemporer.** Diterjemahkan oleh Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga.
- Modelska,
1997 Early World Cities. Extending the census to the fourth millennium. **Paper.** Konvensi ISA. World Sytem Data Historical Group. Toronto. Dapat diakses di <http://www.etext.org/Politics/World.Systems/papers/modelski/geocit.htm>.
- Samhadi, Sri Hartati.
2006 Dilema Sektor Informal. **Kompas.** 16 April.
- Sukadana, A. Adi.,
1983 **Antropo-ekologi.** Surabaya: Airlangga University Press.
- Todaro, Michael P., dan Jerry Stilkind.
1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.
- Weber, Max.
1977 Apakah yang disebut Kota? Diterjemahkan oleh Darsiti Soeratman dan Amin Soendoro. Dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). **Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Wiradi, Gunawan.
1983 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 3

Kemiskinan dan Pengukurannya

Kemiskinan sejati tidak berarti tidak memiliki apa-apa, melainkan keterlepasan dari keterikatan akan benda-benda di dunia dan dalam melepaskan kekuasaan atas benda-benda secara sukarela. Itulah sebabnya ada orang-orang miskin yang sungguh-sungguh kaya. Demikian pula sebaliknya.

Escriva (1987: 150)

Kemiskinan:

Antara Ada dan Tidak, Nampak dan Tidak Nampak

Di dalam satu film yang dibintangi oleh Jean Claude van Damme, *Hard Target*, diceritakan di New Orleans terdapat sindikat yang memiliki usaha perburuan manusia. Sindikat itu terdiri dari seorang pemimpin, seorang kepercayaan, dan beberapa orang sebagai anjing-anjing pemburu yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Pakaian mereka hitam dengan kaca mata hitam pula. Mereka mengumpulkan uang dari orang-orang kaya yang ingin berburu. Satu orang kaya membayar \$ 750.000. Bila berhasil membunuh buruannya, uangnya akan kembali dan ditambah lagi dengan bonusnya.

Untuk memperoleh orang-orang yang diburu, mereka menggunakan jasa makelar. Makelar ini memiliki usaha menyebarkan pamflet. Makelar tersebut memperkerjakan orang-orang gelandangan yang beberapa di antaranya adalah bekas veteran Perang Vietnam. Dicarilah dari mereka, orang veteran yang memiliki bintang dengan kemampuan tempur semasa perang dan paling penting lagi, tidak memiliki sanak keluarga. Orang tersebut

ditawari sebagai orang buruan dengan bayaran \$ 10.000 bila berhasil lepas dengan menyeberangi sungai dalam waktu 1 (satu) jam. Orang-orang gelandangan yang miskin tersebut diiming-imingi bahwa betapa enaknyanya memperoleh sebesar itu. *“Kamu tidak perlu menggelandang, mencari makan di tong sampah, atau dari gereja ke gereja. Kamu bisa hidup enak, meninggalkan kehidupan jalanan yang keras dan bisa mati kedinginan di tengah malam. Hanya dengan satu jam saja. Dan, kamu bisa!*

Kenyataannya, tidak seorang pun berhasil. Bagaimana tidak, satu orang diburu oleh puluhan orang dengan senjata yang lengkap. Satu orang buruan yang berlari, sementara itu dikejar oleh anjing-anjing bersepeda motor dan mobil. Ketika terbunuh, mayatnya tinggal dibuang atau dibakar dalam gubuknya. Polisi tidak bisa mengetahui jejak pembunuhan tersebut karena dokter yang mengotopsi telah dibayar untuk memalsukan hasil *visum et repertum*, sehingga menunjukkan kematian yang wajar dan kasusnya ditutup.

Suatu ketika datang seorang wanita yang kehilangan ayahnya, Nona Binder. Di luar kebiasaan, ayah tidak menulis surat lagi padanya. Oleh karena itu, ia mencari dengan dibantu Chance (Jean Claude van Damme). Dari data visum dokter, ia mati terbakar dalam gubuknya, tetapi tidak demikian menurut Chance karena salah satu kalung identitasnya ditemukan berlubang ditembus anak panah. Bersama dengan polisi wanita yang akhirnya terbunuh, Nona Binder dan Chance membongkar sindikat perburuan manusia. Karena takut terbongkar, sindikat pun berbalik memburu Chance. Namun, pada akhirnya terjadi sebaliknya, Chance dengan kekuatan dan kecerdikannya mampu membunuh satu per satu pemburunya. Selain Nona Binder, ia dibantu Paman Duvee, seorang pembuat minuman keras ilegal. Kelebihannya, Chance lebih tahu medannya, yaitu rawa-rawa dan Gudang Mardi Grass. Akhirnya, seluruh sindikat mati terbunuh berikut orang-orang kaya yang ikut berburu.

Apa yang terpikirkan dari film tersebut, seandainya sindikat tersebut ada, maka tidak salah mengapa di dunia ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang miskin. Binatang buruan harus lebih banyak dibandingkan pemburunya. Di dalam bentuk lain, pernah pula terdapat penjualan organ-organ tubuh dari orang-orang miskin dan orang-orang terpidana, terdapat pula *child trafficking* (penjualan anak-anak) baik untuk pekerja di bawah umur maupun menjadi kesenangan seks. Mereka diambil, diculik atau apa pun dari keluarga-keluarga miskin.

Paling mudah mengingat mereka adalah dengan melihat angka-angka di Biro Statistik. Itulah yang dilakukan oleh sebagian besar pemerintah di dunia ini, mulai dari angka kesakitan, kematian anak di bawah umur, kematian ibu melahirkan, angka kematian karena kurang gizi hingga apa lagi. Karena terlalu bosan mengisi lembar demi lembar instrumen survai, sering kemudian angka tersebut tidak pernah berubah, cukup mengambil dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, orang miskin tidak bertambah, tidak juga berkurang, meski jumlah penduduk selalu bertambah berlipat-lipat.

Menjadi terhenyak ketika kematian mereka berada tepat di depan kita, setidaknya-tidaknya oleh media massa disajikan di depan piring makan kita. Di Indonesia, menjelang akhir pemerintahan Suharto, tahun 1997, di televisi disiarkan langsung acara pembukaan SEA-Games yang menghabiskan ratusan juta rupiah, sementara itu di Irian Jaya, sekarang Papua, yaitu di Pegunungan Jaya Wijaya, terdapat puluhan orang mati karena kelaparan. Begitu pula, ketika pesta demokrasi yang menghabiskan puluhan milyar rupiah pada paska pemerintahan Suharto dengan menghasilkan anggota Dewan yang kerdil dan egoistis¹, kita disuguhkan sekian

¹ Di dalam beberapa kasus di pusat dan daerah, telah ditunjukkan pada kita tentang tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, serta kegiatan studi

banyak anak-anak busung lapar, dan bahkan di antaranya meninggal dunia. Bila kurban tsunami di Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) tidak mencapai di atas seratus ribu jiwa, mungkin baunya tidak sampai di hidung kita, kemudian kita akan menutup mata dan telinga atas penderitaan mereka. Hal ini bisa dilihat pada penanganan gempa sebelumnya di Indonesia Timur.

Sebenarnya, apa yang dialami oleh kita, rakyat Indonesia, tidak berbeda jauh dengan di negara-negara maju. Pada akhir tahun 1990-an misalnya, seorang veteran Perang Vietnam dengan berbagai bintang kehormatan ditemukan mati kedinginan di taman, depan Gedung Putih, Washington. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan penghormatan yang berlebihan pada tentara yang pulang dari Perang Badai Gurun.

Artinya, ada dan tidak adanya pengakuan keberadaan mereka sebenarnya bersifat kontekstual. Lebih kontekstual lagi dari sisi pandangan pengambil kebijakan publik dan birokrasi pemerintahan. Bila menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, maka jumlah mereka selalu dieliminasi sedemikian rupa mendekati titik nol. Namun, menjadi berbeda tatkala jumlah mereka kemudian dikompensasi dengan jumlah proyek, anggaran atau dana, maka jumlah mereka menjadi berlipat. Pada kasus Inpres Desa Tertinggal (IDT), tatkala dilakukan pendataan terhadap jumlah orang miskin dan desa tertinggal, awal kali para bupati menampik adanya desa tertinggal dengan keluarga miskin di dalamnya. Namun demikian, berbeda tatkala disebutkan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana untuk mengentaskan desa tertinggal tersebut. Demikian pula, dorongan yang besar untuk menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah keluarga pra-sejahtera berkaitan dengan pemberian beras subsidi bagi

banding, sementara itu kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat krisis moneter 1997-1998.

pemerintah paska Suharto, maka jatah beras bersubsidi dari tahun ke tahun terus berkurang sebagai bukti telah terjadi pengurangan keluarga miskin.

Mereka, orang-orang miskin, tidak berarti berdiam diri. Mereka memiliki strategi sendiri dalam mengatasi kemiskinannya. Namun demikian, strategi tersebut tidak selalu diterima, sebagian besar kebijakan tata ruang kota misalnya sangat tidak menguntungkan kelompok miskin. Hal ini mengingatkan kita pada cerita Abunawas tentang Orang Kaya dan Orang Miskin. Di dalam cerita tersebut, terdapat dua orang, sebut saja Alu si orang kaya, Ali si orang miskin. Kedua orang itu memiliki postur yang berbeda. Alu yang memiliki rumah besar dengan isinya yang berlimpah itu kurus badannya, sementara itu Ali yang hanya tinggal di dalam gubuk yang menempel di tembok pagar Alu memiliki postur gemuk. Tidak saja Ali, istri dan kedua anaknya pun berbadan gemuk.

Suatu ketika seseorang bertanya pada Ali, mengapa seluruh anggota keluarganya berbadan sehat dan gemuk. Apa yang dimakan, sehingga menghasilkan tubuh semacam itu. Ali pun menjawab, *"Mudah saja hanya nasi dan lauk ala kadarnya. Kami sekeluarga menikmati benar, bahkan dengan nasi pun kami bisa karena setiap hari asap dapur Alu memberikan aroma masakan yang lezat."* Jawaban Ali tersebut didengar oleh Alu. Oleh karenanya, Alu pun marah. *"Itu sebabnya badanku kurus, aroma masakanku sudah dimakan Ali sekeluarga. Aku tidak terima. Aku akan menghadap pada Pak Hakim. Menuntut ganti rugi."* Maka, pergi Alu ke hadapan Hakim dan menuntut ganti rugi 100 real uang emas pada Ali.

Hakim pun tidak bisa memutuskan dan meminta tolong pada Abunawas. Oleh Abunawas, Alu pun dipanggil. Hakim kemudian memutuskan bahwa tuntutan Alu dipenuhi dengan catatan tidak boleh dipegang. Hakim dari jauh menghitung dengan melempar uang tersebut satu per satu. Setelah selesai, Abunawas mengatakan bahwa Alu telah menerima ganti rugi

tersebut. Alu pun protes, maka Abunawas juga mengatakan bahwa Ali tidak mengambil apapun dari Alu, mengapa Alu merasa dirugikan.

Gubuk-gubuk mereka digusur dan dihancurkan, begitu pula dengan rombongan jual pun diangkut Satpol PP. Mereka yang melacur dan menggelandang pun dicap *pekat* (penyakit masyarakat) ditangkap dan diadili, meski dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlandar dipelihara oleh negara.*" Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya ditangkap.....

Mendefinisikan Kemiskinan

Kemiskinan sebenarnya tidak saja diamati, tetapi juga dirasakan. Membangun empati bersama dengan orang dan keluarga miskin mungkin lebih dari cukup, terutama bagi pengambil kebijakan publik. Oleh karenanya, Dillon dan Hermanto (1993: 18-19) mencermati bahwa ada 2 (dua) pandangan tentang kemiskinan. Di satu pihak, kemiskinan adalah suatu proses, di pihak lain kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19; kutip dari Pakpahan dan Hermanto, 1992). Dengan demikian, kemiskinan dapat pula dipandang sebagai salah satu akibat dari kegagalan dari kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini memunculkan kemiskinan relatif atau dikenal pula kemiskinan struktural.

Sementara itu, kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala dari suatu masyarakat melahirkan konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut oleh Bank Dunia pada tahun 1990 didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu individu memenuhi

kebutuhan dasarnya (Dillon dan Hermanto, 1993: 19), meski telah berkembang pada tahun-tahun belakangan ini.

Acuan bahwa orang miskin selalu diarahkan pada kegagalan dalam pemenuhan sumber daya dan dana ini kemudian mengarahkan definisi kemiskinan lebih pada dimensi ekonomi. Oleh karena itu, seperti yang dihimpun oleh Andre Bayo Ala (1981: 3-5), antara lain dari pendapat Sar A Levitan (1980), Schiller (dalam Stone, Whelen dan Murin, 1979), Emil Salim (1980), dan Ajit Ghose dan Keith Griffin (1980), lebih mengacu pada ketidakmampuan individu atau keluarga dalam kebutuhan hidupnya melalui pendapatan yang diperolehnya.

Hal itu berbeda dengan pendapat John Friedman dalam Ala (1981: 4) yang lebih mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial itu meliputi modal yang produktif atau aset, seperti tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan, sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, antara lain: partai politik, sindikat dan koperasi, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan dan barang-barang, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya.

Oleh karena itu, Andre Bayo Ala (1981: 5-8) menyimpulkan beberapa aspek kemiskinan. Pertama, kemiskinan menyangkut nilai-nilai (*values*), sesuatu yang dihargai tinggi oleh individu dan masyarakat. Kedua, kemiskinan itu multi-dimensional, memiliki berbagai aspek kondisi dalam orang dan keluarga miskin. Ketiga, aspek-aspek kemiskinan itu saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga membentuk lingkaran kemiskinan atau spiral kemiskinan (*the poverty spiral*) dalam istilah Lukas Hendratta. Keempat, di dalam kemiskinan terdapat aktor, yaitu orang-orang yang hanya sedikit atau tidak mampu mengakumulasi nilai-nilai utama, sehingga kebutuhannya

akan nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi secara layak. Aktor itu bisa secara individu, namun bisa secara kolektif, seperti keluarga atau komunitas lokal. Berkaitan dengan aktor, Niels Mulder (1986: 76) mendefinisikan sebagai mereka yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal, seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk bisa hidup dengan cukupan dan wajar. Mereka yang tidak sampai pada patokan itu dipandang sebagai orang miskin. Kelima, kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai utama secara layak, dan terakhir bahwa gap antara nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai tersebut, artinya besar-kecilnya gap tersebut menunjukkan parah tidaknya kemiskinan tersebut. Bila gap yang dicapai seseorang antara nilai-nilai yang harus dicapai dan pemenuhannya besar, maka semakin parah kemiskinan tersebut atau disebut kemiskinan absolut. Sementara itu, bila gap antara akumulasi nilai yang diperoleh dan pemenuhan kecil, maka orang tersebut berada dalam kemiskinan relatif.

Ravallion (1992: 4) secara lebih sederhana menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat dinyatakan oleh masyarakat ketika seseorang atau lebih tidak mencapai titik minimum dari kesejahteraan material yang layak menurut standard masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka muncul 3 (tiga) pertanyaan berkaitan dengan ukuran standar kelayakan kesejahteraan ini. Pertama, bagaimana cara kita menilai kesejahteraan atau hidup layak tersebut. Kedua, bila sudah diukur, bagaimana menentukan seseorang itu miskin atau sebaliknya berkecukupan. Terakhir, pertanyaan adalah bagaimana cara mengumpulkan indikator kesejahteraan individu ke dalam ukuran kemiskinan.

Ketiga pertanyaan tersebut memiliki implikasi lebih mendalam, khususnya berkaitan dengan ukuran kemiskinan (*poverty line*). Akibatnya, dari tahun ke tahun perdebatan ukuran kemiskinan selalu berlanjut, begitu pula dengan cara-cara pengukurannya.

Bagi pemerintah dan ahli studi pembangunan, akurasi ukuran dan caranya sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Jebakan pengukuran ini adalah bias ekonomi. Kemiskinan lebih disebabkan oleh kegagalan seseorang dan sekelompok orang (keluarga) dalam mencapai tingkat ekonomi tertentu.

Lebih tepat, bila mendefinisikan kemiskinan itu sebagai situasi di mana seseorang atau sekelompok orang (keluarga) berada dalam kondisi secara sosial, ekonomi dan budaya tidak menguntungkan. Mereka berada dalam hidup yang tidak layak dan tidak sejahtera (*welfare/well-being*).

Meskipun demikian, dalam buku panduan Bank Dunia tentang pengurangan kemiskinan, Jeni Klugman (2002: 2-3) menyebutkan bahwa kemiskinan bukan sekedar tingkat pendapatan yang rendah, tetapi lebih dari itu tingkat konsumsi dan pendapatan yang rendah ini berhubungan dengan distribusi modal manusia dan aset sosial dan fisik (*lack of opportunity*), seperti pemilikan tanah dan peluang pasar. Selain dari berkurang kesempatan, kemiskinan juga berarti kemampuan yang rendah (*low capabilities*), yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, dan tingkat keamanan yang rendah, yaitu rentan dan pendapatan yang mudah terganggu, serta terakhir, ketidakberdayaan (*empowerment*), kemampuan keluarga miskin dalam berpartisipasi, negosiasi dengan perubahan dan berhubungan institusi yang dapat berpengaruh pada kelayakan hidupnya.

Apa yang disebut oleh Jeni Klugman (2002) ini adalah dimensi atau indikator kemiskinan. Dimensi tersebut ternyata juga tidak berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh orang miskin. Dari penelitian Smeru (Mawardi, 2004: 1-5), menurut orang miskin, kemiskinannya disebabkan oleh ketidakberdayaan, keterkucilan, kekurangan materi, kelemahan fisik, kerentanan, dan sikap atau perilaku. Ketidakberdayaan itu meliputi faktor yang di luar kendali masyarakat miskin, antara lain: lapangan kerja, tingkat biaya/harga (baik barang konsumsi, sarana produksi, maupun harga jual

produksi), kebijakan pemerintah, sistem adat, lilitan hutang, keamanan, dan takdir/kodrat. Munculnya aspek takdir mungkin mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang mereka alami sudah sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya memunculkan sikap apatis. Bagi mereka, sepertinya sudah tidak ada peluang lagi untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan menganggap hanya mukjizat Tuhan yang mampu mengubah keadaan. Kekurangan Materi adalah kepemilikan atau tidak memiliki berbagai macam aset, seperti rumah, tanah, modal kerja, warisan, serta rendahnya penghasilan karena upah atau hasil panen rendah). Faktor berikutnya adalah keterkucilan yang berkaitan dengan hambatan fisik dan nonfisik dalam mengakses kesempatan meningkatkan kesejahteraan, antara lain mencakup aspek lokasi yang terpencil, buruknya prasarana transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tidak ada atau kurangnya akses terhadap kredit, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan air bersih. Faktor lain, kerentanan, dianggap penyebab dari kemiskinan karena mencerminkan ketidakstabilan atau guncangan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan. Di dalamnya mencakup aspek pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerjaan tidak tetap, masalah dalam produksi, bencana alam, dan musibah keluarga. Terakhir, sikap dan perilaku juga dianggap sebagai penyebab kemiskinan, yaitu kebiasaan buruk atau sikap yang cenderung menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan atau menghambat kemajuan, Sikap dan perilaku itu antara lain meliputi kurangnya upaya untuk bekerja, tidak bisa mengatur uang atau boros, masalah ketidakharmonisan keluarga, serta kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan.

Dimensi atau oleh orang miskin dianggap sebagai faktor penyebab ini sebenarnya telah menjadi perhatian dari Nasikun (1993: 4) dan Chambers (1980) dengan *integrated poverty*. Di dalam analisis sosiologis, kemiskinan dibedakan sebagai kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (*budaya kemiskinan*). Kemiskin-

an struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi obyektif yang berpengaruh pada kesejahteraan keluarga miskin, mulai dari kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak hingga ketidakmampuan dalam bernegosiasi untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang berpihak pada orang miskin sebagaimana disebutkan oleh Sritua Arief dan Adi Sasono (1984: 109), dan Chambers (1980). Sementara itu, kemiskinan juga dipandang sebagai cara hidup atau kebudayaan dari keluarga miskin yang disosialisasikan. Pola-pola sosialisasi yang berlandaskan pada kebudayaannya ini merupakan mekanisme adaptif atau *survival* berkaitan dengan kondisi-kondisi keluarga miskin yang marginal (Lewis, 1981: 15-30; Lewis, 1988; Gailbraith, 1983).

Menimbang Kemiskinan, Menentukan Kesejahteraan

Apapun definisi kemiskinan, bila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang di dalam masyarakat dianggap tidak beruntung, maka sebenarnya telah dapat menggolongkan mereka ke dalam kelompok miskin. Bagi kita, bagaimana membangun empati bersama, turut merasakan dan kemudian berbagi, sehingga mereka tidak lagi berkekurangan, tersisih dan terabaikan. Mungkin, hal ini mengingatkan kita pada tahun 1990-an pada waktu bencana kelaparan di Ethiopia, seorang koki restoran di Roma, Italia, dengan sederhana mengolah makanan sisa pelanggan, dan kemudian mengirimkan ke tempat beca. Atau, Ibu Teresa mengawali dengan merawat orang-orang tua terlantar dan sakit-sakitan di pinggir jalan kota India. Apa yang dikatakannya, *"Biarlah mereka merasakan kebahagiaan, meski hanya menjelang ajal menjemput!"*

Tidak usah terlalu jauh mencari orang-orang yang tidak sejahtera, bila pula ada di sekitar kita, mungkin bawahan kita dan seterusnya. Di dalam dunia yang kapitalistik, demi memperoleh keuntungan yang besar, sering kita menciptakan pekerjaan yang

tidak dibayar seimbang, sehingga menghasilkan kelompok miskin “baru.” Suatu misal, salah satu pasar swalayan terbesar di Surabaya, dengan alasan tertentu karyawan tidak boleh menikmati makanan siap saji yang dijualnya, meski pada waktu menjelang tutup. Manajer lebih memilih membuang ke tempat sampah, padahal masih layak dimakan. Untuk makan, karyawan menerima nasi kotak dengan harga yang tidak layak. Akibatnya, menjelang akhir tahun 2004 sejumlah karyawan masuk rumah sakit karena keracunan. Hal ini berbeda dengan kebijakan rumah makan rawon “Nguling” di Probolinggo, selain pegawainya juga menikmati, setiap malam puluhan nasi rawon dibungkus untuk keluarga miskin dan janda di lingkungan sekitarnya. Kata kuncinya hanya satu: *empati*. Meskipun empati sebagai kata kunci dalam mencermati kemiskinan, bagi pengambil kebijakan publik persoalan kemiskinan tidak saja pada definisi dan empati, tetapi pada dimensi dan ukurannya. Dimensi dan ukuran menjadi penting karena program pengurangan tingkat kemiskinan (*poverty reducing*) berkaitan dengan pendanaan.

Di Indonesia selama ini perkiraan-perkiraan tentang kemiskinan umumnya didasarkan atas pendekatan pendapatan kebutuhan dasar (*basic needs income* atau *BNI Approach*), dimana garis kemiskinan ditentukan dengan memperkirakan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi suatu paket kebutuhan dasar inti konsumsi perorangan (makanan, sandang, perumahan). Batas ambang garis kemiskinan setara nilai konsumsi pangan minimum, yaitu 2.100 kalori ditambah 6,12 % hingga 17,96 % nilai konsumsi non pangan. Jika perkiraan nilai konsumsi perkapita rata-rata penduduk Indonesia sebesar dua kali dari nilai konsumsi pangan pada akhir PJP II, maka batas ambang garis kemiskinan sepanjang 25 tahun mendatang dapat ditetapkan sebesar dua kali lipat dari nilai konsumsi pangan minimum (kira-kira setara dua kali Rp 15.000,00 menurut tingkat harga tahun 1990) (Nasikun, 1993: 1-2). Kelemahan dari pendekatan ini adalah tingkat minimum dasar

pendapatan tidak akan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Kelemahan lainnya, secara operasional, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dimana pendapatan tidak cukup. Pendapatan ditafsirkan sebagai kemampuan suatu rumah tangga atau perorangan untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa.

Untuk itu, Nasikun (1993: 2-3) mengajukan dua alternatif tolok ukur kemiskinan lain. *Pertama*, menawarkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan sebagai suatu fenomena multifaset atau multidimensional. *Kedua*, mengusulkan tolok ukur yang lebih mampu mengungkapkan kemiskinan pada tingkatnya yang relatif. Mendasarkan diri pada pemikiran Chambers yang melihat kemiskinan sebagai suatu *integrated concept*, Nasikun merumuskan konseptualisasi kemiskinan multidimensional yang terdiri atas lima dimensi: (1) kemiskinan “proper”; (2) kelemahan fisik; (3) kerentanan terhadap atau menghadapi berbagai bentuk situasi darurat; (4) ketidakberdayaan (*powerlessness*); dan (5) isolasi. Kemiskinan “proper” kurang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan aset yang kurang dan/atau akses yang rendah terhadap aliran lalu lintas uang dan barang, terutama pangan. Kelemahan fisik diartikan sebagai berat dan pertumbuhan badan yang tidak normal dan sensitif terhadap variasi musim atau konjungtur ekonomi. Kerentanan terhadap berbagai bentuk situasi darurat diartikan sebagai penjualan barang atau tenaga kerja, hubungan utang piutang atau gadai, dan tindakan lain yang terpaksa dilakukan untuk mengatasi berbagai situasi darurat. Ketidakberdayaan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau kelompok dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang menyangkut nasib dan peruntungannya sendiri dan hubungan-hubungan sosial dengan orang, keluarga atau kelompok lain. Isolasi diartikan sebagai posisi relatif seseorang, keluarga, atau kelompok dalam ruang spasial dan sosial yang dilembagakan oleh masyarakat tempat ia menjadi bagiannya.

Dimensi kemiskinan proper dapat diukur antara lain melalui butir-butir pertanyaan pengeluaran rata-rata sebulan dan rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan. Dari dimensi kelemahan fisik, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan tingkat morbiditas dalam kurun waktu sebulan sebelumnya: (1) apakah sebulan yang lalu ada keluhan kesehatan, karena panas, batuk, pilek, muntaber, sakit gigi, kejang-kejang, kecelakaan, dan lainnya; (2) kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari; (3) apakah sekarang masih sakit; (4) jenis pelayanan yang memberikan perawatan. Dari dimensi ketidakberdayaan, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) status penguasaan bangunan tempat tinggal; (2) status penguasaan tanah; (3) kondisi rumah atau bangunan tempat tinggal; (4) luas bangunan dan pekarangan; (5) jenis fondasi bangunan terluas; (6) jenis kerangka atap yang terbanyak. Dilihat dari dimensi isolasi antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (1) jarak terdekat dari dan ke tempat fasilitas-fasilitas kendaraan umum, kesehatan, pasar, atau kelompok perkotaan, bioskop, taman hiburan/ rekreasi, SD, SLTP, SLTA; (2) lama bersekolah (dalam jumlah tahun); (3) mendengarkan radio seminggu yang lalu, nonton TV seminggu yang lalu dan membaca koran/majalah seminggu yang lalu (Nasikun, 1993: 3).

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo.
 1981 Definisi Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
- Arief, Sritua., dan Adi Sasono.
 1984 **Ketergantungan dan Keterbelakangan**. Jakarta: Sinar Harapan.

- Dillon, HS., dan Hermanto
 1993 Kemiskinan di Negara Berkembang. Masalah Konseptual dan Global. **Prisma**. Tahun XII No. 3
- Galbraith, John Kenneth.
 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa**. Diterjemahkan oleh Tom Anwar. Jakarta: Sinar Harapan.
- Klugman, Jeni.
 2002a Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross Cutting Issues**. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Lewis, Oscar.
 1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.
 1988 **Kisah Lima Keluarga. Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan**. Diterjemahkan oleh Rochmulyati Hamzah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulder, Niels.
 1986 **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasikun,
 Nasikun.
 1988 “Desa dalam Perspektif Pembangunan,” makalah disampaikan sebagai bahan ceramah pada Kursus Singkat Teori dan Konsep Studi Pedesaan yang diselenggarakan oleh Divisi Studi Pedesaan, PAU-Studi Sosial, UGM Yogyakarta, tanggal 12 – 31 Agustus.
 1993 “Redefinisi Kriteria Batas Ambang Kemiskinan Berwawasan Martabat Manusia,” **makalah** disampaikan pada Seminar Bulanan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), UGM, tanggal 7 Juni.
- Ravallion, Martin.
 1992 **Poverty Comparison. A Guide to Concepts and Methods**. LSMS Working Paper No. 88. Washington: World Bank.

Bagian 2

Usaha-usaha Membebaskan dari Kemiskinan Kota

Bab 4

Surabaya: Geliat Calon Kota Metropolitan

Rek, ayo rek, mlaku-mlaku ning Tunjungan Rek, rek
ayo rek... Mlaku-mlaku ngumbah mata...

(lagu rakyat Surabaya)

Kota Lama dengan Wajah Kolonial

Sepuluh tahun yang lalu, sekitar tahun 1991, ketika salah seorang anggota tim peneliti (FX Sri Sadewo) mengunjungi ibukota Jakarta kedua kalinya. Jakarta adalah kota yang sangat berbeda dibandingkan pada tahun 1970-an, terdapat jalan utama yang membentang dengan lebar kurang lebih 100 meter panjangnya. Daerah-daerah periferinya sudah terhubung satu sama lain, seperti Kota Depok, Kab. Tangerang dan Bekasi. Keadaan ini terus berubah hingga tahun-tahun terakhir ini. Apa yang dibayangkan oleh peneliti tersebut, Jakarta seperti gurita raksasa dengan tentakel-tentakel yang menjulur ke Timur, Barat dan Selatan.

Ketika kemudian kembali ke kota Surabaya, peneliti kemudian bertanya apa yang salah dari catatan mata pelajaran Geografi dengan menyebut Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Mungkin lebih tepat sebagai kota terbesar ke lima atau ketujuh di Indonesia. Kota terbesar pertama adalah Jakarta, kedua Jakarta dan seterusnya hingga kelima adalah Surabaya.

Meskipun demikian, Surabaya telah berusaha tumbuh sebagai kota terbesar kedua. Dari sisi usia, kota ini sebenarnya

jauh lebih tua dari Jakarta. Kota ini tercatat dalam sejarah pada tanggal 31 Mei 1293 M sebagai hari lahirnya, sedangkan Jakarta pada berdiri pada abad ke-16. Sebagaimana lazimnya pertumbuhan kota-kota pesisir, Surabaya awalnya adalah sebuah desa nelayan, kemudian berkembang sebagai pelabuhan dalam rangkaian jalur sutera (*silk road*). Namun demikian, seperti halnya Jakarta, kota ini tidak pernah sekalipun menjadi pusat kerajaan-kerajaan besar pada masa lampau. Nampaknya, raja-raja Jawa lebih memilih mendirikan ibukota pusat pemerintahan di wilayah pedalaman, daripada pesisir. Salah satu di antaranya, kecuali Sriwijaya, kerajaan-kerajaan tersebut dibangun melalui basis pertanian sebagai struktur ekonominya. Kota-kota tersebut lebih sebagai syahbandar yang harus menyetor pajak ke ibukota yang berada di pedalaman.



Gambar 4.1.
Totem Surabaya Modern,
Penghubung dengan Roh dari Masa Lalu

Kota Surabaya, menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (2004) yang disampaikan di Sarasehan “*Surabaya dan Tantangan Masa Depan*,”² bahwa kota Surabaya, sebagai kota pesisir lainnya, lebih tepat dibangun oleh pemerintah kolonial (Belanda). Memang benar, sesudah kerajaan Majapahit runtuh, kota ini sebagai kadipaten (kerajaan lokal) taklukan di bawah kerajaan Mataraman. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, kota ini diserahkan kepada VOC dan pemerintah kolonial. Surabaya sebagai Kota Eropa, yang semula hanya merupakan pos pangkalan bertembok tanggul tanah *temu gelang*, terletak di kawasan berawa-rawa di sebelah utara daerah pemukiman orang-orang Jawa, sepanjang abad 19 berhasil dibangun meluas menjadi suatu terminal tempat penumpukan hasil bumi untuk diekspor dan dijual ke Eropa.



Gambar 4.2.
Bambu Runcing: Simbol Perlawanan Kaum Urban

² Sarasehan ‘*Surabaya dan Tantangan Masa Depan*.’ Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Tabel 4.1
Perkembangan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk kota Surabaya
(Handinoto, 1996, Pemda KMS, 1978, BPS, 1997 dan 2002).

Abad/Tahun	Luas Wilayah (dalam ha)	Jumlah Penduduk
2005 (Perkiraan)	32.636	2.750.000
2000	32.636	2.444.976
1995	32.636	2.329.598
1990	32.600	2.100.000
1980	---	2.027.913
1971	---	1.953.248
1920	---	200.000
1905	4.275	150.188
Awal abad ke-18	---	50.000 s/d 60.000
1625 (Penaklukan oleh Mataram)	---	1.000

Perkembangan kota Surabaya menjadi pesat tatkala liberalisasi ekonomi. Ekonomi eksploitatif dengan investasi modal Eropa telah berhasil memanfaatkan kesuburan *binterland* Jawa Timur. Surabaya kemudian lebih menempatkan sebagai kota pemberi layanan jasa ekonomi daripada sebagai pusat pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsinya, Surabaya menjadi organisasi kerja yang membangun berbagai institusi ekonomi dan mekanisme kontrol untuk mengendalikan ekonomi agribisnis di daerah Jawa Timur. Institusi bisnis kapitalistik ditandai dengan bangunan yang berfungsi sebagai kantor-kantor dagang dan kantor-kantor layanan jasa hukum, serta jasa keuangan, kantor-kantor administrasi

pemerintahan, dan gudang-gudang. Jalan-jalan penghubung diperkeras, saluran-saluran penatusan dibangun, rel-rel berikut stasiun terminalnya diciptakan, dan ujung muara sungai Brantas pun diperdalam dan diluruskan untuk kemudian diberi nama baru yang mengingatkan sebuah sungai besar di Negeri Belanda Selatan, *Maas River*. Di kiri-kanan sungai, dibangun kade-kade tempat kapal dan perahu bertambat, sedangkan di kiri-kanan muara dibangun pelabuhan untuk tempat kapal-kapal besar merapat guna membongkar dan mengangkat muatan (Wignjosoebroto, 2004: 2).

Sarat Fungsi, Sarat Beban:

Kota Industri, Maritim, Perdagangan, Pendidikan dan Apalagi?

Dengan demikian, wilayah utaranya, atau dikenal sebagai kota lama, selain sebagai pusat pemerintahan *Oost Java Proviciën*, tumbuh sebagai pusat perdagangan. Suatu bentuk yang lazim, bahwa pertumbuhan dari perdagangan mengikuti keberadaan pusat pemerintahan. Kedekatan geografis akan mempengaruhi kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Pertumbuhan industri bergeser ke wilayah selatan, mengikuti alur sungai Kalimas, yaitu Ngagel-Wonokromo dan Kebraon-Karangpilang (Jalan Mastrip sekarang). Hal ini merupakan konsekuensi dari industri yang memerlukan air sebagai pendingin mesin-uapnya. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pemukimannya, mengikuti catatan dari Hans-Dieter Evers (1985), dari atas dasar etnik menjadi mata pencaharian. Kampung-kampung etnik luruh (meski tidak semuanya) menjadi perumahan dan kampung-kampung atas dasar mata pencaharian, seperti: Tjantian (tukang arloji), Kawatan (tukang cor tembaga), dan Bubutan (tukang bubut) (Handinoto, 1996: 72; kutip dari Faber, 1931: 185).



Gambar 4.3.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-1

Melalui mekanisme urbanisasi, kota ini kemudian tumbuh dengan relatif pesat. Kota ini meluas dari hampir sepuluh kali lipat dalam waktu seratus tahun, dari hanya semula 4.275 ha menjadi 32.636 ha. Kota semula berpusat di wilayah kota lama, yaitu Kebonrojo, Pasar Besar, kantor Walikota Surabaya sekarang hingga ke Waru (perbatasan Sidoarjo), Karangpilang dan Sepanjang, sementara itu terjadi pemindahan terminal bis dari Jembatan Merah ke Osowilangun (dekat perbatasan Kab. Gresik) pada pertengahan tahun 1990-an. Tabel 1 hanya mencatat jumlah penduduk tetap, perkiraan jumlah penduduk musiman bisa menjadi separuhnya. Dari perkiraan tersebut, Kota ini praktis dihuni hampir 4 juta jiwa untuk tahun 2005.



Gambar 4.4.
Simbol-simbol Modernitas Surabaya-2

Kota ini juga menjadi kota multi-etnik. Orang-orang Madura menggunakan kota Surabaya sebagai alur memasuki wilayah Jawa Timur bagian Selatan dan Barat. Sebagian bekerja sebagai buruh industri dan berdagang, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh perkebunan yang berada di wilayah Mojokerto, Jombang hingga karesidenan Madiun. Sementara itu, orang-orang Jawa Pesisiran dan Mataraman memasuki kantor-kantor pemerintahan menjadi *ambtenar*, pegawai *pangreh praja*, atau sebagai pegawai kantor-kantor dagang dan layanan hukum. Meski tidak begitu besar jumlahnya, kelompok-kelompok etnik lain dari kawasan Indonesia Timur memasuki kota Surabaya, mulai dari pedagang antar pulau hingga menjadi *ambtenar* dan tentara kolonial. Batas-batas kampung etnik pun menjadi meluruh tatkala aturan *wijken* dan *passesn stelsel* (sistem pas dan pemukiman)

dicabut pada tahun 1920-an, terutama bagi kelompok etnik *Timur Asing*.

Untuk memperkuat institusi-institusinya, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sistem pendidikan formal. Sekolah dasar pertama kali didirikan oleh CC Werner tahun 1818 untuk anak orang Belanda di Surabaya, muridnya hanya 35 orang. Sekolah tutup seiring dengan kematian CC Werner, baru tahun 1821 pemerintah kolonial mendirikan sekolah dasar negeri (*Government Europeesche Lagere School*). Untuk orang-orang pribumi, sekolah dasar swasta didirikan oleh *Maatschappij Tot Nut van Het Algemeen*, dengan nama *Javaansche School* tahun 1853, sedangkan sekolah negeri tahun 1860. Atas instruksi Residen Surabaya, tahun 1864 sekolah tersebut didirikan di beberapa distrik dengan nama *Districtschool*, meski tidak berlangsung lama karena biaya. Beberapa tahun kemudian, pemerintah mendirikan *Holandsche Indische School* (HIS) untuk anak-anak pribumi yang mampu dan Sekolah *Ongko Loro* untuk anak pribumi yang kurang mampu (Handinoto, 1996: 59-60).

Tanggal 2 Mei 1853 sebuah sekolah teknik swasta (*ambachtschool*) didirikan, dan pihak pemerintah baru mendirikan *government ambachtschool* pada tahun 1862. Sekolah setingkat sekolah menengah atas, yaitu HBS (*Hoogere Burger School*) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian diubah 5 tahun didirikan pada tahun 1875 di Jl. Baliwerti (bekas gedung FT Kimia ITS), kemudian dipindah di *Regenstraat* (sekarang Jl. Kebonrojo, Kantor Pos Besar Surabaya) pada tahun 1881 dan pada tahun 1923 di pindah ke *HBS Straat* (Jl. Wijayakusuma, sekarang SMA Negeri II, Surabaya). Sekolah kejuruan lain, seperti dokter hewan, berdiri dengan nama *School Ter Onleiding van de Veeartsenijkunst* tahun 1860-an

Perkembangan fasilitas pendidikan formal di Surabaya ini berlanjut hingga masa kemerdekaan. Sementara itu, masyarakat pribumi sebenarnya telah mengembangkan sistem pendidikan,

yaitu pesantren. Model pendidikan ini sebenarnya berakar dari sistem pendidikan *mandala* pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Para santri meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama kiyai dalam pondok pesantren. Mereka bekerja dan belajar, pagi hari melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh gurunya, sesudahnya belajar mengaji dan mendengar ajaran moral gurunya, yaitu Kiyai. Pada waktu mengaji, santri ini dibimbing oleh para seniornya, yaitu santri yang lebih dahulu masuk. Oleh karenanya, kata santren dalam pesantren tersebut berarti *nyantri*, menimba ilmu sambil bekerja di lingkungan gurunya. Dari catatan von Faber (1931), sebagaimana dikutip Handinoto (1996: 60), jumlah pesantren mencapai 162 buah, salah satu di antaranya pondok pesantren yang cukup dikenal adalah di Sidosermo-Wonokromo.

Tabel 4.2.
Perkembangan Perguruan Tinggi di Surabaya Tahun 2004
(BPS Jawa Timur, 2005)

Jenis	Surabaya	Jawa Timur
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	4	9
a. Mahasiswa	57.228	112.694
b. Dosen	3.507	6.455
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	70	249
a. Universitas	24	69
b. Institut	3	13
c. Sekolah Tinggi	29	119
d. Akademi	11	42
e. Politeknik	3	6

Perguruan tinggi negeri yang tertua di Surabaya adalah Universitas Airlangga yang berdiri dari perpaduan pendidikan

dokter dari masa kolonial Belanda dan Sekolah Tinggi Hukum, baru kemudian sesudahnya tahun 1960-an berdiri Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (dulu IKIP Surabaya yang merupakan perkembangan dari Fakultas Pendidikan Universitas Airlangga dan IKIP Malang), dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), sedangkan salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup tua di Surabaya, seperti Universitas Surabaya (*Ubhaya*), berdiri pada 1960-an. Universitas ini mulanya merupakan perkembangan dari Universitas Trisakti. Pada pertengahan tahun 1990-an, universitas ini mendirikan kampus baru di Trenggilis Mejoyo. Jumlah mahasiswa telah menyamai perguruan tinggi negeri, di atas 10 ribu mahasiswa. Ada sekitar 10 gedung dengan rata-rata 3-4 lantai.

Tidak saja Universitas Surabaya, Universitas Kristen Petra (Petra), Universitas Katolik Widyamandala (WM) dan Universitas 17 Agustus (Untag) juga memiliki jumlah yang kurang lebih sama, hampir 10 ribu mahasiswa. Untuk memenuhi fasilitas pendidikannya, Petra dan Untag misalnya mendirikan kampus bertingkat 8 (delapan). Selain beberapa universitas ini, di Surabaya juga sekitar 10 universitas memiliki mahasiswa antara 5 ribu dan 10 ribu, seperti UPN (Universitas Pembangunan Nasional Veteran), Unitomo (Universitas Dr. Soetomo), dan ITATS (Institut Teknologi Adhitama Surabaya). Sebelum 2 (dua) tahun yang lalu, jumlah mahasiswa Unitomo dan ITATS mencapai di atas 10 ribu. Konflik internal, yaitu antara yayasan dan rektorat, di kedua perguruan tinggi yang diberitakan ke media massa menjadi “promosi” yang buruk bagi penampilan perguruan tinggi (*performance*).

Pasca reformasi, dengan alih-alih sebagai langkah persiapan menuju BHMN (Badan Hukum Milik Negara), sejumlah perguruan tinggi negeri, kecuali IAIN, menyelenggarakan program ekstension (non-reguler). Ada berbagai istilah untuk program tersebut, antara lain: program khusus, pmdk nonreguler, dan

PMDK. Melalui program ini, perguruan tinggi menerima mahasiswa di luar SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang diselenggarakan di bawah pengawasan Dikti. Mahasiswa yang diterima dikenakan SPP dan uang IKOMA/SOM yang besar, bergantung pada fakultasnya. Uang SPP biasanya sebesar kurang lebih dua kali lipat dari kelas reguler. Asumsinya, mereka mahasiswa yang tidak diberi subsidi oleh negara (pemerintah). Oleh karenanya, mereka harus menanggung sendiri biaya operasional pendidikannya selama studi. Jumlah SPP ini sering jauh lebih besar daripada di perguruan tinggi swasta, bisa mencapai di atas dua juta, seperti pada program-program studi yang memerlukan laboratorium. Di Fakultas Farmasi Unair, seorang mahasiswa non-reguler harus membayar 4 juta rupiah/semester.

Dari tahun ke tahun, terutama paska tahun 1997-1998, yaitu krisis ekonomi, telah terjadi penurunan jumlah peminat sebagai mahasiswa baik di PTN maupun PTS di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya. Untuk peserta SPMB menurun dari tahun ke tahun sebanyak lebih dari 100.000 pendaftar. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang diterima pun juga berkurang. Ada beberapa penyebab penurunan peminat ini, antara lain: jumlah lulusan SMA juga berkurang akibat keberhasilan KB pada tahun 1970-1980-an. Alasan berikutnya, lulusan SMA kini jauh lebih realistis, *"Buat apa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, kalau nantinya hanya menjadi pengangguran."*³ Mereka memilih untuk mengambil kursus keterampilan atau langsung mencari pekerjaan.

Lebih lanjut, tidak semua lulusan SMA sederajat melanjutkan perguruan tinggi, sebagai mahasiswa program gelar sarjana atau ahli madya (D3). Memang, tidak ada catatan resmi dari pemkot tentang rasio jumlah lulusan yang melanjutkan dan keseluruhan. Namun, diperkirakan untuk kota Surabaya hanya

³ Hasil wawancara dengan lulusan SMA yang tidak mendaftar SPMB dan melanjutkan ke perguruan tinggi, DA, tanggal 12 September 2005.

separoh saja lulusan mahasiswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah memilih untuk bekerja atau melanjutkan kursus kerja satu tahun hingga dua tahun. Oleh karenanya, jumlah kursus di Surabaya cukup banyak, hampir separuh dari jumlah perguruan tinggi. Kursus atau program keahlian yang ada di Surabaya adalah program keahlian perhotelan/pariwisata, program keahlian komputer, dan program keahlian teknik. Sementara itu, perguruan tinggi juga menyelenggarakan pula, seperti ITS dengan PIKTI, Unair dengan berbagai program keahlian, dan UNESA dengan P2KB, P3B dan P3KT.

Kondisi Obyektif Masyarakat Miskin Kota

Sementara itu, di “pinggiran” lingkaran kota terdapat orang yang tidak bisa menikmati fasilitas yang ditawarkan kota. Pendidikan tinggi adalah “barang mewah” yang menjadi impian dan harus ber-*jibaku* untuk masuk dan menyentuh tembok-tembok kampus. Bagi mereka, hidup “sehat” dan dapat mencari makan adalah anugerah. Mereka adalah kelompok masyarakat rentan kota, atau dalam istilah Sosiologi (Kemiskinan) lebih dikenal sebagai masyarakat marjinal (*marginal community*) ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai dalam kehidupan perkotaan.

Di Surabaya, ada dua kelompok, yaitu: penduduk asli atau dikenal dengan orang *kampung* yang tidak memiliki akses karena kondisi obyektifnya, seperti: tingkat pendidikan dan modal. Kelompok kedua adalah kaum urban yang memiliki akses terbatas di Surabaya, kemudian sering ditemui memilih tinggal bersama di lingkungan *kampung* tersebut karena dengan alasan mendekati tempat kerja.

Bila oleh BPS dan BKKBN, mereka, kedua kelompok itu, digolongkan sebagai kelompok miskin kota. Jumlahnya di

Surabaya, menurut tafsiran BPS dan BKKBN, kurang lebih 327.572 jiwa, atau seperdelapan dari jumlah penduduk Surabaya (BPS Surabaya, 2003). Jumlah ini menjadi besar tatkala harus memasukkan keluarga urban yang sering tidak aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Data Suryahadi, et.al (2003: 78) menunjukkan bahwa dengan jumlah rumah tangga di Surabaya sebanyak 707.167 jiwa, maka setidaknya-didaknya dikatakan miskin bila setidaknya-tidak pendapatan sebesar 202.512,56 sebulan dengan *standard error* 6.701,98.

Bila faktor penyebabnya adalah pekerjaan, maka jumlah orang miskin yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran) berdasarkan sensus tahun 2000 di Surabaya 82.691 orang atau 7,23% dari angkatan kerja. Hanya bila mengandalkan data pekerjaan, maka besarnya angka pengangguran ini belum cukup. Data statistik kependudukan tidak pernah menghimpun seberapa banyak orang yang bekerja pada pelapisan terendah dari suatu usaha, perkantoran, seperti buruh, karyawan swasta atau pegawai negeri golongan rendah (I dan II), atau kelompok sektor informal yang memiliki modal terbatas (kecil), atau hanya mengandalkan tenaga saja. Data terakhir dari BPS, berkaitan pemberian dana kompensasi BBM, jumlah keluarga miskin di Surabaya diperkirakan 106.000 keluarga (**Kompas**, 29 September 2005, “106.000 KKB untuk Warga Surabaya”).

BPS sebenarnya telah memberikan kriteria ukuran kelompok miskin yang merupakan kelompok rentan ini. Pertama, dari pola konsumsi energi di bawah 2100 kkal per kapita sehari. Kedua, menggunakan indikator kesehatan, mulai dari persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, persentase penduduk tanpa akses pada pelayanan kesehatan dasar dan angka kematian bayi. Ketiga, indikator pendidikan dasar, yaitu: persentase penduduk usia 7-15 tahun tidak sekolah dan persentase penduduk dewasa yang buta huruf. Keempat, indikator ketenagakerjaan, yaitu: persentase penduduk penganggur terbuka, setengah

penganggur dan pekerja sektor informal. Kelima, indikator perumahan, yaitu persentase rumah tangga tanpa akses pada listrik, rumah tangga dengan lantai tanah, dan persentase rumah dengan luas tanah kurang dari 10 m². Terakhir, indikator air dan sanitasi, yaitu: persentase penduduk tanpa akses air bersih dan persentase penduduk tanpa jamban sendiri (BPS, 2004: 1; bandingkan juga dengan Klugman, 2002: 2-24; Coundouel, Hetschel dan Wodon, 2002: 29-46). Di lapangan, ukuran-demikian sulit dilakukan, antara lain: tidak ada lagi rumah berlantai tanah – hasil dari program lantanisasi pada tahun 1990-an), demikian pula rumah tanpa listrik karena program listrik masuk desa/kampung.



Gambar 4.5.
The Lost Generation, Buah dari Pembangunan?

Dari tempat tinggal, kelompok masyarakat rentan kota ini biasanya tinggal di pemukiman yang kumuh (*kampung*). Catatan Siswono Judohusodo (1991: 2), jumlah orang Surabaya yang tinggal di kampung sekitar 25% dari jumlah penduduk. Jumlah kampung tersebut lebih dari 100 (seratus) jumlahnya, mulai dari wilayah Surabaya Utara sebagai kota lama. Di kota lama, kampung-kampung itu sering bercirikan sebagai kampung etnis, seperti kampung Arab dan *Pecinan*, seperti daerah Ampel untuk kampung Arab dan Kembang Jepun dan Karet sekitarnya untuk *Pecinan*. Orang-orang Madura tinggal mulai dari Perak (Pelabuhan) hingga Semampir, bahkan ada beberapa kampung, seperti Wonosari Lor, sebagian besar penghuninya beretnis Madura. Asal mereka, orang-orang Madura di Surabaya, adalah daerah Bangkalan dan Sampang. Suatu pola yang lazim mengikuti arah transportasi terdekat (Jonge, 1989; Kuntowijoyo, 1988). Wilayah perkampungan orang-orang yang memanjang di sepanjang pinggir Surabaya Utara ini hingga memasuki wilayah Surabaya Selatan (sekitar Pasar Wonokromo dan Keputran) ini seperti setengah lingkaran. Sementara itu, dari arah pelabuhan, orang Madura mendiami wilayah Pasar Loak Dupak hingga ke Benowo (wilayah Surabaya Barat).

Kampung orang Surabaya asli berada di sekitar tengah kota, seperti mulai dari Kepatihan dan Oro-oro Ombo (dulu tempat pusat pemerintahan Kadipaten Surabaya dan berlanjut hingga masa kolonial Belanda), wilayah Kebalen, Surabayan, Wonorejo hingga Kupang dan Kembang Kuning terus ke arah Selatan, yaitu Ketintang dan Pakis. Kampung-kampung ini berada di sepanjang jalan utama dan di antara gedung. Wilayah yang strategis ini, yaitu sebagai kawasan pusat pemerintahan dan perdagangan, sebenarnya tidak saja dihuni oleh orang-orang Surabaya asli, tetapi juga oleh orang-orang urban. Di daerah Kaliasin misalnya, sebagian pemilik menyewakan kamar (kost) dengan harga dari 200 ribu hingga 500 ribu rupiah, tergantung keadaan

kamarnya. Orang-orang urban (terutama berstatus *single*) memilih kost di tempat tersebut. “*Selain dekat tempat kerja, enak untuk malam minggu. Mau jalan-jalan ke Tunjungan tidak jauh.*”⁴

Tabel 4.3.
Jumlah Orang dan Keluarga Miskin (Rentan) di Surabaya, berikut fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
(BPS, 2003)

No.	Rincian	Jumlah
1.	Kecamatan	28
2.	Penduduk	2.532.417
3.	Keluarga	707.167
4.	Orang Miskin (BPS)	327.572
5.	Keluarga Miskin	91.880
6.	Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskemas Pembantu	48
	b. Dokter	141
	c. Paramedik	824
7.	Pendidikan	
	a. Sekolah (SD dan SMP)	2.743
	b. Guru	31.193
	c. Kelas	16.522
	d. Murid	553.250

Kampung-kampung tersebut, baik tempat tinggal orang Surabayan, Madura, Arab dan Cina ini setiap tahunnya selalu

⁴ Hasil wawancara dengan A yang bekerja di Tunjungan Plaza Sabtu, 4 Juni 2005, pk. 19.00 WIB.

menjadi daerah epidemi demam berdarah (DB), selain ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) dan diare/muntaber. Rumah-rumah kampung tersebut sangat rapat satu sama lain menyulitkan melakukan kontrol terhadap genangan air (bersih). Saluran air (got) pun sering *mampet*, buntu. Sementara itu, keberadaannya di tengah kota dengan arus kendaraan yang padat, angka pencemaran udara menjadi sangat tinggi – hal ini bisa dilihat dari papan penanda tingkat pencemaran di Surabaya, mulai dari Jalan A. Yani, Kertajaya hingga Bubutan. Angka pencemaran rendah pada pagi hari ketika jalan masih sepi. Kecuali Jalan *Ondomoben*, Diponegoro dan Darmo, pohon-pohon yang membantu mengurangi pencemaran udara sangat sedikit tumbuh di pinggir jalan.⁵ Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada korelasi positif antara kondisi perkampungan yang kumuh di Surabaya dan angka penyakit.

Untuk mengatasi kondisi perkampungan, khususnya sanitasi, pemerintah telah melakukan perbaikan perkampungan, dengan memperbaiki saluran air hingga jalan. Program tersebut dikenal dengan program KIP (*Kampoeng Improvement Programme*). Hasil penelitian Indrayana (2000) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara perbaikan kampung dan penurunan angka kesakitan.

Data lain yang menarik untuk Surabaya adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan. Setiap kecamatan memiliki lebih dari satu fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibangun oleh pemerintah, belum lagi dengan klinik praktek dokter bersama dan rumah sakit swasta. Jumlah dokternya adalah 141 orang. Namun demikian, data ini berasal dari *Surabaya dalam Angka* yang mendasari pada data di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang dikelola

⁵ Kebijakan tata ruang kota Surabaya untuk 2010 direncanakan akan menyediakan 20% ruang terbuka hijau.

pemerintah, sehingga rasio dokter dalam 100.000 penduduk adalah 7 (jauh dari 40, sesuai Indikator Indonesia Sehat 2010, Depkes, 2003). Bila dianalisis dengan membandingkan jumlah orang miskin dan keluarga miskin, maka ada korelasi positif. Artinya, fasilitas tersebut didirikan sesuai dengan jumlah orang/keluarga miskin. Demikian pula fasilitas kesehatan, sekolah, guru dan kelas dalam analisis ternyata berkorelasi dengan jumlah orang miskin. Persoalannya terletak pada kemampuan akses dari kelompok miskin tersebut.

Bab 5

Buruh Bangunan

Sektor Informal tidak hanya sebagai “*Safety Valve*” bagi Orang Miskin “Baru” di Surabaya tahun 1990-an

FX Sri Sadewo

Pembangunan “Bias Kota” Menuai Migran

Kota-kota besar di negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, mengalami proses pertumbuhan yang lain dibandingkan dengan negara industri. Kota-kota tersebut pada mulanya memiliki fungsi pemerintahan dan ekonomi pada jaman kolonial. Industrialisasi yang tumbuh di kota itu mulanya hanya sebatas melengkapi fungsi ekonomis, melayani kepentingan kolonial, seperti: pelabuhan ekspor.

Sesudah Perang Dunia ke-2, kota-kota tersebut menjadi ibukota pemerintahan negara baru. Proses konsolidasi dari negara-negara baru mengakibatkan kota tadi berkembang dengan cepat. Proses perkembangan ini dikenal sebagai *urbanisasi tanpa industrialisasi*. Jika di negara industri, proses urbanisasi didorong oleh usaha efisiensi dari bidang pertanian pedesaan, misalnya melalui mekanisasi yang menghacurkan petani gurem kemudian ditarik ke sektor industri di kota besar, maka hal itu tidak terjadi di negara-negara sedang berkembang (Magenda, 1983: 7-9).

Karena mengambil model pembangunan dari negara industri, negara baru kemudian melakukan industrialisasi. Industri mulanya dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pasar, melayani

kelompok elite perkotaan, seperti birokrat pemerintahan, kaum usahawan, dan karyawan. Akibatnya, industri cenderung memusat di kota besar yang menentukan urat nadi mereka. Lebih dari itu, industri-industri baru ini tidak meningkatkan produk industri kecil pribumi, tetapi lebih sering menggantikan. Pengabaian terhadap industri kecil dari pertanian pada gilirannya mengakibatkan sejumlah rakyat berpindah dari desa ke kota. Kota-kota besar di dunia ketiga bertambah penduduknya hingga delapan kali dari ukuran semula, bila dibandingkan antara 1920-an dan sekarang. Separuh dari pertumbuhan ini berasal dari penambahan alamiah penduduk kota, dan sisanya dari perpindahan penduduk (Owens dan Shaw, 1983: 40-42). Demikian pula dengan kota-kota Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta.

Pertumbuhan kota yang “*urban bias*” itu ternyata tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Menjadi semakin berat, ketika harus diikuti perubahan struktur sosial ekonomi pedesaan. Penggunaan teknologi pertanian yang berakibat pada polarisasi pemilikan tanah dan marjinalisasi petani kecil dan buruh tani, serta pada gilirannya perembesan industri kecil dan besar ke wilayah pedesaan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi ke arah non-pertanian di pedesaan. Atau, untuk menyelamatkan keluarganya, mereka memilih bekerja di kota. Dalam catatan Steele (1984: 379), ada kecenderungan kaum migran kemudian memilih sektor yang tidak memerlukan keterampilan, seperti buruh bangunan, kuli angkut, atau tukang becak. Mereka yang memilih pekerjaan sebagai buruh bangunan mempunyai alasan, yaitu upah yang ditawarkan relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, selain mudah dimasuki (Effendi, 1985: 51-52).

Hal yang serupa terjadi di Surabaya. Dengan mengambil 75 responden dan 7 informan, penelitian ini mencermati secara mendalam mulai dari proses perpindahan dari desa, hingga bekerja sebagai buruh bangunan. Bila mengikuti pendapat Irwan

Abdullah (1984) bahwa proses migrasi merupakan proses perubahan pola pikir, dan begitu pula dengan ancaman antropologi kognitif, setiap kemampuan diperoleh sebagai anggota masyarakat yang “unik,” maka perubahan untuk menjadi buruh bangunan di Surabaya merupakan perjuangan tidak saja secara fisik, tetapi juga kesiapan untuk berubah.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung tahun 1988-1989.⁶ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang diterapkan adalah *life history* dan analisis etnografi, sementara itu pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penggunaan tabulasi frekuensi dan silang.

Responden diambil secara availability, yaitu tidak saja *accidental*, tetapi juga memperhitungkan kesediaan untuk diwawancara. Hal itu dilakukan karena pertama, buruh bangunan bersifat sporadis dan terus bergerak (mobil), sehingga tidak bisa diketahui besaran jumlah dan alamat yang tepat. Mereka lebih sering tinggal sementara di bangunan yang dikerjakan. Kedua, buruh bangunan yang berasal dari desa sering lebih tertutup pada orang di luar lingkungan kerjanya. Mereka lebih terikat dan bersosialisasi dengan teman-teman sekerja. Teman-teman sekerjanya tidak jarang berasal dari satu daerah asal.

Profil Buruh Bangunan dan Keluarganya

Ali Effendi, Mandor Borongan yang Sukses, tapi Malang.

Ia adalah seorang mandor yang agak pendiam, tidak banyak cakap. Tampangnya bersih dengan kumis tipis, meski kulitnya agak hitam. Perawakannya kurus. Setiap orang akan

⁶ Studi kasus ini diolah dari hasil penelitian skripsi FX Sri Sadewo di Program Studi Antropologi, FISIP-Unair, tahun 1989.

menyangka dia berpendidikan sekolah menengah kejuruan, padahal tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar, hanya kelas empat. Seorang majikannya pernah heran dan mengira ia lulusan STM ketika melihat hasil gambarnya. Orang itu, setelah tahu latar belakangnya, mendesaknya untuk melanjutkan sekolah. Dia mau membiaya. Hal itu terjadi pada tahun 1980-an.

Pada waktu penelitian, Ali Effendi berumur 28 tahun, tapi wajahnya lebih tua daripada usia sebenarnya. Dia lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Kabupaten Gresik. Dia mengakui, sejak kecil dia nakal. Dia menyesalkan masa lalunya, terlebih ketika ia tidak menamatkan sekolah.

“...Dari segi biaya, keluarga kami berkecukupan. Ada paman dari kota yang mau membantu saya. Adik saya sendiri sudah tamat STM. Tapi, saya tidak tamat. Saya sebenarnya cukup pintar, gampang mudeng (memahami, pen). Sekarang saya sudah tua. Itu sebabnya saya menolak tawaran untuk sekolah lagi. Pengalaman itu lebih penting. Buktinya, adik saya yang STM itu masih menganggur...”

Pada usia 15 tahun, Ali Effendi minggat dari rumah, dari desanya. Pertama kali di Surabaya, ia bekerja sebagai kernet truk perusahaan. Setahun kemudian, ia bekerja sebagai tukang las di galangan. Tidak lebih dari satu, ia kemudian menjadi kuli pada seorang mandor. Ia dibimbing langsung oleh seorang tukang batu dan mandor. Selama 2 tahun lebih ikut mandor itu, ia diangkat sebagai tukang dengan bayaran yang hanya untuk makan dan minum. *“Yang penting menjadi tukang, tidak kuli lagi.”* Selama menjadi tukang batu itu, ia juga belajar menjadi tukang kayu, tukang besi dan membaca gambar.

Ketika mandornya berpisah dengan pelaksana, maka Ali Effendi pun juga berpisah dengan mandornya. Di tempat kerja

yang baru, dengan pelaksana Elizabeth, ia melamar sebagai mandor borong. Ia diterima karena bisa membaca gambar.

Sejak itu, ia tidak hanya mengerjakan satu rumah saja. Pernah, ia mendapat proyek membangun rumah di kompleks BTN, tapi bersamaan juga di Manyar.

“..Kalau membangun rumah di BTN atau Perumnas, untungnya sedikit, bahkan untuk mengurangi biaya harus kerja sebagai tukang. Untungnya, saya juga mengerjakan di Manyar. Jadi, transpor dan kebutuhan keluarga dari Manyar, sedangkan hasil dari Perumnas cukup bayar tukang dan kulinya. Untungnya mepet sekali daripada rumah luks...”

Baginya, yang penting bagi mandor borong adalah bisa menyelesaikan. Pantangan bila meninggalkan pekerjaan. Ia akan dicap tidak bertanggung jawab. *“Jangan harap bisa dipercaya orang, kalau melarikan diri. Sekali tidak dipercaya, tidak ada lagi pekerjaan.”*

Dalam mencari tukang dan kuli, Ali Effendi berani membayar lebih mahal bila mereka rajin dan hasil pekerjaannya baik.

“Jam tujuh pagi, tukang dan kuli saya sudah bekerja. Dan, nglaut nanti pukul empat hingga lima sore. Tergantung selesai-nya pekerjaan. Untuk menggerakkan orang, saya menunjuk salah satu tukang sebagai kepala tukang, setengah mandor. Upahnya lebih besar.”

Ali Effendi juta tidak bersusah payah membentak atau marah bila ada pekerjaan yang kurang beres. Menurutny, itu hanya menghabiskan tenaga dan waktu, sekaligus mengurangi kewibawaan. *“Cukup panggil kepala tungkang atau tukang yang ngerjakan, ditanya apakah benar-benar berniat bekerja atau tidak. Habis perkara.”*

Menurut pengakuannya, pada saat ini banyak saingan, dan persaingannya tidak sehat. Menurunkan harga borongan itu sudah wajar. Belum lagi, ada pesaing yang *ngatok* (cari muka) dengan

cara menjelekjelekkan atau menghambat hubungannya dengan pelaksana, agar diberi pekerjaan terus. Kemampuan mereka sering di bawahnya. Hal itu terjadi karena dalam pekerjaan bangunan borongan hubungan antara mandor dan pelaksana sangat penting. Mandor harus mengikuti selera pelaksana. Kalau tidak sesuai, pelaksana tidak mau membayar. *“Kalau sudah begini, saya stress, iya larinya minum-minum, pasang nomer dan main perempuan.”*

Pelarian ini menjadi kebiasaanyang sudah dihilangkan, apalagi seorang mandor dapat menghasilkan uang Rp. 100.000,00 bersih, bahkan sampai Rp. 250.000,00.⁷ Dengan uang sebanyak itu, ia kemudian berfoya-foya ke tempat pelacuran. Ia sendiri sudah kawin 7 kali, keempat istrinya bekas pelacur. Pada waktu penelitian, ia sedang berurusan dengan germo yang pelacurnya minta kawin, padahal ia masih berstatus beristri. Istrinya tinggal di Sepanjang, di tanah dan rumah yang dibangunnya. Lebih parah lagi, kebiasaan membeli nomer “togel.” Akibatnya, *“baru-baru ini saya menjual motor saya untuk tombakan dan urusan dengan pelacur itu.”*

Mat Aji, Tukang Kayu yang unik.

“Bu, kulo wangsul sak meniko. Biasane dbuhur, sak sampune nampi bayaran, kulo wangsul. Sakniki, mandore mbayare jam gangsal sonten,” kata Mat Aji pada salah seorang pelanggan di mana ia menjadi tukang kebun sesudah jam kerja. (“Bu, saya pulang sekarang ke desa sekarang, biasanya saya sudah pulang jam 12 siang, sesudah menerima upah. Sekarang, mandor baru membayar

⁷ Pada tahun 1990-an, harga beras Rp. 450,00, harga emas Rp. 10.000,00 dan harga Premium Rp. 500,00. Gaji PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp.100.000,00. Sekarang, tahun 2006 harga beras rata-rata Rp 4.000,00, harga emas Rp. 120.000,00 dan harga Premium Rp. 4.500,00, sedangkan gaji PNS golongan IIIa sudah mencapai Rp. 1.000.000,00.

jam 5 sore”). Di proyek bangunan, hingga sekarang hari Sabtu merupakan hari kerja separuh hari, selesai jam 12 siang. Pada jam itu mandor membayar upah untuk setiap tukang dan kuli bergantung dari beberapa hari mereka bekerja.

Mat Aji berjanji akan kembali dua hari kemudian. Hal itu biasa dilakukannya. Setiap hari Sabtu, sesudah mengambil upah, ia ke Terminal. Dia pulang ke desanya, Desa Sukomangu, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto. Pada waktu pulang, ia bisa membawa uang antara Rp. 10.000,00 hingga Rp. 25.000,00. Uang sebesar itu sudah dipotong ongkos transport Rp. 1.000,00 (karcis bis Surabaya-Mojokerto Rp. 550,00, ojek Rp. 150,00 dan selebihnya ongkos naik colt), dan uang makan selama seminggu Rp. 1.800,00 (beras 2,5 kg @ Rp. 450,00, lauk Rp. 450,00 dan *mbako* Rp. 200,00), sedangkan sayur diambil dari pekarangan temannya di Pakis. Sayur itu ditanam sendiri. “*Aku nandur dhewe. Tapi, nggake ana sing wani maneni. Koncoku mungkin sungkan. Ora melu nandur kok maneni. Tapi, sakjane gak opo-opo wong yo dhuk pekarangane. Ping pindone, waktu mbangun omabe itu, aku iya ngewangi. Gratis.*”

Mbako (tembakau, pen.) tidak selalu dibeli. Mat Aji sering diberi dari teman-temannya yang minta tolong untuk membuat *jimat*, meski ia sendiri tidak memintanya. *Jimat* itu untuk *pengasih*an (welas asih), agar orang yang memakainya mudah mendapat pekerjaan. Dia membuat dari *sabuk* (ikat pinggang), kertas, bolppoint hitam dan minyak wangi yang masih baru. Kemudian, Mat Aji *melekan* (tidak tidur) sambil *wiridan* (membaca dan menulis mantra) sampai jam 2 atau 3 pagi. Mantra ditulis dalam bahasa Arab *Gandul* dengan bolppoint dan minyak wangi pada kertas yang dimasukkan ke dalam ikat pinggang.

Tentang oleh-oleh untuk di rumah, Mat Aji membelinya di terminal seharga antara Rp. 2.000,00 hingga Rp. 5.000,00. Oleh-oleh itu dibedakan, untuk ibunya yang tinggal di desa lain, dan untuk istri dan keempat anaknya. Untuk ibunya, dia membelikan lebih istimewa, lebih mahal daripada untuk istri dan

keempat anaknya. Sesampai di rumah, oleh-oleh itu diletakkan di meja, tetapi anak-anaknya tidak berani membuka sebelum Mat Aji membagikannya, sedangkan untuk ibunya dikirim oleh anak sulungnya yang sudah dewasa.

Perhatian pada ibunya begitu kuat karena Mat Aji adalah anak tertua dari lima bersaudara, dan kini hanya ibunya yang masih hidup di desa Tegan, desa tetangganya. Ayahnya dulu seorang petani yang memiliki sawah cukup luas. Sejak kecil, Mat Aji membantu ke sawah. Selain itu, ia lebih suka berburu ular, *nyambek* (biawak), dan *celeng* (babi hutan). Dagingnya ia jual atas permintaan orang kota. Sementara itu, dalam sisi pendidikan Ia hanya tamat SR (Sekolah Rakyat, setingkat dengan SD sekarang). Sewaktu di SR, ia berguru dengan seorang kiyai di pondok. Dari kiyai itu, ia mengenal ilmu *klenik*, perdukunan.

Setelah beberapa tahun menikah, ayahnya membelikan dan membangun rumah di atas seribu meter persegi. Rumah itu didiami hingga sekarang, meski sudah beberapa kali mengalami rehab. Rumah itu sekarang separuh berdinding bata, separuh sisanya gedeng, berlantai tanah yang dikeraskan dan memakai penerangan listrik. Rumah itu secara bertahap kini dibangun dengan lantai ubin/keramik dan tembok. Pembangunan ini tidak terlepas dari kegiatan arisan dengan 12 tetangga. Di dalam ariasan itu, setiap triwulan setiap anggota mengumpulkan uang untuk membeli bahan, dan saling membantu membangun rumah ukuran 8x12 m dengan leter L 3 meter secara bergiliran.

Rumah Mat Aji bertetangga dengan keempat adiknya dan seorang kakak ipar (kakak dari isterinya). Keempat adik dan kakak ipar itu bekerja sebagai tukang, selain berkebun dan bertani membantu ibunya. Ada pula yang menjadi tukang batu, tukang besi dan tukang kayu.

Selain menjadi tukang kayu di kota, Mat Aji sendiri bekerja di kebun dengan menanam duren, nangka, moris (*sirzak*), dan poh gadung (mangga). Selain untuk dimakan sendiri, hasil

kebut di-*tebas* (dijual). Setiap pohon laku terjual seharga Rp. 25.000,00 atau lebih, tergantung jenisnya. Dia jua pernah berjualan *apokat*, dari kebun sendiri dan tetangganya. Kini, kebun itu menjadi tanggung jawab anak *barep*-nya (anak sulung) yang dulu pernah diajak bekerja di Delta Plaza pada waktu liburan.

Mat Aji belajar pertukangan, khususnya tukang kayu dari saudara dan tetangganya. Sebagian besar orang-orang di desa itu bekerja sebagai tukang daripada petani sebab sawahnya yang sempit tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mat Aji serius menekuni pertukangan ketika merehab rumahnya. Waktu itu, dia mengukur dari rumah lama ke bahan mentah, kayu, dengan menggunakan *debog* (batang pisang) dan *pring* (bambu). Untuk membuat lubang, ia meletakkan *dlumang* (kertas) yang dibasahi dengan minyak rambut (*kelentik*) di kayu lama untuk ukuran besarnya. Ketika sedang bekerja di siang hari, ada seorang tamu, tetangganya, datang ke rumah dan kemudian mengajarnya cara yang benar.

Berbeda dengan orang-orang sekitar rumahnya, Mat Aji mencari pekerjaan di tempat yang lebih jauh. Informasi pekerjaan diperoleh di pasar. Dia mengaku sudah pernah menjadi tukang di ujung lain dari kabupaten Mojokerto, sebelum ke Surabaya. *“Kalau mengharapkan pekerjaan di sekitar rumah atau di desa tetangga, bakalan tidak makan dan anak-anak tidak sekolah.”*

Mat Aji pertama kali ke Surabaya diajak oleh kakak iparnya sekitar tahun 1983-1984. Di rumah yang dikerjakan pertama kali itu ia sekarang bekerja sebagai tukang kebun. Dari tempat itu, dia ikut mandor mengerjakan di Darmo Grande, kemudian di Perak. Di Perak, ia terpaksa kost dan berkenalan dengan temannya yang sekarang ini tinggal di Pakis. Sesudah di Perak, ia mengerjakan di Jobang. Dengan mandor yang sama pula, ia bekerja di Malang. Dari Malang, ia diajak mengerjakan rumah Perumnas di Bondowoso, tapi tidak bisa menolak dengan alasan tidak bisa pulang sekali seminggu.

Pada waktu penelitian ini, dia pergi ke Surabaya karena terpaksa. Anak-anaknya membutuhkan uang sebesar Rp. 57.000,00 untuk biaya ujian EBTA (sekarang UNAS, pen). Dia sebenarnya sudah menitipkan anak-anaknya kepada guru untuk memberi pekerjaan di sekolah agar bisa membiayai uang sekolah sendiri. *“Buru-buru anak Bapak, saya sendiri pusing memikirkan anak sendiri,”* dia menirukan ucapan seorang guru dari anak sulungnya.

Pada waktu penelitian ini dilakukan, dia bekerja berkat tawaran teman sebangku di bis antar kota ke jurusan Surabaya. Kalau tidak *nggandol* (menumpang gratis, pen.) truk sampai di Darmo Grande, ia biasa naik truk dengan bekal dari rumah Rp. 3.000,00 sampai Rp. 5.000,00. Kesepakatan untuk pergi ke Surabaya itu diambil setelah berunding dengan isterinya, sedangkan uang dari simpanan atau pinjam baik dari saudara maupun tetangga bila tidak punya. Setelah dipotong untuk transpor, uang itu digunakan untuk biaya makan selama mencari kerja (1-3 hari) dan selama belum mendapat upah dari mandor atau uang dari sesama buruh. Bila mandornya baik, dia dipinjami dengan potong upah. Bila tidak, dia terpaksa pinjam uang dengan tanggungan baju atau barang lain yang dibawa.

Selama 3 hari pertama tiba di Surabaya, dia biasanya langsung menuju ke kompleks perumahan untuk mendatangi setiap rumah yang dibangun sambil menanyakan bila ada pekerjaan. Dia biasanya menempuh 4 kilometer sehari, kemudian pindah lagi hingga mendapatkan pekerjaan. Selama mencari kerja dia tidur di rumah temannya (Pakis) atau dari mesjid ke mesjid. Bila tidak mendapatkan pekerjaan selama 3 hari, Mat Ali kembali ke desanya. *“Tapi, syukurlah selama ini saya bisa memperoleh pekerjaan kurang dari 3 hari,”* katanya, *“Dan, salah satu di antaranya karena ini.”* Dia tersenyum sambil menunjukkan ikat pinggangnya ketika ditanya apa rahasianya mendapat pekerjaan secepat itu.

Ran, Tukang Batu yang Kerja Keras.

Ran mulai menginjakkan kaki di Surabaya untuk bekerja sejak tahun 1982. Dia mengaku, waktu itu dia membutuhkan uang untuk mengerjakan sawah dan kebutuhan rumah tangganya. Sawahnya waktu itu mencukupi hasilnya. *“Saya beruntung sekali waktu itu. Di terminal Nganjuk saya berkenalan Cak Arief, tukang batu. Dia ajak saya jadi kulinya. Dia butuh untuk ngecor dan pasang bata,”* katanya dalam bahasa Jawa Ngoko.

Dia dilahirkan dan dibesarkan di desa Jarak, Nganjuk. Dia hidup bersama isteri keduanya, anak-anak dan adik laki-lakinya. Isteri pertamanya sudah meninggal. Isterinya yang sekarang adalah adik dari isteri yang terdahulu. Dari isteri pertamanya, dia mendapat empat anak, sedangkan isteri kedua dua anak. Anaknya yang sulung sudah duduk di kelas 2 SMP pada waktu penelitian ini.

Adik laki-laki yang ikut dia ini menggantikan ia bekerja di sawah. Pada tahun tersebut, sawahnya bertambah 0,5 ha, sebelumnya hanya 0,25 ha dan menjadi 0,75 ha dari hasil kerja menjadi *kuli* di Surabaya. Sawah itu berstatus hak milik, sementara itu ia juga membeli dengan cara *adol tabunan*.

Dia bekerja dan tinggal di tempat kerjanya. Setelah beberapa minggu bekerja, dia kembali mengajak teman dan saudara sepupunya, tiga orang jumlahnya, ke Surabaya, sama-sama menjadi *kuli*. Dan, pada waktu penelitian hanya dua yang bertahan sebagai *kuli*, salah satunya menjadi tukang batu, seperti dia. Seorang telah beralih sebagai pelayan toko. *“Yang jadi pelayan toko itu tidak tahan kerja di bangunan. Habis, di desa dia tidak pernah bekerja, hanya di rumah saja. Yang tetap jadi kuli itu salah, karena tidak mau belajar.”*

Setelah dari Cak Arief, dia masih tetap terus bekerja di tempat itu. Cak Arief kembali ke Jombang. *“Mungkin, dia sudah di-petrus. Sebab, hubungi baik surat maupun saya datang, dia tidak ada di*

rumah. Ngakunya, dia pernah jadi copet, tapi sebenarnya di baik sekali. Ngajari saya nukang batu. Cuma dia boros.”

Setelah dari tempat kerja yang pertama, dia ikut temannya bekerja di Kayoon. Ran waktu itu masih menjadi *kuli*, meski sudah mempunyai keahlian dari tempat kerjanya yang terdahulu. Dia kemudian pindah lagi di Kramat Gantung, merenovasi toko. *“Saya pindah mandor. Kalau tidak begitu, saya tetap dianggap kuli. Padahal, kemampuan saya sudah seperti tukang.”*

Di Surabaya, Ran selalu berhemat. Dia memasak sendiri. Beras dibawa dari rumah, lauknya beli di warung. *“Kalau ngirit, bisa bawa uang ke rumah lebih banyak. Tapi, itu tergantung mandor dan pemiliknya. Ada yang tidak boleh masak, takut temboknya hitam kena asap. Rokok pun saya bawa dari rumah. Harganya murah dan bau mentol agarangat.”*

Dia *nglaut* (selesai bekerja) jam 4 sampai 5.30 sore, kemudian mandir dan merebus air buat kopi atau teh. Dia tidur sekitar jam 10 malam di tanah yang dilapisi *tripleks*. Pagi-pagi dia sudah bangun, memasak dan bersiap-siap bekerja lagi. *“Kalau tidur, saya tidak tentu. Kalau ada yang ngajak ngobrol atau nonton wayang atau ketoprak, iya bisa larut pagi.”*

Dia rata-rata pulang ke desa sebulan sekali. Selain membawa uang Rp. 30.000,00 bersih, artinya telah dipotong untuk biaya hidup di Surabaya, oleh-oleh makanan, pakaian dan mainan untuk anak-anak, isteri dan adik lelakinya. Ketika kembali dari desa, Ran sering membawa hasil panen, seperti kelapa, buah dan beras. Sebagian untuk dirinya, sebagian lagi untuk teman, mandor dan pemilik rumah tempat dia bekerja dahulu. Dia memberikan oleh-oleh dari desa itu dengan harapan dia akan diajak bekerja bila ada *garapan*. *“Saya belum merencanakan untuk jadi mandor borongan, saya belum ada modal. Tapi, saya sekarang berani jadi tukang yang dibayar borongan.”*

Mas Pur, Tukang Besi produk Balai Latihan Kerja.

Tiap pagi, selain hari Minggu, Mas Pur berangkat dari tempat menumpanginya ke tempat kerja sejauh 7 km dengan naik sepeda. Ia tinggal menumpang di rumah familinya, Waru, Sidoarjo. Tempat kerjanya di Margorejo, Wonocolo, Surabaya. Ia sudah bekerja sebagai tukang besi selama 6,5 tahun.

Selain di Surabaya, dia mengaku pernah bekerja di kota-kota besar Pulau Sumatera, seperti di Aceh dan Medan. *“Terlalu jauh, saya sering tidak pulang rumah, di Cilacap. Untung saya bisa balik ke Jawa karena informasi dari famili kalau di Surabaya banyak kerjaan.”*

Ijazah SMA (Umum) yang dimilikinya, tetapi tidak pernah dipakai untuk melamar pekerjaan. *“Kalau hanya ijazah SMA, siapa yang mau menerima saya kerja. Saya pakai sertifikat BLK. Dari BLK, ia memperoleh keterampilan pertukangan, mulai dari tukang batu hingga tukang besi. “Kalau nglamar kerja, saya lihat dabulu apa yang mereka butuhkan. Kalau butuh tukang batu, saya juga bisa. Sekarang pekerjaan saya sebagai tukang batu.”* Meskipun demikian, ia lebih sering menerima tawaran sebagai tukang besi. Menurutnya, pekerjaan tukang besi itu jauh lebih mudah dibandingkan tukang-tukang lainnya. *“Kerjanya hanya membuat plat, begel untuk pondasi dan tulangan. Kalau hanya mengkhususkan sebagai tukang besi saja, rugi mas. Dipakai hanya di awal saja, sisanya pekerjaan tukang batu dan kayu. Jadi, akhirnya saya pilih pekerjaan tukang apa saja. Asal kerja.”*

Sebagai tukang batu, Mas Pur dibayar per hari Rp. 4.000,00, tapi sebagai tukang besi hanya antara Rp. 3.000,00 hingga Rp. 2.500,00. *“Kalau jadi tukang besi dan tukang batu, saya pilih borongan. Hasilnya lebih banyak. Tergantung rajin dan kecepakatan.”*

Pukul 3 sore ia sudah *nglaut*, dan bersiap-siap pulang dengan mengumpulkan peralatan dan mandi di tempat kerja. Sekitar pukul 4.30 sore dia sudah melaju pulang ke waru. *“Saya kadang-kadang pulang pergi naik bemo. Tapi, saya lebih suka naik sepeda.*

Lebih hemat. Uangnya bisa dipakai untuk jajan pada waktu istirahat siang.

Dia mengaku bahwa hampir setiap bulan mengirimkan sebagian upanya untuk orangtuanya yang menjadi petani dengan luas sawah 0,86 ha dan untuk saudaranya. Dia sendiri telah bercerai sewaktu bekerja di Sumatera. Sisa uang lainnya untuk makan di tempat kerja dan *nyumbang* ke famili yang rumahnya ditempati. Tidak selalu dalam bentuk uang karena saudaranya *sungkan* menerima.

“...Saya belikan saja kebutuhan dapur, seperti beras dan bayar listrik. Itu saja sudah hampir Rp. 30.000,00. Tidak seberapa, bila dibandingkan harus kost. Memang, lama kelamaan saya juga sungkan. Memang ada rencana untuk pindah dan kost. Tapi, kapan dan alasan apa. Masih saya pikir-pikir...”

Pak Mian, Keluarga Kuli Batu.

“Helo.... helo Purnomo, apa ning kono?” kata Mak Sri di depan *corong omplong* (kaleng bekas). (*“Helo.. helo Purnomo, apa ada di situ”*). Purnomo adalah anak bungsunya. Umurnya kurang dari lima tahun. Ia berdiri di ujung lain. Ia melekatkan corong yang dihubungkan benang itu ke telinganya. Ia tertawa mendengar suara ibunya. Mainan itu dibuatkan Pak Min, teman kerja ayah dan ibunya. Begitu pula dengan truk mainan yang terbuat dari kayu. Mereka tinggal di bangunan yang belum jadi. Di tempat itu, kedua orang tuanya bekerja.

Ningsih anak perempuan sulungnya sedang *ngladeni* sarapan pagi tukang dan kuli. Selain itu, ia mencatat berapa dan apa yang dimakan tukang dan kuli. Mereka biasanya *ngebon*, membayar setelah mendapat upah di akhir minggu. Biasanya dalam seminggu mereka menghabiskan Rp. 5.000,00 untuk makan, belum lagi untuk *ses* (rokok).

Masakan itu dibuat oleh Ningsih dan ibunya, Mak Sri, antara jam 5 sampai 6 pagi. Bahan-bahannyadibeli sore hari sebelumnya di toko dan pasar terdekat, kurang lebih 300 meter jauhnya atau *kulakan* pada hari Minggu. Pak Mian yang pergi *kulakan*. Sementara isteri dan anaknya memasak. Pak Mian membantu mencari dan merebus air. Air itu diambil dari ledeng rumah di seberang jalan. Dia tidak perlu membayar karena sudah dibayar oleh mandornya dengan cara mengganti tagihan air tiap bulan, biasanya sekitar Rp. 20.000,00. “*Mereka sebenarnya curang, Mas. Masak yang sering pakai mereka. Tapi, seluruh tagihannya yang bayar kami. Mestinya, untuk adilnya dibagi dua,*” kata Mandronya yang d-iya-kan oleh tukang dan kuli lainnya.

Pukul 7 pagi, Pak Mian dan Mak Sri sudah ganti dengan baju *telesan* (baju yang sudah luntur warnanya untuk kerja). Sementara itu, Ningsih terus melayani tukang dan kuli yang mau makan. Prunomo sendiri sudah berganti mainan dengan truk yang terbuat kayu. *Om* yang mengawasi bangunan, sebagai wakil dari pemilik bangunan (rumah), ikut menggoda Prunomo. *Om*, seorang Tionghoa separuh bayu ini adalah paman (kakak dari ayah) pemilik bangunan. “*Pur, sing gawe truk iki sapa?*” “*Lik Min,*” sahut Prunomo tanpa menoleh sedikitpun. “*Iki truk kudu momot gragal nggo digarap bapakmu,*” godo Cak Podo, teman ayahnya, sampil meletakkan batu pada *bak* truk mainan. (“Truk ini harus berisi batu yang harus dikerjakan ayahmu”). Akibatnya, truk tidak bisa ditarik lagi oleh Purnomo karena terasa berat. Teman-temah ayahnya tertawa melihat tingkah Purnomo menarik truk. “*Ah, kowe ngawur Cak Podo,*” kata Pak Min sambil membantu Purnomo menarik truk.

Kurang lebih pukul 8 pagi, mereka semua bekerja. Pak Min, sesudah mengisi air ke dalam tong, *ngladeni* tukang batu dan keramik membuat *luluh* (campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1:3). Sementara itu, Pak Mian dan Mak Sri *ngayak* pasir dan mengangkat *luluh* ke tukang batu dan keramik.

Sementara itu, Ningsih tetap menjaga warung dan melayani pembeli, sambil *ngemong* Purnomo. Warung itu sebenarnya *direksiget* (gudang). *"Saya sebenarnya ingin sekolah. Tapi, tidak ada biaya. Jadi, kelas tiga SD saya sudah berhenti. Kata bapak, kalau ada biaya, tahun depan saya sekolah lagi,"* kata Ningsih. Ningsih berkulit hitam manis, seperti ibunya, dan berambut hitam panjang sebatas pinggang. Hal ini berbeda dengan ayahnya, Pak Mian. Ciri-ciri Pak Mian bertubuh sedang, 50 tahun umurnya, berambut keriting (*"Susah diatur. Tidak perlu potong,"* katanya) dan biji mata sebelah kiri berbintih putih (mungkin akibat kekurangan vitamin A). Lebih lanjut, selain melayani pembeli, dia memasak air untuk minum ketika menjelang jam 12 siang. Waktu istirahat siang, atau istilahnya *nglaut*.

Pada waktu *nglaut*, Mak Sri dan Ningsih kembali melayani mereka yang bekerja di bangunan itu, termasuk mandornya. Setelah *nglaut*, sekitar pukul 1 siang mereka kembali bekerja. Mereka baru selesai bekerja sekitar jam 4 sampai 4.30 sore. *"Beginilah cara kami mencari makan. Datang ke Surabaya, hanya jadi kuli dan buka warung,"* kata Pak Mian. Meskipun demikian, sejumlah teman sekerjanya menyayangkan tekad mereka. *"Sayang, dia tidak bisa mencapai jenjang lebih tinggi. Tidak bisa jadi tukang. Ketuweken (terlalu tua, pen). Tidak bisa belajaran. Apalagi membawa keluarganya di Surabaya,"* kata Pak Min.

Menurut pengakuannya, Pak Mian berasal dari Desa Tanggul Angin, Kab. Bojonegoro. Pak Mian tidak mempunyai sawah atau ladang. Sawah milik ayahnya yang 0,5 ha luasnya sekarang dimiliki dan dikerjakan oleh kakak sulungnya. Dia dan isterinya di desa hanya bekerja sebagai buruh tani yang dibayar Rp. 1.000,00 per hati pada waktu musim tanam atau musim panen. *"Saya dan sekeluarga berniat pulang desa akhir Maret nanti. Kami dengar akan ada panen bawang dari teman dan kerabat keteta pulang bulan yang lalu."*

Pertama kali datang ke Surabaya, Pak Mian diajak temannya sudah tiga lamanya sebelum penelitian ini. Ia ditawarkan menjadi kuli. Waktu itu, ia menjadi kuli di Rungkut. Sudah 2-3 bulan pada waktu penelitian berlangsung, isteri dan kedua anaknya di ajak. Baru beberapa minggu setelah bekerja di Surabaya, isterinya mengajak untuk buka warung, berjualan nasi. Modalnya diperoleh dari hasil tabungan.

Ia bekerja di Rungkut kurang lebih dua tahun lamanya. Setelah selesai bangunan yang satu, ia berpindah ke bangunan lain. Kurang lebih satu tahun terakhir, mereka diajak mandor ke tempat yang sekarang di kawasan Chris Utama, Pakis Gurung. Di tempat tinggal yang sekaligus tempat kerjanya, dia bersama isteri dan anak-anaknya menempati satu ruangan yang belum jadi. Dia tidur di atas *tripleks* dan menggunakan *sendir* buatan sendiri untuk penerangan bila malam hari. Untuk menghangatkan dan memasak, mereka menggunakan kayu bakar.

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga sebagai Faktor Pendorong Migrasi

Everett S. Lee (1985: 8-9) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi, yakni: faktor dorong-tarik, penghalang antara dan faktor pribadi. Faktor dorong-tarik, oleh pendekatan sistem, digambarkan sebagai akibat *over*-populasi dan lingkungan yang memburuk di kawasan desa serta daya tarik kota.

Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan sangat sulit, pada kasus ini semua responden telah melakukan migrasi desa-kota. Mereka berasal dari daerah asal yang berbeda satu sama lain. Cara lain yang digunakan adalah menanyakan alasan pergi bekerja di Surabaya.

Tabel 5.1.
Alasan Pergi Bekerja di Surabaya (N=75)

No.	Rincian	Utama		Kedua	
		f	%	f	%
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	38	50,67	8	10,67
2.	Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarga	17	22,67	9	12,00
3.	Mengisi Waktu Luang (Pra-Panen dan Tanam)	0	0,00	20	26,67
4.	Diajak Kawan	10	13,33	5	6,67
5.	Lain-lain	5	6,67	0	0,00
6.	Tidak Menjawab	2	2,67	33	44,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 6.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak adanya pekerjaan di desa sebagai alasan utama yang dominan. Atau, singkatnya tidak adanya pekerjaan sebagai faktor pendorong. Hal itu bisa dipahami karena revolusi hijau dan biru telah mengakibatkan efisiensi dan komersialisasi di sektor pertanian. Revolusi hijau mengakibatkan penyeragaman musim tanam (dan sekaligus musim panen), sehingga petani kecil dan buruh tani hanya bekerja pada lahan pertanian tertentu saja dalam satu kali musim tanam-panen. Jumlah buruh tani yang digunakan pun semakin terbatas akibat penggunaan teknologi pertanian. Untuk membajak, hanya menggunakan satu traktor sudah bisa mengolah tanah dalam jumlah yang besar. Sementara itu, ketika musim panen tenaga yang diperlukan juga sedikit karena menggunakan sabit. Penurunan penggunaan tenaga di sektor pertanian ini tidak diikuti pengembangan sektor non-pertanian yang lebih luas, terlebih lagi dalam bentuk industri kecil rumah tangga (Adiwikarta, 1984: 71-77; Sayogyo, 1978: 3-14; Manning, 1988: 3-39). Akibatnya,

mereka memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Penjelasan yang ini juga dapat digunakan untuk memahami alasan utama kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga (pendapatan tambahan).

Tabel 5.2
Luas Pemilikan Tanah sebelum Bekerja dan Alasan-alasan Bermigrasi
(N=75)

No.	Alasan	Utama			Kedua		
		Sempit	Sedang	Luas	Sempit	Sedang	Luas
1.	Tidak Ada Pekerjaan di Desa	27 50,00%	6 75,00%	5 38,46%	8 14,81%	0 0,00%	0 0,00%
2.	Mencukupi Kebutuhan Keluarga	12 22,22%	2 25,00%	3 23,08%	2 3,70%	0 0,00%	7 53,85%
3.	Isi Waktu Luang	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	17 31,48%	0 0,00%	3 23,08%
4.	Diajak Kawan	7 12,96%	0 0,00%	3 23,08%	5 9,26%	0 0,00%	0 0,00%
5.	Lain-lain	8 14,81%	0 0,00%	2 15,38%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
6.	Tidak Menjawab	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	22 40,74%	8 100,00%	3 23,08%

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 26

Oleh karena itu, pada alasan kedua yang dominan adalah mengisi waktu luang pra panen dan tanam. Mereka, buruh bangunan yang terjaring, mengisi waktu luang dengan bekerja di Surabaya. Mereka mengaku sebenarnya ingin juga bekerja di daerah asal, tetapi ternyata tidak ada pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Akhirnya, mereka memilih menjadi buruh bangunan di Surabaya.

Bila dikaitkan dengan SES dan tanah yang dimiliki sebelum melakukan migrasi, maka tidak ada pekerjaan menjadi satu penjelasan kolektif (*collective reasoning*) masyarakat desa mengapa mereka meninggalkan desanya dan menuju kota. Namun, bila digali lebih dalam lagi, di samping pekerjaan yang tidak ada, bagi informan yang memiliki SES tinggi (dan tanah) yang luas, pekerjaan merupakan “keberadaan” dirinya. Mereka tidak puas hanya bekerja ikut atau bersama orang tua. “*Yen kerja ning sawah melu wong tuwo iku podho wae ngganggu. Kulo pingin duwe penghasilan dhewe. Sawah ben diurus sing ning desa.*” (Kalau ikut orang tua bekerja di sawah itu sama dengan menganggur. Saya ingin punya pendapatan sendiri. Sawah biar diurus oleh orang yang masih tinggal di desa). Jawaban ini rata-rata diberikan oleh buruh bangunan yang ber-SES tinggi dengan tanah di atas 0,5 ha, bahkan ada salah seorang responden yang memiliki sawah 5 ha lebih suka menyuruh tetangganya mengerjakan daripada dirinya.

Menjadi Penglaju, Migran Permanen dan Sirkuler untuk Menyiasati Faktor Penghalang

Meski masih belum ada kesepakatan konsep *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen, Hugo misalnya, mengusulkan ukuran-ukuran yang cocok dari keterlibatan seseorang yang pindah, yaitu: (1) apakah keluarganya ikut pindah atau tidak; (2) apakah tanah, rumah atau harta benda lainnya di desa tetap menjadi miliknya atau tidak; (3) apakah ada kiriman uang atau barang ke desa, kiriman-kiriman tersebut seberapa bagain dari jumlah seluruh penghasilannya; (4) apakah dia mempunyai peranan politik atau sosial di desa; dan (5) apakah sering pulang ke desa (Goldstein, 1980: 75). Pakar lain menghendaki perlunya memperhatikan kriteria ruang (wilayah, jarak ekonomi dan jarak sosial), tempat tinggal, waktu dan kegiatan dalam migrasi, khususnya desa-kota (Standing, 1987: 1-20).

Selain mengikuti pendapat Hugo, cara lain yang ditempuh untuk seseorang melakukan migrasi permanen, sirkuler dan/atau *nglaju* adalah menanyakan apakah ada rencana kembali (*niat*) ke daerah asalnya (Mantra, 1985: 3) dan frekuensi kembalinya. Buruh bangunan yang menyatakan kembali dan tetap menetap di desa adalah 80,00%, sedangkan 15% menyatakan menetap di Surabaya. Alasan mereka yang memilih menetap di Surabaya adalah karena keluarganya sudah dipindahkan, tidak mempunyai sawah atau terlalu sempit, atau selain keluarganya telah dipindahkan, karena tidak ada pekerjaan di desa. Beberapa yang mengambil keputusan pindah ke Surabaya telah memiliki rumah, namun ada pula yang mengontrak, tinggal bersama famili dan orang lain, biasanya teman sekerjanya (sumber: pertanyaan no. 42 dan 61).

Tabel 5.3
Jarak dan Frekuensi kembali ke Daerah Asal
(N=75)

No	Jarak ke Daerah Asal	Dekat		Sedang		Jauh	
	Frekuensi Kembali	f	%	f	%	f	%
1.	Tinggi	16	76,19	2	5,71	3	16,67
2.	Sedang	0	0,00	27	77,14	8	44,44
3.	Rendah	5	23,81	7	20,00	7	38,89

Sumber: data primer, pertanyaan no. 11, 59, 60 dan 63.

Sementara itu, mereka yang tidak punya rencana menetap melakukan migrasi sirkuler dan *nglaju*. Responden yang *nglaju* akan pulang setiap hari, jumlahnya 8 orang, dua orang lebih memilih pulang 2 hari sekali. Migrasi sirkuler dilakukan dengan cara pulang 1 atau 2 kali dalam sebulan, bahkan ada yang tidak pulang setiap bulan, meski tetap memberikan kiriman uang yang ditiptkan pada saudara atau teman-teman sedesanya (sumber: pertanyaan no. 60 dan 61). Frekuensi pulang ke daerah asal

mereka berbeda bergantung dari jarak antara Surabaya dan daerah asalnya. Semakin dekat jaraknya, semakin sering pulang, bisa setiap hari, atau mengambil pola *nglaju*. Sementara itu, semakin jauh jaraknya semakin lama pulang rentang waktu pulanginya (lihat tabel 4.3).

Ketika berangkat ke Surabaya, mereka tidak selalu diajak oleh orang tuanya atau temannya, tetapi 22 (29,33%) orang mengambil inisiatif sendiri. Meskipun demikian, ajakan dari teman se-desa yang terlebih dahulu pergi ke Surabaya dan telah memperoleh pekerjaan tetap dominan, yaitu 25 (33,33%). Pada waktu diajak atau berinisiatif sendiri ke Surabaya, mereka meminta pertimbangan dan ijin dari orang tua (37,33%), keluarga (33,33%) dan cukup tekad dan keputusan sendiri (29,33%). Permintaan ijin pada orang tua dan keluarga biasanya dilakukan anak muda dengan karakteristik sosial tertentu. Sebagaimana pendapat David F. Sly dan J. Michael Wrigley (1985: 75-97), keputusan migrasi pada anak muda pada dasarnya dibuat oleh kepala keluarga, khususnya yang kurang berpendidikan, sedangkan orang di luar keluarga lebih berperan pada migran yang berpendidikan. Namun demikian, orang yang memberikan pertimbangan ini tidak berarti ikut membiayai migrasi tersebut, karena dari temuan lapangan 77,34% responden mencari biaya sendiri.

Magang atau *Ngernet*, Proses Belajar dan Adaptasi Kerja

Kartini Sjahrir (1985: 82) memaparkan bahwa keahlian seorang tukang di Jakarta diperoleh secara bertahap dari teman sekolah sekerjanya. Mandor maupun kontraktor tidak pernah menyelenggarakan suatu latihan keterampilan khusus. Setiap tukang memperolehnya lewat pengalaman kerja dan barangkali juga bakat. Hal ini terjadi pada buruh bangunan di Surabaya. Hampir semua buruh mengaku pernah menjadi kuli sebelum kedudukannya sekarang, bahkan ada yang mau bekerja tanpa di-

bayar, hanya uang makan, seperti Ali Effendi. Pekerjaan *kuuli, laden tukang*, tidak selalu dijalani di Surabaya, biasa jadi di desa asalnya atau kota

Alat-alat kerja didapat dengan jalan beli sendiri (36,0%), pinjam atau diberi oleh mandor atau pemilik bangunan (7,0%), atau dari sebagian membeli dan sebagian lain pinjam (16,%) (sumber: data primer, pertanyaan no. 64). Alat-alat ini dikenalkan oleh teman kerja, teman se-daerah, saudara, dan/atau orang tuanya, sekaligus dibimbing cara menggunakannya. Tabel 5.4 menunjukkan bahwa selain didukung oleh kemauan sendiri, teman kerja sangat berperan dalam mengenalkan dan membimbing dalam penggunaan alat-alat kerja. Proses belajarnya tidak seperti pada pelatihan, tetapi sambil kerja temannya memperhatikan. Kalau salah, baru diberi tahu mana yang salah, bisa pada saat itu juga atau pada waktu *nglaut*.

Tabel 5.4
Yang Mengenalkan Alat dan Membimbing/Melatih Pekerjaan
(N=75)

No.	Rincian	Yang Mengenal Alat		Yang Membimbing	
		f	%	f	%
1.	Sendiri	4	5,33	4	5,33
2.	Orang tua	2	2,67	5	6,67
3.	Saudara	4	5,33	4	5,33
4.	Teman se-daerah	3	4,00	0	0,00
5.	Teman se-kerja	11	14,67	14	18,67
6.	Sendiri dan orang tua/saudara	9	12,00	12	16,00
7.	Sendiri dan teman se-daerah	2	2,67	5	6,67
8.	Sendiri dan teman se-kerja	22	29,33	26	34,67
9.	Sendiri, orang tua/saudara dan teman se-kerja	10	13,33	5	6,67
10.	Sendiri, orang tua/saudara, teman sekerja dan teman se-daerah	8	10,67	0	0,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 56 dan 57.

Proses magang, *ngernet* atau *belajaran* diceriterakan oleh Pan Ran, yakni pada awalnya seorang *kuli* mengikuti tukangnyanya bekerja dan seringkali tukang inilah yang memberikan pekerjaan padanya, tapi hanya 1 atau 2 kali proyek mereka ikut, selebihnya mencari sendiri. Pertama kali kuli batu memperhatikan tukang bekerja sewaktu *laden* dan memberikan luluh. Tukang memberitahu berapa campurannya, apakah pasir itu perlu di-*ayak* atau tidak, jenis batu yang digunakan dan campuran semennya. *Kuli* juga diminta memegang ujung lain dari pipa plastik yang berisi air untuk melihat sejajar atau tidak dan *ngelot* (menimbang ketebalan lapisan semen). Selain itu, lambat laun kuli disuruh mengerjakan pasang batu bata supaya target (borongan) terpenuhi. “*Ayo melu masang, nggak ono rugi. Aku nggak iso mbayar sampeyan!*” (“Ayo ikut pasang kalau tidak bisa rugi. Kalau rugi, saya tidak membayar kamu!”). Setelah kelihatan sudah agak terampil, tukang memberikan bonus dan sering mengajak lembur. Bila yang membayar mandor, tukang akan mempromosikan *kuli*-nya. Bila *kuli* merasa sudah bisa melakukan, dia keluar dan mencari tempat kerja baru atas informasi teman-temannya. “*Umpamane ora pindah, bakal pancet ae.*” (“Kalau tidak pindah, kondisinya tetap saja”).

Di tempat yang baru, dia melamar sebagai tukang, bukan *kuli* lagi. Oleh mandor yang baru, dia boleh bekerja dengan masa percobaan beberapa hari.. Bila hasilnya kurang baik, mandor akan menurunkan upahnya, tapi biasanya tukang yang “baru” ini memilih keluar. Kalau hasilnya baik, ia tetap bekerja dengan status yang baru, sebagai tukang.

Untuk meningkat menjadi kepala tukang atau mandor, seorang tukang harus dekat dengan mandor atau pelaksana. Mereka mengajarkan bagaimana seluk-beluk mencari proyek dan memberikan kepercayaan. Di samping itu, tukang tersebut menyisakan upahnya untuk modal. *Kuli* jarang langsung menjadi mandor atau kepala tukang, tetapi harus bertahap.



Gambar 5.1.

Kadang dengan perut kosong, sudah harus bekerja.

Perubahan Status Sosial Ekonomi Keluarga, berkah dari Kota Besar

Perubahan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal sebenarnya tidak terlepas dari perilaku pengiriman uang atau barang, dalam istilah kependudukan adalah *remittance*. Pengiriman uang atau barang ini dilakukan oleh kaum migran, termasuk oleh buruh bangunan. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa semua buruh bangunan yang berstatus berkeluarga dan separuh dari berstatus janda/duda, atau 70,7% dari 75 responden mengaku mengirimkan uang dan/atau barang pada keluarganya, khususnya istri dan/atau anak-anak mereka. Bentuk pemberian itu bervariasi, namun umumnya berupa uang setiap kali pulang.

Tabel 5.5
Bentuk Pengiriman/Pemberian Uang dan/atau Barang pada Keluarga
(N=75)

No.	Rincian	Istri dan anak-anak		Orang Tua/ Mertua		Kerabat Lain	
		f	%	f	%	f	%
1.	Uang secara teratur	22	29,33	0	0,00	5	6,67
2.	Uang setiap kali pulang	25	33,33	16	21,33	0	0,00
3.	Uang dan/atau barang	3	4,00	20	26,67	12	16,00
4.	Barang-barang saja	3	4,00	15	20,00	15	20,00
5.	Tidak memberi apa-apa	22	29,33	24	32,00	43	57,33

Sumber: data primer, pertanyaan no. 67.

Tabel 5.5 juga menunjukkan bahwa buruh bangunan juga mengirim uang dan/atau barang setiap kali pulang, meski frekuensi pemberiannya berbeda bila dibandingkan istri dan/atau anak-anak. Namun tidak demikian untuk kerabat, kecenderungan memberikan uang, meski dalam jumlah kecil, biasanya dilakukan oleh buruh bangunan pada kerabat yang masih menjadi tanggungannya, seperti yang dilakukan Pak Ran. Atau, pemberian itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya selama proses migrasi, misalnya memberikan tumpangan menginap, atau mencari/memberi informasi tentang pekerjaan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pemberian uang dan/ atau barang ini digunakan membeli tanah atau barang-barang elektronik sebagai investasi. Sebelum ke Surabaya, separuh lebih dari buruh bangunan berstatus petani kecil atau tidak memiliki tanah (*tunakisma*). Kalau pun memiliki tanah pertanian, ada sejumlah pola pemilikan, mulai dari milik sendiri, warisan, beli

sewa, bagi hasil, hadiah/hibah dan lungguh. Pola penguasaan lahan yang demikian ini adalah wajar pada masyarakat Jawa pada tahun 1990-an. Data Sensus Pertanian tahun 1983 yang dilakukan oleh BPS, 63,3% usaha tani dari 11,6 juta rumah tangga petani di Jawa adalah petani gurem dengan luas tanah rata-rata 0,25 ha. Meski pada buruh bangunan yang tidak bertanah dan petani sempit tidak berubah, namun pada kelompok buruh bangunan di atas 0,25 ha mengalami perubahan luas tanahnya.

Tabel 5.6
Luas Pemilikan Tanah Pertanian Sebelum dan
Sesudah Bekerja di Surabaya
(N=75)

No.	Luas Lahan (dalam ha)	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Tidak Bertanah	28	37,33	28	37,33
2.	0,01 – 0,25	21	28,00	21	28,00
3.	0,26 – 0,50	7	9,33	0	0,00
4.	0,51 – 0,75	3	4,00	2	2,67
5.	0,76 – 1,00	8	10,67	16	21,33
6.	1,01 – 1,25	2	2,67	2	2,67
7.	Lebih dari 1,25	6	8,00	6	8,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 15 dan 16.

Ada temuan yang menarik dari tabel 5.6, bahwa tidak peningkatan perluasan tanah pertanian yang dimiliki. Pada beberapa kasus perpindahan pekerjaan yang kurang dari satu tahun pada waktu penelitian ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Lebih dari itu, para buruh tani dan pemilik tanah yang bertanah sempit lebih memilih mengembangkan sektor non-pertanian, bahkan telah dilakukan pada waktu sebelum melakukan proses migrasi. Sementara itu, petani yang memiliki tanah di atas

0,25 ha tetap mengembangkan strategi peningkatan ekonomi pada sektor pertanian. Caranya, hasil dari bekerja di kota digunakan untuk membeli tanah. Dengan membeli tanah yang cukup luas hingga mencapai 1 ha. Dengan luas tanah tersebut, setidak-tidak biaya antara pengelolaan padi dan keuntungan dari menjual beras seimbang atau lebih untung.



Gambar 5.2
Bekerja untuk keluarga di desa?

Tidak ada perubahan signifikan pada kelompok buruh bangunan yang *tunakisma* (tidak bertanah) dan petani *gurem* (lahan kurang dari 0,25 ha) ini nampaknya berhubungan dengan (1) status pekerjaan di desa yang tidak lagi memfokuskan pada sektor pertanian, dan (2) orientasi dalam pengembangan modal yang dimiliki. Orientasi pengembangan ini terlihat dari perubahan kualitas rumahnya. Meski luas tanah atau rumah relatif tidak berubah, tetapi terlihat perubahan pada bahan dinding, lantai dan penggunaan listrik. Lebih penting lagi, status kepemilikan rumah

pun telah berubah, bila dulu bergantung pada orangtuanya, kini mereka telah mengutamakan untuk membeli sendiri, baik dengan cara membeli, maupun membuat sendiri.

Tabel 5.7
Kondisi Obyektif Rumah di Daerah Asal Sebelum dan Sesudah Bekerja
di Surabaya (N=75)

No	Kondisi Obyektif	Sebelum		Sesudah	
		f	%	f	%
1.	Luas Rumah (dalam m ²)				
	a. Kurang dari 40	10	13,33	16	21,33
	b. 40,01 – 60,00	21	28,00	15	20,00
	c. 60,01 – 80,00	7	9,33	4	5,33
	d. 80,01 – 100,00	15	20,00	18	24,00
	e. 100,01 – 120,00	10	13,33	7	9,33
	f. Lebih dari 120,00	12	16,00	15	20,00
2.	Dinding terbuat dari				
	a. Tembok	49	65,33	62	82,67
	b. Papan	7	9,33	3	4,00
	c. Gedeg	19	25,33	10	13,33
3.	Lantai terbuat dari				
	a. Tegel/Keramik	7	9,33	9	12,00
	b. Semen	31	41,33	53	70,67
	c. Tanah	37	49,33	13	17,33
4.	Penerangan				
	a. Listrik	33	44,00	53	70,67
	b. Lampu Minyak	42	56,00	22	29,33
5.	Status Pemilikan				
	a. Beli Sendiri	11	14,67	20	26,67
	b. Buat Sendiri	9	12,00	18	24,00
	c. Hibah Orangtua	8	10,67	13	17,33
	d. Buat Sendiri dgn dibantu Orangtua	18	24,00	9	12,00
	e. Milik Orangtua	29	38,67	15	20,00

Sumber: data primer, pertanyaan no. 27.



Gambar 5.3

Makan bersama, bekerja bersama. Modal sosial orang miskin kota.

Penutup

Apa yang dapat disimpulkan dari perilaku buruh bangunan. Pertama, mobilitas buruh bangunan yang bekerja di Surabaya adalah *nglaju*, migrasi sirkuler dan permanen. Frekuensi mereka kembali ke daerah asal ini berhubungan dengan dengan jarak antara tempat kerja dan daerah asal. Semakin dekat jaraknya, semakin tinggi frekuensi kembali ke daerah asal. Intensitas hubungan dengan asal ini sebenarnya berbeda bergantung status kawinnya. Pada buruh bangunan yang berstatus kawin, dengan istri dan anak-anak yang tinggal di daerah asal, intensitasnya semakin tinggi, sebaliknya tidak demikian pada status tidak kawin dan janda/duda. Intensitas ini ditandai dari frekuensi kembali ke daerah asal, pengiriman uang dan/atau barang, ada tidaknya teman atau famili dari daerah asal yang diajak bekerja dan keterlibatannya pada organisasi di daerah asalnya.

Kedua, pola migrasi yang demikian sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang *bias* kota dan pembangunan pertanian yang memarjinalikan kelompok miskin pedesaan. Oleh karena itu, pada buruh bangunan yang ber-SES rendah di daerah asal cenderung mempunyai alasan tidak ada pekerjaan di daerah asalnya. Sementara itu, selain karena tidak ada pekerjaan, buruh bangunan yang ber-SES tinggi lebih melihat ketidakpuasan atas pekerjaan di daerah asal. Bekerja ikut orang tua di sawah dianggap tidak memiliki pekerjaan.

Ketiga, dari hasil penelitian ini, keberhasilan migrasi ini sebenarnya ditentukan juga oleh intensitas pembelajaran, baik di daerah asal maupun sesudah di Surabaya. Intensitas pembelajaran terhadap pekerjaan di daerah terjadi tatkala mereka beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian di pedesaan, yaitu menjadi buruh bangunan. Di dalam kajian antropologi kognitif, pekerjaan buruh bangunan awalnya tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian, menggunakan alat-alat utama yang sama, seperti pacul dan sekop. Oleh karena itu, bisa dipahami bila Intensitas pembelajaran sebenarnya berbanding terbalik dengan SES buruh bangunan sebelum ke Surabaya.

Keempat, keberhasilan migrasi berpengaruh pada peningkatan status sosial ekonomi keluarga di daerah asal. Peningkatan status keluarganya ditandai dengan peningkatan luas tanah pertanian yang dimiliki dan kualitas rumahnya. Pada buruh bangunan yang sebelumnya merupakan petani gurem lebih menginvestasikan di sektor pertanian dengan membeli lahan pertanian. Namun demikian, buruh bangunan yang tuna kisma dan bekerja di sektor non-pertanian ini lebih memperbaiki rumahnya.

Terakhir, penelitian ini juga menguatkan anggapan bahwa sektor formal di perkotaan tidak selalu menjadi tujuan dari migrasi. Sektor formal memiliki daya tampung yang terbatas, hal itu berbeda dengan sektor informal seperti buruh bangunan. Pada

kasus buruh bangunan, sepanjang ada kegiatan membangun rumah atau proyek lain, beberapa pun jumlah orangnya dapat tertampung⁸. Sementara itu, masyarakat desa yang melakukan migrasi memiliki kesadaran dan mengukur kemampuannya. Mereka tidak lagi menaruh mimpi-mimpinya, tetapi lebih realitis apa yang bisa dilakukan di daerah tujuan.

Daftar Pustaka

Adiwikarta, Sudardja.

1984 Dampak Irigasi Jatiluhur dan Pola Keluarga Tani. **Prisma**. Th. XIII No. 9.

Ananta, Aris., dan Prijono Tjiptoherjianto.

1985 Sektor Informal: suatu Tinjauan Ekonomis. **Prisma**. Th. XIV. No. 3.

Effendi, Tadjuddin Noer.

1985 Masalah Ketenagakerjaan di Pedesaan dan Strategi Penanganannya. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: CV Rajawali.

Lee, Everett S.

1985 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta; PPK-UGM.

Magenda, Burhan D.

1983 Manusia Kota Besar: Contoh dari Surabaya. **Widyapura**. Th. IV. No. 2.

Mantra, Ida Bagoes.

1985 **Migrasi Penduduk di Indonesia. Suatu Analisis Hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1980**. Yogyakarta: PPK-UGM.

⁸ Lebih menarik lagi, pada situasi krisis ekonomi tahun 1997-2006 ini kecenderungan untuk mendirikan bangunan tidak berkurang, baik melalui proyek *real-estate* maupun rumah pribadi.

Owens, Edgar., dan Robert. Shaw.

- 1983 **Pembangunan Ditinjau Kembali. Menjembatani Gap antara Pemerintah dan Rakyat.** Diterjemahkan oleh A.S. Wan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sjahrir, Kartini.

- 1986 **Tukang-tukang di Jakarta, Suatu Jaringan Kerja.** **Prisma.** Th. XV. No. 9.

Sly, David F., dan J. Michael Wrigley.

- 1985 **Migration Decision Making and Migration Behavior in Rural Kenya.** Dalam James T. Fawcett. **Migration Intentions and Behavior: Third World Perspective, A Special Issues of Population and Enviornment.** New York: Human Science Press,Inc.

Standing, Guy.

- 1987 **Konsep-konsep Mobilitas di Negara sedang Berkembang.** Yogyakarta: PPSK UGM.

Stelle, Ross.

- 1985 **Mobilitas Pekerjaan dan Penghasilan Migran di Surabaya.** Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota.** Jakarta: Gramedia.

Bab 6

Petani Kota

Memindahkan Pekerjaan sebagai Mekanisme Survival Orang
Urban

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto,
dan Usman Mulyadi

Pertumbuhan Kota dan Marginalisasi Pertanian, Sebuah Pendahuluan

Kota-kota di Indonesia, khususnya Jawa, tumbuh dan memiliki multi fungsi. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, misalnya memiliki nama *akronim* yang mengikuti namanya, yaitu INDAMARDI, artinya industri, perdagangan, maritim dan pendidikan. Nampaknya, hal ini merupakan pola yang lazim dari pertumbuhan kota-kota di dunia. Kota tumbuh sebagai tahap lanjut dari pedesaan tatkala manusia mengembangkan kemampuannya yang tidak lagi sekedar *food gathering*, tetapi menjadi *food producing*, yaitu bercocok tanam. Revolusi peradaban pertama inilah, pertanian, kemudian menuntut golongan pekerjaan lain di luar pertanian. Golongan pertama adalah mereka yang menjaga kekayaan atau produksi dari pertanian, membentuk pemimpin yang *primus inter pares* dan tentara. Golongan kedua adalah pedagang yang menjual atau menjadi perantara antara petani dan kelompok masyarakat lain. Kedua golongan ini berada di wilayah yang disebut kota dengan bangunan benteng di sekitarnya atau *gilda-gilda* pada abad Pertengahan di Eropa (lihat Sukadana, 1983: 57-74; Nas, 1984: 2-3).

Multi-fungsi ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia. Kota Surabaya awalnya memang merupakan desa (*wanua*) di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha pada masanya, antara lain Kajuruhan, Mataram Hindu, Singhasari dan Majapahit. Karena posisinya berada di pantai, desa ini tidak saja sebagai desa pertanian, tetapi juga tumbuh sebagai pelabuhan (Soekadri, 1996: 5-23). Pada masa selanjutnya, menjadi kota syahbandar (Majapahit, abad 14-15), sekaligus penyebaran agama Islam semasa Sunan Ampel dan penerusnya (lihat Faber, 1931: 5-20), dan terutama sesudah 1870, kebijakan *Liberalisasi Ekonomi* di masa pemerintahan kolonial Belanda, berubah sebagai kota industri dan perdagangan, di samping sebagai pusat pendidikan (Handinoto, 1996: 47-127).

Kota Surabaya ini tumbuh meluas dan menjadikan daerah-daerah sekitarnya sebagai *binterland*, penyangga. Pertumbuhan ini sebenarnya tidak lain untuk menopang aktivitas perkebunan di wilayah-wilayah pedalaman *Oost Java Provincie* (Jawa Timur). Industri yang dibangun berkaitan dengan kelengkapan peralatan mesin pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan. Memang, sebelumnya telah ada pabrik-pabrik dan fasilitas lain yang lebih ditujukan untuk kebutuhan militer. Kota ini meluas hingga Wonokromo sekarang ini, akan tetapi dari sumber-sumber sejarah, yaitu *Verslag van den Toestand de Stads-gemeente Soerabaja* tahun 1870-1940, masih tercatat sebagian besar orang-orang bumi putera bekerja di sawah. Artinya, pola pemukiman tumbuh mengikuti jalur transportasi, meski bergerak di dalam satu garis lurus, tetapi tiga arah, yaitu ke Gresik (*Greesse*), Mojokerto (*Majakerta*), dan Sidoarjo (*Sidaharja/Sidakare*).

Hingga tahun 1970-an, wilayah Sedati, sekitar 20 km dari pusat kota Surabaya dan masuk wilayah Sidoarjo, masih dikenal sebagai daerah *gudang beras*. Selain dipanen dari wilayahnya, beras tersebut dipasok dari wilayah pertanian Surabaya. Melalui program pembangunan lima tahun (PELITA), hampir semua

sawah tersebut memiliki saluran irigasi (teknis) yang mengambil air dari Kali Surabaya (Mas). Pertumbuhan pemukiman, pusat-pusat perdagangan dan industri telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. Meskipun demikian, wilayah pertanian tersebut masih tersisa. Pada tahun 1999, jumlah luas lahan sawah sebesar 2.153 ha, dengan rincian 1.604 ha sawah tadah hujan, 305 ha sawah beririgasi teknis, 153 ha semi teknis dan 91 ha desa (irigasi non PU). Dari wilayah persawahan tersebut, kota ini bisa menerima hasil panen 2.730 ha dengan rata-rata produksi 50,77 kwintal/ha dan jumlah keseluruhan 13.859, produksi yang terkecil dibandingkan wilayah lainnya di Propinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2003: 165-175).

Dengan berbagai sarana pendidikan dan tersedianya lapangan kerja *off-farm* (sektor industri dan perdagangan), keluarga-keluarga petani asli Surabaya ini kemudian beralih ke sektor pekerjaan lain. Tanah sawahnya dijual dan didirikan pemukiman, pusat perdagangan atau industri. Uang ganti itu dikenal dengan istilah *uang landasan*. Karena dalam jumlah besar, sering mereka kemudian menjadi keluarga yang konsumtif. Seperti halnya di Jakarta, meski terjadi mobilitas pekerjaan ke sektor di luar pertanian oleh masyarakat petani asli, namun ternyata sektor pertanian tetap menampung petani-petani (penggarap) di luar Surabaya. Produksi tidak saja beras, melainkan sayur-sayuran hingga tanaman hias.

Meski telah ada penelitian tentang petani kota di Yogyakarta (Setyobudi, 2001), hasil pengamatan awal keadaan kaum tani di Surabaya ini berbeda dengan di Yogyakarta. Bila Setyobudi (2001) mencermati kaum tani yang merupakan penduduk asli Yogyakarta, seperti juga yang diteliti oleh Koentjaraningrat (1976) pada petani buah-buahan di Selatan Jakarta, yaitu kecamatan Pasar Rebo, desa Ciracas dan Cilangkap tahun 1972, maka penelitian ini mencermati *ekspansi* masyarakat petani di luar kota besar (Surabaya), memasuki ruang-ruang yang

kosong, atau mempertahankan lahan sawah pertanian hingga pemiliknya menjual ke investor atau melakukan alih fungsi sawahnya.

Sementara ini, sejumlah ahli kependudukan, khususnya kajian perkotaan, mencermati perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, selain karena faktor-faktor pendorong (*push factor*) di daerah asalnya, seperti sempitnya lapangan pekerjaan, ditambah dengan produk dari kurikulum pendidikan yang *bias kota*, dan faktor-faktor penarik (*pull factor*) di daerah tujuan (kota), seperti lapangan kerja yang terbuka, penuh dengan kemudahan dan kelengkapan sarana kehidupan. Mereka yang pindah dari desa selalu diduga mencari pekerjaan di sektor formal, yaitu di kantor atau pabrik, namun sering tidak disadari sebenarnya telah memiliki pilihan sendiri berdasarkan informasi yang dipunyai.

Menjadi masalah menarik kemudian, ketika mereka pindah ke kota dan tetap mempertahankan pekerjaan lamanya. Persoalannya, di lingkungan pedesaan mata pencaharian, dalam hal ini pertanian, telah membentuk sistem yang mendukung, seperti organisasi kelompok tani, HIPPA (Himpunan Pemakai Air) dan Petugas PPL. Hal ini berbeda dengan lingkungan barunya, jaringan semacam itu tidak ada. Kalau pun ada, fungsinya tidak berjalan lebih maksimal dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan berkaitan dengan kasus ini adalah pola migrasi dan strategi adaptasinya.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil penelitian ⁹ yang dilakukan pada tahun 2004. Lokasi penelitian ini berada di Surabaya,

⁹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

khususnya daerah sekitar Ketintang, Kebonsari dan Karah. Wilayah itu meninggalkan jejak-jejak pertanian pada masa lalu Kota Surabaya. Hal itu ditandai dengan bekas kompleks pabrik beras di Jalan Ketintang, tepatnya persis berada di depan kantor kelurahan. Lahan pertanian ini lambat laun tergerus oleh perumahan.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan perpektif etnografis. Tim peneliti mengamati keseharian para petani kota dan melakukan wawancara yang mendalam. Pengamatan itu terekam dengan baik melalui lensa kamera. Gambar memang tidak terlalu terfokus karena harus mengambil jarak dengan para pelaku. Para pelaku tidak terbiasa bisa diambil dengan jarak yang dekat. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi dari kedalaman hasil penelitian. Langkah berikutnya, hasil pengamatan dan wawancara mendalam direkonstruksi dan dianalisis menjadi satu tema tentang perjuangan kaum urban yang memasuki wilayah kota.

Tidak Ada Rotan, Akar pun Jadi, Tidak Ada Pekerjaan Menjadi Petani Tidak Masalah

Petani Asli dan Petani Migran

Di kota besar, seperti Surabaya, akan mengalami kesulitan bila mencari orang yang pada waktu pagi hari berjalan ke luar rumah dengan membawa cangkul dan satu tangan lainnya membawa *bontotan* (bekal makanan) yang dibungkus kain atau dengan menggunakan *rantang*. Apalagi, bila ia menggunakan *caping*, topi berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Di waktu lain, ia membawa *alat pantun*, yaitu kayu persegi panjang dengan sejumlah besi yang menancap, sehingga berbentuk seperti sikat sepatu. Kayu tersebut dihubungkan dengan gagang yang terbuat dari kayu pula. Alat itu digunakan untuk membersihkan atau

menyiangi *gulma*, tanaman pengganggu. Itulah gambaran seorang petani dan sangat sulit didapati di Surabaya, apalagi di pusat kotanya. Bila ada yang membawa cangkul, lebih pasti mereka bekerja sebagai buruh bangunan atau tukang gali (kabel telpon, pipa PAM atau gas).

Ketika menelusuri wilayah Surabaya Utara, bila dulu masih terdapat sawah yang letaknya berpenjaran (*sporadis*) kini cukup sulit didapati, bahkan nyaris tidak ada, kecuali di daerah Surabaya Barat, seperti Tandes, Balongsari dan Lontar, meskipun dalam jumlah yang kecil. Penelitian Nur Laily Assafitri (2004) menunjukkan bahwa Kelurahan Gadel, salah satu kelurahan dari kecamatan Tandes, bila pada tahun 1993 masih ada 2 orang yang berprofesi sebagai petani dan 10 orang buruh tani, maka pada tahun berikutnya (1994) sudah tidak ada lagi, mereka beralih ke pertukangan. Tanah mereka dijual dan menjadi perumahan. Rumah mereka memang lebih baik dan diisi oleh berbagai benda-benda elektronik, seperti tv dan vcd, dan tak jarang pula memiliki sepeda motor. Namun, mereka tidak lagi menjadi pemilik tanah, kecuali sejenkal tanah untuk rumahnya. Mereka kemudian bekerja sebagai tukang di perumahan tersebut tanpa bisa membelinya. Mereka masih menyisakan tradisi *tegal desa*, sebuah upacara ritual untuk menghormati *danyang* yang melindungi desa dengan sumur *sakral*, sebuah sumur yang berada di desa tersebut. Air sumur tersebut tidak pernah habis, bahkan mampu memenuhi kebutuhan untuk tujuh “desa,” yaitu Lempung, Sambisari, Karangpoh, Tandes, Tubanan dan Balongsari. Karena airnya terus mengalir, meskipun pada musim kemarau, sumur tersebut dianggap mempunyai kekuatan supranatural dan dikeramatkan. Kalau pun ada petani di Kecamatan Tandes, Lontar hingga daerah Lidah dan sekitarnya, jumlah mereka pun juga sangat sedikit. Karena kondisi lingkungan tanahnya yang keras, mereka bercocok tanam dengan cara perladangan dan sawah tadah hujan.



Gambar 6.1
Menunggu padi menguning di tengah perumahan

Baru mendekati Surabaya Timur, daerah Jojoran, Karang Menjangan, Karang Empat, Kaliyudan, hingga Kenjeran, hingga Semampir dan Rungkut, terdapat petani sawah. Jumlah mereka tetap tidak terlalu besar. Mereka tinggal di kampung-kampung lama Surabaya dengan bentuk rumah yang sangat sederhana. Mereka bisa sebagai petani pemilik yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang, ataupun bekerja sebagai buruh tani di tanah yang dulu miliknya atau tanah yang sama, tetapi telah berganti pemilik, hanya menunggu alih fungsi ke perumahan, perkantoran atau pabrik. Bila memperhatikan saluran-saluran air di perumahan hingga ke sungai, maka masih terlihat bahwa saluran tersebut sebenarnya diperuntukan sebagai saluran irigasi. Daerah Surabaya Timur dan perbatasan Kab. Sidoarjo pada tahun 1960-an hingga 1970-an terkenal sebagai wilayah gudang besar, sebutannya adalah *beras Sedati*.

Perumahan dan perkantoran tidak melebar hingga ke pinggir pantai Surabaya Timur hingga ke perbatasan Kab. Sidoarjo karena kesulitan jalur transportasi, meskipun kini lambat laun telah merambat ke wilayah tersebut, seperti Perumahan Wiguna di Rungkut. Pada wilayah tersebut, sering terdapat

kampung-kampung dengan sawah di sekitarnya atau tambak. Kondisi rumahnya tetap sangat sederhana. *“Sekarang Mas, nggak ada orang kaya dari tani. Bila ingin kaya, iya tunggu landasan, setelah itu kerja apa saya tidak tahu,”* begitu perkataan salah seorang petani bila ditanya tentang kondisi ekonominya, bahkan anak-anaknya merasa malu kalau menyebutkan pekerjaan orang tuanya karena petani sama dengan orang miskin.

Kata *landasan* itu merupakan istilah alih fungsi dan alih pemilikan khas komunitas petani di Surabaya dan sekitarnya. Kata itu pertama kali muncul ketika pembangunan atau perluasan bandara Juanda, Kab. Sidoarjo. Pada waktu itu, sejumlah sawah terjual dan dialihfungsikan. Pemiliknya memperoleh ganti rugi dan acapkali digunakan untuk naik haji, membeli motor dan benda-benda konsumtif lainnya. Meskipun setelah itu, mereka jatuh miskin karena tidak mempunyai pekerjaan. Uangnya telah habis, barang-barangnya telah terjual.

Dari semua wilayah tersebut, kemudian tim peneliti mengarahkan perhatian di wilayah Surabaya Selatan. Khususnya, di Kec. Ketintang dan Jambangan. Kedua kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Wonocolo pada tahun 1998. Selain wilayahnya terlalu luas, jumlah penduduk (KK) telah melebihi dari ukuran penduduk per kecamatan di Surabaya, sehingga perlu dipisahkan dari kecamatan induknya. Pertambahan jumlah penduduk ini lebih disebabkan oleh perumahan baru.

Di kedua wilayah tersebut terdapat sejumlah bidang sawah yang kini dalam hitungan hari telah berubah menjadi perumahan, bahkan dalam keadaan padi yang sudah berbuah dan tinggal menunggu panen diurug tanah. Tanah itu dijual baik sebagai tanah kapling yang siap bangun, maupun dijadikan perumahan. Ada sejumlah perumahan, antara lain Ketintang Permai, Karang Agung, Gayungsari dan Palm Spring yang baru berdiri, selebihnya untuk rumah tinggal dan tempat usaha.

Bidang yang pertama berada di lingkungan UNESA, luasnya berkisar antara 2 hingga 3 ha. Sawah tersebut lebih merupakan sawah tadah hujan yang berada di antara sejumlah bangunan, antara lain di belakang Gedung P2B, di sebelah Gedung Perpustakaan dan di depan Gedung MIPA. Sebagai sawah tadah hujan, sawah tersebut ditanami hanya satu kali dalam setahun. Mungkin karena hasilnya kurang dan sering terkena banjir pada waktu paruh musim hujan, kini sering tidak ditanami. Bidang sawah berikutnya berada dekat Ketintang Permai dan Perumahan Gayung Kebonsari. Sawah di depan Perumahan Ketintang Permai kini sebagian telah dibangun perumahan baru perluasan dari Perumahan Ketintang Permai dan perluasan Gedung Depag. Keadaan yang sama terjadi di depan Pasar Karah dan Jawa Pos, sehingga harus bertarung dengan waktu.

Tidak seluruhnya petani yang mengerjakan sawah ini adalah penduduk asli daerah tersebut. Sebagian besar merupakan petani migran. Asal mereka bervariasi mulai dari daerah Pantai Utara, yaitu Lamongan dan Bojonegoro, daerah *Surabaya/Arek* (Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang), dan daerah Mataraman (Tulungagung dan Nganjuk). Ada di antara mereka yang sudah menetap di Surabaya lebih dari 10 tahun, namun ada pula yang kurang dari 10 tahun, antara 2 hingga 5 tahun. Mereka tidak memiliki rumah sendiri. Mereka mengontrak rumah yang sederhana, meskipun atapnya sudah genting, tetapi dindingnya separuh dari tembok, di atasnya *gedeg* (bambu). Lantainya semen atau tegel yang lama. Air minumnya berasal dari sumur.

“Kami tidak bisa mengontrak rumah yang bagus. Harganya terlalu mahal, bisa di atas dua juta. Apalagi kalau ada air PAM, Listrik dan telpon. Untuk apa? Kami cukup mandi dengan air sumur. Listrik seadanya. Telpon, ah telpon siapa. Kalau mau, ya ke wartel. Yang penting tidak kehabisan, tidak kepanasan. Bisa tidur. Harganya murah. Bisa nabung. Buat apa kita ke Surabaya, kalau tidak membawa kaya.”

Sebagian lainnya tinggal di sawahnya. Mereka membangun gubuk dari bambu. Ukuran 2 x 2 m atau 3 x 3 m. Di dalamnya terdapat dipan untuk tidur, lemari atau kardus tempat pakaian, rak piring, peralatan masak dan makan, serta kompor. Di daerah Jambangan dan Ketintang, jumlah ini memang sedikit, karena memilih *mengontrak* di tanah PJKa yang terbilang murah, tetapi di daerah Pagesangan dan Gayungan (Kebonsari dan Menanggal), yaitu dekat Mesjid Agung, jumlahnya lebih besar daripada mereka yang mengontrak, terutama pada waktu musim kemarau, yaitu menanam *blewah* dan *timun mas*.

“...Kami memilih membangun gubuk di sini. Selain dekat dengan lahan kami, ongkosnya pun jauh lebih murah. Gedeg ini gedeg bekas. Untuk air minum, kita gali sumur. Air sumur ini tidak saja untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk menyirami tanaman. Tanaman ini tidak memerlukan air. Hanya dua kali sehari saja disirami, pagi dan sore hari. Dan, tidak perlu sampai kecembeng (tergenang, pen.).”

Umur petani dan buruh tani yang termuda adalah 35 tahun, yaitu Pak Urip dan Pak Sumaji, sedangkan tertua adalah Pak Supardi (60 tahun). Pendidikan mereka yang paling ditemukan oleh tim peneliti adalah SMP, namun sebagian besar adalah lulusan SD. Artinya, mereka sudah tidak buta huruf lagi. Bila memperhatikan tingkatan pendidikannya, apabila tidak kendala kultural, maka mereka bisa tergolong dari kelompok miskin pedesaan.

Pekerjaan mereka tidak berbeda dengan di tempat asalnya. Mereka merupakan keluarga petani dan buruh tani. Tanah mereka sempit, bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Pada pola migrasi sebelumnya, ada sebagian yang mengakui bahwa bila pekerjaan buruh tani di desa telah usai, maka mereka berpindah ke desa dan kota lain. Mereka berangkat bersama-sama, bisa pula secara sendiri. Kemudian, setelah mempunyai modal dan jaringan

sosial di kota, ada yang sebelumnya menyewa tanah sawah di kota, mereka berangkat ke Surabaya. Oleh karenanya, tempat asalnya tidak berjauhan di kota asalnya, setidaknya-tidaknya satu kecamatan dan memiliki hubungan emosional, baik sebagai kerabat, teman atau lainnya.

Pola yang demikian ini merupakan konsekuensi dari revolusi hijau dan biru. Di dalam perkembangan teknologi pertanian, bibit unggul dan teknologi pengolahan pertanian mengakibatkan penanaman padi secara relatif serempak. Hasilnya, buruh tani dan petani pemilik lahan sempit – kurang dari 0,25 ha – baik wanita maupun laki-laki tidak bisa berkerja di beberapa lahan sawah yang ada di desanya. Wanita buruh tani hanya bekerja pada waktu musim tanam, tetapi sesudah panen mereka tidak bisa lagi turut *menumbuk* padi, pemilik lahan lebih cenderung menggunakan *buller*, dan kini bahkan terdapat *buller* yang kecil yang dengan mesinnya bisa bergerak dari rumah ke rumah. Akhirnya, mereka memilih bekerja ke luar desa dengan pola pekerjaan yang sama atau relatif sama, perpindahan ke sektor non-pertanian mereka tidak secara progresif seperti pemilik lahan luas yang memiliki modal besar dari sektor pertaniannya (Wiradi, 1985: 40-48; kutip dari Sinaga dan White, 1979; Wiradi dan Makali, 1983; serta Collier dan Birowo, 1973).

Terjadinya pemilikan tanah sempit dan perumitan dalam proses pengolahan lahan ini bisa dijelaskan dalam teori *invulsi pertanian* dari Clifford Geertz (1983). Namun, perpindahan ke sektor *off-farm* dan kemudian melakukan migrasi ke kota (urbanisasi) merupakan dampak dari revolusi hijau dan revolusi biru yang merembet pada komersialisasi pertanian dan berlanjut pada runtuhnya hubungan patron-klien. Petani lahan sempit dan buruh tani (*tuna kisma*) tidak mendapat jaminan ekonomi dari pemilik tanah luas yang cenderung memperhitungan untung dan rugi. Sikap pemilik tanah luas ini terjadi karena biaya produksi padi meningkat.



Gambar 6.2.
Menjemur “gabah” di fasilitas umum

Kasus yang menarik lainnya adalah Pak Supri. Ia berusia 48 tahun, berasal dari Kab. Tulungagung. Di desanya ia bekerja sebagai pencari marmer. Artinya, desa asalnya berada dalam lingkungan yang tandus, yaitu di lereng Pegunungan Kendeng Selatan, sebuah pegunungan kapur. Pekerjaan tersebut begitu keras, ia tidak sanggup karena usianya semakin tua dan tenaganya semakin berkurang. Keadaan ini diperparah oleh kebutuhan marmer yang berkurang pada masa krisis moneter, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Fenomena ini sangat menarik karena dari sektor non pertanian di pedesaan ke sektor pertanian di perkotaan, padahal menurut Wiradi (1985) bahwa kecenderungan dimulai dari sektor non-pertanian di desa kemudian berlanjut ke sektor non-pertanian di kota. Apa yang dikatakannya, *“Meski sebagai buruh pencari marmer, di desa saya juga punya kebun yang saya tanami ketela dan jagung. Bertani sawah memang*

bal baru, tapi pekerjaan iya seperti itu saja. Saya juga tidak mengerjakan sendiri, tetapi ada penggarap yang saya upah setiap kali ada pekerjaan di sawah.”

Tabel 6.1.
Tempat Asal dan Tempat Tinggal Informan di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Kebonsari	Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro Kab. Mojokerto
Karakteristik Desa	Eks Desa Pertanian	Pertanian Perladangan dan Non-Pertanian
Tempat Tinggal	Milik Sendiri	Kontrak/Kost Di Gubuk Sawah

Penduduk asli Surabaya yang menjadi petani/buruh tani sangat sedikit. Seperti yang telah disebutkan, dari sejak dulu mereka juga berasal dari keluarga petani *gurem* atau buruh tani. Ketika lingkungan sekitarnya berubah, karena kondisi strukturalnya, yaitu tingkat pendidikannya yang rendah, mereka tidak mampu mengakses sektor ekonomi di luar pertanian. *“Iya, bagaimana lagi bisanya jadi buruh, kalau panen yang buruh tani, di hari lain buruh bangunan atau tukang becak. Sawah yang saya kerjakan ini sudah dua kali ganti pemilik. Sekarang, pemiliknya orang Sidoarjo.”*

Pola Penguasaan dan Pengolahan Lahan

Ada beberapa hal yang selalu diperhatikan dalam kebijakan pertanian. Hasil pertanian berhubungan dengan kebutuh-

an masyarakat. Di dalam kebijakan skala makro ini, kemudian memunculkan target pencapaian. Di masa pemerintahan Orde Baru, berkembang wacana tentang *swasembada* beras, dan seterusnya. Artinya, mengurangi impor hasil bumi dalam kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, ada dua strategi yang dikembangkan waktu itu, sejak tahun 1970-an, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi lahan dilakukan dengan memasukkan unsur bibit unggul yang menaikkan produksi, dan penggunaan *pestisida* sebagai pembasmi penyakit dan hama lainnya, dan terakhir adalah pemanfaatan teknologi pertanian (mesin) yang membantu petani untuk melakukan percepatan pengolahan tanah dan hasil panen. Penggunaan pupuk buatan dilakukan karena intensifikasi lahan mengakibatkan tanah tidak mampu menghasilkan zat hara yang berguna bagi tanaman, sementara itu penggunaan *pestisida* merupakan konsekuensi dari bibit unggul yang tidak tahan penyakit (perhatikan Ismawan, 1985: 18-19). Program tersebut pada masa itu dikenal dengan program *Bimas* dengan *Panca Usaha Tani*, dimulai dari penanaman bibit unggul PB 5 dan PB 8, dan kemudian berlanjut hingga IR 64 (Mubyarto, 1991: 6-8). Karena program tersebut, pada awal tahun 1990-an Suharto memperoleh penghargaan dari FAO sebagai negara yang swasembada pangan (beras).

Setelah itu, hasil pertanian mengalami titik balik. Kebutuhan beras semakin meningkat dan tidak bisa dipenuhi dengan produksi lokal hingga menjelang terakhir masa pemerintahan Suharto perluasan penanaman (*ekstensifikasi*) padi di Kalimantan dengan program satu hektar lahan gambut. Kebijakan ini diambil sebagai pengganti dari lahan sawah terus berkurang di Jawa dan Sumatera akibat alih fungsi ke non-pertanian.

Selain perluasan lahan, pemerintah menempuh kebijakan diversifikasi tanaman. Pertama, hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman hama akibat penanaman padi yang terus menerus (tiga kali dalam setahun). Kedua, dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan padi. Pada kenyataannya dengan hasil produksi padi yang berlimpah mengakibatkan nilai tukar beras menurun, kesejahteraan petani tidak terjamin. Pemerintah juga mencoba menentukan standar nilai jual padi dan melakukan terus melakukan pembelian padi, terutama pada musim, oleh Bulog/Dolog dalam rangka menstabilkan harga.

Lebih penting dari kebijakan pertanian tersebut adalah kesejahteraan petani. Selain diukur dari nilai tukar beras terhadap harga *barang konsumsi* yang dibeli petani dan juga nilai tukarnya dengan harga *sarana* produksi (Mubyarto, 1991: 2), diperhatikan pula pola penguasaan tanah. Seberapa besar perubahan pemilikan tanah, di wilayah pedesaan dari tahun 1970-an hingga 1990-an telah terjadi perubahan pemilikan, yaitu polarisasi tanah, jumlah petani gurem (di bawah 0,25 ha) semakin berkurang bergeser menjadi buruh tani, sebaliknya jumlah petani pemilik lahan luas (di atas satu ha) tidak bertambah, tetapi tanah yang dikuasainya bertambah luas dan ditambah pelaku baru yang dikenal dengan *petani absentee* atau *petani berdasi*. Hal ini terjadi bahwa akibat revolusi hijau, biaya produksi pertanian meningkat – diperlukan tanah di atas 0,25 ha agar mencapai titik impas (*break event point*) antara biaya produksi dan hasilnya – akibatnya petani gurem tersebut menjual lahan miliknya, dan memilih menjadi petani penggarap dengan pola penyakapan yang tidak menguntungkan atau menjadi buruh tani yang bekerja pada waktu proses produksi, selebihnya bekerja di luar sektor non-pertanian. Hal ini terlihat pada temuan Mubyarto (1991: 3) bahwa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, dan peningkatan di sektor industri dan jasa antara tahun 1960 hingga 1988.

Petani penggarap dan buruh tani yang ditemui dalam penelitian tidak berbeda jauh dari penggambaran Mubyarto (1991) dan Gunawan Wiradi (1985), meskipun beberapa di antaranya menolak asumsi bahwa peralihan ke sektor pertanian di perkotaan ini merupakan kegagalan mereka dalam memasuki

sektor formal (industri dan birokrasi) (lihat Todaro dan Stikind, 1991: 4-33). Seperti yang dikatakan oleh mereka, *"Wong saya ini pendidikan hanya SD. Mau jadi apa di kantor, paling-paling pesuruh. Pesuruh pun sekarang banyak yang lulusan SMA, Mas!"* Mereka realitis dan ingin bekerja apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya.

Tabel 6.2.
Tempat Tinggal Pemilik di Surabaya

Keterangan	Surabaya	Luar Surabaya
Asal	Ketintang dan Jambangan 1. Universitas Negeri Surabaya; 2. PJKK – Kereta Api; 3. Real Estat/ Perumahan; 4. Perseorangan.	Kab. Sidoarjo Perseorangan
Harga Sewa	1. Tidak Membayar 2. Rp. 600.000,00	Rp 600.000,00

Sebagian besar dari informan ini mengerjakan sawah dengan menyewa. Sebidang tanah, dengan luas kurang lebih 0,5 ha, mereka sewa seharga Rp 600.000,00. Mereka menyewa dua tahun lamanya, hal itu berarti kurang lebih enam kali panen padi untuk wilayah Ketintang, Jambangan dan Gayung Kebonsari. Wilayah tersebut merupakan sawah beririgasi, tetapi pada sawah tadah hujan, seperti di Menanggal, empat kali panen dan dua kali panen buah, yaitu blewah dan timun mas. Sebagian besar pemilik tanahnya tidak tinggal di kelurahan atau kecamatan tersebut, tetapi tinggal di luar Surabaya.

Untuk perumahan, selain dikenakan biaya sewa – melalui perjanjian ataupun secara lisan – mereka harus bersedia merela-

kan tanamannya diurug bila *real-estat* tersebut memerlukan lahan tersebut untuk dibangun. Kini, hampir separuh lebih daerah Jambangan, sebelah jalan tol, telah diurug, dibangun oleh perumahan (*real-estat*), seperti *Palm Spring Estat* dan KPR Mandiri, serta penjualan tanah kapling dengan fasilitas jalan yang telah dibuat dan lahan yang diurug. Tim peneliti melihat bagaimana tanaman padi yang mulai menguning tersebut diurug. Begitu pula dengan Unesa, kesepakatan yang sama dilakukan juga pada petani penggarap.

Tabel 6.3.
Status Pekerjaan Sebelum dan Sesudah dalam Pertanian
di Surabaya

Di Desa Asal	Buruh Tani	Petani Penggarap	Petani Gurem	Non- Pertanian	Pola Hubungan
Di Surabaya					
Buruh Tani	Surabaya & Luar Surabaya	↓	↓	↓	Upah Harian
Petani Penggarap	Luar Surabaya	Surabaya & Luar Surabaya	Luar Surabaya	Luar Surabaya	Bagi Hasil atau Menyewa
Pola Hubungan	Upah Harian	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	Bagi Hasil atau Menyewa	

Tidak semuanya harus menyewa, *PJKA* tidak menetapkan harga sewa pada petani penggarap. Bila ingin menanaminya, mereka gratis, tidak perlu membayar sewa, meski ada ketentuan tidak boleh mendirikan bangunan apapun. Nampaknya, ada kebijakan dari pihak *PJKA*, daripada didirikan bangunan liar yang nantinya susah dibongkar, lebih baik tanah di sekitar rel kereta api

itu dijadikan lahan pertanian. Selain ketentuan tersebut, yaitu tidak mendirikan bangunan permanen, petani penggarap harus bersedia merelakan tanaman bila lahan tersebut diperlukan. Hal ini pernah dilakukan petugas PJKA di Gayung Kebonsari dengan cara melakukan penebangan pada tanaman pisang ketika tanaman tersebut menghalangi pandangan penjaga pintu dan masinis kereta api.

Struktur penguasaan tanah di perkotaan memang berbeda dengan di desa. Di kota, tidak ada lagi golongan tuan tanah yang memiliki tanah ratusan hektar, tidak ada petani kaya yang memiliki tanah di atas 5 hingga 10 ha, seperti pembagian Kroef (1984: 162-163), karena sebagian besar adalah pendatang akibat perluasan kota dalam fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan perniagaan, sehingga berkurang penggunaan lahan untuk pertanian (Weber, 1977: 11-23). Akibatnya, tidak ada lagi penduduk inti (*gogol*) yang memiliki tanah luas, sebagai konsekuensinya “pemilik”-nya adalah perusahaan negara, lembaga-lembaga negara dan perusahaan swasta atau perumahan.

Bila tidak sebagai penyewa, hubungan kerja antara petani penggarap tersebut dan pemilik lahannya adalah penyakapan, yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil di wilayah yang diteliti adalah *maro*, *mertelu* dan *merlima*. Di dalam *maro*, masing-masing memperoleh sebagian yang dari hasil panen, sedangkan dalam *mertelu*, petani penggarap memperoleh sepertiga bagian, dan pemilik lahan dua pertiga, sedangkan *merlima* disepakati dengan *seperlima* bagian milik petani penggarap dan empat bagian lainnya diberikan pada pemilik lahan. Kesepakatan ini bergantung pada luas tanah tersebut dan keterlibatan pemilik lahan. Semakin tanahnya luas, maka bagi hasil menjadi *merlima*, begitu sebaliknya semakin sempit maka bagi hasilnya *mertelu*. Bila hasil bagi lebih besar pada pemilik, maka pemilik mempunyai kewajiban pengadaan pupuk, pestisida, dan sering kali bibit, sebaliknya semakin kecil penerimaan pemilik, maka segala kebutuhan pertanian ditanggung

petani penggarap, begitu pula dengan kerugian akibat gagal panen. *“Wah, kami di sini lebih suka sistem menyewa daripada bagi hasil. Kalau bagi hasil, selama ini kami tidak pernah untung. Kami sering menanggung segala keperluan pertanian. Pemiliknya tinggal datang pada waktu panen. Mendingan sewa. Untung rugi kita tanggung sendiri. Dan, biasanya lebih untung.”* Oleh karenanya, seperti yang telah disebutkan, sebagian besar petani memilih menyewa daripada bagi hasil.

Di dalam menggarap sawah, mereka tidak sendiri. Sebelum bercocok tanam, mereka menyewa traktor milik orang di Sepanjang – di wilayah tersebut, meski sudah mulai bergeser, tetapi sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian penduduk. Selain karena cepat, dan bila dihitung ongkosnya penggunaan traktor jauh lebih murah.

“...Bila dikerjakan buruh tani, satu bidang memerlukan tiga hingga empat orang. Satu harinya orang dibayar duapuluh lima ribu rupiah, belum lagi sarapan dan makan siang dan ditambah dengan satu bungkus rokok. Dengan traktor, cukup membayar seratus ribu. Uang itu sudah termasuk solar dan makannya. Dengan buruh tani, sawah dikerjakan selama dua hari, dengan traktor cukup sehari.”

Meskipun demikian, tidak semuanya bisa dikerjakan oleh traktor. Dalam memperbaiki saluran air dan pematang sawah, petani penggarap harus turun tangan sendiri. Kegiatan dimulai pagi hari sekitar pukul 07.00, sesudah sarapan (makan pagi) petani keluar rumah dengan menenteng bekal makan siang dalam kantong plastik. *Tas kresek* tersebut berisi *rantang* yang dibungkus dengan *serbet* dan botol *aqua* untuk air putih. Ada nasi dan lauk pauk di dalam *rantang*. Sering pula bekal tersebut dibawa oleh isteri pada waktu siang. Sementara itu, cangkul ada di pundak. Dengan jalan kaki, petani tersebut ke sawah. Tak jarang, petani juga membawa sepeda atau sepeda motor *bebek*. Kalau membawa kendaraan, *tas kresek* ditaruh pada sepeda motor, sedangkan cangkul dibawa melintang di sepeda motor. Sebagian sepeda

motor itu dibawa dari desa asalnya, sebagian lainnya membeli di Surabaya. Mereka membeli sepeda motor yang murah, tidak lebih dari tiga juta rupiah harganya. Sesampainya di sawah, setelah istirahat sebentar, mereka turun ke sawah, mencangkul, dan seterusnya seperti yang ada pada tabel 5.4.

Pada waktu menjelang panen, mereka menjaga sawahnya. Caranya membuat *orang-orangan*, kemudian ditarik tali ke gubuknya. Di tali tersebut diberi bendera warna-warni dari *tas kresek* (merah, hitam dan putih) dan kaleng. Ketika burung *gelatik* yang jumlahnya ratusan hingga di tanamannya, ia dengan segera menarik tali itu, sehingga menimbulkan gerak *orang-orangan* dan bunyi dari kaleng yang saling berbenturan. Terkadang, para petani tersebut berjalan di pinggir sawah dengan membawa kayu dan tanah (*lempung*) yang dibuat berbentuk bulat-bulat. Dengan menancapkan tanah itu ke ujung kayu, petani tersebut kemudian mengayunkan, sehingga tanah terlempar jauh ke sawah dan membuat burung terkejut dan terbang.

Ketika tanaman padi sudah berusia lebih dari tiga bulan, bulir-bulir telah menguning dan padat, para petani mulai memanennya. Untuk mengerjakan tersebut, mereka menggunakan buruh tani laki-laki. Setelah disabit, padi langsung dirontokkan di tempat tersebut. Gabah biasanya telah dibeli oleh tengkulak jauh hari sebelum panen tiba, namun petani sering menjualnya sebagian saja, sebagian yang lain digunakan untuk keperluan sehari-hari. Satu kilogram gabah harganya Rp. 1.050,00, sebidang tanah kurang lebih setengah hingga satu hektar bisa mencapai 2 ton, paling rendah pernah mencapai 17 kwintal saja.

Tabel 6.4.
Kegiatan Petani Penggarap Laki-laki dari Pra-Tanam hingga Paska Panen Padi
Di Surabaya

Pekerjaan Petani	Kegiatan dalam Satu Kali Masa Tanam-Panen (4 bulan)				
	Pra-Tanam	Tanam	Tunggu	Panen	Paska Panen
07.00–08.00	ke sawah	ke sawah	ke sawah	ke sawah	Di rumah, mengeluarkan karung gabah
09.00–10.00			Menyiangi	Sebelum panen di gubuk mengusir burung.	Ke lapangan atau jalan dekat sawah
08.00–12.00	Mencangkul orang men-traktor	Menunggu buruh tani (Wanita) menanam	Narik becak/ke warung (bersama isteri)	Waktu panen menunggu buruh tani menyabit	Menjemur gabah; Nyelep, dan mengumpulkan jerami
12.00–13.00	Makan siang di sawah. Bersama dengan pengemudi traktor, dan buruh tani		Pulang ke rumah untuk makan	Makan siang di sawah. bersama buruh tani.	
13.00–14.00	Istirahat sebentar. tidur siang dan merokok	Tidur siang di gubuk	Tidur siang di rumah/warung	Mengusir burung.	Tidur Siang
14.00–17.00	Mencangkul atau menunggu traktor	Pulang ke rumah, Narik becak atau ke warung	Narik Becak atau ke Warung	Memasukan padi ke dlm karung. Menunggu Tengkulak	Membalik gabah agar keringnya merata Membakar jerami
17.00–20.00	Membayar	Membayar buruh tani. Menutup warung. Menunggu penumpang	Mandi, dan terus Narik becak atau ke Warung	Menghitung jumlah karung gabah, Menerima uang, atau menyimpan dalam rumah.	Memasukkan gabah ke dalam karung.
20.00–04.00	Makan Malam dan Tidur	ke rumah, makan malam dan tidur	Makan malam, nonton TV (bila ada) dan tidur		

Besar kecilnya hasil panen tersebut bergantung pada beberapa hal. Pertama, penggunaan bibit unggul. Sebagian besar mereka menggunakan IR 64 atau *Beramo* (*Mamberamo*) yang berasnya punel dan wangi. Hasilnya besar, namun sering tidak tahan penyakit. Kedua, hal ini bergantung pada pemupukan, bila terlambat atau sedikit, maka hasilnya pun sedikit. Untuk pupuknya, mereka menggunakan pupuk urea. Ketiga, penyakit dan hama, untuk mencegah penyakit mereka memberi pestisida, sedangkan hama, khususnya burung dan tikus, kalau burung dengan menjaga setiap hari sebelum panen. Serangan tikus tidak terlalu besar, seperti di desa. Tikus-tikus itu lebih suka tinggal di got dan di rumah (perumahan). Untuk mencegahnya, mereka memberi racun tikus. Terakhir, gangguan yang sering dihadapi adalah musim hujan. Pada waktu musim hujan, karena salurannya sudah berubah, semakin sempit, sementara itu di daerah sekitarnya (perumahan) lebih tinggi – tepat ditinggikan – sawah sering menjadi *tempat buangan* air hujan, sehingga menggenangi tanaman yang baru berusia satu bulan. Bila tergenang lebih dari tiga hari, maka tanaman itu mati, dan petani pun harus menanam lagi.

Narik Becak atau Buka Warung untuk Mencari Tambahan

Berbeda dengan pekerjaan di luar sektor pertanian, petani lebih memiliki waktu yang longgar. Mereka bekerja pada waktu awal musim tanam, mulai dari merawat tanah dengan membajak, melakukan pembibitan, dan dilanjutkan dengan penanaman. Pada waktu menanam bibit, kaum perempuan melakukannya. Para lelakinya praktis *ngganggur*, cukup mengawasi dan memperhatikan pasokan air. Setelah penanaman, mereka cukup merawat dengan memberi pupuk dan menyiangi (*mantun*) yang dikerjakan. Hal itu berlangsung tidak lebih dari sebulan, setelah itu istirahat, dan pada bulan ketiga mulai persiapan masa panen. Pada waktu musim

panen, mereka mengerjakan seperti dalam tabel 4.4. Pekerjaan semua ini menjadi ringan dan waktu petani penggarap lebih banyak ketika mereka menyerahkan pada buruh tani dan traktor.

Setelah musim tanam, sebenarnya petani juga bisa memanfaatkan untuk mengeringkan gabah, sehingga siap di-*selep*. Masalahnya, kini sebagian besar gabah telah dijual pada waktu panen, hanya sedikit yang dikeringkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga waktu pengolahan hasil panen sedikit menyita waktu. Pada waktu masa tunggu, petani memiliki waktu yang luang, kurang lebih antara satu hingga dua bulan lamanya.

Ada beberapa petani penggarap di Surabaya ini menggunakan waktu tersebut untuk mengurus sawah miliknya di desa. Mereka biasanya merupakan petani *gurem* yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar. *“Kami terpaksa ke Surabaya karena di desa tidak ada lagi sawah yang disewakan. Mereka lebih memilih mengerjakan sendiri. Kalau di sini banyak tanah, tetapi kban tidak ada yang mau jadi petani. Karena itulah, kami memilih menyewa di sini.”* Bila sawah di Surabaya telah ditanami, selebihnya diserahkan pada anak atau istrinya untuk mengawasi, mereka kembali ke desa untuk mengolah tanahnya dan menanaminya, kemudian diserahkan pada anaknya yang lain atau kerabatnya untuk diawasi. Karena jaraknya tidak jauh, mereka bisa bolak-balik antara Surabaya dan daerah asalnya.

Seperti yang telah disebutkan pada tabel 5.4., petani penggarap yang tidak punya sawah di desanya atau buruh tani lebih memilih mengisi waktunya untuk menjadi penarik becak atau masuk ke sektor bangunan, menjadi kuli bangunan di perumahan sekitar sawahnya. Becak tersebut disewa dari pemilik di sekitar tempat tinggalnya dan bisa dibawa pulang. Becak itu disewa dengan membayar setiap hari Rp. 5.000,00 dan segala kerusakan ditanggung penyewa. Mereka bisa menyewa karena ada penghubung yang juga penarik becak. Penghubung tersebut menjadi jaminan atau dasar kepercayaan dari pemilik becak, selain

dilihat pula *keajegan* membayar setoran. Penghubung tersebut adalah tetangganya di Surabaya atau teman sekampungnya (di daerah asalnya). Ada beberapa petani juga membeli becak tersebut seharga satu juta rupiah. Rute mereka antara Pasar Wonokromo hingga ke perumahan sekitar tempat tinggalnya, seperti Gayung Kebonsari, Jambangan dan Ketintang. Satu hari, dari pagi hingga malam hari, dengan istirahat siang hari dan sore hari, mereka bisa mengumpulkan uang (bersih) hingga Rp. 30.000,00.

Pagi hari mereka keluar rumah, menunggu penumpang di perempatan jalan. Memang, mereka harus bersaing dengan *len*, *mikrolet angkutan kota*. Meskipun demikian, mereka nampaknya memiliki segmen tersendiri, biasanya penumpangnya membawa barang yang besar dan berat atau jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 1-3 km dari tempatnya mangkal, sementara itu juga tidak dilalui oleh mikrolet. Bila di perempatan tempat mangkalnya terdapat jumlah penarik becak yang besar, maka diatur di kalangan penarik tersebut secara bergiliran, bahkan mereka membentuk paguyuban penarik becak dan membatasi jumlahnya agar pendapatan stabil. "*Memang rezeki itu yang ngatur Tuhan. Tapi, kalau tidak punya paguyuban, Kalau tidak begitu, semua ingin jadi penarik becak. Padahal jumlah penumpang tetap.*"

Beberapa di antara petani penggarap yang membawa keluarga, khususnya isterinya ke Surabaya dan sedikit modal, membuka warung di sekitar sawah. Warung tersebut didirikan dengan tidak secara permanen, hanya memerlukan *rombong* dengan biaya seharga satu juta rupiah bila baru, atau lima ratus ribu rupiah dengan bahan bekas. Harga tersebut tidak termasuk ongkos kerjanya – *rombong* tersebut dibuat sendiri. *Rombong* itu merupakan kotak besar dengan dua atau tiga roda di bawahnya, sehingga bisa dipindahkan. Di atasnya *rombong* itu diberi empat tonggak untuk menahan *terpal* atau *plastik* sebagai penutup dari panas matahari dan hujan. Di dalam *rombong*, terdapat rongga

kosong untuk barang-barang dan ditutup dengan papan yang dikunci dengan *gembok*.

Malam hari biasanya petani penggarap membawa sepeda motor atau becak berbelanja di Pasar Keputran atau Pasar Wonokromo. Karena berjualan makanan, mereka berbelanja sayuran dan daging, sedangkan rokok bisa diambil pada toko-toko besar dengan harga miring. Jumlah rokok yang dibelinya pun sedikit, hanya cukup untuk satu minggu. Pada waktu subuh isterinya bangun dan menanak nasi, merebus sayuran, biasanya pagi hari menu makanan yang mudah dibuat adalah *pecel*, sedangkan *peyek* sudah dibuat sebelumnya atau diganti dengan *krupuk* putih. Selain *pecel*, biasanya mereka membuat rawon atau masakan Jawa lain yang mudah diolah.

Sekitar jam 6.30 pagi, masakan telah matang, peani penggarap dan isterinya telah *sarapan*, kemudian dengan becak makanan tersebut diangkut, biasanya *rombong*, terutama bila besar, ditinggal di pinggir jalan, sedangkan perlengkapan dibawa pulang. Sekitar jam 7 pagi warungnya sudah buka, pelanggannya biasanya adalah buruh bangunan yang mengerjakan di perumahan. Buruh tersebut biasanya membuat nasi sendiri, tetapi sering pula makan di warung, terlebih lagi bila siang hari (*laut*). Selain buruh, pembelinya juga orang-orang perumahan yang tidak sempat membuat sarapan pagi, dan orang yang melewati jalan tersebut (baik berangkat kerja ke kantor atau pada waktu pulang).

Pulang Kampung Membawa Uang dan Harga Diri

Seperti yang disebutkan pada bagian awal bab ini, selain dari Surabaya, mereka berasal dari kota-kota di sekitar Surabaya, seperti daerah Pantura (Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan), ada pula yang berasal dari Jawa Pedalaman (Kab. Nganjuk dan Kab. Tulungagung). Jarak antara kota-kota tersebut dan Surabaya tidak lebih dari 200 km. Seperti halnya di kota-kota besar lainnya,

arus transportasi umum dari dan ke Surabaya hampir tidak pernah berhenti. Terminal bus Surabaya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo untuk bagian Timur dan Jawa Pedalaman, yaitu di Terminal *Bungurasih* (Purabaya), sedangkan kendaraan umum dari kota-kota Pantura di sebelah kota Surabaya berhenti terakhir di Terminal Osowilangun. Dari Terminal Osowilangun, terdapat bis kota lewat jalan tol ke Terminal Bungurasih, akan tetapi pada waktu malam hari (lebih dari pukul 18.00) kendaraan umum tersebut, dalam hal ini bis langsung ke Terminal Bungurasih, karena tidak ada kendaraan yang masuk ke Surabaya dari terminal tersebut.

Oleh karenanya, kebutuhan mereka untuk pulang kampung sudah tidak menjadi kendala. Beberapa pun orang yang akan menempuh perjalanan ke luar Surabaya akan dilayani dalam Terminal Bungurasih. Namun demikian, pada waktu menjelang hari raya calon penumpang akan berdesak-desakan dan berebut kendaraan (bis) ke tempat asalnya. Jalan-jalan ke luar kota pun menjadi padat. Biasanya, pemudik menyiasati pulang pada waktu hari H, pasti Terminal Bungurasih akan nampak lengang. Kota-kota daerah asal dari petani penggarap ini bisa ditempuh dalam waktu 3 jam pada siang hari dan 2 – 2,5 pada waktu pagi hari. Kecuali ke Bojonegoro, kendaraan umum (bis) selalu ada. Kendaraan ke Bojonegoro hanya terbatas dari pagi hari hingga pukul tujuh malam.

Beberapa petani penggarap yang memiliki sawah di daerah asalnya masih memiliki ikatan yang kuat dengan daerahnya. Mereka kembali ke daerah asal tidak tergantung pada waktu hari raya. Keharusan kembali pada waktu hari raya memang merupakan tradisi budaya petani. Menurut Eric Wolf (1985), tradisi ini mengikat kembali hubungan antar individu, antara individu dan keluarga, antar keluarga, dalam pola interaksi kemasyarakatan. Ketidakhadiran individu akibat perpindahan ke kota mengurangi interaksinya dengan masyarakat se-desanya, renggang dan perlu

diikat kembali. Hal yang sama dicermati oleh Clifford Geertz (1989), ikatan hubungan itu tidak saja kepada saudara dan tetangganya yang masih hidup, tetapi juga kepada leluhurnya yang dimulai pada waktu menjelang puasa, yaitu *nyadran*. Dalam aktivitas membersihkan kubur ini, seluruh jaringan kekerabatan *alur waris* tersambung kembali. Sementara itu, *rijaya* bukan sekedar *idul fitri*, perayaan satu syawal sebagai tanda berakhirnya bulan puasa dan kembali ke *fitrah*-nya, tetapi sebagai *slametan urip*, ucapan syukur atas keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga. Semua individu didamaikan, direkat kembali sebagai komunitas petani yang telah bergeser.

Kewajiban-kewajiban sosial inilah masih melekat, meski mereka telah berpindah ke kota sekalipun. Namun, pada kasus ini sebagian petani penggarap yang didesanya sebagai petani gurem memiliki ikatan yang lebih kuat karena tanah yang dimilikinya. Tanah tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan pada kerabatnya, anak, isteri atau tetangganya untuk dikerjakan, tetapi setelah habis tanam di Surabaya ia pergi ke desa untuk mengolah tanah dan menanam padi di lahannya. Hal itu bisa berlangsung selama satu minggu lamanya, sementara itu lahan di Surabaya akan dijaga oleh buruh tani, sesama petani penggarap se-desa atau isteri dan anak-anaknya.

Pada waktu pulang ke desa dalam keperluan ini, mereka membawa uang secukupnya dan sedikit oleh-oleh untuk kerabatnya. Ketika kembali ke Surabaya, sering pula mereka membawa hasil bumi dari desanya, seperti kelapa dan beras. Berbeda pula pada waktu hari raya, mereka akan membawa uang dan oleh-oleh yang jauh lebih banyak. Di luar uang tranpor, uang saku mereka bisa mencapai di atas satu juta rupiah (informan enggan menyebut besar riil nilai uang tersebut).

Karena biasanya kembali ke Surabaya seminggu setelah lebaran, semua harta bendanya ditiptkan agar dicuri. Bila memiliki warung, maka rombongan dibawa pulang ke tempat

kontrakan, begitu pula becak dikembalikan ke pemiliknya atau diparkirkan di Wonokromo dengan sistem harian. Untuk rumah berikut isinya, mereka serahkan kepada pemilik rumah untuk menjaganya (*"dereke titip"*). Pemilik biasanya tinggal tidak di lingkungan/pekarangan rumah tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, petani tersebut menyediakan khusus oleh-oleh dari desa dan diberikan pada saat kembali dari desa.

Penutup:

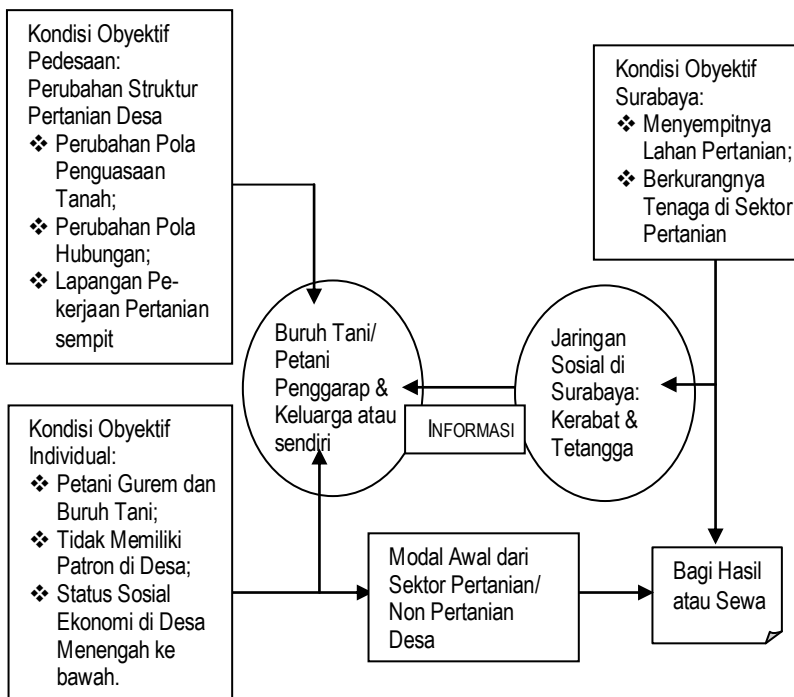
Analisis Ringkas tentang Sektor Pertanian di Kota

Pergeseran struktur penggunaan lahan di perkotaan sebenarnya terjadi tidak saja di Surabaya, tetapi seluruh kota di Indonesia. Bila dalam catatan sejarah, daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat semula merupakan daerah pertanian yang subur, masyarakat aslinya, Betawi, merupakan petani buah yang andal. Namun, pada tahun 1960-an hingga sekarang telah terjadi alih fungsi lahan menjadi bangunan perkantoran dan perumahan, dan sebagian lain menjadi pabrik. Sawah Besar di dekat wilayah Gambir dan Kebon Jeruk tinggal nama yang mengingatkan fungsi lahan tersebut, begitu pula kampung Condet yang semula dipertahankan keasliannya telah mulai menghilang (perhatikan kasus petani buah di Jakarta oleh Koentjaraningrat, 1976: 97-188). Penetapan cagar budaya tersebut hanya memberi sedikit rintangan arus alih fungsi lahan. Kini, masyarakat Betawi tergusur ke Selatan, ke arah Depok, seperti Setu Babakan, Srengseng Sawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan (*Jawa Pos*, 26 Oktober 2004, "Pariwisata. Pemprov Dirikan Museum Betawi"), meskipun terdapat pula kantong-kantong di perkotaan. Untuk mempertahankan eksistensi kulturalnya, mereka membentuk organisasi kemasyarakatan, *Forum Betawi Rempug*.

Begitu pula yang digambarkan oleh Setyobudi (2001) di Yogyakarta, sawah-sawah lambat laun mulai menghilang dari kota

tersebut. Salah satu di antaranya yang mempercepat proses tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar. Jalan lingkar tersebut kemudian memudahkan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan. Wilayah Sleman dan Bantul di pinggir kota Yogyakarta telah berubah menjadi perumahan dan kampus. Hal yang sama terjadi di Semarang, Medan, Makasar dan kota-kota lain di Indonesia. Artinya, jumlah petani di kota pun lambat laun juga berkurang dan menghilang, pekerjaan tersebut menjadi langka. Mereka yang tidak mempunyai akses ekonomi perkotaan akibat kondisi strukturalnya, seperti pendidikan, akan memasuki sektor informal dan sektor yang kurang lebih serupa, yaitu menjadi buruh bangunan.

Bagan 6.1.
Perubahan dari Petani Desa ke Petani Kota



Sementara itu, di wilayah pedesaan, seperti yang telah dicermati oleh ahli-ahli pedesaan, telah terjadi perubahan struktur penguasaan tanah. Mulanya, perubahan itu disebabkan pola pewarisan kemudian diikuti oleh perumitan-perumitan pengolahan sebagai strategi adaptifnya. Pola yang demikian ini diistilahkan oleh Clifford Geertz (1983) sebagai *invulasi pertanian*. Pada tahap selanjutnya, revolusi hijau dan biru telah menciptakan komersialisasi dalam pertanian, hubungan patron-klien menjadi runtuh, dan terus berlanjut hingga memunculkan polarisasi penguasaan tanah (lihat Wiradi, 1985) dan petani berdasi.

Akibatnya, kelompok petani gurem dan buruh tani tidak memiliki akses ekonomi di lingkungan sendiri. Dengan jaringan sosial yang dimilikinya, mereka berpindah ke kota, terlepas ada tidaknya tujuan awal untuk memasuki sektor formal (industri) atau telah ada kesadaran (empati) atas kemampuannya untuk memasuki sektor pertanian di kota, buruh pabrik dan buruh bangunan. Di dalam kasus penelitian ini, mereka memasuki sektor pertanian yang “sudah” ditinggalkan oleh masyarakat kota, kecuali mereka yang masih bertahan, meski hanya menjadi buruh tani. Dengan modal yang dibawa dari desa, mereka tidak lain menjadi buruh tani semata tetapi telah menjadi petani penggarap.

Menjadi petani penggarap merupakan salah satu strategi adaptif mereka di perkotaan. Ada strategi lainnya, yaitu membuka warung dan narik becak. Pekerjaan yang mudah dan/atau tidak jauh dari lingkungan pedesaannya. Hasilnya, selain untuk mengembangkan bodal usaha, mereka juga mengirimkannya ke daerah asalnya, bahkan ada pula yang menabung dan berharap dapat membeli sawah tersebut dari pemilik lahan tersebut. Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi daya tarik bagi mereka yang memiliki keahlian yang sesuai dengan sektor ekonomi perkotaan, tetapi juga menghimpun mereka yang tidak memiliki keahlian.

Daftar Pustaka

Assafitri, Nur Laily.

2004 Tradisi Tegal Desa di Kelurahan Gades, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya tahun 1970-2000. **Skripsi**. Surabaya: FIS-Unesa.

BPS Jawa Timur

1998 **Jawa Timur dalam Angka 1997**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

2000 **Jawa Timur dalam Angka 1999**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

2001 **Jawa Timur dalam Angka 2000**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

2003 **Jawa Timur dalam Angka 2002**. Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

Faber, G.H. von.,

1931 **Oud Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's eeste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van gemeenteraad (1906).

1933 **Nieuw Soerabaia**. De Geschiedenis van Indie's voornamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931.

Geertz, Clifford.

1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia**. Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

1989 **Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa**. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta; Pustaka Jaya.

Handinoto.

1996 **Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940**. Yogyakarta: Andi.

Ismawan, Bambang.

1985 Pendidikan yang Diperlukan untuk Pengembangan Pedesaan. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: Rajawali.

Koentjaraningrat.

1976 Petani Buah-buahan di Selatan Jakarta. Dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat, **Indonesia. Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia.

Kroef, Justus M. van der.

1984 Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. **Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa**. Jakarta: Gramedia.

Kustiwan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1 Tahun XXVI.

Labib, Muhammad.

1990 Beberapa Masalah Kebijakan Perbaikan Pemukiman di Perkampungan Kota Surabaya. **Masyarakat, Kebudayaan dan Politik**. No. 4 tahun III. Surabaya: FISIP Unair.

Lee, Everett S.,

1980 **Suatu Teori Migrasi**. Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta: PPSK UGM.

Mubyarto,

1991 **Menerawang Masa Depan Pertanian Indonesia**. dalam Mubyarto, et.al. Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan. Yogyakarta: P3PK UGM.

Putra, Shri Ahimsa.

1985 Urbanisasi sebagai Proses Budaya. **Bulletin Antropologi**. No. 1.

Rusli, Said.

1985 **Pengantar Ilmu Kependudukan**. Jakarta: LP3ES.

Setyobudi, Imam.

2001 **Menari di Antara Sawah dan Kota. Ambiguitas Diri, Petani-petani Terakhir di Yogyakarta**. Magelang: Inodnesiatera.

Sukadana, A.Adi.

1983 **Antropo-ekologi**. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekadri, Heru.

1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan**. Surabaya: IKIP Surabaya.

Tjandrasasmita, Uka.

2000 **Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia**. Kudus: Menara Kudus.

Todaro, Michael P., dan Jerry Stilkind.

1991 Dilema Urbanisasi. Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota**. Jakarta: Gramedia.

124 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Verslag van den Toestand der Stadsgemeente Soerabaja over 1930.
Weltevreden-Soerabaja: NV Koninklijke Boekhandel en Drukkerijen G.
Kolff & Co.

Weber, Max.

1977 Apa yang disebut Kota? Dalam Sartono Kartodirdjo. **Masyarakat Kuno dalam Kelompok-kelompok Sosial.** Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Wolf, Eric.

1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Jakarta: Rajawali.

Wiradi, Gunawan.

1984 Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.** Jakarta: Rajawali.

Bab 7

Petugas *Cleaning Service*

Berharap di Sektor “Formal”, meski Harus Cerdik dan Tabah

Sugeng Harianto, FX Sri Sadewo,
dan Arief Sudrajat

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi fenomena perkotaan yang selalu hadir. Dilihat dari jumlahnya, kemiskinan di perkotaan akan bertambah karena dua hal yaitu: pertama, penambahan alamiah—lebih banyak kelahiran daripada kematian, dan yang kedua, migrasi orang-orang pedesaan yang miskin ke kota. Dengan kata lain, golongan miskin di kota-kota besar di Indonesia meliputi para migran dan orang-orang yang lahir di sana. Jumlahnya sangat tergantung dari definisi yang diberikan kepada kemiskinan. Collin Clark dan Sayogyo mengajukan ukuran yang hampir sama untuk mengukur kemiskinan. Sayogyo (1978: 3-14), misalnya, mengukur kemiskinan dengan menggunakan ukuran setara dengan beras. Orang disebut miskin jika penghasilannya kurang dari 320 kg beras di desa dan kurang dari 480 kg beras di kota tiap jiwa tiap tahun. Sayogyo juga membedakan golongan berpenghasilan rendah ini menjadi tiga kategori yaitu: miskin, miskin sekali, dan sangat miskin. Namun ukuran ini tak dapat menjelaskan meningkatnya jenis kebutuhan pokok lainnya, yang tentunya ikut berubah dengan meningkatnya pendapatan.

Collin Clark, seperti dikutip oleh Papanek (1986: 223) menggunakan ukuran nilai gizi yang dibutuhkan oleh setiap orang setiap hari. Yang dibutuhkan oleh setiap orang sehari adalah 1.821 kalori. Untuk memenuhinya dibutuhkan beras per tahun 320 kg atau 0,88 kg per hari. Clark hanya memfokuskan kebutuhan makan, kebutuhan lainnya diabaikan.

BPS (Biro Pusat Statistik) memperbaiki ukuran tersebut dengan menambahkan komponen konsumsi non-pangan. BPS menggunakan ukuran setara dengan 2.100 kalori dan menambah komponen konsumsi non-pangan sebesar 6,12% hingga 17,96%. Ukuran ini sebenarnya menggunakan kriteria kebutuhan pangan minimum (*emergency food budget*), yang hanya layak diberlakukan pada situasi darurat.

Jumlah orang miskin di perkotaan sangat tergantung pada ukuran-ukuran tersebut. Jika nilai dari ukuran-ukuran itu diturunkan, maka jumlah orang miskin juga akan turun, demikian sebaliknya. Mereka yang termasuk dalam golongan berpenghasilan rendah ini adalah orang kecil yang bukan orang elit dan bukan orang kelas menengah. Mereka adalah pekerja yang tidak terdidik atau berpendidikan rendah, pegawai rendah, penjaja, tukang becak, pekerja kebersihan, dan *element of lumpen proletariat who are characterized by their struggle to make ends meet simply in order to to fulfill their subsistence needs* (Cohen, 1975: 51).

Golongan berpenghasilan rendah ini adalah sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat, daerah atau negara, yang mendapatkan penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan minimum yang seharusnya mereka penuhi. Mereka, baik pendatang maupun bukan pendatang, mempunyai cara hidup atau kebudayaan sendiri yang berbeda dengan cara hidup atau kebudayaan golongan berpenghasilan tinggi. Yang dimaksudkan kebudayaan di sini adalah kebudayaan kemiskinan yang terwujud dalam lingkungan kemiskinan yang mereka hadapi. Dengan

kebudayaan kemiskinan ini mereka dapat terus mempertahankan kehidupannya.

Di Indonesia penelitian tentang kemiskinan di perkotaan sudah cukup banyak. Misalnya, pada pertengahan tahun 1980-an sepuluh peneliti peserta PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial) Jakarta melakukan penelitian secara terpadu tentang kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah di tiga wilayah di Jakarta Timur, yaitu: Pulogadung, Jatinegara, dan Klender. Mereka di antaranya Sundoyo Pitomo, Bambang S. Sunuharyo, Agusfidar Nasution, Endang Purwaningsih (lihat Sumardi dan Evers, 1985). Penelitian-penelitian tersebut menentukan apa saja yang oleh penduduk berpendapatan rendah di Jakarta dianggap sebagai kebutuhan dasar, dan seberapa jauh mereka merasa puas, di samping perekonomian rumahtangga di perkotaan. Beberapa aspek kebutuhan dasar yang diteliti oleh peneliti peserta PLPIIS antara lain: aspek pengeluaran dan pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang intensif.

Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah merasa tidak cukup penghasilan dan penerimaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka membuat skala prioritas kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan pangan menempati urutan pertama. Hasil yang hampir sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh LP3ES dan FEUI (lihat Papanek dan Jakti, 1986). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan penduduk berpenghasilan rendah dibelanjakan untuk keperluan makan dan rokok. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada masyarakat berpenghasilan rendah proporsi terbesar dari pendapatannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan.

Penelitian Evers (1993) terhadap 1.201 rumahtangga di dua daerah hunian liar di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat

“produksi subsisten di kota” untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk berpenghasilan rendah. Produksi subsisten umumnya terwujud dalam produksi pangan, termasuk perikanan dan memelihara ternak. Lea Jelinek (1995) selama tigabelas tahun melakukan pengamatan tentang sebuah kampung di Jakarta mulai muncul, kembang hingga punah. Kampung itu Kampung Kebun Kacang. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana sebuah komunitas miskin di kampung itu mencoba bertahan di tengah-tengah upaya pemerintah kota untuk meratakan kampung itu. Murray (1994) dan Effendi (1993) melakukan penelitian terhadap kampung miskin di dua lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan antropologis Murray meneliti Kelurahan Manggarai dan Bangka untuk melihat dampak pembangunan terhadap kehidupan warga kampung miskin. Penelitian ini memfokuskan pada wanita yang dilihatnya sebagai hasil dari proses pembangunan. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak wanita bekerja di sektor informal, bahkan ditemukan banyak wanita yang berorientasi pada kebudayaan metropolis dengan menjadikan dirinya komoditas seksual. Effendi dalam penelitiannya memfokuskan pada pelacur, gali, dan pengusaha warung di daerah Wonosito Kotamadya Yogyakarta. Meskipun penelitian Effendi ini sudah mengungkap bagaimana masyarakat Wonosito mampu mempertahankan kehidupannya dengan membentuk sistem kehidupan, namun tidak secara khusus meneliti bagaimana mereka mempertahankan hidup. Penelitian Effendi ini dilengkapi oleh penelitian Chris Manning dan kawan-kawan (1996) di kota yang sama, tetapi fokusnya berbeda. Penelitian Manning memfokuskan pada kegunaan sector informal bagi analisis perilaku ekonomi dan struktur social ekonomi di kota dengan mengamati struktur pekerjaan dan kaitannya dengan tingkat penghasilan, stabilitas pekerjaan, dan status social ekonomi keluarga pada sebuah masyarakat kota.

Masih banyak penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan tentang penduduk miskin di perkotaan, antara lain: Gavin Jones (1986) dengan “Demografi dalam Kemiskinan di Kota, Graeme Hugo (1986) “Migrasi Sirkuler,” Gordon Temple (1986) “Migrasi ke Jakarta,” Lea Jelinek (1986) “Sistem Pondok dan Migrasi Sirkuler,” dan John L. Taylor (1993), “Kampung-kampung Miskin dan Tempat Pengelompokan Penghuni Liar di Kota-kota Asia Tenggara,” serta P de Angelino (1993) “Perbudakan Melalui Hutang Buruh pada Perusahaan Batik di Jawa.” Penelitian dan tulisan itu mengungkap dan menganalisis berbagai aspek dari kehidupan masyarakat miskin di perkotaan, namun belum ada yang secara khusus memfokuskan pada upaya yang dikembangkan oleh penduduk berpenghasilan rendah untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah kerasnya persaingan hidup di kota. Karena itu, penelitian ini akan mencoba memfokuskan pada upaya-upaya yang dibangun penduduk berpenghasilan rendah, dalam hal ini pekerja kebersihan, untuk mempertahankan kehidupannya di kota Surabaya ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004.¹⁰ Penelitian tentang upaya bertahan hidup petugas *cleaning service* ini mengambil lokasi di Surabaya. Ada beberapa alasan secara metodologis pemilihan lokasi tersebut. Pertama Surabaya sebagai kota besar, kemiskinan menjadi persoalan serius dan proporsi orang miskin di kota ini juga cukup besar. Surabaya dipilih diharapkan dapat menggambarkan karakteristik kemiskinan kota. Kedua, peneliti sudah cukup lama bertempat tinggal di Surabaya, sehingga pengetahuan tentang lokasi dan masalah kemiskinan cukup

¹⁰ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Arief Sudrajat.

memadai. Pengetahuan seperti ini penting untuk memperlancar proses penelitian secara intensif dan peneliti dapat mendalami masalah yang sedang diteliti. Pertimbangan lain adalah dari aspek biaya, tenaga dan waktu. Di dalam penelitian ini yang menjadi *informan* adalah tenaga-tenaga kebersihan yang sehari-hari bekerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Karena jumlah tenaga kebersihan di Universitas Negeri Surabaya jumlahnya hanya 40 orang, maka dalam penelitian ini ada sejumlah pekerja diwawancara secara mendalam. Melalui wawancara dan pengamatan, pada setiap informan disusun *life history* yang menggambarkan mulai dari proses migrasi, pemilihan pekerjaan hingga upaya bertahan hidup, mulai dari pencarian pekerjaan tambahan hingga pengeluaran untuk biaya hidupnya.

Fungsi dari Waktu Kerja Berlebih dan Pendapatan

Kehidupan yang keras diperkotaan memungkinkan banyak orang memiliki siasat untuk mempertahankan kehidupan kesehariannya. Demikian juga yang telah dilakukan oleh sebagian besar pekerja *cleaning service*. Model siasat yang dibangun oleh mereka beragam tergantung situasi dan kondisi individu tersebut. Secara umum, pekerjaan *cleaning service* di Unesa dijadwalkan bekerja sejak hari Senin hingga hari Jum'at dan dimulai pukul 06.30 sampai 12.00, kemudian istirahat dan dilanjutkan bekerja mulai jam 13.00 sampai 15.00. Pada hari Sabtu dan Minggu, mereka dibebaskan bekerja dan merupakan hari libur mereka. Hari kerja ini terkait dengan perkuliahan mahasiswa dan jam kerja di Unesa.

Begitu ketatnya jadwal yang dibuat untuk mereka ternyata tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Setiap pekerja mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 325.000,- setiap bulannya. Uang sebesar itu bagi masing-masing pekerja harus diterima dengan lapang dada dan dimanfaatkan secara efisien. Kemampu-

an melakukan efisiensi terhadap penghasilan yang sangat kecil menciptakan berbagai bentuk kekreativitasan bagaimana mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan hidup.

Para pekerja cleaning service di UNESA tidak didominasi oleh satu kelompok atau jenis kelamin tertentu, namun terdiri dari beragam kelompok maupun jenis kelamin. Kelompok-kelompok tersebut terpilah ke dalam kelompok para bujangan yang tidak memiliki keluarga di Surabaya, kelompok bujangan yang bertempat tinggal di Surabaya, kelompok berkeluarga laki-laki, kelompok berkeluarga perempuan.



Gambar 7.1.
Seragam: Formalisasi Tukang Kebun

Siasat Kemiskinan Bujangan: Antara Hidup Menumpang dan Membangun Relasi

Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pengaman Sosial

Perkembangan yang sangat pesat yang terjadi di kota Surabaya, ternyata tidak begitu saja meminggirkan berbagai lembaga semacam pondok pesantren, bahkan kehadiran lembaga pondok pesantren sering merupakan acuan penting bagi para pendatang migran dari luar Surabaya. Hal itu disebabkan pondok pesantren memiliki tradisi yang kental untuk selalu saling membantu terhadap sesama terlebih terhadap para musafir yang memang menurut ajaran agama perlu dibantu. Pandangan orang-orang pondok pesantren yang baik dan selalu menyambut dengan tangan terbuka terhadap para pendatang memungkinkan beberapa pendatang dapat singgah dan tinggal di beberapa pondok pesantren yang tersebar di seluruh kota Surabaya.

Demikian juga dalam pandangan beberapa pekerja *cleaning service* di UNESA, menurut mereka, lembaga pondok pesantren merupakan lembaga yang sedikit banyak dapat membantu kehidupan mereka pada masa-masa awal menjalani kehidupan dan tinggal di kota Surabaya. Pondok pesantren merupakan tumpuan harapan awal mereka. Di samping bekerja di UNESA, mereka dapat mengaji di malam harinya.

Dari beberapa pondok pesantren yang tersebar di sekitar UNESA, Pondok Pesantren Al Idris yang berada di daerah Karangrejo Lama merupakan satu-satunya pondok pesantren yang bersedia menampung beberapa pekerja *cleaning service* untuk tinggal dan mengabdikan di tempat itu. Seluruh pekerja *cleaning service* yang diijinkan tinggal di dalam Pondok Pesantren Al Idris tersebut merupakan kelompok para bujangan dan mereka berasal dari luar kota.

Rencana kedatangan pertama mereka ke Surabaya, sejak awal memang berkeinginan untuk bertempat tinggal di pondok

pesantren. Dengan tinggal di pesantren, di samping dapat bekerja di luar pondok, mereka dapat mengabdikan dan mengaji. Bahkan menurut mereka, dengan tinggal di pondok, mereka dapat segera memecahkan berbagai permasalahan hidup pelik yang mereka hadapi setiap hari karena suasana pondok yang penuh kekeluargaan dan saling bantu membantu sangat mendukung. Apalagi suasana kota Surabaya bagi pekerja *cleaning service* dianggap sebagai kota yang asing dan penuh kekerasan.

Prosedure untuk bisa tinggal di pondok pesantren tidaklah mudah. Seseorang dapat membangun hubungan dengan secara langsung menemui kyai pondok pesantren tersebut atau diantar oleh seorang kenalan yang telah terlebih dahulu mondok di tempat itu untuk menemui kyainya. Meski hubungan telah dibangun, para pekerja *cleaning service* tidak bisa begitu saja langsung mendapatkan kamar atau ruang sendiri namun mereka harus mengawalinya dengan proses pengabdian yaitu dengan membantu berbagai macam pekerjaan di pondok terlebih dahulu. Namun pada umumnya para pekerja ini membantu membersihkan seluruh wilayah pondok yang ditempati. Selepas mereka membantu pekerjaan di pondok seperti membersihkan, mereka juga ikut mengaji dan malamnya mereka menginap di tempat seadanya yang ada di ruang-ruang kosong pondok tersebut seperti istirahat di halaman belakang masjid pondok.

Atas jasa para pekerja tersebut ikut mengabdikan membersihkan pondok setiap hari, akhirnya usaha mendapatkan respon dari pemilik pondok. Sebagai imbalan dari kyai atau pengurus pondok, mereka akhirnya mendapatkan ruang atau kamar apa adanya untuk istirahat tanpa dibebani dengan uang biaya hunian setiap bulan. Penerimaan yang total dari pihak pondok terhadap kehadiran mereka di wilayah pondok pesantren, bagi mereka begitu sangat berharga. Bagaimanapun dengan dibebaskannya mereka dari uang pembayaran hunian, mereka dapat menghemat uang yang sedianya akan dialokasikan sebagai uang kost. Implikasinya,

para pekerja dapat menabung dan uang yang mereka kumpulkan akan mereka berikan kepada keluarga yang ada di desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anang: *“Habis bekerja di UNESA, saya juga bersih-bersih di pondok. Jadi saya nempati pondok ini tidak dipungut biaya. Lumayan mas, yang penting ada tempat tidur, daripada ngekost. Duitnya nanti kan bisa dikirim ke orang tua”*.

Di balik keleluasaan para pekerja tinggal di pondok, bagaimanapun membawa konsekuensi bagi kehidupan kesehariannya. Dibandingkan dengan teman-teman pekerja lainnya, Anang merupakan salah satu pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaan sampingan. Hal itu disebabkan, selepas dia bekerja dari UNESA, ia harus melakukan kewajibannya di pondok. Waktunya habis untuk membersihkan pondok. Implikasinya, penghasilan yang ia dapatkan hanya sebatas yang ia terima dari UNESA. Di luar itu tidak ada penghasilan sama-sekali. Bagi Anang, dengan melakukan pekerjaan sambil berarti ia telah merusak akad yang telah dibuat dengan pemilik pondok. Sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan dengan pemilik pondok yang telah memberi keleluasaan menginap di sana, anang menerima dengan ikhlas jumlah penghasilan yang hanya sebesar ia terima dari UNESA saja. Di samping itu ia bisa beribadah di pondok itu.

Agar jumlah uang yang ia tabung setiap bulan dapat berlebih, Anang dan teman-temannya perlu menyiasatnya yaitu dengan mengurangi tingkat konsumsi sehari-hari dan mengatur uang makan sehari-hari. Caranya yaitu bekerja sama dengan teman di pondok untuk masak bersama. Biaya yang dikeluarkan untuk masak bersama dapat lebih ditekan bila dibandingkan dengan membeli makanan dari luar.

Membangun Relasi dengan Mandor

Kehadiran Mandor pekerja tidak selamanya mencitrakan suatu sosok yang menakutkan bagi para pekerja *cleaning service*.

Meski ada beberapa pekerja yang masih menganggap posisi mandor sebagai posisi yang menakutkan namun ada beberapa pekerja yang menganggap kehadiran para mandor sebagai *partner* bekerja. Tugas mandor adalah mengawasi para pekerja yaitu dengan melakukan proses absensi beberapa kali dalam sehari. Adanya deskripsi pekerjaan mandor seperti inilah, menurut beberapa pekerja sangat ditakuti. Bagaimanapun pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat mandor menyebabkan para pekerja akan diperingatkan, mengulangi pekerjaan bahkan akan menerima gaji yang tidak seperti biasanya atau dikurangi. “*Mas, lha wong saben dino diprekso karo mandore, yo gak iso nyelintung titik*” (Mas, karena setiap hari diperiksa oleh mandor, ya tidak bisa menyimpang sedikit)

Bagi Farid, adanya ancaman semacam itu tidak perlu ditakuti namun memang merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Kalau memang para pekerja serius bekerja, maka hal-hal yang mereka takuti tidak akan terjadi, misalnya bekerja dengan bersih atau selalu tidak pernah absen. Ia menunjukkan bahwa dirinya yang tidak pernah melanggar aturan yang dibuat oleh mandor, hingga saat ini tidak pernah mendapatkan sanksi dari para mandor. Baginya bekerja sebagai cleaning service di UNESA, merupakan pekerjaan yang menyenangkan bahkan menurutnya merupakan peningkatan karier. Hal ini disebabkan, sebelumnya ia bekerja di pabrik Palet Pasuruan (pabrik pembuatan kotak dari kayu untuk bok susu) selama beberapa tahun namun hanya digaji sebesar Rp. 200.000,-. Jadi buat apa ia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Gaji yang telah didapatkan pun mengalami peningkatan. Hal ini perlu disukuri.

Bahkan ia mampu menjalin hubungan dengan mandor secara baik. Hasilnya, Farid sekarang dapat tinggal di kamar yang disediakan oleh mandor. Kamar yang disediakan oleh mandor memang tidak cukup besar namun sudah lebih dari cukup bila

dibandingkan dengan mereka harus mencari kamar sendiri yaitu kost. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya penginapan. Tentu tidak murah untuk harga sebuah kamar di wilayah ketintang dan sekitarnya. Meskipun ia telah mendapatkan fasilitas penginapan, ia masih harus mengeluarkan biaya untuk listrik dan air setiap bulan. Mandor yang telah menyediakan tempat tinggal di wilayah Ketintang Madya II, bahkan seringkali memberinya ijin cuti untuk pulang kampung. Apakah ini bukan suatu manifestasi kebaikan mandor yang seringkali di anggap sebagai orang yang galak.



Gambar 7.2.
Mengharap Rezeki dari Sampah

Keberadaan fasilitas penginapan yang disediakan mandor, membuat Farid dapat menabung. Hanya saja selama ia tinggal di situ, ia tidak dapat meningkatkan nilai tabungannya karena tidak

memiliki pekerjaan sambilan. Pekerjaannya sehari-hari selama tinggal di Surabaya hanyalah sebagai pekerja *cleaning service*. Hal itu merupakan wujud dari kesetiaannya kepada mandor tersebut. Untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya, ia agak *sungekan* kepada mandor yang telah berbaik hati kepadanya. Di samping itu, ia juga bingung ingin bekerja apa bila seandainya pak mandor mengizinkan ia bekerja sambilan. Apalagi tingkat pendidikannya hanya sebatas SMP saja dan ia tidak banyak memiliki hubungan dengan orang lain karena ia berasal dari luar kota yaitu Pasuruan. Paling-paling ia kembali jadi pekerja *cleaning service* di tempat lain, bahkan bisa-bisa terjadi bentrokan jawal.

Kost Bareng, Urunan Mbayar

Memang tidak semua bujangan pekerja *cleaning service* UNESA yang berasal dari luar kota Surabaya, seberuntung dengan rekannya yang berhasil membangun hubungan dengan mandor maupun dengan rekannya yang diijinkan untuk tinggal di pondok pesantren sehingga rekan-rekannya tersebut dapat mengurangi tingkat pengeluarannya untuk biaya penginapan.

Bagi mereka yang tidak beruntung mendapatkan fasilitas penginapan bagaimanapun juga mereka harus mencari kost untuk bisa tinggal di Surabaya. Pilihan kost adalah pilihan yang rasional bila dibandingkan harus nglaju dari tempat tinggalnya ke tempat kerjanya. Hampir semua pekerja *cleaning service* UNESA yang mengambil kost sebagai tempat tinggal berasal dari luar kota Surabaya yang jauh jaraknya seperti Blitar, Nganjuk, Bojonegoro, dan Caruban dll. Dengan begitu, pilihan *nglaju* merupakan pilihan yang tidak rasional karena akan menghabiskan uang penghasilan mereka dalam beberapa hari. Implikasinya, mereka tidak bisa menabung dan selalu kehabisan uang untuk biaya transportasi.

Pilihan untuk mengambil kamar kost sebenarnya merupakan pilihan yang sangat berat karena biaya sewanya yang cukup tinggi untuk daerah Ketintang. Biaya kost-kostan untuk daerah Ketintang Madya yang ditempati beberapa pekerja *cleaning service* UNESA sudah berkisar antara Rp. 75.000,- sampai 100.000,- per bulannya. Belum lagi biaya yang lain seperti listrik dan air.

Mengingat biaya yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan untuk bisa tinggal di wilayah tersebut, maka pilihan mengambil kost sendiri merupakan pilihan yang sangat tidak rasional. Hal ini disebabkan, biaya yang mesti dikeluarkan harus ditanggung sendiri. Namun bila biaya yang harus dikeluarkan tersebut ditanggung bersama-sama, maka pilihan untuk kost tersebut merupakan pilihan yang sangat rasional.

Walaupun tidak semua tempat tinggal yang dikostkan itu mengijinkan untuk ditempati atau disewa untuk beberapa orang. Namun, kalau pekerja *cleaning service* jeli, mereka segera dapat menemukan. Implikasinya, biaya yang mesti mereka keluarkan untuk penginapan akan berkurang. Bahkan, ketika pemilik kamar segera akan menaikkan biaya sewa kamar tersebut bila dihuni lebih dari satu orang, bagaimanapun, biaya tersebut akan tampak lebih murah karena ditanggung berdua atau bertiga. Dengan begitu, sisa uang penghasilannya dapat digunakan untuk keperluan lain atau ditabung oleh masing-masing pekerja.

Uang sewa akan dibayarkan jika para pekerja sudah mendapatkan gaji. Beberapa pemilik rumah sudah memaklumi kebiasaan dan kemampuan ekonomi para pekerja *cleaning service* tersebut sehingga mereka tidak mensyaratkan mereka untuk membayar uang kost di depan atau harus membayar selama satu tahun di muka sekaligus. Di samping uang kost, mereka dibebani dengan uang listrik dan air yang dapat dibayar menjadi satu dengan uang kost atau masih dihitung perbulan tergantung biaya yang akan dibayar tuan rumah ke PLN atau PAM. Hal ini

disebabkan akhir-akhir ini, biaya untuk listrik dan air seringkali naik tiap satu semester. Sisa uang yang mereka dapatkan, menurutnya, masih lebih dari cukup. Apalagi kondisi mereka yang masih bujangan, sebagaimana kata Mas Muluk, “*Lumayan cukup untuk biaya hidup sendiri, karena masih bujang sih mas! Entah nanti kalau sudah punya istri. Kalau ada, sedikit-dikit saya tabung, kalau tabungannya banyak akan saya kirim ke rumah untuk orang tua*”.

Bagi mas Muluk, dengan tinggal kost bersama teman-temannya satu kamar, di samping dapat mengurangi pengeluaran juga memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan sambilan. Keinginan mencari pekerjaan sambilan ini juga terkait dengan alasan atau niat awal mulanya bekerja di surabaya. Menurutnya, niat bekerja ke Surabaya lebih disebabkan pekerjaan di desa itu tidak variatif dibandingkan di Surabaya. Di Surabaya orang bisa memilih pekerjaan yang disenangi dan bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. “*Di sini (Surabaya) pekerjaannya macem-macem, kalau di desa itu yang ada cuma tani. Itu penghasilannya nggak pasti, belum kalau musim kemarau, terus kena hama. Mendingan disini (UNESA),itung-itung cari pengalaman*”

Oleh sebab itu, selama bekerja sebagai cleaning service di UNESA, ia tidak terpaku pada satu pekerjaan namun mencoba untuk menerima pekerjaan lainnya yang jam kerjanya tidak bersamaan dengan jadwal kerjanya di UNESA. Pekerjaan sambilan yang diterima, baik Muluk maupun temannya yang lainnya tidak hanya berupa satu ragam pekerjaan saja namun bermacam-macam, misalnya ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga toko, ada yang mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjual keliling atau mendapat pekerjaan sambilan sebagai penjaga wartel. Hal ini didukung dengan kondisi kost yang pada umumnya sangat kondusif dan memungkinkan

Hidup Bersama Orang tua

Bila dibandingkan dengan pekerja *cleaning service* UNESA sebelumnya, para bujangan yang hidup bersama orang tua, pada umumnya adalah penduduk asli Surabaya atau mereka yang sudah lama mendiami kota Surabaya. Dengan begitu, kita dapat mengasumsikan bahwa pengetahuan mereka tentang Surabaya dan hubungan antar manusia sedikit banyak lebih menguasai, sehingga dapat memiliki beberapa macam pekerjaan sampingan di luar *cleaning service* UNESA. Namun pada kenyataan di lapangan, ternyata asumsi bahwa bujangan *cleaning service* UNESA yang hidup bersama orang tua memiliki pekerjaan sampingan yang lebih banyak, tidak berlaku sepenuhnya. Beberapa informan yang berhasil diwawancarai menunjukkan bahwa sebagian besar para bujangan ini tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaannya sekarang. Meskipun demikian, ada beberapa memiliki pekerjaan sampingan yang menyenangkan dan dapat menambah keuangan keluarga.

Para bujangan yang bekerja di *cleaning service* UNESA ini, pada umumnya bekerja untuk membantu atau menyumbang memperbesar penghasilan keluarga yang dihasilkan dari kedua orangtuanya yang sama-sama bekerja. Mengenai kebutuhan sehari-hari para bujangan seperti Warno yang bekerja di lingkungan FIS UNESA, semuanya sudah dipenuhi orang tuanya meskipun dalam kapasitas yang sangat terbatas. Lebih-lebih kebutuhan dasar seperti makan, minum dan pakaian. Dengan begitu, sebagian uang hasil pekerjaannya bebas ia nikmati sendiri.

Kebutuhan hidupnya yang cukup banyak dan kewajiban untuk membantu saudara-saudaranya menyebabkan penghasilan yang sudah dibagi dua menjadi sangat sedikit. Implikasinya, ia tidak memiliki tabungan sama-sakali. Setiap gaji, uang yang ia terima, tidak sampai dua minggu sudah habis. Kondisi keuangan yang sangat labil ini, tidak membuat warno memiliki keinginan

atau hasrat untuk mencari pekerjaan sambilan lainnya. Hal ini disebabkan Warno merasa aman meskipun tidak memiliki uang dan pekerjaan tambahan lainnya. Apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dianggap sudah terpenuhi dari kedua orang tuanya.

Berbeda dengan Warno, bagi Lukman, pekerja *cleaning service* UNESA di lingkungan fakultas teknik UNESA, meski ia berstatus bujangan dan hidup bersama orang tua, ia masih ingin mencari pekerjaan tambahan. Hal itu disebabkan, orang tuanya tidak semuanya bekerja. Ayahnya adalah seorang buruh di wilayah Rungkut sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Penghasilan yang hanya bertumpu pada ayahnya saja menyebabkan roda ekonomi akan goyah. Apalagi pada zaman sekarang biaya listrik dan air sangat tinggi.

Untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari, Lukman tidak hanya bekerja sebagai *cleaning service* UNESA namun di luar jam kerja, ia selalu mencari kesempatan lainnya yang sekiranya dapat menghasilkan uang. Apapun ia lakukan yang penting halal. Tingkat pendidikannya yang mencapai SMA (Sekolah Menengah Atas), tampaknya mempengaruhi kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini terbukti bahwa ia tidak sekedar mencari tambahan penghasilan dengan cara menjadi penjaga wartel saja seperti teman-teman *cleaning service* UNESA lainnya namun di balik kesederhanaannya, ia memiliki telenta atau kemampuan yang tidak terduga. Kemampuan ini nampaknya berkaitan dengan aktivitasnya ketika masa sekolah dan merupakan pengetahuan yang sangat ia sukai semasa di SMA. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kemampuan musikal.

Semasa SMA, ia memiliki sebuah *group band*. Pengalaman mendalami kegiatan itu setidaknya-tidaknya memungkinkan dia memiliki banyak relasi di antara anak-anak muda yang menggemari musik. Apalagi pada masa itu sering melakukan latihan bersama-sama di berbagai tempat. Pengetahuan semacam ini nampaknya menjadi aset bagi Lukman, karena selepas ia dari SMA dan

bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Kegiatan bermain musik tampaknya tidak ditinggalkan. Bahkan seringkali ia mendapatkan job bersama-teman-teman lamanya sebagai pemain band. Job manggung yang sering ia terima biasanya pada acara perkawinan atau ulang tahun.

Meskipun job bermain band tidak selalu ada tiap hari, namun menurutnya ada bulan-bulan tertentu *job* bermain band itu sangat ramai bahkan seringkali menyebabkan ia sangat sibuk di waktu malam hari. Implikasinya, penghasilan bulanan yang ia terima pada bulan-bulan tertentu seringkali lebih banyak berasal dari pekerjaan sampingan.

Oleh karena, ia merasa memiliki sumbangsih yang cukup signifikan terhadap penghasilan keluarga, Lukman merasa bahwa ia pun memiliki hak untuk memuat suatu kebijakan keluarga. Apalagi ia adalah anak kedua dari empat bersaudara. Kebijakan yang seringkali ia urusi berkaitan dengan kebijakan pengeluaran keluarga. Hal-hal mana yang harus di tekan pengeluarannya dan hal-hal mana yang penting bagi keluarga. Meskipun kebijakan pengeluaran keluarga sudah diatur sedemikian rupa, tampaknya pengeluaran tetap saja besar. Pengeluaran untuk makan sehari-hari dan pola konsumsi lainnya tidak begitu besar dan dapat ditekan sekecil mungkin. Hanya pengeluaran air dan listrik sangat menyedot anggaran keluarga. Pengeluaran ini sangat susah ditekan. Solusi penggunaan peralatan listrik yang hemat tetap tidak bisa memecahkan masalah ini.

Adanya beberapa pos yang sangat susah ditekan pengeluaran menyebabkan Lukman hingga saat ini tidak memiliki tabungan sama sekali. Tabungan yang ia miliki adalah tabungan berupa relasi antar teman dalam kelompok band-nya atau kelompok band di daerah lainnya. Hal ini disebabkan melalui relasi inilah ia sewaktu-waktu akan mendapatkan rejeki mendadak dan rejeki ini bisa digunakan sebagai pembayar utang bulan sebelumnya.

**Siasat Keluarga *Cleaning Service*:
Dari Pekerjaan Sambilan, Mendayagunakan Keluarga hingga
Berhemat**

Hidup Hemat, Prioritaskan Kebutuhan

Pak Jamali merupakan pekerja *cleaning service* UNESA yang bekerja di wilayah FIS. Ia sudah menikah dan memiliki satu putra. Rumah yang ia tempati merupakan rumah kontrakan yang berada di daerah Ketintang lama. Sebagai kepala rumah tangga, pak Jamali hanya mengandalkan penghasilan keluarga dari pekerjaannya sebagai *cleaning service* UNESA. Ia tidak memiliki penghasilan keluarga di sektor lainnya. Hal ini menurutnya karena pendidikannya yang hanya setamat SMP. Tingkat pendidikan ini yang menyebabkan ia hanya di terima sebagai tenaga kasar yang umumnya dipekerjakan di siang hari. Di samping itu, usahanya untuk melamar pekerjaan lainnya belum menghasilkan.

Istri Pak Jamali yang juga lulusan SMP, sampai saat ini ia masih menganggur. Ia masih belum tertarik untuk bekerja membantu suaminya. Hal ini disebabkan perkawinannya yang masih tergolong muda dan ia baru saja memiliki anak yang masih berusia 4 tahun. Usia anak yang masih belia inilah yang menyebabkan sebagian besar waktu istrinya dihabiskan untuk menjaga buah hatinya. Keinginan untuk mencari penghasilan tambahan menjadi tertahan sementara waktu. Meskipun istrinya tidak ikut membantu mencari penghasilan keluarga, Pak Jamali masih bersyukur penghasilannya bisa menghidupi keluarganya meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Menurut mereka, tingkat kebutuhan sehari-hari belum begitu banyak. Hal itu disebabkan, keberadaan anaknya yang masih kecil, sehingga tuntutan terhadap segala hal belum ada. Di samping itu kebutuhan Pak Jamali dan istri juga bisa ditekan sesuai dengan prioritasnya. Prioritas keluarga Pak Jamali adalah

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum meskipun terbilang kurang sekali.

Bilamana ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, sering Pak Jamali harus mengubah strategi konsumsinya. Ia dan istrinya mengubah pola makan yang sudah sederhana menjadi lebih sederhana lagi. Bila masih belum mencukupi, Pak Jamali sering menyiasati dengan cukup makan sekali setiap hari. Padahal kebutuhan kalori yang diterima Pak Jamali setiap hari sudah pas-pasan masih ditambah pengurangan jumlah makan setiap harinya. Kebutuhan-kebutuhan mendesak itu bisa berupa biaya membeli obat bagi anaknya. Harta paling berharga yang dimiliki keluarga Pak Jamali hanyalah sebuah TV lama yang diproduksi tahun 1970-an.

Berbeda dengan Pak Jamali, Pak Mudjib adalah seorang bapak dengan dua anak. Sebelum ia bekerja sebagai cleaning service UNESA, ia bekerja sebagai pedagang kaki lima di Wonokromo. Namun, karena usahanya tidak berkembang dengan baik, ia banting stir sebagai pekerja cleaning service UNESA yang dianggapnya sebagai pekerjaan yang dapat diandalkan karena penghasilannya pasti.

Dengan mendiami rumah berlantai tanah di daerah Kertanting Baru, Pak Mudjib hidup saling bekerja sama dengan istrinya. Kerja sama dengan istri menurutnya merupakan hal yang penting karena penghasilan yang ia peroleh dari pekerjaan cleaning service UNESA sangat pas-pasan meskipun dapat diandalkan. Di samping menerima gaji dari suaminya, istri Pak Mudjib membuka usaha cucian baju. Pada umumnya langganannya yang dilayani oleh istri Pak Mudjib adalah tetangga-tetangga sekitar saja. Hasilnya cukup lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. *“Untuk nambah kebutuhan, istri saya kadang-kadang juga nerima cucian ! Iya lumayan untuk tambahan dari pada nganggur.”*

Adanya penghasilan tambahan dari pekerjaan istri bukan berarti penghasilan keluarga mencukupi. Keluarga Pak Mudjib

pun masih melakukan banyak penghematan di sana-sini. Untuk kebutuhan listrik, mereka hanya menggunakan beberapa lampu neon dengan watt yang paling kecil dan untuk kebutuhan air, mereka terpaksa menggunakan air sumur untuk segala aktivitas seperti mandi, mencuci, air minum dll.

Cleaning Service untuk Membantu Suami

Di samping kaum laki-laki, kaum perempuan juga berperan serta di dalam pekerjaan *cleaning service* UNESA. Pada umumnya para wanita yang bekerja di sini adalah sekedar membantu penghasilan suaminya yang tidak mencukupi. Ibu Sutinah misalnya, ia sudah bekerja selama 3 tahun sebagai pekerja *cleaning service* UNESA. Suaminya bekerja sebagai buruh pabrik yang penghasilannya sangat terbatas. Padahal ia masih memiliki tiga anak-anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah.

Pada awalnya, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun segera ditinggalkan karena gajinya cuma Rp. 200.000,- per bulan dengan jam kerja yang ketat. Bila dibandingkan dengan pekerjaan sebagai *cleaning service* UNESA, sangat nyata perbedaan penghasilannya. Oleh sebab itu ia dengan senang hati menerimanya. “*Di sini kerjanya ringan cuma membersihkan WC, tapi gajinya lumayan*”. Apalagi menurutnya “*lha wong saya ini lulusan SMP, mau kerja di mana lagi, disini sudah bagus.*”

Menumpang, Berjualan dan Apa lagi, asal untuk Anak

Sumiyati merupakan informan yang berstatus janda satu-satunya yang berhasil kami wawancarai. Ia sudah ditinggal mati suaminya sejak tahun 2000. Kematian suaminya merupakan suatu pukulan yang berat dalam hidupnya, karena selama ini hanya suami satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Untuk menggantikan peran suaminya, akhirnya ia bekerja ke Surabaya. Kedatangannya di Surabaya lebih disebabkan atas kebaikan saudara-

nya. Beserta dengan kedua anaknya, Bu Sumiyati diijinkan untuk tinggal serumah dengan saudaranya tersebut.

Berkat bantuan saudaranya pula Bu Sumiyati dapat bekerja sebagai *cleaning service* UNESA. Meskipun penghasilan yang ia dapatkan dari bekerja *cleaning service* UNESA sangat terbatas untuk biaya hidup selama di surabaya, namun ia sangat bersyukur. Apalagi sebelumnya, ia sama sekali tidak memiliki penghasilan sama sekali.



Gambar 7.3.
Menikmati sedikit, hanya berada di luar pagar kampus

Untuk menutupi kebutuhan yang besar bagi kedua anak-anaknya, dan juga biaya sehari-hari yang ia nikmati seperti listrik dan air di rumah saudaranya, ia mencoba untuk berjualan kecil-kecilan di rumah saudaranya tersbut setiap sore hari. Jualan yang

ia bawa berupa pisang goreng, dan gorengan lainnya. Keuntungannya sedikit banyak membantu kehidupan sehari-harinya dan dapat ikut menyumbangkan biaya sehari-hari kepada saudaranya.

Penutup

Perkembangan Surabaya yang pesat sedikit-tidaknyanya membawa berkah ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan Surabaya menjadi sebuah pusat daya tarik dan kota tujuan utama bagi kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah. Implikasinya, arus pendatang setiap hari selalu membanjiri Surabaya.

Beragamnya latar belakang yang dibawa para pendatang menyebabkan munculnya perbedaan daya serap diberbagai sektor yang tersedia. Bagi pendatang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang baik atau yang memiliki modal yang cukup, berbagai permasalahan yang dihadapi tampaknya mudah dipecahkan, apalagi ruang yang tersedia bagi mereka sangat luas. Namun bagi para pendatang yang tidak memiliki keahlian maupun modal sama sekali, ruang yang tersedia sangat terbatas. Dampaknya, kemiskinan di kota menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan.

Para pekerja subsisten kota pada umumnya membanjiri pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan yang tinggi seperti pekerjaan cleaning service UNESA. Meskipun pekerjaan ini tidak menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun untuk bisa bekerja sebagai cleaning service UNESA, seseorang membutuhkan satu tahap *entry point*. Tahap ini berkaitan dengan siasat yang memungkinkan ia dapat bekerja di suatu tempat. Biasanya mereka menggunakan hubungan teman untuk membawanya bekerja di tempat itu. Hubungan perkawanan ini

seringkali juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai persoalan sehari-hari mereka.

Siasat para pekerja cleaning service UNESA agar tetap bertahan hidup di Surabaya dengan bekerja sama dengan teman tampaknya menjadi pandangan yang lumrah. Di tengah himpitan ekonomi yang berat, hubungan perkawanan setidaknya mampu mengeliminir berbagai masalah penghasilan keuangan yang tidak memadai dengan cara mengkonsumsi secara bersama-sama. Di samping itu, hubungan perkawanan merupakan ruang psikologis yang aman karena mereka sama-sama senasip dan sepenanggungan.

Pengurangan jumlah barang-barang konsumsi hingga sampai bawah batas minimal yang layak merupakan suatu siasat yang harus mereka lakukan. Demi sesuatu, mereka rela berkorban. Dengan begitu, setiap hari merupakan hari-hari penuh pengorbanan. Demi anak, orang tua rela berkorban untuk makan sekali sehari. Implikasi pengurangan tingkat konsumsi yang berada di bawah standar minimal menyebabkan kondisi fisik mereka bekerja tidak optimal di tengah volume pekerjaan yang mengharuskan seseorang mengkonsumsi kebutuhan pada batas minimal.

Keluarga merupakan tim kerja yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, penghasilan keluarga dapat lebih baik bila dibandingkan dengan hanya kepala rumah tangga saja yang harus bekerja. Kerja sama yang baik antar anggota keluarga bagaimanapun juga akan menutupi berbagai biaya untuk pos-pos tertentu.

Di tengah ketidakberdayaan pada pekerja cleaning service UNESA, ternyata keberadaan suatu lembaga pondok pesantren, ikut berperan menyelamatkan kehidupan para pekerja cleaning service UNESA. Sebagai lembaga sosial setidaknya keberadaan pondok pesantren memungkinkan seorang pekerja bisa hidup lebih layak ditengah tekanan yang berat di Surabaya.

Daftar Pustaka

- Effendi, Tadjudin Noer,
1993 **Masyarakat Hunian Liar di Kota: Sebuah Studi Kasus di Wonosito Kotamadya Yogyakarta**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Evers, Hans-Dieter.
1982 **Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia**, Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
- Jellinek, Lea.
1995 **Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta**, Jakarta: LP3ES.
- Lewis, Oscar.
1993 “Kebudayaan Kemiskinan,” dalam Parsudi Suparlan, Penyunting, **Kemiskinan di Perkotaan**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manning, Chris, dkk,
1986 **Struktur Pekerjaan, Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota**, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Murray, Alison J.,
1994 **Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial**, Jakarta: LP3ES.
- Nasution, Agusfidar.
1985 “Buruh Perusahaan Industri Kecil dan Menengah di Jatinegara,” dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**, Jakarta: Rajawali Press.
- Noormohammed, Sidik.
1986 “Perumahan bagi Golongan Miskin di Jakarta,” dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Papanek, Gustav, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,

1986 "Penduduk Miskin di Jakarta," dalam Gustav Papanek dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. **Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pitomo, Sundoyo.

1985 "Kebutuhan Dasar Kelompok Berpenghasilan Rendah di Kota Jakarta," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Purwaningsih, Endang.

1985 "Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Perumnas Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Sayogyo.

1978 "Garis Kemiskinan dan Minimum Kebutuhan Pangan." **Makalah** dalam Kongres II HIPIS di Manado.

Sunuharyo, Bambang Swasto.

1985 "Pendapatan dan Pengeluaran Rumah tangga Pegawai Rendah di Perumahan Klender," dalam Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers. **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**. Jakarta: Rajawali Press.

Bab 8

Pengamen

Seniman Jalanan dan Suara-suara “Lapar” Orang Miskin Kota

Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo,
dan Sugeng Harianto

Pendahuluan

Di dalam sejarahnya, seniman jalanan telah terjadi cukup lama. Di Eropa dan Amerika, bangsa pengembara, dari rumpun Slavia, yaitu suku Gipsi telah mengembara ratusan tahun dengan bekerja sebagai peternak, penjinak binatang, dan lebih dari itu bermain musik di malam hari, bermain boneka kayu dan meramal nasib. Memang, tidak banyak catatan tentang kelompok etnik ini.

Di Indonesia, khususnya Jawa, meski seniman keraton yang mengembangkan wayang, di dalam tradisi *babad* (Tanah Jawi) diberitakan tatkala untuk menaklukan Ki Ageng Mangir, penguasa wilayah Selatan, putri sulung Panembahan Senapati, *Pembayun*, menyamar sebagai *tledek*, *wong barang* yang mengembara dengan menyanyi dan menari hingga masuk ke wilayah tersebut. Karena kecantikannya, Ki Ageng Mangir kemudian mengawini. Kisah ini kemudian berlanjut hingga Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senapati dan dibunuh dengan membentur kepalanya di singgasananya, istirinya akhirnya ikut *bela pati*.

Pada masa kolonial seniman jalanan ini berkembang dari lingkungan perkebunan, Augustijn Michels sebagai seorang pemilik *landhuis Citeureup* tercatat pada tahun 1831 bahwa dari

budak-budaknya yang berjumlah 130 orang, terdapat 30 orang budak yang oleh V.I. van de Wall disebut pemain musik yang pandai dan serba bisa (*de onderschidene bekwame muzijkanten*). Di samping itu, ada 4 orang penari ronggeng, 2 pemain gambang, dan 2 penari topeng, bahkan orang Cina juga melatih budak mereka untuk menjadi artis dalam rombongan sandiwara Cina. Budak-budak yang pandai bermain sandiwara, menari, dan menyanyi biasanya berharga tinggi. Gaya hidup yang demikian ini sebenarnya meniru budaya keraton di mana raya memiliki sekelompok seniman, sebagian di antaranya pemain musik Barat yang tinggal di Kampung Musikanan (sebelah timur Pagelaran), dan di halaman dalam keraton terdapat bangunan *koepel*, khusus untuk tempat bermain musik (Soekiman, 2000: 90-91). Gaya hidup ini dimasukkan ke dalam budaya *indis*.

Di dalam perkembangan selanjutnya, muncul kelompok *toniel* atau *stambul*, seni pertunjukan keliling dengan kisah seribu satu malam. Musik dan lagu menyertai dalam pertunjukkan tersebut. Seni pertunjukan rakyat keliling dengan mengambil tradisi lisan juga berkembang pula, grup Ketoprak di Jawa Tengah dan Ludruk di Jawa Timur. Alat-alat musik yang digunakan tidak lengkap, seperti pada seni pertunjukan keraton, bila merupakan seni pertunjukan, maka tema ceritera diambil dari tradisi lisan, seperti pahlawan lokal Sarip Tambakoso pada Ludruk atau mengadopsi ceritera seribu satu malam dan ceritera barat. Sudah barang tentu, alur ceriteranya pasti berbeda dengan tradisi keraton.

Musik jalanan memang tidak selalui kemudian identik dengan seni pertunjukan. Ia bisa tampil sendiri, seperti *musik sinteran* yang dilakukan satu atau dua orang. Seorang memainkan alat musik *sinter*, sedangkan yang lain *nembang*, menyanyikan lagu Jawa, atau sambil bermain *sinter* ia bernyanyi. Alat musik *sinter* merupakan modifikasi alat musik cina yang berupa kotak kayu sebagai wadah resonansi dengan banyak dawai. Cara memainkan

dengan meletakkan sinter secara mendatar dan dipetik dengan kedua tangan.

Bila diamati di kota Surabaya dan sekitarnya, komunitas pemusik jalanan memang terpilah menjadi dua, kelompok pertama terdapat pelaku tradisional (lama), seperti pemusik *sinter*, gitar dan *tayub* dengan lagu-lagu Jawa dan keroncong, penikmatnya adalah kelompok urban dari pedesaan Jawa. Kelompok kedua adalah anak jalanan (anjel) dengan rentang usia bervariasi dari anak-anak hingga remaja dan dewasa. Ada berbagai modus, ada sebagian memilih bernyanyi di pinggir jalan pada saat lampu merah, ada pula bernyanyi di kendaraan umum, biasanya bis kota dan bis antar kota, dan sebagian lain bernyanyi dari rumah ke rumah. Alat musik yang dipakai mulai dari yang paling sederhana, *kecek-kecek* buatan sendiri dari sejumlah tutup botol yang dipaku pada kayu dan digoyang-goyang secara berirama hingga alat musik gitar, dari pemusik yang hanya mengandalkan suara hingga menggunakan alat *sound system* dengan tenaga aki atau baterai.

Berbeda dengan kelompok pertama yang jumlah terbatas dan cenderung berkurang, jumlah kelompok kedua ini tidak semakin berkurang, tetapi cenderung bertambah. Ada beberapa alasan memilih mengambil profesi tersebut, namun sering dicermati sebagai produk dari urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja formal menggiring pelaku pada pekerjaan informal, termasuk musik jalanan.

Bila kelompok pertama, demi memenuhi kenangan penikmatnya, lebih suka melantunkan lagu-lagu lama, seperti pemusik *sinter* dengan tembang-tembang *dandang gula* dan *pangkur*, pemusik keroncong dengan lagu-lagu pop bergaya keroncong, dan seterusnya, maka kelompok kedua mengambil dua modus, yaitu menyanyikan lagu-lagu pop yang sedang “*in*”, atau menciptakan lagu-lagu yang sederhana dengan tema yang jelas dan tidak jauh dari kehidupannya. Di dalam modus pertama, tidak semua lagu-lagu pop yang sedang “*in*” dinyanyikan, misalnya

menjelang akhir pemerintah Orde Baru, antara tahun 1996-1998, pemusik jalanan lebih suka menyanyikan lagu “Anoman Obong” (Iwans Fals) daripada lagu “Tenda Biru” (Desy Ratnasari).

Pada modus kedua, lagu-lagu tersebut bisa muncul ke permukaan tatkala ada produser yang mendengarkan dan merekrutnya ke dalam dunia rekaman, sebut saja Gombloh (alm.) dari Surabaya dengan lagu-lagu perjuangan dan cinta. Rekrutmen ke permukaan bisa terjadi pula bila pemerintah, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (dulu Depdikbud), dan sejumlah kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa menyelenggarakan ajang lomba pemusik atau lagu-lagu jalanan (perhatikan kasus Iwan Fals dalam Murray, 1992). Tulisan ini yang merupakan hasil penelitian bermaksud menggali tentang jenis dan tema musik, hubungan antara obyektif (dan subyektif) dan jenis dan tema musiknya, serta fungsinya bagi masyarakat kota.

Metode Penelitian¹¹

Penggalan data dari komunitas seniman jalanan bukan merupakan hal yang mudah. Mereka merupakan kelompok-kelompok kecil yang tersebar secara sporadis dan sangat *mobil*. Pada saat tertentu mereka dengan mudah ditemui di atas bus-bus kota (dan luar kota), di perempatan jalan, dan berjalan dari rumah ke rumah, namun pada saat lain menghilang karena takut ditangkap oleh Satpol PP karena dianggap orang-orang terlantar yang mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, mereka sebenarnya terbuka untuk diwawancarai. Melalui wawancara dan observasi, selain jenis dan musik, dapat pula digali tentang kondisi subyektif pengamen. Sementara itu, kondisi obyektif tentang per-

¹¹ Diolah dari Hasil Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2004 atas nama Agus Trilaksana, FX Sri Sadewo, dan Sugeng Harianto.

ubahan masyarakat dan kebijakan publik dapat diketahui dari data sekunder, seperti data statistik dan surat kabar.

Untuk analisis, ada tiga tahap yang dilakukan. Pertama melakukan pengkodean dan melakukan identifikasi terhadap kondisi obyektif dan subyektif pemusik jalanan. Dari koding ini, kemudian dibuat matriks untuk menggambarkan kondisi obyektif dan subyektifnya. Kedua, melakukan koding pada musik/lagu jalanan. Koding didasarkan, antara lain (1) jenis musik, (2) tema, dan (3) isi, (4) tempat atraksi dan (5) penikmat/pendengar (*audience*). Krippendorff (1991: 178-180), tahap ini bisa digolongkan ke dalam klasifikasi kontekstual, yaitu teknik untuk mengeliminasi jenis kelebihan tertentu dalam data dengan cara demikian menyarikan apa yang nampak menjadi konseptualisasi dasar. Diasumsikan bahwa obyek dan lebih jelasnya, kata mempunyai semakin banyak sinonim apabila semakin banyak konteks kejadiannya yang sama. Dalam tahap ini jenis dan tema musik jalanan teridentifikasi. Ketiga, menggunakan matriks yang menghubungkan antara kondisi obyektif dan subyektif terhadap jenis dan tema musik jalanan, sehingga akan nampak fungsi dari musik jalanan, apakah musik jalanan hanya sebagai tampilan rasa keindahan, ataukah sebagai proses imitasi terhadap kondisi obyektif dan subyektifnya, dan lebih dari itu sebagai kritik atau protes sosial.

Pekerjaan itu bernama Pengamen Jalanan

Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya ibarat gadis dan pemuda cantik dan ganteng yang menebarkan daya pesona dan daya tarik, yang siap untuk memikat hati siapa saja. Meskipun Kota Surabaya dikesankan sebagai kota metropolitan yang padat penduduk dan kota yang tidak ramah kepada siapa saja, namun Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berasal dari daerah-

daerah yang menjadi *binterland* Surabaya. Sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur, Surabaya sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat peredaran uang, pusat hiburan, dan lainnya. Hal ini menjadikan Surabaya sebagai kota yang menawarkan daya tarik kepada masyarakat di *binterland*-nya. Sebaliknya, daerah-daerah *binterland* yang kurang maju lebih mendorong penduduknya untuk melakukan migrasi ke Surabaya.

Surabaya menawarkan potensi lapangan pekerjaan, baik sektor formal maupun sektor informal, yang sangat luas. Mereka yang tidak dapat memasuki pekerjaan di sektor formal, terbuka luas pekerjaan di sektor informal. Banyak anggota masyarakat, karena kalah bersaing atau tidak mempunyai persyaratan, tidak mampu memasuki sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali memasuki sektor informal. Di kota ini terbuka cukup luas bagi warganya untuk mencari pendapatan dari sektor ini. Sektor informal menjadi sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Salah satu pekerjaan di sektor informal di Surabaya adalah menjadi pengamen jalanan. Bagi sebagian warga kota Surabaya menjadi pengamen jalanan adalah pekerjaan. Pekerjaan ini dipilih karena mereka tidak mempunyai banyak pilihan, bahkan pekerjaan ini menjadi katup penyelamat (*safety valve*) ketika mereka terlempar dari pekerjaan di sektor informal lainnya.

Konsep sosiologi mobilitas sosial yang bersifat horizontal barangkali tepat untuk menggambarkan dinamika kehidupan para pengamen jalanan. Sektor informal memang sektor pekerjaan yang dicirikan oleh adanya mobilitas pekerjaan yang tinggi. Pada sektor informal orang mudah berganti-ganti pekerjaan. Kebanyakan pengamen jalanan melakukan mobilitas pekerjaan ini. Sebelum menjadi pengamen jalan mereka rata-rata sudah pernah bekerja.

Secara ekonomi para pengamen jalanan adalah orang-orang yang berasal dari strata masyarakat bawah. Mereka menjadi

pengamen jalanan lebih didorong oleh kondisi kehidupannya yang termarjinalkan karena mereka adalah orang-orang yang kalah ketika memasuki arena kompetisi, yang di mata mereka, yang tidak memberikan keadilan sosial. Surabaya ibarat arena kompetisi bagi siapa saja yang tidak sanggup dimenangkan oleh para pengamen jalanan, bahkan dalam arena kompetisi itu mereka mengalami ketidakadilan, seperti ditertibkan dan digusur oleh aparat birokrasi maupun aparat represif negara. Ibarat di arena pertandingan sepakbola, negara yang seharusnya menjadi wasit yang adil, justru melakukan pemihakan kepada pihak yang kuat, dan keputusan-keputusannya justru merugikan pihak yang lemah, seperti pedagang asongan, pedagang nasi, pengamen jalanan, dan lainnya.

Penertiban Berbuah Pengamen Jalanan

Kondisi kehidupan semacam itu sehari-hari dialami oleh para pengamen jalanan. Mereka menjadi pengamen jalanan salah satunya disebabkan karena mereka menjadi korban penertiban oleh aparat birokrasi dan aparat represif negara.

Muryanti dan Naning adalah dua orang di antara sekian banyak orang yang mengalami nasib seperti itu. Mak As sapaan akrab Muryanti yang berusia 46 tahun, sehari-hari mengamen berpindah-pindah tempat. Sehari-hari Mak As mengamen di Terminal Joyoboyo, halte bus depan Rumah Sakit Islam Jl. A. Yani, dan Terminal Bungurasih. Mak As mengawali pekerjaannya di Surabaya dengan bekerja sebagai pedagang nasi di kawasan Terminal Joyoboyo. Bagi Mak As berjualan nasi di Terminal Joyoboyo merupakan pekerjaan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang miskin. Pekerjaan ini dia jalani sudah cukup lama yaitu sudah sekitar 10 tahun. Mak As yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dari pekerjaan berjualan nasi mendapatkan pendapatan

yang diakuinya cukup lumayan. Pendapatan ini dapat membantu pendapatan keluarga. Mak As menceritakan:

Saya berjualan nasi sudah sepuluh tahun lamanya, sebelumnya saya menjadi buruh tani di Tanggulangin. Dari jualan nasi sebenarnya saya mendapatkan hasil yang lumayan, walaupun keuntungan yang saya peroleh tidak banyak, namun setidaknya masih bisa memperoleh keuntungan dari sisa makanan untuk dimakan sendiri.

Tahun 2002 merupakan tahun buruk bagi Mak As. Warung makanan miliknya yang berlokasi di kawasan Terminal Joyoboyo menjadi obyek penertiban oleh aparatur Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya. Penertiban tersebut merupakan peristiwa tragis bagi Mak As, karena dia harus kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Sejak saat itu ia menganggur, sampai ia memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan. *“Mau gimana lagi punya warung sudah kena penertiban, ya akhirnya saya menjadi pengamen, yang penting halal,”* kata Mak As.

Di Surabaya sehari-hari Mak As bertempat tinggal bersama-sama dengan salah satu anaknya. Ia mempunyai tujuh anak dan semuanya sudah dewasa. Ia tidak menetap di Surabaya, seminggu atau bahkan sebulan sekali ia pulang ke Tanggulangin. Tanggulangin adalah desa di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, bahkan sampai sekarangpun ia pun masih mempunyai rumah dan bertempat tinggal di desa itu. Ketika berada di Desa Tanggulangin Mak As tidak jarang bekerja sebagai buruh tani.

Sebagai pengamen jalanan Mak As hanya berbekal alat yang ia beri nama kentrungan. Mak As menjalani pekerjaannya mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 12.00 siang, dan pekerjaan itu ia jalani dengan setulus hati dan tanpa beban. Bagi Mak As pendapatan dari mengamen hanya untuk menambah pendapatan suaminya yang sehari-hari sebagai tukang becak. Mak As mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 10.000 per hari.

Demikian pula yang dialami oleh Naning. Naning lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengamen di perempatan jalan yang ada lampu pengatur lalu lintas. Dia memilih tempat seperti itu tidak banyak menghabiskan tenaga dan tidak berbahaya. Perempuan berusia 28 tahun itu mengaku menjadi pengamen jalanan karena dipaksa oleh keadaan keluarganya. Dia mengaku sudah mempunyai suami yang sehari-hari bekerja secara serabutan, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Naning menceritakan suaminya sehari-hari kadang-kadang bekerja sebagai tukang becak, kadang-kadang bekerja sebagai kuli bangunan. *"Itu pun tidak pasti. Suami saya bekerja serabutan,"* kata Naning.

Bekerja sebagai pengamen jalanan, bagi Naning, sebenarnya bukanlah pekerjaan yang menarik. Untuk memutuskan menjadi pengamen jalanan tidak mudah baginya untuk memutuskan. Sebelum bekerja sebagai pengamen jalanan, Naning bekerja sebagai penjual makanan ringan di Taman Bungkul. Pekerjaan sebagai penjual makanan sudah dia geluti selama 5 tahun. Malang nasibnya, suatu hari pada tahun 2003 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Taman Bungkul. Lapak yang penuh barang dagangan miliknya dibongkar paksa oleh Polisi Pamong Praja. Kebijakan pemerintah kota menertibkan PKL di seluruh kawasan kota menjadi awal bagi dia untuk berpindah profesi. Naning menuturkan:

Mau gimana lagi mas, bisa saya hanya mengamen di jalan. Saya yang hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) bisa bekerja sebagai apa. Selain berjualan dan mengamen saya tidak mempunyai kemampuan lain. Menjadi pengamen jalan sebenarnya sangat terpaksa saya lakukan, namun saya mensyukurinya karena dapat membantu meringankan beban suami saya yang hanya bekerja serabutan.

Bencana Itu Bernama Krisis Ekonomi

Wawan dan Yanto mengalami nasib yang sama. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan, keduanya pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh pabrik. Wawan misalnya, pria yang telah menekuni pekerjaan sebagai pengamen jalanan selama tiga tahun ini, mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Gelar lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang disandanginya belum cukup untuk menjadi modal bagi dia untuk memasuki pekerjaan di sektor formal. Nasib membawanya menjadi kuli bangunan. Pekerjaan yang telah lama dia tekuni tidak memberikan harapan bagi masa depannya. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh bangsanya (Indonesia) mempengaruhi masa depan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Seperti hukum alam, hukum ekonomi *supply and demand* berlaku. Permintaan pekerjaan di sektor perumahan menurun. Bagi Wawan penurunan permintaan itu bermakna sepiya order pekerjaan. Hal ini yang mendorong Wawan untuk memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. *“Aku dulu bekerja pertama kali sebagai kuli bangunan. Karena sepiya pekerjaan untuk dikerjakan akhirnya aku jadi pengamen,”* kata Wawan.

Krisis ekonomi negara ini juga berdampak pada kehidupan Yanto. Pemuda berusia 33 tahun ini sebelum menjadi pengamen jalanan bekerja sebagai buruh pabrik. Yanto tidak mengetahui dengan jelas secara tiba-tiba dua tahun lalu dia mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaannya. Yanto menduga pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaannya, karena ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yanto menjalani pekerjaannya sebagai pengamen jalanan sudah dua tahun lamanya dan menjalaninya di atas bus antarkota. *“Sebelum menjadi pengamen jalanan, awalnya saya bekerja sebagai buruh pabrik. Saya tidak tahu persis entah kenapa saya di-PHK. Menurut saya, mungkin perusahaan saya sedang mengalami krisis sehingga akan bangkrut,”* kata Yanto.

Dari Loper Koran ke Pengamen Jalanan

Nasib yang sama juga dialami oleh Deni dan Termas. Dua pemuda ini sebelum menjadi pengamen jalanan pernah menekuni pekerjaan sebagai loper koran. Deni, pemuda berusia 24 tahun, meskipun kelahiran Surabaya, nemun tumbuh dan besar di Yogyakarta hidup bersama dengan *budhe*-nya. Dia menjadi pengamen jalanan sudah sekitar 10 tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan, Deni menekuni pekerjaan sebagai loper untuk berbagai surat kabar. Sebagai loper koran Deni setiap hari mengayuh sepeda menyusuri jalan dan gang untuk mengantarkan koran ke rumah para pelanggan.

Sebagai loper koran dia awali dengan menjadi loper koran *Suara Pembaharuan* di Yogyakarta. Ketika surat kabar itu tidak terbit lagi, membawa Deni menjadi loper koran *Yogya Pos*. Pekerjaan sebagai loper surat kabar ini tidak bertahan lama, karena nasib surat kabar itu sama dengan *Suara Pembaharuan*. Kebangkrutan dua surat kabar itu membawa Deni untuk pertama kalinya memasuki pekerjaan sebagai pengamen jalanan. Deni menceritakan, “*Setelah tidak menjadi loper koran aku menjadi pengamen, itu terjadi sekitar tahun 1994-an.*”

Pemuda ini menceritakan, pertama kali menjadi pengamen hanya berbekal alat mengamen sederhana yang dia sebagai *ecek-ecek*. Alat musik ini dia buat dari tutup botol yang dirangkai dengan kayu sehingga bisa menghasilkan bunyi. Dia menggunakan alat musik ini karena dia belum bisa menggunakan alat musik gitar. Kemampuan dia sekarang memainkan gitar diawali ketika dia mengajak temannya yang bisa bermain gitar untuk mengamen. Berawal dari itu dia berusaha belajar bermain gitar, dan akhirnya bisa memainkan alat musik tersebut.

Tahun 1999 Deni pulang ke Surabaya atas permintaan ibunya. Pulang ke Surabaya bukan berarti memutus matarantai pekerjaannya sebagai pengamen jalanan. Pertama kali Deni

mengamen di Surabaya di kawasan perempatan depan Hotel Sahid Surabaya. Di kawasan itu dia hanya mengamen pada siang hari, pada malam hari dia bersama-sama temannya mengamen di warung lesehan di sepanjang Jalan Dharmawangsa.

Statusnya sebagai pengamen jalanan sudah dijalani Termas selama delapan tahun. Sebelum menjadi pengamen jalanan Termas pernah bekerja sebagai loper koran di kawasan Demak Surabaya. Pasar yang sepi membawanya sampai pada keputusan untuk menjadi pengamen jalanan. Pemuda berusia 20 tahun ini awalnya menekuni pekerjaan ini hanya ikut teman-temannya. Sebagai pengamen jalanan dia tidak mempunyai harapan yang banyak. Pendapatan dari pekerjaan ini, bagi dia, yang terpenting bisa dipakai untuk membeli makan, minum, dan rokok.

Sebagai anak jalanan Termas sehari-hari ditampung di rumah singgah Insani di kawasan Jagir Surabaya. Di rumah singgah ini dia bersama dengan teman-temannya, sesama pengamen jalanan, mendirikan grup musik yang diberi nama “Bilawa.” Sebagai pengamen jalanan Termas dan teman-temannya sesama anak jalan bukanlah orang-orang minimalis. Dia bersama dengan teman-temannya mempunyai obsesi tidak sekedar sebagai pengamen jalan, namun bisa menciptakan lagu dan dinyanyikan sendiri, seperti yang dilakukan oleh grup-grup musik lain yang telah mempunyai nama. Bagi Termas dan teman-temannya obsesi itu bukanlah impian, namun impian yang menjadi kenyataan. Mereka telah berhasil menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu tersebut kadang-kadang mereka nyanyikan ketika mengamen di jalanan. Termas menceritakan:

”....Pada awalnya kami mempunyai niat hanya untuk membuat puisi, sehingga lagu-lagu yang ada awalnya dari puisi. Niat bikin puisi kok malah bisa dibuat lagu. Kadang-kadang lagu-lagu tersebut dibuat untuk ngamen juga. Karena lagu-

*lagu tersebut kebanyakan bercerita tentang anak jalanan.
Sehingga pas dinyanyikan untuk ngamen....”*

Waiter Yang Menjadi Pengamen Jalanan

Nasib Iwan sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya sesama pengamen jalanan, karena dia pernah mempunyai pekerjaan tepat di sebuah diskotik. Iwan juga pernah menyandang status sebagai mahasiswa ketika dia belajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya hingga semester 3. Di tempat kerjanya yang penuh dengan hingar bingar suara musik dan gemerlap lampu itu dia pernah bekerja sebagai waitrees. Iwan bekerja di tempat itu hanya beberapa bulan, tanpa sebab yang jelas dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia bekerja membantu kakaknya menjadi distributor minyak tanah. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya usaha kakaknya tutup.

Kebangkrutan usaha distributor minyak tanah yang menjadi usaha kakaknya ini membawa pria berusia 32 tahun ini beralih ke pekerjaan menjadi pengamen jalanan. Bagi Iwan menjadi pengamen jalanan tidaklah mudah dilalui. Seperti yang dialami pengamen jalanan lainnya dia beberapa kali terkena razia oleh petugas dari pemerintah kota Surabaya. Dia menyebut razia sebagai cakupan. Iwan suatu saat terkena cakupan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kepada petugas pemerintah kota dia hanya mampu menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) pengamen. Meskipun demikian dia tidak khawatir karena sudah ada yang mengurus, yaitu pengurus dan bus Damri. Sebagai pengamen di bus kota, terutama Damri, dia harus menjadi anggota pengamen dengan diberikan tanda anggota.

Tema Lagu: Dari Tsunami hingga Demokrasi

Seni adalah cermin masyarakatnya. Dalam konteks demikian seni salah satunya dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial yang dialami masyarakat. Seni yang mengekspresikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut merupakan

produk dari kepekaan pencipta seni tersebut terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakatnya. Kesenian bagi seniman dapat dipakai sebagai salah satu media untuk mengekspresikan protes sosial atau kritik sosial. Salah satu bentuk kesenian tersebut adalah seni musik. Bagi seniman musik kebanyakan seni musik merupakan seni pertunjukan yang tidak hanya mengekspresikan rasa keindahan manusia (fungsi menghibur masyarakat), melainkan juga mempunyai fungsi ekonomi dan sosial. Melalui pertunjukan di atas panggung seniman musik dapat memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh popularitas. Tercatat nama-nama seperti Rhoma Irama, Iwan Fals, Doel Soembang, Ebit G. Ade, dan beberapa lainnya yang menjadikan seni musik sebagai fungsi sosial, yaitu untuk melakukan kontrol sosial terhadap kondisi masyarakat yang diwarnai ketidakadilan, ketimpangan, dan demoralisasi. Melalui syair lagu-lagunya mereka melakukan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat, bahkan penguasa politik.

Demikian halnya seniman (pengamen) musik jalanan di Surabaya. Bagi pengamen jalanan tidak banyak pilihan bagi mereka untuk mengakses sumber-sumber daya untuk menjamin kehidupan yang layak. Mereka di masyarakat metropolitan seperti Kota Surabaya merupakan orang-orang yang marjinal, tidak berdaya, dan terpinggirkan oleh kompetisi kehidupan yang tidak berjalan adil dan seimbang. Bagi mereka hidup di kota besar seperti Surabaya tidak banyak pilihan. Mengamen menjadi pilihan yang terpaksa mereka pilih. Bagi pengamen jalanan mengamen bukan sekedar sebagai arena untuk menjamin survival hidupnya, musik jalanan mereka menggunakan sebagai saluran untuk mengekspresikan kondisi kehidupan yang sehari-hari mereka hadapi. Musik jalanan mereka pakai untuk mengekspresikan kondisi riil kehidupan mereka secara individual dan kondisi kehidupan masyarakat di tingkat supra lokal. Mereka menggunakan seni musik untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat yang

senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya. Melalui syair lagu mereka mengekspresikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang senjang dan tidak adil. Tidak hanya mengkritik masyarakat yang senjang, musik jalanan juga oleh pengamen dipakai untuk mengawasi fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kondisi masyarakat yang senjang, tidak adil, korup, dan sebagainya mereka ekspresikan melalui simbol-simbol berupa rangkaian kata-kata indah yang mempunyai makna. Simbol-simbol tersebut mereka komunikasikan secara verbal dengan alunan nada yang dapat menghibur setiap insan yang mendengarkan dan menghayatinya. Simbol-simbol yang mereka komunikasikan secara verbal merupakan refleksi realitas kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya. Pengamen jalanan terpinggirkan tidak hanya oleh kompetisi kehidupan yang tidak adil dan seimbang, melainkan juga berhadapan dengan tingkah polah aparatur birokrasi dan aparatur represif di tingkat supra lokal. Jalan dan angkutan umum merupakan arena kehidupan mereka.

Aparatur Negara, Dari Arogansi hingga Resistensi

Dalam tataran empirik dijumpai banyak fenomena aparatur birokrasi dan militer yang menjadi instrumen bagi para pemilik modal untuk menjamin kepentingan-kepentingannya, seperti kasus penggusuran perkampungan kumuh, penertiban PKL (pedagang kaki lima), dan penindasan buruh. Mereka tidak pernah membela kepentingan-kepentingan kelas proletar, bahkan ketika mereka menjadi instrumen pemilik modal mereka berhadapan dengan kelas proletar.

Para pengamen jalanan di Surabaya tidak jarang mempunyai pengalaman berhadapan dengan aparatur suprastruktur

seperti itu. Dalam memasuki arena tersebut mereka ternyata tidak jarang berhadap-hadapan dengan aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara, yang menurut para pengamen jalanan, tidak menjalankan fungsi idealnya. Di mata pengamen jalanan, aparaturnya birokrasi dan aparaturnya represif negara idealnya menjalankan fungsi pelayanan dan memberikan pengayoman kepada rakyat jelata, termasuk di dalamnya adalah kaum marginal di perkotaan. Mereka melihat dan mengalami tingkah polah aparaturnya supra lokal, yang melakukan pengejaran, menggusur, menendang, menyikut, dan merampas hak-hak hidup sesamanya, yang mengais sumber kehidupan sebagai tukang becak, pedagang asongan

Pedagang Asongan

*Kejar mengejar jadi tontonan
 Antara kamtib dan pedagang asongan
 Pedagang asongan diburu bagai buronan
 Tragedi ini terjadi di negeri ini
 Malu dong sama bumi pertiwi
 Gengsi dong sama Bu Megawati
 Pedagang asongan dirampas
 Sungguh malangkan mereka
 Becak-becak digusurin, jadi kapalkah becaknya
 Tunjukkanlah yang benar pada kami.... generasi nanti...
 Jangan main sikut..... jangan main tendang....
 Kalau ingin perut kenyang
 Jangan main gusur kalau ingin hidup makmur
 Yang jadi pejabat..... jadilah pejabat
 Asal jangan suka sikat uang rakyat
 Yang jadi polisi jadilah polisi
 Asal jangan main sikat sembarangan
 Yang jadi pak hansip jadilah pak hansip
 Kalo kerja pak jangan suka mengintip
 Yang jadi pak lurah jadilah pak lurah
 Ngurus KTP, biasa saja....
 Yang jadi pak ABRI..... jadilah pak ABRI
 Asal jangan suka pukul rakyat pribumi*

Melalui syair-syair lagu para pengamen jalanan menggambarkan tingkah polah aparat negara ke dalam berbagai ekspresi. Dalam lagu *Pedagang Asongan*, misalnya, pengamen jalan mengekspresikan aparat negara sebagai kekuatan yang senang menggusur, menyikuk, menendang, dan merampas hak hidup kelompok marginal di perkotaan, seperti tukang becak, pedagang asongan, bahkan mereka sebagai pengamen jalanan. Dalam lagu itu para pengamen jalanan mengekspresikan aparat negara seharusnya malu terhadap bumi pertiwi dan gengsi terhadap Megawati, yang pada saat syair lagu dibuat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada tataran teortik, bagi Max Weber (dalam Ritzer, 1996) aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya diatur melalui peraturan perundangan yang ketat, hirarkhi kewenangan yang jelas, dan bahkan harus ada pemisahan antara pemilikan yang *private* (pribadi) dengan pemilikan yang *public*. Pemisahan ini bertujuan untuk meredusir penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Namun pada tataran empirik acapkali aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya tidak bisa membedakan antara pemilikan yang *private* dengan pemilikan yang *public*. Sudah menjadi fenomena umum kendaraan dinas pada hari libur lalu lalang di jalan raya, bukan dipakai sebagai sarana untuk menjalankan tugas kantor, melainkan untuk kepentingan pribadi. Pemberitaan di media massa setiap hari mengabarkan pengadilan terhadap para pejabat negara yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, ilegal logging, penyelundupan BMM (Bahan Bakar Minyak), dan lain-lain.

Perhatian terhadap fenomena sosial semacam itu bukan hanya milik masyarakat dari strata menengah-atas, pengamen jalanan pun peka dan kritis, bahkan protes terhadap fenomena-fenomena itu. Mereka mempunyai cara dan media sendiri untuk mengajukan kritik sosial dan protes. Lagu dan pekerjaan mereka jadikan cara dan media untuk melakukan protes. Melalui lagu dan

alunan nada mereka mengkomunikasikan pesan kepada siapa saja yang berada di dalam kendaraan umum. Mereka tidak mempedulikan apakah pesan yang mereka sampaikan diperhatikan atau tidak. Bagi pengamen jalan melalui lagu dan alunan nada mereka telah menyampaikan kebenaran kepada publik.

Tiang Negara

*Kau tabu rayap-rayap makin banyak di mana-mana
Di balik baju resmi, merongrong tiang negara
Kau tabu babi-babi makin gemuk di negari ini
Mereka dengan tenang memakan desa dan kota
Rayap-rayap yang ganas merayap
Berjas dasi dalam kantor,
Makan minum darah rakyat
Babi-babi yang gemuk sekali
Tenang, tentram, berkembang biak
Tak ada yang peduli menggemuk para babi
Lautan sawah dan hutan
Menggencet anak rakyat
Meremas jantung mereka
Merayap para rayap
Dalam bumi yang kian rapuh
Resahnya tipu rakyat
Terbantai tanpa ampun*

Dalam lagu yang mereka beri judul *Tiang Negara*, misalnya, para pengamen jalanan mengekspresikan tingkah polah aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat dengan sebutan *rayap*. Mereka menyebutnya rayap untuk menggambarkan kerakuran aparaturnegara yang suka menghabiskan uang rakyat. Masyarakat umum menganggap bahwa rayap adalah binatang sejenis serangga yang sangat berbahaya bagi bangunan rumah.

Rayap-rayap, meskipun serangga, namun dapat *mengerogoti* dan menghancurkan bangunan rumah berukuran raksasa dalam waktu yang relatif cepat. Bangunan rumah akan roboh bila tiang-tiangnya digerogeti oleh rayap. Oleh para pengamen, negara diibaratkan bangunan rumah, sedangkan para koruptor adalah rayap-rayap yang siap merobohkan dan menghancurkan bangunan rumah tersebut.

Rayap-rayap di mata pengamen jalanan tidak hanya suka makan uang rakyat, melainkan juga suka berkolaborasi (kolusi) dengan rayap-rayap lainnya, rayap-rayap suka melakukan pemaksaan, dan bahkan siap untuk memakan tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat.. Hasil korupsi mereka nikmati dengan cara melakukan konsumsi secara menyolok mata. Dalam tataran teoritik, seperti diteorikan oleh Veblen, rayap-rayap tersebut adalah *leisure class*. Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan waktu luang yang banyak. Mereka dalam melakukan konsumsi dengan cara menyolok mata.

Tingkah polah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) aparaturnegara juga mereka ekspresikan dalam lagu *Indonesia Oye*. Dalam syair lagu ini pengamen jalanan ekspresikan bahwa para koruptor adalah orang-orang yang suka makan uang rakyat. Untuk memakan uang rakyat tidak perlu melakukan pemaksaan, melainkan cukup dengan melakukan tindakan korupsi, dan hasil korupsi sudah dapat dinikmati.

Di mata pengamen jalanan aparaturnegara birokrasi tidak lebih sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Melalui kolaborasi dengan aparaturnegara birokrasi, para pemilik modal melakukan ekspansi untuk memperluas usahanya di wilayah-wilayah pedesaan yang subur. Dengan modal yang mereka miliki siap untuk membeli apa saja yang dimiliki oleh penduduk di wilayah pedesaan.

Melalui bait-bait lagu para pengamen jalanan menggambarkan bahwa tanah-tanah pertanian yang subur di kawasan

pedesaan semakin sempit akibat dari modernisasi yang melanda kawasan pedesaan. Dalam bahasa mereka, mereka memaknai modernisasi di kawasan pedesaan sebagai penggusuran sawah rakyat. Untuk melakukan penggusuran sawah rakyat di mata pengamen jalan tidak perlu datang ke desa, melainkan cukup menjalin kolusi dengan aparaturnegara.

Indonesia Oye

Ingin makan uang rakyat (banyak)

Bukan berarti harus me(maksa)

Cukup dengan korupsi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Ingin gusur sawah rakyat (desa)

Bukan berarti harus ke (desa)

Cukup dengan kolusi, semua terpenuhi

Kita tinggal menikmati

Hai Indonesiakn (hai Indonesiakn)

*Tanah subur rakyat nganggur (tanah subur rakyat
nganggur)*

Hai Indonesiakn

Sawah rakyat kamu gusur

Tanam padi, tumbuh pabrik

Tanam jagung, tumbuh gedung

Tanam modal, tumbuh korupsi

Tanam cinta, tumbuh aborsi

Tanam demonstran, tumbuh TNI

Modernisasi yang semakin deras menyentuh wilayah pedesaan dilihatnya sebagai fenomena konversi fungsi lahan pertanian. Modernisasi di wilayah pedesaan, di mata pengamen jalanan, bukan bermakna perubahan yang membawa kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera. Yang terjadi justru banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, kemudian menjadi pengangguran, karena lahan pertaniannya berubah fungsi. Dalam bait-bait lagu konversi fungsi lahan ini mereka ekspresikan seperti *tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh*

gedung. Bagi mereka modernisasi di pedesaan seperti itu hanya akan melahirkan pengangguran, seperti bait lagu *tanah subur rakyat nganggur*.

Bagi pengamen jalanan pembangunan identik dengan ketidakadilan, penindasan, penggusuran, penderitaan, dan bahkan pembunuhan. Di mata pengamen jalanan, pembangunan milik aparaturnya negara dan para pemilik modal. Rakyat kecil justru dianggap oleh pengamen jalanan menjadi korban dari pembangunan. Pembangunan bukan menjadi hak rakyat kecil.

Dalam perspektif modernisasi, pembangunan adalah upaya untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat yang belum modern (terbelakang) menjadi kehidupan yang modern. Masyarakat modern ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang modern, gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan modern, dan lainnya. Karena itu, perkampungan kumuh perlu ditata dan dimodernkan agar mempunyai nilai lebih, yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan melalui *trickle down effect*.

Dalam pelaksanaannya, acapkali menggunakan suprastruktur, seperti ideologi, birokrasi, dan militer, sebagai instrumen untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan pembangunan tersebut. Atas nama ideologi keindahan kota dan pembangunanisme, perkampungan kumuh sudah menjadi keharusan untuk digusur, karena sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan lahan dan nilai ekonominya rendah. Bahkan para investor dan aparaturnya negara menggunakan ideologi demi keindahan kota dan pembangunanisme untuk menjamin kepentingan-kepentingannya. Dalam ideologi pembangunanisme siapa yang menolak tanahnya digusur dianggap tidak mensukseskan pembangunan, dan bahkan diancam akan diberi label-label seperti masih berbau PKI (Partai Komunis Indonesia), dan sebagainya. Atas nama keindahan kota dan pembangunanisme investor atas “seijin” aparaturnya negara me-

netapkan secara sepihak harga ganti rugi tanah dan bangunan, bahkan tanpa ganti rugi bagi tanah dan bangunan yang digusur.

Demi keindahan kota dan pembangunan masyarakat yang menempati perkampungan kumuh harus merelakan tanah dan bangunannya digusur dengan atau tanpa ganti rugi. Ganti rugi yang diterima pun acapkali tidak cukup untuk membeli tanah dan rumah di tempat lain dan biaya sosial dan ekonomi lainnya. Mereka harus meninggalkan rumah dan tanahnya yang telah lama mereka tempati. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya, seperti pekerjaan dan sekolah anak-anaknya. Dengan demikian penggusuran tidak hanya bermakna orang kehilangan tanah dan bangunan, tetapi juga kehilangan akses ke sumber-sumber daya kehidupan. Mereka mengekspresikan fenomena sosial penggusuran tersebut seperti syair lagu berikut:

Nglawan

*Mengapakah harus ada yang digusur
Sementara mereka juga punya hak
Apakah ini pembangunan
Kalau rakyat kecil selalu jadi korban
Haruskah untuk keindahan kota
Memaksa korbannya mereka yang lemah
Jangan biarkan derita terus mengalir
Sampai kapankah ini akan berakhir
Bangunlah sudah tiba waktunya
Untuk kita saling bergandeng tangan
Merebut segala perubahan
Ayo lawan, lawan, lawan, hancurkan
Segala bentuk penindasan
Segala bentuk penggusuran*

Secara teoritis anggota militer dan polisi merupakan alat negara yang diberi kewenangan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Mereka harus menjalankan fungsi untuk

menjaga keutuhan teritorial negara, dan melindungi serta menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Organisasi militer dan polisi juga merupakan satu-satunya institusi negara yang diberi kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik untuk menciptakan keutuhan teritorial negara, melindungi dan menciptakan rasa aman.

Namun pada tataran empirik tidak selalu fungsi-fungsi ideal tersebut dijalankan oleh aparaturnya militer dan kepolisian. Dalam banyak kasus, paling tidak di mata para pengamen jalanan, tingkah polah aparaturnya pertahanan dan keamanan mulai dari hansip, polisi, dan tentara acapkali justru lupa tentang fungsi-fungsi yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Bagi pengamen jalanan, aparaturnya militer dan kepolisian, tidak lebih sebagai aparaturnya represif negara yang melakukan penindasan, sok berkuasa, menyiksa, kejam, dan bahkan membunuh rakyat kecil, yang tidak berkuasa dan lemah.

Mengadu Pada Indonesia

*Hari ini saya sengaja mengadu
Kepadamu Indonesiaku
Tentang ulah aparatmu yang lupa waktu
O.... tentu kamu tahu
Bayangkan ulah mereka
Mereka sok berkuasa
Mereka suka menyiksa
Bahkan membunuh sudah biasa
Aku melihat tindakan aparat
Pukul sana pukul sini sampai rumah sakit
Aku melihat kekejaman aparat
Tembak sana tembak sini sampai ke akhirat
Sialan (sialan)
Aparat kurang ajar
Rakyat kecil dijadikan bahan percobaan
Sialan (sialan)
Aparat itu preman
Kuasanya melebihi kuasa Tuhan*

Orde Itu Bernama Orde Babi

Meskipun rezim Orde Baru telah runtuh tahun 1998 dengan ditandai gulingnya kekuasaan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia, para pengamen jalanan belum sepenuhnya melupakan trauma politik yang terjadi selama 32 tahun tersebut. Era reformasi, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, di mata pengamen jalanan belum sepenuhnya menciptakan perubahan, paling tidak perubahan menurut mereka. Mereka mencita-citakan bahwa era reformasi akan mampu menciptakan perubahan yaitu seperti ungkapan *mandi susu cita-citaku*, bukan *pinggang sakit tidur di kursi*. Era reformasi di mata pengamen jalanan tak ubahnya perpanjangan Orde Baru. Melalui lagu *Orde Babi* para pengamen jalanan mengkritik orang-orang yang mengaku reformis saat pemilu, tetapi setelah menang pemilu melupakan dan meninggalkan rakyat.

Orde Babi

Pinggang sakit tidur di kursi

Mandi susu cita-citaku

Ngaku reformis saat Pemilu

Setelah menang rakyat dilupakan

Setelah menang rakyat ditinggalkan

Rambut gondrong uwan dan ketombean

Siang malam kerjanya kotak katik nomer

Penguasa baru takut adili golkar

Koruptor Orba malah dibiarkan

Koruptor Orba dijadikan saran

Laguku ini anti Orde Baru

Orba jahat sengsarakan banyak rakyat

Laguku ini mengajak kamu

Rakyat miskin bersatu boikot pemilu

Rakyat miskin bersatu hancurkan orde babi

Penguasa pada masa era reformasi dipandang sebagai penguasa yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadili Golkar, sebagai simbol Orde Baru yang tersisa. Penguasa era reformasi dianggapnya tidak mempunyai keberanian untuk mengadili para koruptor Orde Baru, bahkan membiarkan dan memposisikan mereka sebagai pemberi saran pemerintahannya.

Lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan pada setiap kesempatan ini secara eksplisit mereka sebut sebagai lagu anti Orde Baru, sebuah rezim yang mereka anggap telah menyengsarakan rakyat. Melalui lagu ini mereka berupaya membangun kesadaran politik di kalangan rakyat miskin untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Mereka mengajak rakyat miskin untuk bersatu padu memboikot pelaksanaan Pemilu. Lagu ini mereka akhir dengan sikap kontravensi yang ditujukan kepada rakyat miskin untuk menghancurkan sebuah rezim yang mereka beri nama *Orde Babi*.

Nyanyian Demokrasi

Tidak selamanya benar apa yang diteorikan oleh Saymor Martin Lipset, seorang ahli politik Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa demokrasi dibangun di atas landasan variabel ekonomi dan sosial. Tingkat melek huruf dan kesejahteraan ekonomi menjadi prasyarat utama pembangunan demokrasi di suatu negara. Lipset mengajukan proposisi teoritis bahwa demokrasi harulah dibangun dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat melek huruf penduduk yang tinggi. Sebaliknya tingkat kesejahteraan ekonomi dan melek huruf penduduk yang rendah menyebabkan rendahnya kesadaran berdemokrasi penduduk.

Tidak demikian halnya di kalangan pengamen jalanan. Mereka yang rata-rata berasal dari lapisan masyarakat bawah secara ekonomi dan tingkat melek huruf mereka juga masih rendah telah mempunyai kesadaran berdemokrasi yang tinggi.

Meskipun mereka di kota Surabaya adalah orang-orang yang termarjinalkan, namun mereka mempunyai pemahaman tentang demokrasi dan berdemokrasi yang memadai, paling tidak gagasan-gagasan demokrasi mereka tuangkan ke dalam bait-bait syair lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan. Pengamen jalanan menjadikan syair lagu untuk mengekspresikan kehidupan demokrasi di kalangan mereka, bahkan melalui syair lagu mereka mencoba membangun kehidupan demokrasi di lingkungan masyarakat lebih luas dengan pesan-pesan moralnya.

Bagi mereka demokrasi adalah simbol dari ekspresi kebebasan, kebenaran, dan keadilan. Demokrasi adalah adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas berpendapat dan berorganisasi, bebas dari pengusiran, bebas dari penekanan, bebas dari penekanan, bebas dari rasa takut, bebas dari sistem politik yang totaliter serta bebas dari penjajahan oleh bangsa sendiri. Melalui judul lagu *Kemerdekaan* dan *Turun ke Jalan* pengamen jalanan melalui gagasan-gagasannya mengajukan kritik terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru yang belum sepenuhnya merdeka. Masyarakat dipandang masih terbelenggu oleh penindasan, penekanan, tidak mempunyai kebebasan berpendapat dan berorganisasi, rasa takut, dan dibelenggu oleh pemerintahan yang otoriter.

Melalui syair lagu *Kemerdekaan* pengamen jalanan memandang adanya kebebasan berbicara bagi setiap warga negara karena merupakan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara tersebut dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negara. Sebagai negara merdeka, menurut pandangan mereka, wujud demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah penduduk harus bebas dari penindasan, penekanan, dan pengusiran. Dalam pandangan pengamen jalanan negara demokrasi adalah negara yang memberi keadilan dan mampu menegakkan kebenaran

Turun ke Jalan

*Mari kita bergandeng tangan
Tuk menggalang kekuatan
Dengan turun ke jalan
Mari kita kepalkan tangan
Tuk lontarkan perlawanan
Terus maju ke depan
Mati kita acungkan tangan
Tuk teriakan
Segala tuntutan perubahan
Rakyat pasti menang
Memenangi penjajahan
Karena kemerdekaan
Adalah jiwa kita
Rakyat pasti menang
Mengenyahkan penindasan
Karena keadilan
Adalah nurani kita
Yakinlah rakyat pasti menang
Karena kemerdekaan adalah jiwa kita
Karena keadilan adalah nurani kita*

Selain itu mereka dalam lagu *Turun ke Jalan* menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di masyarakat demokrasi yang dicita-citakan dengan bait-bait lagu yang diulang-ulang *rakyat pasti menang*. Segala bentuk penindasan dan penjajahan akan dimenangkan oleh rakyat dengan bergandengan tangan untuk menggalang kekuatan. Di mata para pengamen jalanan kemerdekaan merupakan jiwa mereka, dan keadilan merupakan nurani mereka.

Bahkan pengamen jalanan dalam syair lagu *Kompeni* memandang rezim Orde Baru tak ubahnya seperti Kompeni pada masa kolonial Belanda. Tak ubahnya seperti jaman Kompeni, pada saat ini rakyat di negeri ini belum memperoleh kemerdekaannya. Rakyat merasa dijajah oleh bangsannya sendiri

dan bagaikan hidup dalam penjara. Rezim Orde Baru melakukan penindasan dan menimbulkan penderitaan rakyat. Digagas juga rakyat dalam kondisi diintimidasi, dan kehidupan tidak ada demokrasi karena demokrasi dimatikan. Wakil rakyat digambar tidak ubahnya antek-antek Kompeni yang suka *ngapusi* (membohongi) rakyat.

Kemerdekaan

*Kemerdekaan untuk bicara
Harus kita rebut
Karena berbicara adalah hak azazi
Untuk berbicara dilindungi konstitusi
Kami menentang pengusuran
Kami menentang pencekalan
Kami menentang penindasan
Karena ini negara merdeka
Bukan negara yang dijajah
Karena ini negara demokrasi
Bukan negara totaliter
Mari bersama bikin organisasi
Mari bersatu menggalang kekuatan
Kita bikin tuntutan
Dengan turun ke jalan
Tegakkan kebenaran
Tegakkan keadilan*

Dalam negara demokrasi ada kebebasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi politik dengan berbagai cara dan media, serta melakukan komunikasi politik. Baik dalam lagu *Kemerdekaan*, *Turun ke Jalan*, maupun *Kompeni* para pengamen jalanan mengajukan solusi untuk menciptakan masyarakat yang bebas, merdeka, berkeadilan dan tegaknya kebenaran hanya dapat dicapai melalui penggalangan kekuatan dan secara bersama-sama turun ke jalan. Turun ke jalan menjadi gagasan utama bagi pengamen jalanan untuk melakukan partisipasi politik. Bagi

pengamen jalanan pilihan ini menjadi pilihan satu-satunya ketika semua saluran komunikasi politik buntu dan lembaga-lembaga politik, seperti eksekutif, legislatif, dan partai politik tidak menjalankan fungsi idealnya.

Kompeni

*Ya percuma..... ya percuma
Dari jaman kompeni dan sampai saat ini
Kita ditindas sampai mati
Katanya rakyat sudah tak dijajah
Tapi hanya masih terpenjara
Katanya negara sudah merdeka
Tapi rakyat sudah menderita
Ya percuma..... ya percuma
Dari hari ke hari
Demokrasi diinjak mati
Katanya bebas berorganisasi
Tapi masih diintimidasi
Katanya sudah beraspirasi
Wakil rakyat masih membohongi
Ya ngapusi..... ya ngapusi
Mari bangkitlah kawan semua
Tuk hancurkan segala bentuk kekuasaan
Ayo bangkitlah kawan semua
Tuk merebut segala bentuk hak kita yang dirampas*

Tsunami: Solidaritas dan Duka Pengamen Jalanan.

Duka Aceh juga menjadi duka bagi para pengamen jalanan. Apa yang dirasakan oleh rakyat Aceh di ujung Barat Pulau Sumatra juga dirasakan oleh para pengamen jalan di ujung Timur Pulau Jawa ini. Para pengamen jalanan berempati terhadap duka masyarakat Aceh yang mengalami bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam yang dialami masyarakat Aceh menjadi keprihatinan dan duka masyarakat dunia. Masyarakat dunia berempati seolah-olah apa yang sedang dialami oleh masyarakat

Aceh juga sedang mereka rasakan. Masyarakat dunia mengekspresikan rasa prihatin dan duka dengan cara memberikan bantuan berupa materi maupun nonmateri.

Tsunami

*Bencana melanda negeri ini
Ribuan jiwa melayang pergi
Akibat gelombang tsunami
Banda Aceh nama tempat peristiwa
Meulaboh jadi saksi yang nyata
Mayat-mayatnya sudah bergelimpangan
Ini salah siapa, ini dosa siapa
Mungkinkan Tuhan memurkai kita
Atas segala perbuatan kita
Darah bersimbah jiwapun merana
Selamat jalan wahai saudaraku
Damailah wahai anak negeri
Ciptakan sebuah lagu perdamaian
Satukan tujuan demi cita-cita
Bangunlah kembali Banda Aceh
Siang panas.... semoga anda bahagia
Bercanda bercumbu dengan alam sekitarnya
Tak ada yang pantas untuk dibanggakan
Karena kita kan kembali pada Tuhan
Pokoknya di mana saja anda
Harus hati-hati
Sebentar lagi Joyoboyo
Banyak copet keluyuran
Dompot di saku belakang
Jangan sampai pindah tangan
Nona pakai perhiasan
Awat dijambret orang
Ini sekedar himbauan arek suroboyo*

Seperti masyarakat lainnya, bencana tsunami yang dialami oleh masyarakat Aceh juga menjadi keprihatinan dan duka yang mendalam bagi para pengamen jalanan. Dengan caranya sendiri mereka mengekspresikan rasa keprihatinan dan dukanya. Bagi pengamen jalanan untuk membantu beban masyarakat Aceh tidak harus dengan memberikan bantuan berupa materi, namun dengan bantuan nonmateri dan tanpa harus datang ke Aceh. Para pengamen jalanan mempunyai cara sendiri untuk membantu masyarakat Aceh. Layaknya seniman, mereka membantu masyarakat Aceh dengan lagu.

Bencana alam, seperti gelombang tsunami, ternyata mampu meretas batas-batas negara, budaya, kelas, dan lainnya. Tsunami mampu menggugah kesadaran setiap individu manusia yang dalam dirinya dibekali rasa dan karsa. Kesadaran pengamen jalan mereka ekspresikan melalui lagu. Dalam bait-bait lagu mereka mencoba mengkaitkan bencana alam tersebut dengan manusia yang melakukan kesalahan dan dosa. Akibat kesalahan dan dosa tersebut, Tuhan telah menunjukkan murkanya kepada manusia yang lemah. Melalui lagu pengamen jalanan juga mengajak masyarakat Aceh untuk menciptakan perdamaian dan bersatu untuk membangun kembali Aceh yang telah porak poranda.

Lebih dari itu, pengamen jalanan di wilayah perkotaan dianggap menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Mereka oleh masyarakat kebanyakan dianggap sebagai orang-orang yang kalah dalam pertarungan untuk memperebutkan sumber daya di kota. Mereka tidak memiliki sumber daya, sehingga mereka adalah orang-orang yang tertutup peluangnya bahkan ditolak oleh sektor formal. Mereka tidak mempunyai pilihan kecuali memasuki sektor informal, yaitu mengamen. Sebagai anak jalanan mereka tidak lepas dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat, yaitu kehidupan mereka yang keras, dan sangat dekat dengan dunia kejahatan, seperti

pencurian, penjambretan, pencopetan, perampokan, dan lainnya. Sebagai *arek Suroboyo* secara keseluruhan mendapatkan stereotipe *bonek* (bondo nekat), yang senang melakukan pemalakan, perampasan, pengrusakan, dan lainnya.

Namun tidak demikian halnya dengan para pengamen jalanan di kota Surabaya. Mereka jauh dari stereotipe yang dikembangkan oleh masyarakat itu. Meskipun sebagian besar waktunya mereka habiskan di jalanan, melalui syair lagunya mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati nurani dan moralitas. Paling tidak dalam lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan untuk para korban tsunami di Aceh, misalnya, mereka menyelipkan peringatan dan pesan moral kepada penumpang angkutan umum agar berhati-hati terhadap segala bentuk kejahatan yang dapat menimpa para penumpang, baik pencopetan maupun penjambretan. Pesan moral ini mereka ekspresikan sebagai jawaban terhadap label-label yang sifatnya stigmatif, seperti bonek, keras, suka berkelahi, suka merampas, suka memalak, dan melakukan tindakan kriminal lainnya, yang ditujukan kepada *arek Suroboyo*. Makna syair lagu itu juga mereka tunjukkan kepada masyarakat bahwa *arek Suroboyo* masih mempunyai moralitas yang tinggi (lihat lagu *Tsunami*)

Lagu Untuk Anak Jalanan.

Melalui lagu para pengamen jalanan mengekspresikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari anak jalanan. Trotoar dan jalan raya seolah-olah menjadi saksi bisu kehidupan anak jalanan yang mengais rejeki dari mendengarkan suara tanpa mengenal lelah. Dalam lagu-lagunya para pengamen jalan menggambarkan anak-anak di bawah umur menikmati masa bermainnya di trotoar dan pinggir jalan. Sambil bermain mereka bekerja. Sambil bernyanyi mereka juga bekerja. Anak-anak seperti itu digambarkan telah kehilangan kasih sayang yang didambanya. Mereka juga

merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tiada kunjung tiba. Itulah cerita kehidupan, cerita kehidupan anak jalan. Mereka menunggu mimpi menjadi kenyataan. Mereka hanya berharap perjalanan waktulah yang akan berbicara.

Anak Jalanan

*Anak-anak bermain di pinggir jalan
Anak-anak gembira dengarkan suara
Anak-anak bernyanyi sambil bekerja
Anak-anak bekerja terus menyanyi
Hu..... hu..... hu.....
Hu..... hu..... hu..... (2x)
 Bermain sambil bekerja,
 Bermain sambil bermain (2x)
 Itulah hari-hariku
 Itulah suasanaku
 Itulah kondisiku
 Itulah..... a ha
Kudengar kudengar dan kudengar lagi
Di jalan kulihat dan kulihat lagi
Seorang anak kecil terluka hatinya
Hilang kasih sayang yang didambanya
Berjalan susuri sepanjang trotoar
Hari demi hari tiada bosan kau bernyanyi
Kau songong matahari dengan harapan
Akankah kau bahagia kan kau jelang
 Inilah cerita dari kehidupan
 Hati yang luka rindu bahagia
 Akankah mimpi-mimpi jadi kenyataan
 Biarlah waktu yang bicara
 Ho..... ho..... ho..... ho.....
 Biarlah waktu yang bicara*

Mereproduksi Lagu sudah Populer

Memang, tidak selalu pemusik jalanan mengambil tema-tema lagu protes sosial. Namun demikian, diketahui ternyata setiap lagu yang dibawakan mempunyai makna bagi pemusik

jalan, selain konteks dan kondisi obyektif pengamen jalan. Mak As, yang sudah tua usianya misalnya lebih memilih lagu islami karena faktor usianya. Kentrungan yang selalu dia bawa saat Mak As mengamen di jalan. Alat ini tidak ia beli di toko, karena memang tidak ada toko yang menjualnya, melainkan ia buat sendiri. Kentrungan adalah sebuah alat yang terbuat dari bahan kayu dan senar dari karet. Alat ini cukup sederhana dan mudah dibuat. Kata Mak As, siapa saja bisa membuat dan memainkannya. Ia tidak mengeluarkan biaya untuk membuat alat ini, karena ia hanya memanfaatkan kayu dan karet bekas.

Alat ini dia pakai untuk mengiringi lagu-lagu yang bernafaskan Islami dan lagu-lagu Jawa. Mak As memilih lagu-lagu qosidah, lagu-lagu sholawat, dan kadang-kadang dia selingi dengan lagu-lagu Jawa. Bagi Mak As menyanyi lagu harus disesuaikan dengan kondisi penyanyi dan konsumennya. Menurut penilaiannya lagu yang tepat untuk penyanyi seusia dia (46 tahun) adalah lagu-lagu religius dan lagu-lagu Jawa. Selain itu, ia menyanyikan lagu-lagu tersebut juga berdasarkan diri pada permintaan konsumen.

Masak mas orang setua usia saya menyanyikan lagu-lagu anak muda. Tidak pantas dan siapa yang mau dengar. Rasanya lebih pas saya menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat dan lagu-lagu Jawa. Lagu yang saya nyanyikan saya sesuaikan dengan umur saya dan permintaan dari orang-orang yang nanggap saya. Biasanya orang-orang itu suka dengan lagu-lagu Jawa.

Lagu-lagu yang dibawakan Mak As dalam mengamen lebih banyak unsur rekreatifnya. Orang seusia Mak As tidak menggunakan lagu-lagu untuk melakukan kritik sosial atau protes terhadap kondisi dirinya maupun kondisi masyarakat. Kondisi kemiskinan yang dialaminya bersama keluarga seolah-olah tidak ia rasakan sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Ia lebih memposisikan dirinya sebagai penghibur orang lain dengan mendapatkan kompensasi uang.

Sama dengan Mak As, Naning dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengamen jalanan hanya bermodalkan alat musik kentrungan dan suaranya yang pas-pasan. Bagi Naning kentrungan sangat membantu dia dalam menyanyikan lagu-lagu yang ia bawaikan. Lain dengan Mak As, Naning yang usianya masih relatif muda, lebih memilih lagu-lagu beraliran dangdut dan campursari. Mudah dinyanyikan menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan aliran musiknya. Selain itu, lagu-lagu tersebut cocok dinyanyikan oleh orang seusianya.

Identik dengan Mak As, Naning tidak pernah mempunyai gagasan untuk menjadikan lagu-lagu yang ia nyanyikan sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes. Meskipun hidup dalam kemiskinan, namun ia bersama suaminya rela menerima keadaan itu. Bagi Naning, pendapatan Rp 10.000 hingga Rp 15.000 sehari sudah dirasakan cukup. Ia bersama suaminya yang tinggal di Jagir Wonokromo itu mengaku setiap hari ia mengamen mulai pagi hari hingga sore hari.

Deni mempunyai alasan subyektif yang berbeda. Ia lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer yang digandrungi oleh kalangan anak muda. Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh kelompok musik, seperti: Peterpan, Padi, dan Slank. Lagu-lagu dari grup-grup musik tersebut, bagi Deni, disukai dan digandrungi oleh kalangan remaja yang menjadi obyek dia mengamen di Jl. Dharmawangsa. Bagi Deni dan teman-temannya Jl. Dharmawangsa merupakan jalan yang potensial dapat mendatangkan penghasilan besar. Di sepanjang jalan itu banyak beroperasi warung lesehan dan kawasan kos-kosan mahasiswa. Deni mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp 20.000 per hari dari mengamen di sepanjang jalan itu. Belakangan ini Deni dan teman-temannya lebih memilih mengamen di Jl. Pemuda dekat Monkasel (Monumen Kapal Selam). Tempat ini dia pilih karena lebih menguntungkan selain ramai, juga dia bisa bekerja sambil sebagai tukang parkir.

Kondisi penumpang kendaraan umum menjadi pertimbangan Iwan memilih lagu-lagu yang dinyanyikan selama mengamen. Bagi Iwan lagu yang dinyanyikan oleh seorang pengamen harus disesuaikan dengan kondisi penumpang. Sebagai pengamen ia mempersiapkan lagu-lagu dengan banyak aliran. Ketika Iwan menghadapi penumpang yang rata-rata usianya lanjut usia ia memilih lagu-lagu *oldist* atau lagu-lagu nostalgia, sebaliknya ketika berhadapan dengan penumpang yang rata-rata usianya masih muda dia menyanyikan lagu-lagu populer yang sedang hits, misalnya lagu-lagu yang dinyanyikan Dewa, Radja, Ada Band, dan lainnya.

Iwan kadang-kadang menyanyikan lagu yang menyindir polah tingkah polisi pamong praja yang dinilainya tidak adil dan tidak manusiawi. Polisi pamong praja dia ekspresikan dalam syair lagu sebagai aparat yang suka mengobrak warung, tukang becak, dan pengamen. *“Sebenarnya jangan seperti itu caranya, sebaiknya diberi tempat atau lahan sebelum diobrak. Terkadang saya tidak sepenuhnya menyalahkan polisi pamong praja, karena mereka hanya menjalankan tugas dari yang lebih atas,”* kata Iwan.

Lagu-lagu bertema cinta, kata Wawan, tidak cocok dinyanyikan oleh seorang pengamen jalanan sesusia dia. Lagu-lagu tersebut lebih cocok dinyanyikan oleh penyanyi di media televisi. Lagu-lagu Iwan Fals yang syairnya berisi kritik sosial yang menjadi pilihan Wawan. Ia kadang-kadang juga menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, yang juga mempunyai syair yang mengandung kritik sosial dan protes. Wawan yang baru berusia 23 tahun menjadikan lagu dan mengamen sebagai media untuk melakukan kritik sosial dan protes terhadap kondisi masyaralat yang senjang dan tidak adil. Kaena itu, ia dalam memilih lagu ia kaitkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari dia sebagai pengamen jalanan. Termasuk mengekspresikan kehidupan anak jalanan dalam syair-syair lagu yang dia ciptakan dan nyanyikan. Sebagai anak jalanan dia tidak mempunyai media untuk mengungkapkan kondisi

kehidupannya yang rentan. Lembaga-lembaga suprastruktur politik seperti lembaga legislatif yang menjalankan fungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat dianggapnya bukan media yang tepat dan efektif. Seolah-olah semua saluran yang idealnya dapat menampung aspirasi dan keluhan kehidupannya tertutup. Dia bersama-sama dengan teman mengamen lebih memilih menciptakan lagu sendiri untuk mengungkapkan kehidupan anak jalanan yang rentan tersebut.

Penutup:

Suatu Analisis Wacana tentang Makna Lagu Anak Jalanan

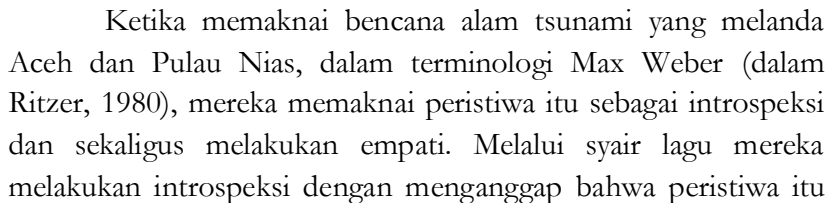
Bagi sebagian masyarakat berkesenian untuk memenuhi kebutuhan akan rasa keindahan, sebagian masyarakat lainnya berkesenian selain untuk memenuhi rasa keindahan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan yang sifat material, bahkan dipakai untuk mengekspresikan rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan kesenjangan. Alasan subyektif orang memenuhi kebutuhan rasa keindahan yang bersifat non-material lebih bersifat rekreatif, yang dalam bahasa Max Weber (dalam Ritzer, 1996) disebut dengan tindakan sosial afektual. Ketika dipakai sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan material, berkesenian seperti itu lebih bersifat rasional instrumental. Berkesenian sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial dan kritik sosial. Cara ini lebih bersifat ideologis.

Pandangan seperti itu justru merupakan antitesis dari pandangan Karl Marx (Ritzer, 1996) yang menganggap kesenian adalah bagian dari suprastruktur yang lebih menjamin kepentingan-kepentingan pemilik modal. Bagi para pemilik modal dunia kesenian diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan, misalnya, yang terjadi pada dunia hiburan di Indonesia. Di balik gemerlapnya dunia hiburan di Indonesia, para pemilik modal mendapatkan keuntungan besar.

Para pengamen jalanan mencoba mengkaitkan kondisi obyektif masyarakat dan kondisi subyektif kehidupannya dengan substansi syair-syair lagu yang mereka ciptakan. Kondisi obyektif dan subyektif tersebut mereka ekspresikan melalui rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna dalam lagu-lagu. Dalam posisi demikian para pengamen jalanan memposisikan kesenian tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya material, mereka juga memposisikan kesenian melalui syair-syair lagu yang diciptakan dan dinyanyikan sebagai media untuk melakukan kontrol sosial, kritik sosial, bahkan protes terhadap tingkah polah aparat birokrasi dan aparat represif negara yang mereka nilai telah melakukan ketidakadilan, penindasan, perampasan, penggusuran, dan bahkan pembunuhan kepada orang-orang yang berasal dari masyarakat lapisan bawah. Mereka juga menggunakan syair lagu-lagu yang mereka ciptakan untuk melakukan kritik terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang meluas di Indonesia dan kebijakan-kebijakan supratsruktur yang lebih memihak kepada para pemilik modal daripada memihak masyarakat kelas bawah. Bahkan melalui lagu-lagu yang diciptakan, mereka mengekspresikan apa yang mereka alami sebagai pengamen jalanan dan mengekspresikan preferensi mereka tentang *the best rezim* atau masyarakat yang ideal.

Bagi pengamen jalanan, melalui syair lagu, *the best rezim* atau masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang dicirikan oleh adanya kemerdekaan dalam semua aspek kehidupan. Negara yang warga negaranya memperoleh kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, bebas dari rasa takut, bebas dari penindasan, bebas penggusuran, bebas dari polah tingkah aparat birokrasi dan keamanan yang represif, bebas dari pembunuhan, bebas dari kemiskinan, dan kebebasan lainnya. Melalui syair lagu-lagunya para pengamen jalanan mempunyai preferensi tentang demokrasi dan negara yang merdeka. Mereka menyebut *orde babi* untuk menggambarkan protes mereka terhadap pemerintah Orde Baru

Bagan 8.1
Musik Jalanan:
Cermin Hubungan antara Negara dan Pengamen Jalanan



sebagai akibat dari dosa manusia dan Tuhan menunjukkan murka-Nya. Dalam empatinya para pengamen jalanan mempunyai kesadaran bahwa di tengah-tengah kemiskinan yang mereka alami, sebagai manusia rasa kemanusiannya tersentuh ketika sebagian dari anggota masyarakat mengalami bencana alam yang tak mampu dihadapi oleh manusia manapun. Kesedihan dan rasa kemanusiaan itu mereka ekspresikan melalui syair-syair lagu.

Bagi pengamen jalanan mengamen di jalan adalah sebagai okupasi (pekerjaan). Pekerjaan satu-satunya yang menjadi salah satu sumber pendapatan. Penhasilan mereka sebagai pengamen jalanan sangat tergantung pada kompensasi yang diberikan oleh orang lain. Mereka memperoleh penghasilan rata-rata Rp 10.000. Meskipun kecil, bagi para pengamen jalanan, yang dipentingkan adalah penghasilan tersebut diperoleh dengan cara legal dan halal. Secara sosiologis para pengamen jalanan mengalami mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial yang terjadi antar-sektor informal. Sebelum menjadi pengamen jalanan mereka rata-rata pernah bekerja di sektor informal lainnya, seperti pedagang makanan, buruh pabrik, buruh bangunan, bahkan pekerjaan tetap. Mereka mengalami mobilitas sosial karena berbagai macam sebab, mulai dari krisis ekonomi hingga penertiban oleh aparat polisi pamong praja.

Para pengamen jalanan mempunyai alasan subyektif yang beragam tentang pemilihan lagu yang dinyanyikan. Dilihat dari lagu yang dipilih dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: campursari (Jawa), religius, populer, dangdut, dan kritik sosial (lagu ciptaan sendiri). Lagu-lagu campursari dinyanyikan oleh pengamen jalanan berjenis kelamin perempuan serta usia muda dan tua, representasi dari kategori ini adalah Mak As dan Naning. Selain campursari Mak As juga menyanyikan lagu religius seperti qosidah dan sholawat. Naning juga merupakan representasi yang menyanyikan lagu dangdut. Lagu-lagu populer dan lagu-lagu yang mengandung kritik sosial lebih dipilih oleh pengamen jalan

berjenis kelamin laki-laki dan berusia relatif muda. Wawan dan Iwan merupakan representasi pengamen jalanan yang memilih lagu-lagu populer, sedangkan Termas adalah sosok yang lebih memilih lagu-lagu ciptaannya sendiri yang di dalamnya mengandung kritik sosial dan protes.

Sementara dilihat dari alasan subyektif memilih lagu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: usia, kemudahan, dan konsumen. Pengamen jalanan yang berusia tua, seperti Mak As, lebih pantas menyanyikan lagu-lagu qosidah, sholawat, dan campursari, sementara Termas yang usianya baru 20 menganggap tidak pantas menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta, ia lebih memilih lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri yang mengandung kritik sosial dan protes. Bagi Naning, ia menyanyikan lagu-lagu dangdut dan campursari karena mudah untuk dinyanyikan, sementara Wawan dan Iwan lebih mempertimbangkan selera konsumen dan menyesuaikan dengan segmen pasar. Bagi Wawan dan Iwan lebih memilih lagu-lagu yang sedang populer, seperti lagu-lagu milik Dewa, Radja, Padi, Slank, dan Peterpan untuk memenuhi selera konsumennya yang rata-rata berusia masih muda. Tidak jarang ketika berhadapan dengan penumpang bus yang rata-rata berusia lanjut mereka menyanyikan lagu-lagu nostalgia (*oldist*).

Daftar Pustaka

- Bakker, J.W.M.
1990 **Filsafat Kebudayaan. Suatu Pengantar.** Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.
- Cassier, Ernst.
1987 **Manusia dan Kebudayaan. Sebuah Esei tentang Manusia.** Diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- 194 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Danandjaja, James.

- 1983 Fungsi Teater Rakyat bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia. Dalam Edi Sedyawati dan Sapardi Djoko Damono. **Seni dalam masyarakat Indonesia. Bunga Rampai**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 1984 **Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain**. Jakarta: Grafitipers.

Darmono, Sapardi Djoko.

- 1977 Kritik Sosial dalam Sastra Indonesia: Lebah tanpa Sengat. **Prisma**. No. 10/ Tahun VI.

Krippendorff, Klaus.

- 1991 **Analisis Isi. Pengantar Teori dan Metodologi**. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Pers.

Murray, Alison J.

- 1992 Budaya Kampung dan Elok Radikal di Jakarta. **Prisma**. No. 5/Th. XXI.

Peursen, C.A. van.

- 1985 **Strategi Kebudayaan**. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius.

Ritzer, George

- 1996 **Sociological Theory**. Fourth Edition. Toronto: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 1980 **Sociology A Multiple Paradigm Science**. Revised edition. Toronto: Allyn and Bacon, Inc.

Soekiman, Djoko.

- 2000 **Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Media Abad XX)**. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Sudiarja, A.

- 1983 Susanne K. Langer: Pendekatan Baru dalam Estetika. Dalam M. Sastrapratedja. **Manusia Multi Dimensional. Sebuah Renungan Filsafat**. Jakarta: Gramedia.

Susanto, Astrid S.

- 1977 Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara. **Prisma**. No. 10/Tahun VI.

Bab 9

Mahasiswa dan Orang Miskin Kota

Kolaborasi dan Perjuangan Kaum Intelektual dan Orang Miskin Kota

FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan
Usman Mulyadi

Pendahuluan

Apa yang dialami daerah kota besar dan sekitarnya di Indonesia terutama pada tahun 1990-an adalah pertumbuhan bidang jasa dan industri yang makin pesat, meninggalkan bidang pertanian yang menjadi tujuan semula pembangunan. Tujuan semula, sektor industri dibangun untuk menopang pertanian, sesuai dengan GBHN pada Pelita I. Pertumbuhan ini ternyata mengakibatkan pengalihan fungsi lahan, dari yang semula perumahan ke pusat perdagangan atau dikenal dengan istilah CBD (*Central Bussiness District*) dan kawasan industri, dari lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman baru – harga komoditas pertanian rendah dan keuntungan dari nilai tanah untuk alih fungsi (*Kompas*, 15 Agustus 2002, “*Menteri Pertanian Bungaran Saragih: Konversi Lahan Terjadi akibat Harga Komoditas Pertanian Rendah*”; perhatikan juga Kustiawan, 1997; 15-32; bandingkan dengan kasus kota Mexico City, Sao Paolo dan Kalkuta pada Todaro dan Stilkind, 1985: 4-9), keadaan serupa terjadi di Surabaya dan daerah sekitarnya, atau dikenal dengan *Gerbangkertasusila*, dengan Surabaya, sebagai pusat pertumbuhannya.

Dari beberapa catatan, konsekuensi dari alih fungsi atau konversi lahan ini adalah terjadi “penggusuran” penghuni pemukiman “kumuh.” Setelah digusur, kemudian didirikan gedung-gedung bertingkat, baik sebagai hotel dan kantor, seperti Darmo Tegal dan Pandegiling, maupun industri, seperti daerah Rungkut (SIER) dan pemukiman baru. Perluasan kawasan industri ini juga merambah sepanjang jalan menuju Sidoarjo dan Mojokerto (Trosobo dan Krian), demikian pula Kab. Gresik dengan diawali oleh Pabrik Semen Gresik dan Petrokimia Gresik. (*lihat* laporan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur tentang *Pelayanan di Bidang Sertifikasi Tanah*, tahun 1998-1999).

Akibatnya, pertama, terjadi “penggusuran” kampung-kampung lama dan kemudian terdesak ke daerah pinggiran kota. Akibatnya, selalu ada konflik antara pengembang dan kampung lama yang akan tergusur. Konflik ini berpulang pada mekanisme perencanaan kota yang tambal sulam dan dinilai oleh masyarakat lebih menguntungkan pengembang dan kelompok kepentingan lainnya. Pihak birokrasi kota dan Dewan lebih berpihak pada pengembang dengan mengatasnamakan kepentingan publik (Surbakti, 1994: 49-68; 1996: 22; Suyanto, 1996: 37-48). Sementara itu, alasan yang serupa, sektor informal yang menjadi penopang kelompok masyarakat rentan kota agar dapat bertahan di lingkungan kota juga turut digusur, perhatikan kasus Tunjungan dan sejumlah pasar tradisional.

Kedua, akibat tergusur kampung-kampung lama, dan bergeser ke daerah pinggiran kota ini, menimbulkan konflik baru di pemukiman baru. Alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian, yaitu industri, perdagangan dan pemukiman, menimbulkan kesenjangan dan konflik antara penduduk asli dan penghuni pemukiman baru. Mereka, penduduk asli, kehilangan mata pencaharian sebagai petani ketika tanahnya dijual, dan sementara itu uang “landasan” biasanya dibelikan barang-barang konsumtif – akibatnya setelah uang habis, begitu pula dengan barang-barang-

nya, mereka menjadi pengangguran, atau bila memenuhi syarat, menjadi buruh di pabrik yang berdiri di atas tanahnya. Penurunan status dari pemilik menjadi buruh ini menimbulkan rasa tidak senang ketika melihat penghuni baru, pindahan dari masyarakat kota yang “relatif” lebih mapan hidupnya. Di pihak lain, mereka harus berjuang mengembangkan hubungan buruh-majikan--karena dipandang sebagai mereka yang lebih membutuhkan pekerjaan, maka perlakuan majikan tidak menguntungkannya.

Ketiga, proses sosial yang demikian ini kemudian berlanjut menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah sosial baru dimulai masalah pengangguran, masalah kenakalan remaja hingga tingkat kriminalitas, dari sekedar corat-coret pagar hingga pencurian di perumahan baru. Dari beberapa catatan penghuni pemukiman baru, mereka dan anak-anaknya mengalami benturan dengan penduduk asli (lama), mulai dari perkelahian anak-anak, di-“balak” hingga mengalami pencurian bila rumah ditinggalkan. Inilah konsekuensi dari rangkaian fenomena pertama.

Keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota ini sebenarnya bukan hal yang baru, di Yogyakarta, bersama dengan Romo Mangun, mereka terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Kali Code dengan mengajar anak-anak di bawah kolong, dan berbagai LSM didirikan oleh mahasiswa untuk kepentingan tersebut. Perkembangan selanjutnya, mereka terlibat pula dalam mengartikulasikan kepentingan dalam bentuk demonstrasi, seperti kasus Dita Indah Sari dalam demonstrasi buruh, dan berbagai aktivitas serikat buruh lainnya.

Selain memberi keberanian untuk mengartikulasikan kepentingan strategis, kehadiran mahasiswa, khususnya teater kampus, membuat bentuk lain dari aksi demonstrasi kelompok tersebut. Dari pengamatan awal, keterlibatan teater kampus terjadi tatkala menyelami kehidupan kelompok tersebut untuk menghasilkan ide-ide cerita teater yang sarat akan kritik sosial. Namun,

pada gilirannya observasi partisipan ini bergulir menjadi tindakan aksi atau partisipatif untuk memberdayakan kelompok tersebut.

Metode Penelitian¹²

Dengan memperoleh data tentang isu-isu ketimpangan sosial-politik yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat rentan kota, tulisan ini juga mencermati perubahan pola demonstrasi dan keterlibatan mahasiswa sebagai kaum intelektual. Dengan mengambil *setting* di Surabaya, dilakukan wawancara secara mendalam pada mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota. Selain itu, karena peristiwanya telah berlangsung sebelum penelitian ini dilakukan (*ex-post facto*), maka tulisan ini juga menggunakan sumber-sumber sejamin, seperti Jawa Pos, Surya, Kompas, Bernas, Pikiran Rakyat dan Suara Merdeka. Sumber-sumber tersebut diakses melalui internet. Selain dari situs-situs surat kabar, data juga diperoleh dari situs-situs lsm, seperti Elsam dengan situs www.elsam.com dan konsorsium kelompok miskin kota (UPC) dalam www.urbanpoor.or.id.

Penggunaan wawancara secara mendalam itu bagian dari *oral history* dilakukan pada pelaku, yaitu mahasiswa yang terlibat dalam pemberdayaan kelompok masyarakat rentan kota, khususnya mereka yang berasal dari teater kampus. Individu-individu diperoleh dengan secara purposif dan *snowball*, begitu pula kelompok masyarakat rentan kota yang pernah melakukan demonstrasi. Informasi awalnya diperoleh dari sumber-sumber pertama (cara pertama). Dalam wawancara tersebut, diharapkan dapat memperoleh (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang

¹² Diolah dari Hasil Penelitian Fundamental yang didanai oleh DIKTI Tahun Anggaran 2005 atas nama FX Sri Sadewo, Sugeng Harianto dan Usman Mulyadi.

dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) usaha mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan.

Dari data sumber-sumber surat kabar, dengan melalui tahapan dalam analisis sejarah dilakukan rekonstruksi tentang pola demonstrasi dan perubahannya pada tahun 1990-an hingga sekarang, berikut isu-isu kesenjangan sosial politik, sedangkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam tentang (1) kondisi obyektif mahasiswa dan kelompok masyarakat rentan kota, (2) isu-isu sosial politik yang berkembang dalam kelompok masyarakat tersebut, dan (3) proses mahasiswa mereformulasikan ke dalam bentuk *adegan teatrikal* sebagai strategi memperoleh perhatian dan dukungan bagi publik dan pengambil keputusan. Di dalam analisis kualitatif, data tersebut diberi koding. Data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara mendalam dilakukan analisis domain, hingga analisis komponensial. Dari teknik-teknik analisis ini, diperoleh proposisi-proposisi yang menggambarkan fenomena tersebut.

Orang Miskin Kota sebagai Korban Kebijakan Pembangunan

Tata Ruang Kota:

Pengusuran, kehilangan rumah dan tempat usaha?

Sungguh tepat sekali, bila kita menggunakan gambaran dari James C. Scott (1983: 27-52) tentang betapa rentannya masyarakat miskin. Ia menggambarkan bahwa setiap kebijakan makro yang terkena pada keluarga miskin seperti ombak yang menerjang orang yang tenggelam dengan air sebatas hidung. Sekali ombak datang, maka tenggelam pula orang tersebut. Oleh karenanya, mereka, kelompok miskin menggunakan prinsip dahulukan selamat (*the safety first*).

Meski terbatas, masyarakat desa tetap memiliki memiliki pilihan. Bila rawan pangan misalnya, orang desa akan mengalihkan makanan pokoknya, dari beras ke ketela, dan seterusnya. Bila tergusur, meski tanah itu telah menjadi bagian diri dan keluarganya, mereka masih bisa menempati tempat-tempat lain di desa yang belum dikelola – sudah barang tentu berubah statusnya dari pemilik ke *ngindung* atau *magersaren* (strata yang rendah dalam masyarakat desa). Tidak demikian pada masyarakat miskin kota, pilihan mereka (amat) sangat terbatas. Klugman (2002: 63) mencatat bahwa orang miskin (rentan) kota sangat tergantung pada pasar kerja yang dualistik dengan bentuk pembayaran tunai (*cash*), tidak memiliki akses pada infrastruktur formal, tidak memiliki akses tanah dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan terakhir dalam situasi ini mereka lebih mengandalkan pada jaringan keluarga daripada pemerintah.

Perubahan tata ruang kota sering berakibat pada masyarakat miskin kota dalam hal pemukiman dan penghidupan (mata pencaharian). Dari pengamatan Ramlan Surbakti (1996: 20-21) pada tahun 1990-an, ada delapan pola perebutan ruang kota.¹³ *Pertama*, konflik antara pemkot dan warga berkaitan dengan perubahan peruntukan tanah, seperti kasus Ngagel Jaya Selatan (antara pusat perdagangan dan jalur hijau), dan Simogunung (penggusuran untuk jalur hijau). *Kedua*, konflik antara pemkot dan perusahaan swasta akibat tindakan swasta menyerobot tanah milik pemkot.¹⁴ *Ketiga*, konflik antara warga dan investor. *Keempat*,

¹³ Perebutan tata ruang kota terlihat pada tarik ulur tentang perda RT/RW. Di dalam perda tersebut, kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki akses di birokrasi (pemkot) dan legislatif (dewan), mengatur peruntukan daerah. Di tingkat pelaksanaan, perebutan tata ruang kota terjadi di BPN untuk status tanah dan perijinan usaha di Dispenda.

¹⁴ Dan, kini terjadi perebutan akibat alih pemilikan dari Pemkot ke perusahaan atau milik pribadi, seperti kasus Gelora Pancasila dan Kolam Renang Brantas.

konflik antara pemkot dan warga yang tergusur akibat pelebaran jalan atau kepentingan umum karena ganti rugi terlalu rendah, seperti: kasus pelebaran jalan Kenjeran untuk *ring road* Timur. *Kelima*, konflik antara eksekutif dan Dewan (publik) karena peralihan aset pemkot tanpa persetujuan Dewan, seperti penjualan *bondho deso* di Pradah Kali Kendal), di Lakasantri dan pengalihan Pasar Induk Sayur Kendangsari. *Keenam*, konflik antara warga, investor dan pemkot karena pemkot membebaskan tanah penduduk dengan alasan untuk kepentingan umum, tetapi kenyataannya untuk kepentingan swasta, seperti: kasus Tubanan, Kasus Pradah Kalikendal, kasus makam Kalidami, dan kasus penggusuran rumah warga Gang Kaliasin Pompa (Kedungdoro), *Ketujuh*, penggunaan tanah fasilitas umum yang tidak jelas dan dijual oleh developer, seperti: kasus tanah YKP di Balongsari dan berbagai kompleks perumahan. Terakhir, konflik akibat salah prosedur dari pihak pemkot, seperti kesalahan pembebasan tanah dan penyimpangan uang dalam kasus SSC dan kasus dua SK untuk bidang tanah yang sama di Dukuh Kupang Timur.

Penggusuran demi tata ruang kota, dengan kata lain ada perubahan peruntukan lahan ini, bagi masyarakat rentan kota sangat berpengaruh. Mereka tidak saja kehilangan tempat tinggalnya, tetapi juga kehilangan mata pencaharian. Oleh karenanya, warga di sekitar Padegiling misalnya, hingga kini tetap bertahan tidak mau pindah. “Berapa pun ganti rugi, asal bisa dapat rumah dan bangun usaha lagi. Kami bersedia.”¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan salah seorang warga Padegiling, tanggal 30 Juli 2005.

Tabel 9.1
Penggusuran dan Kurbannya di Surabaya Tahun 1990-sekarang

Tahun ¹⁶	Penggusuran	Keluarga	Warga
2005	2 kasus	---	500
2004	1 kasus	---	50
2002	3 kasus	200	8.000
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200
1992-1993	26 kasus	109	2.913
1995-1999	$\pm$ 8 kasus	---	$\pm$ 200

Sumber: Suyanto (1996), Supramudyo (2000), dan *UPC-link* (2005)

Namun demikian, dari seluruh kasus tersebut, tidak satupun berpihak pada warga. Pemkot lebih cenderung berpihak pada investor. Pada tahun 2003-2005 peremajaan pasar tradisional misalnya telah mengakibatkan kerugian bagi pedagang tradisional. Di Wonokromo misalnya, pedagang tidak lagi bisa berjualan selama 24 jam, tetapi dibatasi hingga pukul 21.00. Tokonya jauh lebih sempit dibandingkan dengan pasar lama. Mereka, pedagang lama juga tetap harus membeli, sehingga ketika relokasi kembali sebagian mereka tidak setuju, bahkan dari pengamatan¹⁷ di lapangan sejumlah pedagang menderita stress, terutama mereka yang tidak memiliki uang.

¹⁶ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

¹⁷ Pengamatan bulan Januari s/d Mei 2005.

UMR, UMK, dan Sistem Kontrak versus Kenaikan BBM

Persoalan lain dalam masyarakat rentan kota adalah upah. Selain bekerja di sektor informal, sebagian masyarakat tersebut bekerja di pabrik, pusat perbelanjaan (toko) dan perkantoran. Mereka tinggal tidak pernah jauh dari tempat kerjanya, seperti yang telah disebutkan di kampung-kampung tengah kota untuk pusat perbelanjaan, dan kampung-kampung sekitar pabrik, seperti Rungkut, Ngagel, dan Dupak. Sebagian lain membeli rumah tipe RSS jauh di pinggir kota, bahkan di luar kota, seperti Driyorejo. Tinggal kost di dekat tempat bekerja dan membeli rumah di pinggir kota sebenarnya tidak jauh berbeda karena pengeluaran rumah tangga kurang lebih sama. Mereka yang tinggal di tempat kerja harus membayar kost dan biaya lainnya, sementara itu bila di pinggir kota harus mengeluarkan uang transport yang kuang lebih sama besarnya.

Ada perbedaan pendapatan (upah), bagi mereka yang bekerja di di toko, restoran, atau usaha rumah tanggan lainnya, upahnya sering di bawah standar UMR, tidak jaminan kesehatan, meski memperoleh uang makan. Kelebihannya, hubungan antara pekerja dan pemilik bersifat personal, kekeluargaan, hal itu bergantung pada pemiliknya. Tidak jarang, sering terjadi kekerasan atau pelecehdan karena pemilik bersifat sewenang-wenang.

Sementara itu, mereka yang bekerja di pabrik memperoleh upah per harinya. Upah tersebut dapat dibayar setiap minggu, atau setiap bulan. Selain menerima upahnya, sering perusahaan juga memberikan uang makan, dan insentif lainnya. Perusahaan biasanya menyertakan buruhnya (tetap) ke dalam jamsostek. Preminya dibayar setiap hari oleh perusahaan, namun bila tidak masuk dengan (tanpa) ijin upah buruh dipotong oleh premi tersebut.

Upah tersebut mengalami kenaikan yang ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhannya. Pada tahun 1990-an, upah tersebut berdasarkan patokan kebutuhan fisik minimum (KFM) dengan juga mempertimbangkan tingkat inflasi pada harga-harga barang. Ukuran KFM ini memiliki kelemahan. KFM bujangan diukur dengan 2.600 kalori/hari, K-2 (KFM untuk seorang buruh, isteri dan dua anak) setara dengan 8.100 kalori/hari, bila dengan tiga anak, maka KFM setara dengan 10.000 kalori/hari. Kriteria ini menjadi kelemahan pertama dari ukuran tersebut, buruh disetarakan dengan alat produksi dan upah disetarakan dengan tenaga yang dikeluarkan. Kelemahan kedua, barang-barang yang digunakan untuk mengukur KFM hanya berdasarkan kebutuhan buruh laki-laki yang jauh lebih sederhana daripada kebutuhan buruh perempuan (Rudiono, 1992: 70-71).

Dari ukuran ini, kemudian setiap propinsi menetapkan upah minimumnya yang dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional). Asumsinya, harga barang pada setiap propinsi berbeda, oleh karenanya upah minimum buruh pun berbeda. Pada pemerintahan Suharto, upah minimum tersebut ditentukan tidak saja hanya pada wilayah propinsi, tetapi pada wilayah kabupaten atau kota dengan dikenal UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum tersebut tidak saja berdasarkan kebutuhan fisik minimum, tetapi kebutuhan hidup minimum, yaitu dengan menambah beberapa komponen barang kebutuhan lainnya.

Bila pada tahun 1980-an dengan mengikuti hasil kajian Rudiono (1992: 70-76) berdasarkan perbandingan data tahun 1982, 1985 dan 1988, maka upah tersebut tidak pernah melebihi 60% dari KFM, perbandingan tertinggi dicapai di DI Aceh (kini NAD) pada tahun 1982, yaitu 84,6% dari KFM. Kini, untuk Jawa Timur, UMR yang ditetapkan telah sedikit melebihi dari KFM, yaitu sekitar 4%. Kenaikan tersebut menjadi tidak berarti karena

bersamaan dengan penetapan UMR, harga-harga kebutuhan pun semakin naik, terutama kebutuhan bahan pokok (Dinas Infokom Jatim, 2004a).

Bila memperhatikan tabel 9.2, meski kenaikan harga beras berjalan secara linear dengan tidak tajam,¹⁸ tetapi sebenarnya biaya hidup telah meningkat seiring harga BBM yang sering kali ditetapkan pada pertengahan tahun tersebut. Ada perbedaan pola yang dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) dan pemerintahan sesudahnya. Bila pada masa pemerintahan Suharto, kenaikan BBM tidak secara transparan dan terkesan mendadak, sehingga kenaikan harga terjadi pada paska kenaikan harga tersebut. Sementara itu, pada pemerintahan sesudahnya, rencana kenaikan harga tersebut telah disampaikan antara tiga hingga empat bulan sebelumnya. Pada saat pengumuman rencana kenaikan tersebut, para pedagang telah menaikkan harga, dan kemudian berlanjut pada saat penetapan harga baru BBM. Lebih celaka lagi, kenaikan harga BBM sering diikuti oleh kenaikan harga air minum dan tarif dasar PLN.

¹⁸ Pemerintah melakukan pengendalian harga beras dengan cara membuka kran impor beras dari Vietnam dan Cina, sehingga harga beras lokal menjadi jatuh karena secara bersamaan sering dilakukan pada musim panen. Kebijakan ini sangat merugikan kelompok petani (baca **Kompas**, 24 September 2005, "Menggugat Kebijakan Absurd Impor Beras.").

Tabel 9.2.
UMR/UMK Surabaya, BBM, Harga Beras, Emas, Premium dan Kurs
Rupiah thp Dollar tahun 1990-sekarang

Dalam rupiah

Tahun ¹⁹	UMR & UMK	Komoditi		Bahan Bakar Minyak		Kurs Rupiah thp Dollar
		Beras	Emas ²⁰	M. Tanah ²¹	Premium	
2005	578.500	4.000	123.000	700-1.800	1.810-2.400	9.900
2004	550.580	3.700	114.000	700-1.800	1.810	8.900
2003	515.850	3.500	90.000	700-1.800	1.810	8.250
2002	453.500	3.500	80.000	820-1.530	1.450-1.750	8.250
2001	330.700	3.300	76.000	895-400	1.150-1.450	8.250
2000	270.000	3.100	110.000	350	1.150	8.250
1999	230.000	3.000	90.000	350	1.000	8.250
1998	---	1.350-4.500	140.000	280-350	1.000-1.200	2.375-10.500
1997	132.500	1.350	140.000	280	700	2.478
1993-1997	---	800	90.000	280	700	2.000
1991-1993	89.677	700	26.000	220	550	2.000
1990-1991	78.000	600	22.000	190-220	450	2.000
1986-1990	63.285	200-500	10.000	165	385	1.644

Sumber: Kwik (1998), Rudiono (1991) Dinas Infokom Jatim (2005a, 2005b, dan 2005c), Tabor dan Sawit (2001), Pertamina (2005), Astono dan Rosyadi (1997), **Tempo** (1991), 89.677Rahman (1994).

¹⁹ Sebagian besar kasus-kasus penggusuran pada tahun 1994-2001 merupakan kasus lama yang belum terselesaikan, seperti: kasus Tubanan dan Pradah Kali Kendal. Sementara itu, kasus stren kali tidak pernah tuntas hingga sekarang. Setelah digusur, mereka menempati kembali dengan berbagai alasan, antara lain: kehilangan mata pencaharian dan telah "membeli" pada oknum Pemkot.

²⁰ Harga emas berfluktuasi mengikuti harga emas dunia dan kebutuhan dalam waktu tertentu, seperti: pada waktu puasa harga turun, namun beberapa hari sebelum hari raya harga emas naik, dan akan jatuh kembali sesudah hari raya.

²¹ Selain menentukan patokan harga, untuk minyak tanah Pemerintah menentukan harga eceran tertinggi (HET).

Pemerintah seringkali menenangkan dengan mengatakan tidak ada kenaikan harga yang berarti, atau akan mengadakan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Namun demikian, pada kenyataannya kenaikan tersebut bisa mencapai 100%., dan, bagi masyarakat miskin kota, seberapa pun kenaikannya harga sangat berpengaruh pada kehidupannya. Hal itu akan berpengaruh pada usahanya (sektor informal), seperti dikatakan oleh penjual nasi pecel, *“Ngene iki susah. Ora mundak no rego sing tuku iyo wis kurang. Opo maneh mundakna rego, ora ono sing tuku. Aku bakal rugi. Ora balek modal. Pilih rego tetap, untunge sithik, sing penting mlaku terus”* (Kalau begini susah. Tidak menaikkan harga saja orang yang beli semakin berkurang. Apalagi menaikkan harga, tidak ada yang beli. Saya bisa rugi. Tidak kembali modal. Saya pilih harga tetap, untung sedikit).

Kondisi buruh pabrik jauh tidak beruntung. Kenaikan UMR, kenaikan BBM dan kurs rupiah terhadap dollar sering mengakibatkan pabrik bangkrut, *“apalagi sekarang harus berhadapan dengan barang-barang Cina yang murah.”* Ketika sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bangkrut, perusahaan menggunakan banyak cara untuk mem-PHK, mulai dari secara ketat mencari kesalahan dari buruhnya hingga langsung mem-PHK dan menyerahkannya pada Disnaker dalam proses P4P. Meskipun tidak jarang dimenangkan pihak buruh, tetapi jarang dilaksanakan eksekusi keputusan tersebut. Sementara itu, buruh terus menunggu tanpa pesangon dan mencari pekerjaan lain.

Tahun 2005 ini, peraturan perundang-undangan terbaru memungkinkan pengusaha untuk menggunakan sistem kontrak. Sistem kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, sesudah dapat diperbaharui. Cara ini kini yang dipakai oleh pengusaha, dengan sistem ini tidak perlu mengeluarkan uang pesangon, dan pekerja cenderung tidak menuntut karena takut tidak diperpanjang. Ada kecenderungan perusahaan memilih sistem kontrak. Untuk itu, perusahaan sering merubah suasana kerja, sehingga karyawan

tetap tidak betah, memilih keluar (mengundurkan diri) dan kemudian memasukkan karyawan baru. *“Wah, tepat saya sekarang ketat banget. Salah sedikit, langsung di-SP. Kalau sudah lebih dari dua kali, disuruh membuat surat pengunduran diri,”* seperti yang dikatakan oleh seorang karyawan pusat perbelanjaan yang ada di tengah kota Surabaya.

Selain penggunaan sistem kontrak, pengusaha juga menggunakan sistem kerja borongan, upah bergantung dari tingkat produktivitas buruh. *“Iya, pernah saya hanya memperoleh lima puluh ribu rupiah seminggu. Apa cukup untuk makan? Iya, ngutang ke tetangga, kalau diberi,”* kata Mbak T, seorang buruh yang berstatus janda dengan dua anak. Di dalam sistem borongan tersebut, buruh bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing. Setiap ada barang yang hendak dikerjakan, maka kelompok-kelompok itu berebut dan mengerjakan sebanyak mungkin. *“Kalah berebut, maka hasilnya sangat sedikit,”* tambah Mbak T.

Dalam sistem ini, pengusaha hanya membayar sesuai dengan hasil produk yang dikerjakan. Tidak ada tambahan, seperti: uang makan dan uang kehadiran. Ikatan antara buruh dan pengusaha hanya sebatas ada tidaknya pekerjaan borongan. Bila tidak ada pekerjaan borongan, maka buruh pun menganggur di rumah. Buruh hanya menunggu panggilan dari pabrik. Sementara menunggu pekerjaan, buruh menggunakan tabungannya untuk bekerja ke sektor informal, seperti berjualan pentol bakso dengan sepeda *pancal*.

Mahasiswa sebagai Gaya Hidup Kelas Menengah Kota

Dari pengamatan di lapangan, meski tidak ada penelitian yang menggambarkan adanya korelasi antara status sosial ekonomi dan pilihan universitas, fakultas berikut jurusanannya, nampak terjadi segregasi mahasiswa dari status sosial ekonominya. Untuk perguruan tinggi swasta, mahasiswa yang

berasal dari status sosial ekonomi menengah ke atas lebih memilih Ubaya (Universitas Surabaya), UK Petra, dan WM (Universitas Widya Mandala). Pola yang demikian ini terjadi pula pada mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Oleh karenanya, harga kost di sekitar kampus tersebut bisa mencapai di atas 1 (satu) juta. Di sekitar kampus UK Petra, kamar kost di daerah Siwalankerto mencapai harga 3 juta dengan iklan “*kamar kost dengan fasilitas hotel berbintang.*”

Sementara itu, kelompok mahasiswa berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah memilih tinggal di kamar kost dengan harga 100 ribu ke bawah. Mereka tinggal di daerah kampung-kampung yang padat. Kamar kostnya diisi dua hingga empat orang dengan tempat tidur susun. Dari pengakuan seorang mahasiswa Unesa, Ani (bukan nama sebenarnya), mereka mendapat kiriman sekitar 300 ribu hingga 500 ribu rupiah. Seratus ribu untuk kamar kost, sisanya untuk makan, perlengkapan sehari-hari (sabun, shampo dan odol) dan buku. Jatah makan sehari adalah 10 ribu rupiah, dan sering mereka hanya makan dua kali sehari.

Dengan jumlah kiriman yang terbatas, mereka menerapkan strategi adaptif yang unik diamati. Ada berbagai cara, antara lain: hanya membeli lauk, sedangkan nasi ditanak sendiri, bahkan ada yang mengakui bahwa pada minggu terakhir setiap bulan hanya makan nasi, krupuk dan sambal, atau makan 2 (dua) kali sehari. Tempat tinggal juga disiasati, mulai dari cara kontrak dengan beberapa teman, hingga tinggal di UKM dan Masjid Kampus. Untuk keperluan buku, mereka memilih untuk meminjam pada kakak kelas, fotokopi pada bagian tertentu saja, atau ke perpustakaan, terutama pada saat menjelang ujian.

Pola konsumtif pun berbeda, pada mahasiswa kelas menengah ke atas selalu membawa HP, bahkan HP tersebut berfitur kamera dan movie. Pakaian dan kendaraan yang digunakan pun berbeda dan bergantung dari asal kelas ekonominya. Mobil

setingkat sedan atau niaga terbaru (kijang dan panter) sering berada di parkir kampus-kampus universitas (lihat tabel 9.4). Malam hari, tidak selalu bergantung pada hari kuliah atau tidak, mereka mengunjungi kafe-kafe, seperti Hugo Kafe. Di dalam setiap percakapan, mahasiswa kelas menengah ke atas sering berbicara mengenai tempat-tempat dugem baru. Untuk pergi ke tempat dugem, meeka berkelompok atau berpasang-pasangan dengan membawa mobil.

Tabel 9.3
Mahasiswa antara Status Sosial Ekonomi dan Pilihan Jurusan dan Universitas

Status Sosial Ekonomi	Perguruan Tinggi		Fakultas/Jurusan
	Negeri	Swasta	
Atas	Univ. Airlangga dan ITS	Ubaya, UK Petra dan Widya Mandala	Teknik Arsitektur, Teknik Informatika Kedokteran (Umum dan Gigi), Ekonomi Akuntansi.
Menengah	Univ. Airlangga dan Unesa	Untag 17 Agustus, Unitomo, Univ. Hang Tuah, dan UPN	Teknik Industri, Teknik Sipil, Ekonomi, Ilmu-ilmu Sosial dan MIPA
Bawah	Unesa dan IAIN	Ubhara, Unipa, UWP dll	Pendidikan, Politeknik dan Program Diploma (D1-D3)

Sumber: pengamatan

Mahasiswa dari kelas menengah (baru) mengambil bentuk hendak meniru kelas atas. Caranya, antara lain dengan pemilikan HP, meskipun beberapa di antaranya harus memilih tidak membeli buku teks. Pulsa yang digunakan sering dalam jumlah relatif besar, 200 ribu per bulan. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa dari kelas menengah atas, namun tidak harus berhemat. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan niaga keluaran paling muda adalah lima tahun terakhir.

Tabel 9.4.
Status Sosial Ekonomi Mahasiswa dan Gaya Hidup

Status Sosial Ekonomi	Pekerjaan Orang Tua (Bapak)	Ikon-ikon Budaya			
		Tempat Tinggal	Kendaraan	HP dan fitur	Barang/Kegiat an Konsumtif
Atas	Pengusaha (besar), Birokrasi Pemerintah dgn es. I	Rumah sendiri di perum. elit atau tipe 45 ke atas; kost dgn harga di atas 500 ribu/bulan.	Mobil, se- peda motor laki-laki dgn cc di atas 125,	HP dgn kamera dan movie	Kafe atau tempat dugem lainnya.
Menengah	Wiraswasta, birokrasi pemerintah dgn es II, Guru dan Dosen, pemilik tambak luas, petani kaya.	Rumah sendiri di perumahan dgn tipe 36, kost dgn harga 200-500 ribu/bulan.	Sepeda motor terbaru	HP	Ke Kafe, atau Jalan-jalan di Mall.
Bawah	Mracang, petani kecil, buruh dan sektor informal lain- nya	Rumah sendiri di kampungan atau rumah RSS, kost dgn harga di bawah 200 ribu.	Sepeda motor dgn usia di atas 3 tahun, kendaraan umum, dan jalan kaki	Tidak ber-HP	Jalan-jalan ke Mall dgn frekuensi yg terbatas

Sumber : Pengamatan; bandingkan dgn **Kompas**, 30 September 1996. hal. 4.

Teater Kampus sebagai Bentuk Aktualisasi Diri

Seni teater merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara seni gerak, suara dan musik. Dalam seni tersebut, ada satu arahan cerita yang dibawa para pelakon. Arahan cerita tersebut bisa berasal dari tradisi lisan rakyat atau diangkat dari novel. Di Indonesia, seni teater ini, selain teater modern, seniman juga membawakan seni pertunjukkan tradisional, seperti

wayang orang, ketoprak atau kentrung. Di Jawa Timur, khususnya di wilayah pantura, ludruk tumbuh pada awal abad ke XX.

Tidak ada tulisan yang menggambarkan kapan teater memasuki dunia kaum intelektual, seperti mahasiswa. Djoko Soekiman (2000) menunjukkan bahwa seni pertunjukan tumbuh seiring dengan liberalisasi ekonomi. Seni tersebut dimainkan oleh para “budak” untuk memberikan kegembiraan bagi para “tuan.” Seni pertunjukan tersebut merupakan salah satu penciri dari kebudayaan indis.

Setelah keluar dari kampus, memang kaum intelektual Indonesia, seperti Sukarno, mengembangkan seni pertunjukan sebagai bagian dari *counter hegemoni* terhadap pemerintah kolonial. Ketika di Bengkulu, dalam pembuangannya, Sukarno membentuk kelompok teater. Hal yang serupa dilakukan pula oleh tokoh-tokoh pergerakan di Surabaya tatkala mengadakan pasar malam untuk mengumpulkan dana. Mereka mengundang seniman teater tradisional dan memasukkan ide-ide kritik pada pemerintah kolonial Belanda (Mustadji dan Sadewo, 1992).

Untuk lingkungan kampus pada pemerintahan Suharto hingga sekarang, seni pertunjukan kampus (teater kampus) tumbuh sebagai bagian dari Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) (1978-1998). Pada masa Daoed Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi mahasiswa diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan lebih mengembangkan kemampuan profesinya daripada terlibat dalam aksi politik (turun ke jalan). Dalam istilahnya, mahasiswa dikembangkan menjadi menara gading. Oleh karenanya, organisasi intra kampus direstrukturisasi, dema dihapus, digantikan dengan Sema (senat mahasiswa) dan BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) di tingkat fakultas, dan himakjur (himpunan mahasiswa jurusan) di tingkat jurusan dan himaprodi di tingkat program studi. Senat Mahasiswa dipimpin oleh ketua Senat yang dipilih oleh anggota BPM. Ia biasanya membawahi tiga bidang, yaitu (1) akademis, (2) minat dan bakat,

dan (3) kesejahteraan. Sementara itu, di tingkat universitas/institut dibentuk berbagai unit kegiatan mahasiswa, mulai dari olah raga, keagamaan hingga seni. Dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM), seni teater berkembang di kampus. Seni yang dikembangkan mengambil berbagai bentuk, mulai dari seni teater tradisional, seperti ketoprak, ludruk dan ketrung, hingga seni teater modern.

Tabel 9.5.
Perkiraan Jumlah Teater Kampus dan Anggotanya
di Surabaya

Jenis	Jumlah
<i>Perguruan Tinggi Negeri</i>	
a. Teater Kampus	15
b. Anggota	350
<i>Perguruan Tinggi Swasta</i>	
a. Teater Kampus	10-20
b. Anggota	200

Sumber : pengamatan

Dari perguruan tinggi negeri di Surabaya, IAIN memiliki jumlah terbanyak. Selain di tingkat institut sebagai UKM, setiap fakultas memiliki setidaknya-tidaknnya satu teater kampus, bahkan ada pula teater kampus di tingkat jurusan. Setiap teater kampus memang tidak memiliki jumlah anggota yang besar, antara 10-20 orang, ada beberapa di antaranya aktif tidak di satu teater, misalnya: di tingkat institut dan fakultas. Mereka ini menjadi penggerak teater di tingkat lokal (fakultas dan jurusan). Teater ini mengisi setiap kegiatan/acara di tingkat fakultas dan jurusan. Menarik dicermati, selain Teater Kampus SUA (Sunan Ampel)

yang berbentuk UKM di tingkat institut, teater di tingkat fakultas, seperti Teater Q merupakan teater resmi di bawah pembinaan Pembantu Dekan III.

Tidak jauh dari IAIN Sunan Ampel, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang merupakan metamorfosa dari IKIP Surabaya – akibat kebijakan pemerintah untuk memberikan *double mandate* kepada seluruh IKIP di Indonesia – memiliki 2 (dua) teater kampus di tingkat institut, antara lain: teater institut dan saloka. Keanggotaan teater tersebut didukung oleh mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra, antara lain: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah dan Program Studi Sendratasik, dan dari Fakultas Ilmu Sosial, antara lain: Jurusan Pendidikan Sejarah. Teater Institut pada tahun 1990 hingga tahun 2002 cukup aktif dengan menampilkan setidaknya-tidaknya 2-4 lakon setiap semester, atau kurang lebih satu bulan sekali. Cerita lakon yang ditampilkan bisa merupakan hasil karya anggotanya, cerita adaptasi dari luar, seperti: Anton Chekov, dan cerita Cina, Sampek Engtay. Jumlah anggotanya lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Berbeda dengan Teater Institut, Saloka (Sanggar Ludruk dan Ketoprak mengambil bentuk teater tradisional, seperti: Ludruk dan Ketoprak. Dua tahun terakhir ini Saloka juga memainkan teater tradisional pesisiran, yaitu Kentrung. Bentuk teater kentrung ini dikenalkan oleh dosennya, Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo (alm) yang menulis disertasi tentang seni tersebut. Cerita lakonnya tidak terbatas pada cerita tradisional kentrung, tetapi sering menggunakan tema-tema baru. Pengaruh guru besar tersebut sangat kuat karena sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Selain kedua teater tersebut, ada satu teater yang bukan merupakan UKM. Teater tersebut berdiri dari tahun 1997 hingga 2000, sebut saja

teater Sanggar Abu-abu yang dipimpin oleh mahasiswa fakultas bahasa dan sastra, T²².

Hal yang serupa di ITS dan Unair. Teater kampus di ITS berkembang pesat tatkala mampu bergabung dengan stasiun televisi lokal, yaitu: JTV. Acara yang dikembangkan adalah bentuk teater tradisional, yaitu: ludruk dan kentrung. Ide-ide ceritanya bervariasi, dari cerita tradisional hingga ke cerita modern, bahkan mereka melakukan eksperimen dengan mengambil bentuk kontemporer dan menyebutnya *funky*.

Di perguruan tinggi swasta, ada 2 (dua) teater kampus yang menarik dicermati. Pertama, teater kampus “Kusuma” dari Universitas 17 Agustus 1945. Jumlah anggotanya sangat besar, hampir mencapai 100 orang. Mereka tidak saja memainkan di tingkat universitas, tetapi sering diundang untuk mengisi acara seni. Bentuk teaternya bisa berubah-ubah, dari teater tradisional hingga teater modern. Sementara itu, teater berikutnya adalah teater dari Fakultas Bahasa, UK-Petra. Karena didukung oleh Jurusan Bahasa Inggris, mereka mengambil bentuk teater modern dengan menggunakan Bahasa Inggris. Ide-ide cerita pun diadaptasi dari novel-novel berbahasa asing tersebut, seperti: Romeo dan Juliet. Bagi anggotanya, teater ini memiliki fungsi untuk melatih kemampuan percakapan.

Teater Panggung atau Teater Jalanan sebuah Pilihan Berekspresi

Kebebasan untuk Berekspresi

Menjadi pertanyaan mengapa mahasiswa memilih unit kegiatan teater, atau bahkan mendirikan teater tanpa harus

²² T sendiri kini menjadi aktivis salah satu partai nasionalis, peserta pemilu 2004.

memperoleh pembinaan dari pihak rektorat, seperti pada Teater Abu-abu. Salah satu jawabannya adalah “orang teater itu bebas.” Seperti yang dicermati di lapangan, aktivis teater kampus relatif lebih longgar dalam menghadapi aturan-aturan di kampus. Sebagian besar hanya berpakaian kaos oblong dan celana jeans. Rambutnya panjang. Dari penampilan itu, seperti yang dikatakan oleh HT, seorang mahasiswa ITATS yang menjadi aktivis teater Topeng, *“Ini bukan persoalan penampilan, tetapi idealisme. Ia berani tampil beda. Mungkin kami dianggap nyeleneh. Tapi, kami tidak ingin membongki diri kami dengan penampilan.”*

Terkesan sangat bebas lagi bila melihat mahasiswa anggota UKM Teater Institut dan Saloka Unesa. Sebagian besar berasal dari mahasiswa yang mendekati batas waktu, yaitu semester 13 dan 15 (angkatan tahun 1998 dan tahun 1999). *“Saya suka status sekarang ini. Mahasiswa. Saya tidak peduli kapan lulus. Toh, kalau lulus, tidak bekerja juga percuma. Saya di sini tetap bisa kritis dan kreatif.* Namun demikian, tidak berarti tidak ada aktivis teater kampus yang berprestasi dalam bidang akademik. Ada beberapa di antaranya tercatat sebagai mahasiswa yang berprestasi, sehingga memperoleh beasiswa.

Nilai kebebasan dan kreatifitas yang menjadi tujuan dari mahasiswa tersebut tidak saja terletak pada penampilan, tetapi juga terlihat pada lakon-lakon yang dimainkan. Selain mengadopsi cerita naskah dari pengarang terkenal, kemampuan analitis dari stiatusi sekitarnya terletak cerita naskah yang dimainkan. Dengan terjun di masyarakat, dengan mendatangi dan menangkap fenomena, mereka dapat membuat naskah cerita untuk lakon yang akan dimainkan pada hari atau minggu berikutnya. Mereka menangkap fenomena itu ketika jalan-jalan dan duduk di warung dan mendengar percakapan orang-orang tersebut.

Dalam pembuatan naskah cerita, mereka pertama kali membuat dalam bentuk ringkasan cerita, atau dikenal dengan sinopsis. Kemudian, secara bersama-sama menyusun tata urutan gerak dan percakapan. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah

latihan dua hingga empat kali, sekitar hampir satu bulan lamanya. Di dalam latihan itu, setiap anggota diberi tugas menjadi lakon apa-apa. Setiap orang kemudian menghafal dan menghayati perannya. Bila tidak kebagian peran, mereka masih memiliki tugas untuk meminjamkan ruang hingga promosi.

Penjiwaan sebuah peran ini dilatih dari pertama kali seseorang menjadi anggota. ketika menjadi anggota, mereka harus ikut masa orientasi, oleh “senior” (mahasiswa yang lebih dulu menjadi anggota) ke gunung. Selain latihan fisik dan mental, tetapi mereka lebih menekankan latihan mental, seperti dibentuk-bentak, agar “*lebih berani tampil dan nggak duwe isin* (tidak mudah malu),” bahkan lari sambil memaki-maki dirinya sendiri. Pada waktu malam hari, latihan penjiwaan dilakukan dengan membawa anggota ke tempat yang sunyi. Tidak ada suara. Berikutnya, seorang senior meminta membayangkan, mengingat atau merasakan sesuatu pada dirinya. Akibatnya, ada peserta tiba-tiba menangis karena mengingat orang tua di rumahnya. Orang awam akan melihat mereka seperti kerasukan roh, namun bagi mereka hal itu merupakan bagian dari penjiwaan.

Komodifikasi Teater

Dari latihan menghafal naskah cerita dan dialog, penjiwaan terhadap peran yang dimainkan, hingga mengembangkan koreografi (menciptakan latar panggung sesuai dengan naskah), teater kampus sering kemudian menampilkannya dalam panggung. Secara rutin, hingga tahun 2001, hampir satu-dua bulan sekali Teater Institut (Unesa) misalnya menampilkannya di Gedung I6, gedung yang sudah dirancang sebagai ruang pertemuan, berikut panggung di dalamnya. Sementara itu, mereka sering berlatih pada malam hari di lapangan pementasan yang berbentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk berundak-undak.

Teater-teater lain juga memiliki pola yang serupa, setidaknya tidaknya satu semester sekali. *“Prosesnya cukup lama, Mas. Mencari ide cerita sekitar dan mematangkan hingga jadi naskah cerita berikut dialognya itu bisa satu bulan lamanya.. Menghafal, sambil mengatur laku dan lebih penting lagi mengatur panggung.”* Naskah jauh lebih mudah bila melakukan adaptasi dari cerita rakyat. Lakon-lakon sudah dikenal, sehingga tidak memerlukan perhatian yang lebih serius. *“Cukup mengumpulkan anggota, beritahu cerita rakyat apa yang digunakan. Kemudian, anggota langsung didapuk satu per satu menjadi apa. Dialognya diserahkan pada para pemain. Di panggung, antar pemeran saling lempar dialog.”* Untuk memikat penonton, teater kampus sering menampilkan drama komedi *satiris* (mengkritik).

Bila berstatus UKM, maka kegiatan pementasan akan dijadwalkan rutin setiap semester, dan didanai oleh pihak rektorat. Dana yang berasal dari tiket masuk hanya menutupi kerugian bila ternyata diperlukan biaya yang lebih besar. Pos-pos yang ada dalam setiap pementasan, mulai dari konsumsi, kostum, hingga hiasan panggung dan *balibo* untuk iklan pementasan. Namun demikian, tidak berarti harus mengeluarkan biaya tersebut. Baliho dipakai secara berulang-ulang, dengan mencat kembali dan menulis ulang. Kostum diusahakan seperti pakaian sehari-hari. Hanya hiasan panggung sering harus berubah, tergantung pada naskahnya. Bila ada kelebihan dana, maka disimpan dalam kas teater kampus. Hal ini tidak saja terjadi pada Teater Institut (UNESA), tetapi juga pada Teater Sua (IAIN Sunan Ampel), Teater Kusuma (Untag), dan Teater Crystal (UPN).

Oleh karenanya, meskipun selalu menampilkan sosok yang mengedepankan kebebasan dan kreativitas, teater kampus tetap juga terorganisir. Kepengurusan selalu dipilih setiap dua tahun sekali. Di dalam strukturnya, beberapa teater kampus memiliki divisi kerumahtanggaan atau perlengkapan. Divisi ini bertugas untuk mulai dari perlengkapan tata ruang teater, kebersihan sanggar hingga logistik, termasuk di dalamnya kostum untuk

pentas teater, seperti yang kini dijabat oleh Alle, salah seorang pemain Teater Kusuma Untag.

Selain di kampus, mereka, UKM di tingkat universitas/institut ini juga tampil ke pentas lomba teater di tingkat lokal (kota),²³ propinsi atau nasional. Keikutsertaannya sebagai ajang prestise, apalagi bisa memenangkan. Penilaian dimulai dari orisinalitas naskah cerita yang dipentaskan, koreografi (tata gerak), hingga latar panggung. Oleh karenanya, bila mengikuti kegiatan tersebut, setiap teater mempersiapkan dengan serius. Pihak rektorat mendukung kegiatan teater kampus, mulai dari pendanaan hingga akomodasi dan transportasi.

Bila bukan UKM Institut/Universitas, teater kampus ini lebih mengandalkan kegiatan fakultas/jurusan. Setiap awal tahun ajaran senat mahasiswa (SEMA) fakultas/jurusan atau kini dikenal dengan istilah badan eksekutif mahasiswa (BEM) mengadakan pesta seni. Pesta seni dilakukan setelah perlombaan olah raga antar angkatan untuk jurusan, atau antar jurusan untuk fakultas. Selain karena sebagian anggota teater juga pengurus BEM tersebut, BEM juga membutuhkan teater kampus untuk memeriahkan acara pentas seni.

Teater non-UKM, baik di tingkat institut/universitas maupun fakultas, atau sebut saja teater kampus independen, seperti Sanggar Abu-abu di Unesa pada tahun 1997-2000. Mereka melakukan teater jalanan. Artinya, mereka mementaskan ketika melakukan demonstrasi. Pada waktu hari pertama ujian tertulis SPMB tahun 2000, mereka melakukan aksi teaternya dengan berpakaian compang-camping, bahkan salah satunya hanya menggunakan celana pendek. Seluruh tubuh dilumuri oleh cat air hitam. Mereka berlari memasuki ruang, tepatnya lorong-lorong

²³ Biasanya diadakan oleh Dewan Seni/Kebudayaan Kota atau Diknas Kab./Kota. Di Surabaya, kegiatan tersebut diadakan dalam Festival Seni Surabaya pada bulan Mei setiap tahunnya.

dalam gedung I7 (dari markasnya di gedung H) hingga ke gerbang UNESA, sambil berteriak-teriak, “*Aku tidak bisa sekolah. Biaya Pendidikan Mahal. Percuma kuliah, kalau akhirnya menjadi pengangguran.*” Paling akhir, salah satu di antara pemain berdiri di atas *kap* mobil (milik dosen). Kegiatan teater jalanan ini segera direaksi karena mengganggu ketenangan pada waktu ujian, terlebih lagi seorang dosen sempat bersitegang ketika kapnya diinjak-injak oleh mahasiswa tersebut.

Setelah beberapa kali melakukan aksi mengkritisi kampus dan lingkungan (masalah banjir), aktivitas teater tersebut “berakhir” tatkala ketua teater, T, hendak melakukan aksi pada waktu wisuda. Rencana aksi ini diketahui oleh penyelenggara wisuda, yaitu panitia yudisium dari FIK-Unesa. Tindakan aksi T yang pada waktu itu juga sebagai wisudawan bisa dicegah. Karena dianggap mencoreng nama FIK, sejumlah mahasiswa FIK melakukan reaksi balik dengan menyerbu markas Teater Abu-abu pada waktu pagi hari. Karena serangan ini mendadak, para anggota Teater Abu-abu melarikan diri. Markas kemudian ditutup, sementara itu di kampus tersebar berita tentang penemuan “kondom” dan botol-botol minuman keras di markas, sehingga berkembang bahwa kehidupan anggota teater di markas tersebut sangat longgar. Selain seksualitas, isu-isu yang meruntuhkan imej teater ini adalah isu-isu moralitas, seperti aksinya adalah *pesanan*, dibayar, dan dapat dibelokkan ke sasaran lain bila diberi uang. Meski teater tersebut sudah bubar, anggota-anggotanya kemudian tersebar dalam berbagai aktivitas politik. T misalnya kemudian terlibat berbagai aksi kelompok masyarakat rentan kota, seperti buruh dan korban penggusuran. Aksinya berada di bawah naungan PDI-P, dan kemudian menjelang Pemilu 2004 menjadi salah satu pengurus kepemudaan di PNBK Surabaya.

Tabel 9.6.
Teater Panggung dan Teater Jalanan

No.	Karakteristik	Teater Panggung	Teater Jalanan
1.	Asal	teater UKM	teater UKM dan non-UKM
2.	Jumlah pemain	banyak	sedikit
3.	Naskah cerita	lengkap dan kompleks	singkat dan sederhana
4.	Tata panggung	diperlukan	tidak diperlukan
5.	Kostum	lebih rumit	sederhana, terkesan apa adanya
6.	Pengaturan gerak	sudah dirancang	spontan
7.	Penunjukkan pemain (pelakon)	dipersiapkan, dilatih	spontan
8.	Dialog	kompleks	spontan, sederhana, dan cenderung sedikit dialog
9.	Sponsor	universitas, fakultas, atau pihak lainnya, seperti: dewan seni kota.	LSM atau mandiri
10.	Penggunaan uang	Ada dana pembinaan dari lembaga tertinggi.	diberi uang traspor (“dibayar”), tidak ada uang traspor (tidak “dibayar”) bila secara internal melakukan pendampingan pada masyarakat rentan kota.

Kegiatan teater jalanan bukan sekedar monopoli teater non-UKM. Teater Kusuma misalnya juga melakukan teater jalanan (adekan teatrical). Kegiatan tersebut biasanya merupakan undangan dari panitia atau penyelenggara aksi. Penyelenggara juga menentukan temanya. Kemudian, teater kampus merancang menjadi rangkaian adegan yang akan ditampilkan pada waktu aksi.

Untuk itu, mereka mendapat uang transport antara 450 ribu hingga 750 ribu rupiah. Pada waktu Hari Pahlawan 10 Nopember 2002 misalnya bersama dengan teater-teater kampus dari Yogyakarta, seperti ISI Yogyakarta, mereka mementaskan (merekonstruksi) peristiwa 10 Nopember 1945. Begitu pula, pada waktu aksi hari AIDS September 2004 atas permintaan salah satu yayasan peduli HIV/AIDS mengadakan teater jalanan mulai dari Jalan Raya Darmo, Basuki Rahmat dan hingga di Balai Pemuda dan Jalan Pahlawan. Selain teater Kusuma, kegiatan aksi tersebut juga diikuti oleh teater kampus se-Surabaya. Di dalam aksi tersebut, mereka menggambarkan bahaya akibat penyakit HIV/AIDS. Mereka berjalan dalam keadaan kurus, lemah dan sakit-sakitan.

Adegan Teatral:

Indikator Kolaborasi Mahasiswa dan Kelompok Miskin Kota

Ekstra Kampus, serikat buruh dan lsm sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan masyarakat rentan kota.

Sesuai dengan teori Robert K. Merton, bahwa seorang individu bisa memiliki beberapa status dan peran. Hal ini berkaitan dengan keanggotaan individu tersebut dalam berbagai kelompok masyarakat (Johnson, 1986), demikian anggota teater kampus. Di lingkungan kampus, mereka tak jarang aktif tidak saja di UKM Teater Kampus, tetapi juga menjadi UKM lainnya, seperti Alle yang menjadi anggota Teater Kusuma dan UKM Fotografi di Untag. Selain itu, mereka juga aktif di tingkat fakultas dan/atau jurusan, sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa.

Tabel 9.7.
Organisasi Ekstra Kampus, Serikat Buruh dan LSM (Jaringan)

No	Organisasi	Orientasi Ideologis	
		Agama	Nasionalis/Sosialisme
1.	Org. Ekstra Kampus		
	Hubungan terpisah dgn masy.rentan kota ("elitis")	IMM, HMI, PMKRI, dan GMKI	GMNI
	merakyat	PMII, KAMMI	FPPI, LMND, SMID, FMN
2.	Serikat Buruh	Sarbumusi	SBSI
3.	LSM		Pijar, Jakker, Jerit

Selain organisasi mahasiswa intra kampus, seperti senat mahasiswa (kini dikenal dengan badan eksekutif mahasiswa), badan perwakilan mahasiswa (kini, dewan legislatif mahasiswa) dan unit kegiatan mahasiswa, di luar kampus terdapat sejumlah organisasi ekstra kampus. Sebelum tahun 1996-an, organisasi ekstra kampus yang dikenal adalah Kelompok Cipayung, yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Pada tahun 1980-an, akibat pengasastunggalan Pancasila sebagai asas organisasi, HMI terpecah menjadi HMI dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). HMI MPO ini tidak menerima asas tunggal tersebut. Atas kebijakan Menteri Daud Yoesoef pada tahun 1978-an, yaitu NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan

Kampus)²⁴, organisasi tersebut tidak diperbolehkan “berada” di dalam kampus, meskipun pada kenyataannya organisasi ekstra (berikut alumninya) tetap bisa bermain dalam perebutan kursi di senat dan bpm. Sementara itu, “negara” (dalam tanda kutip) melalui ABRI juga sering bermain melalui organisasi kepemudaan, FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri ABRI).

Di luar kelompok Cipayung, terdapat organisasi ekstra mahasiswa. Organisasi ini nampaknya lahir dari aktivitas kelompok studi atau kelompok kajian, kemudian bergerak ke arah praksis menjadi aksi-aksi solidaritas dan akhirnya menjadi organisasi ekstra kampus, seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokratik), SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) dan Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ada pula yang memandang munculnya kelompok ini sebagai bentuk ketidakpuasan dari organisasi ekstra (Kelompok Cipayung) yang bersifat elitis dan hanya mengeluarkan catatan akhir tahun terhadap kebijakan dan ketimpangan sosial akibat pembangunan semasa pemerintahan Suharto.

Akibat kuatnya indoktrinasi pemerintahan Suharto melalui penataran P4 dan Opspek, tidak semua mahasiswa menyukai organisasi ekstra kampus dan LSM, seperti K yang melihat bahwa tidak ada gunanya ikut organisasi ekstra karena hanya demo, tidak ada aksi. Untuk melihat fenomena masyarakat yang dapat dijadikan ide cerita, *“Kita bisa saja baca di berbagai pemberitaan, seperti koran dan internet. Saya itu akurat dan datanya bisa untuk ide cerita, seperti yang dikatakan B, mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya.*

²⁴ Kebijakan ini tidak terlepas dari sikap kelompok Cipayung yang selalu mengkritisi pemerintahan Suharto, mulai dari kasus Malari 1974 tentang investasi asing hingga pemerintahan Suharto jatuh (lihat Pour, 1998, dalam kasus Sofyan Wanandi; perhatikan pula Aribowo, 1999). Padahal, kelompok ini dahulu turut mengguling pemerintahan Sukarno, dan mendukung Suharto dalam aksi bersama, KAMI pada tahun 1966-1967.

Namun demikian, sebagian lain anggota teater kampus justru memilih aktif di organisasi ekstra kampus, dan kecenderungannya, ketika aktivitas di organisasi ekstra semakin tinggi, maka ia mengurangi aktivitasnya di teater kampus. Organisasi ekstra tersebut tidak saja berdiri sendiri, tetapi memiliki jaringan pada kelompok rentan kota, seperti PMII dan Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia) karena ber-“naung” (dalam tanda kutip) di bawah NU (Nadhatul Ulama), begitu pula dengan SMID, LMND dan FMN yang memiliki hubungan dengan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) yang dulu dipimpin oleh Mochtar Pakpahan. SBSI adalah serikat buruh di luar “bentukan” pemerintah, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Sebagai serikat buruh, pengurusnya terdiri dari buruh yang aktivis dan aktivis buruh (orang di luar buruh) yang ber-*empati*. Aktivis buruh ini antara lain adalah mahasiswa, termasuk anggota teater kampus. Di luar buruh, ada pula *Jerit* (Jaringan Orang Tertindas), suatu jaringan yang memiliki hubungan dengan Konsorsium Orang Miskin Kota (*Urban Poor Consorsium/UPC*) di Jakarta yang dipimpin oleh Wardah Hafidz.

Membangun Isu-isu dan Beradegan dalam Demonstrasi

Empati, suatu kemampuan individu dalam membayangkan berada dalam posisi orang di luar dirinya, terbentuk tatkala mereka melakukan pendampingan bersama organisasi ekstra kampus yang bekerja sama dengan organisasi atau jaringan masyarakat rentan kota, seperti *Jerit*, *Sarbumusi* dan SBSI. Kelompok mahasiswa, dalam hal ini aktivis teater kampus tersebut sering “meninggalkan” (dalam tanda kutip) statusnya dan menjadi buruh atau tinggal di kampung-kampung kumuh yang akan tergusur. Oleh karenanya, ketika terjun di dalam masyarakat rentan kota ini, aktivis tersebut mengurangi kegiatan teater

kampus. Namun demikian, kebersamaan ini menjadi sumber inspirasi bagi ide naskah untuk pementasan teater kampusnya.



Gambar 9.1.

Kekuatan Buruh = Mogok Kerja dan Pengerahan Massa

Dengan tinggal bersama, bila tidak kost, terkadang tidur di mushala, kesulitan yang dialami oleh masyarakat rentan kota secara langsung dirasakan, seperti kenaikan BBM yang telah terjadi sejak jaman pemerintahan Megawati, kenaikan tarif listrik dan air,²⁵ kenaikan harga-harga di pasar, UMR buruh yang masih belum memenuhi kebutuhan hidup²⁶ dan sistem kontrak. Para

²⁵ Di beberapa kampung, terutama di Surabaya Utara dan pinggiran kota Surabaya Barat dan Selatan, meskipun tidak memasang saluran PDAM. Kenaikan harga air dirasakan pada kenaikan air jerigen *gledekan*.

²⁶ Berkaitan dengan UMK (Kota Surabaya), pemerintah sering tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak bisa membayar karyawannya sesuai dengan UMK. Ada batas-batas toleransi yang sangat longgar diberikan oleh pemerintah, sementara itu pemerintah serta merta menerapkan undang-undang buruh, meski secara substansial merugikan pihak buruh, pemerintah selalu melaksanakan tanpa memperhatikan buruh.

aktivis tersebut membangkitkan kesadaran bahwa mereka berhak hidup layak. Oleh karenanya, masyarakat tersebut di adakan untuk melakukan aksi. *“Mas, pertama kali iya susah. Mereka berpikir ini sudah menjadi suratan dalam hidupnya. Tetapi, melalui diskusi, mereka sadar. Meskipun belum tentu berhasil, setidaknya orang akan mendengarkan suaranya. Satu kata: Laman,”* begitulah pengalaman yang disampaikan oleh B dan J tentang kelompok masyarakat rentan kota. Secara teoritik, pengalaman ini membenarkan pendapat Oscar Lewis (1981) tentang kebudayaan kemiskinan dan John Kenneth Galbraith (1983) sebagai bentuk adaptasi orang-orang miskin terhadap kondisi kehidupan yang rentan.

Di dalam mengembangkan ke dalam aksi (demonstrasi), para aktivis biasanya mendiskusikan terlebih dahulu dengan para buruh yang aktivis dan orang kampung yang aktivis, biasanya kini terbentuk dalam istilah “forum komunikasi.” Hari-hari peringatan peristiwa tertentu bisa dijadikan momen untuk aksi, seperti Hari Buruh (1 Mei), Hari Bumi (September) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Kemerdekaan (17 Agustus). Pada hari buruh, aksi lebih diarahkan pada tema-tema tentang jaminan sosial buruh, mulai dari kenaikan UMK, sistem kontrak dan borongan, jaminan sosial hingga hak berserikat (lihat tabel 4.6; perhatikan Rahayu, et.al, 2002; Supramudyo, 2000; Rahaju, 2002). Demikian pula, pada hari bumi, tema demonstrasinya berisi tuntutan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin kota, sedangkan hari pendidikan adalah tuntutan pendidikan murah, dan pada hari kemerdekaan tentang harapan untuk merdeka dari kemiskinan.

Tabel 9.8.

Isu-isu Kesenjangan Sosial-Politik yang dikembangkan Masyarakat Rentan Kota bersama Aktivis Teater Kampus (dalam Ekstra Kampus, SB dan LSM)

No.	Masyarakat Rentan Kota	Isu-isu Kesenjangan Sosial Politik
1	Umum	a. Turunkan Harga (1998), yang kemudian berlanjut menjadi salah satu tuntutan dalam reformasi, selain Pak Harto turun; b. Tuntutan Penindakan Korupsi (Pengurusan KTP Murah) c. Tuntutan Biaya Pendidikan Murah (1998-2005) d. Tolak Kenaikan BBM (1999-2005) e. Tolak Kenaikan TDL dan Air PDAM;
2	Masyarakat Kampung	a. Batalkan pengusuran (salah satu di antaranya, kasus Stren Kali bersama <i>Jerit</i> tahun 2001, 2002 dan 2004); b. Kenaikan uang ganti rugi;
3	Masyarakat Buruh	a. Bayarkan THR (setiap menjelang hari raya Idul Fitri sejak sekitar tahun 1990an); b. Tuntutan Hak Berserikat (awal tahun 1990-an); c. Tuntutan Kenaikan UMR/Kota; d. Tuntutan Penerapan UMR segera; e. Hapus Sistem Kontrak dan Borongan; f. Hapus Sistem Lembur, Tuntutan Jam Kerja yang Jelas. g. Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon (Pabrik Sepatu di Sidoarjo); h. Tolak UU Perburuhan yang Merugikan buruh; i. Usut Korupsi di Jamsostek (tahun 1998-an) j. Solidaritas terhadap pemecatan teman-teman sekerja, dll.

Di dalam persiapannya, para aktivis tersebut membentuk korlap-korlap yang digunakan untuk menghimpun massa. Sementara itu, spanduk atau karton disiapkan, dananya dihimpun

dengan cara urunan atau hasil dari *ngamen*. Karena dananya terbatas, maka tidak jarang spanduk yang digunakan berasal dari kegiatan aksi sebelumnya. Sementara itu, para aktivis dari teater kampus menyiapkan adegan teatrical. *“Ada dua tujuan adegan ini. Visualisasi tuntutan dan hiburan untuk mengurangi ketegangan. Kalau tidak begitu, demo yang serius bisa membuat aparat tegang. Akhirnya, tindakannya represif. Kalau itu terjadi, akan membuat jera mereka.”*

Setelah ide atau naskah cerita dibuat, H-2 dari aksi tersebut aktivis teater kampus itu mengumpulkan, baik sesama aktivis teater kampus maupun juga kelompok masyarakat rentan (yang mewakilinya) dan melakukan *casting* peran, siapa melakoni siapa, begitu pula pengaturan gerak yang akan dilakukan. Pengaturan gerak ini juga memperhatikan *lanskap* dari acara aksi tersebut. Orang-orang tersebut juga diberitahu kostum apa yang digunakan, biasanya pakaian sehari-hari, *“lebih baik lagi kalau compang-camping, biar kelihatan penderitaannya.”* Karena miskin dialog, latihannya hanya terbatas pada rangkaian gerak masing-masing pemeran. Pemeran di adegan teatrical dalam demonstrasi dapat lebih longgar, berimprovisasi.

Menurut informan B, adegan ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, meskipun merasa sulit bila jumlah peserta demonstrasi terlalu besar. Bila massa yang berdemonstrasi kurang dari 200 orang, adegan teatrical bisa dilaksanakan sambil *long march* ke tempat sasaran. Namun demikian, bila dalam jumlah besar, adegan teatrical hanya dilakukan ketika telah sampai di tempat tujuan. Pelaksanaan adegan di sepanjang jalan akan memacetkan gerak massa pada akhirnya dapat timbul gerakan dorong-mendorong, hingga menimbulkan kekerasan.

Tabel 9.9.
Beberapa Contoh Adegan Teatrical Demonstrasi Masyarakat Rentan Kota
Surabaya tahun 1990 s/d sekarang

No.	Isu-isu Demonstrasi	Adegan Teatrical
1	Tolak Kenaikan BBM	Digambarkan ada sejumlah orang. Laki-laki membawa puluhan jerigen kosong. Begitu juga dengan perempuan yang <i>jaritan</i> membawa kompor tanpa minyak.
2	Tuntutan Biaya Pendidikan Murah	Dengan mengajak anak-anak berpakaian seragam sambil berjualan koran. Sementara itu, orang tua yang bekerja setengah mati, tetapi tidak bisa membayar uang sekolah.
3	Penolakan thp Pengusuran Warga Kampung Stren Kali	Digambarkan ada orang berpakaian sederhana selalu membersihkan kali. Sementara itu, satpol PP dan petugas membawa bulldoser merusak. Orang-orang itu lari, sampai terjatuh. Adegan teatrical ini dibuat dalam pentas panggung dengan perbaikan naskah cerita dalam judul "Jogo Kali," oleh Teater Sua di Balai Pemuda, Surabaya.

Penutup

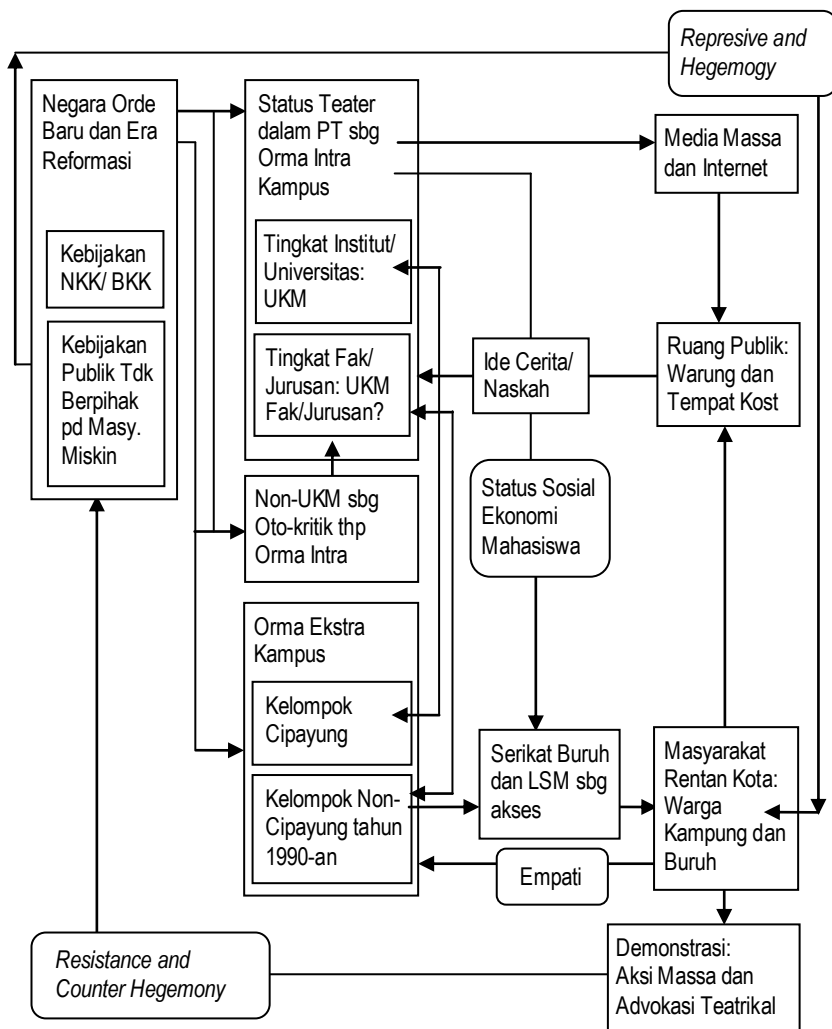
Penelitian Rahaju (2002) telah menunjukkan adanya komunikasi dan aliansi antara buruh dan gerakan mahasiswa. Secara ekstrim ditulis pula dari pernyataan salah seorang tokoh gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa tidak akan memiliki akar yang kuat bila tidak beraliansi dengan buruh. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa proses aliansi antara buruh, warga kampung yang tergusung, sebagai

kelompok masyarakat rentan kota, dan mahasiswa merupakan proses timbal balik. Tahun 1990-an, dengan pembunuhan Marsinah oleh aparaturnegara, gerakan perjuangan buruh memperoleh identitas dan keberanian baru, atau yang diistilahkan oleh Karl Marx sebagai kesadaran kelas, sementara penghancuran dan hegemoni negara atas mahasiswa melalui NKK/BKK tahun 1978 dan Opspek/P4 telah menciptakan bentuk baru gerakan mahasiswa. Ada dua bentuk, yaitu: (1) melakukan modifikasi dari organisasi kemahasiswaan (ormawa) intra kampus, dan (2) mengembangkan kelompok studi, yang kemudian berkembang menjadi organisasi ekstra kampus non-kelompok Cipayang tahun. Di dalam catatan lain, kelompok-kelompok studi juga berkembang dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan. LSM yang terbentuk dari kelompok-kelompok studi ini kemudian mengembangkan jaringan internasional melalui isu-isu yang sama, antara lain: kemiskinan dan demokrasi, meski dikritisi oleh negara pada waktu itu, Suharto, sebagai usaha “menjual” bangsa dan dicurigai sebagai ancaman negara.

Salah satu di antaranya adalah teater kampus. Teater kampus menjadi sarana *conter hegemony*. Bila mengikuti pendapat Antonio Gramsci, bahwa negara, sebagai representasi dari kepentingan kelompok borjuis, melakukan “penaklukan” atas warganya tidak saja menggunakan sarana represif, seperti: hukum dan militer, tetapi juga mengembangkan kontrol moral dan intelektual, sehingga terbentuk kesepakatan lebih bersifat *concensio* (Hendarto, 1993: 66-88) Kontrol moral dan intelektual ini dikembangkan melalui sarana-sarana pendidikan dan media massa. Di dalam perkembangannya, Paulo Freire (1985) memperkuat bahwa model *banking* dalam kurikulum sekolah menyebabkan masyarakat terintegrasi ke dalam sistem industri yang kapitalistik. Meskipun dianggap sebagai langkah kecil, teater kampus, sebagai perkembangan teater modern Indonesia, seperti Teater Sae,

Koma, dan Mandiri (Dahana, 2001) mengembangkan drama satiris yang mengkritik terhadap kehidupan sosial politik Indonesia yang tidak adil dalam setiap kali pertunjukkan.

Bagan 9.1.
Teater Kampus, Masyarakat Rentan Kota dan Adegan Teatrikal





Gambar 9.2

Dengarkanlah Kami, Rasakanlah Penderitaan Kami!

Dalam pencarian ide-ide naskah cerita, selain adaptasi dari naskah karya seniman sebelumnya, seperti Anton Chekov, aktivis teater kampus menemukan perjumpaan yang "mesra" dan "hangat" di dalam masyarakat rentan (kota). Salah satu faktor yang di dalam diri aktivis yang memudahkan memasuki masyarakat rentan (kota) adalah kondisi obyektifnya. Aktivis teater kampus berasal dari kelompok kelas menengah ke bawah di dalam masyarakatnya. Perjumpaan ini sama seperti melihat dirinya di depan kaca, lebih dari itu mereka menemukan jati dirinya di dalam masyarakat tersebut. Apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan di warung-warung makan dan kampung di mana mereka kost, membangun kesadaran dalam diri mereka, bahwa mereka dulu berasal dari kelas tersebut dan sudah selayaknya harus memperjuangkan. Di dalam kondisi yang lebih ekstrim, para aktivis ini kemudian memasuki organisasi ekstra kampus non-

Cipayung tahun 1990-an dan bergabung pada Serikat Buruh (mandiri-bukan organisasi korporatis negara).



Gambar 9.3.

Demi THR, Kenaikan Upah, Uang Makan, haruskah ada korban?

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memberikan sumbangan bagi gerakan kelompok masyarakat rentan kota. Selain mengembangkan jaringan yang mampu mengerahkan massa dalam jumlah yang besar, mereka juga memberikan warna lain dalam aksi massa (demonstrasi), yaitu adegan teatral. Pengerahan massa yang besar memang memberikan kekuatan untuk melawan kebijakan publik yang kurang menguntungkan, namun di sisi lain mengembangkan hubungan yang sinergis antara pengusaha dan negara. Dengan alasan bahwa aksi massa tersebut akan mengancam situasi keamanan, aparat negara kemudian cenderung bertindak represif. Aparat negara menggunakan hak kekerasannya dengan alasan memberikan jaminan rasa aman (meski dapat dibantah, untuk kelompok masyarakat yang mana?). Di bawah kondisi yang demikian, adegan teatral ini sangat membantu dalam visualisasi dari tuntutan, dan sekaligus menjadi hiburan bagi dua kelompok yang bersitegang, yaitu kelompok aksi massa dan aparat negara.

Lebih jauh dari itu, pada kasus lain latihan seni pada kelompok masyarakat rentan kota, termasuk di dalam kelompok buruh, mampu membangkitkan kesadarannya. Di Jakarta misalnya, dalam memperingati Hari Buruh 1 Mei 2005, kelompok buruh, petani dan ibu rumah tangga dari kampung menampilkan drama teatrikal dengan judul “*Mereka bilang Aku Perempuan*” karya Ken Zuraida. Mereka berlatih selama satu bulan dan menghayatinya dengan baik (Liputan6, 4 Mei 2005, ”Penderitaan Buruh dalam Drama Teater,”).

Daftar Pustaka

- Aribowo,
1999 Pola Gerakan Mahasiswa Jawa Timur: Kasus Mahasiswa Surabaya. Dalam Anshari Thayeb, et.al. **Jawa Timur dalam Perspektif Negara dan Masyarakat**. Surabaya: Yayasan Lubuk Hati.
- BPS,
2004 **Indikator Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Peningkatan Kemampuan Statistik.**
- Budiman, Arief.
1981 Peranan Mahasiswa sebagai Inteligensia. Disunting oleh Dick Hartoko. ***Golongan Cendekiawan. Mereka yang berumah di angin. Sebuah bunga rampai.*** Jakarta: Gramedia.
- Coundouel, Aline., Jesko S. Hentschel, dan Quentin T. Wodon.
2002 Chapter 1 Poverty Measurement and Analysis. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues.** Washington: The World Bank.
- Dahana, Radhar Panca.
2001 **Ideologi Politik dan Teater Modern Indonesia.** Magelang: IndonesiaTera.

Danandjaja, James.

- 1980 Fungsi Folklor bagi Kolektif Pendukungnya. *Berita Antropologi*. No. 39, tahun XI.
- 1986 Folklor Indonesia. Ilmu Gosip, Dogeng dan Lain-lain. *Jakarta: Grafitipers*.

Departemen Kesehatan RI,

- 2003 **Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/ Menkes/SK/VIII/2003.** Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Dinas Informasi dan Komunikasi Jawa Timur.

- 2004a UMK 2005 Gunakan Standar Kebutuhan Hidup Minimal. 1 September. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=1797>. tanggal 13 September 2005.
- 2004b Gubernur Jatim tetapkan UMK Tahun 2005, berlaku 1 Januari. 22 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2487>. tanggal 13 Nopember 2005.
- 2004c UMK Jatim masih berdasarkan KHM karena Keppres Baru Belum Terbit. 26 Nopember. Diakses dari <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=2538>. tanggal 13 Septemver 2005.

Galbraith, John Kenneth.

- 1983 **Hakikat Kemiskinan Massa. Diterjemahkan oleh Tom Anwar.** Jakarta: Sinar Harapan.

Hatta, Mohammad.

- 1983 Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia. Disunting oleh Aswab Mahasin dan Ismed Natsir. **Cendekiawan dan Politik.** Jakarta: LP3ES.

Hendarto, Heru.

- 1993 Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci. Dalam Tim Redaksi Driyarkara. **Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan.** Jakarta: Gramedia.

Hutomo, Suripan Sadi.

- 1991 Kidung Jawa Timuran. Perkembangan dan Kritik Sosialnya. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. No. 6, Tahun V.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi.** Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Jonge, Huub de.

- 1989 **Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu Studi Antropologi Ekonomi.** Jakarta: Gramedia.

Klugman, Jeni.

- 2002 Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 1 Core Techniques and Cross-Cutting Issues.** Washington: The World Bank.
- 2002 Rural and Urban Poverty: Overview. Dalam Jeni Klugman. **A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. Volume 2 Macroeconomic and Sectoral Approaches.** Washington: The World Bank.

Koentjaraningrat,

- 1982 ***Sejarah Teori Antropologi 1.*** Jakarta: UI-Press.

Kariredjo, Heru Soekadri.

- 1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan.** Surabaya: FPIPS-IKIP Surabaya.

Kompas,

- 1996 Antara Stabilitas dan Demokrasi. Survei “Kompas” tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 1996 Gaya Hidup Kelas Menengah Baru Jakarta. Survei “Kompas” tentang Kelas Menengah Jakarta. 30 September.
- 2000 Buruh Sidoarjo Protes UMR, Jalan di Surabaya Diblokir. 27 Nopember.
- 2001 FSPSI Akan Bahas Masalah UMR. 16 Juli.
- 2002 Buruh Gresik Ancam Demo, Wakil Gubernur Minta Jangan Ngotot. 2 Januari 2002.
- 2003 Buruh Tuntut Gubernur Jatim Naikkan UMK. 22 Januari.
- 2005 Menggugat Kebijakan Absurd Impor Berat. 24 September.
- 2005 Inti Ekbis. 106.000 KKB untuk Warga Surabaya. 29 September.

Kuntowijoyo.

- 1988 **Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940.** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kustiawan, Iwan.

1997 Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. **Prisma**. No. 1/tahun XXVI.

Kwik, Kian Gie.

1998 **Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia. Badai Belum Akan Segera Berlalu**. Jakarta: Gramedia.

Lewis, Oscar.

1981 Kebudayaan Kemiskinan. Dalam Andre Bayo Ala. **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan**. Yogyakarta: Liberty.

Liputan6 SCTV

2005 Penderitaan Buruh dalam Drama Teater. Diakses dari <http://www.liputan6.com/fullnews/100776.html>, tanggal 1 April 2005.

Melalatoa, M. Junus.

1989 Pesan Budaya dalam Kesenian. **Berita Antropologi**. No. 45, tahun XIII.

Pemda Kotamadya Surabaya.

1978 **Master Plan Surabaya Tahun 2000**. Surabaya: Pemda KMS.

Pour, Julius.

1998 **Jakarta Semasa Lengser Keprabon. 100 hari menjelang peralihan kekuasaan**. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Radjab, Suryadi A.

1990 Panggung-panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara. Gerakan Mahasiswa di bawah Orde Baru. **Prisma**. No. 10 tahun. XX.

Rudiono, Danu.

1992 Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak. **Prisma**. No. 1. Tahun XXI.

Rahaju, Siti Pudji.

2002 Pola Komunikasi dan Aliansi antara Buruh dengan Mahasiswa dalam Aksi-aksi Unjuk Rasa dan Pemogokan Buruh Industri di Jawa Timur. **Laporan Penelitian Dosen Muda**. Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Rahayu, Sri Kusumastuti.

2002 **Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Scott, James C.

1983 **Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.** Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Supramudyo, Gitadi Tegas.

2000 Pola Unjuk Rasa di Daerah Perkotaan. Studi tentang Unjuk Rasa Buruh, Sopir, Mahasiswa dan Warga Kampung di Surabaya. **Laporan Penelitian DIP.** Surabaya: Lemlit Universitas Airlangga.

Susanto, Budi.

1999 *Imajinasi Penguasa dan Identitas Postkolonial. Siasat Politik (Kethoprak) Massa Rakyat.* Yogyakarta: Kanisius.

Surbakti, Ramlan.

1994 Kebijakan Tata Ruang Perkotaan. Siapa Membuat dan Menguntungkan Siapa? **Prisma.** No. 7/tahun XXIII.

1996 Perebutan Ruang di Perkotaan dan Pembengarannya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Suryahadi, et.al.

2003 **Developing a Poverty Map for Indonesia: an Initiatory Work in Three Provinces. Part I: Technical Report.** Jakarta: Smeru Research Institute.

Suyanto, Bagong.

1996 Pembangunan Kota dan Sengketa Tanah. Kasus Kotamadya Surabaya. **Prisma.** No. 9/tahun XXV.

Tabor, Steven R., dan M. Husein Sawit.

2001 Social Protection via Rice: The OPK Rice Subsidy Program in Indonesia. **The Developing Economies.** Th. 39. No. 3.

Wignjosoebroto, Soetandyo.

2004 Surabaya: Memahami Riwayatnya Masa Lampau guna Mempertajam Kemampuan Memproyeksi Perannya di Masa yang akan datang. **Makalah** dalam Sarasehan "Surabaya dan Tantangan Masa Depan." Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Penguatan Perkembangan Masyarakat (LKPPM) di Hotel Santika, tanggal 30 Desember 2004.

Wirodono, Sunardian.

1994 *Catatan 1993. Gerakan Politik Indonesia.* Jakarta: Puspa Swara.

240 *FX Sri Sadewo/Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*

Bagian 3

P e n u t u p

Bab 10

Kemiskinan Kota dan Pembangunan

FX Sri Sadewo

karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.
(Pengkotbah 1:18)

Pengetahuan lebih banyak memang sangat menyedihkan bagi empunya. Betapa tidak, dalam kasus-kasus pada buku ini, masyarakat (warga negara, pen) menaruh harapan besar pada pemerintah untuk kesejahteraannya. Namun demikian, bila mengikuti berbagai pandangan dalam teori-teori sosial dan politik, maka pemerintah merupakan ruang petarungan antar berbagai kelompok kepentingan. Mereka yang bisa mengakses, maka akan memperoleh keuntungan. Kelompok miskin, seperti dari wilayah perkotaan, bukanlah kelompok yang beruntung, baik di tempat yang baru (kota) maupun di daerah asalnya (desa). Dari sejumlah kasus pada bagian 2, ada beberapa hal yang dapat diserahkan dan dipikirkan bersama.

Arah Model Pembangunan yang Salah

Kota dan desa merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kota tumbuh karena revolusi pertanian yang mengkaitkan antara satu desa dan desa yang lainnya. Keberadaan kota mulanya didukung oleh desa-desa, Kota sangat memerlukan desa untuk tenaga kerja, pajak dan barang-barang komoditi. Pada perkembangan selanjutnya, kota tumbuh, seolah-olah otonom,

meninggalkan desa. Kota menjadi *center* (pusat), desa menjadi daerah pinggiran (*periferi*). Sebagai periferi, hampir seluruh enersinya kemudian dicerap kota, kemudian seperti digambarkan oleh Everett S. Lee (1984) sebagai fenomena *push-pull factor* dari migrasi dan urbanisasi.

Fenomena ini terjadi pada abad kedelapan belas di Eropa dan paruh kedua di negara-negara baru paska Perang Dunia ke-2. Kebijakan pajak atas tanah yang dibebankan pada petani oleh bangsawan mengakibatkan hubungan petani dan pekerja melemah, hubungan mereka mulai diukur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekan harga/upah tenaga kerja. Orang-orang desa yang tidak bertanah pun akhirnya berbalik mencari pekerjaan di kota, meskipun kondisi obyektifnya tidak menguntungkan. Mereka bersedia bekerja apa saja dengan upah berapa saja, asal bisa menerima uang *cash*.

Berbagai penelitian seperti James C. Scott (1983), Sujono dan Birowo (1976), dan Hotman Siahaan (1990), menggambarkan betapa perubahan teknologi telah merubah perimbangan pendapatan di desa, kelompok miskin desa semakin *powerless*, tidak mempunyai posisi tawar, sistem bagi hasil menjadi semakin tidak menguntungkan, dari *maro*, *martelu* hingga sistem *ceblokan*, Tulisan dari Agus Trilaksana (2000) dan Zainuddin Maliki (2002) juga menggambarkan hal yang sama di Jawa Timur, namun tindakan yang ekstrim dilakukan kelompok miskin desa adalah merantau hingga ke luar negeri. Mereka menghimpun seluruh enersi terakhirnya dan mempertaruhkan diri dengan bekerja sebagai TKI/TKW. Hal itu tidak terlepas dari *tekong*, orang yang memiliki jaringan dari desa, ke kota hingga keluar batas-batas negara. *Tekong* biasanya adalah kelas menengah desa yang tidak berada dalam hubungan patron-klien dalam struktur ekonomi desa. Dengan posisinya, seorang *tekong* membangun struktur patron-klien yang tidak lagi berbasis pertanian.

Ketika menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, Basofi Soedirman pernah mencanangkan *gerakan kembali ke desa*. Gerakan ini sebenarnya seiring dengan kebijakan pemerintah pusat pada waktu itu. Di tingkat pusat, pemerintah memutuskan lima hari kerja dengan alih-alih satu hari libur tambahan dapat digunakan untuk rekreasi atau kembali ke desa. Artinya, aliran uang yang semula hanya dilakukan pada waktu hari raya dengan fenomena mudik (baca juga Eric Wolf, 1986), kebijakan itu “mengubah” pola menjadi rutin dalam setiap tahun. Gerakan itu tidak relatif berhasil. Ada yang menjadi beberapa kendala, pertama masyarakat desa sekarang telah berubah, menjadi relatif seragam, mulai dari struktur pemerintahan (imbis dari UU No. 5 tahun 1974) hingga struktur ekonomi yang bergeser ke sektor industri. Kedua, dengan demikian, setiap desa relatif tidak memiliki produk unggulan. Ketiga, penciptaan produk unggulan menuntut perhatian dan perubahan paradigma bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal (Kota/Kabupaten hingga desa), misalnya: secara sederhana, kepala desa dan camat harus berani menolak menandatangani surat jual-beli tanah sawah penduduknya, padahal dalam transaksi itu aparat desa memperoleh keuntungan. Belum lagi, perubahan status ke perumahan atau industri akan meningkatkan PAD bagi kabupaten/kota. Sektor industri berdalih mampu menampung tenaga kerja dalam ratusan atau ribuan jumlahnya.

Strategi Adaptif Orang Miskin Kota

Kemiskinan yang demikian itu oleh Selo Soemardjan (1980; dikutip dari Karnadji dan Sudarso, 2005: 17) sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan itu diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosialnya mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapat yang sebenarnya tersedia. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasa kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-

tahun. Ciri utamanya adalah mobilitas vertikal tidak terjadi, walaupun terjadi sifatnya lamban. Ciri lain adalah timbul ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Ketergantungan ini memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam hubungan sosial yang timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh (Karnadji dan Sudarso, 2005: 19; kutip dari Mochtar Mas'ud, 1994:14).

Fatalisme atau sikap pasrah merupakan adaptasi psikologis bagi orang-orang miskin di manapun, baik di desa maupun di kota. Sikap ini memberikan ruang yang “menenangkan” di tengah kegelisahan atas ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah-masalah ekonominya. Kehilangan pekerjaan, tempat tinggal yang tidak “nyaman” dan “rentan” dari penggusuran, anggota keluarga yang sakit dan ditambah lagi harga-harga kebutuhan pokok yang belum tentu bisa dibeli merupakan masalah kaum miskin yang dihadapi terus-menerus setiap hari. Sementara itu, mereka berada di tengah-tengah keluarga yang berada dalam kondisi yang serupa. Pilihannya kemudian setiap keluarga mengembangkan etika subsistensi pada masing-masing keluarga. Walaupun ada simpanan, biasanya dalam yang sangat kecil dan tidak berlebih, sehingga tidak bisa digunakan untuk pinjaman pada keluarga lain. Mereka juga tidak mempunyai akses yang cukup baik untuk memperoleh tambahan uang bila memerlukan secara mendadak. Dunia perbankan sering bersifat diskriminatif terhadap kelompok miskin. Untuk memperoleh pinjaman, mereka diharuskan memenuhi syarat administratif yang belum bisa dipenuhi, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP) hingga anggunan. Kaum miskin kota sering mengalami kesulitan pada masalah KTP karena proses mutasi kependudukan yang dinilai mahal tidak dilakukan. Selain KTP, pemilikan barang atau rumah kaum miskin tidak bisa dijadikan anggunan, selain nilai jualnya, karena bukti pemilikan juga tidak ada. Syarat administratif dunia perbankan

bisa diminimalisir pada kelompok kelas menengah yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai. Kesulitan-kesulitan yang menumpuk kemudian menjadi bentuk *stressor* dan bila tidak “diredam,” maka berakibat pada masalah sosial lainnya, seperti pelacuran, pencurian, dan tindak kriminalitas lainnya. Cara peredamannya adalah melalui saluran psikologisnya, yaitu menenangkan, pasrah dan kemudian mengabaikan segala kesulitan yang dalam pandangan Marxian sebagai produk dari ketidakadilan dan eksploitasi pada kelompok yang lebih lemah.

Adaptasi psikologis, yaitu sikap pasrah tidak terjadi dalam waktu yang sekejap. Orang miskin kemudian langsung pasrah, melainkan berlangsung dalam waktu bertahun-tahun, bahkan harus “diwariskan” pada generasi berikutnya. Kemiskinan, seperti kehilangan pekerjaan, gaji/upah yang tidak cukup hingga sakit dan tidak mempunyai akses ekonomi-politik ini menjadi *stressor*, tekanan bagi kejiwaan seseorang dan/atau keluarga, apalagi hal itu berlangsung dengan sangat cepat.

Dalam kajian Emile Durkheim, situasi yang disfungsional ini bisa berakibat pada tindakan “bunuh diri” (lihat Johnson, 1986: 192-195) atau setidaknya mengambal jalan pintas, Koentjaraningrat (2002: 46-50) mengistilahkan mentalitas menerabas. Pada waktu krisis moneter di Indoneisa, pengumuman likuidasi bank, sepasang suami-istri dan empat orang anaknya melakukan bunuh diri di Kalimantan karena tabungan yang menjadi modal usahanya tidak bisa dicairkan. Sementara itu, di Bandung seorang ibu menjual putrinya untuk menikahkan putri yang lain. Sementara itu, di wilayah pesisir Selatan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, dari Pacitan hingga Wonogiri, terjadi semacam “*pulung ngendat*,” kejadian bunuh diri seolah-olah bergilir sesuai arah sinar putih seperti bintang jatuh. Alasan bunuh diri menjadi beralasan mulai dari sakit yang menahun hingga persoalan yang sepele, seperti tidak diajak anak ke kota. Demikian pula, dari sejumlah pemberitaan media massa elektronik, sejumlah

kejadi-an bunuh diri dengan alasan mulai dari kehilangan pekerjaan, sakit menahun dan kini menjalar pada anak-anak sekolah, seperti karena tidak lulus UAN hingga permintaan yang tidak dipenuhi. Hal itu menunjukkan bahwa kejadian bunuh diri dengan berbagai alasan tersebut sebagai produk adaptasi psikologis yang tidak berlangsung dengan baik. Artinya, menaruh harapan yang tinggi dengan mengabaikan kondisi yang sebenarnya, terjadi *deprivasi relatif* antara nilai harapan dan keadaan yang senyatanya.

Langkah strategi adaptasi kaum miskin pertama kali ketika tidak pendapatannya tidak memadai adalah mengurangi konsumsinya. Makanan yang dikonsumsi dikurangi sedemikian rupa, sehingga hanya mampu menggerakkan dirinya secara fisik, dimulai dari frekuensi makan, dari tiga kali untuk kondisi normal, menjadi dua kali sehari. Menunya pun dikurangi mulai dari tidak menggunakan daging dan ayam, berkurang terus hingga makan nasi, kecap dan kerupuk saja. Kebutuhan protein nabati didapat waktu yang tidak, seperti: pada waktu hajatan atau *slametan*, dan untuk umat Islam, dilakukan pada waktu Idul Kurban.

Langkah berikutnya adalah menggerakkan seluruh anggota keluarga untuk memperoleh pendapatan tambahan yang akan membuat hidup layak. Anak-anak memiliki nilai ekonomi yang positif. Mereka merelakan diri untuk meninggalkan masanya yang menyenangkan. Mereka bekerja, meski mungkin hanya dibayar separuh saja. Sementara ibunya bekerja, anak-anak berkeliraran dan kemudian masuk ke jalanan untuk mencari uang, mulai dari meminta-minta, *ngamen*, hingga menjadi joki *three in one*. Di dalam situasi ini anak-anak rawan mengalami kekerasan, mulai di-*palak* hingga dipukul pihak aparat (*trantib*). Kasus di Jakarta, karena menjadi joki, seorang anak dipukul, ditangkap dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas. Catatan-catatan lapangan lain dari kisah anak jalanan, anak-anak perempuan juga mengalami kekerasan seksual.

Tabel 10.1.
Kebutuhan dan Strategi Adaptasi Kaum Miskin

	Normal	Miskin Baru	Miskin Lama
Fatalisme	Rendah	Rendah, dan mulai beranjak naik	Tinggi
Tabungan	Ada, dalam jumlah sedikit. Cukup untuk mengatasi kebutuhan mendadak	Ada, dalam jumlah sedikit dan terus berkurang, akhirnya habis untuk konsumsi. Termasuk rumah dan seluruh isinya.	Tidak ada. Bila ada, tabungan berbentuk barang yang mudah dijual.
Pendapatan	Memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup (layak?) Terjadi pembagian kerja secara seksual, suami mencari nafkah, istri merawat & mendidik anak. Di kota, bila tidak bisa dipenuhi dari penghasilan suami, maka isteri bekerja di rumah atau sektor formal.	Tidak memadai. Sering terjadi karena pencari nafkah utama tidak bekerja, sakit atau meninggal. Isteri ikut mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah.	Sangat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam mencari nafkah. Anak-anak turun ke jalan atau bekerja di pabrik dengan resiko kesehatan yang tinggi.
Pemukiman	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Kondisi rumah higienis.	Tinggal di perumahan tipe RSS atau di Kampung. Bila kemiskinan berlangsung lama, maka rumah dijual untuk kebutuhan hidup.	Tinggal di perkampungan kumuh dengan status tanah tidak jelas dan rawan penggusuran.
Kesehatan	Meski sedikit, dana diusahakan. Dalam kondisi tertentu Mengandalkan jaminan kesehatan dari perusahaan, ASTEK atau ASKES	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik. Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS	Tidak ada dana kesehatan; sangat bergantung pada JPS Kesehatan bila terjadi penyakit yang kronik Persoalannya tidak setiap keluarga memiliki akses terhadap JPS
Makanan	3 (tiga) x sehari; asupan gizi memadai	2 – 3 x sehari, asupan gizi mulai tidak penting	1-2 x sehari, asupan gizi tidak penting. Penting

Bila ada orang beranggapan bahwa orang miskin itu malas, hal itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Pola strategi mereka mencari nafkah ternyata sering tidak hanya mengandalkan pada satu pekerjaan. Ada temuan mereka melakukan pekerjaan ganda. Pagi hari bekerja di sektor formal, seperti buruh pabrik, sedangkan sore hari bekerja di sektor informal, seperti berjualan, dan tukang potong rambut. Kalau memiliki pekerjaan pokok berjualan, maka tidak berhenti berjualan pada produk di pagi hari, sering sore hingga malam hari berjualan produk lain. Belum lagi, pada waktu bekerja, mereka berhemat dengan membawa lauk-pauk sendiri. Lama waktu bekerja bisa di atas dari 8 (delapan) jam sehari. Hal itu pada gilirannya akan berakibat pada hubungan yang kurang harmonis di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ada temuan bahwa kecenderungan terjadi perceraian tinggi pada keluarga miskin.

Tabungan merupakan hal yang mewah bagi orang-orang miskin, apalagi dalam bentuk uang. Di dalam kondisi yang normal, pada keluarga yang menengah, tabungan merupakan hal yang penting untuk mengatasi situasi krisis, seperti anggota keluarga yang sakit, rumah rusak, pendidikan anak. Ada beberapa cara untuk menabung, selain membuka rekening di Bank, mereka juga mengikuti arisan dalam jumlah yang besar. Kondisi ini tidak dialami oleh keluarga miskin baru, tabungan yang dimiliki akan habis untuk keperluan konsumsi, kemudian barang rumah tangga juga dijual bila perlu. Selain barang rumah tangga, ternak merupakan salah satu tabungan, sedikit-tidaknya bila masa paceklik. Produk dari ternak, seperti telur dan dagingnya, juga dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Rumah bisa juga berfungsi sebagai tabungan. Di dalam situasi mendesak rumah pun dijual, sehingga mereka pun kemudian pindah ke rumah dengan kondisi yang lebih buruk, dari pe-

rumahan ke kampung, dari kampung ke pinggiran kota. Pindah rumah sebagai strategi kaum miskin (lihat Kok, Mandemakers dan Wals, 2002). Dari milik sendiri, menjadi kontrak, dari kontrak kembali ke rumah orang tua. Ketika berada di dalam keluarga besar (*extended family*), maka kemiskinan tersebut menjadi beban dari keluarganya dan kemudian menjadi *shared poverty* dalam istilah Clifford Geertz (1983), kemiskinan dibagi bersama. Kemiskinan seperti virus yang menyebar. Kualitas dan beban yang tinggi berakibat rumah berikut lingkungannya menjadi tidak sehat dan dalam hasil penelitian R. Eddy Indrayana (2000) bahwa permukiman berkepadatan tinggi beresiko tinggi atau rentan terhadap kesehatan. Sanitasi dan udara yang buruk mengakibatkan penyakit pernapasan dan pencernaan.

Inilah rangkaian dari kemiskinan struktural (pendekatan Marx) menuju kebudayaan kemiskinan (Oscar Lewis). Ketidakmampuan akses untuk memenuhi kebutuhan akibat kondisi-kondisi obyektif yang kurang menguntungkan berakibat pada fatalisme, kepasrahan, dan secara terus-menerus melakukan pengabaian atas nilai-nilai ideal. Ini merupakan sikap realistik terhadap kondisi yang menurut mereka sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka awalnya memiliki mimpi untuk hidup yang layak, menjalani proses ritual yang layak, dan walaupun mati juga layak. Mereka berharap bisa memiliki pekerjaan dengan upah yang layak, tinggal di dalam rumah yang layak, membesarkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Mereka berharap tidak akan gelisah bila sakit atau mati karena sudah memiliki asuransi. Mimpi atau harapan ini tidak bisa dicapai karena mereka berada kondisi obyektif, seperti tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan jaringan, yang tidak menguntungkan. Kondisi-kondisi itu mengurangi dan bahkan membatasi akses politik, ekonomi dan sosialnya terhadap struktur sosial. Oleh karena itu, persoalannya bukan pada sekedar mendefinisikan kemiskinan struktural atau kebudayaan kemiskinan, tetapi harus melihat sebagai rangkaian proses yang kontinu.

Daftar Pustaka

Geertz, Clifford.

- 1983 **Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.** Diterjemahkan oleh S. Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Indrayana, R. Eddy.

- 2000 Permukiman Berkepadatan Tinggi dan Resiko Kesehatan. Studi Kasus Perbaikan Permukiman Berkepadatan Tinggi, Persan Serta Masyarakat dan Risiko Kesehatan di Kota Surabaya. **Ringkasan Disertasi.** Surabaya: PPS-Univ. Airlangga.

Johnson, Doyle Paul.

- 1986 **Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1.** Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat,

- 2002 **Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kok, Jan., Kees Mandemakers, dan Henk Wals.

- 2002 City nomads. Moving house as a coping strategy, Amsterdam 1890-1940. **Paper** for the 4th European Social Science History Conference The Hague, 27 February-March 2, 2002

Wolf, Eric R.

- 1985 **Petani. Suatu Tinjauan Antropologis.** Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-ilmu Sosial Jakarta. Jakarta: Rajawali.

Indeks

A

adegan teatrikal, 207, 231, 240, 245
agribisnis, 48
ambachtschool, 52
Ala, Andre Bayo. 32, 40, 41, 249
Arief, Sritua.
 Adi Sasono, 36

C

CBD, 203
Chambers, 36, 38
Cina, 61, 160, 213, 216, 223

D

danyang, 103
demam berdarah, 61
Dilon, HS.
 Hermanto, 31

E

empowerment, 34
Evers, Hans-Dieter., 11, 49, 157, 158

G

Gailbraith, Kenneth. 36
Gerbangkertasusila, 204
gilda-gilda, 18, 98
Goede, 9, 11
Government Eroppeesche Lagere School, 52

H

Handinoto, 48, 50, 52, 53, 99, 129
Hauser, Philip M. 6
Haviland, 6, 17, 24
HIPPA, 101
Holandsche Indische School, 52

I

Indrayana, 62, 248, 263, 264
integrated poverty, 36
isolasi, 39, 40
ISPA, 61

J

Javaansche School, 52
jimpitan, 16

K

Kampoeng Improvement
 Programme, 62
Kartodirdjo, Sartono., 9, 12, 24, 131
Kemiskinan
 Kultural, 36
 Struktural, 31, 36, 257, 263
 lack of opportunity, 34
 low capabilities, 34
Kemiskinan, perangkap
 kelemahan fisik, 35, 39
 kemiskinan "proper", 39
 kerentanan, 35, 39
 ketidakberdayaan, 34, 35, 39, 40, 156
KFM, 212, 213
Klugman, Jeni., 34, 35, 41, 246, 248

L

Lee, Everett S., 21, 80, 256
Levitan, Sar A., 32

LSM, 205, 231, 233, 234, 239, 242

M

Maas River, 49

*Maatschappij Tat Nut van Het
Algemeen*, 52

mahasiswa, 54, 55, 56, 138, 162,
172, 194, 205, 206, 207, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 229, 230, 232, 233,
234, 235, 241, 242

mandala, 53

Modelski, 18, 20, 24

Mulder, Niels., 33

Mumford, 17

N

Nasikun, 36, 38, 40, 41

nyantri, 53

O

off-farm, 100, 109

P

PAM, 103, 107, 147

passesn stelsel, 51

Perguruan Tinggi, 53, 54, 219, 222

PPL, 101

primus inter pares, 16, 98

pusat peradaban, 18

R

Ravallion, 33, 41

Rudiono, 212, 213, 216, 250

Rusli, Said., 5, 12

S

Sadewo, 22, 45, 64, 66, 98, 102, 133,
137, 159, 162, 203, 206, 221, 255

sakral, 103

Samhadi, 23, 24

Suharto,

pemerintahan 28, 112, 212, 213,
221, 234

Sukadana, A. Adi., 15, 17, 24, 99, 130

Suparlan, Parsudi., 4, 7, 12, 157

Surbakti, Ramlan., 208

Steele, 65

Stilkind, Jerry., 14, 24, 131

T

tegal desa, 103

the safety first, 208

Todaro, Michael P., 14

U

UMK, 211, 213, 215, 237, 247, 249

urban bias, 65

V

VOC, 47

W

Weber, Max., 18, 176, 196, 199

Werner, CC., 52

wijken, 51

Wignjosebroto, Soetandyo. 47

Wiradi, Gunawan. 22, 24, 109, 110,
113, 128, 130, 131

Wirth, Louis., 5, 9

Wolf, Eric., 22, 124, 257